Edisi Pemutakhiran

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Zaman Jepang dan Zaman Republik

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia

Balai Pustaka

VI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Sejarah Nasional Indonesia
VI

Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia
(±1942–1998)

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Edisi
Pemutakhiran

Sejarah Nasional Indonesia
VI

Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia
(±1942–1998)

Editor Umum

Marwati Djoened Poesponegoro
Nugroho Notosusanto

Editor Umum Pemutakhiran

R.P. Soejono
R.Z. Leirissa

Balai Pustaka

PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan
BALAI PUSTAKA

BP No. 2707

Hak pengarang dilindungi undang-undang

Edisi Pemutakhiran
Cetakan pertama – 2008
Cetakan ketujuh – Juli 2019
130719

959.8
Poe
s

Poesponegoro, Marwati Djoened
Sejarah Nasional Indonesia VI/Marwati Djoened Poesponegoro: Nugroho. –cet.7 – Edisi Pemutakhiran. –Jakarta: Balai Pustaka, 2019

xlv, 808 hlm.: ilus.; bibl.; indeks 23 cm. – (Seri BP no. 2707).

1. Sejarah Indonesia. I. Notosusanto, Nugroho. II. Judul III. Seri
ISBN 979–407–412–8

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta

Pasal 2

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penyelaras Bahasa: Huri Yani
Desain Isi : Nurhamzah
Desain Sampul : Dion
Sumber Foto : Tim Pemutakhiran

Kata Pengantar
Edisi Pemutakhiran

Buku *Sejarah Nasional Indonesia* (SNI) Edisi Pemutakhiran ini terbit dalam cetakan ketujuh. Sejak awal penerbitan *SNI* pada tahun 1975, buku *SNI* ini belum pernah dimutakhirkan sesuai dengan temuan-temuan baru dan perkembangan teori sejarah yang baru. Sudah hampir tiga puluh tiga tahun, banyak naskah perbaikan masih tersimpan di laci para penulis sejarah Indonesia.

Keunikan pertama dari *SNI* adalah bahwa buku merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri, ilmuwan/-wati Indonesia yang sebagian besar masih hidup. Keunikan kedua dari buku *SNI* ini adalah dia ditulis dengan latar belakang Indonesia atau bersifat indonesiasentris. Untuk mengetahui latar belakang penulisan buku *SNI* sebanyak enam jilid ini perlu membaca Prakata Editor Umum pada edisi pertama yang ditulis oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo.

Buku *SNI* telah mendapat julukan dari masyarakat Indonesia sebagai "buku standar" sejarah Indonesia. Oleh karena itu, isi buku *SNI* sering dipakai sebagai sumber rujukan penulisan dan pembicaraan tentang sejarah Indonesia, baik secara langsung dikatakan maupun secara tersirat.

Balai Pustaka sebagai pemegang hak penerbitan buku *SNI* telah berusaha keras untuk menghidupkan kembali semangat nasional para pencetus dan penulis awal buku *SNI*. Dengan menghimpun semua mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penulisan buku *SNI*, Balai Pustaka berhasil memutakhirkan isi buku *SNI* walaupun memang terlambat. Kepada para penulis buku *SNI*, baik yang masih hidup dan terus terlibat dalam pemutakhiran buku *SNI* ini dan kepada yang telah meninggal, Balai Pustaka mengucapkan terima kasih dan penghormatan besar atas karya dan jasa mereka.

Dengan ini, *SNI* Edisi Pemutakhiran ini hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga *SNI* Edisi Pemutakhiran ini menyadarkan bangsa Indonesia akan sejarah bangsanya dan buku ini berguna bagi bangsa Indonesia.

Terima kasih.

Balai Pustaka

Kata Pengantar
Edisi ke-4

Sejarah nasional menggambarkan pertumbuhan kita sebagai suatu bangsa. Sejak zaman purba dengan tanda-tanda pertama akan akar-akar kehidupan bangsa, kemudian melalui perkembangan suku-suku tiap daerah, kita telah tumbuh menjadi kesatuan bangsa dengan tanggapan dan sikap hidup nasional yang khas.

Perkembangan nasional mengingatkan kita kepada pertumbuhan pohon dengan pokok kesatuan yang makin kukuh dan besar. Kata *sejarah* yang berasal dari bahasa Arab berarti 'pohon'.

Sudah cukup banyak ditulis tentang sejarah nasional kita, baik oleh ahli sejarah bangsa kita maupun oleh orang-orang asing, masing-masing mengenakan pandangan dan tafsirannya terhadap pertumbuhan bangsa kita. Di tengah pelbagai uraian itu diperlukan karangan sejarah *babon*, yang dapat menjadi dasar dan rujukan penulisan sejarah nasional. Buku ini mengandung sejarah nasional Indonesia yang baku, yang ditulis dan disunting oleh ahli-ahli sejarah bangsa kita.

Balai Pustaka sebagai Penerbit Pemerintah merasa bangga dapat menerbitkan keenam jilid *Sejarah Nasional Indonesia* Edisi ke-4 cetakan ke-8 ini.

Balai Pustaka

SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kita semua mengetahui bahwa penulisan buku Sejarah Indonesia sampai sekarang masih menggunakan bahan-bahan dan versi asing. Karena itu sudah lama dirasakan bahwa penulisan buku Sejarah Indonesia perlu ditangani oleh sejarawan Indonesia yang mempunyai keahlian dalam bidang itu. Usaha-usaha ke arah penyusunan buku Sejarah Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950, tetapi mengalami pelbagai kesulitan dan hambatan sehingga baru sekarang dapat disusun Buku Standar Sejarah Nasional Indonesia.

Buku Standar Sejarah Nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan "babon" sejarah Indonesia, yang disusun oleh sejarawan Indonesia, berdasarkan penelitian ilmiah dan orientasi nasional. Tim sejarawan Indonesia, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo telah bekerja dengan penuh ketekunan dan dedikasi. Hasil pekerjaannya sangat berguna bagi dunia pendidikan pada khususnya dan bagi pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena mempergunakan fakta-fakta ilmiah yang objektif, dan orientasi yang sesuai dengan kepentingan nasional. Karena itu, kita sekarang tidak lagi menggunakan bahan-bahan dan versi asing dalam Sejarah Indonesia.

Selain Buku Standar Sejarah Nasional Indonesia, telah pula disusun buku Sejarah Nasional untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang terdiri atas tiga jilid, dan untuk tahun 1976 telah direncanakan untuk menyusun buku Sejarah Nasional untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Penulisan buku Sejarah Indonesia bukan merupakan tugas yang mudah, apalagi jika diselesaikan dalam waktu yang relatif pendek.

Karena itu, usaha-usaha penulisan Sejarah Indonesia yang telah dilakukan itu perlu kita sempurnakan dan kembangkan terus sehingga anak didik dan masyarakat Indonesia akan dapat memetik manfaatnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 5 Maret 1975
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sjarif Thayeb

Prakata Editor Umum
Edisi Pemutakhiran

Buku *Sejarah Nasional Indonesia* (SNI) mungkin telah dianggap sebagai dokumen historis dan telah dimakan waktu sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 1975 dengan pelanjutannya pada tahun 1977 (sampul hijau) dan pada tahun 1981–1983 (sampul biru). Tiga puluh tiga tahun dan/atau 25 tahun perjalanan sebuah buku sejarah tentu memerlukan pemutakhiran baik secara materi, teori, dan konsep, maupun secara perbukuan dan pembahasaan. Jika sebagian penulis (SNI) pada awalnya berumur 40 tahun, sekarang sebagian dari mereka telah berumur 75 tahun atau telah meninggal.

Dalam perjalanan waktu ini, buku *SNI* telah menjadi sumber penulisan sejarah yang beredar dan menjadi rujukan para cendekia dari luar dan dalam negeri. Di samping itu, kebutuhan masyarakat Indonesia akan sebuah sumber sejarah yang terpercaya didasarkan pada keterpercayaan kepada para penulis yang memang pakar dalam bidang sejarah dan bobot kepakaran mereka menjadi jaminan keakuratan sejarah nasional Indonesia. Kelangkaan buku sejarah yang menjadi sumber rujukan masyarakat, khususnya para pelajar/siswa dan mahasiswa, mendorong para pakar yang terlibat dalam penulisan *SNI* berkumpul kembali (tentu yang masih hidup) untuk *memutakhirkan* buku SNI dari segi materi, teori, dan konsep, selain editorial yang menarik dan bertanggung jawab. Lahirlah *SNI* Edisi Pemutakhiran ini.

Edisi Pemutakhiran ini tetap mempertahankan *SNI* dalam enam jilid seperti edisi awal dengan beberapa perubahan susunan subbab dan pengaturan kembali urutan subbab serta perbaikan redaksional pada setiap jilid. Pemutakhiran ini telah berlangsung satu setengah tahun di tengah kesibukan para penulis baik yang lama maupun yang baru.

Bagaimanapun juga yang tetap dijaga dalam Edisi Pemutakhiran ini ialah ditulis oleh pakar Indonesia dengan pandangan orang Indonesia sendiri mengenai kisah bangsanya. Pandangan Prof. Dr. Sartono Kartodirejo tetap relevan dan aktual seperti dalam "Prakata Editor Umum" Edisi I yang tetap dimuat dalam Edisi Pemutakhiran ini.

Dalam Edisi Pemutakhiran ini setiap jilid *SNI* mendapatkan pula prakata sebagai pertanggungjawaban para penulis jilid *SNI*. Ada prakata yang pendek dan ada prakata yang panjang yang semuanya menjadi pintu masuk setiap jilid.

Akhirulkalam para penulis mengucapkan terima kasih kepada PT Balai Pustaka (Persero) sebagai penanggung jawab penerbitan, kepada mereka yang membantu memberikan dana kegiatan penulisan dan penerbitan, dan kepada para Konsultan PT Balai Pustaka (Persero) yang tetap pada usaha dan dorongan untuk penerbitan dan pemutakhiran SNI ini. Inilah jasa dan sumbangsih kita bangsa Indonesia dalam bentuk penulisan buku *SNI*.

Semoga buku ini berguna bagi para anak bangsa sekarang dan pada masa yang akan datang datang.

Semoga Tuhan memberkati kita semua yang terlibat.

Terima kasih.

Akhir 2007

R.P. Soejono

R.Z. Leirissa

Kata Pengantar Editor Umum
untuk Edisi 1984

Sejak buku *Sejarah Nasional Indonesia* ini terbit untuk pertama kali pada tahun 1975 dan selanjutnya pada tahun 1977 (sampul hijau) dan pada tahun 1981–1983 (sampul biru), kehadirannya sudah mantap dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan dalam sebutan masyarakat mendapat nama-julukan "Buku Standar".

Memang hingga kini buku ini masih unik karena merupakan buku sejarah Indonesia pertama yang substansial hasil karya orang Indonesia. Dengan segala kekurangannya, buku ini dapat menyampaikan suatu *view from within*, pandangan orang Indonesia sendiri mengenai kisah bangsanya.

Para pengarang sendiri merasa bahwa buku ini sudah perlu diterbitkan dalam suatu edisi revisi, yang telah disesuaikan dengan hasil penelitian mutakhir. Namun, usaha semacam itu memerlukan waktu yang lebih lama dan koordinasi yang tidak mudah. Oleh karena itu, telah diputuskan untuk menerbitkan edisi ini yang telah mulai mengalami perbaikan-perbaikan, tetapi belum sepenuhnya. Selanjutnya, usaha melakukan revisi besar akan diusahakan terus.

Hal itu adalah semata-mata karena edisi-edisi sebelumnya telah lama habis. Padahal permintaan masyarakat sudah sangat mendesak karena sementara ini telah timbul satu generasi baru cendekiawan yang belum sempat memiliki buku standar Sejarah Nasional Indonesia. Generasi baru itu meliputi pula sejumlah besar guru sejarah pada SD, SMTP, dan SMTA yang perlu memantapkan pemahamannya terhadap sejarah nasional Indonesia untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan memadai.

Diharapkan pula agar supaya masyarakat luas dapat menggunakan edisi ini untuk mengerti masa kini bangsa dan negaranya melalui pemahaman masa lampaunya. Dengan demikian, mudah-mudahan dapat dilaksanakan pembangunan masa depannya yang cemerlang.

11 Agustus 1984 **Marwati Djoened Poesponegoro**
Nugroho Notosusanto

Prakata Editor Umum
Edisi ke-1

Setelah bangsa Indonesia berhasil memerdekakan dirinya terasa di kalangan cendekiawan suatu keperluan untuk menulis kembali sejarah Indonesia, tidak lain karena penulisan-penulisan sejarah yang diwariskan oleh sejarawan Belanda sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia dewasa ini. Sudut penglihatan yang tercermin dalam karya-karya mereka terutama memusatkan perhatian kepada peranan bangsanya, *neerlando-sentrisme* semacam itu perlu diganti dengan *indonesia-sentrisme*, yaitu pandangan dari sudut penglihatan yang berpusat pada Indonesia sendiri. Pemikiran sekitar pandangan baru ini telah dikemukakan oleh beberapa ahli pikir sebagai salah satu usaha untuk mengarahkan usaha pemikiran serta penulisan sejarah Indonesia yang lebih memadai.

Untuk melaksanakan gagasan tentang penulisan kembali sejarah Indonesia pada tahun 1951 telah dibentuk suatu Panitia Sejarah Nasional yang bertugas menyusun kitab sejarah nasional Indonesia dengan dasar luas dan jiwa nasional bersendi pada ilmu pengetahuan dipandang dari sudut politik, sosial ekonomi dan kebudayaan mulai dari zaman purba sampai sekarang. Keadaan dewasa itu rupanya belum memungkinkan Panitia itu untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Sebagai langkah yang sangat penting dapat disebut penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional yang pertama di Yogyakarta pada tahun 1957. Selain untuk memperdalam pemikiran tentang Sejarah Indonesia sebagai sejarah nasional, diperbincangkan pula keperluan yang sangat mendesak, yaitu penulisan buku-buku sejarah untuk sekolah-sekolah. Kenyataannya adalah bahwa buku-buku sekolah yang dipakai, kalau bukan terjemahan atau saduran dari buku-buku sejarah karangan sejarawan Belanda, belum mewujudkan sejarah nasional dalam arti yang sebenarnya. Meskipun hasil dari seminar tidak memenuhi harapan para peserta, tetapi tidak sedikit manfaatnya untuk memperdalam kesadaran akan peranan sejarah nasional sebagai sarana penting untuk pendidikan warga negara Indonesia, terutama menimbulkan kesadaran nasionalnya dengan mengenal identitas bangsanya melalui sejarahnya.

Sekitar tahun 1963 telah dibentuk panitia untuk melaksanakan penulisan kembali sejarah Indonesia, tetapi tahun-tahun berikutnya, yang

penuh ketegangan sosial dan krisis politik, tidak memberi kesempatan kepada panitia untuk menghasilkan karya.

Suatu titik terang dalam perkembangan studi sejarah di Indonesia adalah Seminar Sejarah Nasional kedua yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Agustus 1970, yaitu suatu generasi baru sejarawan memajukan kertas kerjanya dalam jumlah yang cukup besar. Pokok-pokok kertas kerja itu mencakup periode prasejarah sampai dengan periode yang paling modern. Hal ini dapat dianggap suatu langkah yang cukup maju jika dibandingkan dengan seminar yang pertama, tambahan pula dapat dipandang sebagai suatu tanda bahwa sudah ada kemungkinan yang lebih besar untuk meneruskan usaha penulisan sejarah nasional. Jumlah tenaga kerja, meskipun kebanyakan belum banyak pengalaman dalam penulisan, telah memadai untuk membentuk kelompok yang akan bertugas melaksanakan usaha itu. Ditambahkan lagi bahwa keperluan penulisan buku sejarah untuk sekolah semakin terasa mendesak. Kedua hal itu mendorong para sejarawan untuk mengusulkan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar diangkat suatu regu yang ditugaskan menulis kembali Sejarah Indonesia. Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0173/1970, 4 April 1970, mengangkat Panitia Penyusun Buku Standar Sejarah Nasional Indonesia berdasarkan Pancasila yang dapat dipakai di perguruan tinggi dan sekaligus akan dijadikan bahan daripada *textbook* sejarah untuk sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas.

Panel pertama mencakup seluruh periode yang lazim disebut prasejarah. Panel kedua akan membahas periode dari akhir prasejarah sampai kedatangan pengaruh Islam di Indonesia. Panel ketiga bertolak dari awal zaman ini sampai akhir abad ke-17. Panel keempat mulai dari sekitar tahun 1700 sampai 1900. Panel berikutnya meliputi periode pergerakan nasional (1900–1942). Panel yang terakhir menggarap masa pendudukan Jepang sampai dengan kira-kira pertengahan tahun enam puluhan.

Tidak berbeda dengan tugas pujangga di masa lampau, sejarawan dewasa ini juga mempunyai kewajiban untuk menafsirkan serta meneruskan tradisi bangsanya dengan menyusun kembali riwayatnya termasuk garis perkembangan masyarakatnya serta kebudayaannya.

Dalam menunaikan fungsinya itu sejarawan Indonesia perlu menyadari sepenuhnya bahwa dengan gambaran sejarahnya, bangsa Indonesia mampu menempatkan diri dalam waktu serta memahami diri sehingga secara lebih mendalam dikenal identitasnya.

Kesadaran akan tanggung jawab yang berat ini pada satu pihak menimbulkan pada sejarawan suatu keragu-raguan apakah kemampuan serta pengetahuannya telah memadai untuk melaksanakan tugas itu, pada pihak lain keadaan pengajaran sejarah sebagai sendi pendidikan nasional sangat menyedihkan sehingga di dalam keadaan itu tidak dapat diharapkan penanaman perasaan kepribadian nasional serta pemupukan konsensus pada generasi muda melalui pengajaran sejarah itu.

Dengan diperolehnya kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menyadari akan situasinya serta hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Proses dekolonisasi dalam bidang politik diikuti oleh proses yang sama dalam penulisan sejarah. Di dalam masa penjajahan bangsa Indonesia "terasing" dari sejarahnya sendiri, apa yang diajarkannya lebih merupakan sejarah dari negeri perantauan bangsa penjajah di mana ditonjolkan peranan tokoh-tokoh penjajah sedang peranan bangsa Indonesia ada di latar belakang belaka. Pelukisan dari sudut penglihatan Barat jelas-jelas berat sebelah karena subjektivitas yang timbul dari kepentingan perdagangan khususnya dan penjajahan pada umumnya. Masalah dekolonisasi dalam penulisan sejarah tidak cukup dengan mengubah peranan pemberontak menjadi pahlawan, akan tetapi perlu diungkapkan segala kekuatan sosial yang menciptakan masyarakat Indonesia serta memberikan arah perkembangannya. Untuk melengkapi gambaran serta menerangkan proses sejarah perlu diuraikan pelbagai faktor yang mendorong pertumbuhan bangsa Indonesia.

Penyusunan kembali sejarah Indonesia perlu memenuhi beberapa syarat yang dituntut oleh proses dekolonisasi itu.

(1) Sejarah Indonesia yang wajar ialah sejarah yang mengungkapkan "sejarah dari dalam" di mana bangsa Indonesia sendiri memegang peranan pokok.

(2) Proses perkembangan masyarakat Indonesia hanya dapat diterangkan sejelas-jelasnya dengan menguraikan faktor atau kekuatan yang memengaruhinya, baik ekonomis, sosial, maupun politik atau kultural.

(3) Berhubungan erat dengan kedua pokok di atas perlu ada pengungkapan akitivitas dari pelbagai golongan masyarakat, tidak hanya para bangsawan atau kesatria, tetapi juga dari kaum ulama dan petani serta golongan-golongan lainnya.

(4) Untuk menyusun sejarah Indonesia sebagai suatu sintesis, di mana digambarkan proses yang menunjukkan perkembangan ke arah kesatuan geopolitik seperti yang kita hadapi dewasa ini, prinsip integrasi perlu dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh integrasi itu dalam masa-masa tertentu telah tercapai.

Penulisan ini berpangkal pada paham bahwa Indonesia dengan pelbagai kelompok penduduknya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan yang tumbuh bersama dengan perkembangan wilayah Indonesia sebagai daerah politik-geografis. Paham itu kemudian diperkuat dengan munculnya gerakan nasional yang semakin memperkuat kesadaran nasional, ialah kesadaran bahwa penduduk kepulauan Indonesia merupakan satu bangsa.

Perkembangan kesatuan nasional itu sendiri tidak dapat dipahami tanpa mengetahui perkembangan sejarah Indonesia.

Penulisan sejarah pada tahun tujuh puluhan seyogianya didasarkan atas beberapa anggapan tentang perkembangan masyarakat Indonesia serta sejarahnya.

Anggapan pertama adalah proses integrasi yang memuat pengertian bahwa ada kelangsungan dari kesatuan-kesatuan masyarakat dan kebudayaan lokal sampai yang nasional. Ini berarti bahwa sejarah lokal atau daerah perlu ditulis dalam hubungannya dengan atau peranannya dalam kesatuan besar.

Anggapan kedua berhubungan dengan perubahan sosial dan kebudayaan yang merupakan proses yang kompleks. Lembaga-lembaga kebudayaan mendapat pengaruh dari proses perubahan yang bergerak dengan pelbagai kekuatan, serta mencakup pelbagai aspek kehidupan.

Anggapan ketiga menunjuk kepada kenyataan bahwa setiap kesatuan etnis serta kebudayaannya perlu dipahami menurut jasa-jasa atau sumbangan yang diberikan kepada sejarah Indonesia serta perlu dimengerti berdasarkan nilainya sendiri. Setiap kesatuan sejarah menghasilkan warisan untuk masa depan.

Salah satu sebab yang mendorong panitia untuk menerima tugas penulisan sejarah ini ialah karena buku-buku sejarah untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah sangat rendah mutunya. Beberapa kali usaha untuk memperbaikinya telah gagal, antara lain karena tidak ada buku babon atau pedoman yang dapat memberi kerangkanya. Diharapkan tulisan ini akan dapat dipergunakan sebagai kerangka untuk penulisan buku sekolah itu.

Disadari sepenuhnya oleh panitia bahwa pengajaran sejarah merupakan dasar bagi pendidikan dalam masa pembangunan nasional, terutama untuk menggembleng jiwa generasi muda dengan membangkitkan pada mereka suatu kesadaran bahwa mereka anggota dari suatu nasion. Meskipun dirasakan bahwa tenaga ahli masih sangat kurang untuk melaksanakan pekerjaan raksasa itu, keperluan yang mendesak menghilangkan keragu-raguan sehingga kelompok tidak mau mengelakkan kewajiban menulis kembali sejarah Indonesia.

Setiap usaha kolektif semacam ini tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan dari pelbagai pihak, baik lembaga maupun perseorangan. Pertama-tama perlu disebut Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sejak semula memberikan dorongan yang kuat untuk menjalankan penulisan ini, dorongan itu berupa fasilitas-fasilitas serta prasarana-prasarana yang amat memudahkan pekerjaan Panitia. Lagi pula kepercayaan serta perhatian yang diletakkan pada usaha ini merupakan dukungan moril yang sangat berharga sehingga pelbagai kesulitan dapat diatasi. Kepada beliau beserta pembantu-pembantu beliau di lingkungan Departemen kami mengucapkan terima kasih atas bantuan itu.

Semua anggota panitia, tidak ada seorang pun yang terkecuali, adalah tenaga dari universitas, lembaga ilmiah, dan lembaga pemerintah. Selain tugas pokoknya, mereka diberi kesempatan menyumbangkan tenaga serta pikirannya kepada karya penulisan ini. Atas kelonggaran itu Panitia perlu menyatakan rasa terima kasih sebesar-besarnya.

Perhatian terhadap usaha ini, yang sering disertai bantuan materil yang konkret tidak hanya datang dari pihak lembaga-lembaga Pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Tidak sedikit bantuan diterima dari *The Ford Foundation* yang diberikan lewat perwakilannya di Indonesia, terutama dengan memberikan kesempatan bagi para ketua panel untuk memperdalam pengetahuannya dalam bidang teori dan metodologi sejarah.

Selama perantauan di luar, di Amerika Serikat, dan di Nederland, perhatian serta bantuan diberikan kepada rombongan ketua-ketua panel dengan sangat leluasa sehingga tidak ternilai manfaat yang diperolehnya, terutama bagi penyusunan karya ini. Para sarjana atau sejarawan yang tersohor dari Universitas California di Berkeley, dan dari universitas-universitas lain, seperti Cornell, Ohio, Wisconsin, Yale, kemudian dari Universitas Leiden dan Koninklijk Instituut van Taal–, Land–en Volkenkunde, kesemuanya sangat terbuka dalam membahas masalah dan rencana penulisan sejarah ini. Fasilitas-fasilitas diperoleh dari arsip-arsip di negeri Belanda sehingga bahan menjadi semakin lengkap. Panitia merasa beruntung mendapat kesempatan yang luar biasa itu, lagi pula banyak yang secara perorangan dengan tulus ikhlas memberikan segala macam bantuan sehingga memperingan tugas rombongan selama merantau, sesungguhnya terlalu banyak untuk disebut satu per satu.

Kepada segenap anggota panitia di sini kami selaku ketua menyatakan rasa terima kasih atas segala jerih payah dan daya upaya, pengorbanan waktu, tenaga serta pikiran yang kesemuanya memungkinkan pelaksanaan

tugas yang diletakkan pada panitia. Yang perlu mendapat penghargaan sebesar-besarnya tidak lain ialah segala kesediaan serta kemauan baik yang ditunjukkan sehingga selama kira-kira tiga tahun terjalin hubungan yang cukup akrab serta kerja sama yang baik. Tanpa sumbangan itu pekerjaan Panitia tidak akan dapat diselesaikan dengan semestinya.

Meskipun panitia sebagai suatu wadah telah mengatur serta sekadar mengarahkan dan mengoordinasikan penulisan kolektif ini, tetapi tanggung jawab terletak pada pengarang masing-masing.

Meskipun banyak fasilitas yang diperoleh selama menjalankan penulisan itu, mulai dari pengumpulan bahan sampai penerbitannya, tetapi oleh panitia dirasakan bahwa karya belum dapat memenuhi harapan seperti yang telah diutarakan di mana-mana, jangankan tuntutan seperti yang lazim diadakan terhadap karangan ilmiah. Mungkin dirasakan pula bahwa karya ini belum memadai biaya dan tenaga yang dicurahkan bagi pelaksanaannya. Karya kolektif seperti ini memang memerlukan organisasi, permusyawarahan, dan penyerasian pelbagai kondisi anggota, sehingga sukar diharapkan bahwa semua nilai input dapat dicerminkan dalam nilai hasilnya. Kecuali kurang pengalaman menulis, pengalaman pertama dalam usaha kolektif, kurang kemahiran penulisan ini membawa akibat ketidakrataan serta serba kurangnya susunan penulisan ini.

Tidak ada seorang pun dalam panitia yang mempunyai anggapan bahwa karya ini merupakan suatu standar, jauh dari itu. Pada hemat kami, ini merupakan usaha permulaan, sekadar memenuhi keperluan yang mendesak. Besar harapan kami bahwa setelah karya ini terbit banyak, yang didorong menghasilkan penulisan sejarah Indonesia, dalam keseluruhan atau hanya sebagian, yang lebih tinggi mutunya serta lebih memenuhi syarat-syarat sebagai sejarah nasional yang ilmiah.

Panitia masih mencari-cari gaya bahasa serta tingkat penguraian yang sesuai dengan sidang pembaca karya ini. Yang dimaksud dengan sidang pembaca di sini terutama para kaum terpelajar serta cendekiawan Indonesia yang memiliki minat kepada sejarah tanah airnya, sekadar sebagai bacaan pendahuluan. Untuk mempelajari sejarah yang lebih mendalam serta terperinci sudah barang tentu diperlukan karya-karya khusus. Meskipun lingkup waktu serta rangkuman karya ini mencakup periode dari prasejarah sampai sejarah terbaru, tetapi panitia terpaksa membatasi diri pada pasal-pasal pilihan, yang meliputi bagian-bagian dari perkembangan sejarah dan merupakan gejala-gejala penting, terutama dalam hubungannya dengan proses integrasi serta yang menjelaskan sistem dan struktur masyarakat sekarang.

Selanjutnya sejarah yang disajikan di sini tidak meliputi semua bidang kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau, beberapa segi dengan sengaja tidak dicakup, seperti sejarah kesenian dan sejarah kebudayaan dengan alasan bahwa (1) jenis sejarah itu sudah sejak lama mandiri dan (2) ruang lingkup penulisan ini terpaksa dibatasi. Hal ini dilakukan dengan harapan agar pada kesempatan lain ada penulisan tersendiri mengenai sejarah kesenian dan kebudayaan itu.

Keterbatasan karya ini juga disebabkan oleh kenyataan bahwa belum cukup tersedia hasil penelitian, pengkajian, serta penulisan dari sudut penglihatan baru pada waktu karya ini dimulai. Yang jelas adalah bahwa karya ini tidak didasarkan atas penelitian yang asli dan mendalam.

Tidak ada penulisan sejarah yang tidak memuat sifat-sifat subjektif. Meskipun dalam penulisan ini diusahakan agar segala tuntutan metodologi ilmu sejarah dipenuhi, termasuk kritik sejarah, tetapi tidak ada anggapan bahwa hasil penulisan telah mencapai objektivitas sepenuhnya. Dalam menghayati penulisan sejarah Indonesia dari dalam, atau juga sering disebut penulisan yang indonesia-sentris, mau tidak mau panitia membatasi sudut penglihatannya atau titik pendirian. Dianggapnya hal itu yang paling memadai dalam situasi yang kita hadapi, ialah kenyataan bahwa pengertian "Indonesia" memang mewujudkan realitas bagi bangsa Indonesia, yaitu negara nasional yang mengikat sebagai suatu kesatuan kelompok-kelompok etnis sebagai satu bangsa dengan satu bahasa nasional. Di sini perlu kita akui bahwa pangkal tolak penggarapan penulisan sejarah ini terikat pada zaman kita sekarang ini, suatu ikatan yang tidak dapat kita lepaskan begitu saja.

Sejarah Nasional seperti yang dikonsepsikan di sini sama sekali tidak menyangkut pengertian bahwa sejarah bangsa Indonesia harus digambarkan dalam serta keagungannya belaka sehingga objektivitas harus dikorbankan demi penggambaran yang demikian itu. Pasang surut kegiatannya, maju-mundur karya kebudayaannya, timbul tenggelamnya lembaga-lembaganya, unggul-kalahnya perjuangannya, kesemuanya secara bersama-sama menyusun irama sejarah Indonesia yang sebagai nasib bersama akan mempertinggi kesadaran bangsa Indonesia sebagai nasional. Panitia berkeyakinan bahwa sejarah Indonesia yang menggambarkan nasib bersama, dalam suka duka, kegemilangan dan kesuraman, selain kepahlawanan serta kewibawaan tokoh-tokoh sejarah, mampu membangkitkan rasa kebanggaan pada generasi muda, perasaan mana akan memantapkan kepribadian bangsa, serta identitasnya. Dengan demikian, akan tercapai pula apa yang diharapkan dari pelajaran Sejarah Nasional, tanpa mengurangi tuntutan-tuntutan ilmu sejarah.

Akhirulkalam, harapan yang terkandung dalam hati panitia tidak lain adalah semoga karya yang tidak sepertinya ini menambah bahan bacaan bagi kaum terpelajar yang berminat kepada sejarah Indonesia, baik yang hendak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di masa lampau maupun yang ingin mengambil pelajaran dari suri teladan para tokoh sejarah atau dari pengalaman-pengalaman bangsa Indonesia sepanjang masa.

Yogyakarta, akhir 1974

Sartono Kartodirdjo

Prakata Editor Jilid
Edisi Pemutakhiran

Buku *Sejarah Nasional Indonesia VI* ini merupakan edisi pemutakhiran dari edisi terdahulu. Pemutakhiran yang dimaksudkan di sini adalah penambahan sumber-sumber baru, perluasan eksplanasi terutama pada era Orde Baru. Pembagian bab-bab yang mencerminkan periodisasi sejarah nasional kontemporer tetap dipertahankan.

Bab I Zaman Jepang. Bab ini dipertahankan karena periode ini merupakan puncak perjuangan kaum pergerakan nasional yang berjuang secara intelektual dan berhasil merumuskan ideologi bangsa yang mengandung nilai-nilai religius, humanis, demokratis, integratif, dan filantropis, serta rancangan Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara baru yang merdeka dan berdaulat sebagaimana yang mereka idamkan. Pada periode ini pula lahir suatu generasi baru yang bersemangat revolusioner, sebagai kekuatan pendorong dan pembuka gerbang kemerdekaan bangsanya.

Bab II Masa Perang Kemerdekaan atau periode revolusi nasional yang dibuka dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan pada periode ini pula bangsa Indonesia menghimpun seluruh kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan itu. Tidak dapat diingkari bahwa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini terjadi pelbagai dinamika yang unik dan konflik-konflik internal, yang meliputi persepsi, interpretasi, serta strategi tentang perjuangan menghadapi lawan. Namun, pada akhirnya bangsa Indonesia sukses dalam perjuangannya dan memperoleh pengakuan internasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada akhir tahun 1949.

Bab III adalah Masa Demokrasi Liberal. Para pemimpin bangsa mencoba menerapkan sistem demokrasi sebagaimana yang mereka idamkan pada masa pergerakan nasional. Sistem demokrasi yang diterapkan, yang kemudian disebut dengan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, membuahkan konflik politik yang tajam sampai mengarah ke perpecahan nasional. Dalam kondisi demikian bangsa Indonesia sukses dalam

melaksanakan politik luar negerinya sebagai pelopor solidaritas negara-negara Asia-Afrika, sebagaimana tercantum dalam Dasasila Bandung 1955.

Bab IV Masa Demokrasi Terpimpin, yang diawali dengan munculnya tokoh Presiden Soekarno yang diawali melalui dekritnya pada 5 Juli 1959. Soekarno yang selama masa Demokrasi Liberal merasa seolah-olah berada di "Menara Gedung" sebagai penonton penerapan sistem demokrasi liberal. Dengan dekrit kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Soekarno mengoreksi sistem demokrasi liberal dengan menciptakan demokrasi baru, yang disebut Demokrasi Terpimpin. Untuk melaksanakan demokrasi terpimpin, Soekarno melalui konsep *Samen pundeling van alle revolutionaire krachten*, menciptakan perubahan pembaruan institusi pemerintah maupun landasan politik baru, yang disebut Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Perubahan harus dilaksanakan melalui revolusi dan dengan cara-cara revolusioner. Konsep politik dan revolusi Soekarno yang sangat konflik antar-*alle revolutionaire krachten*.

Akhirnya Soekarno jatuh secara tragis karena tidak mampu mengendalikan konflik-konflik tersebut.

Bab V Masa Orde Baru. Masa ini diawali dari terbitnya surat perintah Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto pada 11 Maret 1966, yang dikenal sebagai *Surat Perintah 11 Maret 1966* (Supersemar). Setelah Jenderal Soeharto berhasil mengakhiri dualisme kepemimpinan negara sejak 20 Februari 1967 tampil sebagai pemimping baru, masa kepemimpinannya yang panjang (20 Februari 1967–21 Mei 1998).

Menurut Soeharto, perubahan hanya dapat dilaksanakan melalui pembangunan nasional. Oleh karena itu, sejak 1967 mulai dilaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang hasilnya dapat dirasakan oleh rakyat. Di samping pembangunan fisik-material, Soeharto perhatian terhadap bidang ideologi Pancasila. Oleh karena itu, masa pemerintahannya disebut dengan masa Demokrasi Pancasila. Institusi untuk mensosialisasikan Pancasila dibentuk dan penataran mengenai Pancasila diselenggarakan di seluruh instansi pemerintah. Kekuatan sosial-politik masyarakat disederhanakan, yang mirip dengan konsep Soekarno. Fungsi dan peran politik Angkatan Bersenjata lebih ditegaskan, yang kemudian menjadi dominan.

Kebijakan mengenai stabilitas nasional dengan pendekatan keamanan untuk menyelamatkan pembangunan nasional banyak mengandung kritik bahkan oposisi diam-diam. Krisis ekonomi dan politik yang melanda pemerintahannya pada 1996–1998, menjadi sebab utama Presiden Soeharto mengundurkan diri pada bulan Mei 1998.

Jakarta, Akhir 2007 **Saleh A. Djamhari**

Prakata
Edisi ke-4

Buku *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI* edisi ke-4 (1984) ini berbeda dengan edisi terdahulu, khususnya mengenai bentuk penyajiannya. Edisi terdahulu buku terbagi atas tiga bab, dengan bentuk penyajian prosesual (bab I) dan bentuk penyajian struktural (bab II dan III).

Pada edisi ke-4 ini buku terbagi atas lima bab yang seluruhnya disajikan secara prosesual dimaksudkan untuk memberikan kegamblangan proses dari semua peristiwa secara kronologis.

Sedang usaha penyempurnaan lainnya yang kami lakukan adalah menambahkan beberapa peristiwa penting pada periode Orde Baru yang direntang sampai masa yang mutakhir.

Agustus 1984 **Nugroho Notosusanto**

Prakata
Edisi ke-1

Jilid VI yang merupakan bagian terakhir buku Sejarah Nasional Indonesia ini mengandung masalah-masalah khusus yang menyangkut sifat periodenya yang lazim disebut *contemporary history* atau sejarah sezaman. Periode yang di dalam masyarakat secara populer disebut Zaman Jepang dan Zaman Kemerdekaan ini masih sempat dialami oleh sebagian besar orang Indonesia yang sekarang masih hidup. Pastilah bahwa mereka itu semuanya masing-masing mempunyai pengalaman pribadi atau setidak-tidaknya kesan pribadi mengenai peristiwa-peristiwa dalam periode ini.

Karena itulah bagian terakhir ini kiranya bagian yang paling sulit menyejarahkannya. Setiap penulisan sejarah terdiri atas dua komponen: komponen *fakta* dan komponen *interpretasi.* Untuk menetapkan fakta-fakta dalam periode terakhir ini dituntut taraf *accuracy* atau kecermatan yang tinggi sampai ke detail, justru karena begitu banyak pelakunya masih hidup. *Seleksi* terhadap fakta-fakta yang kesemuanya sudah teruji sesuai dengan syarat-syarat metode sejarah, juga merupakan persoalan yang menyangkut subjektivitas sejarawan. Kita selalu dapat berbantah mengenai fakta mana yang cukup penting untuk dimasukkan ke dalam teks dan fakta mana yang terpaksa harus dikesampingkan karena pembatasan tempat yang tersedia. Sebab jelas kiranya, bahwa tidak semua fakta sejarah mungkin dimasukkan ke dalam sebuah buku sejarah, karena terbatasnya tempat. Memang demikianlah hakikatnya: sejarah-sebagai-kisah pasti jauh lebih sedikit — hanya sekelumit — daripada sejarah-sebagai-aktualitas.

Adapun interpretasi-sejarah, sudah jelas adalah subyektif. Para pelakunya saja, masing-masing, akan menanggapi peristiwa yang dialaminya secara subyektif; demikian pula para sejarawan yang harus mengkisahkannya. Dan subjektivitas itu tidak selalu karena kesengajaan, melainkan karena perspektif yang berbeda-beda.

Persoalan pokok lain yang harus kami pecahkan dalam menyusun sejarah sezaman Indonesia ini ialah mengenai taraf kesejamanan atau *contemporaneity* yang dapat kita capai buku Sejarah Nasional ini. Sampai seberapa dekat ke jam sendiri sejarah itu boleh kita tuliskan? Anggapan konver mengatakan: seluruh Zaman Jepang dan pasti Zaman Kemenangan

masih belum dapat disebut sejarah, karena dialami oleh orang yang masih hidup. Dengan ukuran "pelaku masih ini bahkan periode sebelumnya, yang disejarahkan di dalam jilid V, yang meliputi sejarah Pergerakan Nasional yang begitu pentingnya bagi kehidupan nasional kita, juga dapat dianggap belum sejarah".

Buku ini sejak semula bertolak dari kebutuhan nyata rakyat Indonesia dewasa ini, dan sejak semula memang tidak mau terikat kepada pandangan-pandangan konvensional. Kebutuhan masyarakat kita dewasa ini ialah, antara lain, pengertian atau wawasan mengenai pengalaman nasional kita yang pada tiga dasa yang belakangan ini berkembang begitu cepat. Setidak-tidaknya buku ini, khususnya jilid terakhirnya, harus dapat memberikan *orientasi* kepada masyarakat kita mengenai posisinya sekarang. Kami menilai Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai pengalaman yang paling penting dan paling relevan bagi kita dalam rangka kehidupan nasionalnya. Mengingat sebagai *textbook* perguruan tinggi, buku ini terutama dipakai oleh mahasiswa generasi muda yang lahir sesudah Proklamasi, bahkan sesudah Perang Kemerdekaan, maka jelas kiranya, bahwa ujung Sejarah Nasional ini harus ditarik sedekatnya ke zaman kita. Dalam hal itu kami memutuskan bersikap tidak tanggung-tanggung, dan mengakhiri periode terakhir ini pada saat dimasukinya Zaman Pembangunan ini juga dikenal dengan Zaman Orde Baru.

Adapun Jilid VI ini kami bagi atas tiga bab: pertama adalah *Tinjauan Menyeluruh* yang menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam periode ini secara prosesual; sedangkan bab kedua dan ketiga yang masing-masing membahas *Zaman Jepang* dan *Republik Indonesia* mencoba memberikan penggambaran struktural. Berlainan dengan periode-periode yang lampau, terutama sebelum abad ke-20, aspek prosesual daripada sejarah menonjol, justru karena perkembangan yang cepat yang sebagian besar masih dialami oleh kita yang hidup pada masa. Karena itu kami rasa perlu memberikan satu bab khusus untuk penyajian secara prosesual.

Pada akhirnya kami ingin menutup prakata ini dengan suatu catatan mengenai subjektivitas-sejarah yang di atas telah disinggung. Justru karena kebanyakan pelaku sejarah periode ini masih hidup, pastilah bahwa kadar *emosi* di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa maupun tokoh-tokohnya, sangat tinggi. Banyak peristiwa dan tokoh yang termasuk jenis *kontroversial.* Segalanya itu bertambah intensitasnya dengan tindakan menarik ujung kisah-sejarah periode ini sedekat-dekatnya ke zaman kita sekarang ini. Kiranya peristiwa-peristiwa yang baru terjadi ibaratnya "kemarin" atau "kemarin dulu" masih hangat dalam pandangan dan perasaan kita masing-

masing. Kesemuanya itu cukup memberikan alasan bagi sejarawan yang "mencari amannya" untuk menghindarkan periode yang begitu mutakhir.

Kami memilih sikap untuk tidak melarikan diri dari kesulitan dengan alasan yang termaktub di atas. Kami tetap menyajikan kisah-sejarah sampai ke periode mutakhir dan mencoba memberikan interpretasi yang sejauh mungkin seimbang dan layak. Namun, kami juga menyadari, bahwa interpretasi itu tidak mungkin memuaskan semua pihak secara penuh. Sebagai sejarawan profesional kami menyadari, bahwa memang di sanalah letak limitasi disiplin sejarah. Namun, kami tetap berharap, agar-supaya kombinasi antara fakta dan interpretasi yang kami sajikan di sini akan dapat memenuhi keperluan masyarakat Indonesia dewasa ini untuk mengenali dirinya sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya, sehingga dengan suatu proses penyesuaian yang kritis senantiasa menyempurnakan kemampuan sarana-sarananya guna menyukseskan Pembangunan Nasional. Semoga masa lampau kita yang mutakhir dapat menyinari masa depan yang sedang kita jangkau!

Akhir 1974 **Nugroho Notosusanto**

Sejarah Nasional Indonesia

Edisi Pemutakhiran

Jilid I Zaman Prasejarah di Indonesia

Jilid II Zaman Kuno (awal M – 1500 M)

Jilid III Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia (±1500–1800)

Jilid IV Kemunculan Penjajahan di Indonesia (±1700–1900)

Jilid V Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (±1900–1942)

Jilid VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (±1942–1998)

Tim Redaksi Edisi Pemutakhiran

1. Saleh A. Djamhari (Editor Jilid)
2. Rochmani Santoso
3. Amrin Imran
4. Yuke Ardhiati
5. Ambar Wulan
6. Peter Ferdinandus
7. Maman S. Mahayana

Sejarah Nasional Indonesia

Jilid I Jaman Prasejarah di Indonesia

Jilid II Jaman Kuna (awal M – 1500 M)

Jilid III Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia (±1500–1800)

Jilid IV Abad Kesembilan belas (±1800–1900)

Jilid V Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (±1900–1942)

Jilid VI Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia (±1942–1984)

Tim Redaksi

Ketua : Nugroho Notosusanto
Anggota : Saleh A. Djamhari
Ariwiadi
Rochmani Santoso
Emilia B. Musin Wismar
Moela Marboun

xxx

Daftar Isi

Kata Pengantar Edisi Pemutakhiran v

Kata Pengantar Edisi ke-4 vi

Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia vii

Prakata Editor Umum Edisi Pemutakhiran ix

Kata Pengantar Editor Umum untuk Edisi 1984 xi

Prakata Editor Umum Edisi ke-1 xii

Prakata Editor Jilid Edisi Pemutakhiran xxi

Prakata Edisi ke-4 xxiv

Prakata Edisi ke-1 xxv

Daftar Isi xxxi

Daftar Gambar xxxix

Bab I Zaman Jepang 1

A. Susunan dan Perkembangan Pemerintahan Pendudukan Jepang 1

1. Tentara Jepang Masuk ke Indonesia 1
2. Pemerintah Sementara 14
3. Struktur Pemerintahan Pendudukan Jepang 19

B. Pergerakan Indonesia dan Jepang 27

1. Sikap Tokoh-Tokoh Nasionalis Indonesia terhadap Jepang 27
2. Kerja Sama Kaum Nasionalis "Sekuler" 31
3. Kerja Sama Kaum Nasionalis Islam 37

C. Mobilisasi Rakyat 42

1. Pengerahan Pemuda 42
2. Organisasi Semimiliter 45
3. Organisasi Militer 50

4. Pengerahan *Rōmusha* 60
5. *Jugun Ianfu* 68
D. Ekonomi Perang 75
1. Penguasaan dan Pengawasan 75
2. Keuangan, Perdagangan, dan Industri 78
3. Kehidupan Sosial-Ekonomi di Jakarta 85
E. Pendidikan, Komunikasi Sosial, dan Budaya 91
1. Pendidikan 91
2. Komunikasi Sosial 96
3. Budaya 103
F. Perlawanan Rakyat terhadap Jepang 110
1. Perlawanan di Kalangan Kelompok Agama 110
2. Perlawanan di Kalangan Militer 113
3. Perlawanan di Kalangan Petani 116
G. Janji Mengenai Status Indonesia di Kemudian Hari 120
1. Janji Perdana Menteri Koiso 120
2. Perumusan Dasar Negara dan UUD 1945 122
3. Aktivitas di Kalangan Pemuda 130
H. Menjelang Proklamasi 135
1. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Golongan Pemuda 135
2. Peristiwa Rengasdengklok 139
3. Perumusan Teks Proklamasi 140
Bab II Perang Kemerdekaan 149
A. Proklamasi, Undang-Undang '45, dan Pancasila 149
1. Proklamasi Kemerdekaan 149
2. Sidang-Sidang PPKI 158
B. Perjuangan Awal 165
1. Dukungan terhadap Proklamasi 165
2. Perebutan Kekuasaan dan Senjata 172
3. Menyusun Kekuatan Pertahanan Keamanan 178

C. Perang dan Diplomasi 185
1. Pertempuran Melawan Sekutu 185
2. Diplomasi sebagai Sarana Penyelesaian Pertikaian 203
3. Politik Bebas-Aktif 215
D. Menghadapi Agresi Militer Belanda 220
1. Strategi Diplomasi yang Gagal 220
2. Konsolidasi Kekuatan Bersenjata 225
E. Menumpas Pemberontakan Komunis 227
1. Pepolit, Biro Perjuangan, dan TNI Bagian Masyarakat 227
2. Oposisi Front Demokrasi Rakyat (FDR) 232
3. Pemogokan di Delanggu dan Kekacauan di Solo 234
4. "Jalan Baru" Musso 239
5. Pemberontakan dan Penumpasannya 241
F. Menghadapi Agresi Militer II Belanda 242
1. Perundingan Pasca-*Renville* 242
2. Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang 249
3. Konsep Pertahanan 254
4. Perang Gerilya 258
5. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) . 260
G. Akhir Perang Kemerdekaan dan Pengakuan Kedaulatan 261
1. Pendekatan RI dengan Negara-Negara "Federal" 261
2. Menuju Konferensi Meja Bundar 268
3. Pembentukan RIS dan Pengakuan Kedaulatan 269
H. Ekonomi Blokade 272
1. Blokade Total terhadap RI 272
2. Usaha-Usaha Menembus Blokade Ekonomi 275
3. Pemikiran Mengenai Ketahanan Ekonomi 277

I. Pendidikan, Budaya, dan Komunikasi Sosial 283
1. Perkembangan Pendidikan 283
2. Sistem Pendidikan 289
3. Perkembangan Bahasa dan Sastra 291
4. Perkembangan di Bidang Seni 294
5. Media Komunikasi Massa 298

Bab III Demokrasi Liberal 299

A. Dari RIS ke Negara Kesatuan 299
1. Republik Indonesia Serikat 301
2. Kembali ke Negara Kesatuan 304

B. Sistem Liberal dan Pemilu I 307
1. Instabilitas Politik 307
2. Pemilihan Umum 1955 dan Sesudahnya 316

C. Politik Bebas-Aktif dan Konferensi Asia Afrika 323
1. Politik Luar Negeri Setelah Pengakuan Kedaulatan 323
2. Antara Dua Kekuatan Dunia 325
3. Konferensi Asia Afrika 328

D. Mencari Sistem Ekonomi Nasional 332
1. Pemikiran Ekonomi Nasional 332
2. Sistem Ekonomi Liberal 334

E. Masalah-Masalah Angkatan Perang 338
1. Peristiwa 17 Oktober 1952 338
2. Masalah Intern Angkatan Udara 343

F. Menanggulangi Gangguan Keamanan Dalam Negeri 345
1. Pemberontakan APRA 345
2. Pemberontakan Andi Azis 349
3. Pemberontakan RMS 355
4. Pemberontakan DI/TII 360

G. Krisis Memuncak 368
1. Pergolakan di Daerah-Daerah 368
2. Pemberontakan PRRI dan Permesta 375
3. Menuju Demokrasi Terpimpin 378
H. Pendidikan, Budaya, Komunikasi Sosial, dan Olahraga 385
1. Pendidikan 385
2. Bahasa dan Sastra 390
3. Seni 407
4. Media Komunikasi Massa 409
Bab IV Demokrasi Terpimpin 419
A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Sistem Demokrasi Terpimpin 419
1. Menegakkan Demokrasi Terpimpin 419
2. Interaksi Tiga Kekuatan 425
B. Sistem Ekonomi Terpimpin 429
1. Ekonomi-Keuangan 429
2. Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri 433
C. Pembebasan Irian Barat 436
1. Bidang Diplomasi 436
2. Bidang Militer 440
3. Operasi-Operasi Militer Pembebasan Irian Barat 442
D. Politik Luar Negeri Poros dan Konfrontasi 446
1. Landasan Politik Luar Negeri Demokrasi Terpimpin 446
2. Indonesia dalam Gerakan Nonblok 450
3. Konfrontasi terhadap Malaysia 460
4. Indonesia Keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa 468
E. Ofensif PKI dan Sekutu-Sekutunya 473
1. Ofensif untuk Menguasai Massa Buruh dan Tani 473

2. Ofensif untuk Menguasai Partai Politik dan Organisasi Massa 475
3. Ofensif di Bidang Pertahanan-Keamanan 477
F. Pemberontakan G-30-S/PKI 481
1. Kudeta G-30-S/PKI 481
2. Operasi Penumpasan G-30-S di Jakarta 486
3. G-30-S/PKI di Jawa Tengah 490
G. Pendidikan, Komunikasi Massa, dan Budaya 496
1. Pendidikan dan Olahraga 496
2. Komunikasi Massa 501
3. Kehidupan Budaya 503
H. Seni 508
1. Sanggar-Sanggar Pelukis 508
2. Soekarno Patron Seni Rupa Indonesia 517
3. Diorama, 'Seni Rupa Multidisiplin' 521
I. Arsitek Era Soekarno 525
1. Gaya 'Padu Padan' dalam Arsitek 525
2. Interior Furnitur Berornamen 'Padma' 528
3. Konsep *Pro Bono Publico* 538
Bab V Orde Baru 543
A. Surat Perintah 11 Maret 1966 543
1. Aksi-Aksi Tritura 543
2. Surat Perintah 11 Maret 1966 548
B. Stabilisasi Politik 552
1. Masa Transisi (1966–1967) 552
2. Peralihan Kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Pengemban TAP IX/MPRS/1966, Jenderal Soeharto 558
3. Masa Konsilidasi Sejak Tahun 1968 562
C. Stabilisasi Ekonomi 565
1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi 565
2. Hasil-Hasil yang Telah Dicapai Sebelum Repelita 569

D. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) 574
1. Pola Dasar Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang 574
2. Repelita I dan Pelaksanaannya 578
3. Repelita II dan Pelaksanaannya 582
4. Repelita III dan Pelaksanaannya 585
E. Integrasi, Dwifungsi ABRI, dan Tugas Internasional Keamanan Dalam Negeri 591
1. Integrasi Mental sebagai Titik Tolak 591
2. Integrasi dalam Doktrin dan Organisasi 592
3. Penyempurnaan Organisasi ABRI 595
4. Tugas-Tugas Internasional 597
5. ABRI Masuk Desa (AMD) 599
6. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) 601
7. Dwifungsi ABRI 605
F. Oposisi terhadap Orde Baru 608
Kelompok Petisi 50 .....
G. Politik Luar Negeri Republik Indonesia 610
1. Pelaksanaan Politik Bebas dan Aktif 610
2. Kerja Sama Regional: ASEAN 614
3. Memelihara Keamanan dan Stabilitas Asia Tenggara 619
4. Pengungsi Vietnam 625
5. Timor Timur Berintegrasi dengan Indonesia 627
H. Konflik, Kekerasan, dan Komisi Hak-Hak Asasi Manusia 637
1. Peristiwa 15 Januari 1974 637
2. Peristiwa Tanjung Priok 642
3. Peristiwa Talangsari Lampung 644
4. Peristiwa Dili 12 November 1991 648
5. Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia 652
6. Peristiwa 27 Juli 1996 653

I. Pemilihan Umum Sampai dengan 1997 655
1. Landasan Pemilihan Umum pada Zaman Orde Baru 655
2. Pemillihan Umum 1971 657
3. Pemilihan Umum 1977 659
4. Pemilihan Umum 1982 660
5. Pemilihan Umum 1987 660
6. Pemilihan Umum 1992 661
7. Pemilihan Umum 1997 663
J. Perkembangan Olahraga 663
K. Runtuhnya Orde Baru 665
1. Krisis Moneter, Awal Keterpurukan Perekonomian 665
2. Krisis Politik dan Surutnya Kredibilitas Pemerintah 666
3. Pelbagai Kerusuhan dan Akhir Pemerintahan Orde Baru 668
L. Kesusastraan 674
1. Awal Kebangkitan Kembali 674
2. Angkatan 66 Sebuah Kontroversi 677
3. Heboh Sastra 681
4. Angkatan 70: Kembali ke Tradisi 685
5. Gerakan Sastra *Horison* 696
6. *Budaja Djaja* dan Dewan Kesenian Jakarta 700
Daftar Istilah Asing 707
Daftar Pustaka 711
Indeks 745
Lampiran 773

Daftar Gambar

Gambar 1.1 (a) Pimpinan Pertahanan Laut Laksamana Muda Karel Doorman; (b) Pertahanan di Laut Jawa, para awak kapal Kortenaer tenggelam kena torpedo Jepang, 27 Februari 1942 6

Gambar 1.2 (a) Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten; (b) Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda Starkenborgh Stachouwer 10

Gambar 1.3 Panglima Tentara Ke-16 Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dan Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Jenderal Ter Poorten saat perundingan di Kalijati tanggal 8 Maret 1942 11

Gambar 1.4 Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dan Letnan Jenderal Ter Poorten beserta staf foto bersama seusai perundingan di Kalijati 13

Gambar 1.5 *Gunseikan* Seizaburo Okasaki 16

Gambar 1.6 *Gunseikan* membuka sidang *Chūō Sangi In* tanggal 16–20 Oktober 1943 24

Gambar 1.7 Para anggota *Chūō Sangi In* 24

Gambar 1.8 Empat Serangkai 32

Gambar 1.9 Tiga di antara Empat Serangkai 32

Gambar 1.10 (a) Kepala Bagian Pengajaran dan Agama Kolonel Horie; (b) Gedung MIAI, Jalan Imamura (sekarang Jalan Teuku Umar) No. 1 Jakarta 39

Gambar 1.11 (a) Ketua Pengurus Besar Masjoemi K.H. Hasjim Asj'ari; (b) K.H. Wahid Hasjim salah seorang wakil Pengurus Besar Masjoemi 41

Gambar 1.12 Latihan *Seinendan* 47

Gambar 1.13 Tentara Pembela Tanah Air (Peta) sedang latihan dengan menggunakan senjata dan baris-berbaris 56

Gambar 1.14 *Cudanchō* Latief Hendraningrat di hadapan Tentara Peta sedang memberi penjelasan tentang serangan Sekutu 57

Gambar 1.15 Ir. Soekarno saat memimpin para *rōmusha* sukarela 63
Gambar 1.16 Ir. Soekarno sedang beristirahat bersama para *rōmusha* .. 63
Gambar 1.17 *Rōmusha* Indonesia yang dikerahkan sebagai tenaga kerja paksa 66
Gambar 1.18 Mardiyem, mantan *jugun ianfu* 70
Gambar 1.19 (a) Alat tes kesehatan *jugun ianfu*; (b) Bekas rumah tempat Mardiyem disiksa 73
Gambar 1.20 Pengerahan tenaga rakyat semata-mata untuk kepentingan bala tentara Jepang 90
Gambar 1.21 Latihan kemiliteran untuk anak-anak 93
Gambar 1.22 Latihan gerak badan Jepang (*sumo*) di kalangan anak-anak 94
Gambar 1.23 Kursus bahasa Jepang di jalanan kota Jakarta 97
Gambar 1.24 Kedatangan pejabat Jepang di sekolah, tempat pemuda Indonesia dididik menjadi ahli teknik 97
Gambar 1.25 Pejabat Jepang meninjau Sekolah Kepandaian Poetri "WAKABA" 98
Gambar 1.26 Anggota Tentara Peta Blitar sedang diadili oleh Mahkamah Militer Jepang 117
Gambar 1.27 Ir. Soekarno memimpin sambutan para anggota *Chūō Sangi In* atas diumumkannya janji PM Koiso "Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari" 125
Gambar 1.28 Harian *Asia Raja* memuat pelbagai kegiatan Ir. Soekarno bersama tokoh-tokoh Indonesia lainnya... "Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari" 125
Gambar 1.29 (a) Ir. Soekarno bersama kaum pemuda dan pemudi serta rakyat menyambut pengumuman janji "Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari" dengan penuh kegembiraan; (b) Pada tanggal 11 September 1944 Ir. Soekarno memimpin rapat raksasa di Lapangan Ikada (sekarang Monas) 126
Gambar 1.30 Sidang *Dōkuritsu Junbi Cōsakai* 127
Gambar 1.31 Ir. Soekarno berpidato dalam sidang *Dōkuritsu Junbi Cōsakai* 127

Gambar 1.32 Rumah di Rengasdengklok, tempat Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diamankan oleh para pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945 142

Gambar 1.33 Laksamana Maeda 143

Gambar 1.34 Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta (sekarang Meseum Perumusan Naskah Proklamasi) 143

Gambar 1.35 Tiga tokoh perumus Naskah Proklamasi (Ir. Soekarno), Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Subardjo 145

Gambar 1.36 Konsep Teks Proklamasi yang ditulis oleh Ir. Soekarno ..147

Gambar 1.37 Teks Proklamasi Otentik yang diketik oleh Sajuti Melik pada tanggal 17 Agustus 1945 147

Gambar 2.1 Ir. Soekarno didampingi Drs. Mohammad Hatta sedang memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi) 153

Gambar 2.2 Upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih di halaman gedung Pegangsaan Timur sesaat setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan 154

Gambar 2.3 Para tokoh yang hadir mengikuti dengan khidmat jalannya upacara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 155

Gambar 2.4 Rakyat Indonesia di Jakarta menyambut kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan 156

Gambar 2.5 (a) Presiden Soekarno memasuki arena Rapat Raksasa di Lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945; (b) Pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Ikada 168

Gambar 2.6 Spanduk "Satu Tanah Air, Satu Bangsa, dan Satu Tekad Tetap Merdeka" 169

Gambar 2.7 Presiden Soekarno menyampaikan beberapa pesan singkat di Lapangan Ikada 170

Gambar 2.8 Semangat Merdeka tertulis pada dinding-dinding bangunan di Jakarta tahun 1945 171

Gambar 2.9 Insiden Bendera di Hotel Yamoto Surabaya, 19 September 1945 173

Gambar 2.10 Pelantikan Jenderal Soedirman sebagai Pucuk Pimpinan TNI di Yogyakarta, pada tanggal 28 Juni 1947 183

Gambar 2.11 Presiden Soekarno didampingi Panglima Besar Jenderal Soedirman melakukan inspeksi pasukan TNI tahun 1947 184

Gambar 2.12 Presiden Soekarno datang di Surabaya atas permintaan Sekutu, guna menenangkan keadaan 190

Gambar 2.13 Brigadier Jenderal Mallaby dan Soegiri sedang berkeliling kota memberitahukan adanya penghentian tembak-menembak 191

Gambar 2.14 Suasana Perundingan antara Indonesia dan Belanda di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946 210

Gambar 2.15 Kapal Perang Angkatan Laut Amerika, *USS Renville*, yang digunakan sebagai tempat perundingan Indonesia-Belanda yang menghasilkan "Perjanjian Renville" 218

Gambar 2.16 Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim sedang menghadiri Sidang Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 1947 222

Gambar 2.17 Pawai Badan-badan kelaskaran di Yogyakarta menyambut pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 1947 231

Gambar 2.18 Seruan Presiden Soekarno kepada kaum buruh yang terlibat Pemberontakan PKI di Madiun 235

Gambar 2.19 Seruan Presiden Soekarno kepada kaum buruh yang terlibat Pemberontakan PKI di Madiun... 236

Gambar 2.20 Kesatuan-kesatuan TNI dan Polisi yang dikerahkan untuk menumpas pemberontakan PKI/FDR Madiun di Gunung Kidul 238

Gambar 2.21 Presiden, Wakil Presiden, dan K.H. Agus Salim tiba di lapangan terbang Maguwo untuk diterbangkan ke Sumatra 259

Gambar 2.22 Letnan Kolonel Soeharto bersama anak buahnya mengadakan perlawanan gerilya di sekitar dan di dalam kota Yogyakarta Desember 1948–Juni 1949 259

Gambar 2.23 Penandatanganan naskah Penyerahan Kedaulatan di Jakarta 27 Desember 1949 270

Gambar 2.24 Upacara pengibaran bendera Merah Putih dan penurunan bendera merah putih biru, seusai penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan di depan Istana Merdeka, Jakarta, 27 Desember 1949 271

Gambar 3.1 Konferensi Asia Afrika Bandung, April 1955 315

Gambar 3.2 Presiden Soekarno memasukkan kartu suara pada Pemilu 1955 318

Gambar 3.3 Wakil Presiden Moh. Hatta di hadapan petugas Tempat Pemungutan Suara, pada Pemilu I, September 1955 319

Gambar 3.4 Pemilihan umum pertama, tahun 1955 320

Gambar 3.5 Demonstrasi massa di depan Istana Merdeka pada tanggal 17 Oktober 1952 341

Gambar 3.6 Pada tanggal 23 Januari 1950 pasukan APRA di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling melancarkan serangan ke kota Bandung 347

Gambar 3.7 Markas APRA (atas) dan Pasukan APRA melakukan perampasan harta rakyat di kota Bandung (bawah) 348

Gambar 3.8 Pemberontakan Andi Azis, Soumokil memproklamasikan "Republik Maluku Selatan" (RMS) 2 April 1950 350

Gambar 3.9 Kolonel Kawilarang sedang menyampaikan perintah-perintah operasi melalui radio telefoni 351

Gambar 3.10 Komandan Brigade Garuda Mataram Letkol Soeharto sedang berbincang-bincang dengan Panglima Ekspedisi Indonesia Timur Kol. A.E. Kawilarang di Makassar 353

Gambar 3.11 Korban-korban pada pihak RMS dan pasukan-pasukan APRIS yang terus maju 356

Gambar 3.12 Patroli pasukan polisi Brigade Mobil melaksanakan pemulihan keamanan di Aceh Timur, pada tahun 1954 364

Gambar 3.13 Teungku Daud Beureueh, dan pengikut-pengikutnya sewaktu memenuhi panggilan pemerintah dalam rangka penyelesaian pemberontakannya 364
Gambar 3.14 Pemungutan suara ketiga dan terakhir 2 Juni 1959 382
Gambar 3.15 Suasana setelah pemungutan suara terakhir pada tanggal 2 Juni 1959 382
Gambar 3.16 Presiden Soekarno sedang membacakan Dekrit 5 Juli 1959 di Istana Merdeka, yang dihadiri pejabat-pejabat sipil dan militer serta tokoh-tokoh masyarakat 383
Gambar 3.17 Masyarakat mendengarkan Dekrit Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 di muka Istana Merdeka 384
Gambar 4.1 Kartun dan media massa yang mengkritisi Liga Demokrasi 424
Gambar 4.2 Presiden Soekarno, Wakil Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, Jenderal A.H. Nasution, dan Panglima Mandala, Mayor Jenderal Soeharto 445
Gambar 4.3 Presiden Soekarno, pada KTT Nonblok di Beograd 454
Gambar 4.4 Presiden Soekarno, pada KTT Nonblok di Cairo 455
Gambar 4.5 Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal 465
Gambar 4.6 Presiden Soekarno dengan pemimpin PBB tahun 1960 ... 469
Gambar 4.7 Jenazah para Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya 488
Gambar 4.8 Kartun Manikebu di sebuah media massa 507
Gambar 4.9 Presiden Soekarno dan Direktur Departemen Seni Rupa ITB Pertama, Syafei Soemarojo 509
Gambar 4.10 Lukisan bertema perjuangan karya S. Sudjono 510
Gambar 4.11 Presiden Soekarno dan Direktur ASRI pertama R.J. Katamsi 511
Gambar 4.12 Lukisan bertema perjuangan karya Affandi 512
Gambar 4.13 Poster Affandi, Boeng, Ajo Boeng 513
Gambar 4.14 Lukisan bertema perjuangan (pengantin Revolusi) Karya Hendro Gunawan 514
Gambar 4.15 Lukisan gadis bergaun merah 515
Gambar 4.16 Bung Karno dan Dullah 516

Gambar 4.17 Lukisan gaya Mooi Indi 519
Gambar 4.18 Diorama masyarakan Indonesia purba 522
Gambar 4.19 Diorama Sumpah Palapa 1331 523
Gambar 4.20 Diorama Proklamasi 17 Agustus 1945 524
Gambar 4.21 Furnitur beronamen Padma, Istana (Meja makan kaki teratai 529
Gambar 4.22 Meja berbentuk Daun Padma, Istana Jakarta (Meja tamu teratai) 530
Gambar 4.23 Furnitur berkaki Padma, Istana Jakarta (Meja konsul teratai) 531
Gambar 4.24 Gelora Bung Karno 534
Gambar 4.25 Gelora Bung Karno dilihat dari Jembatan Semanggi 535
Gambar 4.26 Presiden Soekarno dan Maket Tugu Monas 536
Gambar 4.27 Presiden Soekarno meresmikan Pembangunan Tugu Monas 537
Gambar 4.28 Ukiran Kayu *coffee shop* Hotel Samudra Beach, Pelabuhan Ratu 540
Gambar 4.29 Lukisan Mural yang pernah terpasang di Restoran Hotel Indonesia; kini bernama Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta 541
Gambar 5.1 Seonggok panah beracun ciptaan Sudarsono 646
Gambar 5.2 Senjata-senjata: Panah beracun, katapel, dan botol bom molotov yang berhasil disita dari tanah anak buah Warsidi 646
Gambar 5.3 (a) Senjata bendorit (paduan antara bendo dan arit); (b) Kapten Soetiman 647
Gambar 5.4 Presiden Soeharto sedang menggunakan hak pilihnya tahun 1992 di TPS 002 Cendana tanggal 9 Juli 1992 662
Gambar 5.5 Pidato pengunduran diri Presiden Soeharto di Istana Merdeka tanggal 21 Mei 1998 673
Gambar 5.6 Penyerahan kekuasaan dari Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie di Istana Merdeka tanggal 21 Mei 1998 673

Bab I
Zaman Jepang

A. Susunan dan Perkembangan Pemerintahan Pendudukan Jepang

1. Tentara Jepang Masuk ke Indonesia

Di dalam usahanya untuk membangun suatu imperium di Asia, Jepang telah meletuskan suatu perang di Pasifik. Armada Amerika terkuat di Pasifik yang berpangkalan di Pearl Harbor, Hawaii, merupakan penghalang besar bagi Jepang yang berambisi memiliki bahan industri di negara-negara Selatan. Oleh karena itu, untuk menghancurkan Armada Amerika, disusun rencana serangan rahasia oleh Laksamana Isoroku Yamamoto pada bulan September 1941. Pada bulan berikutnya, tanggal 26 November 1941, Armada Laksamana Noichi Nagumo yang diangkat sebagai panglima operasi, bergerak dari kepulauan Kuril. Dengan kekuatan puluhan kapal perang, antara lain terdiri dari kapal induk, kapal selam, dan tanker, Armada Nagumo berlayar ke arah timur, menyeberangi lautan Pasifik melalui jalur pelayaran yang tidak biasa dilayari kapal-kapal. Setelah berlayar kira-kira satu minggu, mereka tiba di suatu tempat kira-kira tujuh ratus mil di sebelah utara Pulau Oahu, Hawaii. Pada tanggal 2 Desember 1941, ketika masih dalam pelayaran, Laksamana Nagumo menerima telegram sandi dari Yamamoto agar ia melaksanakan serangan. Hari H ditetapkan tanggal 7 Desember.[1] Dengan kecepatan tinggi, Armada Nagumo berlayar ke arah selatan dilengkapi dengan kapal-kapal induk di tengah-tengahnya.

Gerakan Armada Nagumo itu baru diketahui Amerika Serikat pada saat-saat terakhir sebelum serangan. Serangan udara Jepang dimulai pada hari Minggu pagi, hari libur, pada saat pasukan Amerika tidak siap menghadapinya. Pada saat itu, di Pearl Harbor terdapat 96 kapal dari pelbagai jenis yang merupakan inti kekuatan Armada Pasifik Amerika, di bawah pimpinan Laksamana H.E. Kimmel. Selain armada, terdapat dua divisi infantri dan di lapangan terbang Hickam dan Wheeler berderet 390 pesawat terbang dari pelbagai jenis.[2]

---

1 J.C. Bijkerk, *Selamat Berpisah, Sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik* (Dokumenter Runtuhnya Pemerintah Hindia Belanda), 1988, hlm. 134–135

2 Arief Iskandar, *Sejarah Perkembangan Perang dari Zaman Klasik–Modern*, 1971, hlm. 196

Jepang melancarkan serangan udara gelombang pertama pada pukul 07.45, dengan mengerahkan 183 pesawat pengebom yang didatangkan dari kapal induk. Satu jam kemudian berlangsung serangan udara kedua. Sebanyak 170 pesawat pengebom dan pesawat tempur Jepang menyerang Pearl Harbour.[3] Di samping pengeboman pesawat-pesawat, Jepang juga melakukan *straffing* dari udara. Sasarannya adalah kapal-kapal perang dan pesawat-pesawat terbang Amerika serta instalasi militer seperti gudang-gudang perbekalan dan bahan bakar.

Serangan berakhir kira-kira pukul 10.00. Dalam waktu singkat Amerika Serikat mengalami kerugian besar dengan hancurnya 86 pesawat terbang Angkatan Darat dan 97 pesawat terbang Angkatan Laut di lapangan terbang Hickam dan Wheeler. Dari 86 kapal perang yang berlabuh di Pearl Harbour, 19 tenggelam dan rusak. Korban jiwa di pihak Angkatan Laut 2.117 tewas, 876 luka-luka, dan 960 orang hilang, sedangkan di pihak Angkatan Darat 49 orang tewas dan 396 luka-luka. Di pihak sipil sebanyak 49 orang tewas dan 83 orang luka-luka.[4] Berbeda dengan Jepang, yang hanya kehilangan 29 pesawat terbang dari 353 pesawat dan 55 pilot serta 6 kapal selam mini (*midget*).[5]

Lima jam setelah serangan mendadak di Pearl Harbor, sore hari pada tanggal 7 Desember 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt menandatangani pernyataan perang terhadap Jepang, yang diikuti oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh. Pada tanggal 8 Desember 1941 pukul 06.30, Gubernur Jenderal ini melalui radio NIROM[6] mengeluarkan pengumuman yang disimpulkan sebagai pernyataan perang pemerintah Hindia Belanda terhadap Jepang. Pernyataan perang ini melibatkan Indonesia dalam perang melawan Jepang. Sebelumnya Indonesia direncanakan menjadi sasaran serbuan Jepang, sesuai dengan "Rencana Tentatif bagi Suatu Kebijaksanaan Mengenai Daerah-Daerah Selatan" yang dirumuskan oleh Kementerian Angkatan Darat Jepang pada tanggal 4 Oktober 1940. Dalam rencana itu, Indonesia dianggap sebagai sumber bahan strategis terutama minyak dan karet, yang harus dikuasai dengan cara menduduki Indonesia.[7]

Sesuai dengan rencana dalam gerakannya ke selatan, Jepang menyerbu pula ke Indonesia, yang diawali dengan serangan udara, kemudian diikuti oleh pendaratan pasukan. Serangan udara dilancarkan Jepang dari

---

3 J.C. Bijkerk, *op. cit.*, 1988, hlm. 144

4 *Encyclopedia Americana*, vol. 21, hlm. 457

5 J.C. Bijkerk, *op. cit.*, hlm. 144

6 Makmun Salim, *Ichtisar Sedjarah Perang Dunia II*, 1971, hlm. 88

7 Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta pada Zaman Pendudukan Jepang*, 1979, hlm. 29–30

pangkalan Davao (Filipina) dan kapal-kapal induk di Laut Cina Selatan. Tujuh ratus dari 1.500 pesawat pelbagai jenis termasuk pesawat tempur yang terkenal "Zeke", dikerahkan Jepang untuk melakukan serangan udara ke Malaya dan Hindia Belanda (Indonesia). Kekuatan udara ini yang merupakan bagian dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut, memiliki 4.000 orang penerbang yang berpengalaman terbang di atas 500 jam.

Lain halnya dengan kekuatan udara Belanda. Menjelang penyerbuan Jepang, Belanda hanya memiliki 132 pesawat yang terdiri dari 66 pesawat Glen Martin, 48 pesawat pemburu, dan 10 pesawat pengintai taktis, sedangkan pesawat cadangan penerbang terdiri dari 14 Glen Martin dan 60 pemburu.[8]

Sehari setelah Jepang menyatakan perang terhadap Belanda, dari Davao dilancarkan serangan pertama pada tanggal 10 Januari 1942. Dalam usahanya untuk menguasai instalasi minyak, pada tanggal 11 Januari 1942 Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur, dan keesokan harinya komandan Belanda di pulau itu menyerah pada tanggal 12 Januari 1942.[9] Setelah Tarakan dikuasai Jepang, 200 orang anggota pasukan meriam Belanda dibunuh dengan alasan melanggar persetujuan tembak-menembak.[10] Serangan selanjutnya adalah Balikpapan, yang merupakan sumber minyak kedua. Tidak lama kemudian, pada tanggal 24 Januari 1942,[11] kota ini jatuh ke tangan Jepang. Sebelumnya Jepang mengultimatum komandan pasukan Belanda yang mempertahankan Balikpapan agar tidak melakukan bumi hangus terhadap instalasi minyak, tetapi pembumihangusan tetap berlangsung sehingga Jepang membunuh 80 orang Belanda dan memaksa orang-orang Indonesia untuk menyaksikannya.[12] Setelah pada tanggal 29 Januari 1942 Pontianak berhasil diduduki Jepang, menyusullah pada tanggal 3 Februari 1942 Samarinda. Sesampainya di kota tersebut pada tanggal 5 Februari 1942, tentara Jepang melanjutkan penyerbuannya ke Lapangan Terbang Samarinda II yang waktu itu masih dikuasai oleh Tentara Hindia Belanda (KNIL). Dengan berhasil direbutnya lapangan terbang itu, dengan mudah pula Banjarmasin diduduki oleh tentara Jepang pada tanggal 10 Februari 1942.[13]

---

8 Makmun Salim, *op. cit.*, 1971, hlm. 125

9 Krijgsgeschiedenis Afdeling, Hoofdkwartier van de Chef van de Generale Staf, Ministerie van Oorlog, *Nederlands Indië Contra Japan*, III, 1954, hlm. 104–105; J.C. Bijkerk, *op. cit.*, hlm. 193

10 J.C. Bijkerk, *ibid.*

11 Krijgsgesehiedenis, *op. cit.*, hlm. 173

12 J.C. Bijkerk *op. cit.*, 1988, hlm. 109

13 *Ibid.*, hlm. 110–111

Serangan udara Jepang berikutnya adalah kota-kota lain di Indonesia bagian timur. Dalam waktu singkat kesatuan udara Jepang berhasil menduduki Ambon yang kurang mendapat perlawanan dari pihak Belanda. Keberhasilan Jepang lainnya adalah menguasai Morotai yang mempunyai arti penting dalam pertempuran udara. Setelah kesatuan udara Jepang berhasil menduduki Manado, Jepang melakukan pengeboman terhadap lapangan terbang Kendari. Dengan dikuasainya Kendari, hubungan udara antara Indonesia dan Australia terputus, dan pertahahan Belanda di Makassar menjadi terancam. Dengan didahului oleh serangan udara, Jepang dengan mudah mendarat di kota ini.[14]

Dari pangkalannya di Laut Cina, pasukan Jepang melancarkan serangan ke Sumatra. Sehari setelah menduduki Singapura, pada tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Dalam serangan ke Palembang, Jepang mengerahkan pasukan payung yang diangkut oleh kira-kira 100 pesawat terbang, antara lain pesawat terbang Inggris "Lockhead Hudson" yang berhasil dirampas di Malaka dan yang masih bertanda gambar Inggris.[15]

Dengan jatuhnya Palembang sebagai sumber minyak, terbukalah Pulau Jawa bagi tentara Jepang. Dalam menghadapi ofensif Jepang, pernah dibentuk suatu komando gabungan oleh pihak Sekutu yakni *American British Dutch Australian Command* (ABDACOM) pada tanggal 15 Januari 1942, di bawah pimpinan Marsekal Sir Archibald Wavell (Inggris), dengan markas besarnya di Lembang, dekat Bandung. Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten diangkat sebagai panglima Angkatan Darat, sedangkan Laksamana Thomas C. Hart sebagai panglima Angkatan Laut ABDACOM.[16] Kurangnya koordinasi yang baik antarkomando yang mendahulukan kepentingan negaranya masing-masing menyebabkan Jenderal Wavell dan Gubernur Jenderal Tjarda dalam perundingan pada tanggal 22 Februari 1942 sepakat untuk membubarkan ABDACOM dan menempatkan Sekutu di bawah perintah Hindia Belanda.[17] Pada akhir Februari 1942 Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Starkenborgh telah mengungsi ke Bandung disertai oleh pejabat-pejabat tinggi pemerintah. Pada masa itu Hotel Homan dan Preanger penuh dengan pejabat-pejabat tinggi Hindia Belanda.

Untuk mempertahankan kekuasaan Hindia Belanda di Pulau Jawa terhadap serangan laut Jepang, ABDACOM (Sekutu) membentuk formasi

---

[14] Makmun Salim, *op. cit.*, 1971, hlm. 127

[15] J.C. Bijkerk, *op. cit.*, 1988, hlm. 197

[16] *Ibid.*, hlm. 159

[17] *Ibid.*, hlm. 178–179

pertahanan laut yang dipusatkan kepada kesatuan pemukul (*striking force*), di bawah pimpinan Laksamana Muda Karel Doorman yang berada di kapal penjelajah *De Ruyter*. Kesatuan pemukul yang berada di Surabaya terdiri dari dua kapal penjelajah berat, tiga kapal penjelajah ringan, sembilan kapal perusak, sedangkan kesatuan pemukul di Tanjung Priok terdiri dari satu kapal penjelajah berat, dua kapal penjelajah ringan, dan tiga kapal perusak.[18]

Armada milik Belanda, Amerika, Inggris, dan Australia itulah yang terlibat dalam pertempuran laut dengan armada Jepang pada tanggal 27 Februari 1942 di sebelah selatan Pulau Bawean, di Laut Jawa. Sekitar pukul 17.00 Laksamana Karel Doorman melihat iringan armada Jepang pimpinan Laksamana Tagaki bergerak di timur laut Pulau Bawean. Kemudian Karel Doorman menggerakkan armadanya dari Surabaya dengan pasukannya yang masih dalam keadaan letih.[19] Dalam pertempuran Laut Jawa, sekitar pukul 16.00 kapal-kapal Jepang yang dilengkapi dengan torpedo memulai serangan terhadap kapal-kapal Sekutu. Dengan bantuan pesawat pengintai, kapal-kapal Jepang dapat melancarkan tembakan-tembakannya secara terarah. Sementara itu, Karel Doorman sulit mengetahui posisi kapal-kapal Jepang yang terlindung oleh tabir asap. Hanya kurang lebih dua jam, serangan tembakan torpedo Jepang mengakibatkan Karel Doorman kehilangan dua kapal perusak, *Kortenaer* dan *Electra*, sedangkan *Exeter* mengalami kerusakan berat dan terpaksa kembali ke Surabaya dengan kawalan *Witte de With*.[20]

Dalam keadaan terjepit Karel Doorman berusaha menyelamatkan diri dengan membawa armadanya ke arah selatan, yang dibayang-bayangi terus oleh armada Jepang. Pada pukul 21.00 Armada Karel Doorman sudah berada tidak jauh dari Tuban yang penuh dengan ranjau Sekutu. Kapal perusak *Jupiter* yang melanggar ranjau mengakibatkan kapal ini akhirnya tenggelam. Pada saat Karel Doorman mengubah haluannya kembali ke utara, dalam jarak 7 km, pada tengah malam, armada pimpinan Laksamana Tagaki melancarkan serangan torpedo yang menyebabkan tenggelamnya kapal penjelajah *De Ruyter* dan Laksamana Karel Doorman turut tenggelam di dalamnya. Sebelumnya ia masih sempat memerintahkan kapal penjelajah *Houston* dan *Perth* untuk menyelamatkan diri ke Tanjung Priok.[21]

---

18 Makmun Salim, *op. cit.*, 1971, hlm. 130–131

19 Antara tanggal 4 dan 25 Februari 1942 mereka terlibat dalam pertempuran laut antara lain dekat Kangean, Selat Madura, dan di Selat Bali pada tanggal 19 Februari 1942; J.C. Bijkerk, *op. cit.*, hlm. 182

20 Makmun Salim, *op. cit.*, hlm. 135–136; Djajusman, *Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda*, 1978, hlm. 79

21 Makmun Salim, *ibid.*, hlm. 136; Djajusman, *ibid.*, hlm. 80–81

(a) (b)

Gambar 1.1 (a) Pimpinan Pertahanan Laut Laksamana Muda Karel Doorman;
(b) Pertempuran di Laut Jawa, para awak kapal *Kortenaer* tenggelam kena torpedo Jepang, 27 Februari 1942
(Sumber: J.C. Bijkerk, *Selamat Berpisah Sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik*)

Dalam pertempuran laut itu, Jepang hanya kehilangan beberapa kapal transpor. Kerugian Sekutu meliputi lima kapal penjelajah, tujuh kapal perusak, dan satu kapal tanker.[22]

Kemenangan Jepang memudahkan pasukannya untuk mendarat di Pulau Jawa. Jepang mendaratkan Divisi ke-2 di Jawa Barat, dan Divisi ke-48 di Jawa Tengah, dekat perbatasan Jawa Timur.[23] Kekuatan Jepang ini yang khusus dipergunakan untuk merebut Pulau Jawa berada di bawah Komando Tentara Ke-16 (*Osamu Butai*) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura.

Pasukan-pasukannya yang ditempatkan di Jawa Barat terdiri dari tiga resimen infantri dan satu resimen kavaleri, zeni, dan angkatan. Kekuatannya bertambah dengan adanya satu detasemen dari Divisi ke-38 yang terdiri dari dua batalion infantri di bawah Kolonel Shoji. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur pasukan-pasukannya terdiri dari tiga resimen infantri beserta satu brigade infantri dengan bantuan satu batalion pasukan perintis dan beberapa satuan artileri dan zeni. Selain itu, terdapat pula Brigade Sakaguchi yang sebelum mendarat di Jawa, pasukannya telah merebut Tarakan, Balikpapan, dan Banjarmasin di Kalimantan.[24]

Kekuatan invasi Jepang di Jawa itu menunjukkan jumlah yang lebih besar daripada kekuatan pihak Sekutu. Selain itu, pihak Jepang memiliki bantuan udara taktis. Sebaliknya, pihak Belanda tidak memilikinya karena kekuatan udaranya sudah dihancurkan pada pertempuran-pertempuran pertama di bagian-bagian lain Indonesia maupun Malaya.[25]

Pada tanggal 28 Februari malam menjelang tanggal 1 Maret 1942, Tentara Ke-16 Jepang berhasil mendarat di tiga tempat sekaligus, yakni di Teluk Banten, Eretan (Jawa Barat), dan di Kragan (Jawa Tengah). Dari Kragan, pasukan Divisi ke-48 bergerak ke tiga jurusan. Satu kolone pasukan yang bergerak melalui rute utara tiba di Surabaya pada tanggal 8 Maret 1942. Kolone lainnya bergerak ke arah barat dan berhasil menduduki Semarang. Gerakan ke arah selatan dilakukan oleh Kolone Sakaguchi menuju Cilacap. Dalam gerakannya itu pasukan Belanda tidak memberikan perlawanan bahkan mengambil posisi mundur sebelum datang pasukan Jepang.

---

22 *Makmun Salim, op.cit.*, 1971, hlm. 137

23 Nugroho Notosusanto, *The Peta Army During The Japanese Ocupation of Indonesia*, 1979, hlm. 35–36; lihat juga Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta ...*, 1979, hlm. 25

24 *Ibid.*, hlm. 35–36

25 Nugroho Notosusanto, *The Peta ...*, hlm. 36; lihat juga Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta ...*, hlm. 25–27

Pasukan yang mendarat di Teluk Banten dipimpin langsung oleh panglima Tentara Ke-16, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Sebelumnya terjadi peristiwa yang agak mengganggu jalannya pendaratan. Dua kapal Sekutu, *Houston* dan *Perth*, yang berusaha melarikan diri dari Tanjung Priok menuju Australia, secara tidak disangka bertemu dengan kapal-kapal torpedo Jepang. Dalam peristiwa baku tembak, dua kapal Sekutu itu menembaki dan menenggelamkan kapal-kapal transpor Jepang. Salah satu di antara penumpangnya terdapat Letnan Jenderal Imamura. Ia menerjunkan diri ke dalam laut dan berhasil mendarat di pantai pesisir Teluk Banten.

Setelah pendaratan itu, ibu kota Batavia (Jakarta) pada tanggal 5 Maret 1942 diumumkan sebagai "kota terbuka", yang berarti bahwa kota itu tidak akan dipertahankan oleh pihak Belanda. Segera setelah jatuhnya kota Batavia ke tangan mereka, tentara ekspedisi Jepang langsung bergerak ke selatan dan berhasil menduduki Buitenzorg (Bogor).

Dalam rangka usahanya menyerbu kota Bandung, pada tanggal 1 Maret, Jepang telah mendaratkan satu detasemen yang dipimpin oleh Kolonel Toshinori Shoji dengan kekuatan 5.000 orang di Eretan, sebelah barat Cirebon. Pada hari yang sama Kolonel Shoji telah berhasil menduduki Subang. Momentum itu mereka manfaatkan dengan terus menerobos lapangan terbang Kalijati, hanya 40 km dari Bandung. Setelah pertempuran singkat tetapi hebat, akhirnya pasukan Jepang merebut lapangan terbang tersebut.[26]

Keesokan harinya tentara Hindia Belanda berusaha merebut Subang kembali, tetapi mereka tidak berhasil. Serangan balasan kedua atas Subang dicoba pada tanggal 3 Maret 1942 dan sekali lagi tentara Hindia Belanda dipukul mundur.[27] Pada tanggal 4 Maret 1942 untuk terakhir kalinya tentara Hindia Belanda mengadakan serangan lagi dalam usahanya merebut Kalijati dan sekali lagi mengalami kegagalan dengan menderita ratusan korban.[28]

Kemudian, pada tanggal 5 Maret 1942, tentara Jepang bergerak dari Kalijati untuk menyerbu Bandung dari arah utara. Mula-mula digempurnya pertahanan di Ciater. Dalam pertempuran di Ciater tanggal 6 Maret 1942, 76 orang KNIL menyerah. Hanya dua orang yang selamat, sedangkan anggota lainnya ditembak mati dalam keadaan diikat.[29] Setelah

---

[26] Djatuhnya Soebang: "Tentara Belanda Menyerang Dua Kali Tapi Tidak Berhasil", *Asia Raja*, 28 Mei 1942

[27] "Djatoehnya Soebang ...", *ibid.*

[28] *Ibid.*

[29] J.C. Bijkerk, *op. cit.*, 1988, hlm. 219

pertahanannya ditembus Jepang, tentara Hindia Belanda mundur ke Lembang dan menjadikan kota tersebut sebagai pertahanan yang terakhir. Akan tetapi, tempat ini pun tidak berhasil dipertahankan sehingga pada tanggal 7 Maret 1942 petang hari Lembang dikuasai oleh tentara Jepang.[30]

Operasi kilat Detasemen Shoji itu telah mengakibatkan kritisnya posisi tentara KNIL dalam pertempuran di Jawa Barat, sehingga kapitulasi pasukan-pasukan yang dikonsentrasikan di sekitar Bandung dalam beberapa hari dapat menjadi kemungkinan yang serius. Pada tanggal 6 Maret 1942 keluarlah perintah dari Panglima KNIL, Letnan Jenderal Ter Poorten, kepada panglima di Jawa Barat, Mayor Jenderal J.J. Pesman, tentang tidak dibolehkannya mengadakan pertempuran di Bandung.[31] Baik Jenderal Ter Poorten maupun Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer berpendapat bahwa Bandung pada saat itu telah penuh sesak dengan penduduk sipil, perempuan, dan anak-anak sehingga perlu dicegah pertempuran-pertempuran di kota itu.

Tidak lama sesudah berhasil didudukinya posisi tentara KNIL di Lembang, pada tanggal 7 Maret 1942 pada petang harinya pasukan-pasukan Belanda di sekitar Bandung meminta penyerahan lokal. Kolonel Shoji menyampaikan usul penyerahan lokal dari pihak Belanda ini kepada Jenderal Imamura, tetapi tuntutan Imamura adalah penyerahan total semua pasukan Sekutu di Jawa.

Jika pihak Belanda tidak mengindahkan ultimatum Jepang itu, kota Bandung akan dibom dari udara. Jenderal Imamura pun mengajukan tuntutan lainnya, yakni Gubernur Jenderal Belanda harus turut dalam perundingan di Kalijati yang diadakan selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Jika tuntutan ini dilanggar, pengeboman atas kota Bandung dari udara akan segera dilaksanakan. Akhirnya pihak Belanda memenuhi tuntutan Jepang dan keesokan harinya, baik Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh maupun Panglima Tentara Hindia Belanda serta beberapa pejabat tinggi militer dan seorang penerjemah pergi ke Kalijati. Dalam perundingan di Kalijati, yang dimulai pukul 17.00 tanggal 8 Maret 1942, Ter Poorten bersedia menerima tuntutan Imamura. Sementara itu, Tjarda menolak dengan alasan Bandung sudah dinyatakan sebagai kota terbuka yang setiap saat Jepang dapat memasuki kota itu, tanpa melakukan pengemboman yang akan menelan korban di kalangan penduduk sipil. Tjarda tetap pada pendiriannya saat berlangsung perundingan berikutnya

---

[30] Mengenai gerakan Detasemen Shoji lihat dalam Krijgsgeschiedenis Afdeling, *Nederlands Indie Contra Japan*, III, 1954, hlm. 85–92

[31] *Ibid.*, hlm. 156

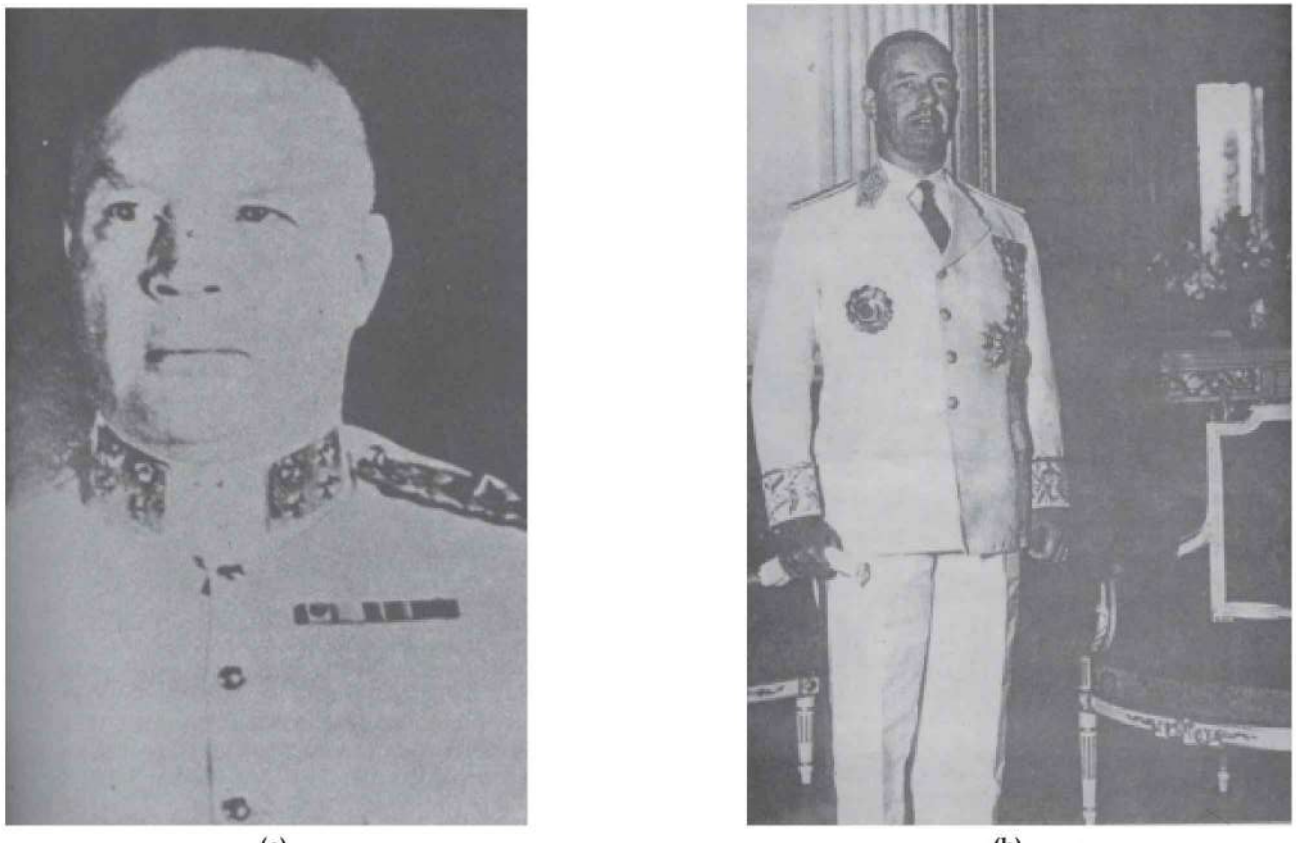

(a) (b)

Gambar 1.2 (a) Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten; **(b)** Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda Starkenborgh Stachouwer
(Sumber: J.C. Bijkerk, *Selamat Berpisah Sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik*)

(a)

(b)

Gambar 1.3 (a) Panglima Tentara Ke-16 Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura duduk berhadapan dengan Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten saat perundingan tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati; **(b)** Dalam perundingan itu akhirnya Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat. Tampak Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten didampingi seorang juru bahasa. (Sumber: Reproduksi Departemen Penerangan dan J.C. Bijkerk, *Selamat Berpisah Sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik*)

setelah ditunda selama 10 menit. Akhirnya, dalam pertemuan antara kedua belah pihak tanpa kehadiran Tjarda, terpenuhilah tuntutan Imamura, yakni kapitulasi tanpa syarat Angkatan Perang Hindia Belanda kepada Jepang.[32]

Radio NIROM menyiarkan berita penyerahan atas nama Panglima Tentara Hindia Belanda. Siaran yang dibacakan oleh seorang perwira stafnya pada pukul 06.30 pagi tanggal 9 Maret 1942 memerintahkan pasukannya untuk tunduk pada tuntutan yang diajukan pihak Jepang dan menghentikan perang serta menghubungi komandan tertinggi Jepang di dalam atau di dekat wilayahnya masing-masing.[33]

Pada pukul 13.20, Letnan Jenderal Ter Poorten dan Letnan Jenderal Imamura menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat yang disusun dalam bahasa Jepang dan bahasa Belanda. Kedua panglima itu juga menandatangani dokumen penyerahan daftar kekuatan yang menyangkut jumlah pasukan, kendaraan, dan senjata. Pada saat itu, Imamura tersentuh perasaannya menyaksikan Ter Poorten berlinang air mata ketika menandatangani dokumen penyerahan. Dalam suasana demikian, Imamura sempat bertanya apakah Ter Poorten masih menginginkan sesuatu dari tentara Jepang. Keinginannya untuk merawat korban yang luka dan menguburkan korban yang gugur dalam medan pertempuran disambut baik oleh Imamura. Hal ini dilaksanakan melalui kerja sama antara tentara di bawah komando Letnan Jenderal Maruyama dengan tentara Belanda.

Namun, setelah kapitulasi Kalijati, pasukan Belanda di Sumatra di bawah pimpinan Mayor Jenderal Overaker masih membangun pertahanan di Kutacane, Aceh Selatan. Akan tetapi, karena tekanan terus-menerus dari pasukan Jepang, akhirnya pasukan gerilya Belanda mengundurkan diri ke arah Sumatra Barat.

Sementara itu, dengan mendaratnya pasukan Jepang yang lain di Tanjung Siram, pasukan Belanda yang berada di Medan ditarik mundur ke Kebonjahe disertai pembumihangusan instalasi-instalasi industri. Pada tanggal 13 Mei 1942 kota Medan pun jatuh.[34] Dalam gerakannya ke pedalaman, kota-kota penting lainnya di Sumatra, seperti Padang dan Bukittinggi, dikuasai pula oleh pasukan Jepang. Pertahanan Belanda di Kutacane yang tidak dapat diandalkan lagi, jatuh pada akhir bulan Maret 1942.

---

[32] Proses perundingan itu dapat dilihat dalam buku J.C. Bijkerk, *op.cit.*, 1988, hlm. 311–333

[33] *Ibid.*, hlm. 331

[34] Makmun Salim, *op. cit.*, hlm. 139

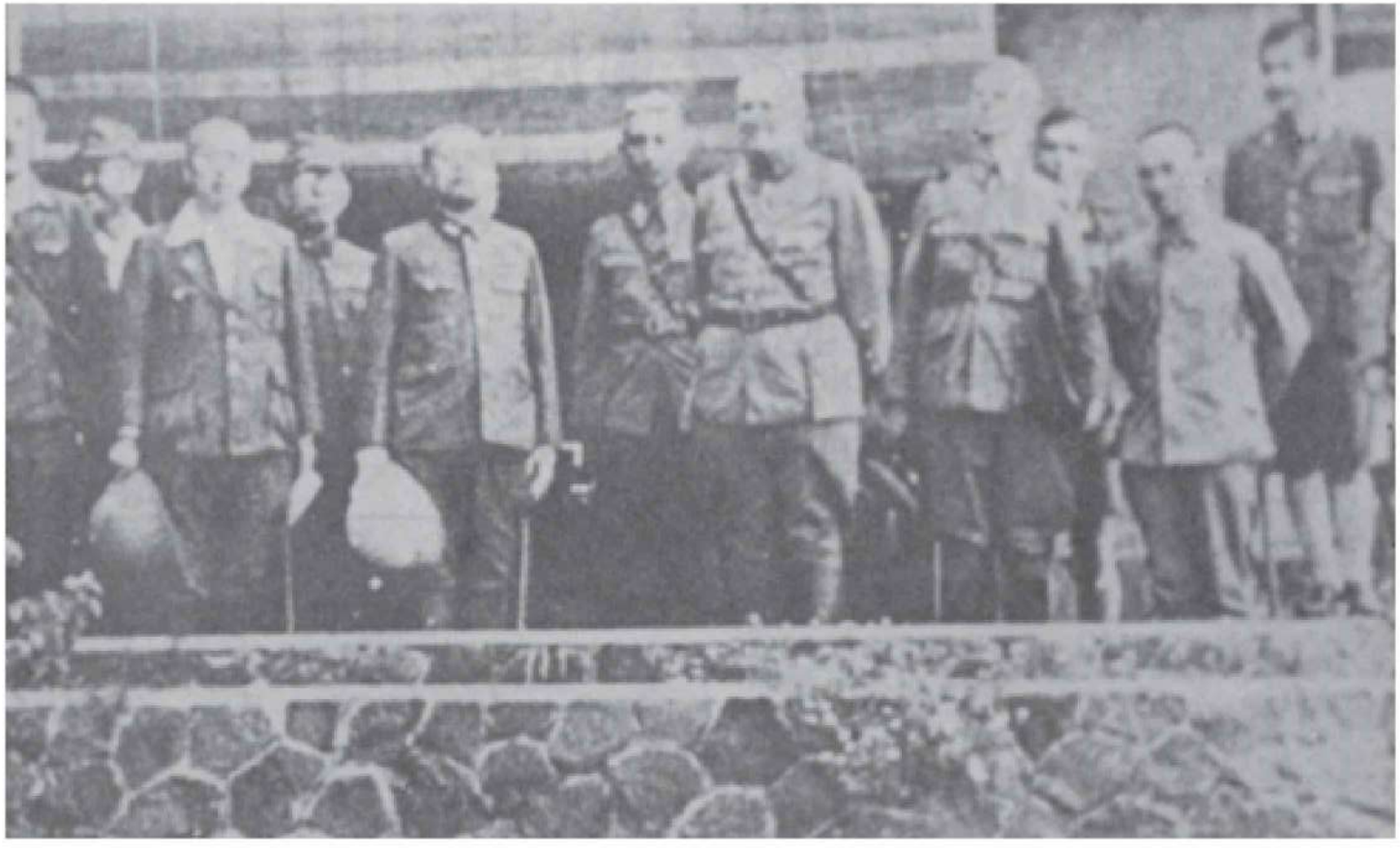

Gambar 1.4 Foto bersama seusai perundingan. Di sebelah kiri, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura beserta staf, sedangkan di sebelah kanan Letnan Jenderal Ter Poorten beserta staf (Sumber: J.C. Bijkerk, *Selamat Berpisah Sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik*)

2. Pemerintah Sementara

Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia, kepada tentara ekspedisi Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942, berakhirlah pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi ditegakkan kekuatan Kemaharajaan Jepang. Sejarah Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu periode Pendudukan Militer Jepang. Berbeda dengan zaman Hindia Belanda yang hanya terdapat satu pemerintah sipil, pada zaman Jepang terdapat tiga pemerintah militer pendudukan, yaitu:

1. Pemerintah Militer Angkatan Darat (Tentara Ke-25) untuk Sumatra dengan pusatnya di Bukittinggi;
2. Pemerintah Militer Angkatan Darat (Tentara Ke-16) untuk Jawa-Madura dengan pusatnya di Jakarta;
3. Pemerintah Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Borneo, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar.

Dengan berhasil didudukinya Indonesia oleh tentara Jepang, mula-mula diadakan pemerintah pendudukan militer di Pulau Jawa yang sifatnya sementara. Hal ini sesuai dengan *Osamu Seirei* yakni undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16 pada tanggal 7 Maret 1942. Dalam Undang-Undang No. 1 dicantumkan pokok peraturan-peraturan tata negara pada waktu pendudukan Jepang. Undang-undang ini berisi antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 1: Bala tentara Nippon melangsungkan pemerintah militer sementara waktu di daerah-daerah yang telah ditempati supaya mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera.
2. Pasal 2: Pembesar bala tentara memegang kekuasaan pemerintah militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu berada di tangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
3. Pasal 3: Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer.
4. Pasal 4: Bahwa bala tentara Jepang akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia pada Jepang.[35]

---

[35] *Kan Pō*, no. Istimewa, th. 2602 (1942), hlm. 6–7

Dari undang-undang itu dapat diketahui bahwa jabatan gubernur jenderal pada masa pemerintah Hindia Belanda dihapuskan, dan segala kekuasaan yang dahulu di tangan gubernur jenderal sekarang dipegang oleh panglima tentara Jepang di Jawa. Dengan dikeluarkannya undang-undang itu dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Militer Jepang ingin terus menggunakan organisasi aparat pemerintah sipil yang lama beserta para pegawainya. Tindakan Jepang itu dimaksudkan agar pemerintahan dapat berjalan terus dan kekacauan dapat dicegah. Bedanya hanyalah bahwa pimpinan dipegang oleh tentara Jepang, baik di pusat maupun di daerah.[36] Susunan Pemerintah Militer Jepang terdiri atas: *Gunshireikan* (panglima tentara), kemudian disebut *Saikō Shikikan* (panglima tertinggi), yang merupakan pucuk pimpinannya; di bawah *Saikō Shikikan* terdapat *Gunseikan* (kepala pemerintah militer) yang dirangkap oleh kepala staf tentara *Gunshireikan* menetapkan peraturan yang dikeluarkan oleh *Gunseikan*, namanya *Osamu Kanrei*. Peraturan-peraturan itu diumumkan dalam *Kan Pō* (berita pemerintah), sebuah penerbitan resmi yang dikeluarkan oleh *Gunseikanbu*.

Panglima Tentara Ke-16 di Pulau Jawa yang pertama adalah Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Kepala stafnya adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Dia diserahi tugas untuk membentuk pemerintah militer di Jawa dan kemudian diangkat menjadi *Gunseikan*. Staf pemerintah militer pusat dinamakan *Gunseikanbu*, yang terdiri dari empat *bu* (semacam departemen) yaitu *Sōmubū* (Departemen Urusan Umum), *Zaimubu* (Departemen Keuangan), *Sangyōbu* (Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan), dan *Kōtsubu* (Departemen Lalu Lintas), yang kemudian ditambah dengan *bu* yang kelima, yaitu *Shihōbu* (Departemen Kehakiman).[37] Koordinator pemerintah militer setempat disebut *gunseibu*, yang dibentuk di Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung, di Jawa Tengah dengan pusatnya di Semarang, dan di Jawa Timur dengan pusatnya di Surabaya. Di samping itu, dibentuk dua daerah istimewa (*kōci*), Surakarta dan Yogyakarta.

Pada setiap *gunseibu* ditempatkan beberapa komandan militer setempat. Mereka ditugasi untuk memulihkan ketertiban dan keamanan serta menanamkan kekuasaan yang sementara ini lowong. Selain itu, mereka diberi wewenang untuk memecat para pegawai bangsa Belanda serta membentuk pemerintah setempat. Akan tetapi, usaha untuk membentuk pemerintah setempat ternyata tidak berjalan lancar. Jepang mengalami

---

[36] A.G. Pringgodigdo, *Tatanegara di Djawa pada Waktu Pendudukan Djepang: Dari bulan Maret Sampai Bulan Desember 1942*, 1952, hlm. 10–13

[37] *Pandji Poestaka*, no. 26, 3 Oktober 1942, hlm. 933

Gambar 1.5 *Gunseikan* Seizaburo Okasaki (Sumber: Achmad Mansur Suryanegara, *Pemberontakan Tentara PETA di Cileunca, Pangalengan, Bandung Selatan*)

kekurangan tenaga pemerintahan yang sebenarnya telah dikirimkan tetapi kapalnya tenggelam kena torpedo Sekutu, sehingga dengan terpaksa diangkat pegawai-pegawai bangsa Indonesia.[38] Hal itu (tanpa dikehendaki oleh pihak Jepang pada waktu itu) menguntungkan pihak Indonesia, dengan demikian mereka memperoleh pengalaman di lingkungan pemerintahan.

Di Jawa Barat, pembesar militer Jepang Kolonel Matsui yang merangkap sebagai gubernur menyelenggarakan pertemuan dengan para anggota Dewan Pemerintah Daerah untuk menciptakan suasana dan kerja sama yang baik. R. Pandu Suradiningrat diangkat menjadi wakil gubernur. Sebagai pembantu wakil gubernur diangkat Atik Suardi.

Pada tanggal 29 April 1942 diangkat beberapa residen, yakni:

1. R. Adipati Aria Hilman Djajadiningrat di Banten (Serang);
2. R.A.A. Surjadjajanegara di Bogor;
3. R.A.A. Wiranatakusumah di Priangan (Bandung);
4. Pangeran Ario Suriadi di Cirebon;
5. R.A.A. Surjo di Pekalongan;
6. R.A.A. Sudjiman Martadiredja Gandasubrata di Banyumas.[39]

Di kota "Batavia" (belum dinamakan Jakarta), H. Dahlan Abdullah diangkat menjadi kepala pemerintah daerah kotapraja. Jabatan kepala polisi diserahkan kepada Mas Sutandoko.

Di Jawa Tengah, sama halnya dengan di Jawa Barat, jabatan gubernur berada di tangan militer Jepang, yakni Letnan Kolonel Taga yang berkedudukan di Semarang. Sementara itu, tugas melaksanakan pemerintahan sehari-hari untuk Yogyakarta, yang saat itu dinyatakan sebagai pusat organisasi pemerintah militer di Jawa Tengah, masih tetap dipercayakan kepada pejabat Belanda, Dr. L. Adam.[40] Pegawai tinggi bangsa Indonesia yang mendampingi Letnan Kolonel Taga di antaranya Rd. Muhammad Chalil sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Salamun sebagai residen yang diangkat.[41] Mereka bekerja di bawah pengawasan ketat pembesar-pembesar militer Jepang.

Dengan diangkatnya pegawai-pegawai Indonesia, pada tanggal 1 April 1942 Pemerintah Pendudukan Jepang mengeluarkan undang-undang tentang peraturan gaji pegawai negeri dan lokal. Untuk sementara waktu

---

38 M.A. Azis, *Japan's Colonialism and Indonesia*, 1955, hlm. 158

39 *Asia Raja*, 4 Mei 1942

40 *Pandji Poestaka*, no. 2, 18 April 1942, hlm. 64

41 *Asia Raja*, 11 Mei 1942

gaji pegawai-pegawai bangsa Indonesia yang dahulu di bawah f100,- sebulan akan tetap dibayarkan seperti sediakala. Akan tetapi, bagi mereka yang dahulu gajinya melebihi f100,- akan dibayar menurut aturan sebagai berikut:

No.	Banyaknya gaji dahulu sebulan	Potongan %	Banyaknya gaji sekarang sebulan
1.	f100–150	5%	f100
2.	f151–201	7,5%	f141
3.	f201–250	10%	f184
4.	f251–300	12%	f224
5.	f301–400	15%	f239
6.	f401–500	18%	f263
7.	f lebih dari 500	20%	f409[42]

Berdasarkan peraturan gaji yang tercantum jelaslah bahwa pegawai-pegawai Indonesia yang gajinya melebihi dari f100,- terkena potongan yang cukup besar. Selain itu, ditetapkan pula larangan memberi gaji kepada pegawai Indonesia melebihi dari f500.[43]

Peraturan lainnya yang sifatnya men-"Jepang"-kan Indonesia adalah seperti yang dimuat di dalam Undang-Undang No. 4 yakni bahwa hanya bendera Jepang, *Hinomaru*, yang boleh dipasang pada hari-hari besar. Lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah lagu *Kimigayo*.

Selanjutnya mulai tanggal 1 April 1942, waktu Jepanglah yang harus dipakai. Perbedaan antara waktu Jepang (waktu Tokyo) dan waktu di Jawa pada zaman pendudukan adalah 90 menit. Sejak saat itu waktu lama, yakni waktu pada zaman Hindia Belanda, tidak dipakai lagi. Mulai tanggal 29 April 1942 tarikh yang harus dipakai adalah tarikh *Sumera* dan tahun Masehi 1942 adalah sama dengan tahun 2602 *Sumera*. Demikian pula sejak tahun 1942 setiap tahun rakyat Indonesia diwajibkan merayakan hari raya *Tencōsetsu* (29 April), yakni hari lahirnya Kaisar Hirohito, atau *Tenno Heika* (Sri Baginda).

Dalam soal keuangan, menurut Undang-Undang No. 2 tertanggal 8 Maret 1942 ditetapkan bahwa untuk kepentingan jual beli dan pembayaran lainnya, mata uang yang berlaku adalah uang rupiah Hindia Belanda. Pemakaian mata uang lain dilarang keras.[44]

---

[43] *Pandji Poestaka*, no. 3, 25 April 1943, hlm. 105

[44] Pada waktu itu harga 1 kg beras f0,12,-; lihat *Kan Pō*, 25 September 1942, hlm. 18 dan *Kan Pō*, 10 Januari 1943, hlm. 16

3. Struktur Pemerintah Pendudukan Jepang

Pada bulan Agustus 1942 usaha Pemerintah Militer Jepang meningkat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 (tentang aturan pemerintah daerah) dan Undang-Undang No. 28 (tentang aturan pemerintah *syū* dan *Tōkubetsu Syi*, yang menunjukkan berakhirnya masa Pemerintah Sementara.[45] Kedua undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan struktur pemerintah setelah datangnya tenaga pemerintah sipil Jepang di Pulau Jawa. Mereka mulai dipekerjakan pada badan-badan pemerintah guna melaksanakan tujuan reorganisasi Jepang yang hendak menjadikan Pulau Jawa sebagai sumber perbekalan perangnya di wilayah selatan. Oleh karena itu, aparat pemerintah harus berada di bawah kekuasaan bangsa Jepang, terbukti dengan jumlah pegawainya yang ada di Pulau Jawa.[46]

Menurut Undang-Undang No. 27 (undang-undang tentang perubahan tata pemerintah daerah) seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali kedua *kōci* Surakarta dan Yogyakarta, dibagi atas *syū*, *syi*, *ken*, *gun*, *son*, dan *ku*. Daerah *syū* sama dengan keresidenan dahulu yang terbagi atas *syi* dan *ken*. Daerah *syi* sama dengan daerah *stadsgemeente* dahulu (istilah sekarang kotapraja), daerah *ken* sama dengan kabupaten, daerah *gun* sama dengan kewedanaan atau *district*, daerah *son* sama dengan kecamatan atau *onderdistrict*, sedangkan *ku* sama dengan kelurahan atau desa dahulu. Selaku kepala daerah pada *syi, ken, gun, son,* dan *ku* masing-masing diangkat seorang *syicō*, *kencō*, *guncō*, *soncō*, dan *kucō*.[47] Dengan demikian, pembagian daerah pemerintah yang pada zaman Hindia Belanda terdiri atas provinsi-provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dihapuskan.[48] Sebagai gantinya pada tanggal 8 Agustus 1942 ditetapkan *syū* sebagai pemerintah daerah yang tertinggi. Jumlahnya di Pulau Jawa ada 17, terdiri atas Banten, Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura. Meskipun tidak ada perubahan struktural, terdapat perbedaan di dalam pelaksanaan pemerintahannya. Meskipun luas daerah *syū* sama dengan keresidenan dahulu, fungsi dan kekuasaannya berbeda. *Residentie* dahulu merupakan daerah dari pembantu gubernur (*resident*). Sementara itu, *syū* merupakan pemerintah daerah yang tertinggi dan berotonomi, di bawah seorang *syūcōkan* yang kedudukannya sama dengan seorang gubernur.

---

45 *Pembangoen*, 16 Maret 1942; *Pandji Poestaka*, no. 2, 18 April 1942

46 Menurut M. A. Azis, pegawai Jepang di Jawa berjumlah 23.242 orang

47 *Pandji Poestaka*, no. 23, 12 September 1942, hlm 88; lihat juga A. G. Pringodigdo, *op. cit.*, hlm 22–23

48 Harry J. Benda, Icikara, Koichi Kishi, *Japanese Military Administration in Indonesia*, 1956, hlm. 66

Seorang *syūcōkan* memegang kekuasaan tertinggi di daerah *syū* karena ia mempunyai kekuasaan legislatif dan eksekutif, sehingga dapat disebutkan sebagai satu otokrasi yang terdapat dari bawah sampai ke atas. Struktur pemerintah *syū* berbeda dengan *residentie* pada zaman Hindia Belanda karena *syūcōkan* kekuasaannya sama dengan gubernur, meskipun daerah kekuasaannya seluas daerah *residentie*.[49]

Di dalam melaksanakan tugasnya, *syūcōkan* dibantu oleh *cokan kanbō* (majelis permusyawaratan *cokan*) yang mempunyai 3 (tiga) *bu* (bagian) yakni sebagai berikut:

a. *Naiseibu* (bagian pemerintahan umum);
b. *Keizaibu* (bagian ekonomi);
c. *Keisatsubu* (bagian kepolisian).

Para *syūcōkan* secara resmi dilantik oleh *Gunseikan* pada bulan September 1942. Pelantikan tersebut merupakan awal pelaksanaan organisasi pemerintah daerah dan penyingkiran pegawai-pegawai Indonesia yang pernah digunakan untuk sementara waktu dari kedudukan yang tinggi. Kedudukan H. Dahlan Abdullah sebagai kepala pemerintah kota praja Batavia misalnya, diganti oleh seorang pejabat Jepang yang menjabat sebagai Batavia *Tōkubetsu syicō* (wali kota istimewa Batavia). Kedudukannya itu sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 27 yang memungkinkan dibentuknya suatu daerah yang dinamakan *Tōkubetsu syi* (Kotapraja Istimewa). Yang dianggap memenuhi syarat adalah kota praja Batavia yang pada tanggal 8 Agustus 1942 ditetapkan sebagai *Tōkubetsu syi*.

Di Sumatra pemerintah militer di bawah Panglima Tentara Ke-25 membentuk 10 keresidenan (*syū*) yang terdiri atas *bunsyū* (sub-keresidenan), *gun*, dan *son*. Jabatan tertinggi dipegang oleh orang Jepang.[50] Kesepuluh *syū* yang dibentuk itu adalah Aceh, Sumatra Timur, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, Bangka, dan Belitung. Setiap *syū* tersebut dipimpin oleh seorang *syūcōkan*.[51]

Pada umumnya struktur pemerintahan di bawah *syū* sama dengan struktur pemerintahan di Jawa. Perbedaannya hanya pada perubahan struktur di bawah. Salah satu di antaranya ialah perubahan *afdeeling* (kabupaten) Siak dan Kepulauan Riau-Lingga yang pada masa Hindia Belanda merupakan bagian dari Keresidenan Sumatra Timur digabungkan

---

[49] Berkas Dokumenter Mr. Ahmad Subardjo, hlm. 42

[50] *Ibid.*

[51] *Ibid.*

ke dalam *Riau Syū*, sedangkan kepulauan Riau-Lingga berada di bawah otoritas Singapura.[52]

Jika di Jawa jabatan gubernur dihapuskan pada masa pendudukan Jepang, di Sumatra justru diangkat tiga orang gubernur, masing-masing untuk Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Mereka bertugas mengoordinasi beberapa *syū*, mengingat luasnya wilayah Sumatra.

Pemerintah Militer Jepang telah mengadakan pemisahan Jawa dengan Sumatra sebagai daerah otonomi yang berdiri sendiri. Dengan demikian, Sumatra tidak lagi berpusat di Jakarta (Batavia) seperti pada zaman Hindia Belanda. Pulau Sumatra digabungkan dengan Semenanjung Malaya dengan pusatnya di Shonanto (Singapura). Pada pertengahan tahun 1943 baru dibentuk Pemerintah Militer Jepang di Sumatra yang disebut *Gunseikanbu* dan dijabat oleh Panglima Tentara Ke-25 yang bertempat di Bukittinggi, Sumatra Barat. *Gunseikanbu* terdiri dari beberapa departemen, yakni Departemen Dalam Negeri, Departemen Kepolisian, Departemen Kehakiman, Departemen Industri, Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Penerangan, Departemen Perindustrian dan Pengiriman, dan Departemen Meteorologi.[53] Tiap-tiap departemen dipimpin oleh seorang direktur yang diawasi oleh Direktur Dalam Negeri sebagai Wakil *Gunseikan*. Setiap *syū* mempunyai *Naiseibu* (Departemen Dalam Negeri), *Keisatsubu* (Departemen Kepolisian), dan *Kesaibu* (Departemen Sosial).

Di samping pemerintah militer (*gunsei*) yang dibentuk oleh Angkatan Darat dibentuk pula suatu pemerintahan militer oleh Armada Selatan kedua yang disebut *Minseifu*, dengan pusat di Makassar. Di lingkungan *Minseifu* hanya terdapat satu departemen, yakni Depertemen Pekerjaan Umum yang dikepalai oleh perwira Angkatan Laut. Departemen lainnya, yakni Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan Masyarakat, dan Departemen Industri, dikepalai oleh pejabat sipil.

Kantor bawahan *Minseifu* terdapat di tiga tempat, yakni di Kalimantan, Sulawesi, dan Seram (kemudian dipindahkan ke Sunda Kecil). Daerah bawahannya meliputi *syū*, *ken, bunken* (sub-kabupaten), *gun*, dan *son*. Sama halnya dengan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra, tidak lama setelah pendaratan tentara Jepang, orang Indonesia untuk sementara mendapat

---

[52] Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra* (Terjemahan), 1987, hlm. 178

[53] Berkas Dokumenter Mr. A. Subardjo, hlm. 42; G.S. Kanahele, "The Japanese Occupation of Indonesia Prelude to Independence", Ph.D., Thesis, Cornell University, 1969, Bab IV, Alinea ke-9

jabatan-jabatan tinggi. Setelah bulan Agustus 1942, jabatan yang disediakan untuk bangsa Indonesia hanya terbatas sampai *gunchō*, sedangkan jabatan sebagai wali kota di Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Pontianak dipegang oleh orang Jepang.[54]

Antara pemerintah Angkatan Darat dan Angkatan Laut hampir tidak pernah ada koordinasi. Pihak Angkatan Laut berusaha membuka kantor penghubung (*Bukanfu*) di Jakarta pada bulan April 1942, tetapi ditolak oleh penguasa Tentara Ke-16 dengan alasan sudah ada detasemen Angkatan Laut di Tanjung Priok dan Surabaya. Namun akhirnya, Tentara Ke-16 menyetujui pembukaan *Bukanfu* dengan tujuan meningkatkan kerja sama dan konsultasi antara kedua angkatan itu, terutama untuk menjamin suplai bahan-bahan yang diperlukan pihak Angkatan Laut. *Bukanfu* ini dikepalai oleh seorang yang mempunyai hubungan baik dengan orang Indonesia sebelum perang, bahkan dengan tokoh-tokoh nasional dan bersimpati terhadap Kemerdekaan Indonesia. Ia adalah Laksamana Muda Tadashi Maeda.

Ofensif Sekutu di Pasifik semakin melemahkan Angkatan Perang Jepang mengakibatkan diperlukan tenaga-tenaga bangsa Indonesia. Jepang mengubah sikap politiknya terhadap negeri-negeri yang didudukinya. Di depan Sidang Istimewa Parlemen ke-82 di Tokyo, Perdana Menteri Tojo dalam pidatonya pada tanggal 16 Juni 1943 tentang keputusan pemerintah mengenai pemberian kesempatan kepada orang Indonesia untuk "turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara". Menyusul pula pada tanggal 1 Agustus 1943 pengumumans *Saikō Shikikan* tentang garis-garis besar rencana pengambilan bagian dalam pemerintahan negara yang dijanjikan itu, yakni meliputi pembentukan badan-badan pertimbangan di daerah dan di pusat serta jabatan-jabatan tinggi untuk orang-orang Indonesia sebagai penasihat pada pemerintah militer.

Pengangkatan orang-orang Indonesia pada kedudukan tinggi dimulai dengan pengangkatan Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1 Oktober 1943. Kemudian pada tanggal 10 November 1943 Mas Soetardjo Kartohadikoesoemo dan R.M.T.A. Surio diangkat menjadi *Syūchōkan* Jakarta dan Bojonegoro. Pengangkatan tujuh penasihat bangsa Indonesia pada pemerintah militer telah dilakukan pada pertengahan bulan September 1943. Mereka disebut *sanyō* yang dipilih untuk enam macam *bu* (departemen): Ir. Soekarno untuk *Sōmubū* (Departemen Urusan Umum), Mr. Suwandi dan Dr. Abdul Rasyid untuk *Naimubu-bunkyōku* (Biro Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Dalam

---

[54] G.S. Kanahele, *op.cit.*, 1969, Bab IV, alinea ke-8 dan ke- 9

Negeri), Prof. Dr. Mr. Supomo untuk *Shihōbu* (Departemen Kehakiman), Mochtar bin Prabu Mangkunegoro untuk *Kotsubu* (Departemen Lalu Lintas), Mr. Muh. Yamin untuk *Sendenbu* (Departemen Propaganda), dan Prawoto Sumodilogo untuk *Sangyōbu* (Departemen Ekonomi).[55]

Khusus mengenai pembentukan Badan Pertimbangan Pusat (*Chūō Sangi In*) dimuat dalam *Osamu Seirei* No. 36/1943. Sementara itu, mengenai Badan Pertimbangan di Keresidenan dan Kotapraja Istimewa (*syū* dan *Tokubetsu syi sangikai*) dimuat dalam *Osamu Seirei* No. 37/1943 untuk kemudian dijelaskan dalam *Osamu Kanrei* No. 8/1943. *Osamu Kanrei* tersebut merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh *Gunseikan* (Kepala Pemerintah Militer yang dijabat secara fungsional oleh Kepala Staf Tentara) untuk melaksanakan *Osamu Seirei*.[56] *Chūō Sangi In* atau Badan Pertimbangan Pusat adalah suatu badan yang tugasnya mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai soal-soal politik dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Militer. Dua puluh tiga orang anggotanya diangkat oleh *Saikō Shikikan*. Delapan belas merupakan utusan dari tiap *syū* dan Jakarta *Tokubetsu Syi* serta dua orang utusan dari Yogyakarta dan Surakarta *kōci*. Dengan demikian, jumlah seluruh anggotanya adalah empat puluh tiga orang. Pada tanggal 17 Oktober 1943, Ir. Soekarno secara resmi dilantik sebagai Ketua *Chūō Sangi In*, sedangkan R.M.A.A. Kusumo Utojo dan dr. Buntaran Martoatmodjo masing-masing sebagai wakil ketua.[57]

Saat pelantikan itu, berlangsung sidang *Chūō Sangi In* pertama yang dimulai pada tanggal 16 sampai dengan 20 Oktober 1943. Dalam sidang dibentuk empat *bunkakai* (komisi), yang telah menjawab pertanyaan *Saikō Shikikan* tentang cara-cara apa yang sebaiknya dilakukan guna mencapai kemenangan di dalam "Perang Asia Timur Raya" (Perang Pasifik). *Gunseikan* dan pembesar-pembesar tentara Jepang lainnya turut menghadiri serta mengawasi jalannya sidang, dan jawaban sidang tidak lepas dari kehendak Pemerintah Pendudukan Jepang, yakni supaya seluruh potensi kerja dan produksi dikerahkan guna kepentingan perang.[58]

Dalam sidang-sidang berikutnya para pemimpin Indonesia yang duduk dalam *Chūō Sangi In* telah berusaha mengajukan usul yang mengarah kepada perbaikan keadaan sosial rakyat yang semakin buruk. Akan tetapi, pemerintah Jepang memanfaatkan sidang-sidang I sampai dengan sidang

---

55 *Kan Pō*, 10 Oktober 2603 (1943)

56 *Ibid.*

57 Arniati Prasedyawati Herkusumo, *Chūō Sangi In: Dewan Pertimbangan Pusat pada Masa Pendudukan Jepang*, 1984, hlm. 37

58 *Pandji Poestaka*, November 1943, hlm. 93

Gambar 1.6 *Gunseikan* membuka sidang *Chūō Sangi In* Pertama (16 Sampai dengan 20 Oktober 1943) (Sumber: A. Mansur Suryanegara, *Pemberontakan Tentara PETA di Cileunca, Pangalengan, Bandung Selatan*)

Gambar 1.7 Para anggota *Chūō Sangi In* (a.l. barisan paling bawah di sebelah kiri Ir Soekarno sebagai ketuanya, sedangkan deret bawah no. 2 dari kanan adalah Drs. Moh. Hatta. Deret kedua dari atas paling kanan adalah Ki Hadjar Dewantara dan di sebelahnya Kyai Mas Mansur masing-masing sebagai anggota *Chūō Sangi In* (Sumber: Fatmawati, *Catatan Kecil Bersama Bung Karno*)

IV untuk membahas usaha-usaha pengerahan rakyat bagi kepentingan *Perang Asia Timur Raya*.[59]

Chūō Sangi In dibentuk untuk memperkuat kedudukan Pemerintah Pendudukan Militer Jepang dalam memenangkan perang. *Chūō Sangi In* adalah sebuah dewan yang serupa dengan *Volksraad* pada zaman pemerintah Hindia Belanda. Bedanya, menurut Ir. Soekarno, dalam *Volksraad* dapat mengkritik pemerintah dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan segala aspek pemerintah kolonial. Dalam *Chūō Sangi In*, kesempatan ini tidak didapat. Pemerintah telah menegaskan agar para anggota *Chūō Sangi In* harus sadar tentang tidak adanya tempat di dewan untuk birokrasi yang tidak perlu dari orang-orang Indonesia yang sombong.[60]

Meskipun demikian, dalam sidang *Chūō Sangi In* II tanggal 30 Januari–3 Februari 1944, sebagai seorang anggota Mr. Samsudin mengajukan usul yang menarik perhatian anggota lainnya. Ia mengusulkan agar pemerintah peduli terhadap nasib petani dengan mengadakan perbaikan kebutuhannya. Hampir seluruh anggota *Chūō Sangi In*, termasuk Drs. Mohammad Hatta, mendukung usul ini, yang merupakan kritik langsung pertama kepada pemerintah. Bahkan, Ketua *Chūō Sangi In* Soekarno membentuk Panitia Istimewa, yang akhirnya memutuskan agar dicari jalan keluar yang tepat guna memudahkan penyerahan dan pembagian padi kepada rakyat dengan menetapkan berapa jumlah yang harus diserahkan dan berapa jumlah yang perlu dipertahankan di setiap daerah, yang dilakukan seadil-adilnya.[61]

Reaksi terlihat dalam pidato penutupan sidang. Dengan nada keras *sōmubucō* antara lain mengatakan "... para anggota bukannya bersidang untuk mempertunjukkan kecakapan berpidato atau mengkritik saja, banyak di antara anggota bersikap kanak-kanak dan tidak dapat merasakan kegentingan di Jawa." Pada akhir pidatonya *sōmubucō* memperingatkan anggota untuk berbicara pada pokok persoalan. Akhirnya, Mr. Samsudin yang dianggap berbicara di luar keinginan penguasa diberhentikan sebagai anggota *Chūō Sangi In*. Ia menempati jabatan baru sebagai *Syicō* (wali kota) di Sukabumi.[62]

Semakin memburuknya kondisi perang menyebabkan penguasa berusaha mempertahankan pengaruhnya di kalangan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso mengumumkan "Janji Kemerdekaan Kemudian Hari". Berbeda dengan

---

59 Sidang *Chūō Sangi In* II (30 Januari–3 Februari 1944); Sidang III (7– 11 Mei 1944); Sidang IV (12–16 Agustus 1944)

60 Arniati Prasedyawati Herkusumo, *op. cit.*, 1984, hlm. 33

61 *Ibid.*, hlm. 60

62 *Ibid.*, 1984, hlm. 61

sidang-sidang sebelumnya, pada sidang-sidang *Chūō Sangi In* yang kelima sampai dengan yang kedelapan pembicaraannya menyangkut usaha-usaha untuk mencapai kemenangan akhir dan kemerdekaan Indonesia. Namun, semuanya itu tidak lepas dari kepentingan Jepang.[63] Khususnya pada sidang ketujuh dan kedelapan, *Chūō Sangi In* telah berani tampil dengan usul-usul yang ditujukan untuk mempersiapkan negara Indonesia yang merdeka. Dalam sidangnya yang ketujuh mengeluarkan resolusi "gerakan hidup baru" dalam 33 pasal yang direncanakan untuk menyadarkan seluruh lapisan rakyat tentang Kemerdekaan Indonesia.[64]

Pada sidang kedelapan tidak ada satu masalah pun ditujukan untuk kepentingan penguasa Jepang, tetapi semata-mata ditujukan untuk mempersiapkan suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Jepang mulai memperlunak pengawasan atas jalannya sidang, sedangkan para pemimpin Indonesia menggunakan kesempatan yang baik pada saat Jepang banyak mengalami kekalahan dalam pertempuran. Dengan dicapainya wacana Kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang, *Chūō Sangi In* berakhir tanpa suatu pembubaran resmi.

Di Sumatra, pembentukan *Chūō Sangi In* baru diumumkan pada tanggal 24 Maret 1945 dengan anggota berjumlah 40 orang. Lima belas di antaranya dipilih oleh anggota badan penasihat *Syū*, bernama *Syū Sangikai*.[65] Anggota lainnya yang berjumlah 25 orang diangkat oleh pemerintah dan dipimpin oleh Moh. Sjafei, pendiri lembaga pendidikan INS Kayutanam, Sumatra Barat, dibantu oleh dua orang wakil ketua Teuku Nyak Arif dari Aceh dan Mr. A. Abbas dari Lampung, dan wartawan Adinegoro sebagai sekretaris.[66]

Chūō Sangi In Sumatra diizinkan bersidang tiga bulan kemudian, pada tanggal 26 Juni 1945 di Bukittinggi. Sidang itu merupakan sidang pertama dan terakhir bagi tokoh-tokoh Sumatra. Dalam sidang, mereka juga mengajukan usul yang mengarah kepada usaha mempercepat tercapainya kemerdekaan. Untuk itu, antara lain mereka mengusulkan, sama halnya dengan di Jawa, dibentuk *Sumatra Hōkōkai* sebagai pusat pengerahan tenaga rakyat, untuk membantu Jepang. Terbentuknya Sumatra *Hōkōkai* diam-diam digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan mengadakan koordinasi dengan *hōkōkai-Hōkōkai* yang sudah ada di setiap *syū*. Selain itu, sidang mengusulkan penggabungan *Giyūgun* dan *Heihō* ke dalam laskar rakyat sebagai dasar bala tentara Indonesia. Usul lainnya agar di Sumatra

---

63 Sidang Istimewa *Chūō Sangi In* V (11 September 1944); Sidang VI (12–17 November 1944); Sidang VII (21–26 Februari 1945); Sidang VIII (18–21 Juni 1945)

64 Arniati Prasedywati Herkusumo, *op. cit.*, 1984, hlm. 94–95

65 Pembentukannya di setiap *Syū* di Sumatra sejak bulan November 1944

66 Anthony Reid, *op. cit.*, hlm. 228

dibentuk panitia untuk penyelidikan kemerdekaan dan dikirim utusan ke Jawa untuk melakukan koordinasi dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang sudah ada di sana.[67]

Pemerintah militer di Sumatra menganggap penduduk pulau ini belum siap untuk menerima kemerdekaan. Sikap ini bertentangan dengan janji kemerdekaan untuk seluruh Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 yang kemudian diimplementasikan dengan pembentukan BPUPKI. Ketika di Jawa BPUPKI hampir menyelesaikan tugasnya, penguasa Jepang menyetujui usul *Chūō Sangi In* setelah terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 28 Juli 1945, pada saat-saat terakhir menjelang kekalahan Jepang. Panglima Tentara Ke-25 mengirimkan Mr. Teuku Mohammad Hasan, dr. Mohammad Amir, dan Mr. Abdul Abbas sebagai wakil Sumatra ke Jakarta untuk mengikuti sidang PPKI. Mereka bertiga ini tidak dikenal di luar daerahnya, bahkan T.M. Hasan dan Mohammad Amir bukan anggota *Chūō Sangi In*.[68]

B. Pergerakan Indonesia dan Jepang

1. Sikap Tokoh-Tokoh Nasionalis Indonesia terhadap Jepang

Masuknya tentara Jepang ke Indonesia pada bulan-bulan pertama, kedua, dan ketiga tahun 1942 kelihatannya mendapat sambutan yang baik dari penduduk setempat. Tokoh-tokoh nasionalis Indonesia seperti Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta bersedia melakukan kerja sama dengan pihak Pemerintah Pendudukan Jepang, padahal sebelumnya pada masa pemerintah Hindia Belanda mereka bersikap nonkooperatif. Faktor-faktor yang menyebabkan kesediaan bekerja sama itu adalah pertama kebangkitan bangsa-bangsa Timur. Faktor lain adalah ramalan *Joyoboyo* yang hidup di kalangan rakyat. Diramalkan bahwa akan datang orang-orang kate yang akan menguasai Indonesia selama umur jagung dan sesudah itu kemerdekaaan akan tercapai. Juga ada faktor diperkenalkannya pendidikan Barat kepada orang-orang pribumi yang dibutuhkan pemerintah Hindia Belanda pada masa jajahannya guna mengisi kekurangan tenaga-tenaga terlatih dan terdidik. Faktor luar yang memengaruhi adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Perjanjian perdamaian di Portsmouth pada tahun itu telah membawa Jepang kepada suatu posisi yang setingkat

---

67 Anthony Reid, *op. cit.*, 1987, hlm. 229

68 Audrey Kahin, "Struggle for Independence: West Sumatra in the Indonesian Revolution" (Disertasi), 1979, hlm. 91

dengan negara-negara Barat. Orang Timur memandang kemenangan Jepang sebagai suatu kemenangan Asia atas Eropa.

Sebelum Perang Dunia II telah terjadi hubungan antara tokoh-tokoh nasional Indonesia dan pihak Jepang. Di antaranya adalah Gatot Mangkupraja dan Moh. Hatta. Setelah berkunjung ke Jepang pada akhir tahun 1933, Gatot mempunyai keyakinan bahwa Jepang dengan gerakan-gerakan Asianya mendukung pergerakan nasional Indonesia.

Tentang reaksi Hatta sesudah kunjungannya ke Jepang pada tahun 1933, George Kanahele mengatakan bahwa meskipun keyakinan nasionalisnya mendalam dan tidak mudah dipengaruhi, Hatta bukannya sama sekali tidak bersimpati terhadap Jepang pada waktu itu. Meskipun dengan tegas menolak kegiatan imperialis Jepang, ia tidak mengecam tantangan dinamis Jepang terhadap rongrongan dari pihak negara-negara Barat.[69]

Sikap Hatta yang antifasis dan imperialis Jepang tergambar dalam sebuah artikel yang dimuat dalam surat kabar *Pemandangan* tanggal 22 dan 23 Desember 1941. Hatta yang waktu itu masih dalam pengasingan di Banda Neira antara lain menulis, "Pada fasisme tidak dapat dikemukakan cita-cita untuk menentukan nasib sendiri. Niat kita dalam perang sekarang ini tidak lain melainkan fasisme hancur lebur sama sekali ..., sebab Jepang yang imperialistis adalah ancaman yang sehebat-hebatnya bagi Indonesia."[70]

Mengapa Hatta bersedia bekerja sama dengan pihak Jepang padahal ia terkenal antifasis? Nugroho Notosusanto mengajukan kemungkinan bahwa Hatta yakin akan ketulusan Jepang dalam janjinya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia atau paling tidak suatu pemerintahan sendiri, seperti yang ditegaskan di dalam propagandanya sebelum melakukan penyerbuan. Demikian pula halnya dengan Soekarno, kesediaannya untuk bekerja sama dengan pihak Jepang didasarkan pada prinsip yang sama dengan Hatta, meskipun kedua-duanya terkenal sebagai tokoh nonkooperasi yang gigih pada masa Hindia Belanda.

Di dalam autobiografinya yang disusun oleh Cindy Adams, Soekarno antara lain menyebutkan bahwa Jepang sedang dalam keadaan kuat sedangkan sebaliknya Indonesia berada dalam posisi yang lemah. Karena itu, bantuan Jepang diperlukan oleh rakyat Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Untuk itu, rakyat Indonesia harus melampaui masa penderitaan.[71]

---

[69] George Stanford Kanahele, 1969, Bab VI

[70] Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan*, Jilid I, 1976, hlm. 220

[71] Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta ...*, 1979, hlm. 15; lihat juga Soekarno: *An Autobiography As Told To Cindy Adams*, 1965, hlm. 154, 156, dan 182

Soekarno-Hatta dan Sjahrir, tiga pemimpin nasionalis yang senior pada waktu itu sepakat untuk bergerak pada dua jalur. Soekarno dan Hatta memakai jalur kerja sama dengan pihak Jepang, sedangkan Sjahrir memakai jalur nonkooperasi.

Faktor lain yang menyebabkan timbulnya simpati rakyat Indonesia terhadap Jepang adalah sikap keras kepala pemerintah Hindia Belanda menjelang akhir masa kekuasaannya. Pada tahun 1938 setelah ditolaknya Petisi Soetardjo yang lunak itu, yang meminta agar diadakan konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk menyusun rencana pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia di bawah kekuasaan pemerintah Belanda sesudah 10 tahun. Tahun berikutnya Belanda pun menolak suatu usul yang diajukan oleh Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Usulnya dirumuskan dalam slogan yang berbunyi: "Indonesia Berparlemen".

Sikap pemerintah Hindia Belanda yang menolak uluran tangan dari pihak Pergerakan Nasional Indonesia menyebabkan timbulnya keyakinan bahwa dari pihak kolonialisme Belanda tidak dapat diharapkan apa-apa yang menyangkut kemerdekaan, sedangkan pihak Jepang sejak semula bicara mengenai kemerdekaan bangsa-bangsa Asia.[72]

Berbeda dengan keadaan pada zaman Hindia Belanda di mana pemerintah kolonial menekan kaum nasionalis Indonesia, pada zaman pendudukan Jepang golongan nasionalis diajak bekerja sama oleh penguasa. Pada pihak lain, jika pada zaman Hindia Belanda sebagian kaum nasionalis Indonesia mengambil sikap yang nonkooperatif, pada zaman Jepang sebagian besar di antara mereka menempuh jalan kerja sama dengan pihak Jepang. Kerja sama itu didahului dengan tindakan Pemerintah Militer Jepang yang secara berangsur-angsur membebaskan pemimpin nasionalis Indonesia. Mereka yang mendapatkan kebebasannya kembali antara lain adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, dan Sjahrir.

Tindakan Pemerintah Militer Jepang tersebut bertolak dari anggapan bahwa kaum nasionalis Indonesia sangat berpengaruh kepada masyarakatnya sehingga mereka merasa perlu untuk mengadakan kerja sama dengan pihak nasionalis itu untuk memudahkan pengerahan potensi rakyat bagi usaha perangnya. Dalam suatu pertemuan dengan seorang pembesar Tentara Ke-16 di Pulau Jawa, Hatta menyatakan kesediaannya itu didasarkan atas penegasan pembesar itu bahwa tujuan pemerintah Jepang bukanlah untuk menjajah Indonesia, melainkan untuk membebaskan sekalian bangsa Asia dari dominasi negara-negara Barat.[73]

---

[72] Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta ...*, 1979, hlm. 16–17

[73] *Hong Po*, 24 April 1942

Langkah itu diikuti oleh tokoh nasionalis lainnya seperti Ir. Soekarno, Mr. Muh. Yamin, Mr. Sartono, dr. Buntaran Martoatmodjo, Dr. G.S.S.J. Ratu Langie, dan Oto Iskandar Dinata. Dalam bulan April 1942 bekas anggota *Volksraad* pada zaman Hindia Belanda seperti Sutardjo Kartohadikusumo, Mr. Samsudin, Dr. T.S.G. Mulia, Tadjuddin Noor, Sukardjo Wirjopranoto, dan Muchtar menyatakan kesediaannya pula untuk bekerja sama dengan pihak Jepang.

Namun, di antara kaum nasionalis itu ada juga tokoh-tokoh yang menolak untuk bekerja sama dengan pihak Jepang. Di antaranya yang terkenal adalah Sutan Sjahrir dan dr. Tjipto Mangunkusumo. Sikap dr. Tjipto itu tidak hanya didasarkan atas pertimbangan yang bersifat politik, tetapi juga karena kesehatannya semakin mundur.[74] Sikap anti-Jepang Dr. Tjipto tampak dari imbauannya kepada rakyat Indonesia setelah Jepang menyerang Pearl Harbour:

> "... negeri kita sungguh-sungguh berada dalam perang. Ini berarti kita harus membela hari depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita yang telah dididik secara Barat. Jadi, sulit mengubahnya untuk dididik secara Jepang."

Ia pun mengimbau rakyat agar membantu pemerintah Belanda yang disampaikan sesudah Gubernur Tjarda mengumumkan perang terhadap Jepang, antara lain berbunyi:

> "Pasti tempat kita di belakang Gubernur Jenderal. Kewajiban bersama dari putih, kuning, sawo matang adalah jangan mengganggu orang-orang yang bertanggung jawab sehingga mereka dapat menempatkan perhatian penuh kepada soal-soal yang dihadapi."

Imbauannya itu tidaklah merupakan dukungan cuma-cuma, seperti dikatakan dr. Tjipto kepada pihak Belanda: "Rekeningnya akan kami tagih kemudian."[75]

Pegawai *Gunsei* yang berjumlah sekitar 300 orang yang datang bersama-sama dengan tentara Jepang ke Jawa tidak semuanya merupakan pegawai pemerintah. Hal yang sama terdapat pula di Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya. Meskipun kekurangan tenaga pegawai itu dapat diatasi dengan ditempatkannya personel militer dan personel rendahan, jumlah tersebut belum mencukupi. Jalan satu-satunya untuk mengatasinya ialah membuka kesempatan bagi golongan nasionalis untuk turut aktif dalam *Gunsei*. Untuk golongan nasionalis tersedia pula jabatan-jabatan dalam bidang pers, radio, dan propaganda. Dengan cara demikian pemerintah *Gunsei* mengharapkan terhimpunnya tenaga penulis, penyair, seniman, dan

---

74 Sutan Sjahrir, *Out of Exile*, 1949, hlm. 241

75 J.C. Bijkerk, *op. cit.*, 1988, hlm. 96

terutama wartawan Indonesia dalam rangka usahanya mengerahkan kemampuan sumber daya masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh wartawan Indonesia seperti Sukardjo Wirjopranoto, Oto Iskandar Dinata, Winarno, dan Parada Harahap termasuk mereka yang segera diangkat menjadi pegawai *Gunsei*.[76]

2. Kerja Sama Kaum Nasionalis "Sekuler"

Pada akhir bulan Maret 1942 hubungan kerja sama antara nasionalis Indonesia dengan pihak Jepang dituangkan dalam bentuk institusional. Suatu perhimpunan dengan nama Gerakan Tiga A. Namanya dijabarkan dari semboyan propaganda Jepang pada waktu itu: "Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia". Bagian propaganda (*Sendenbu*) sebagai sponsor gerakan itu mengangkat tokoh Parindra Jawa Barat, Mr. Samsudin sebagai ketuanya, dengan dibantu oleh tokoh-tokoh Parindra lainnya, seperti Sutan K. Pamuntjak dan Mohammad Saleh.[77] Mr. Samsuddin mencoba mempropagandakan Gerakan Tiga A ke seluruh Jawa.[78]

Karena gerakan itu dibentuk secara resmi, di daerah-daerah dibentuk komite-komite, ada yang bernama komite nasional, komite rakyat, dan ada yang bernama lain yang bersifat lokal. Komite-komite yang dibentuk secara lokal belum berjalan baik sebab situasi sesungguhnya belum cukup mantap untuk membentuk organisasi. Kemudian secara bertahap gerakan yang diciptakan oleh Jepang itu mulai bulan Mei 1942 diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa.[79]

Gerakan Tiga A hanya berumur beberapa bulan. Pemerintah Pendudukan Jepang menganggap bahwa Gerakan Tiga A tidak begitu efektif di dalam usahanya untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Di Sumatra Gerakan Tiga A yang mendukung kepentingan Jepang dilarang. Pemerintah Militer Tentara Ke-25 membentuk sendiri organisasi-organisasi yang mendukung mereka. Setelah Gerakan Tiga A dibubarkan pada bulan Desember 1942 telah direncanakan untuk dibentuk organisasi baru. Organisasi baru itu dipimpin oleh tokoh-tokoh Pergerakan Nasional yang lebih dikenal di kalangan rakyat. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur ditampilkan sebagai pemimpin dengan sebutan Empat Serangkai.

---

[76] Kanahele, *op. cit.*, 1969, Bab III, alinea ke-17
[77] Goenseikanboe, *Orang Indonesia Jang Terkemoeka Dipoelau Djawa*, 2604 (1944), hlm. 46
[78] *Ibid.*
[79] *Asia Raja*, 12 Mei 1942

Gambar 1.8 Empat Serangkai dalam Poetra (Ir. Soekarno (berdiri), K.H. Mas Mansur (sebelah kanan), dan di sebelah kiri Drs. Moh. Hatta dan Ki Hadjar Dewantara (Sumber: *Djawa Baroe*)

Gambar 1.9 Tiga di antara Empat Serangkai (dari kanan ke kiri Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur (Sumber: Arsip Masional RI, *Di Bawah Pendudukan Jepang*)

Pemerintah Jepang rupa-rupanya tidak peduli bahwa pemimpin-pemimpin pada masa sebelum pecah perang mengambil sikap antifasisme Jepang. Tokoh-tokoh seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sutan Sjahrir, dan sudah diketahui secara jelas sikapnya yang antimiliterisme dan antifasisme, di samping mereka bersikap nonkooperatif terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah Jepang ingin menggunakan tokoh-tokoh Pergerakan Nasional Indonesia itu dan diharapkan dapat menggerakkan massa untuk usaha perangnya serta membangkitkan perasaan anti-Barat dan antibangsa kulit putih. Sentimen rasial sangat ditonjolkan dalam propaganda Jepang. Terutama Ir. Soekarno, seorang tokoh nasionalis lulusan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung, yang telah dikenal namanya sejak zaman Hindia Belanda dan sangat mahir berpidato, amat diharapkan kerja samanya oleh Jepang.

Pada bulan Desember 1942, diadakan persiapan pembentukan suatu organisasi rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Pada tanggal 1 Maret 1942 ia mengumumkan lahirnya organisasi baru yang bernama *Poesat Tenaga Rakjat* yang disingkat *Poetera*.[80] Tujuan Poetera ini menurut Ir. Soekarno adalah untuk membangun dan menghidupkan segala apa yang dirobohkan oleh imperialisme Belanda. Peran Soekarno dalam membentuk Poetera ini sangat menentukan, sekalipun dalam banyak hal ruang geraknya dibatasi.

Bagi Jepang tujuan Poetera adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Untuk itu, digariskan sebelas macam kegiatan yang harus dilakukan, sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan dasarnya. Yang terpenting antara lain adalah tugas untuk memimpin rakyat supaya kuat rasa kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menghapuskan pengaruh Amerika, Inggris, dan Belanda, mengambil bagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya, memperkuat rasa persaudaraan Indonesia dan Jepang, serta meng-intensifkan pelajaran-pelajaran bahasa Jepang. Selain tugas di bidang propaganda, Poetera mempunyai tugas pula di bidang sosial-ekonomi. Poetera mempunyai tugas untuk membina masyarakat dan memusatkan potensi itu untuk kepentingan perang Jepang.

Poetera mempunyai pimpinan pusat dan pimpinan daerah, yang masing-masing terdiri atas tiga bagian yang disebut *pejabatan*, yaitu:

a. Pejabatan Susunan Pembangunan;
b. Pejabatan Usaha dan Budaya;
c. Pejabatan Propaganda.

---

[80] Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakjat Indonesia* (terjemahan), 1966, hlm. 217–218

Pimpinan daerah dibagi sesuai dengan tingkat daerah, yaitu pimpinan tingkat *syū*, *ken*, dan *gun*. Pada tingkat daerah ini hanya diadakan dua *pejabatan* yang kegiatannya terbatas pada daerah.[81]

Usaha pengembangan Poetera baru dimulai pada bulan April 1943. Sebagai pemimpin tertinggi diangkat Ir. Soekarno yang dibantu oleh Drs. Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Pimpinan Poetera itu bersifat kolektif dan disebut Empat Serangkai serta dianggap lambang dari segala aliran di dalam Pergerakan Nasional. Di samping pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, Poetera mempunyai beberapa penasihat orang Jepang. Mereka adalah S. Miyoshi, bekas konsul Jepang di Jakarta, G. Taniguci pemimpin surat kabar *Toindo Nippo*, Ichiro Yamasaki seorang pemimpin badan perdagangan, dan Akiyama dari Bank Yokohama. Mereka sebelum perang pernah tinggal di Indonesia.

Pada awal berdirinya, Poetera mendapat sambutan yang baik dari organisasi-organisasi massa yang ada. Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia beserta sejumlah 15.000 orang anggotanya menyatakan diri bergabung dengan Poetera.[82] Demikian pula Perkumpulan Pegawai Pos Menengah akan menyerahkan perkumpulan kepada Poetera.[83] Langkah kedua organisasi ini kemudian diikuti oleh organisasi lainnya. Pada bulan April Pegawai Pos, Telegraf, Telepon, dan Radio (PTTR) di Bandung[84] dan Pengurus Besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Mr. Maria Ulfah Santoso dan Ny. Jusupadi Danudiningrat di Jakarta menyatakan bergabung dengan Poetera.[85] Dari kalangan organisasi pemuda yang pertama kali menyatakan diri masuk dan bergabung dengan Poetera adalah Barisan Banteng.[86] Dari organisasi olahraga adalah Ikatan Sport Indonesia (ISI) yang kemudian diikuti oleh beberapa perkumpulan olahraga lainnya yang menjadi anggotanya. Dari kalangan pelajar, Badan Perantaraan Pelajar-pelajar Indonesia (Baperpi) di bawah pimpinan Supeno juga menyatakan diri bergabung dengan Poetera.[87]

Akan tetapi, Poetera tingkat *syū* dan daerah yang bertingkat lebih rendah tidak dapat berkembang secara baik. Tidak pesatnya perkembangan organisasi ini karena kondisi sosial-ekonomi. Sekalipun Poetera organisasi

---

81 *Asia Raja*, 10 Maret 1942

82 *Ibid.*, 27 Maret 1943

83 *Ibid.*, 30 Maret 1943

84 *Ibid.*, 9 April 1943

85 *Ibid.*, 17 April 1943

86 *Ibid.*, 31 Maret 1943

87 *Ibid.*, 9 April 1943

resmi pemerintah, bantuan pemerintah tidak dapat dirasakan oleh Poetera sebagai organisasi. Untuk menghidupi dirinya, Poetera harus memungut iuran dari anggotanya serta meminta sebagian keuntungan badan-badan perdagangan yang didirikan.

Namun, dengan segala kekurangannya, Poetera berhasil untuk mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan yang akan datang. Dengan rapat-rapat raksasa dan dengan memakai media massa pihak Jepang, pemimpin-pemimpin Indonesia dapat mencapai rakyat secara lebih luas daripada yang pernah dialami dalam zaman Hindia Belanda. Rupa-rupanya pihak Jepang lama-kelamaan menyadari bahwa Poetera lebih bermanfaat bagi pihak Indonesia daripada bagi pihaknya sendiri. Poetera lebih mengarahkan perhatian rakyat kepada kemerdekaan daripada usaha perang pihak Jepang. Karenanya mereka merancang pembentukan organisasi baru, yang mencakup semua golongan masyarakat, termasuk golongan Cina, Arab, dan lain-lainnya. Pada tahun baru 1944 Panglima Tentara Ke-16, Letnan Jenderal Kumakichi Harada menyatakan berdirinya organisasi *Jawa Hōkōkai* (Himpunan Kebaktian Jawa).

Organisasi ini didirikan oleh pemerintah Jepang setelah mendengar pendapat dari Empat Serangkai.[88] Alasan untuk membentuk badan baru menurut keterangan pemerintah Jepang adalah, karena semakin menghebatnya perang, sehingga perlu digiatkan dan dipersatukan segenap rakyat lahir dan batin. Dasar pengertian berasal dari *hōkō seishin* (semangat kebaktian). Kebaktian ini memiliki tiga dasar: mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti. Tiga hal inilah yang dituntut dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia berhubung dengan semakin gawatnya perang. Pemerintah berusaha untuk menggabungkan semua kekuatan sosial-ekonomi dan kultural serta kekuatan-kekuatan politik untuk memenangkan perang dengan menggunakan segala tenaga dan daya yang ada.[89]

Berbeda dengan Poetera, *Jawa Hōkōkai* tegas-tegas dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Jika dalam Poetera pucuk pimpinannya diserahkan kepada tokoh-tokoh nasionalis Indonesia, tidak demikian halnya *Jawa Hōkōkai*. Pimpinannya langsung dipegang oleh *Gunseikan*, sedangkan di daerah dipegang oleh *syūcōkan* sampai ke *syicō* untuk tiap-tiap tingkatan. Kegiatan *Jawa Hōkōkai* sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasarnya meliputi:

---

88 *Peratoeran-peratoeran Himpoenan Kebaktian Rakjat*, 1944, hlm. 1

89 *Ibid.*

a. melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang;
b. memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segala bangsa;
c. memperkukuh pembelaan tanah air.

Jawa Hōkōkai mempunyai peraturan keanggotaan yang khusus. Menurut peraturan ini, syarat untuk diterima menjadi anggota adalah minimal berusia 14 tahun, bangsa Indonesia atau Jepang, pegawai negeri, atau anggota organisasi kelompok profesi. Bagi bangsa Jepang yang bukan pegawai negeri, jika ingin menjadi anggota harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada *syūcōkan* setempat. Bagi orang Cina dan Eropa identitas mereka terlebih dahulu diteliti.

Pengurus Pusat *Jawa syūcōkan* mempunyai tiga bagian, yaitu bagian pendidikan, bagian usaha, dan bagian umum, sedangkan pada tingkat daerah hanya memiliki dua bagian. *Jawa Hōkōkai* adalah organisasi sentral yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam *hōkōkai* sesuai dengan bidang profesinya. Guru-guru bergabung dalam wadah *Kyoiku Hōkōkai* (kebaktian para pendidik). Dokter-dokter bergabung dalam *Izi Hōkōkai* (wadah kebaktian untuk para dokter). Kecuali itu, *Jawa Hōkōkai* mempunyai anggota istimewa (*Tōkubetsu hōkōkai*) yang terdiri atas *Fujinkai* (organisasi perempuan). *Fujinkai* adalah satu-satunya organisasi perempuan yang merupakan peleburan dari seluruh organisasi perempuan Indonesia. Jepang menginginkan organisasi ini sebagai tenaga bantuan untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi yang buruk pada masa itu. *Fujinkai* dibentuk di pusat, dipimpin oleh Ny. Sunarjo Mangunpuspito maupun di daerah-daerah. Anggotanya umumnya terdiri atas istri-istri pegawai yang bekerja pada pemerintah Jepang. Melalui *Fujinkai* diadakan kegiatan sosial di kampung-kampung di dalam kota, antara lain, penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan dengan membawa obat-obatan untuk penduduk yang terjangkit malaria seperti yang terjadi di Cilincing, Tanjung Priok. Karena penduduk di daerah Tanjung Priok sudah berpakaian goni, ibu-ibu yang tergabung dalam *Fujinkai* bertanam kapas, memintal benang dan akhirnya menenun secara sukarela.[90] Kegiatan *Fujinkai* pada dasarnya membantu meringankan penderitaan orang banyak.

Wadah *Hōkōkai* lainnya adalah *Keimin Bunka Shidōshō* (Pusat Kebudayaan), *Boei Engokai* (tata usaha pembantu prajurit *Peta* dan *Heihō*), serta beberapa *Hōkōkai* perusahaan. Perkembangan organisasi *Jawa Hōkōkai*

[90] Arsip Nasional Republik Indonesia, *Di Bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya*, 1988, hlm. 48–53

tidak berbeda dengan Poetera. Akan tetapi, di dalam usaha pengerahan barang-barang atau padi, *Jawa Hōkōkai* merupakan pelaksana utamanya. Bahkan pada pertengahan tahun 1945 semua kegiatan pemerintah dalam bidang pengerahan dilaksanakan oleh *Jawa Hōkōkai*. Potensi sosial-ekonomi masyarakat dimobilisasi melalui *Jawa Hōkōkai* untuk mencapai jumlah yang telah ditentukan, dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Di luar Pulau Jawa golongan nasionalis ternyata kurang mendapat tempat dalam sistem pemerintah lokal. Hal itu disebabkan oleh kebijakan penguasa lokal. Di Sumatra misalnya, tidak dapat dibentuk sebuah organisasi yang merupakan wadah bagi golongan nasionalis. Penguasa di Sumatra berpendapat bahwa Sumatra tidak menggambarkan suatu homogenitas sebab terdiri atas pelbagai suku, bahasa, dan adat istiadat. Oleh karena itu, yang diizinkan hanyalah organisasi-organisasi lokal. Ketika di Jawa dibentuk Poetera, Sumatra pun ingin membentuk organisasi yang sama. Untuk itu, dalam bulan Juli 1943 Moh. Sjafei dan Chatib Sulaiman mengajukan surat permohonan kepada pemerintah Jepang, tetapi pembentukan itu tidak diizinkan. Baru dalam bulan Maret 1945 konsesi politik diberikan kepada Sumatra dengan diizinkannya pembentukan *Chūō Sangi In*.

Di daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut (*Kaigun*), perkembangan yang terjadi di Jawa juga tidak banyak diketahui. Penguasa-penguasa setempat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sengaja menutupi berita-berita mengenai peristiwa-peristiwa yang dianggapnya berlawanan dengan kebijakannya. Begitu pula mengenai pembentukan Poetera, pada umumnya golongan nasionalis di daerah-daerah tidak mengetahuinya. Di Makassar misalnya, berita tentang pembentukan Poetera ditutupi.[91]

3. Kerja Sama Kaum Nasionalis Islam

Dalam rangka melukiskan kehidupan politik pada zaman Pendudukan Jepang, golongan nasionalis Islam perlu mendapat sorotan khusus karena telah memperoleh perhatian istimewa dari Pemerintah Pendudukan Jepang. Golongan ini memperoleh lebih banyak kelonggaran dibandingkan dengan golongan nasionalis "sekuler" yang dinilai pada dasarnya anti-Barat karena soal agama sehingga lebih dapat diandalkan oleh Jepang. Dalam rangka memberikan kelonggaran kepada golongan Islam di Pulau Jawa, pemerintah militer masih mengizinkan tetap berdirinya satu organisasi Islam dari zaman Hindia Belanda yaitu *Majelis Islam A'la Indonesia* (MIAI) yang didirikan di Surabaya pada tahun 1937 oleh K.H. Mas Mansur dan kawan-kawan.

---

[91] G. S. Kanahele, *op. cit.*, 1969, hlm. 74

Pada awal pendudukannya, pihak Jepang membentuk Bagian Pengajaran dan Agama di bawah pimpinan Kolonel Horie yang memulai aktivitasnya dari Jawa Timur. Pada bulan Mei 1942 ia mengadakan pertemuan khusus dengan sejumlah pemuka agama Islam dari seluruh Jawa Timur di Surabaya.[92] Dalam pertemuan dengan pemuka agama ini, Horie menyatakan bahwa ia ingin berkenalan dengan para pemuka agama dan menjelaskan sikap Jepang terhadap agama Islam. Ia meminta agar umat Islam tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat politik. Setelah pertemuan berakhir, organisasi Islam menyatakan diri tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan politik. Partai Islam Indonesia pimpinan dr. Sukiman telah menyatakan akan menghentikan semua aktivitasnya.[93] Hasil pertemuan di Surabaya itu ditingkatkan pada akhir Desember 1942 dengan mengundang sejumlah 32 kiai dari seluruh Jawa untuk menghadap Panglima Tentara Ke-16 Letnan Jenderal Imamura. Dalam pertemuan itu, baik Jenderal Imamura maupun *Gunseikan* Mayor Jenderal Okazaki, menyatakan bahwa Jepang akan tetap menghargai Islam di dalam pemerintahan. Dalam pidato balasannya K.H. Mas Mansur menyatakan terima kasihnya kepada pemerintah Jepang karena akan mengikutsertakan para kiai di dalam pemerintahan tanpa membedakan tamatan pesantren maupun tamatan sekolah.

Mula-mula Jepang memilih MIAI sebagai wadah golongan Islam yang merupakan satu-satunya organisasi gabungan, yang memiliki umat Islam. Namun, MIAI baru diakui oleh Pemerintah Militer Jepang sesudah mengubah anggaran dasar (asas dan tujuannya). Pada asas dan tujuan MIAI ditambahkan kalimat "turut bekerja dengan sekuat tenaganya dalam pekerjaan membangunkan masyarakat baru, untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon". Pada tahap pertama, pengaktifan kembali MIAI agaknya diserahkan kepada Wondoamiseno dan dibantu oleh para kiai terkenal seperti K.H. Mas Mansur sebagai Ketua Muda dan K.H. Taufiqurrachman sebagai penasihat. Untuk mengembangkan MIAI ini, di setiap daerah *sy¤* dibentuk majelis konsul. Kegiatan MIAI yang sangat menonjol adalah membentuk *baitul mal* yang berkembang pesat di daerah-daerah. Kolonel Horie sebagai pejabat yang menangani masalah-masalah keagamaan berusaha terus untuk menggarap kiai yang berada di daerah Jawa Barat. Pada bulan Januari 1943, secara berturut-turut Horie mengadakan pertemuan di beberapa kota kabupaten.[94] Ia mengerahkan para pembantunya orang Jepang Islam seperti Abdul

---

92 *Soeara MIAI*, th. I, no. 1, 1 Januari 2603 (1943), hlm. 7

93 *Ibid.*, hlm. 6

94 *Asia Raja*, 25 Januari 1943

(a)

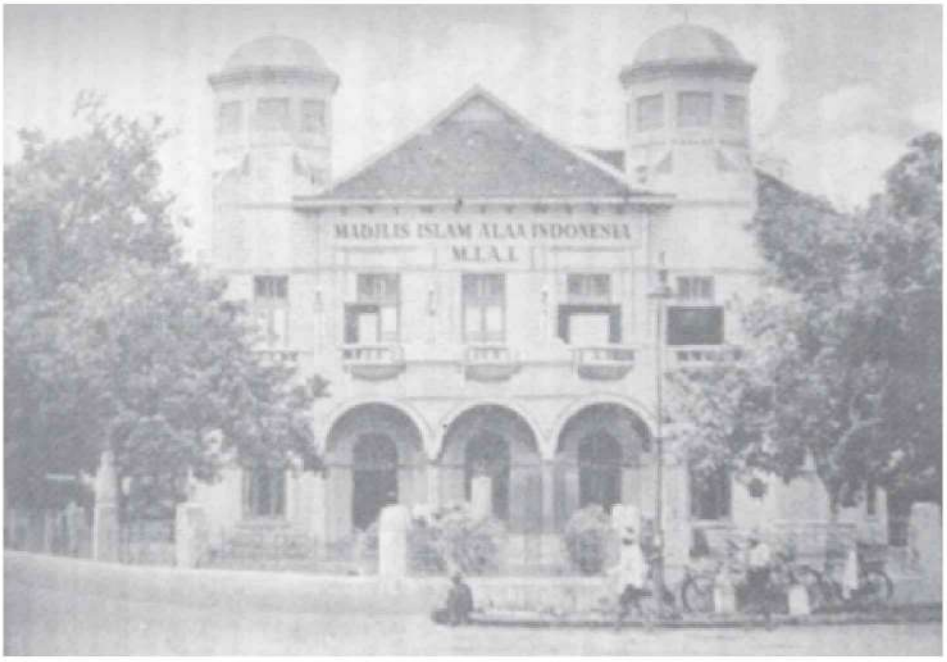

(b)

Gambar 1.10 (a) Kepala Bagian Pengajaran dan Agama Kolonel Horie; **(b)** Gedung MIAI, Jalan Imamura (sekarang Jalan Teuku Umar) No. 1 Jakarta (Sumber: A. Mansur Suryanegara, *Pemberontakan Tentara PETA di Cileunca, Pengalengan, Bandung Selatan*)

Muniam Inada serta Moh. Sayido Wakas, agar secara bergilir mengunjungi beberapa masjid besar yang ada di Jakarta untuk mengadakan ceramah dan khotbah Jumat.[95]

MIAI sebagai organisasi tunggal golongan Islam, mendapat simpati yang luar biasa dari kalangan umat Islam. Kegiatan-kegiatannya dalam membentuk *baitul mal*, melaksanakan peringatan hari besar Islam, menyebabkan MIAI menjadi semakin maju. Sejak awal 1943 MIAI diperbolehkan menerbitkan majalah sebagai sarana komunikasinya yaitu *Soeara* MIAI. Beberapa menyalurkan gagasan dan idenya di majalah ini. Pihak Jepang waspada terhadap pertumbuhan MIAI yang dalam waktu singkat begitu besar. Para tokoh MIAI di daerah-daerah mulai diawasi. Untuk meyakini bahwa pemuka agama di daerah-daerah tidak berbahaya bagi mereka, oleh Pemerintah Pendudukan diselenggarakan pelatihan kiai. Para kiai peserta pelatihan ini harus dipilih dan disaring melalui syarat-syarat: mempunyai pengaruh terhadap lingkungan dan mempunyai watak yang baik. Lama pelatihan satu bulan, bertempat di Balai Urusan Agama di Jakarta. Dari setiap *syū* dikirimkan dua orang peserta. Pada angkatan pertama pelatihan ini para pesertanya dipilih sendiri oleh *kencō*. Selama tahun 1943, telah selesai tiga angkatan, yakni pada bulan Juli, Agustus, dan September. Pada tahun berikutnya pelatihan kiai diadakan secara lokal karena pelatihan tingkat pusat sudah dianggap cukup. Dari hasil pelatihan kiai itu pemerintah Jepang berkesimpulan bahwa para kiai tidak membahayakan bagi dirinya.

Pada bulan September 1943, dua organisasi Islam yakni *Nahdatul Ulama* dan *Muhammadiyah* diizinkan berdiri kembali untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bidang kerohanian dan sosial. MIAI bagi Jepang masih kurang memuaskan karena menurut seleranya kegiatan-kegiatannya terbatas. Pada bulan Oktober 1943, secara resmi MIAI dibubarkan dan diganti dengan organisasi baru yang bernama *Majelis Sjoero Moeslimin Indonesia* (*Masjoemi*) yang disahkan *Gunseikan* pada 22 November 1943 dengan pimpinan Ketua Pengurus Besar K.H. Hasjim Asj'ari, dengan wakil dari Muhammadiyah K.H. Mas Mansur, K.H. Farid Ma'ruf, K.H. Mukti, K.H. Wahid Hasjim, Kartosudarmo, dan dari NU K.H. Nachrowi, Zainul Arifin, dan K.H. Muchtar.[96]

Selanjutnya Ketua Masyumi, K.H. Hasjim Asj'ari diangkat menjadi penasihat *Gunseikan*. Di dalam badan-badan seperti *Chūō Sangi In* maupun *Syū Sangikai* banyak tokoh Islam yang duduk sebagai anggota. Jika dalam

[95] *Soeara Asia*, 7 Mei 1943

[96] *Asia Raja*, 28 November 1943

(a)

(b)

Gambar 1.11 (a) Ketua Pengurus Besar Masjoemi K.H. Hasjim Asj'ari; **(b)** K.H. Wahid Hasjim salah seorang wakil Pengurus Besar Masjoemi (Sumber: A. Mansur Suryanegara, *Pemberontakan PETA di Cileunca, Pengalengan, Bandung Selatan*)

masa pemerintah Belanda, dalam badan legislatif yang terdiri dari 60 anggota, golongan Islam hanya diwakili oleh seorang wakil, pada zaman Jepang dalam *Chūō Sangi In* yang beranggotakan 43 orang, golongan Islam diwakili oleh 6 orang tokoh Islam, di antaranya K.H.A. Halim, ulama dari Cirebon, K.H. Wahid Hasjim, Ketua Nahdlatul Ulama, dan K.H. Fatchurrachman pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur.

Jelaslah bahwa pada zaman Jepang golongan Islam secara relatif lebih leluasa bergerak daripada pada zaman Hindia Belanda. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa golongan Islam selalu mengekor kepada pemerintah Jepang. Banyak hal-hal yang dipraktikkan oleh Jepang yang berlawanan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hal ini menyebabkan sebagian tokoh Islam menarik diri dari kerja sama dengan Jepang, bahkan telah pula timbul pemberontakan yang dipimpin golongan ulama seperti yang terjadi di Singaparna, Indramayu, dan Aceh.

C. Mobilisasi Rakyat

1. Pengerahan Pemuda

Golongan yang terutama mendapat perhatian dari Pemerintah Pendudukan Jepang adalah golongan pemuda. Mereka berasal dari lingkungan sosial yang berbeda-beda, ada yang berasal dari kota dan ada pula yang berasal dari desa. Ada yang mendapat pendidikan yang cukup, misalnya pernah duduk di sekolah menengah, tetapi ada juga yang pendidikannya tidak seberapa lanjut, yakni hanya berpendidikan sekolah dasar. Perhatian Jepang dicurahkan kepada kaum muda ini karena mereka pada umumnya memiliki sifat yang giat, penuh semangat, dan biasanya masih diliputi idealisme. Mereka dianggap belum sempat dipengaruhi oleh alam pikiran Barat. Oleh karena memiliki sifat-sifat yang demikian, segala propaganda dari pihak Jepang diduga akan mudah ditanamkan kepada mereka. Misalnya, propaganda yang dilancarkan Jepang pada waktu pembentukan Gerakan Tiga A seperti yang dikemukakan oleh ketuanya, Mr. Samsuddin, yang antara lain menyatakan bahwa orang Barat telah berabad-abad lamanya menjajah Asia sehingga rakyat menderita. Berkat Jepanglah penjajahan itu berhasil dihapuskan, sebab Jepang adalah "Cahaya Asia, Pemimpin Asia, Pelindung Asia".[97]

Propaganda semacam itu mereka duga akan mudah ditangkap dan dimengerti oleh kaum muda. Apalagi Jepang sering mengemukakan bahwa Jepang adalah orang Asia dan sebagai orang Asia mereka senasib dengan

[97] *Pandji Poestaka*, 2 Mei 2602 (1942), no. 4, hlm. 118

orang-orang Asia lainnya yang dianggap sebagai saudara mudanya. Dengan propaganda yang demikian pada mulanya pemuda tidak merasakan adanya perbedaan antara orang Jepang dan orang Indonesia. Semboyan-semboyan seperti "Jepang-Indonesia sama-sama" atau "Jepang saudara tua" memukau golongan muda khususnya dan masyarakat luas umumnya. Persamaan dengan Jepang itu dianggap sebagai perubahan baru dari keadaan pada masa pemerintahan Kolonial Belanda ketika diskriminasi rasial jelas terasa.

Sehubungan dengan sifat kaum muda itu, pelajaran yang ditekankan kepada mereka ialah *seishin* (semangat) atau *bushido* (jiwa satria) yang meliputi kesetiaan dan bakti kepada tuan atau pemimpinnya. Selain itu, ditekankan pula perlunya disiplin dan diberantasnya rasa rendah diri serta semangat budak.[98] Tanpa dikehendaki oleh pihak Jepang, penanaman semangat yang demikian itu ternyata menguntungkan pemuda Indonesia ketika kelak mereka berjuang mempertahankan kemerdekaan. Semangat itu bahkan juga menjiwai pemuda Indonesia ketika melawan Jepang sendiri, misalnya dalam Pemberontakan Peta di Blitar dan pada awal Perang Kemerdekaan pada tahun 1945.

Salah satu sarana yang dipakai untuk memengaruhi kaum muda ialah sarana pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan khusus. Yang dimaksud dengan pendidikan umum ialah, sekolah rakyat (sekolah dasar) dan sekolah menengah. Pendidikan khusus yang dimaksudkan adalah pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Jepang.

Di antara pusat-pusat pelatihan yang diadakan Jepang untuk menanamkan semangat pro-Jepang di kalangan kaum muda ialah Barisan Pemuda Asia Raya (BPAR). BPAR dimulai dari tingkat pusat di Jakarta. Sebenarnya di daerah juga telah dibentuk Komite Penginsyafan Pemuda yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur kepanduan.[99] Bentuk komite seperti itu sifatnya sangat lokal dan disesuaikan dengan situasi daerah masing-masing. Di tingkat pusat BPAR diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dengan dipimpin oleh dr. Slamet Sudibyo dan S.A. Saleh. BPAR adalah anak Gerakan Tiga A; sekalipun demikian organisasi BPAR ini lebih populer daripada induknya. Melalui BPAR kaum muda mengikuti pelatihan selama tiga bulan. Kepada para peserta pelatihan ditekankan pentingnya semangat, kemauan, dan keyakinan karena mereka diharapkan akan menjadi pemimpin pemuda-pemuda yang lain. Terhadap pemuda tidak dilakukan pembatasan. Artinya setiap pemuda boleh mengikuti pelatihan tersebut.[100]

---

[98] O.D.P. Sihombing, *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Djepang*, 1962, hlm. 93

[99] *Asia Raja*, 8 Juni *1942*

[100] *Almanak Asia Raja*, 2603 (1943), hlm. 761

Di samping BPAR pemerintah Jepang mengadakan pelatihan lain yang dilakukan oleh Gerakan Tiga A, yaitu yang disebut *San A Seinen Kunrenshō*. Di tempat ini kaum pemuda mengikuti pelatihan selama ½ bulan. Berbeda dengan kursus di atas, pelatihan ini lebih bersifat khusus, yaitu ditujukan kepada para pemuda yang pernah turut dalam salah satu organisasi, misalnya kepanduan. Mereka ditempatkan dalam asrama. Selain pendidikan yang berhubungan dengan disiplin dan semangat, kepada mereka juga diajarkan pekerjaan praktis sehari-hari, seperti memasak, membersihkan rumah, serta berkebun. Selain itu, juga diajarkan bahasa Jepang.[101] Pendidikan untuk kaum pemuda ini diadakan atas prakarsa H. Shimizu dan Wakabayashi. Pada tahap pertama dilatih sejumlah 250 pemuda.[102] Pelatihan semacam ini juga diadakan di Yogyakarta.

Pendidikan pemuda semacam itu menjadi intensif, perkumpulan-perkumpulan kepanduan masih diperkenankan berdiri dan melakukan kegiatan. Kegiatan besar kepanduan adalah Perkemahan Kepanduan Indonesia (Perkindo) yang diadakan di Jakarta, bahkan pernah mendapat kunjungan dari *Gunseikan* dan Empat Serangkai dari Poetera.

Situasi perang sejak tahun 1942 mulai berubah. Dari sikap ofensif, Jepang beralih ke sikap defensif. Pukulan-pukulan Sekutu di wilayah Pasifik mulai dirasakan terutama sejak pertempuran di Laut Karang (Mei 1942) dan Guadalcanal (Agustus 1942). Jepang menyadari bahwa untuk dapat mempertahankan daerah pendudukannya yang luas itu mereka memerlukan dukungan dari penduduk di daerah masing-masing. Medianya antara lain olahraga. Pada tahun 1942 dibentuk Perserikatan Olahraga Pulau Jawa (*Tai Iku Kai*). Pendidikan jasmani berupa *taiso* (senam pagi ala Jepang) diiringi lagu yang diberikan di sekolah-sekolah. Selain itu, Jepang mewajibkan pelajar-pelajar baris-berbaris dan pelatihan perang-perangan yang disebut *kyoreng*, bela diri seperti *sumo, kendo,* dan *base ball* diperkenalkan oleh tentara Jepang. Organisasi olahraga baru dibentuk yaitu Gerakan Latihan Olahraga Organisasi Rakyat (GLORA) di bawah pimpinan R. Oto Iskandar Dinata, tetapi akhirnya dilarang.

Masa itu banyak menghasilkan bibit unggul dalam bulu tangkis seperti Sudirman, Basrul Jamal, Oei Hok Tjoan, Liem Soei Liong, dan Napsirin. Namun, hanya sepak bola dan bulu tangkis yang dapat berkembang, sedangkan yang lain tidak berkembang karena sulitnya kehidupan masyarakat.

---

[101] *Pandji Poestaka,* no. 13, 4 Juli 2602 (1942), hlm. 439–440

[102] *Asia Raja,* 26 Juni 1942

Pada awal 1943 Jepang mulai lebih intensif mengumpulkan dan mendidik kaum muda Indonesia di semua *syū*. Bahkan, di Jakarta *syū* di setiap *gun* diadakan pendidikan pemuda. Semua usaha mengadakan gerakan pemuda lokal itu adalah dalam rangka persiapan membentuk gerakan pemuda yang terpusat dan di bawah satu pucuk pimpinan. Dalam masa persiapan ini pelbagai janji dan harapan bagi pemuda disiarkan secara luas.

2. Organisasi Semimiliter

Pada tanggal 29 April 1943, tepat pada hari ulang tahun Kaisar Jepang diumumkan secara resmi berdirinya dua organisasi pemuda yang diberi nama *Seinendan* dan *Keibōdan*. Kedua organisasi ini langsung di bawah pimpinan *Gunseikan*. Persyaratan untuk menjadi anggota *Seinendan* tidak begitu sulit. Semula anggotanya tercatat sebanyak 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa.[103] Jumlah ini berkembang menjadi kira-kira 500.000 orang pemuda pada akhir masa pendudukan Jepang.[104] Secara resmi disebutkan bahwa pembentukan itu bertujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Maksud yang disembunyikan ialah agar dengan demikian memperoleh tenaga cadangan untuk memperkuat usaha mencapai kemenangan akhir dalam perang saat itu.[105]

Kepada anggota *Seinendan* diberikan pelatihan-pelatihan militer, baik untuk mempertahankan diri maupun untuk penyerangan.[106] Mereka adalah pemuda-pemuda Asia yang berusia antara 15–25 tahun (kemudian diubah menjadi 14–22 tahun). Sebagai pembina *Seinendan* bertindak *Naimubu bunkyōku* (Departemen Urusan Dalam Negeri Bagian Pengajaran, Olahraga, dan *Seinendan)*. Pimpinan eksekutif di daerah *syū* adalah *syūcōkan* sendiri. Demikian pula pada daerah yang tingkatnya di bawah *syū* para kepala daerah menjadi pimpinan langsung *Seinendan*. *Seinendan* hanyalah suatu organisasi pemuda pada tingkat daerah (kecamatan). *Seinendan* ini tidak semata-mata dibentuk di desa-desa atau sekolah-sekolah, tetapi juga di pabrik-pabrik atau perumahan-perumahan. Motivasi pemuda menjadi *Seinendan* semula dipaksa kemudian pemuda-pemuda lainnya mengikuti latihan *Seinendan*.[107] Pada bulan Oktober 1944 dibentuk *Josyi Seinendan*

---

[103] *Kan Pō*, no. 10, th. II. 10 Januari 2603 (1943), hlm. 43

[104] Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta ...*, 1974, hlm. 44

[105] *Djawa Seinendan*, 2603 (1943)

[106] *Atoeran-atoeran tentang Seinendan*, 2605 (1945), hlm. 36–40

[107] Wawancara dengan Bapak Kemal Idris tanggal 21 Januari 1986 dalam buku Arsip Nasional Republik Indonesia, *Di Bawah Pendudukan Jepang ...*, hlm. 62

(*Seinendan* Putri). Untuk menyukseskan organisasi *Seinendan*, pemerintah Jepang memperluas *Seinen Kunrensyō* (lembaga pelatihan-pelatihan pemuda) menjadi *Cūō Seinen Kunrensyō* (lembaga pusat pelatihan pemuda). Di lembaga inilah kader-kader pimpinan *Seinendan* daerah dilatih. Di sini mereka mendapat latihan dasar kemiliteran tetapi tanpa menggunakan senjata yang sebenarnya. Di dalam rangka perang, *Seinendan* merupakan barisan cadangan yang mengamankan garis belakang.

Keibōdan adalah pembantu polisi dengan tugas-tugas kepolisian seperti: penjagaan lalu lintas dan pengamanan desa. Berbeda dengan *Seinendan*, anggota *Keibōdan* terdiri dari pemuda-pemuda yang berusia 20–35 tahun (kemudian diubah menjadi 26–35 tahun). Yang dapat diterima sebagai anggota *Keibōdan* ialah semua laki-laki dari setiap *ku* (desa), yang dinyatakan berbadan sehat, kuat, dan berkelakuan baik. Jumlah pemuda yang memasuki *Keibōdan* melebihi jumlah *Seinendan.* Jumlahnya meliputi kira-kira lebih dari satu juta orang pemuda.[108] Sebagian pemuda masuk *Keibōdan* karena takut kepada Jepang dan pamong yang berhasil mengumpulkan mereka dengan paksa.[109] Pembina *Keibōdan* adalah *Keimubu* (Departemen Kepolisian) dan di daerah *syū* dibina oleh *Keisatsubu* (bagian Kepolisian) dan seterusnya di bawah tingkat *syū*, *Keibōdan* dibawahkan kepada kepolisian; kepala polisi daerah bertanggung jawab mengenai *Keibōdan* di daerahnya. Untuk meningkatkan mutu *Keibōdan* dilakukan pelatihan khusus untuk para kader bertempat di Sekolah Polisi Sukabumi. Di kalangan penduduk Cina dibentuk semacam *Keibōdan* dengan nama *Kayō Keibōtai.*

Satu hal yang perlu dicatat dalam pembentukan *Keibōdan* ialah bahwa Jepang berusaha agar badan ini tidak dipengaruhi oleh kaum nasionalis. Hal itu terlihat dari kenyataan bahwa *Keibōdan* dibentuk di desa-desa yang kaum nasionalisnya kurang mempunyai pengaruh. Bahkan kaum nasionalis dari eselon bawah pun tidak mempunyai hubungan dengan *Keibōdan* karena badan ini langsung ditempatkan di bawah pengawasan polisi. Hal itu berbeda dengan *Seinendan.* Dalam badan ini kaum nasionalis dapat menanamkan pengaruhnya dan dengan demikian dapat mengisi jiwa pemuda dengan semangat nasionalisme. Bahkan, di markas besar *Seinendan* duduk beberapa orang nasionalis muda seperti Sukarni dan Abdul Latief Hendraningrat.[110]

Selain di Jawa, kedua badan ini dibentuk pula di Sumatra dan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut. Di Sumatra, *Keibōdan* dikenal dengan nama *Bōgōdan.* Berbeda dengan di Jawa, di

---

[108] Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta* ..., hlm. 44

[109] Arsip Nasional Republik Indonesia, *op. cit.*, 1988, hlm. 62–63

[110] G.S. Kanahele, *op. cit.*, 1969, Bab IV

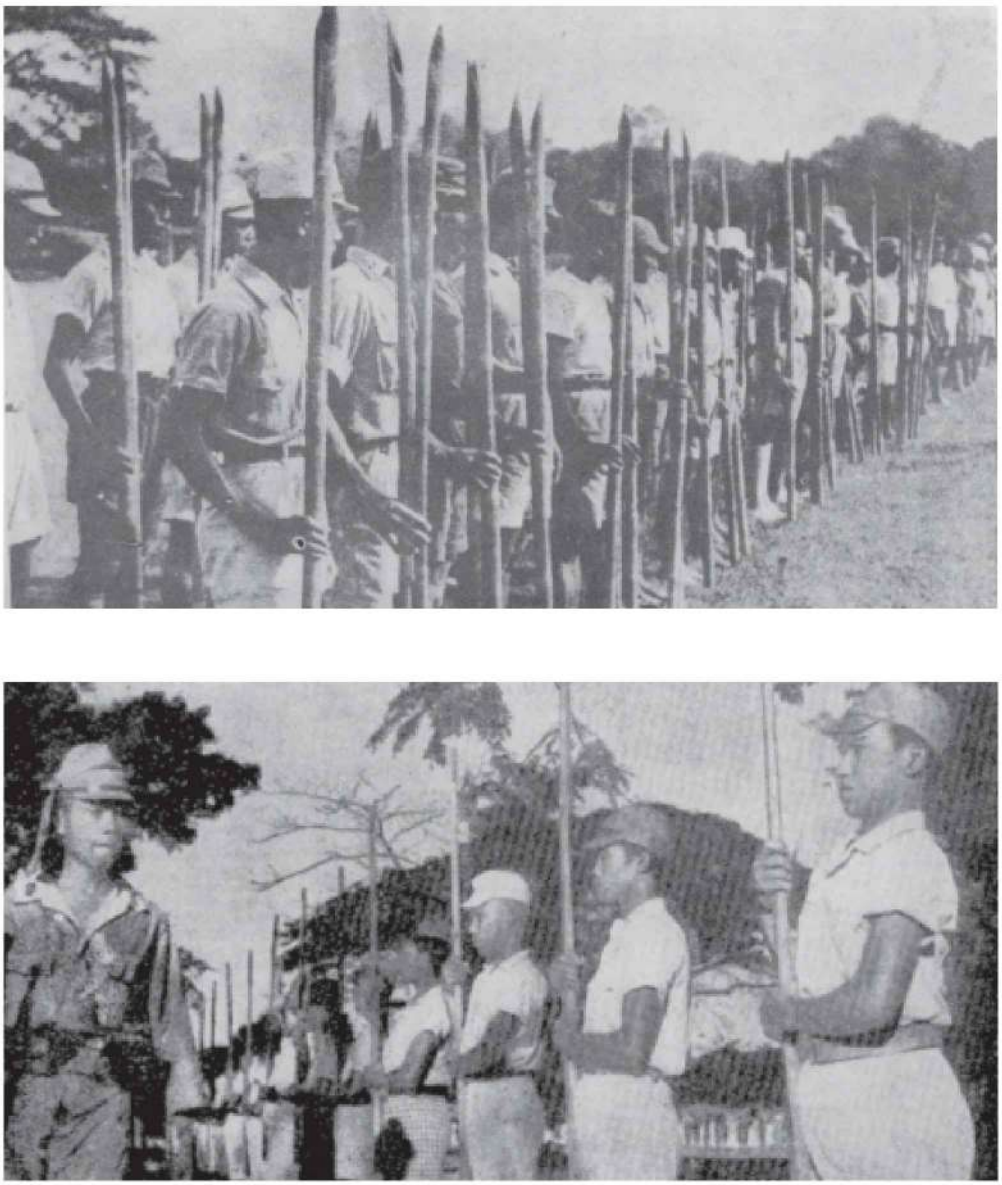

Gambar 1.12 Latihan *Seinendan* (Sumber: *Djawa Baroe*)

Sumatra tidak terdapat suatu markas pusat. Tiap-tiap *syu* memimpin langsung organisasi sedaerah. Hal yang sama terdapat pula di daerah yang dikuasai Angkatan Laut. Di Kalimantan terdapat badan yang disebut *Borneo Konan Hōkōkudan*.

Hal penting lain yang menyangkut *Seinendan* dan *Keibōdan* ialah, badan-badan ini dibentuk meliputi seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok kecil walaupun dengan nama yang berlain-lainan. Belum pernah dalam sejarah Indonesia sebelumnya terjadi pengorganisasian pemuda secara besar-besaran seperti itu.

Pengerahan tenaga untuk kaum perempuan pun diadakan. Untuk keperluan itu dalam bulan Agustus 1943 dibentuk *Fujinkai* (Himpunan Perempuan). Dalam keanggotaan, batas umur maksimum tidak ditentukan, tetapi batas minimum ditetapkan, yaitu 15 tahun.[111] Kepada kaum perempuan ini juga diberikan pelatihan-pelatihan dasar militer. *Fujinkai* mengadakan hubungan dengan *Seinendan* dan *Keibōdan* dan sama halnya dengan kedua badan semimiliter ini, pembentukannya dimaksudkan membantu usaha perang Jepang di garis belakang, sesuai dengan kedudukan perempuan. *Fujinkai* mengadakan kursus-kursus dan ceramah-ceramah dalam usahanya menggiatkan usaha menabung, meningkatkan kesehatan dan makanan serta kepalangmerahan. Dalam usaha membantu memajukan pendidikan, *Fujinkai* bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau mengadakan ceramah-ceramah di lingkungan rumah.

Memasuki tahun 1944, keadaan perang bagi Jepang semakin gawat. Satu demi satu daerah Pendudukan Jepang jatuh ke tangan Sekutu dan serangan mulai diarahkan langsung ke negeri Jepang sendiri. Dalam suasana yang demikian itu, pemerintah Jepang membentuk barisan semimiliter lainnya seperti Barisan Pelopor atau *Suishintai* pada tanggal 1 November 1944.[112]

Barisan Pelopor dibentuk sebagai hasil sidang ke-3 *Chūō Sangi In* pada pertengahan tahun 1944. Pada sidang itu *Saikō Shikikan* mengajukan pertanyaan bagaimana cara memperdalam keinsafan rakyat terhadap kewajibannya dan membangunkan persaudaraan segenap rakyat. *Chūō Sangi In* memberikan jawaban agar membentuk satu badan yang dapat mempersatukan seluruh penduduk untuk bersama-sama menggiatkan usaha dalam kemenangan akhir. Salah satu di antaranya ialah Barisan Pelopor yang merupakan organisasi pemuda pertama yang dibimbing oleh kaum nasionalis Indonesia. Barisan Pelopor ini dipimpin oleh Ir. Soekarno, wakilnya R.P. Suroso, Oto Iskandar Dinata, dan dr. Buntaran Martoatmodjo.

---

[111] *Kan Pō*, no. 26, th. 11, 10 September 2603 (1943)

[112] Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta ...*, hlm. 74

Jumlah anggotanya diperkirakan meliputi 60.000 orang.[113] Kekuatannya terletak di kota-kota besar, antara lain di Jakarta. Barisan Pelopor ini dapat dianggap sebagai "onderbouw" dari *Jawa Hōkōkai.*

Sebagai suatu kekuatan semimiliter, Barisan Pelopor melatih para pemuda, dengan pelatihan-pelatihan militer walaupun senjata yang dimiliki adalah senapan kayu atau bambu runcing. Mereka juga dikerahkan untuk mendengarkan pidato dari pemimpin-pemimpin nasionalis dan bahkan kepada mereka dianjurkan agar meneruskan pidato-pidato itu kepada rekannya yang tidak hadir. Selain itu, mereka juga dilatih dalam cara-cara menggerakkan massa rakyat, memperkuat pertahanan, dan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Melalui *Barisan Pelopor* ini pemuda-pemuda terpelajar yang bekerja di *Hōkōkai* akhirnya terjun dalam kegiatan-kegiatan di antara massa rakyat dan sebaliknya pemuda-pemuda tidak terpelajar atau pemuda-pemuda golongan bawah yang berpendidikan rendah di antaranya pengangguran, bahkan orang-orang yang disebut jagoan (jawara) dapat menyesuaikan diri dengan pemuda terpelajar untuk bersama-sama mengobarkan semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan.[114]

Selain itu, terdapat pula Barisan Pelopor Istimewa milik *Jawa Hōkōkai*, di bawah pimpinan Sudiro yang juga pengawal dan utusan pribadi Soekarno. Barisan ini terdiri dari sekitar 100 orang pemuda yang dipilih dari beberapa asrama pemuda, terutama Asrama Menteng 31, Jakarta. Di antara mereka adalah Supeno, D.N. Aidit, Djohar Nur, Asmara Hadi, Sidik Kertapati, dan Inu Kertapati.[115]

Pemuda-pemuda lainnya adalah mereka yang tergabung di dalam Barisan Berani Mati (*Jibakutai*). Barisan ini rupanya mendapat inspirasi dari pilot *Kamikaze* yang sanggup mengorbankan nyawanya dengan jalan menubrukkan pesawatnya kepada kapal perang musuh. Meskipun barisan ini dipersiapkan untuk membantu Jepang dalam menghadapi musuh (Sekutu), pemuda-pemuda Indonesia dalam *Jibakutai* bertekad menghadapi musuh dari pihak mana pun yang nanti mengancam kemerdekaan negaranya.

Pada tanggal 15 Desember 1944 diresmikan pembentukan barisan semimiliter lainnya, yakni *Hizbullah* (*Tentara Allah*) yang dalam bahasa Jepang disebut *Kaikyō Seinen Taishintai.* Jika Barisan Pelopor dan Barisan Pelopor

---

[113] Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta ...*, hlm. 46

[114] R.O.G. Benedict Anderson, *Some Aspects of Indonesian Politics Under The Japanese Occupation, 1944–1945*, 1961, hlm. 30; Ben Anderson, *Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944–1946* (terjemahan Jiman Rambo), 1988, hlm. 46

[115] Nugroho Notosusanto, *op cit.*, 1979, hlm. 74

Istimewa milik *Jawa Hōkōkai*, lain halnya dengan *Hizbullah* yang berada di bawah naungan Masyumi. Pimpinan keseluruhan barisan ini ialah Zainal Arifin, seorang tokoh NU. Melalui *Hizbullah*, Jepang masih berharap agar propaganda tentang "perang suci" akan mendapat dukungan dari pemuda-pemuda Islam.[116] Pemuda-pemuda yang diterima sebagai anggota *Hizbullah* adalah mereka yang berumur antara 17 dan 25 tahun dan belum berkeluarga. Mereka dilatih oleh beberapa perwira Peta dari golongan Islam karena *Hizbullah* dimaksudkan sebagai korps cadangan Peta. Setiap *syū* di Jawa diharuskan mengirimkan 25 calon untuk dilatih.[117] Pelatihan yang dipercayakan kepada Kapten Yanagawa, yang berhasil melatih pemuda di *Seinen Dōjō* dan kemudian di pelatihan Peta, dimulai pada bulan Februari 1945 di Cibarusa, Jawa Barat dan diikuti oleh 500 orang. Setelah mengikuti pelatihan selama dua bulan, mereka dikembalikan ke daerah untuk melatih calon-calon anggota *Hizbullah* di daerah masing-masing.

Terdapat pula barisan semimiliter yang terdiri dari kaum pelajar. Berbeda dengan barisan-barisan yang disebutkan sebelumnya, anggota *Gakutotai* (Korps Pelajar) berjumlah paling kecil. Pelatihan dasar militer hanya diadakan sekali dalam seminggu selama 2 jam.[118]

3. Organisasi Militer

Pengerahan kaum pemuda dan kaum pelajar dalam barisan-barisan semimiliter itu sepenuhnya mendukung Jepang yang menderita kekurangan *man power* sejak dilakukan ofensif militernya. Sejak awal masa pendudukan, pemerintah Jepang telah mulai memikirkan usaha untuk memberi pelatihan-pelatihan militer kepada penduduk Indonesia yang dapat dimanfaatkan guna mempertahankan negeri-negeri yang telah mereka duduki.

Dalam bulan April 1943 dikeluarkan pengumuman yang isinya memberi kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang (*Heihō*). Para *Heihō* adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut.[119] Syarat-syarat penerimaan ialah berbadan sehat, berkelakuan baik, berumur antara 18–25 tahun, dan pendidikan terendah ialah sekolah dasar.[120] Jumlah *Heihō* sejak mulai didirikan pada tahun 1943 sampai berakhirnya masa pendudukan Jepang diperkirakan sebanyak 42.000

---

[116] Theodore Friend, *The Blue Eyed Enemy: Japan Against the West in Java and Luzon*, 1976, hlm. 97

[117] Ben Anderson, *Revolusi Pemuda ...*, hlm. 32–33

[118] Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta ...*, hlm. 47

[119] *Kaigun Heihō*

[120] *Asia Raja*, 24 April 2603 (1943)

orang (Jawa 24.873, Timor 2.504, dan daerah lain 15.000).[121] Menurut orang Jepang anggota *Heihō* lebih terlatih di dalam bidang militer daripada tentara Pembela Tanah Air (Peta), karena kedudukannya sebagai prajurit Jepang di medan perang. Di antaranya terdapat anggota *Heihō* sebagai pemegang senjata anti-pesawat terbang, tank, artileri medan, dan pengemudi. Akan tetapi, tidak seorang *Heihō* pun yang berpangkat perwira. Pangkat perwira hanya tersedia untuk tentara Jepang. Hal ini berbeda dengan tentara Peta.[122]

Di lingkungan Tentara Ke-16 di Jawa-Madura, instansi yang mula-mula ditugaskan untuk membentuk dan melatih Tentara Peta adalah suatu seksi khusus Bagian Intelijen (Seksi Khusus = *Tōkubetsu Han*, disingkat Beppan). Sebelum perintah pembentukan Peta dikeluarkan, Beppan melatih pemuda-pemuda Indonesia untuk tugas intelijen. Pelatihan yang dipimpin oleh Letnan Yanagawa akhirnya berkembang di dalam penyelenggaraan latihan secara khusus dalam *Seinen Dōjō* (Panti Pelatihan Pemuda) yang terletak di Tangerang. Pelatihan ini dibuka pada awal tahun 1943 dan diikuti oleh 40 orang dari seluruh Jawa. Sesuai dengan kurikulum di *Seinen Dōjō* mereka mendapat kuliah umum (a.l. semangat, situasi dunia, sejarah perang), pelajaran khusus (a.l. spionase), pelajaran praktis (a.l. senam, gulat sumo, dan berenang), pengetahuan teknis (a.l. menembak), bahkan *widya wisata* ke perkebunan dan pabrik-pabrik), dan kegiatan ekstrakurikuler seperti menyanyikan lagu-lagu perang.[123]

Pada pertengahan tahun ini juga berlangsung pelatihan angkatan kedua yang dipimpin oleh perwira lain dan berakhir pada bulan Oktober 1943 bersamaan dengan dimulainya pendidikan calon perwira Peta di Bogor. Lulusan pertama *Seinen Dōjō* yang berjumlah kira-kira 100 orang itu dapat dianggap pendahulu korps perwira Peta. Di antara lulusan angkatan pertama *Seinen Dōjō* adalah Umar Wirahadikusuma (pangkat terakhir Jenderal TNI dan Wakil Presiden RI), A. Kemal Idris (pangkat terakhir Letnan Jenderal TNI, mantan Panglima Komando Wilayah Pertahanan Sulawesi dan mantan Duta Besar RI di Yugoslavia). R.A. Kosasih (pangkat terakhir Letnan Jenderal, mantan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional, yang sebelumnya menjabat Duta Besar RI di Australia), termasuk lulusan angkatan kedua *Seinen Dōjō*. Selain itu, Daan Mogot, yang kemudian menjadi komandan pendidikan perwira Indonesia yang pertama di Tangerang (didirikan tanggal 18 November 1945), dan gugur dalam pertempuran Serpong melawan Jepang.

---

[121] Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta ...*, hlm. 56

[122] O.D.P. Sihombing, *Pemuda Indoenesia Menentang Fasisme Djepang*, 1967, hlm. 140–141

[123] Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, 1979, hlm. 62

Menjelang berakhirnya pelatihan angkatan ke-2, keluar perintah pembentukan tentara Peta yang ditugaskan kepada Beppan. Panglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada memutuskan agar pembentukan Tentara Peta dibuat sedemikian rupa, sehingga seolah-olah merupakan usul dari bangsa Indonesia sendiri. Untuk itu, dicari pribadi yang cocok dan akhirnya dipilih seorang pemimpin nasionalis Indonesia, yakni Gatot Mangkupradja yang dianggap bersimpati kepada Jepang, untuk mengajukan permohonan kepada *Gunseikan* supaya dibentuk sebuah tentara yang segenap anggotanya terdiri atas orang Indonesia.[124] Gatot Mangkupradja melaksanakan apa yang disarankan itu dan menulis surat yang dikirimkan pada tanggal 7 September 1943. Permohonannya tidak lama kemudian dikabulkan dengan dikeluarkannya sebuah peraturan dengan sebutan *Osamu Seirei* No. 44 pada tanggal 3 Oktober 1943. Peraturan itu menetapkan dibentuknya Tentara Peta secara formal.[125] Perhatian masyarakat terhadap Peta ternyata sangat besar, terutama dari pemuda-pemuda yang telah mendapat pendidikan sekolah menengah dan tergabung dalam *Seinendan*.[126]

Pengerahan tenaga-tenaga di dalam Peta ditempuh melalui pangkat yang berbeda. Ada lima macam pangkat di dalam Peta yang sesungguhnya adalah nama untuk jabatan, yakni: *daidanchō* (komandan batalion), *cūdanchō* (komandan kompi), *shōdanchō* (komandan peleton), *budanchō* (komandan regu), dan *giyuhei* (prajurit sukarela).

Anggota Peta berasal dari pelbagai golongan dalam masyarakat. Perwira-perwira yang menjadi komandan batalion atau *daidanchō* dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang terkemuka di daerahnya seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama atau ulama, pamong praja, politikus, dan penegak hukum. *Cudanchō* atau komandan kompi dipilih dari kalangan mereka yang telah bekerja, tetapi belum mencapai pangkat dan jabatan yang tinggi, seperti guru-guru sekolah atau juru tulis. *shōdanchō* atau komandan peleton umumnya dipilih dari kalangan pelajar-pelajar sekolah lanjutan atas atau sekolah lanjutan pertama. Adapun *budanchō* dan *giyuhei* dipilih dari kalangan pemuda dari tingkatan sekolah dasar.[127]

---

[124] Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta ...*, hlm. 69–72

[125] *Boekoe Pengoempoelan Oendang-Oendang, Disoesoen dengan peroebahan dan tambahan sampai penghabisan boelan 6 tahoen Syoowa 1944 (2604)*, hlm. 122

[126] Nugroho Notosusanto, *The Peta Army in Indonesia (1943–1945)*, 1971, hlm. 17

[127] Nugroho Notosusanto, *The Peta Army During the Japanese Occupation of Indonesia, 1979*, hlm. 102–109

Ada tiga macam motivasi yang mendorong mereka masuk Peta. Ada yang masuk dengan bergairah. Sebagian besar para *daidanchō* yang berasal dari pemimpin pergerakan nasional Islam memasuki Peta dengan perasaan segan. Mereka kena bujukan para "ahli Islam" dari Beppan seperti Abdulhamid Ono dan Muhammad Abdul Muniam Inada. Ternyata mereka tidak cocok dengan cara hidup orang Jepang. Mereka melihat kebiasaan orang Jepang yang meminum minuman keras, dan sebagai orang Islam diharuskan menghormat cara Jepang dengan menundukkan badan dan kepala *(seikerei)* ke arah istana Kaisar di Tokyo yang menyerupai rukuk dalam salat. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang membuat tokoh-tokoh Islam tidak kerasan pada posisinya sebagai perwira Peta, sekalipun pihak Jepang berusaha untuk memasukkan watak Islam dalam Peta. Mereka memiliki tingkat pendidikan yang paling tinggi sehingga sikap mereka pun paling kritis terhadap propaganda Jepang.[128]

Di antaranya ada juga yang masuk Tentara Peta dengan sikap acuh tak acuh, dan ada juga yang sekadar untuk mencari nafkah karena waktu itu sulit mencari pekerjaan yang sesuai. Yang lainnya beranggapan bahwa dengan masuk Tentara Peta berarti terhindar dari kecurigaan Jepang, karena pernah menjadi anggota militer Belanda. Ada pula yang karena diperintahkan atasannya, tetapi mereka pun bukannya tidak suka masuk Peta.

Sebagian besar pemuda yang masuk Peta dengan antusias adalah terutama dari kalangan *shōdanchō*. Mereka berasal dari bangku sekolah dan menganggap harus membantu bangsa Jepang untuk kemenangan perangnya di Pasifik. Dengan kemenangan itu, mereka mengharapkan akan terwujud pula cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka. Sebaliknya ada yang menganggap bahwa masa depan bangsa Indonesia tidak tergantung pada nasib bangsa Jepang. Mereka percaya pada ramalan *Joyoboyo* bahwa Jepang akan pergi dan Indonesia akan merdeka. Oleh karena itu, diperlukan suatu tentara untuk membela tanah air. Bagi mereka Peta merupakan tempat pelatihan yang luas untuk menghasilkan tenaga-tenaga militer yang mampu membela tanah airnya kelak.[129]

Calon perwira Tentara Peta mendapat latihan untuk pertama kalinya di Bogor dalam lembaga yang mula-mula bernama *Jawa Bōei Giy¤g¤n Kanbu Renseitai* (Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa) dan kemudian berganti nama menjadi *Jawa Bōei Giy¤g¤n Kanbu Kyōikutai* (Korps Pendidikan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela

---

[128] Nugroho Notosusanto, *The Peta Army ...*, hlm. 110–111

[129] *Ibid.*, hlm. 111

Tanah Air di Jawa).[130] Setelah selesai mengikuti pendidikan di tempat tersebut, anggota Tentara Peta ditempatkan di dalam *daidan-daidan* yang tersebar di seluruh Jawa-Madura dan Bali. Semuanya berjumlah 66 *daidan* (batalion).[131]

Di dalam perkembangannya ternyata anggota Tentara Peta di beberapa *daidan* merasa kecewa terhadap Jepang. Kekecewaan mereka sudah dimulai dalam tahun 1944, bahkan menimbulkan beberapa pemberontakan. Di antaranya yang terbesar adalah Pemberontakan Peta Blitar pada tanggal 14 Februari 1945, yang diikuti oleh kira-kira separuh dari seluruh anggota *daidan*.

Semula anggota *daidan* Peta Blitar terisolasi dari masyarakat luas, baik masyarakat asal maupun masyarakat di sekitarnya. Namun, kemudian mereka diperbolehkan pulang untuk menemui sanak keluarganya. Mereka menyaksikan sendiri penderitaan fisik dan mental yang dialami masyarakat sekampung dan seketurunan. Didengarnya bagaimana rakyat hidup di bawah tekanan Jepang, yang antara lain memaksa para petani untuk menyerahkan hasil padinya kepada *kumiai* (koperasi pengumpulan padi). Hal ini mengakibatkan kelaparan dan sejak akhir tahun 1944 rakyat hidup menderita dengan hanya makan nasi jagung dan berpakaian goni.[132]

Kekecewaan di kalangan Tentara Peta, terutama para perwira terhadap para bintara dan tamtama Jepang. Mereka merasa bahwa status mereka direndahkan daripada prajurit-prajurit Jepang yang berpangkat bukan perwira. Perwira Peta diharuskan memberi hormat lebih dahulu kepada bintara dan tamtama Jepang.[133]

Di samping itu, kebencian timbul di kalangan perwira Peta karena penderitaan para *rōmusha* (pekerja). Hilanglah rasa solidaritas untuk membantu kemenangan perang Jepang. Perwira Peta tidak lagi menganggap bangsa Jepang sebagai "saudara tua" yang membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Perwira Peta menganggap bangsa Jepang tidak berbeda dengan bangsa Belanda sebagai penindas dan penjajah.[134] Kebencian memuncak menjadi suatu pemberontakan seperti yang terjadi di *daidan* Peta Blitar yang dipimpin oleh para *shōdanchō*, antara lain Suprijadi dan Muradi yang belum berumur 20 tahun sewaktu memimpin pemberontakan. Akan tetapi, pemberontakan ini tidak berlangsung lama.

---

[130] Nugroho Notosusanto, *The Peta Army ...*, hlm. 121

[131] *Ibid.*, hlm. 129–131

[132] *Ibid ...*, 150–151

[133] *Ibid.*, 1979, hlm. 151

[134] *Ibid.*, hlm. 152

Mereka berhasil ditangkap atau menyerah karena tipu daya dan kemudian diadili dan dijatuhi hukuman.

Pemberontakan lainnya terjadi pula di *daidan* Cilacap pada bulan Juni 1945 di bawah pimpinan seorang *budanchō*. Begitu pula di *daidan* Cimahi. Antara *daidan* satu dengan *daidan* lainnya tidak ada hubungan karena politik isolasi yang diadakan oleh Jepang. Oleh karena itu, pemberontakan-pemberontakan itu dapat dilokalisasi oleh Jepang.

Dari Jawa, pembentukan kesatuan Peta meluas ke Pulau Bali, yang sebenarnya merupakan wilayah *Minseifu* (Angkatan Laut). Tentara Ke-16 diperintahkan untuk melakukan pembentukannya dan disetujui oleh Komando Angkatan Laut di pulau ini. Kesatuan Angkatan Darat juga ada di Bali, tetapi jumlah pasukannya hanya sekitar 1.000 orang, karena sebagian besar dipindahkan ke Nugini dan Solomon.[135] Dari 1.000 orang yang mendaftar, hanya 500 orang yang diterima mengikuti pendidikan. Yang menjadi pelatih mereka adalah tamatan *Seinen Dōjō*, di antaranya Zulkifli Lubis, Kemal Idris, Daan Mogot, Sabirin Muchtar, Satibi Darwis, Efendi, dan Kusno Wibowo. Sekolah perwira Peta di Bali berbeda dengan pendidikan Peta di Jawa. Pendidikan diikuti oleh calon-calon untuk mendaftar kepangkatan di dalam Peta, mulai dari yang tertinggi sampai terendah, yakni di samping calon *daidanchō*, *Cudanchō*, dan *shōdanchō*, juga para calon *budanchō*. Setelah pendidikan berakhir pada pertengahan Juli 1944, terbentuklah tiga *daidan*.[136]

Manfaat yang didapat pemuda-pemuda Indonesia itu selama menjadi anggota Tentara Peta adalah instruktif. Gemblengan-gemblengan di dalam *daidan* Peta memberikan mereka kepercayaan kepada diri sendiri bahwa mereka pun mampu berjuang melawan kekuatan yang lebih kuat dan lebih terlatih. Orang Jepang memperlihatkan kepada bangsa Indonesia bahwa sebagai orang Asia mereka tidak hanya dapat tegak berdiri sebagai bangsa merdeka, tetapi juga mampu mencapai tingkat yang sama dengan orang Barat.

Apabila di Jawa pemuda pembela tanah air dikenal dengan nama Tentara Peta, di Sumatra disebut *Giy¤g¤n* (Tentara Sukarela). Pembentukan *Giy¤g¤n* bersamaan dengan pembentukan Peta di Jawa. Pembentukannya di seluruh Sumatra tidak serempak. Markas Besar Tentara Ke-25 di Bukittinggi memberi kebebasan kepada kesatuan militer di setiap keresidenan (*sy¤*) untuk membentuk pusat pelatihan sendiri-sendiri. Kebijakan ini memungkinkan berdirinya pusat-pusat pelatihan *Giy¤g¤n* di setiap keresidenan mulai dari Aceh di utara sampai ke Palembang di selatan.

---

[135] Aiko Shiraishi, *Lahirnya Tentara Pembela Tanah Air (Peta)*, 1977, hlm. 46–47

[136] *Ibid.*, hlm. 56 – 47

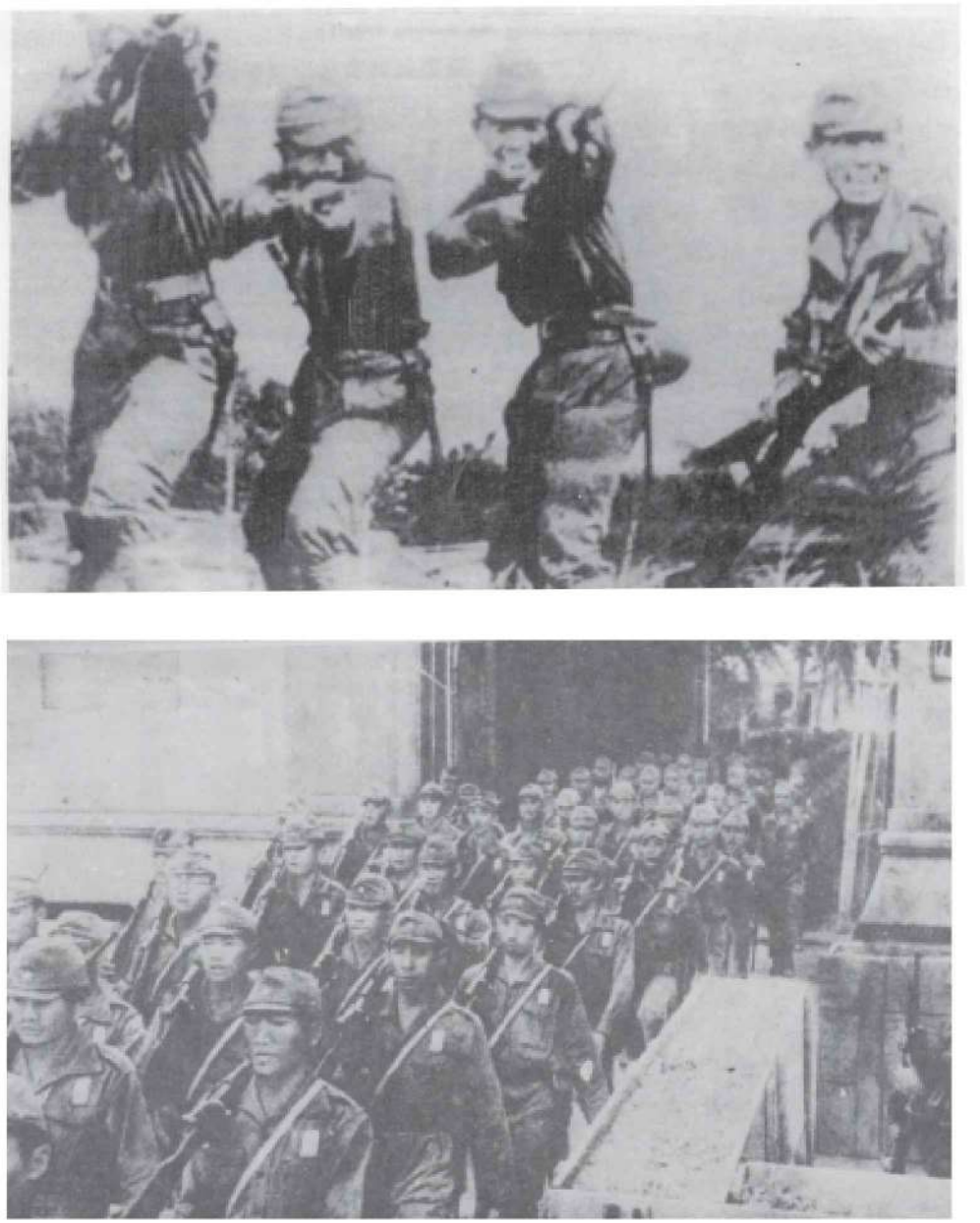

Gambar 1.13 Tentara Pembela Tanah Air (Peta) sedang latihan dengan menggunakan senjata dan baris-berbaris (Sumber: *Djawa Baroe*)

Gambar 1.14 *Cūdanchō* Latief Hendraningrat di hadapan Tentara Peta sedang memberi penjelasan tentang serangan Sekutu (Sumber: A. Mansur Suryanegara, *Pemberontakan Tentara PETA di Cileunca, Pengalengan, Bandung Selatan*)

Pertama-tama dibuka pendaftaran calon *Giyúgún* di Padang, Sumatra Barat pada bulan Oktober 1943. Di sini, panitia pendaftaran *Giyúgún Konsetsu Honbu* (Markas Besar Pembentukan *Giyúgún*) dipimpin oleh seorang tokoh sipil, Chatib Sulaiman. Pada bulan berikutnya, Majelis Agama untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya (Maibkatra) membuka pendaftaran di Aceh.[137] Pendidikan angkatan pertama di wilayah ini diselenggarakan di Pidie, sedangkan angkatan kedua di Lhok Nga.[138] Di Keresidenan Sumatra Timur pendaftaran dilaksanakan oleh Badan Oentoek Membantu Pertahanan Asia (BOMPA) di Medan dan sekitarnya, sedangkan di Tapanuli oleh Badan Pertahanan Negeri (Baperi).[139] Di Sumatra Timur pusat pelatihan diperluas, tidak hanya di Medan tetapi juga di Siborong-borong (Tapanuli). Pusat pelatihan calon *Giyúgún* di Sumatra Selatan (meliputi Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka) diadakan di Pagar Alam.[140] Pusat-pusat pelatihan yang terpisah itu berbeda dengan di Jawa yang tempat pelatihan Peta hanya dipusatkan di Bogor.

Persyaratan minimum calon anggota *Giyúgún* adalah tamatan sekolah dasar. Akan tetapi, yang mendaftar sebagian besar pemuda tamatan sekolah menengah. Bahkan *Giyúgún Konsetsu Honbu* di Sumatra Barat menetapkan usia calon minimum 25 tahun dan maksimum 30 tahun, suatu usia yang dianggap dapat menanggapi dengan kritis nilai-nilai dan kebiasaan Jepang. Dari hasil wawancara Aiko Kurusawa dengan sejumlah bekas tokoh *Giyúgún* berpendapat bahwa seleksi calon *Giyúgún* lebih didasarkan pada bidang pendidikan dan keahlian.[141] Dengan adanya kesempatan itu, para pemuka agama dan pemuka masyarakat mendorong para pemuda untuk memasuki *Giyúgún* dengan pelbagai alasan seperti demi kepentingan agama dan negara ataupun semata-mata untuk mengatasi kesulitan ekonomi.

Selain itu, hubungan yang baik antara tokoh-tokoh setempat dan penguasa Jepang setempat mempermudah pemuda memasuki *Giyúgún*. Misalnya, tokoh Parindra dr. Pirngadi berhasil memasukkan sembilan orang pemuda yang aktif dalam organisasi kepanduannya bernama Surya Wirawan, ke dalam pelatihan *Giyúgún* di Sumatra Timur. Di Aceh dan Palembang, sebagian dari mereka yang terpilih mengikuti pendidikan angkatan pertama berasal dari keluarga bangsawan. Di Sumatra Barat

---

[137] Muhammad Ibrahim, *et al.*, *Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, 1991, hlm. 188

[138] *Ibid.*

[139] *Ibid.*

[140] *Ibid.*

[141] Arsip Nasional Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 105

seorang ulama terkenal dan propagandis *Giyūgun* yang berhasil, Syekh Djamil Djambek memasukkan ketiga putranya ke dalam pendidikan *Giyūgun* angkatan pertama.[142]

Pelatihan calon anggota *Giyūgun* berlangsung selama 3 sampai 6 bulan. Mereka yang mencapai pangkat perwira diharuskan mengikuti pelatihan selama tiga bulan lagi. Pusat pelatihan perwira diadakan di dua tempat di Sumatra Barat, yaitu di Padang dan Bukittinggi.

Sama halnya dengan di Jawa, *Nippon Seisin* (Nippon), juga ditanamkan secara halus atau terang-terangan sejak di pelatihan-pelatihan *Giyūgun* di Sumatra. Para pemuda digembleng dengan disiplin keras dan mendapat gemblengan untuk bersikap anti-orang-orang Barat. Kepala Sekolah suatu Taman Latihan Kepemimpinan untuk Malaya, Sumatra, dan Singapura, dalam pidato pembukaan sekolah itu antara lain mengatakan:

> "Tuan-Tuan dibawa kemari bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk belajar *Nippon Seisin,* belajar disiplin dan kerja keras. Barang siapa yang ingkar, akan saya tendang ke luar. Saya tidak mau perangai Inggris dan Amerika itu dibawa kemari. Saya tahu bagaimana malasnya orang-orang Barat, kemalasan yang telah diajarkan kepada tuan-tuan selama beratus-ratus tahun itu akan dikikis habis-habis."[143]

Namun, semangat kebangsaan juga ditanamkan oleh tokoh-tokoh nasional. Misalnya, dr. A.K. Gani, tokoh pergerakan Gerindo Pusat yang pindah ke Palembang sejak tahun 1941. Ia sering mengadakan kunjungan ke kesatuan-kesatuan *Giyūgun* di daerah Palembang.

Tidak adanya keinginan untuk mengembangkan satuan komando di atas satuan kompi seperti di Jawa yang dikenal dengan sebutan *daidan* menyebabkan tidak tercapainya jenjang kepangkatan perwira dalam *Giyūgun*. Di Sumatra Barat hanya 8 orang yang mencapai pangkat letnan satu, 30 orang berpangkat letnan dua, dan lebih kurang l80 orang berpangkat sersan. Jumlah *Giyūgun* Sumatra Barat diperkirakan antara 1.500 dan 2.000 orang. Mereka ditempatkan dalam kesatuan-kesatuan kecil di sepanjang pantai antara Airbangis dan Muko-Muko untuk menghadapi pendaratan Sekutu.

Tidak seperti Peta di Jawa yang kesatuannya mencapai tingkat batalion, kesatuan *Giyūgun* di Sumatra hanya mencapai tingkat kompi *Giyūgun* Aceh merupakan kesatuan yang terkuat. Jumlahnya melebihi 20 kompi, yang

---

[142] Muhammad Ibrahim, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 105–106

[143] Arsip Nasional Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 107

masing-masing berkekuatan 250 orang atau keseluruhannya berjumlah antara 5.000 sampai 6.000 orang. *Giyūgun* Sumatra Timur hanya memiliki 6 kompi dengan kekuatan 1.500 orang.[144] Setelah itu, *Giyūgun* Sumatra Barat dan *Giyūgun* Sumatra Selatan masing-masing memiliki jumlah anggota yang lebih kecil.

Meskipun *Giyūgun* di Sumatra tidak pernah terlibat langsung dalam pertempuran, hal ini bukan berarti tidak ada perlawanan terhadap Jepang. Perlakuan yang keras dalam pelatihan agar menyamai klasifikasi yang dimiliki perwira Jepang, telah menimbulkan reaksi seperti yang dilakukan oleh salah seorang anggota *Giyūgun* Aceh, T.A. Hamid. Pada bulan November 1944 ia bersama-sama anggota *Giyūgun* Aceh lainnya melarikan diri dari asrama ke gunung, tetapi kemudian Hamid menyerah setelah Jepang menyandera keluarganya. Karena tekanan-tekanan yang mereka peroleh pada bulan Juli 1945, anggota *Giyūgun* Pematang Siantar pimpinan Hotman Sitompul memasang barikade-barikade sebagai tanda perlawanan. Dalam suatu wawancara dengan Aiko Kurasawa, Hotman Sitompul memberikan alasannya sebagai berikut:

> *"The Japanese promised that they would make Giyūgun completely an independent army, but this promise were never fulfilled. We always felt to be pressed by the Japanese."*[145]

Tampaknya *Nippon Seisin* yang ditanamkan oleh para pelatih Jepang baik di kalangan anggota Peta di Jawa maupun anggota *Giyūgun* di Sumatra tidak selalu memenuhi harapan Jepang. Akan tetapi, gemblengan militer yang keras di pelatihan-pelatihan Peta maupun *Giyūgun* telah menumbuhkan semangat korps dan semangat membela tanah air yang kuat, terutama karena doktrinasi nasionalisme Indonesia yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh nasional. Pengalaman pertama *Giyūgun* berkenalan dengan pelatihan militer profesional telah memberikan kepada para pemuda Sumatra pengetahuan dan keterampilan militer yang bermanfaat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari.

4. Pengerahan *Rōmusha*

Mobilisasi lainnya dalam jumlah yang sangat besar sebagai akibat dari politik pengerahan total Jepang adalah *rōmusha*. Pengerahan *rōmusha* merupakan eksploitasi pekerja kasar, terutama pemuda untuk menunjang perang Jepang melawan Sekutu yang menimbulkan banyak penderitaan

---

[144] Arsip Nasional Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 108, lihat juga Anthony Reid, *op. cit.*, hlm. 194

[145] Arsip Nasional RI, *Ibid.*

termasuk korban jiwa. Meskipun Pemerintah Militer Jepang terlibat langsung dalam pengerahan *rōmusha*, para pemimpin Indonesia dalam sidang *Chūō Sangi In* masih diminta pertimbangannya sebagai alat legimitasi agar pengerahan *rōmusha* berhasil secara maksimal. Dalam sidangnya yang pertama, *Chūō Sangi In* mengusulkan beberapa syarat antara lain supaya dibentuk badan-badan yang memovitasi rakyat menjadi tenaga sukarela, melalui kerja sama dengan bupati, wedana, camat, dan kepala desa untuk pengerahan tenaga kerja (buruh) sukarela di perusahaan-perusahaan bala tentara Jepang. *Chūō Sangi In* mengusulkan persyaratan agar dibuat perjanjian kerja yang nyata dan resmi, dan badan-badan pengerahan tenaga kerja sukarela yang akan dibentuk harus menjamin pengiriman uang dan memberikan bantuan lainnya kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga para buruh tidak khawatir di tempat kerjanya.[146]

Namun, dalam pelaksanaannya persyaratan yang disampaikan oleh *Chūō Sangi In* itu diabaikan. Pada hakikatnya mereka tidak lebih dari pekerja paksa. Seperti halnya di Yogyakarta *kōci*, tepatnya di desa Timbul Harjo, Bantul, pengerahan *rōmusha* dilakukan oleh perangkat desa dengan cara mendatangi keluarga-keluarga yang memiliki tenaga potensial untuk dijadikan *rōmusha*. Keluarga yang menolak, mereka takut-takuti akan dikucilkan. Jika anak yang diminta itu tidak berada di rumah, mereka biasanya mencari ke sawah dan kalau sudah bertemu dibawa secara paksa ke tempat pengerahan *rōmusha*.[147] Di Kabupaten Gunung Kidul, para calon *rōmusha* disuruh datang ke kelurahan pada pagi maupun malam hari dan dilarang pulang sekalipun hanya untuk mengambil baju.

Selama berada di tempat kerja sampai pulang ke kampung halamannya, ternyata *rōmusha* mendapat fasilitas sangat minim dan banyak yang tidak diberi upah, tetapi tidak dapat menuntut karena memang tidak ada perjanjian kerja tertulis. Mereka dikerahkan menjadi tenaga kerja paksa dan buruh yang diberi upah selayaknya.

Para tenaga kerja yang disebut *rōmusha* atau Jepang menyebutnya "Prajurit Pekerja" diperlukan untuk membangun prasarana perang seperti kubu-kubu pertahanan, gudang senjata, jalan raya, dan lapangan udara. Selain itu, mereka dipekerjakan di pabrik-pabrik seperti pabrik garam dan pabrik kayu di Surabaya dan di Sumatra Selatan, mereka dipekerjakan di pabrik pembuatan dinamit di Talangbetutu atau di pertambangan batu bara serta penyulingan minyak.[148] Mereka dipekerjakan pula di pelabuhan-

---

[146] P.J. Suwarno, *Rōmusha Daerah Istimewa Yogyakarta*, 1999, hlm. 11–12

[147] *Ibid.*, hlm. 20–21

[148] *Ibid.*, hlm. 47–48

pelabuhan antara lain untuk memuat dan membongkar barang-barang dari kapal-kapal. Bahkan di desa Gendeng, dekat Badug, Yogyakarta *Kōci* misalnya, *rōmusha* menanam sayuran dan palawija guna memenuhi kebutuhan makan Jepang dan *rōmusha* itu sendiri.[149]

Pada umumnya mereka diperdapat di desa-desa, terdiri dari pemuda petani dan penganggur. Pulau Jawa sebagai pulau yang padat penduduknya memungkinkan pengerahan tenaga tersebut secara besar-besaran. Pada mulanya tugas-tugas yang dilakukan itu bersifat sukarela dan pengerahan tenaga tersebut tidak begitu sukar dilakukan, karena orang masih terpengaruh oleh propoganda "untuk kemakmuran bersama Asia Timur Raya". Bahkan, di beberapa kota terdapat barisan-barisan *rōmusha* untuk bekerja di tempat-tempat dan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, dalam bulan September 1944 sejumlah 500 orang *rōmusha* sukarela, yang terdiri dari pegawai tinggi dan menengah serta golongan terpelajar di bawah pimpinan Ir. Soekarno berangkat dari kantor besar *Jawa Hōkōkai* dengan berjalan kaki ke Stasiun Tanah Abang, Jakarta diiringi orkes suling Maluku. Di antara mereka terdapat pula orang Cina, Arab, dan India. Rombongan diikuti pula oleh anggota yang sudah berumur 60 tahun, sehingga Soekarno memuji mereka sebagai masih kuat seperti orang muda.[150] Para pekerja itu bekerja dalam apa yang disebut "Pekan Perjuangan Mati-matian". Tidak lama kemudian, pada tanggal 17 Oktober 1944, Oto Iskandar Dinata mengikuti jejak Soekarno dengan jumlah pengikut yang lebih banyak, yakni 625 orang.[151]

Namun, wartawan Rosihan Anwar yang ikut dalam rombongan Soekarno yang bergabung dalam pasukan pimpinan Sudiro, melukiskan penderitaaan yang dialami *rōmusha*. Kekecewaan tampak pada tulisannya yang dimuat di *Asia Raja*, 9 September, antara lain berbunyi:

> "Jika ada di antara pekerja sukarela itu, yang 400 orang yang mempunyai angan-angan serba sedap seraya dia membayangkan kejadian yang indah pada ketika meninggalkan kantor besar *Jawa Hōkōkai* di pagi itu, maka rasanya di waktu berbaris berjam-jam lamanya di bawah terik matahari itu akan leburlah segala khayalan itu.[152]

Lama-kelamaan karena kebutuhan yang terus meningkat di seluruh Asia Tenggara, pengerahan tenaga yang bersifat sukarela seperti yang telah

---

[149] P.J. Suwarno, *op. cit.*, hlm. 34

[150] Rochmani Santoso, "Djakarta Raja Pada Djaman Djepang"(Skripsi Sardjana), 1969, hlm. 108–109

[151] *Ibid.*, hlm. 112

[152] *Ibid.*, hlm. 110

Gambar 1.15 Ir. Soekarno saat memimpin para *rōmusha* sukarela (Sumber: *Djawa Baroe*, 1 Oktober 1944)

Gambar 1.16 Ir. Soekarno (tanda) sedang beristirahat bersama para *rōmusha* setelah bekerja sukarela (Sumber: Fatmawati, *Catatan kecil Bersama Bung Karno,* Bagian I)

diteladani oleh Soekarno itu, berubah menjadi paksaan. Pemerintah Tentara Ke-16 membentuk suatu badan khusus yang melaksanakan pengerahan *rōmusha* secara besar-besaran pada tahun 1944. Badan ini disebut *Rōmukyōku* (Kantor Urusan Pekerja).[153]

Pemerintah Tentara Ke-25 di Sumatra pada bulan April 1944 mengeluarkan peraturan tentang pendaftaran tenaga kerja yang berusia antara 16–45 tahun. Di Aceh, didirikan badan "Perkumpulan Pekerja untuk Umum. Di Aceh *Sy¤* untuk membina Asia Raya yang mempunyai cabang sampai di desa-desa. Setiap kepala desa diwajibkan mengerahkan tenaga kerja sesuai dengan daftar yang dibuat penguasa Jepang.[154]

Rōmukyōku membuat peraturan sebagai berikut: orang atau badan yang membutuhkan tenaga *rōmusha* lebih dari 30 orang diharuskan mengajukan permohonan kepada kepala daerah setempat. Si pemohon, baik orang maupun badan, harus memiliki perusahaan atau pabrik yang bemanfaat untuk kepentingan perang. Mereka harus mengisi formulir yang menyangkut nama tempat *rōmusha* yang dipekerjakan, berapa jumlah yang diperlukan, dan berapa lama akan dipekerjakan. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pengerahan *rōmusha* harus pula memberikan laporan bulanan kepada *Rōmukyōku*. Sebenarnya peraturan itu tidak memberatkan *rōmusha*, tetapi dalam praktiknya di lapangan berbeda, apalagi kalau pihak Jepang yang memerlukan *rōmusha*.[155] Seperti halnya calon yang akan dipekerjakan di daerah Yogyakarta *Kōci*, mereka ditakut-takuti dengan ancaman kalau tidak mau mereka akan dikirim ke tempat-tempat di luar Yogyakarta.[156]

Bahkan, banyak di antara petugas pengerahan *rōmusha* bersikap curang, seperti mencoret nama yang sudah terdaftar dan menggantinya dengan nama lain karena menerima suap sejumlah uang.[157] Sebaliknya, ada pula kepala desa yang menunjuk seseorang menjadi *rōmusha* sebagai tindakan balas dendam atau rasa tidak suka. Dengan uang pula, seseorang yang sudah terdaftar sebagai *rōmusha* dapat menunjuk orang lain sebagai penggantinya.[158]

Rōmusha yang dipekerjakan di proyek-proyek, antara lain pembuatan jalan, jembatan, barak-barak militer, dan perbentengan di sekitar tempat mereka tinggal di suatu keresidenan, berlangsung selama satu sampai tiga

---

[153] Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta ...*, hlm. 48

[154] Muhammad Ibrahim, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 154

[155] *Ibid.*, hlm. 144–145

[156] P.J. Suwarno, *op. cit*, 1999, hlm. 15

[157] Ben Anderson, *Revolusi Pemuda ...*, hlm. 32–33

[158] Mestika Zed, *Kepialangan, Politik dan Revolusi: Palembang 1900–1945*, 2003, hlm. 246

bulan. Lebih dari tiga bulan merupakan masa kerja *rōmusha* yang dipekerjakan di proyek-proyek di luar keresidenan mereka. Tidak hanya ke luar Jawa, bahkan *rōmusha* dikirim ke luar Indonesia, seperti Birma, Muang Thai, Vietnam, dan Malaya. Tenaga *rōmusha* ini pada umumnya adalah petani dari desa-desa sehingga hal itu mempunyai pengaruh terhadap keadaan ekonomi desa. Menurut laporan pihak Inggris dan Belanda, hanya seperempat dari 50.000 orang yang berhasil kembali ke desanya di Indonesia, sedangkan separuhnya meninggal dunia di tempat mereka bekerja.[159]

Tidak sesuai dengan usul yang disampaikan oleh anggota *Chūō Sangi In* agar para *rōmusha* diperlakukan secara layak, ternyata mereka diperlakukan sangat buruk. Sejak pagi buta sampai petang hari mereka dipaksa melakukan pekerjaan kasar tanpa makan dan perawatan cukup, membuat kondisi fisik mereka menjadi sangat lemah, dan bahkan mereka hampir tidak punya sisa kekuatan. Jika ada di antara mereka yang berani beristirahat sekalipun hanya sebentar, hal itu akan mengundang maki-makian dan pukulan-pukulan dari pengawas mereka orang Jepang. Hanya pada malam hari mereka berkesempatan melepaskan lelah. Dalam keadaan demikian, mereka tidak punya daya tahan lagi terhadap penyakit. Karena tidak sempat memasak air minum, sedangkan buang air di sembarang tempat, berjangkitlah wabah disenteri. Karena tidak dapat menghindarkan diri dari serangan nyamuk, banyak di antara mereka yang terserang malaria.[160]

Kesehatan yang tidak dijamin, makanan yang tidak cukup, dan pekerjaan yang terlalu berat, menyebabkan banyak *rōmusha* itu meninggal dalam jumlah besar di tempat kerjanya. Untuk menghilangkan ketakutan di kalangan penduduk karena sudah menjadi rahasia umum bahwa para *rōmusha* diperlakukan sangat buruk, sejak tahun 1943 Jepang melancarkan kampanye propaganda untuk memperlancar usaha pengerahan yang telah menjadi seret. Di dalam kampanye itu mereka mendapat julukan "prajurit ekonomi" atau "pahlawan pekerja" yang digambarkan sebagai orang-orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Akan tetapi, kenyataan adalah sebaliknya. Di antara 300.000 tenaga *rōmusha* yang dikirim ke luar Jawa, diperkirakan 70.000 orang dalam kondisi yang menyedihkan.[161]

---

[159] Theodore Friend, *op. cit.*, hlm. 164

[160] Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta ...*, hlm. 118–119

[161] K.A. de Weerd, *The Japanese Occupation of the Netherlands Indies*, 1946, hlm. 73

Gambar 1.17 *Rōmusha* Indonesia yang dikerahkan sebagai tenaga kerja paksa (Sumber: *Djawa Baroe*, 1943)

Tidak dapat diketahui secara pasti berapa banyak *rōmusha* Indonesia yang dikerahkan sebagai tenaga kerja paksa selama masa Pendudukan Jepang. Jumlahnya mencapai 5 sampai 8 juta orang, menurut Miyoshi Sunhichiro dalam artikel *"Jawa Senryo Gunsei Kaikoroku"* yang dikutip oleh Theodore Friend. Pemerintah Indonesia menyebut jumlah *rōmusha*-nya sekitar 4,1 juta orang, pada saat membicarakan pampasan perang dengan Jepang.[162] Tulisan di surat kabar *Aceh Simbun* tanggal 8 April 1944 menyebutkan 7.000 orang dikerahkan setiap hari untuk membangun jalan antara Takengon dan Blangkejeren yang dimulai pada tanggal 1 Januari 1944 dan dibuka secara resmi pada bulan Juli tahun itu juga.[163]

Pengerahan tenaga *rōmusha* tersebut telah membawa akibat jauh pada struktur sosial di Indonesia. Karena kaum tani yang dikerahkan, banyak pemuda-pemuda yang menghilang dari desanya pergi ke kota karena takut akan diambil sebagai *rōmusha*. Pemerintah Jepang bertindak lebih jauh lagi, akhirnya hampir semua laki-laki yang tidak cacat diambil. Yang tinggal di desa hanyalah kaum perempuan, anak-anak, dan lelaki yang kurang sehat. Sesudah penyerahan Jepang para *rōmusha* yang dapat mengatasi kesengsaraan yang mereka alami maupun pemuda-pemuda yang lari ke kota-kota, kembali ke desanya dengan pengalaman yang banyak. Baik karena pengerahan *rōmusha* maupun karena datangnya gagasan-gagasan baru yang dibawa oleh mereka yang kembali, desa-desa menjadi terbuka dan terlepas dari isolasinya.

Desa juga mengalami pengaruh dari institusi lain, yakni dibentuknya *tonarigumi* (rukun tetangga) sampai ke pelosok-pelosok. Maksud yang sebenarnya dari pembentukan *tonarigumi* ialah untuk meningkatkan pengerahan maupun pengawasan terhadap penduduk. Seperti tercantum dalam berita pembentukannya, tujuannya antara lain adalah "agar penduduk berusaha meningkatkan produksi hasil buminya dan menyerahkannya untuk negeri".[164]

Kesemuanya itu: pengerahan *rōmusha*, eksodus pemuda desa, turut sertanya pemuda desa dalam organisasi pemuda seperti *Seinendan* dan *Keibōdan* serta menjadi prajurit *Peta* atau *Heihō*, yang berakibat keluarnya mereka dari desa masing-masing untuk pergi ke kota-kota, memberikan pandangan baru kepada mereka tentang dunia di luar desanya. Mereka ke luar, juga memperoleh status yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketika masih berada di desanya.

---

[162] Theodore Friend, *op. cit.*, 1976, hlm. 164

[163] O.P.D. Sihombing, *op. cit.*, 1962, hlm. 151

[164] *Kan Pō* , no. 34, th. III, Januari 2604 (1944)

5. *Jugun Ianfu*

Selain mengerahkan laki-laki potensial yang berusia antara 16 sampai 40 tahun sebagai pekerja paksa (*rōmusha*), pemerintah Pendudukan Jepang mengerahkan pula tenaga perempuan tidak saja untuk kepentingan-kepentingan formal seperti dalam *Fujinkai*, tetapi juga untuk kepentingan pemuas nafsu. Mereka itu disebut perempuan penghibur atau *jugun ianfu*.

Sama halnya dengan *rōmusha*, *jugun ianfu* juga direkrut dari desa yang pada umumnya dipaksa dengan cara-cara kekerasan, tipu muslihat, dan ancaman, untuk memenuhi kebutuhan biologis Jepang baik di kalangan militer maupun sipil. Berbeda dengan *rōmusha* yang dilakukan secara terbuka, pengerahan *jugun ianfu* yang diartikan sebagai "budak seks" dilakukan secara gelap, di bawah tangan. Sistem rekrutmen yang tertutup ini tidak menggunakan pengumuman resmi. Pemerintah Militer Jepang menggunakan bantuan pejabat daerah seperti lurah, camat, dan melalui *tonarigumi*. Mereka menawarkan, bahkan memaksa agar perempuan-perempuan muda belia bersedia ikut dalam program pengerahan tenaga kerja, di samping dengan ancaman juga dengan mendekati keluarga yang diincar. Seperti kesaksian mantan *jugun ianfu* asal Yogyakarta, yang orang tuanya dipanggil Pak Lurah. Dikatakannya anaknya bernama Suharti akan dididik, disekolahkan di Balikpapan dan setelah lulus akan dipekerjakan di kantor. Namun, anak yang masih berumur 15 tahun ini dijadikan *jugun ianfu* selama enam bulan di Balikpapan, Kalimantan Timur.[165]

Kaum perempuan yang menjadi *jugun ianfu* kebanyakan mereka yang berpendidikan rendah, bahkan tidak berpendidikan dan buta huruf. Selain kebodohan yang dimilikinya, mereka berada dalam kesulitan ekonomi. Kebodohan dan kemiskinan membuat mereka percaya begitu saja pada tawaran kerja yang cukup menjanjikan yang tidak membutuhkan keahlian khusus seperti pembantu rumah tangga, pelayan restoran, atau pekerjaan apa saja yang membutuhkan tenaga. Mantan *jugun ianfu* dari Yogyakarta bernama Lasiyem, memberikan alasan mengapa ia memutuskan mencari pekerjaan. Katanya antara lain:

> "... yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana bisa kerja. Saya ingin membelikan makanan untuk anak saya . . . karena itu ketika ada tawaran kerja saya langsung sanggup, . . . saya tidak bilang dengan suami saya."[166]

Rekrutmen *jugun ianfu* dapat juga dilakukan melalui jalur hiburan di mana para seniman terlibat di dalamnya, seperti yang dialami oleh mantan

---

[165] Eka Hindra, "Jugun Ianfu, Kejahatan Perang Asia Pasifik yang Belum Terselesaikan" (makalah), 18 Oktober 2006

[166] A. Budi Hartono dan Dadang Juliantoro, *Derita Paksa Perempuan: Kisah Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang 1942–1945*, 1997, hlm. 89

jugun ianfu dari Yogyakarta, Mardiyem. Seorang pemain sandiwara keliling dari grup "Pantja Soerja" telah menjanjikannya jadi penyanyi di Kalimantan, sesuai dengan cita-citanya yang ingin membebaskan diri dari lingkungannya sebagai *abdi dalem* (mengabdi pada keluarga bangsawan Jawa) di daerah Suryotarunan. Selain itu, dokter dan para pejabat, baik rendah maupun tinggi, ikut berpartisipasi langsung atau tidak, dalam usaha pencarian dan pengumpulan tenaga kerja perempuan yang akan dijadikan *jugun ianfu*. Mereka dianggap memiliki akses tersendiri pada kaum perempuan, baik di desa maupun di kota.

Kebanyakan kaum *jugun ianfu* dapat digolongkan sebagai perempuan yang berasal dari keluarga baik-baik. Di antara mereka ada yang masih gadis, bahkan di bawah umur dan ada pula yang sudah bersuami dan mempunyai anak. Akan tetapi, ancaman pihak militer Jepang yang kejam yang memiliki kekuatan senjata, membuat mereka takut menolak atau melarikan diri pada saat mereka sampai di tempat yang penuh dengan penderitaan fisik dan batin.

Penguasa militer Jepang mendirikan tempat-tempat yang dihuni *jugun ianfu* di setiap wilayah komando militer dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pemerkosaan oleh tentara Jepang terhadap penduduk lokal, menjaga moral tentara Jepang, serta mencegah penyakit kelamin yang akan melemahkan kekuatan militernya.

Para perempuan yang dijadikan *jugun ianfu* dimasukkan ke rumah-rumah bordil *a'la* Jepang yang disebut *Ian-jo*, antara lain terdapat dibekas asrama peninggalan Belanda, markas militer Jepang, dan rumah-rumah penduduk yang sengaja dikosongkan. Tempat-tempat itu biasanya dijaga ketat oleh tentara Jepang. Setiap perempuan di *Ian-jo* mendapat kamar dengan nomor kamar, bahkan namanya diganti dengan nama Jepang yang ditulis di pintu kamar.[167] Momoye misalnya, nama Jepang yang diberikan kepada gadis Jawa bernama Mardiyem. Disadarinya kemudian bahwa dengan nama Jepang, para tetamu Jepang seolah-olah seperti menggauli perempuan-perempuan dari negaranya sendiri, padahal pada kenyataannya yang digauli perempuan-perempuan Indonesia. Meskipun hal ini merupakan suatu tindakan yang merendahkan, Mardiyem dan kawan-kawannya hanya menerimanya dengan terpaksa.[168]

Mardiyem termasuk salah satu di antara 24 orang perempuan angkatan pertama yang dikerahkan sebagai *jugun ianfu* (budak seks) dan tanpa sepengetahuan mereka ditempatkan di *Ian-jo* Telawang, sebuah kampung

---

[167] Eka Hindra, *"Jugun Ianfu: Kejahatan Perang Asia-Pasifik ..."*

[168] A. Budi Hartono dan Dadang Juliantoro, *op. cit.*, hlm. 128

(a) (b)

Gambar 1.18 (a) Mardiyem pada waktu muda; **(b)** Mardiyem di usia tua
(Sumber: Koleksi Eka Hindra)

di pinggiran kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seperti halnya dengan Mardiyem, di sini nama perempuan-perempuan Jawa lainnya diganti dengan nama-nama Jepang, antara lain Waginem menjadi Sakura, Suharti menjadi Masako, Nur menjadi Noburu, dan Jatinem menjadi Haruye.[169] Mereka ini yang semula ingin mencari kerja guna mengubah nasib, untuk pertama kalinya dipaksa menjalani pekerjaan hina, direndahkan oleh bangsa lain di negaranya sendiri. Demikian pula halnya dengan nasib 35 orang perempuan yang dijadikan *jugun ianfu* angkatan kedua pada tahun 1943 berganti nama Jepang, antara lain Lasiyem menjadi Takito dan Giyah menjadi Sakura.[170] Selama di *Ian-jo* Telawang, badan Giyah semakin kurus dan akhirnya meninggal. Mayat Giyah ditumpuk bersama-sama mayat-mayat *rōmusha* yang dibiarkan membusuk di Pasar Lama. Meskipun Mardiyem dan kawan-kawannya disiksa pengelola *Ian-jo* di Telawang, bernama Cikada, mereka berhasil memaksanya agar Giyah dimakamkan di pemakaman umum sebagaimana layaknya manusia.[171] Para *jugun ianfu* angkatan kedua ini mendapat jatah makan yang kualitasnya menurun, sering kali tanpa daging dan tidak cukup bagi mereka yang dipaksa melayani tamu setiap hari mulai dari pukul 12.00 siang sampai pagi keesokan harinya.

Dengan datangnya sembilan orang *jugun ianfu* angkatan ketiga pada pertengahan tahun 1944, jatah makan penghuni *Ian-jo* di Telawang hanya satu kali sehari. Di antara j*ugun ianfu* angkatan ini, Suharti yang berubah nama menjadi Sakura, termasuk yang berhasil menyelamatkan diri dari pengeboman Sekutu di Balikpapan. Ia kemudian berjalan kaki dan nekad menembus hutan melewati kampung-kampung selama 52 hari, menuju Banjarmasin. Di antara rombongan ini yang tidak kuat kemudian meninggal karena sakit dan kelaparan. Dengan kondisi makanan yang semakin buruk di *Ian-jo* Telawang, Suharti dipaksa melayani kebutuhan seks orang-orang Jepang selama enam bulan sampai akhirnya Jepang kalah pada tahun 1945.[172]

Sebelum menjalani tugas sebagai budak seks (*jugun ianfu*), perempuan-perempuan di *Ian-jo* menjalani pemeriksaan kesehatan yang merendahkan martabat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika para petugas medis menyuruh mereka membuka pakaian sampai akhirnya mereka telanjang bulat, lalu menggerayangi tubuh mereka. Bahkan, di antara mereka tidak berani bertanya, apalagi menolak, ketika vagina mereka diperiksa dengan

---

[169] Eka Hindra dan Koichi Kimura, *Momoye, Mereka Memanggilku*, 2007, hlm. 92; A. Budi Hartono, Dadang Juliantoro, *Ibid.*, hlm. 135

[170] Eka Hindra dan Koichi Kimura, *Ibid.*, hlm. 146

[171] *Ibid.*, 2006, hlm. 142–144

[172] *Ibid.*, hlm. 146–147

memasukkan alat terbuat dari besi panjang, dan jika alat ini ditekan, bagian ujungnya akan mengembang dan dapat membuka vagina menjadi lebih lebar. Melalui alat yang dikenal dengan sebutan *cocor bebek*, dapat diketahui apakah kemaluan calon *jugun ianfu* sudah terserang penyakit atau masih sehat.[173]

Di *Ian-jo* mereka mengalami pemerkosaan, suatu hubungan seks secara paksa seperti yang dialami Mardiyem. Usianya baru 13 tahun dan belum mengalami haid saat ia diperkosa untuk pertama kalinya oleh seorang Jepang berambut berewok. Ia adalah pembantu dokter yang memeriksa kesehatannya pertama di *Ian-jo* Telawang. Pada hari pertama itu Mardiyem dipaksa melayani enam orang laki-laki, padahal ia sudah mengalami pendarahan. Hari yang naas itu adalah hari ketika ia direndahkan, dirampas kehormatannya, dan dihancurkan harapan dan cita-citanya, sehingga Mardiyem hampir bunuh diri, tetapi kemudian urung setelah bermimpi bertemu dengan almarhum ayahnya yang menasihatinya agar tabah dalam menghadapi cobaan hidup dan tidak melakukan tindakan tercela dengan cara bunuh diri. Oleh karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Mardiyem terpaksa mengalami penderitaan hidup sekuat daya. Ketika usianya menginjak 15 tahun Mardiyem dipaksa menggugurkan kandungannya yang telah berusia lima bulan dengan cara ditekan perutnya dengan paksa oleh dokter tanpa pembiusan. Tidak lama kemudian, ia dipaksa melayani pengelola *Ian-jo* di Telawang, bernama Cikada. Ketika Mardiyem menolak permintaannya, siksaan fisik berupa pukulan dan tendangan berkali-kali dialamatkan kepadanya, sehingga ia pingsan selama enam jam. Penyiksaan terhadap dirinya selama menjadi *jugun ianfu* mengakibatkan ia mengalami cacat fisik dan secara psikis trauma berhubungan seks.[174]

Siksaan berupa tamparan, pukulan, dan tendangan dilakukan oleh tentara Jepang, apalagi mereka yang dalam keadaan mabuk. Jika kurang puas dengan pelayanan *jugun ianfu*, mereka melakukan cara-cara tidak manusiawi yang biasa dilakukan oleh binatang dan tentunya tidak dapat diikuti oleh *jugun ianfu* baik karena faktor tenaga maupun etik.

Para *jugun ianfu* hanya pasrah menjalani penderitaan hidup karena mereka tidak punya pilihan lain. Kesempatan untuk melarikan diri tidaklah mungkin karena jarak perjalanan pulang jauh, apalagi mereka buta tentang pengetahuan peta, dan mereka pun tidak punya uang untuk berpergian meskipun di *Ian-jo* berlaku sistem pembayaran.

---

[173] Eka Hindra dan Koichi Kimura, *op. cit.*, hlm. 97

[174] Kisah selengkapnya sebagai *jugun ianfu* lihat buku Eka Hindra dan Koichi Kimura, *Ibid.*, hlm. 91–149; A. Budi Hartono dan Dadang Juliantoro, *op. cit.*, hlm. 116–150

(a)

(b)

Gambar 1.19 (a) Alat tes kesehatan *jugun ianfu*; **(b)** Bekas rumah Cikada di depan Asrama Telawang pada tahun 2000, tempat Mardiyem disiksa (Sumber: Koleksi Eka Hindra dan dalam bukunya bersama Koichi Kimura, *Momoye, Mereka Memanggilku*)

Setiap tamu baik kalangan militer maupun sipil yang datang ke *Ian-jo* harus antre untuk mendapatkan karcis dan kondom. Namun, sebagian besar pengunjung *Ian-jo* tidak mau memakai kondom yang dianggap mengganggu kenikmatan hubungan seksual mereka.

Adapun besarnya pembayaran untuk tiap waktu berbeda. Jika kalangan militer berkunjung ke *Ian-jo* pada siang hari dikenakan biaya 2,5 rupiah, sedangkan bagi kalangan sipil harus membayar 3,5 rupiah, dimulai pada sore hari pukul 17.00–24.00, dan tamu yang menggunakan jasa *jugun ianfu* sampai pagi membayar 12,5 rupiah. Meskipun berlaku sistem pembayaran, *jugun ianfu* tidak pernah menerima uang kecuali karcis dari tamu yang datang. Pengelola *Ian-jo*, Cikada, mengatakan agar karcis dikumpulkan, kelak dapat ditukar dengan uang jika mereka berhenti bekerja sebagai *jugun ianfu*.[175]

Dalam perkembangannya, janji itu tidak terbukti, sehingga kaum *jugun ianfu* tidak memedulikan uang karcis. Mereka simpan karcis di bawah kasur setiap kali tamu datang. Mardiyem memperlihatkan jumlah karcisnya melebihi satu keranjang besar. Ia meninggalkan karcis begitu saja pada saat *Ian-jo* di Telawang tidak beroperasi lagi, dan Mardiyem yang sejak berusia 13 tahun dijadikan *jugun ianfu* bersama kawan-kawannya tidak pernah mendapat uang.[176]

Di luar Pulau Jawa, di Morotai misalnya, meskipun para *jugun ianfu* merasa kewalahan melayani 5–10 tentara Jepang dalam sehari, mereka antara lain Since, seorang perempuan keturunan Cina asal Malaysia, mendapat bayaran sebesar Rp60.000 sebulan, berdasarkan karcis yang diterima dari tamu-tamu di kalangan militer Jepang. Akan tetapi, seorang di antara 20 orang *jugun ianfu* di Morotai telah bunuh diri meminum racun karena tidak kuat menahan beban fisik dan mental.[177]

Derita hidup sebagai *jugun ianfu* dialami pula oleh kaum perempuan Belanda yang diambil secara paksa oleh tentara Jepang dari kamp interniran Ambarawa, Jawa Tengah. Kesepuluh perempuan dari interniran diseret ke luar dan dilempar ke atas truk yang membawa mereka menuju Jalan Kenari untuk menandatangani surat dalam bahasa Jepang yang tidak diketahui isinya. Kemudian, mereka pun dibagi dalam dua kelompok; enam orang di antaranya dibawa ke sebuah lokasi pelacuran "Futabashi", tidak jauh dari sana.

Perempuan-perempuan bermata biru ternyata banyak digemari tentara Jepang. Salah satu di antaranya bercerita bahwa rambut pirangnya yang

---

[175] Eka Hindra, *"Jugun Ianfu, Kejahatan Perang Pasifik ...."*

[176] Budi Hartono dan Dadang Juliantoro, *op. cit.*, hlm. 133

[177] *Tempo*, 25 Juli 1992

semula dielus-elus seorang tentara Jepang kemudian dijambak secara kasar, lalu tentara itu mendorong korbannya ke tempat tidur. Perempuan Belanda itu pada hari pertama dipaksa melayani lima tentara Jepang berikutnya yang sudah menunggu di depan pintu kamarnya. Demikian seterusnya hari-hari dilewatinya di dalam rumah bordil yang pengap tanpa ventilasi dan saluran air. Di dalam bordil yang mirip tahanan, ia tidak dapat berbuat banyak, kecuali merasakan penderitaan fisik dan mental di tempat tidurnya dan sebulan kemudian ia menderita gangguan jiwa. Tidak diketahui berapa banyak perempuan Belanda yang menderita sakit ingatan. Diperkirakan sekitar 100 perempuan Belanda di Jawa Tengah dijadikan *jugun ianfu*.

Pengerahan perempuan berkebangsaan Indonesia maupun Belanda yang dipaksa menjadi *jugun ianfu* telah mengalami penderitaan lahir batin. Hal ini merupakan salah satu bukti kekejaman Jepang yang memaksa kaum perempuan memenuhi kepentingannya yaitu kepentingan nafsu seksnya.

D. Ekonomi Perang

1. Penguasaan dan Pengawasan

Dalam rencana penguasaannya terhadap Asia Tenggara (yang oleh Jepang disebut "Wilayah Selatan", yang mereka anggap penting adalah menguasai dan mendapatkan sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang, terutama sekali minyak bumi. Dalam rencananya, "Wilayah Selatan" dibagi atas dua bagian, yaitu wilayah A dan wilayah B. Wilayah A adalah beberapa koloni Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat, yaitu Malaya, Kalimantan Utara, Hindia Belanda, dan Filipina. Wilayah B meliputi beberapa koloni Prancis di daratan Asia Tenggara, yakni Vietnam, Laos, dan Kamboja. Khususnya di wilayah A, Jepang tidak hanya bermaksud untuk menguasai wilayah sumber ini, tetapi juga untuk memotong garis perbekalan musuhnya yang bersumber pada wilayah ini. Jepang memperkirakan perang akan berlangsung lama sehingga penguasaan wilayah yang kaya akan bahan mentah akan sangat meringankan beban yang dipikulnya.

Rencana Jepang itu akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan tahap penguasaan dan tahap kedua merupakan rencana untuk jangka panjang, yaitu menyusun kembali struktur ekonomi wilayah tersebut di dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan-bahan untuk perang. Struktur ekonomi yang direncanakan akan bertumpu kepada wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhan sendiri, yang diberi nama Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.[178]

---

[178] Koichi Kishi, Shigetada Nishijima, *et al., Indonesia ni Okeru Nihon Gunsei No Kenkyu (The Japanese Military Administration in Indonesia)*, terjemahan, 1963, hlm. 114–115

Pada bulan Maret 1942 Jepang berhasil merebut Hindia Belanda sesuai dengan rencana. Setelah pemerintah Hindia Belanda memperhitungkan bahwa invasi Jepang tidak dapat ditahan lagi, mulailah dilaksanakan aksi bumi hangus. Objek-objek vital dihancurkan, yang sebagian besar terdiri atas aparat produksi. Akibatnya ialah, pada awal pendudukan Jepang hampir seluruh kehidupan ekonomi lumpuh.[179] Kehidupan ekonomi kemudian sepenuhnya berubah dari keadaan normal menjadi ekonomi perang.

Sejalan dengan perkembangan keamanan, Pemerintah Pendudukan Jepang mengambil alih semua kegiatan dan pengendalian ekonomi. Langkah pertama adalah rehabilitasi prasarana ekonomi seperti jembatan, alat-alat transpor, dan telekomunikasi yang bersifat fisik. Beberapa peraturan yang bersifat kontrol terhadap kegiatan ekonomi dikeluarkan. Pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang dan barang-barang yang disita dari musuh diperketat. Untuk mencegah meningkatnya harga barang dan timbulnya pelbagai manipulasi secara setempat, dikeluarkan peraturan pengendalian harga dan hukuman yang berat bagi pelanggarnya.[180]

Harta milik bekas musuh atau harta yang dibiayai dengan modal musuh, disita dan menjadi hak milik pemerintah Jepang. Harta milik musuh yang disita antara lain perkebunan-perkebunan, bank-bank, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan vital seperti: pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transpor. Khusus mengenai perkebunan dikeluarkan Oendang-Oendang No. 322/1942. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa *Gunseikan* (Kepala Pemerintah Militer) langsung mengawasi perkebunan-perkebunan kopi, kina, karet, dan teh. Pelaksanaan pengawasan perkebunan-perkebunan tersebut diserahkan kepada sebuah badan pengawas yang dibentuk oleh *Gunseikan*. Badan pengawas itu bernama *Saibai Kigyo Kanrikodan* (SKK). SKK selain bertindak sebagai pengawas juga bertindak sebagai pelaksana pembelian dan penentuan harga penjualan hasil perkebunan itu, maupun selaku pemberi kredit kepada perkebunan yang ditunjuk oleh *Gunseikan* untuk direhabilitasi (karena tidak semua jenis perkebunan diizinkan untuk direhabilitasi).[181] Sebagai pelaksana

---

[179] Sampai bulan Maret 1942 ditaksir ada 4.000 aparat produksi dengan jumlah pekerja 325.000 orang; lihat Ir. F. H. Davis, "Beknopt overzicht van den huidigen toestand der industrie in Nederlands-Indie dalam *Economisch Weekblad*, no. I, th. XXII, 1 Februari 1946, hlm. 2

[180] Misalnya di Yogyakarta, *Gunseikan* mengeluarkan maklumat, yang berkenaan dengan pengendalian harga. *Makloemat Gunseibu* No. 36 (2 Juli 1942); lihat *Kan Po* , no. 1, Agustus 1942, hlm. 23–24

[181] *Oendang-Oendang* No. 322/1942, 5 Juli 1942

penguasaan perkebunan-perkebunan itu ditunjuk beberapa perusahaan swasta Jepang. Tanpa petunjuk dari *Gunseikan* semua pihak dilarang untuk melakukan rehabilitasi perusahaan perkebunan. Larangan ini dikaitkan dengan kepentingan perang karena tidak semua perkebunan dinilai sebagai perusahaan penunjang perang. Hanya beberapa jenis perkebunan yang mendapat perhatian dari pemerintah Jepang, khususnya karet dan kina.[182]

Namun, secara terbatas perkebunan kopi, teh, dan tembakau masih dipertahankan pengusahaannya. Kopi, teh, dan tembakau diklasifikasikan sebagai barang kenikmatan, yang kurang berguna bagi usaha perang, maka perkebunan ketiga jenis tanaman ini diganti dengan tanaman penghasil bahan makanan dan tanaman jarak untuk pelumas.[183] Di Jawa hal itu dilakukan dengan menebang pohon-pohon kopi, sedangkan di Sumatra diusahakan menanam padi pada bekas perkebunan tembakau.

SKK sebagai pemegang monopoli penjualan dan pembelian hasil perkebunan dibubarkan dengan dikeluarkannya *Osamu Seirei* No. 30/1944. Kedudukannya diganti oleh *Kigyo Saibaien* (Penguasa Perkebunan); perannya terbatas pada pengusahaan kebun yang ditunjuk oleh *Gunseikan.*[184] Terutama kina yang dianggap merupakan bahan obat-obatan yang vital bagi perang, kelangsungan hidup perkebunannya diperhatikan benar dan dipelihara sebaik-baiknya. Pabrik obat-obatan dari kina yang pada zaman Hindia Belanda bernama *Bandoengsche Kinine Fabriek* (BKF) diteruskan oleh maskapai swasta Jepang *Takaco.*[185]

Demikian pula tanaman karet dianggap penting. Di Jawa Timur hampir semua perkebunan karet diharuskan terus bekerja. Di Sumatra perkebunan karet yang direhabilitasi seluas 672.000 hektare yang terdiri dari 216 perkebunan. Akan tetapi, di Kalimantan hasil karet menjadi surplus karena pengangkutannya sulit. Oleh karena karet dan kina dianggap sebagai barang penting, kerusakan perkebunan kina dan karet relatif kecil jika dibandingkan dengan yang lain. Kina diperkirakan rusak 3% dan karet hanya sampai 7%.[186]

---

182 *Kan Pō* , no. 52, th. III, Oktober 1944, hlm. 26

183 *Ibid.*, no. 32, th. 11, Desember 1943, hlm. 52; John O. Sutter, *Indonesianisasi,* 1962, hlm. 150

184 John O. Sutter, *ibid.*, hlm. 153

185 *Kan Pō* , no. 44, th. III, Juni 1944, hlm. 5

186 Untuk jelasnya persentase kerusakan dan penyusutan areal perkebunan adalah: karet 7%, teh 22%, kina 3%, kopi 22%, kelapa sawit 16%; lihat Ir. Prillwitz, "De ondernemingslandbouw tijdens de Japanse bezetting" dalam *Economisch Weekblad,* no. 1, th. XII (Maret 1946), hlm. 14, dan seterusnya

Hasil perkebunan lainnya adalah gula. Industri gula diusahakan kembali dengan modal swasta Jepang. Sekalipun sebagian besar pabriknya dibumihanguskan oleh Belanda, sebagian di antaranya berhasil direhabilitasi. Akan tetapi, dalam usaha pembukaannya kembali, Jepang kekurangan tenaga ahli. Untuk mencukupi kebutuhan itu personel ahli Belanda masih digunakan. Dari jumlah pabrik di Jawa yang semula 85 buah, yang berhasil direhabilitasi hanya 13 pabrik. Sebagai pengawas industri gula oleh pemerintah Jepang dibentuk *Tōgyo Rengōkai* (Persatuan Perusahaan Gula).

Karena persediaan gula di Jawa telah dianggap cukup dan yang diperkenankan menghasilkan surplus ekspor hanya negeri Jepang dan Taiwan, produksi gula setiap tahunnya dikurangi. Persediaan itu termasuk untuk kepentingan perang dan penduduk. Sampai tahun 1945 produksi gula di Jawa hanya mencapai 84.000 ton saja.[187] Oleh karena itu, *Gunseikan* mengeluarkan *Osamu Seirei* No. 31/1944 yang menyatakan bahwa rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula.[188] Alasan melarang ini untuk mengurangi jumlah gula yang beredar dalam masyarakat, juga untuk menekan produksi. Cara lainnya untuk menekan produksi gula adalah mengubah pabrik-pabrik gula menjadi pabrik senjata atau memindahkannya ke tempat lain untuk kepentingan perang. Selama itu perusahaan gula diserahkan kepada beberapa maskapai swasta Jepang yaitu: *Meiji Seito Kaisha, Okinawa Seito Kaisha, Taiwan Seito Kaisha,* dan *Dai Nippon Seito Kaisha.* Distribusi dan penjualannya dilakukan oleh *Jawa Hanbai Rengo Kumiai* (Koperasi Pusat Penjualan Gula Jawa). Tambang-tambang yang penting, khususnya minyak bumi, pengusahaannya kembali dilakukan oleh *Mitsui Kabushiki Kaisha.*

2. Keuangan, Perdagangan, dan Industri

Di bidang moneter, Pemerintah Pendudukan Jepang berusaha sekeras-kerasnya untuk mempertahankan nilai gulden atau rupiah Hindia Belanda. Tujuannya ialah agar harga barang-barang dapat dipertahankan seperti sebelum perang dan untuk mengawasi lalu lintas permodalan dan arus kredit. Uang rupiah Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebagai tanda pembayaran yang sah. Selanjutnya diambil tindakan terhadap bank-bank bekas milik musuh. Bank bekas musuh dilikuidasi berdasarkan Undang-Undang No. 13/1942, antara lain beberapa bank bekas milik

---

[187] Ir. Sosrohadikoesoemo, "Kedoedoekan Goela di Jawa", *Berita Perekonomian,* no. I, th. 1 (15 Mei 1946), hlm. 10–14; lihat juga Mr. Rodenburg, "De Suikerindustrie Op Java Tjdens de Japanse Bezetting", *Economisch Weekblad,* no. 5, th. XII (13 April 1946), hlm. 38–39

[188] *Kan Pō* , no. 44, th. III (Juni 1944), hlm. 6

Belanda yaitu *De Javasche Bank, Nederlandsche Handels Maatschappij, Nederlands-Indische Escompto Bank,* dan *Batavia Bank.* Bank-bank milik Inggris dan asing lainnya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan utang-utangnya sampai batas waktu 20 November 1942.[189] Bank-bank itu adalah *The Chartered Bank of India, The Hong Kong and Shanghai Corporation Ltd,* dan *Overseas Chinese Banking Corporation Ltd.* Kedudukan dan tugas-tugas bank-bank yang telah dilikuidasi itu digantikan oleh bank-bank Jepang yaitu *Yokohama Ginko, Mitsui Ginko, Taiwan Ginko,* dan *Kana Ginko.* Bank-bank Jepang semua ada di bawah supervisi *Nanpo Keihatsu Kenso* (Perbendaharaan untuk Kemajuan Wilayah Selatan).

Di bidang perpajakan diadakan pemungutan dari pelbagai sumber, termasuk pajak penghasilan, terutama yang mempunyai penghasilan antara f30.000 setahun. Antara orang Eropa (yang dimaksud adalah warga negara musuh) dan orang Cina terdapat perbedaan pemungutan pajaknya, yaitu berbanding 70 dan 35 kali dari jumlah yang dibayarkan pada masa penjajahan Hindia Belanda.[190]

Bidang perdagangan pada periode ini pada umumnya lumpuh akibat menipisnya persediaan. Barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat didistribusikan melalui penyalur-penyalur yang ditunjuk. Pengendalian harga diadakan dengan tujuan untuk mengurangi manipulasi. *Osamu Seirei* No. 38/1943 menetapkan bahwa semua barang harus dijual dengan harga yang ditentukan. Barang-barang yang diklasifikasi penting, dikuasai oleh pemerintah, baik penggunaannya maupun distribusinya diawasi. Para penyimpan barang-barang yang diklasifikasi penting harus melaporkan jumlah barang dan peredarannya, jika barang itu terjual. Barang penting dibagi atas dua golongan: *golongan pertama*, adalah barang-barang yang langsung kegunaannya bagi usaha perang, seperti mobil, sepeda motor, agregat (alat pembangkit listrik pabrik-pabrik) pelbagai barang dari baja, besi, aluminium; *golongan kedua*, adalah barang yang menyangkut kehidupan dan kebutuhan rakyat.

Mula-mula hanya beberapa macam barang yang digolongkan penting seperti benang tenun. Akan tetapi, pada akhir Pendudukan Jepang, hampir setiap *syū* (karesidenan) menyatakan beberapa jenis barang sebagai barang penting untuk keperluan daerahnya. Larangan pokok bagi barang penting jenis kedua adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain ke luar *syū*.[191] Secara lokal tiap *syū* melaksanakan autarki. Sektor *ekspor*

---

189 *Kan Pō* , no. *5,* th. I (Oktober 1942), hlm. 8

190 *Ibid.,* no. 1, th. I, (Agustus 1942), hlm. 27

191 *Ibid.,* no. 40, th. III (April 1944), hlm. 19 dan no. 24, th. II, Agustus 1943

dan *impor* selama perang ini lumpuh. Amerika Serikat mengadakan blokade keras terhadap wilayah-wilayah yang diduduki oleh Jepang.

Pengaturan-pengaturan, pembatasan-pembatasan, dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintah, adalah ciri dari ekonomi perang. Pola ekonomi perang yang direncanakan oleh Tokyo dilaksanakan secara konsekuen dalam wilayah yang diduduki oleh angkatan perangnya. Setiap lingkungan, daerah harus melaksanakan autarki, yang disesuaikan dengan situasi perang. Jawa dibagi atas 17 lingkungan autarki, Sumatra atas 3 lingkungan dan daerah *Minseifu* dibagi atas 3 lingkungan. Politik ekonomi menggariskan desentralisasi. Di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ini Pulau Jawa sebagai satu bagian dari "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya", mempunyai dua tugas. Tugas pertama adalah memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan, dan tugas kedua adalah mengusahakan produksi barang-barang untuk kepentingan perang. Kedua tugas yang dibebankan oleh "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" kepada para penguasa militer di Pulau Jawa, dilaksanakan secara konsekuen. Penduduk dan rakyat serta kekayaan Pulau Jawa dikorbankan untuk pelaksanaan itu. Kepentingan perang mendapat prioritas pertama.

Ketika perang menginjak tingkat yang kritis pada tahun 1944 di mana ofensif Sekutu sudah mendekat ke Jepang, tuntutan akan kebutuhan bahan baku semakin meningkat. Di Jawa tentara Jepang mulai menyusun pertahanan yang didasarkan atas konsepsi perang gerilya untuk waktu yang lama. Pada tingkat inilah pengerahan kebutuhan perang meningkat. Pada bulan Juni 1944 diadakan kampanye mengenai gerakan memperkuat tenaga perang tingkat pertama. Kampanye ini adalah kampanye pengerahan barang untuk menambah tenaga perang.[192] Pengerahannya dilakukan melalui badan-badan resmi seperti *Jawa Hōkōkai, Nōgyō Kumiai,* dan instansi-instansi resmi lainnya.

Pada sidang *Chūō Sangi In* bulan Oktober 1944 telah disepakati untuk:

1. memperkuat para prajurit *Peta* dan *Heihō;*
2. menggerakkan tenaga kerja untuk keperluan masyarakat dan perang;
3. meneguhkan susunan penghidupan masyarakat dalam masa perang;
4. memperbanyak hasil produksi pangan.

Khususnya usaha memperbesar produksi hasil bumi ini telah dibicarakan dalam rapat *Keizaibuō* (kepala urusan ekonomi) pada bulan

---

[192] *Kan Pō* , no. 40, th. III (April 1944), hlm. 17, khususnya mengenai Penjelasan *Osamu Seirei* No. 20/1944

April 1944. Dalam kesempatan tersebut *Gunseikan* menerangkan bahwa di dalam rangka memenangkan perang harus ditimbulkan tenaga perang dan dilaksanakan penggunaannya untuk perang.[193] Sebenarnya keadaan beras di Jawa sendiri sejak 1942 dirasakan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, untuk produksi bahan makanan direncanakan menambah areal tanah. Cara menambah areal ini adalah dengan jalan membuka tanah baru, terutama bekas perkebunan, dan memanfaatkan tanah lainnya yang belum pernah ditanami.

Usaha untuk menambah produksi beras itu sebenarnya adalah rencana lama. Di Sumatra Timur bekas perkebunan tembakau ditanami padi, yang luasnya lebih kurang 10.000 ha. Tanah pertanian baru di daerah Karo juga dibuka dengan menggunakan tenaga-tenaga tawanan. Di Kalimantan juga terdapat semacam kewajiban menanam padi. Hal yang sama dilakukan juga di Sulawesi.[194] Selain itu, juga diserukan untuk menebang tanaman kenikmatan seperti kopi dan teh. Yang menderita karena peraturan ini adalah rakyat. Mereka diharuskan menebang kebun-kebun kopi mereka dan menggantinya dengan tanaman lainnya untuk memperbesar produksi pangan.[195] Pulau Jawa dituntut untuk menghasilkan 50.000 ton beras dan 30.000 ton jagung.[196] Akibat yang parah lagi dari anjuran pemerintah ini adalah perusakan hutan-hutan. Pada masa itu hutan di Pulau Jawa tidak kurang dari 500.000 hektare yang ditebang secara liar.

Kecuali anjuran untuk menambah luas areal, pemerintah Jepang juga menyelenggarakan bimbingan secara intensif kepada para petani melalui para penyuluh pertanian.[197] Sebenarnya cara ini adalah cara yang baik, karena pemerintah Jepang secara tidak langsung telah memperkenalkan cara bertani modern, sebagaimana yang telah dilakukan di Jepang. Akan tetapi, kelemahan dari sistem ini terletak pada organisasinya; para pelatih (*shidokan*) bukanlah orang yang benar-benar mengerti masalah pertanian, sedang orang yang dilatih (*shidoin*) hanya mendapat latihan yang sangat singkat. Oleh karena itu, produksi bahan makanan terus-menerus merosot. Faktor lainnya yang sangat memengaruhi adalah jumlah pemotongan hewan yang meningkat dan menurunnya angka kelahiran hewan yang berguna untuk pertanian. Menurunnya produksi pangan di Jawa dapat dilihat pada angka-angka di berikut ini:

---

193 *Soeara Asia*, 17 April 1944

194 John O. Sutter, *op. cit.*, 1962, hlm. 150–151

195 *Kan Pō* , no. 3, th. II, (Desember 1943), hlm. 52

196 *Soeara Asia*, April 1944

197 *Ibid.*, 24 Oktober 1943

Tahun	Padi	Palawija	
1941	89.934.807	121.525.781	
1942	83.081.989	118.054.367	Kuintal
1943	81.125.225	107.109.669	= 100 kg
1944	68.115.550	90.055.664	

Sumber: Makmoer, th. 1 (25 Desember 1954), hlm. 13

Cara tersebut di atas akan lebih berhasil sekiranya tidak ada unsur paksaan yang meliputi pelaksanaannya dan penyetoran hasilnya. Rakyat hanya diperbolehkan memiliki 40% dari jerih payahnya, setiap kali musim panen; 30% harus disetorkan kepada pemerintah melalui *Beikoku Seimeigyo Kumiai* (*kumiai* penggilingan padi) dan dibeli dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah, dan 30% lainnya disediakan untuk bibit yang harus disetor kepada lumbung desa. Sebenarnya rakyat sendiri tidak menghendaki menjual padinya kepada pemerintah. Oleh karena itu, sering kali terjadi kecurangan, dalam penyetoran padi, akibat perbedaan harga padi di pasaran gelap. Bagaimanapun kerasnya tindakan pemerintah Jepang, tetap tidak berhasil memecahkan masalah beras ini. Oleh karena itu, ia meminta kepada Dewan Penasihat (*Sanyo Kaigi*) yang anggota-anggotanya terdiri dari: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Oto Iskandar Dinata, Dr. Buntaran Martoatmodjo, Prawoto Sumodilogo, Mr. R. Sartono, Sukardjo Wirjopranoto, dan R.P. Suroso, untuk memecahkan masalah beras ini. Sidang tersebut diadakan sehubungan dengan pertanyaan *Saikō Shikikan* pada Sidang *Chūō Sangi In* mengenai bagaimana meningkatkan partisipasi rakyat dalam hal pengumpulan padi. Dalam sidangnya pada tanggal 8 Januari 1945, *Sanyo Kaigi* menyimpulkan hal-hal berikut.

Cara-cara mengumpukan padi kurang sempurna, disebabkan oleh:

1. Musim kemarau yang panjang pada tahun 1944, panen tidak dapat diharapkan.
2. Cara memberikan penerangan mengenai penyetoran padi kepada pemerintah kurang cukup jelas bagi rakyat, dan kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa padinya dibawa ke luar keresidenan, bahkan ke luar Jawa.
3. Struktur masyarakat dan kondisi sosial pada umumnya belum teratur dan masih belum dapat menyesuaikan diri dengan keadaan perang. Hal ini dapat dibuktikan dengan:
   a. perlengkapan pemimpin desa masih kurang berkembang untuk dapat menyelesaikan masalah pengumpulan padi;
   b. solidaritas sosial cukup tinggi pada semua lapisan masyarakat desa, khususnya di antara mereka yang kaya dan berpengaruh;

c. adanya pasar gelap merupakan rintangan bagi kelancaran penyetoran padi;

d. pelbagai kecurangan yang timbul melemahkan gairah petani untuk menyetor padi.

4. Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pemindahan padi mulai dari tangan para pedagang sampai menjadi beras di tangan pemerintah.[198]

Gagalnya penyetoran padi merupakan akibat perlawanan dari rakyat desa. Akibat yang timbul adalah kekurangan bahan makanan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di dalam rangka ini sering kali timbul kecurangan dan pasar gelap. Harga resmi ditentukan 10 sen, sedang harga di pasar gelap tertinggi f3.25 (Jakarta) dan yang terendah f1.20 (Bojonegoro). Kelaparan melanda di pelbagai tempat, angka kematian tinggi. Di Wonosobo angka kematian mencapai 53,7% dan Purworejo 24,7%.[199]

Di samping rakyat dituntut untuk menyetor padi dan menaikkan produksi padi, mereka masih dibebani pekerjaan tambahan yang bersifat wajib, seperti menanam dan memelihara jarak. Pekerjaan semacam ini mengurangi waktu kerja petani apalagi banyak di antara mereka dipaksa menjadi *rōmusha*. Sebagian besar dari mereka adalah petani. Hal ini mengurangi jumlah tenaga kerja petani. Karena tenaga berkurang, gairah menjadi berkurang, ditambah keadaan gizi yang rendah, membuat stamina mereka mundur. Keadaan ini merupakan tindakan yang berlawanan dengan gagasan untuk meningkatkan produksi. Bagi rakyat tindakan pemerintah mengakibatkan kesengsaraan yang berlipat ganda. Penyakit akibat kekurangan gizi merajalela, ditambah timbulnya pelbagai bencana alam.

Masalah pokok yang menyangkut kehidupan rakyat, selain pangan adalah sandang, karena memang sejak masa sebelum pecah perang masalah sandang di Indonesia sangat tergantung kepada impor dari negeri Belanda. Untuk mengatasi masalah sandang ini diusahakan percobaan penanaman kapas dan usaha-usaha lainnya. Di Jawa, daerah-daerah yang dipilih untuk tempat percobaan, ialah Cirebon, Malang, Kediri, dan Bekasi. Setelah percobaan berjalan dua tahun, yang menghasilkan kapas terbaik adalah daerah Kediri dan Besuki.[200]

---

[198] Ben Anderson, "The Problem of Rice", *Indonesia II*, Oktober 1966, hlm. 85–87

[199] *Ibid.*, hlm. 93

[200] *Soeara Asia*, 27 Mei 1944

Di Sumatra, kapas juga ditanam di daerah Palembang, demikian pula di Bali dan Sulawesi.[201] Penanaman kapas ini dimasukkan sebagai rencana lima tahun. Memang pada awal pendudukan, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertenunan masih meneruskan usahanya. Karena kekurangan bahan baku, usahanya ditutup. Namun, usaha pemintalan rakyat secara massal didirikan dan rakyat dilatih untuk memintal. Mereka dikerahkan untuk memintal bahan-bahan yang mengandung serat kapuk randu. Percobaan-percobaan mencari ganti benang kapas dilakukan secara intensif. Kampanye untuk menolong orang yang tidak berpakaian, dilakukan secara intensif oleh *Jawa Hōkōkai* dan aparat pemerintah lainnya. Bahkan, pada bulan April 1944 diadakan "Pekan Pengumpulan Pakaian untuk Rakyat Jelata".[202] Masalah sandang merupakan masalah serius. Sebagian rakyat sudah memakai pakaian dari karung, bahkan sudah ada yang mengganti pakaian dengan lembaran karet mentah sebagai satu-satunya busana.

Di bidang keuangan, pemerintah hanya memperoleh pemasukan dari sumber yang terbatas, yaitu pungutan pajak dan penjualan hasil perkebunan. Pengeluaran memerlukan biaya yang sangat besar, khususnya untuk kepentingan perang, seperti pembuatan kubu-kubu pertahanan, pembuatan alat-alat perang, dan lain-lain pengeluaran yang berhubungan dengan usaha perang. Sumber penghasilan tidak dapat menutup jumlah pengeluaran yang besar sekali. Untuk menutup defisit, satu-satunya jalan adalah mengeluarkan uang baru. Jumlah mata uang yang beredar dalam masyarakat adalah 1,5 miliar di samping cadangan yang tersimpan dalam bank lebih kurang 2,5 miliar.

Karena sirkulasi uang sangat besar, pemerintah Jepang mengadakan kampanye menabung, untuk menyedot sebagian uang yang beredar. Semula di Jawa hasil kampanye itu sejumlah f20 juta dan pada akhir Februari 1944 mencapai f127 juta. Di samping itu, pengawasan terhadap kenaikan harga dengan tujuan untuk mengendalikan harga, ternyata tidak berhasil. Hal ini terbukti menimbulkan harga-harga baru di pasar gelap, sekalipun diancam dengan hukuman yang berat. Harga barang dengan cepat menjadi naik, apalagi sesudah Jepang menyerah kepada Sekutu.

Sesuai dengan asas ekonomi perang, segala aparat ekonomi dikuasai oleh pemerintah, maka bidang perdagangan dimonopoli maskapai swasta Jepang, seperti *Mitsui Kabushiki Kaisha, Osaka Reina Kabushiki Kaisha.* Monopoli juga dilakukan terhadap pembelian, penjualan, pembagian barang-

---

[201] John O. Sutter, *op. cit.*, hlm. 158

[202] *Soeara Asia*, 18 April 1944

barang yang berasal dari *kumiai.* Sebaliknya pedagang-pedagang pribumi diawasi secara keras, barang yang dijual harus didaftar dan dilaporkan hasil penjualannya.

3. Kehidupan Sosial-Ekonomi di Jakarta

Pada waktu Jepang menduduki kota Jakarta, kehidupan sosial ekonomi sehari-hari di kota ini tidak lebih baik daripada kota-kota besar lainnya di Indonesia meskipun Pemerintah Militer Jepang pada tangal 20 Maret 1942 telah menetapkan harga-harga bahan makanan yang paling tinggi di pasar, seperti:

100 kg beras – f.8.30 – f.10.30

1 kg gula pasir – f.0,10

1 kg garam – f.0,15

1 kaleng minyak kelapa – f.2,50.[203]

Akan tetapi, daftar harga-harga tersebut yang ditempelkan di pasar-pasar dan gang-gang tidak dituruti, sehingga menyulitkan kehidupan rakyat, bahkan penjualan bahan makanan yang telah ditetapkan itu dinaikkan harganya sebagai berikut:

1 kaleng minyak kelapa – f.4,40

1 kg gula pasir – f.0,25

1 liter beras – f.0,14

1 liter minyak tanah – f.5,60.[204]

Sementara itu, penduduk Jakarta mengalami krisis beras yang mencapai puncaknya di Tanah Abang/Karet.[205] Hilangnya beras di pasar mengakibatkan sebagian penduduk hanya makan ketan, singkong, ubi, dan buah-buahan.

Untuk mengatasi kesulitan hidup, berdiri Koperasi Perusahaan Dagang Indonesia di kampung Pulo Empang, di bawah pimpinan R. Boenawan.[206] Tujuannya ialah, berusaha membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan harga murah untuk para anggotanya yang menjadi korban kenaikan harga.

Pada tanggal 3 April 1942 berdiri pula Perserikatan Warung Bangsa Indonesia (Perwabi). Perwabi di bawah pimpinan B.R. Motik bertujuan

---

[203] *Pemandangan*, 23 Maret 1942

[204] *Ibid.*, 25 Maret 1942

[205] *Ibid.*, 26 Maret 1942

[206] *Ibid.*, 7 April 1942

mempersatukan warung-warung bangsa Indonesia, menjaga kepentingan para anggotanya. Di samping itu, Perwabi berusaha mendapatkan barang keperluan warung dengan mudah dan murah dan mencegah kenaikan harga. Sebagai langkah pertama Perwabi menetapkan harga barang-barang yang dijual harus sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah Militer Jepang seperti harga gula pasir tidak boleh dijual lebih dari f.0,14 satu kilogram[207]

Rakyat menyambut baik pendirian Perwabi, hingga dalam waktu singkat berdiri sebanyak 1.574 warung Perwabi, bertepatan diresmikannya kantor Perwabi di Jalan Pintu Air No. 70, Jakarta. Dengan meluasnya keanggotaan Perwabi, yang mempunyai kepentingan jauh berbeda dengan warung-warung kecil di kampung-kampung, kemudian Perwabi membentuk badan baru, bernama Warung Distribusi Perwabi. Dalam rapat tanggal 15 November 1943, yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta, fungsi Perwabi berubah menjadi badan koperasi.

Dalam usaha memperbaiki kehidupan rakyat dibentuk badan lainnya, yakni *Pengoeroes Besar Perhimpoenan Oentoek Memadjoekan Ekonomi Perang* (*PB Pomer*). Dalam rapatnya pada tanggal 3 Mei 1942, badan ini membentuk suatu komite yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta. Komite menganjurkan agar perusahaan-perusahaan ekonomi mengutamakan kebutuhan umum di dalam lingkungan Asia Raya.[208]

Sebaliknya, untuk kepentingan perangnya, Pemerintah Militer Jepang mengeluarkan keputusan pada tanggal 28 November 1942 yang memberatkan rakyat. Pemerintah memutuskan agar padi rakyat dijual kepada penggilingan padi yang dipimpin dan diawasi oleh tentara Jepang.[209] Di samping itu, ditetapkan pendirian warung-warung *kumiai* yang memonopoli pembelian dan penjualan barang-barang dari dan kepada penduduk, biasanya dengan harga sepihak.

Rakyat dipaksa menyerahkan hasil buminya sesuai dengan "Peraturan Tentang Padi dan Beras" yang dikeluarkan oleh Jakarta *Syūcōkan* pada tanggal 15 Oktober 1943. Peraturan ini memaksa rakyat menjual produksi padi kepada orang-orang dan badan-badan yang ditentukan oleh Jakarta *Syūcōkan*, antara lain kepada anggota-anggota *Seimaigyo Kumiai* (Perkumpulan Penggilingan Padi) di Mawuk, Klender, Karawang, dan Cikampek.[210]

---

[207] Rochmani Santoso, "Djakarta Raya pada Djaman Djepang" (skripsi), 1969, hlm. 50–51

[208] *Ibid.*, hlm. 51–52

[209] *Pembangoen*, Desember 1942

[210] Rochmani Santoso, *op. cit.*, hlm. 54

Demikian pula rakyat dilarang menjual dan mengirim padi keluar *gun* tanpa izin *Syūcōkan* atau pembesar yang ditunjuk. Bagi mereka yang melanggar peraturan, dikenakan hukuman penjara 3 bulan atau denda f.100. Peraturan tersebut berlaku juga untuk orang yang tidak menanam padi, karena dianggap sebagai orang yang menanam padi.[211]

Selanjutnya pemerintah Jepang mengumumkan diadakannya Susunan Perekonomian Baru, pada tanggal 28 April 1944, yang mengikutsertakan penduduk Pulau Jawa di dalam susunan ini, dengan maksud memperkukuh kedudukannya di bidang perekonomian untuk menuju kemakmuran bagi kepentingan perangnya. Ikut sertanya penduduk Jawa ke dalam badan itu menghilangkan kemerdekaan mereka untuk berperan di bidang perekonomian. Keuntungan yang mereka peroleh bukanlah untuk diri mereka, melainkan diserahkan dan diatur oleh pemeritah Jepang. Hal ini tidak sesuai dengan alasan pemerintah yang mengatakan Susunan Pekonomian Baru itu akan mendahulukan kepentingan umum, untuk hidup bersama dan makmur bersama, serta mementingkan kebaktian dan sebaliknya membasmi kepentingan diri sendiri.[212]

Susunan Perekonomian Baru di *Jakarta Tōkubetsu Syi* dimulai dengan didirikannya badan-badan *kumiai*, yaitu golongan/perkumpulan pelbagai perusahaan dan badan perdagangan yang didasarkan pada koperasi. Kaum pedagang dan pengusaha yang bergabung dalam suatu *kumiai* memudahkan Jepang untuk mengawasinya secara langsung dan memonopoli hasil keuntungannya.[213] *Kumiai* yang dianjurkan pendiriannya antara lain *Jakarta Tokubetsu Syi Hikaku Hin Seizo Giyo Kumiai* (Ikatan Pertukangan Barang-barang Kulit di *Jakarta Tōkubetsu Syi*).[214] Badan ini mengatur pembagian barang-barang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mengatur penjualan barang-barang buatan para anggotanya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Jakarta *Tōkubetsu Syi*. Dengan demikian, jelas para anggota *kumiai* itu yang terdiri dari pengusaha-pengusaha kulit hanyalah sebagai tenaga-tenaga kerja yang menghasilkan keuntungan untuk pemerintah, bukan untuk diri mereka.

Pada bulan Juni 1944 dibentuk *Jakarta Tōkubetsu Syi Insyōkuten Kumiai*,[215] yang merupakan gabungan perusahaan rumah makan. Dalam *kumiai* itu pemerintah menetapkan tiga macam tarif untuk rumah-rumah makan Cina dan dua macam tarif untuk rumah-rumah makan Indonesia.

---

[211] *Pembangoen*, 9 Desember 1943

[212] Rochmani Santoso, *op. cit.*, hlm. 148–149

[213] *Ibid.*, hlm. 153

[214] *Asia Raja*, 6 Juni 1944

[215] *Ibid.*, 24 Juni 1944

Bahkan dibentuk tiga *kumiai* perikanan.Yang pertama ialah *Jakarta Tōkubetsu Syi Suisan Kumiai* (Perserikatan Untuk Mengurus Penghasilan Ikan di *Jakarta Tōkubetsu Syi*). Tenaga pembuat ikan kering dipersatukan dalam badan ini yang dapat merupakan jumlah yang besar bagi pemerintah untuk mencapai kemenangan perangnya. Pada tanggal 12 Juni 1944 dibentuk *Jakarta Tōkubetsu Syi Gyogo Kumiai* (Perserikatan Perikanan di *Jakarta Tōkubetsu Syi*), yang antara lain akan mempersiapkan suatu badan perikanan dan mendidik ahli perikanan. *Kumiai* perikanan lainnya bernama *Jakarta Tōkubetsu Syi Sensyo Haikyugo Kumiai*, yang menggabungkan 148 penjual ikan laut, 162 penjual ikan tawar, dan 254 penjual ikan berkeliling di kampung. Mereka menjual ikan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh *Jakarta Tōkubetsu Syi*.

Setiap hasil produksi badan-badan *kumiai* tersebut berada di bawah pengawasan pemerintah dan harga jualnya pun ditentukan pemerintah. Demikian cara Pemerintah Militer Jepang memonopoli bidang perekonomian dengan mengorbankan hasil keringat rakyat.

Mengingat situasi peperangan yang semakin melemahkan kekuatan Jepang, sejak bulan November 1943 pemerintah memaksa rakyat untuk melakukan "usaha memperbanyak hasil bumi" di *Jakarta Sy¤*. Usaha ini dilakukan dengan cara menanam palawija, tidak hanya di tanah-tanah kosong tetapi juga di kebun-kebun yang tidak terpakai lagi, seperti di tiga kebun teh seluas ±900 ha yang terletak di Plered *Son* (Krawang Ken) oleh penduduk setempat ditanami dengan palawija.

Pada tanggal 10 sampai 16 maret 1994 diadakan"Pekan Perekonomian" di *Jakarta Sy¤*. Selama seminggu penduduk setempat terdiri dari para pejabat, sampai rakyat jelata, pegawai negeri maupun pegawai swasta dan murid-murid sekolah diwajibkan menanam bermacam-macam bahan makanan dan tanaman jarak di tanah-tanah yang kosong, dalam batas waktu yang telah ditentukan.[216]

Kantor Perekonomian di *Jakarta Tōkubetsu Syi* di dalam usahanya memperbanyak hasil bumi, selama seminggu lamanya itu mengadakan penerangan di kalangan murid-murid sekolah. Mereka dianjurkan supaya memperluas pekarangan sekolahnya agar dapat menghasilkan sejumlah besar perkebunan.

Dalam "Pekan Perekonomian", penduduk setempat dikobarkan semangatnya terutama dalam menanam kapas dan jarak. Kedua tanaman ini mempunyai fungsi sangat vital yang dibutuhkan Jepang dalam peperangan. Selama "Pekan Perekonomian para kiai, kepala sekolah, kepala

[216] *Asia Raja*, 8 Maret 1944

kantor, pemimpin *Seinendan* dan *Keibōdan*, *Fujinkai* melalui pidato mereka menganjurkan penanaman kapas dan jarak di setiap pekarangan sekolah, masjid, kantor, rumah, bahkan kuburan. Anjuran mereka dilengkapi dengan disediakannya tujuh kuintal biji kapas dan 2 kuintal biji jarak oleh kantor pertanian *Jakarta Tōkubetsu Syi*. Gerakan menaman kapas dan jarak secara serentak antara lain dilakukan oleh anggota *Fujinkai* di bawah pimpinan Ny. Harun di Petojo Ku.[217]

Gerakan mengumpulkan barang-barang perhiasan yang wajib dilakukan oleh rakyat Indonesia merupakan usaha pemerintah Jepang yang semakin menonjol untuk merampas kekayaan rakyat. Pemerintah Jepang memberi batas waktu dari tanggal 20 Desember 1944 sampai 20 Januari 1945 bagi pengumpulan barang-barang perhiasan. Alasan yang disiarkan pemerintah kepada masyarakat adalah barang-barang perhiasan seperti intan bermanfaat untuk menggosok barang-barang dari logam, terutama barang-barang dari kaca di pabrik-pabrik senjata. Untuk maksud itu, *Gumseikanbu* membentuk badan khusus yang mengumpulkan barang-barang perhiasan yang diharapkannya dari penduduk di seluruh Pulau Jawa sebagai tanda bakti mereka kepada pemerintah Jepang. Meskipun pemerintah menjanjikan barang-barang perhiasan akan dibayar sesuai dengan harga semestinya dan penilaian pegawai kantor gadai, pada kenyataannya penduduk menyerahkannya sebagai sumbangan. Sumbangan pertama datang dari *Jakarta Shūcōkan* Soetarjo Kartohadikoesoemo berupa giwang intan milik istrinya, R.A. Soetardjo, dan kedua putrinya Nn. Soesanti dan Nn. Sri.[218]

Penyerahan perhiasan dari penduduk dimulai tanggal 22 Desember 1944. Ny. R.A. Abdoerachman memimpin penyerahan perhiasan dari *Jakarta Tōkubetsu Syi Fujinkai*, *Syiku-Syiku* di Jatinegara, dan Gambir pada suatu upacara di kantor besar *Jawa Hōkōkai*, Jakarta.[219]

Sumbangan untuk meningkatkan harta kekayaan Jepang yang dilakukan di kalangan rakyat biasa antara lain dari M. Sapii berupa 4 butir berlian dan 6 butir intan. Ny. Soewarni Pringgodigdo menyumbang sepasang giwang berliannya, sedangkan Oei Tiang Tjoei, The Djing Seng, dan Kie Yoek Moi, ketiganya dari *Kakyō Sōkai* (Perkumpulan Golongan Tionghoa) menyumbangkan 12 macam perhiasan yang bertatahkan lebih dari 20 butir berlian.[220]

---

[217] *Asia Raja*, 26 Maret 1944

[218] *Ibid.*, 11 Juli 1944

[219] *Ibid.*, 15 Desember 1944

[220] Rochmani Santoso, *op. cit.* hlm. 158

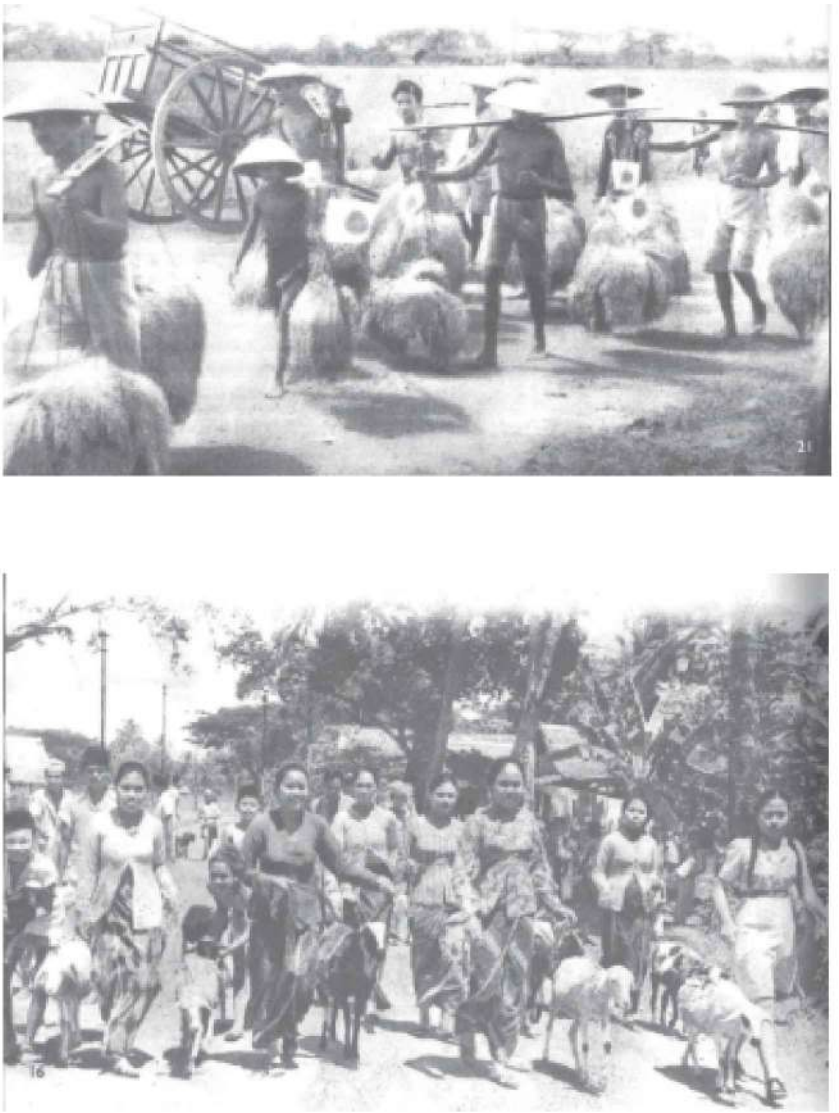

Gambar 1.20 Pengerahan tenaga rakyat semata-mata untuk kepentingan bala tentara Jepang seperti pengumpulan padi dan bulu biri-biri yang digunakan sebagai bahan pakaian (Sumber: *Djawa Baroe*)

E. Pendidikan, Komunikasi Sosial, dan Budaya

1. Pendidikan

Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia memperlihatkan gambaran buruk mengenai bidang pengajaran jika dibanding dengan masa-masa pemerintah Hindia Belanda. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500, sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20, perguruan tinggi/ fakultas terdiri dari 4 buah, dapat dikatakan untuk beberapa lama belum dapat melakukan kegiatan-kegiatannya. Jumlah murid sekolah dasar merosot 30%, sedangkan murid sekolah menengah merosot 90%. Guru-guru sekolah dasar berkurang 35%, sedangkan guru sekolah menengah yang aktif tinggal kira-kira 5%. Angka buta huruf tinggi sekali walaupun memang ada di sana-sini dilakukan usaha-usaha untuk pemberantasan buta huruf.[221]

Pada masa Pendudukan Jepang pendidikan tingkat dasar dijadikan satu macam saja yakni sekolah dasar 6 tahun. Sebenarnya Jepang mengadakan penyeragaman itu adalah hanya untuk memudahkan pengawasan terhadap sekolah-sekolah tersebut, baik dalam isi maupun hal penyelenggaraannya. Ternyata, kemudian penyeragaman tersebut menguntungkan bagi kita, terutama bila dilihat dari segi pendidikan itu sendiri yaitu berarti menghapuskan diskriminasi. Sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditujukan kepada keperluan Perang Asia Timur Raya, seperti disebutkan di bawah ini.

a. Mengadakan pelatihan bagi guru-guru di Jakarta untuk mengindoktrinasi mereka dalam *Hakko Ichiu* ("delapan benang di bawah satu atap", yang inti sarinya adalah pembentukan suatu lingkungan yang didominasi oleh Jepang yang meliputi bagian-bagian besar dunia).[222] Para peserta pelatihan diambil dari tiap-tiap daerah/ kabupaten. Sesudah selesai dari pelatihan tersebut mereka harus kembali ke daerah masing-masing dan mengadakan pelatihan untuk meneruskan hasil-hasil yang diperolehnya selama pelatihan di Jakarta.
b. Sekolah umum terdiri dari:
    1) sekolah rakyat enam tahun *(kokumin gakkō)*, di samping itu, masih ada lagi sekolah desa atau sekolah pertama;
    2) sekolah menengah pertama tiga tahun;
    3) sekolah menengah tinggi tiga tahun.

---

[221] Departemen Penerangan, *20 Tahun Indonesia Merdeka,* Jilid VIII, 1965, hlm. 35. Pemberantasan buta huruf ini dimasukkan dalam kategori pendidikan masyarakat. Pendidikan ini dipelopori oleh *Poetera* atau *Jawa Hōkōkai* dan *Tonarigumi, Soeara Asia,* 28 April 1943

[222] Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta ...,* hlm. 17

c. Sekolah guru terdiri dari:
   1) sekolah guru dua tahun (*shōtō shihan gakkō*);
   2) sekolah guru empat tahun (*chūtō shihan gakkō*);
   3) sekolah guru enam tahun (*kōtō shihan gakkō*).

Ternyata bahasa Jepang tidak saja diajarkan melalui sekolah-sekolah untuk para murid, tetapi masyarakat umum pun dapat mempelajarinya melalui kursus-kursus. Kursus bahasa Jepang antara lain diadakan di Balai Pustaka, Jakarta, dimulai tanggal 6 Juni 1942. Pengajarnya W.J.S. Poerwadarminta, yang memberikan kursus bahasa Jepang khusus untuk teman-teman sejawatnya, seperti Kartadiredja (Patih Jatinegara), Sutan Doko (Kepala Komisaris Polisi), dan Hilman Mangkudidjaja (Ketua Pengadilan Jatinegara) dan Pubaja (Wedana Kota).[223] Untuk para guru Indonesia sebagai pendukung perserikatan, di samping diadakan pelatihan, juga diadakan kursus-kursus bahasa Jepang, yang diakhiri dengan ujian. Jika mereka ternyata lulus dari ujian itu, kepada mereka diberikan sekadar tambahan gaji sebagai perangsang.

Rupanya disiplin militer yang merupakan ciri Pemerintah Militer Jepang diterapkan pula di bidang pendidikan. Murid-murid diharuskan melakukan *kinrohosyi* (kerja bakti), seperti mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama, dan memperbaiki jalan-jalan. Selain itu, juga diadakan latihan jasmani yang keras serta kemiliteran.

Murid-murid menerima gemblengan sedemikian rupa agar mereka "bersemangat Jepang" (*Nippon Seishin*). Hal lainnya yang harus dilakukan para pelajar adalah menyanyikan lagu kebangsaan Jepang *Kimigayo* dan lagu-lagu lainnya, melakukan penghormatan ke arah istana Kaisar di Tokyo *seikeirei*, dan menghormati bendera Jepang dan melakukan gerak badan *taiso*.

Demikianlah, sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan menjadi tempat indoktrinasi Jepang. Menurut Jepang, melalui pendidikan dibentuk kader-kader untuk memelopori dan melaksanakan konsepsi "Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya". Adapun "Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" dikatakan tergantung kepada kemenangan dalam "Perang Asia Timur Raya". Oleh karena itu, segala usaha harus ditujukan kepada memenangkan perang itu. Konsepsi dan pelaksanaannya telah siap dibuat oleh Jepang sebelum Perang Pasifik pecah.[224]

---

[223] Rochmani Santoso, *op. cit.*, hlm. 81–82

[224] *Pandji Poestaka*, no. 11, 20 Juni 1942, hlm. 362

Gambar 1.21 Latihan kemiliteran untuk anak-anak (Sumber: *Djawa Baroe*)

Gambar 1.22 Latihan gerak badan Jepang (*sumo*) di kalangan anak-anak
(Sumber: *Djawa Baroe*)

Jepang menyadari pentingnya pendidikan. Melalui pendidikan mentalitas dan cara berpikir masyarakat Indonesia dapat diubah dari mentalitas Eropa kepada alam pikiran Nippon. Melalui pendidikan, tercipta kader-kader khususnya para pemuda sebagaimana yang diharapkan Jepang.

Sesuai dengan Oendang-Oendang No. 12 tertanggal 22 April 1942, sekolah yang semula dibekukan dibuka kembali secara berangsur-angsur. Pada tanggal 1 Juni 1942 Sekolah rakyat yang pertama kali dibuka adalah HIS Djagamonjet, HIS Gastenweg, dan HIS Baloelweg, Jatinegara. Jumlah murid seluruhnya 966 orang, menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap ketiga sekolah itu. Kemudian, pada bulan Agustus 1942 berlangsung pembukaan sekolah-sekolah menengah seperti: Sekolah Menengah Pertama I di Prapatan 10; Sekolah Menengah Pertama II di Gambir Wetan, dan Sekolah Menengah Pertama III di Raya Straat Manggarai. Di samping sekolah-sekolah rakyat dan menengah di Jakarta itu, dibuka pula Sekolah Menengah Tinggi di Menteng 10.[225]

Tidak hanya berlangsung pembukaan kembali bekas sekolah-sekolah pemerintah Belanda, sekolah-sekolah swasta pun diizinkan dibuka kembali, misalnya Sekolah Agama Islam,[226] Sekolah Taman Siswa, dan Sekolah Muhammadiyah.[227] Sekolah-sekolah swasta yang dahulunya diasuh oleh badan-badan *missie* ataupun oleh *zending*, pada umumnya kembali dibuka dengan catatan bahwa sekolah-sekolah itu langsung diselenggarakan oleh pemerintah Jepang seperti sekolah-sekolah negeri. Mengenai pembukaan sekolah-sekolah swasta baru, Pemerintah Pendudukan Jepang memberikan kesempatan kepada perkumpulan-perkumpulan untuk membuka sekolah-sekolah bagi golongan minoritas, misalnya perkumpulan Chung Hua Chiao Thung diizinkan membuka sekolah untuk menampung anak-anak golongan keturunan Cina.[228]

Dengan dikeluarkannya *Osamu Seirei* No. 22/2604 (1944) mengenai penertiban sekolah-sekolah swasta, kebebasan untuk membuka sekolah-sekolah baru diberikan kepada *Jawa Hōkōkai*, sedang swasta lainnya hanya diperkenankan untuk membuka sekolah kejuruan dan bahasa. Pemberian izin demikian untuk *Jawa Hōkōkai* tidak mengherankan karena badan *organisasi* itu adalah untuk membantu Jepang dalam usaha perangnya.[229] Pembukaan sekolah-sekolah kejuruan dan bahasa adalah sejajar dengan kepentingan Jepang di Indonesia, yaitu untuk memenuhi tenaga pendidik.

---

[225] Williard H. Elsbree, *Japan's Role ini Southeast Asian Nationalist Movements*, 1953, hlm. 38

[226] *Sinar Baroe*, 10 Juli 2602 (1942)

[227] *Ibid.*, 2 *Agustus* 2605 (1945)

[228] *Soeara Asia*, 14 April 2605 (1945)

[229] *Djawa Baroe*, 9 Juli 2602 (1942)

Pemerintah Pendudukan Jepang juga mengadakan pelatihan-pelatihan atau indoktrinasi bagi para guru untuk seluruh Jawa. Pelatihan pertama dimulai pada bulan Juni 1942 di Jakarta. Mata pelajaran yang diberikan kepada mereka antara lain adalah: pendidikan semangat, bahasa dan adat istiadat Jepang, nyanyian Jepang, dan pendidikan tentang dasar-dasar pertahanan.[230]

Para guru turut juga menjadi pelaksana propaganda. Pelatihan-pelatihan bagi para guru untuk seluruh Jawa seperti disebutkan di atas merupakan *pilot project* Pemerintah Militer Jepang. Setelah selesai pelatihan, mereka dikembalikan ke daerah masing-masing. Mereka meneruskan hasil-hasil yang diperolehnya itu kepada rekan-rekan guru, murid-murid, dan juga kepada masyarakat lingkungannya.[231] Kedudukan golongan pendidik dalam zaman Jepang dapat dikatakan baik dalam masyarakat.

Pada awal zaman Jepang, semua perguruan tinggi ditutup. Awal sejak tahun 1943 ada beberapa yang dibuka kembali, seperti Perguruan Tinggi Kedokteran (*Ika Daigaku*) di Jakarta dan Perguruan Tinggi Teknik (*Kogyo Daigaku*) di Bandung. Di samping itu, Jepang membuka Akademi Pamong-praja (*Kenkoku Gakuin*) di Jakarta dan Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor.[232] Khusus untuk kaum perempuan didirikan Sekolah Kepandaian Poetri "Wakaba".

Demikianlah, jika dilihat dari segi pencapaian akademis (*academic achievement*), perguruan tinggi pada zaman Jepang benar-benar mundur, akan tetapi pencapaian yang paling penting oleh sekolah-sekolah ketika itu (1942–1945) adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan permulaan nasionalisasi staf pengajar serta pembentukan kader-kader muda untuk tugas besar dan berat pada zaman kemerdekaan.

2. Komunikasi Sosial

Sudah tentu dapat dipahami bahwa Angkatan Perang Jepang yang menguasai Indonesia, sepenuhnya mengendalikan media komunikasi massa seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, film, dan sandiwara. Dengan sarana tersebut, dapat dipancarkan bahan-bahan propagandanya.

Surat kabar dan majalah terbit tanpa izin istimewa, tetapi diawasi oleh badan-badan sensor. Pikiran-pikiran atau pendapat yang tiada sesuai

---

230 *Soeara Asia*, 9 Juli 2602 (1942)

231 *Ibid.*

232 *Asia Raja*, 9 Juli 2602 (1942)

Gambar 1.23 Kursus bahasa Jepang tidak hanya diadakan di sekolah-sekolah, tetapi juga di jalanan kota Jakarta (Sumber: *Djawa Baroe*)

Gambar 1.24 Kedatangan pejabat Jepang di sekolah, tempat pemuda Indonesia dididik menjadi ahli teknik (Sumber: Arsip Nasional RI, *Di Bawah Pendudukan Jepang*)

Gambar 1.25 Pejabat Jepang meninjau Sekolah Kepandaian Poeteri "WAKABA", didampingi pimpinan sekolah Nona Aziah (Sumber: Arsip Nasional RI, *Di Bawah Pendudukan Jepang*)

dengan kehendak Jepang, dilarang. Surat kabar yang terbit berada di bawah pengawasan badan yang diberi nama *Jawa Shinbunkai*.[233]

Surat kabar berbahasa Belanda, Cina, dan Indonesia dihentikan penerbitannya oleh Pemerintah Militer Jepang. Hanya untuk sementara, surat kabar *Tjahaja Timoer* dan surat kabar *Pemandangan* berusaha untuk meneruskan penerbitannya dengan menyatakan kepada Jepang "bahwa menyetopnya adalah suatu usaha menekan pikiran dan menghalangi kemajuan Indonesia". Tidak lama kemudian surat kabar tersebut dipaksa juga oleh Jepang untuk tidak terbit lagi.[234] Sebagai gantinya diterbitkan surat kabar *Asia Raja* mulai bulan April 2602 (1942) dengan pimpinan Sukardjo Wirjopranoto.

Pada tanggal 8 Desember 2602 (1942) di Jakarta diterbitkan oleh pemerintah sebuah surat kabar yang bernama *Jawa Shinbun.* Surat kabar berbahasa Jepang tersebut berada di bawah pimpinan Bunshiro Suzuki.[235] Surat kabar *Asia Raja* dan *Jawa Shinbun* merupakan sumber pemberitaan bagi semua surat kabar di Jawa. Selain itu, diterbitkan pula surat kabar *Kung Yung Pao* yang berbahasa Cina di bawah pimpinan Oei Tiang Tjoei.

Di Bandung surat kabar *Sipatahunan* dari Paguyuban Pasundan dan surat kabar *Nicork Express* dihentikan penerbitannya oleh Jepang dan diganti dengan surat kabar *Tjahaja* dengan pimpinan umum Oto Iskandar Dinata. Surat kabar *Mataram* kepunyaan Belanda di Yogyakarta diganti dengan surat kabar *Sinar Matahari* dengan pimpinan R. Sudjito, sedangkan surat kabar *Sedyo Tomo* kepunyaan orang Indonesia tidak diperbolehkan lagi terbit. Di Semarang surat kabar *De Locomotief,* surat kabar *Matahari,* surat kabar *Soeara Semarang* dan surat kabar *Daja Oepaja* semuanya dihentikan. Sebagai gantinya terbit surat kabar *Sinar Baroe* di bawah pimpinan Parada Harahap. Di Surabaya semua surat kabar kepunyaan orang Indonesia, Belanda, dan Cina dilarang terbit dan beredar, kemudian pemerintah Jepang menerbitkan surat kabar *Soeara Asia* di bawah pimpinan R. Tukul Surohadinoto.

Demikianlah gambaran surat kabar-surat kabar, baik yang dilarang terbit dan dihentikan peredarannya maupun yang diterbitkan oleh Jepang, yang kesemuanya itu tidak terlepas dari pertimbangan politik Jepang di Indonesia. Tindakan-tindakan yang demikian diambil pula di Sumatra (Palembang, Bukittinggi, Medan). Semua surat kabar yang diterbitkan oleh Jepang baik di Jawa maupun di Sumatra dicetak oleh percetakan surat kabar-surat kabar Belanda dahulu, sehingga bila dilihat rupa dan bentuknya surat kabar-surat kabar itu baik, tetapi jika ditinjau dari isinya dapat dikatakan mengalami kemunduran.

---

[233] *Asia Raja,* 1 Februari 2603 (1943)
[234] *Asia Raja,* sekitar bulan Juli 2602 (1942)
[235] *Asia Raja,* 4 Februari 2603 (1943)

Pada tanggal 2 Februari 2603 (1943), setelah surat kabar-surat-kabar yang berada di bawah pengawasannya beredar, Pemerintah Pendudukan Jepang mendirikan perserikatan (gabungan) surat kabar-surat kabar di Jawa yang diberi nama *Jawa Shinbunkai.* Pengurusnya terdiri dari pimpinan redaksi semua surat kabar yang terbit di Jawa termasuk *Jawa Shinbun* dan kantor berita *Domei* cabang Jawa. Ditunjuk sebagai ketua perserikatan, Bunshiro Suzuki dari surat kabar *Jawa Shinbun,* sedang Sukardjo Wirjopranoto dari *Asia Raja* ditunjuk sebagai Ketua Muda serta beberapa anggota pengurus lainnya atas pengangkatan *Gunseikan.*[236] *Jawa Shinbunkai* dijadikan badan hukum dan sejak itu pula semua surat kabar yang dahulunya berdiri sendiri berada dalam pengaturan dan pengawasan *Jawa Shinbunkai.* Baik isi, bentuk, jumlah, maupun daerah peredarannya ditentukan oleh organisasi itu. Di samping itu, didirikan pula badan sensor pers. Semua artikel tulisan yang dimuat, baik di dalam surat kabar maupun majalah, karya berbentuk cerita maupun sajak harus melewati badan sensor, dan baru dapat dicetak dan beredar bilamana telah dibubuhi paraf pegawai yang berwenang memberikan izin itu.

Minat pembaca pada umumnya baik, terbukti dari jumlah peredaran surat kabar harian tersebut. Sebagai contoh surat kabar *Sinar Baroe* pada bulan Juli 2602 (1942) mencatat tempat-tempat peredarannya hampir di semua kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti: Ambarawa, Batang, Blora, Pemalang, Purwodadi, Purworejo, Salatiga, Solo, Tegal, Temanggung, Madiun, Surabaya, dan Kedungjati.[237]

Terjadinya peningkatan minat membaca surat kabar itu mungkin disebabkan oleh tidak adanya pada waktu itu surat kabar lain dan ditambah lagi surat kabar itu memakai bahasa Indonesia atau ada bagian-bagian lain yang diberi tempat untuk bahasa daerah (Sunda, Jawa, Madura, dan lain-lain). Jumlah *oplah* pelbagai surat kabar di Jawa pada tahun *2603* (1943) sebagai berikut:

Soeara Asia di Surabaya..... .....23.000
Asia Raja di Jakarta..... ..... 18.000
Kung Yung Pao di Jakarta 5.000
Tjahaja di Bandung 8.000
Sinar Baroe di Semarang 7.000
Sinar Matahari di Yogyakarta ..... 5.000.[238]

---

[236] *Asia Raja,* 4 Februari 2603 (1943)

[237] *Sinar Baroe,* 2 Juli 2602 (1942)

[238] Parada Harahap, *Serba Sedikit tentang Pers*, 1952, hlm. 36

Selain surat kabar tersebut di atas diterbitkan juga majalah-majalah seperti *Djawa Baroe, Pandji Poestaka, Soeara Kita,*[239] dan *Warta Sy¤,* untuk tiap-tiap *sy¤* yang memuat warta daerah dan memakai bahasa daerah yang bersangkutan dan bahasa Indonesia. Oplah surat kabar atau majalah saat itu sangat terbatas karena kurangnya kertas, tinta, dan prasarana lainnya.

Seperti telah disebutkan, *Jawa Shinbunkai* setelah dijadikan badan hukum kemudian berfungsi sebagai pengawas terhadap surat kabar yang terbit dan beredar di Jawa. Oleh karena itu, Jepang mengangkat dan menempatkan beberapa orang wartawan berbangsa Jepang yang diberi kedudukan sebagai penasihat (*shidōbucō*) pada *Jawa Shinbunkai.* Wartawan-wartawan Jepang itu hanya menjadi penasihat, sedangkan yang bertindak sebagai penanggung jawab adalah orang Indonesia. Akan tetapi, dalam kenyataannya para *shidōbucō* itu lebih banyak menimbulkan kesukaran-kesukaran daripada membantu memperlancar penerbitannya.

Asia Raja masih terus terbit di Jakarta beberapa waktu setelah Proklamasi. Namun, kemudian terjadi pertentangan karena pihak Jepang melarang menyiarkan berita Proklamasi melalui surat kabar itu. Oleh karena itu, semua staf redaksi *Asia Raja* serentak meletakkan jabatan sehingga surat kabar tersebut terhenti penerbitannya. Sementara itu, beberapa orang wartawan Indonesia di bawah pimpinan B.M. Diah berhasil memaksa pegawai-pegawai Jepang untuk meninggalkan percetakan *Jawa Shinbunkai* (dahulu tempat mencetak *Java Bode),* dan kemudian mereka menerbitkan surat kabar *Merdeka* pada tanggal 1 Oktober 1945.

Demikian juga surat kabar di Bandung direbut oleh wartawan-wartawan Indonesia dan kemudian mereka menerbitkan surat kabar *Soeara Merdeka.* Surat kabar *Sinar Baroe* di Semarang digantikan oleh surat kabar *Warta Indonesia,* surat kabar *Soeara Asia* di Surabaya digantikan oleh surat kabar *Soeara Rakjat,* dan surat kabar *Sinar Matahari* di Yogyakarta digantikan oleh surat kabar *Kedaulatan Rakjat.*

Radio tidak kurang pentingnya sebagai alat komunikasi massa, dan karena itu Jepang pun setelah menduduki Indonesia terus bertindak menguasai radio, baik swasta maupun semipemerintah, seperti Perserikatan-Perserikatan Radio Ketimuran (PPRK), *Nederlands-Indische Radio Omroep Maatschappij* (NIROM), dan sebagainya.[240]

Setelah menghentikan semua aktivitas siaran radio swasta dan semipemerintah tersebut, Jepang mendirikan suatu badan yang mengurus dan menyelenggarakan siaran radio, baik di pusat maupun di daerah-daerah.

---

[239] Yang menerbitkannya *Sendenbu,* Djakarta, terbit satu kali sebulan tiap-tiap tanggal 10 dan 25. Diterbitkan secara gratis, setiap terbitan 20.000 lembar, *Asia Raja,* 13 Februari 2603 (1943)

[240] Kementerian Penerangan, Djawatan Radio Republik Indonesia, *Sedjarah Radio di Indonesia,* 1955, hlm. 26

Badan ini diberi nama *Hoso Kanrikyoku* untuk Jawa di bawah pimpinan Tomabeci yang mempunyai delapan cabang radio di daerah-daerah dan disebut *hōsōkyōku* Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, dan Surakarta. Cabang-cabang tersebut dipimpin oleh Jepang sendiri seperti halnya di Jakarta dipimpin oleh Shimamura.[241]

Selain adanya *hōsōkyōku* tersebut, di kabupaten-kabupaten didirikan lagi kantor studio yang diberi nama *Shōdansō*. *Shōdansō* ini selain menyelenggarakan penyiaran propaganda Pemerintah Pendudukan Jepang juga melakukan reparasi dan servis radio di daerah tersebut. Kantor inilah satu-satunya yang diberi tugas oleh Jepang untuk menyelenggarakan reparasi, servis, dan penyegelan radio. *Shōdansō* juga memegang peran penting dalam mengatur penyelenggaraan radio untuk umum, propaganda, penyegelan terhadap radio, atau menetapkan gelombang-gelombang mana yang boleh didengarkan. Pada masa Pendudukan Jepang, radio umum dipasang hampir di setiap tempat yang ramai sampai di pelosok-pelosok desa dengan maksud agar rakyat dapat mendengarkan siaran propaganda Jepang.[242] Pengawasan terhadap radio dilakukan dengan ketat untuk mencegah, jangan sampai ada siaran kecuali siaran-siaran dari delapan cabang studio (*hōsōkyōku*) tersebut di atas, lolos dan didengarkan oleh masyarakat.

Walaupun demikian, ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Jepang terhadap semua alat pemberitaan baik melalui radio, kantor berita *Domei*, maupun surat kabar, masih ada juga celah yang dapat ditembus oleh pejuang-pejuang Indonesia yang bekerja di kantor-kantor tersebut. Mereka mengetahui dari siaran-siaran luar negeri mengenai kedudukan kedua belah pihak yang sedang terlibat di dalam Perang Pasifik.

Pemerintah Jepang menerbitkan *Berita Gunseikanbu*, berisi undang-undang dan beberapa maklumat. *Berita Gunseikanbu*, undang-undang dan maklumat tersebut dikirim sampai ke pelosok-pelosok di Jawa melalui kereta api ke cabang-cabang barisan propaganda Jepang dan agen-agen surat kabar yang dahulunya kepunyaan *Jawa Shinbunkai.*

Sarana komunikasi, pers dan radio pada masa Pendudukan Jepang memainkan peran penting dalam menyebarluaskan serta meningkatkan semangat nasional rakyat Indonesia, karena mereka dapat mendengar dan membaca pidato-pidato dan tulisan-tulisan para tokoh pergerakan nasional Indonesia.

---

[241] Kementerian Penerangan, *op. cit.*, hlm. 27

[242] *Ibid.*, hlm. 22

3. Budaya

Radio turut menyebarluaskan pemakaian bahasa Indonesia. Dalam pada itu Indonesia sangat terisolasi dari hubungan dengan dunia luar sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa Pendudukan Jepang itu Indonesia tertutup ke luar dan ke dalam, karena komunikasi di dalam Indonesia sendiri tertutup, misalnya, antarpulau Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Seluruh komunikasi dikendalikan oleh Pemerintah Militer Jepang.

Lenyapnya bahasa Belanda dari dunia perguruan dan dari pergaulan sehari-hari memberikan kesempatan yang baik bagi pemakaian dan pengembangan bahasa Indonesia. Orang Belanda sendiri dilarang memakai bahasanya sendiri. Yang melanggarnya dituduh membantu musuh (Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris). Seperti diketahui, pada masa penjajahan Belanda, bahasa Belanda menjadi bahasa resmi di bidang pemerintahan.

Demikian kerasnya larangan pemakaian bahasa Belanda sehingga boleh dikatakan di semua toko, rumah makan, perusahaan, perkumpulan, dan lain-lainnya papan nama atau papan iklan yang berbahasa Belanda diganti dengan yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Jepang. Film atau gambar-gambar yang memakai bahasa Belanda dilarang beredar.[243] Mengenai bahasanya sendiri orang Jepang tidak jual mahal, malahan diobral, tidak seperti pada masa pemerintah Hindia Belanda, di mana bahasa Belanda hanya diberikan pada sekolah-sekolah tertentu dan tidak semua orang Indonesia diizinkan memakai bahasa Belanda terhadap orang Belanda.[244] Ketika itu sudah jelas bahwa maksud orang Jepang adalah untuk menggantikan bahasa Belanda dengan bahasa Jepang. Karena itulah di semua sekolah yang dibuka kembali oleh Jepang diberi mata pelajaran bahasa Jepang. Di kota-kota besar, madya, kecil, maupun di kantor-kantor diadakan kursus bahasa Jepang, yang juga mengadakan ujian. Bahkan terdapat pula sekolah-sekolah khusus untuk pengajaran bahasa Jepang. Pelajaran bahasa Jepang juga disiarkan melalui radio.[245]

Selain itu, Jepang juga menerbitkan surat kabar *Kana Jawa Shinbun*, yang memakai bahasa Jepang dengan mempergunakan huruf *katakana*. Disebutkan bahwa tujuan utama dari surat kabar itu adalah untuk menyebarluaskan bahasa Jepang dan meningkatkan pengetahuan membaca dan menulis bagi rakyat Jawa.[246] Demikianlah Jepang mendatangkan

---

[243] *Asia Raja*, 1 Februari 2603 (1943)

[244] Pada zaman Hindia Belanda ada yang pro ada yang kontra tentang pengajaran bahasa Belanda untuk anak bumiputra

[245] *Sinar Baroe*, 6 Juni 2603 (1943)

[246] *Ibid.*

beratus-ratus orang guru bahasa Jepang ke Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia, untuk mengajar bahasa Jepang.[247] Sebaliknya, orang Jepang mempelajari bahasa Indonesia secukupnya untuk berkomunikasi langsung dengan orang Indonesia, dan dengan pengetahuan bahasa yang minim itu, mereka dapat menjelajah sampai ke pelosok-pelosok Indonesia.

Oleh karena pada waktu itu banyak benar hal yang diucapkan atau dituliskan dalam bahasa itu, bahasa Indonesia maju dengan amat pesatnya. Perkembangan bahasa Indonesia ketika itu boleh dikatakan dipaksakan agar dalam waktu secepat-cepatnya dapat menjadi alat komunikasi yang dapat digunakan ke seluruh pelosok untuk semua bidang. Karena orang Jepang bermaksud untuk mengerahkan seluruh tenaga bangsa Indonesia guna "Perang Asia Timur Raya" sampai dari desa-desa yang jauh terpencil sekalipun, mereka merasa perlu menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia meluas ke segala penjuru, sedangkan semakin banyak orang Indonesia mengalami suatu perasaan yang selama ini belum dikenalnya dengan mendalam. Bertambah lama jalannya perang, bertambah banyak orang Indonesia memakai bahasa Indonesia, maka bertambah kuat pulalah terasa hubungan antara sesamanya. Bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi serta wahana integrasi bangsa Indonesia.

Penguasa Jepang tidak dapat lagi menahan pertumbuhan bahasa Indonesia. Mereka mau tidak mau mengabulkan keinginan bangsa Indonesia untuk menyempurnakan bahasanya demi pelaksanaan Sumpah Pemuda 1928. Pengajaran Jepang di Jawa pada tanggal 20 Oktober 2603 (1943), atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia mendirikan Komisi (Penyempurnaan) Bahasa Indonesia. Tugas komisi ini menentukan terminologi, yaitu istilah-istilah modern, serta menyusun suatu tata bahasa normatif dan menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Susunan anggota Komisi Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Mori (Kepala Kantor Pengajaran)
Wakil Ketua	:	Iciki
Penulis	:	Mr. R. Suwandi
Penulis Ahli	:	Mr. S. Takdir Alisjahbana
Anggota-anggota	:	Abas St. Pamuntjak, Mr. Amir Sjarifuddin, Armijn Pane, dr. Aulia, Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat, Drs. Moh. Hatta, S. Mangunsarkoro, Dr. R. Ng. Purbatjaraka, R.P. Prawiradinata, Dr. Prijono, H. Agus Salim, Sanusi Pane, Ir. Soekarno, Mr. R.M. Sumanang, dan lain-lain.[248]

[247] *Djawa Baroe*, no. 24, th. II, 15 Desember 2603 (1943), hlm. 8

[248] St. Takdir Alisjahbana, *Dari Perdjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*, 1957, hlm. 78

Penguasa Jepang terpaksa memenuhi hasrat bangsa Indonesia untuk menyempurnakan dan memperkembangkan bahasanya. Sesungguhnya mereka enggan melaksanakan dengan sungguh-sungguh keinginan orang Indonesia itu. Mereka mulai membuka Kantor Komisi Bahasa Indonesia dengan peralatan dan staf yang serba kurang. Soal penetapan nama "bahasa Indonesia" selalu ditunda-tunda, barulah setelah kekalahan di ambang pintu mereka mengizinkan pemakaian nama "bahasa Indonesia". Kantor pengajaran Jepang itu tidak pernah menyampaikan kata-kata yang sudah diputuskan kepada sekolah-sekolah dan kantor-kantor untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Komisi Bahasa Indonesia tidak pernah diumumkan.[249] Akan tetapi, berkat ketekunan para anggota komisi pada akhir masa Pendudukan Jepang di Indonesia telah dapat ditetapkan kira-kira 7.000 istilah.[250] Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Hal itu sesungguhnya merupakan formalisasi dari sesuatu yang telah menjadi kenyataan, yakni penggunaan bahasa Indonesia dalam percaturan umum.

Sifat sastra di masa Pendudukan Jepang sudah dengan sendirinya lain daripada sifat sastra di masa damai. Umumnya isi cerita dan sajak-sajak di tengah-tengah suatu perang yang dahsyat mengandung usaha menimbulkan semangat serta menyebarkan patriotisme atau menganjurkan semangat bekerja. Para pujangga tua meminta pada pujangga muda supaya menginsafi arti karya mereka bagi masyarakat agar dapat memberikan kepada masyarakat suatu pegangan hidup. Hasil sastra yang menimbulkan keraguraguan dan kebimbangan harus dijauhkan sehingga tidak meracuni masyarakat. Untuk itu, dibangkit-bangkitkan jiwa nasionalisme Indonesia dengan mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia itu sejajar dengan nasionalisme Asia.[251] Jiwa muda yang tadinya sedia menerima pikiran-pikiran cita-cita yang kelihatannya bagus dan indah, untuk beberapa lama hanyut dalam kekaguman semboyan-semboyan "Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" dan sebagainya, yang ternyata hanya merupakan balon-balon yang indah berisi angin.[252]

Karya sastra sesuai dengan anjuran pemerintah saat itu harus ditujukan ke arah usaha memenangkan "Perang Asia Timur Raya". Demikianlah dalam publikasi pemerintah ditampilkan karya-karya sastra pengganti pengaruh Barat. Dalam situasi yang demikian itu lahir juga karya-karya

---

[249] St. Takdir Alisjahbana, *op. cit.*, hlm. 88

[250] Departemen Penerangan, *20 Tahun Indonesia Merdeka,* Jilid VIII, hlm. 33

[251] *Almanak Seni,* 1957, hlm. 30

[252] H.B. Jassin, *Kesusasteraan Indonesia di Masa Djepang*, 1969, hlm. 9

sastra yang bersemangat sesuai dengan cita-cita perjuangan rakyat Indonesia. Untuk mengarahkan agar karya-karya seniman (seperti roman, sajak, lagu, lukisan, sandiwara, dan film) itu jangan menyimpang dari tujuan Jepang, didirikanlah sebuah Pusat Kebudayaan pada tanggal 1 April 2603 (1943) di Jakarta yang diberi nama bahasa Jepang *Keimin Bunka Shidōshō* .[253] Penyiaran hasil karya Pujangga Baru, begitu Jepang tiba di Indonesia, segera mereka hentikan.[254] Di dalam *Keimin Bunka Shidōshō* kegiatan sastrawan-sastrawan dapat diawasi oleh Jepang, karena baik *Keimin Bunka Shidōshō* maupun *Jawa Shinbunkai* tidak mengizinkan para pengarang atau sastrawan mengeluarkan isi hatinya dalam bentuk karangan atau cerita kecuali bila mendukung politik Pemerintah Pendudukan Jepang. Seorang sarjana Belanda mengatakan tentang berdirinya *Keimin Bunka Shidōshō* itu demikian: "Badan Pusat Kebudayaan ini membuktikan betapa sempurnanya Jepang dalam usahanya untuk menghapuskan kemungkinan-kemungkinan bagi tiap pernyataan berterang-terang perihal kebudayaan."[255]

Di dalam penjelasan pada waktu peresmian berdirinya *Keimin Bunka Shidōshō* disebutkan bahwa badan ini bertugas memimpin dan menilik budaya umum untuk meningkatkan derajat (mutu) budaya rakyat asli. Akan tetapi, semua itu tidak lepas dari kepentingan Jepang, karena disebutkan bahwa maksud dan tujuan utama badan ini ialah menanamkan dan menyebarkan seni dan budaya Jepang untuk rakyat di Indonesia.[256] *Keimin Bunka Shidōshō* mempunyai bagian-bagian, antara lain bagian musik, bagian sandiwara, bagian seni tari, dan bagian seni lukis.[257]

Keimin Bunka Shidōshō dimanfaatkan Jepang untuk mengerahkan para seniman, budayawan, dan sastrawan Indonesia. Namun, anggotanya memanfaatkan *Keimin Bunka Shidōshō* sebagai komunikasi untuk membicarakan pelbagai hal, khususnya menyangkut cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, *Keimin Bunka Shidōshō* tidak hanya merupakan alat untuk kepentingan Jepang, tetapi juga untuk kepentingan nasional Indonesia.

Pada tanggal 29 Agustus 1942 *Keimin Bunka Shidōshō* memulai kegiatannya dengan mengadakan pameran lukisan yang diikuti oleh pelukis Basuki Abdoellah, Agus Djajasoeminta, Otto Djaja Soetara, Kartono Joedokoesoemo, dan Ny. Emiria Soenassa yang merupakan satu-satunya pelukis perempuan waktu itu. Pameran yang berlangsung selama 60 hari

---

253 *Djawa Baroe*, th. II, no. 8, 15 April 2603 (1943), hlm. 8–10

254 Ajip Rosyidi, *Ichtisar Sedjarah Sastra Indonesia*, 1969, hlm. 35, hlm. 80–81

255 A. Teeuw, *Pokok dan Tokoh*, 1958, hlm. 11

256 *Ibid.*, hlm. 93

257 *Ibid.*, hlm. 8–10

di Jalan Noordwijk (sekarang Jalan Nusantara) No. 39 Jakarta ini mencapai sukses, sehingga diikuti oleh kegiatan lain. Ketua *Keimin Bunka Shidōshō* bagian seni suara, R. Koesbini berhasil membentuk grup seni suara dan lahirlah lagu-lagu ciptaannya seperti "Meruntuhkan Inggris-Amerika" dan lagu "Kalau Padi Menguning Lagi", yang menggambarkan harapan Indonesia kembali menjadi penghasil padi terbesar.

Komponis Cornel Simanjuntak menciptakan lagu-lagu, antara lain yang terkenal lagu "Tanah Tumpah Darahku" yang menggambarkan rasa cinta terhadap tanah air.[258] Begitu juga dengan lagunya "Maju Putra-Putri Indonesia" yang membangun semangat kesadaran bangsa Indonesia untuk membangun Jawa Baru, dalam rangka Asia Timur Raya.[259]

Karya-karya sastra yang mendukung politik Tiga A atau yang sejenis seperti *Tjinta Tanah Sutji* karangan Nur Sutan Iskandar; *Palawidja* karangan Karim Halim; *Angin Fudji* karangan Usmar Ismail, adalah karya sastra yang sejalan dengan propaganda Jepang untuk menggelorakan semangat berjuang dan berkorban untuk kepentingan Asia Timur Raya. Karya-karya seperti itulah yang diinginkan oleh Jepang.

Karya sastra yang bertentangan dengan atau menentang kebijakan dan kepentingan Jepang tidak boleh terbit dan beredar, bahkan kalau diketahui penciptanya ia harus berhadapan dengan *Kenpeitai.* Misalnya, sajak Chairil Anwar "Siap Sedia" yang menyebabkan pengarangnya harus mendekam dalam tahanan beberapa waktu. Sajak tersebut mengajak kawan-kawan untuk bangkit dengan kesadaran dan mengayunkan pedang untuk menuju dunia baru. Tentu saja yang dimaksudkan adalah semangat bangsa Indonesia, antara lain ia berseru:

Kawan, kawan
Dan kita bangkit dengan kesadaran
Mentjoetjoek dan menjerang beroelang
Kawan, kawan
Kita mengajoen pedang ke Doenia Terang.[260]

Gunseikanbu mendakwa pengarang, bahwa yang dimaksud dengan "Dunia Terang" dalam baris terakhir ialah negeri Jepang, sehingga pengarang dituduh menganjurkan pemberontakan terhadap Jepang.

Tjak Durasim dengan sandiwaranya (1944) menyentil kesewenang-wenangan Jepang dengan pantunnya antara lain: *Pegupon omahe doro Melok Nippon tambah soro. "Melok Nippon tambah soro"* artinya "ikut Nippon tambah

---

[258] *Djawa Baroe,* no. 7, 1 April 2605 (1945), hlm. 24
[259] *Ibid.*, no. 6, th. III, 5 Maret 2604 (1944), hlm. 34
[260] H.B. Jassin, *op. cit.*, 1969, hlm. 20

sengsara". Kemudian Tjak Durasim ditangkap dan ditahan, serta disiksa oleh *Kenpeitai* sehingga meninggal dunia.[261]

Gubahan-gubahan untuk seni drama, seperti drama karya Usmar Ismail *Api* dan *Tjitra*, yang mengambil tema kecintaan dan pengabdian kepada tanah air serta karya El Hakim (Dr. Abu Hanifah) yang menciptakan *Taufan di Atas Asia*, *Intelek Istimewa*, dan *Dewi Rini* adalah pedang bermata dua yang penuh arti bagi bangsa Indonesia.[262] Karena sensor yang ketat dari Jepang, pengarang-pengarang itu mencari kata-kata, susunan kalimat, sindiran yang samar-samar untuk menembus tembok dinding sensor.

Dalam usahanya meningkatkan jumlah massa agar berpihak kepadanya, Jepang semula membentuk *Jawa Eiga Kosha* yang dipimpin oleh Miss Dja, tetapi sebelum melaksanakan kegiatannya pada tanggal 12 April 1943 badan film ini berubah nama menjadi *Jawa Eiga Haikuska*, dan sekaligus bergabung dengan *Keimin Bunka Shidōshō*.[263] Dengan berdirinya *Jawa Eiga Haikuska*, pemutaran film Barat, terutama film asal Inggris dan Amerika, dilarang. *Jawa Eiga Haikuska* mengatur pemutaran film produk Jepang di beberapa tempat di Indonesia. Film produk Jepang tidak hanya diputar di bioskop, tetapi juga di tempat umum secara gratis.

Pada bulan Agustus 1943 Jepang membentuk Persatuan Aktris Film Indonesia (Persafi). Pada bulan berikutnya, September 1943, dibentuk Bagian Film Indonesia (BAF) pimpinan Inoe Perbatasari, Sunario, dan B. Arifin. Dengan adanya dua badan film itu, *Jawa Eiga Haikuska* tetap memutarkan film selama bulan Februari 1944, termasuk mengadakan pertunjukan *Kamisibai*, semacam wayang beber, dengan bantuan *Jakarta Syuco*.[264]

Dalam pada itu, selama Pendudukan Jepang, sandiwaralah satu-satunya tontonan, karena film luar negeri dilarang diputar oleh Jepang. Dengan demikian, sandiwara diberi kesempatan dan mendapat fasilitas serta kebebasan bergerak walaupun masih tetap dalam rangka propaganda Jepang. Sandiwara sekaligus berfungsi, baik sebagai penerangan maupun sebagai hiburan untuk rakyat, misalnya sandiwara *Bintang Surabaja*, *Tjahaja Timur*, *Warnasari*, dan *Miss Tjitjih*.[265] Sebelum Perang Pasifik, boleh dikatakan sandiwara hampir tidak ada.[266] Banyak dari kalangan generasi muda

[261] Tjak Durasim adalah anggota Parindra di Surabaya
[262] H.B. Jassin, *op. cit.*, hlm. 19
[263] Arsip Nasional, *op. cit.*, hlm. 73
[264] *Ibid.*, hlm. 74
[265] *Djawa Baroe*, th. IV, no. 7, 1 April 2605 (1945), hlm. 24. Semua badan yang menyelenggarakan tontonan harus mendapat izin dan cerita yang akan dimainkan juga harus terlebih dahulu dikirim kepada sensor Jepang untuk memperoleh izin pertunjukan, *Sinar Baroe*, 16 Januari 2603 (1943)
[266] Andjar Asmara, "Sandiwara Dimasa Datang", *Mimbar Indonesia*, no. 2 (22 November 1947), hlm. 14

menceburkan diri ke dunia sandiwara atau menjadi pengarang. Artis-artis Jepang juga ikut terjun seperti yang dilakukan oleh Persatuan Artis Film Indonesia (Persafi). Hal itu turut mendorong artis-artis Indonesia profesional maupun amatir untuk memulai eksperimen dengan mementaskan lakon-lakon yang diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia.

Adanya sensor yang keras, sukarnya kertas, dan tidak adanya pers yang bebas, membuat kehidupan sastra hanya bergerak melalui saluran-saluran resmi Jepang. Keadaan itu menyebabkan tiadanya kesempatan untuk menyiarkan atau mengeluarkan perasaan sehingga api terus menjalar di bawah tanah.[267] Akan tetapi, adalah keliru untuk memungkiri adanya nada patriotisme dalam karangan-karangan dan sajak-sajak, sekalipun harus disebutkan "di dalam lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" di belakang tiap perkataan "tanah air Indonesia".

Kedudukan masyarakat sastrawan relatif baik karena terdapat fasilitas bagi perkembangan sastra. Cabang-cabang seni seperti seni drama, seni film, seni musik, dan seni rupa menerima fasilitas yang sama. Kegiatan seni diatur dan diawasi oleh suatu badan yang dibentuk oleh penguasa Jepang, karena dimasukkan sebagai bagian propaganda guna menunjang "Perang Asia Timur Raya".

Pada masa Pemerintahan Pendudukan Jepang muncul beberapa pengarang dan penyair baru, misalnya, M.S. Ashar, Usmar Ismail, M.H. Lubis, Amal Hamzah, Nursyamsu, Anas Ma'ruf, Maria Amin, Rosihan Anwar, dan El Hakim.

Meskipun *Keimin Bunka Shidōshō* merupakan pusat kegiatan propoganda Jepang di bidang kebudayaan, tidak semua seniman aktif maupun bergabung di dalamnya. Kelompok-kelompok mandiri, antara lain kelompok sandiwara "Dardanella" dengan bintangnya yang terkenal saat itu Dewi Dja (Miss Dja) dan "Orion" yang dipimpin oleh Miss Ribut. Sedangkan kelompok lainnya, yakni Persatuan Sandiwara Amatir Maya, berdiri sebagai akibat ketidakpuasan seniman panggung seperti D. Djajakusuma dan pengarang Abu Hanifah menghadapi kebijakan Pemerintah Militer Jepang, khususnya *Keimin Bunka Shidōshō*. Bahkan meningkatnya rasa sentimen terhadap penguasa lahir dalam pertemuan dan diskusi para seniman di *Keimin Bunka Shidōshō* . Mereka menghasilkan pelbagai karya seni yang tidak dapat disiarkan saat itu, tetapi kemudian terkenal pada masa RI. Sajak-sajak Chairil Anwar merupakan seni yang membakar semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia.[268]

---

[267] A. Teeuw, *op. cit.*, hlm. 12

[268] Arsip Nasional, *op. cit.*, hlm. 74–75

F. Perlawanan Rakyat terhadap Jepang

1. Perlawanan di Kalangan Kelompok Agama

Pelecehan terhadap agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia menimbulkan kekecewaan yang berakhir dengan perlawanan terbuka. Kebiasaan orang Jepang yang mendewakan "kaisarnya" dengan penghormatan membungkukkan badan ke Istana Kaisar di negeri Jepang, yang dikenal dengan sebutan *seikeirei* sangatlah bertentangan dengan agama Islam. *Seikeirei* yang wajib dilakukan pada upacara-upacara mirip dengan melakukan "rukuk" pada saat umat Islam melakukan sembahyang. Bagi umat Islam, yang wajib disembah hanyalah Allah yang tidak tampak, bukan manusia yang ada di depannya. Pertama-pertama Abdul Karim Amrullah, penasihat pada S*humubu* (Kantor Urusan Agama), yang mengemukakan penyembahan kaisar itu tidak dapat disatukan dengan monoteisme Islam.[269] Protes Amrullah diperlihatkannya pada suatu pertemuan 59 kiai seluruh Jawa di Bandung, pimpinan Kolonel Horie pada tahun 1943. Amrullah satu-satunya orang Indonesia yang waktu itu ditempatkan di antara para perwira Jepang, yang tetap duduk ketika para hadirin dan lainnya bangun berdiri untuk melakukan s*eikeirei*.[270] Pemerintah Militer Jepang tidak mengambil reaksi keras saat itu, tetapi hanya menekankan perbedaan antara penyembahan kepada kaisar dan yang diberikan umat Islam kepada Allah, seperti yang dikatakan Haji Abdul Hamid Ono, antara lain:

> " ... banyak orang Islam sangat enggan mengikuti (upacara) pemberian hormat, mereka yakin bahwa hal itu identik dengan rukuk, yang merupakan sebagian dari sembahyang (Islam). Pemikiran dan keraguan semacam ini sama sekali keliru. Penghormatan kepada kaisar sama sekali berbeda dengan rukuk dan dalam kenyataannya hampir tidak ada satu pun yang sama. Melakukan penghormatan bukanlah sembahyang ...."[271]

Meskipun demikian, Pemerintah Militer Jepang tidak memutuskan untuk menghapuskan *seikeirei* bagi umat Islam pada upacara-upacara resmi, misalnya pada acara pembukaan kursus-kursus maupun pelatihan para kiai dan ulama pada bulan Juli 1943. Karena dukungan umat Islam sangat diharapkan untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya, Kyai Mas Mansur memberikan syarat dengan mengatakan:

---

[269] Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, (terj. Daniel Dhakidae), 1980, hlm. 15

[270] *Ibid.*, 1980, hlm. 15

[271] *Ibid.*, hlm. 156

" ... kita bisa berkerja sama (dengan tentara dari Nippon), akan tetapi dengan syarat dipakai suatu jalan yang tidak menghina agama. Namun, jika sekiranya agama dihinakan, haruslah disadari bahwa orang-orang Islam yakin untuk membela agamanya, apa pun yang terjadi. Dan hal ini dipahami oleh mereka semua."[272]

Akhirnya umat Islam dibebaskan dari keharusan melakukan *seikeirei* pada pertemuan-pertemuan agama. Bahkan, Dr. Hoesein Djajadiningrat diangkat sebagai *Sōmubuchō* pada bulan Oktober 1943. Kepada seorang tamunya yang beragama Islam dari Sumatra, ia mengatakan:

"Pemerintahan Militer Jepang kini telah menyadari bahwa *Keirei* bertentangan dengan kepercayaan Islam. Konsekuensinya hal itu tidak lagi dituntut di dalam pertemuan-pertemuan orang-orang Islam.[273]

Umat Islam di Indonesia tidak hanya melakukan perlawanan tertutup, tetapi juga perlawanan terbuka atau perlawanan bersenjata. Perlawanan terbuka yang bermotifkan agama dilakukan pertama kali di Aceh setelah delapan bulan tentara Jepang masuk ke daerah ini. Perlawanan terjadi di Cot Plieng Bayu, dekat Lhok Seumawe yang dipimpin oleh seorang ulama muda bernama Teungku Abdul Djalil. Jepang dianggapnya sebagai setan-setan yang merusak ajaran Islam. Sebagai pemimpin madrasah, di kalangan murid-muridnya ia mengobarkan semangat jihad dan mati syahid. Dianjurkannya mereka membaca *Hikayat Perang Sabil*. Dalam khotbah-khotbah, ia mengatakan Jepang keparat jenis majusi (*keuparat biek majusi*), sedangkan Belanda dikatakan kafir berkitab (*kaphee meukitab*). Ia menentang pula kewajiban melakukan *seikeirei*, yang dianggapnya mengubah kiblat ke arah matahari.[274]

Teungku Abdul Djalil tidak memedulikan panggilan polisi Lhok Seumawe dan Komandan *Kenpeitai* di Kutaraja. Ia tidak pula mengindahkan nasihat beberapa tokoh masyarakat seperti bekas gurunya, Teungku H. Hasan Kruengkale, agar ia menghentikan kegiatannya. Ia bahkan mempersenjatai murid-muridnya dan terdengar suara ratib dan pembacaan *Hikayat Perang Sabil* di dalam masjid dan meunasah-meunasah sekitar daerah Cot Plieng.[275]

Murid-muridnya melarang Komandan *Kenpeitai* Lhok Seumawe, Hayashi, yang berangkat ke Cot Plieng pada tanggal 7 November 1942,

---

[272] Harry J. Benda, *op. cit.*, hlm.157

[273] *Ibid.*, hlm.158

[274] Syamaun Gaharu: "Pemberontakan Rakyat Aceh Melawan Kekuatan Belanda dan Jepang" (Naskah), hlm. 4

[275] *Ibid.*, hlm. 5

untuk bertemu dengan pemimpin mereka. Usahanya untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik itu berakhir dengan ditombaknya Hayashi oleh seorang pengawal Abdul Djalil, tetapi ia berhasil melarikan diri ke Lhok Seumawe. Tidak lama kemudian, pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengerahkan pasukannya yang bersenjatakan modern dari Bireuen, Lhok Seumawe ke Cot Plieng. Di sini, selama setengah hari, Jepang berhadapan dengan murid-murid Abdul Djalil yang hanya bersenjatakan tradisional. Keberhasilan Jepang menguasi Cot Plieng diikuti oleh tindakan mereka yang membakar masjid dan rumah-rumah penduduk serta menewaskan 86 orang murid Abdul Djalil.

Pada tanggal 13 November Jepang meneruskan serangannya ke tempat Abdul Djalil beserta para pengikutnya menyingkir, yakni di Blang Gampong Teungah. Abdul Djalil tewas di tempat ini bersama 19 orang pengikutnya, sedangkan 5 orang lainnya ditangkap.[276] Sebagai bukti keberhasilan Jepang, kepala Abdul Djalil dipisahkan dari tubuhnya dan dibawa ke Lhok Seumawe, bagian tubuh lainnya dikubur di bekas masjid Cot Plieng.[277]

Perlawanan bersenjata bermotifkan agama terjadi pula di Singaparna, desa Sukamanah, dekat Tasikmalaya, pimpinan K.H. Zaenal Mustafa pada bulan Februari 1944. Ia menggangap Jepang musuh bangsanya karena itu ia tidak mau bekerja sama dengan penguasa itu. Ia juga tidak mau melakukan *seikeirei*. Ia pun menolak beberapa kali permintaan untuk menemui komandan *Kenpeitai* Tasikmalaya sehubungan dengan tindakannya.

Penolakan Zaenal Mustafa dianggap sebagai sikap perlawanan dan berakibat sepasukan polisi Jepang begerak ke Sukamanah pada tanggal 24 Februari 1944 untuk menangkapnya. Para pengikutnya berhasil menyerang dan melawan mereka, tetapi mereka kemudian dibebaskan.

Keesokan harinya, empat orang anggota *kenpeitai* berangkat lagi ke Sukamanah untuk memaksanya menemui komandan mereka di Tasikmalaya. Setelah salat Jumat tanggal 24 Februari 1944, Zaenal Mustafa beserta para pengikutnya kembali menolak permintaan menghadap komandan mereka dan penyerahan senjata-senjata polisi yang berhasil dirampas oleh para pengikut Zaenal Mustafa. Penolakan itu diikuti dengan penyergapan, yang mengakibatkan tiga orang di antara empat orang anggota *kenpeitai* terbunuh, sedangkan satu orang berhasil melarikan diri dalam keadaan luka. Sebagai akibatnya, pertempuran yang tidak seimbang terjadi antara pasukan santri bersenjata tradisional dengan pasukan Jepang

---

[276] Muhammad Ibrahim, *et al., Sejarah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm. 120

[277] Syamaun Gaharu, *op. cit.*, hlm. 6

bersejantakan modern. Setelah perlawanan, pimpinan Zaenal Mustafa dipatahkan oleh Jepang, ia dan sejumlah besar pengikutnya ditangkap. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta, 79 orang dipenjara di Sukamiskin, Bandung dan 23 orang di penjara Cipinang, Jakarta, di antaranya Zaenal Mustafa. Ia bersama 17 orang lainnya akhirnya dibunuh Jepang di penjara ini, 5 orang lainnya meninggal akibat siksaan. Jumlah seluruhnya 198 orang termasuk yang tewas dalam pertempuran. Di pihak Jepang yang tewas 3 orang dan 20 orang luka-luka.[278]

2. Perlawanan di Kalangan Militer

Rendahnya status perwira Peta, pemerasan ekonomi, dan pengerahan tenaga kerja secara paksa (*rōmusha*) untuk kepentingan perang Jepang merupakan benih-benih tumbuhnya perlawanan bersenjata di kalangan militer. Salah satu di antaranya ialah perlawanan yang dilakukan oleh para anggota tentara Peta di *Daidan* Blitar yang dikenal dengan nama Pemberontakan Tentara Peta Blitar pada tanggal 14 Februari 1945.

Daidan Blitar yang dibentuk pada tanggal 25 Desember 1943, terdiri dari tiga *chūdan* yang masing-masing dipimpin oleh seorang *chūdanchō*. Setiap *chūdan* terdiri dari tiga *shōdan*[279] yang masing-masing dipimpin oleh seorang *shōdanchō* di antaranya Supriyadi. Ia yang waktu itu belum berumur 22 tahun dikenal sebagai pemrakarsa pemberontakan terhadap kekuasaan pemerintah Jepang.[280]

Selama pelatihan kemiliteran pertama berlangsung, *Daidan* Blitar dipisahkan dari masyarakat. Setelah pelatihan dasar kemiliteran selesai, mereka mendapatkan kelonggaran untuk menemui keluarganya masing-masing. Pada saat itu mereka mendengar penderitaan para petani yang dipaksa menjual padinya kepada *kumiai-kumiai* (organisasi pembelian padi) melebihi jatah yang telah ditentukan sehingga sisanya tidak cukup menghidupi keluarganya. Mereka pun mendengar Jepang telah memerintahkan pembelian telur secara besar-besaran dengan harga murah. Katanya untuk tentara Peta, tetapi pada kenyataannya mereka tidak pernah mendapatkan jatah telur, bahkan sering makan *grontol* tanpa lauk pauk.[281]

---

[278] Karkono Kamajaya, *et al.*, *Wajah dan Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional*, 1985, hlm. 92

[279] *Daidan* kurang lebih sama dengan batalion, *cūdan* kurang lebih sama dengan kompi, *shōdan* kurang lebih sama dengan peleton; Nugroho Notosusanto, *Pemberontakan Tentara Peta Blitar Melawan Jepang (14 Februari 1945)*, 1968, hlm. 10

[280] *Ibid.*, hlm. 20

[281] *grontol*, biji jagung kering yang direbus

Kekecewaan para anggota tentara Peta terutama para perwiranya timbul karena merasakan betapa rendahnya martabat mereka dibandingkan dengan anggota tentara Jepang. Perwira-perwira tentara Peta diharuskan memberi hormat lebih dahulu kepada tentara Jepang. Mereka pun harus menghadapi kesombongan dan penghinaan, yang dilakukan para tentara dan tamtama Jepang.[282]

Kekecewaan semakin meningkat pada saat tentara Peta bertugas mengawasi pekerjaan para *rōmusha* membangun kubu-kubu di Pantai Selatan. Sejak dini hari para *rōmusha* yang mirip kerangka berjalan dikumpulkan dan dipaksa bekerja berat dari pagi sampai sore hampir-hampir tanpa istirahat dan tanpa bayaran. Makanan dan bantuan kesehatan yang didapatkan para *rōmusha* sangatlah minim sehingga separuh dari mereka jatuh sakit dan meninggal dalam waktu singkat pada akhir tahun 1944. Sejumlah penduduk laki-laki di desa-desa di sekitar mereka menipis, sehingga sebagai gantinya dikerahkan *rōmusha* perempuan. Sama halnya dengan *rōmusha* laki-laki, *rōmusha* perempuan yang kekuatan fisiknya tidak kuasa mengalami penyiksaan pun menjadi korban, dan jumlahnya lebih banyak daripada *rōmusha* laki-laki.

Pengalaman traumatis itu merupakan faktor utama yang mendorong para anggota *Daidan* Blitar untuk menentang terhadap pelatih-pelatih Jepang. Dalam suasana demikian terdengar desas-desus bahwa tentara Peta merencanakan pemberontakan terhadap Jepang dan merebut kemerdekaan dengan kekuatan senjata. "Bersiaplah!", demikian isyarat yang dibisikkan dari *chūdan* ke *chūdan*, dari *shōdan* ke *shōdan*, dan dari *budan* ke *budan* (semacam regu).

Perasaan nasionalisme tercermin dari tindakan yang dilakukan oleh para anggota tentera Peta Blitar. *Shōdanchō* Supriyadi dalam rapat rahasia mengatakan bahwa tujuan perlawanan ialah mencapai kemerdekaan. Dikatakannya pula kepada *Daidanchō* Soerachmad sehubungan dengan janji Jepang untuk memberi kemerdekaan Indonesia di kemudian hari, bahwa janji itu omong kosong, saya tidak percaya. Lain halnya dengan *Shōdanchō* Suparjono yang sebelumnya mengambil prakarsa untuk secara sistematis mengajarkan lagu "Indonesia Raya" dan lagu-lagu Indonesia lainnya kepada anak buahnya, antara lain lagu yang paling digemarinya yaitu "Di Timur Matahari mulai Bercahaya", sedangkan lagu-lagu Jepang jarang terdengar.[283] Tindakan yang dilatarbelakangi oleh perasaaan nasionalisme lainnya, dilakukan oleh *Shōdanchō* Partohardjono yang melakukan pengibaran bendera Merah Putih di lapangan besar di seberang

[282] Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta ...*, hlm. 117

[283] Nugroho Notosusanto, *Pemberontakan Tentara Peta Blitar*, hlm. 18–19

jalan di depan *Daidan* pada dini hari tanggal 14 Februari 1945, sebelum ia meninggalkan kota menyusul teman-temannya. Demikian pula *Budanchō* Sunanto, sebelum meninggalkan asrama ia memerintahkan anak buahnya menurunkan spanduk yang bertuliskan "Indonesia akan Merdeka" dan merobek kata "akan" dengan pedangnya. Setelah spanduk itu disambungkan kembali tertera kata-kata yang berbunyi: "Indonesia Merdeka" pada spanduk itu yang kemudian dipasang kembali di tempat semula.

Salah satu di antara mereka, yakni *Shōdanchō* Supriyadi, merupakan pemrakarsa perlawanan. Pada tahap perencanaan ia dibantu oleh *Shōdanchō* Muradi, *Budanchō* Halir, dan *Budanchō* Sunanto. Sejak pertengahan September 1944 mereka mengadakan rapat-rapat rahasia hingga enam kali. Mereka juga mengadakan kontak dengan *daidan-daidan* lainnya untuk bersama-sama mengadakan perlawanan, tetapi tidak berhasil.

Shōdanchō Supriyadi baru berhasil meyakinkan teman-temannya untuk memulai pemberontakan pada rapat yang keenam petang hari tanggal 13 Februari. Mereka sepakat akan meninggalkan kota Blitar dan akan bertahan di lereng Gunung Kelud di sebelah utara kota sambil berusaha menggerakkan *daidan-daidan* di sekitarnya untuk ikut berontak.[284]

Dini hari tanggal 14 Februari 1944 pecahlah pemberontakan, yang diawali dengan menembaki sasaran-sasaran yang sudah ditentukan yakni ke rumah para pelatih maupun gedung *kenpeitai* dan sebuah hotel Jepang. Kemudian pasukan bergerak ke luar kota dalam empat rombongan. Tiga rombongan menuju Gunung Kelud, sedangkan rombongan keempat ke arah hutan Lodoyo. Selama dalam perjalanan para pemberontak telah membunuh beberapa orang Jepang.

Dalam usaha menumpas pemberontakan, Jepang mengerahkan pasukan pribumi yakni *daidanchō* dan para *chūdanchō* Blitar yang tidak diikutsertakan dalam pemberontakan dan Katagiri *Butai* (Resimen Katagiri). Peta maupun *Heihō* dari tempat-tempat lain, bersama-sama dengan pasukan Katagiri *Butai* dari Malang bergerak mengepung kaum pemberontak. Pada waktu itu pihak Jepang hanya mempunyai dua resimen di Pulau Jawa, sehingga tidak berani menanggung risiko dengan cara menggempur, tetapi memilih jalan perundingan. Dalam perundingan dengan kelompok terbesar di bawah pimpinan Muradi, komandan resimen Jepang di Malang, Kolonel Katagiri, menjanjikan pengampunan kepada mereka. Namun, janji tersebut tidak ditepati oleh Jepang. Setelah mengalami beberapa kali pemeriksaaan disertai dengan siksaan di Blitar, pemimpin utama pemberontakan dibawa ke Jakarta dan diadili oleh Mahkamah Militer Jepang. Setelah bersidang

[284] Nugroho Notosusanto, *Pemberontakan Tentara Peta Blitar*, 1968, 122–123

selama tiga kali, akhirnya mahkamah militer menjatuhkan hukuman penjara, yang paling rendah dua tahun, seumur hidup sebanyak tiga orang, sedangkan enam orang lainnya dipidana mati. Mereka adalah *chūdanchō* dr. Ismangil, *shōdanchō* Muradi, *shōdanchō* Suparjono, dan tiga *budanchō* bernama Sunanto, Halir Mangkudidjaja, dan Sudarmo.[285]

Tidak hanya tentara Peta Blitar, tetapi juga tentara *giyūgun* di Aceh mengadakan perlawanan yang terjadi di Jangka Buaya, pada bulan November 1944, dipimpin oleh seorang perwira *giyūgun*, Tengku Hamid. Perlawanan ini merupakan reaksi atas paksaan-paksaan yang dilakukan Letnan Nemoto. Ia memaksa penduduk bekerja keras siang malam untuk kepentingan perang seperti membuat jalan dan lubang-lubang perlindungan. Dipaksanya pula penduduk menebang pohon kelapa dan pinang mereka dan kemudian dipancangkan di sawah-sawah dan tempat terbuka yang tidak lain sebagai barikade untuk menghalangi pendaratan pasukan payung Sekutu. Pertahanan pantai diperkuat oleh kawat-kawat berduri yang diambil dari kebun-kebun penduduk. Di samping penduduk, anggota *giyūgun* pun dipaksa bekerja keras membuat pertahanan di kampung-kampung, sampai ke daerah perbukitan. Tengku Abdul Hamid menggerakkan dua peleton anggota *giyūgun* ke gunung di atas kampung Beuracan. Tuntutannya agar Nemoto dipindahkan dari Jangka Buaya berakibat Jepang bertindak cepat. Jepang mengepung asrama *giyūgun* menyandera keluarga anggota yang meninggalkan asrama, sedangkan anggota yang tidak meninggalkan asrama mengadakan perundingan dengan pihak Jepang. Sesuai dengan kesepakatan, Tengku Hamid menghentikan rencana perlawanannya dan kembali ke asramanya di Jangka Buaya. Jepang pun mengganti Letnan Nemoto dengan perwira lain.[286] Akan tetapi, menurut sumber lain, Tengku Hamid dan anak buahnya menghentikan perlawanan karena Jepang mengancam akan membunuh semua keluarga mereka.

3. Perlawanan di Kalangan Petani

Pemerintah Militer Jepang menganggap Pulau Jawa sebagai sumber pangan yang memungkinkan mereka dapat meneruskan operasi militernya dan memelihara daerah-daerah yang dikuasainya di Asia Tenggara. Sebagai penghasil beras yang setiap tahunnya mencapai 8,5 juta ton, pulau ini dianggap amat penting dalam memenuhi kebutuhan militer Jepang.[287] Sejak

---

[285] Uraian Pemberontakan Tentara Peta Blitar selengkapnya lihat Nugroho Notosusanto, *Pemberontakan Tentara Peta Blitar*, hlm. 20–55

[286] Syamaun Gaharu, "Pemberontakan ...", hlm. 8

[287] Aiko Kurusawa-Shiraishi, "Pendudukan Jepang dan Perubahan Sosial: Penyerahan Padi secara Paksa dan Pemberontakan Petani di Indramayu" dalam *Pemberontakan Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, 1988, hlm. 86

Gambar 1.26 Anggota Tentara Peta Blitar sedang diadili oleh Mahkamah Militer Jepang (Sumber: Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI)

bulan Agustus 1942, Jepang menerapkan peraturan tentang pemungutan bahan pangan secara sistematis dengan membentuk *Shokuryo Kanri Limusyo* (SKL, Kantor Pengelolaan Pangan). Badan ini menguasai seluruh pembelian dan penyaluran padi di bawah monopoli negara, menentukan jumlah padi yang akan dibeli masyarakat, menentukan harga resmi padi. Pemerintah Jepang juga menerapkan peraturan yang mengharuskan petani menjual produksi beras mereka kepada pemerintah sebanyak kuota yang ditentukan dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Padi harus diserahkan kepada penggilingan yang telah ditetapkan pemerintah dan bila petani memiliki kelebihan beras (surplus), mereka tidak diizinkan untuk menjualnya kepada tengkulak.[288]

Pada tahap awal, para petani diminta menyerahkan padinya hanya kuota tetap per hektare, berdasarkan wilayah administrasi, dengan memperkenalkan kuintal sebagai satuan berat padi pada tingkat desa. Akan tetapi, kemarahan petani timbul terhadap peraturan baru yang mengharuskan mereka menyerahkan semua padi, kecuali sejumlah kecil untuk konsumsi keluarganya dan berlanjut dengan perlawanan petani ketika padi sisa mereka pun harus diserahkan, yang mengancam kelangsungan hidup mereka.

Paksaan untuk menyerahkan sebagian besar padi kepada pemerintah menimbulkan perlawanan seperti yang terjadi di daerah Indramayu, Jawa Barat. Perlawanan di daerah ini yang dapat disebut sebagai perlawanan petani berlangsung selama bulan April sampai Agustus 1944 di tiga tempat yang berbeda. Perlawanan mula-mula terjadi di desa Kaplongan, Karangampel, kemudian meluas ke Sindang dan Lohbener serta desa Bugis, terletak di perbatasan sebelah barat Indramayu. Mereka menggunakan senjata tradisional seperti golok bahkan batu, batu bata, dan bambu runcing. Sasaran pertama-tama tertuju kepada para penguasa desa yang dianggap sebagai kaki tangan Jepang.[289] Di Kaplongan seorang *syicō* jatuh pingsan akibat serangan hujan batu, sedangkan *kucō* dan para penguasa desa lainnya melarikan diri sehingga lolos dari maut.[290] Akan tetapi, serangan batu telah menewaskan *kucō* Pranggong, Lohbener, bernama Kalipa bersama putranya. Di desa Bugis, perlawanan dimulai dengan serangan terhadap rumah-rumah pamong desa, sehingga mengalami kerusakan ringan maupun berat.[291]

---

[288] Aiko Kurusawa Shiraishi, *op. cit.*, hlm. 87–88

[289] A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid I, 1972, hlm. 420–143

[290] Aiko Kurusawa-Shiraishi, *op. cit.*, hlm. 96

[291] *Ibid.*, hlm. 99

Dalam menghadapi perlawanan itu, Jepang menggunakan pemimpin agama seperti Kyai Abas, yang memiliki pesantren di desa Buntet, Sindang-Laut. Ia diminta berperan sebagai penengah dan utusan antara pemerintah dan para pelaku perlawanan. Ia datang ke desa Kaplongan dan dalam suatu pertemuan pimpinan perlawanan ia ditangkap. Akhirnya, perlawanan dapat ditumpas. Para petani desa itu meneriakinya dengan kata-kata, "Kyai Abas Abis, Kyai Cap Nippon!" Ketika ia berpidato propaganda di Karangampel, petani-petani tidak memedulikannya bahkan mereka melemparinya dengan batu dan mengejeknya dengan sebutan" Kyai Kuintal". Peristiwa yang sama terjadi ketika Kyai Abas berpidato di Sindang untuk menganjurkan penyerahan padi.[292]

Di desa-desa Indramayu, para petani diharuskan menyerahkan kuota per hektare yang luar biasa tingginya, biasanya mencapai dua puluh kuintal padi basah, sedangkan di Cirebon *ken* kuotanya dua kuintal dan di Majalengka *ken* antara empat sampai tujuh kuintal.[293] Dengan demikian, penyerahan padi yang wajib dilakukan oleh para petani Indramayu tiga atau empat kali lebih banyak daripada di *ken* lain.

Pungutan padi semakin menekan para petani pada musim panen tahun 1944, setelah menyerahkan kuota tetap per hektare. Semua sisa padi kecuali untuk konsumsi pangan dan persiapan bibit harus diserahkan kepada pemerintah. Sistem pungutan padi ini merugikan petani kaya yang kemudian berpengaruh pada penduduk desa yang menggantungkan hidupnya pada mereka sebagai pemilik tanah. Jika pemilik tanah tidak mempunyai modal untuk penanaman tahun berikutnya, para petani akan menganggur atau berkuranglah upah mereka. Situasi ini mengakibatkan perlawanan para petani dari pelbagai lapisan sosial di luar pejabat desa, yang pada umumnya diprakasai oleh para petani kaya. Seperti Haji Aksan yang memiliki sekitar dua puluh ha sawah di Kaplongan dan Haji Madrais dan tokoh-tokoh penting dalam perlawanan yang memiliki antara 20 sampai 100 ha sawah di Cidempet, Lohbener.

Paksaan penduduk untuk menyerahkan padi kepada pemerintah juga terjadi di Unra. Paksaan ini mengakibatkan perlawanan petani yang sasarannya terutama tertuju kepada pejabat desa yang dianggap sebagai kaki tangan Jepang.

Paksaan dilakukan oleh Kepala Desa Sullewatang, Jaling, yang memerintahkan anak buahnya membongkar loteng-loteng rumah penduduk untuk mengambil padi mereka di dalamnya. Tujuh orang penduduk

---

[292] Aiko Kurusawa Shiraishi, *op. cit.*, hlm. 101

[293] *Ibid.*, hlm. 103–104

menolak paksaan yang terjadi pada pertengahan tahun 1994 itu, dan mereka mendapat dukungan dari penduduk lainnya. Seorang pemuka Unra, Haji Temmale, berhasil mencegah niat Jaling untuk menangkap mereka dan penduduk dapat ditenangkan. Selanjutnya Haji Temmale pergi ke Watampone untuk meminta bantuan anggota Hadat Tujuh menyelesaikan keadaan di Unra agar terhindar dari ketegangan di kemudian hari. Namun yang terjadi sebaliknya, karena salah seorang anggota Hadat Tujuh yang menangani urusan kepolisian, Andi Abdullah Arung Ponceng, kurang memahami apa yang diinginkan Temmale. Kedatangannya dengan sejumlah polisi di Unra disambut penduduk yang hanya bersenjatakan senjata tradisional. Berkat campur tangan Andi Baso Ahmad yang datang ke Unra bersama Andi Abdullah Arung Ponceng, pertumpahan darah dapat dicegah dan penduduk bersedia menyerahkan senjatanya. Senjata-senjata itu mereka rebut kembali akibat tindakan Jaling menganiaya seorang penduduk. Dengan senjata di tangan, penduduk menyerang Arung Ponceng beserta anggota polisi.

Sepasukan tentara Jepang langsung melancarkan serangan ke Unra dan menuntut agar penduduk Unra menyerah. Atas permintaan penguasa Jepang, Raja Bone Andi Mappanyukki dapat mencegah penduduk untuk melakukan perlawanan, meskipun ia tidak menyukai pasukan Jepang yang langsung menyerang rakyat.

Dua hari kemudian pasukan Jepang tiba lagi Unra untuk menangkapi penduduk dan memasukkan mereka ke penjara di Watampone. Para tahanan terutama yang dicurigai terlibat dalam perlawanan dua hari sebelumnya mendapat siksaan. Haji Temmale bersama-sama keluarga para tahanan yang datang ke penjara akhirnya dipenjarakan pula. Dalam usianya yang sudah tua Haji Temmale yang dituduh sebagai otak perlawanan dan sejumlah orang tahanan lainnya mengalami pelbagai siksaan dalam penjara yang berakhir dengan kematian.[294]

G. Janji Mengenai Status Indonesia di Kemudian Hari

1. Janji Perdana Menteri Koiso

Pada tanggal 7 September 1944 di dalam Sidang Istimewa ke-85 *Teikoku Ginkai* (Parlemen Jepang) di Tokyo, Perdana Menteri Koiso (pengganti Perdana Menteri Tojo) mengumumkan tentang pendirian Pemerintah Kemaharajaan Jepang, bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenan-

[294] Uraian selengkapnya lihat Muhammad Abduh, *et al.*, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*, 1985, hlm. 186–191

kan merdeka kelak di kemudian hari.[295] Sebenarnya yang menyebabkan dikeluarkannya pernyataan tersebut adalah karena semakin terjepitnya Angkatan Perang Jepang. Dalam bulan Juli 1944, Kepulauan Saipan yang letaknya sudah sangat dekat dengan kepulauan Jepang jatuh ke tangan Amerika, yang menimbulkan keguncangan dalam masyarakat Jepang.[296]

Situasi Jepang semakin memburuk di dalam bulan Agustus 1944. Terbukti bahwa moril masyarakat mulai mundur, produksi perang merosot, yang mengakibatkan kurangnya persediaan senjata dan amunisi, ditambah dengan timbulnya soal-soal logistik karena hilangnya sejumlah besar kapal angkut dan kapal perang.

Faktor-faktor yang tidak menguntungkan tersebut menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 dan diangkatnya Jenderal Kuniaki Koiso sebagai penggantinya. Salah satu langkah yang diambilnya guna mempertahankan pengaruh Jepang di antara penduduk negeri-negeri yang didudukinya ialah dengan cara mengeluarkan pernyataan "Janji Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari". Dengan cara demikian, Jepang mengharapkan bahwa Sekutu akan disambut oleh penduduk, tidak sebagai pembebas rakyat, tetapi sebagai penyerbu ke negara merdeka.[297]

Dalam tahun 1944 dengan jatuhnya Saipan dan dipukul mundurnya Angkatan Perang Jepang oleh Angkatan Perang Sekutu dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall, seluruh garis pertahanan di Pasifik mulai bobol yang berarti kekalahan Jepang telah terbayang. Kemudian Jepang mengalami serangan udara Sekutu atas kota-kota Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya; bahkan tentara Sekutu telah pula mendarat di daerah-daerah minyak seperti Tarakan dan Balikpapan. Menghadapi situasi yang kritis itu, Pemerintah Pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada, pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (*Dōkuritsu Junbi Cōsokai*). Tindakan ini merupakan langkah konkret pertama bagi pelaksanaan janji Koiso tentang "Kemerdekaan Indonesia di Kelak Kemudian Hari". Tujuannya ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Susunan pengurusnya terdiri atas sebuah badan perundingan dan kantor tata usaha. Badan Perundingan terdiri dari seorang *Kaicō* (Ketua), dua orang *Fuku Kaicō* (Ketua Muda),

---

[295] *Pandji Poestaka*, 15 September 1944, hlm. 561

[296] Prof. Dr. I.J. Brugmans, *et al.*, *Nederlandsh-Indie onder Japanse Bezetting: Gegevens en Documenten over de Jaren 1942–1945*, 1969, hlm. 65

[297] *Ibid.*, hlm. 68

60 orang *Iin* (anggota), termasuk empat orang golongan Arab serta golongan peranakan Belanda. Di samping itu, terdapat pula tujuh orang anggota Jepang, yang duduk dalam pengurus istimewa yang akan menghadiri setiap sidang tetapi tidak mempunyai hak suara.[298] Pengangkatannya diumumkan pada tanggal 29 April 1945, dan yang diangkat menjadi *Kaicō* bukanlah Ir. Soekarno yang saat itu dikenal sebagai salah satu di antara pemimpin nasional utama, melainkan dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Pengangkatan itu disetujui oleh Ir. Soekarno yang menganggap bahwa kedudukannya sebagai seorang anggota biasa dalam badan tersebut akan lebih mempunyai kemungkinan besar untuk aktif di dalam diskusi-diskusi.[299] *Fuku Kaicō* pertama dijabat oleh seorang Jepang yakni *Shūcōkan* Cirebon bernama Ichibangase, dan R.P. Suroso diangkat pula sebagai Kepala Sekretariat *Dōkuritsu Junbi Cōsokai* dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo.[300]

2. Perumusan Dasar Negara dan UUD 1945

Pada tanggal 28 Mei 1945, dilangsungkan upacara peresmian Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bertempat di gedung *Chūō Sangi In*, Jalan Pejambon, Jakarta (sekarang gedung Departemen Luar Negeri). Jenderal Itagaki (Panglima Tentara Wilayah Ketujuh yang bermarkas di Singapura dan membawahi tentara-tentara yang bertugas di Indonesia) dan Letnan Jenderal Nagano (Panglima Tentara Ke-16 yang baru di Jawa) menghadiri sidang tersebut. Pada kesempatan itu pula dilakukan upacara pengibaran bendera *Hinomaru* oleh Mr. A.G. Pringgodigdo yang kemudian disusul dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Toyohiko Masuda. Peristiwa tersebut telah membangkitkan semangat para anggota dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Dōkuritsu Junbi Cōsokai atau yang disingkat Badan Penyelidik mulai mengadakan persidangan untuk merumuskan undang-undang dasar, dimulai dengan persoalan "dasar" bagi negara Indonesia Merdeka. Dalam kata pembukaannya, Ketua dr. Radjiman Wediodiningrat meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia Merdeka yang akan dibentuk itu. Ternyata ada tiga anggota yang memenuhi permintaan Ketua, yakni secara khusus membicarakan dasar negara. Mereka itu adalah

---

[298] Pengumuman *Saikō Shikikan* pada hari perayaan Jawa Baru yang ketiga, *Kan Pō* , no. 62, (10 Maret 1945)

[299] George S. Kanahele, *op. cit.*, 1969, Bab IX, alinea ke-14

[300] *Kan Pō* , no. 67, 25 Mei 1945; *Asia Raja*, 5 Juni 1945

Mr. Muh. Yamin, Dr. Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno. Hari pertama, dari persidangan pertama Badan Penyelidik tanggal 29 Mei 1945 Muh. Yamin memulai pidatonya antara lain dengan kata-kata sebagai berikut:

> "... kewajiban jang terpikul di atas kepala dan kedua bahu kita, ialah suatu kewadjiban jang sangat teristimewa. Kewadjiban untuk ikut menjelidiki bahan-bahan jang akan mendjadi dasar dan susunan negara jang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan ...."[301]

Di dalam pidato selanjutnya Mr. Muh. Yamin mengemukakan lima "Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia" sebagai berikut:

1) Peri Kebangsaan;
2) Peri Kemanusiaan;
3) Peri Ke-Tuhanan;
4) Peri Kerakyatan;
5) Kesejahteraan Rakyat.

Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Supomo memulai pidatonya dengan kalimat sebagai berikut:

> "Bahwa jika hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (*Staatssidee*) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apa pun. Menurut aliran pikiran ini, Kepala Negara badan-badan Pemerintah lain, harus bersifat pemimpin yang sejati, penunjuk jalan ke arah cita-cita luhur, yang diidam-idamkan oleh rakyat. Negara harus bersifat hukum yang timbul dari hati sanubari rakyat seluruhnya."[302]

Prof. Supomo juga memusatkan pembicaraannya kepada dasar negara Indonesia Merdeka. Dasar-dasar yang diajukannya untuk Indonesia Merdeka adalah "persatuan", "kekeluargaan", "keseimbangan lahir dan batin", "musyawarah", dan "keadilan rakyat."[303]

---

[301] Nugroho Notosusanto, "Mengamankan Pancasila Dasar Negara", *Persepsi*, I, no. 1, 1979, hlm. 9–10; Saafroedin Bahar, *et al.* (*eds.*) *Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 25 Mei 1945, 22 Agustus 1945*, 1995, hlm. 8 – 22. Naskah Pidato Mr. Muh. Yamin tidak ditemukan dalam koleksi Mr. Muh. Yamin maupun koleksi Pringgodigdo, yang tersimpan di Arsip Nasional RI (ANRI). Naskah pidato Mr. Muh. Yamin muncul pada buku Mr. H. Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, I, Djakarta Jajasan Prapantja, 1959 dan 1971, hlm. 88. Cetakan pertama buku ini disertai pengantar dari Presiden Soekarno, yang ditulis dengan tangan. Selama Presiden Soekarno dan Mr. Muh. Yamin masih hidup tidak pernah ada bantahan mengenai otensitas dari pidato Muh. Yamin tersebut.

[302] Nugroho Notosusanto, "Mengamankan Pancasila, Dasar Negara", 1979, hlm. 10; Muh. Yamin, *op. cit.*, 1959, hlm. 120

[303] Saafroedin Bahar, *et al.* (*eds.*), *op. cit.*, 1995, hlm. 37

Keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 1945 berlangsunglah rapat terakhir dalam persidangan pertama itu. Pada kesempatan itulah Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila".

Pada kesempatan itu Ir. Soekarno di dalam pidatonya mengemukakan perumusan lima prinsip dasar negara Indonesia Merdeka dengan usul nama (antara lain) Pancasila sebagai berikut:

1) Kebangsaan Indonesia;
2) Internasionalisme atau peri-kemanusiaan;
3) Mufakat atau demokrasi;
4) Kesejahteraan sosial;
5) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pidatonya Ir. Soekarno antara lain mengatakan:

> "Saudara-saudara! Dasar-dasar Negara telah saya usulkan. Lima bilangannya ... tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas, atau dasar dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi."[304]

Dengan berakhirnya rapat tanggal 1 Juni itu selesailah pula seluruh persidangan pertama *Dōkuritsu Junbi Cōsokai*. Persidangan itu tidak menghasilkan suatu kesimpulan atau perumusan. Selama persidangan berlangsung anggotanya hanya mendengarkan pemandangan umum para pembicara yang mengetengahkan usul-usul rumusan dasar negara bagi Indonesia Merdeka. Setelah persidangan pertama itu selesai, diadakanlah "reses" selama satu bulan lebih.

Sebelum memasuki reses itu, Badan Penyelidik membentuk suatu Panitia Kecil di bawah pimpinan Ir. Soekarno dengan anggota lainnya Drs. Moh. Hatta, Soetardjo Kartohadikusumo, Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandar Dinata, Muh. Yamin, dan A.A. Maramis. Kesemuanya berjumlah delapan orang dan mereka bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggota yang oleh Ketua telah diminta untuk diserahkan melalui Sekretariat. Pada rapat pertama persidangan kedua Badan Penyelidik pada tanggal 10 Juli 1945, Panitia Kecil itu dimintai laporan oleh Ketua Radjiman yang telah pula dipenuhi oleh ketuanya, Ir. Soekarno.[305]

---

[304] Saafroedin Bahar, *et al.*, (*eds.*), *op. cit.*, 1995, hlm. 69–84

[305] Nugroho Notosusanto, *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*, 1976, hlm. 17

Gambar 1.27 Ir. Soekarno memimpin sambutan para anggota *Chūō Sangi In* dengan teriakan bahasa Jepang *Banzai* (Hidup) atas diumumkannya janji PM Koiso tentang "Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari" (Sumber: Prof . Dr. I.J. Brugmans, *et al.*, *Nederlands Indië Onder Japanese Bezetting*)

Gambar 1.28 Harian *Asia Raja* memuat pelbagai kegiatan Ir. Soekarno bersama tokoh-tokoh Indonesia lainnya dan pejabat Jepang sehubungan dengan diumumkannya janji PM Koiso tentang "Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari" (Sumber: Fatmawati, *Catatan Kecil Bersama Bung Karno*, Bagian I)

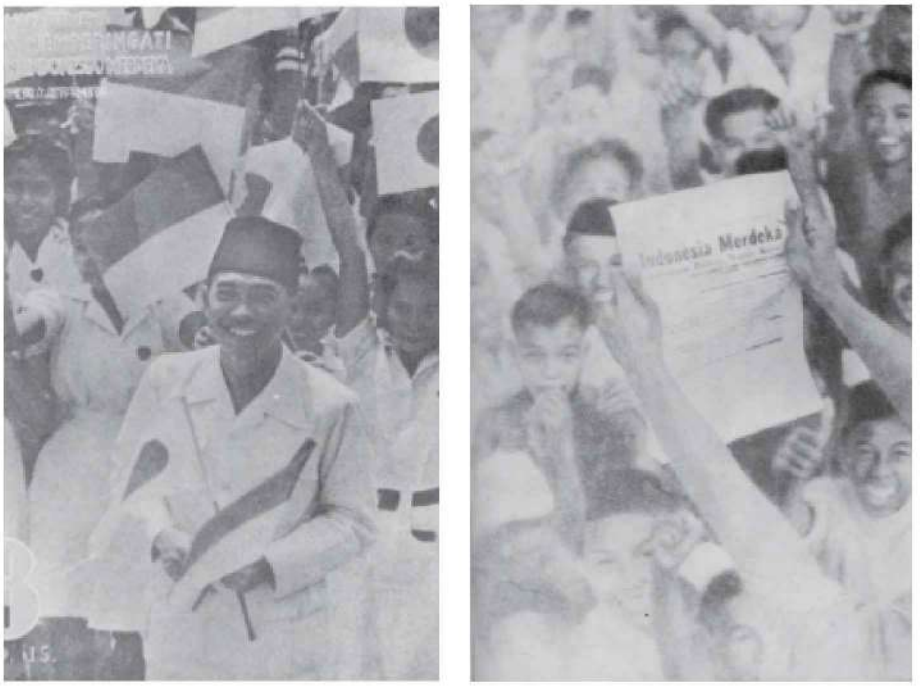

(a)

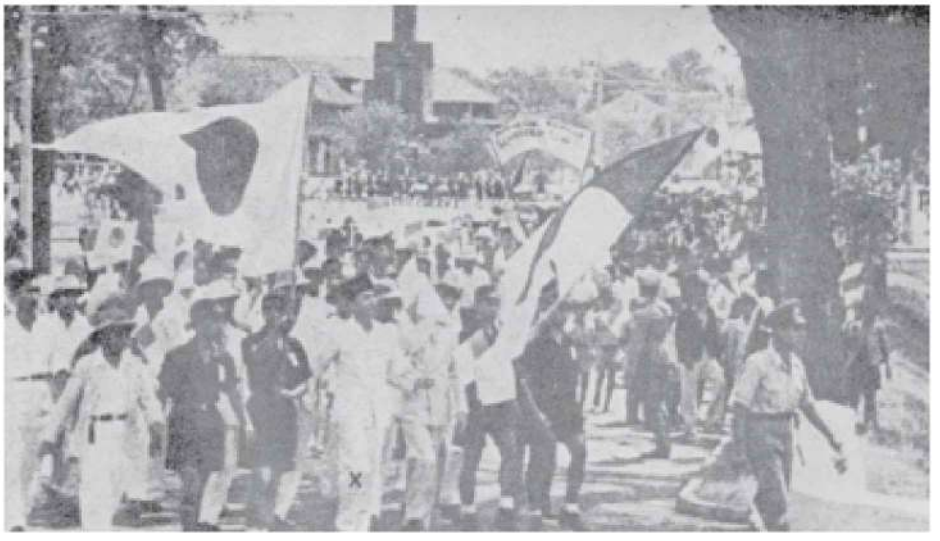

(b)

Gambar 1.29 (a) Ir. Soekarno bersama kaum pemuda dan pemudi serta rakyat menyambut pengumuman janji "Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari" dengan penuh kegembiraan; **(b)** Pada tanggal 11 September 1944 Ir. Soekarno memimpin rapat raksasa di Lapangan Ikada (Sekarang Monas), Jakarta dalam rangka menyambut janji "Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari" (Sumber: Fatmawati, *Catatan Kecil Bersama Bung Karno*, Bagian I)

Gambar 1.30 Sidang *Dōkuritsu Junbi Cosokai*, di tingkat Badan Penyelidik (Sumber: *Djawa Baroe*)

Gambar 1.31 Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato dalam sidang *Dōkuritsu Junbi Cōsokai* (Sumber: Fatmawati, *Catatan Kecil Bersama Bung Karno*, Bagian I)

Ir. Soekarno melaporkan bahwa Panitia Kecil pada tanggal 22 Juni mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota *Dōkuritsu Junbi Cōsokai* atau Badan Penyelidik, yang sebagian di antaranya sedang menghadiri sidang *Chūō Sangi In*. Pertemuan itu oleh Ir. Soekarno ditegaskan merupakan "rapat pertemuan antara Panitia Kecil dengan anggota-anggota *Dōkuritsu Junbi Cōsokai*. Hasil pertemuan itu adalah telah ditampungnya suara-suara dan usul-usul lisan dari pihak anggota Badan Penyelidik.[306]

Dalam pertemuan itu dibentuk sebuah Panitia Kecil lain yang anggotanya berjumlah sembilan orang. Kesembilan anggota itu berkumpul untuk menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pemandangan umum para anggota dan kemudian terkenal dengan sebutan Panitia Sembilan yang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakkir, Wachid Hasjim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosoejoso. Mereka menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka, yang akhirnya diterima dengan suara bulat dan ditandatangani. Oleh Mr. Muh. Yamin rumusan hasil Panitia Sembilan itu kemudian diberinya nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan kolektif daripada dasar negara Indonesia Merdeka tersebut sebagai berikut:

1) Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2) (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
3) Persatuan Indonesia;
4) (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5) (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[307]

Perumusan terakhir *draft* dasar negara dilakukan pada persidangan kedua mulai tanggal 10 Juli 1945. Pada kesempatan itu dibahas tentang wilayah negara, persiapan Rancangan Undang-Undang Dasar, pembentukan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, pembelaan tanah air, serta keuangan dan perekonomian. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Ir. Soekarno dengan 18 orang anggota yaitu. Mr. A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, Poeroebojo, Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Prof. Dr. Mr. Supomo, Mr. Maria Ulfah Santoso, Wachid Hasjim,

---

[306] Nugroho Notosusanto, "Mengamankan Pancasila" ..., hlm. 11; Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, hlm. 148

[307] Muh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, 1954, hlm. 12; Nugroho Notosusanto, *Naskah Proklamasi ...*, hlm. 14

Parada Harahap, Mr. Latuharhary, Mr. Susanto Tirtoprodjo, Mr. Sartono, Mr. Wongsonegoro, Wuryaningrat, Mr. R.P. Singgih, Tan Eng Hoat, Prof. Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat, dan dr. Sukiman.[308]

Dalam rapatnya pada tanggal 11 Juli, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan suara bulat menyetujui isi preambul yang diambil dari Piagam Jakarta. Panitia tersebut kemudian membentuk sebuah "Panitia kecil Perancang Undang-Undang Dasar" yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Supomo dengan anggota-anggota lain Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim, dan dr. Sukiman. Pada rapat tanggal 13 Juli 1945, diputuskan, hasil perumusan Panitia kecil disempurnakan bahasanya oleh sebuah "Panitia Penghalus Bahasa" yang terdiri dari Hoesein Djajadiningrat, Agus Salim, dan Supomo. Panitia itu bertugas pula menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan undang-undang dasar yang sudah dibahas itu.[309]

Persidangan kedua *Dōkuritsu Junbi Cōsakai* dilanjutkan pada tanggal 14 Juli 1945 untuk menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia melaporkan tiga hasil panitia, yakni:

1) Pernyataan Indonesia Merdeka;
2) Pembukaan Undang-Undang Dasar;
3) Undang-Undang Dasarnya sendiri (Batang Tubuhnya).

Adapun konsep pernyataan Indonesia Merdeka disusun dengan mengambil tiga alinea pertama Piagam Jakarta dengan sisipan yang panjang sekali, terutama di antara alinea pertama dan alinea kedua. Konsep Pembukaan Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat (dan terakhir) Piagam Jakarta. Kedua konsep itu diterima oleh sidang setelah berlangsung diskusi lebih kurang satu jam.

Sidang kedua Badan Penyelidik dilanjutkan dengan rapat besar tanggal 15 Juli 1945 dengan acara pembahasan lanjutan Rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam laporannya kepada sidang, Ir Soekarno menyatakan:

> "....Kita rancangkan Undang-Undang Dasar dengan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan individu. Kedaulatan rakyat sekali lagi, bukan kedaulatan individu. Inilah menurut Paham Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, satu-satunya jaminan bahwa dengan Indonesia seluruhnya akan selamat di kemudian hari. Jadikan paham kita ini pun dipakai oleh bangsa-bangsa lain, itu akan memberi jaminan akan perdamaian dunia kekal dan abadi .... Marilah kita menunjukkan keberanian kita dalam menjunjung hak kedaulatan bangsa kita."

---

[308] Nugroho Notosusanto, *"Mengamankan Pancasila ...,"* hlm. 12; Muh. Yamin, *Naskah Persiapan ...*, hlm. 250 – 251

[309] Ben Anderson, *Revolusi Pemuda: Pendudukan dan Perlawanan di Jawa 1944–1946*, terjemahan dari *Java in a Time of Revolution, Occupation and Resistence (1944–1946)*, 1988, hlm. 62–64

Pada sidang kedua rapat besar tanggal 16 Juli 1945, Ketua sidang, dr Radjiman sebelum menutup sidang, memastikan bahwa semua anggota setuju sebulat-bulatnya:

> "Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya jadi saya ulangi lagi. Undang-Undang Dasar ini kita ini diterima sebulat-bulatnya? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat supaya yang disetujui yang menerima berdiri! Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih Tuan-tuan."

3. Aktivitas di Kalangan Pemuda

Pada masa Pendudukan Jepang, asrama merupakan konsentrasi para pemuda dan mereka memperoleh inspirasi dari tokoh-tokoh nasional dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Salah satu di antaranya Asrama Angkatan Baru di Menteng 31, Jakarta yang didirikan oleh Hitoshi Shimizu dari *Sendenbu* (Departemen Propaganda). Dengan bantuan dua orang staf *Sendenbu*, yakni Chairul Saleh dan Sukarni, di asrama ini para pemuda mendapat pendidikan sebagai propagandis yang menyuarakan kepentingan perang Jepang. Di samping mendapat pendidikan *Nippon Seishin* (semangat Nippon), mereka juga mendapat pendidikan tentang nasionalisme dari generasi yang lebih tua seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan Mr. Soenario. Meskipun pendidikan yang diikuti oleh 50–60 orang berakhir pada bulan April 1943, asrama ini tetap menjadi tempat pertemuan mereka untuk membahas hal-hal yang sedang berlangsung saat itu, antara lain masalah politik. Bahkan tokoh-tokoh seperti Adam Malik, B.M. Diah, Harsono Tjokroaminoto, dan Anwar Tjokroaminoto aktif menghadiri pertemuan-pertemuan itu.[310]

Konsentrasi lainnya adalah Asrama Penguruan Tinggi Kedokteran (*Ika Daigaku*), di Jalan Prapatan 10, Jakarta, tempat menampung bekas mahasiswa *Geneeskundige Hoge School* (GHS) dan *Nederlands Indische Artsen School* (NIAS).[311] Karena yakin kekuasaan Jepang akan berakhir, kalangan mahasiswa ini mulai mempersiapkan kekuatan untuk mencapai Indonesia Merdeka. Mereka melakukan pembangkangan terhadap peraturan buatan Jepang seperti penggundulan kepala sampai botak. Bangsa Indonesia termasuk para mahasiswa, menyadari bahwa kepala melambangkan harga diri. Mereka akan cepat tersinggung jika ada seseorang yang berani berbuat tidak senonoh, baik dengan kata-kata maupun perbuatan terhadap kepalanya.[312] Pembangkangan ini diikuti oleh aksi mogok kuliah pada bulan

---

[310] Soejono Martosewojo, Eri Soedewo, *et, al., Mahasiswa '45 Prapatan 10, Pengabdiannya,* jilid I, 1984, hlm. 6

[311] *Ibid.*, hlm. 26–27

[312] *Ibid.*, hlm. 27

Oktober 1943.[313] Mereka pun menolak pelatihan militer di waktu hujan pada bulan Desember 1943.[314] Pada bulan Mei 1945, mereka memboikot rapat raksasa pemuda yang diadakan oleh Jepang.[315] Akibatnya, beberapa mahasiswa seperti Soedjatmoko, Soedarpo, dan Soeroto Koento dilarang mengikuti kuliah.

Sementara itu, hubungan baik terjalin antara pemuda Asrama Prapatan 10 yang sadar politik dan dengan para pemuda berseragam militer. Mereka mengikuti ceramah keagamaan yang diberikan oleh *Daidanchō Daidan* Jaga Monyet Jakarta, Kasman Singodimejo. Di samping itu, mereka mendapat pula pelatihan militer dari beberapa orang perwira Peta antara lain *Chudanchō* Latief Hendraningrat dan Mufraeni Mukmin.[316]

Di Asrama Indonesia Merdeka, Jalan Bungur Besar 56, Jakarta, para pemuda dididik semata-mata untuk memperjuangkan kemerdekaan, bukan menjadi propagandis Jepang seperti di Asrama Angkatan Baru. Tokoh-tokoh penceramah di asrama pimpinan Ahmad Soebardjo ini, adalah Soekarno (Politik), Hatta (Alumni), Syahrir (Sosialisme Asia), R.P. Singgih (Nasionalisme dan Kebudayaan), Sanusi Pane (Sejarah Indonesia), Suwondo (Sejarah Pergerakan Nasional), Iwa Kusumasumantri (Hukum Kriminal), Ahmad Soebardjo (Hukum Internasional), dan Mohamad Said (Pendidikan dan Kebudayaan).[317] Pendidikan Angkatan I yang diiikuti 30 orang berakhir pada bulan April 1945 dan pendidikan Angkatan II yang diikuti 80 orang dimulai pada bulan Mei 1945 tetapi terpaksa berakhir dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada bulan Agustus 1945.

Para pemuda di tiga asrama tersebut berhubungan baik meskipun berbeda orientasi. Mereka bergabung dalam Barisan Pelopor Istimewa (*Tokuketsu Suisyintai*). Anggotanya tidak lebih dari 100 orang yang dipilih sendiri oleh Ir. Soekarno dan sebagian di antara mereka berasal dari Asrama Angkatan Baru. Pada umumnya mereka telah mempunyai bekal kesadaran nasional. Di samping menerima pelatihan militer, anggota Barisan Pelopor Istimewa juga menerima kursus-kursus politik dari tokoh-tokoh pergerakan nasional.[318]

---

[313] Soejono Martosewojo, Eri Soedewo, *et al., op. cit.*, hlm. 33

[314] *Ibid.*, hlm. 46

[315] *Ibid.*, hlm. 53–66

[316] Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, *Kesadaran Nasional Sebuah Autobiografi*, 1978, hlm. 256

[317] Rohmani Santoso, *et al., Hari-hari Menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945*, 1988, hlm. 34

[318] William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926–1946)*, (terjemahan *dari Visions and Heat, the Making of the Indonesian Revolution*), 1989, hlm. 215

Di kota Surabaya, seorang kepercayaan Syahrir, Djohan Syahruzah menghimpun kelompok kecil pemuda yang bekerja di perusahaan minyak maupun perusahaan yang berhubungan dengan perminyakan. Untuk menghindari kecurigaan Jepang, pada akhir tahun 1943 mereka membentuk organisasi nonformal. Di kota yang sama berdiri pula kelompok pemuda lain yang dipimpin oleh Roeslan Abdulgani. Kelompok ini tidak membentuk organisasi formal dan mempunyai ciri yang sama, yakni merasa tidak senang terhadap kekuasaan Jepang.

Di dua kota yang berdekatan yakni di Jakarta dan Bandung terbentuk Angkatan Muda. Semula Roeslan Abdulgani mencurigai organisasi ini dan menolak untuk mendukungnya. Berkat kunjungan Chairul Saleh dan Sukarni ke Surabaya, akhirnya Roeslan berhasil diyakinkan, akan tetapi ia mengadakan modifikasi. Ia memakai nama Komite Angkatan Muda, yang bergerak di kampung-kampung melakukan propaganda tentang kemerdekaan di balik kedok organisasi resmi.[319] Pada bulan yang sama (Mei 1945), dalam pertemuannya dengan tokoh-tokoh pelajar sekolah menengah, Komite Angkatan Muda membicarakan situasi tanah air dan perlunya usaha-usaha untuk mencapai kemerdekaan. Dalam rapat umum yang diadakan tanggal 1 Juli 1945 beberapa tokoh komite berpidato yang bernada mengancam pemerintah Jepang sehingga Roeslan Abdulgani dan beberapa anggota komite dipanggil dan diperiksa secara intensif.[320] Pada bulan Juli 1945, para pemuda pelajar mengadakan rapat di gedung *Hosokyoko*. Pada akhir rapat para pemuda mengeluarkan resolusi: "Pelajar-pelajar sekolah lanjutan Surabaya menuntut kemerdekaan Indonesia tidak bersyarat selekas-lekasnya, mengubah semua aba-aba berbahasa Jepang dengan aba-aba Indonesia". Pada umumnya, pemuda pelajar kemudian menjadi anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP).[321]

Pada bulan Mei 1945, para pelajar di Solo juga mengadakan rapat dan mereka berikrar: "Kami bersumpah akan berjuang untuk kemerdekaan bangsa, nusa dan tanah air Indonesia. Setiap penghalang dan penjajah tanah air kami tentang dan kami terjang serta kami hancurkan".[322] Di Semarang pada tanggal 16 Juli 1945 didirikan Markas Angkatan Muda sebagai realisasi rapat yang diadakan di rumah sakit perusahaan.[323]

Semakin terdesaknya posisi Jepang dalam perang menyebabkan mereka terpaksa memberikan konsesi kepada pihak Indonesia dan memungkinkan

---

[319] William H. Frederick, *op. cit.*, hlm. 219

[320] Amrin Imran, *et al.*, (*eds.*), *Peranan Pelajar dalam Perang Kemerdekaan*, 1985, hlm. 21

[321] *Ibid.*, hlm. 22

[322] Kementerian Penerangan, *Propinsi Djawa Tengah*, 1952, hlm. 107

[323] Sidik Kertapati, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, 1964, hlm. 76–77

para pemuda meningkatkan kegiataannya secara terbuka. Pada tanggal 16–18 Mei diadakan Kongres Pemuda seluruh Jawa di Bandung, yang penyelenggaraannya disponsori oleh Angkatan Moeda Indonesia. Angkatan Moeda Indonesia ini dibentuk atas inisiatif Jepang pada pertengahan 1944, tetapi kemudian berkembang menjadi suatu pergerakan pemuda yang anti-Jepang.[324] Para pemimpin Angkatan Moeda Indonesia di dalam kongres yang dihadiri oleh lebih dari 100 utusan pemuda, pelajar, dan mahasiswa, antara lain Djamal Ali, Chairul Saleh, Sukarni, Anwar Tjokroaminoto, Harsono Tjokroaminoto, serta sejumlah mahasiswa *Ika Daigaku* Jakarta, seperti Lus Ratu Langie, menganjurkan para pemuda di Jawa hendaknya bersatu dan mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan yang bukan hadiah Jepang. Pertemuan berlangsung dalam suasana militan dan nasionalistis di mana hanya dinyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa lagu *Kimigayo* (lagu kebangsaan Jepang) serta hanya dikibarkan bendera Merah Putih, tanpa didampingi bendera Jepang.[325]

Setelah tiga hari lamanya kongres berjalan, akhirnya diterima baik dua resolusi sebagai berikut: *pertama*, semua golongan Indonesia, terutama golongan pemuda dipersatukan dan dibulatkan di bawah satu pimpinan nasional saja, *kedua*, dipercepatnya pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, sebagaimana yang diberitakan oleh pers resmi, resolusi kongres pun ditambah dengan menyatakan dukungan sepenuhnya dan kerja sama erat dengan Jepang dalam usaha mencapai kemenangan akhir.[326]

Pernyataan tersebut tidak memuaskan beberapa tokoh pemuda yang hadir, seperti utusan dari Jakarta yang dipimpin oleh Sukarni, Harsono Tjokroaminoto, dan Chairul Saleh. Mereka bertekad untuk tidak mengambil bagian dalam gerakan Angkatan Moeda Indonesia dan bermaksud untuk menyiapkan suatu gerakan pemuda yang lebih radikal.

Sebagai realisasi tekad itu, pada tanggal 3 Juni 1945 diadakan suatu pertemuan rahasia di Jakarta yang dihadiri oleh 100 pemuda yang membentuk suatu panitia khusus yang diketuai oleh B.M. Diah, dengan para anggotanya Sukarni, Sudiro, Sjarif Thajeb, Harsono Tjokroaminoto, Wikana, Chairul Saleh, P. Gultom, Supeno, dan Asmara Hadi. Pertemuan rahasia diadakan lagi pada tanggal 15 Juni 1945, yang menghasilkan pembentukan Gerakan Angkatan Baroe Indonesia, yang kegiatannya sebagian besar digerakkan oleh para pemuda dari Menteng 31.[327]

---

[324] Wawancara dengan Djamal Ali di Jakarta, 14 April 1972

[325] *Asia Raja*, 24 Mei 1945

[326] Soediro, *Pengalaman Saja di Sekitar Proklamasi 17 Agustus '45*, 1972, hlm. 11–16

[327] *Ibid.*, hlm. 9–15

Tujuan gerakan tersebut tercantum di dalam surat kabar *Asia Raja* pertengahan bulan Juni 1945, yang menunjukkan sifat yang lebih radikal sebagai berikut: *pertama,* mencapai persatuan kompak di antara seluruh golongan masyarakat Indonesia; *kedua,* menanamkan semangat revolusioner massa atas dasar kesadaran mereka sebagai rakyat yang berdaulat; *ketiga,* membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan *keempat,* mempersatukan Indonesia bahu-membahu dengan Jepang, tetapi jika perlu gerakan itu bermaksud untuk "mencapai kemerdekaan dengan kekuatannya sendiri".[328]

Tokoh-tokoh pemuda radikal seperti Chairul Saleh, Sukarni, B.M. Diah, Asmara Hadi, Harsono Tjokroaminoto, Wikana, Sudiro, Supeno, Adam Malik, S.K. Trimurti, Soetomo, dan Pandu Kartawiguna telah diikutsertakan di dalam suatu gerakan yang disebut Gerakan Rakyat Baroe. Gerakan tersebut diperkenankan pembentukannya oleh *Saikō Shikikan* yang baru, Letnan Jenderal Y. Nagano, di dalam suatu pertemuan pada tanggal 2 Juli 1945. Gerakan Rakyat Baroe disusun berdasarkan hasil sidang ke-8 *Chūō Sangi In* yang mengusulkan didirikannya suatu gerakan untuk mengobarkan semangat cinta kepada tanah air dan semangat perang. Susunan pengurus pusat gerakan terdiri dari 80 orang. Di samping anggotanya terdiri atas penduduk asli Indonesia dan bangsa Jepang, juga terdapat golongan Cina, golongan Arab, dan golongan peranakan Eropa.

Adapun pengangkatan wakil-wakil golongan pemuda di dalamnya dimaksudkan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi kegiatan-kegiatan mereka. *Sōmubuchō* Mayor Jenderal Nishimura menegaskan bahwa setiap pemuda yang tergabung di dalamnya harus tunduk sepenuhnya kepada *Gunseikanbu* (Pemerintah Militer Jepang) dan mereka pun harus pula bekerja di bawah pengawasan pejabat-pejabat pemerintah. Dengan demikian, berarti kebebasan bergerak para pemuda dibatasi, sehingga timbullah rasa tidak puas dan terjadi jurang yang lebar antara pemikiran golongan muda dan pemikiran golongan tua. Kekecewaan pun timbul ketika panitia bersidang untuk membicarakan anggaran dasar Gerakan Rakyat Baroe. Para pemuda menuntut dicantumkannya kata-kata Republik Indonesia dalam anggaran dasar tersebut. Tuntutan mereka menemui jalan buntu, setelah terjadi perdebatan dengan pimpinan yang lebih tua yang yakin bahwa Jepang tidak akan mengabulkan tuntutan mereka.Oleh karena itu, tatkala Gerakan Rakyat Baroe diresmikan pada tanggal 28 Juli 1945, di mana dua organisasi besar, yaitu *Jawa Hōkōkai* dan Masyumi digabungkan menjadi satu di dalamnya, tidak seorang pun tokoh golongan pemuda radikal yang

---

[328] *Kan Pō*, no. 70 (10 Juli 1945), hlm. 19

bersedia menduduki kursi yang telah disediakan untuk mereka. Perselisihan paham terjadi antara golongan tua dan golongan muda tentang cara melaksanakan pembentukan negara Indonesia Merdeka.[329]

H. Menjelang Proklamasi

1. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Golongan Pemuda

Memuncaknya perjuangan menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tampaknya disebabkan oleh golongan muda. Baik golongan tua maupun golongan muda sama-sama berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan, hanya mengenai cara melaksanakan Proklamasi itu terdapat beda pendapat. Golongan tua sesuai dengan perhitungan politiknya berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah hanya jika tetap bekerja sama dengan Jepang. Mereka menggantungkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dōkuritsu Junbi Inkai).* Peresmian pembentukan badan itu dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1945, sesuai dengan keputusan Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan, yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara.[330]

Para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) itu diizinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri; tetapi mereka diwajibkan memerhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan ialah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia; karena itu bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya, dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya.[331]
2. Negara Indonesia itu merupakan anggota Lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya, maka cita-cita bangsa Indonesia itu harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat *Hakkō-Ichiu.*

---

329 *Kan Pō*, no. 70 (10 Juli 1945), hlm. 19

330 Pengumuman *Gunseikan* Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, lihat *Kan Pō*, no. *72* (10 Agustus 1945), hlm. 12

331 Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, 1970, hlm. 18–19; lihat juga Brugmans, *op. cit.*, hlm. 594–595

Dengan diumumkannya pembentukan PPKI tanggal 7 Agustus 1945, pada saat yang sama *Dōkuritsu Junbi Cōsokai* dianggap bubar. Kepada para anggota PPKI, *Gunseikan* Mayor Jenderal Yamamoto mengucapkan terima kasihnya dan menegaskan bahwa para anggota yang duduk dalam PPKI itu tidak dipilih oleh pejabat di lingkungan Tentara Ke-16 saja, tetapi oleh Jenderal Besar Terauchi sendiri yang menjadi penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara.

Untuk pengangkatan itu Jenderal Besar Terauchi memanggil tiga tokoh Pergerakan Nasional, terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945 mereka berangkat menuju markas besar Terauchi di Dalat (Vietnam Selatan). Dalam pertemuan di Dalat itu, pada tanggal 12 Agustus 1945 Jenderal Besar Terauchi menyampaikan kepada ketiga pemimpin tersebut bahwa pemerintah Kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapannya selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Mungkin pelaksanaannya tidak dapat sekaligus untuk seluruh Indonesia, tetapi bagian demi bagian sesuai dengan kondisi setempat.[332]

Dua puluh satu anggota telah dipilih, tidak hanya terbatas pada wakil-wakil dari Jawa yang ada di bawah pemerintah Tentara Ke-16, tetapi juga dari pelbagai pulau sebagai berikut: dua belas wakil dari Jawa, tiga wakil dari Sumatra, dua dari Sulawesi, seorang dari Kalimantan, seorang dari Sunda Kecil (Nusa Tenggara), seorang dari Maluku, dan seorang dari golongan penduduk Cina.[333] Yang ditunjuk sebagai ketua dalam PPKI ialah Ir. Soekarno, sedangkan Drs. Moh. Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua. Sebagai penasihat ditunjuk Mr. Ahmad Subardjo. Kemudian oleh orang Indonesia sendiri anggota PPKI ditambah dengan enam orang lagi tanpa seizin pihak Jepang. Anggota-anggota itu adalah Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Iwa Kusumasumantri, dan Ahmad Soebardjo. Pada saat ketiga tokoh PPKI, yakni

---

[332] Anggota PPKI dari *Jawa:* Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dr. Radjiman Wediodiningrat, Oto Iskandar Dinata, Wachid Hasjim, Ki Bagus, Hadikusumo Surjohadimidjojo, Sutardjo Kartodihadikoesoemo, R.P. Suroso, Prof. Dr. Mr. Supomo, Abdul Kadir, Purubojo; dari *Sumatra:* dr. Amir, Mr. Teuku Moh. Hasan, Mr. Abdul Abas; dari *Sulawesi:* Dr. G.S.S.J. Ratu Langie, Andi Pangeran; dari *Kalimantan:* A.A. Hamidhan; dari *Sunda Kecil* (Nusa Tenggara): Mr. I Gusti Ketut Pudja; dari *Maluku:* Mr. J. Latuharhary; golongan *Cina:* Drs. Yap Tjwan Bing, lihat Hadji Muh. Yamin, *op. cit.*, hlm. 399. Saafroedin Bahar *et al.*, (*eds.*), *op. cit.*, 1995, hlm. 412

[333] Rekaman dialog antara Drs. Moh. Hatta dengan Mr. Ahmad Subardjo di Bern pada tahun 1960

Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat berangkat kembali menuju Jakarta dari Vietnam pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengalami pengeboman oleh Sekutu atas Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom, sedangkan Uni Sovyet menyatakan perang terhadap Jepang seraya melakukan penyerbuan ke Mancuria.

Dengan demikian, dapat diduga bahwa kekalahan Jepang akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat sehingga Proklamasi Kemerdekaan harus segera dilaksanakan. Dalam hal ini Drs. Moh. Hatta berpendapat bahwa "soal kemerdekaan Indonesia datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidaklah menjadi soal karena Jepang sudah kalah. Kini kita menghadapi Sekutu yang berusaha akan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi".[334] Soekarno dan Hatta ingin memperbincangkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan di dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sehingga dengan demikian tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang, yang menetapkan waktu berkumpulnya para anggota PPKI yang pertama pada keesokan harinya (dihitung dari saat pembentukannya).[335]

Sikap inilah yang tidak disetujui oleh golongan muda, yang menganggap PPKI adalah badan *bikinan* Jepang yang tunduk pada kemauan Jepang. Mereka juga tidak menyetujui dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan secara yang telah digariskan oleh Jenderal Besar Terauchi dalam pertemuan di Dalat. Sebaliknya, mereka menghendaki terlaksananya Proklamasi Kemerdekaan dengan kekuatan sendiri lepas sama sekali dari Jepang.

Sutan Sjahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tanpa menunggu janji Jepang yang dikatakannya sebagai tipu muslihat belaka. Karena mendengarkan radio yang tidak disegel pemerintah Jepang, ia mengetahui bahwa Jepang sudah memutuskan untuk menyerah. Desakan tersebut dilaksanakannya pada tanggal 15 Agustus 1945, dalam suatu pertemuaan dengan Drs. Moh. Hatta begitu Hatta kembali dari Dalat. Akan tetapi, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta masih ingin mengecek kebenaran berita tentang kapitulasi Jepang pada pihak resmi dan tetap ingin membicarakan pelaksanaan Proklamasi pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.[336]

---

[334] Pengoemoeman Bala Tentara tentang "Pembentoekan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia", *Asia Raja,* 14 Agustus 1945

[335] Koichi Kishi, Shigetada Nishijima, *et al., op. cit.,* hlm. 457; Mohammad Hatta, *op. cit.,* hlm. 26–27

[336] Adam Malik, *Riwajat Perdjuangan Sekitar Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945,* 1962, hlm. 35

Langkah berikutnya yang diambil oleh golongan pemuda adalah terlebih dahulu mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta (sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia) pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 19.00 WIB). Di antara hadirin tampak Chairul Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, di samping Wikana dan Armansjah. Keputusan rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh menunjukkan tuntutan-tuntutan radikal golongan pemuda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak dapat digantungkan pada orang dan kerajaan lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakannya perundingan dengan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta supaya mereka diikutsertakan menyatakan Proklamasi.[337]

Keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada pukul 22.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 21.50 WIB) di rumah kediaman Ir. Soekarno, Pegangsaan Timur (sekarang Jalan Proklamasi) 56, Jakarta. Tuntutan Wikana agar Proklamasi dinyatakan oleh Ir. Soekarno pada keesokan harinya telah menegangkan suasana karena ia juga menyatakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Mendengar ancaman itu Ir. Soekarno menjadi marah dan melontarkan kata-kata yang bunyinya lebih kurang sebagai berikut: "Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok."[338] Ketegangan itu disaksikan oleh tokoh-tokoh nasionalis angkatan tua lainnya seperti Drs. Moh. Hatta, dr. Buntaran, dr. Samsi, Mr. Ahmad Subardjo, dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Tampak perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda memuncak, karena para pemuda tetap mendesak agar keesokan harinya tanggal 16 Agustus 1945 itu juga Proklamasi dilaksanakan, sedangkan pemimpin golongan tua masih menekankan perlunya diadakan rapat PPKI terlebih dahulu.

---

[337] Wawancara Pusat Sejarah ABRI dengan Mr. Ahmad Subardjo, Jakarta, tanggal 14 November 1967; lihat juga Cindy Adams, *Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia*, 1966, hlm. 316 – 317 dan Moh. Hatta, *op. cit.*, hlm. 35

[338] Merupakan asrama pemuda yang juga menjadi markas Baperpi (Badan Permusyawaratan Pemuda Indonesia); lihat Adam Malik, *Riwajat dan Perdjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945*, hlm. 38; berdasarkan buku catatan Djohar Nur tentang Proklamasi 17-8-1945 yang dibuat di Jakarta pada tahun 1952 dan hasil wawancara dengan yang bersangkutan pada tanggal 16 Juli 1975 di Jakarta

2. Peristiwa Rengasdengklok

Adanya perbedaan paham itu telah mendorong golongan pemuda untuk membawa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke luar kota. Tindakan itu berdasarkan keputusan rapat terakhir yang diadakan oleh para pemuda pada pukul 00.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 23.00) menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi, Cikini 71, Jakarta.[339] Selain dihadiri oleh pemuda-pemuda yang sebelumnya berapat di ruangan Lembaga Bakteriologi, Pegangsaan Timur, rapat itu juga dihadiri oleh Sukarni, Jusuf Kunto, Dr. Muwardi dari Barisan Pelopor, dan *Shōdanchō* Singgih dari *Daidan Peta Jakarta Sy¤*. Bersama Chairul Saleh mereka telah bersepakat untuk melaksanakan keputusan rapat pada waktu itu, yaitu antara lain "menyingkirkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke luar kota dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang". Guna menghindari kecurigaan dan tindakan Jepang, *Shōdanchō* Singgih mendapat kepercayaan untuk melaksanakan rencana tersebut.

Rencana berjalan lancar karena diperoleh dukungan berupa perlengkapan Tentara Peta dari *Cudanchō* Latief Hendraningrat yang pada saat itu sedang menggantikan *Daidanchō* Kasman Singodimedjo yang bertugas ke Bandung.[340] Demikianlah, pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 03.00 WIB) Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta oleh sekelompok pemuda dibawa ke luar kota menuju ke Rengasdengklok, sebuah kota kewedanaan di Kabupaten Karawang.

Rengasdengklok dipilih untuk mengamankan Soekarno-Hatta berdasarkan perhitungan militer. Antara anggota *Peta Daidan* Purwakarta dan *Daidan* Jakarta terdapat hubungan erat sejak mereka mengadakan pelatihan bersama-sama. Di samping itu, Rengasdengklok letaknya terpencil yakni 15 km dari Kedunggede, Karawang pada jalan raya Jakarta-Cirebon. Dengan demikian, deteksi dapat dengan mudah dilaksanakan terhadap setiap gerakan tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok, baik dari arah Jakarta maupun dari arah Bandung atau Jawa Tengah. Karena pastilah mereka harus melalui Kedunggede, di mana pasukan Peta telah bersiap-siap untuk menahannya.[341]

Sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengasdengklok. Maksud para pemuda untuk menekan mereka berdua supaya segera melaksanakan

---

[339] Wawancara Pusat Sejarah ABRI dengan Drs. Singgih, di Jakarta, pada tanggal 7 Juli 1975, (transkripsi) lihat juga Rochmani Santoso, *et al., op. cit.*, 1988, hlm. 45

[340] Wawancara *simultan* Pusat Sejarah ABRI, Rengasdengklok, 8 Agustus 1974 (transkripsi) lihat juga Rochmani Santoso, *et al., ibid.*, 1988, hlm. 44

[341] Mr. Ahmad Subardjo, *Lahirnya Republik Indonesia*, 1972, hlm. 94; Wawancara di Rengasdengklok, *ibid.*

Proklamasi Kemerdekaan terlepas dari setiap kaitan dengan Jepang, rupa-rupanya tidak terlaksana. Agaknya kedua pemimpin senior itu mempunyai wibawa yang cukup besar sehingga para pemuda yang membawanya ke Rengasdengklok segan untuk melakukan penekanan. Namun, dalam suatu pembicaraan berdua dengan Soekarno, *Shōdanchō* Singgih menganggap Soekarno menyatakannya kesediaannya untuk mengadakan Proklamasi itu segera sesudah kembali ke Jakarta. Berdasarkan anggapan itu Singgih pada tengah hari kembali ke Jakarta untuk menyampaikan rencana Proklamasi itu kepada kawan-kawannya pemimpin pemuda.[342]

Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subardjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda tercapai kata sepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta. Didapat pula penegasan bahwa Laksamana Tadashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu Jusuf Kunto dari pihak pemuda pada hari itu juga mengantarkan Mr. Ahmad Subardjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro (Mbah) ke Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan tiba pada pukul 18.00 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 16.30 WIB). Di Rengasdengklok oleh Ahmad Subardjo diberi jaminan dengan taruhan nyawa bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan tersebut komandan kompi Peta setempat *Chūdanchō* Subeno bersedia melepaskan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali ke Jakarta.[343]

3. Perumusan Teks Proklamasi

Sesampainya di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 22.00 WIB), rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 (sekarang Perumusan Naskah Proklamasi, Depdikbud) setelah Soekarno dan Hatta singgah di rumah masing-masing terlebih dahulu. Di rumah itulah naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disusun.

Sebelumnya Soekarno dan Hatta telah menemui *Shōmubucō*, Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikapnya mengenai Proklamasi Kemerdekaan. Yang menemani mereka adalah Laksamana Maeda bersama Shigetada Nishijima dan Tomegoro Yoshizumi serta Miyoshi sebagai penerjemah.[344]

---

[342] Keberhasilan misi Subarjo itu, lihat Rochmani Santoso, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 55–60

[343] Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, hlm. 53

[344] Moh. Hatta, *op. cit.*, hlm. 53–54

Pada pertemuan tersebut tidak dicapai kata sepakat antara Soekarno-Hatta di satu pihak dan Nishimura di lain pihak. Di satu pihak Soekarno-Hatta bertekad untuk melangsungkan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945 itu tidak jadi diadakan karena mereka dibawa oleh para pemuda ke Rengasdengklok. Mereka menekankan kepada Nishimura bahwa Jenderal Besar Terauchi telah menyerahkan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Di lain pihak, Nishimura menegaskan garis kebijakan Panglima Tentara Ke-16 di Jawa, yakni dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah *status quo*. Sejak tengah hari sebelumnya tentara Jepang semata-mata sudah merupakan alat Sekutu dan diharuskan tunduk kepada perintah Sekutu.

Berdasarkan garis kebijakan itu Nishimura melarang Soekarno-Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan.[345] Akhirnya, sampailah Soekarno-Hatta pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan soal kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Hanya mereka mengharapkan dari pihak Jepang supaya tidak menghalang-halangi pelaksanaan Proklamasi oleh rakyat Indonesia sendiri.[346]

Setelah hampir dua jam lamanya mereka mengadakan pertemuan dengan Nishimura tanpa dicapai kesepakatan pendapat di antara mereka, Soekarno dan Hatta dengan didampingi Miyoshi kembali ke rumah Maeda. Di rumah Maeda kedua pemimpin itu bertemu dengan Subardjo. Demikian pula Maeda yang pulang ke rumahnya lebih dahulu secara diam-diam dari rumah Nishimura.

Rumah laksamana Jepang itu dianggap tempat yang aman dari tindakan Pemerintah Militer Angkatan Darat. Kedudukan Maeda sebagai Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat memungkinkannya berhubungan dengan Mr. Ahmad Subardjo dan sejumlah pemuda Indonesia yang bekerja pada kantornya. Berdasarkan hubungan baik itu rumah Maeda dijadikan tempat pertemuan antara pelbagai golongan pergerakan nasional baik golongan tua maupun pemuda.[347]

---

[345] Mohammad Hatta, *op. cit.*, hlm. 55

[346] Nugroho Notosusanto, *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*, hlm. 10–11

[347] Ahmad Soebardjo, *Lahirnya Republik Indonesia*, hlm. 108; Rochmani Santoso, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 65

Gambar 1.32 Rumah di Rengasdengklok, tempat Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta diamankan oleh para pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945 (Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi)

Gambar 1.33 Laksamana Maeda

Gambar 1.34 Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta (sekarang Museum Perumusan Naskah Proklamasi)

Di ruang makan rumah itu dirumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai kedua tatkala peristiwa bersejarah itu berlangsung. Miyoshi sebagai orang kepercayaan Nishimura bersama tiga tokoh pemuda yakni Sukarni, Mbah Diro, dan B.M. Diah menyaksikan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Subardjo membahas perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh lainnya, baik dari golongan tua maupun muda, menunggu di serambi muka.

Perumusan berlangsung dengan lancar dan di antara rumusan Proklamasi didapati kalimat yang diambil dari Piagam Djakarta 22 Juni 1945, yaitu bab Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh Panitia yang diketuai oleh Soekarno.

Perumusan didahului dengan pertanyaan Soekarno kepada Subardjo sebagai berikut:

> "Masih ingatkah saudara teks dari bab Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar kita?"
>
> "Ya, saya ingat, tetapi tidak lengkap seluruhnya," jawab Subardjo.
>
> "Tidak mengapa, kita hanya memerlukan kalimat-kalimat yang menyangkut proklamasi dan bukannya seluruh teksnya," jawab Soekarno.[348]

Pada saat itu Soekarno memegang pena dan menulis teks Proklamasi yang kalimatnya terdiri dua ayat. Ayat pertama yang ditulis "Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia"adalah kalimat yang diingat oleh Mr. A. Subardjo dari Piagam Djakarta yang antara lain berbunyi "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya."

Kemudian Hatta menyempurnakan teks Proklamasi dengan ayat kedua "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.[349]

Soekarnolah yang menuliskan konsep teks Proklamasi pada secarik kertas, sedangkan Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Subardjo menyumbangkan pikiran secara lisan.[350] Sebagai hasil pembicaraan mereka diperoleh rumusan yang ditulis oleh Ir. Soekarno sebagai berikut:

---

[348] Rochmani Santoso, *et al.*, hlm. 65

[349] Nugroho Notosusanto, *Naskah Proklamasi ...*, hlm. 10–11

[350] Nugroho Notosusanto, *ibid.*, hlm. 11

Ir. Soekarno

Drs. Moh. Hatta

Mr. Ahmad Subardjo

Gambar 1.35 Tiga tokoh perumus Naskah Proklamasi
(Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi)

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17 - 8 - '05

Wakil-2 bangsa Indonesia,[351]

Kalimat pertama merupakan saran Mr. Ahmad Subardjo yang diambil dari rumusan dalam sidang *Dōkuritsu Junbi Cosakai*, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan pikiran Drs. Moh. Hatta. Beliau menganggap kalimat pertama hanyalah merupakan pernyataan dari kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Menurut pendapatnya perlu ditambahkan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan (*transfer of sovereignty*). Maka dihasilkanlah rumusan kalimat terakhir dari naskah Proklamasi tersebut.[352]

Setelah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo selesai merumuskan naskah Proklamasi, kemudian mereka menuju serambi muka untuk menemui hadirin yang telah berkumpul. Waktu saat itu menunjukkan pukul 04.30 waktu Jawa zaman Jepang (pukul 03.00 WIB)[353] Ir. Soekarno membuka pertemuan dengan membacakan rumusan naskah Proklamasi yang masih merupakan konsep. Kepada mereka yang hadir Ir. Soekarno menyarankan agar bersama-lama menandatangani naskah Proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia.[354] Saran itu diperkuat oleh Drs. Moh. Hatta dengan mengambil contoh kepada naskah *"Declaration of Independence"* Amerika Serikat.[355] Saran itu ditentang oleh pihak pemuda. Mereka tidak setuju kalau tokoh-tokoh golongan tua yang disebutnya sebagai "budak-budak Jepang" turut menandatangani naskah Proklamasi.[356] Tokoh-tokoh golongan tua yang bukan orang pergerakan nasional mereka anggap sebagai oportunis yang memperoleh kedudukan menjadi pejabat Kepala Pemerintahan Militer Jepang. Akan tetapi, kemudian salah seorang tokoh pemuda, yakni Sukarni,

---

[351] Moh. Hatta, *op. cit.*, hlm. 57–58; Mr. A. Soebardjo, *op. cit.*, hlm. 109

[352] Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hlm. 11

[353] *Ibid.*, hlm. 11–12

[354] Moh. Hatta, *op. cit.*, hlm. 59

[355] Wawancara dengan Moh. Hatta, Jakarta, tanggal 6 Desember 1974; lihat juga Rochmani Santoso, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 67

[356] Moh. Hatta, *op. cit.*, hlm. 60

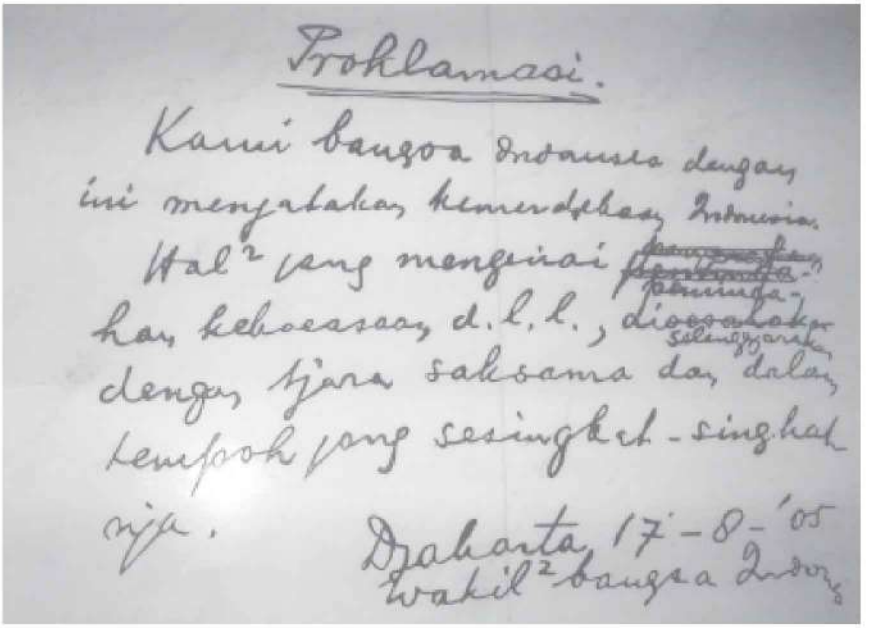

Proklamasi.

Kami bangsa Indonesia dengan
ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal² jang mengenai pemindahan
kekoeasaan, d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara saksama dan dalam
tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17-8-'05
Wakil² bangsa Indonesia

Gambar 1.36 Konsep Teks Proklamasi yang ditulis oleh Ir. Soekarno (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

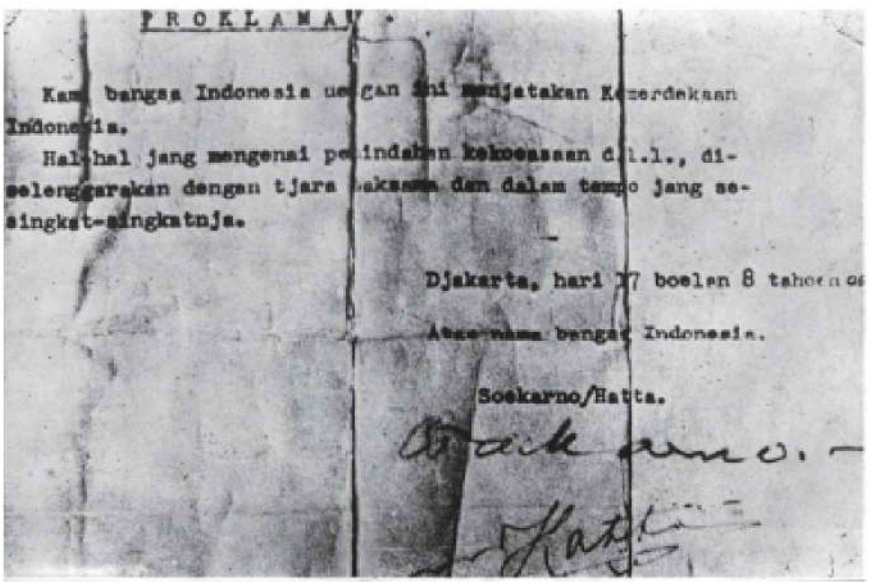

PROKLAMASI.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta.

Gambar 1.37 Teks Proklamasi Otentik yang diketik oleh Sajuti Melik pada tanggal 17 Agustus 1945. (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

mengusulkan agar yang menandatangani naskah Proklamasi cukup dua orang saja, yakni Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bukankah mereka berdua yang pada masa itu di mana-mana dikenal sebagai pemimpin utama bangsa Indonesia?[357] Dengan disetujuinya usul Sukarni itu oleh hadirin, Ir. Soekarno meminta kepada Sajuti Melik untuk mengetik bersih naskah itu berdasarkan naskah tulisan tangan Soekarno, disertai dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui.[358]

Sajuti Melik mengetik naskah bersih rumusan Proklamasi. Ada tiga perubahan yang terdapat pada naskah bersih itu, yakni kata-kata "tempoh" diganti menjadi "tempo", sedangkan "wakil-wakil bangsa Indonesia" pada bagian akhir diganti dengan "Atas nama Bangsa Indonesia". Demikian pula perubahan terjadi pada cara menulis tanggal, yaitu "Djakarta, 17-8-05" menjadi "Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05". Dengan perubahan tersebut, naskah yang, sudah diketik kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta.[359]

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l. diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta

(tandatangan Soekarno)
(tandatangan Hatta)[360]

Demikianlah proses dan peristiwa yang menghasilkan naskah Proklamasi Kemerdekaan itu telah berlangsung pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945.

---

[357] Moh. Hatta, *op. cit.*, hlm. 60

[358] Wawancara dengan Sajuti Melik, Jakarta, tanggal 15 Desember 1976; tanggal 28 Juli 1977; Rochmani Santoso, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 67

[359] *Ibid.*

[360] Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hlm. 33. Angka tahun '05 adalah singkatan angka tahun 2605 dari tarikh *Sumera* yang sama dengan tahun 1945 Masehi

Bab II
Perang Kemerdekaan

A. Proklamasi, Undang-Undang Dasar '45, dan Pancasila

1. Proklamasi Kemerdekaan

Pada pukul 05.00 (waktu Jawa pada zaman Jepang) tanggal 17 Agustus 1945, anggota PPKI dan tokoh-tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda, pulang ke rumah masing-masing setelah berhasil merumuskan teks Proklamasi. Mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi, Gedung Perintis Kemerdekaan), pada pukul 11.30 (waktu Jawa pada zaman Jepang) atau pukul 10.00 WIB sekarang. Sebelum pulang, Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di lembaga pers dan kantor berita, terutama B.M. Diah, untuk memperbanyak teks Proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia.[1]

Para pemuda langsung melakukan kegiatan-kegiatan membagi pekerjaan dalam kelompok-kelompok. Tiap-tiap kelompok mengirimkan kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat Proklamasi telah tiba. Kelompok Sukarni, misalnya, yang bermarkas di Jalan Bogor Lama (sekarang Jalan Dr. Sahardjo, S.H.) melakukan rapat di Kepu (Kemayoran), kemudian pindah ke Defensielijn van den Bosch (sekarang Jalan Bungur Besar) untuk mengatur penyiaran berita Proklamasi. Semua alat komunikasi yang ada akan dipergunakan untuk maksud itu, seperti pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil akan dikerahkan ke segenap penjuru kota.[2] Diusahakan juga pengerahan massa untuk mendengarkan pembacaan Proklamasi di Pegangsaan Timur 56.

Ribuan teks Proklamasi berhasil dicetak dengan roneo dan segera disebarkan ke pelbagai penjuru kota, ditempelkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh publik. Juga, secara beranting berita itu disampaikan ke luar kota Jakarta.

---

1 Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*–1969, hlm. 53; Ahmad Soebardjo Djojoadisurjo, *Kesadaran Nasional: Autobiografi*, Jakarta,1978, hlm. 339–340

2 Adam Malik, *Riwajat dan Perdjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945*, 1962, hlm. 59

Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, barisan pemuda datang berbondong-bondong menuju Lapangan Ikada, di sudut tenggara Lapangan Monumen Nasional (Monas) yang sekarang. Ternyata, Lapangan Ikada sudah dijaga oleh pasukan Jepang yang bersenjata lengkap.[3] Rupanya Jepang sudah mengetahui kegiatan para pemuda, dan karena itu mereka berusaha menghalanginya.

Para pemuda datang ke Lapangan Ikada berdasarkan informasi dari mulut ke mulut bahwa Proklamasi akan diucapkan di tempat tersebut. Mereka tidak mengetahui keputusan terakhir yang diambil oleh PPKI bahwa Proklamasi akan diucapkan di Pegangsaan Timur 56.[4] Bahkan Soediro, pemimpin Barisan Pelopor pun, tidak mengetahuinya. Pagi itu ia berangkat ke Lapangan Ikada. Setelah melihat lapangan itu dijaga oleh pasukan Jepang, ia menemui dr. Muwardi, Kepala Keamanan Ir. Soekarno. Dari dr. Muwardi ia mendapat penjelasan bahwa Proklamasi akan diucapkan di Pegangsaan Timur 56. Soediro kembali ke Ikada untuk memberitahukan hal itu kepada anak buahnya.

Pada pagi itu pekarangan rumah Ir. Soekarno sudah dipadati oleh sejumlah massa pemuda. Untuk menjaga keamanan, dr. Muwardi meminta kepada *Cudanco* Latief Hendraningrat untuk menugasi beberapa orang anak buahnya berjaga-jaga di sekitar rumah Ir. Soekarno. Sesuai dengan permintaan itu, Latief menempatkan beberapa orang prajurit Peta berjaga-jaga di sekitar jalan kereta api yang membujur di belakang rumah itu.[5] Di samping itu, di ksatrian mereka di Jaga Monyet disiagakan pula pasukan yang dipimpin oleh *Shodanco* Arifin Abdurrahman.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Suwirjo memerintahkan Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan, yaitu mikrofon dan beberapa pengeras suara. Wilopo dan Nyonoprawoto berhasil meminjam peralatan tersebut dari Gunawan, pemilik toko radio Satria di Salemba Tengah 24. Gunawan juga mengirimkan seorang pemuda kepercayaannya untuk melayani penggunaannya.[6]

Sudiro (yang merangkap sebagai sekretaris Ir. Soekarno) memerintahkan S. Suhud Komandan Pengawal Rumah Ir. Soekarno untuk menyiapkan satu tiang untuk menggerek bendera. Karena situasi tegang,

---

3 Sudiro, *Pengalaman Saja di Sekitar Proklamasi* 17 *Agustus 1945*, 1974, hlm. 20

4 Bung Karno berpendapat bahwa pembacaan naskah Proklamasi di Ikada akan mengandung risiko yang besar ditinjau dari sudut keamanan dan politik, Ahmad Soebardjo Djojoadisurjo, *op. cit.*, hlm. 340

5 Keterangan S.K. Trimurti, *Merdeka,* 17 Agustus 1972; wawancara dengan Prof. Dr. Arifin Abdurrahman, Jakarta, 7 Mei 1975; Sudiro, *op. cit.*, hlm. 22

6 *Tempo,* 16 Agustus 1975, hlm. 13; Panitia Peringatan 70 Tahun Wilopo, *Wilopo 70 Tahun,* Jakarta, 1979, hlm. 41

Suhud tidak ingat bahwa di depan rumah masih ada dua tiang bendera dari besi yang tidak digunakan dan salah satu di antaranya dapat dipindahkan. Malahan, ia mencari sebatang bambu yang berada di belakang rumah, kemudian dibersihkan dan diberi tali, lalu ditanam beberapa langkah dari teras.[7] Bendera yang akan dikibarkan ialah bendera yang dijahit oleh tangan Nyonya Fatmawati Soekarno. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar karena kainnya berukuran tidak sempurna.[8]

Sebagaimana yang telah disepakati semula, para anggota PPKI menjelang pukul 10.30 telah berdatangan ke Pegangsaan Timur. Di antara mereka adalah dr. Boentaran Martoatmodjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. Latuharhary, Abikoesno Tjokrosujoso, Anwar Tjokroaminoto, Harsono Tjokroaminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hadjar Dewantara, Sam Ratu Langie, K.H. Mas Mansur, Mr. Sartono, Sajuti Melik, Pandu Kartawiguna, M. Tabrani, dr. Muwardi, dan A.G. Pringgodigdo.

Rangkaian acara yang akan dilaksanakan dalam upacara itu adalah: pembacaan Proklamasi, pengibaran bendera Merah Putih, dan sambutan Wali Kota Suwirjo dan dr. Muwardi. Ketika waktu mendekati pukul 10.00, sedangkan acara belum juga dimulai, para pemuda yang berdiri menunggu sejak pagi mulai tidak sabar. Mereka yang diliputi suasana tegang berkeinginan keras agar pembacaan Proklamasi segera dilakukan. Mereka mendesak dr. Muwardi agar segera mengingatkan Bung Karno bahwa hari telah siang. Karena desakan itu, dr. Muwardi memberanikan diri menemui Bung Karno yang masih berada di kamar dan menyampaikan keinginan para pemuda. Bung Karno menolak membacakan Proklamasi sendiri tanpa hadirnya Hatta. Muwardi terus mendesak. Ia menyatakan bahwa hal itu lebih baik dikerjakan oleh Bung Karno sendiri saja tanpa kehadiran Bung Hatta, sebab naskah Proklamasi sudah ditandatangani berdua. Bung Karno menjawab dengan nada marah: "Saya tidak akan membacakan Proklamasi kalau Hatta tidak ada. Kalau Mas Muwardi tidak mau menunggu, silakan membaca Proklamasi sendiri."[9]

Lima menit sebelum acara dimulai, Hatta datang. Ia langsung menuju ke kamar Soekarno. Beberapa menit sebelum pukul 10.00 kedua pemimpin itu keluar bersama-sama menuju tempat upacara, diiringi oleh Nyonya

---

7 Wawancara dengan S. Suhud, Jakarta, 7 Mei 1972; keterangan Ibu Fatmawati dalam *Merdeka*, 16 Agustus 1972; Sudiro, *op. cit.*, hlm. 21

8 Bendera ini dijahit oleh Ny. Fatmawati setelah adanya Janji Koiso. Kain untuk bendera itu, atas permintaan Ny. Fatmawati, disumbangkan oleh Shimizu dan diserahkan kepada Ny. Fatmawati oleh Chairul Basri. Lihat Chairul Basri, *Apa yang Saya Ingat*, 2003, hlm. 42

9 Sudiro, *op. cit.*, hlm. 30; Cindy Adams, *Sukarno: An Autobiography*, 1965, hlm. 219; Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, 1966, hlm. 54

Fatmawati Soekarno.[10] Upacara berlangsung tanpa protokol. Segera Latief memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda, yang telah menunggu sejak pagi. Semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latief mempersilakan Bung Karno dan Bung Hatta maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Sebelum membacakan teks Proklamasi, Bung Karno menyampaikan pidato singkat. Dikatakannya bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sudah berlangsung puluhan, bahkan ratusan tahun, dan mengalami gelombang naik dan turun. Mengenai perjuangan dalam zaman Jepang dikatakannya, "tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri." Pada bagian akhir pidato singkat itu Bung Karno mengatakan, "Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya."

Sesudah menyampaikan pidato singkat itu, Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan teks Proklamasi.

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta

(tanda tangan Soekarno)
(tanda tangan Hatta)

Pembacaan Proklamasi diakhiri Bung Karno dengan penegasan:

"Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun Negara kita! Negara Merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu."[11]

---

[10] Cindy Adams, *op. cit.*, hlm. 219

[11] Koesnodiprodjo, *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945* (terbitan baru), Jakarta, 1951, hlm. Pendahuluan Bagian I

Gambar 2.1 Ir. Soekarno (Bung Karno) didampingi Drs. Mohammad Hatta (Bung Hatta) sedang memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi di Pegangsaan Timur 56 Jakarta (sekarang Jalan Proklamasi) (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

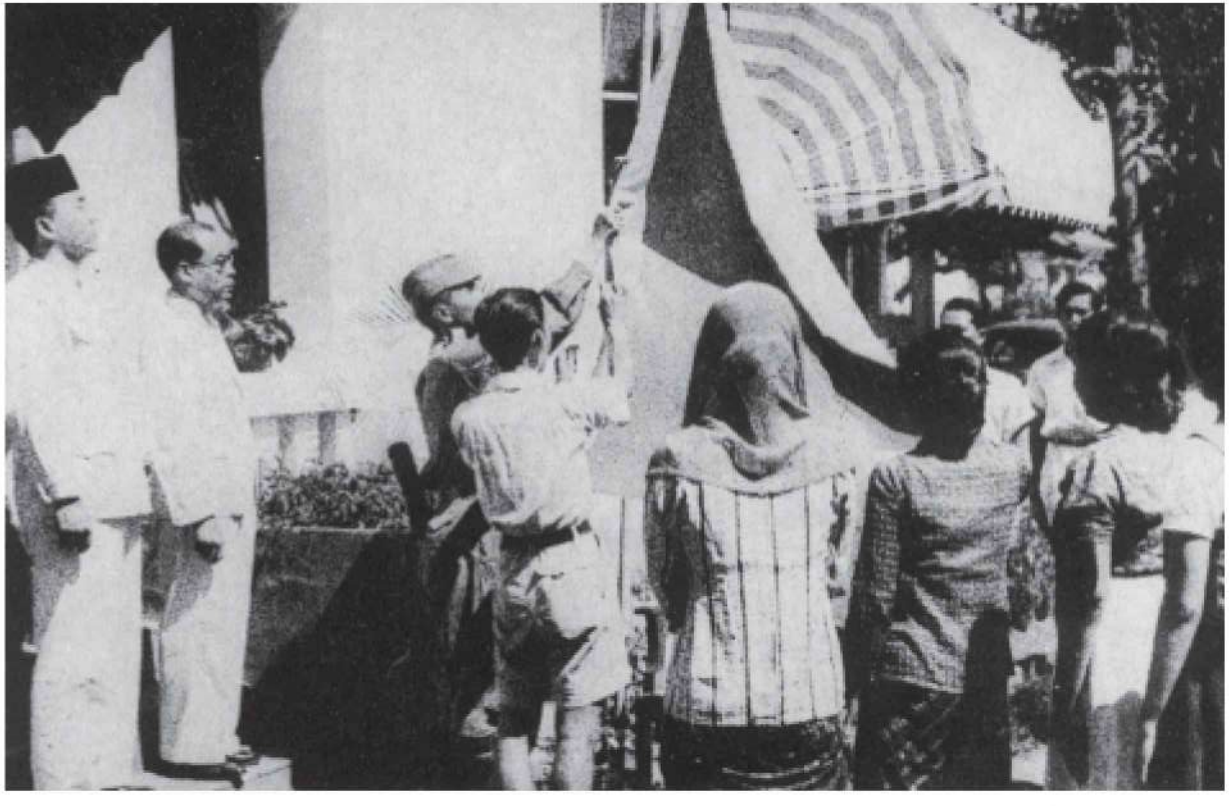

Gambar 2.2 Upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih di halaman gedung Pegangsaan Timur 56 sesaat setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno dan kemudian dikibarkan kembali setiap tahun pada tanggal 17 Agustus untuk memperingati detik-detik yang paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia itu (mulai tahun 1968 yang dikibarkan adalah duplikatnya untuk menjaga agar Bendera Pusaka tidak rusak). (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

Gambar 2.3 Di antara mereka yang hadir dan dengan khidmat mengikuti jalannya upacara Proklamasi Kemerdekaan, tampak di barisan depan dari kanan ke kiri Mr. Latuharhary, Soewirjo, Ibut Fatmawati, Dr. Samsi, dan Ny. S.K. Trimurti. Di barisan belakang, antara lain tampak Mr. A.G. Pringgodigdo dan Mr. Soedjono. (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

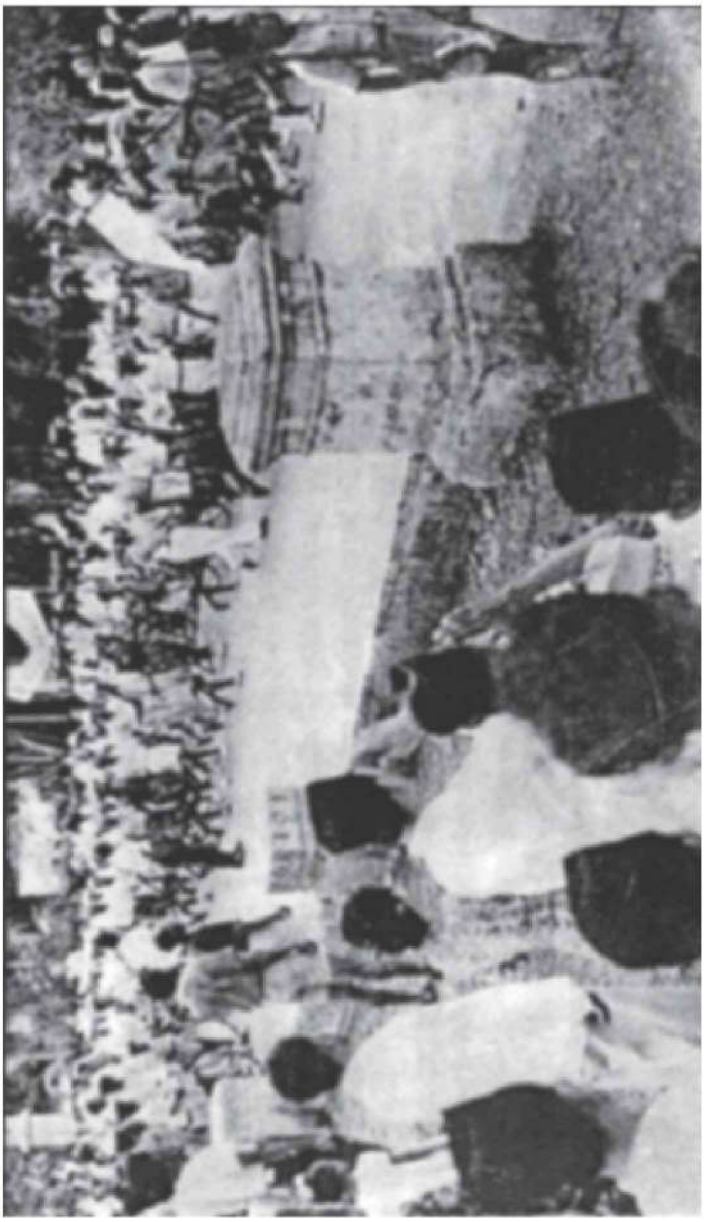

Gambar 2.4 Rakyat Indonesia di Jakarta menyambut kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan
(Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

Tepat pada saat pengucapan Proklamasi itu, pengeras suara yang dipakai rusak, padahal sebelum dipergunakan telah dicoba beberapa kali dan berjalan dengan baik. Hal ini mungkin disebabkan kabel-kabelnya rusak, terinjak-injak oleh massa.

Acara selanjutnya ialah pengibaran bendera Merah Putih. S. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan, dan mengikatkannya pada tali dengan bantuan *Cudanco* Latief. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan irama dengan lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Seusai penggerekan bendera, Wali Kota Suwirjo dan dr. Muwardi menyampaikan sambutan masing-masing.

Peristiwa besar itu berlangsung hanya selama lebih kurang satu jam dengan penuh kekhidmatan. Sekalipun sangat sederhana, ia membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Berita Proklamasi yang telah meluas di seluruh Jakarta segera disebarkan ke seluruh Indonesia. Pada pagi tanggal 17 Agustus itu juga, teks Proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio Kantor Berita *Domei,* Waidan B. Panelewen. Ia menerima teks itu dari Syahruddin, seorang wartawan *Domei*. Segera ia memerintahkan F. Wuz, seorang markonis, supaya berita itu disiarkan tiga kali berturut-turut. Baru dua kali F. Wuz mengerjakannya masuklah orang Jepang ke ruangan radio. Dengan marah orang Jepang itu memerintahkan agar penyiaran berita itu dihentikan. Akan tetapi, Waidan Panelewen memerintahkan F. Wuz untuk terus menyiarkannya. Berita ini kemudian diulangi setiap setengah jam, sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran itu, pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita tersebut dan menyatakannya sebagai kekeliruan.[12] Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 1945 pemancar itu disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk.

Sekalipun pemancar pada kantor berita *Domei* disegel, para pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar baru, dengan bantuan beberapa orang teknisi radio, Sukarman, Sutamto, Susilahardja, dan Suhandar. Alat-alat pemancar yang diambil dari kantor berita *Domei* bagian demi bagian dibawa ke rumah Waidan B. Panelewen, dan sebagian ke Menteng 31. Akhirnya terciptalah pemancar baru di Menteng 31, dengan kode panggilan DJK I. Dari sinilah seterusnya berita Proklamasi disiarkan.[13]

---

[12] Adam Malik, *Riwayat Proklamasi,* 1962, hlm. 60

[13] *Tempo,* 16 Agustus 1975

Usaha para pemuda dalam penyiaran berita ini tidak terbatas lewat radio, tetapi juga lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa dalam penerbitannya tanggal 20 Agustus memuat berita Proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Sidang-Sidang PPKI

Kesibukan para pemimpin sesudah Proklamasi adalah menyusun tatanan kehidupan kenegaraan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu rapat yang pertama sesudah Proklamasi. Pada waktu itu Soekarno-Hatta merencanakan untuk menambah sembilan orang anggota baru, termasuk dari golongan pemuda, antara lain, Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana. Akan tetapi, setelah berlangsung pembicaraan yang tidak memuaskan antara Hatta dan Chairul, para pemuda meninggalkan tempat. Mereka masih menganggap bahwa PPKI adalah aparat Jepang.[14] Rapat diadakan di Pejambon di gedung Departemen Luar Negeri sekarang. Sebelum rapat dimulai, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan, untuk membahas rancangan pembukaan undang-undang dasar, yang dibuat pada 22 Juni 1945, khususnya mengenai kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", karena pemeluk agama lain merasa keberatan terhadap kalimat tersebut.[15] Adanya keberatan itu diketahui Hatta sore tanggal 17 Agustus dari seorang perwira *Kaigun* (Angkatan Laut Jepang). Perwira ini mengatakan bahwa dicantumkannya kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" akan menyebabkan penganut agama lain di daerah Indonesia Timur merasa didiskriminasikan dan karena itu mereka lebih suka berdiri di luar RI.

Dengan dipimpin oleh Hatta, tokoh-tokoh Islam tersebut membahas masalah yang cukup sensitif itu. Di antara tokoh-tokoh ini, Ki Bagus Hadikusumo merupakan tokoh berpaham "keras", artinya ingin tetap mempertahankan tujuh kata tersebut. Sikap keras Hadikusumo dapat dilunakkan oleh T.M. Hassan dengan mengemukakan argumentasi bahwa persatuan bangsa lebih penting daripada kepentingan golongan. Akhirnya dalam waktu lima belas menit dicapai kata sepakat untuk mengganti tujuh

[14] Adam Malik, *op. cit.*, 1962, hlm. 63; Mohammad Hatta, *op. cit.*, 1969, hlm. 61

[15] Masalah tersebut sesungguhnya telah dibahas atas keberatan Mr. Latuharhary pada Rapat Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 11 Juli 1945, dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, Prof. Mr. Hadji Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, 1971, hlm. 259

kata tersebut dengan "Yang Maha Esa", sehingga lengkapnya berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Kesepakatan yang dicapai oleh tokoh-tokoh Islam itu memperlancar pembicaraan dalam rapat pleno PPKI sebab bila dibicarakan dalam rapat pleno, rapat akan memakan waktu yang lama dan berlarut-larut.[16] Setelah bertukar pikiran itu rapat pleno PPKI dibuka pada pukul 11.30 di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta. Rapat dihadiri oleh 27 orang anggota. Soekarno membuka rapat dengan pidato singkat. Ia mengingatkan anggota PPKI bahwa mereka berada dalam zaman yang beralih secepat kilat dan karena itu harus bertindak kilat pula. Pada akhir pidato itu dikatakannya, "Janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil, tetapi marilah kita menurut garis besar saja yang mengandung sejarah."

Rapat pertama ini berlangsung dengan lancar. Pembahasan masalah rancangan pembukaan dan undang-undang dasar yang telah disiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, berhasil dibahas dalam tempo kurang dari dua jam, disepakati bersama rancangan Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.[17] Sidang diskors pada pukul 12.50, dan akan dimulai lagi pukul 13.15. Pada awal pembukaan sidang kedua ini Soekarno mengumumkan enam orang anggota baru PPKI, yaitu Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman, Sajuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantri, dan Mr. Subardjo.

Sebelum meningkat ke acara baru, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, Soekarno meminta agar disahkan Pasal III Aturan Peralihan.[18] Kemudian Oto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan aklamasi. Ia mengajukan calon Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Semua hadirin menerima dengan aklamasi sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Setelah acara pemilihan presiden dan wakil presiden, sidang meneruskan acara membahas pasal-pasal rancangan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Dengan perubahan-perubahan kecil seluruh rancangan tersebut disepakati oleh sidang.

---

[16] Moh. Hatta, *op. cit.*, hlm. 57–59; T. Mohammad Hassan, "Bung Hatta di Sumatera", dalam *Bung Hatta Mengabdi pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa*, 1972, hlm. 182–183

[17] Muhammad Yamin, *op. cit.*, hlm. 399–427

[18] Pasal III Aturan Peralihan itu berbunyi: Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan. Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 25 Mei 1945–22 Agustus 1945*, 1995, hlm 445

Presiden Soekarno menutup acara pembahasan itu dengan menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta peraturan peralihan telah sah ditetapkan.[19]

Dengan demikian, pada tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan bernegara yang meliputi dasar negara yakni sebuah undang-undang dasar yang kini dikenal sebagai Undang-Undang Dasar '45. Pembukaan Undang-Undang Dasar '45 itu mengandung dasar negara yang kita kenal dengan "Pancasila". Sila-sila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila ini dari rumusan yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yang merupakan sintesis dari rumusan yang diajukan oleh Ir. Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Prof. Supomo pada sidang pertama *Dōkuritsu Junbi Cōsokai* serta oleh Panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945.[20]

Sebelum rapat PPKI pertama ini ditutup, Presiden Soekarno menunjuk sembilan orang sebagai anggota Panitia Kecil yang ditugasi menyusun rancangan yang berisi hal-hal yang meminta perhatian mendesak, yakni pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Mereka adalah Oto Iskandar Dinata, Subardjo, Sajuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusumah, Dr. Amir, A.A. Hamidhan, Dr. Ratulangi, dan Ketut Pudja.

Rapat dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi. Acara pertama adalah membahas hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpin oleh Oto Iskandar Dinata. Sebelum acara dimulai Presiden Soekarno menunjuk Mr. Ahmad Subardjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman[21] untuk membentuk Panitia Kecil yang merencanakan bentuk departemen, tetapi bukan personalianya.

Hasil Panitia Kecil Oto Iskandar Dinata kemudian dibahas dan menghasilkan keputusan:

a. Pembagian wilayah: terdiri atas 8 provinsi beserta para calon gubernurnya, yaitu:

---

[19] Prof. Mr. Hadji Muhammad Yamin, *op. cit.*, hlm. 437

[20] A.G. Pringgodigdo, *Sekitar Pantjasila*, hlm. 4–11; lihat pula Nugroho Notosusanto, *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*, hlm. 15–20, dan harap lihat Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djakarta, 1969, hlm. 399 dst.

[21] Menurut Ahmad Subardjo, bukan Mr. Kasman tetapi Mr. Alex Andries Maramis, lihat Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, *op. cit.*, hlm. 346; Muhammad Yamin, *op. cit.*, hlm. 438

Jawa Barat;
Jawa Tengah;
Jawa Timur;
Borneo (Kalimantan), calon Ir. Moh. Noor;
Sulawesi, calon Dr. Ratulangi;
Maluku, calon Mr. Latuharhary;
Sunda Kecil (Nusa Tenggara), calon Mr. Ketut Pudja;
Sumatra, calon Mr. T. Mohammad Hassan;
dua daerah istimewa, Yogyakarta dan Surakarta.

b. Adanya Komite Nasional (Daerah).

Kemudian Panitia Kecil yang dipimpin oleh Mr. Ahmad Subardjo menyampaikan laporannya. Diusulkan oleh panitia itu adanya 13 kementerian. Setelah dibahas, sidang memutuskan adanya:

1. Departemen Dalam Negeri;
2. Departemen Luar Negeri;
3. Departemen Kehakiman;
4. Departemen Keuangan;
5. Departemen Kemakmuran;
6. Departemen Kesehatan;
7. Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Departemen Sosial;
9. Departemen Pertahanan;
10. Departemen Penerangan;
11. Departemen Perhubungan;
12. Departemen Pekerjaan Umum.[22]

Departemen Urusan Agama yang diusulkan oleh Panitia Subardjo ditolak oleh sidang, sedangkan Departemen Kesejahteraan diganti namanya menjadi Departemen Sosial. Satu departemen yang tidak terdapat dalam usul Panitia Subardjo ialah Departemen Penerangan. Dalam kabinet yang dibentuk tanggal 4 September 1945 (Kabinet Presidensial), menteri negara bukan hanya satu, tetapi lima orang.

Pembahasan mengenai masalah departemen ditunda, kemudian Presiden kembali membahas masalah tentara kebangsaan. Panitia Kecil yang dipimpin oleh Oto Iskandar Dinata mengajukan dua usul. *Pertama*, menolak rencana pembelaan negara yang disusun oleh BPUPKI sebab rencana itu

[22] Muhammad Yamin, *op. cit.*, 1962, hlm. 461–462; Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, 1945, hlm. 423 – 512

mengandung politik perang. Dalam rencana itu antara lain disebutkan bahwa tentara Indonesia akan dibentuk bekerja sama dengan Jepang dan dikukuhkan dalam perjanjian. Dalam bagian lain disebutkan perlunya mengumumkan perang terhadap Amerika, Inggris, serta Belanda dan sekutunya. Rencana ini disetujui oleh BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. *Kedua*, membubarkan tentara Peta di Jawa dan Bali serta Lasykar Rakyat (*Giy¤g¤n*) di Sumatra dengan alasan kesatuan militer ini merupakan buatan Jepang dan kedudukannya di dunia internasional tidak berketentuan. Sebagai gantinya diusulkan agar Presiden memanggil tokoh-tokoh yang mempunyai kemampuan militer untuk membentuk tentara kebangsaan.

Usul tersebut diterima secara aklamasi oleh sidang. Urusan kepolisian oleh Panitia Kecil dimasukkan ke dalam Departemen Dalam Negeri. Sesuai dengan usul sidang, Presiden Soekarno menunjuk Abdul Kadir, Kasman Singodimedjo, dan Oto Iskandar Dinata, untuk mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan. Abdul Kadir ditunjuk sebagai ketuanya.[23]

Pembicaraan lainnya ialah mengenai perlunya ketenteraman dan segera dimulainya perjuangan. Rapat pada siang hari tanggal 19 Agustus ini ditutup pada pukul 14.55. Pada waktu Presiden dan Wakil Presiden akan pulang, mereka diminta oleh pemuda-pemuda untuk hadir pada rapat yang mereka adakan di Jalan Prapatan 10.

Rapat itu dipimpin oleh Adam Malik bersama Mr. Kasman dan Ki Hadjar Dewantara. Hadir pula di situ Sutan Sjahrir. Mereka mengharapkan agar Soekarno-Hatta melakukan perebutan kekuasaan terhadap Jepang yang diatur dengan cepat dan serentak. Presiden Soekarno memberikan tanggapan bahwa apa yang mereka kehendaki tidak dapat dilakukan tergesa-gesa. Para pemuda menolak pendapat Presiden, yang dianggapnya berbahaya dan merugikan bangsa Indonesia di mata dunia. Adam Malik kemudian membacakan dekrit mengenai lahirnya Tentara Republik Indonesia yang berasal dari bekas Peta, *Hoihō*.[24] Bung Karno dan Hatta menyetujui usul pemuda tersebut, tetapi belum dapat memutuskan pada saat itu. Rapat kemudian bubar.

Pada malam tanggal 19 Agustus 1945 itu di Jalan Gambir Selatan (sekarang Merdeka Selatan) No. 10, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono, Suwirjo, Oto Iskandar Dinata, Sukardjo Wirjopranoto, dr. Buntaran, Mr. A.G. Pringgodigdo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan

---

[23] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *op. cit.*, 1945

[24] Menurut Adam Malik, Soekarno-Hatta, telah setuju dengan pembentukan tentara itu, tetapi minta waktu untuk mempertimbangkan. Bung Hatta mempunyai kesan dari sikap para pemuda bahwa mereka ingin badan mereka diakui sebagai parlemen; lihat pula dalam karya Mohammad Hatta, *op. cit.*, 1969, hlm. 63

dr. Tajuluddin, berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Disepakati bahwa anggota KNIP berjumlah 60 orang.[25] Rapat pertama KNIP direncanakan tanggal 29 Agustus 1945 malam, bertempat di Gedung Komidi, Jalan Pos (sekarang Gedung Kesenian) Pasar Baru, Jakarta. Rapat PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam rapat ini diputuskan tiga persoalan pokok yang sudah dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya, yakni pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat.

Komite Nasional Indonesia akan dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah. Tujuan Komite, seperti dijelaskan Presiden Soekarno, antara lain mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar tercapai solidaritas dan kesatuan nasional yang erat dan utuh, membantu menenteramkan rakyat dan melindungi keamanan serta membantu para pemimpin untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Di tingkat pusat, pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI), yang kemudian dikenal dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945. Anggotanya berjumlah 137 orang, dan Mr. Kasman Singodimedjo diangkat sebagai ketua dibantu oleh tiga wakil ketua, yakni Sutardjo Kartohadikusumo (Wakil Ketua I), Mr. Johannes Latuharhary (Wakil Ketua II), dan Adam Malik (Wakil Ketua III). Dengan terbentuknya KNIP, tugas PPKI pun berakhir. Pembentukan KNIP dengan cepat diikuti oleh pembentukan KNI Daerah (KNID). Sejak awal September 1945 sudah terbentuk di berbagai daerah dari tingkat keresidenan sampai tingkat desa.[26]

Dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD '45 disebutkan bahwa Komite Nasional adalah sebuah badan yang bertugas membantu presiden menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga tersebut terbentuk. Berarti, KNIP hanya merupakan lembaga pembantu eksekutif. Pada tanggal 7 Oktober 1945 kelompok pemuda dalam KNIP mengajukan petisi yang ditandatangani oleh lima puluh orang kepada Presiden Soekarno agar KNIP diberi wewenang legislatif. Berdasarkan petisi itu, pada tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden Hatta mengeluarkan Maklumat No. X (baca: eks, bukan sepuluh) yang menyatakan bahwa sebelum MPR dan DPR terbentuk, KNIP diberi kekuasaan legislatif dan ikut serta menentukan garis-garis besar haluan negara. Dinyatakan pula bahwa tugas sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP (BP KNIP).

---

[25] Prof. Mr. Hadji Muhammad Yamin, *op. cit.*, 1962, hlm. 461–462

[26] Nugroho Notosusanto (ed.), *Pertempuran Surabaya*, 1995, hlm. 166–167

Sehari kemudian, juga atas desakan golongan pemuda dalam KNIP, dilangsungkan pemilihan pimpinan baru. Sutan Sjahrir diangkat menjadi ketua dan Amir Sjarifuddin menjadi wakil ketua yang sekaligus juga menjadi Ketua dan Wakil Ketua BP KNIP. Setelah Sjahrir menjadi Perdana Menteri, kedudukannya digantikan oleh Mr. Assaat yang memegang jabatan tersebut sampai akhir tahun 1949.

Selama keberadaannya, KNIP mengadakan lima kali sidang pleno. Sidang yang "terpanas" adalah sidang tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 1947 di Malang, berkaitan dengan penambahan jumlah anggota dalam rangka meratifikasi Persetujuan Linggajati. Sidang pleno KNI yang terakhir berlangsung dari tanggal 6 sampai 15 Desember 1949 dalam rangka meratifikasi hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Sebagai badan pembuat dan pengesah undang-undang, KNIP menghasilkan 113 undang-undang dan 32 peraturan.

Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk pada akhir tahun 1949 dan RI menjadi negara bagian dalam RIS, KNIP berfungsi sebagai parlemen RI. Dalam DPR RIS, 42 orang di antara 150 anggotanya berasal dari anggota KNIP. Ada pula yang diserahi tugas pemerintahan, antara lain Mr. Assaat sebagai Pejabat Presiden RI dan dr. A. Halim sebagai Perdana Menteri RI.

Berbeda dengan KNI yang bertahan sampai masa akhir Perang Kemerdekaan, PNI sebagai partai negara hanya bertahan dalam bilangan hari. PNI dimaksudkan sebagai wadah untuk memperkuat persatuan bangsa, memperbesar rasa cinta, setia, dan bakti kepada tanah air. Pemimpin partai terdiri atas pengurus besar, pengurus daerah, dan pengurus cabang. Setiap orang Indonesia yang sudah berumur 18 tahun ke atas berhak menjadi anggota. Presiden Soekarno mengatakan bahwa PNI akan menjadi motor perjuangan rakyat dalam segala urusan dan lapangan. Berbeda dengan KNI yang merupakan sebuah komite yang diadakan untuk sementara, PNI dimaksudkan akan hidup terus pada massa yang akan datang.

Pengurus harian PNI diumumkan pada tanggal 27 Agustus 1945. Mereka adalah Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Mr. Sudjono, Wikana, dan Mr. A.A. Maramis. Dua hari kemudian, diumumkan pengurus yang lebih lengkap terdiri atas Ir. Soekarno (Pemimpin Besar Pertama), Drs. Mohammad Hatta (Pemimpin Besar Kedua), Mr. Gatot Tarunamihardja (Pemimpin Umum atau disebut juga Ketua Partai), Abikusno Tjokrosujoso (Ketua Umum Seksi Politik), dan dr. Muwardi (Ketua Seksi Organisasi).

Pembentukan PNI sebagai partai negara ini mengundang reaksi penolakan dari berbagai pihak. Partai ini dianggap sangat "berbau" *Jawa*

Hokokai sebab sebagian besar anggotanya adalah orang yang dahulu duduk dalam organisasi buatan Jepang itu. Partai ini juga tidak mewakili segenap golongan dalam masyarakat. Golongan Islam, misalnya, sangat sedikit diwakili, dan tidak seorang pun tokoh utama gerakan bawah tanah pada masa Pendudukan Jepang yang diikutsertakan. Lagi pula, PNI dianggap akan menggusur peran KNI. Dari 34 anggota pengurus PNI, hanya 4 orang yang bukan anggota KNI.

Sjahrir dan kelompoknya menganggap pembentukan partai tunggal bertentangan dengan paham demokrasi. Ia mengidentikkan PNI dengan partai Nazi di Jerman dan partai Fasis di Italia sebelum Perang Dunia II. Karena sebagian besar anggotanya adalah bekas anggota *Jawa Hokokai*, diperkirakan pihak luar, terutama negara-negara Sekutu, akan menganggap partai ini buatan Jepang. Hal itu akan mempersulit usaha pemerintah untuk memperoleh pengakuan dari luar negeri.[27]

Akibat banyaknya reaksi menolak, pada tanggal 3 Agustus pembentukan PNI dibatalkan, atau seperti dikatakan Presiden Soekarno, "untuk sementara waktu ditunda", sebab segala *aktiviteit* harus dicurahkan ke dalam Komite Nasional Indonesia yang kedudukannya sangat penting untuk memusatkan segala tindakan dan susunan rakyat. Akan tetapi, di beberapa daerah cabang-cabang partai ini sudah terbentuk atau dalam proses pembentukan, seperti di Palembang di bawah pimpinan dr. A.K. Gani dan di Makassar di bawah pimpinan Manai Sophiaan.

Keputusan PPKI tanggal 22 Agustus tentang pembentukan BKR merupakan perubahan dari keputusan untuk membentuk tentara kebangsaan yang diambil dalam sidang tanggal 19 Agustus. Hal-hal yang berhubungan dengan BKR akan diuraikan di bagian lain.

B. Perjuangan Awal

1. Dukungan terhadap Proklamasi

Proklamasi Kemerdekaan tidak diketahui di semua daerah pada waktu yang bersamaan. Hal itu disebabkan oleh sulitnya komunikasi dan adanya penyegelan radio yang dilakukan Jepang pada waktu sebelumnya. Akan tetapi, begitu diketahui, tokoh-tokoh di daerah segera menyatakan dukungannya. Raja Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono IX, misalnya, tanggal 18 Agustus sudah mengirimkan telegram ucapan selamat atas

---

[27] Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, 1974, hlm. 145

diproklamasikannya kemerdekaan kepada Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat.[28]

Dukungan daerah pada umumnya diwujudkan dengan pembentukan pemerintahan dan KNI setempat. Untuk menyebut beberapa contoh, pemerintahan RI di Semarang terbentuk pada tanggal 19 Agustus 1945, di Surabaya pada tanggal 3 September 1945. Di Bogor, walaupun dekat dengan Jakarta, pemerintahan baru terbentuk pada awal Oktober 1945. Keterlambatan pembentukan pemerintahan di beberapa daerah disebabkan pula oleh sikap Jepang yang berusaha menghalang-halangi atau oleh sikap ragu-ragu tokoh-tokoh setempat. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa pada bulan Oktober 1945 pemerintahan RI di daerah-daerah sudah berhasil didirikan.

Dukungan juga dinyatakan oleh para pegawai Indonesia yang tadinya bekerja di jawatan-jawatan Pemerintahan Pendudukan Jepang. Pada tanggal 30 Agustus 1945 para pegawai ini disertai anggota polisi mengadakan konferensi di Jakarta. Dalam konferensi yang diprakarsai oleh Sutardjo Kartohadikusumo ini, mereka menyatakan diri sebagai pegawai dan polisi Indonesia. Sejak itu mulailah mereka mengambil alih kantor-kantor pemerintahan dari tangan Jepang.

Masyarakat umum menyatakan dukungannya dalam bentuk rapat-rapat raksasa. Penduduk Surabaya, misalnya, pada tanggal 11 September mengadakan rapat raksasa di Tambaksari, disusul kemudian di Pasar Turi pada tanggal 17 September 1945. Dalam kedua rapat raksasa itu tokoh-tokoh pemuda berseru agar kekuasaan segera diambil alih dari tangan Jepang. Di Medan, rapat raksasa diadakan tanggal 6 Oktober bersamaan dengan diumumkannya secara resmi Proklamasi Kemerdekaan.

Rapat raksasa yang berskala dan bersifat nasional karena dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI serta sejumlah menteri, berlangsung pada tanggal 19 September 1945 di Lapangan Ikada, Jakarta. Rapat ini direncanakan oleh Komite van Aksi. Tujuannya ialah agar para pemimpin pemerintahan berbicara langsung dengan rakyat.[29]

Rencana penyelenggaraan rapat raksasa itu dilakukan dengan dua cara, yaitu persiapan pengerahan massa dan menyampaikan rencana itu kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada prinsipnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta setuju, demikian pula para menteri. Persoalannya ialah bagaimana sikap penguasa Jepang setelah mereka menyerah dan menjadi

---

[28] Atmakusumah (ed.), *Takhta untuk Rakyat*, 1982, hlm. 65

[29] Ben Anderson, *Revolusi Pemuda*, 1988, hlm. 135–136

alat Sekutu. Bila Jepang bersikap bermusuhan dan menghalang-halangi, pasti akan terjadi malapetaka yang hebat yang akan menimpa massa rakyat.[30]

Masalah yang sulit ini kemudian dibicarakan dalam sidang kabinet bertempat di kediaman Presiden. Sidang berlangsung sampai dini hari tanggal 19 September 1945, tetapi tidak menghasilkan keputusan yang bulat, lalu ditangguhkan sampai pukul 10 pagi. Sidang dimulai lagi pada pukul 10 di Lapangan Banteng Barat yang dihadiri juga oleh para pemimpin pemuda. Para pemimpin pemuda menyatakan agar rapat tidak dibatalkan. Sementara itu, massa sudah berbondong-bondong membanjiri Lapangan lkada siap mendengarkan pidato dari pemimpin-pemimpinnya. Situasi menjadi sangat tegang karena Lapangan Ikada telah dijaga secara ketat oleh pasukan bersenjata Jepang, yang juga mengerahkan tank-tanknya. Sewaktu-waktu dapat terjadi bentrokan berdarah. Akhirnya, sidang memutuskan agar para pemimpin datang untuk berhadapan muka dengan massa guna meminta kesediaan mereka untuk mematuhi perintah-perintahnya. Selanjutnya menyerukan kepada mereka supaya bubar dan pulang ke rumah masing-masing.[31]

Kemudian Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri menuju ke Lapangan Ikada. Pada waktu itu Lapangan Ikada telah melimpah ruah dengan massa yang membawa pelbagai macam senjata tajam. Tampak pula pasukan-pasukan Jepang dengan bayonet terhunus di samping tank-tanknya. Mobil Presiden dan Wakil Presiden sebelum memasuki lapangan ditahan sebentar oleh komandan jaga. Mereka saling mengadakan pembicaraan, kemudian diperbolehkan meneruskan perjalanan. Presiden Soekarno langsung menuju panggung, berpidato singkat. Ia meminta kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan jalan mematuhi perintah-perintahnya dan tunduk kepada disiplin. Kemudian, massa diperintahkan bubar dengan tenang.[32] Ternyata perintah itu ditaati. Rapat raksasa 19 September 1945 itu adalah manifestasi pertama dari kewibawaan pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya. Sekalipun rapat raksasa di Lapangan Ikada ini berlangsung hanya beberapa menit, berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia yang baru berusia sebulan itu dengan rakyat dan memberikan kepada rakyat kepercayaan kepada potensinya sendiri.

---

30 Adam Malik, *op. cit.*, hlm. 76–77

31 Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, *op. cit.*, hlm. 369–373

32 Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, hlm. 374; lihat pula Adam Malik, *op. cit.*, hlm. 77

(a)

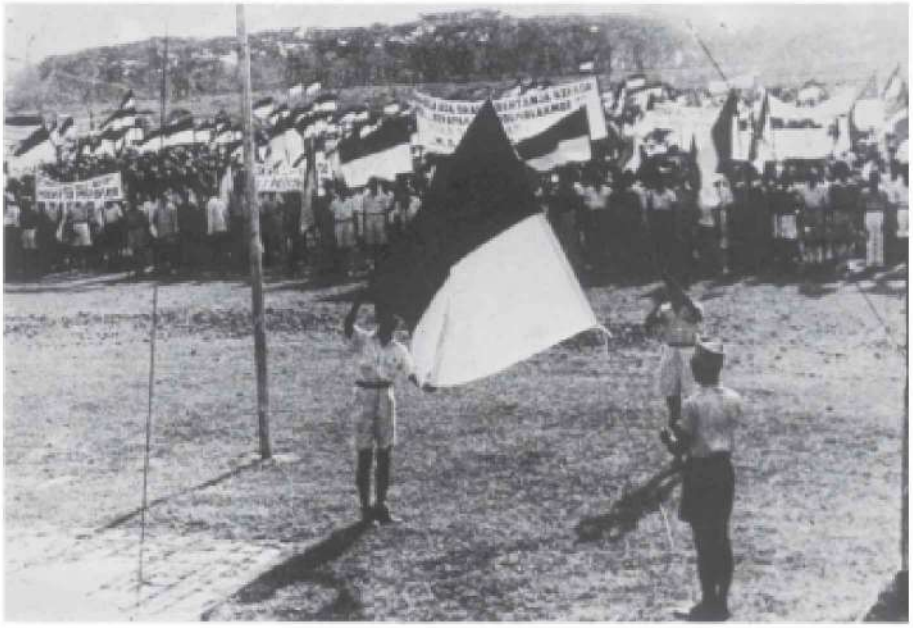

(b)

Gambar 2.5 (a) Presiden Soekarno memasuki arena Rapat Raksasa di Lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945; **(b)** Pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Ikada (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

Gambar 2.6 "Satu Tanah Air, Satu Bangsa dan Satu Tekad Tetap Merdeka", demikian spanduk yang mereka bawa (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

Gambar 2.7 Presiden Soekarno tidak jadi berpidato dan hanya menyampaikan beberapa pesan singkat, antara lain meminta rakyat percaya pada pimpinan dan pulang dengan tenang (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

Gambar 2.8 Semangat Merdeka tertulis pada dinding-dinding bangunan di Jakarta tahun 1945 (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

2. Perebutan Kekuasaan dan Senjata

Di beberapa daerah di Indonesia terjadi perebutan kekuasaan, baik dengan cara kekerasan maupun dengan jalan perundingan. Di beberapa keresidenan di Jawa, pada bulan September 1945 pemimpin masing-masing menyambut Proklamasi Kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai pemerintah Republik Indonesia dan mengancam bahwa terhadap segala tindakan yang menentang pemerintah RI akan diambil tindakan keras.[33] Pegawai-pegawai Jepang dirumahkan, dilarang memasuki kantor-kantor mereka. Pada tahap selanjutnya para pemuda berusaha merebut senjata dan gedung-gedung vital. Di Surabaya selama bulan September terjadi perebutan senjata di arsenal (gudang mesiu) Don Bosco, perebutan Markas Pertahanan Jawa Timur, pangkalan Angkatan Laut Ujung, dan markas-markas tentara Jepang serta pabrik-pabrik yang tersebar di seluruh kota.

Pada tanggal 19 September 1945, ketika perebutan senjata Jepang masih berlangsung, terjadi insiden bendera di Hotel Yamato. Insiden ini pecah ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki hotel tersebut dibantu oleh serombongan pasukan Inggris yang diterjunkan di Gunungsari, untuk mendirikan Markas RAPWI. Orang-orang Belanda tersebut mengibarkan bendera mereka di puncak hotel. Hal ini memancing kemarahan para pemuda. Hotel tersebut diserbu oleh para pemuda, setelah permintaan Residen Sudirman dengan cara baik-baik untuk menurunkan bendera Belanda ditolak oleh penghuni hotel. Bentrokan tidak dapat dihindarkan. Beberapa orang pemuda berhasil memanjat atap hotel serta menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Mereka merobek warna birunya dan mengibarkannya kembali sebagai Merah Putih.[34]

Sasaran perebutan selanjutnya adalah Markas *Kempeitai* yang dianggap sebagai lambang kekejaman pemerintah Jepang. Pada tanggal 1 Oktober 1945, markas itu diserbu oleh rakyat. Gedung dipertahankan dengan gigih oleh pihak Jepang, tetapi jatuh ke tangan rakyat setelah pertempuran selama 5 jam. Dalam pertempuran ini 25 orang pemuda gugur dan 60 luka-luka, sedangkan 15 orang prajurit Jepang mati.[35]

---

[33] Semua surat kabar yang ada di Jawa dan Sumatra memuat berita tersebut, mengenai daerah masing-masing

[34] Tim Sejarah Dewan Harian Daerah Angkatan '45 Jawa Timur, "Peristiwa Perobekan Bendera Tiga Warna" dalam *Menyongsong Pembangunan Museum Perjuangan '45 Jawa Timur*, hlm. 63–73

[35] *Soeara Rakjat*, 3 Oktober 1945

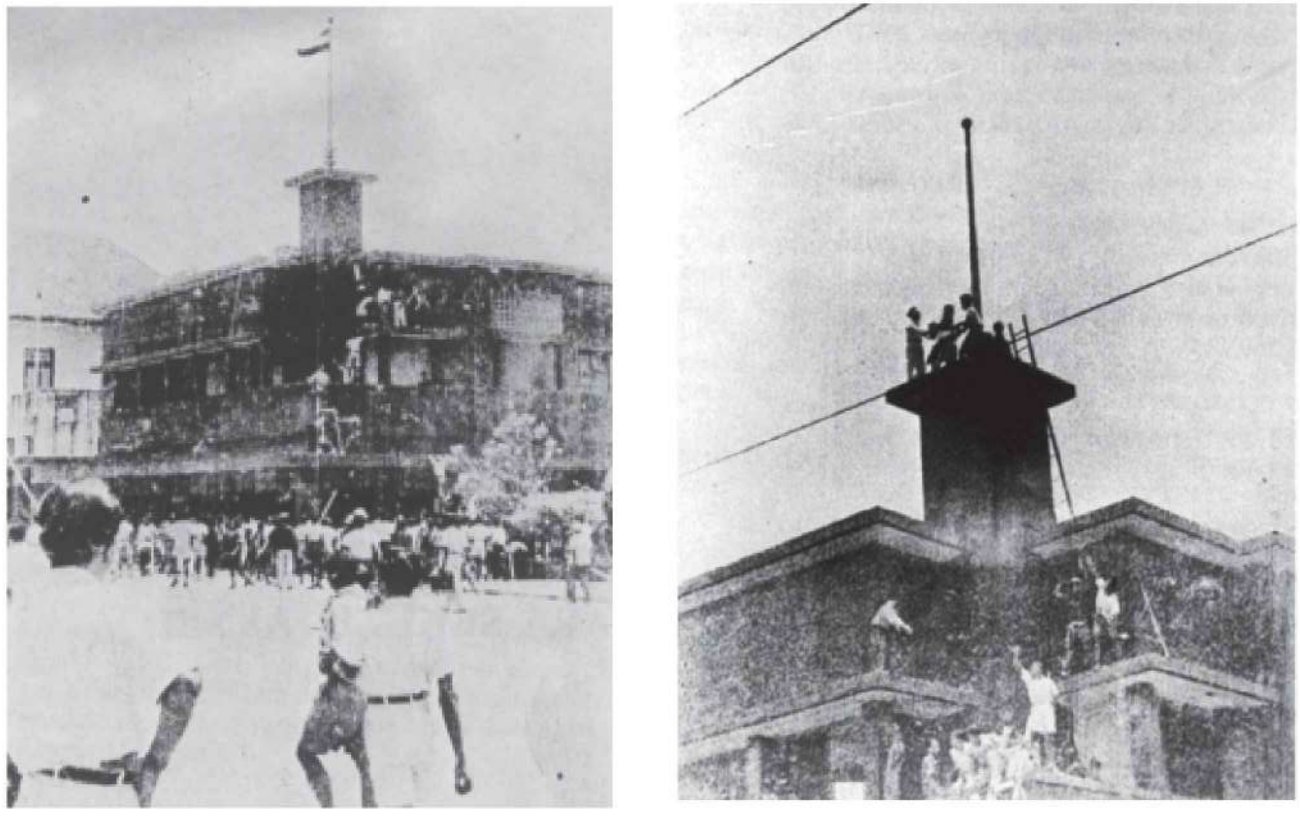

Gambar 2.9 Insiden Bendera di Hotel Yamato Surabaya, 19 September 1945 ((Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor kepada orang Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, KNI Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintah RI. Pada hari itu juga di Yogyakarta terbit surat kabar *Kedaulatan Rakjat*.[36]

Para pemuda yang tergabung dalam BKR berusaha memperoleh senjata. Usaha untuk melucuti Jepang melalui perundingan sama sekali gagal. Pada tanggal 7 Oktober malam para pemuda BKR bersama dengan pemuda Polisi Istimewa bergabung menuju Kota Baru. Mereka menyerbu tangsi *Otsuka Butai* (sekarang gedung SMA di sebelah Sentral Telepon). Pada hari itu juga *Otsuka Butai* menyerah. Korban yang gugur dalam penyerbuan ini 18 orang yang terdiri atas pemuda dan polisi.[37]

Di Bandung, pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut Pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas *Artillerie Constructie Winkel* (ACW, sekarang Pindad), dan terus berlangsung sampai kedatangan pasukan Inggris di kota Bandung pada 17 Oktober 1945.

Di Semarang, perebutan senjata menimbulkan korban yang cukup banyak di kedua belah pihak. Di kota ini terdapat pasukan Jepang di bawah pimpinan Mayor Kido dan karena itu disebut pasukan *Kido Butai*. Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro meminta agar Mayor Kido menyerahkan senjata pasukannya kepada pemerintah RI dengan jaminan tidak akan digunakan untuk melawan Jepang. Mayor Kido hanya menyerahkan sebagian kecil dan itu pun senjata usang. Hal itu menimbulkan rasa tidak puas di kalangan pemuda yang tergabung dalam BKR dan laskar-laskar. Mereka pun mengadakan aksi merampas senjata dan kendaran-kendaraan Jepang secara paksa.

Pada tanggal 14 Oktober 1945, dalam situasi yang sudah panas itu, 400 tawanan Jepang dengan dikawal oleh polisi Indonesia diangkut dari pabrik gula Cepiring ke Semarang untuk dimasukkan ke penjara Bulu. Dalam perjalanan, sebagian tawanan itu berhasil melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di Jatingaleh. Sekitar pukul 03.00 tanggal 15 Oktober pasukan Kido Butai bergerak ke dalam kota. Pertempuran pun berkobar, antara lain di Simpang Lima dan di Hotel Du

---

[36] Kementerian Penerangan, *Daerah Istimewa Jogyakarta*, Djakarta, 1954, hlm. 39

[37] *Ibid.*, hlm. 343; R.P. Soedarsono, "Revolusi Jogyakarta dan Sekitarnya" (Penelitian Sedjarah), no. 3, th. 1, hlm. 30–32

Pavillon. Pasukan Jepang membunuh siapa saja yang mereka temui, bahkan para pemuda yang menyerah. Para pemuda pun melakukan pembalasan dengan membunuh orang-orang Jepang yang ditawan di penjara Bulu.

Pertempuran berlangsung sampai tanggal 19 Oktober dan karena itu dikenal dengan nama Pertempuran Lima Hari di Semarang. Dalam pertempuran ini ditaksir jatuh korban sebanyak 990 orang di kedua pihak.[38] Pertempuran berhenti setelah pasukan Sekutu yang mendarat di Semarang tanggal 19 Oktober langsung melucuti pasukan Jepang.

Pertempuran atau lebih tepat pembantaian yang dilakukan Jepang terhadap rakyat, terjadi di Tebing Tinggi, Sumatra Utara selama empat hari mulai tanggal 13 Desember 1945. Dua hari sebelumnya, 11 Desember, para pemuda Tebing Tinggi menahan kereta api yang mengangkut orang-orang sipil Jepang ke tempat penampungan mereka di Kisaran. Mereka dikawal oleh tentara di bawah pimpinan Kapten Namura. Para pemuda meminta agar Jepang menyerahkan senjatanya. Karena ditolak, empat orang Jepang disandera oleh para pemuda. Tiga orang di antaranya, termasuk Kapten Namura, mereka bunuh. Akibatnya, pada tanggal 13 Desember Jepang menyerang kota Tebing Tinggi dengan mengerahkan panser-panser. Selama empat hari mereka melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap rakyat. Pihak Jepang mengatakan bahwa penduduk yang tewas berjumlah antara 500 sampai 800, sedangkan menurut pihak Indonesia antara 2.000 sampai 5.000 orang.[39]

Di Lengkong, Tangerang (Banten), sampai pertengahan Januari 1946 masih terdapat pasukan Jepang di bawah pimpinan Kapten Abe. Pemimpin Resimen IV TKR menghubungi Kapten Abe untuk meminta senjata, tetapi ditolak dengan alasan senjata harus diserahkan kepada Sekutu. Komandan Resimen IV Letnan Kolonel Singgih akhirnya memutuskan untuk merebut senjata secara paksa. Ia mengerahkan para taruna Akademi Militer Tangerang di bawah pimpinan Mayor Daan Mogot untuk melakukan hal itu. Para taruna ini menyamar sebagai tentara Sekutu, bahkan delapan orang tentara India muslim yang sudah menyeberang ke pihak RI diikutsertakan.

Pada mulanya rencana berjalan lancar. Sejumlah senjata dapat diperoleh. Namun, kemudian penyamaran mereka diketahui oleh Kapten Abe. Ia segera memerintakan pasukannya melancarkan serangan. Jepang berhasil merebut kembali senjata yang sudah mereka serahkan, dan oleh para taruna ditumpuk di halaman markas sehingga tidak sempat mereka

---

[38] Panitia Penilaian Sejarah Pertempuran Lima Hari di Semarang, *Pertempuran Lima Hari di Semarang*, 1978, hlm. 33

[39] Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Runtuhnya Kerajaan di Sumatra*, 1987, hlm. 288

gunakan. Dalam pertempuran yang tidak seimbang ini Mayor Daan Mogot dan 37 taruna gugur, sedangkan 35 orang tertawan.[40]

Tidak semua usaha merebut senjata Jepang berakhir dengan pertempuran. Adakalanya senjata diperoleh melalui perundingan, atau melalui "perang purang-pura". Di Banyumas, misalnya, Komandan Divisi V TKR Kolonel Soedirman dan Residen Iskaq Tjokroadisurjo berhasil memperoleh senjata yang cukup banyak melalui perundingan dengan komandan Jepang.

Di Indonesia bagian timur (Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain), pasukan Australia yang mewakili Sekutu lebih cepat tiba dibandingkan dengan pasukan Inggris di Jawa dan Sumatra. Di Makassar, misalnya, mereka sudah tiba menjelang akhir September 1945. Sesudah melucuti Jepang, mereka menyerahkan pemerintahan sipil kepada aparat *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA)/Belanda. Oleh karena itu, pada umumnya pihak Indonesia di daerah bagian timur ini langsung berhadapan dengan Belanda, walaupun perebutan senjata dengan Jepang juga terjadi di beberapa tempat.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, rombongan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi, mendarat di Sapiria, Bulukumba. Setibanya kembali di Makassar, Gubernur mulai menyusun pemerintahan. Akan tetapi, dalam segala tindakan, Gubernur oleh para pemuda dianggap terlalu hati-hati. Para pemuda mulai mengorganisasi diri dan merencanakan untuk merebut gedung-gedung vital, seperti studio radio dan tangsi polisi yang sudah dikuasai oleh Belanda di bawah perlindungan pasukan Australia. Kelompok pemuda tersebut terdiri dari kelompok Barisan Berani Mati (*Bo-ei Tai-shin*), bekas *kaigun heiho* dan pelajar SMP. Pada tanggal 28 Oktober mereka bergerak menuju sasaran dan menduduki nya. Karena peristiwa itu, pasukan Australia bergerak dan melucuti para pemuda. Sejak itu, pusat gerakan pemuda dipindahkan dari Makassar ke Polombangkeng.[41]

Di Sulawesi Utara, sekalipun telah hampir setengah tahun dikuasai NICA, usaha menegakkan kedaulatan tidaklah padam. Pada tanggal 14 Februari 1946, pemuda-pemuda Indonesia anggota KNIL, yang tergabung pada Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Teling, Manado. Mereka membebaskan tokoh-tokoh pro-RI yang ditahan NICA di penjara tersebut, antara lain, Taulu, Wuisan, Sumanti, G.A. Maengkom, Kusno Dhanupojo, dan G.E. Duhan. Sebaliknya, mereka menahan Komandan Garnisun Manado dan semua pasukan

---

[40] Pusat Sejarah TNI, *op. cit.*, 2000, hlm. 106–108

[41] Radik Djawardi, *Naskah Sedjarah Corps Hasanuddin*, 1972, hlm. 6–9

Belanda di Teling dan penjara Manado. Dengan diawali oleh peristiwa itu, para pemuda menguasai markas Belanda di Tomohon dan Tondano. Berita mengenai perebutan kekuasaan mereka kirim ke pemerintah pusat di Yogyakarta dan mengeluarkan Maklumat No. 1, yang ditandatangani oleh Ch. Taulu. Pemerintah sipil dibentuk pada 16 Februari dan sebagai residen dipilih B.W. Lapian. Satuan lokal Tentara Indonesia disusun dengan pimpinan kolektif, Ch. Taulu, Wuisan, dan J. Kaseger.[42]

Di beberapa kota di Kalimantan timbul pula gerakan yang mendukung Proklamasi. Akan tetapi, tentara Australia yang sudah mendarat mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik, seperti demonstrasi dan mengibarkan bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih, dan menyelenggarakan rapat-rapat. Namun, kaum nasionalis tetap melaksanakannya. Di Balikpapan, pada tanggal 14 November 1945 sejumlah 8.000 orang berkumpul di depan kompleks NICA sambil membawa bendera Merah Putih.[43]

Di Gorontalo, pada tanggal 13 September 1945 terjadi perebutan senjata terhadap markas-markas Jepang. Kedaulatan RI berhasil ditegakkan dan pemimpin-pemimpin Republik menolak setiap ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan Australia. Kekuatan mereka berjumlah 600 orang pemuda yang terlatih.[44]

Di Pulau Sumbawa, pemuda-pemuda Indonesia pada bulan Desember 1945 berusaha merebut senjata dari Jepang. Di Gempe terjadi bentrokan antara 200 pemuda dan Jepang. Di Sape 400 orang pemuda berusaha merebut senjata di markas Jepang, juga di Raba terjadi peristiwa yang sama.[45]

Di Bali, para pemuda membentuk beberapa organisasi pemuda seperti AMI dan Pemuda Republik Indonesia (PRI) pada akhir bulan Agustus. Mereka berusaha menegakkan kekuasaan RI melalui perundingan, tetapi mendapat hambatan dari pihak Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945 mereka melakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang, tetapi gagal.[46]

Di Biak, timbul pemberontakan 14 Maret 1948 yang sasarannya adalah Kamp NICA, tangsi Sorido. Pemberontakan itu gagal, dua orang pemimpinnya dihukum mati dan lainnya dihukum seumur hidup.

---

42 D. Wowor, *Sulawesi Utara Bergolak*, Jakarta, 1979, hlm. 45 dst.

43 Gavin Long, *The Final Campaigns*, Canberra, 1963, hlm. 572–573

44 *Ibid.*, hlm. 573

45 *Ibid.*, hlm. 572

46 Njoman S. Pendit, *Bali Berdjuang*, Denpasar, 1954, hlm. 41–44

Di Banda Aceh, pada tanggal 6 Oktober 1945 para pemuda dan tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API). Pada tanggal 12 Oktober 1945 *Shucokan* Jepang memanggil para pemimpin pemuda. Ia menyatakan, sekalipun Jepang telah kalah, keamanan dan ketertiban masih menjadi tanggung jawab pemerintah Jepang. Oleh karena itu, ia meminta agar semua kegiatan mendirikan perkumpulan yang tanpa izin dihentikan. Perkumpulan yang sudah telanjur didirikan supaya dibubarkan. Para pemimpin pemuda menolak dengan keras. Pertemuan berubah menjadi perbantahan. Sejak hari itu dimulailah perebutan dan pengambilalihan kantor-kantor pemerintah dan pengibaran bendera Merah Putih. Perlucutan senjata Jepang terjadi di beberapa tempat. Bentrokan-bentrokan dengan pasukan Jepang terjadi di Langsa, Lho' Nga, Ulee Lheue, dan tempat-tempat lain di Aceh.[47]

Di Sumatra Selatan, perebutan kekuasaan terjadi pada tanggal 8 Oktober 1945, ketika Residen Sumatra Selatan dr. A.K. Gani bersama seluruh pegawai *Gunseibu* dalam suatu upacara menggerek bendera Merah Putih. Setelah upacara itu, para pegawai negeri kembali ke kantornya masing-masing untuk di sana menggerek bendera Merah Putih. Pada hari itu juga diumumkan bahwa di seluruh Keresidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan, yakni kekuasaan Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang itu berlangsung tanpa insiden karena orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi.[48]

3. Menyusun Kekuatan Pertahanan Keamanan

Di bagian depan sudah disebutkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Keputusan itu merupakan perubahan dari keputusan yang diambil tiga hari sebelumnya tentang pembentukan tentara kebangsaan. BKR bertugas sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi Komite Nasional Indonesia (KNI) setempat.[49]

Pembentukan BKR diumumkan Presiden Soekarno tanggal 23 Agustus 1945. Presiden berseru agar para bekas tentara Peta, *Heiho*, dan pemuda-pemuda lain memasuki BKR sambil menunggu dibentuknya tentara kebangsaan. Di daerah-daerah yang dengan cepat mengetahui

---

[47] Sjamaun Gaharu, "Perebutan kekuasaan dari tangan Djepang", *Modal Revolusi '45*, 1960, hlm. 30–37; Hoesin Joesoef, "Detik Proklamasi Atjeh", *ibid.*, hlm. 43–45; Kementerian Penerangan, *Propinsi Sumatera Utara*, 1954, hlm. 31

[48] Kementerian Penerangan RI, *Propinsi Sumatera Selatan*, 1953, hlm. 42–43

[49] *Tjahaja*, 23 Agustus 1945

pengumuman itu, segera terbentuk BKR. Di Jakarta terbentuk BKR Pusat di bawah pimpinan Kasman Singodimedjo, bekas *Daidanchō* Peta Jakarta.[50] Setelah Kasman diangkat menjadi Ketua KNIP, kedudukannya digantikan oleh Kaprawi, bekas *Daidanchō* Peta Sukabumi. BKR Pusat ini dimaksudkan sebagai koordinator dan pengendali BKR-BKR daerah. Selain BKR Pusat, di Jakarta terbentuk pula BKR Jakarta di bawah pimpinan Mufraeni Mukmin.

Para pemuda bekas *Kaigun Heihō*, karyawan *Jawa Unko Kaisha* serta para siswa dan guru-guru Sekolah Tinggi Pelayaran membentuk BKR Laut di daerah-daerah pelabuhan. Di Jakarta terbentuk BKR Laut Pusat di bawah pimpinan M. Pardi, dibantu antara lain oleh R.E. Martadinata. BKR Laut Pusat ini mengeluarkan instruksi-instruksi dan mengirim utusan ke daerah-daerah pelabuhan sehingga di tempat-tempat tersebut terbentuk pula BKR Laut. Di Jawa, misalnya, terbentuk BKR Laut di Banten, Tegal, Semarang, dan Pasuruan; sedangkan di Sumatra terbentuk di Palembang, Tanjung Karang, Sibolga, Belawan (Medan), dan Pariaman.

Sementara itu, para pemuda di sekitar pangkalan udara membentuk BKR Udara, antara lain, di Bugis (Malang), Maospati (Madiun), Kali Banteng (Semarang), Cibereuem (Tasikmalaya), dan Cililitan (Jakarta), serta beberapa tempat di Sumatra.

Pada bulan September 1945 tokoh-tokoh BKR Pusat menghubungi para bekas perwira KNIL yang ada di Jakarta. Mereka bersama-sama menghadap Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin dengan maksud mendesak Presiden Soekarno agar segera dibentuk tentara reguler. Amir Sjarifuddin meminta jaminan dari para bekas perwira KNIL bahwa mereka akan berdiri di belakang perjuangan bangsa dengan segala konsekuensinya.[51]

Untuk memperoleh jaminan itu, bekas perwira KNIL Didi Kartasasmita di tugasi Amir menghubungi rekan-rekannya di kota-kota lain. Di Yogya, Didi mendapat jaminan dari bekas Mayor KNIL Oerip Sumarhardjo yang oleh bekas perwira KNIL dan perwira lainnya dianggap sebagai sesepuh dan sangat dihormati. Di Bandung, Didi menemui perwira yang lebih yunior, yakni lulusan *Corps Opleiding Reserve Officieren*, antara lain A.H. Nasution. Mereka pun memberikan jaminan.[52] Akhirnya, para bekas KNIL ini mengeluarkan pernyataan bersama bahwa mereka tidak terikat lagi dengan sumpah sebagai KNIL dan siap membantu perjuangan.

---

[50] Dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Kasman bersama dengan Abdulkadir dan Oto Iskandar Dinata ditunjuk sebagai anggota panitia yang diserahi tugas membentuk tentara kebangsaan dan polisi: Muhammad Yamin, *op. cit.*, hlm. 464

[51] Wawancara dengan Prof. Dr. Arifin Abdurrachman, Latief Hendraningrat, Mahmud, Samidjo Mangoenwirono, Didi Kartasasmita, M.R.A. Soewardi, Yogyakarta, 18 Des. 1976

[52] Ali Sastroamidjojo, *op. cit.*, 1974, hlm. 182

Sebagian para pemuda tidak puas dengan pembentukan BKR. Para pemuda di Jakarta yang pada zaman Jepang telah membentuk kelompok-kelompok politik yang besar perannya dalam mencetuskan Proklamasi, menginginkan dibentuknya tentara nasional. Setelah usul mereka mengenai pembentukan tentara nasional "ditolak" oleh Presiden dan Wakil Presiden, mereka menempuh jalan lain.[53] Mereka membentuk badan-badan perjuangan yang kemudian menyatukan diri dalam sebuah Komite van Aksi, yang bermarkas di Jalan Menteng 31 di bawah pimpinan Adam Malik, Sukarni, Chairul Saleh, Maruto Nitimihardjo, dan lain-lain. Badan-badan perjuangan yang bernaung di bawah Komite van Aksi adalah Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (Bara), dan Barisan Buruh Indonesia (BBI).[54] Badan-badan perjuangan lainnya kemudian dibentuk di seluruh Jawa seperti Barisan Banteng, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Hizbullah, Sabilillah, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), dan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI). Di samping itu, terdapat pula badan perjuangan yang bersifat khusus seperti kesatuan-kesatuan pelajar (Tentara Pelajar atau TP, Tentara Genie Pelajar atau TGP, dan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP).

Pembentukan badan-badan perjuangan juga terjadi di Sumatra, Sulawesi, dan pulau lainnya. Di Aceh dibentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) di bawah pimpinan Sjamaun Gaharu dan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) yang kemudian menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) di bawah pimpinan A. Hasymi.[55] Di Medan terbentuk Barisan Pemuda Indonesia (BPI) di bawah pimpinan Ahmad Taher, sedangkan di Padang terbentuk Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) di bawah pimpinan Ismail Lengah. Sementara itu, Barisan Pelopor yang dibentuk pada zaman Jepang, pada bulan September menyatakan diri bernaung di bawah KNI.[56] Di Sulawesi Selatan dibentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI) di bawah pimpinan Manai Sophiaan serta kelompok Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI), Pemuda Merah Putih, dan Penunjang Republik Indonesia (PRI).[57]

Setelah mengalami sendiri tindakan-tindakan provokatif dan bahkan agresif dari pasukan-pasukan Belanda yang oleh tentara Sekutu dikeluarkan dari tawanan Jepang serta kemudian dipersenjatai, pemerintah RI menyadari

---

53 Adam Malik, *Riwajat dan Perdjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945*, 1962, hlm. 66–67; Adam Malik, *Mengabdi Republik*, I, 1978, hlm. 27

54 *Ibid.*, hlm. 71–72

55 *Semangat Merdeka*, 27 Oktober 1945

56 *Tjahaja*, 10 September 1945

57 *Soeara Moeda*, 21 November 1945; mereka mengadakan Kongres di Yogyakarta pada tanggal 10–11 November 1945

bahwa sebuah tentara reguler bukanlah merupakan suatu luks. Karenanya, pemerintah kemudian memanggil pensiunan Mayor KNIL Oerip Sumohardjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan kepadanya diserahi tugas menyusun tentara nasional. Pada tanggal 5 Oktober dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya tentara nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sebagai pimpinan TKR ditunjuk Soeprijadi, tokoh pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air (Peta) terhadap Jepang di Blitar, dan sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim diangkat Moh. Suljodikusumo, bekas *daidanco* Peta. Dengan dasar Maklumat Pemerintah tersebut segera dibentuk Markas Tertinggi TKR oleh Oerip Sumohardjo yang berkedudukan di Yogyakarta. Di Pulau Jawa terbentuk 10 divisi dan di Sumatra 6 divisi.

Berkembangnya kekuatan pertahanan dan keamanan yang begitu cepat, memerlukan satu pemimpin yang kuat dan berwibawa untuk mengatasi segala persoalan akibat dari pengembangan tersebut. Suprijadi, yang telah ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi TKR ternyata tidak pernah menduduki posnya. Diperkirakan ia sudah dibunuh Jepang setelah pemberontakan yang dipimpinnya di Blitar, gagal. Pada bulan November 1945, atas prakarsa Markas Tertinggi TKR, diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru. Yang terpilih adalah Kolonel Soedirman, Komandan Divisi V/Banyumas. Sebulan kemudian, pada tanggal 18 Desember 1945, Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar (Pangsar) TKR dengan pangkat jenderal. Oerip Sumohardjo tetap menduduki jabatan lamanya, Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat letnan jenderal.

Terpilihnya Soedirman merupakan titik tolak perkembangan organisasi kekuatan pertahanan keamanan. TKR berubah menjadi TRI pada bulan Januari 1946. Soedirman berpendapat bahwa TRI adalah tentara nasional dan tentara rakyat yang percaya kepada kekuatan sendiri, tanpa mengharap bantuan dari luar negeri.[58] Sementara itu, kekuatan di luar TKR, yaitu Badan-badan Perjuangan, pada tanggal 10 November 1945 mengadakan Kongres Pemuda seluruh Indonesia di Yogyakarta. Kongres dipimpin oleh Chairul Saleh dan Sukarni, yang dihadiri oleh 332 utusan dari 30 organisasi pemuda seluruh Indonesia. Sekalipun di dalam kongres ini lahir dua kekuatan yang " bersaing", yaitu kelompok Chairul Saleh dan kelompok Soemarsono (Pesindo), tetapi berhasil membentuk Badan Kongres Pemuda Indonesia (BKMI).[59] Perkembangan selanjutnya badan-badan perjuangan ini ditampung di dalam wadah Biro Perjuangan dalam Kementerian Pertahanan. Baik anggota BKR maupun badan-badan perjuangan ini

[58] "Amanat Panglima Besar Soedirman, 7 Juni 1946", *Kumpulan Amanat Panglima Besar Djenderal Soedirman*, 1970, hlm. 16

[59] A. Dahlan Ranuwihardjo, S.H., *Pergerakan Pemuda Setelah Proklamasi*, 1979, hlm. 16–20

menganggap dirinya adalah pejuang. BKR yang kemudian menjadi TKR dan TRI, menganggap dirinya sebagai pejuang bersenjata yang juga aktif dalam bidang sosial politik, antara lain dalam KNI dan pemerintah, sedangkan badan-badan perjuangan menganggap diri mereka pejuang di bidang sosial politik, juga aktif di dalam pertahanan negara.[60] Kedua kelompok pejuang ini kemudian diintegrasikan menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada bulan Juni 1947, yaitu tentara yang bukan semata-mata alat negara atau pemerintah melainkan alat rakyat, alat "revolusi", dan alat bangsa Indonesia.[61] Pada pertengah tahun 1947, alat pertahanan dan keamanan berhasil dikonsolidasikan dan sekaligus diintegrasikan.

Alat pertahanan keamanan lainnya ialah Kepolisian Negara. Berbeda dengan Peta dan *Heihō*, kesatuan-kesetuan polisi tidak dibubarkan oleh Jepang. Senjata mereka pun tidak dilucuti. Kesatuan-kesatuan inilah yang ditransformasikan menjadi Kepolian Negara.

Pada tanggal 29 September 1945, R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).[62] Pada mulanya kepolisian ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara (DKN) dan hanya mengurus hal-hal yang bersifat administratif, sedangkan yang berhubungan dengan operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.[63] Barulah pada 1 Juli 1946 Kepolisian Negara dipisahkan dari Departemen Dalam Negeri dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri.

Mula-mula kepolisian berkedudukan di Jakarta. Namun, setelah Kementerian Dalam Negeri pindah ke Purwokerto, Kepolisian Negara pindah pula ke Purwokerto. Di Purwokerto inilah sesungguhnya dimulai usaha pembinaan Kepolisian. Di Jawa dibentuk tiga daerah Kepolisian, kemudian dijadikan dua, yakni Penilik Kepolisian Jawa Timur berkedudukan di Blitar dan Penilik Kepolisian di Jawa Tengah berkedudukan di Magelang. Di Sumatra dibentuk cabang Kepolisian. Di samping menata organisasi, dibentuk pula pasukan khusus, yakni Mobiele Brigade (Mobbrig) yang pada tahun 1950-an berganti nama menjadi Brigade Mobil (Brimob).

Pada waktu Belanda melancarkan Agresi Militer Pertama, Kepolisian Negara dimiliterisasi dan ditempatkan teknis di bawah komando militer setempat. Setelah Purwokerto diduduki Belanda, kedudukan pusat Kepolisian Negara dipindahkan ke Yogya.

---

60 Nugroho Notosusanto, *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces*, 1970, hlm. 6; *Kedaulatan Rakjat*, 1 November 1945

61 A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, II, 1968, hlm. 86

62 Pusat Sejarah TNI, *op. cit.*, 2000, hlm. 48–49

63 Awaloedin Djamin, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, 2007, hlm. 122

Gambar 2.10 Pelantikan Pucuk Pimpinan TNI di Yogyakarta, pada tanggal 28 Juni 1947. Tampak dalam gambar Jenderal Soedirman sedang dilantik sebagai Panglima Besar TNI (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

Gambar 2.11 Presiden Soekarno didampingi Panglima Besar Jenderal Soedirman melakukan inspeksi pasukan TNI tahun 1947 (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

C. Perang dan Diplomasi

1. Pertempuran Melawan Sekutu

Ketika Perang Pasifik masih berlangsung, Sekutu membagi Indonesia menjadi dua daerah operasi. Sumatra dimasukkan ke dalam daerah operasi *South East Asia Command* (SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Moubattan, sedangkan Jawa dan Indonesia bagian timur ke dalam daerah operasi *South West Pacific Commad* (SWPC) di bawah komando Jenderal Mac-Arthur. Daerah operasi itu berubah setelah Perang Dunia II di Eropa berakhir dengan menyerahnya Jerman bulan Mei 1945. Dalam Konferensi Gabungan Kepala Staf Sekutu di Potsdam bulan Juli, seluruh wilayah Indonesia dijadikan daerah operasi SEAC, sebab MacArthur ingin mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya untuk langsung menyerbu kepulauan Jepang. Serah terima resmi kedua komando utama Sekutu itu baru dilaksanakan tanggal 15 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah.

Daerah yang menjadi tanggung jawab SEAC meliputi pula Burma (Myanmar), Thailand, Indo-Cina, dan Semenanjung Tanah Melayu. Untuk Indonesia dibentuk komando khusus, yakni *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) di bawah komando Letnan Jenderal Sir Philips Christison. Sebelum pasukan ini sempat melancarkan operasi militer, Jepang sudah menyerah. Oleh karena itu, tugas AFNEI dialihkan dari tugas militer ke tugas administratif. Tugas itu adalah:

1. menerima penyerahan dari tangan Jepang;
2. membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu;
3. melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan;
4. menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil;
5. menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan Sekutu.[64]

Pasukan AFNEI tidak cukup banyak untuk memasuki seluruh Indonesia, sehingga Indonesia di bagian timur diserahkan kepada tanggung jawab pasukan Australia. Pasukan AFNEI hanya akan menjalankan tugasnya di Jawa dan Sumatra. Semula Mounbatten memperkirakan pasukan yang akan dikirimkan itu cukup satu divisi. Namun, setelah mempelajari perkembangan situasi, diputuskannya untuk mengerahkan tiga

---

[64] David Wehl, *The Birth of Indonesia*, 1948, hlm. 52

divisi. Divisi-divisi tersebut ialah Divisi India Ke-26 di bawah pimpinan Mayor Jenderal H.M. Chambers untuk Sumatra, Divisi India Ke-23 di bawah pimpinan D.C. Hawthorn untuk Jawa Barat, dan Divisi India Ke-5 di bawah pimpinan Mayor Jenderal E.C. Mansergh untuk Jawa Timur. Pengiriman divisi-divisi itu tidak dapat dilakukan serentak sebab Sekutu kekurangan kapal pengangkut.

Sebelum melakukan pendaratan, Sekutu terlebih dahulu mengirim Mayor Greenhalgh untuk mempersiapkan markas besar Sekutu di Jakarta. Ia diterjunkan dengan parasut di Lapangan Terbang Kemayoran pada tanggal 14 September 1945. Lima belas hari kemudian, 29 September 1945, rombongan pertama yang diangkut dengan kapal Cumberland mendarat di Tanjung Priok, Jakarta. Dalam rombongan ini terdapat Laksamana Muda W.R. Patterson. Sesudah itu, menyusul pendaratan di tempat-tempat lain. Sampai akhir Oktober 1945 Sekutu sudah mendarat di tiga kota pelabuhan utama di Jawa (Jakarta, Semarang, Surabaya) dan tiga kota pelabuhan utama di Sumatra (Medan, Padang, Palembang). Dari kota-kota ini mereka bergerak ke kota-kota pedalaman, antara lain Bandung dan Magelang, untuk membebaskan para interniran dan menerima penyerahan Jepang. Sementara itu, pasukan Australia mendarat pula di beberapa tempat di Indonesia bagian timur.

Kedatangan pasukan Sekutu disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia. Apalagi, dalam wawancara dengan pers di Singapura tanggal 29 September 1945 Christison mengatakan bahwa tugas Sekutu hanyalah untuk membebaskan tawanan perang dan interniran serta melucuti pasukan Jepang. Sekutu tidak akan mencampuri urusan politik dan tidak akan menyingkirkan pemerintah RI, bahkan ia bermaksud mengadakan musyawarah dengan pemimpin RI.[65] Pernyataan ini menghebohkan pemerintah Belanda. Sebaliknya, dianggap sebagai pengakuan *de facto* terhadap RI. Apalagi, pada tanggal 1 Oktober 1945 Christison mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno.[66] Oleh karena itulah kedatangan pasukan Sekutu ini diterima dengan tangan terbuka oleh pejabat-pejabat RI.

Akan tetapi, setelah diketahui bahwa dalam pasukan Sekutu itu terdapat serdadu Belanda dan aparat *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) yang terang-terangan bermaksud menegakkan kembali pemerintah Hindia Belanda, sikap pihak Indonesia berubah menjadi curiga, bahkan memperlihatkan sikap bermusuhan. Situasi keamanan dengan cepat

---

[65] *Independence*, 29 Desember 1945

[66] Anak Agung Gede Agung, *Persetujuan Linggajati: Prolog dan Epilog*, 1995, hlm. 18

memburuk sebab NICA mempersenjatai kembali anggota KNIL yang baru dibebaskan dari tawanan Jepang. Di kota-kota yang diduduki Sekutu, seperti Jakarta dan Bandung, anggota KNIL ini memancing kerusuhan dengan mengadakan provokasi-provokasi bersenjata. Bahkan, di Jakarta mereka berusaha membunuh Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin. Aksi-aksi teror terhadap penduduk mereka lakukan dengan memakai seragam Sekutu. Hal inilah yang antara lain menyebabkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta pada tanggal 4 Januari 1946 pindah ke Yogyakarta yang sampai akhir tahun 1949 dijadikan ibu kota RI.

Pihak Indonesia menilai bahwa Sekutu melindungi kepentingan Belanda. Oleh karena itu, kehadiran mereka ditentang yang dengan sendirinya menimbulkan bentrokan-bentrokan bersenjata, bahkan di beberapa kota meledak menjadi pertempuran. Di bawah ini diceritakan beberapa pertempuran yang terjadi antara pihak Indonesia dan Sekutu (Inggris).

a. Pertempuran Surabaya

Pertempuran Surabaya tidak lepas kaitannya dengan peristiwa yang mendahuluinya, yaitu usaha perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai tanggal 2 September 1945. Perebutan kekuasaan dan senjata ini membangkitkan suatu pergolakan sehingga berubah menjadi situasi revolusi yang konfrontatif.

Para pemuda berhasil memiliki senjata dan para pemuka pemerintah menguasai pemuda, yang keduanya siap menghadapi pelbagai ancaman yang datang dari mana pun. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadier A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya. Brigade ini adalah bagian dari Divisi India Ke-23 di bawah pimpinan Mayor Jenderal D.C. Hawthorn. Mereka mendapat tugas dari Panglima AFNEI untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran Sekutu.[67] Kedatangan mereka diterima secara enggan oleh pemerintah Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur R.M.T.A. Surjo. Setelah diadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI dan Brigadier A.W.S. Mallaby dicapai kesepakatan:

1. Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak terdapat Angkatan Perang Belanda;
2. Kedua belah pihak akan bekerja sama untuk menjamin keamanan dan ketenteraman;

---

[67] David Wehl, *The Birth of Indonesia*, 1948, hlm. 52

3. Akan segera dibentuk "Kontact Bureau" (Kontak Biro) agar kerja sama dapat terlaksana sebaik-baiknya;
4. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang.[68]

Kemudian pihak RI memperkenankan tentara Inggris memasuki kota, dengan syarat hanya objek-objek yang sesuai dengan tugasnya yang boleh diduduki, seperti kamp-kamp tawanan.

Pihak Inggris juga menyatakan bahwa di antara tentara mereka tidak terdapat tentara Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada tanggal 26 Oktober 1945 malam satu peleton dari *Field Security Section* di bawah pimpinan Kapten Shaw, melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Huiyer, seorang kolonel Angkatan Laut Belanda, dan kawan-kawannya. Tindakan Inggris dilanjutkan pada keesokan harinya dengan menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio, dan objek-objek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober pukul 11.00, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari Jepang. Pemerintah RI menanyakan perihal tersebut kepada Mallaby. Mallaby mengaku tidak mengetahui perihal pamflet tersebut, tetapi ia berpendirian bahwa sekalipun sudah ada perjanjian dengan pemerintah RI, ia akan melaksanakan tindakan sesuai dengan isi pamflet tersebut. Sikap ini menghilangkan kepercayaan pemerintah RI terhadapnya. Pemerintah memerintahkan kepada para pemuda untuk siaga menghadapi segala kemungkinan. Pihak Inggris mulai menyita kendaraan-kendaraan yang lewat.

Pada pukul 14.00 tanggal 27 Oktober 1945 terjadi kontak senjata yang pertama antara pihak pemuda dan Inggris. Peristiwa meluas menjadi serangan umum terhadap kedudukan Inggris di seluruh kota selama dua hari. Pertempuran seru terjadi di beberapa sektor. Pada tanggal 28 Oktober kedudukan Inggris bertambah kritis.[69] Tank-tank mereka berhasil dilumpuhkan. Pada tanggal 29 Oktober 1945, beberapa objek vital dapat direbut kembali oleh pemuda. Untuk menyelamatkan pasukannya dari bahaya kehancuran total, pihak Inggris menghubungi Presiden Soekarno dan meminta Presiden agar memerintahkan pihak Indonesia menghentikan serangan. Pada keesokan harinya tanggal 29 Oktober pukul 11.30, Presiden Soekarno bersama-sama dengan Mayor Jenderal D.C. Hawthorn, atasan Brigadier Mallaby, tiba di Surabaya.

---

[68] *Soeara Rakjat*, 26 Oktober 1945, Dr H. Roeslan Abdulgani, "Seratus Hari di Soerabaya yang menggemparkan Indonesia", *Surabaya Post*, 30 Oktober 1973

[69] Doulton, Lieutenant Colonel A.J.F., *The Fighting Cock the story of the 23rd Indian Division*, 1951, hlm. 253–267; David Wehl, *The Birth of Indonesia*, 1948, hlm. 57

Presiden Soekarno didampingi oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin segera berunding dengan Mallaby. Perundingan menghasilkan keputusan: menghentikan kontak senjata. Perundingan dilanjutkan pada malam hari antara Presiden Soekarno, wakil pemerintah RI di Surabaya, wakil pemuda dan pihak Inggris yang didampingi oleh Jenderal Hawthorn. Dalam perundingan tersebut didapat kesepakatan: eksistensi RI diakui oleh Inggris dan cara-cara menghindari bentrokan senjata diatur sebagai berikut:

1. Surat-surat selebaran yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal D.C. Hawthorn dinyatakan tidak berlaku;
2. Inggris mengakui eksistensi TKR dari polisi;
3. Pasukan Inggris hanya bertugas menjaga kamp-kamp tawanan. Penjagaan dilakukan bersama dengan TKR;
4. Untuk sementara waktu Tanjung Perak dijaga bersama TKR, polisi, dan tentara Inggris guna menyelesaikan tugas menerima obat-obatan untuk tawanan perang.[70]

Hasil perundingan dipertegas kembali oleh Menteri Penerangan bahwa:

1. Dibentuk suatu Kontak Biro yang terdiri dari unsur pemerintah RI di Surabaya bersama-sama tentara Inggris;
2. Daerah pelabuhan dijaga bersama, dan kedudukan masing-masing ditentukan oleh Kontak Biro;
3. Daerah Darmo, daerah kamp interniran orang-orang Eropa, dijaga oleh tentara Inggris. Hubungan antara Darmo dan pelabuhan Tanjung Perak diamankan untuk mempercepat pelaksanaan pemindahan tawanan;
4. Tawanan dari kedua belah pihak harus dikembalikan kepada pihak masing-masing.

Perundingan selesai pada tanggal 30 Oktober 1945. Presiden Soekarno dan Jenderal D.C. Hawthorn meninggalkan Surabaya pada pukul 13.00 hari itu juga. Dalam perundingan tersebut juga disepakati nama-nama anggota Kontak Biro dari kedua belah pihak. Dari pihak Inggris lima orang, yakni (Brigadier A.W.S. Mallaby, Kolonel L.H.O. Pugh, Wing Commander Groom, Mayor M. Hubson, dan Kapten H. Shaw). Dari pihak Indonesia sembilan orang, yakni, Residen Sudirman, Doel Arnowo, Atmaji, Mohammad, Soengkono, Soeyono, Koesnandar, Roeslan Abdulgani, dan T.D. Kundan sebagai juru bahasa.

---

[70] *Merah Putih*, 30 Oktober 1945

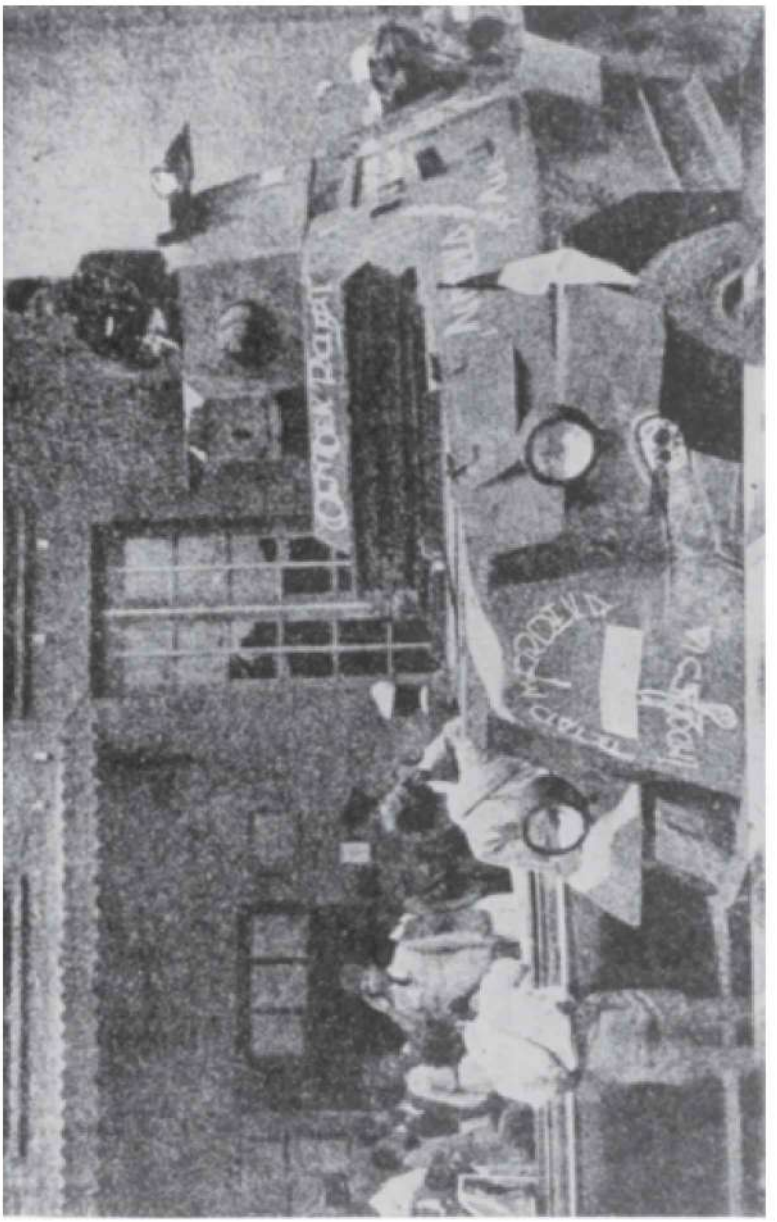

Gambar 2.12 Presiden Soekarno datang di Surabaya atas permintaan Sekutu, guna menenangkan keadaan (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

Gambar 2.13 Suasana setelah penghentian tembak-menembak yang disepakati oleh para pemimpin pemerintah RI dengan tentara Sekutu. Pada gambar tampak Brigadier Jenderal Mallaby dan Dr. Soegiri sedang berkeliling kota memberitahukan adanya penghentian tembak-menembak (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

Sementara itu, di beberapa tempat masih terjadi pertempuran, sekalipun sudah diumumkan gencatan senjata. Oleh karena itu, para anggota Kontak Biro dari kedua belah pihak mendatangi tempat-tempat tersebut dengan maksud menghentikan pertempuran setempat-setempat itu. Pada pukul 17.00, tanggal 30 Oktober 1945, seluruh anggota Kontak Biro pergi bersama-sama menuju beberapa tempat.

Tempat yang terakhir adalah Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Gedung ini masih dididuduki oleh pasukan Inggris, dan pemuda-pemuda masih mengepungnya. Setibanya di tempat ini terjadi insiden. Pemuda-pemuda menuntut agar pasukan Mallaby menyerah. Mallaby tidak dapat menerima tuntutan itu. Tiba-tiba terdengar tembakan gencar dari dalam gedung yang dilakukan oleh pasukan Inggris. Pemuda-pemuda membalas. Di tengah-tengah keributan dan kekacauan itu para anggota Kontak Biro mencari perlindungan sendiri-sendiri. Mallaby menjadi sasaran para pemuda. Dia ditusuk dengan bayonet dan bambu runcing. Pengawal-pengawal melarikan diri. Mallaby terbunuh.[71]

Dengan terbunuhnya Brigadier Mallaby, pihak Inggris menuntut pertanggungjawaban. Pada tanggal 31 Oktober 1945 Jenderal Christison, Panglima AFNEI memperingatkan kepada rakyat Surabaya agar mereka menyerah, apabila tidak mereka akan dihancurleburkan.

> "Indonesian!"
>
> "Subsequently these Indonesian broke the truce which had been agreed ini presence of Ir. Soekarno and Mohammad Hatta and foully murdered Brigadier Mallaby, who had game to parley with them."

Kontak Biro Indonesia mengumumkan bahwa kematian Mallaby adalah akibat kecelakaan, tidak dapat dipastikan apakah akibat tembakan rakyat atau tembakan dari tentaranya sendiri.[72]

Sesudah kematian Mallaby pihak Inggris mendatangkan pasukan baru di bawah pimpinan Mayor Jenderal E.C. Mansergh. Kemudian, pada tanggal 7 November, Mansergh menulis surat kepada Gubernur Soeryo berisi tuduhan bahwa Gubernur tidak menguasai keadaan, seluruh kota telah dikuasai oleh para ekstremis. Mereka menghalang-halangi tugas Inggris. Akhirnya, ia mengancam akan menduduki kota Surabaya untuk melucuti "gerombolan yang tidak mengenal tertib hukum" itu. Ia juga "memanggil" Gubernur Soeryo untuk "menghadap".

---

[71] Pengalaman Tn. R.H. Muhammad, *Soeara Rakjat*, November 1945; Roeslan Abdulgani, "Seratus hari di Soerabaia yang mengemparkan Indonesia", *Surabaya Post*, 31 Oktober 1973

[72] David Wehl, *op. cit.*, (1946), hlm. 61

Dalam surat jawaban tanggal 9 November 1945 Gubernur Soeryo membantah semua tuduhan Mansergh. Ia mengutus Residen Sudirman dan Roeslan Abdulgani untuk menyampaikan suratnya. Kepada utusan itu pihak Inggris menyampaikan dua surat, satu di antaranya berisi ultimatum kepada bangsa Indonesia di Surabaya. Ultimatum itu bertanggal 9 November 1945. Isi dan maknanya merupakan penghinaan terhadap martabat dan harga diri bangsa Indonesia. Isi pokoknya adalah tuntutan agar semua pemimpin Indonesia, pemimpin pemuda, kepala polisi, dan kepala pemerintahan, harus melapor pada tempat dan waktu yang ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala, dan kemudian menandatangani dokumen yang disediakan sebagai tanda menyerah tanpa syarat.

Pemuda-pemuda bersenjata diharuskan menyerahkan senjatanya dengan berbaris serta membawa bendera putih. Batas waktu yang ditentukan adalah pukul 06.00 tanggal 10 November 1945. Apabila tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut, dan udara. Ultimatum ini ditandatangani oleh Mayor Jenderal E.C. Mansergh. Untuk menentukan sikap terhadap ultimatum ini para pemimpin di Surabaya mengadakan pertemuan. Mereka berusaha menghubungi Presiden Soekarno untuk meminta instruksi mengenai tindakan apa yang akan diambil; menerima atau menolak ultimatum. Namun, mereka hanya berhasil mengadakan hubungan dengan Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subardjo. Menteri Luar Negeri menyerahkan "kata putus" kepada rakyat Surabaya. Secara resmi pada pukul 22.00, Gubernur Soeryo melalui radio menyatakan menolak ultimatum Inggris.

Sementara itu, para pemuda yang sudah siap siaga membuat pertahanan di dalam kota. Komandan Pertahanan Kota, Soengkono, pada tanggal 9 November pukul 17.00 mengundang semua unsur kekuatan rakyat yang terdiri dari Komandan TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR, dan TKR Laut untuk berkumpul di Markas Pregolan 4. Soengkono menyatakan bahwa siapa yang ingin meninggalkan kota dipersilakan. Ternyata, semuanya bertekad untuk mempertahankan Surabaya. Mereka masing-masing membubuhkan tanda tangan pada secarik kertas sebagai tanda setuju, dan diteruskan dengan ikrar bersama. Soengkono dipilih sebagai komandan pertahanan.

Kota Surabaya dibagi dalam tiga sektor pertahanan. Garis pertahanan ditentukan dari Jalan Jakarta, tetapi penempatan pasukannya agar mundur ke belakang ke Krembangan, Kapasan, dan Kedungcowek. Garis kedua di sekitar *Viaduct*. Garis ketiga di daerah Darmo.

Pembagian tiga sektor meliputi sektor barat, sektor tengah, dan sektor timur. Sektor barat dipimpin oleh Koenkiyat. Sektor tengah oleh Kretarto dan Marhadi, sedangkan sektor timur oleh Kadim Prawirodihardjo.[73]

Sementara itu, radio pemberontakan yang dipimpin oleh Bung Tomo membakar semangat juang rakyat. Siaran ini dipancarkan dari Jalan Mawar No. 4. Sesudah batas waktu ultimatum habis, keadaan semakin eksplosif. Kontak senjata pertama terjadi di Perak, yang berlangsung sampai pukul 18.00. Inggris berhasil menguasai garis pertama dari pertahanan pihak Indonesia. Gerakan pasukan Inggris disertai dengan pengeboman yang ditujukan pada sasaran yang diperkirakan menjadi tempat pemusatan pemuda. Surabaya yang digempur oleh Inggris itu berhasil dipertahankan oleh para pemuda hampir tiga minggu lamanya. Sektor demi sektor dipertahankan secara gigih walaupun pihak Inggris mempergunakan senjata-senjata modern dan berat. Pertempuran terakhir terjadi di Gunungsari, pada 28 November 1945, tetapi perlawanan secara sporadis masih dilakukan. Setelah itu, Markas Pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa Lebaniwaras, yang terkenal dengan nama Markas Kali.

b. Pertempuran Ambarawa

Pertempuran di Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 November dan berakhir pada 15 Desember 1945. Ambarawa adalah kota yang terletak antara Semarang–Magelang dan Semarang–Solo. Latar belakang peristiwa ini dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang. Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 yang mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945, yang dipimpin oleh Brigadier Bethell oleh pihak RI diperkenankan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang dan evakuasi 19.000 interniran Sekutu (APW) yang berada di Kamp Banyu Biru Ambarawa dan Magelang. Ternyata mereka diboncengi oleh orang-orang NICA, yang kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang itu. Pada tanggal 26 Oktober 1945, pecah insiden di Magelang, yang berlanjut menjadi pertempuran antara TKR dan tentara Inggris. Insiden ini berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadier Bethell di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan untuk melakukan gencatan senjata dan tercapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam 12 pasal, antara lain:

a. Pihak Inggris akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang, untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi APWI. Jumlahnya dibatasi hanya untuk keperluan melaksanakan tugasnya.
b. Jalan raya Magelang–Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris.

---

[73] Wawancara dengan Mayjen (Pur.) Soengkono, Surabaya, 4 – 6 November 1974

c. Inggris tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya.

Ternyata pihak Inggris ingkar janji. Kesempatan dan kelemahan dari pasal-pasal persetujuan itu dipergunakan Inggris untuk menambah jumlah serdadunya yang berada di Magelang.

Sementara itu, pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara. TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pasukan Inggris. Pasukan Inggris yang berada di Magelang pada tanggal 21 November 1945 ditarik ke Ambarawa dengan dilindungi oleh pesawat-pesawat udara. Pertempuran berkobar di dalam kota pada tanggal 22 November 1945. Pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan-pasukan pemuda yang berasal dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura bertahan di kuburan Belanda, sehingga membentuk garis pertahanan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Dari arah Magelang pasukan TKR dari Divisi V/Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adrongi pada tanggal 21 November 1945 melakukan serangan fajar dengan tujuan memukul pasukan Inggris yang berkedudukan di desa Pingit. Pasukan Imam Adrongi berhasil menduduki Pingit dan merebut desa-desa sekitarnya.[74] Kemudian, pasukan ini meneruskan gerakan pengejarannya. Sementara itu, kekuatan di Ambarawa bertambah dengan datangnya tiga batalion yang berasal dari Yogyakarta, yaitu Batalion 10 Divisi X di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sardjono dan Batalion Sugeng, sehingga kedudukan musuh menjadi terkepung.

Sekalipun telah terkepung, Inggris mencoba mematahkan kepungan itu. Mereka mengadakan gerakan melambung dan mengancam kedudukan pasukan TKR dari belakang dengan menggunakan tank-tanknya sehingga kedudukan TKR terancam. Kota Ambarawa dihujani dengan tembakan meriam.[75] Untuk mencegah jatuhnya korban, pasukan TKR diperintahkan oleh komandannya masing-masing untuk mundur ke Bedono. Dengan datangnya bala bantuan dari Resimen 2 di bawah pimpinan M. Sarbini dan Batalion Polisi Istimewa di bawah Onie Sastroatmodjo serta batalion dari Yogyakarta, gerakan musuh berhasil ditahan di desa Jambu.

Sementara itu, di desa Jambu, para komandan pasukan mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kolonel Holand Iskandar. Rapat ini menghasilkan terbentuknya suatu komando, yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran (MPP). Markas ini kemudian ditempatkan di Magelang. Sejak

---

[74] Semdam VII/Diponegoro, *Palagan Ambarawa dan Hari Infanteri*, 1967, hlm. 53

[75] A.J.F. Doulton, Lieutenant Colonel, *The Fighting Cock Being The History, of The 23rd Indian Divission, 1942–1947*, 1951, hlm. 271–275

itu medan Ambarawa dibagi atas empat sektor, yaitu sektor utara, sektor selatan, sektor timur, dan sektor barat.

Adapun kekuatan pasukan yang ikut bertempur di Ambarawa ini berjumlah 19 batalion TKR dan beberapa batalion badan-badan perjuangan yang bertempur secara berganti-ganti. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan yang berasal dari Purwokerto Letnan Kolonel Isdiman gugur. Setelah Isdiman gugur, Kolonel Soedirman, Panglima Divisi di Purwokerto mengambil alih pimpinan pasukan. Situasi pertempuran berubah menjadi semakin menguntungkan pasukan TKR. Musuh terusir dari desa Banyubiru, yang merupakan garis pertahanannya yang terdepan pada tanggal 5 Desember 1945.

Setelah mempelajari situasi pertempuran, Kolonel Soedirman pada tanggal 11 Desember 1945 mengambil prakarsa untuk mengumpulkan para komandan sektor. Mereka melaporkan situasi pada sektor masing-masing. Akhirnya, Kolonel Soedirman menyimpulkan bahwa musuh telah terjepit, dan perlu segera dilancarkan pukulan terakhir. Rencana pelaksanaannya disusun sebagai berikut:

a. Serangan pendadakan dilakukan serentak dari semua sektor.
b. Tiap-tiap komandan sektor memimpin serangan.
c. Pasukan-pasukan badan-badan perjuangan (laskar), disiapkan sebagai tenaga cadangan.
d. Serangan akan dimulai tanggal 12 Desember pukul 04.30.[76]

Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari pasukan-pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu satu setengah jam mereka berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota. Diperkirakan pertahanan musuh yang terkuat terdapat di benteng Willem, yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama empat hari empat malam. Pasukan Inggris yang merasa kedudukannya terjepit, berusaha keras untuk melakukan pemutusan pertempuran. Pada tanggal 15 Desember 1945, mereka meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang.

Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting, dan diakui oleh pihak Inggris, bahwa pasukan Indonesia sulit ditaklukkan sekalipun dengan mengerahkan seluruh kekuatannya.[77] Letak kota Ambarawa sangat strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, tiga kota utama Jawa Tengah akan terancam sekaligus, yaitu Surakarta, Magelang, dan terutama Yogyakarta, sebagai tempat kedudukan Markas Tertinggi TKR.

---

[76] Semdam VII/Diponegoro, *op. cit.*, 1967, hlm. 58

[77] A.J.F. Doulton, Lieutenant Colonel, *op. cit.*, 1951, hlm. 272

c. Pertempuran Medan Area

Pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadier T.E.D. Kelly mulai mendarat di Sumatra Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Kekuatan mereka adalah satu brigade yaitu Brigade-4 dari Divisi India Ke-26. Ikut serta membonceng mereka adalah orang-orang NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pemerintah RI Sumatra Utara memperkenankan mereka menempati beberapa hotel di kota Medan, seperti Hotel de Boer, Grand Hotel, dan Hotel Astoria karena menghormati tugas mereka. Sebagian dari mereka kemudian ditempatkan di Binjai, Tanjung Morawa, dan beberapa tempat lainnya dengan memasang tenda-tenda lapangan.[78] Sehari setelah mendarat Tim dari RAPWI mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulau Berayan, Saentis, Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur M. Hassan. Ternyata dari kelompok mereka langsung dibentuk menjadi "Medan Batalion KNIL". Dengan kekuatan ini tampaklah perubahanan sikap dari para bekas tawanan tersebut. Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai "pemenang" dalam perang. Sikap ini memancing timbulnya pelbagai insiden yang dilakukan secara spontan oleh para pemuda. Insiden pertama pecah dari hotel di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Awal dari insiden ini adalah seorang penghuni hotel merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai oleh seseorang yang ditemuinya. Akibatnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden ini jatuh korban 96 orang luka-luka. Terbukti sebagian besar adalah orang-orang NICA.[79]

Insiden ini kemudian menjalar di beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Sementara itu, pada tanggal 10 Oktober 1945, terbentuk TKR Sumatra Timur yang dipimpin oleh Achmad Tahir.[80] Selanjutnya diadakan pemanggilan terhadap para bekas *giyūgun* dan *hoihō* ke seluruh Sumatra Timur. Panggilan ini mendapat sambutan yang luar biasa dari mereka. Di samping TKR, di Sumatra Timur terbentuk pula Badan-badan Perjuangan. Badan-badan perjuangan ini sejak tanggal 15 Oktober berfusi menjadi Pemuda Republik Indonesia Sumatra Timur dan sebulan kemudian berubah menjadi Pesindo. Setelah terbentuknya partai-partai politik pada bulan November 1945 terbentuklah laskar-laskar partai. PNI

---

78 Biro Sejarah Prima, *Medan Area Mengisi Proklamasi,* Medan, 1976, hlm. 240

79 Tim Asistensi Pangdam II/Bukit Barisan, *Sejarah Perjuangan Komando Daerah Militer II/Bukit Barisan,* jilid I, 1977, hlm. 107

80 Biro Sejarah Prima, *op. cit.,* hlm. 212

memiliki Nasional Pelopor Indonesia (Napindo), PKI mempunyai Barisan Merah, Masyumi memiliki Hizbullah, dan Parkindo membentuk Pemuda Parkindo.

Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, Inggris memulai aksinya untuk memperlemah kekuatan Republik dengan cara memberikan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjatanya kepada Sekutu. Hal ini juga dilakukan oleh Brigadier T.E.D. Kelly terhadap pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober 1945. Sejak saat itu tentara NICA merasa memperoleh dukungan dari pihak Inggris. Demikian pula pasukan Serikat pun mulai melakukan aksi-aksi terornya sehingga timbul rasa permusuhan di kalangan pemuda. Patroli-patroli Inggris ke luar kota tidak pernah merasa aman. Keselamatan mereka tidak dijamin oleh pemerintah RI. Meningkatnya korban di pihak Inggris menyebabkan mereka memperkuat kedudukannya dan menentukan sendiri secara sepihak batas kekuasaannya. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Serikat memasang papan-papan yang bertuliskan *Fixed Boundaries Medan Area* di pelbagai sudut pinggiran kota Medan. Sejak saat inilah *Medan Area* menjadi terkenal. Tindakan pihak Inggris ini merupakan tantangan bagi para pemuda. Pihak Inggris bersama dengan NICA melakukan aksi "pembersihan" terhadap unsur-unsur Republik yang berada di kota Medan. Para pemuda membalas aksi-aksi tersebut sehingga daerah tersebut menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengepungan, bahkan sering kali terjadi tembak-menembak. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan NICA berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes berhasil digagalkan. Selanjutnya seorang perwira Inggris diculik oleh pemuda, beberapa truk berhasil dihancurkan. Dengan peristiwa ini Brigadier T.E.D. Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Barang siapa yang nyata-nyata melanggar akan ditembak mati. Daerah yang ditentukan adalah kota Medan dan delapan setengah kilometer dari batas kota Medan dan Belawan.[81] Perlawanan terus memuncak. Pada bulan April 1946 tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah RI ke luar kota Medan. Gubernur, Markas Divisi TKR, Wali Kota RI pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan. Tanpa adanya satu komando, mustahil dapat melakukan serangan yang efektif terhadap kedudukan-kedudukan pasukan Inggris.

Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama: Komando Resimen *Lasykar Rakyat Medan Area*, yang dibagi atas 4 sektor

[81] Biro Sejarah Prima, *op. cit.*, hlm. 255

dan tiap sektor dibagi atas 4 subsektor. Setiap sektor berkekuatan 1 batalion. Markas komando berkedudukan di Sudi Mengerti (Trepes).[82] Di bawah komando inilah kemudian mereka meneruskan perjuangan di Medan Area.

d. Pertempuran Padang dan Sekitarnya

Pasukan Inggris, Lincoln Fifth Regiment, di bawah pimpinan Brigadier Hutchinson mendarat di pelabuhan Teluk Bayur, pada tanggal 13 Oktober 1945. Dua hari kemudian, Hutchinson mengadakan pertemuan dengan pemerintah RI Sumatra Barat. Dalam pertemuan itu ia mengatakan bahwa pasukannya hanya bertugas menjalankan tugas-tugas Sekutu, tidak akan mencampuri urusan pemerintahan, dan akan berkonsultasi dengan pemerintahan RI sebelum melakukan suatu tindakan. Dalam pertemuan kedua, ia meminta kesediaan pemerintah Sumatra Barat meminjamkan kantor residen yang akan digunakan sebagai kantornya. Pihak Indonesia menafsirkan permintaaan itu sebagai pengakuan Inggris terhadap kekuasaan *de facto* pemerintah RI.[83]

Kesepakatan yang telah dicapai dalam pertemuan tersebut tidak seluruhnya ditaati Inggris. Mereka menggeledah rumah-rumah penduduk untuk mencari senjata, mengobrak-abrik kantor Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) yang mereka curigai sebagai pusat kegiatan pemuda. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tahanan, mereka persenjatai. Dengan perlindungan Inggris, bekas tawanan ini menduduki secara paksa gedung sekolah Teknik di Simpang Haru, bahkan memukuli kepala sekolahnya. Tindakan orang-orang Belanda ini dibalas oleh TKR dan para pemuda dengan melakukan serangan pada tanggal 17 November 1945. Sebagai balasan terhadap serangan itu, Inggris menggeledah rumah-rumah di sekitar Simpang Haru, bahkan ada yang dibakar. Beberapa orang pemuda mereka tangkap dan dimasukkan ke penjara. Inggris juga memberlakukan jam malam dari pukul 18.00 sore sampai pukul 06.00 pagi.

Insiden yang berdampak luas terjadi pada tanggal 5 Desember 1945. Seorang perwira Inggris, Mayor Anderson dan seorang anggota Palang Merah Sekutu, Miss Allingham, ditemukan terbunuh dekat pemandian Sungai Barameh, kira-kira sebelas kilometer di selatan kota Padang.[84] Inggris melakukan pembalasan yang tidak kepalang tanggung, membakar tiga kampung dekat terjadinya peristiwa itu, menyerbu pos TKR yang

---

[82] Biro Sejarah Prima, *op. cit.*, hlm. 285

[83] Badan Pemurnian Sejarah Indonesia Minangkabau, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Minangkabau*, jilid I, 1978, hlm. 224 – 225

[84] Mestika Zed, Emizal Amri, Edmihardi, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 1945–1994 di Kota Padang dan Sekitarnya*, 2002, hlm. 155–156; Badan Pemurnian Sejarah, *op. cit.*, hlm. 254–256

menyebabkan beberapa orang TKR tewas, dan membunuh 12 orang penduduk.

Pertempuran yang cukup besar antara pasukan Inggris dan pasukan Indonesia terjadi tanggal 21 Februari 1946 di Rimbo Kaluang. Pasukan TRI di bawah pimpinan Ahmad Husein, dengan bantuan laskar, berhasil menghancurkan beberapa pos pertahanan Inggris dan membongkar gudang senjata. Sesudah itu terjadi lagi beberapa serangan malam sehingga Inggris menarik pasukannya dari Rimbo Kaluang. Serangan ini dilancarkan dari Kuranji sehingga Inggris menyebut pasukan ini dengan istilah *The Tiger of Kuranji* (Harimau Kuranji).[85]

Pada tanggal 14 Juni 1946 pasukan Inggris menyerang Batu Busuak untuk membebaskan kaki tangan mereka yang ditangkap oleh pasukan TRI. Pihak TRI yang sudah mengetahui akan adanya serangan tersebut, mengatur siasat dengan membiarkan pasukan Inggris memasuki Batu Busuak. Serangan dilancarkan pada waktu pasukan itu kembali ke kota Padang. Dalam pertempuran ini 13 anggota TRI gugur dan puluhan orang mengalami luka-luka. Satu regu tentara India muslim melakukan desersi dan bergabung dengan laskar Hizbullah.

Daerah-daerah sekitar Simpang Haru merupakan medan yang cukup panas. Selama tiga hari dari tanggal 7 sampai 9 Juli 1946 pasukan TRI dan laskar melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di tempat ini. Pada mulanya pasukan Indonesia hanya melancarkan serangan malam dan paginya mereka mundur ke basis mereka. Pada hari ketiga terjadi pertempuran jarak dekat. Akhirnya Simpang Haru ditinggalkan Inggris dengan korban beberapa serdadunya tewas dan sejumlah senjata ringan jatuh ke tangan TRI.

Malam tanggal 28 Oktober 1945, bertepatan dengan malam takbiran menjelang Idul Fitri, TRI dan laskar melancarkan serangan besar-besaran. Serangan ini langsung diamati oleh Komandan Divisi III/Banteng Kolonel Dahlan Djambek. Pertempuran berkobar dalam kota dari pukul 00.00 sampai pukul 05.00. Menjelang pagi, pasukan TRI menarik diri ke pangkalan masing-masing. Pagi hari, ketika penduduk Padang sedang melakukan salat Idul Fitri, Inggris menyiapkan pasukannya. Namun, rencana untuk melancarkan serangan kemudian mereka batalkan.[86]

Tugas Inggris untuk melucuti pasukan Jepang, membebaskan para tawanan, dan memulangkan orang Jepang ke negeri mereka, sudah selesai pada bulan Juni 1946. Namun, mereka tetap bertahan di Padang menunggu

---

[85] *Ibid.*, hlm 261–262

[86] Kementerian Penerangan, *Propinsi Sumatra Tengah*, 1954, hlm. 136

kesiapan pasukan Belanda untuk mengambil alih kedudukan mereka. Pasukan Belanda, Brigade U, di bawah pimpinan Kolonel Sluyter tiba di Padang pertengahan November 1946. Serah terima antara pasukan Inggris dan pasukan Belanda dilangsungkan tanggal 28 November dan esok harinya pasukan Inggris meninggalkan Padang. Sejak itu, pasukan RI di sekitar Padang berhadapan langsung dengan pasukan Belanda sampai terjadinya Agresi Militer Pertama Belanda bulan Juli 1947.

e. Pertempuran Bandung (Bandung Lautan Api)

Pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah RI setempat sudah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali TKR dan polisi, diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp-kamp tawanan mulai pula melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Malam tanggal 24 November 1945 TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas. Tiga hari kemudian MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum itu harus dilaksanakan paling lambat pukul 12.00 tanggal 29 November 1945. Dengan ultimatum itu, Inggris membagi kota Bandung menjadi bagian utara yang berada di bawah kekuasaan mereka dan bagian selatan di bawah kekuasaan RI.

Ultimatum itu dijawab pasukan Indonesia dengan mendirikan pos-pos gerilya di berbagai tempat. Selama bulan Desember terjadi beberapa kali pertempuran, antar lain, di Cihaurgeulis, Sukajadi, Pasir Kaliki, dan Viaduct. Inggris berusaha merebut Balai Besar Kereta Api, tetapi gagal. Ketika berusaha membebaskan interniran Belanda di Ciater, mereka terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Indonesia di Lengkong Besar. Dalam bulan-bulan pertama tahun 1946 pertempuran berkobar secara sporadis.[87]

Selama berlangsungnya pertempuran, banyak serdadu India yang merupakan bagian dari pasukan Inggris, melakukan desersi dan bergabung dengan pasukan Indonesia. Salah satu di antaranya ialah Kapten Mirza dan pasukannya ketika terjadi pertempuran di Jalan Fokker (sekarang Jalan Garuda) pada pertengahan Maret 1946. Pihak Inggris menghubungi

---

[87] Djen Amar, *Bandung Lautan Api*, 1963, hlm. 141

Panglima Divisi III Jenderal A.H. Nasution meminta agar pasukan India tersebut diserahkan kepada mereka. Nasution menolak, bukan hanya untuk mengembalikan pasukan India, melainkan juga untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Inggris.[88]

Serangan-serangan sporadis yang dilancarkan pasukan Indonesia dan kegagalan mencari penyelesaian di tingkat daerah menyebabkan Inggris "bermain" di tingkat atas. Pada tanggal 23 Maret 1946 mereka menyampaikan ultimatum kepada Perdana Menteri Sjahrir agar selambat-lambatnya pukul 24.00 tanggal 24 Maret 1946 pasukan Indonesia sudah harus meninggalkan Bandung Selatan sejauh 10 sampai 11 km dari pusat kota. Sjahrir menugasi Sjafruddin Prawinegara dan Jenderal Mayor Didi Kartasasmita ke Bandung untuk menyampaikan ultimatum tersebut. Baik Jenderal Mayor Nasution maupun aparat pemerintah menolak ultimatum sebab tidak mungkin memindahkan ribuan pasukan dalam waktu yang sangat singkat itu. Mereka menemui Mayor Jenderal Hawthorn meminta agar batas ulitmatum ditunda. Sementara itu, Inggris meyebarkan pamflet yang berisi pengumuman bahwa sebelum pukul 24.00 tanggal 24 Maret 1946 Bandung Selatan sudah harus dikosongkan oleh pasukan Indonesia.

Sore hari tanggal 23 Maret Nasution ikut bersama Sjafruddin dan Didi Kartasasmita ke Jakarta untuk menemui Perdana Menteri Sjahrir. Dengan alasan untuk menyelamatkan TRI dari kehancuran, Sjahrir mendesak Nasution agar ultimatum itu dipenuhi. Ia berpendapat bahwa TRI belum mampu menghadapi pasukan Inggris. Nasution kembali ke Bandung esok harinya. Sekali lagi ia menghubungi pihak Inggris agar batas waktu ultimatum ditunda. Inggris menolak. Sebaliknya, Nasution juga menolak tawaran Inggris meminjamkan seratus truk untuk membawa pasukan Indonesia ke luar kota.[89]

Dalam pertemuan yang diadakan Nasution dengan para komandan TRI, para pemimpin laskar, dan aparat pemerintahan dicapai kesepakatan untuk membumihanguskan Bandung sebelum kota itu ditinggalkan. Menurut rencana, bumi hangus akan dilakukan pukul 00.00 tanggal 24 Maret. Ternyata, bumi hangus dilakukan lebih awal yakni pukul 21.00. Gedung pertama yang diledakkan ialah Bank Rakyat, disusul dengan pembakaran di beberapa tempat seperti Banceuy, Cicadas, Braga, dan Tegallega. Anggota TRI membakar sendiri asrama-asrama mereka. Malam tanggal 24 Maret 1946, bukan hanya pasukan bersenjata, melainkan juga ribuan rakyat meninggalkan kota Bandung, ketika kota itu terbakar.

---

88 A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, jilid I, 1984, hlm. 128

89 *Ibid.*, hlm. 128–131

2. Diplomasi sebagai Sarana Penyelesaian Pertikaian

Pemerintah berusaha memperoleh pengakuan terhadap kedaulatan negara dan pemerintah RI dari Sekutu, dan terutama Belanda yang masih saja menganggap Indonesia sebagai daerah jajahannya. Untuk itu, pemerintah bersedia memberikan berbagai konsesi seperti yang dinyatakan dalam Maklumat 1 November 1945. Dalam maklumat itu disebutkan bahwa pemerintah bersedia membayar semua utang yang dibuat Belanda sebelum Perang Dunia II, mengembalikan milik asing atau memberi ganti rugi atas milik asing yang sudah dikuasai pemerintah.

Dua hari kemudian, pemerintah mengeluarkan Maklumat 3 November yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik. Pemerintah berharap agar melalui partai-partai tersebut, segenap aliran dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Berdirinya partai-partai politik diikuti dengan berubahnya sistem pemerintahan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer, dalam arti kabinet bertanggung jawab kepada KNIP yang selama Perang Kemerdekaan berfungsi sebagai dewan perwakilan rakyat. Pada tanggal 14 November 1945 kabinet presidensial di bawah pimpinan Presiden Soekarno diganti dengan kabinet ministerial di bawah Perdana Menteri Sutan Sjahrir (Kabinet Sjahrir I). Kabinet ini segera mengadakan kontak diplomatik dengan pihak Belanda.

Pemerintah Inggris yang ingin secepatnya melepaskan diri dari kesulitan pelaksanaan tugasnya di Indonesia mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia,[90] sedangkan pemerintah Belanda diwakili oleh Wakil Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Dalam awal perundingan itu van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda yang terdiri atas enam pasal yang mengulangi pidato Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942. Isi pokoknya adalah:

1. Indonesia akan dijadikan negara Persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan Kerajaan Nederland.
2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda.
3. Sebelum dibentuknya Persemakmuran akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun.
4. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.[91]

---

[90] *Soeara Moeda,* 17 Februari 1946

[91] Regerings Voorlichtings Dienst, *Indonesia's Toekomst, Batavia,* 1946, hlm. 13–15

Pihak Indonesia dalam perundingan itu belum memberikan usul balasannya. Sementara itu, suatu gabungan organisasi dengan nama Persatuan Perjuangan (PP) melakukan oposisi terhadap Kabinet Sjahrir.[92] Mereka berpendapat bahwa perundingan hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengakuan 100% terhadap Republik Indonesia. Di dalam sidang KNIP di Solo (28 Februari–2 Maret 1946) mayoritas suara menentang kebijakan Perdana Menteri Sjahrir. Karena oposisi yang terlalu kuat itu Sjahrir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Akan tetapi, Presiden menunjuk kembali Sutan Sjahrir menjadi formatur kabinet dan kemudian ia menjabat lagi sebagai Perdana Menteri (Kabinet Sjahrir II).

Kabinet Sjahrir II terbentuk pada tanggal 12 Maret 1946. Kabinet ini menyusun usul balasan pemerintah RI, yang terdiri atas 12 pasal, antara lain:

1. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda.
2. Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tanggungan pemerintah RI.
3. Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu, dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda.
4. Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan Tentara Republik Indonesia.
5. Pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia untuk dapat diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
6. Selama perundingan berlangsung, semua aksi militer harus dihentikan dan pihak Republik akan melakukan pengawasan terhadap pengungsian tawanan-tawanan Belanda dan interniran lainnya.[93]

Usul balasan ini disampaikan kepada van Mook. Akan tetapi, pihak Belanda tidak dapat menerima usul balasan tersebut meskipun pihak Republik sudah memberikan konsesi-konsesi yang oleh sebagian besar rakyat Indonesia sendiri sukar diterima.

---

[92] Persatuan Perjuangan dibentuk pada tanggal 4–5 Januari 1946 di Surakarta atas prakarsa Tan Malaka, *(Lasjkar, 7* Januari 1946). Semula bernama *Volksfront*. Pada tanggal 15–16 Januari 1946 dibentuk badan tetap bernama Persatuan Perjuangan (PP). Program minimum PP adalah menolak perundingan tanpa dasar pengakuan kemerdekaan 100%. PP diikuti oleh semua organisasi massa bahkan *BKNIP* menyambut lahirnya PP, *Berita Repoeblik Indonesia,* no. 7, tahun II, 1 Februari 1946, hlm. 56

[93] Dr. H.J. van Mook, *Indonesia, Nederland en de Wereld*, 1949, hlm. 123–124

Perkembangan di Vietnam rupanya memengaruhi pikiran van Mook. Pada tanggal 6 Maret 1946 tercapai persetujuan antara Vietnam dan Prancis yang menyebutkan bahwa Vietnam akan menjadi negara bebas dalam lingkungan federasi Indo-Cina. Dengan bercermin pada persetujuan tersebut, van Mook mengajukan usul pribadi untuk mengakui Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pembentukan negara federal yang bebas dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Wakil semua bagian Hindia Belanda dan wakil semua golongan minoritas akan berkumpul untuk menetapkan struktur negara Indonesia yang akan datang itu. Selanjutnya pasukan-pasukan Belanda akan mendarat untuk menggantikan tentara Sekutu.[94]

Pada tanggal 27 Maret 1946 Sjahrir memberikan jawaban disertai konsep persetujuan dalam bentuk traktat. Isi pokoknya adalah:

1. Supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan *de facto* RI atas Jawa dan Sumatra;
2. Supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk RIS;
3. Republik Indonesia Serikat bersama-sama dengan Nederland, Suriname, dan Curacao menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan dengan Belanda.

Dengan usul balasan tersebut, kedua belah pihak dianggap telah saling mendekati dan karena itu perundingan perlu ditingkatkan. Perundingan di Jakarta antara Sutan Sjahrir dan van Mook dengan disaksikan oleh Archibald Clark Kerr dinyatakan berakhir. Hasil perundingan oleh van Mook akan dilaporkan kepada pemerintah Belanda.

Dengan perantaraan Clark Kerr sekali lagi kedua pemerintah mengadakan perundingan di Hooge Veluwe (negeri Belanda). Pemerintah RI mengirimkan delegasi yang terdiri dari Mr. Suwandi, dr. Sudarsono, dan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo.[95] Delegasi RI berangkat ke Nederland pada tanggal 4 April 1946 bersama-sama dengan Sir Archibald Clark Kerr. Delegasi Belanda yang diajukan dalam perundingan ini terdiri atas Dr. van Mook, Prof. Logemann, Dr. Idenburgh, Dr. van Roijen, Prof. van Asbeck, Sultan Hamid II dari Pontianak, dan Surio Santoso.

Di dalam perundingan itu ternyata pihak Belanda menolak konsep hasil pertemuan Sjahrir-van Mook-Clark Kerr di Jakarta, terutama usul Clark Kerr tentang pengakuan *de facto* atas kedaulatan Republik Indonesia di Jawa dan Sumatra. Pihak Belanda hanya bersedia memberikan pengakuan *de facto* kedaulatan RI atas Jawa dan Madura, itu pun masih dikurangi dengan

---

[94] Alastair M. Taylor, *Indonesian Independence and the United Nations*, 1960, hlm. 20–21

[95] Drs. Susanto Tirtoprodjo, S.H., *Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia*, 1963, hlm. 19

daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Sekutu, sedangkan Republik Indonesia masih harus tetap menjadi bagian dari kerajaan Nederland. Demikian juga campur tangan Republik dalam menentukan perwakilan daerah-daerah di luar daerah Republik, ditolak oleh Belanda. Perundingan yang berlangsung selama 10 hari itu (14–25 April 1946) telah gagal. Untuk sementara waktu hubungan Indonesia-Belanda terputus. Akan tetapi, pada tanggal 2 Mei 1946 van Mook kembali membawa usul pemerintahnya yang terdiri atas tiga pokok:

1. Pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai bagian dari Persemakmuran(*Gemeenebest*)Indonesia yang berbentuk federasi (serikat).
2. Persemakmuran Indonesia Serikat di satu pihak dengan Nederland, Suriname, dan Curacao di lain pihak akan merupakan bagian-bagian dari Kerajaan Belanda.
3. Pemerintah Belanda akan mengakui *de facto* kekuasaan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatra, dikurangi dengan daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Inggris dan Belanda.

Usul Belanda itu pada tanggal 17 Juni 1946 ditolak oleh pemerintah RI karena dianggap tidak mengandung sesuatu yang baru. Adapun usul balasan pemerintah RI adalah:

1. Republik Indonesia berkuasa *de facto* atas Jawa, Madura, Sumatra, dan ditambah dengan daerah-daerah yang dikuasai oleh tentara Inggris dan Belanda.
2. Republik Indonesia menolak ikatan kenegaraan (dalam hal ini *gemeenebest, rijksverband, koloni, trusteeship territory* atau federasi ala Vietnam) dan menghendaki penghentian pengiriman pasukan Belanda ke Indonesia, sedangkan pemerintah Republik Indonesia tidak akan menambah pasukannya.
3. Pemerintah Republik menolak suatu periode peralihan (*over gangs-periode*) di bawah kedaulatan Belanda.[96]

Sesudah Kabinet Sjahrir dijatuhkan oleh Persatuan Perjuangan dalam sidang KNIP di Solo pada pertengahan bulan Februari 1946, sebenarnya Persatuan Perjuangan mengharapkan Tan Malaka ditunjuk sebagai formatur kabinet sesuai dengan mayoritas suara dalam KNIP. Akan tetapi, Presiden Soekarno menunjuk kembali Sutan Sjahrir (Partai Sosialis) sebagai formatur. Penunjukan kembali Sutan Sjahrir menimbulkan ketidakpuasan pada

[96] Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Lukisan Revolusi Rakjat Indonesia*, 1949, hlm. 354 dst.

kelompok PP. Sebelum Presiden menunjuk Sjahrir, Adam Malik menghadap Presiden meminta agar mandat menyusun kabinet diserahkan kepada Tan Malaka. Presiden menolak. Penolakan untuk menunjuk Tan Malaka sebagai formatur juga disampaikan Wakil Presiden Hatta kepada Chairul Saleh.[97] Keinginan kelompok PP ini berdasarkan mayoritas suara dalam KNIP dan merupakan kesempatan yang baik untuk menghantam lawan politiknya. Namun, Presiden dan Wakil Presiden mempertahankan Sutan Sjahrir karena kebijakan politiknya sesuai dengan garis mereka, khususnya mengenai politik diplomasi. Sebaliknya, Tan Malaka dan kelompoknya menghendaki konfrontasi total terhadap Belanda.

Pada tanggal 12 Maret 1946 Kabinet Sjahrir II terbentuk, dan mengumumkan program kabinetnya, yang antara lain akan meneruskan politik diplomasinya, dengan mengajukan 12 pasal Usul Balasan terhadap keterangan pemerintah Belanda. Persatuan Perjuangan tetap meneruskan oposisinya terhadap Kabinet Sjahrir, sekalipun program kabinet baru ini merupakan kompromi antara pendapat Persatuan Perjuangan dan haluan politik pemerintah. Program kabinet baru itu tidak memuaskan golongan Tan Malaka dan kawan-kawannya. Oleh karena itu, pemerintah mencurigai Tan Malaka dan kawan-kawannya yang menginginkan kedudukan dalam pemerintahan.

Pada tanggal 17 Maret 1946 beberapa tokoh politik, khususnya dari Persatuan Perjuangan ditangkap. Pemerintah menyatakan bahwa tujuan penangkapan adalah untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar sebagai akibat dari tindakan pemimpin-pemimpin politik itu, karena terdapat bukti-bukti bahwa mereka akan mengacaukan, melemahkan, dan memecah persatuan. Mereka dianggap tidak melakukan oposisi yang sehat dan loyal, tetapi hendak melemahkan pemerintah. Dikatakan ada indikasi kuat bahwa mereka akan mengubah susunan negara di luar undang-undang.[98] Mereka yang ditangkap adalah Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Tjokrosujoso, Chairul Saleh, Muh. Yamin, Suprapto, dan Wondoamiseno.[99] Dengan ditangkapnya para pemimpin PP ini praktis organisasi PP lumpuh. PP dibubarkan pada tanggal 4 Juni 1946, tetapi pengikut Tan Malaka masih berusaha melakukan oposisi terhadap pemerintah. Pada tanggal 3 Juli 1946 mereka memaksa Presiden Soekarno membentuk pemerintahan yang sesuai dengan konsep mereka. Usaha itu gagal.

---

97 Adam Malik, *Mengabdi Republik*, jilid II, 1978, hlm. 167–168; Mohammad Hatta, *Memoir*, 1978, hlm. 481–482

98 *Kedaulatan Rakjat*, 1 April 1946. Pengumuman Pemerintah sebagai penjelasan dari Pengumuman Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Maret 1946

99 *Ibid.*, Adam Malik, *op. cit.*, 1978, hlm. 168

Kekalutan dan pergolakan politik di dalam negeri merupakan kesempatan bagi pihak Belanda untuk melakukan tekanan politik dan militer terhadap Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Malino, dengan tujuan untuk membentuk "negara-negara" di daerah-daerah yang baru diserahterimakan oleh Inggris dan Australia. "Negara-negara" itu kelak dijadikan imbangan terhadap RI, untuk memaksa RI agar menerima bentuk federasi sebagaimana yang diusulkan oleh pihak Belanda. Kecuali konferensi Malino, juga diselenggarakan konferensi di Pangkalpinang khusus untuk golongan minoritas. Konferensi Malino diadakan pada tanggal 15–25 Juli 1946 dan dilanjutkan dengan Konferensi Denpasar tanggal 17 sampai 24 Desember 1946 yang akhirnya melahirkan Negara Indonesia Timur (NIT), sedangkan Konfrensi Pangkal Pinang diadakan pada tanggal 1 Oktober 1946. Tekanan militer dilakukan oleh Belanda dengan jalan terus-menerus mengirimkan pasukan ke Indonesia.

Pihak Inggris sekali lagi menawarkan jasa baiknya untuk menjadi perantara dua negara yang bertikai ini. Kali ini Inggris mengutus Lord Killearn untuk menjadi penengah. Pada bulan Agustus 1946 Lord Killearn datang ke Indonesia dan menemui Menteri Luar Negeri Sjahrir. Pokok pembicaraan Sjahrir-Killearn menyangkut tiga hal. *Pertama*: masalah gerakan militer dan gencatan senjata. Untuk ini akan dikirim perwira Tentara Republik Indonesia (TRI) yang akan membahas detail teknis dengan Markas Besar Sekutu di Jakarta. *Kedua*: mengenai masalah *Relief of Allied Prisoners of War and Internees* (RAPWI). Sjahrir juga menjanjikan akan mengirim perwira TRI yang ditugasi untuk membahas masalah tersebut. *Ketiga*: masalah golongan minoritas. Indonesia berjanji tetap melindungi golongan minoritas.[100]

Sebagai realisasi dari pertemuan Sjahrir-Lord Killearn pada tanggal 17 September, dikirim delegasi TRI dalam rangka membicarakan gencatan senjata. Delegasi dipimpin oleh Jenderal Mayor Sudibjo beserta enam anggota, antara lain, Komodor S. Surjadarma, Kolonel M. Simbolon, dan Kolonel T.B. Simatupang.[101] Dalam perundingan dengan Sekutu ini delegasi Indonesia mengajukan nota yang terdiri atas lima pasal yang meliputi:

1. gencatan senjata secara total di darat, laut, dan udara;
2. penghentian pemasukan pasukan Belanda ke Indonesia;
3. jaminan dari Sekutu bahwa Sekutu tidak akan menyerahkan senjata-senjatanya kepada pihak Belanda;

---

[100] *Kedaulatan Rakjat*, 20 Agustus 1946

[101] *Kedaulatan Rakjat*, 16 September 1946

4. pembukaan atau kebebasan memakai jalan di darat, laut, dan udara oleh pihak RI;
5. penyingkiran orang Jepang baik sipil maupun militer dari seluruh Indonesia.[102]

Sementara itu, Kabinet Sjahrir II berada dalam status demisioner setelah ia diculik oleh pengikut Tan Malaka di Solo tanggal 26 Juni 1946. Sjahrir memang dibebaskan kembali, tetapi kekuasaan pemerintahan untuk sementara langsung dipegang oleh Presiden Soekarno. Namun, Presiden kemudian menunjuk Sjahrir kembali untuk menyusun kabinet baru.[103] Pada tanggal 2 Oktober 1946 Kabinet Sjahrir III dilantik. Kabinet ini melangsungkan perundingan dengan pihak Belanda. Kemudian perundingan gencatan senjata diteruskan. Setelah berunding selama lima hari (9–14 Oktober 1946) akhirnya dicapai persetujuan sebagai berikut:

1. Delegasi Indonesia, Inggris, dan Belanda setuju mengadakan gencatan senjata atas dasar kedudukan militer pada waktu kini dan atas dasar kekuatan militer.
2. Disetujui pembentukan Komisi Gencatan Senjata yang bertugas untuk menimbang dan memutuskan pelaksanaan gencatan senjata dan pengaduan terhadap pelanggarnya.
3. Komisi ini bekerja sampai 30 November 1946. Susunan Komisi Gencatan Senjata adalah: Mr. Wright, Mayor Jenderal A.C. Mansergh, Kolonel Laut Cooper, Komodor Udara Stevens, Mayor Jenderal Formann (Inggris); dr. Sudarsono, Jenderal Soedirman, Laksamana Muda M. Nazir, Komodor (Jenderal Mayor) Surjadarma (Indonesia); Dr. Idenburgh, Letnan Jenderal Spoor, Laksamana Pinke, dan Mayor Jenderal Kengen (Belanda).
4. Disetujui bersama membentuk subkomisi teknis yang terdiri atas para kepala staf militer Inggris, Indonesia, dan Belanda.

Tugas subkomisi ini adalah untuk selekasnya memberi perintah penghentian tembak-menembak, menyusun instruksi untuk pedoman pelaksanaan gencatan senjata, membentuk badan arbitrase, dan lain-lain.[104]

Pembicaraan masalah gencatan senjata tersebut baru pada tingkat politik dan persetujuan yang dicapai masih berupa prinsip, belum menyangkut hal-hal yang bersifat teknis.[105] Oleh karena itu, Panglima Besar

---

[102] *Ibid.*, 25 September 1946

[103] *Ibid.*, 1 Oktober 1946

[104] *Kedaulatan Rakjat*, 10 Oktober 1946

[105] *Ibid.*, 18 Oktober 1936

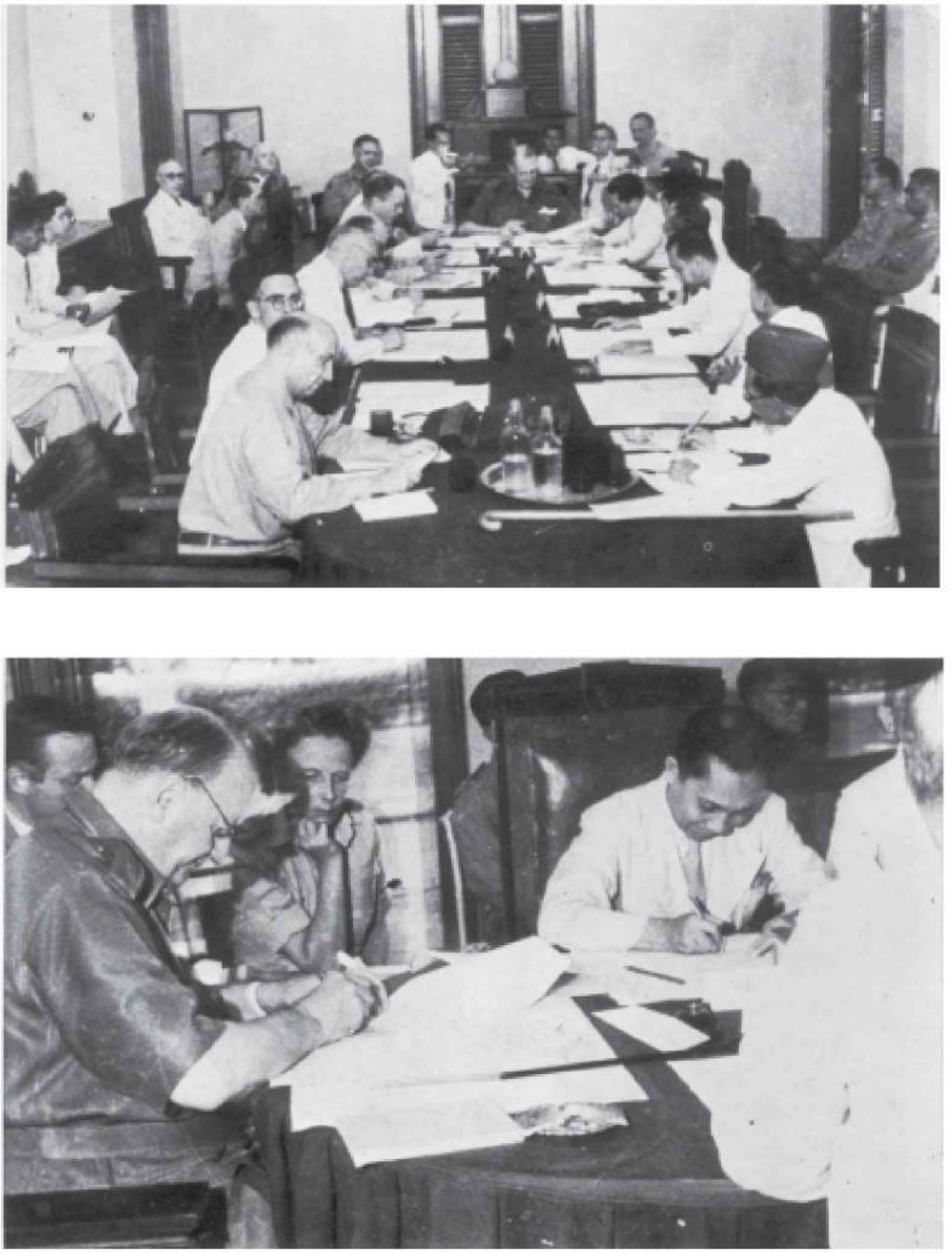

Gambar 2.14 Suasana perundingan antara Indonesia dan Belanda yang diketuai diplomat Lord Killearn sebagai penengah di Jakarta, pada tanggal 7 Oktober 1946 (atas). Pada gambar bawah tampak antara lain Perdana Menteri Sjahrir (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

Soedirman dalam pidato radionya menegaskan bahwa dalam masalah gencatan senjata ini belum ada perintah penghentian tembak-menembak, sekalipun telah tercapai persetujuan. Sesuai dengan persetujuan itu, pada akhir November dan awal Desember diadakan perundingan-perundingan untuk menetapkan garis demarkasi. Perundingan itu dihadiri oleh anggota Komisi Gencatan Senjata dari kedua belah pihak, tetapi tidak menghasilkan suatu keputusan.

Sesudah Kabinet Sjahrir III dilantik, mulai lagi dilaksanakan perundingan dengan Belanda, dan delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sjahrir sendiri. Anggota-anggota delegasi tiga orang, yaitu Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprodjo, dan dr. A.K. Gani, disertai dengan anggota-anggota cadangan Mr. Amir Sjarifuddin, dr. Sudarsono, dan dr. J. Leimena. Dasar pokok perundingan adalah program politik pemerintah, yang terdiri atas:

1. berunding atas dasar pengakuan negara Republik Indonesia, merdeka 100%;
2. mempersiapkan rakyat dan negara di segala lapangan, politik, militer, ekonomi, dan sosial untuk mempertahankan RI.[106]

Pihak Belanda menyusun Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Prof. Schermerhorn. Anggota-anggotanya adalah Max van Poll, F. de Boer, dan H.J. van Mook.

Perundingan dimulai pada tanggal 7 Oktober di Jakarta.[107] Dalam perundingan ini Komisi Jenderal mengajukan usul-usul yang tidak dapat diterima oleh pemerintah RI. Usulnya ialah jika pemerintah RI tidak dapat menerima masa peralihan, diusulkan agar RI mau menerima kedudukan sebagai negara bagian. Usul lainnya adalah agar RI memulihkan keamanan dan ketertiban sehingga benar-benar menguasai keadaan di daerah yang dikuasainya. Pihak RI menyatakan bahwa alam pikiran Komisi Jenderal masih diliputi oleh *rijkseenheids-gedachte* (gagasan kesatuan kerajaan Belanda), sehingga menuntut RI tetap dalam lingkungan Belanda. Hal inilah yang menjadi sebab untuk sementara perundingan mengalami penundaan. Kemudian, pihak RI kembali mengajukan usul mengenai pengembalian hak-hak milik swasta Belanda. Karena tawaran ini dianggap menguntungkan, Komisi Jenderal menyatakan akan berkonsultasi dengan pemerintahnya.

Akhirnya perundingan diteruskan dan diadakan di Linggajati, sebelah selatan Cirebon, pada tanggal 10 November 1946. Hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15 November dan tersusun sebagai naskah

[106] *Ibid.*, 7 Oktober 1946

[107] *Ibid.*, 8 Oktober 1946

persetujuan yang terdiri atas 17 pasal. Naskah ini kemudian diparaf oleh kedua belah pihak untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah masing-masing. Isi naskah antara lain adalah:

1. Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi, yang dinamai Negara Indonesia Serikat (NIS).
2 Pemerintah NIS akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia-Belanda.[108]

Setelah naskah diparaf, timbul pelbagai macam tanggapan dari masyarakat Indonesia, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Mengenai masalah ini, Sutan Sjahrir menyatakan harapannya agar naskah persetujuan dapat diterima, sehingga tenaga 75 juta rakyat dapat digunakan dengan lebih rasional. Naskah persetujuan bukanlah untuk ditafsirkan sehingga menimbulkan anggapan seolah-olah merupakan surat wasiat yang menentukan hidup-mati negara dan tidak dapat diubah-ubah. Naskah sekadar alat untuk mencari jalan baru bagi perjuangan di masa mendatang dan sebagai batu loncatan guna mencapai tujuan, yaitu memperbaiki kedudukan politik. Hal ini dapat memberikan harapan kepada rakyat, untuk menunjukkan jalan yang baik, yang tidak semata-mata berupa status yuridis, tetapi kedudukan politik.[109]

Beberapa partai politik menyatakan menentang yaitu Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Wanita, Angkatan Comunis Muda (Acoma), Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, Partai Rakyat Jelata, sedangkan yang mendukung adalah PKI, Pesindo, BTI, Lasykar Rakyat, Partai Buruh, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katholik. Dewan Pusat Kongres Pemuda menyatakan tidak menentukan sikap terhadap naskah persetujuan demi menjaga persatuan di kalangan organisasi mereka yang berbentuk federasi. Golongan yang menolak Linggajati bergabung di dalam Benteng Republik Indonesia, yang terdiri dari partai serta organisasi tersebut di atas.[110]

Pertentangan pendapat mengenai pro dan kontra naskah berlangsung terus. Untuk mendobrak jalan buntu pemerintah bertindak untuk mengubah perimbangan kekuatan di dalam KNIP supaya cenderung kepada sikap pro-Linggajati. Pada bulan Desember dikeluarkan Peraturan Presiden No. 6/ 1946, yang bertujuan untuk menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Peraturan Presiden No. 6 ini menggariskan pembebasan para pejabat

---

[108] Lihat Lampiran 3

[109] *Soeara Merdeka*, 3 Desember 1496

[110] *Soeara Merdeka*, 3 Desember 1946

negara yang aktif sebagai anggota KNIP, seruan kepada partai-partai politik besar untuk memilih calon-calonnya sejumlah dua kali lipat jumlah hak perwakilan mereka dalam KNIP, serta penambahan wakil-wakil dari daerah di luar Jawa dan Madura.[111]

Peraturan Presiden ini juga mendapat tantangan keras dari partai-partai yang anti-Linggajati termasuk PNI dan Masyumi. Kedua partai besar itu berpendapat bahwa Peraturan Presiden tersebut tidak sah, karena setelah ada kabinet, Presiden tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat legislatif.[112] Mereka juga menggugat bahwa dalam membuat peraturan itu Badan Pekerja KNIP tidak diajak berunding. Hal ini mereka anggap pemerkosaan terhadap hak-hak rakyat.[113] Namun, partai-partai pemerintah, khususnya Partai Sosialis, menyatakan bahwa Peraturan Presiden tersebut adalah sah berdasarkan hak prerogatif Presiden, meskipun Badan Pekerja KNIP juga menentang keras peraturan tersebut. Oleh karena BP KNIP menolak untuk mengesahkan PP tersebut, pemerintah berusaha meminta pengesahan dalam sidang pleno KNIP. Sidang diadakan di Malang dari tanggal 25 Februari sampai 5 Maret 1947. Dari pidato-pidato yang disampaikan oleh anggota KNIP pemerintah menyimpulkan bahwa PP itu akan ditolak.[114] Untuk menyelamatkannya, Wakil Presiden Hatta menyampaikan pidato yang memberikan kepada KNIP hanya dua pilihan: menerima PP atau mencari presiden dan wakil presiden baru. Hatta mengancam bahwa ia dan Presiden Soekarno akan mengundurkan diri kalau PP itu ditolak.[115]

Akhirnya sidang menerima Peraturan Presiden tersebut, dan pada tanggal 28 Februari 1947 dilantik sejumlah 232 anggota baru KNIP.[116] Dengan penambahan suara itu pemerintah berhasil memperoleh dukungan dari KNIP untuk meratifikasi Persetujuan Linggajati. Akhirnya, pada tanggal 25 Maret 1947 naskah Persetujuan itu ditandatangani oleh kedua delegasi yang mewakili pemerintah masing-masing.

Sekalipun Persetujuan Linggajati telah ditandatangani, hubungan Indonesia-Belanda tidak bertambah baik. Perbedaan tafsir mengenai beberapa pasal Persetujuan Linggajati, menjadi pangkal perselisihan. Apalagi, pihak Belanda secara terang-terangan melanggar gencatan senjata

---

[111] *Ibid.*, 4 Januari 1947

[112] *Ibid.*, 15 Januari 1947

[113] Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, 1974, hlm. 51

[114] *Ibid.*, 4 Januari 1947

[115] Parada Harahap, *Saat Bersedjarah*, 1951, hlm. 20

[116] *Ibid.*, hlm. 45; *Soeara Merdeka*, 14 Februari 1947

yang telah diumumkan bersama pada tanggal 12 Februari 1947, seminggu sebelum Persetujuan Linggajati ditandatangani. Pada tanggal 27 Mei 1947 Komisi Jenderal menyampaikan nota kepada pemerintah RI melalui misi Idenburgh. Nota tersebut harus dijawab oleh pemerintah RI dalam tempo dua minggu.[117] Isi nota tersebut adalah:

1. membentuk pemerintahan peralihan bersama;
2. mengadakan garis demiliterisasi dan menghentikan pengacauan-pengacauan di daerah yang bergabung dalam Konferensi Malino, seperti NIT, Kalimantan, Bali, dan sebagainya;
3. mengadakan pembicaraan bersama mengenai pertahanan negara. Untuk membangun pertahanan yang modern, sebagian Angkatan Darat, Laut, dan Udara Belanda akan tetap tinggal di Indonesia;
4. membentuk alat Kepolisian yang dapat melindungi kepentingan dalam dan luar negeri;
5. mengawasi secara bersama hasil-hasil perkebunan dan devisa.[118]

Pada tanggal 8 Juni 1947 pemerintah RI menyampaikan nota balasan yang terdiri atas empat pokok, meliputi pemerintahan peralihan/politik, masalah militer, masalah ekonomi, dan masalah-masalah lainnya.

Dalam masalah politik pemerintah menyatakan bersedia mengakui Negara Indonesia Timur sekalipun pembentukannya tidak selaras dengan Linggajati. Status Borneo harus dibicarakan bersama oleh RI-Belanda. RI tetap diakui sebagaimana termaktub dalam Persetujuan Linggajati. Dalam bidang militer pemerintah RI menyetujui demiliterisasi daerah demarkasi antara kedua pihak dengan menyerahkan penjagaan zona bebas-militer itu kepada polisi. Peta demarkasi dikembalikan pada situasi 24 Januari 1947. Tentara kedua belah pihak harus diundurkan dari daerah demarkasi ke kota garnisun masing-masing. Penyelenggaraan Pasal 16 tentang pertahanan Indonesia Serikat, adalah urusan Negara Indonesia Serikat sebagai kewajiban nasional dan pada dasarnya harus dilakukan oleh tentara nasional sendiri. *Gendarmerie* bersama ditolak.[119]

Sementara itu, terjadi lagi krisis politik. Pada tanggal 27 Juni 1947 Sjahrir mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, terbentuk pada tanggal 3 Juli 1947. Seperti Sjahrir, Amir pun berusaha mendekati tuntutan Belanda. Namun, Belanda tetap tidak puas. Pada tanggal 15 Juli mereka menyampaikan nota yang bersifat ultimatif. Selain mengulang tuntutan

---

[117] *Merdeka,* 30 Mei 1947

[118] *Bahtera,* no. 7, tahun I, 15 Juni 1947, hlm. 2

[119] *Merdeka,* 10 Juni 1947

untuk membentuk *gendarmerie* bersama, Belanda menuntut pula agar paling lambat tanggal 16 Juli RI harus menghentikan semua bentuk permusuhan dan TNI harus mengundurkan diri sejauh sepuluh kilometer dari batas daerah yang diduduki Belanda. Pengunduran itu sudah harus selesai selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juli 1947.[120] Nota yang bersifat ultimatif itu tidak pernah dijawab oleh Kabinet Amir Sjarifuddin. Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkanAgresi Militer Pertama.

3. Politik Bebas-Aktif

Di dalam rangka menjalin kerja sama dan hubungan baik dengan bangsa lain di dunia, prinsip politik bebas-aktif dipegang teguh di dalam praktik. Setelah diproklamasikannya kemerdekaan, pemerintah RI merintis hubungan dengan luar negeri. Secara formal hubungan itu dilakukan secara bilateral antara RI dan Belanda. Hubungan itu menjadi berkembang sesudah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut campur. Keterlibatan PBB untuk membahas masalah RI dimulai dengan usul utusan Republik Sosialis Ukraina pada tanggal 21 Januari 1946. PBB diminta untuk campur tangan karena ternyata tentara lnggris yang bertugas di Indonesia telah menggunakan tentara Jepang untuk menindas gerakan rakyat Indonesia. Hal ini merupakan suatu ancaman terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan diminta untuk membentuk panitia penyelidik. Usul ini belum dapat diputuskan oleh PBB, tetapi Perang Kemerdekaan Indonesia telah membuka mata dunia dan menembus tembok forum PBB. Ketika perjuangan diplomasi meningkat kepada suatu pengakuan *de facto* terhadap RI atas Jawa dan Sumatra oleh Belanda dalam Persetujuan Linggajati 25 Maret 1947, RI mulai mendapat perhatian internasional.

Ketegangan-ketegangan baru timbul karena perbedaan tafsir mengenai isi persetujuan itu. Pihak Belanda tidak dapat menahan diri, dan melancarkan agresi militer pada tanggal 21 Juli 1947. Akibatnya, timbul reaksi dari seluruh dunia. Masalah Indonesia dimasukkan ke dalam acara sidang Dewan Keamanan pada 31 Juli 1947. Australia mengusulkan atas dasar Pasal 39 Piagam PBB agar Dewan Keamanan mengambil tindakan terhadap suatu usaha yang mengancam perdamaian dunia. Agresi militer yang dilakukan terhadap RI oleh Belanda itu merupakan suatu ancaman terhadap perdamaian. Kedudukan Republik Indonesia semakin kuat dan dunia luar mengakui perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu organisasi internasional tersebut memberikan jasa-jasa baik untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dengan Belanda.

---

[120] Pusat Sejarah TNI, *Sejarah TNI*, jilid I, 2000, hlm. 139

Dalam sidang Dewan Keamanan tanggal 1 Agustus 1947 dikeluarkan satu seruan kepada kedua belah pihak yang sedang bermusuhan (Indonesia-Belanda) untuk segera menghentikan tembak-menembak; menyelesaikan pertikaian dengan cara perwasitan (*arbitrase*) atau dengan cara-cara damai yang lain, dan melaporkan hasil-hasil penyelesaian itu kepada Dewan Keamanan. Demikianlah, pada tanggal 4 Agustus 1947 berlaku gencatan senjata dan kemudian meningkat kepada perundingan.[121]

Suatu teks resmi keputusan Dewan Keamanan yang disampaikan kepada Republik Indonesia berbunyi "supaya membuat laporan yang sesungguhnya tentang keadaan di Indonesia; pembentukan suatu komisi yang akan memberikan jasa-jasa baik untuk membantu penyelesaian pertikaian Indonesia dengan Belanda.[122] Sehubungan dengan itu, Duta Keliling Republik Indonesia, Sutan Sjahrir, diminta oleh sidang Dewan Keamanan berbicara di muka sidang Dewan Keamanan menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia dan perihal politik penjajahan Belanda. Sjahrir meminta kepada Dewan Keamanan untuk membentuk suatu badan *arbitrase* yang tidak memihak.[123]

Dewan Keamanan kemudian menawarkan suatu komisi jasa-jasa baik sebagai suatu kompromi, yang kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN seorang dipilih oleh Indonesia, seorang dipilih oleh Belanda, sedangkan kedua anggota itu memilih anggota ketiga. Pemerintah Republik Indonesia memilih Australia, pemerintah Kerajaan Belanda meminta Belgia, sedang kedua negara tersebut memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Pemerintah Australia menunjuk Richard C. Kirby, Hakim Mahkamah Arbitrase dari Persemakmuran Australia sebagai wakilnya untuk duduk dalam Komisi itu. Pemerintah Belgia menunjuk Paul van Zeeland (mantan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri) sebagai wakilnya, dan Pemerintah Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank B. Graham, seorang pendidik yang terkenal, pada waktu itu Rektor Universitas North Carolina.[124] Bahwa negara-negara yang dipilih untuk duduk dalam KTN menerima hal itu dengan sungguh-sungguh dibuktikan dengan orang-orang yang ditunjuk sebagai wakilnya, yakni orang-orang yang berpengalaman dan berkaliber besar.

KTN dapat bekerja secara efektif setelah para anggotanya tiba di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947. Sejak dikeluarkannya resolusi

---

[121] *Detik dan Peristiwa*, hlm. 29 dan seterusnya

[122] Panitia Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri, *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945–1970*, 1971, hlm. 77 dst.

[123] Panitia Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri, *op. cit.*

[124] Mohammad Roem, *Bunga Rampai dari Sedjarah*, 1972, hlm. 76

Dewan Keamanan pada tanggal 1 November 1947, tugas KTN bukan lagi hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang militer. Kontak pendahuluan yang diadakan oleh KTN dengan kedua pihak yang bersengketa itu menunjukkan bahwa tiap-tiap pihak tidak mau bertemu di wilayah yang dikuasai pihak lainnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak akhirnya menerima baik tawaran pemerintah Amerika Serikat yang menyediakan kapal angkut pasukan *Renville* sebagai tempat netral.

Sementara menunggu tibanya kapal *Renville,* KTN memulai usahanya untuk memecahkan pertikaian di bidang militer, khusus yang menyangkut daerah demarkasi dan gencatan senjata. Pihak Belanda menginginkan agar lebih dahulu diselesaikan pertikaian militer daripada penyelesaian masalah politik.

Sebaliknya pihak Indonesia menghendaki kedua masalah itu, masalah militer dan politik, diselesaikan secara bersama-sama, sebab justru kekuatan TNI dan gerilya rakyat menjadi tulang punggung perjuangan politik Republik Indonesia. Pihak Indonesia bersedia menghentikan gerilya asal pengakuan kedaulatan Republik Indonesia mendapat penyelesaian yang wajar. Pihak Belanda menginginkan dihentikannya perlawanan rakyat lebih dahulu, baru kemudian merundingkan pemecahan masalah politik yang menjadi sumber sengketa. Akhirnya, setelah melalui beberapa kompromi, kedua belah pihak setuju membentuk suatu komisi bersama baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Secara resmi perundingan baru dimulai tanggal 8 Desember 1947 di kapal *Renville* yang berlabuh di perairan Jakarta. Dengan melalui prosedur yang sulit, KTN berunding secara informal dan melakukan desakan-desakan secara halus terhadap kedua belah pihak. Menjelang hari Natal 1947, KTN mengajukan kepada kedua belah pihak Pesan Natal atau *Christmas Message* berisi dua hal pokok:

Pertama: *immediate standfast and cease-fire* (berdiri tegak di tempat dan penghentian tembak-menembak dengan segera);

Kedua: pengulangan kembali pokok dasar Persetujuan Linggajati.

Akhirnya, pada tanggal 17 Januari 1948, naskah Persetujuan Renville ditandatangani, yang antara lain berisi: "persetujuan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda; dan enam pokok prinsip tambahan untuk perundingan guna mencapai penyelesaian politik".[125] Persetujuan Renville mengalami nasib yang sama dengan Persetujuan Linggajati. Belanda melakukan aksi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948.

---

[125] Panitia Penulisan Sedjarah Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, hlm. 33 (lihat Lampiran 2)

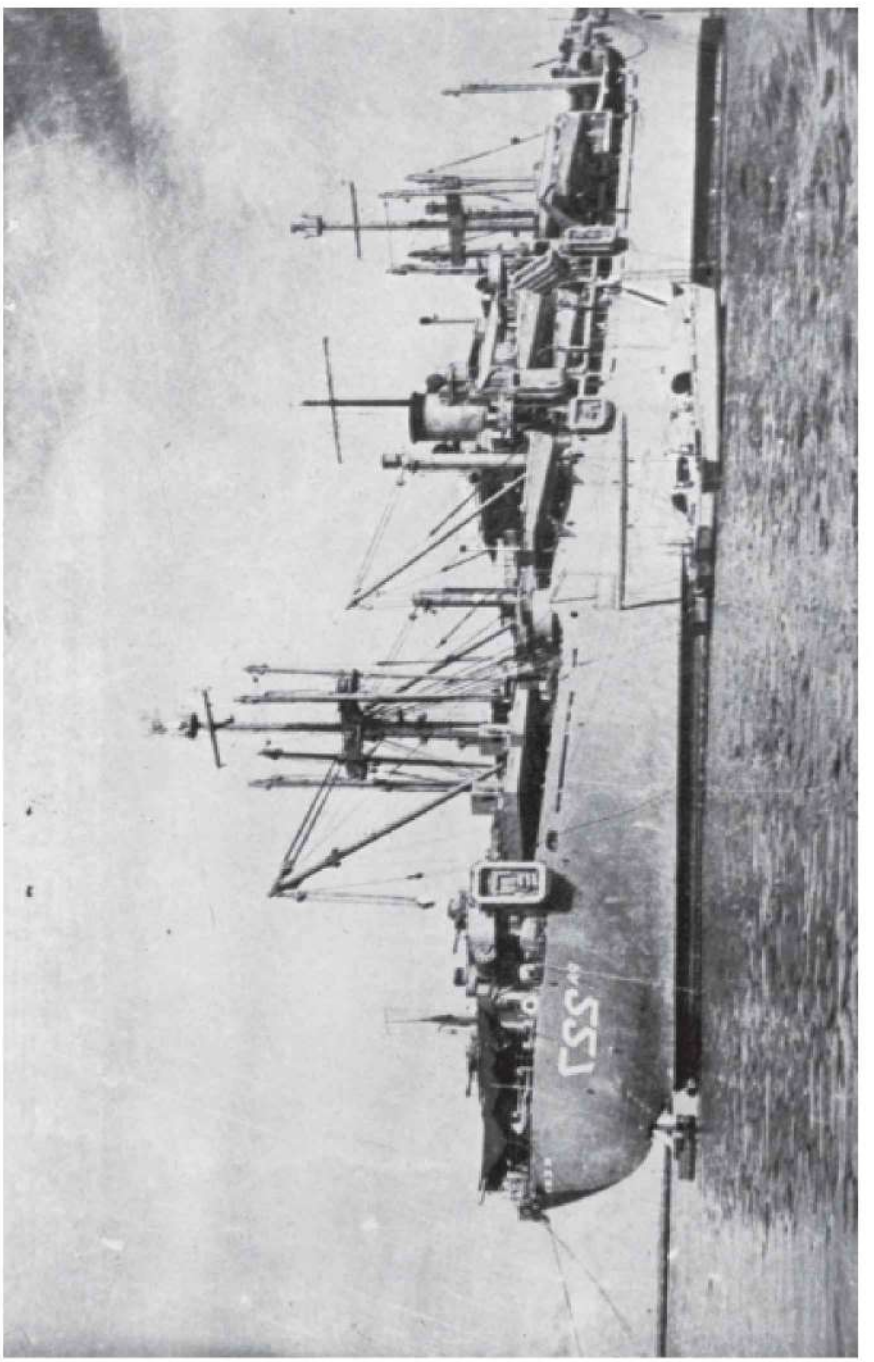

Gambar 2.15 Kapal Perang Angkatan Laut Amerika, *USS Renville*, yang digunakan sebagai tempat perundingan Indonesia-Belanda yang menghasilkan "Perjanjian Renville" (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

KTN melaporkan kepada Dewan Keamanan bahwa Belanda nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan bersidang pada 22 Desember 1948, dan menghasilkan resolusi; mendesak supaya permusuhan segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditawan segera dibebaskan. KTN ditugasi menjadi pengawas pelaksanaan resolusi itu.

Pada waktu Dewan Keamanan bersidang lagi pada tanggal 7 Januari 1949, tampak sekali bahwa pendapat umum dunia terhadap pihak Belanda makin lama makin memburuk. Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, tanggal 23 Januari 1949 atas nama Konferensi Asia di New Delhi menuntut dipulihkannya Republik Indonesia kepada keadaan semula, ditarik mundurnya tentara Belanda, diserahkannya kedaulatan kepada rakyat Indonesia, dan diperluasnya wewenang KTN. Konferensi New Delhi ini diprakarsai oleh Perdana Menteri India dan dihadiri oleh wakil-wakil negara-negara Afghanistan, Australia, Burma, Sri Lanka, Mesir, Etiopia, India, Iran, Irak, Lebanon, Pakistan, Filipina, Saudi Arabia, Suriah, dan Yaman sebagai peserta; dan wakil dari negara-negara Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Muang Thai sebagai peninjau.

Para peserta Konferensi New Delhi merupakan suatu unsur yang cukup besar dalam lingkungan PBB. Oleh karena itu, sudah logis bila Dewan Keamanan memberikan perhatian yang wajar kepada tuntutan konferensi New Delhi ini. Demikianlah suara dari 16 negara Asia, Afrika, Arab, dan Australia berkumandang di Dewan Keamanan, sehingga pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan menerima suatu resolusi yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

a. Segera melakukan gencatan senjata.
b. Pemimpin-pemimpin Republik Indonesia segera dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta.

Resolusi itu untuk pertama kalinya menentukan dengan jelas garis-garis dan jangka waktu "penyerahan" kedaulatan dari tangan Belanda ke pihak Indonesia, dan meluaskan wewenang KTN yang namanya diubah menjadi *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI). Oleh karena Republik Indonesia dengan jujur menjalankan politik damai dan bersedia berunding untuk menyelesaikan soal-soal Indonesia atas prinsip Indonesia Merdeka dan siap berperang untuk membela diri apabila diserang, perjuangan Republik Indonesia mendapat simpati dunia internasional di forum PBB.

D. Menghadapi Agresi Militer Belanda

1. Strategi Diplomasi yang Gagal

Agresi terbuka Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 menimbulkan reaksi yang hebat dari dunia. Pada tanggal 30 Juli 1947 pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan. Permintaan itu diterima baik dan pada tanggal 31 Juli dimasukkan sebagai acara pembicaraan Dewan Keamanan. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak, yang dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu, untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dibentuk Komisi Konsuler, yang anggota-anggotanya terdiri dari para konsul jenderal yang ada di Indonesia. Komisi Konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Dr. Walter Foote dan beranggotakan Konsul Jenderal Cina, Konsul Jenderal Belgia, Konsul Jenderal Prancis, Konsul Jenderal Inggris, dan Konsul Jenderal Australia.[126] Komisi Konsuler ini kemudian diperkuat dengan personalia militer Amerika Serikat dan Prancis sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan, Komisi Konsuler menyatakan bahwa sejak tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus pasukan Belanda masih mengadakan gerakan militer. Pemerintah Indonesia menolak garis demarkasi yang dituntut oleh pihak Belanda berdasarkan kemajuan pasukan-pasukannya setelah perintah gencatan senjata. Perintah penghentian tembak-menembak tidak memuaskan. Belum ada tindakan yang praktis untuk menyelesaikan masalah penghentian tembak-menembak untuk mengurangi jumlah korban yang jatuh.[127]

Dewan Keamanan yang memperdebatkan masalah Indonesia akhirnya menyetujui usul Amerika Serikat bahwa untuk mengawasi penghentian permusuhan ini harus dibentuk sebuah komisi jasa-jasa baik. Indonesia dan Belanda dipersilakan masing-masing memilih satu negara yang dipercaya untuk mengawasi penghentian tembak-menembak. Dua negara yang terpilih oleh Indonesia dan Belanda dipersilakan memilih satu negara untuk ikut serta sebagai anggota komisi. Pemerintah Indonesia meminta Australia menjadi anggota komisi, sedangkan Belanda memilih Belgia, dan kedua negara yang terpilih ini memilih Amerika Serikat. Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat oleh Dr. Frank Graham. Komisi PBB ini di Indonesia dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN). Dalam masalah militer, KTN mengambil inisiatif, tetapi dalam masalah politik hanya memberikan saran dan usul, tidak mempunyai

[126] *Merdeka*, 15 Oktober 1947

[127] *Ibid.*, 11 Oktober 1947

hak untuk memutuskan persoalan politik. KTN mulai bekerja di Indonesia pada bulan Oktober 1947. Setelah KTN mengadakan pembicaraan dengan kedua pemerintah, akhirnya disepakati untuk kembali ke meja perundingan. Belanda mengajukan Jakarta sebagai tempat berunding, tetapi ditolak oleh pihak Republik. Republik menganggap bahwa di Jakarta tidak ada kebebasan untuk menyatakan pendapat dan tidak ada jawatan RI yang aktif, akibat agresi militer.[128] Republik menginginkan perundingan diselenggarakan pada suatu tempat di luar daerah pendudukan Belanda. KTN mengambil jalan tengah dan mengusulkan agar kedua belah pihak menerima tempat perundingan di atas sebuah kapal Amerika Serikat yang disediakan atas perantaraan KTN.

Sebelum itu, sebetulnya sudah dibentuk komisi untuk melaksanakan gencatan senjata yang disebut *Komisi Teknis*. Anggota-anggota *Komisi Teknis* dari pihak Republik di bawah pimpinan Menteri Kesehatan dr. Leimena. Anggota-anggotanya adalah Mr. Abdul Madjid, Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo, Mayor Jenderal Didi Kartasasmita, Kolonel Simbolon, dan Letnan Kolonel Bustomi.[129] Komisi Teknis pihak Belanda dipimpin oleh van Vredenburgh dengan anggota-anggota Mayor Jenderal Buurman van Vreden, Kolonel Drost, Mr. Zulkarnaen, Letnan Kolonel Surio Santoso, Dr. Stuyt, dan Dr. P.J. Koets.[130] Di dalam perundingan Komisi Teknis yang telah dilakukan, usul mengenai daerah bebas militer dianggap kurang praktis dan Belanda tetap menuntut dipertahankannya garis van Mook, yakni suatu garis yang menghubungkan pucuk-pucuk pasukan Belanda yang dimajukan sesudah keluarnya perintah Dewan Keamanan untuk menghentikan tembak-menembak. Kemudian mereka mengeluarkan pernyataan dari tempat perundingan di Kaliurang, yang berisi: dilarang melakukan sabotase, intimidasi, pembalasan dendam, dan tindakan yang semacam terhadap orang-orang, golongan, dan harta benda kedua pihak.

Setelah jatuhnya Kabinet Sjahrir III, Presiden menunjuk Mr. Amir Sjarifuddin untuk menyusun kabinet baru. Setelah Amir berhasil menyusun kabinet baru, mulailah delegasi menghadapi perundingan dengan Belanda. Delegasi Republik dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin sendiri, dengan Ali Sastroamidjojo sebagai Wakil Ketua. Anggota-anggota terdiri dari dr. Tjoa Siek Ien, Sutan Sjahrir, H.A. Salim, Mr. Nasrun, dan dua anggota cadangan masing-masing Ir. Djuanda dan Setiadjit, serta 32 orang penasihat.[131] Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo, dengan

---

[128] *Merdeka*, 22 Oktober 1947

[129] *Ibid.*, 3 November 1947; Kolonel M. Simbolon dan Letnan Kolonel Bustomi dari Sumatra

[130] *Min Pao*, 18 November 1947

[131] *Merdeka*, 29 Oktober 1947

Gambar 2.16 Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim sedang menghadiri Sidang Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 1947 (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945–1949*, 1985)

Mr. H.A.L. van Vredenburgh sebagai wakil ketua. Anggota-anggotanya terdiri dari Dr. P.J. Koets, Mr. Dr. Ch. R. Soumokil, Tengku Zulkarnaen, Mr. Adjie Pangeran Kartanegara, Mr. Masjarie, Thio Thian Tjiong, Mr. A.H. Ophuyzen, dan A. Th. Baud sebagai sekretaris.[132]

Perundingan yang diselenggarakan di atas kapal angkutan pasukan milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS *Renville* dibuka pada tanggal 8 Desember 1947 di bawah pimpinan Herremans, wakil Belgia di dalam KTN.[133] Sementara itu, perundingan Komisi Teknis mengalami jalan buntu sebab Belanda menolak saran KTN untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB. Pihak Belanda tidak mau merundingkan soal-soal politik selama masalah gencatan senjata belum beres.[134] Karena macetnya perundingan, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan keterangan mengenai sebab-sebab kemacetan tersebut. Dinyatakan bahwa pihak Belanda hanya menyetujui hal-hal yang menguntungkan dirinya. Kecepatan gerakan pasukan Belanda menunjukkan keinginan untuk menduduki daerah seluas mungkin dengan dalih mengadakan operasi-operasi "pembersihan" berdasarkan kedudukan mereka yang terdepan. Namun, situasi pada tanggal 4 Agustus 1947 menunjukkan bahwa pihak Belanda hanya menduduki kota-kota, sedangkan di luar kota pemerintah RI dan TNI tetap utuh dan aktif. Garis depan RI ada di mana-mana, di kantung-kantung di belakang kedudukan Belanda yang terdepan.

Untuk mengatasi kemacetan perundingan ini KTN mengajukan usul baru, supaya tiap-tiap pihak berunding dahulu dengan KTN. Kedua belah pihak setuju dan diadakan perundingan pendahuluan dengan KTN. Dari hasil perundingan itu KTN menyimpulkan bahwa persetujuan Linggajati dapat dijadikan dasar perundingan. Namun, terdapat kesulitan yakni mengenai gencatan senjata, karena Belanda tetap menekankan tuntutannya pada garis demarkasi van Mook, sedangkan pihak Republik menolak. Wakil Australia mengusulkan diadakannya daerah demiliterisasi yang diawasi oleh polisi. Pasukan masing-masing diundurkan sejauh 10 kilometer. Kemudian, KTN mengajukan usul politik yang didasarkan atas persetujuan Linggajati, yaitu:

a. kemerdekaan bagi bangsa Indonesia;
b. kerja sama Indonesia-Belanda;
c. suatu negara yang berdaulat atas dasar federasi;
d. uni antara Indonesia Serikat dan bagian lain Kerajaan Nederland.

---

[132] *Kedaulatan Rakjat*, 9 November 1947

[133] *Merdeka*, 9 November 1947

[134] *Ibid.*, 11 Desember 1947

Sebagai balasan usul KTN pihak Belanda mengajukan 12 prinsip politik untuk disampaikan kepada pihak Indonesia. Prinsip Belanda adalah: pengurangan pasukan, menghidupkan kegiatan ekonomi, tetapi dalam usul itu tidak disebutkan masalah penarikan tentara Belanda. Belanda menyatakan bahwa 12 prinsip politik itu adalah usaha yang terakhir. Apabila ditolak, mereka tidak dapat lagi melanjutkan perundingan, dan RI diberi waktu 48 jam untuk menjawabnya. KTN menyadari bahwa sikap ultimatif pihak Belanda itu mengakibatkan situasi yang sangat berbahaya. Untuk mengatasi hal itu, Dr. Graham mengajukan 6 prinsip tambahan untuk mencapai penyelesaian politik. Pemerintah RI mendapat jaminan KTN bahwa kekuasaan Republik tidak akan berkurang selama masa peralihan sampai diserahkannya kedaulatan oleh Belanda kepada negara federal Indonesia. RI mau menerima prinsip-prinsip KTN itu karena dalam poin 4 dari 6 prinsip itu dinyatakan bahwa antara enam bulan sampai satu tahun sesudah ditandatanganinya persetujuan politik akan diadakan plebisit di seluruh Indonesia di bawah pengawasan KTN untuk menentukan apakah rakyat berhasrat bergabung dengan Republik atau tidak. Pihak Belanda juga berjanji akan menerima prinsip yang diajukan oleh KTN apabila pihak RI menyetujui sampai batas waktu 9 Januari 1948. Akhirnya, pada tanggal 17 Januari 1948 kedua belah pihak bertemu kembali di atas kapal *Renville* untuk menandatangani persetujuan gencatan senjata dan prinsip-prinsip politik yang telah disetujui bersama dengan disaksikan oleh KTN.

Sementara perundingan berlangsung, pihak Belanda berusaha terus membentuk negara-negara boneka. Konferensi Jawa Barat II diselenggarakan di Bandung pada tanggal 16–19 Desember 1947 untuk menentukan status Jawa Barat. Konferensi ini mendapat tantangan dari rakyat Jawa Barat sendiri. Mereka menyatakan bahwa Jawa Barat adalah bagian dari RI dan status Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dengan RI.[135] Selain itu, Belanda juga membentuk Komite Indonesia Serikat sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Beel pada 19 Desember 1947 dan membentuk "negara" Sumatra Timur.[136]

Pada saat perundingan berlangsung, diadakan *reshuffle* Kabinet Amir Sjarifuddin.[137] Tujuan pemerintah adalah untuk memperkuat kabinetnya dalam rangka menghadapi perundingan dengan Belanda. Sekalipun Kabinet Amir ini merupakan kabinet koalisi yang kuat, setelah Kabinet Amir

---

[135] *Merdeka,* 22 Desember 1945

[136] *Merdeka,* 22 Desember 1945

[137] Hasil *reshuffle* kabinet tanggal 12 November 1947 adalah Partai Sosialis 7 kursi, Masyumi 5 kursi, PNI 7 kursi, PSII 5 kursi, PBI, PKI, Partai Katholik, Parkindo, Badan Kongres Pemuda masing-masing 1 kursi, golongan tidak berpartai 5 kursi. Jumlah 37 kursi, *Merdeka,* 13 November 1947

menerima Persetujuan *Renville,* kembali partai-partai politik menentangnya. Masyumi yang merupakan pendukung utama kabinet, menarik kembali menteri-menterinya. Tindakan ini diambil karena Masyumi berpendapat bahwa Amir Sjarifuddin menerima begitu saja ultimatum Belanda atas dasar 12 prinsip politik dan 6 tambahan dari KTN. Tindakan Masyumi didukung oleh PNI. Sebagai hasil sidang Dewan Partai tanggal 18 Januari 1948, PNI menuntut supaya Kabinet Amir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. PNI menolak Persetujuan *Renville* karena persetujuan itu tidak menjamin dengan tegas kelanjutan dan kedudukan Republik. Kabinet Amir yang hanya didukung oleh Sayap Kiri tidak berhasil dipertahankan, dan pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Sjarifuddin menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden.

2. Konsolidasi Kekuatan Bersenjata

Di bidang perjuangan bersenjata, sejak pemerintah menyatakan terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945 yang ditunjuk sebagai pemimpin tertingginya adalah Suprijadi. Suprijadi adalah tokoh pemberontak tentara Peta terhadap Jepang di Blitar pada bulan Februari 1945. Ternyata Suprijadi tidak pernah tampil dan tidak pernah menduduki posnya.

Wajarlah jika di kalangan TKR terasa adanya kekosongan pemimpin tertinggi yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada pertengahan bulan November 1945 diadakan musyawarah TKR yang dihadiri oleh para panglima divisi dan komandan resimen dari seluruh Jawa.[138] Dalam permusyawaratan itu yang terpilih sebagai pengganti Suprijadi ialah Kolonel Soedirman, Panglima Divisi V, Banyumas, sedangkan Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo terpilih (kembali) sebagai Kepala Staf Umum. Hampir sebulan kemudian, pada tanggal 18 Desember 1945 Presiden mengumumkan pengangkatan Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal.[139] Setelah diangkatnya Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar, pada bulan Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat mengalami dua kali perubahan, mula-mula menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).[140]

Pada tanggal 23 Februari 1946 pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden tentang Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara. Panitia bertugas menyusun peraturan mengenai bentuk Kementerian Pertahanan

---

[138] T.B. Simatupang, *Laporan dari Banaran*, 1960, hlm. 198–199

[139] *Tentara Keamanan Rakjat*, no. 1, th. I, 10 Januari 1946, hlm. 2

[140] *Ibid.*, no. 3, th. I, tanggal 10 Februari 1946, hlm. 1

dan bentuk kekuatan serta organisasi tentara, serta kedudukan laskar atau badan-badan perjuangan. Panitia menyelesaikan tugasnya pada tanggal 17 Mei 1946 dan menyampaikan hasilnya yang kemudian disetujui oleh Presiden. Di bawah Menteri Pertahanan terdapat Markas Tertinggi dan Direktorat Jenderal Bagian Militer. Sebagai Panglima Besar ditunjuk Jenderal Soedirman dan sebagai Kepala Markas Besar Umum Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo. Jumlah divisi diperkecil. Di Jawa 10 divisi yang semula ada dikurangi menjadi 7 divisi, sedangkan di Sumatra yang semula 6 divisi menjadi 4 divisi. Mengenai badan-badan perjuangan setelah dibentuknya Dewan Pertahanan Negara dikeluarkan Peraturan No. 19. Peraturan ini menyatakan bahwa semua badan-badan perjuangan ditempatkan di bawah satu biro dalam lingkungan Kementerian Pertahanan, yaitu Biro Perjuangan. Peraturan itu kemudian ditegaskan kembali oleh Maklumat Menteri Pertahanan 4 Oktober 1946, tentang pembentukan Dewan Kelaskaran Pusat dan Dewan Kelaskaran Daerah yang dipimpin oleh Biro Perjuangan.[141]

Pada tanggal 5 Mei 1947 dikeluarkan Penetapan Presiden yang memutuskan untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mempersatukan Tentara Republik Indonesia (TRI) dengan laskar-laskar ke dalam satu organisasi tentara. Pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah panitia yang dipimpin oleh Presiden sendiri, dengan dibantu oleh tiga orang wakil ketua, yakni Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima Besar dengan anggota-anggota terdiri dari Kepala Staf Umum MBT dan para pimpinan badan-badan perjuangan. Hasil kerja panitia adalah dikeluarkannya Penetapan Presiden tanggal 7 Juni 1947 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 3 Juni telah disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia, disingkat TNI. Dengan terbentuknya TNI kini tidak terdapat lagi dualisme antara tentara reguler dan formasi-formasi ireguler. TNI menjadi satu-satunya wadah bagi semua pejuang bersenjata.

Mula-mula TNI mempunyai pimpinan kolektif sebagai pemimpin tertinggi. Pucuk Pimpinan TNI adalah Panglima Besar Soedirman. Nama TNI ini memuaskan semua pihak, baik dari kalangan TRI maupun pelbagai laskar yang tetap menganggap dirinya bukan sebagai alat negara semata-mata, melainkan juga sebagai pejuang. Nama TRI dianggap sebagai sebutan untuk alat negara, tetapi TNI adalah alat bangsa Indonesia.[142] Penetapan Presiden tersebut baru dalam tahap perubahan nama saja, dan susunan organisasi TNI yang sempurna masih belum sempat disusun, ketika Belanda melancarkan aksi militernya.

---

[141] *Resimen Tentara Perdjoangan,* no. 1, th. I, Februari 1947, hlm. 6

[142] A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, I, 1968, hlm. 84–87

Adapun alat keamanan lainnya adalah Kepolisian Negara. Kepolisian Negara semula di bawah Kementerian Dalam Negeri, tetapi pada tanggal 26 Juli 1946 dikeluarkan Penetapan Pemerintah No. 11/SD tahun 1946 yang menetapkan bahwa Jawatan Kepolisian Negara dikeluarkan dari Kementerian tersebut dan berdiri sebagai jawatan sendiri di bawah Perdana Menteri.[143]

Sementara itu, pada tanggal 21 Juli 1947 pukul 00.00, Belanda memulai aksi militernya. Dalam waktu singkat Belanda berhasil menerobos garis pertahanan TNI. Kekuatan TNI dengan organisasi dan peralatannya yang sederhana tidak mampu menahan pukulan musuh yang serbamodern. Meskipun TNI sudah bersiap-siap untuk menyambut serangan Belanda apabila sewaktu-waktu pihak mereka melanggar *cease-fire*, sistem pertahanan linier memang tidak tepat untuk kondisi masa itu.[144]

E. Menumpas Pemberontakan Komunis

1. Pepolit, Biro Perjuangan, dan TNI Bagian Masyarakat

Usaha golongan kiri untuk menguasai Angkatan Perang dilakukan secara bertahap sejak Amir Sjarifuddin menjadi Menteri Pertahanan. Usaha pertama ialah memanipulasi badan pendidikan tentara yang dibentuk oleh Markas Tertinggi TKR. Pembentukan badan pendidikan ini diusulkan oleh beberapa perwira dalam Rapat Besar (Konferensi) TKR bulan November 1945. Usul tersebut disetujui oleh pimpinan TKR dan sebagai realisasinya dibentuk suatu komisi yang bertugas menyusun garis-garis besar pendidikan tentara. Anggota komisi terdiri atas enam orang.[145] Selain komisi dibentuk pula staf Badan Pendidikan Tentara, yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat.[146] Kedua badan itu pada bulan Februari 1946 berhasil merumuskan lima bidang pendidikan bagi TRI, meliputi: politik, agama, kejiwaan, sosial, dan pengetahuan umum. Anggota-anggota badan pendidikan itu kemudian diangkat sebagai perwira TRI.

Sejalan dengan perkembangan TRI, pada bulan Mei 1946 diadakan reorganisasi dalam tubuh TRI dan Kementerian Pertahanan. Dalam pertemuan dengan pemimpin TRI dan pemimpin laskar-laskar pada tanggal 24 Mei 1946, Menteri Pertahanan berhasil mendesak keinginannya, sehingga

---

[143] *Berita Repoeblik Indonesia*, no. 18–19, th. II, Agustus 1946, hlm. 215

[144] A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 90

[145] Anggota komisi: K.R.T. Soegiono Josodiningrat, Mr. Sunarjo, Mr. Kasman Singodimedjo Surjadarma, Kaprawi, dan Martono Tirtonegoro

[146] Anggota-anggota Staf Pendidikan: R. Sukono Djojopratignjo, Wijono, drg. Moestopo, Farid Ma'ruf, H. Abdullah Mukti, Anwar Tjokroaminoto, Soemarsono, *Kedaulatan Rakjat*, 22 Januari 1946; *Tentara Keselamatan Rakjat*, no. 2, th. I, 25 Januari 1946, hlm. 43

Badan Pendidikan ini dialihkan dari Markas Tertinggi TRI ke Kementerian Pertahanan.[147] Namanya diubah menjadi Staf Pendidikan Politik Tentara (Pepolit), yang akan dipimpin oleh opsir-opsir politik.[148] Pada tanggal 30 Mei 1946, 55 opsir politik dilantik oleh Menteri Pertahanan. Sebagai pimpinan Pepolit ditunjuk Sukono Djojopratignjo dengan pangkat letnan jenderal.

Rumusan pendidikan yang semula dianggap masuk akal itu, sejak berubah menjadi Pepolit ternyata menimbulkan persoalan baru dalam tubuh TRI. Para opsir politik ditugasi untuk merapatkan hubungan tentara dan rakyat. Pada tiap-tiap divisi diperbantukan lima orang opsir politik yang berpangkat letnan kolonel,[149] semuanya adalah anggota Pesindo, pendukung Amir Sjarifuddin. Pepolit ternyata dieksploitasi oleh Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin untuk kepentingan politiknya sehingga tumbuh menjadi semacam komisaris politik seperti pada Angkatan Perang Uni Sovyet, yang berkedudukan sejajar dengan para komandan pasukan. Oleh karena itu, ditolak oleh sebagian panglima divisi dan para komandan pasukan, karena dianggap sebagai penyebar ideologi komunis. Kolonel Gatot Subroto, misalnya, menolak kehadiran opsir politik di lingkungan divisinya. Akibatnya adalah aktivitas *Pepolit* ini merosot di daerah-daerah.

Sesuai dengan keputusan Panitia Besar Reorganisasi Tentara, pada bulan Mei 1946 Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin membentuk lembaga baru yaitu Biro Perjuangan dan dikukuhkannya Dewan Penasihat Pimpinan Tentara.[150] Biro Perjuangan adalah badan pelaksana dari Kementerian Pertahanan yang bertugas menampung laskar-laskar yang semula didirikan oleh partai-partai politik. Dibentuknya Biro Perjuangan ini dilihat dari segi ketahanan nasional sesungguhnya sangat menguntungkan pemerintah. Laskar-laskar atau badan-badan perjuangan yang semula terpecah-pecah di dalam pelbagai kelompok ideologi dan "anak" partai politik, dapat disatukan dan dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah akan memiliki potensi cadangan yang tangguh dan besar di samping tentara reguler.[151] Diharapkan adanya pembagian tugas yang serasi dan harmonis antara tentara reguler dan laskar-laskar rakyat sebagai partisan.[152] Biro Perjuangan juga akan merupakan pusat cadangan nasional yang menyalurkan dan mengatur tugas cadangan di dalam rangka ketahanan nasional. Tugas cadangan tidak semata-mata untuk bertempur, tetapi merupakan tenaga

---

147 *Antara*, 25 Mei 1946

148 *Kedaulatan Rakjat*, 28 Mei 1946

149 *Ibid.*, 30 Mei 1946

150 *Kedaulatan Rakjat*, 2 Mei 1946

151 Maklumat M.T. TKR, tanggal 6 Desember 1945

152 A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, jilid I, 1968, hlm. 158

yang aktif dan berperan di dalam masyarakat, seperti aktivitas menambah produksi.[153]

Namun, di dalam perkembangan selanjutnya Biro Perjuangan ini dijadikan arena adu kekuatan untuk menandingi tentara reguler. Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin berusaha keras menguasai biro ini untuk kepentingan politiknya. Pimpinan biro ini dipegang oleh kelompok yang seideologi dengan Amir Sjarifuddin, yaitu kelompok komunis. Mereka adalah Djokosujono dan Ir. Sakirman sebagai kepala dan wakil kepalanya, yang masing-masing mendapat pangkat jenderal mayor. Biro ini kemudian mendapat peran yang kuat setelah Kabinet Sjahrir mendapat tantangan dari kelompok *Persatuan Perjuangan;* terutama setelah terjadi penculikan atas diri Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan pemerintah menyatakan negara dalam keadaan bahaya.[154] Organisasi Biro Perjuangan diperluas. Pada bulan September 1946 diberi wewenang untuk mengoordinasikan barisan cadangan. Pada bulan Oktober 1946 tugasnya ditambah dengan mengoordinasikan Dewan Kelaskaran Seberang. Bahkan, mereka mewakili resimen-resimen kelaskaran dan Polisi Tentara Laskar yang berdiri sendiri secara vertikal di bawah Biro Perjuangan. Fungsi cadangan sebagaimana yang dikehendaki tidak terlaksana, bahkan dengan adanya Biro Perjuangan ini seakan-akan terdapat dua macam tentara.

Kelompok Amir yang memonopoli Biro Perjuangan ini memasukkan seluruh program dan konsepsi perjuangan partainya, sehingga biro ini lebih merupakan pendukung kekuatan politik Amir daripada suatu badan resmi pemerintah.[155] Akibatnya, terdapat dualisme dalam bidang pertahanan nasional. Di satu pihak terdapat tentara reguler di bawah pimpinan Jenderal Soedirman dan di pihak lain laskar-laskar yang secara *de facto* di bawah pimpinan tertinggi Menteri Pertahanan melalui Biro Perjuangan. Laskar-laskar mempunyai posisi dan tugas yang sama dengan TRI. Perbedaannya hanyalah TRI adalah milik nasional, sedangkan laskar-laskar adalah milik partai-partai politik.[156]

Keadaan semacam ini disadari oleh pemimpin nasional, yang kemudian menyatukan dua kekuatan itu menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada bulan Juni 1947. TNI dipimpin oleh sebuah badan yang disebut Pucuk

---

[153] *Siasat,* no. 14, th. I, 5 April 1947

[154] Pada tanggal 28 Juni 1946 Presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya dengan Undang-Undang No. 16/1946. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan dibentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Dewan Pertahanan Daerah (DPN). DPN mengeluarkan Peraturan Negara No. 9/1946 tentang Laskar yang Barisan. *Biro Perjuangan* adalah wadah dari Laskar, berhak membentuk Inspektorat Pusat dan Daerah.

[155] A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia,* jilid II, 1968, hlm. 41

[156] *Ibid.*, hlm. 83

Pimpinan TNI. Keanggotaannya bersifat kolektif. Dua orang di antaranya adalah tokoh komunis, yakni Ir. Sakirman dan Djokosujono. Dengan demikian, berakhirlah peran Biro Perjuangan. Akan tetapi, berakhirnya peran Biro Perjuangan ini tidaklah berarti berakhirnya usaha Amir Sjarifuddin untuk menghimpun kekuatannya. Sebagian besar laskar yang berideologi komunis tidak mau bergabung dengan TNI secara penuh. Mereka ditampung dalam suatu wadah yang diberi nama TNI Bagian Masyarakat yang dibentuk pada bulan Agustus 1947.[157]

Pemimpin TNI Bagian Masyarakat adalah Ir. Sakirman yang juga duduk dalam Pucuk Pimpinan TNI. Pada tanggal 26 Oktober 1947 TNI Bagian Masyarakat mengadakan konferensi. Wakil Perdana Menteri Setiadjit yang separtai dan sealiran dengan Amir Sjarifuddin menegaskan bahwa TNI Bagian Masyarakat adalah jembatan antara tentara dan rakyat dalam usaha mempersatukan tenaga dalam pertahanan serta memberikan pendidikan ideologi kepada tentara.[158] Rupanya adanya struktur organisasi Pucuk Pimpinan TNI yang bersifat kolektif dimanfaatkan oleh kelompok Amir Sjarifuddin. Dengan demikian, ia berhasil menghimpun kembali kekuatan di bawah naungan nama TNI, dengan konsepsi dan garis politik yang tetap.

Kebijakan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin ini memancing perdebatan sengit dalam sidang BP KNIP tanggal 12 November 1947. Beberapa anggota KNIP menuduh bahwa pembentukan TNI Bagian Masyarakat ini terlalu politis, tidak sesuai dengan konsepsi Pertahanan Rakyat Semesta. Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin dan Menteri Muda Pertahanan Arudji Kartawinata menyatakan adanya TNI Bagian Masyarakat dan Pepolit, merupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip pertahanan,yakni tentara harus mengenal politik, agar mereka sadar membela kepentingan politik, jika pada suatu saat pertentangan politik memuncak berubah menjadi perang.[159] Keterangan pemerintah tersebut mendapat tantangan keras dari PNI dan Masyumi. PNI menyatakan TNI Bagian Masyarakat bukanlah tentara, melainkan organisasi politik, karena hampir 100% pimpinannya berada di tangan Sayap Kiri. Diusulkan agar pimpinannya diubah dengan mengikutsertakan semua organisasi rakyat, sehingga tercipta suatu *fighting democracy*.[160] PNI setuju di dalam prinsip, tetapi menolak monopoli kepemimpinan Sayap Kiri. Pihak Masyumi sama sekali menolak bentuk itu bahkan menganjurkan agar TNI Bagian Masyarakat dibubarkan saja.[161]

---

[157] George M. Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, 1951, hlm. 261
[158] *Berita Indonesia*, 27 Oktober 1947
[159] *Merdeka*, 13 November 1947
[160] *Berita Indonesia*, 14 November 1947
[161] *Ibid.*, 10 November 1947

Gambar 2.17 Pawai badan-badan kelaskaran di Yogyakarta menyambut pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 1947 (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka)*

Pada hakikatnya TNI Bagian Masyarakat ini adalah Biro Perjuangan bentuk baru dan merupakan rangkaian usaha Amir Sjarifuddin untuk mempersenjatai kelompok organisasinya untuk tujuan jangka panjang serta mendapatkan biaya dari pemerintah. Anggota TNI Masyarakat pada masa Kabinet Amir telah mencapai jumlah 90.000 orang,[162] dirasionalisasi pada waktu Kabinet Hatta.

2. Oposisi Front Demokrasi Rakyat (FDR)

Sesudah Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh, Presiden Soekarno menunjuk Wakil Presiden Moh. Hatta untuk membentuk kabinet baru. Hatta berusaha membentuk kabinet koalisi dengan mengikutsertakan semua partai dalam kabinet untuk menggalang persatuan nasional. Kepada Sayap Kiri ditawarkannya tiga kursi tanpa portofolio. Akan tetapi, Sayap Kiri menuntut empat kursi, termasuk jabatan Menteri Pertahanan. Hatta tidak dapat mengabulkannya sebab akan ditentang oleh Masyumi. Akhirnya, pada tanggal 31 Januari 1948 Kabinet Hatta diumumkan dengan Hatta sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Kabinet ini didukung oleh Masyumi, PNI, Partai Katholik, dan Parkindo. Satu-satunya anggota Sayap Kiri yang duduk dalam kabinet ialah Supeno atas nama perseorangan. Ia menduduki jabatan Menteri Pembangunan dan Pemuda.

Amir Sjarifuddin yang tersingkir dari pemerintahan melancarkan oposisi terhadap Kabinet Hatta. Ia membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang merupakan gabungan partai dan organisasi kiri, yakni Partai Sosialis (PS), Partai Komunis Indonesia (PKI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Barisan Tani Indonesia (BTI). FDR menuntut agar Kabinet Hatta dibubarkan, diganti dengan Kabinet Parlementer. Mereka juga menuntut agar Persetujuan *Renville* yang justru diarsiteki oleh Amir Sjarifuddin, dibatalkan, perundingan dengan Belanda dihentikan, dan semua milik asing dinasionalisasikan tanpa ganti rugi. Oposisi juga dilakukan terhadap pelaksanaan reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Perang.

Pemerintah berusaha meredam oposisi ini melalui cara persuasif, di samping berikhtiar membangun kembali persatuan nasional. Penjajakan diadakan dengan FDR mengenai kemungkinan diadakannya *reshuffle* kabinet. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang untuk pertama kalinya diadakan di Yogya tanggal 20 Mei 1948 dimanfaatkan pemerintah untuk

---

[162] Moh. Hatta, "Rasionalisasi TNI dalam Tahun 1948", ceramah pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 28 Maret 1972 (Stensil)

mengadakan pertemuan dengan wakil partai-partai, termasuk FDR. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk menyusun program nasional. Untuk itu, dibentuk sebuah panitia diketuai oleh Mr. Tambunan dari Parkindo.[163]

Akan tetapi, suasana yang mulai membaik itu dirusak oleh siaran radio Moskow (Uni Sovyet) tanggal 28 Mei 1948. Dalam siaran itu disebutkan bahwa pemerintah Uni Sovyet sudah meratifikasi perjanjian mengenai pertukaran konsul dengan pemerintah RI sebagai hasil perundingan yang diadakan oleh Suripno dengan Duta Besar Uni Sovyet M.A. Sillin di Praha. Suripno disebut sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI.[164] Pemerintah menganggap siaran radio itu sebagai usaha Uni Sovyet untuk memperkuat posisi tawar FDR dalam menghadapi pemerintah dan sekaligus merusak perjanjian antara RI dan Belanda. Namun, agar tidak dianggap menghina Uni Sovyet, pemerintah tidak secara terang-terangan menolak perjanjian tersebut. Hatta hanya mengumumkan bahwa ratifikasi perjanjian itu ditunda sambil menunggu kedatangan Suripno. Pernyataan itu ditentang oleh FDR. Mereka menuduh pemerintah sudah tunduk kepada kemauan Belanda. Rakyat pun dihasut agar menggalang persatuan untuk mendukung perjanjian tersebut. Akibat sikap FDR itu, pertemuan yang direncanakan antara mereka dan Hatta tanggal 31 Mei 1948 untuk membahas *reshuffle* kabinet, menjadi gagal.

Program nasional yang disusun oleh Panitia Tambunan, setelah diadakan beberapa kali pembahasan dan perbaikan, pada tanggal 14 Juli disetujui oleh 20 partai, termasuk FDR. Salah satu isi program itu, sesuai dengan kehendak FDR, ialah menghapus tanah partikelir dan membagi-bagikan tanah yang tidak dikuasai pemerintah kepada rakyat. Perdana Menteri Hatta, dalam pernyataan tangga 27 Juli, mengatakan bahwa pemerintah menyetujui program tersebut sebab tidak bertentangan dengan rencana pemerintah. Akan tetapi, FDR mendesak agar program tersebut dijalankan oleh Kabinet Parlementer bukan Kabinet Presidensial seperti Kabinet Hatta. Berarti, Kabinet Hatta harus dibubarkan. Keinginan FDR ditentang oleh partai-partai lain yang menganggap kabinet tidak perlu diganti, bahkan *reshuffle* pun tidak perlu diadakan.

Setelah gagal menjatuhkan kabinet dengan memanfaatkan program nasional, pada bulan Juli itu juga FDR menyusun program sendiri yang mereka sebut "Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru". Program ini

---

[163] A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid VIII, 1979, hlm. 13–21

[164] A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia,* jilid VIII, 1979, hlm. 24–25

dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah tahap parlementer dengan cara memengaruhi BP KNIP agar mengeluarkan mosi untuk menjadikan program nasional sebagai program pemerintah yang harus dijalankan oleh kabinet parlementer. Selain itu, FDR akan mempercepat pembentukan front nasional dan menggerakkan front ini untuk menjatuhkan Kabinet Hatta. Jika kedua usaha ini gagal, FDR akan melakukan demontrasi besar-basaran yang diikuti oleh pemogokan umum.[165]

Tahap kedua (nonparlementer) yang berarti penggunaan kekerasan untuk merebut pemerintahan akan dilaksanakan jika tahap pertama tidak berhasil. Untuk melaksanakannya, FDR melakukan berbagai persiapan, antara lain menarik pasukan mereka yang tergabung dalam TNI dari garis depan, memindahkan pasukan ke daerah yang dianggap basis dan meninggalkan daerah yang tidak mungkin dipertahankan lagi. Persiapan lain ialah membentuk tentara rakyat sebagai tambahan kekuatan dan menarik pasukan mantan laskar yang tergabung dalam TNI. Termasuk pula ke dalam persiapan ialah menjadikan daerah Madiun sebagai pangkalan gerilya untuk jangka panjang dan Solo sebagai daerah kacau (*wild west*), sehingga perhatian pemerintah dicurahkan ke daerah ini. Dengan cara itu, FDR dapat lebih leluasa melakukan persiapan di Madiun.[166]

FDR memperkirakan 35% kekuatan Angkatan Perang berada di pihak mereka. Jumlah yang cukup besar itu dicapai berkat usaha Amir Sjarifuddin selama menjadi Menteri Pertahanan termasuk pembentukan TNI Bagian Masyarakat bulan Agustus 1947. Laskar Pesindo juga merupakan pendukung kuat mereka. Begitu pula Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) di Solo.

3. Pemogokan di Delanggu dan Kekacauan di Solo

Dalam usaha merongrong pemerintah di bidang ekonomi, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang merupakan organisasi massa yang tergabung dalam FDR menggerakkan pemogokan buruh pabrik sisal dan perkebunan kapas di Delanggu. Pemogokan yang dimulai tanggal 23 Juni 1948 itu melibatkan lebih dari 15.000 buruh. Mereka menuntut agar Badan Tekstil Negara (BTN) memberikan bahan pakaian dan makanan kepada buruh musiman, tidak hanya kepada buruh bulanan dan buruh harian.[167]

---

[165] Kahin, George McTurman, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, 1962, hlm. 341–342

[166] *Ibid.*, 1962, hlm. 270–271

[167] A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid VIII, 1979, hlm. 35

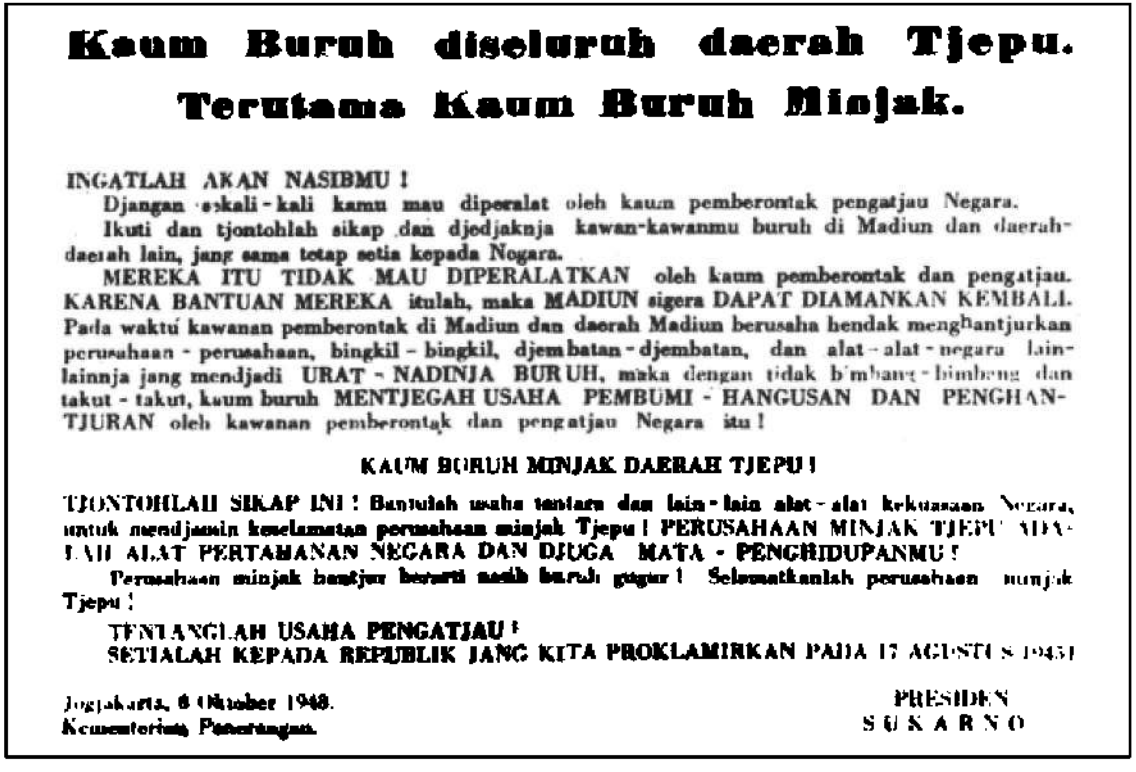

Kaum Buruh diseluruh daerah Tjepu.
Terutama Kaum Buruh Minjak.

INGATLAH AKAN NASIBMU !

Djangan sekali - kali kamu mau diperalat oleh kaum pemberontak pengatjau Negara.

Ikuti dan tjontohlah sikap dan djedjaknja kawan-kawanmu buruh di Madiun dan daerah-daerah lain, jang sama tetap setia kepada Negara.

MEREKA ITU TIDAK MAU DIPERALATKAN oleh kaum pemberontak dan pengatjau. KARENA BANTUAN MEREKA itulah, maka MADIUN sigera DAPAT DIAMANKAN KEMBALI. Pada waktu kawanan pemberontak di Madiun dan daerah Madiun berusaha hendak menghantjurkan perusahaan - perusahaan, bingkil - bingkil, djembatan - djembatan, dan alat - alat - negara lain-lainnja jang mendjadi URAT - NADINJA BURUH, maka dengan tidak bimbang - bimbang dan takut - takut, kaum buruh MENTJEGAH USAHA PEMBUMI - HANGUSAN DAN PENGHANTJURAN oleh kawanan pemberontak dan pengatjau Negara itu !

KAUM BURUH MINJAK DAERAH TJEPU !

TJONTOHLAH SIKAP INI ! Bantulah usaha tentara dan lain - lain alat - alat kekuasaan Negara, untuk mendjamin keselamatan perusahaan minjak Tjepu ! PERUSAHAAN MINJAK TJEPU ADALAH ALAT PERTAHANAN NEGARA DAN DJUGA MATA - PENGHIDUPANMU !

Perusahaan minjak hantjur berarti matih buruh gugur ! Selamatkanlah perusahaan minjak Tjepu !

TENTANGLAH USAHA PENGATJAU !
SETIALAH KEPADA REPUBLIK JANG KITA PROKLAMIRKAN PADA 17 AGUSTUS 1945 !

Jogjakarta, 6 Oktober 1948.
Kementerian Penerangan.

PRESIDEN
SUKARNO

Gambar 2.18 Seruan Presiden Soekarno kepada kaum buruh yang terlibat Pemberontakan PKI di Madiun (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka)*

Insjaflah ! **Sadarlah !**

SAUDARA SAUDARA KAUM BURUH, TANI, PEMUDA, DAN PRADJURIT JANG TURUT MEMBERONTAK DENGAN P.K.I./MUSO/AMIR.

—ooOoo—

Tahukah saudara/ bahwa MAKSUD PEMBERONTAKAN P.K.I./MUSO AMIR jang sebenarnja hendak merubahkan Negara Republik Indonesia jang kita proklamirkan bersama pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dipimpin oleh SUKARNO HATTA ???? Bahwa siasat pemberontakan mereka SAMA dengan SIASAT BELANDA ?????

Tahukah saudara/ bahwa dalam salah satu MARKAS KAUM PEMBERONTAKAN P.K.I./MUSO AMIR, diketemukan sedjumlah besar LENTJANA MERAH - PUTIH - BIRU dan sekantong TANDA/ PANGKAT TENTERA BELANDA ????

Tahukah saudara/ bahwa KAKI TANGAN NICA jang tadinja turut bertempur dikalangan kaum pemberontak telah lari bersembunji didaerah pendudukan Belanda dan dilindungi oleh tentera Belanda???? Seperti didaerah Tjandiroto???

Tahukah saudara/ bahwa dimalah satu Markas kaum pemberontak P.K.I./MUSO AMIR di Solo telah diketemukan BENDERA MERAH - PUTIH - BIRU ????

Tahukah saudara/ bahwa dikalangannya banjak MENJELIP DAN BERSEMBUNJI kaki tangan Nica jang dengan gini menghasut saudara/ untuk berchianat kepada Pemerintah Republik Indonesia jang sjah ????

Tahukah saudara/ bahwa PEMBUNUHAN/ DAN KEKEDJAMAN/ jang dilakukan oleh kaum pemberontak P.K.I./MUSO/AMIR adalah sebagian besar pekerdjaan jang di SENGADJA OLEH KAKI TANGAN MUSUH, UNTUK MERUSAK NEGARA kita dan melemahkan perdjuangan Republik melawan pendjadjahan Belanda ????

Oleh karena itu: I N S J A F L A H !!! dan S A D A R L A H !!!

Djangan mau dihasut dan ditipu oleh kaum P.K.I./MUSO/AMIR.

Kembalilah kepada djalan jang benar dan BANTULAH PEMERINTAH NEGARAMU untuk membasmi kaum pemberontak dengan kakis tangan Nica jang mengatjau tempat dan daerahmu. Rakjat didaerah pemberontakan seperti Madiun, Solo, Purwodadi, Tjepu JANG SUDAH DIAMANKAN KEMBALI oleh Tentera/Polisi kita, telah insjaf dan merasa tertipu oleh propaganda kaum pengatjau dan gembira menjambut tentera Pemerintah kembali untuk keselamatan Rakjat.

Bila kamu kembali kepada djalan jang benar dan membantu Pemerintah, kesalahanmu AKAN DIAMPUNI OLEH PEMERINTAH.

Tetapi bila kamu tetap engkar dan melawan terus, kamu AKAN DIBASMI OLEH TENTERA DAN POLISI PEMERINTAH, SAMPAI HABIS

Karena itu INSJAFLAH dan SADARLAH!!!

Djangan ikut merusak Negaramu sendiri !!!

Bantulah tentera kita !!! Tentera Republik Indonesia, mengembalikan keamanan didaerah/ saudara/ untuk keselamatan saudara/ semua.

Hidup REPUBLIK INDONESIA ! ! ! !

Hidup PRESIDEN SUKARNO/HATTA ! ! ! !

TETAP MERDEKA

KEMENTERIAN PENERANGAN Jogjakarta, 14-10-1948.

Gambar 2.19 Seruan Presiden Soekarno kepada kaum buruh yang terlibat Pemberontakan PKI di Madiun (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka)*

Untuk menyelidiki sebab-sebab pemogokan, BP KNIP membentuk Panitia Angket yang diketuai oleh Mr. Sartono. Kesimpulan panitia adalah, pemogokan tidak dapat dibenarkan. FDR pun segera mengadakan reaksi dengan mengerahkan pasukannya mengepung gedung KNIP sambil melepaskan tembakan-tembakan. Mereka menuntut agar Panitia Angket mengubah kesimpulannya.[168] Atas saran BP KNIP, pada tanggal 16 Juli 1948 Perdana Menteri Hatta mengadakan pertemuan dengan wakil SOBSI. Kesepakatan yang dicapai, mereka menghentikan pemogokan mulai tanggal 18 Juli. Beberapa tuntutan SOBSI dipenuhi, antara lain pembagian pakaian kepada buruh musiman, sedangkan bahan makanan akan diberikan hanya pada hari-hari mereka masuk kerja.[169]

Sebelum pemogokan Delanggu dapat diatasi, situasi di Solo mulai memanas. Pasukan TNI di kota ini ialah Divisi IV/Panembahan Senopati di bawah pimpinan Kolonel Sutarto. Selain itu, terdapat pula kesatuan lain, baik yang pro-FDR maupun yang anti-FDR. Pasukan pro-FDR adalah Laskar Pesindo, Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) pimpinan Letnan Kolonel Jadau, Laskar Buruh, Laskar Minyak, dan lain-lain yang berjumlah 19 kesatuan kelaskaran, dan yang anti-FDR adalah Barisan Banteng di bawah pimpinan dr. Muwardi yang juga merangkap sebagai pemimpin Gerakan Revolusi Rakyat (GRR). Pasukan lain lagi ialah Tentara Pelajar di bawah pimpinan Achmadi dan pasukan "hijrah" Siliwangi (pasukan resmi) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sadikin.

Beraneka ragamnya pasukan tersebut yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi pasukan pro-pemerintah dan pasukan anti-pemerintah dimanfaatkan PKI untuk menjadikan Solo daerah kacau. Pada tanggal 2 Juli 1948 terjadi pembunuhan terhadap Kolonel Sutarto. Pembunuhnya tidak diketahui, tetapi pihak Panembahan Senopati menuduh pembunuhan itu dilakukan oleh anggota Siliwangi. Dengan tuduhan itu, pasukan TLRI di bawah pimpinan Jadau menyerang Batalion Rukman (Siliwangi) di Tasikmadu. Serangan ini gagal. Namun, untuk menghindari bentrokan selanjutnya, Batalion Rukman dikembalikan ke Jawa Barat yang dengan sendirinya terpaksa melewati garis demarkasi. Peristiwa ini kelak diprotes oleh pihak Belanda.

Untuk mengimbangi ofensif FDR yang semakin meningkat, pemerintah membebaskan tokoh-tokoh pro-Tan Malaka yang dipenjarakan karena terlibat dalam Peristiwa 3 Juli 1946. Bahkan, Tan Malaka juga dibebaskan. Sebelum itu, para pengikut Tan Malaka yang masih bebas, pada tanggal 6 Juni 1948 mendirikan organisasi Gerakan Rakyat Revolusioner (GRR) di

[168] Pusat Sejarah ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia*, jilid II, 1992, hlm. 10

[169] A.H. Nasution, *op. cit.*, jilid VIII, 1979, hlm. 46

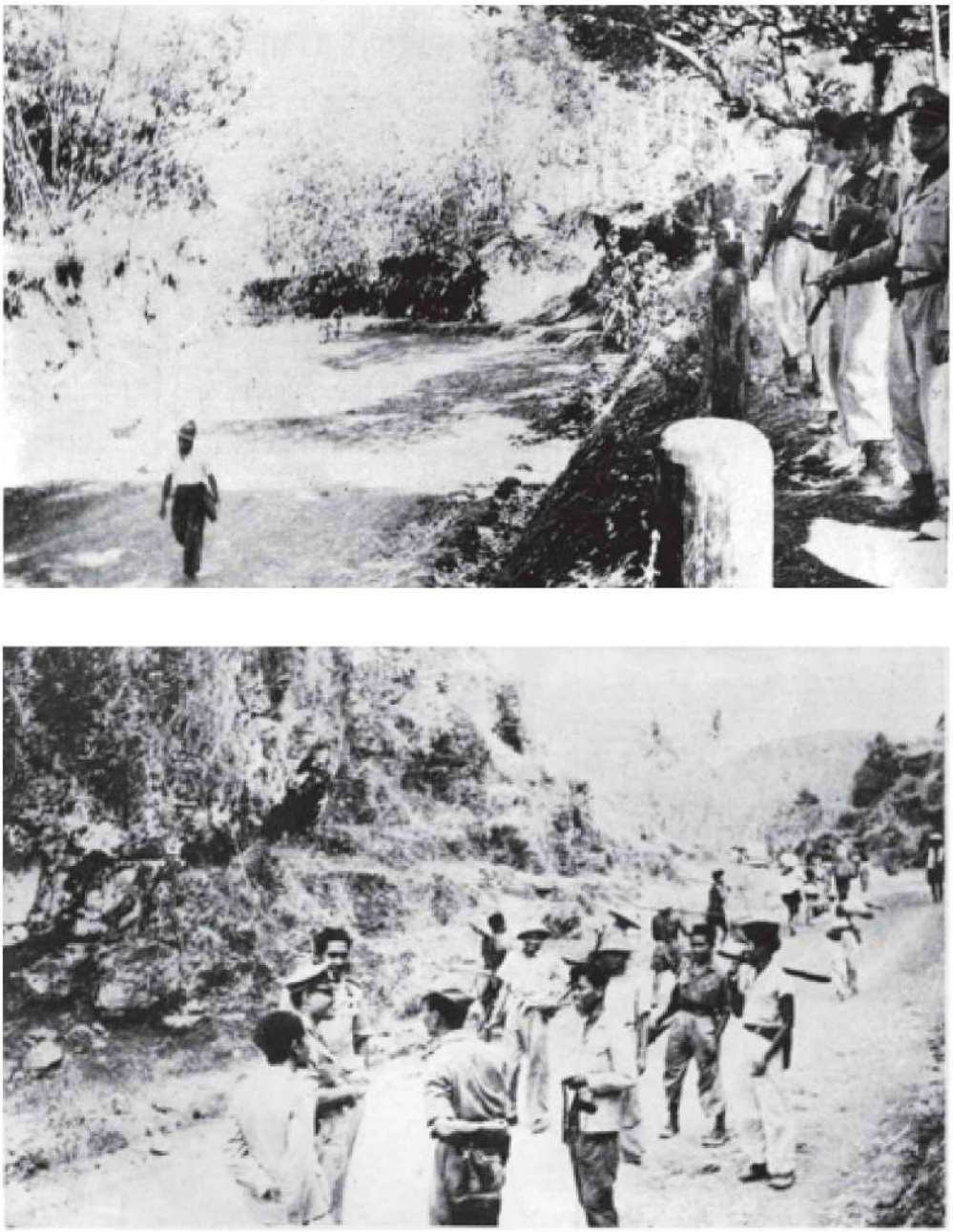

Gambar 2.20 Tindakan PKI bukan sekadar pengkhianatan, tetapi secara nyata merupakan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia di saat bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman Belanda. Pada kedua gambar ini tampak kesatuan-kesatuan TNI dan Polisi yang dikerahkan untuk menumpas pemberontakan PKI/FDR Madiun di Gunung Kidul (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

bawah pimpinan dr. Muwardi (ketua), Sjamsu Harja Udaja (wakil ketua), dan Chairul Saleh (sekretaris).

Antara GRR dan FDR terdapat beberapa kesamaan ideologi. Akan tetapi, antara keduanya terdapat perbedaan prinsipil. FDR berorientasi ke Moskow (komunis internasional), sedangkan GRR berorientasi ke dalam (nasional). GRR berpendapat bahwa sebelum kedaulatan RI diakui oleh dunia internasional, tidak mungkin RI memainkan perannya dalam kekacauan internasional (Perang Dingin). Sebaliknya, FDR ingin menyeret RI ke dalam blok Uni Sovyet.

Sementara itu, terjadi culik-menculik tanpa diketahui pihak mana yang melakukannya. Dua orang tokoh PKI diculik pada awal September, disusul dengan diculiknya Letnan Kolonel Suherman, perwira TNI Masyarakat dan seorang mayor yang ditugasi mencari Suherman. Pada tanggal 13 September 1948 orang-orang PKI menculik dan membunuh dr. Muwardi yang mengakibatkan pecahnya pertempuran antara Barisan Banteng dan pasukan FDR.

Pihak Panembahan Senopati sekali lagi menuduh anggota Siliwangi yang melakukan penculikan terhadap dua orang tokoh PKI dan Letkol Suherman. Letnan Kolonel Suadi yang menggantikan Kolonel Sutarto, mengultimatum Siliwangi agar mengembalikan orang-orang yang diculik itu. Akibatnya, pecah pertempuran antara pasukan Senopati dan Siliwangi. Pembunuhan yang dilakukan PKI terhadap dr. Muwardi menyebabkan pula terjadinya pertempuran antara Barisan Banteng dan Pesindo.

Untuk mengatasi kekacauan yang berlarut-larut itu, Presiden Soekarno menyatakan daerah Solo dalam keadaan bahaya. Untuk memulihkan keamanan dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, pada tanggal 17 September Kolonel Gatot Subroto diangkat sebagai Gubernur Militer Surakarta, Madiun, Semarang, dan daerah sekitarnya. Perintah Gatot Subroto yang dikeluarkan tanggal 18 September agar pasukan yang terlibat dalam permusuhan menghentikan tembak-menembak, ternyata tidak efektif lagi sebab pada hari yang sama PKI sudah melancarkan pemberontakan di Madiun.

4. "Jalan Baru" Musso

Musso, tokoh kawakan komunis yang cukup lama bermukim di Uni Sovyet, kembali ke Indonesia bersama Suripno pada tanggal 10 Agustus 1948. Tatkala bertemu Presiden Soekarno, Presiden memintanya agar bersedia membantu dengan memperkuat negara dalam melancarkan revolusi. Ia menjawab: *Ik kom hier om orde te scheppen*.[170] Ia segera menyusun

[170] Saya datang kemari untuk memperbaruinya

konsep yang disebut "Jalan Baru untuk Republik Indonesia" atau yang lebih dikenal sebagai "Jalan Baru Musso". Pokok isinya adalah kritik terhadap kebijakan politik yang dijalankan oleh pemimpin-pemimpin Komunis Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dinilainya salah besar.[171] Musso menegaskan bahwa dunia terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu imperialis di bawah Amerika Serikat dan kubu Komunis di bawah pimpinan Uni Sovyet. Perjuangan rakyat Indonesia adalah perjuangan menentang imperialis dan karena itu seharusnya Indonesia berada di pihak Uni Sovyet.

Ada tiga gagasan utama yang dikemukakan Musso. *Pertama*, membentuk front nasional untuk menghimpun kekuatan komunis dan nonkomunis di bawah pimpinan PKI. *Kedua*, mengubah PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis, dan yang *terakhir*, menyesuaikan perjuangan PKI dengan garis perjuangan Komunis Internasional (Komintern).[172] Tawaran PKI kepada PNI dan Masyumi untuk bersama-sama membentuk front nasional ditolak oleh kedua partai tersebut.[173] Di pihak lain, Amir Sjarifuddin berhasil memfusikan partai-partai dan organisasi massa beraliran kiri dengan terbentuknya PKI yang diperluas. Pada tanggal 1 September diumumkan pembentukan Politbiro PKI yang langsung dipimpin oleh Musso. Amir Sjarifuddin ditempatkan di sekretariat pertahanan. Beberapa tokoh muda, antara lain, Aidit, Lukman, dan Njoto diangkat sebagai anggota Politbiro. Sebaliknya, peran tokoh-tokoh tua seperti Sardjono dan Alimin, dikurangi.[174]

Sambil mengadakan konsolidasi ke dalam, Musso meningkatkan serangannya terhadap pemerintah. Ia menyatakan bahwa revolusi Indonesia adalah revolusi defensif, harus diganti dengan revolusi ofensif. Dalam salah satu pidato di Madiun, ia menuduh Hatta membawa Indonesia ke bawah kekuasaan imperialis. Tuduhan yang dilancarkan Musso itu dibantah oleh Hatta. Dalam sidang BP KNIP tanggal 2 September 1948 Hatta menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memihak salah satu kubu, baik Amerika maupun Uni Sovyet, "Mestikah kita bangsa Indonesia," kata Hatta, "yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tidak ada pendirian lain, yang harus kita ambil?" Pemerintah berusaha agar negara RI "tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi harus menjadi subjek yang berhak menentukan nasib sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri.[175]

---

[171] Pusat Sejarah ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia*, jilid II, 1991, hlm. 107

[172] Pusat Sejarah ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia*, jilid I, 1991, hlm. 84

[173] Kahin, *op. cit.*, 1962, hlm. 362

[174] Brackman, *Indonesian Communism: A History*, 1963, hlm. 85

[175] Hatta, *Mendayung Antara Dua Karang*, 1976, hlm. 17 – 18

5. Pemberontakan dan Penumpasannya

Menjelang pertengahan September 1948, PKI semakin mematangkan persiapannya di Madiun. Pasukan tempur ditempatkan antara lain di Saradan, Ponorogo, dan Ngawi. Kekuatan mereka diperkirakan dua belas batalion. Di Jawa Timur terdapat beberapa batalion dari Brigade 29 pimpinan Letnan Kolonel Dahlan dan pasukan TLRI pimpinan Laksamana Muda Atmadji. Daerah sekitar Gunung Liman di Pegunungan Wilis disiapkan sebagai tempat pengunduran apabila mereka terpaksa meninggalkan Madiun. Selain itu, PKI juga berusaha melumpuhkan lawan-lawan politiknya. Sebelas orang pejabat pemerintah dan tujuh tokoh partai, mereka bunuh di Madiun antara tanggal 10 sampai 18 September. Pembunuhan juga mereka lakukan di Magetan yang menelan korban seorang bupati serta sejumlah anggota TNI dan polisi.[176]

Pada tanggal 18 September 1948 PKI melancarkan pemberontakan di Madiun. Pasukan bersenjata mereka bergerak menguasai kantor-kantor pemerintahan, bank, dan kantor telepon. Mereka juga menduduki markas Sub-Teritoral Comando (STC), markas Staf Pertahanan Djawa Timur (SPDT), markas Corps Polisi Militer (CPM), dan kantor polisi, serta menawan beberapa orang perwira TNI, antara lain Letnan Kolonel Marhadi, Letnan Kolonel Wijono, Letnan Kolonel Sumantri, dan Mayor Rukmito Hedraningrat.

Di Balai Kota Madiun, PKI memproklamasikan berdirinya "Sovyet Republik Indonesia". Wali Kota Madiun, Supardi, diangkat menjadi residen, Kolonel Djokosujono sebagai gubernur militer, dan Letnan Kolonel Dahlan, Komandan Brigade 29, sebagai komandan komando pertempuran. Melalui Radio *Gelora Pemuda*, tokoh-tokoh PKI berpidato mendeskreditkan pemerintah dan berusaha memengaruhi rakyat agar mendukung mereka. Hatta dicaci maki sebagai fasis yang menindas para buruh dan petani. Djokosujono mengatakan bahwa bagian terpenting dari revolusi ialah membersihkan Tentara Republik Indonesia dari golongan reaksioner dan kolonial. Ia menuduh TNI melakukan kampanye terhadap pasukan revolusioner di Solo. Musso juga berpidato menyerang pemerintah. Dikatakannya, Soekarno-Hatta telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda dan Inggris dan hendak menjual tanah air kepada kaum kapitalis.[177]

Untuk menghadapi pemberontakan PKI di Madiun itu, Kabinet Hatta dalam sidangnya tanggal 19 September 1948 memutuskan untuk menghadapinya dengan kekuatan senjata. Markas Besar Tentara segera

[176] Pusat Sejarah TNI, *Sejarah TNI*, jilid I, 2000, hlm. 258

[177] *Merdeka*, 21 September 1948

menyusun rencana operasi. Di Yogya dilakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PKI, antara lain, Ir. Sakirman, Abdulmadjid, dan Tan Ling Djie. Penangkapan juga dilakukan di markas besar SOBSI dan BTI. Surat-surat kabar kiri, *Revolusioner*, *Patriot*, dan *Buruh* dilarang terbit, dan beberapa wartawan, antara lain Gajus Siagian, ditangkap.

Malam tanggal 19 September Presiden Soekarno menyampaikan pidato radio. Kepada rakyat Presiden berseru, "Ikut Musso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta yang insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara RI ,yang merdeka, tidak dijajah oleh negara mana pun juga." Pidato Presiden itu disambut Musso dalam pidato radio dari Madiun, "Soekarno-Hatta budak-budak Jepang dan Amerika ... Musso selamanya menghamba rakyat Indonesia." [178]

Untuk melancarkan operasi militer, Markas Besar Tentara (MBT) mengerahkan dua brigade Divisi IV Siliwangi (Brigade Sadikin dan Brigade Kusno Utomo) dan satu brigade Divisi I Jawa Timur (Brigade Surachmad) ditambah dengan satu batalion Mobiele Brigade Polisi. Pada tanggal 30 September 1948 pasukan TNI memasuki Madiun tanpa perlawanan dari pihak pemberontak. Mereka sudah melakukan evakuasi besar-besaran ke Gunung Wilis. Sesudah Madiun dikuasai, operasi dilanjutkan ke tempat-tempat lain. Pada akhir November 1948 dapat dikatakan bahwa seluruh operasi selesai.

Sebelum Madiun direbut TNI, Musso, Amir Sjarifuddin, dan beberapa tokoh PKI lainnya sudah melarikan diri. Tempat mereka terpencar-pencar. Mereka pun terpaksa berpindah-pindah tempat. Dalam pengejaran yang dilakukan TNI, Amir Sjarifuddin, Suripno, serta beberapa orang lainnya tertangkap di daerah Purwodadi pada tanggal 29 November 1948.[179] Sebelum itu, tanggal 31 Oktober 1948, Musso tewas dalam tembak-menembak di desa Semanding, Somoroto (Ponorogo).[180]

F. Menghadapi Agresi Militer II Belanda

1. Perundingan Pasca-*Renville*

Salah satu program Kabinet Hatta dan merupakan program pertama ialah melanjutkan perundingan Indonesia dan Belanda atas dasar Persetujuan *Renville*. Mr. Moh. Roem diangkat sebagai ketua delegasi RI.

---

[178] A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, jilid VIII, 1979, hlm. 247

[179] Pusjarah ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia*, jilid II, 1992, hlm. 126–127

[180] *Ibid.*, 1992, hlm. 86– 87

Delegasi Belanda dipimpin oleh Abdulkadir Widjojoatmodjo. Pertemuan pertama antara kedua delegasi berlangsung di Kaliurang pada tanggal 21 Februari 1948. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa pertemuan-pertemuan berikutnya diadakan di dua tempat secara berganti-ganti sekali tiga minggu, yakni di Kaliurang dan di Jakarta. Agenda perundingan berkisar pada persoalan politik, yakni pembentukan pemerintahan federal, Uni Indonesia-Belanda, pemerintahan peralihan, dan sidang konstituante.

Sebagai pendahuluan, Hatta mengadakan pembicaraan dengan van Mook mengenai masalah plebisit, kedudukan RI, dan penyerahan kekuasaan RI kepada pemerintah sementara. Dalam pembicaraan itu Hatta juga mengemukakan bahwa jumlah negara bagian tidak boleh lebih dari ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan Linggajati, yakni RI, Negara Indonesia Timur (NIT), dan Borneo (Kalimantan). Selama masa pemerintahan peralihan, RI harus tetap diakui *de facto* dan hubungan dengan luar negeri tetap terpelihara agar tidak terjadi kekosongan. Masalah ini dapat diselesaikan berdasarkan Pasal 1 Prinsip Tambahan Komisi Tiga Negara (KTN).

Perundingan selanjutnya diadakan di Kaliurang, tetapi mengalami jalan buntu disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan plebisit. Menurut pihak RI, plebisit hanya perlu diadakan di daerah-daerah pendudukan Belanda untuk menentukan apakah rakyat di daerah tersebut ingin tetap di bawah kekuasaan Belanda atau ingin bergabung dengan RI. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut agar plebisit juga diadakan di daerah RI. Kedua delegasi berbeda pendapat pula mengenai agenda perundingan. Pihak Belanda bersikeras agar masalah pelaksanaan gencatan senjata dibicarakan terlebih dahulu, sesudah itu baru meningkat ke masalah politik. Sebaliknya, RI (dalam hal ini didukung oleh KTN) berpendapat bahwa masalah politiklah yang harus didahulukan. Jika penyelesaian politik tercapai, masalah gencatan senjata dengan sendirinya dapat diselesaikan.

Setelah tiga minggu berunding tanpa hasil, wakil Amerika Serikat dalam KTN mengusulkan agar di daerah-daerah Jawa, Madura, dan Sumatra diadakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante. Sidang konstituante itulah yang akan menentukan apakah daerah-daerah Pasundan, Sumatra Selatan, dan Sumatra Timur akan digabungkan dengan RI atau berdiri sendiri sebagai negara. Namun, usul pun tidak mencapai kesepakatan.[181]

Sementara itu, tersiar kabar bahwa pemeritah RI melalui duta besarnya di Praha, Suripno, telah mengadakan perundingan dengan Uni Sovyet dan

[181] *Merdeka*, 5 Mei 1948

negara-negara blok Timur lainnya untuk saling mengadakan pertukaran konsul. Berita ini sangat berpengaruh bagi usaha untuk meneruskan perundingan. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengirimkan *aide memoire* kepada pemerintah RI. *Pertama*, meminta RI supaya melaksanakan hal-hal yang telah disetujui dalam Persetujuan Linggajati, yaitu pengakuan kedaulatan Belanda di seluruh Indonesia pada masa peralihan. *Kedua*, sampai di mana hubungan luar negeri yang dilakukan oleh RI, terutama hubungan dengan Uni Sovyet.

Pada tanggal 10 Juni 1948 pemerintah RI mengirimkan jawaban melalui ketua delegasinya Mr. Moh. Roem. Isi jawaban itu adalah mengenai pengakuan kedaulatan Belanda di seluruh Indonesia, RI bersedia memasrahkan kekuasaan kepada Negara Indonesia Serikat (NIS). Sebelum NIS dibentuk, kedudukan RI tetap seperti sekarang. Tentang perjanjian persahabatan dengan Uni Sovyet, karena belum diratifikasi oleh KNIP, perjanjian itu belum dianggap berlaku.[182]

Untuk menembus jalan buntu, pada akhir Mei 1948 dua orang anggota KTN, Du Bois (wakil Amerika Serikat pengganti Frank Graham) dan Thomas Critchley (wakil Australia pengganti Richard Kirby) mengajukan usul yang dikenal sebagai "Rencana Du Bois-Critchley". Secara prinsipil, rencana itu berbeda dengan rencana Belanda. Du Bois-Critchley mengusulkan agar sebelum pembentukan pemerintahan federal sementara, diadakan terlebih dahulu pemilihan umum yang harus dilaksanakan dalam waktu tiga bulan setelah tercapai penyelesaian politik. Untuk itu, perlu dibentuk sebuah komisi yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil RI dan wakil Belanda dalam jumlah yang berimbang. Komisi ini bertanggung jawab dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Pihak Belanda sebaliknya menginginkan agar terlebih dahulu dibentuk pemerintahan federal sementara, sesudah itu baru diadakan pemilihan umum. Pemerintahan federal sementara akan bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Mengenai hubungan luar negeri juga terdapat perbedaan antara rencana Belanda dan usul Du Bois-Critchley. Sejak semula Belanda menuntut agar RI melepaskan hubungan luar negerinya, sedangkan Du Bois-Critchley mengusulkan agar selama masa peralihan, hubungan luar negeri diurus oleh pemerintah federal sementara. Perbedaan lainnya ialah mengenai kedudukan TNI. Berbeda dengan tuntutan Belanda agar TNI dibubarkan, Du Bois-Critchley mengusulkan agar TNI secara keseluruhan ditampung dalam Angkatan Perang Federal.[183]

---

[182] *Merdeka*, 10 dan 11 Juni 1948

[183] Anak Agung Gde Agung, *Renville*, 1983, hlm. 95

Sebelum sempat dibicarakan oleh delegasi RI dan delegasi Belanda, rencana tersebut sudah bocor dan disiarkan dalam pers, termasuk pers di Amerika Serikat. Belanda menuduh Du Bois yang membocorkannya. Mereka mendesak pemerintah Amerika Serikat agar mengganti Du Bois dengan tokoh lain, sambil mengancam tidak akan melanjutkan perundingan selama Du Bois belum diganti. Akan tetapi, pihak Belanda tidak pula mengajukan usul baru. Akibatnya, pada tanggal 23 Juli 1948 delegasi RI menyatakan bahwa perundingan tidak dapat dilanjutkan.

Sebuah usul baru diajukan oleh Merle Cochran, pengganti Du Bois pada tanggal 10 September 1948. Isinya yang penting adalah mengenai pembentukan pemerintah federal sementara serta lembaga-lembaga yang terdiri atas komisaris tinggi, perdana menteri dengan kabinetnya, dewan federal, dan majelis permusyawaratan federal. Pemerintah federal sementara sudah harus dibentuk pada bulan Februari 1949, didahului oleh pembentukan majelis permusyawaratan sementara pada 1 Januari 1949. Diusulkan pula agar jumlah anggota yang mewakili RI dalam dewan federal sepertiga dari jumlah seluruh anggota. Wilayah pemerintahan ini meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Pemerintahan federal sementara akan berakhir dengan terbentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS) tanggal 31 Juli 1949 dan pada saat itu pula Belanda harus menyerahkan kekuasaan kepada NIS. Dalam usul itu disebutkan pula bahwa Angkatan Perang, kecuali Angkatan Laut Belanda dan KNIL, berada di bawah kekuasaan pemerintah federal sementara.[184]

Usul Cochran tidak pernah dibahas oleh kedua delegasi sebab perundingan selanjutnya diadakan antarpemerintah. Pada tanggal 3 sampai 7 November 1948 diadakan pembicaraan antara Hatta dan D.U. Stikker (Menteri Luar Negeri Belanda). Pembicaraan ini hanya berisi penjajakan sebab Stikker tidak diberi wewenang untuk membicarakan masalah politik sebelum RI menghentikan pelanggaran-pelanggaran gencatan senjata. Namun, Hatta menjanjikan bahwa ia akan mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Pada tanggal 9 November 1948 Hatta menyampaikan *aide memoire,* yang memuat hal-hal berikut:

1. RI bersedia bekerja sama dengan Belanda untuk membentuk pemerintah federal sementara pada tanggal 1 Desember 1948 dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. lembaga pemerintah federal sementara terdiri atas dewan menteri di bawah pimpinan seorang perdana menteri;

---

[184] *Ibid.*, 1983, hlm. 112–113

b. dewan perwakilan sementara terdiri atas wakil-wakil negara bagian dan wakil-wakil RI;
c. dalam dewan federal jumlah wakil RI seperdua dari jumlah seluruh anggota.

2. Pemilihan umum untuk membentuk konstituante yang selanjutnya akan bertindak sebagai parlemen, diadakan enam bulan setelah pemerintahan federal sementara terbentuk. Konstituante ini yang akan memilih presiden.
3. Perwakilan RI di luar negeri ditampung oleh pemerintah federal sementara.[185]

Aide memoire juga menyinggung masalah Angkatan Perang. Hatta mengusulkan agar Angkatan Perang pemerintah federal sementara terdiri atas TNI, KNIL, dan batalion-batalion keamanan yang terdapat di negara-negara bagian. Komando atas Angkatan Perang itu berada di tangan pemerintah federal sementara, sedangkan Wakil Tinggi Mahkota Belanda[186] hanya memegang komando atas Angkatan Perang Belanda. Setelah NIS terbentuk, TNI secara keseluruhan dilebur ke dalam Angkatan Perang NIS.

Stikker merasa optimis sebab *aide memoire* Hatta sudah mendekati keinginan Belanda. Akan tetapi, Wakil Tinggi Mahkota, Dr. Beel, menolak adanya dua komando dalam Angkatan Perang pemerintah federal sementara dan peleburan TNI secara keseluruhan dalam Angkatan Perang itu. Dalam telegramnya kepada Sassen dikatakannya bahwa komando harus tunggal dan TNI harus dibubarkan. Hanya anggota TNI yang lulus dalam seleksi yang dapat diterima dalam Angkatan Perang federal. Ia juga mengatakan bahwa jalan satu-satunya ialah melancarkan aksi militer ke Yogya dan melenyapkan RI untuk selama-lamanya.

Namun, pemerintah Belanda masih mengirimkan utusan lagi untuk mengadakan perundingan yang terdiri atas Sassen, Stikker, dan L. Neher. Dalam pembicaraan dengan Hatta di Kaliurang tanggal 27 sampai 30 November, ketiga utusan ini tetap menuntut adanya komando tunggal di bawah Wakil Tinggi Mahkota dan TNI harus dibubarkan. Hatta menolak kedua tuntutan itu. Akibatnya, perundingan gagal mencapai kesepakatan. Setelah perundingan gagal, pada tanggal 9 Desember 1948 pemerintah RI mengirimkan nota kepada KTN mengenai pendirian RI:

---

[185] *Ibid.*, hlm. 141–142

[186] Pada tanggal 3 November 1948 van Mook diberhentikan sebagai Letnan Gubernur Jenderal atas permintaan sendiri. Ia digantikan oleh Dr. L.J.M. Beel dengan kedudukan sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda.

1. Pemerintah RI telah mengalah sedapat-dapatnya untuk mendekati pendirian Belanda.
2. Petunjuk yang diberikan kepada para menteri Belanda terbatas pada penjajakan apakah pada dasarnya RI menerima baik syarat-syarat yang diajukan Belanda, sehingga tidak merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian lewat perundingan.
3. Pemerintah Belanda terbukti pada tahun 1948 akan membentuk pemerintah interim tanpa RI, tanpa perundingan terlebih dahulu dengan RI di bawah pengawasan KTN.

Dua hari kemudian, tanggal 11 Desember 1948, KTN juga menerima nota dari pemerintah Belanda, yang isinya:

1. Dalam perundingan di Kaliurang terbukti RI tidak mempunyai kekuasaan yang nyata terhadap tentaranya, karena itu tidak dapat diharapkan kerja sama yang sungguh-sungguh untuk mencegah pelanggaran persetujuan gencatan senjata.
2. Pendirian RI mengenai Wakil Tinggi Mahkota, terutama mengenai kekuasaan terhadap tentara di masa peralihan, bertentangan dengan kedaulatan Belanda sebagaimana yang ditetapkan dalam bagian pertama pokok asasi Persetujuan *Renville*, yang berarti berlangsungnya suatu keadaan yang tidak dapat dipertahankan, yakni adanya dua tentara saling berhadapan di bawah pimpinan yang terpisah.
3. Penolakan mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan menyebabkan tidak ada harganya RI menerima naskah persetujuan yang direncanakan oleh KTN dan Amerika Serikat pada tanggal 10 September sebagai dasar perundingan.
4. Pemerintah Belanda harus bertindak melaksanakan keputusan mengenai pembentukan pemerintahan interim yang direncanakan atas dasar persetujuan wakil-wakil daerah federal.

Sebagai penutup dari nota tersebut pemerintah Belanda menyatakan bahwa perundingan di bawah KTN tidak berfaedah, karena pada hakikatnya RI tidak mau mengakui perjanjian gencatan senjata dan Persetujuan *Renville*.[187]

Hatta masih berusaha menembus jalan buntu. Pada tanggal 13 Desember 1948 ia menulis surat kepada Cochran. Dalam surat itu dinyatakan bahwa RI bersedia menunda penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Negara Indonesia Serikat (NIS) walaupun sudah menyimpang dari waktu yang ditetapkan sebelumnya, yakni 1 Januari 1949. Dinyatakan pula bahwa

[187] Anak Agung Gde Agung, *Renville*, 1981, hlm. 112–113

RI bersedia mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan. Surat Hatta disampaikan Cochran kepada delegasi Belanda yang hari itu juga langsung mengawatkannya ke Nederland.

Pada saat yang sama, 13 Desember 1948, Kabinet Belanda sudah memerintahkan Beel untuk melancarkan serangan terhadap RI yang dapat dimulai pada tanggal 17 Desember 1948. Karena adanya surat Hatta, rencana serangan itu ditunda sampai 21 Desember sebab Kabinet Belanda merasa perlu menjawab surat Hatta. Surat jawaban tiba di Jakarta tanggal 16 Desember dan Beel diperintahkan agar hari itu juga menyampaikannya kepada Cochran yang ketika itu berada di Kaliurang, Yogya. Akan tetapi, Beel baru menelegramkan isi surat itu kepada Cochran lewat tengah hari tanggal 17 Desember dan Hatta menerimanya dari Cochran sekitar pukul 16.30.

Dalam surat jawaban itu Kabinet Belanda menyatakan bahwa surat Hatta tidak memadai untuk dijadikan dasar membuka kembali perundingan dan karena itu Hatta diminta mempertegas argumentasinya.[188] Surat jawaban itu tidak mencantumkan batas waktu jawaban yang diminta dari Hatta, tetapi Beel menambahkan bahwa Hatta harus menyampaikan jawaban paling lambat pukul 10.00 tanggal 18 Desember 1948. Tidaklah mungkin bagi Hatta mengumpulkan anggota kabinet untuk menyusun jawaban dalam waktu yang sangat singkat itu (delapan belas jam).

Pukul 21.00 tanggal 18 Desember 1948 pihak Belanda menyampaikan surat kepada Jusuf Ronodipuro, *liaison officer* delegasi RI di Jakarta. Isinya, terhitung mulai pukul 00.00 tanggal 19 Desember 1948 Belanda tidak terikat lagi dengan Persetujuan *Renville* dan perjanjian gencatan senjata. Surat yang merupakan ultimatum itu disampaikan Jusuf kepada Mr. Sudjono, perwakilan RI di Jakarta. Sesudah itu ia ke kantor pos untuk mengawatkan isi surat itu kepada Hatta di Yogya. Ternyata, hubungan telepon dan telegram dengan Yogya sudah diputuskan oleh pihak Belanda.

Karena tidak berhasil menghubungi Hatta melalui telegram, Jusuf menemui Cochran di Hotel Des Indes. Keduanya memutuskan untuk berangkat malam itu juga ke Yogya dengan pesawat KTN. Waktu sudah menunjukkan pukul 23.00 ketika mereka tiba di Lapangan Terbang Kemayoran. Berarti, satu jam lagi Belanda akan memulai serangannya. Akan tetapi, pihak Belanda tidak mengizinkan pesawat yang akan membawa mereka ke Yogya tinggal landas.[189] Akibatnya, pemerintah di Yogya tidak mengetahui perkembangan terakhir.

---

[188] R.Z. Leirissa, *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, 2006, hlm. 163

[189] Untuk uraian yang lebih rinci lihat Mestika Zed, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, 1997, hlm. 83–84

2. Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang

Rencana untuk melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi di lingkungan Angkatan Perang (lebih dikenal dengan istilah *Rera*) diajukan dalam bentuk mosi oleh Z. Baharuddin, anggota fraksi Sayap Kiri dalam KNIP pada tanggal 20 Desember 1947. Oleh karena dianggap masuk akal, hal itu disetujui oleh KNIP. Mosi itu mengandung dua hal pokok. *Pertama* merasionalisasikan kesatuan, komando, dan pimpinan Angkatan Perang. *Kedua,* Menteri Pertahanan[190] diberi tanggung jawab atas semua permasalahan Angkatan Perang, baik yang menyangkut politik pertahanan maupun siasat militer. Untuk itu, Markas Besar Tentara (MBT) yang selama ini merupakan lembaga yang berdiri sendiri akan ditempatkan di bawah Menteri Pertahanan. Dengan demikian, akan dapat diwujudkan prinsip "satu tentara, satu komando".

Rera mulai dilaksanakan pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 1 tanggal 2 Januari 1948. Sesuai dengan peraturan itu, Pucuk Pimpinan TNI dan Gabungan Kepala Staf Angkatan Perang dibubarkan. Di lingkungan Kementerian Pertahanan dibentuk Staf Umum dan Markas Besar Pertempuran. Staf Umum dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP), dibantu oleh Wakil KSAP. Markas Besar Pertempuran dipimpin oleh Panglima Besar Angkatan Perang Mobil. Penetapan Presiden itu juga mencantumkan personel yang akan menduduki jabatan-jabatan tersebut, yakni Komodor Surjadarma sebagai KSAP dan Kolonel T.B. Simatupang sebagai Wakil KSAP, serta Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil.

Pengangkatan pejabat-pejabat tersebut menimbulkan reaksi dari pimpinan Angkatan Perang. Kepala Staf Umum MBT, Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo, belum diberhentikan, padahal KSAP yang baru sudah diangkat. Posisi Jenderal Soedirman juga mengalami degradasi, sebab Markas Besar Pertempuran ditempatkan di bawah Staf Umum yang berarti Jenderal Soedirman berada di bawah perintah perwira yang lebih yunior, yakni Komodor Surjadarma. KNIP juga menyesalkan cara yang ditempuh oleh pemerintah. Menurut KNIP, seharusnya organisasi ditetapkan terlebih dahulu, baru kemudian diangkat personalianya.[191] Akibat adanya reaksi itu, Penetapan Presiden No. 1 kemudian dibatalkan.

Setelah Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh, Rera dilanjutkan oleh Kabinet Hatta. Akan tetapi, sasarannya berbeda secara prinsipiil dengan sasaran

---

[190] A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia,* jilid I, 1956, hlm. 195–196

[191] Pusat Sejarah TNI, *Sejarah TNI,* jilid I, 2000, hlm. 54

yang ingin dicapai oleh Kabinet Amir. Golongan Kiri yang mendominasi Kabinet Amir ingin memanfaatkan Rera untuk menguasai, atau sekurang-kurangnya memperbesar pengaruh golongan Kiri dalam Angkatan Perang. Hatta justru berusaha memotong pengaruh golongan Kiri. Sejumlah tokoh Kiri yang menduduki jabatan penting di Kementerian Pertahanan, diberhentikan. TNI Masyarakat yang dibentuk Amir Sjarifuddin tahun 1947 (jumlah anggotanya diperkirakan 90.000 orang) dan merupakan saingan TNI, dibubarkan. Semua laskar Kiri, termasuk Laskar Pesindo, harus meleburkan diri ke dalam TNI dan mematuhi perintah-perintah TNI. Oleh karena itulah pelaksanaan Rera dihalang-halangi oleh golongan Kiri.

Sasaran lain yang ingin dicapai Hatta ialah menghemat belanja negara, apalagi dalam situasi wilayah yang semakin menyempit akibat Persetujuan *Renville* dan hanya terdiri atas daerah-daerah minus, ditambah lagi dengan adanya blokade ekonomi yang dilancarkan Belanda. Hatta menilai, dalam Angkatan Perang banyak tenaga yang tidak produktif untuk masa datang. Pengurangan jumlah (rasionalisasi) anggota Angkatan Perang akan dilaksanakan melalui tiga cara, yakni:

1. melepaskan mereka yang dengan sukarela mau meninggalkan tentara, yakni yang ingin kembali ke pekerjaan lama, seperti guru atau pegawai swasta;
2. menyerahkan mereka kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda yang menyiapkan objek-objek usaha bagi mereka;
3. mengembalikan seratus ribu orang ke masyarakat desa.[192]

Untuk melanjutkan pelaksanaan Rera, pada tanggal 27 Februari 1948 diumumkan Penetapan Presiden No. 9 tahun 1948. Isinya tidak jauh berbeda dengan Penetapan Presiden No. 1. Di Kementerian Pertahanan tetap diadakan Staf Angkatan Perang, tetapi Markas Besar Umum ditiadakan. Jenderal Soedirman tetap memimpin Angkatan Perang Mobil. Penetapan Presiden No. 9 itu juga mengangkat Jenderal Mayor A.H. Nasution sebagai Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Mobil. Penurunan pangkat satu tingkat berlaku bagi seluruh Angkatan Perang.

Pada tanggal 6 Maret 1948 dikeluarkan Undang-Undang No. 3 tentang susunan organisasi Kementerian Pertahanan dan organisasi Angkatan Perang. Sesuai dengan undang-undang tersebut, KSAP membawahi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 3 ini, dikeluarkan Penetapan Presiden No. 14 tanggal 4 Mei

---

[192] Moh. Hatta, *Mendayung antara Dua Karang*, 1976, hlm. 27–28

1948. Di Jawa dan di Sumatra, masing-masing akan dibentuk sebuah komando, yakni Komando Jawa dan Komando Sumatra. Tiap-tiap komando terdiri atas divisi dan subteritorial, serta mempunyai dua jenis pasukan, yakni pasukan mobil dan pasukan teritorial. Menurut rencana, tujuh divisi di Jawa akan dikurangi menjadi empat, sedangkan divisi-divisi di Sumatra (tiga divisi) dihapus dan diganti dengan delapan subteritorial. Berarti, beberapa divisi di Jawa akan digabungkan. Dalam kenyataannya, tidak semua komandan lama bersedia menyerahkan jabatannya kepada komandan baru, seperti yang terjadi dalam penggabungan Divisi V, Divisi VI, dan Divisi VII menjadi divisi baru, yakni Divisi III. Kolonel Sungkono (Panglima Divisi VI) tidak bersedia menyerahkan jabatannya kepada Kolonel Bambang Supeno, Panglima Divisi III baru. Reorganisasi di lingkungan Divisi IV (Solo) juga tidak terlaksana disebabkan oleh sebagian perwiranya sudah dipengaruhi oleh PKI.[193]

Pelaksanaan Rera, khususnya rasionalisasi, di Sumatra pada mulanya juga menghadapi kendala. Komandemen Sumatra menganggap pemerintah terlalu menggeneralisasi keadaan tentara di Sumatra dengan tentara di Jawa. Di Jawa jumlah tentara memang terlalu banyak dan dalam hal pembiayaan sangat tergantung kepada pemerintah. Di Sumatra jumlah tentara tidak sebanyak di Jawa dan pada umumnya dapat membiayai diri sendiri dengan cara mengadakan perdagangan barter dengan luar negeri, terutama Singapura. Komandemen juga berpendapat sebaiknya rasionalisasi diadakan setelah sengketa dengan Belanda betul-betul berakhir, sehingga Komandemen tidak akan menghadapi dua lawan, yakni Belanda dan anggota yang terkena rasionalisasi yang bukan tidak mungkin akan mengadakan kekacauan.

Akan tetapi, dalam melaksanakan rencana yang bersifat nasional itu, pemerintah tidak mungkin membedakan satu daerah dengan daerah yang lain. Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci, pada bulan Juni 1948 Perdana Menteri/Menteri Pertahanan Hatta dan Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Mobil Kolonel Nasution mengadakan kunjungan ke Sumatra.

Walaupun menghadapi berbagai kendala, pada akhirnya Rera berhasil juga dilaksanakan. Berbagai bagian yang mempunyai tugas sejenis tetapi dengan nama yang beragam, berhasil disederhanakan. Kepolisian militer, misalnya, menjadi Korps Polisi Militer di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto. Reorganisasi berhasil pula dilakukan di kalangan laskar yang dibentuk oleh putra daerah serta kesatuan-kesatuan yang dibentuk oleh

---

[193] Pusat Sejarah TNI, *Sejarah TNI*, jilid I, 2000, hlm. 61

para pelajar dan mahasiswa. Laskar-laskar yang dibentuk oleh putra daerah yang direncanakan untuk diinfiltrasikan ke daerah masing-masing bila terjadi perang, dilebur menjadi Brigade 16 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Warrouw. Berbagai kesatuan pelajar dan mahasiswa seperti Tentara Pelajar (TP) di Yogya dan Solo, Tentara Republik lndonesia Pelajar (TRIP) di Jawa Timur, Tentara Genie Pelajar (TGP), dan Corps Mahasiswa (CM) disatukan menjadi Brigade 17 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sudarto.[194] "Penyumbang" terakhir bagi pelaksanaan Rera ialah ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun bulan September 1948 yang didukung oleh kesatuan-kesatuan Angkatan Perang yang sudah terkontaminasi oleh paham komunis. Dengan ditumpasnya pemberontakan tersebut, berakhir pula rongrongan mereka terhadap pelaksanaan Rera khususnya dan pemerintah umumnya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 28 Oktober 1948, di Jawa dibentuk Markas Besar Komando Djawa (MBKD) di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorial Djawa (PTTD) dan di Sumatra dibentuk Markas Besar Komando Sumatra (MBKS) di bawah pimpinan Panglima Tentara dan Teritorial Sumatra (PTTS). MBKS sebagai pengganti Markas Besar Komando Sumatra baru berfungsi setelah Kolonel Hidayat diangkat sebagai PTTS pada tanggal 23 November 1948.

MBKD membawahi empat divisi yang masing-masing terdiri atas beberapa brigade, bahkan ada yang mempunyai subteroterium. Adapun divisi-divisi itu adalah:

1. Divisi I (Jawa Timur) di bawah pimpinan Kolonel Sungkono berkedudukan di Kediri, terdiri atas enam brigade;
2. Divisi II (Jawa Tengah bagian timur) di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto berkedudukan di Solo, terdiri atas dua brigade dan empat subteritorium;
3. Divisi III (Jawa Tengah bagian barat) di bawah pimpinan Kolonel Bambang Sugeng berkedudukan di Magelang, terdiri atas empat brigade;
4. Divisi Siliwangi di bawah pimpinan Pejabat Panglima Letnan Kolonel Daan Jahja.

Di Sumatra, dari delapan subteritorium yang direncanakan, hanya tujuh yang berhasil direalisasikan, yakni:

---

[194] A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, jilid II, 1968, hlm. 2

1. Sub-Teritorium I (Keresidenan Palembang) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Bambang Utojo;
2. Sub-Teritorium II (Keresidenan Lampung) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sjamaun Gaharu;
3. Sub-Teritorium III (Keresidenan Bengkulu) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Barlian;
4. Sub-Teritorium IV (Keresidenan Jambi) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Abunjani;
5. Sub-Teritorium V (Keresidenan Sumatra Barat) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim.
6. Sub-Teritorium VI (Keresidenan Riau) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Hasan Basri;
7. Sub-Teritoriurn VII (Tapanuli) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Alex Kawilarang.

Pembentukan Sub-Teritorium VIII untuk Keresidenan Aceh dan Sumatra Timur bagian utara tidak dapat diwujudkan. Di daerah ini penggabungan laskar dengan TNI belum selesai, bahkan terjadi kericuhan dengan didaulatnya Panglima Divisi X Kolonel Husein Jusuf oleh Teungku Daud Beureueh.[195]

Dengan terbentuknya Markas Besar Komando Djawa (MBKD) dan Markas Besar Komando Sumatra (MBKS) dapat dikatakan bahwa Rera di lingkungan Angkatan Darat sudah dianggap rampung. Untuk melaksanakan Rera di lingkungan Angkatan Laut, pada tanggal 17 Maret 1948 dibentuk Komite Reorganisasi Angkatan Laut (KRAL) dipimpin oleh Kolonel Subijakto yang juga ditugasi membersihkan Angkatan Laut dari unsur-unsur komunis.

Di bidang organisasi, Angkatan Laut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut dibantu oleh Wakil Kepala Staf yang berada di Kementerian Pertahanan. Instalasi yang ada di luar Kementerian Pertahanan hanya Pangkalan dan Badan Pusat Pendidikan. Untuk sementara, Tentara Laut (Marinir) ditiadakan. Anggota-anggotanya dilebur ke dalam kesatuan Angkatan Darat di tempat mereka masing-masing. Anggota Polisi Tentara Angkatan Laut (PTAL) yang tempatnya jauh dari Pangkalan, dijadikan anggota Polisi Militer AD, sedangkan yang dekat dengan Pangkalan dimasukkan ke dalam Polisi Militer AL. Beberapa orang laksamana diwajibkan menyerahkan instalasi-instalasi yang mereka kuasai kepada

---

[195] Amrin Imran, *et al.*, *Ichtisar Perang Kemerdekaan di Sumatera*, 1988, hlm. 110

Menteri Pertahanan. Mutasi beberapa perwira pun dilakukan. Laksamana III M. Nazir dan Laksamana III Adam dipindahkan ke Sumatra dengan tugas membentuk perwakilan AL dalam Komandemen Sumatra. Laksamana III Atmadji dan Laksamana III M. Pardi diperbantukan pada Kementerian Pertahanan.

3. Konsep Pertahanan

Dengan berakhirnya pemberontakan PKI, pemimpin Angkatan Perang mulai memikirkan kembali kemungkinan serangan militer Belanda. Berdasarkan perkiraan keadaan setelah diterimanya Persetujuan *Renville,* Belanda berusaha mengepung Republik Indonesia, secara politis, ekonomis, dan militer. Gejala-gejala akan datangnya suatu serangan militer telah dirasakan oleh pemimpin Angkatan Perang, sejak Belanda mencoba mengulur-ulur waktu perundingan pelaksanaan Persetujuan *Renville*. Di beberapa tempat tentara Belanda melakukan pemindahan pasukan ke dekat garis demarkasi.[196]

Sebagai tanggapan atas tindakan Belanda ini pimpinan Angkatan Perang menyusun konsep pertahanan RI. Adapun konsepsi pertahanan yang dianut adalah Pertahanan Rakyat Semesta (*Total People's Defence*), artinya pelaksanaan perang bukan semata-mata oleh Angkatan Perang melainkan oleh seluruh rakyat dengan Angkatan Perang sebagai intinya. Namun, konsepsi ini baru dicanangkan pada tingkat politis dan belum dijabarkan secara nyata. Penjabaran tersebut didasarkan pada pengalaman menghadapi Belanda pada Agresi Militer I, ditambah dengan kenyataan bahwa kurang lebih 35.000 tentara keluar (hijrah) dari kantung-kantung yang berada di daerah pendudukan Belanda, baik di Jawa maupun di Sumatra berdasarkan Persetujuan *Renville*. Hal ini sangat menguntungkan musuh. Dengan mengkaji pengalaman dan kenyataan yang ada, pimpinan Angkatan Perang menjabarkan konsepsi pertahanan semesta yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Penjabarannya diterangkan di dalam Perintah Siasat No. 1 dari Panglima Besar Angkatan Perang yang berisi:

a. tidak akan melakukan pertahanan linier;
b. tugas memperlambat kemajuan dan serbuan musuh serta pengungsian total serta bumi hangus total;
c. tugas membentuk kantung-kantung di tiap-tiap onderdistrik militer yang mempunyai pemerintahan gerilya yang totaliter (*Wehrkreis*) dan mempunyai pusat di beberapa kompleks pegunungan;

---

[196] A.H. Nasution, *TNI,* jilid II, 1968, hlm. 250–251

d. tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah "federal" untuk ber-*wingate* (menyusup ke kantung-kantung), sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi satu medan perang gerilya yang besar.[197]

Dalam lampiran Perintah Siasaat itu dijelaskan pula pengalamanan Divisi Siliwangi ketika menghadapi Agresi Militer I Belanda di Jawa Barat.

a. Penyerbuan Belanda tidak mungkin ditahan, paling banyak hanya dapat dihambat dengan gangguan serta bumi hangus, sehingga diperoleh waktu dan ruang sebanyak mungkin untuk mengungsikan pasukan, peralatan, pegawai-pegawai, dan rakyat umumnya ke kantung-kantung di pedalaman.
b. Pokok perlawanan ialah perang gerilya. Pada satu pihak bersifat agresif terhadap musuh, dan pada pihak lain konstruktif dapat menegakkan kekuasaan *de facto* RI dalam arti militer maupun sipil dengan membuat sebanyak mungkin kantung-kantung.

Maksud pokok dari Perintah Siasat tersebut adalah: mengadakan perlawanan dengan perang gerilya yang agresif yang dilakukan oleh tentara dan rakyat dalam jangka panjang untuk membela RI dan sekaligus memenangkan perang. Hal ini perlu dicapai dengan:

a. Pimpinan totaliter, artinya dibentuk suatu pemerintahan militer gerilya yang dipegang oleh lurah sampai kepada pemimpin tertinggi, dalam hal ini Panglima Besar Soedirman.
b. Politik nonkooperasi dan nonkontak yang tegas. Semua aparat pemerintah dilarang melakukan kebijakan lain dalam hubungannya dengan musuh;
c. Organisasi TNI dengan tiga macam tugas:
    1) pasukan mobil, yang bertugas tempur dengan perbandingan senjata dan personel 1 : 1;
    2) pasukan teritorial yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial dan perlawanan statis;
    3) melaksanakan *wingate* (menyusup) ke daerah kekuasaan musuh, yang pernah ditinggalkan karena "hijrah", untuk diisi dengan kekuatan gerilya, untuk menciptakan kantung di daerah tersebut.[198]

---

[197] A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 187

[198] A.H. Nasution, *op. cit.*, 1968, hlm. 189
Istilah *Wingate* berasal dari nama Mayor Jenderal Orde Wingate, Komandan Divisi pasukan Inggris yang dalam operasinya melawan tentara Jepang di Chindit (Birma) berhasil melakukan penyusupan (penetrasi) jauh ke dalam daerah musuh dengan doktrinnya yang terkenal "the long-range penetration"

Karena saat serbuan musuh tidak dapat dipastikan, persiapan lebih lanjut tidak saja dalam bentuk dukungan politis yang berupa peraturan pemerintah, tetapi juga dalam bentuk kekuatan militer yang nyata. Pada tanggal 11 November 1948, para pejabat sipil dan militer diundang ke Markas Besar Komando Jawa untuk mendapat penjelasan tentang rencana dan pelaksanaan Perintah Siasat No. 1 tersebut. Suatu pemerintahan militer akan segera mendapat instruksi bekerja apabila musuh memulai agresinya. Telah diatur bersama oleh Departemen Dalam Negeri dan Markas Besar Angkatan Perang dalam suatu sidang kabinet untuk menghapuskan jabatan gubernur sipil di masa perang. Para gubernur diangkat menjadi penasihat gubernur militer. Bentuk pemerintahan militer di Jawa disusun sebagai berikut.

Panglima Besar Angkatan Perang membawahi Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD). Selaku Panglima Tentara, PTTD membawahi empat divisi, sedangkan selaku Panglima Teritorium membawahi empat orang gubernur militer. Jabatan gubernur militer di Jawa dirangkap oleh panglima divisi. Gubernur militer membawahi komando teritorial, yang instansinya disusun mulai dari Subteritorial Commando (STC) atau Sub-Teritorium Militer (STM) untuk wilayah keresidenan, Komando Distrik Militer (KDM) untuk wilayah kabupaten, Komando Onder Distrik Militer (KODM) untuk wilayah setingkat kecamatan, dan akhirnya para lurah. Para lurah akan menjadikan desa sebagai pelaksana pemerintah militer yang terendah. Panglima divisi membawahi pasukan tempur (mobil) yang tersusun mulai dari brigade dan batalion. Tugas pasukan mobil ini di samping bertempur melawan musuh juga melindungi dan memperluas daerah kekuasaan pemerintah militer.[199]

Sementara itu, sidang kabinet tanggal 16 Desember 1948 menunjuk lima orang menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri dr. Sukiman, Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan/Pemuda Supeno, dan Menteri Agama K.H. Masjkur untuk diperbantukan kepada pemerintah militer.[200] Staf Angkatan Laut dipindahkan ke Aceh di bawah pimpinan Kepala Staf Kolonel Subijakto. Beberapa orang perwira dikirim ke Sumatra untuk ditugaskan ke beberapa kesatuan.

Sampai dengan pertengahan bulan Desember 1948, persiapan pertahanan telah mencapai tahap:

a. bidang militer, reorganisasi dan rekonstruksi Angkatan Perang telah diselesaikan;

---

[199] Markas Besar Angkatan Darat, *Himpunan Instruksi Pemerintah Militer Panglima Tentara dan Teritorium Djawa tahun 1948–1949* (dokumen), 1948, hlm. 4

[200] Markas Besar Angkatan Darat, *Ibid.*, hlm. 27

b. bidang pemerintahan, instruksi-instruksi tentang pertahanan rakyat telah disebarkan. Persiapan militerisasi jawatan-jawatan vital telah diselesaikan melalui undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.[201]

Secara terpisah, sekitar bulan Maret 1948 Kepala Staf Divisi Siliwangi, Letnan Kolonel Daan Jahja, menyampaikan memorandum kepada Menteri Pertahanan Hatta. Ia menyarankan agar pemerintah menyiapkan pangkalan cadangan di tempat yang lebih luas yang memungkinkan pemerintah bergerak lebih leluasa dalam perang gerilya. Tempat yang disarankannya ialah daerah sekitar Bukittinggi di Sumatra Barat. Hal itu diajukannya karena ruang untuk bergerak di Pulau Jawa sangat sempit. Mustahil pemerintah dapat bergerilya di Jawa Tengah yang selain sempit juga padat penduduknya. Pemerintah harus berkedudukan di daerah yang luas dan dari sana memimpin perjuangan, sehingga rakyat merasakan bahwa pemerintah masih menjalankan fungsinya. Tanpa adanya pemerintah, perjuangan bersenjata, betapapun dahsyatnya, hanya akan merupakan pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah.[202]

Tokoh lain yang juga menyampaikan memorandum kepada Menteri Pertahanan mengenai persiapan untuk menghadapi kemungkinan Agresi Militer II Belanda, ialah bekas Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Sama dengan Daan Jahja, Sjahrir juga menyarankan agar pemerintah memusatkan kekuatan dan pimpinan perjuangan di Sumatra.[203]

Tidak jelas apakah kedua memorandum itu diketahui oleh Dewan Siasat Militer atau tidak. Namun, dewan ini juga membahas kemungkinan memusatkan perjuangan di Sumatra. Ruang gerak di pulau ini lebih luas sehingga kantung-kantung gerilya dapat dibangun sebanyak mungkin. Akan tetapi, Sumatra berpenduduk jarang, sehingga akan timbul kesulitan dalam pengerahan tenaga dan logistik. Oleh karena itu, titik berat perjuangan tetap diletakkan di Jawa, sedangkan Sumatra dijadikan sebagai daerah pengunduran untuk meneruskan perjuangan apabila perjuangan di Jawa tidak mungkin lagi dilanjutkan.

Untuk memperkuat pertahanan Sumatra dan sekaligus menyempurnakan organisasi TNI, sejak bulan Mei 1948 beberapa perwira Siliwangi dikirim ke Sumatra. Mereka antara lain adalah Letnan Kolonel Daan Jahja, Letnan Kolonel Alex Kawilarang, Mayor Akil Prawiradiredja, dan Kapten Ibrahim Adjie. Daan Jahja kembali ke Jawa karena tidak diberi tugas oleh Panglima Sumatra Soehardjo Hardjowardojo.

---

[201] A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm. 259 dst.

[202] Islam Salim, *Terobosan PDRI dan Peran TNI*, 1995, hlm. 30

[203] Aboe Bakar Lubis, *Agresi Militer II Belanda*, 1995, hlm. 8

4. Perang Gerilya

Pada tanggal 19 Desember 1948 pasukan payung Belanda melancarkan serangan terhadap Lapangan Terbang Maguwo (kini Lanuma Adisucipto), kurang lebih enam kilo meter di sebelah timur ibu kota RI Yogyakarta. Dengan serangan itu mulailah Agresi Militer Belanda Kedua. Panglima Besar Soedirman segera mengeluarkan Perintah Kilat untuk semua Angkatan Perang agar menjalankan rencana untuk menghadapi Belanda.[204]

Gerakan pasukan Belanda menuju Yogya baru dimulai sekitar pukul 12.00. Oleh karena itu, kabinet masih sempat bersidang. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak akan meninggalkan ibu kota. Ada dua alasan yang dikemukakan. *Pertama,* tidak ada pasukan yang akan mengawal mereka ke luar kota. *Kedua,* bila tetap tinggal dalam kota, hubungan dengan KTN masih dapat dilakukan dan dengan perantaraan KTN perundingan dengan Belanda dapat dibuka kembali. Keputusan lain ialah memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Bukittinggi untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatra. Mandat juga diberikan kepada dr. Sudarsono, A.A. Maramis, dan L.N. Palar untuk membentuk *exile government* di luar negeri bila usaha Sjafruddin gagal.[205]

Pada tanggal 19 Desember itu juga Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Presiden, Wakil Presiden, dan sejumlah petinggi negara mereka tawan dan tiga hari kemudian diasingkan ke luar Jawa. Panglima Besar Soedirman berangkat ke luar kota untuk memimpin perang gerilya. Pada tanggal 22 Desember 1948 PTTD Kolonel Nasution mengumumkan berdirinya pemerintah militer di Jawa.

Sesuai dengan rencana, Angkatan Perang mengundurkan diri ke luar kota untuk melakukan perang gerilya. Pasukan yang tadinya "dihijrahkan" akibat Persetujuan *Renville*, melakukan *wingate* ke daerah asal mereka. Pasukan Siliwangi, misalnya, melakukan *long march* dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Di luar kota, TNI membentuk daerah-daerah pertahanan (*wehrkreise*). Setelah berhasil melakukan konsolidasi, TNI mulai memberikan pukulan-pukulan terhadap Belanda. Pertama kali yang menjadi sasaran adalah garis-garis komunikasi pasukan Belanda. Kawat-kawat telepon diputuskan, jalan-jalan kereta api dirusak, dan konvoi-konvoi Belanda dihadang dan diserang. Oleh karena itu, Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan yang menghubungkan kota-kota yang sudah

[204] Teks lengkap dapat dilihat antara lain dalam Pusat Sejarah TNI, *Sejarah TNI*, jilid I, 2000, hlm. 176

[205] Isi kedua mandat itu dapat dilihat dalah Amrin Iman, Saleh A. Djamhari, J.R. Chaniago, *PDRI dalam Perang Kemerdekaan*, 2005, hlm. 50 dan 52

Gambar 2.21 Presiden, Wakil Presiden, dan K.H. Agus Salim tiba di lapangan terbang Maguwo untuk diterbangkan ke Sumatra (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

Gambar 2.22 Kesatuan TNI yang terdiri dari Brigade 10 Garuda Mataram, Militer Akademi Brigade 16 (KRIS), TP dan TGP yang berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Wk. III, mengadakan perlawanan gerilya di sekitar dan di dalam kota Yogyakarta antara bulan Desember 1948 hingga bulan Juni 1949. Tampak Letnan Kolonel Soeharto bergambar bersama beberapa anak buahya. (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

mereka duduki. Dengan demikian, kekuatannya terpaku pada ribuan pos kecil yang tersebar di daerah RI yang kini menjadi medan gerilya yang luas.

Situasi perang pun mulai berbalik. TNI yang tadinya defensif mulai beralih ke ofensif. Serangan terhadap Belanda tidak lagi hanya berupa pencegatan konvoi-konvoi atau terhadap pos-pos Belanda yang terpencil, tetapi juga terhadap kota-kota yang diduduki Belanda. Salah satu serangan yang cukup monumental dan berdampak politis selain berdampak militer ialah Serangan Umum ke Yogya tanggal 1 Maret 1949 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto.[206] Selama enam jam Yogya dikuasai TNI, dan hal itu membuktikan kepada dunia luar bahwa TNI masih mempunyai kemampuan untuk bertempur dan sekaligus membantah gembar-gembor Belanda bahwa TNI sudah hancur dan riwayat RI sudah berakhir.

5. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Mandat yang dikirimkan pemerintah kepada Sjafruddin untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatra tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan. Akan tetapi, pemerintah darurat seperti yang dimaksudkan dalam mandat itu terbentuk juga di Sumatra. Inisiatif untuk membentuknya diambil oleh Sjafruddin bersama T.M. Hassan (Ketua Komisariat Pemerintah Pusat untuk Sumatra) dan Kolonel Hidayat (Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra) dalam pertemuan sore tanggal 19 Desember 1948.[207] Pembentukannya diresmikan tanggal 22 Desember 1948 di Halaban, dekat Payakumbuh, dengan nama Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Sjafruddin diangkat sebagai Ketua PDRI, sedangkan T.M. Hassan sebagai wakil ketua. Kedudukan PDRI berpindah-pindah. Tempat yang cukup lama mereka tempati ialah Desa Bidar Alam, Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat.

Komunikasi antara PDRI dan tokoh-tokoh di Jawa yang masih bebas mulai terbuka akhir Januari 1949. Sejak itu diadakan koordinasi untuk menyamakan sikap menghadapi Belanda. Pada tahap berikutnya, di Jawa dibentuk Komisariat Pemerintah Pusat untuk Djawa (KPPD). Kemudian, pada tanggal 31 Maret 1949 Kabinet PDRI disempurnakan dengan memasukkan beberapa tokoh di Jawa sebagai menteri.[208] PDRI juga mendapat dukungan dari Angkatan Perang. Baik Jenderal Soedirman maupun Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang dan PTTD

[206] Secara rinci serangan umum ini diuraikan dalam Seskoad, *Serangan Umum 1 Maret 1949, di Yogyakarta; Latar Belakang dan Pengaruhnya*, 1990, hlm. 220 – 254

[207] Amrin Imran, Saleh A. Djamhari, J.R. Chaniago, *op. cit.*, hlm. 63

[208] *Ibid.*, hlm. 155–156

Kolonel Nasution mengadakan hubungan dengan PDRI melalui radiogram. PDRI juga mengadakan hubungan dengan para diplomat RI yang berada di luar negeri, khususnya dengan anggota delegasi RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Informasi-informasi yang disampaikan PDRI mengenai perkembangan di dalam negeri, khususnya kemajuan gerilya, digunakan oleh para diplomat ini sebagai senjata untuk menghadapi Belanda dalam perdebatan di Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi, hubungan dengan para pemimpin RI yang ditawan Belanda di Pulau Bangka tidak ada sama sekali. Oleh karena itulah kemudian terdapat perbedaan pendapat antara PDRI dan pihak Bangka, khususnya mengenai Pernyataan Roem-Roijen (7 Mei 1949).

Selama lebih kurang tujuh bulan PDRI memimpin perjuangan dan mempertahankan eksistensi RI, dan pada tanggal 13 Juli 1949 Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.

G. Akhir Perang Kemerdekaan dan Pengakuan Kedaulatan

1. Pendekatan RI dengan Negara-Negara "Federal"

Informasi mengenai Agresi Militer Belanda II sudah diterima oleh Dewan Keamanan PBB yang ketika itu bermarkas di Paris, pada hari agresi itu dilancarkan. Dewan Keamanan PBB membatalkan cuti Natal dan langsung mengadakan serangkaian sidang. Pada tanggal 24 Januari 1949 DK PBB mengeluarkan resolusi yang disponsori oleh Amerika Serikat. Isinya adalah:

1. hentikan permusuhan;
2. bebaskan Presiden serta pemimpin-pemimpin RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948;
3. memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948.

Pada bulan pertama tahun 1949, karena didesak oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, Belanda mengadakan pendekatan-pendekatan politis. Perdana Menteri Belanda Dr. Drees mengundang Prof. Dr. Supomo, salah seorang anggota delegasi RI dalam perundingan lanjutan *Renville,* untuk berunding.[209] Undangan diterima dan merupakan pertemuan yang pertama sejak tanggal 19 Desember 1948. Pertemuan Dr. Drees dengan pemimpin-pemimpin Indonesia itu tidak diumumkan.[210] Pertemuan yang sama 21

[209] *Merdeka,* 14 Januari 1949

Januari 1949 antara delegasi *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) yang terdiri atas Mr. Djumhana serta dr. Ateng, dengan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Moh. Hatta. *Bijeenkomst voor Federal Overleg* adalah musyawarah antara "negara-negara bagian" buatan Belanda. Hasil pertemuan itu tidak pernah diumumkan.[211] Akan tetapi, Mr. Moh. Roem pemimpin delegasi Republik kemudian menyatakan bahwa RI bersedia berunding dengan BFO dengan syarat diawasi oleh Komisi PBB apabila telah mencapai tingkatan formal.[212] Akan tetapi, jelas dari perkembangan selanjutnya bahwa telah terjadi pendekatan antara RI dan BFO. Pada tanggal 13 Februari Wakil Presiden Moh. Hatta secara resmi menyatakan pendapatnya bahwa perundingan dapat saja dimulai dengan syarat dikembalikannya pemerintahan RI ke Yogyakarta dan pengunduran pasukan Belanda dari wilayah RI sesuai dengan resolusi PBB.[213] Keinginan Wakil Presiden Moh. Hatta ini kemudian disetujui dan didukung oleh BFO.

Berdasarkan kenyataan dan penjajakan politis oleh pihak Belanda bahwa pada dasarnya pemimpin-pemimpin RI bersedia berunding, pada tanggal 26 Februari 1949 mereka mengumumkan niatnya akan melakukan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 12 Maret 1949, guna membicarakan masalah Indonesia dan merundingkan syarat-syarat "penyerahan" kedaulatan, serta pembentukan Uni Indonesia-Belanda. Wakil Tinggi Mahkota Belanda mengutus Dr. Koets untuk menemui Ir. Soekarno bersama beberapa pembesar RI lainnya ditawan di Bangka guna menyampaikan maksud pemerintah Belanda, Dr. Koets pergi ke Bangka pada tanggal 28 Februari 1949. Kedatangannya di Bangka ini juga untuk menjelaskan maksud pemerintah Belanda dan mengundang Ir. Soekarno menghadiri Konferensi itu di Den Haag. Isi penjelasan yang disampaikan kepada Ir. Soekarno adalah:

1. Pemerintah Belanda akan mengadakan KMB di Den Haag guna membahas "penyerahan" kedaulatan yang dipercepat.
2. Penarikan pasukan-pasukan Belanda secepat-cepatnya setelah "penyerahan" kedaulatan.
3. Tentang pengembalian pemerintah RI ke Yogya dinyatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilaksanakan.[214]

---

[210] *Ibid.*, 19 Januari 1949

[211] *Ibid.*, 24 Januari 1949

[212] *Ibid.*, 10 Februari 1949

[213] *Ibid.*, 14 Maret 1949

[214] *Merdeka*, 19 April 1949

Pada tanggal 3 Maret 1949 Presiden Soekarno mengadakan pembicaraan dengan penghubung BFO, dan menegaskan perlunya kedudukan pemerintah RI dipulihkan sebagai syarat dilangsungkannya perundingan selaras dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Selesai pertemuan itu, pada keesokan harinya, tanggal 4 Maret 1949, Presiden Soekarno membalas undangan Wakil Tinggi Mahkota, yang berisi penolakan menghadiri KMB kecuali dengan syarat, yaitu:

1. Pengembalian kekuasaan RI adalah syarat mutlak untuk memulai perundingan;
2. Kedudukan dan kewajiban Komisi PBB untuk Indonesia dalam membantu melaksanakan resolusi PBB tidak akan terganggu.[215]

Dari pihak BFO dikeluarkan pernyataan yang berisi pemberitahuan bahwa BFO tetap pada pendirian semula, yakni:

1. supaya pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta;
2 komisi PBB untuk Indonesia agar membantu melaksanakan resolusi DK PBB;
3. RI memerintahkan gencatan senjata.[216]

Dari pihak Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 dikirimkan kawat kepada pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa Komisi PBB untuk Indonesia telah bekerja sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 dan tidak merugikan tuntutan kedua belah pihak. Komisi PBB akan memberikan bantuan terhadap:

1. tercapainya persetujuan sebagai pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 paragraf 1 dan 2, yakni menghentikan aksi militer oleh Belanda dan pengembalian para pemimpin RI ke Yogyakarta.
2. menetapkan tanggal dan waktu serta syarat untuk mengadakan KMB di Den Haag agar dapat diselenggarakan selekasnya.[217]

Dengan adanya petunjuk dari Dewan Keamanan dan adanya pendekatan politis antara pihak RI dan Belanda, pada tanggal 14 April 1949 atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia diadakan perundingan RI-Belanda. Perundingan diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta, di bawah pimpinan Merle Cochran (Amerika Serikat). Delegasi Republik dipimpin oleh Mr. Moh. Roem sebagai Ketua dan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai Wakil Ketua. Anggota-anggotanya adalah: dr. Leimena, Ir. Djuanda, Prof. Dr. Supomo, dan

[215] *Ibid.*, 19 April 1949
[216] *Ibid.*, 14 Maret 1949
[217] *Ibid.*, 19 April 1949

Mr. Latuharhary disertai lima orang penasihat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Roijen, dengan anggota-anggotanya: Mr. N.S. Blom, Mr. A. Jacob, Dr. J.J. van der Velde, dan empat orang penasihat.[218]

Merle Cochran yang memimpin perundingan ini sekali lagi menyatakan bahwa perundingan tersebut diselenggarakan atas inisiatif pihak PBB sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 29 Januari 1949. Delegasi RI dalam pidatonya mengemukakan pendirian RI bahwa perundingan ini lebih dahulu harus menyetujui pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta. Dengan kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta, baru terbuka kemungkinan bagi delegasinya untuk mengambil keputusan bagi soal-soal lainnya.[219] Delegasi Belanda bersedia mendahulukan perundingan mengenai syarat-syarat untuk kemungkinan kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta, tetapi tiap kewajiban yang mengikat yang mungkin timbul dalam perundingan harus ditunda sampai tercapainya persetujuan tentang perintah penghentian gerilya dan membuat perjanjian mengenai waktu dan syarat KMB di Den Haag.[220] Sesudah perundingan pertama ini, jalan perundingan sangat lamban, dan masing-masing pihak berpegang pada pendiriannya.

Karena perundingan berjalan sangat lamban, bahkan hampir mengalami jalan buntu, pada tanggal 24 April 1949 Moh. Hatta datang ke Jakarta. Pihak RI menempuh cara lain, yakni mengadakan perundingan informal dan langsung dengan pihak Belanda dengan disaksikan oleh Merle Cochran. Pada tanggal 25 April diadakan pertemuan informal pertama antara Hatta dan ketua delegasi Belanda Dr. van Roijen.[221] Hasil pertemuan ini tidak diumumkan, tetapi Hatta menyatakan bahwa pertemuan informal itu diadakan untuk membantu memberikan penjelasan kepada delegasi Belanda.[222] Perundingan semacam itu juga dilakukan oleh ketua delegasi RI dengan ketua delegasi Belanda sebanyak dua kali, yakni tanggal 28 April dan tanggal 4 serta 5 Mei 1949.[223]

Tampaknya perundingan ini dapat memberikan harapan untuk tercapainya persetujuan. Oleh karena itu, komisi PBB bersikap menunggu matangnya perundingan informal itu.[224] Pada dasarnya pemerintah Belanda

---

[218] *Merdeka*, 19 April 1949

[219] *Ibid.*, 18 April 1949

[220] *Ibid.*

[221] *Ibid.*, 26 April 1949

[222] *Ibid.*, 27 April 1949

[223] *Ibid.*, 25 April dan 6 Mei 1949

[224] *Ibid.*, 29 April 1949

telah setuju tentang pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta, dengan syarat harus dibarengi dengan perintah penghentian perang gerilya. Masalah ini dapat diatasi, tetapi masalah yang lainnya adalah mengenai luasnya daerah kekuasaan RI. Petunjuk dari Bangka kepada Delegasi RI menghendaki dilaksanakannya resolusi Dewan Keamanan dan pengembalian daerah RI (menurut Persetujuan *Renville)* secara berangsur-angsur. Petunjuk dari Bangka lebih menekankan pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta sekalipun hanya memiliki daerah seluas lima mil persegi sebagai langkah permulaan.[225] Akan tetapi, delegasi RI menganggap bahwa wilayah lima mil persegi adalah sangat berbahaya bagi keamanan. Delegasi RI menuntut daerah seluas Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk lapangan terbang Maguwo dengan batas selatan Samudra Indonesia. Pihak Belanda sebaliknya menafsirkan resolusi Dewan Keamanan tentang pengembalian pemerintah RI ke kota Yogyakarta dan daerah sekitarnya, adalah seluas lima mil persegi; mereka juga menolak menyerahkan lapangan udara Maguwo (sekarang Pangkalan Udara Adisutjipto).

Berkat usaha keras dari Merle Cochran, anggota Komisi PBB dari Amerika Serikat, pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan. Pada pukul 17.00 dibacakan pernyataan oleh Komisi PBB. Ketua delegasi RI Mr. Moh. Roem atas nama Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta menyampaikan kesanggupan mereka sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949 serta petunjuk-petunjuknya tanggal 23 Maret 1949 untuk memudahkan:

1. pengeluaran perintah kepada "pengikut RI yang bersenjata" untuk menghentikan perang gerilya;
2. kerja sama dalam hal pengembalian perdamaian dan menjaga keamanan dan ketertiban;
3. turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat "penyerahan" kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.[226]

Selanjutnya ketua delegasi Belanda Dr. van Roijen membacakan pernyataannya yang berisi antara lain sebagai berikut.

1. Delegasi Belanda menyetujui pembentukan panitia bersama di bawah pengawasan Komisi PBB dengan tujuan untuk:
   a. mengadakan penyelidikan dan persiapan yang perlu sebelum kembalinya pemerintah RI;

---

[225] *Ibid.*, 4 Mei 1949

[226] *Merdeka*, 9 Mei 1949

b. mempelajari dan memberikan nasihat tentang tindakan yang diambil dalam melaksanakan penghentian perang gerilya dan kerja sama dalam hal pengembalian perdamaian serta menjaga keamanan dan ketertiban.

2. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi Keresidenan Yogyakarta.
3. Pemerintah Belanda membebaskan tidak bersyarat pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang tertangkap sejak tanggal 19 Desember 1948.
4. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
5. Konferensi Meja Bundar di Den Haag akan diadakan selekasnya sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Pada konferensi tersebut diadakan pembicaraan tentang cara-cara mempercepat "penyerahan" kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat.[227]

Pernyataan Roem-Roijen ditentang oleh PDRI yang secara resmi diberi mandat untuk memimpin pemerintahan, tetapi tidak diajak berunding terlebih dahulu oleh para pemimpin di Bangka. Pada tanggal 14 Mei 1949 PDRI mengadakan musyawarah di Sumpur Kudus untuk menentukan sikap. Dalam musyawarah itu para tokoh PDRI menolak Pernyataan Roem-Roijen. Penolakan PDRI didasarkan pada pengalaman dua kali perundingan dengan Belanda (Linggajati dan *Renville*) yang kemudian dilanggar Belanda dengan melancarkan agresi militer. Lagi pula, perundingan yang menghasilkan Pernyataan Roem-Roijen diadakan oleh para pemimpin yang masih ada dalam status tawanan dan karena itu posisi mereka lemah.[228] Untuk melunakkan sikap PDRI, pada awal Juli 1949 Wakil Presiden Hatta mengirim utusan di bawah pimpinan dr. Leimena ke Sumatra Barat yang akhirnya berhasil mengajak Sjafruddin dan kawan-kawannya ke Yogyakarta.[229]

Partai politik yang pertama kali menyatakan setuju dan menerima baik tercapainya Pernyataan Roem-Roijen adalah Masyumi (Mr. Roem adalah pemimpin Masyumi). Dr. Sukiman selaku Ketua Umum Masyumi menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh delegasi RI adalah dengan melihat posisi RI di dunia internasional dan di dalam negeri sendiri, apalagi

---

[227] *Merdeka*, 16 Mei 1949

[228] Amrin Imran, Saleh A. Djamhari, J.R. Chaniago, *op. cit.*, hlm. 261 – 263

[229] *Ibid.*, hlm. 270–272

dengan adanya sikap BFO yang semakin menyatakan hasratnya untuk bekerja sama dengan RI.[230] Mr. Sujono Hadinoto, Ketua Umum Partai Nasional Indonesia (PNI), menyatakan bahwa Pernyataan Roem-Roijen merupakan suatu langkah ke arah tercapainya penyelesaian masalah-masalah Indonesia.[231] Akhirnya, kedua partai ini mengeluarkan pernyataan bersama bahwa Pernyataan Roem-Roijen sekalipun masih kurang memuaskan, tetapi merupakan langkah ke arah penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda.[232]

Pihak Angkatan Perang sebaliknya menyambut pernyataan itu dengan perasaan curiga.[233] Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soedirman pada tanggal 1 Mei 1949 memperingatkan kepada para komandan kesatuan agar tidak memikirkan masalah perundingan. Pernyataan yang sama untuk mempertegas amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman dikeluarkan juga oleh Panglima Tentara dan Teritorium Jawa Kolonel A.H. Nasution pada tanggal 5 Mei 1949. Pernyataan itu mengetengahkan bahwa perundingan yang dilaksanakan itu hanyalah merupakan taktik perjuangan, dan diperingatkan kepada semua komandan agar membedakan antara gencatan senjata untuk kepentingan politik dan untuk kepentingan militer. Pada pokoknya dari kalangan Angkatan Perang tidak terdapat kepercayaan akan berhasilnya perundingan karena menurut pengalaman dengan Linggajati, *Renville*, dan lain-lain, perundingan atau persetujuan dengan Belanda dianggap selalu merugikan perjuangan.

Sebagai tindak lanjut dari Pernyataan Roem-Roijen, pada tanggal 22 Juni diadakan perundingan formal antara RI, BFO, dan Belanda di bawah pengawasan komisi PBB, dipimpin oleh Critchley (Australia). Hasil perundingan itu adalah:

1. Pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949. Keresidenan Yogyakarta dikosongkan oleh tentara Belanda dan pada tanggal 1 Juli 1949 pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu.
2. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta.
3. Konferensi Meja Bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag.

Hasil permusyawaratan yang dicapai ini akan dicantumkan dalam sebuah memorandum.[234] Setelah para pemimpin RI berkumpul kembali di

[230] *Ibid.*, 27 Mei 1949

[231] *Ibid.*, 30 Mei 1949

[232] Djenderal Major T.B. Simatupang, *op. cit.*, hlm. 129 dan hlm. 141–142

[233] Markas Besar Angkatan Darat, *op. cit.*, hlm. 117 (stensil)

[234] *Indonesia*, 23 Juni 1949

Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 pukul 20.30, diadakan sidang kabinet RI yang pertama. Pada kesempatan itu Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden/Perdana Menteri Moh. Hatta. Dalam sidang kabinet diputuskan untuk mengangkat Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan.[235]

2. Menuju Konferensi Meja Bundar

Sejak kembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta (6 Juli 1949), perundingan dengan BFO yang telah dirintis di Bangka dimulai lagi. Yang dibahas dalam perundingan itu ialah pembentukan pemerintah peralihan sebelum terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Kemudian, pada tanggal 19 s.d. 22 Juli 1949 diadakan perundingan antara kedua belah pihak, yang disebut Konferensi Antar-Indonesia. Konferensi itu memperlihatkan bahwa politik *divide et impera* Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik dari Republik Indonesia, mengalami kegagalan. Pada Konferensi Antar-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta itu dihasilkan persetujuan mengenai bentuk negara dan hal-hal yang bertalian dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat.

1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme.
2. RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat.
3. Akan dibentuk dua badan perwakilan, yakni sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan negara bagian (senat). Pertama kali akan dibentuk dewan perwakilan rakyat sementara.
4. Pemerintah Federal Sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak negara Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia.

Di bidang militer juga telah tercapai persetujuan sebagai berikut:

1. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.
2. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS; negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri.
3. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh pemerintah RIS dengan inti Angkatan Perang RI (TNI), bersama-sama dengan orang Indonesia yang ada dalam *KNIL, ML, KM, VB,* dan *Territoriale Bataljons.*

[235] *Ibid.*, 15 Juli 1949

4. Pada masa permulaan RIS, Menteri Pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.[236]

Konferensi Antar-Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 1949, dan dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta yang membahas masalah pelaksanaan dari pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB). Sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dengan musyawarah di dalam Konferensi Antar-Indonesia, kini bangsa Indonesia sebagai keseluruhan telah siap menghadapi KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949 diangkat delegasi Republik Indonesia yang terdiri dari: Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Supomo, dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Sumardi. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 KMB dimulai di Den Haag. Konferensi selesai pada tanggal 2 November 1949.

3. Pembentukan RIS dan Pengakuan Kedaulatan

Hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP untuk diratifikasi. KNIP yang bersidang pada tanggal 6 Desember 1949 berhasil menerima KMB dengan 226 pro lawan 62 kontra, dan 31 meninggalkan sidang.

Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949 dan pada tanggal 17 Desember (keesokan harinya) Presiden RIS diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949 Kabinet RIS yang pertama di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta selaku Perdana Menteri, dilantik oleh Presiden. Akhirnya, pada tanggal 23 Desember delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta berangkat ke Nederland untuk menandatangani Piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda.[237] Pada tanggal 27 Desember 1949 baik di Indonesia maupun di Nederland diadakan upacara penanda-tanganan naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Di Nederland bertempat di Ruang Takhta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen, dan Ketua

[236] *Ronde Tafel Conferentie te Gravenhage* 's-*Gravenhage*, 1949, hlm. 143 – 158

[237] Soemitro Djojohadikoesoemo, *Beberapa Soal Keoeangan*, Djakarta, 1947, hlm. 27

Gambar 2.23 Penandatanganan naskah Penyerahan Kedaulatan di Jakarta 27 Desember 1949. Pihak Indonesia diwakili Sri Sultan Hamengku Buwono IX, pihak Kerajaan Belanda diwakili oleh Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink. (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

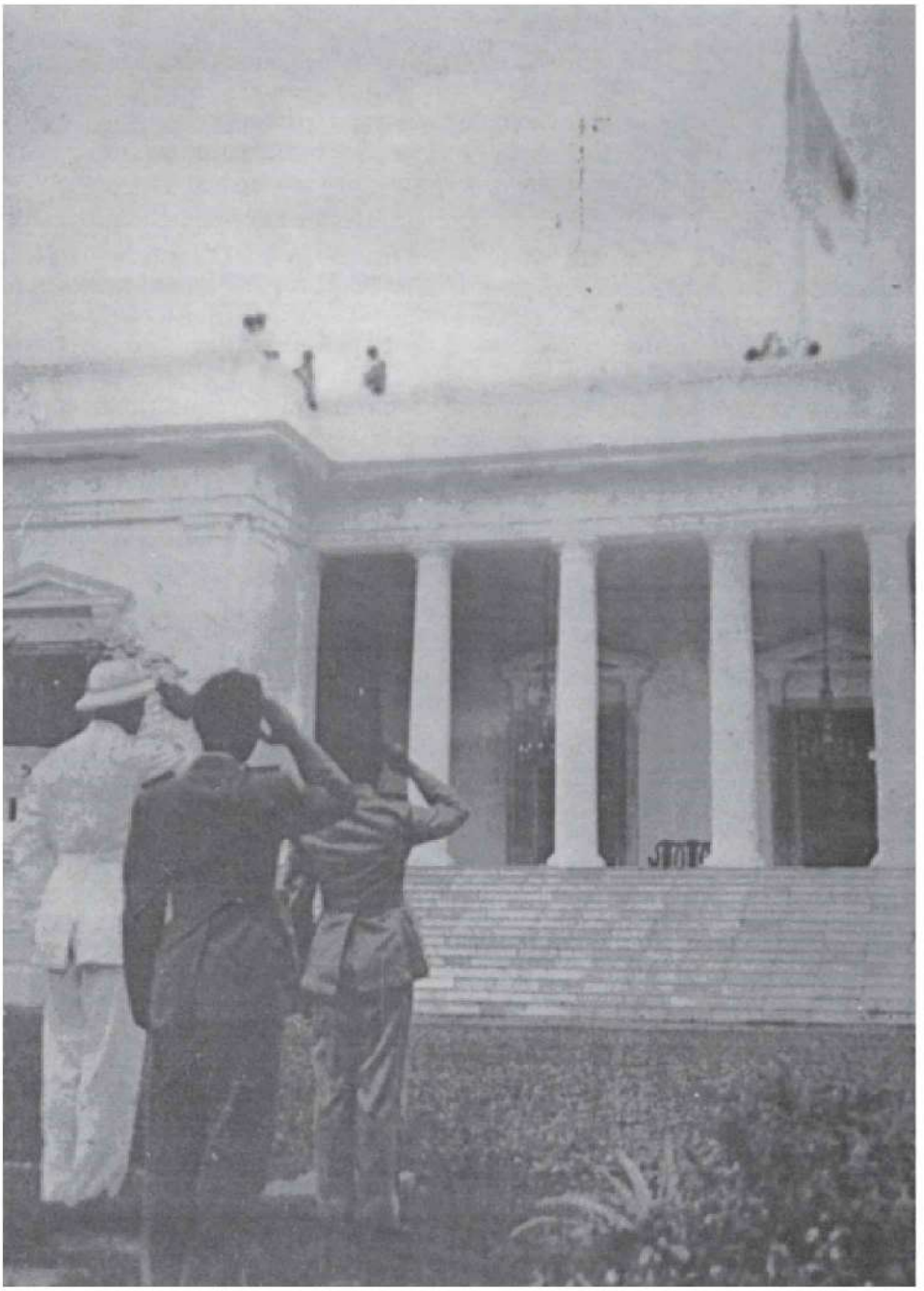

Gambar 2.24 Upacara pengibaran bendera Merah Putih dan penurunan bendera merah putih biru, seusai penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan di depan Istana Merdeka, Jakarta, 27 Desember 1949 (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

Delegasi RIS Drs. Moh. Hatta bersama-sama membubuhkan tanda tangannya pada piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan kepada RIS. Pada waktu yang sama di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. Lovink dalam suatu upacara, membubuhkan tanda tangan mereka pula pada naskah penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Secara formal Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan penuh suatu negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda (kecuali Papua). Dengan demikian, berakhirlah secara resmi perang kemerdekaan Indonesia.

Dengan demikian, pada hakikatnya apa yang dilakukan pihak Belanda adalah mengakui kedaulatan bangsa Indonesia sendiri atas wilayah nasionalnya, yang dalam hal ini diwakili oleh RIS.

H. Ekonomi Blokade

1. Blokade Total terhadap RI

Pada akhir masa pendudukan Jepang dan masa awal Republik Indonesia, keadaan ekonomi sangat kacau. Hiperinflasi menimpa negara Republik Indonesia yang baru berumur beberapa bulan itu. Sumber inflasi adalah beredarnya mata uang Jepang secara tidak terkendali. Mata uang Jepang yang beredar di masyarakat diperkirakan sejumlah empat miliar. Sampai pada bulan Agustus 1945 mata uang Jepang yang beredar di Jawa saja berjumlah 1,6 miliar. Jumlah ini kemudian bertambah ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank. Dari bank-bank itu diedarkan uang cadangan sebesar 2,3 miliar untuk tujuan operasi dan membiayai pembantu-pembantunya seperti menggaji pegawai. Untuk jelasnya keadaan peredaran uang di Jawa dari masa akhir Pendudukan Jepang sampai bulan Desember 1945 dapat dilihat pada tabel berikut:

Mata uang pendudukan Jepang yang beredar	1.600.000.000
Sisa dari pemerintah Hindia Belanda dan *de Javasche Bank*	300.000.000
Mata uang Jepang cadangan yang disita oleh NICA	2.000.000.000
Jumlah	3.900.000.000

Sumber: *Makmoer*, no. 2, th. I, 10 Djanuari, 1946, hlm. 60

Keadaan ini membuat ekonomi RI bertambah merosot. Pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang Jepang tidak berlaku. Hal ini disebabkan oleh negara sendiri belum memiliki mata uang sebagai penggantinya. Kas pemerintah kosong. Pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah.[238] Untuk sementara waktu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah mengeluarkan penetapan yang menyatakan berlakunya beberapa mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI. Yang dinyatakan berlaku adalah tiga macam mata uang, yaitu mata uang *de Javasche Bank,* mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang Pendudukan Jepang.[239]

Golongan yang paling menderita akibat inflasi adalah petani karena pada zaman Pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang. Di samping penderitaan yang dialami oleh petani, situasi keuangan yang sulit yang dialami oleh pemerintah bertambah sulit akibat dilakukannya blokade laut oleh Belanda. Blokade ini menutup pintu keluar-masuk perdagangan RI. Tindakan blokade ini dimulai pada bulan November 1945. Akibat blokade ini barang-barang dagangan milik pemerintah RI tidak dapat diekspor. Adapun alasan Belanda melakukan blokade itu adalah:

1. mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia;
2. mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya;
3. melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.

Tujuan Belanda melakukan blokade adalah untuk mencekik Republik dengan senjata ekonomi. Hasil yang terutama diharapkan oleh Belanda adalah timbulnya keadaan sosial-ekonomi yang buruk dan kekurangan bahan-bahan impor yang sangat dibutuhkan RI. Barang-barang milik Republik diusahakan untuk dihancurkan atau dibumihanguskan. Juga, adanya inflasi yang tidak terkendalikan, diharapkan akan menimbulkan kegelisahan dan keresahan sosial, sehingga dapat menimbulkan kebencian terhadap pemerintah Republik. Memang perbendaharaan Republik kosong, sedangkan pengeluarannya semakin bertambah besar. Pihak Belanda memperhitungkan bahwa RI secara ekonomis akan segera ambruk.

Usaha pemerintah untuk mengatasi kesulitan moneter pertama-tama adalah melakukan pinjaman nasional. Dengan persetujuan Badan Pekerja

---

[238] Soemitro Djojohadikoesoemo, *Beberapa Soal Keoeangan*, 1947, hlm. 27

[239] Makloemat Presiden RI No. 1/10, tanggal 3 Oktober 1945

Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), Menteri Keuangan Ir. Surachman melaksanakan pinjaman direncanakan akan meliputi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun.[240] Pada bulan Juli 1946 seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetor uangnya kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian.[241] Pinjaman Nasional tahap pertama berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp500.000.000,00. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Sukses yang dicapai oleh pemerintah itu dapat dijadikan ukuran bagi dukungan rakyat. Ditinjau dari segi politik, sukses ini menunjukkan kelirunya perhitungan pihak Belanda mengenai kekuatan intern Republik.[242]

Ketika kesulitan keuangan belum lagi teratasi, pihak Sekutu di bawah Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford, Panglima AFNEI yang baru, mempermaklumkan berlakunya uang baru di wilayah yang diduduki Sekutu. Uang baru itu dikenal sebagai uang NICA. Uang NICA ini dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya sudah sangat menurun. Kurs ditentukan 3%, yaitu setiap f1,- uang Jepang dinilai sama dengan 3 sen uang NICA. Maklumat penggantian mata uang baru ini diumumkan tanggal 6 Maret 1946. Perdana Menteri RI Sutan Sjahrir memprotes tindakan Panglima AFNEI itu, karena terang-terangan Sekutu melanggar persetujuan yang telah disepakati bersama. Dalam persetujuan itu dinyatakan bahwa selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan dikeluarkan mata uang baru untuk menghindari kekacauan di bidang ekonomi dan keuangan.[243] Untuk menghadapi tindakan Sekutu itu pemerintah mengingatkan kepada masyarakat bahwa di wilayah RI hanya berlaku tiga macam mata uang sebagaimana yang telah diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Oktober 1945. Penduduk tidak dibenarkan mempergunakan mata uang NICA sebagai alat bayar. Tindakan Sekutu itu dianggap merupakan bagian dalam rangkaian usaha untuk merongrong ketahanan nasional RI di bidang ekonomi dan keuangan.

Pada bulan Oktober 1946, sebagai tindak lanjut, pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru yang terkenal dengan nama *Oeang Repoeblik Indonesia* disingkat ORI (ejaan van Ophuyzen) untuk mengganti mata uang Jepang. Kurs mata uang Jepang dengan ORI adalah satu perseribu, artinya

---

[240] *Makmoer*, no. 10, th. 1, 10 Mei 1946

[241] Soemitro Djojohadikoesoemo, *op. cit.*, 1947, hlm. 27

[242] *Ibid.*, hlm. 22 dan 27

[243] John O. Sutter, *Indonesianisasi*, 1959, hlm. 345–347

setiap seribu rupiah mata uang Jepang ditukar dengan 1 rupiah ORI. Untuk sementara waktu pemerintah mengizinkan setiap keluarga memiliki Rp300,00 saja, dan bagi yang tidak berkeluarga Rp100,00.

Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan, pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia yang diresmikan pada tanggal 1 November 1946. Bank Negara ini semula adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dan dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo.[244] Sebelum berdirinya Bank Negara Indonesia, pemerintah telah merintis pembentukan Bank Rakyat Indonesia, yang semula adalah *Shomin Ginko.* Bank Rakyat Indonesia ini merupakan prototipe dari Bank Negara.[245] Bank Negara ini diberi tugas untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia.

Situasi perang sangat memengaruhi situasi ekonomi. Pendapatan pemerintah semakin tidak sebanding dengan pengeluarannya. Hasil produksi perkebunan dan pertanian sebagian besar tidak dapat diekspor secara normal karena blokade Belanda. Dengan demikian, penghasilan pemerintah hanya semata-mata bergantung kepada produksi petani. Prof. Sumitro Djojohadikusumo berpendapat bahwa pada masa Perang Kemerdekaan produksi petanilah yang merupakan pokok dari kehidupan ekonomi Indonesia. Karena dukungan rakyat tani, pemerintah berhasil bertahan sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk. Dengan produksi petani, pemerintah berhasil menanggulangi akibat blokade Belanda.

2. Usaha-Usaha Menembus Blokade Ekonomi

Usaha-usaha untuk menembus blokade ekonomi musuh dengan tujuan mematahkan isolasi ekonomi, dilakukan oleh pemerintah dengan pelbagai cara. Usaha pertama bersifat lebih politis daripada ekonomis. Pemerintah RI segera menyatakan kesediaannya untuk membantu pemerintah India dengan mengirimkan 500.000 ton beras ketika terbetik berita bahwa bangsa itu sedang ditimpa bahaya kelaparan. Alasan pemerintah untuk mengirimkan bantuan itu adalah panen tahun 1946 diperkirakan akan mengalami surplus sebesar 200.000 sampai 400.000 ton.[246] Sebagai imbalannya pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Harga beras yang ditawarkan kepada India adalah yang paling rendah dibandingkan dengan penawaran pihak-pihak lain. Bagi RI yang terpenting bukanlah harga,

[244] *Antara,* 19 Mei 1947

[245] *Makmoer,* no. 7, th. I, 10 April 1946

[246] *Makmoer,* no. 9, th. I, 25 April 1946, hlm. 312

melainkan aspek politik yang berhubungan dengan pelaksanaan Persetujuan Linggajati. Dalam persetujuan itu disebutkan bahwa RI diharuskan mengirimkan dan menjual surplus berasnya ke daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda. Pemerintah RI menganggap lebih menguntungkan untuk menjual berasnya kepada negara sahabat daripada membantu Belanda.[247] Perhitungan pemerintah ini terbukti tepat karena India adalah negara Asia yang paling aktif membantu perjuangan diplomatik di forum internasional dalam rangka solidaritas bangsa-bangsa Asia.

Usaha lainnya dari pemerintah adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Usaha ini dirintis oleh *Banking and Trading Corporation* (BTC), suatu badan perdagangan semipemerintah yang dipimpin oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan Dr. Ong Eng Die. BTC berhasil mengadakan kontrak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat (*Isbrantsen Inc.*). Dalam transaksi pertama pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor dari Indonesia, seperti gula, karet, dan teh. Kapal *Isbrantsen Inc.* yang masuk ke pelabuhan RI Cirebon adalah kapal *Martin Behrmann,* yang mengangkut barang-barang pesanan BTC dan akan memuat barang-barang ekspor RI. Akan tetapi, kapal itu dicegat oleh Angkatan Laut Belanda dan diseret ke pelabuhan Tanjung Priok. Seluruh muatannya disita.

Menteri Kemakmuran dr. A.K. Gani menyampaikan protes kepada pihak Belanda sebab sesuai dengan Perjanjian Linggajati, perairan Cirebon adalah wilayah *de facto* RI. Protes itu tidak digubris Belanda. Gani yang tidak ingin melihat Belanda diuntungkan sedangkan RI dirugikan, mengambil keputusan untuk membakar gudang tempat barang-barang itu disimpan. Dengan bantuan uang dari Hasjim Ning, seorang pengusaha nasional, Gani berhasil "membujuk" dua orang anggota tentara Belanda (KL) dengan imbalan f5.000 per orang untuk membakar gudang tersebut.

Karena kuatnya blokade Belanda, usaha menembusnya dipusatkan di Sumatra. Tujuan utama adalah Singapura dan Malaya. Karena jarak perairan relatif dekat, usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Usaha ini secara sistematis dilakukan sejak tahun 1946 sampai dengan akhir masa Perang Kemerdekaan. Pelaksanaan penembusan blokade ini dilakukan oleh Angkatan Laut RI dengan dibantu oleh pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Sejak awal tahun 1947 pemerintah RI membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama *Indonesia Office* (*Indoff*).Secara resmi *Indoff* ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, tetapi secara rahasia ia adalah pengendali usaha penembus blokade dan usaha perdagangan barter. Badan perwakilan

---

[247] Dr. Soedarsono, "Pengiriman beras ke India", *Siasat,* no. 16, th. I, 9 April 1946, hlm. 11

ini dipimpin oleh Mr. Oetojo Ramelan dan dibantu oleh beberapa orang anggota stafnya, Soerjono Daroesman, Mr. Zairin Zain, Thaharudin Ahmad, Dr. Soeroso, dan Tamtomo. Badan inilah yang bertindak sebagai perantara dengan para pedagang Singapura dan juga mengusahakan kapal-kapal yang diperlukan.

Selain *Indoff*, Kementerian Pertahanan juga membentuk perwakilannya di luar negeri yang disebut Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Ia dibantu oleh staf yang kecil saja terdiri dari Suhardjo, Harmono, Kusmardjo, Ferdy Salim, dan Darry Salim. Tugas pokoknya adalah membeli senjata dan perlengkapan Angkatan Perang, serta memasukkannya ke Indonesia. Sebagai pelaksana penembusan blokade ini dikenal nama-nama John Lie, O.P. Koesno, Ibrahim Saleh, dan Chris Tampenawas; dalam menunaikan tugas mereka selalu "berkucing-kucingan" dengan patroli laut Belanda. Selama tahun 1946 pelabuhan Sumatra hanya Belawan yang diduduki dan dikuasai oleh Belanda.[248] Karena perairan teritorial Sumatra yang sangat luas, pihak Belanda tidak mampu melaksanakan pengawasan yang ketat. Hasil-hasil ekspor Sumatra terutama karet "sheet" yang diselundupkan ke luar, terutama ke Singapura, mencapai jumlah puluhan ribu ton. Selama tahun 1946 saja barang-barang yang diterima oleh Singapura dari Sumatra seharga Straits $20.000.000,-, sedangkan yang berasal dari Jawa hanya Straits $1.000.000,-. Sebaliknya barang-barang yang dikirim ke Sumatra dari Singapura seharga Straits $3.000.000,- dan dari Singapura ke Jawa seharga Straits $2.000.000,-. [249]

3. Pemikiran Mengenai Ketahanan Ekonomi

Karena pada awal pertumbuhan ekonomi RI pemerintah dihadapkan kepada satu situasi yang serbakacau akibat Pendudukan Jepang, pemerintah tidak sempat melakukan tindakan-tindakan penanggulangan secara konsepsional. Barulah pada bulan Februari 1946 pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Prakarsa itu berupa konferensi ekonomi yang diselenggarakan pada bulan Februari 1946. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan pejabat-pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa saja. Namun, usaha ini

---

[248] Askandar *et al.*, "Operasi Lintas Laut Penembusan Blokade Belanda (1946–1949)" (naskah), hlm. 32 dst.

[249] Perhitungan tersebut dikutip dari bulan September 1946. Selanjutnya lihat Mr. Moh. Thayeb, "Blokade Ekonomi", *Mimbar Indonesia*, no. I. th. 11, 3 Januari 1947, hlm. 10

merupakan perintisan dari pemecahan masalah ekonomi secara menyeluruh. Konferensi dipimpin oleh Ir. Darmawan Mangunkusumo, Menteri Kemakmuran. Tujuan konferensi ini ialah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat di dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah adalah:

1. masalah produksi dan distribusi bahan makanan;
2. masalah sandang;
3. status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

Di dalam masalah produksi dan distribusi bahan makanan masih tetap dilakukan autarki lokal sebagai kelanjutan sistem ekonomi perang Jepang. Sampai saat itu belum ada peraturan yang mengubahnya. Sistem ini disepakati akan dihapuskan secara berangsur-angsur dan diganti dengan sistem desentralisasi. Badan Pengawasan Makanan Rakyat kemudian diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM) di bawah supervisi Kementerian Kemakmuran. PPBM dipimpin oleh dr. Sudarsono dapat dianggap sebagai pendahulu dari Badan Urusan Logistik (Bulog) sekarang.[250] Sejak adanya PPBM, larangan pengiriman bahan-bahan antarkeresidenan dihapuskan, kecuali beras. Untuk beras masih harus mendapat izin dari Jawatan Kemakmuran. Tentang administrasi perkebunan-perkebunan, konferensi menyumbangkan beberapa pokok pikiran mengenai penilaian kembali status dan administrasi perkebunan yang merupakan perusahaan vital bagi RI. Pada Kabinet Sjahrir II, persoalan status dan administrasi perkebunan berhasil diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai negara dengan sistem sentralisasi di bawah pengawasan Menteri Kemakmuran.

Konferensi ekonomi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi ekonomi kedua ini mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan konferensi yang pertama. Acara-acara yang dibahas adalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini rencana konkret yang disarankan oleh Wakil Presiden Moh. Hatta adalah rehabilitasi pabrik-pabrik gula karena gula merupakan bahan ekspor yang penting dan pengusahaannya harus dikuasai negara.[251] Hasil ekspor ini diharapkan dapat dibelikan atau ditukar dengan barang-barang lain yang sangat dibutuhkan oleh RI. Rencana dan rancangan lainnya yang dibahas dalam Konferensi Ekonomi ini belum dapat direalisasikan dalam waktu yang singkat.

---

[250] *Siasat*, no. 20, th. I, 17 Mei 1947, hlm. 4

[251] *Makmoer*, no. 10, th. I, 10 Mei 1946, hlm. 331

Realisasi yang konkret adalah penguasaan dan pengubahan administrasi perusahaan gula. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3/ 1946 tanggal 21 Mei 1946 dibentuk Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) dengan status perusahaan negara. BPPGN dipimpin oleh Notosudirdjo.[252] Peraturan mengenai gula disusun dengan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1946, tanggal 6 Juni 1946, mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). Status PPN adalah perusahaan negara, yang mempunyai tugas:

1. meneruskan pekerjaan bekas perusahaan perkebunan yang dikuasai oleh Jepang;
2. mengawasi perkebunan bekas milik Belanda;
3. mengawasi perkebunan-perkebunan lainnya dengan cara mengawasi mutu produksinya.

   Pulau Jawa dibagi atas beberapa wilayah PPN.[253]

Sesudah dua kali mengadakan konferensi ekonomi, pemerintah tetap berusaha sekuat tenaga untuk memecahkan masalah ekonomi secara realistis. Atas inisiatif Menteri Kemakmuran dr. A.K. Gani, pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk *Planning Board* (Badan Perancang Ekonomi).[254] Badan Perancang Ekonomi merupakan badan tetap, yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun. Perencanaannya adalah untuk mengoordinasi dan merasionalisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum seperti yang dilakukan pada BPPGN dan PPN. Sesudah Badan Perancang ini bersidang, Menteri Gani kemudian mengumumkan rencana pemerintah tentang Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Rencana-rencana yang dikemukakan oleh dr. A.K. Gani sebagai langkah pertama adalah:

1. semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik negara, jatuh ke tangan pemerintah RI;
2. bangunan umum vital milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi;
3. perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap RI;
4. perusahaan modal asing lainnya akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian RI-Belanda.[255]

---

[252] *Antara*, 22 Juni 1946

[253] Lima Wilayah PPN: Jakarta, Banten, Bogor, Priangan-Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur".

[254] *Antara*, 14 Juni 1947

[255] *Siasat*, no. 15, tahun I, 12 April 1947, hlm. 2

A.K. Gani menyatakan bahwa biaya untuk melaksanakan rancangan ini akan diperoleh dari penanaman modal asing, serta pinjaman dari dalam dan luar negeri. Untuk menampung dana-dana pembangunan yang direncanakan, dibentuk Bank Pembangunan.

Pemikiran-pemikiran yang dituangkan Badan Perancang ini oleh pemerintah dinilai sangat positif. Perusahaan patungan (*joint venture*) diperkenankan didirikan dengan pengawasan dari negara. Tanah-tanah partikelir dihapuskan.

Untuk membiayai rencana pembangunan ekonomi ini pemerintah akan mengerahkan dana-dana masyarakat, yaitu dengan pinjaman nasional dan tabungan rakyat, pinjaman dari luar negeri sebagaimana yang telah direncanakan oleh *Planning Board.* Biaya lainnya didapat dengan cara mengikutsertakan badan-badan swasta.[256]

Rencana panitia pemikir ini tidak berhasil dilaksanakan karena situasi politik dan militer tidak memungkinkan. Agresi Militer Belanda Pertama mengakibatkan sebagian besar daerah Republik yang ekonomis potensial jatuh ke tangan mereka. Wilayah RI yang tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatra tergolong daerah minus dan berpenduduk padat. Akibatnya, kesulitan ekonomi semakin memuncak. Di samping itu, pemerintah harus pula menanggung konsekuensi Persetujuan *Renville,* yakni pasukan-pasukan TNI harus ditarik ke wilayah RI dari kantung-kantung perlawanan yang berada di daerah pendudukan Belanda.

Pemerintah yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta melaksanakan tindakan yang realistis, yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi itu meliputi penyempurnaan administrasi negara,Angkatan Perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah satuan Angkatan Perang dan laskar yang menjadi beban pembiayaan pemerintah, dikurangi secara drastis. Tenaga-tenaga bekas Angkatan Perang dan laskar-laskar (rasionalisan) disalurkan ke bidang yang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

Dasar ekonomi adalah produksi petani, maka bidang ini akan dipergiat kembali. Menteri Urusan Bahan Makanan Kasimo membuat Rencana Produksi Tiga Tahun 1948–1950 atau terkenal dengan *Plan Kasimo* yang pada dasarnya adalah usaha swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis. Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah yang kosong di Sumatra Timur seluas 281.277 ha. Di Jawa diadakan intensifikasi dengan menanam bibit padi unggul. Hewan yang memegang peran penting dalam produksi pangan dipelihara sebaik-baiknya, dalam

---

[256] Dasar Pokok Rencana Ekonomi Indonesia", *Mimbar Indonesia,* no. 2, tahun I, 22 November 1947, hlm. 7

arti pencegahan penyembelihan dan penggunaan yang kurang perlu. Sensus hewan harus dilaksanakan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit untuk memberikan bibit yang baik bagi rakyat. Oleh Kasimo juga disarankan agar dilaksanakan transmigrasi.[257]

Pada bulan April 1947, Badan Perancang dr. A.K. Gani diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi. Panitia Pemikir ini dipimpin sendiri oleh Wakil Presiden Hatta, sedangkan dr. A.K. Gani menjadi wakilnya. Tugas panitia ini adalah mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan bahan bagi kebijakan pemerintah dan bahan-bahan guna merencanakan pembangunan ekonomi, serta nasihat-nasihat kepada pemerintah dalam rangka perundingan dengan Belanda. Panitia Pemikir ini dibagi atas delapan bagian yang mempelajari masalah ekonomi yang mendesak pada waktu itu, yaitu:

1. masalah ekonomi umum;
2. masalah perkebunan;
3. masalah industri, pertambangan, dan minyak bumi;
4. masalah hak milik asing;
5. masalah keuangan;
6. masalah listrik, kereta api, dan trem;
7. masalah perburuhan;
8. masalah-masalah di daerah pendudukan Belanda.[258]

Panitia Pemikir ini kemudian menghasilkan dasar pokok rancangan ekonomi Indonesia. Rancangan ini berisi program pembangunan jangka panjang, dengan tujuan memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat secara merata, dengan cara:

1. mengintensifkan usaha produksi;
2. memajukan pertukaran internasional;
3. mencapai taraf hidup yang lebih tinggi;
4. mempertinggi derajat dan kecakapan rakyat.

Petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti adalah sebagai berikut.

Sektor perdagangan digiatkan kembali. Impor dibatasi pada barang-barang yang penting seperti bahan pakaian, bahan baku untuk industri, dan alat transpor. Ekspor meliputi hasil-hasil perkebunan, hasil hutan, dan tambang. Penyebaran penduduk dengan cara memindahkan sejumlah 20 juta penduduk Jawa ke Sumatra selama 15 tahun. Dengan cara demikian,

---

[257] "Rencana Produksi Tiga Tahun" (Plan Kasimo), *Buku Penyongsong Konferensi Ekonomi Antar-Indonesia di Yogyakarta*, 2–8 Desember 1949, 1949, tanpa halaman

[258] John. O. Sutter, *op. cit.*, hlm. 496–497

diharapkan kemakmuran di Jawa berkembang dan terbuka kemakmuran baru di Sumatra. Dasar politik ekonomi pemerintah adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni semua perusahaan vital harus dikuasai oleh negara. Perusahaan itu adalah perusahaan listrik dan air, perusahaan kereta api dan trem, pos dan telekomunikasi, serta bank sirkulasi.

Semua hasil pemikiran itu belum sempat dilaksanakan karena situasi politik dan militer yang tidak kondusif. Pada bulan September 1948 pecah pemberontakan PKI di Madiun, yang kemudian segera disusul dengan Agresi Militer Belanda II pada bulan Desember 1948.

Pada masa Perang Kemerdekaan, karena pemerintah mengawasi semua kegiatan ekonomi, peran dan partisipasi pengusaha-pengusaha swasta kurang begitu menggembirakan. Oleh karena itu, di dalam kongres Persatuan Ekonomi di Malang, Wakil Presiden Moh. Hatta menganjurkan agar para pengusaha swasta memperkuat wadah persatuannya. Anjuran ini mendapat dukungan dari para pengusaha.

Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) di bawah pimpinan B.R. Motik menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Tujuannya adalah menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkukuh ekonomi bangsa Indonesia. Bahkan, Presiden Soekarno pernah menjanjikan kepada PTE, dalam rangka lebih meningkatkan partisipasinya, akan diangkat calon-calon dari PTE di dalam Komite Nasional Pusat. Dianjurkan juga agar pemerintah daerah membantu usaha-usaha PTE. Akan tetapi, akibat perubahan situasi, perusahaan-perusahaan yang berada di bawah PTE menjadi semakin mundur. PTE hanya berhasil mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal pertama Rp5.000.000,00. Kegiatan PTE semakin mundur akibat aksi militer Belanda. PTE kemudian mencurahkan kegiatannya pada bidang perbankan.[259]

Usaha perdagangan swasta lainnya yang membantu usaha ekonomi pemerintah adalah *Banking and Trading Corporation* (BTC) atau Perseroan Bank dan Perdagangan. Dibentuknya BTC ini, menurut Dr. Sumitro Djojohadikusumo, adalah langkah persiapan organisasi badan perdagangan nasional, jika sewaktu-waktu perjuangan politik beralih ke perjuangan ekonomi.[260] Beberapa perusahaan lainnya dari kalangan swasta bergabung dalam bentuk gabungan perusahaan. Misalnya, Gabungan Perusahaan

---

[259] Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) dibentuk di Jakarta pada bulan September 1945 sebagai hasil permusyawaratan Kaum Ekonomi Indonesia yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 20 Juli 1945; periksa *Indonesia Merdeka*, no. 7, th. I, 25 Juli 2605 (1945), hlm. 5. Ketua PTE adalah B.R. Motik. Tujuan PTE: menyusun segala tenaga ekonomi bangsa Indonesia dalam kebaktian terhadap pemerintah dan memperkukuh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia, Soewarno, "Persatuan Tenaga Ekonomi", *Buku Penyongsong*, tanpa halaman

[260] *Siasat*, Tahun I, 22 Februari 1947, hlm. 1

Perindustrian dan Perusahaan Penting yang berpusat di Malang. Pusat Perusahaan Tembakau Indonesia (Puperti) yang berpusat di Cirebon.[261] Produksi Puperti mencapai 170 juta batang rokok untuk konsumen di Jawa.[262]

I. Pendidikan, Budaya, dan Komunikasi Sosial

1. Perkembangan Pendidikan

Dalam kabinet pertama RI (Kabinet Presidensial), Ki Hadjar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Jabatan ini dipegangnya sampai dengan tanggal 14 November 1945, selama kurang lebih tiga bulan. Dalam Kabinet Sjahrir I yang menggantikan Kabinet Presidensial, jabatan Menteri PPK dipegang oleh Mr. T.S.G. Mulia (14 November 1945 sampai 12 Maret 1946). Dalam Kabinet Sjahrir II yang mulai bekerja tanggal 12 Maret 1946, pada mulanya jabatan Menteri PPK masih kosong. Barulah pada tanggal 29 Juni 1946 ditunjuk menteri baru, yakni Mohammad Sjafei. Akan tetapi, Sjafei tidak pernah menduduki jabatannya sebab ia tidak mungkin meninggalkan Sumatra Barat.[263] Praktis yang bertindak sebagai Menteri PPK ialah T.S.G. Mulia yang sesungguhnya memegang jabatan sebagai Wakil Menteri PPK.

Dalam Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 sampai 26 Juni 1947) jabatan Menteri PPK dipegang oleh Mr. Suwandi. Pada masa Suwandi ini di Yogyakarta dibentuk suatu panitia yang bertugas meneliti dan merumuskan masalah-masalah pengajaran, yakni Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pekerja KNIP tanggal 27 Desember 1945 atas usul pemerintah. Pertimbangannya adalah bahwa untuk pembinaan negara dan masyarakat baru, perlu diciptakan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru. Dengan adanya panitia ini pemerintah berharap akan terdapat kebulatan paham dengan masyarakat[264] mengenai masalah pendidikan.

Pada tanggal 12 Mei 1947 Menteri PPK mengesahkan anggota Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang beranggota 52 orang.[265] Anggota panitia tersebut diambil dari semua lapisan dan aliran yang ada yang mencakup semua lapangan dan tingkatan. Panitia ini bertugas

---

261 *Antara*, 31 Mei 1946

262 *Ibid.*, 2 Januari 1947

263 A.A. Navis, *Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Sjafei*, 1966, hlm. 40

264 Sugarda Purbawakatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, 1970, hlm. 35

265 *Berita Repoeblik Indonesia*, no. 15–16, tahun 11, 1 Juli 1946, hlm. 145

meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari usia tiga tahun hingga dewasa, atau dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi dengan segala macam coraknya. Tugas panitia, seperti yang diarahkan oleh Mr. Suwandi, adalah:

1. merencanakan susunan baru untuk tiap-tiap macam sekolah (*schooltype*);
2. menetapkan bahan-bahan pengajaran dan menimbang keperluan yang praktis dan tidak terlalu berat;
3. menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas, termasuk fakultas, dengan disertai daftar dan keterangan-keterangan yang langsung.[266]

Hal-hal lain, khususnya mengenai masalah konsentrasi rencana pelajaran, perlengkapan sekolah, organisasi, dan administrasi, serta pemeliharaan isi pendidikan dan pengajaran, termasuk soal-soal agama, budi pekerti, dan budaya menjadi perhatian panitia ini. Setelah bekerja beberapa bulan, panitia ini menghasilkan saran-saran untuk disampaikan kepada pemerintah tentang pelbagai hal yang menyangkut bidang teoretis, praktis, teknis, serta arah dan tujuan pendidikan. Pokok-pokok saran itu adalah:

1. pedoman pendidikan dan pengajaran harus diubah secara mendasar;
2. khusus mengenai pengajaran diharapkan agar bisa mendapat tempat yang teratur dan saksama;
3. mengenai pengajaran tinggi disarankan supaya diadakan seluas-luasnya, dan tenaga pengajarnya jika perlu menggunakan tenaga bangsa asing sebagai guru besar;
4. disarankan agar diusahakan pengiriman pelajar-pelajar ke luar negeri;
5. "paham perseorangan" yang masih dianut, harus diganti dengan "paham susila dan rasa perikemanusiaan yang tinggi", sebab tujuan pendidikan dan pengajaran diarahkan kepada usaha membimbing murid-murid agar menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab;
6. tentang kewajiban bersekolah, panitia menyarankan agar wajib sekolah dilaksanakan secara bertahap, sesingkat-singkatnya 10 tahun;
7. bidang-bidang pengajaran kejuruan, seperti pertanian, industri, pelayaran, dan perikanan diharapkan mendapat perhatian istimewa, sedangkan pengajaran kesehatan dan olahraga hendaknya diatur dengan baik, sehingga dapat dihasilkan kecerdasan rakyat yang harmonis;

---

[266] *Ibid.*

8. tentang masalah pembiayaan, panitia menyarankan agar untuk sekolah dasar tidak dipungut uang sekolah, sedangkan untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi agar diadakan aturan pembayaran dan tunjangan yang luas sehingga soal keuangan tidak menjadi halangan bagi pembayar-pembayar yang kurang mampu.[267]

Setelah pemerintah menerima saran-saran dari Panitia Penyelidik Pengajaran tersebut, disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan baru. Tujuan umum pendidikan merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dasar-dasar pendidikan menganut prinsip-prinsip demokrasi, kemerdekaan, dan keadilan sosial.

Pendidikan terbagi atas empat tingkatan: pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada pendidikan rendah, anak-anak diajarkan dasar-dasar pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Dengan cara ini, mereka dapat mulai memahami persoalan di sekitar mereka. Pendidikan lanjutan atas umum, juga memberikan pendidikan khusus kepada kelas terakhir, guna mempersiapkan mereka memasuki perguruan tinggi. Juga pendidikan kejuruan, seperti sekolah-sekolah perindustrian yang mendidik tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian khusus, perlu diselenggarakan guna memenuhi kebutuhan pemerintah.

Lama pendidikan, dilihat dari tingkatannya, dibagi sebagai berikut:

1. sekolah rakyat (dasar), enam tahun.
2. sekolah lanjutan, tiga hingga enam tahun.
3. sekolah industri, tiga hingga enam tahun.
4. perguruan tinggi, empat hingga enam tahun.

Pada pendidikan dasar, anak akan mengikuti pendidikan pada sekolah rakyat, dimulai pada usia enam tahun. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap sekolah rakyat setelah kemerdekaan pada akhir tahun ajaran didatangi oleh lebih kurang 2.000 orang calon murid. Untuk dapat meneruskan pada pendidikan lanjutan, anak harus menyelesaikan pendidikan sekolah rakyat sebagai syaratnya.

Pendidikan sekolah lanjutan dibagi menjadi dua bagian, yaitu tingkat lanjutan pertama tiga tahun dan tingkat lanjutan atas juga tiga tahun.

Untuk sekolah lanjutan kejuruan dagang, selain mata pelajaran umum para siswa diberi pelajaran mengetik, surat-menyurat, tata buku, dan ilmu

---

[267] Sugarda Purbakawatja, *op. cit.*, 1970, hlm. 38–39

dagang. Pendidikan ini merupakan pendidikan kejuruan dagang tingkat pertama. Sekolah lanjutan kejuruan tingkat pertama lainnya ialah sekolah teknik dan sekolah perindustrian.

Untuk mempersiapkan tenaga-tenaga pengajar bagi pendidikan dasar, diadakan sekolah guru yang lama pendidikannya lima tahun, dengan syarat siswa harus memiliki ijasah sekolah rakyat, atau pendidikan sekolah guru dua tahun untuk mereka yang berijasah sekolah lanjutan pertama. Para pengajar di sekolah guru ini harus berusia paling sedikit 18 tahun. Untuk mempersiapkan tenaga pendidik bagi sekolah lanjutan pertama dibuka Kursus Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama. Kursus ini merupakan pendidikan lanjutan bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan guru sekolah rendah dan telah memiliki masa kerja praktik mengajar dua tahun. Lama kursus tiga tahun. Mata pelajarannya meliputi matematika, ilmu tubuh manusia, ilmu kimia, sastra (termasuk pelajaran bahasa Indonesia, Inggris, dan Jerman), ilmu bumi dan sejarah, tata buku, ekonomi, serta zoologi dan botani.

Semua mata pelajaran tersebut diberikan selama mengikuti kursus tiga tahun. Mata pelajaran melukis, olahraga, dan pekerjaan tangan (prakarya) diberikan pada tahun kedua; ilmu jiwa praktis merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tersebut. Kursus diadakan pada petang hari karena pada pagi hari para siswa bertugas sebagai guru. Mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut dan menerima diploma A, berhak mengajar di sekolah lanjutan pertama. Mereka juga diberi kesempatan untuk mencapai diploma B dengan persyaratan tertentu. Pemilik diploma B ini berhak mengajar di sekolah lanjutan atas. Bagi pemilik ijasah perguruan tinggi dan berhasrat mengajar, diberikan kualifikasi mengajar seperti pemilik diploma B.

Di sekolah-sekolah kejuruan, yang diutamakan adalah pendidikan teknik. Sekolah ini dibagi atas sekolah teknik pertama dan sekolah teknik menengah. Kedua sekolah ini merupakan cabang dari sekolah perindustrian. Baik di sekolah teknik pertama maupun di sekolah teknik menengah, lama pendidikan tiga tahun.

Mata pelajaran bersifat praktis dan teoretis. Pelajar pada sekolah teknik menengah diberi juga kesempatan untuk mengambil pengkhususan mempelajari masalah-masalah perkapalan, tambang, dan kimia.

Di bidang pendidikan tinggi, pada bulan Agustus 1945 telah berdiri Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, dengan fakultas-fakultas sastra, kedokteran, farmasi, dan hukum, yang dipimpin oleh Prof. dr. Sarwono Prawirodihardjo. Oleh karena itu, panitia menyarankan agar pendidikan

tinggi dibagi atas lima fakultas, yaitu sastra, ilmu alam, teknik, kedokteran, dan ekonomi. Sejak tanggal 1 Oktober 1946 urusan pengajaran pertanian dipindahkan wewenangnya,[268] diurus langsung oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah-sekolah pertanian yang diurus oleh pemerintah daerah statusnya tetap.

Pada pendidikan dasar, berdasarkan keputusan Kementerian PP & K tanggal 3 September 1946, diadakan pengembangan sekolah pertama tiga tahun menjadi sekolah rakyat, dengan menambah kelas IV pada beberapa sekolah pertama. Keputusan itu mulai berlaku pada awal tahun ajaran 1946/1947. Juga diputuskan mengubah nama sekolah pertama yang mendapat tambahan kelas IV itu menjadi sekolah rakyat.[269] Sekolah-sekolah yang diklasifikasikan sebagai sekolah lanjutan pertama adalah sekolah menengah pertama (SMP), sekolah teknik pertama (STP), sekolah teknik menengah (STM), sekolah guru menengah (SGM), sekolah kepandaian putri (SKP), sekolah pertanian menengah (SPM), dan sekolah dagang menengah (SDM), sedangkan yang termasuk dalam kelompok sekolah lanjutan tingkat tinggi ialah: sekolah menengah tinggi (SMT), sekolah menengah tinggi teknik (SMTT), sekolah pertanian menengah tinggi (SPMT), sekolah guru kepandaian putri (SGKP), dan sekolah guru tinggi (SGT).

Untuk keperluan ujian bagi tiap-tiap sekolah lanjutan, oleh kepala pemerintah daerah keresidenan, daerah istimewa, serta kota praja, dibentuk panitia ujian penghabisan yang terdiri atas kepala sekolah sebagai ketua, seorang guru yang ditunjuk olehnya sebagai penulis, guru-guru yang memberikan pelajaran di kelas tertinggi, dan beberapa tokoh masyarakat sebagai anggota.

Di dalam rangka pengembangan perguruan tinggi, di Yogyakarta diadakan Konferensi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan dari tanggal 25 April sampai dengan 1 Mei 1947. Konferensi dihadiri oleh 220 orang peserta. Menurut kesimpulan konferensi itu, salah satu masalah yang menghalangi kemajuan perguruan tinggi ialah karena perguruan tinggi tidak bernaung di bawah satu kementerian. Ada yang masuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Kemakmuran, juga ada yang menjadi milik partikelir atau swasta. Akibatnya, kerja sama antarperguruan tinggi menjadi sulit. Konferensi menyarankan kepada pemerintah agar beberapa perguruan tinggi disatukan sehingga terdapat susunan pengajaran dan sarana yang lebih memuaskan. Pihak partikelir

---

[268] Tim Redaksi Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, *Sedjarah Singkat Universitas Indonesia*, 1967, hlm. 6

[269] *Berita Repoeblik Indonesia*, no. 22–23, tahun 11, 1–15 Oktober 1946, hlm. 266–267

atau swasta yang menyelenggarakan perguruan tinggi tidak berkeberatan melepaskan sifat khasnya, jika hal itu dianggap perlu. Akan tetapi, beberapa pembicara dalam konferensi itu ternyata berpendapat bahwa menyatukan semua perguruan tinggi dalam satu balai perguruan tinggi yang terkumpul pada satu tempat saja, bukanlah usaha yang baik. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah bekerja sehingga sulit untuk pindah ke tempat lain. Juga masalah pemondokan dan situasi politik yang labil merupakan faktor-faktor penghambat. Namun, konferensi itu telah mencetuskan dua gagasan penting tentang asas dan tujuan perguruan tinggi, yaitu:

1. mewujudkan pusat budaya dan ilmu-ilmu;
2. mendidik orang-orang yang memerlukan pendidikan tinggi guna keperluan masyarakat dan negara.

Konferensi mengusulkan pembagian ilmu-ilmu dalam tiga bagian. *Pertama*, ilmu-ilmu alam (*natuurwetenschappen*) yang meliputi ilmu teknik, fisika, ilmu pasti, kedokteran, dan biologi. *Kedua*, "ilmu-ilmu kebudian" yang meliputi sastra, filsafat, dan agama. *Ketiga*, ilmu-ilmu sosial yang melingkupi hukum. Atas dasar pembagian itu dapat disusun balai perguruan tinggi atau universitas. Diusulkan pula agar kepada mereka yang telah menyelesaikan ujian sarjana (doktoral) diberikan gelar kesarjanaan. Gelar-gelar yang diusulkan adalah SA untuk lulusan bidang ilmu-ilmu alam adalah SAD (Sarjana Ilmu Alam Dokter) untuk lulusan bidang kedokteran, SB (Sarjana Ilmu-ilmu Kebudian) untuk lulusan bidang ilmu-ilmu kebudian, dan SS (Sarjana Ilmu-ilmu Sosial) untuk lulusan bidang ilmu-ilmu sosial.[270]

Perguruan tinggi yang didirikan pada masa awal kemerdekaan adalah sekolah tinggi teknik didirikan di Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 1946. Pada tanggal 3 Maret 1946 oleh Yayasan Perguruan Tinggi Gajah Mada diresmikan berdirinya Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada yang terdiri atas Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusasteraan bertempat di Pagelaran, Yogyakarta.[271]

Pada tanggal 25 September 1946 telah dibuka Fakultas Hukum dan Kesusasteraan Darurat di Jakarta, serta Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kedokteran Gigi di Kota Malang. Perguruan Tinggi Kedokteran bagian II sebelumnya telah dibuka tanggal 4 Maret 1946 di Solo, dan bagian I pada tanggal 5 Maret 1946 di Klaten. Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan dibuka oleh Menteri Kemakmuran Republik Indonesia di Bogor pada bulan

---

[270] "Konferensi Perguruan Tinggi", *Pembangunan*, no. 1, tahun II, 1 April 1947, hlm. 49–50

[271] lstilah "fakulteit", "universiteit" kemudian diubah menjadi "fakultet" "serta" universitet", dan kemudian lagi menjadi "fakultas" dan "universitas"

November 1946. Dengan meletusnya Aksi Militer I Belanda pada bulan Juli 1947, perguruan tinggi tersebut dipindahkan ke Klaten, sama halnya dengan perguruan tinggi di Malang. Sebagian juga mengungsi ke Klaten dan Yogyakarta.[272]

Sementara itu, pemerintah pendudukan Belanda dalam tahun 1947 telah mendirikan "Universiteit van Indonesie", sebagai gabungan dari perguruan tinggi yang didirikan dari fakultas-fakultas Hukum, Kedokteran, Ekonomi, dan Sastra. Di Bogor, Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan, di Bandung Fakultas Teknik, kemudian diperluas lagi dengan perguruan-perguruan tinggi di Surabaya (Kedokteran Gigi) dan di Makassar (Ekonomi). Di pihak Republik diresmikan berdirinya Universitas Gajah Mada (Negeri) pada tanggal 19 Desember 1949 yang berkedudukan di Yogyakarta, yang terdiri dari enam fakultas.[273]

2. Sistem Pendidikan

Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara tidak semata-mata memikirkan pendidikan reguler, tetapi juga berusaha mengembangkan suatu sistem pendidikan masyarakat. Landasannya adalah keadilan sosial. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak di dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada tahap pertama, untuk memperkuat potensi dan kecerdasan masyarakat, satu-satunya cara yang diusulkan adalah pemerintah hendaknya membuka sekolah khusus untuk semua lapisan masyarakat. Metode pengajaran yang digunakan adalah metode sekolah kerja. Tujuannya agar aktivitas yang dipusatkan kepada sesuatu pekerjaan atau keterampilan tertentu dapat berkembang seluas-luasnya. Corak pendidikannya bersifat khas karena sasarannya adalah orang-orang dewasa. Selain itu, perlu juga diadakan perguruan untuk pemimpin masyarakat pada tiap bidang yang penting. Telah dipikirkan pula untuk membentuk kelas masyarakat, yakni suatu kelas yang mengutamakan mata pelajaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dianjurkan agar setiap sekolah mempunyai pandangan yang objektif, yang ditujukan kepada lingkungan hidup murid-murid dan kemudian baru dihadapkan ke dalam lingkungan masyarakat luas. Pertimbangan-pertimbangan lain mengenai pentingnya menyelenggarakan kelas masyarakat itu karena:

---

[272] *Berita Repoeblik*, no. 22–23, tahun 11, 1–15 Oktober 1946, hlm. 226–227

[273] Departemen Perguruan Tinggi dan llmu Pengetahuan, *Perguruan Tinggi di Indonesia*, 1965, hlm. 9–12

1. sistem pengajaran yang lama bercorak statis, tidak hidup, dan tidak dinamis;
2. hubungan antara sekolah (guru-guru) dan orang tua murid renggang dan terbatas;
3. pengajaran yang diberikan bersifat "diktatorial";
4. pengajaran kurang praktis;
5. murid-murid terlampau pasif, hanya menerima.

Usaha-usaha yang perlu dilaksanakan adalah mempraktiskan pengajaran, menghidupkan pelajaran-pelajaran, dan memperkuat autotiaktivitas para murid. Kelas masyarakat itu direncanakan terdiri atas empat macam, yaitu kelas-kelas masyarakat pertanian, perdagangan, kerajinan, dan kewanitaan. Kelas masyarakat itu diutamakan bagi murid-murid yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke sekolah lanjutan. Lama pengajaran ditetapkan satu tahun. Selama satu tahun itu diusahakan membentuk jiwa si anak agar dapat langsung bekerja di lingkungan masyarakat. Dengan mengadakan kelas masyarakat itu diharapkan akan timbul golongan "menengah" dan golongan "produsen" yang tangguh. Sebagaimana diketahui, kedua golongan itu masih lemah keadaannya, lebih-lebih golongan menengah. Menurut catatan pada waktu itu murid tamatan sekolah rakyat (sekolah dasar) 1944/1945 yang tidak melanjutkan pelajarannya ke sekolah lanjutan berjumlah 80.050 orang.

Berdasarkan angka tersebut, direncanakan akan dibuka paling sedikit 1.000 buah kelas masyarakat. Untuk menyelenggarakan kelas masyarakat itu perlu bekerja sama dengan Kementerian-kementerian Perdagangan dan Pekerjaan Umum.[274]

Panitia Penyelidik juga memikirkan pemberantasan buta huruf. Di Jawa pada tahun 1946, diperkirakan terdapat lima sampai enam juta penduduk yang buta huruf. Masalah ini dapat diatasi dengan cepat, apabila pemerintah berhasil menyusun rencana yang terkoordinasi, dengan mengikutsertakan masyarakat. Peran masyarakat sangatlah menentukan karena akan sangat mahal apabila mengeluarkan biaya bagi pendidikan dan gaji bagi guru-guru pemberantas buta huruf.

Di samping pendidikan dasar, Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Menteri Ki Hadjar Dewantara sangat memerhatikan pendidikan olahraga. Seorang tokoh gerakan olahraga, dr. Abdrurachman Saleh diserahi membina keolahragaan. Kemudian dibentuk Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) dan dibentuk pula Komite

[274] "Oeraian tentang kelas Masjarakat", *Pewarta*, no. 1, tahun I, 15 Juni 1946, hlm. 10–18

Olimpiade Indonesia (KORI) yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubowono IX. Pada bulan September 1948, berhasil diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional I di kota Solo.

3. Perkembangan Bahasa dan Sastra

Sejak awal kemerdekaan, bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu bangkitnya semangat kebangsaan Indonesia yang telah mengatasi kedaerahan dan kesukuan. Faktor kedua karena telah terbitnya kitab *Logat Melayu* pada tahun 1901 karangan van Ophuyzen, yang digunakan di sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Melayu. Faktor ketiga ialah didirikannya *Commissie voor de Volkslectuur* pada tahun 1908, yang kemudian menjadi Balai Pustaka. Hal ini mendorong perkembangan di bidang bahasa dan sastra, terutama dengan lahirnya kelompok "Pujangga Baru".

Faktor-faktor di atas mendasari terpenuhinya fungsi bahasa tersebut sebagai bahasa baku yang telah memperkuat sikap masyarakat Indonesia terhadapnya. Adanya larangan menggunakan bahasa Belanda pada zaman Jepang telah memberikan peluang bagi pengembangan bahasa Indonesia dalam bidang-bidang administrasi, pendidikan, komunikasi massa, penerjemahan buku-buku pelajaran ke dalam bahasa Indonesia, serta perkembangan yang pesat di bidang sastra Indonesia. Timbulnya usaha-usaha kodifikasi tata bahasa, pemakai kata-kata baru dan peristilahan telah memberikan kerangka petunjuk kepada para penutur, sehingga kesadaran akan norma pun akhirnya bertambah besar.

Sejak awal zaman kemerdekaan bahasa Indonesia sudah memenuhi fungsi dan menerima sikap yang diperlukan sebagai bahasa baku. Contohnya: teks Proklamasi ditulis dalam bahasa Indonesia.[275] Pemerintah memegang peran penting dalam usaha-usaha memajukan bahasa Indonesia. Sejak tahun 1947 usaha kodifikasi diteruskan oleh Menteri PP dan K Mr. R. Suwandi.[276] Menteri PP dan K pada waktu itu bermaksud menyederhanakan ejaan van Ophuyzen. Oleh Menteri dibentuk suatu Komisi Bahasa pada 18 Juni 1947. Komisi ini diberi tugas untuk:

1. menetapkan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia;
2. menetapkan tata bahasa Indonesia;
3. menyusun kamus baru atau menyempurnakan kamus yang telah ada dalam bahasa Indonesia untuk keperluan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah.

[275] B.H. Hoed, "Pembakuan Bahasa Indonesia", *Kompas*, 29 Juli 1972, hlm. III, IX

[276] Lembaga Bahasa Indonesia, *Bahasa dan Kesusastraan*, Seri Khusus, no. 9/1972, hlm. 76

Hasil panitia ini ialah lahirnya Ejaan Republik, yang biasa disebut "Ejaan Suwandi",[277] serta ditetapkannya 5.000 istilah baru.[278]

Kebutuhan akan adanya pembakuan bahasa Indonesia disebabkan adanya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beraneka bahasa (*pluri-lingual*). Dalam usaha pembakuan bahasa Indonesia ini ternyata faktor bahasa asing dan bahasa daerah harus diperhitungkan. Di samping bahasa Indonesia, bahasa asing pun dianggap penting. Dapat dirasakan bagaimana kuatnya kedudukan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari yang jumlahnya lebih kurang 200 buah.

Dalam menghadapi hal tersebut pembakuan merupakan salah satu segi dari politik bahasa. Politik bahasa adalah kebijakan di dalam menentukan pilihan terhadap satu atau lebih bahasa dan bagaimana menggunakan serta mengembangkannya demi kepentingan masyarakat atau negara. Sudah menjadi suatu kenyataan bahwa sejak lahirnya negara RI, pelbagai seminar dan diskusi telah diadakan untuk membahas pelbagai masalah yang menyangkut bahasa Indonesia. Di samping itu, secara terpisah para ahli bahasa Indonesia, Prancis, dan Jerman telah mengadakan lokakarya mengenai masalah-masalah yang timbul. Selain itu, pertemuan-pertemuan untuk membicarakan masalah bahasa daerah, seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda, juga diadakan.

Kongres Bahasa Indonesia yang pertama tahun 1938 di Surakarta memutuskan perlunya segera mengadakan suatu lembaga dan suatu fakultas bahasa Indonesia, guna menentukan istilah-istilah ilmu.[279] Pada zaman Jepang tanggal 20 Oktober 1942 oleh Kantor Pengajaran Bala Tentara Jepang didirikan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia yang terdiri dari tiga bagian.[280] Seksi ketiga yang menyelenggarakan penentuan kata-kata istilah, dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, dan terbagi atas beberapa seksi kecil. Pada tanggal 30 April 1945 Komisi Bahasa tersebut dibubarkan setelah menghasilkan 7.000 istilah baru.

Komisi bahasa yang baru dibentuk pada tanggal 18 Juni 1947. Pembentukan istilah dilanjutkan oleh Komisi Istilah dari Lembaga Bahasa dan Budaya, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dalam Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, khusus mengenai masalah istilah ditentukan bahwa istilah-istilah yang telah biasa dipakai hingga saat ini, tetap diakui, sedangkan istilah yang telah disiarkan oleh Komisi Istilah supaya disaring

---

[277] Berdasarkan Keputusan Menteri PP & K No. 268/ Th. 4, 19 Maret 1947, diakui sebagai ejaan baru

[278] S. Takdir Ali Sjahbana, *Sedjarah Bangsa Indonesia*, 1956, hlm. 19

[279] B.H. Hoed, "Pembakuan Bahasa Indonesia", *Kompas*, 29 Djuni 1972, hlm. IX

[280] Alisjahbana, "Sedjarah Bahasa Indonesia", *Pembinaan Bahasa Indonesia*, no. 6, th. III, 1955, hlm, 72

dengan cara berpegang pada pengertian keseluruhannya, dan tidak hanya merupakan penerjemahan kata-kata bagiannya. Semua istilah internasional dalam lapangan ilmiah dan budaya diterima dengan diselaraskan kepada bahasa Indonesia, itu pun bila dipandang perlu dan tidak merusak pengertiannya. Selanjutnya untuk memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia hendaknya diambil kata-kata dari bahasa daerah dan bahasa yang serumpun.[281] Pada tahun 1972 pemerintah Orde Baru akhirnya menetapkan berlakunya sebuah ejaan yang disempurnakan (EYD) mulai tanggal 17 Agustus 1972,[282] dan yang berlaku juga bagi bahasa Malaysia.

Bersamaan dengan datangnya Jepang pada tahun 1942, terjadilah dua perkembangan yang memengaruhi sastra Indonesia modern. *Pertama,* bahasa Indonesia (sebagai wahana bagi sastra Indonesia) diharuskan oleh Jepang untuk dipakai sebagai bahasa pengantar untuk menggantikan bahasa Belanda. *Kedua,* terhentinya penerbitan *Pujangga Baru* dan tampilnya Chairil Anwar dan kawan-kawan yang telah mencanangkan fase baru dalam sastra Indonesia.[283]

Pada zaman kemerdekaan sastra Indonesia makin berkembang. Para sastrawan mencari bentuk yang berasal dari pelbagai budaya. Studi sastra dunia lebih dipergiat sehingga para sastrawan dunia mulai memengaruhi para pengarang Indonesia. Berlainan dengan sastrawan generasi sebelumnya yang orientasinya terbatas kepada sastra Belanda dan India, sastrawan sejak kemerdekaan orientasinya meliputi seluruh dunia. Dengan demikian, horison mereka menjadi lebih luas. Akibat dari orientasi yang luas itu ialah adanya heterogenitas aliran di dalam sastra Indonesia.

Mengenai perkembangan sastra Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan dapat dikemukakan bahwa dengan terpecahnya Republik menjadi "daerah pedalaman" yang dikuasai oleh pemerintah RI di satu pihak dan "daerah pendudukan" di lain pihak, timbullah perbedaan perkembangan para sastrawan di tiap-tiap daerah. Di pedalaman nada patriotisme lebih tegas terdengar. Bahkan, sebagian sastrawan untuk sementara mengganti penanya dengan senapan. Di kota pendudukan lebih terdengar semboyan "universalisme" atau "humanisme universal".[284] Suatu hal yang bukannya tidak dipergunakan oleh pihak Belanda untuk melemahkan semangat perlawanan orang Indonesia terhadap mereka.

---

[281] Pembinaan Bahasa Indonesia, *Isi Kongres Bahasa Indonesia,* Medan, 1954, hlm. 69–70

[282] Harimurti Kridalaksana, "Pembentukan Istilah ilmiah dalam "Bahasa Indonesia", *Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia sebagai Tjermin Manusia Indonesia Baru,* hlm. 82–83

[283] Emmanuel Subangun, "Rapat Seniman-2 Sastra se-Indonesia di TIM tanggal 9 dan 10 Desember 1972", *Kompas,* 9 Desember 1972, hlm. IV, IX

[284] Lihat *Siasat*, 22 September 1950

4. Perkembangan di Bidang Seni

Pertumbuhan seni lukis yang telah mulai pada waktu tentara Jepang masih menduduki Indonesia, mengalami perkembangan yang luar biasa pada masa kemerdekaan. Pada tahun 1946 atas inisiatif Sudjojono, Trisno Sumardjo, Sunindyo, dan Suradji didirikan organisasi Seniman Indonesia Muda (SIM). Pelukis-pelukis lainnya yang tergabung dalam badan ini, atau yang ada hubungannya ialah: Sundoro, Zaini, Nasjah, Moh. Hadi, A. Wakidjan, Ismono, Sudiono, Sudibjo, Surono, Sjahri, Nahar, dan lain-lain. Pada tahun 1947 atas inisiatif pelukis-pelukis Affandi dan Hendra, di Yogyakarta didirikan perkumpulan Pelukis Rakyat sebagai pecahan dari SIM.[285] Anggota-anggota barunya yang dididik oleh himpunan itu antara lain Rachmat, Batara Lubis, Tarmizi, dan Amrus. Secara horizontal, Pelukis Rakyat ini mengalami perkembangan paling banyak, dengan dibantu tokoh-tokoh pemerintah. Para anggotanya tidak hanya berkesempatan menjual banyak lukisan, tetapi juga lapangan mereka diperluas dengan seni patung. Hasil-hasil yang dibuat secara apa yang disebut kolektif ialah patung Jenderal Soedirman di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta, Tugu Muda di Semarang, dan patung serta relief-relief di gedung Polisi Militer Jakarta. Kemudian, di Yogya pun berdiri Pelukis Indonesia (PI), mula-mula dipimpin oleh Sumitro, kemudian diganti oleh Solihin dan Kusnadi. Perkumpulan para pelukis muda ialah Pelukis Indonesia Muda (PIM), terbentuk pada tahun 1952, diketuai oleh Hidayat. Paling awal di Yogya berdiri Pusat Tenaga Pelukis Indonesia (PTPI) dengan ketua Djajengasmoro. Oleh pihak resmi didirikan Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogya dengan pelukis-pelukis setempat sebagai guru. Akademi dibagi dalam lima bagian: seni lukis, seni patung, seni ukir, seni reklame, dan pendidikan guru gambar.

Di Solo beberapa pelukis bergabung dalam Himpunan Budaya Surabaya. Di Madiun berdiri Tunas Muda. Tokoh-tokohnya antara lain Sunindyo, Sedyono, dan Ismono. Di Jakarta, timbul Gabungan Pelukis Indonesia (GPI) dengan ketuanya Suktiksna, angota-anggotanya: Nashar, Zaini, O. Efendi, Wakidjan, dan lain-lain. Pada tahun 1946 lahir perkumpu!an angkatan muda: Matahari pimpinan Mardian dan Nashar. Di Bandung, pernah berdiri Djiwa Mukti pada tahun 1948 dengan tokoh-tokohnya Barli, St. Lucas Gilde (Sularko Cs), dan golongan-golongan lain. Kecuali itu, terbentuk pula perkumpulan Sanggar Seniman oleh KartonoYudhokusumo pada tahun 1952 dan Cipta Pancaran Rasa oleh ketuanya Abedy. Di Surabaya, lahir Prabangkara dipimpin oleh Karyono Js. Di Malang, berdiri Angkatan Pelukis Muda yang diketuai Widagdo.

[285] "Pertentangan Seni Lukis di Indonesia", *Madjalah Kebudayaan Indonesia*, tahun I, 1949, hlm. 594 – 598

Di Medan, lahir Angkatan Seni Rupa Indonesia (ASRI) pada tahun 1945 dengan tokoh-tokohnya Ismail Daulay, Tino Sidin, dan lain-lain. Di Bukittinggi, berdiri organisasi Seniman Muda Indonesia (SEMI) dengan ketuanya Zetka, dengan anggota-anggotanya antara lain: A.A. Navis. Di Sulawesi, beberapa pelukis bergabung dalam Wong Ken Weru. Di Ubud (Bali), terbentuk gabungan pelukis yang beranggotakan Anak Agung Gede Sobrat, Ida Bagus Made, dan lain-lain. Pihak pemerintah mendirikan pula Akademi Seni Rupa di Bandung, dipimpin oleh S. Sumardja.

Di samping melukis dan mematung, para pelukis juga giat di lapangan-lapangan lain yang sejenis. Banyak di antara mereka membuat poster, ilustrasi, dan gambar kulit buku. Di Jakarta, Zaini dkk. membuat dekor-dekor sandiwara; O. Effendi membuat desain-desain seni kerajinan. Di Yogya Surono menghasilkan cukilan kayu paling baik, demikian pula Widayat dan Zakariah. Kecuali itu, para pelukis mulai membuat percobaan-percobaan lukisan batik.[286]

Pada periode 1945–1955 seni tari di Indonesia pembaruannya baru terbatas pada teknik penyajian, yaitu dengan menyingkat waktu, memeras atau menyingkat cerita dan penyederhanaan pada umumnya.

Selama periode 1942–1945 diciptakan lagu-lagu dengan langgam baru yang berlainan dengan lagu-lagu keroncong asli. Sebenarnya, timbulnya langgam dan corak baru pada lagu-lagu itu tidak terjadi pada masa revolusi, tetapi telah ada sebelumnya. Hanya saja jiwa revolusi telah mendorong terjadinya perkembangan pesat dalam penggubahan lagu-lagu. Jiwa revolusi menimbulkan kebebasan serta menghilangkan rasa rendah diri dan sebaliknya menimbulkan keberanian. Ritme atau irama dalam lagu-lagu baru pada masa revolusi 1945–1949 dapat dikatakan lain daripada masa sebelumnya. Tentang corak dan tingkatan itu ada juga pencipta-pencipta lagu yang menciptakan lagu tanpa memakai tingkatan raras internasional, sehingga mewujudkan tingkatan raras pelog. Menurut para ahli musik, dengan sendirinya rasa ketimuran dapat dengan mudah diterjemahkan. Sayang sekali, bahwa coraknya Barat. Menurut para pengamat dan kritikus pada waktu itu isi lagu-lagu yang diterjemahkan dengan rangkaian seni raras telah berbeda dengan isi lagu keroncong yang harmoninya mengalami kemajuan. Keroncong asli disusun dengan harmoni sederhana. Dilihat dari segi pengetahuannya, para pengamat berpendapat bahwa meskipun sebagian seniman tidak mendapat pendidikan khusus, hasil kreasinya baik dan mereka memiliki pengetahuan luas.[287]

---

[286] Trisno Sumardjo, "Kedudukan Seni Rupa Kita", *Almanak Seni*, 1957, hlm. 132–135

[287] Dr. R.M.T. Padmonagoro, "Seni Suara Indonesia dalam Revolusi", *Siaran dan Masjarakat Indonesia*, 1950, hlm. 37

Penggubah lagu-lagu selama masa Revolusi selain meliputi penulis-penulis musik Indonesia juga meliputi penulis-penulis lagu keroncong. Lagu-lagu langgam yang telah disebut di atas yang sudah dimulai pada waktu yang lampau sampai ke masa kemerdekaan mendapat tanah yang subur setelah Pengakuan Kedaulatan. Kesempatan dan pertumbuhan ini mencapai "puncaknya" pada prestasi Sjaiful Bahri dan Iskandar dari RRI Jakarta. Kemajuan-kemajuan ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh penulis-penulis musik Belanda seperti Jos Cleber dan Tom Diessevelt. Mereka ini membawakan aransemen-aransemen lagu-lagu keroncong lama maupun langgam. Jos Cleber mempunyai orkes besar yang bernama Orkes Cosmopolitan. Sesudah kepergian penulis-penulis Belanda itu, peran berpindah kepada pemuka-pemuka keroncong di RRI Jakarta; Sjaiful Bahri kemudian menjabat pimpinan Orkes Studio Jakarta dengan anggota lebih dari 50 orang mencontoh orkes Jos Cleber. Mulailah Sjaiful Bahri, Iskandar, dan Ismail Marzuki menulis aransemen-aransemen untuk Orkes Studio Djakarta (OSD) juga bagi lagu-lagu keroncong. Akan tetapi, sebetulnya kemajuan dalam arti yang baik berbeda dengan Jos Cleber yang mampu bekerja dengan orkes besar, tidak demikian dengan Sjaiful dan kawan-kawan. Kemajuan mereka tidak seperti yang diharapkan karena kemampuan teknis untuk mencipta, mengaransemen, dan memimpin orkes besar, rata-rata belum dipunyai oleh para musisi Indonesia.

Sementara itu, lagu-lagu dalam tujuan seninya berjalan dengan suburnya pula. Lagu-lagu ini baru datang belakangan dengan munculnya lagu-lagu corak Cornel Simandjuntak,[288] dan akhirnya lagu-lagu Amir Pasaribu dan R.A.J. Sudjasmin. Cornel Simandjuntak sebagai produk revolusi banyak menghasilkan lagu-lagu perjuangan, tetapi ada juga lagu-lagunya yang bersifat liris. Lagu-lagu ini merupakan langkah pertama ke lagu-lagu seni, yang diusahakan sendiri oleh penciptanya yang banyak melihat pada pencipta lagu di Eropa seperti Schubert. Tahun 1943–1945 merupakan tahun-tahun produktif bagi Cornel Simandjuntak meskipun pada waktu itu sebagian ciptaannya berbentuk lagu-lagu mars. Di antara lagu-lagu ciptaannya terdapat "Teguh Kukuh Berlapis Baja" (Asia Berpadu), "Sorak-sorak Bergembira", "Maju Tak Gentar", "Padamu Pahlawan", "Mars Majapahit", dan "Mars Pembela Tanah Air". Lagu di atas diciptakan pada saat-saat terakhir Pendudukan Jepang dan menjelang Kemerdekaan.[289]

Dalam lapangan musik vokal dengan bentuk-bentuk yang besar, belum ada yang bisa dikemukakan. Hal itu berlainan dengan bentuk instrumental

---

[288] "Gema Suara", *Madjalah Bulanan Indonesia,* 6 Juni 1950, hlm. 354–356

[289] Frans F. Harahap, "In memoriam Cornel Simandjuntak", *Sinar Harapan,* 13 September 1971, hlm. VI

yang mengingat waktu yang singkat dan keadaan yang belum menguntungkan, sudah bisa dibanggakan. Dalam hal ini komponis Amir Pasaribu mengambil tempat yang terpenting. Dari tangannya telah lahir beberapa buah sonata untuk piano, variasi-variasi, ciptaan untuk biola, dan beberapa buah musik kamar.[290]

Tentang perkembangan seni drama, usaha-usaha mempertinggi derajat serta mutu kesandiwaraan pada umumnya berpusat pada Serikat Artis Sandiwara. Usaha-usaha badan ini menemui jalan buntu disebabkan oleh kegelisahan masyarakat yang ditimbulkan oleh masalah-masalah politik dan ekonomi. Sering kali kepentingan-kepentingan seni terdesak oleh kepentingan-kepentingan politik, hingga pada masa Revolusi timbul anggapan bahwa seni itu adalah suatu kemewahan dalam zaman perjuangan. Mereka yang harus berjuang melawan segala prasangka ini, masih tetap dan sejak zaman pendudukan Jepang tidak mendapat kesempatan istirahat, hingga dapatlah dimengerti bahwa daya pendorong yang ada pada mereka pun sudah sampai pada batasnya.

Meskipun dalam waktu tiga tahun setelah kemerdekaan, tokoh-tokoh seni di berbagai tempat di Jawa berusaha menggiatkan perkembangan seni nasional, tetapi mengingat keadaan dan kesempatan, mereka belum mendapat sambutan yang layak. Terutama pada seni sandiwara yang pada umumnya memang menjadi cermin masyarakat yang tidak membohong.

Selanjutnya, setelah berlangsungnya Kongres Kebudayaan pada bulan Juni 1948 di Magelang, mulai kentara timbulnya suatu politik kebudayaan yang hampir pasti. Didirikanlah *Institut Cinedrama* yang mendapat sokongan penuh dari pemerintah. Akan tetapi, umurnya tidak panjang, karena meletusnya Aksi Militer II Belanda telah mengakhiri terlaksananya suatu rencana yang mungkin bagus dan indah.[291]

Mengenai kegiatan Cinematografi di zaman Revolusi (1945–1949), di Yogya terdapat dua buah perusahaan film yaitu Cinedrama dan Yayasan Hiburan Mataram oleh almarhum Dr. Huyung yang seperti diketahui telah membuat film "Antara Bumi dan Langit", dan kemudian diubah menjadi "Frieda". Dalam film itu diperkenalkan pemain baru Grace, seorang gadis lndo. Grace dan Nana Mayo kemudian memegang peran utama dalam film "Olahraga". Sementara itu, perusahaan Cina yang ditutup pada masa Jepang dibuka kembali. Sesudah itu didirikan Perusahaan Film Nasional Indonesia (Perfini) di bawah pimpinan Usmar Ismail dengan rekan-rekannya Surjosumanto, Djajakusuma, dan lain-lain. Sebelum itu, Persatuan Artis

---

[290] J.A. Dungga, "Studie Pendahuluan Perkembangan, Musik Indonesia", *Almanak Seni*, 1957

[291] Usmar Ismail, "Sandiwara dan Masjarakat", *Madjalah Indonesia,* th. I, 1949, hlm. 144–148

Republik Indonesia (Persari) yang berasal dari rombongan sandiwara Pancawarna pada zaman Jepang di bawah Djamaluddin Malik telah muncul pula.

Perkembangan seni bangunan dapat dikemukakan bahwa keadaan bangunan di kota-kota pada umumnya mengambil tempat tidak berketentuan dan tidak melaraskan diri dengan lingkungan. Sekolah-sekolah, kantor-kantor besar, toko, gedung tua, pondok rakyat, berselang-seling sepanjang satu jalan atau dalam satu bagian kota yang seharusnya mempunyai ketentuan pasti. Corak, isi, dan rupa tidak berketentuan.

Sementara itu, di kampung-kampung atau di desa-desa yang jauh letaknya dari kota, kebanyakan bangunan yang ditemui masih berpegangan pada corak lamanya serta didirikan dengan bahan-bahan yang tidak dapat bertahan lama. Hal ini disebabkan lemahnya ekonomi rakyat. Di antara bangunan-bangunan itu ada yang mengikuti arus bangunan kota, ada juga yang meniru bentuk luarnya saja. Pandangan total dari desa-desa kehilangan perasaan garis keindahan pembentuk rupa, serta ketinggalan beberapa abad dari kemajuan. Selanjutnya ada bangunan pada beberapa daerah yang seolah-olah tidak merasa bahwa keadaan sudah meminta patokan-patokan baru, seperti di kepulauan Indonesia yang tidak begitu mengenal budaya Barat. Masyarakat ini masih mempunyai keindahan bentuk dan isi yang asli.[292]

5. Media Komunikasi Massa

Kehidupan pers pada awal kemerdekaan berkembang dengan semangat revolusi. Surat-surat kabar yang terbit di daerah Republik aktif ikut serta menghidupkan semangat perjuangan. Dengan terjadinya blokade Belanda, hubungan dengan dunia luar menjadi sulit. Hanya dengan komunikasi radio, berita-berita tentang perjuangan memberikan bahan, baik bagi pers luar negeri maupun dalam negeri. Di daerah-daerah pendudukan Belanda, surat-surat kabar berbahasa Indonesia pada umumnya menunjukkan sikap anti-Belanda. Dibandingkan dengan kondisi persurat-kabaran di daerah Republik, kondisinya lebih baik. Para penerbit surat kabar di daerah pendudukan Belanda menghadapi saingan dengan surat kabar yang disponsori oleh Dinas Penerangan Belanda. Akan tetapi, selama masa tersebut jumlah pembaca surat kabar berbahasa Belanda menurun. Hal ini memberikan peluang bagi pemasaran surat kabar Indonesia. Membaca surat kabar berbahasa Indonesia pada masa itu berarti menunjukkan sikap solidaritas dengan Republik.

---

[292] O. Effendi, "Seni Bangunan di Indonesia", *Gema Suasana,* no. 2, Februari 1948, hlm.99–101

Surat kabar pada waktu itu rata-rata terdiri dari empat halaman. Pemasukan iklan sangat kecil jumlahnya. Pada umumnya perusahaan-perusahaan penerbit surat kabar tidak menitikberatkan usahanya pada mencari keuntungan. Harga surat kabar relatif rendah. Dengan mulai adanya seleksi dari masyarakat terhadap surat kabar, para penerbit beserta para pembantunya berusaha meningkatkan mutunya. Dalam kompetisi ini kualitas pemberitaannya memegang peran penting. Akibat kompetisi ini, dapat terbit suatu surat kabar yang baru lagi. Di daerah Republik beberapa golongan politik mulai menggunakan surat kabar untuk kepentingan perjuangan golongannya. Berita-berita yang ada hubungannya dengan perjuangan seperti perundingan-perundingan dengan Belanda, keinginan-keinginan pemerintah, serta hubungan internasional Indonesia digambarkan lebih tajam.

Ketika Belanda melancarkan aksi militer yang kedua, beberapa minggu setelah penumpasan Pemberontakan Madiun, beberapa surat kabar di daerah pendudukan Belanda menghilang dari peredaran sedangkan sebagian lagi ada yang bekerja sama dengan Belanda. Jumlah surat kabar di Indonesia selama berlangsungnya Aksi Militer Kedua Belanda berdasarkan laporan UNESCO sampai dengan bulan April 1949, adalah 81 surat kabar dengan jumlah oplahnya 293.000 eksemplar, sehari 500 eksemplar sampai 5.000 eksemplar. Rata-rata terbit dengan 4 halaman.

Keadaan persuratkabaran sampai dengan akhir Desember 1948 lebih baik, karena terdapat 124 surat kabar dengan oplah 405.000 eksemplar.[293] Setelah Pengakuan Kedaulatan persuratkabaran mengalami kemajuan. Dari 75 surat kabar, 45 yang berbahasa Indonesia dengan jumlah oplah 413.700 eksemplar pada akhir tahun 1949, kemudian bertambah lagi menjadi 166 surat kabar (96 yang berbahasa Indonesia) dengan jumlah oplah 1.043.450. Keadaan ini berlangsung sampai dengan akhir tahun 1957.[294]

Sarana komunikasi lainnya yang vital adalah radio. Sejak Proklamasi, penyiaran radio dikuasai oleh bangsa Indonesia. Dengan sendirinya corak siaran radio dapat disesuaikan dengan jiwa revolusi. Pada masa awal Kemerdekaan, radio menjadi saluran penerangan yang terpenting. Semua radio umum hampir di seluruh pelosok tanah air selalu dikerumuni oleh rakyat yang ingin mengetahui kejadian-kejadian di Indonesia. Corak siaran banyak menggunakan siaran-siaran "kata-kata yang berat" mengenai politik dan agitasi untuk membakar semangat rakyat. Usaha lain yang dilakukan ialah mematahkan siaran propaganda dari pihak yang memusuhi Republik Indonesia.

---

[293] UNESCO, *World Communications* (1951), hlm. 86

[294] Lembaga Pers dan Pendapat Umum, *Almanak Pers Indonesia 1954–1955*, hlm. 36; *Almanak Pers Indonesia*, 1957, hlm. 50

Dilihat dari perkembangannya, setelah Jepang menyerah, tenaga-tenaga Indonesia berhasil merebut *Hosokyoku* (kantor radio) yang kemudian dilanjutkan siarannya dengan sebutan: Radio Republik Indonesia (RRI), dimulai pada tanggal 11 September 1954.[295] Stasiun radio RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah stasiun, bekas *Hosokyoku*, yakni di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.

Pada masa Revolusi (1945–1949), di samping RRI dikenal juga Radio Pemberontakan di Jawa Timur, yaitu di kota Surabaya dan Malang. Radio Pemberontakan di Solo, Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer di Yogyakarta, Radio Perjuangan di Semarang, dan Radio Indonesia Raya di Yogya.[296]

Pada masa Perang Kemerdekaan pembangunan RRI dalam arti yang sebenarnya belum dapat dilakukan. Meskipun demikian, stasiun-stasiun RRI masih tetap mempertahankan diri, baik di Sumatra maupun di Jawa. Sejak tahun 1946 Yogyakarta menjadi stasiun pusat menggantikan studio Jakarta. Dengan adanya serbuan Belanda ke ibu kota Yogyakarta, penyiaran berita dilakukan secara rahasia dan berpindah-pindah dari kampung ke kampung. Pada waktu itu RRI memiliki 12 studio di Jawa, antara lain: di Purwakarta, Magelang, Wonosobo (dari Purwokerto), Mojokerto (dari Surabaya) kemudian pindah ke Kediri, Blitar (dari Malang), dan Tawangmangu.

Sejak Aksi Militer II Belanda lenyaplah semua studio tersebut di atas, tetapi siaran-siaran darurat tetap dilaksanakan, baik dari pegunungan-pegunungan di Sumatra maupun di Jawa. Stasiun-stasiun di daerah pegunungan pada masa gerilya itu antara lain di Jawa berada di Jawa Timur (Gunung Wilis), Jawa Tengah (Balong-Wonosari-Lawu), Jawa Barat, dan di Sumatra berada di Bukit Barisan.

Setelah ada gencatan senjata, barulah RRI bekerja agak tenang. Selanjutnya mulai tahun 1950 diadakan rencana lima tahun, yakni diusahakan penambahan-penambahan studio dan penyempurnaan alat-alat pemancar. Perubahan studio-studio dirasakan amat perlu dalam waktu singkat dan di beberapa tempat harus dilakukan secepat-cepatnya. Jakarta sebagai studio pusat jawatan harus menggunakan pemancar-pemancar yang berkekuatan 100 kw sampai paling sedikit 1 kw untuk keperluan siaran-siaran dengan studio lainnya.[297]

---

[295] Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio

[296] Kementerian Penerangan, Djawatan Radio Republik Indonesia, *Sedjarah Radio di Indonesia*, 1955, hlm. 227

[297] *Siaran Kementerian Penerangan*, I, no. 6, 12 September 1956, hlm. 8–12

Bab III
Demokrasi Liberal

A. Dari RIS ke Negara Kesatuan

1. Republik Indonesia Serikat

Dengan diratifikasinya hasil-hasil KMB oleh KNIP yang bersidang tanggal 6–15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara yang berbentuk federasi ini terdiri dari 16 negara bagian yang masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur.

Dalam sidang bersama Parlemen dan Senat RIS tanggal 16 Desember 1945 Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS. Untuk membentuk kabinet, Presiden menunjuk empat orang formatur, dua orang dari RI yakni Mohammad Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX dan dua orang dari negara federal yakni Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamid II. Pada tanggal 20 Desember, Kabinet RIS terbentuk dengan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini terdiri atas 13 menteri dan 3 menteri negara, 11 orang di antaranya adalah Republiken. Tokoh-tokoh terkemuka yang duduk dalam kabinet ini antara lain dari pihak Republik Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Ir. Djuanda, Mr. Wilopo, Prof. Dr. Supomo, dr. Leimena, Arnold Mononutu, Ir. Herling Laoh, sedangkan dari BFO adalah Sultan Hamid II dan Ide Anak Agung Gde Agung.[1]

Kabinet ini merupakan *zaken kabinet* (yang mengutamakan keahlian anggota-anggotanya) dan bukan kabinet koalisi yang bersandar pada kekuatan partai-partai politik. Memang ada menteri yang merupakan anggota partai politik (PNI, Masyumi, dan Parkindo), tetapi mereka duduk dalam kabinet bukan sebagai wakil partai, melainkan sebagai perseorangan. Anggota-anggota kabinet ini sebagian besar pendukung unitarisme dan hanya dua orang pendukung sistem federal yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gde Agung.[2] Arnold Mononutu memang berasal dari negara

---

1 Kementerian Penerangan RI, *Kabinet-kabinet RI*, 1957

2 Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, 1962, hlm. 47

federal (NIT), tetapi ia lebih republiken daripada federalis. Dalam Parlemen NIT ia memimpi Fraksi Progresif yang lebih berorientasi kepada RI daripada kepada NIT.

Kabinet RIS di bawah pimpinan Hatta memerintah sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Pada hari itu RIS menjelma menjadi negara kesatuan Republik Indonesia (RI). Dengan demikian, negara federal itu tidak sampai mencapai usia 1 tahun. Dalam usia yang singkat itu RIS dengan satu-satunya pemerintahannya di bawah Perdana Menteri Hatta harus memecahkan masalah-masalah yang timbul akibat perang kemerdekaan dan masalah-masalah yang inheren dengan kehidupan suatu negara muda.

Akibat perang kemerdekaan banyak prasarana yang hancur, keadaan ekonomi pada umumnya buruk, dan di sana-sini terdapat pula kerusakan mental. Di bidang ekonomi masalah utama adalah terdapatnya inflasi dan defisit dalam anggaran belanja. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah mengeluarkan peraturan pemotongan uang pada tanggal 19 Maret 1950. Peraturan ini menentukan bahwa uang yang bernilai 2,50 gulden ke atas dipotong menjadi dua sehingga nilainya tinggal setengahnya. Walaupun banyak pemilik uang yang terkena oleh peraturan ini, pemerintah mulai dapat mengendalikan inflasi agar tidak cepat meningkat. Selain soal keuangan, ekonomi juga dapat diperbaiki, karena dengan meletusnya Perang Korea, perdagangan ke luar negeri meningkat, terutama untuk bahan mentah seperti karet, sehingga ekspor Indonesia meningkat dan pendapatan negara juga bertambah.

Masalah utama lain terdapat di bidang kepegawaian, baik sipil maupun militer. Setelah perang selesai, jumlah pasukan harus dikurangi karena keuangan negara tidak mendukungnya. Mereka perlu mendapat penampungan jika diadakan rasionalisasi. Oleh karena itu, pemerintah membuka kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya dalam pusat-pusat pelatihan yang memberi pendidikan keahlian agar mereka dapat menempuh karier sipil profesional. Juga dilakukan usaha transmigrasi dengan wadah Corps Tjadangan Nasional (CTN). Walaupun demikian, masalah ini belum dapat diselesaikan.

Dalam pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) intinya diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari kalangan bekas anggota Angkatan Perang Belanda.[3] Personel bekas anggota Angkatan Perang Belanda yang akan dilebur ke dalam APRIS meliputi kira-kira 33.000 orang dengan 30 orang perwira. Pada Angkatan Udara diserahkan 10.000 orang. Pembentukan APRIS sebagai salah satu keputusan KMB dengan TNI

[3] Notosoetardjo, *Dokumen-dokumen Konferensi Medja Bundar*, Djakarta, 1956, hlm. 21

sebagai intinya ternyata menimbulkan masalah psikologis. Di satu pihak, TNI berkeberatan untuk bekerja sama dengan bekas musuhnya. Sebaliknya, dari pihak KNIL terdapat pula tuntutan untuk ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan menentang masuknya TNI ke dalam negara bagian tersebut. Gejala ini terlihat di Bandung berupa gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang mengirimkan ultimatum kepada pemerintah RIS dan Negara Pasundan menuntut untuk diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya negara tersebut.[4] Di Kalimantan Barat, Sultan Hamid II menentang masuknya TNI serta menolak untuk mengakui Menteri Pertahanan RIS dan menyatakan bahwa dialah yang berkuasa di daerah tersebut. Di Makassar muncul gerakan Andi Azis dan di Ambon gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Keadaan tersebut sengaja diwariskan oleh kekuatan reaksioner Belanda dengan tujuan mempertahankan kepentingannya dan mengacau RIS, sehingga di dunia internasional akan timbul citra bahwa RIS tidak mampu memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Selain harus mengatasi suasana instabilitas nasional sebagai akibat bom-bom waktu yang sengaja ditinggalkan oleh pihak kolonialis, pemerintah juga menghadapi pemberontakan DI/TII.[5]

Kabinet Hatta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif, walaupun hubungan diplomatik masih lebih banyak dilakukan dengan negara-negara Barat daripada dengan negara komunis. Hubungan dengan negeri Belanda diusahakan menjadi lebih baik dengan harapan Belanda akan menyerahkan Irian Barat (Irian Jaya). Atas inisiatif pihak RI, pada bulan April 1950 di Jakarta dilangsungkan Konferensi Tingkat Menteri yang pertama antara Indonesia dan Belanda. Pada konferensi tersebut dibicarakan persiapan-persiapan untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat. Sebagai hasilnya dibentuk Komisi Irian, yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tugas komisi ini ialah mengadakan penyelidikan di Irian Barat serta melaporkan hasilnya. Konferensi selanjutnya memutuskan untuk melanjutkan perundingan mengenai masalah Irian Barat atas dasar laporan Komisi dalam Konferensi Tingkat Menteri Kedua di Den Haag pada tanggal 4 Desember 1950. Delegasi RI yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri Mr. Mohammad Roem mengajukan dua usul kompromi, yaitu agar pengakuan kedaulatan atas Irian Barat dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1950, sedangkan penyerahannya dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun 1951. Delegasi Indonesia juga memberikan jaminan mengenai kemerdekaan agama, hak-hak asasi manusia, dan otonomi seluas-luasnya bagi penduduk Irian Barat serta

---

[4] Saleh As'ad Djamhari, *Ichtisar Sedjarah Perdjuangan ABRI* (*1945–Sekarang*), 1971, hlm. 65

[5] Saleh As'ad Djamhari, *ibid.*, hlm. 65–70

jaminan perlindungan atas kepentingan-kepentingan Belanda. Namun, pihak Belanda tetap bersikukuh pada pendiriannya bahwa kedaulatan atas Irian Barat berada pada Uni Indonesia-Belanda, sedangkan *de facto* pemerintahan tetap di tangan mereka. Belanda menyarankan pembentukan Dewan Irian Barat dan dalam dewan ini Indonesia mempunyai wakil-wakil yang sama jumlahnya dengan wakil-wakil Belanda. Dengan adanya perbedaan pendapat itu, perundingan tidak dapat diharapkan mencapai hasil.[6]

2. Kembali ke Negara Kesatuan

RIS lahir dari hasil kompromi antara RI dan negara-negara federal ciptaan Belanda yang dicapai dalam Konferensi Inter-Indonesia dan dilanjutkan dalam KMB. Ini merupakan kompromi antarelite politik. Akan tetapi, rakyat di negara-negara federal yang sejak akhir tahun 1949 menjadi negara bagian RIS, tetap menghendaki bentuk negara kesatuan. Sejak awal tahun 1950 sudah muncul gerakan-gerakan yang menuntut pembubaran negara bagian dan penggabungannya dengan RI. Pemberontakan yang dilancarkan oleh kelompok kecil pendukung federalis, seperti APRA, Andi Azis, dan RMS (akan diuraikan di bagian belakang), semakin memperkuat tuntutan tersebut.

Pemberontakan APRA bulan Januari 1950 menyebabkan Wali Negara Pasundan R.A.A. Wiranatakusumah mengundurkan diri. Pemerintah RIS mengangkat Sewaka sebagai Komisaris RIS untuk Negara Pasundan.[7] Pengangkatan itu tidak sesuai dengan tuntutan rakyat Jawa Barat yang menghendaki dibubarkannya negara tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Maret 1950 terjadi demonstrasi di Bandung yang menuntut pembubaran Negara Pasundan dan penggabungan seluruh daerah Jawa Barat ke dalam RI.

Pemberontakan Andi Azis di Makassar awal April 1950 mengakibatkan terjadinya krisis Kabinet NIT. Pada tanggal 20 April, tokoh Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Pupella, mengajukan mosi tidak percaya dalam Parlemen NIT. Akibatnya, Perdana Menteri NIT Ir. P.D. Diapari mengundurkan diri dan kabinet bubar. Kabinet baru terbentuk di bawah Perdana Menteri Ir. Pituhena, tokoh pro-RI. Program kabinet ini ialah pembubaran NIT dan penggabungannya ke dalam RI.

---

[6] Departemen Luar Negeri, *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri*, 1971, hlm. 88, 219

[7] Sewaka, *Tjorat-tjaret dari Djaman ke Djaman*, hlm. 184–185

Tuntutan untuk bergabung dengan RI terjadi pula di negara-negara bagian lainnya. Negara Jawa Timur yang dibentuk oleh Belanda dalam Konferensi Bondowoso, karena lahir dan hidupnya memang tidak didukung rakyat Jawa Timur, akhirnya setelah didesak oleh tuntutan rakyat, dibubarkan. Pada tanggal 25 Februari 1950 seluruh daerah Negara Jawa Timur yang meliputi Keresidenan Besuki, sebagian Malang dan Surabaya, digabungkan menjadi daerah Republik Indonesia dan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, oleh Gubernur Jawa Timur Samadikoen, pada tanggal 27 Februari dikeluarkan instruksi kepada segenap residen, bupati, wali kota, serta aparat bawahannya dari bekas Negara Jawa Timur agar menyerahkan pimpinan daerahnya masing-masing kepada pegawai/ pejabat Republik Indonesia yang telah ditunjuk sebelumnya. Tindakan tersebut diambil oleh Gubernur untuk meredakan suasana panas di kalangan rakyat antara yang pro dan yang kontra terhadap pembubaran negara tersebut. Selain Negara Jawa Timur, Negara Madura yang meliputi Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya juga membubarkan diri dan bergabung dengan RI.[8]

Di Sumatra Selatan tuntutan rakyat agar Negara Sumatra Selatan dibubarkan mencapai puncaknya pada awal tahun 1950 sehingga RIS harus menerima pembubaran itu dengan tiada bersyarat. Kedatangan dr. Isa ke Palembang yang resminya diangkat oleh pemerintah RIS sebagai Komisaris RIS, ternyata disambut dan diperlakukan oleh rakyat sebagai Gubernur RI bagi Sumatra Selatan. Di mana-mana Gubernur Isa didaulat oleh rakyat yang menyambut kedatangannya dan memintanya untuk berbicara. Upacara serah terima antara Wali Negara Sumatra Selatan A. Malik dan Gubernur Isa berlangsung pada tanggal 18 Maret 1950. Pada tanggal 24 Maret 1950, Pemerintah Pusat RIS meresmikan pembubaran Negara Sumatra Selatan dan daerahnya dimasukkan ke lingkungan Provinsi Sumatra Selatan di bawah RI. Negara Sumatra Selatan itu hanya meliputi sebagian besar Keresidenan Palembang. Peristiwa ini kemudian disusul dengan pembubaran Daerah Istimewa Bangka-Belitung. Penyerahannya dilaksanakan pada tanggal 22 April 1950.[9]

Di Sulawesi Selatan, gerakan-gerakan menuju ke unitarisme mendapat reaksi dari golongan federal yang ingin tetap mempertahankan Negara Indonesia Timur (NIT). Pemerintah NIT melakukan penangkapan terhadap para pemuda yang melakukan kegiatan menentang NIT. Berbagai demonstrasi yang menuntut pembubaran NIT dan memasukkannya ke dalam RI terjadi di Makassar, Gorontalo, Poso, Donggala, Takalar, dan Jeneponto. Pada bulan Maret 1950 berlangsung serangkaian demonstrasi

[8] Kementerian Penerangan RI, *Propinsi Djawa Timur*, hlm. 21–23
[9] Kementerian Penerangan RI, *Propinsi Sumatra Selatan*, hlm. 67

di kota-kota tersebut. Sementara itu, golongan federalis juga telah melangsungkan demonstrasi di Makassar dan Bone. Meskipun kemudian Andi Azis dengan pasukannya melakukan serangan terhadap kesatriaan APRIS di Makassar, keinginan rakyat di Sulawesi untuk melepaskan diri dari NIT tidak mengendur. Sebelum pemerintah RIS dengan resmi membubarkan NIT, rakyat provinsi-provinsi Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil (Nusa Tenggara) telah menyatakan melepaskan diri dari ikatannya dengan NIT dan langsung menggabungkan diri dengan RI. Pernyataan tersebut diwujudkan dalam bentuk proklamasi yang dikeluarkan di Polongbangkeng pada tanggal 17 April 1950 dan ditandatangani oleh Makkaraeng Dg. Djarung yang mengatasnamakan gubernur-gubernur Provinsi Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.[10]

Keterlibatan Sultan Hamid II dalam pemberontakan APRA, penolakannya terhadap masuknya APRIS yang berasal dari TNI ke Kalimantan Barat, dan pernyataan bahwa ialah yang berkuasa di daerah tersebut, menimbulkan protes dari rakyat. Akan tetapi, kondisi di Kalimantan Barat berbeda dengan kondisi di daerah-daerah Kalimantan lainnya. Tuntutan rakyat agar daerah ini digabungkan dengan RI menghadapi kendala karena tokoh yang ditempatkan di Kalimantan Barat sebagai wakil pemerintah RIS adalah Mr. Indrakusuma, seorang tokoh federalis yang dengan sendirinya berusaha untuk tetap mempertahankan bentuk federal. Langkah berikutnya yang dilakukan rakyat Kalimantan Barat ialah memberikan mandat kepada pemerintah RI supaya daerah mereka diakui sebagai bagian dari RI. Usaha itu pun tidak berhasil sebab daerah ini diwakili sendiri oleh pemerintah RIS, berbeda dengan Negara Sumatra Timur (NST) dan NIT yang mengadakan perundingan langsung dengan RI. Satu-satunya hasil yang dicapai oleh rakyat Kalimantan Barat ialah membubarkan Daerah Istimewa. Pada pertengahan Januari 1950, dr. Murdjani selaku wakil pemerintah RI mengadakan kunjungan ke Kalimantan Timur guna menyaksikan penggabungan daerah tersebut ke dalam RI.

Sementara itu, Dewan Kalimantan Timur dalam sidangnya menghasilkan resolusi yang mendesak Dewan Gabungan Kesultanan untuk menyerahkan mandat secepatnya kepada RIS. Dalam resolusi tersebut disetujui penggabungan daerah Kalimantan Timur sebagai daerah otonomi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Kalimantan Selatan juga terjadi pergolakan yang menuntut penggabungan daerah itu ke dalam RI. Penggabungan tersebut terjadi setelah bubarnya Dewan Banjar. Peristiwa penggabungan juga disaksikan oleh dr. Murdjani.

---

[10] Kementerian Penerangan RI, *Propinsi Sulawesi,* hlm. 161–162

Pada akhir Maret 1950 tinggal NIT, NST, dan Kalimantan Barat yang belum bergabung dengan RI. Akan tetapi, usaha penggabungan tetap dilakukan. Pada tanggal 3 April 1950 dilangsungkan konferensi antara RIS-NIT-NST. Kedua negara bagian tersebut menyerahkan mandatnya kepada Perdana Menteri RIS, Hatta, pada tangga1 12 Mei. Sebelum itu, pada tanggal 22 April Kalimantan Barat sudah bergabung dengan RI.

Kesepakatan antara RIS dan RI (sebagai negara bagian) untuk membentuk negara kesatuan tercapai pada tanggal 19 Mei 1950 dengan ditandatanganinya Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI. Dalam piagam itu dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan pembentukan negara kesatuan.[11] Sebagai tindak lanjut kesepakatan itu dibentuklah Panitia Persiapan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan yang diketuai oleh Menteri Kehakiman RIS Prof. Supomo dengan wakil ketua Perdana Menteri RI dr. Abdul Halim.[12] Panitia ini bekerja selama lebih kurang dua bulan dan pada tanggal 20 Juli 1950 merampungkan tugasnya. Setelah diadakan pembahasan di DPR masing-masing, rancangan UUD negara kesatuan itu diterima, baik oleh Senat dan Parlemen RIS maupun oleh KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950 Soekarno menandatangani rancangan UUD tersebut yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950). Dua hari kemudian, 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan.

B. Sistem Liberal dan Pemilu I

1. Instabilitas Politik

Dari tahun 1950 sampai tahun 1955 terdapat empat buah kabinet yang memerintah sehingga rata-rata tiap tahun terdapat pergantian kabinet. Kabinet-kabinet tersebut secara berturut-turut ialah Kabinet Natsir (September 1950–Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951–April 1952), Kabinet Wilopo (April 1952 Juli 1953), dan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953 Agustus 1955). Dapat digambarkan, dalam waktu rata-rata satu tahun itu, tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya karena Parlemen terlalu sering menjatuhkan kabinet jika kelompok oposisi kuat. Bahkan, pernah terjadi partai pemerintah menjatuhkan kabinetnya sendiri.

---

[11] Dr. Supomo, *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, 1950, hlm. 133–139

[12] Anhar Gonggong, Musa Asy'ari (eds.), *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*, 2005, hlm. 57

Boleh dikatakan bahwa semua kabinet, termasuk yang resminya bersifat *zaken kabinet* (yang menteri-menterinya dianggap ahli pada bidangnya masing-masing), didukung oleh koalisi di antara pelbagai partai. Juga komposisi pihak oposisi dapat berubah-ubah. Inilah yang menyebabkan berkecamuknya instabilitas politik.

Kabinet Natsir yang memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai tanggal 20 Maret 1951 adalah kabinet koalisi. Akan tetapi, PNI sebagai partai kedua terbesar dalam Parlemen tidak duduk dalam kabinet karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Inti kabinet ini adalah Masyumi, walaupun di antara para menterinya terdapat juga tokoh-tokoh nonpartai. Banyak di antara mereka yang cukup terkenal dan dianggap ahli pada bidangnya, sehingga sesungguhnya formasi kabinet ini termasuk kuat. Tokoh-tokoh terkenal di antaranya ialah Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Assaat (bekas Pejabat Presiden RI), Ir. Djuanda, dan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Di antara program-programnya yang penting ialah:

1. menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman;
2. mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan;
3. menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat;
4. memperjuangkan penyelesaian soal Irian secepatnya;[13]
5. mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar untuk melaksanakan ekonomi nasional yang sehat.

Selain soal keamanan, yang menjadi beban pemerintah ialah perjuangan pengembalian Irian Barat ke tangan Indonesia. Belanda rupa-rupanya tidak bermaksud untuk mengembalikan wilayah ini kepada Indonesia. Perundingan soal Irian Barat antara Indonesia dan Belanda dimulai pada tanggal 4 Desember 1950 semasa Kabinet Natsir, tetapi menemui jalan buntu. Baik Indonesia maupun Belanda tidak beranjak dari pendirian masing-masing. Hal ini menimbulkan mosi tidak percaya dari Parlemen terhadap kabinet. Krisis menjadi lebih mendalam dengan adanya mosi Hadikusumo (PNI) sekitar pencabutan PP No. 39/1950 tentang pemilihan anggota perwakilan daerah supaya lebih demokratis. UU No. 39 yang dikeluarkan pada masa Kabinet Hatta (RIS) menentukan pemilihan secara bertingkat. Mosi ini diterima oleh parlemen yang menyebabkan Menteri Dalam Negeri Assaat mengundurkan diri, tetapi pengunduran diri itu ditolak oleh kabinet. Natsir mengingatkan Parlemen bahwa pembentukan lembaga-lembaga perwakilan daerah menurut PP No. 39 itu sudah disetujui

---

[13] Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, I, cet. 2, 1962, hlm. 410

oleh Parlemen. Hubungan kabinet dengan Parlemen menjadi tegang. Sementara itu, pada tanggal 20 Maret 1951 Partai Indonesia Raya (PIR) yang merupakan partai pendukung kabinet menarik menteri-menterinya dari kabinet. Sehari kemudian, 21 Maret 1951, Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.[14]

Presiden Soekarno kemudian menunjuk Mr. Sartono dari PNI untuk membentuk kabinet baru. Sartono berusaha membentuk kabinet koalisi PNI-Masyumi, sebab kedua partai ini merupakan partai yang terkuat dalam DPR saat itu. Akan tetapi, usaha Mr. Sartono menemui kegagalan dan pada tanggal 18 April 1951 ia mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Presiden Soekarno pada hari itu juga menunjuk dua orang formatur baru, yaitu Sidik Djojosukarto (PNI) dan dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) untuk dalam waktu lima hari membentuk kabinet koalisi atas dasar nasional yang luas. Akhirnya, setelah diadakan perundingan, pada tanggal 26 April diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan dr. Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) dan Suwirjo (PNI).

Yang penting dalam program kabinet ini di antaranya ialah:

1. keamanan: akan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman;
2. sosial-ekonomi: mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani, serta mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha;
3. mempercepat persiapan-persiapan pemilihan umum;
4. politik luar negeri: menjalankan politik luar negeri secara bebas-aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.[15]

Kabinet ini juga tidak berusia lama karena banyak soal yang mendapat tantangan dalam Parlemen termasuk dari Masyumi dan PNI sendiri. Konflik politik muncul akibat Menteri Dalam Negeri Mr. Iskaq (PNI) menginstruksikan penonaktifan dewan-dewan perwakilan daerah yang dibentuk berdasarkan PP No. 39. Konflik kepentingan bertambah tajam ketika Iskaq mengangkat tokoh PNI menjadi gubernur di Jawa Barat dan Sulawesi. Sementara itu, Menteri Kehakiman Muh. Yamin, tanpa persetujuan kabinet, membebaskan 950 orang tahanan SOB. Tindakan ini ditentang oleh Perdana Menteri Sukiman dan golongan militer. Akibatnya, Yamin mengundurkan diri.

---

[14] Muh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, 1960, hlm. 34–36

[15] Naskah Riwayat Hidup H. Djuanda Kartawidjaja, *op. cit.*

Akan tetapi, sebenarnya penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman ialah mosi Sunario (PNI) berkaitan dengan penandatanganan perjanjian *Mutual Security Act* (MSA) oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo dan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Cochran. Perjanjian itu menyangkut bantuan ekonomi dan persenjataan Amerika Serikat kepada Indonesia. Persetujuan itu menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki Blok Barat (AS) yang berarti bertentangan dengan politik luar negeri bebas-aktif. Subardjo hanya melaporkannya kepada Sukiman tanpa konsultasi dengan Menteri Pertahanan Sewaka dan pimpinan Angkatan Perang.

Mosi Sunario menuntut agar semua perjanjian yang bersifat internasional harus disahkan oleh Parlemen. Mosi ini disusul oleh tuntutan PNI agar kabinet mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Akibat mosi itu, Menteri Luar Negeri Subardjo mengundurkan diri dan pada tanggal 23 Februari 1952 Kabinet Sukiman mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Dengan jatuhnya Kabinet Sukiman, kembali Indonesia mengalami krisis pemerintahan. Dalam masa dua tahun sejak Negara Kesatuan RI terbentuk menggantikan RIS, kabinet sudah berganti dua kali. Jadi, satu kabinet hanya memerintah kira-kira satu tahun lamanya. Dalam waktu yang hanya satu tahun itu sudah tentu program kabinet yang direncanakan tidak dapat terlaksana. Salah satu faktor penyebab jatuhnya kabinet-kabinet itu ialah adanya sepuluh partai dan beberapa fraksi dalam Parlemen yang mayoritas anggotanya berasal dari Masyumi dan PNI.[16] Untuk membentuk suatu pemerintah yang kuat perlu dukungan dari kedua partai terbesar itu, padahal hampir selalu terdapat ketidakserasian antara keduanya. Selain itu, dalam kedua partai itu sendiri terdapat kelompok-kelompok yang sering juga saling bertentangan, misalnya dalam Masyumi terdapat kelompok Moh. Natsir dan kelompok dr. Sukiman, dan dalam PNI terdapat kelompok Mr. Sartono dan kelompok Mr. Sujono Hadinoto.

Untuk mengatasi keadaan sering dan mudahnya kabinet dijatuhkan oleh Parlemen, ada saran agar dibentuk *zaken kabinet* yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli pada bidangnya tanpa memperhitungkan keanggotaannya dalam partai. Hal itu diharapkan dapat mencegah timbulnya tantangan-tantangan dari partai-partai oposisi. Akan tetapi, ada anggapan lain, seperti yang dikemukakan oleh Jusuf Wibisono dari kelompok Sukiman dalam Masyumi yang berpendapat bahwa *zaken kabinet* bersifat ekstra-parlementer, sedangkan Sukiman sendiri yakin bahwa kabinet koalisi dapat saja menjadi dasar dari stabilitas politik.

---

[16] Miriam S. Budiardjo, *Evolution Toward Parliamentary Government in Indonesia: Parties and Parlement*, 1955, hlm. 121

Pada tanggal 1 Maret 1952 Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur. Yang diminta oleh Presiden kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari Parlemen. Usaha kedua formatur menemui kegagalan sebab tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan didudukkan di dalam kabinet. Pada tanggal 19 Maret mereka mengembalikan mandat, dan Presiden menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai formatur baru. Akhirnya, setelah berusaha dua minggu, pada tanggal 30 Maret Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas PNI dan Masyumi masing-masing mendapat jatah 4 orang, PSI 2 orang, Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Indonesia Raya (Parindra), Partai Buruh, dan PSII masing-masing 1 orang dan golongan tidak berpartai 3 orang. Dalam menentukan susunan personalia kabinetnya, Wilopo mengusahakan adanya suatu tim yang padu sebagai *zaken kabinet*, sehingga dapat secara bulat mendukung kebijakan pemerintah.

Dalam konstelasi politik saat itu kehadiran partai-partai kecil tetap diperhitungkan agar dapat mencapai mayoritas di Parlemen. Sikap dan posisi partai-partai menjadi lebih jelas lagi selama berlangsungnya perdebatan dalam DPR mengenai Keterangan Pemerintah dan Program Kabinet. Pada sidang itu pemerintah tidak meminta kepercayaan, tetapi hanya memberitahukan kepada DPR bahwa pemerintah akan melanjutkan pekerjaannya kecuali jika DPR menghendaki lain. Suara yang setuju memberikan dukungan bekerja kepada kabinet ada 125 suara melawan 5 suara yang tidak setuju, terdiri dari Partai Murba dan Sarekat Kerakyatan Indonesia (SKI), sedangkan Fraksi Progresif Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Indonesia Raya (PIR), Fraksi Demokrat (FD), dan beberapa anggota tidak berpartai di samping satu dua orang dari Masyumi, *abstain.*

Pemerintah saat itu dihadapkan pada keadaan ekonomi yang kritis, terutama karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia, seperti karet, timah, dan kopra, sedangkan kecenderungan impor terus meningkat. Karena penerimaan negara akan mengalami penurunan dalam jumlah yang besar dan karena banyaknya komitmen-komitmen lama yang harus dipenuhi, terjadinya defisit tidak dapat dihindarkan, sekalipun diadakan penghematan-penghematan yang drastis. Rencana kenaikan gaji pokok pegawai negeri sebesar 20% tetap dilaksanakan, tetapi pembagian jatah beras pegawai terpaksa dihentikan, sedangkan hadiah Lebaran tidak pula dapat diberikan.[17] Kesulitan lain yang dihadapi ialah produksi panen yang

[17] Wilopo S.H., *Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahannya*, 1978, hlm. 28–29

menurun sehingga perlu disediakan jumlah devisa yang lebih besar untuk mengimpor beras.

Dalam usaha meningkatkan ekspor yang perlu untuk memperbaiki situasi neraca pembayaran, pemerintah mengambil langkah menurunkan pajak ekspor serta menghapuskan sistem sertifikat yang oleh kabinet sebelumnya diadakan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mengorbankan barang-barang yang pada waktu itu kuat pasarannya. Di lain pihak, dilakukan pembatasan impor dengan jalan menaikkan pajak terhadap barang-barang nonesensial dan mewajibkan para importir membayar uang muka sebesar 40%.[18]

Program Kabinet Wilopo terutama ditujukan pada persiapan pelaksanaan pemilihan umum (untuk Konstituante, DPR, dan DPRD), kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamanan. Program luar negeri terutama ditujukan pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda dan pengembalian Irian Barat ke Indonesia serta menjalankan politik bebas-aktif menuju perdamaian dunia.[19] Wilopo dengan kabinetnya berusaha melaksanakan program itu sebaik-baiknya. Akan tetapi, kesukaran-kesukaran yang dihadapi tidaklah sedikit. Di antara kesukaran-kesukaran yang harus diselesaikan ialah timbulnya provinsialisme dan bahkan separatisme. Di beberapa tempat di Sumatra dan Sulawesi timbul rasa tidak puas terhadap pemerintah pusat. Alasan utama adalah kekecewaan karena tidak seimbangnya alokasi keuangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah. Daerah merasa bahwa sumbangan yang mereka berikan kepada pusat dari hasil ekspor misalnya, lebih besar daripada yang dikembalikan oleh pusat kepada daerah. Mereka juga menuntut diperluasnya hak otonomi daerah. Timbul pula perkumpulan-perkumpulan yang berlandaskan semangat kedaerahan, seperti Paguyuban Daya Sunda di Bandung dan Gerakan Pemuda Federal Republik Indonesia di Makassar.

Selain soal kedaerahan dan kesukuan, pada tanggal 17 Oktober 1952 timbul soal dalam Angkatan Darat yang terkenal dengan nama Peristiwa 17 Oktober.[20] Peristiwa ini dimulai dengan perdebatan sengit di DPR selama berbulan-bulan mengenai masalah pro dan kontra kebijakan Menteri Pertahanan dan pimpinan Angkatan Darat. Aksi pihak kaum politisi itu akhirnya menimbulkan reaksi keras dari pihak Angkatan Darat.

---

[18] Wilapo, S.H., *Zaman Pemerintahan Partai-Partai Politik dan Kelemahannya*, 1978, hlm. 24

[19] Kementerian Penerangan, *Keterangan dan Djawaban Pemerintah atas Program Kabinet Wilopo*, Djakarta, 1952

[20] T.B. Simatupang, "Dua Puluh Tahun Setelah Peristiwa 17 Oktober 1952", *Sinar Harapan*, 16–21 Oktober 1972; A.H. Nasution, "Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952", *Sinar Harapan*, 9 November 1972

Aksi-aksi ini diikuti dengan penangkapan 6 orang anggota Parlemen dan pembrangusan beberapa surat kabar. Demonstrasi-demonstrasi yang menuntut pembubaran Parlemen itu terjadi pula di Semarang, Banjarmasin, Medan, dan Bandung.[21] Akibat peristiwa ini, kedudukan kabinet menjadi goyah.

Kedudukan kabinet yang sudah goyah itu semakin goyah karena soal tanah di Sumatra Timur yang terkenal dengan nama Peristiwa Tanjung Morawa.[22] Peristiwa itu terjadi karena pemerintah, sesuai dengan apa yang diputuskan dalam persetujuan KMB, mengizinkan pengusaha asing kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan. Sebetulnya Mr. Iskaq Tjokroadisurjo, Menteri Dalam Negeri Kabinet Sukiman, pada tahun 1951 sudah mengadakan kompromi sebagai dasar penyelesaian masalah pengusahaan perkebunan asing. Pemerintah sudah menyetujui dikembalikannya tanah *Deli Planters Vereeniging* (DPV) yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan dan sementara itu digarap oleh petani Sumatra Utara yang terdiri dari bangsa Indonesia dan keturunan Cina. Kabinet Wilopo kemudian melaksanakannya. Akan tetapi, petani penggarap yang dihasut oleh kader-kader PKI menolak untuk meninggalkan tanah garapan mereka. Pada tanggal 16 Maret 1953 Gubernur Sumatra Utara A. Hakim (Masyumi) memerintahkan satuan polisi menraktor tanah tersebut. Para penggarap mengadakan perlawanan yang mengakibatkan jatuhnya korban, lima orang meninggal dan beberapa orang ditangkap. Peristiwa ini mendapat sorotan tajam dan emosional baik dari pers maupun dalam Parlemen. Mosi tidak percaya dilancarkan oleh Sidik Kertapati dari Sarekat Tani Indonesia (Sakti). Dalam mosi itu disampaikan tuntutan agar pemerintah menghentikan usaha pengosongan tanah tersebut dan semua tahanan dibebaskan. PNI cabang Sumatra Utara mendesak Fraksi PNI dalam Parlemen agar mendukung mosi Kertapati dengan ancaman akan keluar dari PNI jika hal itu tidak dilakukan. Sebagian anggota DPP PNI pun mendesak agar Gubernur A. Hakim meletakkan jabatannya. Akibatnya, pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet kembali demisioner dan Indonesia mengalami krisis pemerintahan lagi.

Untuk membentuk kabinet baru yang diharapkan mendapat dukungan yang cukup dari Parlemen, pada tanggal 15 Juni 1953 Presiden Soekarno menunjuk Sarmidi Mangunsarkoro (PNI) dan Moh. Roem (Masyumi) sebagai formatur. Kedua formatur gagal mencapai kesepakatan dengan beberapa partai. Pada tanggal 24 Juni 1953 mereka mengembalikan mandat kepada

---

[21] Wilopo S.H., *op. cit.*, hlm. 30

[22] *Antara*, 17 Maret 1953; *Keng Po*, 17 Maret 1953; Wilopo S.H., *op., cit.*, 1978, hlm. 33

Presiden. Formatur baru, Mukarto Notowidagdo (PNI), tidak pula berhasil mencapai kesepakatan dengan Masyumi mengenai komposisi dan personalia kabinet. Setelah Mukarto mengembalikan mandatnya pada tanggal 18 Juli, Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wongsonegoro (PIR) sebagai formatur. Ia berhasil menghimpun partai-partai kecil untuk mendukungnya. Pada tanggal 30 Juli kabinet baru dilantik tanpa mengikutsertakan Masyumi, tetapi memunculkan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai kekuatan baru. Ali Sastroamidjojo diangkat sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini dikenal dengan nama Kabinet Ali I atau Kabinet Ali-Wongso.

Selain soal keamanan di daerah-daerah yang belum dapat dipulihkan, seperti gerombolan "DI/TII" Kartosuwirjo di Jawa Barat, "DI/TII" Daud Beureueh di Aceh, dan "DI/TII" Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Kabinet Ali I juga menghadapi persoalan-persoalan lain, baik soal dalam negeri maupun soal luar negeri. Salah satu persoalan di dalam negeri yang harus diselesaikan ialah persiapan pemilihan umum yang direncanakan akan diadakan pada pertengahan tahun 1955. Panitia Pemilihan Umum Pusat dibentuk pada tanggal 31 Mei 1954, diketuai oleh Hadikusumo (PNI). Pada tanggal 16 April 1955 Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk Parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Dengan adanya pengumuman ini kampanye yang dilakukan oleh partai-partai semakin meningkat. Mereka masing-masing berusaha mendapatkan suara terbanyak dan melakukan kampanye sampai ke pelosok-pelosok desa.[23]

Walaupun Kabinet Ali-Wongso dapat dikatakan merupakan kabinet yang paling lama bertahan, akhirnya pada tanggal 24 Juli 1955 Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya. Penyebab yang utama adalah persoalan dalam TNI AD sebagai lanjutan dari Peristiwa 17 Oktober dan soal pimpinan TNI AD menolak pimpinan baru yang diangkat oleh Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan TNI AD.[24] Selain itu, juga karena keadaan ekonomi yang semakin buruk dan korupsi yang mengakibatkan kepercayaan rakyat merosot.

Pada tanggal 20 Juli 1955, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya, yang kemudian diikuti oleh partai-partai lain. Terjadinya keretakan dalam kabinetnya memaksa Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya. Kabinet ini merupakan kabinet terakhir sebelum diadakannya pemilihan umum. Prestasi menonjol kabinet Ali-Wongso ialah dilangsungkannya Konferensi Asia Afrika bulan April 1955.

[23] Herbert Feith, *The Indonesian Elections of 1955*, 1957, hlm. 353–354

[24] Nugroho Notosusanto, *Sedjarah dan Hankam*, 1968, hlm. 120

Gambar 3.1 Konferensi Asia Afrika Bandung, April 1955 (Sumber: Deppen)

2. Pemilihan Umum 1955 dan Sesudahnya

Periode ini dimulai dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum 1955 dan berakhir dengan diumumkannya Dekrit Presiden tahun 1959 tentang kembali ke UUD 1945. Masa yang lamanya empat tahun ini mengalami tiga kabinet yang silih berganti, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955–Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956–Maret 1957), dan Kabinet Djuanda (Maret 1957–Juli 1959). Dari sini ternyata, walaupun sudah diadakan pemilihan umum sesuai dengan aturan permainan demokrasi Barat yang menurut peninjau-peninjau luar negeri berjalan dengan bersih, pemerintahan yang stabil tetap tidak tercapai. Rata-rata kabinet memerintah selama 1 tahun. Dengan demikian, kiranya terbukti bahwa Demokrasi Liberal memang tidak sesuai bagi kondisi di Indonesia.

Setelah Kabinet Ali-Wongso menyerahkan mandatnya kembali, pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Moh. Hatta mengumumkan nama tiga orang formatur yang bertugas untuk membentuk kabinet baru. Ketiga orang formatur itu ialah Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Assaat (nonpartai). Pada waktu itu Presiden Soekarno sedang ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Kabinet baru ini bertugas untuk:

1. mengembalikan kewibawaan pemerintah, yakni mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah;
2. melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru.[25]

Ketiga formatur ini mencapai persetujuan akan menempatkan Hatta sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Namun, timbul kesukaran karena Hatta masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Karena soal itu timbul pertentangan pendapat antara PNI dan Masyumi; masing-masing saling menolak rencana yang diajukan. Formatur mengajukan usul agar Presiden mengumumkan bahwa Hatta nonaktif sebagai Wakil Presiden selama menjadi Perdana Menteri. Setelah tugasnya selesai, kembali sebagai Wakil Presiden. Usul ini ditolak oleh PNI dan mengusulkan agar Parlemen mengeluarkan resolusi yang memungkinkan Hatta sebagai warga negara memimpin Kabinet Parlementer. Usul ini ditolak oleh Masyumi, dan Sukiman diinstruksikan untuk mengembalikan mandatnya. Pada tanggal 3 Agustus 1955 ketiga formatur mengembalikan mandatnya.

Hatta kemudian menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) untuk membentuk kabinet. Burhanuddin Harahap mendekati PNI dan menawarkan kedudukan Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan

---

[25] *Pedoman*, 1 Agustus 1955

Menteri Pekerjaan Umum. PNI menerima tawaran ini, tetapi menuntut hak untuk menunjuk orang yang akan duduk di dalamnya, sedangkan formatur menghendaki agar orang-orangnya dipilih oleh formatur sendiri. Jalan buntu tidak dapat dihindarkan. Akhirnya, Burhanuddin Harahap berhasil membentuk kabinet baru tanpa PNI. Kabinet ini terdiri dari 23 menteri dan didominasi oleh Masyumi.

Segera setelah kabinet terbentuk, Polisi Militer menangkap Mr. Djody Gondokusumo, mantan Menteri Kehakiman dalam Kabinet Ali I, dengan tuduhan korupsi. Wakil Jaksa Agung Abdul Muthalib Moro mengumumkan bahwa tindakan Polisi Militer ini tidak ada hubungannya dengan kabinet yang baru terbentuk.[26]

Tindakan Polisi Militer ini mendapat dukungan dari masyarakat dan tampak adanya hubungan yang dekat antara Angkatan Darat dan kabinet. Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1955 berlangsung serangkaian penangkapan terhadap pejabat tinggi. Tindakan ini merupakan salah satu pelaksanaan program kabinet, yaitu pemberantasan korupsi.

Program lain Kabinet Burhanuddin Harahap yang harus diselesaikan seperti telah dijanjikan dalam pembentukan kabinet, ialah pemilihan umum. Golongan oposisi mendesak terus pada kabinet untuk melaksanakan pemilihan umum itu secepat mungkin. Panitia Pemilihan Umum Pusat telah menetapkan bahwa pemilihan untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Akan tetapi, dalam kabinet sendiri timbul pertentangan karena ada yang menghendaki ditunda, dengan alasan persiapan belum selesai dan ada juga yang menuntut tetap diadakan pada waktu yang sudah ditetapkan.[27] Semakin mendekati waktu yang ditentukan suasana semakin tegang, sebab tiap-tiap partai berusaha untuk menang. Koran-koran partai saling menyerang dan melontarkan tuduhan-tuduhan serta saling menelanjangi partai lawannya. Tidak kurang dari 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota DPR dan 82 untuk Konstituante. Selain itu, terdapat pula 86 organisasi dan perseorangan yang akan ikut dalam pemilihan umum.[28]

Pada tanggal 29 September 1955 Iebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Hasil Pemilihan Umum I ini ternyata dimenangkan oleh empat partai yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI, sedang partai-partai lainnya mendapat suara jauh lebih kecil daripada keempat partai tersebut.

---

[26] Herbert Feith, *op. cit.*, hlm. 422; *Berita Indonesia*, 15 Agustus 1955

[27] NU menuntut tetap dilaksanakan pada waktunya, sedangkan PSI dan PIR menghendaki agar ditunda karena komposisi Panitia Pemilihan Pusat dan Daerah perlu diubah

[28] *Merdeka*, 24 September 1955

Gambar 3.2 Presiden Soekarno memasukkan kartu suara pada Pemilu 1955, September 1955 (Foto: *Ipphos*)

Gambar 3.3 Wakil Presiden Moh. Hatta di hadapan petugas Tempat Pemungutan Suara, pada Pemilu I, September 1955 (Foto: *Ipphos*)

Gambar 3.4 Pemilihan umum pertama, tahun 1955 (Sumber: Deppen)

Pemilihan umum untuk Konstituante diadakan pada tanggal 15 Desember 1955. Suasana dalam menghadapi pemilihan ini lebih tenang daripada ketika menghadapi pemilihan untuk DPR. Rupanya rakyat sudah lebih berpengalaman dan ketegangan dapat diatasi.

Tugas Kabinet Burhanuddin Harahap dianggap selesai dengan selesainya pemilihan umum sehingga perlu dibentuk kabinet baru yang akan bertanggung jawab kepada parlemen yang baru. Selain itu, dalam pemerintahan terjadi ketidaktenangan karena banyak mutasi dilakukan di beberapa kementerian, misalnya di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perekonomian.[29] Hal-hal tersebut di atas merupakan faktor munculnya desakan agar Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya. Pada tanggal 3 Maret 1956 kabinet pun bubar.

Berbeda dengan pembentukan kabinet pada masa-masa sebelumnya, Presiden Soekarno tidak menunjuk perseorangan menjadi formatur, tetapi menunjuk partai pemenang pemilu dan partai itulah yang akan mengajukan calonnya kepada Presiden. Partai yang ditunjuk ialah PNI sebab partai ini memperoleh suara terbanyak dalam pemilu. PNI mengajukan Ali Sastroamidjojo dan Wilopo sebagai formatur, tetapi Presiden Soekarno pada tanggal 8 Maret 1956 memilih Ali Sastroamidjojo.

Personalia kabinet diumumkan tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini disebut Kabinet Ali II. Inti kabinet adalah koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Pada mulanya Presiden Soekarno tidak setuju dengan susunan kabinet sebab tidak memasukkan anggota PKI ke dalam kabinet. Presiden mencoba mendesakkan keinginannya kepada tokoh Masyumi (Sukiman) dan tokoh NU K.H. Idham Chalid serta tokoh PNI dan PSII. Akan tetapi, semua tokoh itu mempunyai pendapat yang sama, menolak mengikutsertakan PKI dalam kabinet. Kabinet Ali Sastroamidjojo merupakan kabinet koalisi di mana tiga partai besar, yaitu PNI, Masyumi, dan NU memegang peran selain beberapa partai lainnya.

Pada bulan Oktober terjadi penggantian Kepala Staf TNI AD. Tiga orang calon diajukan yaitu Kolonel Simbolon, Kolonel Gatot Subroto, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Akan tetapi, tidak ada kesepakatan dalam Parlemen siapa dari ketiga calon ini yang akan dipilih sebab masing-masing ada yang menentangnya. Atas usul NU, Kolonel A.H. Nasution dicalonkan dan Nasution sendiri pada tanggal 25 Oktober 1955 menerima pencalonan itu. Akhirnya, pada tanggal 28 Oktober 1955 diputuskan bahwa Kolonel A.H. Nasution kembali diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat.

---

[29] Herbert Feith, *op. cit.*, hlm. 422

Program kabinet ini yang disebut Rencana Lima Tahun, memuat soal-soal jangka panjang, yaitu usaha perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam RI, melaksanakan pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat pemilihan anggota-anggota DPRD; mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai; menyehatkan keuangan negara sehingga tercapai imbangan anggaran belanja serta berusaha mewujudkan pergantian ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.[30]

Kabinet yang baru ini mendapat kepercayaan yang penuh dari Presiden Soekarno, yang kentara dari pidatonya di muka parlemen pada tanggal 26 Maret 1956 yang menyebut kabinet ini sebagai titik tolak dari periode *planning* dan *investment*.[31] Namun, Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini juga tidak luput dari kesukaran-kesukaran yang harus dihadapi; di antaranya yang penting adalah berkobarnya semangat anti-Cina di kalangan masyarakat dan adanya kekacauan di beberapa daerah.

Ditandatanganinya Undang-Undang Pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1956, menimbulkan persoalan tentang bagaimana nasib modal Belanda yang ada di Indonesia. Ada anjuran untuk mengadakan nasionalisasi atau indonesianisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda itu. Akan tetapi, sebagian besar anggota kabinet menolak tindakan tersebut. Dalam hal itu banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang menjual perusahaannya, terutama kepada orang-orang Cina karena pada umumnya merekalah yang beruang. Orang-orang Cina ini memang sejak lama sudah mempunyai kedudukan yang kuat dalam ekonomi Indonesia. Itulah sebabnya pada tanggal 19 Maret 1956 Mr. Assaat di depan Kongres Nasional Importir Indonesia di Surabaya mengatakan perlunya pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi pengusaha-pengusaha nasional. Hal ini penting sebab pengusaha Indonesia tidak mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha nonpribumi, khususnya orang Cina.

Pernyataan Assaat ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat, dan lahirlah "gerakan Assaat" di mana-mana. Pemerintah menanggapi gerakan ini dengan keluarnya *statement* dari Menteri Perekonomian Burhanuddin (NU) bahwa pemerintah akan memberi bantuan terutama pada perusahaan-perusahaan yang 100% diusahakan oleh orang Indonesia.

Perasaan anti-Cina ini menimbulkan tindakan kekerasan antara lain perusakan toko mobil milik seorang pengusaha keturunan Cina sebagai ekor

---

30 *Keterangan dan Djawaban Pemerintah tentang Program Kabinet Ali Sastroamidjojo II,* 1956

31 *Pedoman,* 27 Maret 1956

pemukulan olehnya terhadap seorang dokter tentara. Selain itu, juga tidak sedikit tulisan-tulisan anti-Cina disebarkan, baik di Jakarta, Bandung, Semarang, maupun Solo.[32]

C. Politik Bebas-Aktif dan Konferensi Asia Afrika

1. Politik Luar Negeri Setelah Pengakuan Kedaulatan

Hubungan luar negeri yang dirintis sejak Perang Kemerdekaan berkembang sesudah Pengakuan Kedaulatan 1949. Kabinet RIS di bawah Perdana Menteri Hatta melaksanakan hubungan luar negeri yang dititikberatkan pada negara-negara Asia dan negara-negara Barat, karena kepentingan ekonomi Indonesia masih terkait di Eropa; pasar hasil bumi Indonesia masih berpusat di negeri Belanda dan Eropa Barat pada umumnya. Untuk kepentingan yang sama pemerintah mengirimkan Djuanda guna mencari bantuan yang tidak mengikat ke Amerika Serikat. Garis itu diteruskan oleh kabinet penggantinya yaitu Kabinet Natsir (September 1950–Maret 1951) setelah kembali kepada bentuk Negara Kesatuan. Adapun Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952) pengganti Kabinet Natsir, menempuh kebijakan yang menyimpang dari politik bebas-aktif. Pada bulan Januari 1952 Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo mengadakan pertukaran surat dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran dalam rangka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan *Mutual Security Act* (MSA). Sekalipun masih di dalam tingkat pertukaran surat, kejadian ini mengundang reaksi dari pelbagai pihak. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) mengajukan interpelasi atas kebijakan politik luar negeri, yang menyangkut MSA. Pemerintah dianggap telah meninggalkan politik bebas-aktif dan memasukkan Indonesia ke dalam sistem pertahanan Blok Barat. DPRS menolak meratifikasi perjanjian itu sehingga Kabinet Sukiman jatuh dan digantikan oleh Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953). Dasar hubungan dengan Amerika Serikat yang ditempuh oleh Kabinet Sukiman diteruskan, tetapi "perjanjian" Subardjo-Cochran diubah dengan bentuk lain yang tidak melebihi batas kerja sama biasa antarbangsa. Isi perjanjian diubah dan dibatasi pada bantuan ekonomi dan teknik saja.[33] Bagi pemerintah selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Kabinet Sukiman menentukan batas "kanan" bagi pelaksanaan politik bebas-aktif demi kepentingan nasional.

---

[32] *Suluh Indonesia*, 27 Juli 1956; Wilopo, S.H., *op. cit.*, 1978, hlm. 48

[33] Departemen Luar Negeri, *Dua Puluh Tahun Departemen Luar Negeri RI*, 1971, hlm. 232, 241, 242

Kabinet Ali Sastroamidjojo I melaksanakan ofensif diplomatik yang menonjol. Hal itu tercermin dalam jawabannya pada tanggal 3 Juni 1952 kepada Parlemen agar pemerintah menetapkan sikap yang pasti antara tiga kemungkinan politik luar negerinya, yaitu:

Pertama : kerja sama dengan semua negara dengan menitikberatkan kerja sama dengan Amerika Serikat, dengan segala konsekuensinya.

Kedua : kerja sama dengan semua negara dengan menitikberatkan kepada kerja sama dengan Uni Sovyet, dengan segala konsekuensinya.

Ketiga : kerja sama dengan semua negara dengan menitikberatkan kepada penyusunan kekuatan ketiga, di samping blok Amerika dan blok Uni Sovyet.

Selanjutnya dalam keterangannya kepada Parlemen pada tanggal 25 Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengemukakan betapa pentingnya usaha pemupukan kerja sama antara negara-negara Asia-Afrika. Dalam keterangan tersebut dikemukakan: "Kerja sama dengan golongan negara-negara Asia-Afrika (Arab) kami pandang penting benar, karena kami yakin bahwa kerja sama erat antara negara-negara tersebut tentulah akan memperkuat usaha ke arah tercapainya perdamaian dunia yang kekal."

Isi pernyataan tersebut tidak berarti bahwa Indonesia hendak membentuk suatu blok ketiga, guna dihadapkan kepada kedua blok lainnya itu, sebagaimana yang kemudian dijelaskan oleh PM Ali Sastroamidjojo:

> "... Dalam hal ini bukan maksud pemerintah Indonesia untuk membentuk suatu blok ketiga, tetapi adalah menjadi pendapat Indonesia, bahwa suatu konferensi Asia-Afrika sangat mungkin mendorong terciptanya suatu faktor perdamaian dan dapat memberikan sumbangan bagi perdamaian dunia."

Penjelasan pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1953 tersebut merupakan landasan dalam rangka memupuk solidaritas Asia-Afrika dan menyusun kekuatannya agar mendapatkan posisi yang menguntungkan di tengah-tengah percaturan politik internasional.

Kabinet berikutnya yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap berusaha menjalankan politik bebas-aktif dengan agak dekat ke Barat. Selain dengan Australia dan Amerika Serikat, hubungan baik juga dijalin dengan kerajaan Inggris, Singapura, dan Malaya. Indonesia memperoleh bantuan surplus makanan dari Amerika Serikat senilai $96.700.000 berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 2 Maret 1956. Presiden

Soekarno juga secara resmi diundang untuk mengunjungi Amerika Serikat oleh John Foster Dulles, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yang datang ke Indonesia pada bulan Maret 1956.

Selain mengadakan hubungan baik dengan negara-negara Barat, untuk membuktikan bahwa Indonesia menganut politik bebas-aktif, Presiden Soekarno pada bulan Agustus 1956 mengunjungi Uni Sovyet. Dalam kunjungan ini telah ditandatangani perjanjian kerja sama dengan pemberian bantuan ekonomi tanpa ikatan dari Sovyet sebesar $100.000.000.[34] Pada bulan yang sama Presiden mengadakan kunjungan ke Cekoslovakia dan Yugoslavia. Kunjungan ke RRC dilakukan pada bulan Oktober.

Dengan Belanda dicoba membuka hubungan baru untuk menyelesaikan masalah Uni Indonesia-Belanda dan masalah Irian. Perundingan memakan waktu lama dan berlarut-larut sehingga menimbulkan tentangan dari partai-partai anggota kabinet sendiri. Indonesia dianggap merendahkan diri dan meminta-minta kepada Belanda. Akhirnya, Indonesia memutuskan Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tindakan ini disambut dengan hangat. Pada tanggal 22, 23, dan 24 Februari 1957 bendera Merah Putih dikibarkan sebagai tanda syukur bahwa satu lagi sisa ikatan kolonial diputuskan.

2. Antara Dua Kekuatan Dunia

Dalam keterangan Kabinet Natsir kepada Parlemen pada bulan September 1952[35] yang meninjau politik luar negeri Indonesia dari segi pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet, antara lain disebutkan: "Antara dua kekuasaan yang telah timbul, telah muncul persaingan atas dasar pertentangan ideologi dan haluan yang semakin meruncing. Kedua belah pihak sedang mencari dan mendapatkan kawan atau sekutu, membentuk golongan atau blok: Blok Barat dan Blok Timur. Dengan demikian, pertentangan paham dan haluan makin meluas dan mendalam, sehingga menimbulkan keadaan Perang Dingin dan dikhawatirkan sewaktu-waktu akan menyebabkan perang di daerah-daerah perbatasan antara dua pengaruh kekuasaan itu. Dalam keadaan yang berbahaya itu Indonesia telah memutuskan untuk melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan dalam menjalankan politik yang bebas itu kepentingan rakyatlah yang menjadi pedomannya. Di samping itu, pemerintah akan berusaha membantu tiap-tiap usaha untuk mengembalikan perdamaian dunia, tanpa

---

[34] Ide Anak Agung Gde Agung, *Twenty Years Indonesia Foreign Policy 1945–1965*, 1973, hlm. 1980

[35] Sejak bulan Agustus 1950 sampai tanggal 4 Juli 1959, Negara Republik Indonesia berada dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

menjalankan politik oportunis yang hanya didasarkan perhitungan laba-rugi dan tidak berdasarkan cita-cita luhur."[36]

Keterangan Kabinet Sukiman kepada Parlemen pada bulan Mei 1951 mengatakan antara lain, "politik luar negeri RI tetap berdasarkan Pancasila, pandangan hidup bangsa yang menghendaki perdamaian dunia. Pemerintah akan memelihara hubungan persahabatan dengan setiap negara dan bangsa yang menganggap Indonesia sebagai negara dan bangsa sahabat, berdasarkan harga-menghargai dan hormat-menghormati. Berhubung dengan adanya ketegangan politik, antara blok Uni Sovyet dan blok Amerika Serikat, pemerintah Indonesia tidak akan menambah ketegangan itu dengan turut campur dalam Perang Dingin yang terjadi antara dua blok itu. Berdasarkan pendirian di muka, Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentu menggunakan forum PBB tersebut untuk membela cita-cita perdamaian dunia."[37]

Kabinet Wilopo menerangkan kepada parlemen pada bulan Mei 1952 antara lain: "... asal mulanya pemerintah menyatakan sikap bebas dalam perhubungan luar negeri, ialah untuk menegaskan bahwa berhadapan dengan kenyataan adanya dua aliran bertentangan dalam kalangan internasional yang mewujudkan dua blok: yaitu Blok Barat dengan sekutu-kutunya dan Blok Timur dengan teman-temannya, Republik Indonesia bersikap bebas dengan makna:

a. tidak memilih salah satu pihak untuk selamanya dengan mengikat diri kepada salah satu dari dua blok dalam pertentangan itu;
b. tidak mengikat diri untuk selamanya atau akan bersikap netral dalam tiap-tiap peristiwa yang terbit dari pertentangan antara dua blok itu."

Ternyata kemudian keterangan yang memperlihatkan sikap negatif itu menimbulkan salah paham atau sedikit keragu-raguan baik dalam kalangan politik dalam negeri maupun pada pihak dua blok yang bertentangan itu. Dalam suatu soal atau peristiwa yang timbul mengenai pertentangan antara dua blok itu Republik Indonesia tetap berdasarkan sikapnya kepada politik bebas-aktif, dengan mengingat:

a. paham tentang niat dan tujuannya sebagai anggota yang ikhlas, setia dan bersungguh-sungguh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa;
b. Pandangannya tentang kepentingan negara dan bangsanya yang berpengaruh besar pada jangka masa dekat ataupun masa jauh.[38]

---

[36] Moh. Hatta, *Dasar-dasar Politik Luar Negeri RI*, 1953, hlm. 17; Departemen Luar Negeri, *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri*, 1971, hlm. 59–60

[37] Moh. Hatta, *op. cit.*, 1953, hlm. 18–19

[38] Moh. Hatta, *op. cit.*, 1953, hlm. 20

Dalam hal itu jelas bahwa politik luar negeri itu tidak semata-mata ditentukan oleh faktor subjektif, sesuai dengan keinginan satu negara, atau perasaan simpati atau antipati dari para negarawan serta pemimpin-pemimpin suatu negara.[39] Faktor-faktor objektif turut serta menentukan corak politik luar negeri itu. Karena itulah sering terjadi bahwa haluan politik luar negeri suatu bangsa berlainan dengan politik dalam negerinya dan tidak tergantung kepada ideologi suatu partai atau golongan yang pada suatu waktu memegang kekuasaan. Politik bebas-aktif merupakan *subject policy* dalam arti bersumber dan berakar pada hak memilih sikap yang ditentukan oleh kepentingan bangsa sendiri.

Republik Indonesia menggandengkan politik bebas-aktifnya dengan politik bertetangga baik (*good neighbour policy*). Politik bertetangga baik sering ditonjolkan terutama oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I dalam bulan Januari 1953 tatkala melaksanakan hubungan dan konsultasi dengan negara-negara tetangga seperti India, Pakistan, Birma, dan Sri Lanka, yang sama pandangannya mengenai politik internasional, terutama mengenai Perang Dingin, misalnya usaha untuk menghentikan perang di Korea. Menurut mereka, Perang Dingin itu sangat ditakuti oleh umat manusia. Alat perang yang semakin hebat dan dahsyat yang dalam sekejap mata sanggup memusnahkan daerah yang luas beserta penduduknya, makin menebalkan keyakinan dalam hati bangsa-bangsa tentang mutlak perlunya perdamaian dan harus dicegahnya perang. Keyakinan inilah yang menjadi pegangan bagi Indonesia untuk berjuang bagi perdamaian, sehingga tidak memilih salah satu pihak di antara kedua raksasa itu.[40]

Pada waktu kunjungannya ke India (1954), Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam pidatonya menjelaskan bahwa pelaksanaan politik persahabatan Indonesia adalah untuk kepentingan Asia umumnya. Kerja sama dan hidup berdampingan, *cooperation* dan *co-exsistence,* ialah isi dan makna politik luar negeri Indonesia.[41]

Sebagai hasil dari hubungan-hubungan bilateral tersebut makin kukuhlah pandangan yang sama mengenai kepentingan yang sama antara Indonesia dan tetangga-tetangganya. Misalnya, pembangunan ekonomi, pembangunan politik, dan kerja sama di bidang ekonomi. Berdasarkan semangat demikianlah kemudian terselenggara Konferensi Asia Afrika.

---

[39] Contoh dalam hal ini, politik pemerintahan Soekarno pada zaman Demokrasi Terpimpin (1960–1965), yang melancarkan politik konfrontasi dan mercusuar

[40] Moh. Hatta, *op. cit.*, hlm. 11

[41] Muhammad Yamin, *Pembentukan dan Pembubaran Uni*, 1955, hlm. 63

Perkembangan baru dalam pelaksanaan politik bebas-aktif ini terjadi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953–Juli 1955). Kabinet Ali I tidak menitikberatkan hubungannya ke Barat, tetapi lebih mendekatkan diri dengan negara Asia Afrika dan negara-negara Blok Sosialis. Ali telah merintis ofensif diplomatik bebas-aktif yang diwujudkan dengan menggalang solidaritas negara-negara Asia dan Afrika yang bertujuan menghapuskan kolonialisme dan meredakan ketegangan dunia yang ditimbulkan oleh ancaman perang nuklir antara kedua negara raksasa Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Indonesia kemudian berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955. Bagi bangsa Asia-Afrika, Konferensi Asia Afrika merupakan titik kulminasi dari solidaritas di kalangan mereka. Konferensi memulai suatu kerja sama baru dan pemberian dukungan lebih tegas terhadap perjuangan kemerdekaan. Khusus bagi Indonesia, konferensi memberi dukungan utama bagi pembebasan wilayah Irian Barat.

Oleh Kabinet Ali II (sesudah pemilihan umum) dilaksanakan hubungan dengan negara blok Sosialis. Dengan Uni Sovyet pada bulan Maret 1954 dibuka hubungan diplomatik. Berdasarkan prinsip politik bebas-aktif itu sesudah pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno melaksanakan muhibah, baik ke negara Blok Barat (Mei–Juli 1956) maupun ke negara Blok Timur (Agustus 1955).[42] Walaupun RI dan negara sosialis masing-masing mempunyai ideologi dan menganut sistem politik yang berlainan, perbedaan itu tidak menutup kemungkinan adanya pandangan-pandangan yang sama mengenai pelbagai soal. Titik pertemuan dituangkan di dalam *joint statement* (pernyataan bersama).[43]

Pernyataan bersama RI-Uni Sovyet yang dikeluarkan di Moskow pada tanggal 11 September 1956 mengundang reaksi pelbagai pihak. DPR menganggap bahwa pernyataan bersama ini telah melampui batas "kiri" dari politik bebas-aktif. Oleh karena itu, pernyataan bersama tersebut dianggapnya masih jauh dari batas kiri politik bebas-aktif RI. Pernyataan bersama yang menyangkut masalah perlucutan senjata, pakta militer, senjata atom, dikatakan sejiwa dengan Dasasila Bandung.[44]

3. Konferensi Asia Afrika

Sesudah Perang Dunia II konfigurasi politik dunia ditandai oleh munculnya dua kekuatan raksasa dunia yang saling bertentangan, yakni

---

[42] Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, 1971, hlm. 233

[43] Roeslan Abdulgani, *Mendajung Dalam Taufan*, 1956, hlm. 122

[44] Roeslan Abdulgani, *Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia*, Djakarta, 1957, hlm. 30– 32; Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, 1971, hlm. 234

Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Kedua kekuatan raksasa itu masing-masing mempunyai sistem politik dan bentuk pemerintah yang berbeda. Kedua kekuatan itu saling bertentangan dan berlomba-lomba menyusun dan mengembangkan kekuatannya baik secara politis maupun militer meliputi pengembangan senjata nuklir. Situasi pertentangan itu disebut Perang Dingin. Tiap-tiap pihak menuntut supaya semua negara di dunia ini menjatuhkan pilihannya kepada salah satu blok itu. Tidak "pro" sudah dianggap "anti", sedangkan sikap netral dikutuk.

Republik Indonesia bukan penganut politik luar negeri netral karena menolak untuk mengaitkan dirinya kepada negara atau kekuatan mana pun, betapapun besarnya. Politik dan sikap Indonesia dilandaskan kepada kemerdekaan dan bertujuan untuk memperkuat perdamaian. Terhadap dua blok kekuatan raksasa dunia yang bertentangan itu Indonesia tidak mau memilih salah satu pihak. Indonesia mengambil jalan sendiri dalam menghadapi masalah-masalah internasional. Oleh karena itu, politik ini disebut "politik bebas". Sering pula politik ini diperjelas dengan menambahkan kata "aktif" sehingga menjadi "politik bebas-aktif". Dengan "aktif" dimaksudkan bahwa Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan-pertentangan sesuai dengan cita-cita PBB. Politik ini sedapat mungkin diusahakan agar mendapat bantuan dan dukungan sebanyak mungkin dari negara-negara yang menjadi anggota PBB.[45] Contoh konkret dalam hal ini ditunjukkan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Kolombo yang berlangsung dari tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954 dan dihadiri oleh Perdana Menteri U Nu dari Burma (Myanmar), Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, Perdana Menteri Mohamad Ali dari Pakistan, Perdana Menteri Sir John Kotelawala dari Ceylon (Sri Lanka), dan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.

Dalam konferensi tersebut Ali Sastroamidjojo menyarankan agar pertemuan-pertemuan selanjutnya diperluas dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lainnya dari Asia-Afrika. Selanjutnya dalam akhir kunjungan Ali Sastroamidjojo ke India pada tanggal 25 September 1954 di New Delhi dikeluarkan Pernyataan Bersama Indonesia-India yang menekankan kembali perlunya diselenggarakan konferensi negara-negara Asia-Afrika yang akan bermanfaat bagi usaha menunjang perdamaian dunia serta mengadakan pendekatan-pendekatan mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi. Setelah berkunjung ke India, Ali Sastroamidjojo

[45] Moh. Hatta, *op. cit.*, 1953, hlm. 14

mengunjungi Burma. Pada akhir kunjungannya dikeluarkan pula pernyataan bersama. Di dalam pernyataan ini dijelaskan bahwa Perdana Menteri Burma juga menganggap bahwa Konferensi Asia Afrika perlu dan akan bermanfaat bagi perdamaian dunia. Setelah itu, diadakan pertemuan kembali para perdana menteri peserta Konferensi Kolombo di Indonesia untuk membicarakan persiapan-persiapan konferensi negara-negara Asia-Afrika di Indonesia.

Pertemuan yang diselenggarakan di Bogor dari tanggal 28–31 Desember 1954 dan disebut Konferensi Bogor itu telah mengajukan rekomendasi untuk:

a. mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung dalam bulan April 1955;
b. menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor;
c. menetapkan 25 negara-negara Asia Afrika yang akan diundang;
d. menentukan empat tujuan pokok dari Konferensi Asia Afrika, yaitu untuk:
    1) memajukan kemauan baik dan kerja sama antara bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam menjelajah dan memajukan kepentingan-kepentingan bersama mereka serta memperkukuh hubungan persahabatan dan tetangga baik;
    2) meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara yang diwakili;
    3) mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara yang diwakili;
    4) mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia-Afrika, seperti masalah kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme;
    5) meninjau kedudukan Asia-Afrika dan rakyatnya, serta memberikan sumbangan yang dapat mereka berikan dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia.

Setelah Konferensi Persiapan di Bogor, dari tanggal 18–25 April 1955 diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung dengan dihadiri oleh 24 negara undangan dan 5 negara pengambil prakarsa. Negara-negara kolonial Barat pada umumnya menyangsikan kemampuan negara-negara baru itu untuk menyelenggarakan konferensi politik. Sebaliknya, sambutan-sambutan dan dorongan-dorongan positif terdengar dari pihak negara-negara sosialis. Dengan makin kuatnya usaha negara-negara sosialis dan

negara-negara lain untuk menonjolkan *peaceful-coexistence*, agenda Konferensi Bandung memuat lima pokok acara yang akan dibicarakan, yaitu:

1. kerja sama ekonomi;
2. kerja sama budaya;
3. hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri (di dalamnya antara lain termasuk soal Palestina dan rasialisme);
4. masalah-masalah bangsa-bangsa yang tidak merdeka (di dalamnya antara lain termasuk soal Irian Barat dan Afrika);
5. masalah perdamaian dunia dan kerja sama internasional (di dalamnya termasuk beberapa segi tentang PBB, soal koeksistensi masalah Indo-Cina, Aden, serta masalah pengurangan persenjataan serta masalah-masalah senjata pemusnah massal).[46]

Dalam pidato pembukaannya mengenai keadaan dunia, Presiden Soekarno antara lain mengingatkan bahwa kolonialisme belum lagi mati.[47] Pidato-pidato sambutan baik dari Indonesia maupun dari para ketua delegasi negara peserta, selain menimbulkan suasana yang membesarkan semangat persaudaran dan persatuan di antara para peserta konferensi, juga merupakan pernyataan lahirnya Asia-Afrika yang baru.

Dalam keterangan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Sementara pada tanggal 14 Juni 1955 mengenai hasil-hasil Konferensi Asia Afrika antara lain dikemukakan bahwa konferensi dapat mengelakkan diri menjadi medan pertentangan Perang Dingin. Selain itu, beberapa ketegangan yang timbul di beberapa bagian benua Asia-Afrika dapat diredakan. Konferensi ternyata juga dapat menerima pendekatan tradisional bangsa Indonesia yaitu musyawarah dan mufakat. Sistem musyawarah dan mufakat ternyata dapat diterapkan pada konferensi tersebut dengan hasil yang baik.

Dengan berkumpulnya wakil 29 negara Asia-Afrika yang memiliki aneka warna dasar hidup kemasyarakatan, perekonomian, dan ketatanegaraan sebenarnya telah diperlihatkan koeksistensi secara damai dalam praktik.

Pada akhir konferensi dihasilkan beberapa dokumen, yaitu: *Basic Paper on Racial Discrimination* dan *Basic Paper on Radio Activity*. Keduanya dianggap sebagai bagian dari keputusan konferensi. Dokumen yang kemudian terkenal

---

[46] Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, hlm. 116–118; lihat juga George McTurnan Kahin, *The Asian-African Conference*, 1955, hlm. 76–84

[47] Roeslan Abdulgani, *Perkembangan ...* dan seterusnya, 1957, hlm. 23; 161–169

dengan nama Dasasila Bandung ialah 10 prinsip yang tercantum dalam *Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation*.[48]

Untuk Indonesia sendiri konferensi ini membawa keuntungan yang nyata, yaitu ditandatangani persetujuan dwikewarganegaraan antara Indonesia dan RRC (seorang yang memegang dwikewarganegaraan harus memilih salah satu, menjadi warga negara Indonesia atau RRC; yang tidak dapat memilih dapat mengikuti kewarganegaraan ayahnya). Keuntungan lain ialah dukungan yang diperoleh berupa putusan Konferensi Asia Afrika mengenai perjuangan merebut Irian Barat.[49]

D. Mencari Sistem Ekonomi Nasional

1. Pemikiran Ekonomi Nasional

Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo, yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi umumnya dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Sumitro mencoba mempraktikkan pemikirannya itu pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pada bangsa Indonesia harus selekas mungkin ditumbuhkan kelas pengusaha. Para pengusaha bangsa Indonesia yang pada umumnya bermodal lemah, diberi kesempatan untuk berpartisipasi membangun ekonomi nasional. Pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha itu, baik dalam bentuk bimbingan konkret maupun dengan bantuan pemberian kredit karena pemerintah menyadari bahwa pengusaha-pengusaha Indonesia pada umumnya tidak mempunyai modal yang cukup. Jika usaha ini berhasil, secara bertahap pengusaha bangsa Indonesia akan dapat berkembang maju, dan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial di bidang perdagangan akan tercapai.

Gagasan Sumitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir (September 1950–April 1951); ketika itu ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan.[50] Program ini terkenal dengan sebutan Program Benteng. Gerakan Benteng (*Benteng Group*) telah dimulai pada bulan April 1950. Selama tiga tahun (1950–1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa

---

[48] Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, hlm. 248–249

[49] Herbert Feith, *op. cit.*, hlm. 393

[50] Dalam Kabinet Natsir, salah satu programnya adalah "memperkembangkan dan memperkukuh kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar melaksanakan ekonomi nasional yang sehat"

Indonesia mendapat kredit bantuan dari program Benteng ini.[51] Program pemerintah ini pada hakikatnya adalah kebijakan untuk melindungi pengusaha-pengusaha pribumi. Namun, usaha ini tidak berhasil mencapai tujuannya.

Pengusaha-pengusaha Indonesia ternyata lamban menjadi dewasa, bahkan ada yang menyalahgunakan maksud pemerintah ini dengan mencari keuntungan secara cepat. Bantuan kredit ini ternyata tidak efektif sehingga program pemerintah tidak berhasil. Padahal, pemerintah menambah beban keuangannya sehingga menjadi salah satu sumber defisit.[52] Kabinet Sukiman yang memegang pemerintahan selama 10 bulan sejak April 1951 sampai Februari 1952 berusaha membatasi krisis moneter. Salah satu usaha yang ditempuh ialah melakukan nasionalisasi terhadap *De Javasche Bank.*

Krisis moneter yang dihadapi pemerintah ialah defisit anggaran belanja pada tahun 1952 sebanyak tiga miliar rupiah, ditambah dengan sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Meskipun dilanda krisis moneter, Menteri Keuangan Jusuf Wibisono masih memberikan perhatian kepada para pengusaha dan pedagang nasional golongan ekonomi lemah. Sesuai dengan Program Benteng kepada mereka masih diberikan bantuan pinjaman uang. Dengan memberikan bantuan tersebut diharapkan para pengusaha yang merupakan produsen dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo selaku Menteri Perekonomian di bawah Kabinet Ali lebih mengutamakan kebijakan Indonesianisasi, yaitu mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Langkah-langkah yang diambil antara lain mewajibkan perusahaan-perusahaan asing memberikan pelatihan-pelatihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf; mendirikan perusahaan-perusahaan negara, menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional, serta memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Kebijakan pemerintah di bidang perekonomian, terutama mengenai lisensi istimewa menimbulkan perdebatan di parlemen, oleh Tjikwan dari Masyumi diajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri

---

[51] Ralph Anspach, *The Problem of a Plural Economy and Its Effects On Indonesia's Economy*, 1963, hlm. 212

[52] Douglas S. Paauw, *Financing Economic Development: the Indonesian Case*, 1959, hlm. 65; Sri-Edi Swasono, "Proteksi atau penyuluhan untuk Pengusaha Pribumi", *Indonesia Raya*, 28–29 Mei 1973

Perekonomian Iskaq. Meskipun Mosi Tjikwan dapat dikalahkan, kabinet menjadi goyah, karena NU menyampaikan nota politik yang menghendaki perubahan personalia kabinet. Pada bulan November 1954 Mr. Iskaq digantikan oleh Ir. Roosseno Surjodikusumo.[53] Mengenai masalah pengelolaan bank pemerintah dan swasta di Indonesia, Sjafruddin Prawiranegara bekas Menteri Keuangan pada Kabinet RIS dan kemudian menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa keberhasilan suatu bank sentral, dalam hal ini adalah bank pemerintah, tergantung pada dorongan dan kerja sama dengan bank-bank lainnya. Demi kelangsungan hidup bank-bank yang lebih kecil lainnya, bank sentral harus dapat mengurangi persaingan dengan mereka.[54]

2. Sistem Ekonomi Liberal

Sesudah Pengakuan Kedaulatan, Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat ketentuan-ketentuan KMB: beban utang luar negeri sebesar Rp1.500 juta dan utang dalam negeri sejumlah Rp2.800 juta.[55] Struktur ekonomi yang diwarisi berat sebelah. Ekspor masih tergantung kepada beberapa jenis hasil perkebunan. Produksi barang-barang ekspor ini di bawah produksi sebelum Perang Dunia II.

Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup,[56] sedangkan masalah jangka panjang adalah masalah pertambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah. Beban yang berat ini merupakan konsekuensi dari Pengakuan Kedaulatan. Defisit pemerintah pada waktu itu sejumlah Rp5,1 miliar. Defisit ini untuk sebagian berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah, yaitu dengan cara melakukan tindakan keuangan pada tanggal 20 Maret 1950. Jumlah yang didapat dari pinjaman wajib sebesar Rp1,6 miliar. Kemudian, dengan kesepakatan Sidang Menteri Uni Indonesia-Belanda, diperoleh kredit sebesar Rp200.000.000,00 dari negeri Belanda. Pada tanggal 13 Maret di bidang perdagangan diadakan usaha untuk memajukan ekspor dengan sistem sertifikat devisa. Tujuan pemerintah adalah untuk merangsang ekspor. Nilai tukar rupiah dari Rp3,80 setiap $1, menjadi Rp7,6 untuk setiap $1 untuk ekspor, dan Rp11,40 setiap

---

53 Bruce Glassburner, "Economic Policy Making", *The Economy of Indonesia: Selected Readings* (Bruce Glassburner ed.), 1971, hlm. 86–88; lihat juga Wilopo S.H., *Zaman Pemerintahan Partai-Partai*, 1978, hlm. 39–40

54 Ali Wardhana, "The Indonesian Banking System", *The Economy of Indonesia: Selected Readings* (*Bruce Glassburner ed.*), 1971, hlm. 347

55 Djuanda, "Ekonomi Nasional", *Mimbar Indonesia,* no. 32, th. IV, 12 Agustus 1950, hlm. 11

56 Sumitro Djojohadikusumo, *op. cit.*, hlm. 138

$1 untuk impor.[57] Sistem ini memberikan penghasilan yang besar kepada eksportir dalam rupiah sehingga mereka dapat membayar lebih tinggi kepada produsen.

Karena pecahnya Perang Korea, ekspor RI pada kuartal kedua meningkat menjadi 187% pada bulan April 1950, dan 243% pada bulan Mei 1950, atau sejumlah $115 juta. Di samping usaha-usaha tersebut pemerintah juga berusaha mendapat kredit dari luar negeri. Kredit ini dimaksudkan untuk pembangunan prasarana ekonomi. Misi Menteri Kemakmuran Ir. Djuanda ke Amerika Serikat berhasil mendapat kredit dari *Exim Bank of Washington* sejumlah $100.000.000. Dari jumlah tersebut direalisasi sejumlah $52.245.000. Jumlah ini ditentukan untuk membangun proyek-proyek pengangkutan automotif, pembangunan jalan, telekomunikasi, pelabuhan, kereta api, dan perhubungan udara.[58]

Sejak tahun 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan oleh menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tidak memiliki barang-barang ekspor lainnya kecuali hasil perkebunan. Perkembangan ekonomi Indonesia tidak menunjukkan arah yang stabil, bahkan sebaliknya. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik (perluasan program pemerintah, biaya untuk operasi-operasi keamanan dalam negeri), adalah sebab utama bagi defisit. Di samping itu, pemerintah sendiri tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih ada untuk peningkatan pendapatan nasional. Kecuali itu, kelemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangannya tidak dibuat di Indonesia tetapi dirancang di Nederland.[59] Jadi, sebab-sebab terjadinya instabilitas tidak semata-mata terletak pada perluasan program, tetapi dipengaruhi juga oleh dua faktor di atas. Hal ini adalah akibat dari politik kolonial Belanda. Pemerintah Belanda tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup sehingga usaha mengubah sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak menghasilkan perubahan yang drastis.[60]

Pada tahun berikutnya pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan penghasilan negara. Kebijakan moneter ditinjau kembali sesudah pada akhir tahun 1951 Indonesia menasionalisasikan *De Javasche Bank.* Usaha pemerintah adalah menurunkan biaya ekspor dan melakukan tindakan penghematan. Defisit pada tahun 1952 telah meningkat menjadi

---

57 John Paul Meek, *The Government and Economic Development in Indonesia*, 1965, hlm. 282–284

58 Kementerian Penerangan, *Exim Bank*, 1952, hlm. 4–8

59 Ali Wardhana, *Monetery Problems of an Underdevelopment Economy: With Special Reference to Indonesia*, 1952, hlm. 30

60 Ali Wardhana, *ibid.*, hlm. 11

3 miliar rupiah. Pada mulanya, pemerintah tidak pernah meminta DPR untuk mengesahkan anggaran belanja. Barulah sejak tahun 1952 rencana anggaran belanja dimintakan persetujuan DPR.

Karena defisit ini, ada kecenderungan untuk mencetak uang baru, yang menimbulkan tendensi inflasi. Kecenderungan inflasi secara tidak langsung menghambat produksi karena naiknya upah. Sejak tahun 1953 defisit anggaran belanja pemerintah sebesar Rp3.047 juta dan peredaran uang berjumlah Rp7,6 miliar. Defisit ini meluncur terus sampai tahun 1958.

1953	3.047 juta rupiah
1954	3.600 juta rupiah
1955	2.000 juta rupiah
1956	2.300 juta rupiah
1957	5.300 juta rupiah[61]

Defisit yang terus-menerus adalah akibat kebijakan bujeter pemerintah yang mempunyai dua kelemahan yakni:

1. Tidak terdapat kontinuitas dalam penerimaan karena penerimaan hanya tergantung pada pajak-pajak tidak langsung. Besar kecilnya penerimaan ini tergantung kepada perkembangan perdagangan luar negeri.
2. *Current expenditures* (pengeluaran yang sedang berjalan) meningkat akibat perluasan program pemerintah, meluasnya birokrasi dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak efisien.[62]

Kebijakan yang ditempuh kemudian oleh pemerintah (Kabinet Natsir) adalah melaksanakan industrialisasi, yang dikenal sebagai Rencana Sumitro. Sasarannya ditekankan terutama pada pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan.[63] Kebijakan ini diikuti pula dengan usaha peningkatan produksi, pangan, perbaikan prasarana, dan penanaman modal asing.[64]

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I, pemerintah membentuk Biro Perancang Negara dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang, karena pemerintah yang terdahulu lebih menekankan program jangka

[61] Lukman Hakim, "Keadaan dan Keuangan pada Waktu Sekarang dan Jalan Keluar Mengatasi" dalam *Menuju Ekonomi Marhaenis,* hlm. 39

[62] Tan Goan Po, *Faktor-faktor Strategis dalam Kebijaksanaan Ekonomi Ditinjau dari Sudut Pembangunan,* 1955, hlm. 1

[63] John. O, Sutter, *Indonesianisasi*, 1962, hlm. 775

[64] Benjamin Higgins, *Indonesia's Economy: Stabilization and Development*, 1968, hlm. 15

pendek, sehingga hasilnya belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Masa kerja tiap-tiap kabinet yang terlalu singkat dan programnya selalu berganti-ganti mengakibatkan tidak terdapat stabilitas politik. Tidak adanya stabilitas politik ini merupakan faktor bagi kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Biro ini dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Pada bulan Mei 1956 biro ini menghasilkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) (1956–1961). Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 11 November 1958, yang mempunyai daya surut sampai 1 Januari 1956. Akibat situasi politik dan ekonomi, Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun kemudian terpaksa diubah prioritas dan sasarannya pada tahun 1957 sesudah diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT ini diperkirakan berjumlah Rp12,5 miliar, didasarkan harapan bahwa harga barang dan upah buruh tidak berubah selama lima tahun. Akan tetapi, karena adanya depresi di Amerika Serikat dan Eropa Barat akhir 1957 dan awal 1958, pendapatan negara menjadi mundur, karena harga ekspor bahan mentah merosot. Demikian pula perjuangan pembebasan Irian Barat yang mendorong pemerintah untuk melaksanakan tindakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia pada bulan Desember 1958, turut pula memengaruhi. Faktor politik lainnya yang memberatkan pelaksanaan RPLT adalah ketegangan antara pusat dan daerah, serta adanya barter gelap yang bertendesi membahayakan pembangunan.[65]

Ketegangan antara pusat dan daerah ini dapat diredakan untuk sementara waktu dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Djuanda yang sementara itu telah menjadi perdana menteri memberikan kesempatan kepada Munap untuk mengubah rencana pembangunan itu agar menghasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh dalam jangka panjang. Namun, pelaksanaan pembangunan ini dihambat oleh kesulitan administratif, khususnya penentuan prioritas. Ketegangan politik yang timbul tidak dapat diredakan lagi dan akhirnya pecah pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk menumpas pemberontakan itu diperlukan biaya yang besar. Akibat langsung adalah meningkatnya defisit dan angka ekspor menunjukkan tren menurun. Persentase defisit dari tahun 1950 adalah 20% pada tahun 1960 meningkat menjadi 100%. Sementara itu, ketegangan politik antara Indonesia dan Belanda juga memuncak menuju konfrontasi senjata.

---

[65] Biro Perantjang Nasional, "Laporan Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun, 1956–1960", Djakarta, 1960, hlm. 5–9

E. Masalah-Masalah Angkatan Perang

1. Peristiwa 17 Oktober 1952

Pada hakikatnya Peristiwa 17 Oktober 1952 mempunyai faktor-faktor penyebab pada masa-masa sebelumnya. Setelah Perang Kemerdekaan berakhir, Indonesia menghadapi banyak persoalan, antara lain:

1. keadaan politik yang labil dengan sistem demokrasi liberal model Eropa Barat (khususnya Belanda);
2. keadaan sosial-ekonomi yang semakin memburuk dan korupsi yang semakin meluas;
3. persoalan pembebasan Irian Barat yang tidak cepat selesai;
4. kemerosotan integritas dan kemampuan aparatur pemerintahan akibat pertentangan antar dan intern partai-partai serta pergolakan intern Angkatan Perang.[66]

Setelah Pengakuan Kedaulatan, pimpinan Angkatan Perang khususnya Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) berusaha mengonsolidasi dan memajukan TNI. TNI yang terdiri atas pejuang-pejuang yang bermodalkan semangat dan masih diikat oleh loyalitas pribadi, akan ditingkatkan menjadi Angkatan Perang yang lebih tinggi mutu teknis militernya dan diikat oleh disiplin yang melembaga. Jika usaha ini berhasil, Angkatan Perang akan menjadi suatu kekuatan sosial-politik yang kompak yang dapat mengimbangi kekuasaan partai-partai politik dan golongan politik pada umumnya. Partai-partai menganggap usaha ini sebagai ancaman terhadap mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha mencegahnya dengan cara memengaruhi pion-pion politik di dalam Angkatan Perang. Langkah-langkah mulai diambil melalui seorang perwira senior. Bambang Supeno mendatangi panglima-panglima daerah dan mengajak mereka untuk menandatangani pernyataan agar Presiden mengganti Kolonel A.H. Nasution sebagai KSAD.[67] Pada tanggal 12 Juli 1952 diadakan pertemuan perwira-perwira pimpinan Angkatan Darat dari pusat serta daerah dan kebanyakan di antara mereka tidak menyetujui cara yang ditempuh oleh Bambang Supeno itu karena merusak solidaritas intern Angkatan Perang. Keesokan harinya Bambang Supeno menulis surat langsung kepada Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Parlemen. Di dalam surat itu ia menyatakan bahwa ia sudah kehilangan kepercayaan

---

[66] A.H. Nasution, "Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952", *Sinar Harapan*, 9 November 1972

[67] T.B. Simatupang, "Dua Puluh Tahun Setelah Peristiwa 17 Oktober 1952", *Sinar Harapan*, 16–21 Oktober 1972

kepada atasannya. Parlemen mengadakan sidang yang membahas sebuah mosi yang menuntut agar diadakan perbaikan dalam pimpinan dan organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.[68]

Pada tanggal 18 Juli 1952 KSAP mengirim surat kepada pemerintah, mendesak agar peristiwa tersebut diselesaikan sesuai dengan prosedur militer. Karena tindakan Kolonel Bambang Supeno dianggap melanggar disiplin, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX membebastugaskannya. Sementara itu, seksi-seksi pertahanan dari parlemen memberikan perhatian yang serius terhadap masalah ini. Pembebasan tugas Kolonel Bambang Supeno yang kemudian diajukan kepada Presiden ternyata ditolak.

Selanjutnya atas inisiatif Kolonel Djatikusumo dengan seizin KSAP diselenggarakan rapat kolegial pada tanggal 10 Oktober yang dihadiri oleh para panglima serta para perwira menengah yang berada di Jakarta. Pada rapat tersebut diadakan pertukaran pendapat apakah perdebatan dalam DPR(S) mengenai kebijakan Kementerian Pertahanan membahayakan keutuhan organisasi Angkatan Perang serta negara atau tidak. Mereka bersepakat untuk berkumpul lagi apabila ternyata DPR(S) sampai menerima mosi. Rapat khusus lanjutan antara KSAD dan para panglima membicarakan mosi DPR(S) diadakan pada tanggal 11 Oktober. Hasil keputusan rapat ialah mereka bersama akan solider menghadapi perkembangan selanjutnya. Masih dalam rangkaian pembicaraan DPR(S) tentang Angkatan Perang, pada tanggal 15 Oktober para panglima diundang rapat lagi ke Staf Umum Angkatan Darat karena DPR(S) akan menyatakan putusannya pada tanggal 16 Oktober. Dalam DPR(S) sendiri ada tiga mosi yang mempermasalahkan Angkatan Perang, yaitu:

1. mosi Burhanuddin sebagai mosi tidak percaya;
2. mosi Kasimo/Natsir yang menuntut peninjauan kembali susunan Kementerian Pertahanan dan APRI;
3. mosi Manai Sophiaan/Arudji/Idham Chalid yang menuntut peninjauan kembali pimpinan Angkatan Perang.

Kalangan milier menganggap sikap DPR(S) itu tidak wajar dan dirasakan sebagai intervensi langsung dalam soal intern TNI AD. Apalagi terdapat kenyataan bahwa lebih kurang separuh anggota DPR(S) itu berasal dari "negara-negara" bentukan Belanda sehingga tidak memiliki riwayat perjuangan dalam Perang Kemerdekaan yang merupakan sesuatu yang dijunjung di kalangan TNI AD.

---

[68] *Antara*, 7 Maret 1953; *Keng Po*, 17 Maret 1953

Untuk menghadapi perkembangan DPRS yang dapat mengganggu stabilitas nasional, Pimpinan AD berdasarkan hasil konsensus dengan para panglima teritorium pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1952 mengeluarkan Pernyataan Pimpinan AD. Butir kelima dari pernyataan yang terdiri dari tujuh butir keputusan itu mengemukakan kekhawatiran akan terjadinya instabilitas. Oleh karena itu, pimpinan Angkatan Perang mendesak Kepala Negara untuk membubarkan DPR(S) dan membentuk DPR baru. Pernyataan itu ditandatangani oleh KSAD, para panglima teritorium, asisten-asisten KSAD serta inspektur-inspektur kesenjataan/jawatan sebanyak 16 orang perwira menengah. Penyampaian surat pernyataan tersebut kepada Presiden dipercayakan kepada Wakil KSAD Letkol Sutoko yang juga dipercayakan bertindak sebagai juru bicara. Karena malam sebelumnya Presiden sudah diberi tahu lewat Kolonel drg. Mustopo, ia merasa tidak begitu terkejut. Presiden menolak desakan itu dan berkata akan menyelidiki lebih dahulu keinginan rakyat di luar Jakarta dan akan mendesak pemerintah agar mempercepat pemilihan umum.

Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi menuntut dibubarkannya Parlemen. Para demonstran memasuki gedung DPR(S), merusak beberapa peralatan, dan kemudian bergerak ke Istana. Mereka mendesak Presiden Soekarno agar membubarkan DPR(S) dan menggantinya dengan DPR yang baru. Di depan para demonstran, Presiden menyatakan menolak membubarkan DPR(S) karena ia bukan diktator. Dikatakannya pula bahwa para demonstran hanyalah sebagian rakyat Jakarta, tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Penolakan yang sama juga disampaikan Presiden di depan KSAD, WKSAD, dan para panglima Tentara dan Teritorium serta KSAP yang datang ke istana pada hari itu juga. Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya demonstrasi telah diadakan penjagaan pada posisi yang strategis seperti di Lapangan Banteng dan Lapangan Merdeka.[69]

Akibat peristiwa 17 Oktober ini Angkatan Darat mengalami perpecahan yang memerlukan waktu beberapa tahun untuk mengatasinya. KSAP Jenderal Mayor T.B. Simatupang diberhentikan dan jabatan KSAP dihapuskan, sedangkan KSAD Kolonel A.H. Nasution mengajukan permintaan berhenti, sebagai pertanggungjawabannya atas terjadinya peristiwa tersebut. Ia digantikan oleh Kolonel Bambang Sugeng. Pemerintah pada tanggal 22 November 1952 mengeluarkan keterangan bahwa pada tanggal 17 Oktober tidak terjadi *coup* atau percobaan *coup*. Pemerintah tidak dapat mewujudkan persatuan di lingkungan Angkatan Perang, tetapi hanyalah berhasil mengusahakan Angkatan Perang kembali kepada

[69] A.H. Nasution, 17 Oktober 1952, hlm. 8–11

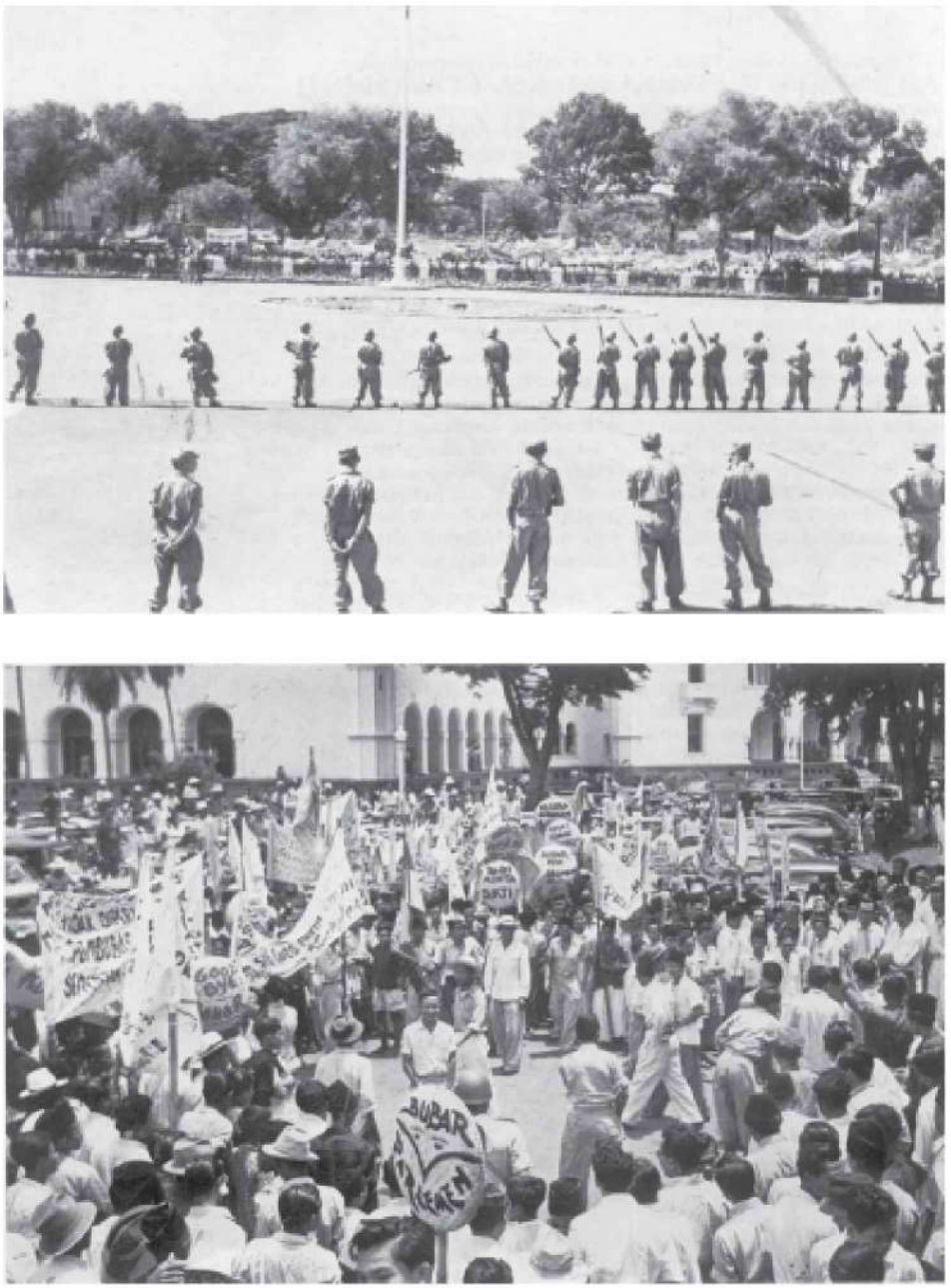

Gambar 3.5 Demonstrasi massa di depan Istana Merdeka pada tanggal 17 Oktober 1952 (Foto: *Ipphos*)

tugasnya sehari-hari.[70] Walaupun demikian, peristiwa ini mulai menggoyahkan kabinet.

Masalah yang bersangkutan dengan peristiwa 17 Oktober 1952 oleh Kabinet Ali I tidak disebut-sebut dalam programnya, tetapi dalam jawabannya atas pertanyaan anggota DRRS Burhanuddin, pemerintah menyatakan bermaksud akan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Penyelesaian itu akan dijalankan menurut hukum oleh Kejaksaan Agung di samping akan ditempuh jalan penyelesaian lain.

Peristiwa 17 Oktober 1952 menyebabkan terjadi dua blok dalam Angkatan Darat, yang pro dan yang kontra. Pejabat Panglima TT V/ Brawijaya, Letnan Kolonel dr. Suwondo, mendukung sikap pimpinan Angkatan Darat, sedangkan salah seorang komandan resimennya, Letnan Kolonel Sudirman, menentang Suwondo dengan mengundurkan diri dan diganti oleh Sudirman sebagai pejabat panglima. Peristiwa yang sama terjadi pula di lingkungan TT VII/Sulawesi. Kepala Staf TT VII Letnan Kolonel J.F Warrouw mengambil alih pimpinan dari tangan panglimanya, Kolonel Gatot Subroto, yang terang-terangan mendukung peristiwa 17 Oktober. Pengambilalihan jabatan terjadi pula di TT II/Sriwijaya dari Pejabat Panglima Letnan Kolonel Kosasih ke tangan Letnan Kolonel Kretarto. Namun, pemerintah mengangkat Kolonel Bambang Utoyo yang baru saja dipensiunkan bulan September 1952 menjadi Panglima TT II yang baru.

Untuk mengutuhkan kembali jajaran Angkatan Darat diselenggarakan musyawarah antara golongan pro-17 Oktober dan golongan anti-17 Oktober. Pertemuan yang dihadiri oleh 29 orang perwira senior Angkatan Darat diadakan di Yogyakarta dari tanggal 21 sampai 25 Februari 1955. Pertemuan yang disebut *Rapat Collegiaal* (*Raco*) ini membahas tiga masalah pokok, yaitu:

1. keutuhan dan persatuan Angkatan Darat;
2. penyelesaian Peristiwa 17 Oktober 1952;
3. pembangunan Angkatan Darat.

Raco itu menghasilkan Piagam Keutuhan Angkatan Darat Republik Indonesia yang juga disebut Piagam Yogyakarta.[71] Dengan ditandatanganinya Piagam Yogyakarta oleh 29 orang perwira senior peserta Raco, Peristiwa 17 Oktober 1952 di kalangan Angkatan Darat dianggap selesai.

Tidak lama setelah berakhirnya Konferensi Asia Afrika, KSAD Kolonel Bambang Sugeng meletakkan jabatannya karena merasa tidak mampu

---

[70] Wilopo S.H., *Zaman Pemerintahan Partai-partai,* hlm. 30

[71] Saleh As'ad Djamhari, *Ichtisar Sejarah Perdjuangan ABRI* (*1945–Sekarang*), 1971, hlm. 83

melaksanakan isi Piagam Yogya. Terjadilah kesukaran-kesukaran untuk menunjuk penggantinya. Akhirnya, pemerintah memutuskan mengangkat Kolonel Bambang Utojo, Panglima Tentara dan Territorium II/Sriwijaya sebagai KSAD. Pengangkatan Kolonel Bambang Utojo sebagai KSAD mendapat tantangan dari Wakil KSAD Kolonel Zulkifli Lubis dan kalangan Angkatan Darat sendiri. Upacara pelantikan KSAD baru pada tanggal 27 Juni 1955 diboikot oleh para perwira senior Angkatan Darat. Upacara berlangsung sangat sederhana, tanpa panji-panji AD, tanpa pasukan kehormatan sebagaimana lazimnya dalam tata cara militer, bahkan lagu Indonesia Raya tidak dimainkan oleh barisan musik militer, tetapi oleh Barisan Musik Pasukan Pemadam Kebakaran.[72] Lebih dari itu, pejabat KSAD Kolonel Zulkifli Lubis menolak untuk melakukan serah terima dengan Bambang Utoyo, bahkan KSAD yang baru ini tidak diizinkan memasuki MBAD. Akibat peristiwa ini, Ketua Seksi Pertahanan dalam Parlemen, Zainal Baharuddin, dengan dukungan B.M. Diah, Margono Djojohadikusumo, Mr. T.M. Hassan, dan Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri dari jabatannya.[73] Kedudukan pemerintah menjadi goyah serta tidak mungkin lagi untuk bertahan setelah Menteri Pertahanan Mr. Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri akibat mosi tersebut. Krisis ini memuncak setelah adanya desakan dari partai-partai pendukung pemerintah, yaitu Parindra, PSII, NU, PRN, dan Partai Buruh agar kabinet bubar. Akibat adanya desakan-desakan ini akhirnya Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menyerahkan kembali mandatnya kepada Wakil Presiden pada tanggal 24 Juli 1955 karena Presiden saat itu sedang menjalankan ibadah haji.[74]

2. Masalah Intern Angkatan Udara

Peristiwa yang hampir serupa dengan yang terjadi di Angkatan Darat pada tanggal 27 Juni 1955 terjadi pula di Angkatan Udara. Di Pangkalan Udara Cililitan (Halim Perdanakusuma) pada tanggal 14 Desember 1955 terjadi keributan menjelang dilantiknya Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Muda Udara Hubertus Suyono. Tidak lama sebelum Komodor Suyono dilantik, secara tiba-tiba 25 orang prajurit dari pasukan kehormatan pembawa panji-panji Angkatan Udara bersama-sama maju serta berteriak, "Tidak setuju, tidak setuju!" Secara beramai-ramai mereka meninggalkan barisan. Upacara pelantikan mengalami kegagalan karena Menteri

---

72 *Mimbar Umum*, 28 Juni 1955

73 *Kedaulatan Rakjat*, 30 Juni 1955

74 Wilopo S.H., *Zaman Pemerintahan Partai-partai*, hlm. 41–42

Pertahanan Burhanuddin Harahap menolak melantik Komodor Suyono tanpa panji-panji.

Akibat peristiwa tersebut, dilakukan tindakan-tindakan penangkapan terhadap para pelaku huru-hara. Masalah pengusutannya diserahkan kepada Jaksa Tentara Agung. Guna mengatasi peristiwa kemelut itu kemudian Presiden/Panglima Tertinggi dengan didampingi oleh KSAU Komodor Udara Surjadarma dan Komodor Cililitan Noordraven memberikan amanatnya di hadapan para perwira AURI di Halim. Dalam amanatnya di hadapan para perwira Presiden menyatakan bahwa ia telah menerima permohonan berhenti dari KSAU Surjadarma, tetapi ia menolak.

Latar belakang peristiwa Halim ini sebenarnya merupakan masalah intern Angkatan Udara yang timbul sejak tahun 1950. Pada tanggal 28–29 Januari 1950 atas inisiatif Komodor dr. Hardjolukito diadakan rapat guna membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh Angkatan Udara, dihadiri oleh 10 perwira senior AURI dan dipimpin oleh Komodor Muda Suyono. Rapat yang sama diselenggarakan di Bandung dari tanggal 30 Januari sampai 9 Februari yang dipimpin oleh Komodor Muda Wiweko. Dalam rapat ini pimpinan AURI dikecam karena dianggap tidak mempunyai kebijakan yang tegas.

Sementara itu, pada tanggal 2 Juli dan 12 Juli 1952 di Pangkalan Cililitan (Halim) diselenggarakan rapat yang membahas masalah pendidikan dan penerbangan yang dipimpin oleh Komodor Muda Suyono.Terjadinya rentetan rapat-rapat itu menunjukkan bahwa di kalangan perwira AURI terdapat dua kelompok, sebagian mendukung KSAU dan sebagian lagi menentang kebijakan KSAU.

Tindakan selanjutnya dari Komodor Muda Suyono ialah pada tanggal 30 Oktober 1952 mengumpulkan para perwira Angkatan Udara yang sudah diliputi oleh suasana pertentangan paham. Akibat tindakan-tindakannya, Suyono dipanggil oleh KSAU dan pada tanggal 11 Mei 1953 diperintahkan untuk berangkat ke luar negeri. Karena merasa bahwa perintah itu sebagai hukuman, ia minta izin kepada KSAU agar diperbolehkan mengadukan masalahnya kepada Menteri Pertahanan. Permintaan itu diluluskan, tetapi ternyata tembusan surat pengaduannya diberikan kepada DPR(S). Tindakan ini dipersalahkan oleh pimpinan AURI. Peristiwa ini berlanjut dengan adanya permohonan pengunduran diri beberapa perwira muda penerbang AURI. Permohonan pengunduran ini tidak dikabulkan oleh KSAU.

Dalam menanggapi peristiwa intern AURI ini, pada bulan Januari 1956 Kabinet Ali Sastroamidjojo menyatakan mempertahankan Surjadarma sebagai KSAU. Kepada Suyono dan rekan-rekannya yang tidak menyetujui kebijakan KSAU diajukan pilihan, tetap tinggal atau keluar dari AURI.

Komodor Muda Suyono kemudian dikenakan tahanan. Masalah Suyono Cs., setelah Kabinet Ali jatuh, ditinjau kembali. Suyono akhirnya direhabilitasi dan untuk sementara ditugaskan di Kementerian Pertahanan. Mengenai penyelesaian peristiwa Halim serta masalah intern AURI, Menteri Pertahanan Burhanuddin Harahap mengeluarkan pengumuman bahwa penyelesaian itu dibagi dua persoalan yang masing-masing terpisah, yaitu:

1. masalah yang terjadi di Pangkalan Halim diselesaikan oleh Jaksa Tentara Agung;
2. menyempurnaan AURI dalam arti yang luas ditugaskan kepada Gabungan Kepala Staf GKS yang pada waktu itu dipimpin oleh KSAD Mayor Jenderal A.H. Nasution. GKS diberi kebebasan untuk membentuk panitia khusus untuk keperluan tersebut.[75]

F. Menanggulangi Gangguan Keamanan Dalam Negeri

1. Pemberontakan APRA

Pada masa RIS tidak sedikit kesukaran yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat. Sebagai suatu negara yang baru diakui kedaulatannya, Indonesia harus menghadapi rongrongan dari dalam yang dilakukan oleh beberapa golongan yang mendapat dukungan dan bantuan dari pihak Belanda atau mereka yang takut akan kehilangan hak-haknya jika Belanda meninggalkan Indonesia.[76]

Yang pertama ialah gerakan yang dikenal dengan nama Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di bawah pimpinan bekas Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didalangi oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya.

Salah satu cara untuk memperoleh dukungan bagi gerakannya, Westerling mempermainkan kepercayaan rakyat tentang akan datangnya Ratu Adil. Ia memahami bahwa sebagian besar rakyat Indonesia yang telah lama menderita karena penjajahan, baik di bawah Belanda maupun di bawah Jepang, mendambakan datang masa kemakmuran seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya. Menurut ramalan itu akan datang seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil, yang akan memerintah rakyat dengan adil dan bijaksana, sehingga keadaan akan aman dan damai dan rakyat akan makmur dan sejahtera. Tujuan APRA dan kaum kolonialis yang

---

[75] Saleh As'ad Djamhari, *op. cit.*, hlm. 88– 89

[76] Daska Prijadi, *Gerakan Operasi Militer II, Penumpasan "APRA" Westerling di Bandung*, 1965, hlm. 3

ada di belakangnya ialah mempertahankan bentuk federal di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara tersendiri di negara-negara bagian RIS. Padahal, pada Konferensi Antar-Indonesia di Yogya telah disetujui bahwa APRIS adalah Angkatan Perang Nasional.

Pasukan APRA yang terdiri dari lebih kurang 523 orang di antaranya kira-kira 300 anggota KL bersenjata lengkap menyerang kota Bandung pada pagi hari tanggal 23 Januari 1950. Sehari sebelumnya, sebetulnya pimpinan Divisi Siliwangi telah mensinyalir adanya suatu gerakan dari sekelompok orang bersenjata di luar kota Bandung. Akan tetapi, sebelum mereka sempat mengadakan persiapan untuk mengantisipasi gerakan itu, Westerling telah bertindak lebih dahulu. Dalam gerakan ke Bandung, pasukan APRA melucuti anggota polisi di pos Cimindi, Cibeureum, dan pabrik Mecaf. Di dalam kota, mereka membunuh setiap anggota TNI yang mereka jumpai. Mereka juga berhasil menduduki Markas Staf Divisi Siliwangi setelah membunuh hampir seluruh regu jaga yang hanya berjumlah 15 orang serta Letnan Kolonel Lembong, sedangkan jumlah gerombolan penyerbu lebih dari 150 orang. Hanya 3 orang yang selamat karena dapat meloloskan diri dari pengepungan.[77]

Gerakan APRA di kota Bandung ini menewaskan lebih dari 79 aggota APRIS dan juga banyak penduduk biasa yang menjadi korban. Pemerintah RIS segera mengirimkan bala bantuan ke Bandung. Kepolisian RIS mengerahkan satuan Mobiele Brigade Polisi dari Jawa Timur di bawah pimpinan Komisaris Polisi II Sutjipto Judodihardjo. Pasukan ini diangkut dengan pesawat terbang dari Jakarta.[78] Sementara itu, di Jakarta diadakan perundingan antara Perdana Menteri RIS Moh. Hatta dan Komisaris Tinggi Belanda. Sesuai dengan hasil perundingan itu, Komisaris Tinggi Belanda memerintahkan Mayor Jenderal Engels, Komandan Tentara Belanda di Bandung, agar memaksa Westerling dan pasukannya meninggalkan kota Bandung. Sore itu juga gerombolan APRA meninggalkan Bandung, menyebar ke berbagai tempat. Pasukan APRA yang bergerak ke Jakarta dihancurkan APRIS di daerah Cianjur.

Setelah gerombolan APRA meninggalkan Bandung, APRIS mengadakan razia secara intensif. Tokoh-tokoh yang diduga terlibat dalam gerakan itu pun ditangkap. Mereka adalah Anwar Tjokroaminoto (Perdana Menteri Pasundan), Komisaris Besar Polisi R. Jusuf, Komisaris Besar Polisi Djanakum, Surja Kartalegawa, dan Male Wiranatakusumah.[79]

---

77 *Pedoman*, 26 Januari 1950

78 Memet Tanuwidjaja, *et al.*, *Sejarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*, 1971, hlm. 97

79 Saleh As'ad Djamhari, *Ichtisar Sedjarah Perdjuangan ABRI*, 1971, hlm. 63

Gambar 3.6 Pada tanggal 23 Januari 1950 pasukan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling melancarkan serangan ke kota Bandung (Foto: *Ipphos*)

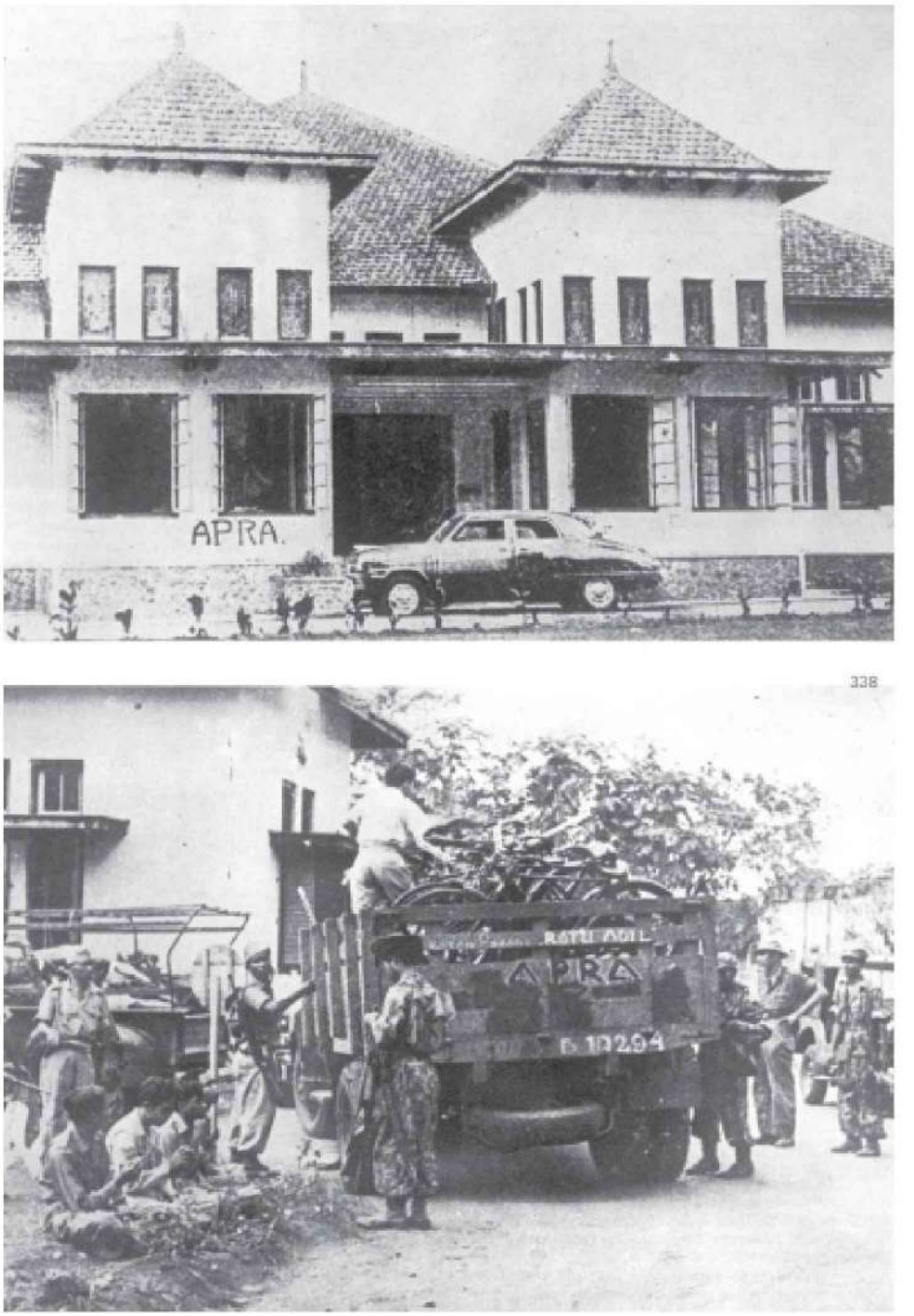

Gambar 3.7 Markas Staf Divisi Siliwangi yang diduduki APRA (atas) dan pasukan APRA melakukan perampasan harta rakyat di kota Bandung (bawah) (Foto: *Ipphos*)

Selain di Bandung, APRA juga merencanakan gerakan di Jakarta. Di sini Westerling mengadakan kerja sama dengan Sultan Hamid II, Menteri Negara tanpa portofolio di dalam kabinet RIS. Menurut rencana, gerombolan APRA ini akan menyerang gedung tempat kabinet bersidang. Mereka akan menculik semua menteri dan membunuh Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. Ali Budiardjo, dan Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel T.B. Simatupang.[80] Sebagai kamuflase, Sultan Hamid akan ditembak di kakinya. Rencana ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari, tetapi tercium oleh aparat intelijen. Sultan Hamid ditangkap, sedangkan Westerling pada tanggal 22 Februari 1950 meninggalkan Indonesia menuju Malaya dengan pesawat terbang Belanda. Dengan perginya Westerling, para pengikutnya pun menjadi bubar.[81]

2. Pemberontakan Andi Azis

Rongrongan kedua yang dialami RIS adalah dari petualangan yang dijalankan oleh Kapten Andi Azis, bekas ajudan Presiden NIT di Makassar.[83] Sebenarnya, pada tanggal 30 Maret 1950 Andi Azis bersama dengan pasukan yang ada di bawah komandonya, sudah menggabungkan diri ke dalam APRIS pada upacara resmi di depan Letnan Kolonel A.J. Mokoginta, Ketua Komisi Militer dan Teritorial Indonesia Timur. Ternyata, kurang dari satu minggu setelah penggabungan itu, Andi Azis melakukan pemberontakan. Motifnya adalah menolak masuknya pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Pada waktu itu situasi politik di Makassar memang tidak stabil, akibat adanya demonstrasi dari dua kelompok yang berseberangan. Kelompok anti federal menuntut agar NIT secepatnya membubarkan diri dan bergabung dengan RI, sedangkan kelompok profederal berdemonstrasi untuk tetap mempertahankan NIT.[82]

Dalam suasana politik yang cukup tegang itu terdengar berita bahwa pada tanggal 5 April 1950 pemerintah RIS mengirimkan kira-kira 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar untuk menjaga keamanan di sana. Kesatuan TNI/APRIS ini di bawah pimpinan Mayor H.V. Worang, diangkut dengan dua buah kapal dan sudah berada di perairan Makassar. Berita ini mengkhawatirkan pasukan bekas KNIL yang takut akan terdesak oleh pasukan baru yang akan datang itu. Mereka bergabung dan menamakan diri "Pasukan Bebas" di bawah pimpinan Kapten Andi Azis.[83]

---

80 Persadja, *Proses Peristiwa Sultan Hamid II*, 1955, hlm. 54–60

81 Raymond (Turk) Westerling, *Challenge to Terror*, 1952, hlm. 121–196

82 Rochmani Santoso, *Bom Waktu Kolonialis Belanda Meledak di Makassar*, 1965

83 Herbert Feith, *op. cit.*, hlm. 67; lihat juga Bardosono, *Peristiwa Sulawesi Selatan*, 1950

Gambar 3.8 Pemberontakan Andi Azis, Soumokil memproklamasikan "Republik Maluku Selatan" (RMS) 2 April 1950. Pada tanggal 14 Juli 1950 Pasukan Ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Azis Kawilarang mendarat di Pulau Buru. Namlea diduduki tanggal 16 Juli 1950, dan 28 September 1950 mendarat di pantai Ambon. (Foto: *Ipphos*)

Gambar 3.9 Kolonel Kawilarang sedang menyampaikan perintah-perintah operasi melalui radio telefoni (Foto: *Ipphos*)

Pada pukul 05.00 pagi tanggal 5 April 1950 Andi Azis dan pasukannya yang dibantu oleh anggota *Koninklijke Leger* (pasukan Belanda) dan KNIL menyerang markas APRIS di Makassar. Kekuatan mereka jauh melebihi kekuatan APRIS dan karena itu dengan mudah mereka berhasil menguasai kota Makassar. Beberapa orang prajurit APRIS/TNI jatuh menjadi korban dan beberapa orang perwira termasuk Letnan Kolonel A.J. Mokoginta ditawan.

Untuk menghadapi pemberontakan Andi Azis ini, pada tanggal 7 April 1950 pemerintah memutuskan untuk mengirim pasukan ekspedisi ke Sulawesi di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Esok harinya, 8 April, pemerintah mengultimatum Andi Azis agar dalam waktu 2 × 24 jam melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia juga diperintahkan mengonsinyasi pasukannya, mengembalikan senjata-senjata yang mereka rampas, dan membebaskan semua tawanan. Ultimatum itu ditanggapi Andi Azis setelah batas waktu terlampaui selama tiga hari. Ia berjanji akan ke Jakarta pada tanggal 13 April. Akan tetapi, atas desakan Soumokil, janji itu diingkarinya dan karena itu ia dianggap pemberontak. Ia menyerahkan diri kepada Letnan Kolonel Mokoginta, kemudian dibawa ke Jakarta pada tanggal 15 April untuk diadili. Sementara itu, Batalion Worang yang belum sempat mendarat di Makassar meneruskan perjalanan ke Jeneponto dan mendarat di situ dengan dikawal oleh Korvet Banteng dan Hang Tuah. Pasukan Worang kemudian bergerak ke arah Makassar dan pada tanggal 21 April berhasil memasuki kota tanpa perlawanan yang berarti dari pasukan pemberontak.

Setelah seminggu lamanya Batalion Worang menduduki Makassar, pada tanggal 26 April mendaratlah pasukan ekspedisi di bawah Kolonel A.E. Kawilarang di pantai timur, tenggara, dan barat Sulawesi Selatan. Pasukan ini berkekuatan lebih kurang 12.000 personel, diangkut oleh 12 kapal yang juga membawa dua tank pendarat. Kapal-kapal itu antara lain ialah Korvet Hang Tuah, Banteng, dan Rajawali. Untuk membantu kelancaran operasi di darat, APRIS mengerahkan dua pesawat pengebom B. 25 Mitchell. Markas komando APRIS ditempatkan di Makassar.

Sebuah pesawat Dakota AURIS menyebarkan surat selebaran ke seluruh Sulawesi Selatan yang memberitahukan kepada penduduk tentang kedatangan pasukan APRIS. Selanjutnya, untuk menjamin lancarnya pendaratan pasukan, diperintahkan kepada penduduk untuk tidak keluar rumah sesudah pukul 07.00, kecuali dalam jarak 40 km dari Makassar. Di samping kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, pihak Kepolisian Pusat di Jakarta mengerahkan dua kompi Mobiele Brigade (Mobbrig sekarang Brimob) yang berasal dari Jawa Timur.

Gambar 3.10 Komandan Brigade Garuda Mataram Letkol Soeharto sedang berbincang-bincang dengan Panglima Ekspedisi Indonesia Timur Kol. A.E. Kawilarang di Makassar (Foto: *Ipphos*)

Dalam rencana pendaratan APRIS di Sulawesi Selatan dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Batalion Worang mendarat di Jeneponto menuju Makassar;
2. Korvet Rajawali menembaki Pare-Pare dari Selat Makassar;
3. Batalion Andi Mattalatta mendarat di Pancana, kemudian bergerak ke Pare-Pare;
4. Pesawat-pesawat AURIS menembaki kota Makassar;
5. Korvet Banteng menembaki Bonthain;
6. Brigade Garuda Mataram Divisi II di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto mendarat di Bonthain menuju Makassar;
7. Brigade 18 Divisi I di bawah pimpinan Letnan Kolonel S. Sokowati mendarat di Balangnipa dan Sinjai.

Dengan datangnya pasukan ekspedisi ini, keamanan di Makassar berhasil dipulihkan. Akan tetapi, situasi aman itu tidak berlangsung lama sebab di dalam kota masih terdapat pasukan KL dan KNIL yang menunggu penarikan ke luar kota Makassar. Pasukan KL-KNIL ini sering mengadakan provokasi dan memancing bentrokan dengan pasukan APRIS.

Penduduk yang bertempat tinggal di dekat tangsi KNIL sering dianiaya atau dipukul. Tindakan yang sama juga dilakukan terhadap anggota APRIS yang sedang berjalan tanpa senjata. Provokasi mereka semakin lama semakin meningkat. Lebih dari itu, mereka mulai berani melancarkan serangan menembaki pos-pos APRIS, terutama asramanya yang berada di Kampemen Kis dan Tangsi Mattoangin. Keduanya terletak di kota bagian selatan.

Pertempuran antara KNIL dan APRIS/TNI meletus pada tanggal 15 Mei 1950. Dalam pertempuran tersebut APRIS berhasil memukul mundur pasukan lawan. Sore harinya pertempuran umum berhenti setelah KL-KNIL merasa tidak mampu mengimbangi kekuatan APRIS/TNI. Walaupun demikian, bentrokan-bentrokan bersenjata masih juga terjadi di Mattoangin, Mariso (Kampemen Kis), Boomstraat (dekat pelabuhan), dan di Markas Staf KNIL di Hogepad.

Kemudian pasukan APRIS mengadakan pengepungan terhadap tangsi-tangsi KNIL itu karena mereka tetap bersikap provokatif, seperti *show of force* dengan berkendaraan truk dan panser lewat di tengah kota untuk memancing bentrokan bersenjata. Dengan pertimbangan bahwa pertempuran mungkin akan berlangsung di dalam kota Makassar, Komandan APRIS Sektor Makassar Letkol Soeharto memerintahkan kepada tiap-tiap subsektor untuk mengirimkan satu kompi pasukan ke kota.

Untuk mengatasi kemelut tersebut, pada tanggal 18 Mei 1950 diadakan perundingan antara pimpinan APRIS dan KNIL. Pihak APRIS diwakili oleh Kolonel Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Abdul Haris Nasution, sedang pihak Belanda diwakili oleh Kolonel Pereira. Dalam perundingan itu disepakati untuk melakukan penjagaan bersama oleh Polisi Militer (PM) dari pihak APRIS/TNI dan MP (Militer Politie) dari pihak KNIL di daerah tangsi-tangsi KNIL. Di daerah tersebut KNIL tidak boleh keluar dan sebaliknya prajurit APRIS tidak boleh masuk. Di dalam kota dilakukan patroli bersama.

Hasil perundingan ini ternyata hanya ditaati selama beberapa bulan. Pertempuran berkobar lagi. Penyebabnya ialah tindakan anggota KNIL menembak mati sorang perwira APRIS, Letnan Jan Ekel, pada tanggal 1 Agustus 1950. Perwira ini baru datang dari daerah Nusa Tenggara. Karena dan tidak mengetahui adanya peraturan mengenai garis demarkasi, ia memasuki daerah KNIL-KL.

Pertempuran meletus pada tanggal 5 Agustus petang ketika Markas Staf Brigade Garuda Mataram secara tiba-tiba diserang oleh KNIL-KL. Mereka dapat dipukul mundur lagi ke tangsinya masing-masing di Kampemen Kis dan Mattoangin. Di sini KNIL-KL kemudian dikepung. Serangan umum dilakukan oleh APRIS dengan mengikutsertakan unsur-unsur infanteri maupun artileri, serta kekuatan udara dan laut. Pada tanggal 8 Agustus KNIL-KL sudah sangat lemah. Menyadari kedudukannya yang sangat kritis, pada tanggal 8 Agustus pihak KL-KNIL minta berunding. Perundingan diadakan antara Kolonel Kawilarang dan Mayor Jenderal Scheffelaar dari KL-KNIL. Hasil perundingan ini ialah kedua pihak setuju menghentikan tembak-menembak dan dalam waktu dua hari pasukan KL-KNIL harus sudah meninggalkan Makassar.[84]

3. Pemberontakan RMS

Cobaan terakhir yang dihadapi RIS dan berlanjut sampai masa RI adalah gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang tidak hanya ingin memisahkan diri dari NIT, tetapi juga dari RIS. Pendiri RMS ialah Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil, bekas Jaksa Agung NIT.[85]

Kedudukannya sebagai Jaksa Agung NIT memudahkan Soumokil untuk bepergian ke beberapa tempat di Indonesia Timur dengan menggunakan pesawat militer. Sebelum menuju Ambon, pada tanggal 13 April ia berkunjung ke Manado. Di Ambon gejala-gejala ke arah

---

[84] Rochmani Santoso, *op. cit.*, hlm. 6–12; Periksa juga: Bardosono, *op. cit.*

[85] Soe Hok Gie, *Kisah Penumpasan "RMS" (Gerakan Operasi Militer III)*, 1965

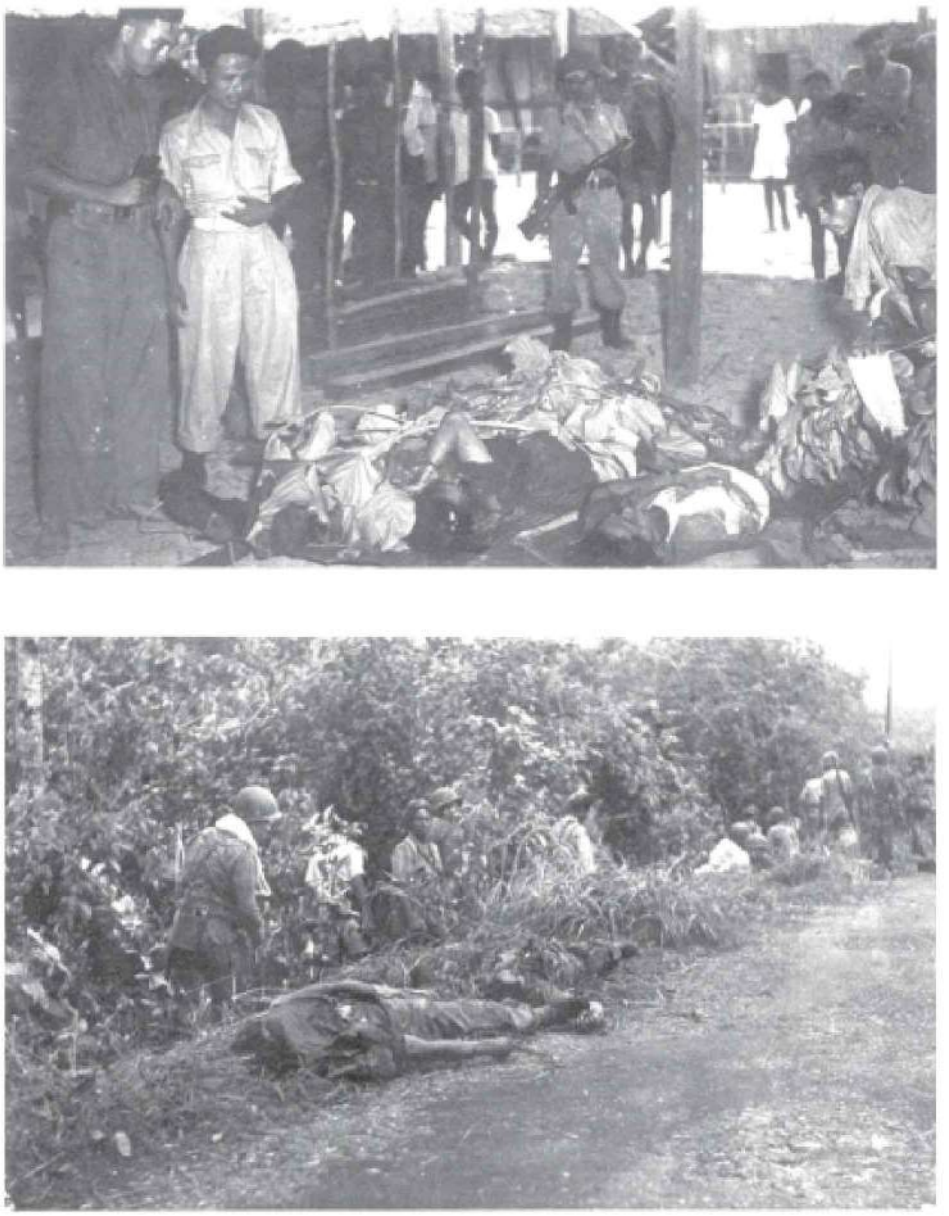

Gambar 3.11 Operasi penumpasan RMS dilakukan terus dari kota ke kota, dari pulau ke pulau. Tampak dalam kedua gambar ini korban-korban pada pihak RMS dan pasukan-pasukan APRIS yang terus maju. (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

pemisahan dengan NIT sudah tampak. Pada tanggal 4 April Ir. Manusama mengundang rapat para rajapati (penguasa desa) dari Pulau Ambon bertempat di kantornya. Kepada para rajapati dikemukakan bahwa penggabungan Maluku Selatan dengan wilayah Indonesia lainnya mengandung bahaya. Untuk memperingatkan seluruh rakyat Pulau Ambon mengenai bahaya ini, para rajapati menyetujui jika Manusama mengadakan rapat umum di kota Ambon. Rapat umum diselenggarakan pada tanggal 18 April 1950.

Perkembangan selanjutnya setelah rapat umum setidak-tidaknya dipengaruhi oleh Soumokil. Perannya secara aktif dalam proses pembentukan RMS tampak ketika ia mengadakan rapat rahasia di Tulehu tanpa mengikutsertakan para pamong praja. Dalam rapat yang dihadiri oleh para pemuka KNIL dan Ir. Manusama itu, Soumokil menganjurkan agar KNIL bertindak. Seluruh anggota Dewan Maluku Selatan disarankan untuk dibunuh, kemudian daerah itu dinyatakan sebagai negara merdeka. Sebagian peserta rapat menolak gagasan untuk melakukan pembunuhan.[86] Untuk melaksanakan proklamasi disarankan agar pemerintah daerah sendirilah yang melakukannya. Pada rapat kedua sore itu Kepala Daerah Maluku Selatan, J. Manuhutu, dipaksa hadir di bawah ancaman pasukan KNIL.

Praktik-praktik mengintimidasi massa dengan teror telah mulai tampak dilaksanakan sejak bulan Februari 1950 dengan menggunakan tenaga polisi. Pihak-pihak yang pro-Republik mengalami tekanan-tekanan. Serangkaian pembunuhan terjadi di beberapa tempat. Pelaksanaan gerakan teror ini selain mendapat bantuan polisi didukung pula oleh pasukan istimewa KNIL yang merupakan bagian dari *Korps Speciale Troepen* yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling di Batujajar (dekat Bandung). Mereka ikut mengambil bagian dalam pemberontakan Westerling di Bandung pada awal tahun 1950. Semula mereka hanya berjumlah 60 orang di Ambon, tetapi kemudian pada bulan April 1950 bertambah menjadi sekitar 200 orang. Mereka kemudian menjadi pengikut Soumokil dan melakukan teror terhadap golongan republikein. Ketua Persatuan Pemuda Indonesia Maluku, Wim Reawaru, mereka tangkap dan mereka bunuh.

Sampai bulan April di Ambon terdapat 2.000 orang anggota KNIL. Sebagian tiba di sana dalam rangka pengembalian ke masyarakat dan sebagian lagi ingin bergabung dengan APRIS. Di samping itu, terdapat pula

---

[86] R.Z. Leirissa, "Republik Maluku Selatan", *Prisma*, no. 7, th. VII, Agustus 1978, hlm. 34; lihat juga: R.Z. Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, 1975, hlm. 174–180; Ben van Kam, *Ambon Door de Eeuwen*, 1977, hlm. 91–95; 119–120

kelompok yang sengaja dikirim ke sana lengkap dengan senjatanya untuk tujuan-tujuan lain. Suatu ketika timbul huru-hara antara anggota-anggota KNIL dan pimpinan mereka yang berkebangsaan Belanda. Guna mengatasi hal ini, Kementerian Pertahanan RIS mengirim Letkol Tahiya, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perwira Staf KSAP. Tahiya dengan kepala daerah mencatat nama para prajurit KNIL yang ingin masuk APRIS. Pekerjaan itu terhenti karena kemudian terjadi kekacauan.

Pada masa prolog sebelum dicanangkan proklamasi "RMS", dilancarkan propaganda-propaganda separatis oleh Gabungan Sembilan Serangkai yang beranggotakan KNIL dan Partai Timur Besar. Menjelang Proklamasi tanggal 24 April 1950, Soumokil berhasil menghimpun kekuatan yang ada di lingkungan masyarakat Maluku Selatan. Selain KNIL dan polisi yang dapat dipengaruhi, juga para rajapati melalui Manusama, serta pemerintah daerah melalui Manuhutu dan sebagian golongan cendekiawan. Orang-orang yang menyatakan dukungannya kepada Republik dipenjarakan atau diancam.[87]

Pemerintah RIS berusaha mengatasi masalah ini secara damai dengan mengirimkan dr. Leimena. Akan tetapi, misi damai ini ditolak oleh Soumokil, bahkan mereka meminta bantuan, perhatian, dan pengakuan dari dunia luar, terutama dari negeri Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia.[88]

Masyarakat Ambon pun ikut membantu mencoba mencari penyelesaiannya. Bekas anggota-anggota badan perjuangan mengadakan pertemuan untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada masyarakat Ambon. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mencegah meluasnya provokasi dari kelompok-kelompok yang mendukung "RMS".

Masih dalam rangkaian usaha membendung meluasnya pengaruh "RMS", pada tanggal 12 sampai 13 Juni 1950 diselenggarakan Konferensi Maluku di Semarang. Dalam konferensi tersebut para politikus asal Ambon yang umumnya terdiri dari tokoh-tokoh zaman pergerakan nasional menganjurkan agar masyarakat Maluku mengirim misi perdamaian ke Ambon. Mereka juga menyusun daftar usul kepada pemerintah agar diberikan otonomi kepada Maluku Selatan. Para pemuda dari kelompok badan-badan perjuangan tidak menyetujui gagasan itu dan menganjurkan agar pemerintah melaksanakan operasi militer.[89]

---

87 Laporan A. Tahiya, 1975, hlm. 10

88 R.Z. Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, 1975, hlm. 178

89 *Ibid.*, hlm. 178–179

Misi perdamaian dikirimkan terdiri dari para politikus, pendeta, dokter, dan wartawan. Meskipun berhasil diberangkatkan, mereka tidak dapat bertemu dengan pengikut Soumokil. Karena usaha kompromi mengalami jalan buntu, akhirnya pemerintah terpaksa menumpas petualangan itu dengan kekuatan senjata. Ekspedisi militer untuk menumpas RMS disebut Gerakan Operasi Militer (GOM) III. Selaku pemimpin ekspedisi ditunjuk Kolonel Kawilarang, Panglima Tentara dan Territorium Indonesia Timur.

Pada tanggal 14 Juli pagi, pasukan ekspedisi APRIS sebanyak 850 orang di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang mendarat di Namlea, Pulau Buru. Dengan susah payah, karena belum mengenal medannya, APRIS berhasil merebut pos-pos penting di Pulau Buru. Komandan pasukan RMS menyerah dan menghadap Kolonel Kawilarang. Setelah Pulau Buru dikuasai, pasukan APRIS bergerak menuju Seram. Pendaratan dilakukan di Seram Barat pada tanggal 19 Juli 1950, dan dengan mudah Seram Barat dapat dikuasai pada hari itu juga. Dari sini gerakan pasukan APRIS dilanjutkan ke bagian lain Pulau Seram. Rupanya RMS bermaksud memusatkan kekuatan dan kekuasaannya di Pulau Seram dan Ambon. Pertempuran kemudian terjadi di Piru. Pada tanggal 28 September 1950 pasukan ekspedisi mendarat di Ambon, dan dengan demikian Pulau Ambon bagian utara berhasil dikuasai. Serangan selanjutnya ditujukan ke Teluk Passo. Dalam serangan itu pasukan dibagi atas tiga grup, yaitu Grup I dipimpin oleh Mayor Achmad Wiranatakusumah, Grup II dipimpin oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi, dan Grup III di bawah pimpinan Mayor Surjo Subandrio. Grup III berhasil menguasai lapangan terbang Laha, sedangkan Grup II ketika mendarat di Tulehu disambut dengan gembira oleh rakyat. Serangan-serangan ini dilindungi oleh tembakan-tembakan dari udara dan dari laut. Sementara Grup II menyerang Waitatiri, pada tanggal 3 November 1950 Grup I didaratkan di Ambon dan berusaha merebut benteng Nieuw Victoria. Pada hari itu juga kota Ambon dapat dikuasai setelah terjadi pertempuran dramatis, seorang lawan seorang. Pasukan RMS dengan menyamar sebagai APRIS serta membawa bendera Merah Putih berhasil menguasai benteng itu kembali. Beberapa saat setelah peristiwa itu, datang Grup II di bawah pimpinan Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Dalam pertempuran jarak dekat di depan benteng Nieuw Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi tertembak dan gugur.

Dengan jatuhnya Ambon, perlawanan RMS praktis telah dipatahkan. Banyak tokohnya yang melarikan diri ke pedalaman Pulau Seram dan selama beberapa tahun mengadakan serangkaian pengacauan.[90]

---

[90] Saleh As'ad Djamhari, *Ichtisar Sedjarah Perdjuangan ABRI*, 1971, hlm. 66–67

4. Pemberontakan DI/TII

a. DI/TII Jawa Barat

Pemberontakan yang bermotif agama Islam ini muncul di Jawa Barat di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1930-an. Resminya, pada tanggal 7 Agustus 1949 Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) yang kemudian lebih dikenal dengan nama Darul Islam (DI), di Desa Cisampang, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya. Akan tetapi, gerakannya sudah dimulai jauh sebelumnya, bahkan gagasan untuk mendirikan negara Islam sudah muncul dalam pikiran Kartosuwirjo pada masa Pendudukan Jepang. Sebagai langkah awal, di Malangbong, dekat Garut, didirikan Institut (pesantren) *Suffah* untuk merekrut para pengikutnya. Kepada mereka ditanamkan fanatisme yang dalam dan loyalitas yang tinggi kepada pemimpin, dalam hal ini Kartosuwirjo. Pesantren ini juga berfungsi sebagai tempat pelatihan militer dengan memberikan penekanan pada militansi Islam.[91]

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Kartosuwirjo menjadi anggota Partai Masyumi. Bahkan, ia terpilih sebagai Komisaris Masyumi Jawa Barat merangkap Sekretaris I Partai Masyumi. Ia pernah pula dicalonkan sebagai Menteri Muda Pertahanan, akan tetapi, karena sudah mempunyai tujuan sendiri, jabatan itu tidak pernah dipangkunya.[92]

Pada tanggal 14 Agustus 1947, seusai Aksi Militer I Belanda, Kartosuwirjo menyatakan perang suci melawan Belanda. Ia membagi wilayahnya dalam beberapa daerah yang terdiri dari Daerah I (daerah ibu kota negara), Daerah II, dan Daerah III. Daerah II adalah daerah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, sedangkan daerah yang penduduknya tidak beragama Islam dikategorikan sebagai Daerah III. Penolakannya terhadap Persetujuan *Renville* diwujudkan dalam sikap menolak melaksanakan hijrah. Bersama dengan pasukannya yang terdiri dari Hizbullah dan Sabilillah sebanyak 4.000 orang, ia tetap tinggal di Jawa Barat. Dalam Konferensi Cisayong yang diselenggarakan pada bulan Februari 1948 diputuskan untuk mengubah gerakan mereka dari bentuk kepartaian ke bentuk kenegaraan serta membekukan Masyumi Jawa Barat. Melalui Majelis Umat Islam yang kemudian dibentuk, Kartosuwirjo diangkat sebagai imam dari Negara Islam Indonesia (NII). Selanjutnya dibentuk "angkatan perang" yang diberi nama Tentara Islam Indonesia (TII) yang ditempatkan di daerah pegunungan di sekitar Jawa Barat.

---

[91] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*, 1980, hlm. 168

[92] J. Boland, *The Struggle for Islam in Modern Indonesia*, 1975, hlm. 1–87

Jatuhnya ibu kota RI Yogyakarta dan tertawannya pemimpin negara pada hari pertama Belanda melancarkan Agresi Militer II, 19 Desember 1948, dinilai oleh Kartosuwirjo bahwa riwayat RI sudah berakhir. Sehubungan dengan hal itu, ia menganggap daerah Jawa Barat sebagai daerah *de facto* NII. Setiap pasukan yang memasuki Jawa Barat diharuskan mengakui NII atau dihancurkan. Pasukan Siliwangi yang melakukan *long march* ke Jawa Barat dianggap sebagai tentara liar. Kontak senjata pertama dengan TNI terjadi pada tanggal 25 Januari 1949 ketika pasukan Divisi Siliwangi di bawah pimpinan Mayor Utarja memasuki daerah Priangan Timur.[93] Mayor Utarja dibunuh oleh anggota DI. Nasib yang sama dialami pula oleh Mayor Tobing di daerah Singaparna.

Pemerintah RIS berusaha menyelesaikan pemberontakan Kartosuwiryo ini dengan jalan damai. Sebuah panita yang beranggotakan Zainul Arifin (Kementerian Agama), Makmun Sumadipraja (Kementerian Dalam Negeri), dan Kolonel Sadikin (Kementerian Pertahanan) ditugasi mengadakan kontak dengan Kartosuwirjo. Usaha ini gagal. Begitu pula usaha Wali Alfatah pada masa Kabinet Natsir. Kartosuwirjo hanya bersedia berunding apabila pemerintah mengakui eksistensi NII.[94]

Setelah usaha secara damai itu gagal, TNI melancarkan operasi militer, yakni Operasi Merdeka. Operasi ini masih bersifat insidentil, lokal, dan rutin tanpa rencana yang tegas dan sistematis.[95] Serangan-serangan DI/TII yang bersifat gerilya itu belum dihadapi dengan taktik antigerilya. Oleh karena itu, inisiatif lebih banyak dilakukan oleh DI/TII. Di samping itu, kekuatan TNI juga terpecah sebab sebagian pasukan terpaksa dikirim ke luar Jawa untuk menghadapi DI/TII di Sulawesi dan Aceh.

Barulah pada tahun 1957 mulai terjadi titik balik setelah TNI menyusun rencana operasi yang dikenal sebagai "Rencana Pokok 21". Intinya adalah menahan DI/TII di daerah-daerah tertentu untuk selanjutnya dihancurkan.[96] Operasi penghancuran dimulai di daerah Banten dan selanjutnya bergerak ke timur. Dalam melaksanakan operasi ini rakyat diikutsertakan, antara lain untuk mencegah masuknya anggota DI/TII ke desa-desa. Taktik ini kemudian berkembang menjadi Operasi Pagar Betis yang berhasil membatasi kegiatan gerombolan. Penumpasan secara menyeluruh berhasil dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin.

---

93 Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat, *Sejarah TNI AD 1945–1973*, jilid 2, 1979, hlm. 194–195

94 Pusat Sejarah TNI, *Sejarah TNI*, jilid II, 2000, hlm. 82

95 *Ibid.*, hlm. 86

96 Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat, *op. cit.*, 1973, hlm. 218

Tidak sedikit penderitaan yang ditanggung rakyat Jawa Barat karena gerombolan "DI" ini melakukan teror terhadap mereka. Untuk kebutuhan hidup, mereka merampok rakyat terutama rakyat yang tinggal di pelosok-pelosok yang terpencil di lereng-lereng gunung.

b. DI Jawa Tengah

Seperti juga pemberontakan DI di Jawa Barat, pemberontakan DI di Jawa Tengah khususnya di daerah Pekalongan, sudah dimulai pada masa Perang Kemerdekaan. Pemimpinnya ialah Amir Fatah. Pada bulan Agustus 1948 ia membawa tiga kompi pasukan Hizbullah yang tidak mau di-TNI-kan ke daerah Pekalongan yang sudah ditinggalkan oleh TNI akibat Persetujuan *Renville*. Ia berhasil memengaruhi penduduk setempat dengan mengatakan bahwa ia dikirim oleh Panglima Besar Soedirman untuk mencegah Belanda mendirikan negara boneka di daerah Pekalongan. Untuk menghimpun kekuatan, ia mendirikan Majelis Islam dan pasukan bersenjata Mujahidin.[97]

Pada waktu Belanda melancarkan Agresi Militer Kedua, pasukan TNI di bawah pimpinan Mayor Wongsoatmodjo melakukan *wingate* ke daerah Pekalongan. Selain itu, terdapat pula kesatuan Mobiele Brigade (Mobbrig) Polisi di bawah pimpinan Komisaris Bambang Suprapto. Pada mulanya terdapat kerja sama antara TNI/Polri dan Amir Fatah utuk bersama-sama menghadapi Belanda. Kerja sama ini kemudian dilanggar Amir Fatah setelah ia diangkat oleh Kartosuwirjo sebagai pemimpin DI Jawa Tengah. Ia pun memproklamasikan berdirinya Negara Islam Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Islam pimpinan Kartosuwirjo.[98] Bumiayu dijadikan sebagai basis pertahanan pasukannya. Serangan terhadap pos-pos TNI mulai dilancarkannya, termasuk pos-pos TNI di kota Pekalongan. Pasukan Mobbrig yang sedang mengadakan patroli juga mereka serang dan Komisaris Bambang Suprapto mereka bunuh.

Untuk menghadapi pemberontakan ini, TNI melancarkan operasi terhadap konsentrasi pasukan DI di Tembangrejo dan Pengarasan. Akibatnya, kekuatan DI mulai melemah. Operasi dilanjutkan setelah berakhirnya perang kemerdekaan. Pada tahun 1950 TNI membentuk komando tempur yang disebut Gerakan Banteng Negara (GBN) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sarbini (kemudian digantikan oleh Letnan Kolonel Bachrun). Tujuan utamanya ialah memisahkan DI Jawa Tengah dengan DI

---

[97] Yusmar Basri, "Operasi Penumpasan DI/TII di Jawa Tengah" dalam Pusat Sejarah TNI, *Himpunan Bacaan Prajurit*, 2003, hlm. 138

[98] *Ibid.*, hlm. 139–140

Jawa Barat.[99] Dalam operasi-operasi yang dilancarkan GBN, banyak tokoh DI yang terbunuh atau tertangkap. Amir Fatah tertangkap tanggal 22 Desember 1950 dalam perjalanan ke Jawa Barat untuk bergabung dengan Kartosuwirjo.

c. DI/TII Aceh

Pada awal Agustus 1949 bekas Ketua PDRI Sjafruddin Prawinegara diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta II. Ia ditempatkan di Aceh dengan tujuan untuk memimpin perjuangan di Sumatra jika perundingan KMB gagal. Tanpa berkonsultasi dengan kabinet, ia menjadikan daerah Aceh sebagai provinsi, terlepas dari Provinsi Sumatra Utara. Teungku Daud Beureueh yang pada masa Perang Kemerdekaan memegang jabatan sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, diangkat sebagai gubernur.[100]

Pada awal tahun 1951, setelah RIS bubar dan RI kembali ke bentuk Negara Kesatuan, status daerah Aceh dikembalikan menjadi keresidenan dalam lingkungan Provinsi Sumatra Utara. Penurunan status dari provinsi menjadi keresidenan ini, sangat mengecewakan Daud Beureuh dan para pendukungnya, terutama anggota Pusat Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Sejak itu, ia mulai membangun kekuatan untuk menentang pemerintah. Untuk mencari dukungan, ia mengorbarkan sentimen kedaerahan dan sentimen agama (Islam). Kontak dengan Kartosuwirjo pun diadakan dengan saling mengirim utusan.[101]

Setelah merasa persiapannya cukup, pada tanggal 21 September 1953 Daud Beureueh memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosowirjo. Dengan proklamasi itu mulailah pemberontakan DI di Aceh. Proklamasi itu segera disusul dengan usaha menduduki kota-kota penting. Pada mulanya beberapa kota dapat mereka kuasai, akan tetapi mereka gagal menduduki Banda Aceh. Serangan paling hebat dilancarkan terhadap kota Takengon yang dapat mereka kuasai selama hampir tiga bulan.

Untuk menghadapi pemberontakan ini, TNI mendatangkan pasukan dari Sumatra Utara dan Sumatra Tengah. Begitu pula Kepolisian Negara mengerahkan satuan-satuan Brigade Mobil (Brimob). Pada akhir November 1953, kota-kota yang tadinya dikuasai DI direbut kembali oleh pasukan pemerintah. Para pemberontak mengundurkan diri ke hutan-hutan

---

[99] Pusat Sejarah TNI, *op. cit.*, 2000, hlm. 37

[100] Nazaruddin Syamsudin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, 1990, hlm. 35–36

[101] *Ibid.*, hlm. 89–90

Gambar 3.12 Patroli pasukan polisi Brigade Mobil melaksanakan pemulihan keamanan di Aceh TImur, pada tahun 1954 (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

Gambar 3.13 Teungku Daud Beureueh dan pengikut-pengikutnya sewaktu memenuhi panggilan pemerintah dalam rangka penyelesaian pemberontakannya (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

melancarkan perang gerilya, melakukan sabotase terhadap alat-alat perhubungan, dan meneror rakyat. Untuk mengatasi gangguan keamanan ini, Komandan Daerah Militer Aceh (KDMA) Letnan Kolonel Sjamaun Gaharu menerapkan kebijakan yang disebut "Konsepsi Prinsipiil Bijaksana". Intinya adalah menerima dengan tangan terbuka para pemberontak yang ingin menghentikan perlawanan dan menghancurkan mereka yang masih membangkang. Pendekatan persuasif pun dilakukan dengan beberapa tokoh DI. Pada tanggal 5 dan 7 Juli 1957 Sjamaun Gaharu yang didampingi oleh M. Insja (Kepala Kepolisian Aceh) mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh DI, yakni Hasan Saleh, Hasan Ali, Gani Mutiara, Ustad Amin, dan Pawang Leman di Desa Lamteh. Pertemuan ini melahirkan " Ikrar Lamteh". Intinya, kedua pihak sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan mengusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh.[102]

Ikrar Lamteh menimbulkan perpecahan di kalangan DI. Kelompok Hasan Saleh bersedia berunding dengan pemerintah, sedangkan Daud Beureueh menolak. Pada bulan Mei 1959 pemerintah mengirim misi yang dipimpin oleh Mr. Hardi untuk berunding dengan kelompok Hasan Saleh. Hasil penting dalam perundingan itu ialah pemerintah akan memberikan status istimewa untuk daerah Aceh. Akan tetapi, Daud Beureueh menolak hasil perundingan tersebut dan tetap melanjutkan pemberontakannya. Barulah pada masa Demokrasi Terpimpin pemberontakan DI Aceh ini dapat diakhiri.

d. DI Sulawesi Selatan

Pada masa Perang Kemerdekaan, di Sulawesi Selatan lahir berbagai laskar. Mereka berjuang secara gerilya menghadapi Belanda. Sesudah Perang Kemerdekaan berakhir, para gerilyawan ini membentuk Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS).[103] KGSS meminta agar para gerilyawan diterima secara keseluruhan menjadi anggota TNI/APRIS dan dijadikan Divisi (Brigade) Hasanuddin dengan Kahar Muzakar, putra Sulawesi Selatan, sebagai panglimanya. Selama Perang Kemerdekaan, Kahar Muzakar berjuang di Jawa dan berpangkat letnan kolonel.

Pemerintah tidak mengabulkan permintaan KGSS ini. Sesuai dengan kebijakan demobilisasi, hanya anggota gerilyawan yang memenuhi syarat yang dapat diterima menjadi anggota TNI/APRIS. Penolakan itu mengecewakan KGSS. Mereka mengganggap kebijakan yang dijalankan pemerintah tidak adil sebab anggota KNIL yang dahulu menjadi musuh

---

[102] Pusat Sejarah TNI, *op. cit.*, hlm. 96 – 97

[103] Anhar Gonggong, *Abdul Qahher Mudzakar: dari Patriot hingga Pemberonta*k, 1992, hlm. 94

mereka secara otomatis diterima menjadi anggota TNI/APRIS. Para gerilyawan ini menarik diri ke pedalaman dan mulai menentang pemerintah.

Kolonel Bambang Supeno, dengan mengabaikan keberatan KSAD Kolonel Nasution, pada bulan Juni 1950 mengirim Kahar Muzakar dan Letnan Kolonel Mursito ke Sulawesi Selatan dengan tugas membujuk para gerilyawan agar menaati kebijakan pemerintah.[104] Ternyata, Kahar Muzakar membela kepentingan KGSS. Dalam pertemuan dengan Panglima TT VII Kolonel Kawilarang tanggal 1 Juli 1950, ia menyampaikan tuntutan yang sama dengan tuntutan KGSS. Kawilarang menolak dan menyatakan KGSS sebagai organisasi terlarang. Hari itu juga Kahar meninggalkan Makassar dan bergabung dengan para gerilyawan di pedalaman.[105]

Pemerintah berusaha menyelesaikan masalah gerilyawan ini dengan menampung mereka dalam Corps Tjadangan Nasional (CTN). Mereka diterima menjadi anggota CTN dalam kesatuan-kesatuan yang terpisah. Sebagian gerilyawan bersedia menjadi anggota CTN. Mereka ditempatkan dalam beberapa rayon. Anggota yang ingin meneruskan karier di bidang militer, diberi pelatihan militer, sedangkan yang ingin kembali ke masyarakat akan dicarikan pekerjaan atau disekolahkan. Sesudah masa pelatihan, pada tanggal 24 Maret 1951 dilangsungkan pelantikan lima batalion CTN di Makassar dan Kahar Muzakar diangkat sebagi komandannya. Mereka juga dipersenjatai. Sesudah pelantikan, batalion-batalion CTN ini kembali ke rayon masing-masing menunggu proses peresmian menjadi TNI.

Pemerintah merencanakan untuk meresmikan batalion-batalion CTN ini menjadi batalion-batalion TNI pada tanggal 17 Agustus 1951. Kahar menuntut agar batalion-batalion itu diterima sebagai satu kesatuan dan dijadikan Divisi (Brigade) Hasanudin. Karena tuntutannya ditolak, pada tanggal 16 Agustus ia memerintahkan batalion-batalion ini meninggalkan rayon-rayon mereka, masuk ke hutan dan membawa senjata yang sudah mereka terima sebelumnya. Bahkan, truk-truk yang dikirim oleh TT VII untuk mengangkut mereka ke Makassar dalam rangka peresmian sebagai TNI, mereka rampas.[106] Pemerintah, dalam hal ini TNI, terpaksa menghadapi pembangkangan Kahar ini dengan melancarkan operasi miter, yakni Operasi Merdeka. Pemerintah juga memberikan waktu lima hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus kepada anggota CTN agar melaporkan diri.

Di samping melancarkan operasi militer, Kolonel Gatot Subroto yang menggantikan Kolonel Kawilarang sebagai Panglima TT VII, juga

---

[104] Barbara Hillars S. Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakar: dari Tradisi ke DI/TII*, 1989, hlm. 174

[105] *Ibid.*, hlm. 175

[106] *Ibid.*, hlm. 187

menjalankan kebijakan yang bersifat psikologis-politis. Terhadap para pemberontak yang ingin kembali ke masyarakat tidak akan diadakan penahanan dan tuntutan apa pun. Sejalan dengan kebijakan itu, diusahakan pula mengadakan pertemuan dengan Kahar Muzakar. Namun, Kahar menolak. Sementara itu, ia mengadakan hubungan dengan Kartosuwirjo di Jawa Barat. Pada tanggal 7Agustus 1953 ia menyatakan daerah Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Darul Islam pimpinan Kartosuwirjo dan pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia (TII).

Operasi Merdeka kemudian dilanjutkan dengan Operasi *Halilintar.* Namun, operasi ini belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Bahkan, pada tahun 1954 pengaruh DI hampir meliputi seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Kahar memusatkan kekuatannya di daerah Luwu. Untuk menghancurkan pusat kekuatan ini TNI melancarkan Operasi *Wirabuana.* Sebaliknya, Kahar juga meningkatkan kekuatannya dengan membentuk pasukan tempur yang disebut *Moment Mobiele Commando* (*Momoc*).[107]

Operasi Halilintar kemudian dilanjutkan dengan Operasi *Musafir.* Sasarannya utamanya adalah menghancurkan kekuatan Kahar di Awo Kompleks (Palopo Selatan). Dalam operasi ini diikutkan pasukan Usman Balo yang sudah memisahkan diri dari Kahar Muzakar. Kekuatan Kahar mulai berkurang, tetapi belum hancur sama sekali. Untuk mencari dukungan dari penduduk, ia mengembangkan sentimen kedaerahan dengan membentuk pasukan yang disebut Barisan Anti-Jawa Komunis (Bajak). Kekuatannya juga bertambah setelah mengadakan kerja sama dengan pasukan Permesta pimpinan Letnan Kolonel Gerungan. Selain bantuan senjata, Kahar juga menerima bantuan personel sebanyak 200 orang anggota Permesta.

Operasi-operasi militer yang dilancarkan TNI diikuti dengan imbauan agar pemberontak menghentikan perlawanannya. Berkat imbauan itu beberapa tokoh DI menyerahkan diri, antara lain Bahar Mataliu, tokoh kedua DI Sulawesi Selatan, pada tanggal 12 September 1959. Hal itu memperlihatkan bahwa di kalangan pengikut Kahar Muzakar mulai timbul perpecahan.[108]

Seperti juga pemberontakan DI Jawa Barat dan DI Aceh, pemberontakan DI di Sulawesi Selatan ini masih berlangsung ketika Indonesia memasuki periode Demokrasi Terpimpin. Oleh karena itu, TNI tetap melancarkan operasi militer. Barulah pada bulan Februari 1965 operasi dianggap berakhir setelah Kahar Muzakar tewas tertembak.

---

[107] Pusat Sejarah TNI, *op. cit.*, hlm. 101

[108] Anhar Gonggong, *op. cit.*, hlm. 190

G. Krisis Memuncak

1. Pergolakan di Daerah-Daerah

Pada akhir tahun 1956 dan awal 1957 di beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi muncul gerakan-gerakan menentang pemerintah pusat disebabkan oleh kecilnya alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pusat kepada daerah. Minimnya alokasi itu menyebabkan pembangunan di daerah terhambat. Hal yang sama juga dirasakan oleh pejabat-pejabat militer di daerah yang menyebabkan antara lain mereka tidak mampu membangun asrama yang laik bagi pasukannya. Gerakan-gerakan daerah ini mendapat dukungan dari beberapa panglima militer dengan membentuk dewan-dewan daerah. Yang pertama terbentuk ialah Dewan Banteng di Padang, disusul oleh Dewan Garuda di Palembang, Dewan Gajah di Medan, Dewan Manguni di Manado, dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Makassar.

Pembentukan Dewan Banteng dilaksanakan setelah dilangsungkan rapat reuni perwira eks-Divisi Banteng di kota Padang dari tanggal 20 sampai 25 November 1956. Letnan Kolonel Ahmad Husein, Komandan Resimen 4 TT-I/Bukit Barisan, diangkat sebagai Ketua Dewan Banteng. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa usaha pembangunan daerah akan dilakukan dengan potensi ekonomi seluas-luasnya. Masalah-masalah lainnya yang juga telah menjadi keputusan ialah menyusun sejarah perjuangan Sumatra Tengah, pembangunan museum perjuangan, masalah veteran dan invalid, persoalan panji, masalah janda dan yatim piatu, serta persoalan makam pahlawan. Semua masalah itu akan ditangani dan diselesaikan oleh anggota eks-Divisi Banteng yang ada di daerah Sumatra Tengah.

Khusus mengenai masalah yang menyangkut dengan pemerintah pusat akan diperjuangkan secara bertahap dengan berpedoman kepada keputusan rapat reuni. Pada sidang Pemerintah Daerah, Dewan Banteng juga menyarankan agar daerah Sumatra Tengah diberi otonomi seluas-luasnya, khususnya untuk kepentingan pembangunan. Juga diharapkan adanya penelitian mengenai penempatan pejabat-pejabat daerah, sehingga merupakan tenaga produktif bagi daerah. Di bidang pertahanan daerah diusulkan agar dibentuk suatu komando pertahanan daerah yang berfungsi sebagai komando utama, dalam arti teritorial, operatif dan inisiatif sesuai dengan pembagian administratif Negara Republik Indonesia. Selain itu, diusulkan pula agar eks-Divisi Banteng dijadikan suatu korps dalam Angkatan Darat. Di bidang sosial dan ekonomi, daerah menghendaki dihapuskannya sistem sentralisasi yang pada kenyataannya menimbulkan

birokrasi yang kurang sehat. Keadaan demikian itu menghilangkan inisiatif daerah, khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.[109]

Hasil pertemuan reuni kemudian dilaporkan ke Jakarta oleh delegasi yang terdiri dari Kolonel Dahlan Djambek, A. Halim, Dahlan Ibrahim, Sidi Bakaruddin, dan Ali Lubis. Pada tanggal 28 November 1956 delegasi ini berhasil menemui Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Berturut-turut kemudian delegasi juga menemui Drs. Moh. Hatta dan Mr. A.G. Pringgodigdo, tetapi tidak berhasil menemui Presiden Soekarno. Sementara itu, sebagai kelanjutan dari keputusan rapat reuni bekas anggota Divisi Banteng, Letkol Achmad Husein selaku Ketua Dewan Banteng mengambil alih pemerintah daerah Sumatra Tengah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 1956 di Gubernuran Padang. Alasan yang dikemukakan ialah bahwa gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat itu dipandang kurang berhasil dalam membangun daerah Sumatra Tengah.

Hasrat rakyat Sumatra Tengah yang disalurkan lewat Dewan Banteng mengenai masalah otonomi daerah dapat dipahami oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, pemerintah pusat kemudian menjadi heran dengan tindakan Dewan Banteng mengambil alih kekuasaan pemerintah di Sumatra Tengah. Sejak itu timbul ketegangan antara pimpinan Dewan Banteng dan pemerintah pusat. Tindakan Dewan Banteng mengambil alih pemerintahan di Sumatra Tengah oleh pemerintah pusat dipandang sebagai tindakan yang menyalahi hukum.

Dua hari setelah terjadi pengambilalihan pemerintahan di Sumatra Tengah, Panglima TT-I Kolonel Simbolon, di Medan mengumumkan terbentuknya Dewan Gajah yang langsung dipimpinnya. Dalam pidato radio melalui RRI Medan, Simbolon menyatakan bahwa Dewan Gajah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Ia hanya mau berhubungan dengan Presiden Soekarno.[110] Sebagai alasan pembentukan Dewan Gajah dikatakannya bahwa situasi dan kondisi pada waktu itu sangat kritis sebab keadaan bangsa dan negara dalam keadaan kacau. Lebih lanjut dikatakannya, meskipun keadaan kota Medan agak kacau, undang-undang dan hukum yang telah ada masih tetap berlaku. Pernyataan Simbolon ini ternyata menimbulkan kebingungan masyarakat. Di satu pihak ia tetap taat kepada Kepala Negara, tetapi di pihak lain ia menguasai beberapa instansi pemerintah yang vital di kota Medan.

---

[109] Makmun Salim, *Sedjarah Operasi-operasi Gabungan terhadap PRRI-Permesta*, 1971, hlm. 3 – 4

[110] R.Z. Leirissa, *PRRI Permesta, Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, 1991, hlm. 68

Menanggapi peristiwa tersebut, Presiden Soekarno menyerukan kepada Simbolon agar segera kembali ke jalan yang seharusnya ditempuh oleh anggota tentara. Seruan Presiden Soekarno tersebut ternyata tidak dihiraukan oleh Simbolon. Ia kemudian menuntut agar kerukunan Dwitunggal Soekarno-Hatta dipulihkan kembali serta menuntut agar Presiden RI langsung berada di bawah pengendalian Dwitunggal. Tindakan Kolonel Maludin Simbolon dengan membentuk Dewan Gajah dan memisahkan diri dari pemerintah pusat ternyata mendapat tantangan dari beberapa perwira serta pejabat di Sumatra Utara. Kepala Staf TT I Letkol Djamin Gintings bersama Letkol Wahab Makmur menentang tindakan Simbolon sebab melanggar hukum.

Kabinet Ali Sastroamidjojo kemudian memecat Kolonel Maludin Simbolon dari jabatannya sebagai Panglima TT-I. Dengan berpedoman pada keputusan pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah Sumatra Utara, Letkol Djamin Gintings mengambil alih kekuasaan di TT-I yang berlaku sejak tanggal 27 Desember 1956. Bersama dengan kekuatan pasukan yang masih taat kepada pemerintah, Letkol Djamin Gintings dan Letkol Wahab Makmur berhasil mendesak pasukan-pasukan Simbolon dari kota Medan. Simbolon mengundurkan diri ke Tanjung Morawa membawa sisa pasukannya lebih kurang 300 orang. Di daerah tersebut anak buah Simbolon mendapat perlindungan dari pasukan yang berada di bawah pengaruh Dewan Banteng. Dengan mundurnya Simbolon beserta anak buahnya ke luar kota Medan, praktis aktivitas Dewan Gajah telah dapat dilumpuhkan.

Untuk mengatasi masalah Dewan Banteng, pemerintah mengirimkan misi ke Sumatra Tengah yang disebut Komisi Penyelidik Keadaan (*Fact-Finding Commission*) yang terdiri dari Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Abdul Latief, dan Soelaeman Effendi dari Kepolisian Negara. Tugas utama misi ini ialah mengadakan penjajakan dan penyelidikan tentang dasar-dasar tuntutan daerah yang disalurkan melalui Dewan Banteng. Tugas tim menghadapi hambatan karena Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Banteng dan pimpinan daerah Sumatra Tengah tidak bersedia mengadakan pembicaraan dengan para anggota misi tersebut. Ahmad Husein hanya mau berbicara dengan delegasi yang resmi dari Kepala Negara.[111]

Selain di Sumatra Tengah dan Sumatra Utara, pergolakan juga terjadi di Sumatra Selatan. Sekelompok politikus yang telah berhasil memengaruhi pimpinan militer setempat mencetuskan Piagam Pembangunan sebagai wadah untuk menampung segala aspirasi daerah, kemudian mereka membentuk suatu dewan dengan nama Dewan Garuda. Sebagai tindak lanjut kegiatannya, dewan tersebut mencetuskan tuntutan kepada

[111] Soeripto Putra Djaja, *Kegagalan Pemberontakan Husein Cs.*, 1958, hlm. 13

pemerintah pusat agar daerah Sumatra Selatan diberi otonomi seluas-luasnya. Mereka juga menuntut adanya kerukunan kembali Dwitunggal Soekarno-Hatta dalam mengendalikan pemerintahan Republik Indonesia. Kongres adat yang pernah diselenggarakan di Palembang pada asasnya merupakan sumber lahirnya Dewan Garuda yang dikendalikan oleh beberapa tokoh politik di daerah tersebut. Dengan dalih untuk kepentingan keamanan dan ketenteraman, Letkol Barlian selaku pejabat Panglima TT II mengeluarkan keputusan bahwa daerah Sumatra Selatan dinyatakan dalam keadaan bahaya. Gubernur Sumatra Selatan Winarno Danuatmodjo diminta untuk menyerahkan kekuasaannya dalam rangka memperlancar usaha pembangunan di daerah Sumatra Selatan.[112]

Rentetan tindakan yang telah diambil oleh Dewan Garuda serupa dengan yang dilakukan oleh Dewan Banteng. Aktivitas Dewan Garuda di Sumatra Selatan dipimpin oleh Wakil Kepala Staf TT II Mayor Nawawi yang mendapat perlindungan dari panglimanya sendiri. Hubungan antara pimpinan Dewan Banteng di Sumatra Tengah dan Dewan Garuda di Sumatra Selatan dilakukan melalui seorang kurir, yaitu Sidi Bakaruddin, Kepala Eksploitasi Djawatan Kereta Api (DKA) daerah Sumatra Selatan. Sidi Bakaruddin adalah tokoh Dewan Banteng yang aktif di Sumatra Selatan, khususnya di kalangan kaum adat.[113]

Parlemen ternyata kemudian memberikan perhatian pada kejadian di Sumatra. Guna menjajaki keinginan rakyat setempat, pada tanggal 4 Januari 1957 Parlemen mengirimkan wakil-wakilnya ke Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Sebenarnya tugas yang dibebankan kepada para utusan dari Parlemen tersebut sama dengan tugas yang sebelumnya pernah diberikan kepada perutusan kabinet.

Utusan ke Sumatra Tengah dipimpin oleh Zainal Abidin Ahmad. Mereka berhasil mengadakan pembicaraan dengan pimpinan Dewan Banteng. Zainal Abidin sekembalinya di Jakarta menyatakan telah didapat titik temu pandangan antara tokoh-tokoh masyarakat, Dewan Banteng, dan pemerintah pusat. Ia juga mengatakan bahwa posisi Dewan Banteng tidak membahayakan pemerintah. Komisi Parlemen ke Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Sumarman, S.H. berhasil pula mengadakan pembicaraan dengan para tokoh militer maupun sipil setempat.

Untuk memecahkan masalah Sumatra Tengah pemerintah masih juga berusaha menempuh jalan berunding, yaitu dengan mengirimkan suatu delegasi di bawah pimpinan Menteri Pertanian Eny Karim. Delegasi tersebut

---

[112] Makmum Salim, *op. cit.*, 1971, hlm. 6 – 7

[113] *Indonesia Raja*, 2 Februari 1957

mengalami kegagalan karena tidak berhasil mengadakan pendekatan dengan pimpinan Dewan Banteng. Dalam perkembangan selanjutnya, atas prakarsa pimpinan Dewan Banteng dan Dewan Gajah, diselenggarakan Kongres Rakyat Jambi. Dari pertemuan tersebut diambil keputusan bahwa daerah Jambi dinyatakan sebagai daerah otonom setingkat dengan provinsi, meskipun administrasinya masih berada di bawah kekuasaan Provinsi Sumatra Tengah.

Selain di Sumatra, di Indonesia bagian timur terjadi pula pergolakan. Pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar Panglima TT VII Letkol Ventje Sumual memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Wilayahnya meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku. Piagam tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia bagian timur. Guna memperlancar pelaksanaan programnya, Letkol Sumual menyatakan daerah Indonesia bagian timur dalam keadaan bahaya. Seluruh pemerintahan daerah diambil alih oleh kaum militer.[114] Sebelum Permesta terbentuk, pada akhir tahun 1956 di Manado sudah terbentuk Dewan Manguni atas inisiatif Kapten G.K. Montolalu dan kawan-kawannya. Dewan ini kemudian bergabung dengan Permesta. Di Sulawesi Selatan, Mayor M. Jusuf berinisiatif pula untuk membentuk Dewan Hasanuddin, tetapi batal direalisasikan karena Permesta sudah terbentuk lebih dahulu.[115]

Peristiwa-peristiwa itu sangat melemahkan kedudukan Kabinet Ali II. Pada tanggal 14 Maret 1957 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Dalam keadaan yang gawat dengan munculnya gerakan-gerakan separatis di daerah-daerah, Presiden mengumumkan berlakunya SOB (negara dalam keadaan bahaya) dan dengan demikian Angkatan Perang mendapat wewenang khusus untuk mengamankan negara. Untuk membentuk kabinet baru, Presiden menghubungi tokoh-tokoh partai. Akan tetapi, kaum politisi dan partai-partai tetap mau melakukan "dagang sapi", yaitu tawar-menawar kedudukan untuk membentuk kabinet koalisi. Akhirnya, Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri sebagai warga negara sebagai formatur. Formatur Soekarno kemudian membentuk Kabinet Karya dengan Ir. Djuanda, seorang tokoh nonpartai, sebagai Perdana Menteri.

Kabinet Djuanda resmi terbentuk pada tanggal 9 April 1957 dalam keadaan yang tidak menggembirakan. Kabinet ini adalah *zaken kabinet*. Selain harus menghadapi pergolakan di daerah, kabinet bertugas melanjutkan perjuangan untuk membebaskan Irian Barat, dan menghadapi keadaan

---

[114] *Kedaulatan Rakjat*, 4 Maret 1957

[115] R.Z. Leirissa, *op. cit.*, 1991, hlm. 89

ekonomi dan keuangan yang buruk dengan kemerosotan jumlah devisa dan rendahnya angka-angka ekspor. Program Kabinet Djuanda terdiri dari lima pasal atau Panca Karya (sehingga dinamakan Kabinet Karya), yakni:

1. membentuk Dewan Nasional;
2. normalisasi keadaan Republik;
3. melancarkan pelaksanaan pembantalan KMB;
4. perjuangan Irian;
5. mempergiat pembangunan.[116]

Dewan Nasional mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan keinginan kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Selain itu, juga mempunyai tugas sebagai penasihat pemerintah guna melancarkan jalannya roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik untuk mendukung pembangunan negara. Dewan Nasional beranggota 45 orang, terdiri dari golongan fungsional dan diketuai oleh Presiden sendiri. Walaupun Dewan Nasional sebagai dewan penasihat sudah terbentuk, kesukaran-kesukaran yang dihadapi pemerintah tetap meningkat. Dari hari ke hari keadaan negara semakin buruk. Masalah daerah-daerah yang timbul di Sumatra dan Sulawesi menyebabkan hubungan pusat dan daerah terganggu. Masalah daerah juga membawa pengaruh di bidang ekonomi dan pembangunan. Pemerintah sulit untuk melaksanakan program-programnya.

Untuk meredakan pergolakan daerah, dari tanggal 10 sampai 14 September 1957 dilangsungkan Musyawarah Nasional (Munas) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional baik di pusat maupun di daerah. Hadir pula bekas Wakil Presiden Moh. Hatta. Musyawarah diadakan di Gedung Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Di dalam musyawarah itu antara lain dibicarakan masalah-masalah pemerintahan, soal-soal daerah, ekonomi, keuangan, Angkatan Perang, kepartaian, serta masalah yang menyangkut Dwitunggal Soekarno-Hatta.

Musyawarah Nasional ini berhasil mengambil beberapa keputusan yang mencerminkan suasana saling pengertian. Pada upacara penutupannya, 14 September 1957, dibacakan pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan bekas Wakil Presiden Moh. Hatta.[117] Bunyi pernyataan itu antara lain, "... adalah kewajiban mutlak kami untuk turut serta dengan seluruh rakyat Indonesia, pemerintah RI serta segenap alat-alat kekuasaan negara, membina dan membela dasar-dasar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam kedudukan apa pun juga adanya."

---

[116] Naskah Riwayat Hidup Ir. H. Djuanda Kartawidjaja (Arsip Kabinet Perdana Menteri)

[117] Sekretariat Negara RI, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, 1978, hlm. 349

Sebagai kelanjutan dan untuk melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional dalam bidang ekonomi dan pembangunan, dari tanggal 25 November sampai dengan 4 Desember 1957 dilangsungkan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) bertempat di Gedung Olahraga, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Tujuan utamanya adalah untuk membahas dan merumuskan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan keinginan daerah. Musyawarah diikuti oleh para ahli ekonomi, wakil-wakil partai dan organisasi, tokoh-tokoh pusat dan daerah serta para pejabat militer. Para pemimpin militer dari segenap teritorium hadir dalam musyawarah ini, kecuali Letkol Achmad Husein dari Komando Daerah Militer Sumatra Tengah.[118]

Untuk membantu mengatasi persoalan Angkatan Darat dibentuk Panitia Tujuh. Panitia ini terdiri dari Panglima Tertinggi Presiden Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Perdana Menteri Djuanda, Wakil Perdana Menteri dr. Leimena, Menteri Kesehatan Kolonel dr. Azis Saleh, Sultan Hamengku Buwono IX, dan KSAD Jenderal Mayor A.H. Nasution.[119] Tugas panitia ini ialah merumuskan putusan-putusan untuk menyelesaikan masalah Angkatan Darat. Setelah menyelenggarakan sidang yang pertama, panitia mengambil beberapa keputusan:

1. menetapkan pedoman kerja;
2. membentuk suatu panitia pengumpul bahan-bahan (*Fact Finding Committee*), yang terdiri dari Kolonel A.J. Mokoginta, Kolonel Sudirman;
3. menginstruksikan kepada semua anggota Angkatan Darat untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat menyulitkan penyelesaian peristiwa-peristiwa Angkatan Darat;
4. menginstruksikan kepada seluruh anggota Angkatan Darat untuk mengusahakan terpeliharanya pekerjaan rutin;
5. menyerukan kepada semua anggota Angkatan Darat dan masyarakat supaya berikhtiar ke arah kelancaran pekerjaan Panitia Tujuh.[120]

Akan tetapi, belum sempat Panitia Tujuh ini mengumumkan hasil pekerjaannya, telah terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1957 yang dikenal sebagai Peristiwa Cikini, ketika Presiden Soekarno menghadiri pesta ulang tahun ke-15 Perguruan Cikini, tempat putra-putri beliau bersekolah. Percobaan pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan granat tangan sehingga menimbulkan banyak korban terutama anak-anak sekolah yang berada di

[118] *Antara*, no. 328/A, 25 November 1957, hlm. 2

[119] *Pedoman*, 19 September 1957, hlm. 1

[120] *Ibid.*

halaman sekolah. Korban lain ialah Inspektur Polisi I Oding Suhendar, anggota pasukan pengawal presiden. Ia tewas akibat terkena pecahan granat.[121] Presiden sendiri selamat berkat kesigapan dan kecepatan bertindak Mayor Sudarto (ajudan presiden). Setelah terjadi ledakan pertama, Sudarto cepat membawa Presiden ke tempat yang aman.[122]

2. Pemberontakan PRRI dan Permesta

Akibat peristiwa Cikini, keadaan Indonesia semakin memburuk. Daerah-daerah yang bergolak tidak menjadi tenang, tetapi semakin berusaha untuk melepaskan diri dari pusat. Pada tanggal 10 Februari 1958 Ketua Dewan Banteng, Achmad Husein mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat, berisi tuntutan agar dalam waktu 5 × 24 jam Kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dan Presiden/Pejabat Presiden menunjuk Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX membentuk Kabinet Nasional. Pada waktu ultimatum disampaikan, Presiden Soekarno sedang berada di luar negeri. Ketua Parlemen Mr. Sartono bertindak sebagai pejabat Presiden. Menerima ultimatum ini pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Achmad Husein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dahlan Djambek.[123] Kemudian KSAD A.H. Nasution pada tanggal 12 Februari 1958 mengeluarkan perintah untuk membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah dan selanjutnya menempatkannya langsung di bawah KSAD. Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Husein memproklamasikan "Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" (PRRI) dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri.

Karena usaha melalui musyawarah tidak berhasil, untuk memulihkan keamanan negara, pemerintah dan KSAD memutuskan untuk melancarkan operasi militer. Di daerah Sumatra Barat, yang merupakan pusat kedudukan PRRI, dilancarkan Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Operasi ini merupakan operasi gabungan AD, AL, dan AU. Pada tanggal 17 April 1958 kota Padang dapat dikuasai. Operasi dilanjutkan ke Bukittinggi, dan pada tanggal 4 Mei kota ini pun diduduki. Kota-kota lain pun dapat dikuasai dalam waktu singkat.

Sebelum Operasi 17 Agustus dilancarkan, terlebih dahulu dilakukan usaha untuk menguasai daerah Riau yang merupakan pusat instalasi-instalasi minyak asing sehingga pihak asing (Amerika Serikat) tidak mempunyai alasan untuk turut campur. Untuk itu, dilancarkan Operasi Tegas di bawah

---

[121] Awaloedin Djamin, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, 2007, hlm. 259

[122] *Antara*, no. 334/A–B, 30 November 1957, hlm. 20–21

[123] Ong Hok Ham, *Sapta Marga Berkumandang di Sumatra: Operasi-operasi Menumpas Pemberonlakan "PRRI"*, 1965, hlm. 5

pimpinan Letkol Kaharudin Nasution. Pada tanggal 12 Maret Pekanbaru dapat dikuasai.

Operasi lain yang dilancarkan ke Sumatra ialah Operasi Saptamarga di Sumatra Utara dan Operasi Sadar di Sumatra Selatan. Operasi Saptamarga ditujukan untuk menghadapi pasukan Boyke Nainggolan di Sumatra Timur dan Tapanuli, sedangkan Operasi Sadar untuk menghadapi pasukan Mayor Nawawi. Berbeda dengan operasi-operasi yang lain itu, Operasi Sadar lebih merupakan operasi intelijen. Masalah yang dihadapi pemerintah ialah ketidaktegasan sikap Letnan Kolonel Barlian. Kemudian ia dinonaktifkan dan sebagai penggantinya pemerintah mengangkat Letnan Kolonel Harun Sohar.[124]

Proklamasi PRRI yang diumumkan pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang rupanya mendapat sambutan dari Indonesia bagian timur. Dalam rapat-rapat raksasa yang diselenggarakan di beberapa tempat di daerah tersebut, Komandan Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah (KDMSUT) Letnan Kolonel D.J. Somba mengeluarkan pernyataan bahwa sejak tanggal 17 Februari 1958 wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat serta mendukung Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).[125]

Terhadap Permesta pun pemerintah tidak ragu-ragu untuk bertindak. KSAD sebagai Penguasa Perang Pusat sehubungan dengan pernyataan Somba yang sifatnya menentang pemerintah pusat itu kemudian memecat Somba dan Mayor Runturambi. Batalion yang berada di bawah KDMSUT termasuk dinas dan jawatan, wewenang komandonya diserahkan kepada Komando Antar Daerah Indonesia Timur (Koandait).Untuk menumpas pemberontakan Permesta ini, Angkatan Perang melancarkan operasi militer, yakni Operasi Merdeka yang merupakan gabungan ketiga angkatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rukmito. Operasi ini terdiri atas Operasi Saptamarga I, II, III, IV, dan Operasi Mena I dan II.[126]

Sebelum operasi pokok dilancarkan, terlebih dahulu digerakkan Operasi Insyaf di daerah Sulawesi Tengah dipimpin oleh Letnan Kolonel Jonosewojo. Operasi ini berhasil menguasai kota Palu pada tanggal 18 April 1958. Untuk mengamankan seluruh wilayah Sulawesi Tengah, dilancarkan Operasi Saptamarga I. Operasi ini merupakan lanjutan dari Operasi Insyaf dan juga dipimpin oleh Letnan Kolonel Jonosewojo. Pada awal bulan Juni seluruh daerah Sulawesi Tengah sudah dapat dikuasai.

---

[124] Pusat Sejarah TNI, *op. cit.*, jilid II, 2000, hlm. 117

[125] Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat, *Mengungkap Saptamarga*, 1967, hlm. 37–38

[126] *Ibid.*, hlm. 110, 128

Operasi Saptamarga II di bawah pimpinan Mayor Agus Prasmono ditujukan untuk menguasai daerah Gorontalo. Kota Gorontalo dapat dikuasai pada tanggal 18 Mei 1958. Dalam serangan ke Gorontalo ini pasukan APRI mendapat bantuan dari pemuda-pemuda setempat di bawah pimpinan Nani Wartabone, seorang tokoh nasionalis yang anti-Permesta. Sementara itu, Operasi Saptamarga III di bawah Letnan Kolonel Magenda berhasil pula menguasai Kepulauan Sangir Talaud. Pasukan ini kemudian bergabung dengan pasukan Operasi Saptamarga IV yang langsung dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukmito. Sasaran utamanya ialah merebut Manado, yang merupakan basis Permesta. Operasi terhadap Manado merupakan operasi berat. Namun, pada tanggal 26 Juni 1958 kota itu pun dapat dikuasai oleh APRI.

Operasi Mena I di bawah pimpinan Letnan Kolonel H. Pieters ditujukan untuk menguasai Jailolo, sedangkan Operasi Mena II di bawah pimpinan Letnan Kolonel (KKO) Hunholz untuk merebut lapangan udara Morotai. Morotai dikuasai pada tanggal 20 Mei 1958. Jailolo direbut tanggal 3 Juni 1958.

Dibandingkan dengan PRRI di Sumatra, Permesta di Sulawesi mempunyai kelebihan, yakni memiliki pesawat terbang. Pada waktu APRI memusatkan kekuatan di Sumatra, Angkatan Udara Permesta yang disebut Angkatan Udara Revolusioner (Aurev) melakukan pengeboman terhadap beberapa kota di Indonesia bagian timur, antara lain Ambon. Permesta juga menyewa seorang penerbang asing (Amerika), yakni Allan Pope. Namun, setelah lapangan udara di Manado, Gorontalo, Tondano, Jailolo, dan Morotai dikuasai APRI, praktis kegiatan udara Aurev terhenti. Pesawat pengebom B-25 yang dipiloti Allan Poppe dapat ditembak pada tanggal 18 Mei 1958 di atas Ambon.[127] Ia dan operator Harry Rantung menyelamatkan diri dengan parasut, kemudian ditangkap oleh APRI.

Dengan dikuasainya kota-kota yang disebut di atas, baik di Sumatra maupun di Sulawesi, secara praktis kekuatan PRRI/Permesta sudah lumpuh. Namun, untuk beberapa waktu lamanya mereka masih mengadakan perlawanan secara gerilya. Secara keseluruhan, perlawanan ini berakhir pada tahun 1961 dengan menyerahnya para pemimpin PRRI/Permesta.

Dalam melaksanakan operasi militer ini APRI mendapat bantuan dari kekuatan anti-PRRI/Permesta yang terdapat di daerah. Di Sumatra Barat terdapat satuan polisi di bawah pimpinan Komisaris Besar Polisi Kaharudin Datuk Rangkayo Basa (Kepala Kepolisian Sumatra Tengah) dan Batalion

---

[127] R.Z. Leirissa, *Bukan Disiplin Kadaver Melainkan Disiplin Berdjiwa: Operasi-operasi Militer terhadap Permesta 1958*, 1965, hlm. 7

140 Resimen 4 TT-I di bawah pimpinan Mayor Nurmatias. Di Sulawesi Tengah terdapat pasukan Brimob di bawah pimpinan Inspektur Polisi Suaeb.

3. Menuju Demokrasi Terpimpin

Dalam pidato memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1956 Presiden Soekarno menyerukan agar partai-partai dibubarkan. Seruan itu diulanginya dua hari kemudian, 30 Oktober, dalam pidato di depan Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Presiden mengecam demokrasi liberal yang dianggapnya tidak cocok untuk masyarakat Indonesia. Paham yang dijiplak dari alam pikiran Barat itu telah melahirkan banyak partai yang dalam kenyataannya lebih banyak memperjuangkan kepentingan masing-masing daripada memperjuangkan kepentingan rakyat.

Anjuran untuk "menguburkan partai-partai" ditentang oleh berbagai pihak. Tokoh NU, Kiai Dahlan, mengatakan bahwa mengubur partai bertentangan dengan ajaran Islam dan akan menimbulkan diktator. Pendapat yang sama dilontarkan pula oleh tokoh Masyumi, Moh. Natsir. Ia mengakui bahwa keadaan di tanah air jauh dari memuaskan. Akan tetapi, cara untuk mengatasinya bukanlah dengan menguburkan partai-partai.[128]

Oleh karena oposisi terlalu kuat, Presiden meralat ucapannya. Kepada Ali Sastroamidjojo, tokoh PNI, dikatakannya bahwa yang dimaksudkannya ialah mengurangi jumlah partai yang terlalu banyak (pada waktu itu terdapat empat puluh partai). Istilah "menguburkan partai" sengaja digunakannya hanya sebagai *shock treatment* supaya masyarakat sadar tentang banyaknya partai.[129] Akan tetapi, ia tetap menolak demokrasi liberal. Dalam pidato pada sidang pembukaan Konstituante tanggal 20 November 1956, ia menyatakan:

> "Masalah kita bangsa Indonesia hanya bisa dipecahkan dengan perumusan nilai-nilai murni bangsa sendiri ....
>
> Saya mohon dengan sangat supaya konstitusi yang saudara-saudara akan susun itu bukan berupa suatu kopi atau jiplakan konstitusi yang ada di negara-negara lain. Ingatlah, konstitusi yang akan disusun itu dimaksudkan untuk rakyat Indonesia, dan oleh karena itu jiwa, sifat, dan kepribadian bangsa Indonesia harus tercermin dalam konstitusi itu."[130]

Dalam pidato di depan rapat umum "Merah Putih" di Bandung tanggal 7 Januari 1957 Presiden Soekarno mengemukakan konsepsi yang kemudian

---

[128] Deliar Noer, *Partai-Partai Islam dan Partai Nasional*, 1987, hlm. 354

[129] Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, 1974, hlm. 371 – 372

[130] Soekarno, *Susunlah Konstituante yang Benar-Benar Konstituante, Res Publika*, 1956

dikenal sebagai "Konsepsi Presiden". Konsepsi itu diuraikan secara lebih rinci dalam pertemuan dengan para pemimpin partai di Istana Bogor (16 Februari 1957) dan dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat di Istana Negara (21 Februari 1957). Dikatakannya bahwa ia ingin mencampuri urusan pemerintahan sebelum Konstituante menyelesaikan pekerjaannya sampai hasil kerja itu dapat direalisasikan. Ia juga berbicara tentang perlunya dibentuk Dewan Nasional yang bertugas memberi nasihat kepada kabinet, sedangkan kabinet harus terdiri atas wakil-wakil semua golongan masyarakat. Kabinet yang akan dibentuk itu disebutnya "kabinet kaki empat" yang terdiri atas wakil-wakil PNI, NU, Masyumi, dan PKI, dibantu oleh wakil-wakil partai kecil lainnya.

Tentang Dewan Nasional dikatakannya bahwa dewan itu akan terdiri dari wakil-wakil buruh, petani, intelektual, pengusaha nasional, pemuka agama (Islam, Katolik, dan Protestan), perempuan dan Angkatan 45 serta Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Kepolisian Negara, Jaksa Agung, beberapa menteri, dan wakil-wakil pemuda. Oleh karena itu, Dewan Nasional merupakan cermin masyarakat, sedangkan kabinet merupakan cermin parlemen, dan keduanya akan menjadi jembatan yang hebat menuju penyelesaian kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi bangsa.

Untuk mengetahui apakah konsepsinya diterima atau ditolak, pada tanggal 29 Februari 1957 Presiden Soekarno mengundang wakil-wakil partai ke Istana dan ditanyai secara bergiliran. Wakil-wakil Masyumi dan NU menolak secara tegas, sedangkan wakil-wakil Parkindo, IP-KI, dan PSI menolak dengan kata-kata yang halus dan diplomatis. Adapun yang mendukung ialah PNI, PKI, PRN, Baperki, dan Persatuan Pegawai Kepolisian Negara. Pada tanggal 2 Maret 1957 Masyumi, NU, PSII, Partai Katholik, dan PRI mengeluarkan pernyataan bersama bahwa perubahan mendasar dari sistem pemerintah harus dilakukan melalui Konstituante.

Reaksi datang juga dari bekas Wakil Presiden Hatta. Ia mengakui bahwa konsepsi itu baik dan ideal, tetapi sulit dilaksanakan. Dikatakannya bahwa dalam "kabinet kaki empat" yang direncanakan Soekarno tidak akan terdapat kerja sama antara partai-partai agama dan PKI. Pembentukan Dewan Nasional dianggap Hatta menyalahi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Dewan itu hanya dapat dibentuk dengan terlebih dahulu mengubah UUDS dan perubahan itu harus dilakukan oleh Konstituante. Daripada membentuk kabinet gotong royong, Hatta menyarankan agar dibentuk kabinet presidensial di bawah pimpinan Soekarno.[131]

---

[131] Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, 1990, hlm. 497

Sementara itu, Kabinet Ali Sastroamidjojo II menghadapi krisis. Pada tanggal 9 Januari 1957 Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet sebab tidak menyetujui cara yang diambil kabinet dalam menyelesaikan pergolakan daerah. Langkah Masyumi ini diikuti oleh Perti. Pada tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat kepada Presiden. Pada hari itu juga Presiden mengumumkan negara dalam keadaan bahaya (SOB). Suwirjo ditunjuk sebagai formatur untuk membentuk kabinet baru, tetapi gagal, dan pada tanggal 2 April ia mengembalikan mandat kepada Presiden. Berdasarkan SOB dan dalam kedudukan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang, pada tanggal 4 April 1957, Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri, sebagai warga negara, untuk membentuk *zaken kabinet ekstraparlemen* yang akan bertindak tegas dan tepat dan akan membantu Dewan Nasional sesuai dengan Konsepsi Presiden. Pada tanggal 9 April 1957 terbentuk Kabinet Karya. Ir. Djuanda, seorang tokoh nonpartai, diangkat sebagai Perdana Menteri.

Langkah Presiden Soekarno selanjutnya ialah membentuk Dewan Nasional, 6 Mei 1957, yang langsung dipimpinnya. Berbagai golongan mengecam pembentukan dewan ini sebab dalam UUDS tidak ada pasal yang dapat dijadikan dasar hukum untuk pembentukannya.

Sementara itu, dalam sidang Konstituante timbul perbedaan mengenai dasar negara yang akan dituangkan dalam undang-undang dasar pengganti UUDS. Pada mulanya terdapat tiga golongan yang menghendaki dasar negara menurut versi mereka masing-masing, yakni Pancasila, Islam, dan sosial-ekonomi. Kemudian, terjadi dua penggolongan besar, yakni Pancasila dan Islam. Akibatnya, sidang Kontituante macet. Lembaga yang sudah bekerja sejak November 1956 itu, sampai April 1959 belum berhasil menyusun undang-undang dasar yang baru. Oleh karena itulah, dalam pidato di depan sidang Konstituante tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno menganjurkan agar dalam rangka melaksanakan Demokrasi Terpimpin, Konstituante memberlakukan kembali UUD 45 secara tetap. Ia juga mengulang penjelasannya bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dan bukan oleh perdebatan dan perhitungan pro dan kontra. Hal-hal konkret yang akan dilaksanakan dalam rangka Demokrasi Terpimpin adalah:

1. mengadakan penertiban dan pengaturan menurut wajarnya kehidupan kepartaian;
2. menyatukan golongan-golongan fungsional dalam perwakilan guna kelancaran roda pemerintahan dan stabilitas politik;
3. mengadakan sistem yang lebih menjamin kontinuitas pemerintah yang sanggup melaksanakan program.

Sebelum Konstituante menerima atau menolak usul pemerintah untuk memberlakukan kembali UUD 45, dari blok Islam datang usul amandemen untuk mengembalikan kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" ke dalam Pembukaan UUD 1945. Usul amandemen tersebut ditolak oleh Konstituante dalam sidangnya tanggal 29 Mei 1959 dengan perbandingan suara 201 (setuju) lawan 265 (menolak). Barulah pada tanggal 30 Mei 1959 dilakukan pemungutan suara terhadap usul pemerintah: kembali kepada UUD 1945 (tanpa perubahan). Hasilnya ialah 269 lawan 199, sedangkan yang hadir pada waktu itu 474 orang anggota. Dengan demikian, tidak tercapai kuorum 2/3 seperti disyaratkan oleh UUDS 1950, Pasal 37.

Sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib Konstituante, diadakan pemungutan suara dua kali lagi. Pemungutan suara terakhir dilakukan pada tanggal 2 Juni 1959, akan tetapi juga tidak tercapai kuorum seperti tersebut di atas. Mulai keesokan harinya, tanggal 3 Juni 1959, Konstituante mengadakan reses yang kemudian ternyata untuk selama-lamanya.

Untuk mencegah ekses-ekses politik akibat ditolaknya usul pemerintah oleh Konstituante, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal A.H. Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), mengeluarkan Peraturan No. Prt/Perpepu/040/1959 tentang Larangan Mengadakan Kegiatan-kegiatan Politik, yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 1959, pukul 06.00.[132] Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum Partai Nasional Indonesia (PNI) Suwirjo, mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno (yang ketika itu sedang berada di Jepang dalam rangka perjalanan keliling dunia), agar Presiden Soekarno mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.[133] Sekretaris Jenderal Central Comite Partai Komunis Indonesia (CC-PKI) D.N. Aidit mengirim surat kepada fraksi PKI di Konstituante yang berbunyi: "Harap diketahui bahwa Politbiro CC-PKI hanya membenarkan anggota-anggota fraksi menghadiri sidang pleno Konstituante jika hal itu terpaksa diadakan dan dengan cara untuk membubarkan diri.[134]

Pada saat krisis Konstituante itu terjadi, Presiden Soekarno sedang berada di Tokyo, Jepang, dalam rangka kunjungan ke beberapa negara. Ia kembali ke tanah air pada tanggal 29 Juni 1959. Setelah mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh politik, beberapa menteri, dan pimpinan Angkatan Perang, pada tanggal 5 Juli 1959 disusun rumusan yang kemudian dikenal sebagai "Dekrit 5 Juli 1959". Dekrit itu dibacakan Presiden Soekarno sore tanggal

---

[132] *Antara*, 3 Juni 1959

[133] *Suluh Indonesia*, 18 Juni 1959

[134] *Harian Rakjat*, 27 Juni 1959

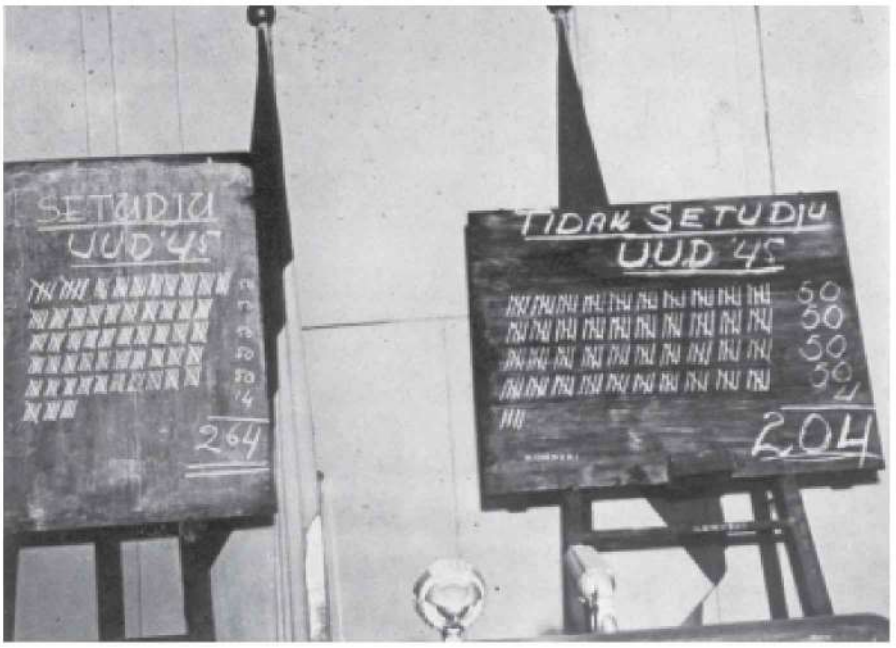

Gambar 3.14 Pemungutan suara ketiga dan terakhir, 2 Juni 1959 (Foto: *Ipphos*)

Gambar 3.15 Suasana setelah pemungutan suara terakhir pada tanggal 2 Juni 1959. Keesokan hari Konstituante mengadakan reses yang ternyata untuk selamanya. (Foto: *Ipphos*)

Gambar 3.16 Presiden Soekarno sedang membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di Istana Merdeka (atas). Dalam kesempatan tersebut hadir pejabat-pejabat sipil dan militer serta tokoh-tokoh masyarakat (bawah) (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

Gambar 3.17 Suasana di muka Istana Merdeka pada tanggal 5 Juli 1959. Masyarakat mendengarkan Dekrit Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*)

5 Juli dalam acara yang berlangsung lima belas menit di halaman Istana Merdeka di Jakarta yang dihadiri oleh ribuan orang. Inti Dekrit itu adalah:

1. pembubaranan Konstituante,
2. berlakunya kembali UUD 1945, dan
3. pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung.

Dalam waktu-waktu yang kritis itulah, ketika keadaan ketatanegaraan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, adanya pemberontakan yang ditumpangi intervensi tertutup kekuatan besar asing, dan partai-partai politik sebagai keseluruhan memperlihatkan impotensinya, Presiden Soekarno dan TNI muncul sebagai kekuatan politik yang diharapkan dapat mengatasi kemacetan nasional.

Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui Konstituante dan rentetan peristiwa politik yang mencapai klimaksnya dalam bulan Juni 1959, akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk sampai kepada kesimpulan bahwa telah timbul: "keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan negara, nusa, dan bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur". Demikianlah, demi keselamatan negara dan berdasarkan *staatsnoodrecht* (hukum keadaan bahaya bagi negara), pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, diumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin.

H. Pendidikan, Budaya, Komunikasi Sosial, dan Olahraga

1. Pendidikan

Setelah diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS pada tahun 1950, oleh Menteri Pendidikan, dr. Abu Hanifah, disusun suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan pada spesialisasi. Menurut Menteri Abu Hanifah, bangsa Indonesia amat terbelakang dalam pengetahuan teknik, yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Pengetahuan umum memang penting, tetapi pengetahuan teknik mendapat prioritas utama karena dianggap dapat membawa kunci kemajuan. Dalam garis besarnya konsepsi itu mencakup hal-hal sebagai berikut: Pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 : 1. Bagi tiap-tiap 3 sekolah umum mulai dari bawah ke

atas diadakan 1 sekolah teknik. Yang diterima di sekolah teknik ialah anak-anak tamatan sekolah dasar. Sebagai lanjutannya ialah sekolah teknik menengah (tiga tahun) dan sekolah teknik atas, juga tiga tahun. Sekolah teknik harus mempunyai rencana pelajaran yang lengkap sehingga tamatan sekolah teknik menengah atau sekolah teknik atas sanggup mengerjakan suatu pekerjaan, misalnya *opzichter* seperti pada masa penjajahan Belanda.[135]

Di samping itu, karena Indonesia berupa negara kepulauan, di beberapa kota diadakan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi, dan Akademi Research Laut. Kota-kota yang dimaksudkan itu adalah Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang. Tenaga-tenaga pengajarnya diminta dari luar negeri. Yang bersedia mengirim adalah Inggris, Amerika, dan Prancis. Di samping itu, mahasiswa-mahasiswa yang IQ-nya tinggi dikirimkan ke luar negeri. Mereka termasuk mahasiswa teladan tahun-tahun pertama di Indonesia.

Selain itu, Sekolah Tinggi Pertanian mendapat tempat yang pantas karena sifat masyarakat yang agraris. Direncanakan di Sumatra Barat dekat Payakumbuh diadakan filial dari Sekolah Tinggi Pertanian Bogor yang sama derajatnya. Hanya kemudian rencana serta konsepsi tersebut hilang sama sekali setelah Kabinet Hatta berhenti.

Oleh Menteri Abu Hanifah juga direncanakan "kota universiter" seperti *Cite Universitarie* di Paris untuk kota-kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bukittinggi. Pembiayaan akan diambilkan dari anggaran belanja negara, yang dalam hal ini pendidikan mendapat bagian 15%. Di samping itu, juga diusulkan kepada pemerintah tambahan 1% pajak pada pembayar pajak di seluruh Indonesia, yang akan digunakan untuk perbaikan kesejahteraan guru. Fakultas kedokteran dan fakultas eksakta lainnya juga mendapat perhatian. Direncanakan pula untuk mendirikan semacam *akademie voor wetenschappen*.[136]

Sistem pendidikan diadakan dengan titik berat desentralisasi. Berarti dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama menjadi urusan daerah (provinsi) dengan supervisi pusat, terutama dalam perencanaan pelajaran. Sekolah menengah atas menjadi tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai masalah keuangan maupun mengenai mata pelajaran. Untuk sekolah-sekolah di bawah tanggung jawab provinsi atau daerah dapat dimintakan subsidi sebesar 40% dari anggaran belanja. Selebihnya menjadi tanggungan daerah. Guru-guru harus mempunyai diploma yang diakui oleh pusat. Tiap-tiap provinsi atau daerah harus mempunyai satu universitas

[135] Abu Hanifah, "Pembangunan Negara dan Pendidikan Bangsa", *Kompas*, 21 November 1970, hlm. IV, IX

[136] Abu Hanifah, *ibid.*

negeri. Para lektor dan guru besarnya harus mempunyai kualifikasi negara. Selanjutnya juga dihidupkan kompetisi sehat untuk memiliki perguruan-perguruan yang tinggi nilainya. Sebagai konsekuensi tentunya daerah-daerah diberi bagian banyak dari jumlah penghasilannya setahun, termasuk devisa. Daerah-daerah yang miskin dapat dipertimbangkan untuk mendapat lebih banyak bantuan dibandingkan dengan daerah-daerah yang kaya.[137]

Dalam rangka konsolidasi universitas-universitas negara, dikeluarkan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950 yang mewajibkan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat, jika perlu, mengambil tindakan dari peraturan yang berlaku (dari "Hoger Onderwijs Ordonnantie 1946" Stbl. 1947 No. 47 dan "Universiteitsreglement 1946" Stbl. 1947 No. 170), dan lain-lain.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1950 tersebut, pada tanggal 2 Februari 1950 Ir. Surachman diangkat menjadi Presiden (Rektor) Universitas Indonesia, yaitu gabungan dari Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta dengan Universiteit van Indonesia termasuk semua cabangnya, seperti fakultas-fakultas yang ada di Bogor, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Selanjutnya, selama periode Demokrasi Liberal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954 yang mulai berlaku tanggal 10 November 1954, didirikan sebuah universitas negara lain di Jawa, yaitu Universitas Airlangga di Surabaya, yang terdiri dari fakultas-fakultas: (1) Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya (berasal dari Fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi Universitas Indonesia di Surabaya), (2) Hukum, Sosial, dan Politik di Surabaya (berasal dari Cabang Bagian Hukum, Fakultas Hukum, Sosial, dan Politik Universitas Gajah Mada), (3) Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang, dan (4) Fakultas Ekonomi di Surabaya.

Perluasan universitas-universitas di luar Jawa direalisasikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 23, 1 September 1956 yang menetapkan berdirinya Universitas Hasanuddin di Makassar, serta Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1956 yang menetapkan berdirinya Universitas Andalas di Bukittinggi. Kemudian, berturut-turut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1957 terhitung mulai tanggal 1 September 1957 di Bandung didirikan Universitas Pajajaran, serta dengan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1957 tanggal 1 September 1957 didirikan Universitas Sumatra Utara di Medan.[138]

---

[137] Abu Hanifah, *ibid.*

[138] Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, *Perguruan Tinggi di Indonesia*, 1963, hlm. 15–16

Dalam perkembangan selanjutnya, sejak tahun 1959 di bawah Menteri PP dan K Prof. Prijono disusun suatu rencana konsepsi pengajaran yang disebut Sapta Usaha Tama. Konsepsi yang terdiri atas tujuh ketentuan itu menurut Menteri dalam rangka usaha membuktikan kepada masyarakat bahwa lapangan pendidikan dapat membawa jiwa baru, serta dapat pula menyelaraskan diri dengan program Kabinet Kerja. Adapun yang dimaksudkan dengan konsepsi Sapta Usaha Tama itu meliputi usaha-usaha: (1) penertiban aparatur dan usaha-usaha Departemen PP dan K, (2) meningkatkan seni dan olahraga, (3) mengharuskan "usaha halaman", (4) mengharuskan penabungan, (5) mewajibkan usaha-usaha koperasi, (6) mengadakan kelas masyarakat, serta (7) membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas.[139]

Mengenai masalah penyelenggaraan sekolah-sekolah asing, pada tahun 1957 pemerintah mengambil tindakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Departemen Pengajaran dan pihak Penguasa Perang Pusat. Yang dimaksud dengan *sekolah asing* ialah sekolah partikelir yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan/atau menggunakan pelajaran-pelajaran asing. Sejak Indonesia merdeka, jumlah *sekolah asing* bukan makin berkurang, melainkan makin bertambah. Pada masa perjuangan ada gejala-gejala bahwa sekolah-sekolah tersebut tidak saja berusaha menahan anak-anak Indonesia yang terdapat di dalamnya, bahkan menjalankan usaha untuk menarik lebih banyak anak-anak ke dalam lingkungannya. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Departemen PP dan K, dapatlah dikumpulkan angka-angka statistik mengenai sekolah-sekolah asing tersebut, sebagai berikut:

Tahun	Jumlah sekolah asing	Jumlah guru sekolah asing	Jumlah murid sekolah asing
1939/1940	26	73	3.062
1952/1953	1.271	8.349	254.730
1954/1956	1.861	13.441	415.565

Berdasarkan angka-angka yang tercantum di atas sebagai pegangan, dapat dikatakan bahwa pada pertengahan tahun 1957 di Indonesia terdapat lebih kurang 2.000 sekolah asing dengan lebih kurang 14.000 guru dan lebih kurang 425.000 murid. Sekitar 60%–70% dari jumlah lebih kurang 425.000 murid sekolah-sekolah asing itu adalah anak-anak Indonesia yang dengan sendirinya menerima pendidikan asing. Dengan demikian, mereka disiapkan untuk menjadi orang-orang Indonesia yang bersikap asing.

[139] Instruksi Menteri Muda Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan No. 1, 17 Agustus 1959

Pada pertengahan tahun 1957 sekolah asing antara lain terdiri atas lebih kurang 1.800 sekolah Cina dan 125 sekolah Belanda yang dilihat dari sudut kewaspadaan nasional, dinilai mempunyai aspek khusus. *Pertama,* karena bangsa Belanda belum bersikap bersahabat terhadap bangsa Indonesia. *Kedua,* karena timbulnya sengketa politik antara Kuo Min Tang dan Kung Cang Tang di negeri Cina yang telah meluas pula ke masyarakat Cina penduduk Indonesia. Berdasarkan pertimbangan bahwa ketegangan-ketegangan itu dapat merugikan kepentingan nasional, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mencegah merembetnya persoalan Cina itu ke Indonesia. Tentang pengawasan terhadap pengajaran asing tersebut, dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer tanggal *6* November 1957 No. 989/PMT tahun 1957. Pengawasan itu berlangsung sampai dengan tanggal 17 April 1958.[140]

Di bidang pendidikan jasmani, pada masa RIS pada tanggal 2 Januari 1950, oleh pemerintah RI, dikeluarkan Undang-Undang No. 4/1950 tentang Pengajaran. Pada Bab IV Pasal 9 tentang pendidikan jasmani tercantum demikian: "Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air".

Dengan adanya Undang-Undang No. 4 tahun 1950, jumlah kantor-kantor Inspeksi Pendidikan Jasmani dan sekolah-sekolah Guru Pendidikan Djasmani (SGPD), juga kursus-kursus instruktur. Aplikasi pendidikan jasmani dibentuk. Perlombaan pancalomba untuk bertambah SLP dan SLA diadakan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri P.P.K tanggal 24-8-1952 No. 7388/B, diadakan ujian ketangkasan atletik dan renang.

Sejak tahun 1950 Komite Olympiade Indonesia (KOI) telah berupaya agar Indonesia dapat diterima menjadi anggota negara dalam Komite Olympiade Internasional/KOI (*International Olympic Committee/IOC*) yang berpusat di Laussane, Swiss. Pada tahun 1952 KOI diterima menjadi anggota *Internasional Olympic Committee* (*IOC*). Bahkan, Sri Sultan Hameng-Kubuwono IX disahkan menjadi Ketua IOC yang pertama di Indonesia.

Pada tanggal 16–20 Desember tahun 1951, Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) pertama diselenggarakan di Yogya sebagai kota kelahiran Universitas Gadjah Mada. Salah seorang pendiri POM adalah Ir. Soewarno. POM bertujuan meletakkan dasar persatuan mahasiswa Indonesia. Pada saat pertandingan sepak bola Presiden Soekarno datang dan memberi petuah kepada pada mahasiswa:

---

[140] Departemen Pengadjaran dan Kebudajaan, Penguasa Perang Pusat, *Pengawasan Pengadjaran Asing*, hlm. 15, 28–29

"Kepada semua mahasiswa dalam Republik Indonesia, saya sambut lahirnya POM dengan kegembiraan, dan keaktifannya dalam usianya yang masih muda itu memberi harapan yang baik buat masa datang. Saya selalu setuju benar kepada keolahragaan. Keolahragaan berarti suatu sumbangan penting kepada pembangunan jasmani bangsa dan pula kepada pembangunan mental dan moril. Mahasiswa bagi saya berarti: tiang hari kemudian, penjamin hari-hari kemudian. Mahasiswa yang jasmaninya kuat, yang mental dan moril sehat membuatlah hari kemudian bangsa menjadi satu kepastian yang telah dapat diraba sekarang."

Pada tanggal 4–11 Maret 1951 tatkala ASIAN Games I diselenggarakan di New Delhi yang mempertandingkan sebanyak tujuh cabang olahraga (atletik, renang, loncat indah, polo air, sepak bola, angkat besi, bola basket, dan balap sepeda, Indonesia mengikuti dua cabang olahraga, yaitu atletik dan sepak bola.

Pada tanggal 21–28 Oktober 1951 diselenggaralcan PON II di Jakarta. Dalam PON II hal yang menarik yaitu pembangunan Stadion Ikada, Jakarta. Pada PON II, kontingen bukan lagi dari keresidenan tetapi dari provinsi.

Indonesia mengikuti Olimpiade XV di Helsinki. Pengiriman rombongan yang pertama kali ke olimpiade ternyata mendapat perhatian yang sangat besar di Indonesia dan luar negeri. Meskipun Indonesia baru pertama kali mengikuti olimpiade, partisipasi ini sangat berharga bagi para atlet dan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

2. Bahasa dan Sastra

Gagasan untuk menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia timbul lagi pada waktu diadakan Kongres Bahasa Indonesia di Medan antara tanggal 28 Oktober s.d. 2 November 1954. Kongres itu antara lain mengambil keputusan supaya penyelidikan dan penetapan dasar-dasar ejaan diserahkan kepada suatu badan yang diatur oleh pemerintah, yang bertugas untuk menyusun suatu ejaan praktis bagi bahasa Indonesia.[141] Sebagai realisasi Keputusan Kongres Bahasa Indonesia tersebut, pemerintah membentuk Panitia Pembahasan Ejaan Bahasa Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri PP dan K No. 448/S, tanggal 19 Juli 1956. Panitia tersebut mula-mula dipimpin oleh Prof. Dr. Prijono, kemudian oleh E. Katoppo. Panitia pembahasan menghasilkan Konsep Pembaruan. Hal ini merupakan satu langkah maju dalam aturan bahasa nasional kita.

Dalam pada itu, dalam bulan September 1956 diadakan Kongres Bahasa dan Perpustakaan Melayu yang ketiga di Johor. Dalam Kongres

[141] Departemen Pengadjaran dan Kebudajaan, Penguasa Perang Pusat, *Pengawasan Pengadjaran Asing*, hlm. 15, 28–29

tersebut timbul hasrat untuk menyatukan ejaan bahasa Melayu dengan ejaan bahasa Indonesia. Hasil-hasil Kongres itu dipergunakan juga oleh Panitia Pembahasan Ejaan Bahasa Indonesia sebagai bahan pertimbangan.

Pada tanggal 17 April 1957 diadakan perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, RI diwakili oleh Perdana Menteri Ir. Djuanda dan Persekutuan Tanah Melayu oleh Perdana Menteri Dato Abdul Razak bin Dato Husein.

Sebagai tindakan selanjutnya, pada tanggal 4 sampai 7 Desember 1959 di Jakarta diadakan sidang bersama antara Panitia Pelaksana Kerja sama Bahasa Melayu-Bahasa Indonesia, yang diketuai oleh Prof. Dr. Slametmuljana dengan Jawatan Kuasa Ejaan Resmi Baharu Persekutuan Tanah Melayu, yang dipimpin oleh Syeh Nasir bin Ismail. Sidang bersama itu menghasilkan Pengumuman Bersama Ejaan Bahasa Melayu-Indonesia (Melindo), yang pada tahun 1961 diterbitkan oleh Departemen PP dan K Republik Indonesia. Dalam Pengumuman Bersama tersebut dinyatakan bahwa kedua pemerintah akan meresmikan Ejaan Melindo itu selambat-lambatnya pada bulan Januari 1962. Akan tetapi, keputusan tersebut belum dapat dilaksanakan karena perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya. Konsep isinya pernah diajukan oleh Samsuri dalam majalah *Medan Ilmu Pengetahuan,* no. 4, th. I, 1950, yang selanjutnya disebut Konsep Samsuri. Konsep lainnya yaitu yang dihasilkan oleh Panitia Ejaan, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada bulan Agustus 1966, yang selanjutnya disebut Konsep Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (LBK). Keempat konsep itu mencoba mengadakan inventarisasi fonem.

Kesamaan fonem ditemukan dari keempat konsepsi tersebut, yaitu: p, b, t, d, c, j, k, g, m ,n, s, h, w, y, r, 1, i, e, a, dan u. Konsep pembaruan memasukkan f sebagai fonem tambahan, berarti membuat ketentuan lain. Konsep Melindo menyebut f dalam rangka wujud tanda fonem konsonan, sedangkan konsep Samsuri dalam denah konsensusnya menyebutkan f, yang kemudian disusul oleh beberapa contoh pemikirannya, dan diperjelas dalam hubungannya dengan v. Akan tetapi, kadang-kadang tanda fonem tersebut diapit oleh tanda kurung, yang menandakan bahwa pengarangnya berpendirian bahwa f tidak termasuk dalam sistem fonem Indonesia. Konsep LBK menempatkan fonem f ke dalam tata konsonan Indonesia.

Mengenai v dari keempat konsep hanya konsep pembaruan yang menyebut v sebagai fonem tambahan media v pada abjad Indonesia. Khusus mengenai z, konsep Pembaharuan dan Melindo memasukkan z sebagai fonem tambahan. Konsep Samsuri tidak memasukkan z ke dalam tata fonemnya, sedangkan konsep LBK jelas memasukkan.

Tentang tata fonem s, dalam konsep Samsuri tidak terdapat fonem tersebut, sedang konsep pembaruan dan Melindo menyetujui penggunaan s ini sebagai fonem tambahan. LBK memasukkan s ke dalam tata fonem Indonesia, disertai alasan secara deskriptif bunyi yang mewakili (s) itu banyak kedapatan. Demikian antara lain mengenai masalah fonem-fonem dari keempat konsepsi yang disebutkan di sini.[142]

Perkembangan sastra Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan dapat dikemukakan bahwa dengan terpecahnya Republik menjadi daerah kekuasaan RI yang biasa disebut daerah pedalaman di satu pihak dan daerah pendudukan di lain pihak, timbullah perbedaan perkembangan para sastrawan di daerah masing-masing. Di pedalaman nada patriotisme lebih tegas terdengar. Bahkan, sebagai sastrawan untuk sementara mengganti penanya dengan senapan. Di kota pendudukan lebih terdengar semboyan "universalisme" atau "humanisme universal".[143] Suatu hal yang bukannya tidak dipergunakan oleh pihak Belanda untuk memperlemah semangat perlawanan orang Indonesia terhadap mereka.

Mengenai istilah Angkatan '45, sejak semula orang Indonesia sendiri sesungguhnya telah membahasnya, tetapi tidak pernah mencapai suatu penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak. Sebenarnya istilah Angkatan '45 pertama kali merupakan nama retrospektif sifatnya, yaitu nama yang hanya digunakan setelah Chairil Anwar menghasilkan sebagian karya-karyanya.

Menurut H.B. Jassin,[144] istilah Angkatan '45 pertama kali digunakan oleh Rosihan Anwar dalam majalah *Siasat*, tanggal 9 Januari 1949. Istilah itu telah digunakan pula oleh Hazil Tanzil dalam *Pujangga Baru*, keluaran bulan November 1948, akan tetapi karena terlambat terbitnya, dahulu diduga artikel Rosihan Anwar yang terbit lebih dahulu. H.B. Jassin mengatakan bahwa para penulis yang mulai memperkenalkan dirinya sepanjang tahun-tahun itu telah dikenal lebih dahulu dengan pelbagai nama lain, sebelum istilah Angkatan '45 terkenal. Dalam artikelnya tentang angkatan ini yang diberi judul "Rasa Hidup Baru", dikemukakan sejumlah ciri-ciri yang dapat digunakan untuk membedakan angkatan revolusi tahun 1945 dari Pujangga Baru.[145] Dalam menilai sastrawan Indonesia Angkatan '45 dan Angkatan Pujangga Baru, dinyatakan bahwa keduanya merupakan hasil pendidikan dan pengajaran kolonial Belanda. Mereka menentang Belanda sebagai penjajah, tetapi zat-zat yang mengalir dalam alam pikiran

[142] Djoko Kentjono, "Penjempurnaan Edjaan Bahasa Indonesia", dalam *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia Sebagai Tjermin Manusia Indonesia Baru*, Djakarta, 1967, hlm. 69–81
[143] *Siasat*, 22 September 1950
[144] H.B. Jassin, *Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai*, Djakarta, 1955, hlm. 189
[145] *Ibid.*

dan pendidikan mereka adalah hasil tanaman Belanda juga. Demikianlah dalam melihat sastrawan dari kedua angkatan tersebut, orang mau tidak mau senantiasa melihat bayangan Angkatan '80 di negeri Belanda pada Angkatan Pujangga Baru. Demikian juga dalam membicarakan Angkatan '45, orang selalu tidak lupa menyangkutkan ingatannya kepada Angkatan Perang Dunia Pertama di negeri Belanda. Menurut Ajip Rosidi, bukanlah hal yang kebetulan bahwa Chairil Anwar terpengaruh oleh Marsman, Slauerhoff, dan Du Perron.[146]

Istilah "Angkatan Terbaru" sebenarnya muncul pertama kali pada Simposium Sastra dan Kesenian Mahasiswa di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960. Sebelum Ajip Rosidi mempergunakan istilah tersebut, Nugroho Notosusanto sebagai Ketua Simposium terlebih dahulu memperkenalkannya. Beberapa tahun sebelumnya Nugroho Notosusanto sudah melihat adanya perbedaan pada karya pengarang sebayanya dengan para pengarang yang oleh para penelaah sastra dinamakan Angkatan '45. Dalam masalah periodisasi, Nugroho Notosusanto dalam ceramahnya dalam seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tanggal 26 Januari 1963 membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa masa sesudah atau sejak 1950 merupakan periode baru dalam sejarah sastra Indonesia. Antara lain ia mengkatakan sebagai berikut: "Sastrawan-sastrawan yang tampil ke muka dalam periode 1950 tidak lagi berat sebelah pada Belanda atau Eropa Barat, jangkauan orientasinya benar-benar meliputi seluruh dunia." Dikonstatasinya bahwa sebagian besar dari mereka tidak lagi menguasai bahasa Belanda. Medium mereka untuk mengenali karya-karya luar negeri adalah bahasa Inggris. Mereka mulai berkembang tatkala negeri kita mulai dibanjiri buku-buku *paperbacks* yang relatif murah dari Amerika serta buku-buku lebih murah lagi terbitan Pustaka Bahasa Asing dari Moskwa dan Peking.

Gairah belajar dari sastrawan terkemuka di luar lingkungannya diimbangi dengan penghargaan mereka yang wajar kepada sastrawan-sastrawan Indonesia sendiri, yang mereka jadikan guru-guru mereka yang pertama. Demikianlah penyair-penyair periode 1950 belajar asas-asas persajakan dari Chairil Anwar atau Sitor Situmorang, dan tidak lagi dari Marsman atau Slauerhoff.[147] Bagi pengarang-pengarang cerita pendek,

---

[146] Ajip Rosidi, "Sumbangan Angkatan Terbaru Sastrawan Indonesia kepada perkembangan Kesusastraan Indonesia", (Prasaran Simposium Sastra, Pekan Kesenian Mahasiswa Kedua di Djakarta pada tanggal l4 Agustus 1960); dalam kumpulan tulisan Ajip Rosidi, *Kapankah Kesusastraan Lahir?*, 1964, hlm. 29–39

[147] Ajip Rosidi, *Masalah Angkatan dan Periodisasi Sedjarah Bahasa Indonesia,* Bandung, 1969, hlm. 67, dsb. Lihat juga tentang Angkatan Terbaru, A. Teeuw, *Modern Indonesian Literature*, 1967, hlm. 227–231

yang menjadi guru mereka yang pertama adalah Pramoedya Ananta Toer atau Idrus, dan bukan Ilya Ehrenburg atau Hemingway. Unsur persajakan mereka gali dari bahasa-bahasa daerah sehingga bahasa Indonesia menjadi semakin kaya.[148]

Sementara itu, H.B. Jassin dalam esainya tahun 1951 yang merupakan pembelaan terhadap adanya kelahiran dan kehidupan Angkatan '45, sampai pada pendapat bahwa pengarang Angkatan '45 tidak mengabdi kepada sesuatu isme, tetapi mengabdi kepada kemanusiaan, yaitu segala yang baik dari semua isme. Mereka tidak berpikir dalam istilah-istilah, tetapi hidup dari pusat pribadi manusia dengan tidak menyebut dirinya nasionalis. Atas dasar perasaan kemanusiaan mereka berdiri di pihak bangsanya, dengan tidak menyebut diri sosialis mereka menghendaki keadilan serta kesejahteraan sosial serta gaya ekspresi yang mendarah daging, universal-nasionalis, revolusioner dalam sikap hidup dan visi.[149]

Khusus masalah periodisasi, Nugroho Notosusanto mengemukakan Periodisasi Sejarah Sastra Indonesia sebagai berikut:

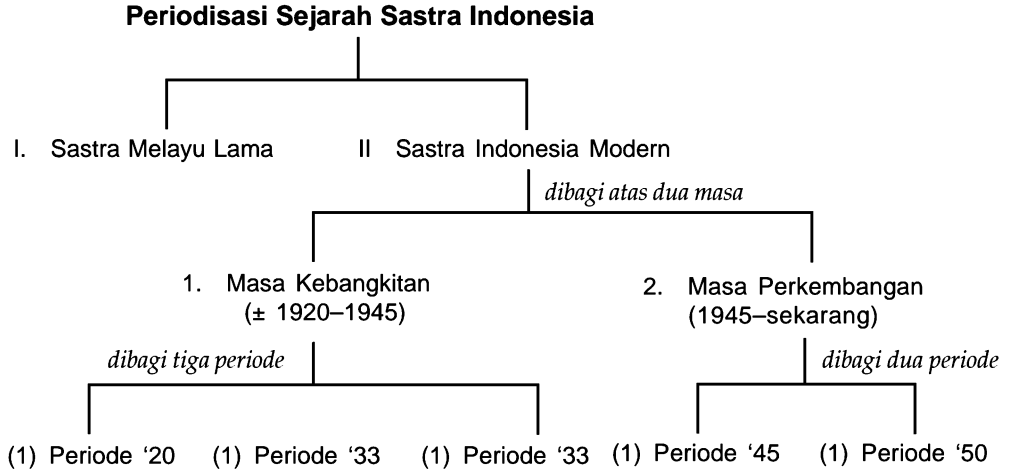

Menurut Ajip Rosidi, periodisasi itu lebih dapat diterima daripada semua periodisasi lain yang pernah dicoba orang tentang Sejarah Sastra Indonesia. Hanya saja ia menganggap pembagian seluruh Sastra Indonesia menjadi dua bagian, yaitu "Sastra Melayu Lama" dan "Sastra Indonesia Modern" tidaklah tepat. Nugroho Notosusanto dalam ceramahnya mengemukakan asas nasionalisme sebagai dasar seluruh periodisasi dalam

[148] *Basis* (Majalah Kebudayaan), no. 7, tahun XII, April 1963, hlm. 199–210

[149] Brosur *Angkatan 45*, 1951; H.B. Jassin, *Kesusastraan Indonesia Modern Dalam Kritik dan Esai*, 1957, hlm. 7–23

Sejarah Sastra Indonesia. Oleh karena itu, dikemukakannya bahwa untuk bagian pertama sebaiknya jangan disebut Sastra Melayu Lama, melainkan Sastra Indonesia Klasik yang tidak hanya meliputi karya-karya sastra yang ditulis dalam bahasa (daerah) Melayu saja, tetapi dalam semua bahasa daerah yang terdapat di seluruh kepulauan Nusantara, sehingga namanya pun lebih tepat disebut sebagai Sastra Nusantara Klasik. Dengan ini termasuk di dalamnya Sastra Jawa, Sunda, Bali, Aceh, Makassar, Bugis, dan lain-lain.

Periodisasi sastra setelah tahun 1945 bukanlah 1950, melainkan tahun 1953. Tahun 1950 para pengarang yang kemudian menjadi tokoh-tokoh periode berikutnya kebanyakan belum muncul. Meskipun ada, baru satu atau dua saja. Pada tahun 1950 gelanggang sastra Indonesia masih mendapat ciri yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengarangnya pun kebanyakan berasal dari tokoh-tokoh sastra periode sebelumnya. Tahun 1953 terbit majalah *Kisah* yang mendapat perhatian serta memberi kesempatan yang besar kepada para pengarang yang muda-muda. Setelah itu, terbit majalah *Prosa, Seni, Tjerita,* ruang kebudayaan "Genta" dalam majalah *Merdeka,* dan lain-lain. Sementara itu, dalam redaksi majalah-majalah kebudayaan *Indonesia, Budaja, Kompas,* lampiran kebudayaan "Gelanggang", dalam Warta Sepekan *Siasat,* mingguan *Mimbar Indonesia,* dan lain-lain terjadi perubahan redaksi atau kebijakan redaksional. Para pengarang muda pada tahun 1950 belum berarti. Karya-karya sastra baru muncul dan mendapat tempat yang menonjol justru setelah terbitnya media berupa majalah-majalah dan ruangan-ruangan budaya yang telah disebutkan di atas. Dalam jangka waktu tahun 1953 hingga sekarang, Ajip Rosidi mendapatkan pula satu periode lagi, karena ada perbedaan-perbedaan yang khas, meskipun secara garis besar barangkali tidak berkelebihan. Sejak tahun 1961, ketika sistem Demokrasi Terpimpin sudah mulai menanamkan kekuasaannya, timbullah suasana baru dalam sastra kita, yaitu semacam semangat perlawanan.[150]

Yang tampak jelas perbedaannya dengan yang lain adalah pengarang-pengarang komunis. Mereka mempergunakan sastra sebagai alat untuk memperjuangkan komunisme. Di antara para tokohnya terdapat Njoto, Bakri Siregar, H.R. Bandaharo, Bachtiar Siagian, A.S. Dharta (dengan nama-nama lain Yogaswara, Klara Akustia, Kelana Asmara, Rodji), M.S. Ashar, Buyung Saleh Puradisastra, dan kemudian juga Rivai Apin dan Pramoedya

---

[150] A. Teeuw, *Sastra Baru Indonesia,* hlm. 138; Bujung Saleh, "Latar Belakang Kemasjarakatan Kesusastraan Indonesia", *Bahasa dan Budaja, 2* Mei 1954, hlm. 9; Prof. Dr. A. Teeuw, *Pokok dan Tokoh,* jilid II, 1958, hlm. 22–23 dsb

Ananta Toer. Mereka tergabung dalam organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang dibina oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Mengenai masalah daerah dalam sastra Indonesia dapat dikemukakan bahwa karena sifatnya, bahasa Indonesia mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas daripada bahasa daerah, termasuk bahasa Melayu. Dengan bebas bahasa Indonesia mengambil serta memasukkan unsur-unsur yang dapat digunakannya dari segala bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Bahasa daerah tidak mempunyai kemungkinan seluas itu serta tidak mempunyai kebebasan seleluasa itu, karena sudah memiliki suatu tradisi dalam pemakaiannya; sebaliknya sifat-sifat bahasa daerah mempunyai suatu hal yang lebih menguntungkan daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai lingkungan masyarakat tertentu yang penggunaanya terbatas pada lingkungan-lingkungan resmi dalam pertemuan-pertemuan resmi. Penggunaan bahasa daerah dilakukan dalam lingkungan terbatas, misalnya dalam keluarga-keluarga yang hidup dalam kota besar yang bersifat nasional. Selain itu, karena bahasanya, sastra daerah pun lebih mempunyai akar serta lingkungan apresiasi yang lebih konkret daripada sastra Indonesia yang terbatas pada lingkungan tertentu.

Pada umumnya sastra daerah mempunyai sastra klasik. Dari sastra klasik tersebut, dapat digali kekayaan-kekayaan kejiwaan, filsafat, watak, serta lingkungan peradaban yang sudah terbentuk dalam tradisi. Beberapa sastrawan yang menulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan tulisan-tulisannya menunjukkan gejala bahwa yang menjadi tempat mereka berpijak adalah sastra daerahnya masing-masing.

Sastra Melayu bukanlah menjadi milik seluruh sastrawan Indonesia, melainkan hanya terbatas pada para sastrawan yang berasal dari lingkungan daerah Melayu. Bukti nyata tampak, misalnya pada Amir Hamzah yang memang berasal dari lingkungan masyarakat yang memiliki Sastra Melayu Klasik. Para sastrawan yang berakar pada sastra daerahnya masing-masing, seperti Ajip Rosidi, Rusman Sutiasumarga, Ramadhan K.H. berakar pada sastra Sunda, W.S. Rendra, Kirdjomuljo, serta Soeripman berakar pada sastra Jawa. Selain itu, ada juga sastrawan yang mencari akarnya pada tradisi Eropa yang diakuinya sebagai sastra dunia.

Kesusastraan Indonesia tahun 1950-an ditandai dengan munculnya tema-tema sekitar kegetiran yang terjadi pada zaman revolusi dan Perang Kemerdekaan. Pramoedya Ananta Toer dalam *Keluarga Gerilja* (Pembangunan, 1950), misalnya, menggambarkan sebuah keluarga yang berantakan akibat perang. Ibu melacurkan diri agar tetap bisa bertahan hidup, ayah menjadi pengkhianat, anak gadisnya diperkosa, dan dua

anaknya yang lain yang menjadi pejuang terpaksa harus membunuh ayahnya sendiri. Novel-novel Pram lainnya yag masih menggambarkan sisi gelap akibat perang, antara lain *Perburuan* (Balai Rakjat, 1950). *Dia jang Menjerah* (Balai Pustaka, 1950). *Mereka Jang Dilumpuhkan* (Balai Pustaka 1951), dan *Di Tepi Kali Bekasi* (Gapura,1951).[151] Bagi Pramoedya Ananta Toer, peristiwa perang atau pengalaman pahit kehidupan di dalam penjara, rupanya telah memperkaya pemikiran dan mata batinnya yang kemudian dijadikannya sebagai latar cerita bagi hampir semua novelnya yang terbit pada dasawarsa itu.

Mochtar Lubis juga mengangkat tema peperangan dalam novelnya, *Tak Ada Esok* (Gapura, 1950) menampilkan berbagai sisi kehidupan dan perjuangan – fisik dan psikis – yang dihadapi seorang pejuang (Kapten Johan) dalam berhadapan dengan pasukan Belanda. Dalam hal ini peristiwa perang gerilya dan penderitaan semasa perang tidak hanya melahirkan semangat kebangsaan, tetapi juga kadang kala memaksa seseorang melakukan tindakan pengkhianatan. Dalam novel Mochtar Lubis yang berjudul *Djalan Tak Ada Udjung* (Balai Pustaka, 1952), masalah nasionalisme, keberanian, dan pengkhianatan juga terungkap dalam penggambaran tokoh-tokohnya. Kegelisahan dan problem psikologis yang dihadapi tokoh utamanya, Guru Isa, merupakan semacam potret betapa seseorang yang terus-menerus dikejar serangkaian ketakutan dalam saat tertentu dapat berubah menjadi sosok seorang pemberani yang menjunjung nilai-nilai kesetiaan dan kepahlawanan. Sebaliknya, seseorang yang pada mulanya tampak seperti pemberani, justru menjadi pengkhianat ketika ia tidak tahan terhadap penyiksaan. Sebuah novel yang mengangkat sisi-sisi kemanusian di tengah penderitaan hidup dalam suasana peperangan.

Sejumlah novel lain yang juga berlatar revolusi dapatlah disebutkan beberapa di antaranya dua karya Matu Mona, *Akibat Perang* (1950) dan *Zaman Gemilang* (1950), dan karya Muhammad Dimyati, *Yogya Diduduki* (1950), semua diterbitkan penerbit Gapura. Kembali, peristiwa perang tidak hanya dimanfaatkan para pengarang Indonesia sebagai latar cerita, tetapi juga sebagai salah satu usaha memasukkan nilai-nilai perjuangan dan semangat kepahlawanan.

Masalah nasionalisme itulah yang juga muncul dalam dua serangkai novel karya Abdoel Moeis. Penulis novel *Salah Asuhan* itu, pada awal dasawarsa 1950-an menghasilkan dua novel yaitu *Surapati* (Balai Pustaka, 1950) dan *Untung Anak Surapati* (Balai Pustaka, 1953). Novel yang pertama

---

[151] Pembicaraan ringkas mengenai karya-karya Pramoedya Ananta Toer, A. Teuw, *Sastra Baru Indonesia*, I, 1978, hlm. 222–242

bercerita tentang perkawinan Surapati dengan Suzan, putri bangsawan Belanda, Edeler Moor dan perjuangan Surapati melawan Belanda; yang kedua tentang kegelisahan Untung yang hidup di tengah dua bangsa, yaitu bangsa ibunya (Belanda) dan bangsa ayahnya (Indonesia). Untung yang berpihak kepada bangsa ibunya, Belanda, akhirnya tewas dalam pertempuran melawan ayahnya sendiri. Semua tema novel yang telah disinggung di atas, tentu saja sangat berbeda dengan tema novel-novel yang terbit sebelum perang ketika Balai Pustaka digunakan sebagai alat kepentingan kolonial.

Sesungguhnya masih banyak sastrawan lain yang juga mengangkat tema atau latar revolusi dalam karyanya, baik novel, puisi, maupun drama. Beberapa dapatlah disebutkan nama-nama, antara lain Toha Mochtar, Trisnojuwono, Trisno Sumardjo, M. Balfas, S. Rukiah, Nugroho Notosusanto, dan Subagio Sastrowardojo. Tampak di sini bahwa pengalaman mereka dalam peristiwa revolusi kemerdekaan sengaja dimanfaatkan menjadi sebuah cerita yang menarik dan sekaligus juga mengharukan. Di dalamnya, tentu saja para pengarang itu sengaja menyelusupkan semangat dan nilai-nilai kebangsaan. Dari sudut itu, pengalaman getir pada zaman Jepang sebagaimana yang digambarkan dengan sangat baik dalam beberapa cerpen Idrus, dan berbagai penderitaan ketegangan atau pengkhianatan yang terjadi ketika perang kemerdekaan melawan Belanda, telah menjadi lahan subur mereka untuk mengangkat tema-tema sekitar peristiwa itu.

Dalam dasawarsa tahun 1950-an itulah sastrawan Indonesia leluasa memanfaatkan kemerdekaan kreatifnya untuk mengangkat berbagai masalah yang menimpa bangsanya. Jika dihubungkan dengan peran sosial sastrawan, pada dasawarsa itu sastrawan Indonesia telah memainkan peran sosialnya dalam menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan dan semangat kebangsaan melalui karya-karya yang telah mereka hasilkan. Slogan-slogan perjuangan seperti"Maju Terus Pantang Mundur", "Merdeka atau Mati", "Sampai Titik Darah Penghabisan," atau "Maju Tak Gentar" telah diterjemahkan sastrawan Indonesia melalui sejumlah karya sastra yang terbit ketika itu. Dalam hal ini, karya sastra telah menjalankan fungsinya sebagai salah satu alat untuk menumbuhkan semangat kebangsaan.

Bahwa sejumlah karya yang bertema peperangan, kebangsaan, dan kepahlawanan yang seperti itu dapat diterbitkan dan bebas beredar di tengah masyarakat, tentu saja faktor utamanya karena pemerintah tidak lagi melaksanakan pembatasan. Peran Balai Pustaka, seperti telah disinggung pada zaman Belanda dan Jepang, bertindak sebagai badan sensor yang mengatur dan mengarahkan kehidupan kesusastraan sejalan dengan

ideologi politik kolonial, sejak Indonesia merdeka, perannya tidak lagi demikian. Di dalamnya termasuk juga soal pemakaian bahasa Indonesia yang tidak lagi diseragamkan sebagai ciri khas bahasa Balai Pustaka. Penerbitan novel-novel Pramoedya Ananta Toer yang banyak memasukkan unsur bahasa Jawa, novel *Atheis* (1949) karya Achdiat Karta Mihardja yang banyak memasukkan unsur bahasa Sunda, merupakan contoh perubahan kebijakan Balai Pustaka dalam soal pemakaian bahasa Indonesia. Dengan begitu, perubahan peran yang dimainkan Balai Pustaka sangat berpengaruh bagi perkembangan kesusastraan Indonesia, baik secara tematik maupun stilistik.

Tiadanya badan sensor, juga telah membuka peluang yang lebih luas bagi sastrawan untuk mengeksplorasi tema-tema yang lebih beragam. Tema-tema keagamaan dan kebangsaan yang semula dilarang dan dianggap tabu dan berbahaya, kini bebas diungkapkan karena tiadanya badan sensor itu. Tema ketuhanan yang diangkat Achdiat dalam *Atheis,* misalnya, niscaya tidak akan dapat terbit jika Balai Pustaka menjalankan perannya sebagai lembaga kontrol ideologi pemerintah. Demikian juga novel *Aki* (Balai Pustaka, 1950) karya Idrus yang menceritakan soal kematian–nyawa–sebagai alat permainan. Untuk ukuran pada masa itu, perdebatan soal ketuhanan dalam *Atheis* dan urusan nyawa yang dipermain-mainkan dalam *Aki*, boleh dikatakan sensitif.

Tema yang juga cukup sensitif diangkat pula oleh A.A. Navis dalam cerpennya, "Robohnya Surau Kami" yang dimuat majalah *Kisah*, no. 5, th. III, 1955. Cerpen yang mengkritik kepicikan penganut agama (Islam) itu malah mendapat hadiah kedua majalah itu. Kritik yang sama dengan cerita yang berbeda juga disampaikan Ramadhan K.H. dalam cerpennya, "Antara Kepercayaan" yang dimuat majalah *Prosa,* no. 3, th. I, September 1955. Cerpen ini bercerita tentang seorang anak yang bimbang dalam berhadapan dengan agama yang semula dianut ibunya (Islam) dan ayahnya (Kristen). Di antara dua agama itu ia dituduh oleh orang Islam sebagai kafir yang akan masuk neraka dan di lingkungan orang Kristen ia dianggap sebagai pendosa yang juga akan masuk neraka. Dalam kebimbangan itulah, ia mencari Tuhannya sendiri, dan gagal karena masyarakat menuduhnya sebagai orang gila. Kritik terhadap agama juga dilakukan Rendra dalam cerpennya, "Mungkin Parmo Kemasukan Setan" yang dimuat majalah *Prosa* bersamaan dengan cerpen "Antara Kepercayaan" karya Ramadhan. Secara implisit Rendra mengkritik disiplin ketat yang diterapkan dalam asrama yang dikelola pastor Katolik. Berbeda dengan cerpen-cerpen itu, Rijono Pratikto yang oleh Jassin dikatakan sebagai pengarang cerita seram, dalam

cerpennya yang berjudul "Isak Kawin" bercerita tentang kemungkinan akal manusia dapat menghidupkan lagi orang yang mati atau mengembalikan orang yang sudah tua menjadi manusia baru.[152] Cerita dengan tema-tema yang cukup sensitif itu ternyata tidak mendapat reaksi apa pun baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Suasana yang kondusif bagi kegiatan kreatif itu tentu saja berdampak positif bagi kehidupan dan perkembangan kesusastraan. Terbukti kemudian bermunculan sastrawan-sastrawanan baru yang justru kebanyakan datang darat luar Sumatra. Peta kesastrawanan pun berubah. Jika sebelumnya sastrawan asal Sumatra mendominasi peta kesusastraan Indonesia, kini keadaannya tidak lagi demikian. Sastrawan asal Jawa tiba-tiba saja seperti hendak merebut dominasi itu. Kehadiran mereka di satu sisi memudarkan dominasi sastrawan asal Sumatra, dan di sisi lain, memperkaya tema dan gaya pengucapan.

Kondisi yang demikian itu dimungkinkan pula oleh terbitnya berbagai surat kabar dan majalah yang menyediakan rubrik-rubrik kesusastraan secara memadai. Pemuatan cerita pendek (cerpen) menjadi hal yang penting dilakukan media massa, di samping puisi dan artikel atau esai kesusastraan. Cerpen pada gilirannya menempati kedudukan penting. Cerpen menjadi bagian yang perlu diperhitungkan kontribusinya dalam perjalanan kesusastraan Indonesia. Bahwa cerpen menempati kedudukan penting dalam kesusastraan pada dasawarsa itu, tampak dari disediakannya ruangan cerpen pada hampir semua media massa (surat kabar dan majalah). Bahkan, ada pula majalah yang khusus menerbitkan cerpen, yaitu majalah *Prosa* yang dikelola Ajip Rosidi.[153]

Selain itu, munculnya sejumlah penerbit swasta membuka kemungkinan yang lebih luas bagi sastrawan untuk mempublikasikan karya-karyanya di luar penerbit Balai Pustaka. Sejumlah novel, antologi puisi, antologi cerpen, dan naskah drama cukup banyak yang diterbitkan penerbit swasta. Pada masa itu, ada sekitar 157 penerbit yang tersebar di 20-an kota besar di Indonesia. Dari jumlah itu, 15 penerbit yang sebagian besar berada

---

[152] Dalam salah satu karya Hariadi S. Hartowardojo, misalnya, dikatakan."Aku djumpa Tuhan di tikungan. Kutjabut keris terus kutikam." Atau, dalam karya Idrus: "Tuhan Lama Sudah Bertukar dengan Tuhan Baru." Mengenai hal ini, lihat artikel Pramoedya Ananta Toer, "Masalah Tuhan dalam Kesusasteraan", *Pudjangga Baru*, no. 10, th. XIII, April 1952

[153] Dalam dasawarsa tahun 1950-an itu ada sekitar 55 majalah yang menyediakan rubrik untuk cerpen belum termasuk surat-surat kabar yang jumlahnya melebihi itu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ernst Ulrich Krazt, *Bibliografi Karya Sastra Indonesia dalam Majalah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988, cerpen yang dimuat di 55 majalah itu berjumlah 5.043 buah hampir mendekati puisi yang berjumlah 6.291 buah, sedangkan drama hanya 75 buah. Lihat juga Mahayana, *Akar ...*, hlm. 26–27

di Jakarta, menerbitkan buku-buku sastra. Tercatat ada sekitar 237 judul buku sastra yang beredar masa itu, 75 judul di antaranya diterbitkan Balai Pustaka.[154]

Munculnya para penulis dari berbagai daerah serta para penulis etnis Cina yang karyanya tidak lagi dikatakan sebagai "bacaan liar" telah melahirkan berbagai kisah yang tidak lagi berlatar Sumatra atau Jakarta. Akibatnya, berbagai unsur dan latar kedaerahan ikut memperkaya khazanah kesusastraan Indonesia. Kondisi itu sekaligus mendorong lahirnya sastrawan-sastrawan baru dan kemudian diikuti generasi berikutnya. Di dalam perkembangannya, generasi itulah yang kelak menjadi sastrawan kenamaan yang perannya sangat penting dalam ikut memajukan kesusastraan Indonesia. Ajip Rosidi, Ramadhan K.H., Ayatrohedi, Dodong Djiwapradja, Toto Sudarto Bachtiar, Mh. Rustandi Kartakusuma, Mahbub Djunaedi, Praktikto, Trisno Sumardjo, Muhammad Ali, Subagio Sastrowardojo, Hartojo Andangdjaja, Nugroho Notosusanto, Kirdjomuljo, Harijadi S. Hartawardojo, P. Sengodjo, Toha Mochtar, A.A Navis, Taufiq Ismail, Mansur Samin, Motinggo Busye, Nasjah Djamin, Iwan Simatupang, Sitor Sitomurang, Gerson Poyk, dan sederet nama lain, adalah sastrawan Indonesia yang kiprahnya dimulai tahun 1950-an dan kemudian menjadi sastrawan penting dalam tahun-tahun berikutnya.[155]

Di antara sastrawan-sastrawan itu, di dalamnya termasuklah beberapa sastrawan perempuan, seperti M. Poppy Hutagalung, S. Rukiah, Nh. Dini, dan yang sudah berkiprah sebelumnya, Suwarsih Djojopuspito. Belakangan, Poppy lebih dikenal sebagai penyair dan Nh. Dini menjadi novelis yang penting dalam dua dasawarsa berikutnya. Kondisi itu diramaikan pula oleh kedatangan beberapa sastawan Indonesia yang pernah menerjemahkan puisi-puisi *Lorca* (Spanyol). Iwan Simatupang hadir dengan novel-novel absurdnya dan Sitor Situmorang memasukkan unsur filsafat eksistensialisme dan gambaran tokoh yang terasingkan melalui cerpen-cerpen dan kumpulan puisinya. Pengalaman di luar negeri dan pengaruh eksistensialisme, yang dibawa mereka, turut memperkaya pengucapan dan tema sastra Indoneisa. Kehadiran mereka ternyata banyak memengaruhi sastrawan lain yang muncul kemudian.

---

[154] Mahayana, *Akar ...*, hlm. 20–29. Dalam penelitian lain, Ernst Ulrich Krazt, "Data Statistik Daerah Asal Para Pengarang Indonesia", dalam Sapardi Djoko Damono (Ed.), *H.B. Jassin 70 Tahun*, Jakarta: Gramedia, 1987, hlm. 97–109, mengungkapkan bahwa antara tahun 1915 sampai tahun 1985, puncak penerbitan (buku-buku sastra) terjadi pada akhir tahun 1950-an dengan jumlah mencapai 1400-an

[155] Menurut catatan Kratz, "Data Statistik ... "sampai tahun 1961, pengarang asal Pulau Jawa berjumlah 344 pengarang (Jawa Tengah 114, Jawa Timur 86, Jakarta 34, dan Yogyakarta 28), sedangkan asal Sumatra berjumlah 181 (Sumut 79, Sumbar 76, Aceh 16, Riau 8, dan Jambi 2)

Pada dasawarsa tahun 1950-an itu pula dimulainya pemberian hadiah bagi karya-karya sastra yang dianggap baik. Tentu saja hal itu ikut mendorong dan memberi rangsangan bagi sastrawan menghasilkan karya dengan kualitas lebih baik lagi. Dimulai tahun 1953 oleh Badan Musyawarah Kebudayaan (BMKN), sebuah badan yang dibentuk dalam Konfrensi Kebudayaan di Jakarta tahun 1950 sebagai Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI), dan diganti BMKN dalam kongres di Bandung tahun 1952. BMKN memberikan hadiah kepada karya sastra terbaik (novel, antologi cerpen, puisi, drama, dan terjemahan) untuk karya sastra terbitan tahun 1952 yaitu novel Mochtar Lubis, *Djalan Tak Ada Udjung*, antologi cerpen Pramoedya Ananta Toer, *Tjerita dari Blora*; antologi puisi S. Rukiah, *Tandus*; drama Utuy Tatang Sontani, *Awal dan Mira*, dan antologi puisi terjemahan M. Taslim Ali, *Puisi Dunia*.

Untuk karya terbitan tahun 1953 dan 1954, entah mengapa, tidak ada hadiah sastra diberikan BMKN. Baru untuk terbitan dua tahun berikutnya (1955–1956) diberikan kepada Toto S. Bachtiar, Rendra, dan Ajip Rosidi (puisi) dan Sitor Sitomurang, Achdiat Karta Mihardja, dan Mochtar Lubis (prosa). Untuk terbitan dua tahun berikutnya (1957–1958) yang baru diberikan tahun 1960 jatuh pada antologi puisi *Priangan si Djelita* (Ramadhan K.H.); *Dari Daerah Kehadiran Lapar dan Kasih* (Hr. Bandaharo), antologi cerpen *Laki-laki Mesiu* (Trisnojuwono), *Tjerita dari Djakarta* (Pramoedya Ananta Toer), dan *Sebuah Rumah buat Hari Tua* (Ajip Rosidi). Untuk novel jatuh pada novel *Pulang* karya Toha Mochtar, sedangkan untuk drama diberikan kepada *Saat jang Genting* (Utuy Tatang Sontani), *Titik-Titik Hitam* (Nasjah Djamin), dan *Merah Semua Putih Semua* (Mh. Rustandi Kartakusuma). Dalam kasus ini, Pram dan Rustandi menolak hadiah itu. Penolakan ini mengawali kontroversi pemberiah hadiah tahun-tahun berikutnya. Penolakan Rustandi didasari anggapan bahwa kualitas juri meragukan.[156]

[156] Inilah benih perpecahan antara seniman yang mengusung gagasan humanisne universal dan seniman Lekra. Dewan Juri waktu itu terdiri dari sastrawan yang meentang adanya campur tangan politik dalam sastra, sedangkan Pramoedya dan Rustandi (walau tidak termasuk anggota Lekra), justru berpandangan sebaliknya. Di awal tahun 1960-an, M. Poppy Hutagalung juga menolak keputusan juri majalah *Sastra* yang waktu itu diketuai H.B. Jassin. Belakangan diketahui, di balik penolakan itu ada usaha Pram yang hendak menjatuhkan reputasi Jassin. Surat-surat penolakan atau keberatan para sastrawan yang pernah memperoleh hadiah sastra antara tahun 1963–1965 dapat kita cermati dalam lampiran buku D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail (Ed.), *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk.*, Bandung: Mizan; 1995, hlm. 422–435. Lihat juga Wiratmo Soekito; *Kesusteraan dan Kekuasaan*, Jakarta: Dian Tujuhbelas, 1984; hlm. 131–135. Menarik juga mengikuti perkembangan intelektual Pramoedya. Esai-esainya tahun 50-an memperlihatkan ketegasan Pram menolak masuknya politik ke dalam sastra. Satu sikap yang bertolak belakang ketika Pram masuk menjadi anggota Lekra.

Selain BMKN yang memberikan hadiah, majalah *Kisah* juga melakukan hal yang sama kepada karya-karya terbaik yang pernah dimuat di majalah itu.

Akan tetapi, kondisi yang semarak dan penuh gairah kreatif itu menjadi rusak ketika kepentingan politik dan ideologi masuk terlalu jauh ke dalam wilayah kesusastraan. Pertentangan ideologi terjadi antara para pendukung "Surat Kepercayaan Gelanggang" dan pendukung Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Surat Kepercayaan Gelanggang bertarikh 18 Februari 1950 diumumkan dalam majalah *Siasat* tanggal 22 Oktober 1950. Sebelum itu, pada tanggal 17 Agustus 1950 sudah berdiri Lekra yang berinduk pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Para pendukung "Gelanggang" menganut paham humanisme universal, sedangkan Lekra menganut paham realisme sosialis dan kecenderungan memasukkan kesusastraan dan kesenian secara umum sebagai bagian dari kehidupan politik.

Dari Mukadimah Lekra dan "Surat Kepercayaan Gelanggang" sebenarnya kita tidak melihat secara eksplisit gagasan tentang konsep "seni untuk rakyat" dan "seni untuk seni" serta gagasan "realisme sosialis" dan "humanisme universal". Sungguhpun demikian, pernyataan yang tertuang dalam Mukadimah Lekra seperti: rakyat adalah pencipta kebudayaan dan bahwa Lekra secara tegas berpihak pada rakyat dan mengabdi kepada rakyat adalah satu-satunya jalan bagi seniman dan pekerja kebudayaan untuk mencapai hasil yang tahan uji dan tahan waktu", tidak lain merupakan jargon atau sekadar propaganda belaka. Dengan begitu, Lekra sebagai sebuah organisasi kebudayaan yang berada di bawah naungan PKI, sejak kelahirannya telah menjadi salah satu alat PKI guna mencapai cita-cita perjuangan PKI yang berkehendak menciptakan masyarakat komunis.

Dalam *Almanak Lembaga 2 Negara dan Kepartaian,* sebagaimana dikutip Yahaya Ismail, dikatakan bahwa "Seluruh pekerjaan PKI didasarkan atas teori Marxisme-Leninisme dan bertujuan ... mencapai sistem demokrasi rakyat di Indonesia ... lebih lanjut menciptakan masyarakat sosialis dan masyarakat komunis di Indonesia .... Masyarakat sosialis ialah masyarakat tanpa pengisapan manusia oleh manusia ... dan masyarakat komunis ialah masyarakat adil dan makmur sebagai tingkatan yang lebih tinggi daripada masyarakat sosialis.[157] Hal tersebut jelas sejalan dengan gagasan Marx mengenai masyarakat masa depan bahwa masyarakat sosialis hanya akan tercapai jika tidak ada lagi kelas-kelas, kecuali proletariat dan partainya, yaitu partai komunis. Tahap ini masih harus dilanjutkan lagi menuju tahap berikutnya, yaitu masyarakat komunisme. Dalam tahap inilah masyarakat

[157] *Almanak Lembaga 2 Negara dan Kepartaian,* Djakarta, Departemen Penerangan, 1961, hlm. 461; Yahaya Ismail, *Pertumbuhan,* ...., hlm. 4–5

akan memasuki dunia yang penuh kebebasan dan pemuasan sempurna dari semua kebutuhan.[158] Jika garis perjuangan Lekra jelas dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat komunisme, di dalam implementasinya yang menyangkut kesenian-kebudayaan, Lekra menyatakan sikap dengan penolakannya terhadap kesenian dan ilmu yang dipisahkan dari masyarakat. Dalam bagian ini, anggapan netralitas seni dan ilmu serta pandangan seni untuk seni dan ilmu untuk ilmu, dipandang terlalu individualis dan tidak mendidik masyarakat secara tegas. Lekra menolak sifat antikemanusiaan dan antisosial dari kebudayaan bukan rakyat. Di bagian lain, Lekra menyatakan bekerja untuk membantu pembentukan manusia baru yang memiliki segala kemampuan untuk memajukan dirinya dalam perkembangan kepribadian yang bersegi banyak dan harmonis.

Sementara itu, dalam "Surat Kepercayaan Gelanggang" terungkap bahwa para penggagasnya menyatakan diri sebagai ahli waris kebudayaan dunia, dan warisan kebudayaan dunia itu dibangun kembali menurut cara mereka sendiri. Ini artinya bahwa mereka secara sadar tidak melandasi diri pada kebudayaan Indonesia *an sich*, melainkan juga menerima pengaruh dari berbagai kebudayaan yang tersebar di mancanegara. Bahwa mereka meneruskan dengan caranya sendiri, itu berarti bahwa tiap individu mempunyai hak dan kebebasan untuk mengembangkannya menurut cita rasa dan pandangan sendiri, tanpa harus dibatasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu di luar itu. Hal itu lalu menjadi jelas dengan pernyataan berikutnya:

> "Kami tidak akan memberikan suatu kata-ikatan untuk kebudayaan Indonesia " dan "Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan suara-suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia dan yang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri."

Demikianlah, tampak bahwa perbedaan sikap dan pandangan golongan Lekra dengan mereka yang mendukung "Surat Kepercayaan Gelanggang" terutama menyangkut beberapa hal yang asasi, seperti soal pengaruh asing dan penerimaan kebudayaan mancanegara yang mengisyaratkan universalisme, dan pernyataan "dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri" yang mengisyaratkan kebebasan menerima pengaruh itu dan mengungkapkan kembali. Begitu juga pembentukan kebudayaan baru Indonesia, misalnya dalam "Surat Kepercayaan Gelanggang" dinyatakan berdasar pada masuknya berbagai pengaruh yang kemudian dirumuskan sendiri, sehingga menjadi khas bercirikan keindonesiaan, sedangkan menurut golongan Lekra pengaruh itu merupakan pengaruh

[158] Frank Von Magnis Suseno J., "Ringkasan Sejarah Marxisme dan Komunisme", Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Djakarta, 1977, hlm. 48–49 (diktat tidak dipublikasikan)

imprealisme dan kolonialisme. Begitu pula, pengertian rakyat bagi Generasi Gelanggang lebih bersifat universal, sedang golongan Lekra menganggap bahwa yang dimaksud rakyat adalah kaum proletar dalam pertentangannya dengan kaum borjuis dan kapitalis. Selanjutnya perbedaan sikap atau pandangan antara Generasi Gelanggang dan golongan Lekra, secara rinci dapat dilihat dari bagan berikut.

Generasi Gelanggang

1. Kebebasan individu
2. Kemanusian sejagat (humanisme universal)
3. Tanpa ikatan
4. Penerimaan berbagai pengaruh asing dan pengangkatan kebudayaan baru
5. Penolakan terhadap wadah yang menghambat
6. Revolusi belum selesai, nilai baru mengganti nilai lama yang usang
7. Tidak mempersoalkan feodalisme
8. Tidak mementingkan aliran (isme)

Generasi Seniman Lekra

1. Keharusan mengabdi pada masyarakat
2. Kemanusian proletariat
3. Terikat pada kepentingan golongan/partai
4. Penolakan pengaruh asing dan penerimaan kesenian rakyat
5. Keharusan memasuki satu wadah
6. Revolusi belum selesai, manusia baru untuk membentuk kebudayaan rakyat
7. Menentang feodalisme
8. Mementingkan aliran (realisme sosialis)

Dalam berbagai artikel yang berkembang sehubungan dengan perbedaan sikap antara Generasi Gelanggang yang kemudian disebut sebagai Angkatan '45 dan golongan Lekra, akan nyata bahwa di dalam menafsirkan "Surat Kepercayaan Gelanggang" dan "Mukadimah Lekra", kedua kubu ini juga tidak jarang bersikap tidak konsisten, terutama golongan Lekra, penafsirannya cenderung semata-mata berdasarkan kepentingan partai.[159] Mengangkat permasalahan tersebut, terasa menjadi penting mana kala ada beberapa di antara anggota salah satu kubu itu berubah sikap dan malah mendukung kubu yang tadinya justru ditentangnya. Rivai Apin dan Pramoedya Ananta Toer, misalnya, adalah contoh bagaimana kedua tokoh ini menggasak kubu yang pada awalnya justru didukung dan dibelanya. Dengan demikian, hal itu menunjukkan juga bagaimana perkembangan sikap beberapa seniman kita pada waktu itu. Dari hampir 40 artikel yang

[159] Beberapa artikel mengenai permasalahan itu kemudian dikumpulkan Aoh Karta Hadimadja dan diterbitkan sebagai buku, berjudul *Beberapa Paham Angkatan 45* (Djakarta, Tintamas, 1950); berisi tulisan Aoh sendiri, Bakri Siregar, Klara Akustia, H.B Jassin, Asrul Sani, dan Hamka

ditulis Pramoedya Ananta Toer antara tahun 1951–1959,[160] tampak jelas bahwa dalam paruh pertama dasawarsa tahun 1950-an itu, sikap kepengarangannya belum terpengaruh oleh keberpihakannya pada partai politik tertentu. Malahan, dalam artikelnya yang berjudul "Ada Humanisme di Oranje dan Komunisme Telah Mati bersama Lenin" (*Budaya*, no. 8 Agustus 1953), ia secara eksplisit menafikan cita-cita komunisme. Dalam artikelnya yang lain,"Kesusastraaan sebagai Alat" (*Indonesia*, no. 7, 1 Juli 1952), ia mengingatkan bahaya politik jika mencampuri kegiatan kesusastraan. Ia menulis, kesusastraan yang sesungguhnya dikorbankan oleh dan untuk politik adalah kesusastraan propaganda yang belum lagi patut mendapat nama kesusastraan.[161] Di bagian lain tulisannya, Pram juga menanggapi pernyataan Mao Tse Tung, bahwa kesusastraan dan seni mengabdi kepada masyarakat, khususnya buruh, petani, dan tentara, yang justru mempersempit ruang gerak seniman. "Kesusastraan yang harus melayani masyarakat tidak bedanya dengan pelayan di restoran yang harus memuaskan langganannya. Ini adalah kesusastraaan yang boleh dinikmati sambil makan angin, kenikmatan yang murah."

Betapapun sejak memasuki tahun 1950-an itu timbul perbedaan pendapat mengenai gagasan humanisme universal dan gagasan masyarakat proletariat, serta seni untuk seni dan seni untuk masyarakat. Permasalahannya sendiri dapatlah dianggap masih dalam taraf yang wajar sebagai sebuah pandangan yang dasar pijakannya berbeda. Karya-karya yang dihasilkan oleh sastrawan pendukung kedua gagasan itu pun pada tahun 1950-an itu masih memperlihatkan perbedaan tema dan sebagian besar tidak terjerumus pada bentuk propaganda. Jadi sesungguhnya, kedua kubu itu masih berusaha untuk menghasilkan karya-karya yang baik dalam arti yang sebenarnya, meski mereka berbeda aliran. Bahwa lalu terjadi perseteruan yang makin hebat, masalah itu justru terjadi saat politik terlalu jauh mencampuri persoalannya, sebagaimana yang terjadi pada paruh pertama tahun 1960-an.

Secara umum kehidupan kesusastraan Indonesia tahun 1950-an memperlihatkan satu dinamika yang positif dibandingkan masa sebelumnya. Pada dasawarsa itulah, kehidupan kesusastraan Indonesia berada pada situasi yang paling semarak. Situasi itu kemudian seperti memasuki titik balik ketika pada awal tahun 1960-an politik ditempatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Slogan "Politik adalah Panglima" telah sedemikian rupa

---

[160] Lampiran penelitian Sapardi Djoko Damono, "Penelitian Gagasan Modernisme dalam Sastra Indonesia Tahun 50-an", Jakarta, Proyek Penelitian Universita Indonesia, 1978, hlm. 159 – 161, tidak dipublikasikan

[161] Pramoedya Ananta Toer "Kesusastraan sebagai Alat", *Indonesia*, no. 7, 1 Juli 1952. Bagian ini dikutip juga oleh Yahaya Ismail, *Pertumbuhan*, hlm. 30

mendorong politik memasuki juga wilayah kebudayaan dan kesusastraan. Pada saat itulah kehidupan kesusastraan Indonesia berada dalam situasi *chaos*. Sastrawan dan seniman secara keseluruhan dipaksa memasuki salah satu kubu politik. Jika tidak, ia akan tergusur. Antara tahun 1960–1965, kehidupan Sastra Indonesia benar-benar berada dalam kegelapan.[162]

3. Seni

Setelah pengakuan kedaulatan, di Yogya berdiri organisasi Pelukis Indonesia (PI), mula-mula dipimpin oleh Sumitro, kemudian diganti oleh Solihin dan Kusnadi. Perkumpulan para pelukis muda ialah Pelukis Indonesia Muda (PIM), yang terbentuk tahun 1954 dan diketuai oleh Widayat. Paling awal di Yogya berdiri Pusat Tenaga Pelukis Indonesia (PTPI) dengan ketua Djajengasmoro. Oleh pemerintah didirikan Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) dengan pelukis-pelukis setempat sebagai guru. ASRI dibagi dalam lima bagian yaitu, seni lukis, seni patung, seni ukir, seni reklame, dan pendidikan guru gambar.

Di Solo beberapa pelukis bergabung dalam Himpunan Budaya Surakarta. Di Madiun berdiri Tunas Muda. Tokoh-tokohnya antara lain Sunindyo dan Ismono. Di Jakarta timbul Gabungan Pelukis Indonesia (GPI) dengan ketuanya Sutisna, dan anggota-anggotanya Nazhar, Zaini, O. Effendi, Wakidjan, dan lain-lain.

Seni tari, pada periode tahun 1945–1955, pembaruannya baru terbatas pada teknik penyajian, yaitu dengan menyingkat waktu, memeras atau menyingkat cerita dan penyederhanaan. Selama periode 1955–1956 mulai tampil kreasi baru. Akan tetapi, kreasi-kreasi itu masih merupakan pengolahan materi elemen-elemen tari yang terdapat di Indonesia, baik tari klasik maupun tarian rakyat. Kebebasan dalam berkreasi sudah mulai timbul, tetapi masih terbatas. Pada waktu itu terasa sekali pengaruh komunis. Tarian klasik yang dianggap "berbau kraton" dikesampingkan, lalu muncul kreasi tari yang dianggap bertema "kerakyatan" dan kehidupan sehari-hari, seperti tari layang-layang, tari tani, tari tenun, tari nelayan, dan tari koperasi. Perkembangan semacam ini terjadi di seluruh tanah air.[163]

Pada tanggal 27 Agustus 1950 di Surakarta didirikan Konservatori Karawitan. Pendiriannya mendapat persetujuan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tanggal 17 Juli 1950. Maksud pertama mendirikan Konservatori Karawitan ialah untuk mempertinggi serta

---

[162] Simaklah buku D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismasil (Ed.), *Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk*, Bandung, Mizan, 1995, yang menggambarkan hiruk-pikuk mengenai keadaan kesusastraan (dan kebudayaan secara keseluruhan) Indonesia pada tahun-tahun itu

[163] "Masalah Modernisasi Senitari di Indonesia", *Berita Yudha*, 3 Juli 1972, hlm. VII

memperkembangkan karawitan. Konservatori ini mempunyai bagian-bagian perguruan, pendidikan, perpustakaan, museum, dan pergelaran. Dalam lingkungan perguruan, kepada para siswa diberikan pengetahuan dan pelatihan tentang karawitan modern, agar mereka memiliki teknik menabuh serta mengembangkan bakat seni tarinya. Selain itu, diajarkan pula niaga karawitan (instrumentalis, vokalis), empu karawitan (pengetahuan tentang komponis), guru karawitan, dan ahli karawitan (musikolog).[164]

Dalam periode ini perusahaan film di Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Produsen Film Indonesia (PPFI) milik bangsa Indonesia dan asing, berjumlah lebih kurang 20 buah. Salah satu di antaranya ialah Perusahaan Film Negara (PFN). Jumlah perusahaan film milik bangsa Indonesia sendiri mula-mula hanya tujuh buah, yaitu Persari, Perfini, Pahlawan Merdeka Film Coy, Titien Sumarni Motion Picture, Pesfilm (di Medan), Radial Film, dan Rafco. Jumlah semua studio film juga hanya tujuh buah, yaitu PFN, Persari, Perfini, Bintang Surabaya, Garuda Film Corp., Tan and Wong Bros Film Coy, dan Golden Arrow.

Konkurensi yang dihadapi oleh perusahaan film Indonesia tidak sedikit, bukan saja dari perusahaan Cina, melainkan juga dari pihak Perusahaan Film Negara (PFN), sebab instansi tersebut tidak hanya mengusahakan membuat film dokumenter, tetapi juga membuat film cerita seperti: "Inspektur Rachman" dan "Sekuntum Bunga di Tepi Danau". Produksi Perfini yang pertama adalah "The Long March" atau "Darah dan Doa", yang mengisahkan perjalanan Divisi Siliwangi dari Jawa Tengah ke Jawa Barat pada waktu Agresi Militer Belanda Kedua, disusul oleh "Enam Jam di Yogya".[165] Dalam perkembangan kemudian, di sekitar tahun 1955-an, banyak perusahaan film yang menutup studionya. Timbulnya persaingan berat dari film-film India, tidak adanya jaminan dari pemerintah dan soal tuntutan PPFI dalam menghadapi persaingan dengan film asing, serta lahirnya "Konsepsi Presiden" yang dipengaruhi oleh golongan komunis dengan doktrin "politik adalah panglima", telah menimbulkan ketidaktenteraman perasaan di antara seniman yang berkecimpung dalam dunia film seperti juga pada seniman lain.

Selanjutnya muncullah tokoh-tokoh seniman dari Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), sebuah ormas PKI yang mendukung konsepsi Presiden Soekarno dan mendesak agar seluruh kehidupan seni diperpolitikkan sesuai dengan garis partai mereka. Tokoh-tokoh tersebut antara lain adalah Henk Ngantung, Pramoedya Ananta Toer, Basuki Resobowo, dan Kotot Sukardi. Demikianlah, dalam tubuh PPFI timbul ketegangan antara para

---

164 *Siaran dan Masjarakat Indonesia*, 1950, hlm. 36

165 "Kegiatan Cinematografi di Indonesia", *Gema Pemuda Al Irsjad*, no. 6, th. III, September 1956

pendukung Konsepsi Presiden dan golongan yang tidak menyetujui diharuskannya para artis film berpolitik praktis. Akhirnya, golongan komunis (Lekra) berhasil memengaruhi PPFI sehingga di tengah-tengah kancah pergolakan dunia artis film itu muncullah istilah "Artis film yang berpolitik". *Move* yang dilancarkan oleh beberapa artis film yang mendukung "Konsepsi Presiden" telah mempertajam pertentangan antara pihak pengusaha dan artis film yang tidak berpolitik praktis. Oleh A.S. Bey, salah seorang anggota Perpefi yang aktif, diusulkan agar diadakan simposium film dengan acara "Artis film dan Politik". Simposium tersebut diadakan pada tanggal 8 September 1957 bertempat di Aula Universitas Indonesia. Para pemrasaran dalam simposium tersebut pada umumnya tidak menyetujui bahwa para artis film harus berpolitik.[166]

Mengenai perkembangan seni bangunan dapat dikemukakan bahwa keadaan bangunan di kota-kota pada umumnya mengambil tempat tidak berketentuan dan tidak melaraskan diri dengan keadaan alam. Sekolah-sekolah, kantor-kantor besar, toko, gedung tua, dan pondok rakyat, berselang-selang sepanjang satu jalan atau dalam satu bagian kota yang seharusnya mempunyai ketentuan pasti. Corak, isi, dan rupa juga tidak berketentuan.

Sementara itu, di kampung-kampung atau di desa-desa yang jauh letaknya dari kota, kebanyakan bangunan masih berpegangan kepada corak lama, serta didirikan dengan bahan-bahan yang tidak dapat bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh lemahnya ekonomi rakyat. Di antara bangunan-bangunan itu ada yang mengikuti arus bangunan kota, ada juga yang meniru bentuk luarnya saja. Pemandangan total dari desa-desa kehilangan perasaan keindahan, serta ketinggalan beberapa abad dari kemajuan. Di beberapa daerah yang tidak begitu mengenal budaya Barat, terdapat bangunan-bangunan yang seolah-olah tidak merasa bahwa keadaan sudah meminta patokan-patokan baru. Ruang atau tempat masyarakat ini masih mempunyai keindahan bentuk dan isinya yang asli.[167]

4. Media Komunikasi Massa

Ciri umum dari pers pada masa Demokrasi Liberal antara lain ditandai oleh prinsip-prinsip liberalis dalam hal penulisan berita, tajuk rencana, dan pojok. Pada umumnya segi komersialnya kurang menguntungkan, meskipun pengusahaannya sudah diasuh secara liberal.

---

[166] Hasil Simposium Film Pertama dari Persatuan Pers Film Indonesia (PERPEFI): *Artis Film dan Partai Politik*, Desember 1957

[167] O. Effendi, "Seni Bangunan di Indonesia", *Gema Suasana*, no. 2, Februari 1948, hlm. 99–101

Gejala lain ialah, setiap individu, asal memiliki uang, tidak memandang golongannya, dapat menerbitkan surat kabar atau majalah, tanpa meminta izin kepada yang berwenang. Akibatnya, timbul perlombaan dalam penerbitan surat kabar yang kadang-kadang penerbitnya tidak memperhitungkan kemampuan keuangannya.

Suatu ciri yang ironis dari zaman Liberal ini ialah, surat kabar bekas milik Dinas Penerangan Belanda yang kemudian diambil alih oleh tenaga bangsa Indonesia, ternyata kondisi pengusahaannya jauh lebih baik dibandingkan dengan pers yang diusahakan oleh modal swasta nasional. Kondisi percetakan-percetakan surat kabar tersebut umumnya juga jauh lebih baik daripada milik swasta nasional.[168]

Pada tahun 1957, dengan dinasionalisasikannya perusahaan-perusahaan Belanda, surat kabar berbahasa Belanda lenyap dari peredaran. Dalam masa yang sama terdapat 17 surat kabar berbahasa Cina dengan oplah berkisar di sekitar 84.300 eksemplar sampai dengan 129.500 eksemplar. Surat kabar berbahasa Inggris dari tahun 1952 sampai dengan tahun 1957 mencapai oplah 25.000 eksemplar.

Pada zaman Demokrasi Liberal, sesuai dengan sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan berada di tangan kabinet. Partai-partai oposisi yang berada di luar pemerintahan dengan menggunakan surat kabarnya melemparkan rasa ketidakpuasannya kepada pemerintah. Sikap sinis publik terhadap pemerintah dibeberkan oleh surat kabar.[169] Peristiwa terpenting dalam perkembangan surat kabar selama Demokrasi Liberal ialah diselenggarakannya Seminar Pers di Tugu, Bogor dari tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 1955, yang dihadiri oleh 29 orang peserta dan 12 orang peninjau, terdiri dari wakil-wakil 17 surat kabar harian serta wakil-wakil instansi pemerintah.

Dalam periode ini pers masih dalam tahap melakukan konsolidasinya, malahan dalam banyak hal juga masih harus meletakkan dasar-dasarnya. Menurut statistik, Jakarta pada tahun 1955 yang berpenduduk 2,5 juta orang, mempunyai 24 surat kabar harian, terbagi menurut bahasanya, yaitu 14 berbahasa Indonesia, 3 berbahasa Belanda, 2 berbahasa Inggris, dan 5 berbahasa Cina. Banjarmasin yang hanya berpenduduk 65.000 orang memiliki 5 buah surat kabar, sedangkan Medan yang berpenduduk 77.000 orang mempunyai 16 surat kabar, suatu jumlah yang agak banyak selisihnya jika dibandingkan dengan kota-kota daerah lainnya. Palembang yang berpenduduk 100.000 orang pada tahun 1955 yang hanya mempunyai dua

---

[168] H. Soebagijo I.N., *Sejarah Pers Indonesia*, 1977, hlm. 95

[169] John H. Sullivan, "The Press and Politics in Indonesia", *Journal Quarterly*, 44, 1976, hlm. 102–104

surat kabar. Di tempat tertentu jumlah surat kabar cukup banyak, sedangkan di tempat lain masih kurang. Akan tetapi, rata-rata kedudukan semua surat kabar itu belum kuat, bahkan sering kali amat lemah. Masyarakat pembacanya belum luas, sedangkan pembaca di daerah menjadi rebutan pula dari beberapa surat kabar sehingga sukar bagi surat kabar daerah untuk hidup secara laik. Dengan sendirinya perusahaan surat kabar daerah merupakan *kleuterbedrijven* (perusahaan kecil) yang pada dasarnya hanya dapat memberi hidup pada staf pegawai yang sangat terbatas.

Dilihat dari segi komersialnya, pers daerah memang kurang menguntungkan. Faktor penduduk di suatu kota tempat surat kabar diterbitkan merupakan unsur yang penting. Di kota yang jumlah penduduknya sedikit sudah barang tentu jumlah pelanggan surat kabar lebih sedikit daripada kota yang penduduknya banyak. Faktor ekonomi dan perdagangan serta taraf kecerdasan penduduk juga memengaruhi maju-mundurnya surat kabar. Di kota-kota besar yang penduduknya banyak, perdagangan dan perindustrian maju, cukup banyak orang yang membutuhkan surat kabar untuk santapan rohani sehingga dengan sendirinya oplah surat kabar juga besar. Begitu pula soal perhubungan dengan daerah-daerah sekitar kota-kota besar tadi, merupakan faktor yang menentukan perkembangan hidupnya surat kabar yang terbit di kota tersebut.

Terhambatnya peredaran surat kabar ke daerah-daerah sekitar kota dapat disebabkan oleh kerusakan jalan, kurangnya kendaraan, kesulitan pengangkutan laut, dan lain-lain. Hal-hal tersebut tidak memungkinkan surat kabar berkembang dengan baik, seperti yang dapat dilihat dari perkembangan persuratkabaran di tahun 50-an di Nusa Tenggara, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan daerah-daerah lainnya yang mengalami kesulitan perhubungan. Di samping faktor perhubungan, percetakan pun dapat merupakan penghambat.

Di kota-kota dan daerah-daerah yang tidak mempunyai percetakan modern dan masih menggunakan *handzet* dan mesin cetak tua untuk penerbitan surat kabar, sudah barang tentu hasil produksinya dilihat dari sudut tipografi kalah bagus dibandingkan dengan hasil percetakan modern. Selain itu, soal iklan pun merupakan faktor yang menentukan hidup matinya surat kabar. Iklan yang banyak dan besar-besar akan menjamin kehidupan surat kabar, di samping para pelanggan.

Di kota-kota besar seperti Medan, Bandung, dan Surabaya, surat kabar dapat hidup lumayan dibandingkan dengan surat kabar di kota-kota kecil yang serba kurang segala-galanya. Kelambatan kemajuan pers daerah disebabkan oleh kebanggaan akan pers daerah sendiri yang masih kurang

yang terdapat pada daerah masing-masing. Hal ini mungkin juga berpangkal pada sebab lain lagi, yakni pers daerah sendiri belum memperlihatkan sifat-sifat yang layak untuk dijadikan kebanggaan bagi daerah yang bersangkutan. Agaknya hal inilah yang menjadikan sebab, mengapa orang daerah dalam soal pers sering kali berkiblat kepada pers ibu kota.[170]

Sifat pers Indonesia dapat dikatakan masih bersifat pers regional. Artinya, tidak terdapat pemusatan atau konsentrasi surat kabar pada suatu tempat, misalnya di ibu kota. Akan tetapi, tersebarnya tempat-tempat surat kabar diterbitkan boleh dikatakan merata. Di tiap provinsi terdapat surat kabar, besar ataupun kecil. Dari jumlah 78 harian di seluruh Indonesia (menurut keadaan 1 April 1954, lihat daftar Kementerian Penerangan Bagian Soal-soal Pers & Grafika), 15 harian terbit di Jakarta, selebihnya di daerah-daerah, berarti kurang dari 20%. Pemakaian istilah pers regional itu baru bisa dibenarkan apabila telah diperiksa perimbangan antara ibu kota dan daerah di dalam jumlah peredaran dan daerah peredaran surat kabar. Sesuai dengan surat izin pemberian kertas oleh Kementerian Penerangan tanggal 1 April 1954, 15 harian ibu kota mencapai oplah total 188.500 sehari, sedangkan oplah total harian-harian daerah adalah 321.650. Perbandingan ini menunjukkan kelebihan di pihak pers daerah. Mengenai peredarannya, pada umumnya surat kabar yang terbit di ibu kota provinsi mempunyai daerah peredaran semata-mata di dalam kota dan lingkungan provinsi yang bersangkutan. Jarang sekali, kecuali pada satu-dua surat kabar daerah, peredarannya melampaui secara luas batas-batas provinsi atau kotanya. Dari hal-hal ini pula dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat pers Indonesia pada waktu itu adalah pers regional.

Pers ibu kota pertama-tama harus melayani rakyat yang berdiam di Jakarta dan sekitarnya. Pers ibu kota umumnya menghidangkan berita-berita yang bersifat nasional. Selanjutnya karena struktur negara serta iklim politik dan usaha-usaha perdagangan besar sangat sentralistis sifatnya, artinya segala-segalanya diatur dan ditentukan dari pusat, mau tidak mau perhatian rakyat besar sekali terhadap surat kabar ibu kota. Adanya minat pembaca dengan sendirinya dimanfaatkan oleh pers ibu kota. Faktor inilah yang menyebabkan surat kabar ibu kota masuk ke daerah-daerah. Pemasukan surat kabar ibu kota ke daerah-daerah ini dibatasi oleh faktor-faktor geografis serta perhubungan. Daerah-daerah yang letaknya berdekatan dengan ibu kota serta mudah dicapai, merupakan pasarnya. Daerah-daerah di seluruh Jawa dan Sumatra Selatan dapat dicapai dalam satu hari dari ibu kota.

---

[170] "Pidato Sambutan Sekretaris Djenderal Kementerian Penerangan Harjoto Joedoatmodjo pada pembukaan Seminar Pers di Tugu Bogor, tanggal 24 Juli 1955", *Warta dan Masa*, no. 1 s.d. 6, 1955/1956, hlm. 1, 2

Dari kenyataan tersebut tampaklah betapa surat kabar ibu kota mendapat pasar yang subur, terutama surat kabar yang tinggi mutunya.

Pada umumnya pers ibu kota mempunyai tenaga-tenaga wartawan serta peralatan dan percetakan yang terbaik untuk ukuran dalam negeri. Pers daerah mempunyai fungsi melayani keperluan rakyat di lingkungan tempat ia diterbitkan. Kadang-kadang isi pemberitaan belum begitu dipahami oleh pers daerah sehingga timbul kesan seolah-olah hampir tidak terdapat perbedaan antara surat kabar yang terbit di Jakarta dan yang terbit misalnya di Surabaya. Politik dan kecenderungan pemberitaan tampaknya sama saja dan sudah barang tentu pers daerah dengan demikian ketinggalan dari pers ibu kota. Baru kemudian timbul kesadaran bahwa pers daerah pertama-tama harus mencerminkan keadaan daerah itu sendiri. Dengan demikian, surat kabar daerah mulai membedakan dirinya dengan tegas dari surat kabar Jakarta.[171]

Dalam memberikan kriteria perbedaan pers pusat dan pers daerah, yang ditentukan adalah tempat terbitnya. Pers pusat terbit di ibu kota, sedangkan pers daerah terbit di suatu ibu kota provinsi, atau hanya dalam suatu kota besar. Sebenarnya, antara pers pusat dan daerah, tidak ada perbedaan yang esensial. Meskipun demikian, orang masih menggunakan perkataan pers pusat dan pers daerah. Untuk mengaksentuasi perbedaannya, orang mengatakan bahwa pers daerah itu bersifat kedaerahan, provinsial, *kleinsteeds,* tidak kosmopolitis, dan sebagainya. Pers daerah timbul, mungkin karena adanya kebutuhan dalam masyarakat di daerah. Di sini yang dimaksudkan dengan daerah ialah kota tempat terbitnya pers itu dan wilayah sekitarnya, jadi juga daerah perdesaan. Dengan demikian, dalam pemberitaannya, pers daerah mau tidak mau harus mempertimbangkan dan memerhatikan keinginan-keinginan pembacanya di dalam wilayah penyebarannya yang meliputi dua macam suasana masyarakat, yaitu kota dan desa.

Dalam komunikasi dengan dunia ilmu, kadang-kadang timbul masalah, karena kadang-kadang diambil sikap saling menyalahkan. Pada umumnya karyawan-karyawan pers yang menghadapi masalah ini menyatakan bahwa ilmuwan dianggap mempersulit para karyawan pers, karena mereka sengaja menggunakan bahasa "tinggi-tinggi", serta tidak mau mencoba menjelaskan kegiatan ilmu kepada orang awam tanpa "penuh teori". Sebaliknya, jika berbicara dengan ilmuwan, petugas-petugas media komunikasi-massalah yang dianggap menjadi pangkal kesulitan. Sebagian

---

[171] Rosihan Anwar, "Adakah Persaingan antara Pers Ibu kota dengan Pers Daerah?", *Warta dan Mesa,* no. 1 s.d. 6, 1955/1956, hlm. 28–34

para ilmuwan berpendapat bahwa wartawan tidak mau berusaha mengerti tentang ilmu serta hanya mau memberitakan hal-hal yang sensasional. Meskipun kedua pendapat tersebut sedikit banyak ada benarnya, tidak setajam yang dibayangkan. Sebenarnya, masalah seperti ini timbul karena adanya pertentangan watak yang asasi antara kegiatan-kegiatan dunia peneliti dan dunia media massa. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada persamaan antara keduanya.

Beberapa sikap yang harus dimiliki oleh petugas-petugas pers juga dimiliki oleh petugas-petugas ilmu. Keduanya mempunyai tugas pokok, yaitu mencari kebenaran serta melaporkannya. Keduanya harus memiliki sifat-sifat skeptis serta selalu ingin menguji. Perbedaan lain yang tampak dalam cara kerja keduanya ialah peneliti harus berpegang teguh pada prinsip keuletan, sedangkan si wartawan harus lincah. Ia mengumpulkan dan melaporkan fakta untuk umum yang terdiri dari berbagai golongan dan profesi serta tidak dapat mengikatkan diri pada metodologi dan kriteria satu bidang tertentu saja. Di samping itu, andaikata karyawan media ingin lebih "ilmiah", sifat-sifat media massa tidak memberikan kesempatan untuk mengikuti langkah-langkah si peneliti untuk menyatakan konsep-konsep dan istilah-istilah melalui aplikasi dan perumusan-perumusan. Tentang ciri media massa yang penting disebut di sini ialah adanya pembatasan ruangan dalam media. Ruangan yang sempit, setelah dikurangi sebagian untuk iklan juga, kadang-kadang harus menampung peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi di dunia. Seorang ilmuwan peneliti tentu akan merasa bahwa karya yang telah menyita waktu dan tenaganya merupakan hal yang penting, sedang bagi penguasa-penguasa media massa (redaktur) karya tersebut mungkin kurang dihargai, misalnya jika dibandingkan dengan masalah-masalah aktual tentang kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, kadang-kadang istilah-istilah yang telah dibatasi secara ketat oleh ilmuwan mungkin diberikan konotasi yang populer. Hal tersebut mungkin bertentangan dengan makna nyata yang ditentukan ilmuwan. Kondisi-kondisi yang membatasi arti dari hasil-hasil penelitian mungkin generalisasi secara lebih luas, sedangkan aspek yang kurang penting dan kecil dalam karya asli mungkin diterjemahkan ke dalam kata sehari-hari yang tidak tepat beserta sinonim-sinonimnya; serta gaya tulisannya mungkin mengandung unsur *human interest.* Petugas pers mungkin mengemukakan hal-hal yang bagi sebagian peneliti tidak relevan untuk dikemukakan (seperti riwayat hidup, pribadi peneliti, biaya penelitian, serta anekdot-anekdot yang terjadi pada waktu penelitian berlangsung).[172]

---

[172] D.H. Assegaff, "Mass Media dan Perkembangan Bahasa", *Indonesia Raya,* 7 Desember 1972, hlm. VI

Hal lain yang menjadi masalah ialah adanya anggapan umum bahwa pers atau media massa di tanah air banyak andilnya dalam merusak bahasa Indonesia. Meskipun demikian, tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa pers/media massa mempunyai andil pula di dalam perkembangan bahasa Indonesia. Dari kedua anggapan yang saling bertentangan ini dapat dilihat kenyataan bahwa media massa mempunyai peran besar di dalam pengembangan bahasa Indonesia. Sementara itu, pada tahun '50-an orang masih membedakan bahasa Indonesia buku dengan bahasa pers yang belum baik. Pada saat itu terlihat adanya surat kabar atau majalah yang menggunakan bahasa "Cina" dengan logat Melayu Cina.[173]

Sarana komunikasi vital lainnya adalah radio. Sejak Proklamasi, penyiaran radio dikuasai oleh bangsa Indonesia. Dengan sendirinya corak siaran radio dapat disesuaikan dengan jiwa revolusi pada waktu itu. Pada masa awal kemerdekaan, radio menjadi saluran penerangan yang terpenting. Semua radio umum hampir di seluruh pelosok tanah air selalu dikerumuni oleh rakyat yang ingin mendengar kejadian-kejadian di Indonesia. Corak siaran banyak menggunakan siaran "kata-kata yang berat" mengenai politik dan agitasi untuk membakar semangat rakyat. Usaha lain yang dilakukan ialah mematahkan siaran propaganda dari pihak Belanda yang melakukan agresi terhadap Republik Indonesia.

Setelah Pengakuan Kedaulatan, corak siaran radio mengalami perubahan, tidak lagi bersifat menentang siaran-siaran pihak Belanda , tetapi digunakan untuk kepentingan nasional. Meskipun terdapat kesulitan-kesulitan dalam penyelenggaraannya, sedikit demi sedikit segala kesulitan dapat diatasi, sehingga penyiaran radio yang dahulu digunakan oleh Belanda dapat digunakan untuk kepentingan negara.[174]

Jenis program sesuai dengan hasil Konferensi Siaran Dalam Negeri tahun 1950, terbagi tiga, yaitu programa umum, programa luar negeri, dan programa tiga. Programa umum adalah siaran-siaran yang dilakukan cabang-cabang dalam bahasa Indonesia serta bersifat populer, menarik, dan mudah diikuti oleh pendengar umum. Programa luar negeri dilakukan oleh Pusat Jawatan dalam berbagai bahasa asing dan khusus ditujukan ke luar negeri. Dalam programa tiga disiarkan acara-acara yang khusus bersifat kursus-kursus pendidikan rakyat, siaran untuk sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Acara lainnya khusus ditujukan untuk suatu "golongan pendengar", seperti acara untuk para teknisi, musisi, dan juga kepada

---

[173] Alwi Dahlan, "Komunikasi Mass Media dan Dunia Ilmu", *Sinar Harapan,* 5 Januari 1971, hlm. V, VIII

[174] Sumarmadi, "Menindjau Corak Siaran Radio", *Radio dan Masyarakat Indonesia,*1952

beberapa golongan kecil bangsa asing di dalam negeri. Ke dalam golongan ini dimasukkan siaran dalam bahasa Belanda yang dalam istilah siaran radio biasa disebut programa dua.

Sejak tanggal 1 Oktober 1950, siaran militer untuk Belanda ditiadakan sesuai dengan sifat dan maksud siarannya, yakni untuk golongan militer. Sebagai penggantinya diadakan siaran untuk Angkatan Perang yang dimasukkan ke dalam jenis programa tiga. Untuk memperluas acara-acara programa tiga, kemudian ditambah dengan siaran-siaran yang bersifat kursus atau pendidikan dalam berbagai lapangan, seperti seni suara dan teknik. Acara ini dimulai bulan Januari 1951.

Dengan bertambahnya jenis acara siaran programa tiga, waktu yang disediakan untuk acara "siaran Barat" akan semakin berkurang. Setelah mengadakan perbandingan dengan corak siaran luar negeri, Jawatan Radio memasukkan siaran-siaran yang bersifat pelayanan kepada masyarakat bangsa asing di dalam negeri ke dalam programa tiga.

Dalam pembagian tugas siaran, pemancar/stasiun-stasiun dibagi atas dua jenis, yaitu stasiun nasional ditentukan di Jakarta, sedangkan stasiun-stasiun regional adalah Bandung (untuk Jawa Barat), Yogyakarta (untuk Jawa Tengah), Surabaya (untuk Jawa Timur), Padang, Medan, dan Makassar. Stasiun di Palembang dan Banyumas, secara bertahap dijadikan stasiun lokal dengan programa regional. Stasiun-stasiun lainnya terdapat di Semarang, Kotaraja, Pontianak, dan Manado. Stasiun-stasiun relai (pemancar pembantu) terdapat di Medan dan Jember. Stasiun nasional bersifat umum dan tidak terikat oleh corak-corak kedaerahan. Dalam siarannya juga diusahakan memasukkan dasar-dasar budaya nasional yang diharapkan dapat membimbing dan mendorong perkembangan budaya.

Stasiun-stasiun regional wajib memelihara jenis-jenis kesenian daerah yang masih hidup di kalangan rakyat, serta memenuhi kebutuhan daerahnya di lapangan pendidikan dan penerangan. Oleh Jawatan Radio juga diperhatikan kesejahteraan tenaga yang membantu siaran secara tetap, dengan cara meningkatkan honorarium mereka. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran pokok adalah "bakat seni", sedangkan untuk tenaga-tenaga yang kreatif di kalangan seniman, diadakan peraturan-peraturan khusus baik mengenai jumlah honorarium maupun syarat-syarat bermain dan sebagainya. Kesukaran-kesukaran akan piringan hitam lagu-lagu Indonesia diatasi dengan mengadakan rekaman sendiri, baik lagu-lagu Indonesia baru maupun lagu-lagu daerah. Usaha-usaha untuk merekam lagu-lagu daerah, misalnya dilakukan dengan merekam penyajian orkes-orkes, musik gamelan, dan lain-lain di Yogyakarta dan Surakarta.

Khusus bagi bagian pekabaran, selain menyelenggarakan warta berita radio, juga menyelenggarakan uraian-uraian, tinjauan dalam dan luar negeri, ikhtisar pers, dan secara insidental menyiarkan warta berita interinsuler dan internasional dalam bahasa Indonesia. Tugas perkabaran regional hanya terbatas menyelenggarakan warta berita regional termasuk berita kota dalam bahasa Indonesia serta menyiarkan ulangan pekabaran yang disiarkan oleh RRI dalam bahasa regionalnya. Demikian juga terjemahan tinjauan dalam dan luar negeri yang disiarkan oleh pusat pekabaran.[175]

Mulai tahun 1950 diadakan rencana 5 tahun. Sesuai dengan rencana itu, diusahakan penambahan studio dan penyempurnaan alat pemancar. Penambahan studio dirasakan amat perlu dan dalam waktu singkat di beberapa tempat harus dilakukan secepat-cepatnya. Jakarta sebagai studio pusat jawatan harus menggunakan pemancar-pemancar yang berkekuatan 100 kw, sampai paling sedikit 1 kw, untuk keperluan siaran-siaran dengan studio lainnya.[176]

Dalam pelaksanaan rencana lima tahun yang disusun masing-masing dengan Jawatan PTT dan memerlukan anggaran belanja yang besar, dikhawatirkan akan menemui banyak kesukaran mengingat keadaan keuangan negara. Untuk mengatasinya, biaya yang diperlukan untuk pembelian-pembelian tersebut diambil dari anggaran pemerintah dan pinjaman *Exim Bank.*

Pada tahun 1950 pembelian pemancar radio (juga untuk RRI), berjalan kurang lancar sebab masih dilakukan oleh Jawatan PTT sehingga tidak ada pemancar yang dibeli. Selain itu, penyelesaian pembelian pemancar melalui *Exim Bank* yang rencananya diserahkan kepada PTT tidak mencapai sesuatu hasil. Barulah pada tahun 1951 berkat perubahan cara pembelian, yaitu semua pembelian pemancar untuk RRI dapat dilakukan oleh Kementerian Penerangan, dapat dibeli dua pemancar yang kuat. Pada pertengahan tahun 1951, dibeli pemancar Philips berkekuatan 50 kw, dan satu pemancar RCA berkekuatan 7½ kw. Mungkin karena kesukaran keuangan, dalam tahun 1952 juga tidak dapat dibeli pemancar-pemancar baru. Anggaran belanja untuk keperluan itu baru diotorisasi pada akhir tahun 1952, sehingga pembeliannya baru dapat dilakukan pada permulaan tahun 1953. Hasil pembelian yang pertama tiba di Indonesia pada bulan April 1953, yaitu tiga buah pemancar RCA berkekuatan 7½ kw dan lima buah pemancar Caster berkekuatan 1 kw.

---

[175] Reporter Radio, "Konferensi Siaran Dalam Negeri tgl. 10 s.d. 13 Desember 1950", *Siaran dan Masyarakat Indonesia,* 1951, hlm. 21–30

[176] *Siaran Kementerian Penerangan,* I, no. 6, 12 September 1956, hlm. 8–12

Hasil kedua yang meliputi jumlah yang lebih besar tiba di Indonesia pada akhir bulan Oktober 1953, yaitu tiga pemancar berkekuatan 25 kw, tujuh pemancar berkekuatan 10 kw, tiga pemancar berkekuatan 5 kw, dan lima pemancar dari 1 kw, semuanya diproduksi oleh pabrik Caster, Amerika. Dengan hasil ini 70% dari rencana 5 tahun telah terlaksana sedangkan yang 30% diharapkan dapat dilaksanakan dari rencana pembelian melalui pinjaman *Exim Bank* atau anggaran belanja pemerintah tahun 1954, yaitu untuk pembelian dua pemancar berkekuatan 50 kw, dan lima pemancar berkekuatan 1 kw, seharga US $100.000.

Dalam penyusunan rencana 5 tahun itu, kecuali anggaran untuk pemancar, agregat diesel, dan lain-lain alat pemancar, juga telah dicantumkan anggaran untuk pembangunan gedung-gedung pemancar yang sangat diperlukan oleh pemancar-pemancar yang berkekuatan 5 kw ke atas. Pertama: pemancar-pemancar yang berkekuatan 5 kw ke atas tidak mungkin ditempatkan di ruangan dekat studio, karena akan mengganggu siaran-siaran di studio. Kedua: pemancar-pemancar besar itu memerlukan gedung-gedung yang khusus yang memenuhi syarat keamanan. Oleh karena itu, perlu dibangun gedung-gedung baru untuk pemancar-pemancar yang besar, yang dapat menjamin keamanan secukupnya, supaya tidak lekas rusak. Akan tetapi, kurangnya anggaran belanja untuk pembangunan gedung-gedung negeri, menyebabkan pembangunan gedung-gedung pemancar untuk RRI sangat lambat. Selama tahun 1950 hanya dapat dibangun sebuah gedung pemancar di Kebayoran, Jakarta, dan tahun 1952 untuk pemancar 50 kw yang telah dibeli tahun 1951. Sebuah gedung pemancar dibangun di Yogyakarta pada akhir tahun 1952, yang pemancarnya berkekuatan 7½ kw sudah datang pada tahun 1951. Kemudian diotorisasi pembangunan pemancar di Medan untuk pemancar 7½ kw, yang telah datang bulan April.

Kelambatan pembangunan gedung-gedung pemancar di Jakarta dan Yogyakarta tidak hanya menyebabkan terjadinya kerugian finansial, tetapi juga kerugian politis dan psikologis. Dari segi finansial pemancar-pemancar yang sudah dibeli tidak segera dipakai sehingga menjadi modal mati, sedangkan dari segi politis dan psikologis mengakibatkan kurang tersebarnya bahan penerangan.[177]

[177] Djawatan Radio Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 230–231

Bab IV
Demokrasi Terpimpin

A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Sistem Demokrasi Terpimpin

1. Menegakkan Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak saja mendapatkan sambutan baik dari masyarakat yang selama hampir 10 tahun dalam kegoyahan zaman Liberal mendambakan stabilitas politik, juga dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung.[1] Dekrit itu didukung pula oleh partai-partai politik besar dan oleh KSAD yang merupakan salah seorang konseptornya. Dalam perintah hariannya, KSAD menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dan mengamankan dekrit tersebut.[2]

Lima hari setelah Dekrit Presiden, Kabinet Karya dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959 diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini Presiden Soekarno bertindak selaku perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda menjadi menteri pertama dengan dua orang wakilnya dr. Leimena dan dr. Subandrio. Program kabinet meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat.

Setelah terbentuknya kabinet pada 22 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang diketuai oleh Presiden dengan Penpres No. 3 tahun 1959 dengan 45 orang anggota yang terdiri dari 12 orang wakil golongan politik, 8 orang utusan/wakil daerah, 24 orang wakil golongan karya, dan 1 orang wakil ketua. Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah (Pasal 16 Ayat 2 UUD 1945). Para anggota DPA dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959. Pada upacara peringatan hari Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno mengucapkan pidato yang bersejarah yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Pidato tersebut merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban Presiden atas Dekrit 5 Juli 1959 serta garis kebijakan Presiden Soekarno dalam mengenalkan sistem Demokrasi Terpimpin.

---

1 *Suluh Indonesia,* 11 Juli 1959; Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Tatanegara di Indonesia,* 1977, hlm. 31

2 Panitia Buku 20 Tahun Indonesia Merdeka, *20 Tahun Indonesia Merdeka,* III, 1965, hlm. 326

Dalam sidangnya pada bulan September 1959, DPA dengan suara bulat mengusulkan kepada pemerintah agar pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" tersebut dijadikan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Usul DPA itu diterima baik oleh Presiden Soekarno.[3] Rumusan DPA atas pidato tersebut menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara berjudul "Manifesto Politik Republik Indonesia" disingkat Manipol. Selanjutnya dengan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. setuju kembali ke UUD 1945,
2. setia kepada perjuangan RI, dan
3. setuju dengan Manifesto Politik.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, keanggotaan MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan wakil-wakil golongan. Keanggotaan MPRS menurut Penpres No. 12 tahun 1959 terdiri atas 261 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan wakil golongan karya sebanyak 200 orang. Dalam Penetapan Presiden itu disebutkan pula bahwa tugas MPRS adalah menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Jika dibandingkan dengan tugas MPRS, menurut Penetapan Presiden dengan tugas dan wewenang MPR menurut Pasal 1 Ayat 2, Pasal 2 Ayat 2, Pasal 6 Ayat 2, dan Pasal 3 UUD 1945, hanya Pasal 2 UUD 1945 yang menjadi tugas MPRS menurut Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959, yaitu menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilihan umum tahun 1955 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1953, tetap menjalankan tugasnya dengan landasan UUD 1945 dengan syarat menyetujui segala perombakan yang dilakukan oleh pemerintah sampai tersusun DPR baru. Penetapan tentang DPR baru dikeluarkan oleh Presiden pada 22 Juli 1959 melalui Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959

Semula tampaknya anggota DPR lama akan mengikuti saja kebijakan Presiden Soekarno, tetapi ternyata kemudian mereka menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Penolakan Rencana Anggaran Belanja Negara tersebut menyebabkan dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960, yang menyatakan pembubaran DPR hasil pemilihan umum tahun 1955. Tindakan itu disusul dengan pembentukan DPR baru. Pada tanggal 24 Juni 1960 Presiden Soekarno selesai menyusun komposisi DPR baru yang diberi nama Dewan Perwakilan

[3] S.M. Amin, *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*, 1967, hlm. 50

Rakyat Gotong Royong (DPR GR). "Penggodogan" komposisi itu dilakukan di Istana Tampaksiring, Bali, dengan mengundang para ketua tiga partai besar, yaitu PNI, NU, dan PKI serta Kolonel Wiluyo Puspoyudo yang mewakili TNI AD. Para anggota DPR GR yang baru itu dilantik pada tanggal 25 Juni 1960.

Komposisi DPR GR, jumlah wakil golongan Nasionalis, Islam, dan Komunis adalah 44, 43, dan 30. Jumlah itu berubah jika ikut dihitung anggota yang resminya tidak mewakili partai politik. Perimbangan suara golongan Nasionalis, Islam, dan Komunis adalah 44 + 50 = 94, 43 + 24 = 67, dan 30 + 51 = 81. Padahal dalam DPR hasil pemilihan umum 1955 perbandingan kursi untuk Nasionalis : Islam : Komunis adalah 65 : 115 : 42. Dengan demikian, setelah pembubaran DPR lama dan pembentukan DPR GR, partai-partai Nasionalis dan PKI memperoleh keuntungan masing-masing: 94–64 kursi = 25 kursi dan 82–42 = 39 kursi. Sementara itu, partai-partai Islam mengalami kerugian 115–67 = 48 kursi.[4] Dari sini dapat dilihat bahwa PKI-lah yang memperoleh keuntungan terbesar dari kebijakan Presiden Soekarno tersebut.

DPR GR yang seluruh anggotanya ditunjuk oleh Presiden Soekarno itu, peraturan-peraturan tata tertibnya juga ditetapkan oleh Presiden dengan Peraturan Presiden No. 24 tahun 1960, dan Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964. Pidato Presiden Soekarno pada upacara pelantikan DPR GR tanggal 25 Juni 1960 menyebutkan bahwa tugas DPR GR adalah melaksanakan Manipol, merealisasikan Amanat Penderitaan Rakyat, dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Dalam upacara pelantikan wakil-wakil ketua DPR GR pada tanggal 5 Januari 1961, Presiden Soekarno menjelaskan lagi kedudukan DPR GR, yaitu bahwa DPR GR adalah pembantu Presiden/Mandataris MPRS dan memberi sumbangan tenaga kepada Presiden untuk melaksanakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh MPRS.[5]

Terhadap perkembangan politik itu pernah ada reaksi dari kalangan partai-partai, antara lain dari beberapa pemimpin Nahdlatul Ulama (NU) dan PNI. Beberapa tokoh NU pernah menyatakan keberatannya terhadap pembubaran DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dan mengancam akan menarik pencalonan anggota-anggotanya untuk DPR GR. Akan tetapi, karena adanya penambahan jumlah kursi untuk NU, sikap mereka berubah, dan mereka memberi kesempatan kepada Presiden Soekarno untuk meneruskan kebijakan politiknya. Namun, Ro'is Aam, K.H. Wahab Chasbullah, menyatakan bahwa NU tidak dapat duduk dengan PKI dalam satu kabinet, dan NU sesungguhnya menolak Kabinet Nasakom dan menolak kerja sama dengan PKI.[6]

---

4 S.M. Amin, *op. cit.*, hlm. 1950

5 Panitia Buku 20 Tahun Indonesia Merdeka, *20 Tahun Indonesia Merdeka*, 1965, hlm. 597

6 *Abadi*, 30 Agustus 1960

Dari kalangan PNI yang patut dicatat ialah sikap Mr. Sartono, tokoh kawakan PNI dan Ketua DPR hasil Pemilu 1955, dan Mr. Iskaq Tjokroadisuryo, keduanya adalah kawan seperjuangan Presiden Soekarno. Pada rapat terakhir DPR pada tanggal 17 Maret 1960, Sartono menyatakan bahwa ia termasuk mereka yang merasa prihatin dengan perkembangan keadaan.[7] Sementara Mr. Iskaq mengatakan bahwa anggota partai mereka yang duduk dalam DPR GR bukanlah wakil PNI; hubungan antara mereka dengan PNI tidak ada lagi, sebab mereka yang duduk dalam DPR GR itu adalah hasil penunjukan. Reaksi juga datang dari Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) dan Soetomo (Bung Tomo) dari Partai Rakyat Indonesia.

Soetomo mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Agung dengan suratnya tanggal 22 Juni 1960. Pengaduan yang ditujukan kepada Kabinet Soekarno berbunyi, antara lain sebagai berikut: "Mengadukan kabinet yang dipimpin oleh Ir. Soekarno atas pelanggaran yang dilakukan oleh kabinet tersebut atas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, dengan tindakan-tindakan kabinet membubarkan parlemen Republik Indonesia hasil pilihan rakyat ...." Selanjutnya Soetomo menuduh Kabinet bertindak sewenang-wenang dan mengemukakan beberapa fakta sebagai berikut.

a. Paksaan untuk menerima Manipol dan Usdek, tanpa diberi tempo terlebih dahulu untuk mempelajarinya.
b. Paksaan supaya diadakan kerja sama antara golongan Nasionalis, Agama, dan Komunis.
c. Paksaan pembongkaran Tugu Gedung Proklamasi Pegangsaan Timur 56, Jakarta.

Memang di kalangan partai-partai terdapat variasi sikap dan pendapat. Karena tidak adanya kesatuan pendapat di kalangan partai-partai, beberapa tokoh partai menggabungkan diri dalam suatu kelompok yang menamakan diri *Liga Demokrasi* yang menentang pembentukan DPR GR.

Di dalam Liga Demokrasi yang diketuai oleh Imron Rosyadi dari NU, tergabung beberapa tokoh NU, Parkindo, Partai Katholik, Liga Muslimin, PSII, IPKI, dan Masyumi. Pada akhir bulan Maret 1960, liga tersebut mengeluarkan pernyataan yang antara lain: supaya dibentuk DPR yang demokratis dan konstitusional. Oleh sebab itu, hendaknya rencana pemerintah untuk membentuk DPR GR yang telah diumumkan tersebut, ditangguhkan. Adapun alasan yang dikemukakan, antara lain sebagai berikut.

---

[7] S.M. Amin, *op. cit.*, 1967, hlm. 192–193

a. Perubahan perimbangan perwakilan golongan-golongan dalam DPR GR, memperkuat pengaruh dan kedudukan suatu golongan tertentu yang mengakibatkan kegelisahan memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
b. DPR yang demikian, pada hakikatnya adalah DPR yang hanya akan mengi-a-kan sehingga tidak dapat menjadi *soko guru* negara hukum dan demokrasi yang sehat.
c. Pembaruan dengan cara pengangkatan sebagaimana yang dipersiapkan itu adalah bertentangan dengan asas-asas demokrasi yang dijamin oleh undang-undang.

Kegiatan Liga Demokrasi terhenti ketika Presiden Soekarno pulang dari perjalanannya di luar negeri. Kegiatan Liga Demokrasi hanya muncul pada waktu Presiden Soekarno berada di luar negeri. Perdana Menteri Djuanda, selaku pejabat Presiden selama Presiden Soekarno berada di luar negeri, bersikap toleran. Akan tetapi, setibanya di tanah air, Presiden Soekarno melarang Liga Demokrasi.

Tindakan Presiden Soekarno selanjutnya dalam menegakkan Demokrasi Terpimpin adalah mendirikan lembaga-lembaga negara baru *Front Nasional,* yang dibentuk melalui Penetapan Presiden No. 13 tahun 1959. Dalam penetapan itu disebutkan, Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita Proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945.[8] Front Nasional itu diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri.

Dalam *regrouping* pertama kabinet yang berdasarkan Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962, dilakukan pengintegrasian lembaga-lembaga tertinggi negara dengan eksekutif. MPRS, DPR GR, DPA, Mahkamah Agung, dan Dewan Perancang Nasional *Depernas* dipimpin langsung oleh Presiden. Dengan pengintegrasian ini, pimpinan lembaga-lembaga negara tersebut diangkat menjadi menteri dan ikut serta dalam sidang-sidang kabinet tertentu, yang selanjutnya ikut merumuskan dan mengamankan *policy* (kebijakan) pemerintah dalam lembaga masing-masing.[9]

Selain lembaga-lembaga tersebut, Presiden juga membentuk Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR) berdasarkan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1962, MPRS beserta stafnya merupakan badan pembantu Pemimpin Besar Revolusi (PBR) dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Keanggotaan MPPR

---

[8] Panitia Buku *20 Tahun Indonesia Merdeka, op. cit.,* 1965, hlm. 648

[9] *Ibid.,* hlm. 598; Muh. Yamin, *Pembahasan UUD 1945,* 1960, hlm. 197–200

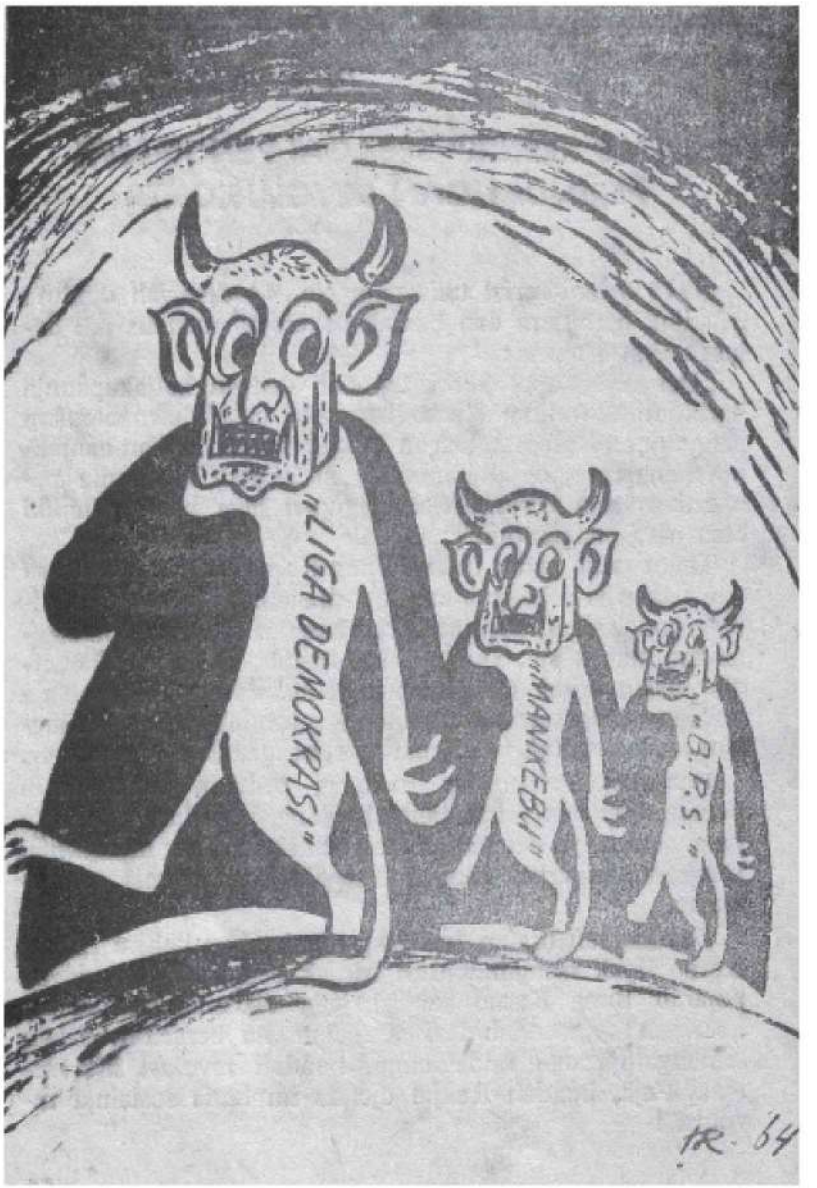

Gambar 4.1 Kartun dan media massa yang mengkritisi Liga Demokrasi (Sumber: *Dokumen Istimewa*)

terdiri dari sejumlah menteri yang mewakili MPRS dan DPR GR, departemen-departemen, angkatan-angkatan, dan para pemimpin partai politik Nasakom.

2. Interaksi Tiga Kekuatan

Dalam perkembangan selanjutnya, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno dengan TNI AD dan PKI di sampingnya.

Sehubungan dengan strateginya "menempel" pada Presiden Soekarno, PKI secara sistematis berusaha memperoleh citra sebagai *Pancasilais* dan yang mendukung kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. D.N. Aidit mengatakan: "Melaksanakan *Manipol* secara konsekuen adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI. Hanya kaum Manipolis munafik dan kaum reaksionerlah yang berusaha menghambat dan menyabot Manipol."[10]

Ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) ciptaan Presiden Soekarno dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PKI karena mendapat tempat sebagai unsur yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat.

Usaha-usaha memancing dukungan politik dari masyarakat dilanjutkan oleh Aidit dengan mengatakan: "Siapa setuju Nasakom harus setuju Pancasila.[11] PKI berusaha menyebarkan cuplikan-cuplikan pidato Presiden Soekarno, yang diuraikan sedemikian rupa sehingga seolah-seolah sejalan dengan gagasan-gagasan dan cita-cita politik PKI.[12] Demikianlah PKI terus-menerus meningkatkan kegiatannya dengan pelbagai isu yang memberi citra sebagai partai yang paling Manipolis dan pendukung Bung Karno yang paling setia, tetapi PKI masih meragukan kebenaran Pancasila, dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada bulan Oktober 1964 terjadi kehebohan dalam masyarakat karena ceramah D.N. Aidit (sebagai Menko/Wakil Ketua MPRS) di depan Kursus Kader Revolusi Angkatan Dwikora. Dalam ceramah tersebut Aidit mengatakan: "Dan di sinilah betulnya Pancasila sebagai alat pemersatu. Sebab jika sudah satu semuanya ... Pancasila tidak perlu lagi. Sebab Pancasila alat pemersatu bukan?[13] Di bagian lain dari ceramah yang sama, yang dikutip oleh *Harian*

---

[10] D.N. Aidit, *Revolusi, Angkatan Bersendjata dan Partai Komunis*, 1964, hlm. 30

[11] D.N. Aidit, *Marxisme dan Pembinaan Nasion Indonesia*, 1964, hlm. 38

[12] D.N. Aidit, *ibid.*

[13] D.N. Aidit, *Aidit Membela Pancasila*, 1964, hlm. 5

Rakjat, Aidit mengatakan: "Landasan idiil Pancasila yang lahir pada tahun 1945 adalah kelanjutan gagasan Nasakom. Pancasila merupakan filsafat persatuan dari nasional Indonesia".[14] Bagian dari pidato ini kemudian dikutip dan ditajukkan dalam harian *Revolusioner*. Peristiwa ini menimbulkan pelbagai reaksi masyarakat. Akibat reaksi masyarakat, Aidit memberikan keterangan yang isinya menolak pemberitaan di harian *Revolusioner* itu. Di dalam surat terbukanya kepada harian ini, Aidit bahkan menyerang sebagai koran subversif.

Usaha-usaha Presiden untuk membentuk Kabinet Gotong Royong (Nasakom) pada tahun usaha 1960, mendapat tantangan dari golongan agama dan pimpinan TNI AD. Kabinet terbentuk tanpa unsur komunis, tetapi Presiden Soekarno memberi imbalan kepada PKI kedudukan dalam MPRS, DPR GR, DPA, Pengurus Besar Front Nasional, serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPRS). Dengan kenyataan itu pimpinan TNI AD berusaha untuk mengimbanginya dengan mengajukan calon-calon yang lain sehingga merupakan *checking* terhadap PKI dalam komposisinya.[15] Akan tetapi, daya upaya pimpinan TNI AD tersebut menemui kesulitan karena kebijakan Presiden Soekarno yang tetap memberikan porsi dan posisi kepada PKI.

TNI AD mensinyalir adanya tindakan-tindakan pengacauan yang dilakukan PKI (malam) di Jawa Tengah. Pimpinan TNI AD baik secara lisan maupun dengan tulisan melaporkan perbuatan-perbuatan itu serta meminta perhatian Presiden Soekarno. Dengan adanya bukti-bukti bahwa PKI berencana mengadakan pengacauan di Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, pimpinan TNI AD berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya mengambil tindakan pengawasan terhadap PKI. Di pusat, *Harian Rakjat* dilarang terbit, dan dikeluarkan perintah menangkap D.N. Aidit dan kawan-kawannya. Akan tetapi, mereka berhasil lolos. Di tingkat daerah, di Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan kegiatan-kegiatan PKI dibekukan.[16] Tindakan pimpinan TNI AD itu tidak disetujui Presiden Soekarno yang malahan memerintahkan agar segala keputusan itu dicabut kembali. Dalam rangka masalah kegiatan PKI ini, pada bulan September 1960 diadakan sidang Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) dengan Penguasa Perang Daerah (Peperda) se-Indonesia di Istana Negara. Dalam sidang tersebut pimpinan TNI AD dan para panglima daerah mengingatkan Presiden Soekarno "agar jangan terlampau percaya atas

---

[14] *Harian Rakjat*, 19 Oktober 1964, hlm. 6

[15] A.H. Nasution, *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran*, I, 1967, hlm. 32; Lihat *General Nasution's Answers in Writing to H.P. Jones' Question*, hlm. 9–10 (Stensil)

[16] *ibid.*, hlm. 32–33

keloyalan PKI, baik atas pertimbangan ideologis maupun atas pengalaman masa lampau".[17] Namun, Presiden Soekarno tetap pada kebijakannya melarang Peperda mengambil tindakan politis terhadap PKI.

Kebijakan Presiden Soekarno mengganyang komunis dimanfaatkan oleh PKI sehingga PKI semakin meningkatkan apa yang kemudian disebutnya "ofensif revolusioner", dengan tema fobi, "anti-Nasakom adalah anti-Pancasila dan kontrarevolusioner", "PKI adalah yang paling progresif revolusioner", dan lain sebagainya.

Pidato-pidato Presiden Soekarno pada setiap peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, sejak 1960 sampai 1965, yang bertema "Revolusi Belum Selesai", yang berjudul *Laksana Malaikat Menyerbu dari Langit Djalannya Revolusi Kita* (Jarek, 1960), *Revolusi, Sosialisme Indonesia, Pimpinan Nasional* (Resopim, 1961), *Tahun Kemenangan* (Takem, 1963), *Genta Suara Revolusi Indonesia* (Gesuri, 1963), *Tahun Vivere Peri Coloso* (Tavip, 1964), dan *Tjapailah Bintang-Bintang di Langit* (Takari, 1965), jelas menggambarkan sikap politik Presiden Soekarno yang cenderung merangsang PKI untuk menyudutkan lawan-lawan politiknya, terutama TNI AD yang dianggap sebagai pesaing utamanya.

Pada akhir tahun 1964, pimpinan Partai Murba menemukan dokumen rahasia PKI, yang diberi nama "Resume Program dan Kegiatan PKl Dewasa Ini". Dokumen ini menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. Aidit menyangkal dengan pelbagai cara dan mengatakan bahwa dokumen tersebut adalah *dokumen palsu*. Peristiwa dokumen rahasia ini menjadi isu politik besar pada akhir tahun 1964,[18] kemudian dokumen tersebut dibicarakan oleh pimpinan partai-partai politik di bawah pimpinan Presiden Soekarno di Istana Bogor pada tanggal 12 Desember 1964. Presiden Soekarno memerintahkan menyusun rumusan untuk menyelesaikan persengketaan antarpartai. Pada 12 Desember 1964, sepuluh partai politik menandatangani sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Bogor, yang dianggap sebagai cetusan kebulatan tekad parta-partai di hadapan Pemimpin Besar Revolusi. Pokok isi deklarasi adalah "bahwa dalam suasana konfrontasi terhadap Malaysia sebagai proyek Nekolim, maka setiap sengketa di antara unsur-unsur di dalam negeri, supaya diselesaikan secara musyawarah".[19] Berkat sikap Presiden Soekarno, musyawarah Bogor berakhir dengan baik bagi PKI. Dengan sukses itu, PKI beralih kepada ofensif untuk membalas

---

[17] *Ibid.*, hlm. 23

[18] *Ibid.*, hlm. 34, 115–131, Dalam operasi anti-Gestapu di Jawa Tengah, Dokumen "Resume Perjuangan PKI Dewasa Ini" disita dari tokoh-tokoh PKI yang tertangkap

[19] Kopkamtib, *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia*, 1987, hlm. 38

serangan Partai Murba. Pemimpin-pemimpin PKI melemparkan fitnah bahwa Partai Murba "memecah belah persatuan Nasakom, dan akan mengadakan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Presiden Soekarno". Lima hari setelah Deklarasi Bogor, Presiden Soekarno membubarkan organisasi Badan Pendukung Soekarno (BPS) yang dibangun oleh beberapa tokoh Partai Murba, antara lain Adam Malik, Sajuti Melik, dan Elkana Tobing. *Soekarnoisme* adalah ajaran tandingan terhadap *ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi*, yang diciptakan oleh PKI yang dimuat dalam media massa yang sehaluan dengan PKI, seperti *Harian Rakjat*, *Bintang Timur*, dan *Warta Bhakti*. Sebaliknya, beberapa media massa Murba, antara lain *Merdeka*, *Berita Indonesia*, dan *Warta Berita*, memuat ajaran Soekarnoisme dengan judul *Memahami Soekarnoisme*, yang ditulis oleh Juti (Sajuti Melik). Atas tuduhan itu Sukarni pemimpin Partai Murba ditangkap dan partainya dibekukan oleh Presiden Soekarno[20] dan semua media massanya dilarang terbit.

Sejak tahun 1963, PKI berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet karena merasa kedudukannya cukup kuat. Di mana-mana dilakukan aksi-aksi, corat-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi yang menyerukan: "bentuk kabinet Nasakom tahun ini juga" dilakukan di pelbagai tempat. Pada tahun-tahun sebelumnya PKI tidak begitu bernafsu untuk duduk dalam kabinet. Mereka hanya melancarkan kritik-kritik terhadap pemerintah khususnya menteri-menteri yang tidak mereka sukai pandangan politiknya. PKI juga melakukan pelbagai tuntutan dalam rangka mencari popularitas di kalangan masyarakat yang tidak sadar politik. Mereka juga menuntut agar pemerintah melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) dan merangsang salah satu organisasi satelit mereka yakni Barisan Tani Indonesia (BTI) untuk melaksanakan aksi-aksi sepihak.[21] Mereka juga mengampanyekan "*retooling*" pembantu-pembantu Presiden yang tidak mampu merealisasi Tri Program Pemerintah, yakni sandang pangan, keagamaan dan Irian Barat dan anti-Nasakom, serta mendesak supaya segera dibentuk Kabinet Gotong Royong berporoskan Nasakom.[22]

Test case terhadap TNI AD dilakukan pula oleh PKI dengan beberapa peristiwa terutama dalam hal yang menyangkut masalah *landreform* atau masalah tanah lainnya. Peristiwa Bandar Betsy (Sumatra Utara) di mana

---

[20] A.H. Nasution, *op. cit.*, 1967, hlm. 34–35

[21] Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah*, 2001, hlm. 98

[22] D.N. Aidit, *Angkatan Bersendjata dan Penjesuaian Kekuasaan Negara dengan Tugas-tugas Revolusi*, 1964, hlm. 32–34

Pelda Sujono dianiaya sampai mati oleh BTI, peristiwa Jengkol, di mana PKI berusaha merongrong kewibawaan aparatur pemerintah, dalam bentuk aksi sepihak. Dalam usaha merongrong kewibawaan pemeritah, PKI melalui kampanye pers, radio, dan poster menggambarkan mereka sebagai *setan desa* yang harus dibunuh dan dibasmi. Sasarannya adalah mematahkan pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh TNI AD, sedangkan tujuan politiknya adalah *menguasai desa untuk mengepung kota.*[23]

B. Sistem Ekonomi Terpimpin

1. Ekonomi-Keuangan

Untuk merencanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, pada tahun 1958 dibuat undang-undang mengenai pembentukan Dewan Perancang Nasional yaitu Undang-Undang No. 80/1958.[24] Menurut Pasal 2 undang-undang ini, tugas Dewan Perancang Nasional adalah:

a. mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana (Pasal 2);
b. menilai penyelenggara pembangunan itu (Pasal 3).

Berdasarkan Undang-Undang No. 80 Tahun 1958 ini, pada tanggal 19 Januari 1958, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1958,[25] yang mengatur tugas dan susunan Dewan Perancang Nasional. Pada tanggal 15 Agustus 1959 terbentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) di bawah pimpinan Mr. Muh. Yamin sebagai Wakil Menteri Pertama yang beranggotakan 80 orang wakil golongan masyarakat dan daerah. Dalam waktu kurang lebih satu tahun, yaitu pada tanggal 26 Juli 1960, Depernas berhasil menyusun suatu "Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan Tahun 1961–1969". MPRS menyetujui rancangan tersebut dengan TAP No. 2/MPRS/1960.

Pada tahun 1963, Dewan Perancang Nasional berganti nama dan statusnya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Bappenas mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional maupun daerah, mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS.[26]

---

[23] D.N. Aidit, *Revolusi, Angkatan Bersendjata dan Partai Komunis*, 1964, hlm. 36–37

[24] Undang-Undang No. 80/1958, Lembaran Negara No. 144/1958

[25] Lembaran Negara No. 2/1959

[26] Penpres, No. 12, 1963

Kekacauan politik pada tahun 1959 terjadi bersamaan dengan kekacauan ekonomi, yang melahirkan inflasi. Dalam rangka membendung inflasi dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1959 yang mulai berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi.[27] Peraturan itu dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan itu nilai uang kertas pecahan Rp500,00 dan Rp1.000,00 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan itu diturunkan masing-masing menjadi Rp50,00 dan Rp100,00.

Selain kebijakan menurunkan inflasi juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1959 tentang pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar, yang terutama dalam tahun 1957 dan 1958 sangat meningkat jumlahnya.

Hal-hal yang merugikan keuangan negara, antara lain adalah perdagangan ekspor-impor dan perdagangan dalam negeri. Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lain yang merupakan sumber-sumber penting untuk penerimaan negara dalam mata uang rupiah ikut merosot. Dengan demikian, defisit anggaran belanja menjadi lebih besar lagi, dan hanya sebagian kecil yang dapat ditutup dengan pinjaman-pinjaman dari luar negeri. Hal-hal itu menyebabkan bertambahnya pencetakan uang kertas.

Serangkaian peraturan-peraturan moneter yang dilakukan sesudah tanggal 25 Agustus 1959, diakhiri dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6/1959,[28] yang isi pokoknya ialah ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1.000,00 dan Rp500,00 yang masih berlaku (dan yang bernilai Rp100,00 dan Rp50,00) harus ditukar dengan uang kertas bank baru sebelum tanggal 1 Januari 1960. Untuk menampung akibat-akibat tindakan moneter dari bulan Agustus 1959 dibentuklah Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK). Tugas pokok panitia ini ialah menyelenggarakan tindak lanjut dari tindakan moneter itu, tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen, dan jawatan yang bersangkutan.

Akibat utama kebijakan moneter pemerintah ialah terjadinya kesukaran likuiditas di semua sektor, baik sektor pemerintah maupun sektor swasta. Keadaan ini pada hakikatnya merupakan suatu kesempatan yang baik untuk mengadakan penertiban segala kegiatan pemerintah dan swasta, yang sebelumnya tidak terkendalikan.

---

[27] Lembaran Negara No. 89/1959 dan Pendjelasannja dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1837/1954

[28] Lembaran Negara No. 696/1959 dan Pendjelasannja dalam Tambahan Lembaran Negara, No. 1851/1959

Untuk tujuan itu pemerintah menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah serta memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran belanja, juga diusahakan untuk menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara baik yang lama maupun yang baru diambil alih dari kepemilikan Belanda. Dengan tindakan moneter tanggal 25 Agustus 1959 itu, pemerintah berhasil mengendalikan inflasi dan mencapai keseimbangan serta kemantapan moneter dengan menghilangkan *excess liquidity* dalam masyarakat. Penyaluran uang dan kredit baru diarahkan ke bidang usaha yang dipandang penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan. Akan tetapi, pada akhir tahun 1959 hanya lebih kurang empat bulan tindakan moneter tersebut sudah membuktikan pemerintah mengalami kegagalan.

Peredaran uang pada akhir Juli 1959 mencapai jumlah Rp33.987 juta, sedangkan pada akhir Agustus 1959 Rp20.999 juta, jadi turun Rp12.988 juta atau 38,2% dalam satu bulan. Akan tetapi, pada akhir Desember 1959, jumlah uang yang beredar mencapai Rp34.883 juta.[29] Setahun kemudian, pada akhir tahun 1960 volume uang yang beredar meningkat sampai Rp47.847 juta, yaitu 37% lebih tinggi daripada akhir tahun 1959. Volume uang itu terus meningkat setiap tahun dengan persentase yang tinggi, sampai mencapai puncaknya pada akhir tahun 1966. Pada akhir tahun 1959 jumlah yang beredar hanya Rp34.889 juta atau dibulatkan Rp35 miliar, pada akhir tahun 1966 mencapai jumlah Rp22.208 miliar atau 635 kali. Kenaikan peredaran uang yang luar biasa ini, kecuali tindakan moneter Agustus 1959 juga akibat dari kebijakan moneter kedua, yakni pengeluaran uang rupiah pada tanggal 13 Desember 1965 dengan Penetapan Presiden RI No. 27 tahun 1965.[30]

Akibat pengeluaran uang rupiah baru yang nilainya ditetapkan sebesar 1.000 kali uang rupiah lama, bukanlah harga barang-barang dalam rupiah baru menjadi seperseribu harga dalam rupiah lama, melainkan:

1. pengeluaran pemerintah dari Rp(baru) 2.526 juta dalam tahun 1965 meningkat menjadi Rp(baru) 29.867 juta, atau lebih kurang 12 kali;
2. peredaran uang dari Rp(baru) 25.72 miliar dalam tahun 1965 menjadi Rp(baru) 22.208 miliar dalam tahun 1966, atau sembilan kali.

Nilai tukar antara uang rupiah baru dengan uang rupiah lama, bergerak antara 1 : 10, jadi hanya dinilai oleh umum lebih kurang 10 kali lebih tinggi daripada uang rupiah lama dan bukan 1.000 kali.

---

29 Laporan Tahunan Bank Indonesia tahun 1959–1960

30 Lembaran Negara No. 102, 1965. Sementara itu, dikatakan bahwa tindakan ini adalah tindakan politik, untuk mengalihkan perhatian masyarakat yang menuntut pembubaran PKI dan lain-lain yang menyangkut G-30-S/PKI

Kebijakan moneter itu tidak mencapai sasarannya karena pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam pengeluaran-pengeluarannya. Untuk menyelenggarakan apa yang dikenal dengan proyek-proyek mandataris, atau dijuluki proyek mercusuar, seperti *Games of the New Emerging Forces* (*Gonefo*) dan *Conference of the New Emerging Forces* (*Conefo*), pemerintah terpaksa mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang setiap tahun semakin besar, hingga inflasi semakin mengamuk dan harga-harga semakin membubung sehingga rakyat kecil semakin tergencet. Tingkat kenaikan harga-harga paling tinggi terjadi dalam tahun 1965 (antara 200%–300% dari harga tahun 1964) selaras dengan tingkat kenaikan peredaran uang dan yang paling tinggi dalam tahun 1965. Karena ekspor merana, impor pun harus dibatasi karena kekurangan devisa.

Sejak tahun 1961, Indonesia terus-menerus membiayai kekurangan neraca pembayarannya dari cadangan emas dan devisa. Pada akhir tahun 1965, untuk pertama kali dalam sejarah moneternya, Indonesia membelanjakan cadangan emas dan devisanya dengan saldo negatif sebesar US $3 juta,[31] sebagai akibat politik konfrontasi terus-menerus yang dilakukan.

Pada pelaksanaan ekonomi terpimpin itu juga, bank-bank negara tidak cukup hanya dikoordinasikan oleh suatu instansi, tetapi oleh Presiden Soekarno dianggap perlu mengintegrasikan semua bank negara ke dalam suatu organisasi bank sentral. Untuk itu, dikeluarkan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1965 tentang Pendirian Bank Tunggal Milik Negara. Pertimbangan pembentukannya didasarkan atas UUD RI dan doktrin-doktrin revolusi Indonesia. Tugas bank adalah menjalankan aktivitas-aktivitas bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum.

Sebagai langkah pertama untuk menuju Bank Tunggal Milik Negara itu pada tahap awal diadakan peleburan bank-bank negara seperti: Bank Koperasi dan Nelayan (BKTN), Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara, dan Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia. Sesudah terbentuknya Bank Indonesia, pada tahap awal dibentuk Bank Negara Indonesia.[32] Bank Negara Indonesia dibagi dalam beberapa unit, dan tiap-tiap unit menjalankan pekerjaannya menurut aturan-aturan pendiriannya.

Keadaan demikian itu berlangsung terus sampai bank tunggal itu dibubarkan dengan berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 1968. Yang mengatur kembali struktur dan tugas/peran bank sentral ialah Bank Indonesia. Satu hal lagi yang menarik dari pembentukan bank-bank ini ialah: bahwa pengintegrasian bank-bank negara ke dalam bank tunggal diatur

---

[31] Laporan Tahunan Bank Indonesia 1970/1971

[32] Penpres, No. 17/1965

melalui Penetapan Presiden, sedangkan bank-bank yang bersangkutan, sebelum diintegrasikan, didirikan atas dasar undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

2. Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri

Ekonomi Indonesia bersifat agraris, karena lebih kurang 80% dari penduduk hidup dari dan berkecimpung dalam bidang pertanian. Sebagian hasil pertanian atau perkebunan yang dihasilkan setiap tahunnya dijual dan diekspor ke luar negeri untuk memperoleh devisa atau valuta asing guna membeli atau mengimpor berbagai bahan baku dan barang konsumsi yang belum dapat dihasilkan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat mengimpor kebutuhan-kebutuhan dari luar negeri adalah mutlak, neraca perdagangan kita dengan luar negeri harus menunjukkan *terms of trade* yang menguntungkan. Apabila itu belum tercapai, terpaksalah dicari bantuan, atau juga disebut kredit luar negeri, supaya dapat membiayai impor. Hal ini membawa konsekuensi yang tidak diinginkan oleh pemerintah yang terpaksa membuat utang-utang di luar negeri.

Suatu negara pada umumnya tidak bersedia mengikat perjanjian perdagangan dengan negara lain apabila negara kreditor itu tidak melihat adanya prospek komersial yang menguntungkan bagi negaranya sendiri, dan apabila tidak dilakukan juga ikatan perdagangan yang pada tahap pertama tidak bersifat komersial dengan negara peminjam. Hal demikian itu hanya terjadi dengan syarat-syarat politik tertentu, maupun dengan tujuan-tujuan komersial jangka panjang, misalnya dengan harapan bahwa negara peminjam itu di kemudian hari akan menjadi negara pelanggan dari barang-barang yang diekspor dari negara itu. Akan tetapi, jika titik beratnya lebih bersifat politis, bantuan yang diberikan juga dengan harapan bahwa negara peminjam itu dapat dimasukkan dalam pengaruh politiknya. Apabila suatu negara terpaksa melakukan pinjaman di luar negeri, harus diusahakan sekuat tenaga, dan dalam waktu sesingkat-singkatnya utang-utang itu segera dilunasi agar negara itu tidak termasuk perangkap ekonomi atau politik dari negara peminjam.

Kredit-kredit luar negeri boleh diterima untuk pembangunan dan perluasan aparat produksi nasional sehingga dapat memperbesar volume komoditas ekspor guna membayar utang-utang luar negeri dan kepentingan lainnya.

Politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin di bidang perdagangan dan perkreditan memiliki kecenderungan untuk menerapkan ajaran *Marxisme* yang bersandar kepada prinsip realitas yang ada dalam masyarakat dan aktivitas politiknya disesuaikan dengan realitas yang

ditemukan. Di sinilah letak sumber pengertian dan latar belakang tindakan-tindakan pemerintahan Soekarno selama Demokrasi Terpimpin itu mengenai perkreditan luar negeri dilandasi dengan konsep meng-*arrangement* dan *readjustment* dengan negara-negara kreditor yang berlaku secara internasional. Namun, di satu pihak masyarakat Indonesia yang baru merasakan kemerdekaannya justru beranggapan bahwa utang luar negeri identik dengan penghasilan.

Politik ekonomi sangat rentan terhadap bahaya yang berupa *insolvensi* internasional dari suatu negara karena suatu negara dapat ditarik ke dalam suatu blok, fakta, atau lingkungan pengaruh. Salah satu peristiwa yang berkenaan dengan ini dapat dicermati pada peristiwa konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Demikian juga politik ekonomi berkenaan bantuan yang diterima RI dari RCC melalui perdagangan bilateral atas dasar *Government to Government (G to* G). Dalam perdagangan *G to G* ini, RRC memperoleh keuntungan politik di samping keuntungan ekonomi yang tidak sedikit.[33] Sebagai contoh dapat disebutkan di sini perdagangan karet. Ekspor karet Indonesia ke RRC diselenggarakan dengan *check price* yang sangat rendah, dan oleh RRC diatur sedemikian rupa sehingga karet itu jatuh di Singapura dengan harga lokal sampai berselisih 5–6 $ sen per lbs, dan setelah diolah di sana menjadi karet yang lebih baik mutunya barulah dikirim ke RRC atau Hong Kong sebagai bahan baku. Dari bahan baku ini dibuat ban mobil di RRC. Dalam hubungan ini, bahwa satu-satunya fasilitas untuk mengolah karet rakyat yang dikirim dari Indonesia itu pada masa konfrontasi hanya sampai pada batas perairan teritorial Singapura, di sana sudah siap kapal untuk menampung karet itu untuk dimasukkan ke Singapura, sedangkan kapal yang datang dari Indonesia itu meneruskan perjalanannya ke Hong Kong dengan muatan karet Malaya yang lebih baik mutunya.[34]

Transaksi karet yang menggambarkan transaksi-transaksi karet rakyat Indonesia dengan RRC pada hakikatnya adalah pembelian bahan baku yang murah oleh RRC, kemudian dijual kembali sebagai barang jadi yang mahal ke Indonesia yang disebut bantuan luar negeri. Dalam hal ini yang disebut bantuan pada hakikatnya adalah hasil keuntungan RRC dari pembelian karet rakyat Indonesia. Kebijakan perdagangan dan perkreditan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Demokrasi Terpimpin, terutama selama tiga tahun terakhir, telah membawa negara Republik Indonesia ke dalam lingkungan pengaruh politik RRC sampai titik kulminasinya dalam pemberontakan G-30-S/PKI.[35]

---

[33] Kejaksaan Agung, *Proses Peradilan Jusuf Muda Dalam*, 1976, hlm. 30

[34] *Ibid.*, hlm. 30

[35] *Ibid.*, hlm. 70

Dalam rangka usaha untuk membiayai proyek-proyek Presiden/ Mandataris MPRS, Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden No. 018 tahun 1964 dan Keputusan Presiden No. 360 tahun 1964,[36] yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai perhimpuan dan penggunaan "dana-dana revolusi". "Dana revolusi" tersebut pada mulanya diperoleh dari pungutan uang *call SPP* dan dari pungutan yang dikenakan pada pemberian izin impor dengan *deferred payment*.[37] Yang dimaksudkan dengan *deferred payment* ialah semacam impor yang dibayar dengan kredit (kredit berjangka 1–2 tahun) karena tidak cukup persediaan devisa.

Sekitar permulaan tahun 1964, Menteri Urusan Bank Sentral, Jusuf Muda Dalam, telah mengemukakan kepada Presiden, "bahwa penghimpunan dan pengeluaran dana itu akan lebih memperhebat laju inflasi yang mempunyai akibat tidak baik bagi keuangan negara". Namun, Presiden Soekarno tetap pada kehendaknya untuk menghimpun dana itu serta menyatakan bahwa ia tidak takut kepada inflasi. Pada waktu itu persediaan devisa menipis sekali. Jika pemerintah mengimpor atas dasar pembelian tunai, barang-barang yang masuk sangat sedikit, untuk menjaga kebutuhan dalam negeri diputuskan untuk mengimpor atas dasar kredit.

Akan tetapi, dalam praktik, barang-barang yang diimpor dengan menggunakan *deferred payment* khusus itu adalah barang-barang yang tidak membawa manfaat bagi rakyat banyak, bahkan sebaliknya merupakan barang-barang yang sudah dijadikan bahan spekulasi dalam perdagangan, misalnya *scooter* dan barang-barang luks lainnya. Jumlah izin impor dengan *deferred payment* khusus ini kira-kira US $270 juta.[37] Untuk setiap satu dolar Amerika bagi barang yang diimpor dengan *deferred payment* khusus ini importir harus membayar antara Rp250,00 sampai Rp1.000,00 (uang lama) untuk *dana revolusi* selain harus membayar dengan valuta asing dalam jumlah tertentu. Pada umumnya yang mendapat izin *deferred payment* ini adalah importir yang disponsori oleh Presiden Soekarno sendiri.[38]

Akibat kebijakan kredit luar negeri ini utang-utang negara semakin meningkat, sebaliknya ekspor semakin menurun.

Utang luar negeri dibayar dengan kredit baru atau melalui penangguhan pembayaran. RI tidak mampu lagi membayar tagihan-tagihan luar negeri, yang mengakibatkan adanya *insolvensi* internasional. Oleh karena itu, sering terjadi bahwa beberapa negara menyetop impornya ke Indonesia karena utang-utang tidak dibayar.[39] Di dalam negeri, kondisi ini

---

[36] Kejaksaan Agung, *Proses Peradilan Jusuf Muda Dalam*, 1976, hlm. 70

[37] *Ibid.*, hlm. 78–84

[38] A.H. Nasution, *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran*, I, 1966, hlm. 149

[39] Kejaksaan Agung, *Proses Peradilan Jusuf Muda Dalam*, 1976, hlm. 108

sangat mengganggu, menghambat, atau mengacaukan produksi, distribusi, dan perdagangan serta menimbulkan kegelisahan di kalangan penduduk.

"Dana revolusi" itu digunakan untuk membiayai proyek-proyek Mandataris MPRS dan proyek-proyek yang direstui oleh Presiden Soekarno. Menteri Bank Sentral, Jusuf Muda Dalam, diberikan kuasa untuk mengelola "dana revolusi" itu. Salah satu tindakan yang dilakukan olehnya ialah memberikan kredit dari dana itu kepada orang lain atau perusahaan-perusahaan dengan rente tertentu agar jumlah dana bertambah terus.[40] Kepada perusahaan-perusahaan yang bukan sektor produksi pun diberi kredit khusus dari "dana revolusi" yang pemberiannya menyimpang dari pemberian kredit biasa yang melalui syarat-syarat perbankan, sampai kira-kira mencapai jumlah Rp338 miliar (uang lama). Prosedur penggalangan pengelolaan dana revolusi yang kurang tepat dapat berakibat mengacaukan ekonomi dan peredaran uang.Tidaklah mengherankan jika inflasi itu meningkat sampai sedemikian tingginya karena pemerintah sama sekali tidak mengindahkan jumlah uang yang beredar. Kekacauan semakin hebat lagi sejak dikeluarkan keputusan Menteri Keuangan RI No. I/M 1961 tanggal 6 Januari 1961, yang menentukan, bahwa neraca Bank Indonesia tidak lagi boleh diumumkan. Sementara itu, dengan keputusan Perdana Menteri No. 85/PM/1964 tertanggal 4 Mei 1964, Bank Indonesia diizinkan untuk mengadakan penyertaan modal dalam perusahaan-perusahaan. Dikeluarkannya keputusan tersebut berdampak luas terhadap masyarakat, misalnya:

1. Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai pengatur peredaran uang.
2. Neraca Bank Indonesia tidak dapat diketahui oleh rakyat lagi.
3. Neraca Bank Indonesia yang tidak diumumkan itu mendorong usaha-usaha spekulasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan.

C. Pembebasan Irian Barat

1. Bidang Diplomasi

Salah satu program Kabinet Kerja adalah pembebasan Irian Barat, yang pada hakikatnya merupakan tuntutan nasional secara mutlak. Pasal 1 persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB 1949), mengenai "penyerahan kedaulatan atas Indonesia yang berbunyi: "Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat

---

[40] *Ibid.*, hlm. 93–95, 273

dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang berdaulat.[41]

Akan tetapi, KMB tidak berhasil menyelesaikan salah satu masalah, yaitu penyerahan kekuasaan oleh kerajaan Belanda atas Irian Barat kepada Indonesia. Kemudian dicapai suatu suatu kompromi: Pasal 2 ayat *f Piagam Penyerahan Kedaulatan,* berbunyi:

> "Mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak atau timbul diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka *status quo* Irian (Nieuw-Guinea) tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedaulatan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan kerajaan Nederland".[42]

Dalam piagam penyerahan kedaulatan terdapat pasal yang mengatur hubungan RIS dan kerajaan Nederland, yang dilakukan dalam bentuk konferensi Uni secara bergilir. Pada konferensi Uni yang pertama di Jakarta pada 25 Maret 1950, pemerintah RIS membawa persoalan Irian Barat sebagai pembahasan pokok. Pihak Belanda enggan membahas masalah status Irian Barat. Hasil konferensi menteri-menteri Uni sepakat membentuk komisi gabungan untuk mengumpulkan fakta. Komisi gabungan inilah yang melakukan peninjauan ke Irian Barat.

Usaha penyelesaian secara bilateral telah mengalami kegagalan. Pemerintah Indonesia sejak September 1954 mengajukan masalah Irian ke dalam acara sidang Majelis Umum PBB. Pada bulan September 1955, Menteri Luar Negeri Sunario dalam Sidang Majelis Umum PBB menegaskan sikap Indonesia, mengenai tuntutan prinsip dekolonisasi Irian Barat. Sebaliknya, Spitz, wakil Belanda menolak tuntutan Indonesia. Dua bulan sesudah sidang umum (23 November 1954), pemerintah Indonesia mengajukan resolusi masalah Irian Barat kepada Panitia Politik PBB yang isinya "bahwa Irian Barat merupakan bagian negara nasional Republik Indonesia, dan Indonesia mencari jalan penyelesaian secara damai dan minta agar diadakan kembali perundingan dengan anjuran dan pengawasan PBB". Namun, pada sidang Panitia Politik PBB tanggal 30 November 1954, resolusi Indonesia diterima dengan perbandingan suara 34 setuju, 14 menolak, dan 10 abstain. Dalam Sidang Majelis Umum 10 Desember 1954, terjadi perubahan perbandingan suara, tetapi perjuangan diplomasi di forum PBB mengalami kegagalan. Peristiwa ini menyadarkan Indonesia untuk melakukan perjuangan

---

41 Notosutardjo, *Dokumen-dokumen Konferensi Meja Bundar,* 1956, hlm. 68

42 *Ibid.*

diplomasi aktif dan efektif. Pada bulan Desember 1954, Indonesia menyelenggarakan Konferensi Perdana Menteri Mancanegara yaitu (Indonesia, India, Pakistan, Ceylon, (Sri Lanka), Birma, dan Myanmar) yang dilanjutkan dengan Konferensi Asia Afrika (18–24 April 1955). Masalah utama yang dibahas adalah masalah dekolonisasi dan kemerdekaan bagi negara-negara yang setengah jajahan dan terjajah. Langkah diplomasi ini sangat efektif untuk menggalang kekuatan dalam rangka perjuangan diplomasi. Hasilnya nyata menjelang Sidang Majelis Umum PBB X bulan September 1955, Menteri Luar Negeri RI Anak Agung Gede Agung mengusulkan agar masalah Irian Barat dicantumkan dalam agenda sidang Dewan Keamanan. Usul ini didukung oleh negara-negara Asia-Afrika. Pihak Belanda pun melunak, dan setuju membuka kembali perundingan bilateral, dan pada 2 Desember 1955 dicapai *Joint Statement*, antara lain mengadakan pembicaraan mengenai Irian Barat dan kedua belah pihak tetap berpegang teguh pada pendirian masing-masing. Sementara perundingan berlangsung, Sidang Majelis Umum PBB menerima resolusi yang mengharapkan masalah Irian Barat dapat diselesaikan kedua belah pihak secara damai. Perundingan bilateral Desember 1956 ini mengalami *deadlock*. Melalui nota politiknya delegasi Belanda mengatakan bahwa masalah Irian Barat tetap merupakan sengketa, hal ini membuat pemerintah Indonesia mulai meragukan peran PBB, karena PBB bukanlah tempat yang terbaik untuk memecahkan masalah. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencari "jalan lain" meskipun berakibat terjadinya ketegangan di Asia Tenggara.

Dalam Sidang Majelis Umum tahun 1957 Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dr. Subandrio menyatakan dalam pidatonya, ketika ikut dalam perdebatan bahwa Indonesia akan menempuh "jalan lain" yang tidak sampai kepada perang (*short of war*) untuk menyelesaikan sengketa Irian dengan Belanda, apabila sidang ke-12 tidak juga berhasil menyetujui resolusi tentang Irian.[43]

Pidato Menteri Luar Negeri itu, yang menyatakan tekad pemerintah Indonesia menempuh "jalan lain" untuk menyelesaikan Irian, tidak dapat mengubah pendirian negara-negara pendukung Belanda, sehingga resolusi yang disponsori 21 negara termasuk Indonesia tidak dapat dimenangkan karena ternyata bahwa 2/3 jumlah suara tidak tercapai. Negara-negara Barat masih teguh mendukung posisi Belanda, malahan sikap itu bertambah kuat lagi dengan adanya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Dengan demikian, pihak kerajaan Belanda tetap tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, bahkan menolak membicarakannya.

---

[43] Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, 1974, hlm. 560

Karena jalan damai yang telah ditempuh selama lebih kurang satu dasawarsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Dalam rangka itulah pada tahun 1957 dilancarkan aksi-aksi pembebasan Irian di seluruh tanah air, yang dimulai dengan pengambilalihan perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Untuk mencegah anarki dan menampung keinginan rakyat, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution selaku Penguasa Perang Pusat memutuskan untuk mengambil alih semua perusahaan milik Belanda dan kemudian menyerahkannya kepada pemerintah.[44] Hubungan yang tegang antara Indonesia dengan Belanda itu mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1960. Pada waktu itu Republik Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah kerajaan Belanda.

Dalam pidatonya di depan Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960, yang berjudul "Membangun Dunia Kembali", Presiden Soekarno menegaskan lagi masalah Irian yang dirangkaikan dengan masalah imperialisme.

> "Kami telah berusaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan penuh harapan. Kami telah berusaha untuk mengadakan perundingan-perundingan bilateral .... Harapan lenyap, kesabaran hilang; bahkan toleransi pun mencapai batasnya. Semuanya itu kini telah habis dan Belanda tidak memberikan alternatif lainnya, kecuali memperkeras sikap kami."[45]

Dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1961 kembali masalah Irian Barat diperdebatkan. Sekretaris Jenderal PBB, U Thant menganjurkan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker untuk mengajukan suatu usul penyelesaian masalah Irian kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Pokok usul Bunker secara singkat adalah: "agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan itu dilakukan melalui PBB dalam waktu dua tahun".[46]

Pemerintah RI pada prinsipnya dapat menyetujui usul tersebut dengan catatan agar waktu dua tahun itu diperpendek. Pemerintah Kerajaan Belanda mempunyai pendapat sebaliknya: "Pihak kerajaan Belanda akan mau melepaskan Irian dengan membentuk dahulu perwakilan di bawah PBB untuk kemudian membentuk Negara Papua".[47] Sikap kerajaan Belanda

---

[44] *Antara*, 14 Desember 1957

[45] Pidato Presiden Soekarno, "*Membangun Dunia Kembali*", 1963, hlm. 183–184

[46] Departemen Luar Negeri, *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri RI*, 1971, hlm. 97

[47] Roeslan Abdulgani, *25 Tahun Indonesia PBB*, 1971, hlm. 17

itu disambut oleh Indonesia dengan membulatkan tekad untuk mengadakan perjuangan bersahabat. Presiden Soekarno memformulasikannya sebagai berikut: "Politik konfrontasi disertai dengan uluran tangan. Palu godam disertai dengan ajakan bersahabat".[48]

2. Bidang Militer

Dalam rangka persiapan suatu kekuatan militer untuk merebut Irian, pemerintah Republik Indonesia mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada mulanya diharapkan pembelian di negara-negara Barat terutama Amerika Serikat, tidak berhasil. Kemudian usaha pembelian senjata itu dialihkan ke negara-negara blok komunis terutama Uni Sovyet. Pada bulan Desember 1960, suatu misi di bawah pimpinan Menteri Keamanan Nasional/Kasad Jenderal Nasution bertolak ke Moskow dan berhasil mengadakan suatu perjanjian pembelian senjata.[49] Misi tersebut disusul dengan misi kedua tahun 1961 dan ketiga (untuk penyempurnaan dan tambahan), dan kemudian pada tahun 1961 disusul pula dengan suatu misi Menteri Keamanan Nasional/Kasad mengunjungi beberapa negara; India, Pakistan, Muang Thai, Filipina, Australia, Selandia Baru, Jerman, Prancis, dan Inggris untuk menjajaki dan mendapatkan kesan mengenai sikap negara-negara itu, seandainya terjadi perang antara Indonesia dengan Belanda. Kesimpulan dari Menteri Keamanan Nasional/Kasad dari hasil penjajakan itu adalah: bahwa negara-negara tersebut tidak ada yang terikat kepada Belanda untuk bidang bantuan militer, meskipun negara-negara tersebut menekankan supaya perang dihindari dan bahkan ada yang mendukung posisi Belanda.[50]

Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian tidak diserahkan secara damai kepada Indonesia, Indonesia akan berusaha membebaskannya dengan kekuatan militer. Menghadapi persiapan-persiapan militer Indonesia pihak Belanda mengajukan protes kepada PBB dengan menuduh Indonesia melakukan agresi. Selanjutnya Belanda memperkuat kedudukannya di Irian dengan mendatangkan bantuan dan mengirimkan kapal perangnya ke perairan Irian di antaranya kapal induk *Karel Doorman*.[51]

Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut *Tri Komando Rakyat (Trikora)* yang isinya sebagai berikut.

---

48 Presiden Soekarno, *Tahun Kemenangan*, 1962

49 Howard Palfrey Jones, *The Possible Dream*, 1971, hlm. 189–192

50 A.H. Nasution, *Kekaryaan ABRI*, 1971, hlm. 390

51 Masashi Nishihara, *The Japanese and Soekarno's Indonesia, Tokyo–Jakarta Relations*, 1951–1966, 1983, hlm. 160

1. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda Kolonial.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Dengan diucapkannya Trikora mulailah konfrontasi total terhadap Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden/Pangti ABRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan No. 1 Tahun 1962 untuk membentuk Komando MandaIa Pembebasan Irian Barat.

Pada mulanya Belanda mencemooh persiapan-persiapan Komando Mandala tersebut. Mereka mengira bahwa pasukan Indonesia tidak mungkin dapat masuk ke wilayah Irian. Ternyata operasi-operasi infiltrasi pasukan Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Teminabuan. Jatuhnya Teminabuan ke tangan pasukan Indonesia memaksa Belanda bersedia untuk duduk pada meja perundingan guna menyelesaikan sengketa Irian. Dunia luar yang semula mendukung posisi Belanda di forum PBB mulai menyadari bahwa Indonesia tidak main-main dengan tuntutannya.

Sementara itu, pemerintah kerajaan Belanda sedikit banyak mendapat tekanan dari Amerika Serikat agar kembali berunding untuk mencegah terseretnya Uni Sovyet dan Amerika Serikat ke dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik Barat Daya di mana tiap-tiap pihak memberi bantuan kepada pihak yang bersengketa, yaitu Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Dengan demikian, pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York, yang terkenal dengan *Perjanjian New York*.[52]

Perjanjian itu berdasarkan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Duta Besar Ellsworth Bunker dari Amerika Serikat, yang oleh Sekretaris Jenderal PBB diminta untuk menjadi penengah.[53] Soal yang terpenting dalam perjanjian itu, ialah mengenai penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak kerajaan Belanda kepada PBB. Untuk kepentingan tersebut dibentuklah *United Nations Temporary Excecutive Authority* (UNTEA) yang pada gilirannya akan menyerahkan pemerintahan sementara PBB kepada Republik Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Indonesia menerima kewajiban untuk mengadakan *Penentuan Pendapat Rakyat* (*Pepera*) di Irian sebelum akhir tahun 1969, dengan ketentuan bahwa, kedua belah pihak,

---

[52] Departemen Luar Negeri, *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri RI*, 1971, hlm. 99; Soeripto, *Dokumen Irian Barat*, 1962, hlm. 27–35

[53] Ganis Harsono, *Recollections of an Indonesian Diplomat in the Soekarno Era*, hlm. 238–24

Indonesia dan Belanda, akan menerima hasilnya.[54] Sementara itu, pemulihan kembali hubungan diplomatik antara kedua negara dilakukan pada tahun 1963 itu juga, dengan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta.

3. Operasi-Operasi Militer Pembebasan Irian Barat

Pada tanggal 17 Agustus 1960 hubungan diplomatik dengan Belanda diputuskan. Untuk lebih meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (Trikora), yang diucapkan oleh Komando Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, menjadi strategi umum.

Rapat Dewan Pertahanan Nasional bersama organisasi Gabungan Kepala Staf serta Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat memutuskan:

a. membentuk provinsi Irian Barat gaya baru dengan putra Irian sebagai gubernurnya;
b. membentuk Komando Mandala yang langsung memimpin kesatuan-kesatuan ABRI dalam tugas merebut Irian Barat.[55]

Pembentukan Provinsi Irian Barat gaya baru dikukuhkan melalui Penetapan Presiden No. 1/1962 dengan ibu kota Kota Baru (sekarang Jayapura).[56] Sesuai dengan Trikora itu, kesiapsiagaan di semua bidang diperhebat. Organisasi Gabungan Kepala Staf diubah dan pimpinan Angkatan Bersenjata langsung di bawah Panglima Tertinggi.[57] Angkatan Udara RI pada tanggal 10 Januari 1962 meresmikan pembentukan Komando Regional Udara (Korud) I–IV.[58]

Selaku Panglima Mandala ditunjuk Brigadier Jenderal Soeharto (mantan Presiden Republik Indonesia) dan Komando Mandala bermarkas di Makassar. Pada tanggal 13 Januari 1962, Brigadier Jenderal Soeharto dilantik menjadi Panglima Mandala dan dinaikkan pangkatnya menjadi mayor jenderal. Di samping menjadi *Panglima Mandala*, Mayjen Soeharto juga merangkap sebagai Deputi Wilayah untuk wilayah Indonesia bagian Timur.[59] Pada bulan Januari itu juga ditetapkan susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat sebagai berikut:

---

54 *Act of free choice* atas dasar musyawarah, selesai dilaksanakan bulan Agustus 1969 dengan hasil: bahwa penduduk Irian memilih untuk tetap dalam lingkungan negara Republik Indonesia

55 *Merdeka*, 2 Januari 1962

56 *Ibid.*, 5 Januari 1962

57 *Merdeka*, 5 Januari 1962

58 *Ibid.*, 10 Januari 1962

59 *Ibid.*, 14 Januari 1962

Panglima Besar Komando Tertinggi
Pembebasan Irian Barat : Presiden/Panglima Tertinggi Soekarno
Wakil Panglima Besar : Jenderal A.H. Nasution
. Kepala Staf : Mayor Jenderal Ahmad Yani

Susunan Komando Mandala adalah:

Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto
Wakil Panglima I : Kolonel Laut Subono
Wakil Panglima II : Letkol Udara Leo Wattimena
Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir.

Sementara itu, pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa tragis, yakni Pertempuran Laut Aru. Dalam pertempuran yang tidak seimbang antara MTB ALRI melawan kapal perusak dan fregat Belanda, gugurlah Deputi KSAL Komodor (Laksamana Pertama) Yos Sudarso.

Sesuai dengan perkembangan situasi, Trikora diperjelas dengan Instruksi Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No. 1 kepada Panglima Mandala yang isinya:

1. merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer, dengan tujuan mengembalikan wilayah Provinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan negara RI;
2. mengembangkan situasi di wilayah provinsi Irian Barat;
   a. sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang diplomasi;
   b. supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di wilayah Provinsi Irian Barat dapat secara *de facto* diciptakan daerah-daerah bebas/ didudukkan unsur kekuasaan/pemerintahan daerah RI.[60]

Untuk melaksanakan instruksi itu, Panglima Mandala menyusun strategi yang dikenal dengan "Strategi Panglima Mandala". Untuk mencapai strategi itu, setelah memperhitungkan semua aspek dan kemampuan angkatan bersenjata pada umumnya, dan berdasarkan telaahan Gabungan Kepala Staf, pelaksanaan rencana tugas disusun sebagai berikut.

a. Sampai Akhir 1962

Fase jalan infiltrasi, yaitu memasukkan 10 kompi sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas *de facto,* yang cukup ulet, sehingga tidak dapat dihancurkan secara bagian demi bagian oleh musuh. Malah kesatuan-kesatuan ini harus dapat mendudukkan dan mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat.

[60] Achmad Tahir, "Soal Mandala dan Irian Barat", *Karja Wira Djati,* no. 9/1963, hlm. 360

b. Awal 1963

Mulai fase eksploitasi dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting.

c. Awal 1964

Fase konsolidasi dengan mendudukkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.[61]

Sampai pada triwulan ketiga tahun 1962, terdapat perkembangan baru dalam bidang diplomasi sehingga jadwal penyelesaian tugas tersebut tidak dapat diikuti dan harus dipercepat enam bulan. Infiltrasi melalui laut sebagian telah tercium oleh musuh dan mengalami hambatan, dari manusia maupun oleh ombak yang besar. Pada bulan April 1962 dilakukan infiltrasi dari udara. Dengan cara demikian, sampai tanggal 15 Agustus telah diinfiltrasikan 10 kompi. Sementara itu, telah dipersiapkan pula operasi penentuan yang bernama Operasi *Jaya Wijaya* dengan *target date* pada awal bulan Agustus 1962. Tahap infiltrasi merupakan peristiwa yang paling dramatis di dalam kehidupan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, dan yang paling bersejarah di dalam riwayat perkembangan angkatan bersenjata kita. Dalam rangka operasi tersebut, pada tanggal 18 Maret dan 20 Maret 1962 didaratkan empat peleton sukarelawan di pulau-pulau Gag, Waigeo, dan Sansapor. Pada tanggal 23 Maret 1962 didaratkan sukarelawan-sukarelawan di Sungai Jera. Pada tanggal 24 April dilakukan Operasi *Banteng Ketaton* dengan menerjunkan Tim Garuda Merah di sekitar Fakfak dan *Garuda Putih* di sekitar Kaimana. Operasi *Serigala* mendaratkan pasukannya di sekitar Sorong dan di sekitar Teminabuan. Selanjutnya pasukan Detasemen Pelopor Brigade Mobil Polisi pada tanggal 15 Mei didaratkan di sekitar Fakfak. Operasi *Naga* menerjunkan 214 orang. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 1962 dilancarkan Operasi *Jatayu* yang bertugas menerjunkan pasukan-pasukan untuk memperkuat kesatuan yang telah terlebih dahulu didaratkan, yang terdiri atas Pasukan Elang, Pasukan Gagak, dan Pasukan Alap-alap. Pasukan Elang diterjunkan di Sorong, Pasukan Gagak di sekitar Kaimana, dan Pasukan Alap-alap di sekitar Merauke.[62]

Melalui laut, pada tanggal 7 Agustus 1962 didaratkan kesatuan dari Detasemen Pelopor 1232 Brimob. Pada tanggal 9 dan 12 Agustus menyusul Pasukan Raiders dari Kodam XV. Sasaran pendaratan adalah Pulau Misool.

---

[61] *Ibid.*, hlm. 365

[62] Saleh As'ad Djamhari, *Ikhtisar Sedjarah Perdjuangan ABRI* (1945–Sekarang), 1979, hlm. 103

Gambar 4.2 Presiden Soekarno dan Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, Jenderal A.H. Nasution, dan Panglima Mandala, Mayor Jenderal Soeharto (Sumber: *Dokumen Istimewa*)

Operasi *Jaya Wijaya* direncanakan untuk melaksanakan serangan terbuka merebut daerah Irian Barat. Operasi itu dibagi atas: Operasi *Jaya Wijaya I* untuk merebut keunggulan di udara dan di laut; Operasi *Jaya Wijaya II* bertujuan merebut Biak; Operasi *Jaya Wijaya III* bertujuan merebut Hollandia (Jayapura) dari laut; Operasi *Jaya Wijaya IV* bertujuan merebut Hollandia dari udara. Untuk melaksanakan operasi tersebut, Angkatan Laut Mandala di bawah Kolonel Laut Sudomo membentuk Angkatan Tugas Amfibi 17, yang terdiri atas tujuh gugus tugas, sedangkan Angkatan Udara membentuk enam kesatuan tempur baru.

Akan tetapi, sebelum Operasi *Jaya Wijaya* ini dilaksanakan, datang perintah dari Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, untuk menghentikan tembak-menembak pada tanggal 18 Agustus 1962 pukul 09.31 waktu Irian Barat. Perintah Presiden itu disusuli dengan Surat Perintah Panglima Mandala yang ditujukan kepada seluruh pasukan dalam jajaran Mandala yang berada di daerah Irian Barat. Isi Perintah Panglima Mandala itu adalah: agar semua pasukan menaati perintah penghentian tembak-menembak dan mengadakan kontak dengan perwira-perwira peninjau PBB yang disertai oleh Brigjen Achmad Wiranatakusumah, Kolonel Udara I Dewanto, dan Letnan Kolonel Laut Nizam Zachman.

Surat Perintah Presiden tersebut dikeluarkan karena telah ditanda-tangani dalam persetujuan antara pemerintah RI dan kerajaan Belanda mengenai Irian Barat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Agustus 1962. Berhasilnya Tri Komando Rakyat itu adalah berkat kerja sama bidang militer dan diplomasi. Diplomasi tanpa dukungan kekuatan militer akan sia-sia, sebagaimana telah dialami sebelum masa Trikora.

Operasi terakhir yang dilaksanakan adalah Operasi *Wisnu Murti,* yakni operasi menghadapi penyerahan Irian Barat kepada RI pada tanggal 1 Mei 1963. Pada tanggal 1 Mei 1963 tugas Komando Mandala telah selesai dan pada hari itu juga Komando Mandala dinyatakan secara resmi dibubarkan.

D. Politik Luar Negeri Poros dan Konfrontasi

1. Landasan Politik Luar Negeri Demokrasi Terpimpin

Semenjak ditetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959, terdapat serangkaian dokumen-dokumen yang mendasari politik luar negeri Republik Indonesia, yakni sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945.
2) Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" dan yang terkenal sebagai "Manifesto Politik Republik Indonesia". Dengan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960, tanggal 29 Januari 1960, yang diperkuat pula dengan Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/I/1960, tanggal 19 November 1960, manifesto tersebut telah dijadikan "Garis-Garis Besar Haluan Negara".
3) Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama "Jalannya Revolusi Kita" yang dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 9 November 1960 telah dijadikan "Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia".
4) Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Majelis Umum PBB yang berjudul *"To Build the World Anew"* (Membangun Dunia Kembali), yang dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 19 November 1960 ditetapkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia dan dengan Keputusan DPA No. 2/Kpts/Sd/61, tanggal 19 Januari 1961, dinyatakan sebagai "Garis-Garis Besar Politik Luar Negeri RI", dan sebagai "Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia di bidang politik luar negeri RI".

Dalam waktu satu tahun saja telah dilahirkan tiga teori revolusi, yang bukan saja telah mencakup tugas-tugas nasional, bahkan juga pandangan-pandangan tentang cara perjuangan internasional seharusnya diarahkan. Kebijakan politik luar negeri yang bertolak dari teori-teori revolusi itu telah menyeret diplomasi Indonesia ke hadapan panggung politik dunia, tanpa memerhatikan prioritas kepentingan dan sumber-sumber kekuatan nasional. Di sini pula berlaku teori bahwa "politik adalah panglima". Jika suatu teori tidak didukung oleh faktor-faktor objektif, pada hakikatnya teori itu hanya merupakan utopia belaka, yang jika dijadikan landasan suatu kebijakan, akan mengaburkan cara-cara pelaksanaannya, sehingga membuka pintu lebar bagi setiap kemungkinan pengingkaran dan penyelewengan.[63]

Dasar politik luar negeri RI termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang berbunyi sebagai berikut:

> "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

---

[63] Departemen Luar Negeri, *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri RI, 1945–1970,* 1971, hlm. 258. Bagian ini sangat bertumpu pada buku ini

Kerangka Ketiga Tujuan Revolusi yang disebutkan di dalam Manifesto Politik RI yang menyangkut politik luar negeri berbunyi sebagai berikut:

> "Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara-negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar kerja sama membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju perdamaian dunia yang sempurna".

Di bidang politik luar negeri Manipol menyatakan sebagai tujuan jangka pendek "melanjutkan perjuangan anti-imperialisme ditambah dengan mempertahankan kepribadian Indonesia di tengah-tengah tarikan-tarikan ke kanan dan ke kiri, yang sekarang sedang berlaku kepada kita dalam pergolakan dunia menuju kepada satu imbangan baru. Dalam jangka panjang, di bidang yang menyangkut luar negeri, Revolusi Indonesia bertujuan untuk "melenyapkan imperialisme di mana-mana, dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi".

Diplomasi sangat erat hubungannya dengan unsur-unsur tentang "cara" melaksanakannya. Menurut Manipol, cara itu tidak bisa lain harus "tidak mengenal kompromi", "harus radikal" dan "revolusioner". Cara yang semacam itu tidak dapat digolongkan sebagai suatu cara untuk menjalankan ofensif diplomatik, oleh karena dalam kenyataannya sifat-sifat yang radikal menjurus kepada *"hostile attitude"* terhadap hampir setiap permasalahan. Sebagai konsekuensinya, posisi Indonesia lambat laun menjadi semakin terasing *isolated.* Dengan "Manipol" itu Indonesia bermaksud untuk menghimpun kawan yang hendak dikonfrontasikan terhadap "musuh revolusi" yaitu kapitalisme dan kolonialisme. Kenyataannya sahabat-sahabat Indonesia sendiri bersikap *"reserved"* terhadap garis politik Indonesia. Bahaya dari suatu politik luar negeri yang militan bukan sekadar *"for the sake of militancy"*, melainkan politik yang demikian itu mudah terjebak oleh siasat dan desersi. Mereka yang disangka "kawan", tetapi sebetulnya adalah "lawan".

Dewan Pertimbangan Agung, dalam Keputusannya No. 1/Kpts/Sd/61, tanggal 19 Januari 1961, tentang Perincian Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia, menetapkan penegasan tentang cara-cara melaksanakan Manipol di bidang politik luar negeri dengan mengambil bagian dari pidato "Djalannya Revolusi Kita", 1960, yang berbunyi sebagai berikut:

> "Kita tidak netral, kita tidak penonton kosong daripada kejadian-kejadian dunia ini, kita tidak tanpa prinsip ... kita tidak tanpa pendirian. Kita menjalankan politik bebas itu tidak sekadar "cuci tangan", tidak sekadar defensif, tidak sekadar apologetis. Kita aktif, kita berprinsip, kita berpendirian! Prinsip kita ialah terang

Pancasila, pendirian kita ialah aktif menuju kepada persahabatan segala bangsa, aktif menuju kepada lenyapnya *exploitation de l'homme par l'homme*, aktif menentang dan menghantam segala macam imperialisme dan kolonialisme di mana pun ia berada. Pendirian kita yang "bebas dan aktif" itu, secara aktif pula setapak demi setapak harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri, agar supaya tidak berat sebelah ke Barat atau ke Timur".

Dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang aktif menuju kepada persahabatan dengan segala bangsa sesuai dengan "Kerangka Ketiga Tujuan Revolusi" dalam "Manipol" itu, Menteri Luar Negeri Subandrio menyatakan, terdapat dua aspek dalam politik luar negeri Indonesia, yaitu:

1) menjalankan politik persahabatan dengan dunia luar secara konvensional, seperti yang dilakukan oleh semua negara;
2) berjuang menyelesaikan Revolusi Indonesia yang merupakan kenyataan dan harus diterima oleh dunia luar.

Suatu negara mungkin secara konvensional bersahabat dengan Indonesia, tetapi menentang revolusinya. Oleh karena itu, Indonesia harus berhati-hati dalam membedakan hal ini. Jika suatu negara memberikan bantuan material atau bantuan teknik dan lain-lain kepada Indonesia, hal itu belum berarti bahwa negara itu 100% sahabat Indonesia.[64]

Kenyataan ini memberi petunjuk bahwa diplomasi yang *inkonvensional* dapat tidak disertai landasan *"peaceful means"* dan *"peaceful minds"*. Forum *non-governmental* seperti *Persatuan Wartawan Asia-Afrika* (PWAA), Konferensi Internasional Anti Pangkalan Asing (KIAPMA), dan lain-lain menjadi salah satu forum kegiatan diplomatik yang sangat memengaruhi perkembangan politik dalam negeri. Organisasi-organisasi semacam ini di dalam negeri perkembangannya didominasi oleh golongan komunis.

Menurut perincian Dewan Pertimbangan Agung dalam Keputusan No. 2/Kpts/Sd/I/61, tanggal 19 Januari 1961, Garis-garis Dasar Politik Luar Negeri RI sebagaimana yang termuat dalam pidato "Membangun Dunia Kembali", adalah:

1) Dasar : UUD 1945;
2) Sifat : Bebas dan aktif, anti-imperialisme, dan kolonialisme;
3) Tujuan :
   a) mengabdi pada perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia yang penuh;
   b) mengabdi pada perjuangan untuk kemerdekaan nasional dari seluruh bangsa-bangsa di dunia;
   c) mengabdi pada perjuangan untuk membela perdamaian dunia.

[64] Slamet Sugijardjo, *et al.*, *Tri Komando Rakyat Pembebasan Irian Barat*, 1995, hlm. 282

Pidato "Membangun Dunia Kembali", yang diucapkan oleh Presiden Soekarno depan forum PBB, merupakan salah satu usaha agar Indonesia dipandang sebagai unsur yang diperhitungkan di Asia dan dunia internasional. Pada kesempatan itu Indonesia "menjual" konsepsi-konsepsinya untuk pemecahan berbagai masalah internasional dan menguatkan posisi "kepeloporan" Indonesia.

Usul Indonesia dalam "Membangun Dunia Kembali" agar Pancasila diterima dan dicantumkan di dalam Piagam PBB, agar Markas Besar PBB dipindahkan ke tempat yang bebas dari suasana Perang Dingin, agar pembagian kursi dalam Dewan Keamanan dan badan-badan serta lembaga-lembaga lainnya diubah, dan agar sekretaris di bawah pimpinan Sekretaris Jenderal ditinjau kembali tidak mendapatkan sambutan yang selayaknya dari para anggota PBB. Namun, Indonesia telah berani menyuarakan perubahan.

"Manipol", "Djarek", dan "Membangun Dunia Kembali" merupakan embrio kelahiran suatu doktrin politik baru, yaitu bahwa dunia tidak terbagi dalam Blok Barat dan Blok Timur, tidak pula dalam tiga blok di mana Asia-Afrika merupakan blok yang ketiga, akan tetapi terbagi menjadi dua blok, yaitu *New Emerging Forces* (*Nefos*) dan *Old Established Forces* (*Oldefos*). Dengan doktrin politik baru yang bersumber kepada konsep dan hukum-hukum revolusi Indonesia harus melakukan konfrontasi terus-menerus dengan menggalang kekuatan *Nefos* untuk melawan *Oldefos* atau Neo-Kolonialisme Emperialisme (Nekolim).

2. Indonesia dalam Gerakan Nonblok

Politik bebas dan aktif Indonesia bukanlah suatu politik netralisme dan dalam hubungannya dengan *non-alignment*. Indonesia berpendirian bahwa politik *non-alignment* juga bukan politik netralisme. Karena hakikat *non-alignment* itu adalah aktif, diplomasi Indonesia senantiasa diarahkan untuk menempatkan Indonesia pada posisi subjek dan bukan sebagai objek dalam pergolakan politik internasional.

Di tengah-tengah tarikan ideologis dan militer yang bergerak menuju bipolarisasi kekuatan dunia dan di tengah-tengah terjadinya mutasi-mutasi besar di bidang politik dan teknologi, secara konsepsional politik *non-alignment* sudah dianut oleh banyak negara, jauh sebelum Presiden Nasser dan Presiden Tito untuk pertama kalinya mengemukakan gagasan untuk mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara *non-aligned*.

Sejumlah besar dokumen dari tahun 1950-an, baik dalam bentuk komunike bersama maupun pernyataan-pernyataan politik lainnya, menunjukkan garis politik Indonesia tentang *non-alignment* adalah:

a. tanpa mengikatkan diri pada Pakta-Pakta Militer yang ada, berusaha menghapuskan atau setidak-tidaknya mengurangi ketegangan-ketegangan internasional yang lahir karena pertentangan dua blok dunia;
b. menjauhkan diri dan meninggalkan pola penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan untuk sebaliknya mengutamakan saluran perundingan-perundingan sebagai alat;
c. menghapuskan penjajahan, sehingga pergaulan antara bangsa dan antarnegara didasarkan pada prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai di mana penghormatan terhadap integritas wilayah, kemerdekaan, kedaulatan, dan kebebasan memilih sistem sosial, merupakan kaidah-kaidah yang harus dijunjung tinggi.

Tiga hal tersebut merupakan tonggak-tonggak yang memberikan arah pada kemudi diplomasi Indonesia, tidak saja pada waktu *non-alignment* telah menjadi istilah politik, tetapi juga sejak berdirinya Negara Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sikap ini terlihat kembali dalam usaha Indonesia untuk mengurangi pengaruh "perang dingin" atas pergolakan-pergolakan politik di dalam negeri, mengusahakan peredaan ketegangan situasi dunia melalui forum PBB dan yang spektakuler sekali adalah sukses diplomasi Indonesia menghimpun negara-negara Asia-Afrika pada Konferensi di Bandung pada tahun 1955. Pendirian Indonesia mengenai *non-alignment* yang dikemukakan antara tahun 1961–1965 dapat dilihat pada catatan yang diuraikan di bawah ini.

Dipilihnya tanggal 1 sampai 6 September 1961 sebagai waktu diselenggarakannya KTT *Non-aligned I*, ialah dengan maksud agar dapat disinkronisasi dengan permulaan Sidang Umum PBB XVI sehingga negara-negara *non-aligned* dapat memperjuangkan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama keputusan-keputusan KTT tersebut di Sidang Majelis Umum PBB.

KTT Beograd dihadiri oleh 25 kepala-kepala negara atau kepala-kepala pemerintahan, yaitu Afganistan, Aljazair, Burma, Kamboja, Ceylon, Kongo, Kuba, Cyprus, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Tunisia, Republik Persatuan Arab (RPA), Yaman, dan Yugoslavia. Tiga negara hadir sebagai peninjau, yaitu Bolivia, Brazilia, dan Equador.

Berdasarkan geografi, peserta dari Asia berjumlah 12 negara, Afrika 11, Eropa 1; dan Amerika Latin 1 ditambah dengan 3 peninjau.

Konferensi yang diselenggarakan bertujuan untuk memberikan sumbangan pada perdamaian dunia itu telah menerima *"messages"* dari Presiden Kennedy, Perdana Menteri Kruschev, dan Kanselir Adenauer.

Bertambah buruknya situasi hubungan antara Washington dan Moskow dan masih bercokolnya kolonialisme di beberapa bagian dunia, menjadi acara pokok konferensi. Pada kesempatan itu Presiden Soekarno mengemukakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya bukanlah sengketa ideologis, melainkan akibat dari *clash* antara kekuatan-kekuatan orde lama dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit. Dalam *clash,* imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme mengabdi kepada kepentingan kekuatan lama.

Setiap bangsa harus mengembangkan ideologi nasionalnya, hidup berdampingan secara damai dengan bangsa-bangsa lain dan tidak melakukan campur tangan dalam kekacauan ideologis intern bangsa lain.

KTT Beograd menghasilkan tiga dokumen, sebagai berikut:

1) pernyataan tentang bahaya perang dan *appeal* untuk perdamaian;
2) deklarasi mengenai prinsip-prinsip *non-alignment,* bersama dengan 27 ketentuan persetujuan tentang pemecahan masalah-masalah dunia waktu itu;
3) surat bersama kepada Presiden Kennedy dan PM Kruschev yang berbunyi: *"Urging on the Great Powers concerned that negotiation should be resumed and pursued so that the danger of war might be removed from the world mankind adopts ways of peace."*

Hasil-hasil Konferensi Beograd itu bersumber pada *Policy Statement* para ketua delegasi, yang pada umumnya menunjuk pada adanya bahaya perang; perlu adanya perundingan antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet untuk membina perdamaian; perlu adanya larangan tentang *nuclear test* dan adanya *disarmament;* perlu dilaksanakan prinsip *co-existency;* perlu adanya perubahan struktur pimpinan Sekretariat PBB, perlu lekas hapusnya kolonialisme dan imperialisme, serta perlu adanya kerja sama di bidang ekonomi.

Konferensi mengutus Presiden Soekarno dan Presiden Medibo Keita untuk menyampaikan surat kepada Presiden Kennedy serta PM Nehru dan Presiden Nkrumah kepada PM Kruschev.

Hasil-hasil konferensi itu menunjukkan peran mediator yang hendak dijalankan oleh negara-negara *non-aligned,* yang langsung atau tidak langsung hendak mengadakan tekanan pada negara-negara besar agar mengadakan pendekatan untuk mengatasi persengketaan-persengketaan internasional melalui saluran-saluran perundingan.

Pandangan yang sama–setidak-tidaknya paralel–terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu pengelompokan politik sangat diperlukan. Dalam hubungan ini Konferensi Beograd telah menghasilkan suatu analisis tentang hubungan internasional waktu itu, yang ditandai oleh berlakunya masa, peralihan dari suatu orde dunia yang lama yang bersendikan sistem penjajahan dan kekuasaan, kepada suatu orde dunia yang baru yang didasarkan atas kerja sama antara bangsa-bangsa, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan.

Sebagai tindak lanjut *Konferensi Beograd,* pada bulan Juli 1962 di Kairo diadakan *Konferensi Ekonomi Negara-Negara Berkembang*. Konferensi berhasil merumuskan suatu program ekonomi bagi negara-negara Nonblok dan merupakan permulaan dari suatu kegiatan teratur dari negara-negara yang sedang berkembang dalam mencari penyelesaian persoalan-persoalan perekonomian dan pembangunan mereka.

Usaha-usaha yang sudah dimulai di Kairo itu kemudian dilanjutkan lagi secara konkret di dalam *United Nations Conference for Trade and* Development di Jenewa, pada tahun 1964.

Gagasan menyelenggarakan KTT *Non-Aligned II* dicetuskan di dalam *Joint Statement* Presiden Nasser dan PM Ny. Bandaranaike tanggal 14 Oktober 1963 di Kairo. *Statement* itu kemudian disusul oleh konsultasi antara Duta Besar Ceylon dan Duta Besar Yugoslavia, akan mensponsori KTT *Non-Aligned II,* dengan didahului oleh suatu *Consultative Meeting* tingkat duta besar di Kolombo pada tanggaI 23 Maret 1964.

Consultative Meeting di Kolombo pada tanggal 23 Maret 1964 itu berhasil menentukan negara-negara yang akan diundang. *Draft* agenda dan KTT itu didahului oleh suatu pertemuan para menteri luar negeri negara-negara peserta di Kairo.

KTT *Non-Aligned* II di Kairo itu telah dihadiri oleh 47 negara peserta, yaitu Afghanistan, Aljazair, Angola (*Government-in exile*), Burma, Burundi, Kamboja, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Ceylon, Chad, Kongo (Brazaville), Kuba, Cyprus, Dahomey, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iran, Jordania, Kenya, Kuwait, Laos, Lebanon, Libya, Malawi, Mali, Mauritania, Maroko, Nepal, Nigeria, Northern Rhodesia/Zambia, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syria, Togo, Tunisia, Uganda, Republik Persatuan Arab, Republik Persatuan Tanganyika, dan Zanzibar, Yaman, dan Yugoslavia serta sepuluh negara peninjau yaitu Argentina, Bolivia, Brazilia, Cile, Finlandia, Jamaika, Meksiko, Trindidad, Tobago, Uruguay, dan Venezuela.

Peninjau-peninjau lainnya ialah Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika dan Liga Arab.

Gambar 4.3 Presiden Soekarno pada KTT Nonblok di Beograd (Sumber: *Dokumen Istimewa*)

Gambar 4.4 Presiden Soekarno pada KTT Nonblok di Cairo (Sumber: *Dokumen Istimewa*)

Jika dibandingkan dengan Konferensi *Non-Aligned I* di Beograd tahun 1961, Konferensi Kairo itu telah berlangsung dalam suasana dunia yang berlainan. Yang pertama diadakan dalam suasana "perang dingin", sehingga merupakan suatu forum untuk mendekatkan Washington dan Moskow dan keputusannya merupakan *appeal* kepada kedua besar itu untuk berusaha mempertahankan perdamaian dunia yang tergantung pada mereka.

Sewaktu Konferensi Kairo diadakan, antara Moskow dan Washington tidak terdapat lagi ketegangan-ketegangan seperti pada tahun 1961 dan dunia tidak lagi berada dalam suasana "perang dingin".

Meskipun demikian, keadaan ini tidak berarti bahwa tugas konferensi telah menjadi lebih mudah. Kenyataan menunjukkan adanya situasi pertentangan di dalam tubuh Asia dan Afrika sendiri, yaitu sebagai berikut.

1) Pertentangan India-Pakistan dan India-RRC memuncak sehingga India berkeberatan jika Pakistan dan RRC diundang.
2) Konfrontasi Indonesia-Malaysia sehingga Indonesia menolak diundangnya Malaysia.
3) Beberapa negara Afrika menentang hadirnya PM Tshombe dari Kongo sehingga ketika pesawat PM Tshombe hendak mendarat di Kairo, pemerintah RPA terpaksa melarangnya.

Sewaktu Tshombe untuk kedua kalinya mencoba datang lagi dengan pesawat penumpang biasa dari Athena, ia diizinkan turun, tetapi dibawa ke suatu istana di Kairo dan tidak ke tempat konferensi.

Suasana *detente* yang sudah mulai melandasi hubungan antara Washington dan Moskow dan di Benua Eropa, serta suasana intern yang tidak menguntungkan dalam tubuh Asia-Afrika sendiri telah sangat memengaruhi *policy* negara-negara peserta konferensi.

Dalam konferensi itu Indonesia mengumandangkan garis militan dalam rangka *strategi nasakomisasi* di tingkat internasional, hal ini sejalan dengan kebijakan politik di dalam negeri waktu itu. Akan tetapi, negara-negara yang hadir lebih bersedia menerima gagasan "hidup berdampingan secara damai" daripada konsep konfrontasi antara *The New Emerging Forces* dengan *The Old Established Forces* yang dikemukakan oleh Indonesia itu.

Pengutukan terhadap masih bercokolnya kolonialisme, imperialisme, dan neo-kolonialisme perumusannya disesuaikan dengan situasi umum dunia pada waktu itu karena ketegangan umum di dunia tidak lagi terasa akut. Ketegangan-ketegangan di berbagai wilayah di dunia, seperti di Vietnam, Laos, India, RRC, Palestina, Cyprus, Kuba, dan Kongo dianalisis sebab-sebabnya. Dikonstatisi bahwa sebab-sebab ketegangan-ketegangan itu

adalah kolonialisme/imperialisme dan *"economic inequalities"*. Hal itu tercermin pula di dalam keputusan-keputusan konferensi.

Pada akhir konferensi, dikeluarkan deklarasi yang berkenaan dengan hal-hal berikut:

1) aksi bersama untuk pembebasan negara-negara yang masih terjajah serta penghapusan kolonialisme, neo-kolonialisme, dan imperialisme;
2) menghormati hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan mengutuk penggunaan kekerasan terhadap pelaksanaan hak itu;
3) diskriminasi rasial dan politik *apartheid;*
4) hidup berdampingan secara damai dan kodifikasi prinsip-prinsip oleh PBB;
5) menghormati kedaulatan negara-negara dan keutuhan wilayah mereka; masalah bangsa-bangsa yang terpecah-pecah;
6) penyelesaian persengketaan-persengketaan tanpa ancaman atau penggunaan kekerasan sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB;
7) perlucutan senjata secara umum dan total; penggunaan tenaga atom untuk tujuan damai, larangan segala percobaan senjata nuklir, penentuan daerah bebas nuklir, pencegahan penyebaran senjata nuklir, dan penghapusan semua senjata nuklir;
8) pakta-pakta militer, pasukan-pasukan, dan pangkalan-pangkalan asing;
9) PBB, perannya di dalam soal-soal internasional, pelaksanaan resolusi-resolusinya, dan perubahan piagamnya;
10) perkembangan dan kerja sama ekonomi;
11) kerja sama kebudayaan, ilmiah dan pendidikan, serta konsolidasi organisasi-organisasi internasional dan regional yang bekerja untuk tujuan itu.

Selain deklarasi itu, telah diterima pula dua resolusi khusus, sebagai berikut:

1) Resolusi Khusus I tentang keputusan untuk mengoordinasi dan menyatukan usaha-usaha negara-negara *non-aligned* dengan usaha-usaha organisasi Kesatuan Afrika dalam menjamin kepentingan-kepentingan bersama dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan kebudayaan, serta di dalam kerja sama internasional;
2) Resolusi Khusus II tentang penghargaan kepada Kepala Negara RPA Gamal Abdel Nasser, yang telah mengorganisasi konferensi itu secara baik.

Mengenai peran Indonesia yang dalam Konferensi Kairo itu, Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio menyatakan di depan televisi RI pada tanggal 24 Oktober 1964:

> "... Kita sebetulnya boleh membanggakan diri bahwa peran Indonesia sangat penting karena Indonesia dari semula sudah mempunyai pengertian yang positif tentang pengertian *non-aligned,* ialah bahwa *non-aligned* itu tidak diartikan bahwa kita tidak melihat ideologi A atau ideologi B, akan tetapi *non-aligned;* bahwa kita dalam keadaan sekarang ini mementingkan, menitikberatkan kepada *security,* keamanan dari bangsa-bangsa yang sedang berjuang, berjuang untuk kemajuan, berjuang untuk kemerdekaan. Itu arti sekarang dan *non-aligned* ...."

Keterangan Menteri Luar Negeri tersebut dapat dipakai sebagai ukuran untuk menentukan pentingnya peran Indonesia dalam Konferensi Kairo itu, dan Indonesia mempunyai pemahaman sendiri tentang arti politik *non-aligned*.

Beberapa kejadian politik dan langkah-langkah diplomatik menunjukkan pandangan-pandangan Indonesia tentang pentingnya Konferensi A-A II *vis-a-vis* Konferensi *Non-Aligned II*, serta gagasan tentang *Conference of the New Emerging Forces* (*Conefo*).

Pada bulan Maret 1964, ketika di Kairo diadakan "*Consultative Meeting*" antara Dubes Ceylon, Dubes Yugoslavia, dan Wakil Pemerintah RPA untuk merintis jalan ke arah pelaksanaan KTT *Non-Aligned II*, pada bulan April 1964 di Jakarta diadakan pertemuan persiapan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari RRC, Pakistan, dan Indonesia untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika II.

Ke dalam pertemuan tersebut diputuskan agar Konferensi Asia Afrika II itu diadakan sebelum berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara *Non-Aligned II* di Kairo.

Karena terdapat perbedaan kepentingan yang menimbulkan perselisihan di antara beberapa negara Asia sendiri, rencana Konferensi Asia Afrika II diundurkan dan tidak akan diselenggarakan sebelum bulan Maret 1965. Juga mengenai calon-calon peserta tidak terdapat kebulatan kata. Uni Sovyet yang berkepentingan untuk membendung pengaruh RRC menghendaki agar ia ikut diundang. Indonesia menentang usaha Malaysia untuk dapat menjadi negara peserta karena negara itu oleh Indonesia dianggap sebagai *proyek neo-kolonialisme* yang "harus diganyang".

Konferensi Asia Afrika II yang direncanakan akan diselenggarakan di Aljazair pada tahun 1965 ternyata gagal karena pada tanggal 19 Juni 1965 –sepuluh hari sebelum dimulainya Konferensi–di Aljazair terjadi penggulingan kekuasaan Presiden Ben Bella oleh Kolonel Houari Boumedienne. Untuk menampung kegiatan-kegiatan diplomatik yang sudah

lama dipersiapkan, diselenggarakan semacam pertemuan puncak mini di Kairo yang dihadiri oleh Indonesia, RRC, Pakistan, dan RPA.

Memang suatu kenyataan bahwa landasan *non-alignment* sangat erat hubungannya dengan Dasa Sila Bandung (1955). Baik dalam KTT Beograd 1961, maupun KTT Kairo 1964, prinsip-prinsip itu tidak pernah ditinggalkan.

Meskipun falsafah politik yang mendasari Dasa Sila Bandung dan *non-alignment policy* saling mengisi, tetapi dilihat dari fungsinya sebagai forum atau alat politik bagi negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara yang baru merdeka, forum nonblok ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan suatu konferensi yang pesertanya terbatas pada letak geografi negara-negara yang bersangkutan.

"Teori-teori revolusi" yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno bahwa "Rakyat Indonesia sedang melaksanakan ofensif revolusioner manipolis melawan Nekolim" dan "Nasakom sebagai perasan Pancasila" ditingkatkan pelaksanaannya di bidang internasional dalam bentuk "konfrontasi terus-menerus terhadap Nekolim", melalui *samenbundeling van alle internationale revolutionaire krachten"* yang disebut juga *Nasakom internasional,* pada dasarnya mengarah pada Konferensi *New Emerging Forces.*

Karena Konferensi Tingkat Tinggi Nonblok di Kairo tidak dapat memenuhi tuntutan garis militan Indonesia itu dan usaha-usaha yang intensif untuk menyelenggarakan Konferensi A-A II mengalami kegagalan, sasaran diplomasi diarahkan kepada:

a. Usaha menarik negara-negara Afrika dan Timur Tengah sebanyak mungkin untuk menyokong rencana Indonesia mengadakan suatu *Conference of the New Emerging Forces* (*Conefo*).

   Dalam hubungan ini pemerintah mengirimkan misi *Safari Berdikari* ke empat negara-negara Timur Tengah dan ke delapan negara Afrika yang dipimpin Menteri Luar Negeri, Subandrio.

   Akan tetapi, dukungan politik negara-negara tersebut terhadap gagasan untuk mengkonfrontasikan *Nefos* terhadap *Oldefos* itu sangat tipis.

b. Pembentukan Poros Jakarta, Pnom Penh, Hanoi, Peking, dan Pyong-yang, sebagai poros anti-imperialis dan anti-kolonialis.

Politik poros tersebut mengakibatkan menjadi sempitnya ruang gerak Indonesia, terutama ruang gerak diplomasinya di forum internasional dan penyimpangan secara prinsipiil dari dasar-dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif menuju perdamaian dunia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategi politik RRC.

3. Konfrontasi terhadap Malaysia

Pertarungan hegemoni dan ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur di Asia Tenggara menjadi latar belakang lahirnya gagasan pembentukan negara Federasi Malaysia. Pada tanggal 27 Mei 1961, di Singapura, Tengku Abdul Rachman Putu, Perdana Menteri Negara Federasi Malaya, melontarkan gagasan pembentukan negara baru di hadapan *Foreign Journalist Association.* Negara baru itu meliputi Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah. Gagasan ini kemudian ia konsultasikan dengan Perdana Menteri Inggris Harold McMillan pada Oktober 1961. Pada bulan Juli 1961 diadakan persiapan pembentukan Federasi Indonesia yang baru menyelesaikan masalah Irian Barat (Mei 1962), yang mencurigai bahwa gagasan ini datang dari Inggris.[65]

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia menjadi terganggu, terjadi perang kata-kata antara kedua belah pihak. Indonesia berpendirian bahwa gagasan Federasi Malaysia merupakan proyek Neokolonialis Inggris, yang membahayakan revolusi Indonesia, satu pangkalan militer asing yang ditujukan antara lain ke Indonesia untuk menentang Indonesia dan juga menentang *New Emerging Forces* di Asia Tenggara.

Sebagai tindak lanjut persiapan Federasi Malaysia, Inggris membentuk suatu komisi yang dipimpin oleh Lord Cabbold yang beranggota empat orang di antaranya Sir Antony Abell, Sir David Natherson, Dato Wong Po Nee, dan Enche Gazali Shafie. Hasil penjajakan itu dimuat dalam *Report of the Commission of the Inquiry North Borneo*, yang menyatakan sepertiga penduduk setuju tanpa syarat, sepertiga setuju dengan syarat, dan sepertiga yang lain terbelah dua. Sebagian ingin tetap di bawah Inggris dan sebagian ingin merdeka sebelum bergabung dalam federasi. Singapura menunjukkan sikap ragu-ragu karena motif ekonomi dan imbangan jumlah penduduk. Brunei menolak dengan motivasi politis dan ekonomis. Motivasi politis dan psikologis yang mengganjal ialah merasa tidak mungkin Sultan Brunei dapat diangkat sebagai kepala Negara Federasi (Yang Dipertuan Agong). Motivasi ekonomisnya Brunei wajib menyerahkan M $40.000.000 setiap tahun kepada pemerintah federasi.[66] Dalam suasana konfrontatif itu, Filipina mengambil prakarsa untuk meredakan ketegangan dengan membawa Indonesia dan Malaya ke meja perundingan. Indonesia dan Malaya menerima prakarsa itu dan hadir dalam Konferensi Tingkat Wakil-Wakil Menteri Luar Negeri yang diadakan di Manila dari tanggal 1 sampai 17 April 1963.

---

[65] Hidayat Mukmin, *op. cit*, 1991, hlm. 88

[66] Departemen Penerangan RI, *Gelora Konfrontasi Mengganjang "Malaysia"*, 1965, hlm. 66

Konferensi Tingkat Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Malaya dan Filipina itu membicarakan masalah rencana pembentukan Federasi Malaysia serta gagasan pembentukan satu konfederasi longgar ketiga negara itu guna mempererat kerja sama antara pada berbagai bidang. Pertemuan itu merupakan persiapan untuk konferensi tingkat Menteri Luar Negeri yang akan diadakan dalam bulan Juni 1963. Pada akhir bulan Mei 1963 Presiden RI bertolak ke Tokyo.

Dalam perjalanan ke Tokyo, Presiden RI terlebih dahulu singgah di Manila untuk bertukar pikiran dengan Presiden Filipina mengenai masalah-masalah aktual di Asia Tenggara.

Pada waktu Presiden Soekarno sedang berada di Tokyo, Perdana Menteri Malaya Tengku Abdul Rachman datang menemuinya dan mengadakan pembicaraan tidak resmi. Selama dua hari, dari tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 1963, Perdana Menteri Abdul Rachman seusai pertemuan itu menyatakan kesediaannya untuk berbicara dengan Presiden RI dan Presiden Filipina baik mengenai masalah-masalah umum yang menyangkut daerah Asia Tenggara pada umumnya, maupun tentang rencana pembentukan Federasi Malaysia.

Setelah kedua pertemuan terpisah itu, ketegangan mereda dan terbukalah jalan untuk mengadakan Konferensi Tingkat Menteri Tiga Negara di Manila dari tanggal 7 sampai 11 Juni 1963, yang kemudian disusul dengan pertemuan puncak antara ketiga kepala pemerintahan.

Komunike bersama yang dikeluarkan setelah *Konferensi Menteri-Menteri Luar Negeri* Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Manila tanggal 1 sampai 11 Juni 1963, antara lain menyatakan bahwa ketiga Menteri Luar Negeri telah berhasil mencapai pengertian bersama dan persetujuan penuh tentang cara memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama yang timbul sebagai akibat rencana pembentukan Federasi Malaysia.

Dari pertemuan berturut-turut tersebut, yaitu pertemuan wakil-wakil Menteri Luar Negeri di Manila. Soekarno-Abdul Rachman di Tokyo, dan Menteri-Menteri Luar Negeri di Manila terkesan seolah-olah semua pihak yang berkepentingan atas rencana pembentukan Federasi Malaysia telah menunjukkan kemauan baik untuk memecahkan masalah yang menjadi sumber sengketa itu.

Sementara itu, pada tanggal 9 Juli 1963, Perdana Menteri Tengku Abdul Rachman di London menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia, yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1963. Tindakan Perdana Menteri Malaya itu dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai satu tindakan unilateral yang beriktikad buruk dan menyimpang

dari pengertian bersama yang telah dicapai dalam pertemuan tiga Menteri Luar Negeri di Manila dari tanggal 1 sampai 11 Juni 1963 itu.

Meskipun penandatanganan dokumen pembentukan Federasi Malaysia di London oleh Perdana Menteri Malaya pada tanggal 9 Juli 1963 itu dianggap oleh pemerintah RI sebagai penyimpangan dari kesepakatan bersama para Menteri Luar Negeri RI, Malaya, dan Filipina dalam pertemuan mereka tanggal 7 sampai 11 Juni 1963 tetapi mengganggu kelancaran jalan yang menuju pertemuan puncak, tetapi persiapan-persiapan tetap dilakukan. Akhirnya, pertemuan tersebut terselenggara di Manila, dari tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963, dengan dihadiri oleh kepala-kepala pemerintahan ketiga negara. Pertemuan puncak menghasilkan tiga dokumen, yaitu *Deklarasi Manila, Persetujuan Manila,* dan *Komunike Bersama.*

Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintahan setuju untuk meminta Sekretaris Jenderal PBB melakukan pendekatan yang segar terhadap persoalan itu, agar diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Paragraf 10 Persetujuan Manila antara lain menyatakan bahwa Indonesia dan Filipina akan menyambut baik pembentukan Malaysia, bilamana dukungan rakyat di daerah Borneo diselidiki oleh otoritas yang bebas dan tidak memihak, yaitu Sekretaris Jenderal PBB atau wakilnya. Paragraf 11 Persetujuan Manila itu selanjutnya menyatakan penghargaan Federasi Malaya atas sikap Indonesia dan Filipina dan kesanggupannya untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan pemerintah Inggris dan pemerintah-pemerintah daerah-daerah Borneo dalam rangka meminta Sekretaris Jenderal PBB atau wakilnya melakukan penyelidikan tentang kehendak rakyat daerah-daerah itu.

Hasil-hasil pertemuan puncak itu memberikan kesan bahwa ketiga kepala pemerintah berusaha mengadakan penyelesaian secara damai dan sebaik-baiknya mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi sumber sengketa.

Di samping masalah Malaysia, ketiga kepala pemerintah juga telah setuju, untuk dalam rangka mempererat kerja sama antara ketiga negara, membentuk Maphilindo dan mengadakan konsultasi-konsultasi berkala dan teratur pada segala tingkat, dalam forum Musyawarah Maphilindo.

Hasil deklarasi itu menunjukkan bahwa ketiga kepala pemerintah berniat untuk menggunakan musyawarah Maphilindo itu sebagai forum guna memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kepentingan ketiga negara, dengan jalan "diplomasi musyawarah".

Berdasarkan Pasal 4 Komunike Bersama, dan Pasal 10 dan Pasal 11 Persetujuan Manila, Sekretaris Jenderal PBB menunjuk delapan anggota Sekretariat untuk menjadi anggota dalam misi PBB di bawah pimpinan Lawrence Michelmore. Tim peninjau Indonesia dan Filipina terlambat mengikuti tim PBB tersebut dalam peninjauannya ke Sabah dan Serawak, oleh karena pemerintah Inggris mempersulit masuknya peninjau-peninjau kedua negara itu ke daerah-daerah yang bersangkutan. Akibatnya, para peninjau itu tidak dapat menyaksikan jalannya seluruh penyelidikan, tetapi hanya sepertiga saja dari pekerjaan pengawasan misi PBB di kedua daerah itu. Sekretaris Jenderal PBB sendiri menyesalkan tindakan pemerintah Inggris itu.[67]

Berbeda dengan rencana semula, proklamasi Federasi Malaysia baru dilaksanakan pada tanggal 16 September 1963, sedangkan menurut rencana tanggal 31 Agustus 1963. Namun, proklamasi itu tetap dilakukan sebelum misi PBB itu menyampaikan laporan peninjauannya. Oleh karena itu, pemerintah RI menganggap proklamasi itu sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran atas Komunike Bersama Manila, yang secara jelas menyatakan, bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Serawak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan.

Pemerintah RI menganggap proklamasi Federasi Malaysia sebagai perwujudan *"act of bad faith"* dari Tengku Abdul Rachman. Aksi-aksi demonstrasi menentang terjadi di Jakarta yang dibalas pula oleh aksi demonstrasi besar terhadap Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur sehingga pada hari itu juga, 17 September 1963, hubungan diplomatik antara kedua negara putus.

Pemerintah RI pada tanggal 21 September 1963 memutuskan pula hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah, dan pada akhir tahun 1963 menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan "Neo-Kolonialisme Inggris". *"Clash-clash"* bersenjata terjadi antara sukarelawan-sukarelawan Indonesia yang menyokong pejuang-pejuang kemerdekaan Kalimantan Utara yang dipimpin oleh Azahari dengan tentara Inggris. Konflik di Asia Tenggara ini menarik perhatian beberapa negara dan menghendaki agar pertikaian itu dapat diselesaikan secara damai. Presiden Amerika Serikat Johnson, mengirimkan Jaksa Agung Robert Kennedy untuk menemui ketiga kepala

---

[67] Amanat Komando Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi pada apel besar sukarelawan pengganjangan Malaysia pada tanggal 3 Mei 1964" dalam *Gelora Konfrontasi Mengganjang Malaysia,* 1964, hlm 368–388

pemerintah negara-negara Maphilindo dan meratakan jalan ke arah perundingan antara mereka. Perdana Menteri Jepang Ikeda dan Menteri Luar Negeri Thailand Thanat Khoman, berusaha untuk melakukan mediasi.

Mengingat forum musyarawarah Maphilindo dibentuk sebagai wadah di mana ketiga negara anggotanya dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, pemerintah RI berusaha memanfaatkan forum itu untuk menyelesaikan masalah Malaysia. Untuk itu, Presiden Soekarno dari tanggal 7 sampai 11 Januari 1964 berkunjung ke Filipina.

Di dalam pernyataan bersama Musyawarah Maphilindo Pertama antara Indonesia dan Filipina, dirumuskan suatu doktrin mengenai pemecahan Asia oleh orang-orang Asia sendiri, yang kemudian terkenal sebagai *Doktrin Soekarno-Macapagal.* Namun, masalah pokok yang menjadi sebab sengketa dan memburuknya hubungan antara ketiga negara itu tetap tidak terpecahkan, disebabkan tidak hadirnya Kepala Pemerintahan anggota Maphilindo yang lain, yaitu Perdana Menteri Malaya, yang pada waktu itu telah menjadi Malaysia.

Usaha seterusnya untuk memecahkan masalah sengketa Malaysia dilakukan dalam pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina dan Malaysia di Bangkok dari tanggal 5 sampai 10 Februari 1964, sebagai kelanjutan dari gencatan senjata yang diumumkan pada tanggal 25 Januari 1964 di sepanjang perbatasan Kalimantan-Indonesia dan Kalimantan Utara. Pertemuan itu tidak mencapai hasil karena perbedaan tafsiran tentang gencatan senjata itu, yaitu sebagai berikut:

1) Indonesia menghendaki agar gencatan senjata hanya berarti penghentian tembak-menembak.
2) Malaysia menghendaki agar penghentian tembak-menembak disusul dengan penarikan "sukarelawan-sukarelawan Indonesia" dari Kalimantan Utara.

Pertemuan hanya menghasilkan Komunike Bersama yang menyatakan akan mengadakan pembicaraan-pembicaraan lagi pada tingkat Menteri Luar Negeri menjelang diadakannya pertemuan puncak yang kedua.

Pertemuan Bangkok II diadakan antara Menteri-Menteri Luar Negeri ketiga negara dari tanggal 3 sampai 6 Maret 1964. Pertemuan kedua ini juga tidak menghasilkan sesuatu yang positif karena perbedaan tafsiran antara Indonesia dan Malaysia tentang soal gencatan senjata itu.

Di tengah-tengah kemacetan diplomasi itu, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) dihadapan apel besar sukarelawan.

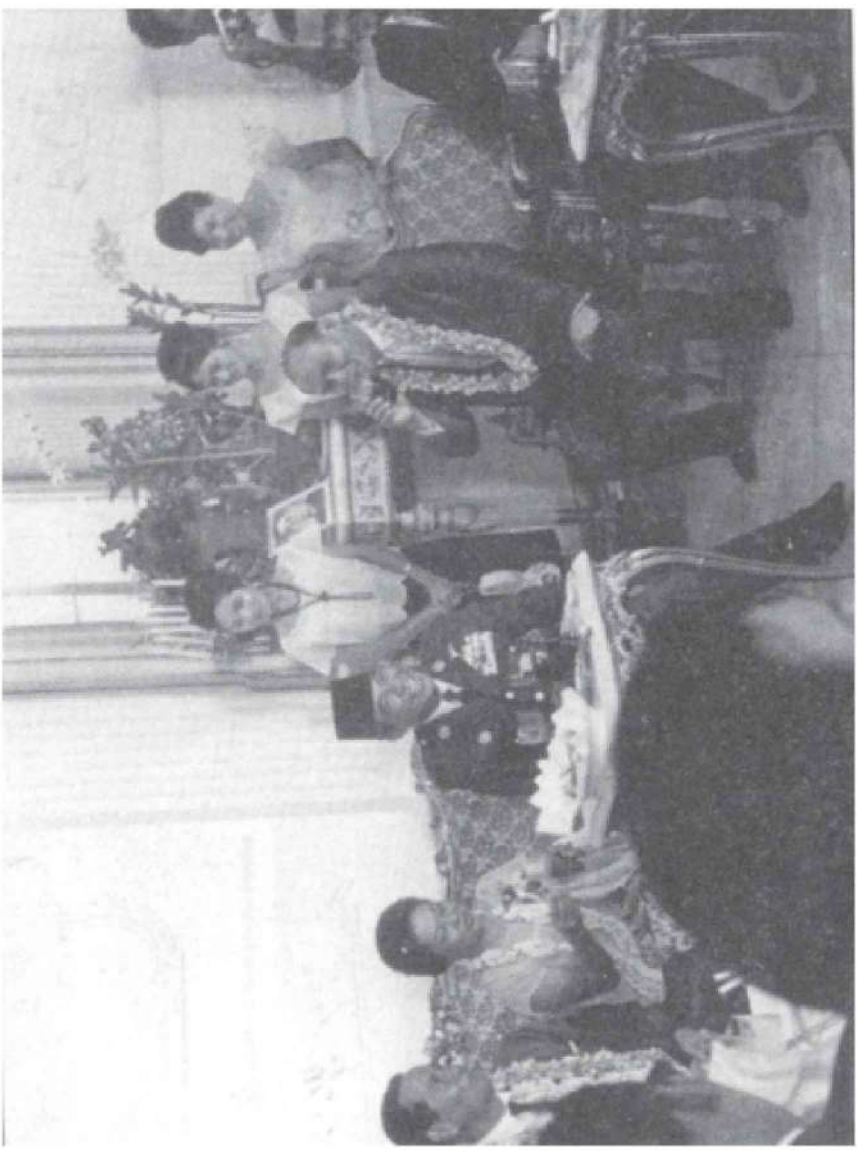

Gambar 4.5 Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal
(Sumber: *Dokumen Istimewa*)

"Kami perintahkan kepada dua puluh satu juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri: perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk membubarkan Negara Boneka Malaysia."[68]

Konfrontasi menentang pembentukan Federasi Malaysia memasuki tingkatan perang. Pada tanggal 16 Mei 1964, Presiden mengeluarkan surat keputusan membentuk Komando Siaga (Koga), yaitu suatu komando gabungan yang tugas pokoknya menyelenggarakan operasi-operasi militer dalam mempertahankan wilayah Indonesia dan membantu perjuangan rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah, serta memimpin dan mempergunakan baik segala pasukan bersenjata maupun segala macam barisan sukarelawan. Presiden menunjuk Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Udara Omar Dhani sebagai Panglima Koga dengan dua orang wakil panglima, Laksamana Muda Laut Muljadi dan Brigjen Achmad Wiranatakusumah dan seorang Kepala Staf Komodor Udara L.W.J. Wattimena. Pada tingkat daerah, pada 14 September 1964 dibentuk Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (Pepelrada). Memasuki tahun 1965, Komando Siaga (Koga) disempurnakan menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga). Panglima Kolaga membawahi dua Komando Mandala (Kola) yang terdiri atas Komando Mandala I, di bawah Panglima Mayjen A.J. Mokoginta. Daerah kekuasaan Kola I meliputi Komando Daerah Militer (Kodam) I, II, III, IV (Sumatra) Komando Daerah Maritim (Kodamar) I, II, dan sebagian dari Kodamar III (perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung), Komando Regional Udara I, dan Komando Daerah Angkatan Kepolisian (Komdak) I, II, III, IV, V, dan VI (Sumatra).

Komando Mandala II, panglimanya Brigjen M. Panggabean dengan daerah kekuasaanya Kodam IX, X, dan XII (Kalimantan). Komando Stasiun Angkatan Laut (Kosial) dan Komando Daerah Maritim (Kodamar) III dan V, serta Komdak XI, XII, XIII, dan XIV. Pangkolaga membentuk satuan-satuan Tugas Tempur, yang kemudian menjadi Komando Tempur (Kopur), yaitu Komando Tempur Rencong, Komando Tempur Tjakra, dan Komando Tempur Mandau. Selain kekuatan militer reguler, dibentuk pula Brigade Sukarelawan Bantuan Tempur (Sukwan Banpur) yang dipimpin oleh Kolonel Sabirin Muchtar.

Keputusan pemerintah Indonesia untuk melakukan konfrontasi secara total, dipicu oleh perbedaan penafsiran mengenai masalah penarikan mundur sukarelawan Indonesia dari Kalimantan Utara.

---

[68] Kusumah Hadiningrat, *Sedjarah Operasi-Operasi Gabungan Dalam Rangka Dwikora*, 1971, hlm. 43–45

Karena terdapat perbedaan tafsiran mengenai masalah penarikan mundur sukarelawan-sukarelawan Indonesia dari Kalimantan Utara, diputuskan untuk menunda pertemuan puncak sampai tanggal 15 atau 19 Juni 1964. Walaupun dalam pertemuan puncak itu belum ada kepastian tentang kehadiran Perdana Menteri Malaysia dan tentang tanggal pembukaannya, Presiden RI pada tanggal 8 Juni 1964 telah berangkat juga menuju Manila dan selanjutnya ke Tokyo. Dalam suasana yang masih diliputi oleh ketidakpastian itu, kepergian Presiden RI itu dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai suatu bukti dari iktikad baiknya untuk mencari penyelesaian mengenai masalah-masalah yang menjadi sengketa itu.

Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri yang mendahului pertemuan puncak itu dimulai lagi di Tokyo pada tanggal 18 Juni 1964. Pada keesokan harinya, yaitu tanggal 19 Juni 1964, ketiga Menteri Luar Negeri sepakat untuk menganjurkan untuk pertemuan puncak dengan agenda sebagai berikut:

1) peninjauan situasi waktu itu;
2) pertimbangan terhadap usul-usul untuk mencapai penyelesaian secara damai mengenai masalah-masalah yang ada.

Pada pertemuan puncak di Tokyo itu, pada tanggal 20 Juni 1964, Presiden Filipina Macapagal mengusulkan pembentukan suatu komisi konsiliasi, yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil dari ketiga negara Maphilindo, ditambah dengan wakil dari negara Asia lainnya, yang akan bertindak sebagai ketua.

Presiden Soekarno, yang pada prinsipnya menyetujui usul presiden Filipina itu, mengajukan amandemen kecil sebagai berikut.

1) Presiden RI menyetujui usul presiden Filipina tentang pembentukan suatu komisi konsiliasi Asia-Afrika yang akan terdiri atas empat anggota, tiga di antaranya dipilih dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dan yang keempat dipilih dengan suara bulat oleh ketiga anggota itu.
2) Komisi itu akan diminta untuk mempelajari masalah-masalah yang ada antara ketiga negara dan menyampaikan saran-saran komisi itu.
3) Perdana Menteri Malaysia pada prinsipnya menyetujui usul itu dengan pengertian bahwa segala tindakan permusuhan terhadap Malaysia harus segera dihentikan.

Mengenai pertemuan puncak serta hasil-hasilnya itu, pemerintah Indonesia berpendapat sebagai berikut.

1) Pertemuan puncak itu telah berakhir dengan berhasil penuh bagi Indonesia dan Filipina, yang keduanya setia pada *Doktrin Soekarno-Macapagal*.

2) Indonesia telah menunjukkan kemauan baiknya dengan pergi ke Tokyo lebih dahulu dan dibiarkan menunggu di sana selama lebih dari satu minggu, sebelum Malaysia memutuskan untuk hadir.
3) Indonesia bahkan telah memulai penarikan sukarelawan-sukarelawannya, meskipun Malaysia sama sekali tidak menunjukkan kemauan baiknya.

4. Indonesia Keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pidato Presiden Soekarno di depan sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 30 September 1960, mengenai saran dan desakan *retooling* PBB, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia merasa tidak puas terhadap PBB yang masih mencerminkan keadaan pada waktu didirikan pada tahun 1945. Namun, Indonesia tetap menjadi anggota PBB, sekalipun saran-saran yang dikemukakan itu tidak mendapat sambutan serius dari PBB. Pemerintah Indonesia juga tidak memutuskan untuk meninggalkan organisasi dunia tersebut. Keluarnya Indonesia dari PBB pada bulan Januari 1965 disebabkan oleh persengketaannya dengan Malaysia dan bukan karena ketidaksempurnaan badan internasional itu.

Berhubungan dengan usaha Malaysia untuk menjadi anggota PBB, Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 31 Desember 1964, mengulangi apa yang pernah dikatakan pada tahun 1960, yaitu bahwa PBB sekarang adalah pencerminan keadaan dunia pada tahun 1945, sewaktu belum banyak terdapat negara-negara baru di Asia, hanya terdapat sedikit negara-negara baru di Afrika, dan rakyat-rakyat Amerika Latin belum lagi bangkit. Dewasa ini telah terdapat berpuluh-puluh negara Asia dan Afrika, dan rakyat-rakyat Amerika Latin sudah bangkit, tetapi PBB masih tetap saja tidak berubah. PBB tetap tinggal seperti PBB tahun 1945. Itulah sebabnya PBB perlu dirombak.

> "Oleh karenanya, jikalau PBB sekarang, PBB yang belum diubah, yang tidak lagi mencerminkan keadaan sekarang, jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan, kita, Indonesia, akan keluar, kita akan meninggalkan PBB sekarang."

Dari isi pidato itu nyata bahwa masuknya Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan yang menjadi sebab keluarnya Indonesia dari PBB. Pada tanggal 31 Desember 1964, Kepala Perutusan Tetap RI di PBB menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB, U Thant, inti sari pidato Presiden Soekarno yang bernada "ancaman" sebagai berikut:

a. Para anggota PBB agar tidak menyokong masuknya Malaysia ke dalam Dewan Keamanan.

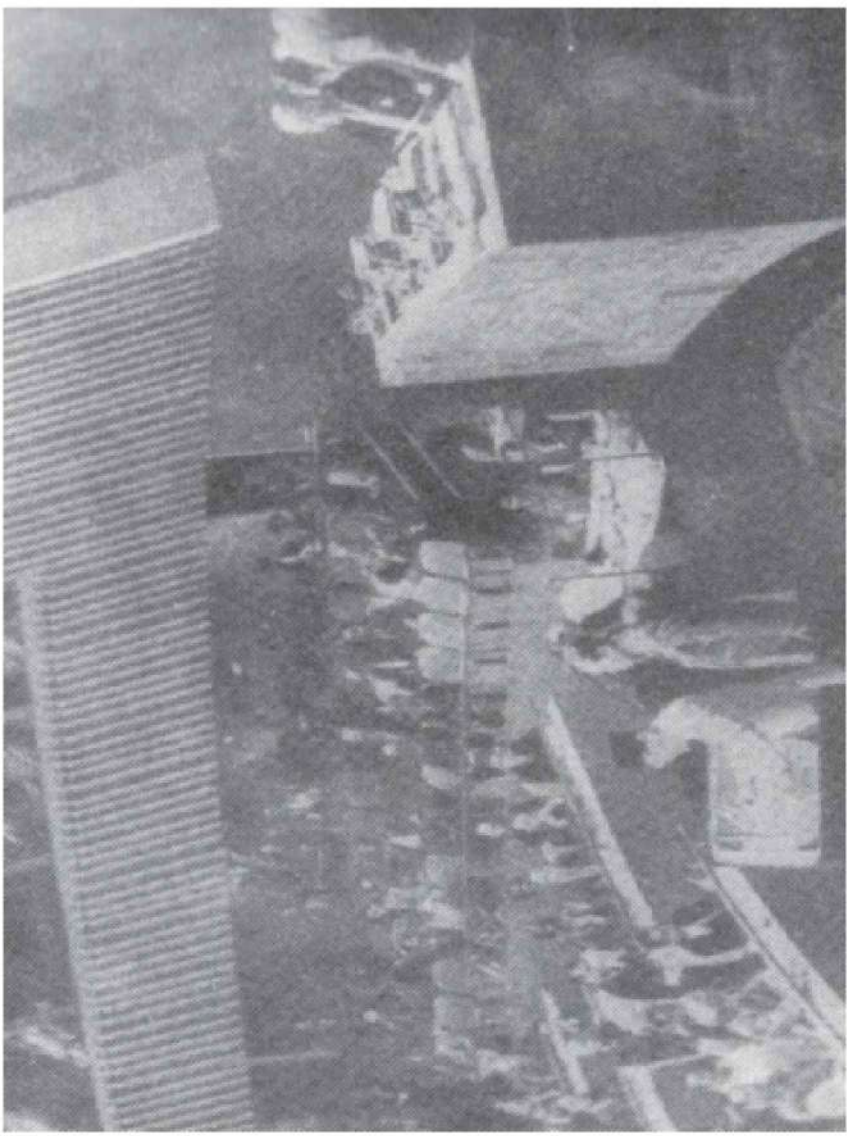

Gambar 4.6 Presiden Soekarno dengan Pemimpin PBB tahun 1960
(Sumber: *Dokumen Istimewa*)

b. Anggota-anggota PBB tetap memilih Indonesia tinggal dalam PBB daripada masuknya Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan.
c. Menegaskan kembali pernyataan yang pernah dikemukakan oleh Indonesia pada tahun 1960 mengenai ketidakpuasannya terhadap PBB yang masih dianggap merupakan pencerminan dari dunia tahun 1945 itu.
d. Memperingatkan PBB bahwa Indonesia adalah sungguh-sungguh dalam melaksanakan niatnya.

Taktik ini bukan tidak lazim digunakan dalam hubungan internasional, baik secara halus maupun secara kasar, baik secara terselubung maupun terang-terangan. Namun, Indonesia pada waktu itu tidak mencapai hasil yang diinginkan. Pada tanggal 7 Januari 1965, satu minggu setelah ancaman Indonesia itu dikeluarkan, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan.

Dengan spontan pada tanggal 7 Januari 1965, Presiden Soekarno menjawab, "Sekarang karena ternyata bahwa Malaysia diterima menjadi anggota Dewan Keamanan, saya menyatakan "Indonesia keluar dari PBB."

Selanjutnya, dijelaskan bahwa dengan "keluar dari PBB" itu dimaksudkan bukan sekadar keluarnya Indonesia dari sidang-sidang, bukan saja tidak hadirnya Indonesia dalam pertemuan-pertemuan, melainkan benar-benar keluar dari PBB, jadi tidak lagi menjadi anggota. Bagi Indonesia, mahkota kemerdekaan bukanlah keanggotaan dalam PBB, mahkota kemerdekaan adalah "kemampuan untuk terbang dengan sayap sendiri". Selanjutnya ditambahkan bahwa keluarnya Indonesia dari PBB itu berarti juga keluarnya Indonesia dari beberapa badan-badan khususnya, yakni UNESCO, UNICEF, dan FAO.

Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB itu diberitahukan secara resmi dengan surat Menteri Luar Negeri dr. Subandrio, tanggal 20 Januari 1965, yang menyebut juga, bahwa keluarnya Indonesia dari organisasi dunia itu terhitung mulai tanggal 1 Januari 1965.

Dalam surat jawabannya tanggal 26 Januari 1965, Sekretaris Jenderal PBB, U Thant, menyatakan telah mencatat keputusan Indonesia untuk mengundurkan diri dari PBB itu serta jaminan Indonesia bahwa akan tetap setia pada prinsip-prinsip kerja sama internasional seperti yang tercantum dalam Piagam PBB. Sekretaris Jenderal PBB menyatakan penyesalannya atas keputusan Indonesia untuk mengundurkan diri dari PBB itu dan mengharapkan agar Indonesia pada suatu hari akan kembali lagi melakukan kerja samanya di dalam PBB.

Selain surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB itu, Presiden Soekarno juga telah menulis kepada beberapa kepala negara sahabat untuk

menjelaskan keadaan dan alasan-alasan yang telah menyebabkan Indonesia keluar dari PBB.

Dalam sejarah PBB sampai pada tahun 1965 itu, memang belum pernah ada preseden tentang keluarnya suatu negara dari keanggotaan organisasi itu. Piagam PBB tidak memuat ketentuan yang mengatur masalah keluarnya suatu anggota dari organisasi itu. Tidak adanya ketentuan demikian mungkin dimaksudkan oleh para pendirinya agar PBB tidak mengalami kelumpuhan karena keluarnya anggota-anggota penting, seperti yang pernah dialami oleh Liga Bangsa-Bangsa. Meskipun demikian, keluarnya suatu negara dari keanggotaan PBB dimungkinkan, meskipun piagam tidak mengaturnya, dari perdebatan-perdebatan selama Konferensi 50 Negara di San Francisco pada tahun 1945 tentang pendirian organisasi itu, ternyata "organisasi ini sama sekali tidak berniat memaksa anggotanya untuk melanjutkan kerja samanya dalam organisasi bilamana anggota itu, sebagai akibat dari keadaan-keadaan yang luar biasa, terpaksa untuk mengundurkan diri". Berdasarkan kenyataan di atas, meskipun sesungguhnya tidak dikehendaki oleh organisasi itu keluarnya suatu anggota bukan tidak mungkin.

Penyebab keluarnya Indonesia dari PBB itu adalah dicalonkannya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Sekalipun ancaman Indonesia untuk keluar dari organisasi itu sudah dinyatakan dalam pidato Presiden RI pada tanggal 31 Desember 1964, dan telah disampaikan dalam bentuk surat oleh Kepala Perutusan Tetap RI di New York pada tanggal 31 Desember 1964 itu juga, Malaysia pada tanggal 7 Januari 1965 tetap juga terpilih, kegagalan Indonesia untuk mencegah terpilihnya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Ada empat kemungkinan penyebabnya. *Pertama*, adalah karena diplomasi kegagalan Indonesia. *Kedua*, karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Indonesia memang tidak dapat diterima oleh negara-negara sahabatnya. *Ketiga*, karena ancaman Indonesia untuk keluar tidak dianggap serius oleh para anggota PBB pada umumnya. *Keempat*, mungkin sebagai akibat dari kombinasi ketiga faktor-faktor itu.

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia dengan keluar dari PBB itu ialah penyelesaian sengketa Indonesia-Malaysia dan perombakan PBB.

Dengan keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaannya dengan Malaysia secara damai. Keberadaan Indonesia di luar organisasi itu akan lebih menyukarkan usahanya untuk merombak organisasi yang dianggapnya telah tidak sesuai lagi dengan keadaan dunia pada waktu itu.

Perombakan hanya mungkin dilakukan dari dalam. Sikap satu negara saja, walaupun mungkin ditambah pula dengan pendapat beberapa negara lain yang bukan anggota PBB, tidak akan dapat menggerakkan organisasi itu untuk mengadakan perombakan dalam tubuhnya sendiri.

Bagaimanapun tidak sempurnanya, PBB merupakan satu forum yang sangat berharga bagi bangsa-bangsa di dunia ini. PBB merupakan suatu forum konsultasi bagi hampir seluruh negara sehingga dengan keluarnya Indonesia dari PBB itu setidak-tidaknya Indonesia telah kehilangan satu forum yang sangat bermanfaat, yang dapat dipergunakannya untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasionalnya.

Kenyataan membuktikan bahwa sasaran-sasaran yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia dengan keluarnya dari PBB itu tidak dapat tercapai dan juga tindakannya itu tidak banyak memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Pemerintah Indonesia pada waktu itu merasa mampu untuk mengadakan satu organisasi tandingan dengan apa yang dinamakannya *Conference of the New Emerging Forces* disingkat *Conefo*. Persiapan-persiapan ke arah diadakannya konferensi tersebut, yaitu satu konferensi dari negara-negara, yang oleh pemerintah Indonesia waktu itu dianggap sebagai *The New Emerging Forces*, sudah mulai dilakukan. Konferensi-konferensi, yang tidak permanen sifatnya, sesungguhnya sudah lama tidak lagi sesuai dengan keadaan pasca Perang Dunia II. Negara-negara lebih menyukai organisasi-organisasi yang bersifat tetap, baik regional, kontinental, maupun mondial; baik di bidang politik, ekonomi, kultural, maupun ilmiah. Konferensi-konferensi secara insidentil antarnegara termasuk kebiasaan pada abad ke-19. Keadaan Perang Dunia II lebih menghendaki adanya organisasi-organisasi antarnegara yang bersifat tetap. Selain itu, pengalaman menunjukkan bahwa bilamana konferensi pertama dapat diselenggarakan, pelaksanaan konferensi sejenis yang kedua belum tentu semudah pasca yang pertama itu. Akibatnya, konferensi sedemikian hanya muncul sekali dan kemudian mungkin akan hilang. Ingat saja betapa susahnya untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika yang kedua.

Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa politik *amour-propre* pemerintah Indonesia untuk keluar dari keanggotaan PBB tidak membawa kepada tercapainya sasaran-sasaran yang dikehendaki dan juga tidak memberikan manfaat kepada Indonesia sendiri. Sebagai lazimnya, keadaan politik dalam negeri suatu negara menentukan pula garis politik luar negeri negara itu. Demikian halnya dengan Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin ini. Politik luar negeri Indonesia merupakan politik luar negeri yang "revolusioner", yang sesuai dengan garis-garis politik dalam negerinya. Dalam beberapa hal politik bersifat konfrontatif, karena zaman itu sendiri dianggap oleh pemerintahan Presiden Soekarno sebagai zaman konfrontasi.

Diplomasi Indonesia, sebagai alat politik luar negeri, tentu saja harus bersifat *diplomasi revolusioner, diplomasi konfrontatif, diplomasi perjuangan, diplomasi yang mau merombak dan menyusun suatu suasana dan perimbangan baru antara negara-negara.* Kenyataan menunjukkan bahwa akibat kesemuanya itu, Indonesia mendapatkan lebih banyak lawan daripada kawan. Hal ini tidak sesuai dengan kalimat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan politik luar negeri Indonesia.

E. Ofensif PKI dan Sekutu-Sekutunya

1. Ofensif untuk Menguasai Massa Buruh dan Tani

Dalam usaha untuk menguasai buruh, PKI mempunyai keuntungan karena merupakan salah satu partai yang tertua dan berpengalaman. Dalam memimpin aksi-aksi buruh, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), federasi organisasi buruh yang dikuasainya sejak akhir tahun 1946, menjadi sarana aksi revolusioner yang efektif. Pada tahun 1961, PKI melaksanakan penyempurnaan sistem organisasi SOBSI melalui plan (rencana) tiga tahun.

Sejak tahun 1950-an PKI mengadakan penggalangan kekuatan massa di desa-desa. Penggalangan ini diadakan dengan pertimbangan penduduk pedesaan meliputi 80% dari penduduk Indonesia, dan karenanya peran mereka tidak dapat diabaikan. Desa merupakan sumber tenaga, sumber bahan keperluan hidup, dan pangkalan kekuatan revolusi atau pangkalan tempat bertahan dari serangan kaum kontrarevolusi.

PKI memulai infiltrasinya terhadap tubuh Barisan Tani Indonesia (BTI), ketika dipimpin oleh Sadjarwo dari PNI, dengan slogan yang menarik yaitu "tanah untuk kaum tani".[69] PKI kemudian berhasil menjadikan BTI itu 100% menjadi ormas PKI. Penguasaan BTI oleh PKI sudah barang tentu merupakan pukulan bagi PNI.

Untuk mempelajari psikologi para petani di desa-desa, pimpinan PKI berusaha mengetahui keluh kesah dan keinginan para petani, PKI mengadakan gerakan *turun ke bawah* atau *turba* dengan mengirimkan sekitar 4.000–5.000 kader ke desa-desa di Jawa Barat untuk menjalankan *Aksi Tiga Sama,* "Sama tinggal, sama makan, dan sama bekerja" dengan para petani itu.[70] Kemudian PKI menyusun satu *manual* (buku pegangan) yang berisi cara-cara mendekati para petani di desa-desa. Juga diterbitkan

---

[69] Sejak Kongres Nasional V, istilah tanah untuk petani menggantikan semboyan nasionalisasi tanah untuk kaum tani

[70] D.N. Aidit, *Kaum Tani Mengganjang Setan-setan Desa*, 1965, hlm. 44

sebagai buku pegangan kader PKI berjudul *Kaum Tani Mengganyang Setan-setan Desa*.[71] Dalam *manual* itu dijelaskan bahwa "setan desa" adalah musuh petani yang harus dihancurkan. Ada tujuh "setan desa" terutama dari kalangan kiai dan ulama desa yang oleh PKI mereka digambarkan sebagai tuan tanah jahat, tengkulak jahat, pengisap darah rakyat, penguasa jahat, bandit desa, tukang ijon, dan penghalang kemajuan rakyat di desa.[72] Dengan taktik ini, seolah-olah PKI membela kepentingan kaum tani. Para petani tentu saja tidak mengetahui bahwa setelah berkuasa kaum komunis di negeri-negeri lain justru menindas kaum tani seperti yang terjadi di Uni Sovyet.

Aksi "mengganyang setan-setan desa" inilah yang menimbulkan rasa dendam di kalangan masyarakat desa yang santri.[73] Hal itulah yang menjadi sebab tumbuhnya aksi main hakim sendiri pada pasca-pemberontakan G-30-S/PKI.

Usaha menghancurkan pengaruh para ulama di desa-desa berusaha diarahkan oleh PKI kepada sasaran memperoleh dukungan dari angkatan muda non-santri di desa-desa dan sekaligus mematahkan kekuatan ormas dan partai-partai Islam. Dalam usaha untuk menarik hati massa angkatan muda di desa-desa, PKI menggunakan ormas-ormas Pemuda Rakyat (PR), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), di samping BTI, yang mendapat keuntungan dengan dikeluarkan undang-undang baru, yakni: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH). PKI dan BTI menjadikan kedua undang-undang itu sebagai fokus kegiatannya. Mereka berkata kepada para petani bahwa kedua undang-undang tersebut tidak akan terealisasi jika massa angkatan muda di desa-desa tidak memilih tokoh-tokoh PKI sebagai pemuka kampung dan lurah-lurah".[74]

Pihak PKI/BTI bahkan mengatakan bahwa pelaksanaan UUPA dan UUBH perlu didobrak. Kader PKI menghasut kaum tani untuk langsung menggarap tanah yang menurut mereka adalah milik petani berdasarkan UUPA. Aksi mendobrak itu disebut dengan aksi sepihak. Akibat aksi sepihak ini di beberapa tempat sering terjadi konflik yang menjurus pada konfrontasi fisik yang membawa korban baik di kalangan rakyat maupun dari kalangan

---

71 Isi buku ini adalah hasil riset PKI mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani di Jawa Barat

72 *Ibid.*, hlm. 27

73 Howard Palfrey Jones, *op. cit.*, hlm. 360

74 UUPA dan UUBH diundangkan pada tahun 1960. Menurut UUPA ada sejuta hektare tanah yang harus dibagikan tetapi sampai akhir 1963 yang dibagikan baru 18.000 hektare tanah

pejabat. Misalnya, peristiwa yang terjadi di Indramayu, Bandar Betsy (Sumatra Utara), dan Jengkol (Kediri). Sebenarnya aksi sepihak ini adalah salah satu cara dari sekian banyak cara pamer kekuatan PKI, seperti "ganyang kaum imperialis dan kapitalis".[75]

Dengan macam-macam atraksi yang disajikan oleh Lekra di desa-desa, seperti ketoprak, wayang kulit, wayang orang, ludruk, kuda lumping, reog Ponorogo, dan sebagainya, PKI juga memakai unsur-unsur budaya untuk penetrasi politiknya ke desa-desa. PKI juga melakukan ofensif psikologis dengan menyiarkan angka-angka statistik mengenai jumlah pendukung PKI.[76]

2. Ofensif untuk Menguasai Partai Politik dan Organisasi Massa

Usaha PKI menginfiltrasi PNI mulai berhasil yang terbukti bahwa sejak tahun 1959 PNI mengubah pengertian *Marhaenisme* menjadi "*Marxisme* yang diterapkan dalam kondisi Indonesia". Sejak itu pula PNI menempuh garis politik radikal kiri anti-Amerika yang sudah barang tentu disokong dan didukung dengan penuh semangat oleh PKI. Beberapa tokoh PNI sadar bahwa perubahan pengertian marhaenisme itu telah dimanfaatkan oleh PKI. Oleh karena itu, di antara mereka ada yang berusaha agar arti marhaenisme tidak diselewengkan oleh golongan kiri yang berada dalam tubuh PNI. Mereka berusaha keras agar garis politik PNI tidak mengikuti garis politik PKI. Akan tetapi, karena golongan kiri dalam Badan Pekerja akhirnya mereka disingkirkan dengan diberi predikat "marhaenis gadungan". Presiden Soekarno sendiri membenarkan tindakan itu.

Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), organisasi Budayawan PNI yang dipimpin oleh Sitor Situmorang, dalam hubungan ini menyatakan: "... tidak ada perbedaan pokok antara LKN dan Lekra tentang soal kultural dan kesusastraan". Karena landasan LKN dan Lekra (organisasi budayawan PKI) sama-sama bertumpu pada *Marxisme*.[77]

Setelah tahun 1959 PNI menonjolkan identitas baru bagi PNI dengan predikat atau sebutan Marhaenis di belakang nama partai dan ormasnya, seperti PNI/Front Marhaenis Pemuda Marhaenis, Wanita Marhaenis, Nelayan Marhaenis, Buruh Marhaenis, dan seterusnya. Mulailah lembaran baru dalam ormas-ormas PNI yang dipengaruhi oleh kader-kader komunis

---

75 Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah*, 2001, hlm. 194–234

76 Yahaya Ismail, *Pertumbuhan, Perkembangan dan Kejatuhan Lekra di Indonesia*, 1972, hlm. 75–76; Aidit mengatakan: bila diadakan pemilihan umum, PKI akan mendapatkan suara 30 persen dari suara pemilih, *Harian Rakjat*, 6 Mei 1964; Arnold C. Brackman, *Indonesian Communism, a History*, 1963, hlm. 301

77 Yahaya Ismail, *op. cit.*, hlm. 75–76

yang mungkin sekali dengan sengaja dimasukkan oleh PKI ke dalam tubuh PNI. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi bentrokan antara pengurus cabang PNI, yang sebagian masih dikuasai oleh golongan nasionalis murni dengan pengurus ormas-ormas PNI, seperti Pemuda Marhaen, Buruh Marhaen, Wanita Marhaen, dan seterusnya, yang masuk ke dalam ormas PNI sesudah tahun 1959. Para pemimpin ormas PNI, yang sebagian besar berasal dari mahasiswa yang berhaluan kiri seperti Consentrasi Mahasiswa Yogya (CMY) masuk ke dalam tubuh PNI sesudah tahun 1959. Karena berhaluan kiri dalam kesadaran politiknya, ormas-ormas PNI selalu mendesak untuk bekerja rapat dengan PKI serta ormas-ormasnya.

Pertentangan antara cabang dan ormas PNI tampak sekali dalam peristiwa aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI beserta ormas-ormasnya, seperti terjadi di Boyolali, Klaten, Jengkol, Kanigoro, Cilacap, dan seterusnya. Dalam aksi sepihak itu ormas PNI berada di pihak PKI penggerak aksi sepihak, sedang cabang PNI menentangnya. Keadaan yang sangat merugikan itu diuraikan oleh Hadisubeno, ketua umum DPD PNI Jawa Tengah dalam sebuah "buku putih". Hadisubeno dan kawan-kawannya dipersalahkan oleh DPP PNI yang pada tanggal 4 Agustus 1965 menskors mereka dari DPP PNI. Dilihat pada latar belakang itu tidaklah mengherankan jika DPP itu pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 10.00 (WS) mengeluarkan *pernyataan* yang ditandatangani oleh Ir. Surachman, Sekretaris Jenderal PNI bekas tokoh CMY Yogyakarta, bahwa PNI mendukung Gerakan 30 September.

Begitu juga penyusupan PKI ke dalam tubuh Partindo. Seluruh napas dan suara maupun kegiatan Partindo benar-benar untuk melaksanakan program perjuangan PKI. Hal ini dapat terjadi karena 75% dari Dewan Pimpinan Pengurus Pusat Partindo dijabat oleh orang-orang komunis berbaju Partindo.[78]

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah satu-satunya organisasi yang anggota-anggotanya (guru-guru sekolah dasar, guru-guru sekolah lanjutan pertama, guru-guru sekolah lanjutan atas, dan sebagainya) tersebar luas dan sangat intensif sampai ke desa-desa. Anggota PGRI di tempat kediamannya menduduki posisi sosial politik yang cukup berpengaruh. Itulah sebabnya dari mula didirikan, PGRI menjadi inceran PKI untuk diinfiltrasi dan dikuasai dari dalam seperti telah dilakukannya terhadap IPPI, BTI, Gerwani, dan ormas-ormas lain, yang permulaannya bukanlah organisasi massa PKI.

---

[78] Adisumarto, Sekjen Partindo, oleh Mahmilub dijatuhi hukuman 13 tahun, lihat Kopkamtib, *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI)*, Jakarta, 1978, hlm. 75

Ketika usaha penguasaan PGRI dari dalam tidak berhasil, PKI dalam tahun 1963 terpaksa membentuk PGRI tandingan dengan nama *"PGRI-NV" (PGRI Non-Vaksentral)* di bawah pimpinan Subandri dan Muljono. Sampai dibubarkan, setelah pemberontakan G-30-S/PKI, PGRI *Non-Vaksentral* kurang berhasil mendapat dukungan dibandingkan dengan PGRI asli, terutama di luar Pulau Jawa, tetapi di Pulau Jawa sempat mendapat dukungan, terutama dan kalangan guru-guru sekolah dasar di desa-desa. Karena itulah guru-guru sekolah dasar banyak yang terlibat secara organisatoris dengan organisasi massa PKI ini.

3. Ofensif di Bidang Pertahanan-Keamanan

Menurut keterangan Njono, Peris Pardede, maupun Sudisman dalam sidang *Mahmilub*, hanya Aidit yang diberi kekuasaan oleh Politbiro untuk menentukan dan melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan ABRI. Dalam hal membina ABRI ternyata Aidit dibantu oleh sebuah Biro Khusus.

Biro Khusus ini tidak tercantum dalam konstitusi partai, yang berarti tidak konstitusional dan menjadi alat kerja (aparat) Aidit,[79] serta memainkan peran penting seperti dalam pelaksanaan Pemberontakan G-30-S/PKI. Sebenarnya perencanaan dan tugas Biro Khusus adalah untuk mencari dan memperluas pengaruh partai secara tertutup di kalangan ABRI. Badan ini sifatnya rahasia, tidak hanya bagi orang luar tetapi juga bagi anggota PKI sendiri, serta langsung berada di bawah kendali Ketua CC PKI. Yang mengepalai Biro Khusus ini sejak tahun 1964 adalah Sjam Kamaruzzaman, sedangkan Supono alias Pono orang kedua, dan Waluyo orang ketiga. Sejak tahun itu pula Biro Khusus berdiri secara otonom dengan garis kendali langsung dari Ketua CC PKI Aidit. Hanya segolongan kecil partai yang mengetahui aktivitas Biro Khusus ini.[80] Badan ini dibentuk pada tingkat pusat dan daerah dengan pimpinan kolektif.

Misalnya Biro Khusus Daerah Yogyakarta dipimpin oleh Wiryomartono dan untuk Solo oleh Djojopratedjo. Dalam mencari anggota ABRI yang akan dibinanya Biro Khusus terutama mementingkan hal-hal berikut.

1. Anggota ABRI yang pada masa revolusi kemerdekaan pernah turut serta atau sedikitnya menunjukkan simpati terhadap pemberontakan PKI Madiun 1948, seperti bekas anggota pasukan Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI). Yadau-Suyoto, bekas anggota Batalion Pesindo, dan sebagainya.

---

[79] Mahmilub, *Pono*, hlm. 15

[80] Kopkamtib, *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI)*, 1978, hlm. 54–57

2. Perwira-perwira yang sakit hati yang tidak menyukai korupsi serta hidup mewah berkelebihan di kalangan beberapa perwira tinggi terutama di Jakarta.
3. Anggota muda ABRI yang masuk ABRI sesudah tahun 1950. Mereka tidak mengalami dan tidak ikut ambil bagian dalam penumpasan Pemberontakan PKI Madiun itu, karena itu mereka diharapkan tidak mempunyai sikap anti-komunis.

D.N. Aidit pernah berkata: "... selama ini masih ada golongan rakyat yang belum diperhatikan dan belum kita jadikan objek karya-karya sastra dan seni, yaitu massa prajurit. Padahal secara politis bagi kita sudah tidak ada lagi, mereka pada umumnya adalah rakyat pekerja yang memanggul senapan, sebab mereka pada umumnya berasal dari buruh, tani, dan rakyat pekerja lainnya."[81]

Dengan dimasukkannya golongan prajurit menjadi *soko guru* PKI bersama buruh dan tani adalah suatu perkembangan baru dalam strategi PKI. Aidit menyadari bahwa suatu revolusi sosial dan politik tidak akan sukses tanpa diikutsertakannya golongan prajurit.

Dalam praktiknya tidak perlu dan tidak harus terjadi proses pengomunisan terhadap orang-orang yang digarap oleh Biro Khusus ini. Caranya biasa saja, seperti yang ditempuh oleh partai lainnya untuk mendapatkan simpatisan. Namun, penggarapan itu merupakan persiapan bagi pendidikan meningkatkan kesadaran politik orang-orang yang dibina serta menanamkan pengertian akan ajaran *Marxisme-Leninisme* dan usaha meyakinkan mereka akan kebenaran garis PKI dan kepastian kemenangan akhir komunisme. Jadi, pembinaan itu bertujuan untuk mem-PKI-kan orang yang dibina, dalam hal ini anggota-anggota ABRI.

Anggota-anggota ABRI yang dibina itu tidaklah secara otomatis menjadi anggota PKI, cukup dengan menjadi simpatisan saja. Oleh karena itu, Biro Khusus melakukan dua macam pembinaan:

1. pembinaan untuk menghasilkan orang-orang yang mau melakukan tugas-tugas partai, seperti Brigjen Supardjo, Kolonel Latief, Mayor Udara Suyono, Letkol Untung, Kolonel Laut Sunardi, dan Letkol Heru Atmodjo;
2. pembinaan fungsional untuk menarik mereka yang ada di tingkat atas agar sejalan dengan usaha dan kebijakan politik PKI.

Adapun anggota-anggota ABRI yang jadi pengikut PKI itu tidak secara resmi menjadi anggota PKI, bahkan keanggotaan mereka dirahasiakan. PKI

[81] D.N. Aidit, *Dengan Sastra dan Seni jang Berkepribadian Nasional Mengabdi Buruh, Tani, Pradjurit*, 1964, hlm. 30

secara diam-diam menyusup masuk ke dalam tubuh ABRI dan membina perwira-perwira tinggi, menengah, dan pertama, serta bawahan supaya bersimpati pada perjuangan PKI. Bahan-bahan yang dipakai untuk pembinaan di samping ajaran komunisme adalah keadaan lingkungan hidup sehari-hari, keadaan ekonomi yang gawat, berbagai penyelewengan, dan lain-lain yang ditekankan pada kontradiksi yang ada serta rasa tidak puas terutama di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Memang harus diakui selalu ada saja yang timpang dalam kehidupan setiap masyarakat. Dalam hal ini kaum komunis tinggal merumuskan dan memberi isi yang mantap serta memberi penekanan-penekanan di mana perlu, tanpa memberi alternatif penyelesaiannya atas kondisi-kondisi yang ada. Jadi, tema pembinaan itu tetap berpokok pada rasa keadilan, sesuatu yang bersifat universal.

Cara mencari hubungan dengan anggota ABRI adalah lewat kenalan kerabat, yakni untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Juga supaya anggota-anggota ABRI tidak *apriori* terhadap PKI atau *komunisto fobi*, setidak-tidaknya dapat diajak bekerja sama dan tidak memusuhi PKI. Tujuan lebih jauh dari penyusupan melalui Biro Khusus ini adalah untuk menyusun kekuatan bersenjata PKI dalam ABRI, hingga dapat mendorong atau mengubah imbangan kekuatan dalam negeri, antara ABRI dan PKI. PKI menugasi kader-kadernya untuk mendampingi para perwira menjadi simpatisan PKI. Hal ini terjadi misalnya dengan diri Letnan Kolonel Untung, ketika di Semarang, yang dibina oleh kader PKI bernama Sudarmo dan di Jakarta oleh Suyono.[82]

Dari bukti-bukti yang ada ternyata PKI telah banyak menyusup ke lingkungan Angkatan Bersenjata RI, walaupun intensitasnya berbeda-beda, seperti *Ikatan Bintara Angkatan Laut* (IBAL).[83] Dalam Angkatan Darat hampir semua Kodam telah disusupinya, karena mereka merupakan sasaran infiltrasi utama.[84] Perhatian khusus diberikan kepada Staf I (Intelijen), III (Personel), dan V (Teritorial) dari masing-masing Kodam. Bukanlah suatu hal kebetulan bahwa perhatian khusus diberikan pada Staf I, III, dan V, sebab staf-staf tersebut mempunyai peran yang sangat penting dilihat dari sudut kepentingan PKI. Selain ketiga staf tersebut, para komandan pasukan juga menjadi incaran PKI sebab peran dan pengaruh komandan terhadap anak buah sangat besar bahkan sampai meliputi kehidupan mereka sehari-hari.

---

82 Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, *40 Hari Kegagalan G-30-S*, 1965, hlm. 11

83 Kopkamtib, *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI)*, 1978, hlm. 62

84 Mahmilub, *Pono*, hlm. 24

Sasaran utama infiltrasi adalah Angkatan Darat karena dianggap sebagai penghalang utama terhadap maksud mereka. Angkatan lain, seperti Angkatan Laut dan Kepolisian dan dianggap sibuk mengurusi soal internnya sendiri, sedangkan Angkatan Udara mereka anggap di tangan mereka. Akibat infiltrasi PKI ke dalam tubuh ABRI adalah timbulnya pengkhianatan terhadap ideologi negara Pancasila serta pengingkaran terhadap Saptamarga dan Sumpah Prajurit karena mereka menilai ideologi komunisme lebih tinggi daripada disiplin sebagai prajurit TNI.[85]

Sejak memegang tampuk pimpinan PKI, Aidit menyadari bahwa kekalahan dalam Pemberontakan PKI Madiun 1948 itu, antara lain disebabkan PKI tidak mempunyai pasukan bersenjata sendiri seperti Mao Zedong di RRC atau Ho Chi Minh di Vietnam. Itulah sebabnya Aidit berusaha sekuat tenaga untuk mencari jalan supaya kesatuan-kesatuan organisasi massanya, seperti Pemuda Rakyat, SOBSI, BTI, dan Gerwani pada suatu ketika dapat dipersenjatai dan diberi latihan kemiliteran. Cita-cita Aidit itu tercapai dengan adanya Trikora dan Dwikora, serta timbulnya gagasan mengenai pengerahan tenaga sukarelawan. Hal ini dipengaruhi situasi politik dalam negeri. Selain itu, juga karena pada setiap kesempatan Aidit dan kawan-kawan mengajukan usul kepada Presiden Soekarno, mempersenjatai buruh dan tani yang kemudian berkembang menjadi gagasan Angkatan V partai, yaitu sayap militer partai. Kasab Jenderal A.H. Nasution mewaspadai usul dan usaha-usaha PKI itu dengan membentuk Pertahanan Sipil (Hansip), resimen mahasiswa, dan kesatuan-kesatuan karyawan perusahaan-perusahaan negara.[86] Dari usul mempersenjatai buruh tani berkembang menjadi Angkatan V, yaitu di angkatan buruh tani bersenjata selain keempat angkatan dalam ABRI.

Gagasan tentang pembentukan Angkatan V ini berasal dari Perdana Menteri Republik Cina Zou Enlai yang disampaikan kepada Presiden Soekarno. Aidit mendesak Soekarno untuk memperkuat kedudukan PKI dalam usaha penyusunan kekuatannya. Dalam situasi konfrontasi terhadap Malaysia yang demikian, Presiden Soekarno melontarkan gagasan pembentukan Angkatan V di hadapan Kursus Reguler Lemhannas pada tanggal 31 Mei 1965.[87] Pembentukan Angkatan V ini sudah pasti merupakan tantangan bagi Angkatan Darat. Gagasan Angkatan V ini oleh Presiden Soekarno kemudian dilemparkan lagi kepada para panglima angkatan. Ketiga panglima angkatan menolak, hanya Pangau Omar Dhani yang menerimanya. Alasan penolakan para panglima angkatan ialah: "Akan

[85] Saleh As'ad Djamhari, *op. cit.*, 1971, hlm. 119

[86] *Kopkamtib, op. cit.*, hlm. 101–105

[87] *Antara*, 31 Mei 1966

berbahaya jika buruh dan tani dipersenjatai, mengingat hal itu menyangkut perjuangan PKI yang ingin menebus kekalahannya pada peristiwa Madiun, ditambah dengan menambah beban rakyat yang cukup banyak".

Saran Presiden Soekarno itu mendapat tanggapan positif dari luar ABRI. Menteri Penerangan Achmadi mengatakan bahwa adalah suatu keharusan sejarah untuk membantu suatu tentara rakyat yang terdiri dari sukarelawan.[88] Kemudian Sekretaris Jenderal Partindo Adisumarto mengatakan: "... sudah masanya melantik Angkatan V. Angkatan V adalah realisasi dari slogan tentara rakyat."[89]

Secara diam-diam, dan dengan bantuan oknum ABRI, PKI tetap melaksanakan keinginannya. Sesudah peristiwa Kudeta G-30-S/PKI, diketahui bahwa PKI telah melakukan latihan-latihan militer bagi anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani di Lubang Buaya, sebagai persiapan perebutan kekuasaan.

F. Pemberontakan G-30-S/PKI

1. Kudeta G-30-S/PKI

Sejak awal tahun 1965, PKI telah mempersiapkan perebutan kekuasaan politik, yang dilaksanakan secara cermat dan akurat. Yang pertama adalah dicanangkannya slogan ofensif revolusioner. Sejumlah pimpinan partai diturunkan ke daerah-daerah untuk menyelenggarakan rapat-rapat umum. Sukses PKI dalam membekukan lawan politiknya yang tangguh merupakan prestasi yang luar biasa pada awal 1965. Ofensif revolusioner semakin ditingkatkan sesudah hari ulang tahun PKI bulan Mei 1965. Pada sidang pleno IV CC PKI tanggal 11 Mei 1965, D.N. Aidit menyampaikan laporannya dengan judul"Perketat Ofensif Revolusioner di Segala Bidang" yang hakikatnya merupakan "Komando". Kepada setiap jajaran organisasi massa PKI untuk mempersiapkan diri dalam rangka merebut kekuasaan politik, komando itu diterjemahkan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi massa masing-masing, karena menurut penilaian PKI kondisi sosial, politik, dan militer di dalam negeri telah kondusif untuk melakukan itu.

Menjelang akhir Agustus 1965 pimpinan Biro Khusus PKI terus-menerus mengadakan pertemuan-pertemuan, yang kesimpulannya dilaporkan kepada ketua CC PKI D.N. Aidit. Kemudian diputuskan oleh Aidit bahwa gerakan perebutan kekuasaan akan dipimpin langsung oleh D.N. Aidit sebagai pimpinan tertinggi gerakan.

---

88 *Antara*, 8 Juni 1965

89 *Ibid.*, hlm. 105–108

Sjam Kamaruzzaman ditetapkan sebagai pimpinan pelaksana gerakan, Pono ditunjuk sebagai wakil pimpinan gerakan, dan Bono ditetapkan sebagai pimpinan bagian observasi. Selanjutnya kepada Sjam selaku pimpinan pelaksana gerakan diinstruksikan untuk mengadakan persiapan-persiapan terakhir menjelang pelaksanaan gerakan.[90]

Berdasarkan instruksi tersebut, sejak tanggal 6 September 1965 pimpinan Biro Khusus PKI berturut-turut mengadakan rapat-rapat rahasia dengan beberapa orang oknum ABRI yang telah lama dibina yang digelari sebagai *perwira progresif revolusioner* untuk membicarakan persiapan kudeta. Rapat pertama dilakukan di rumah Kapten Wahjudi Jalan Sindanglaya 5, Jakarta, dihadiri oleh Sjam, Pono, Letnan Kolonel Untung (Komandan Batalion I Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa), Kolonel A. Latif (Komandan Brigade Infantri I Kodam V/Jaya), Mayor Udara Suyono (Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan (P3) PAU Halim), Mayor A. Sigit (Komandan Batalion 203 Brigade Infantri I Kodam V/Jaya), dan Kapten Wahjudi (Komandan Kompi Artileri Sasaran Udara). Dalam rapat tersebut dibicarakan mengenai situasi umum dan sakitnya Presiden Soekarno. Selanjutnya Sjam melontarkan isu adanya *Dewan Jenderal* di Angkatan Darat yang akan mengadakan kudeta, dan menyampaikan instruksi Aidit untuk mengadakan gerakan mendahului kudeta *Dewan Jenderal.* Rapat kedua diselenggarakan tanggal 9 September 1965 di tempat yang sama, membicarakan kesepakatan bersama untuk turut serta dalam gerakan dan mengadakan tukar pikiran tentang taktik pelaksanaan gerakan, terutama masalah organisasi dan pengendalian kesatuan-kesatuan yang akan digunakan dalam gerakan serta pembagian tugas dan calon pemimpinnya. Rapat ketiga tanggal 13 September 1965 di rumah Kolonel A. Latif, Jalan Cawang I Kavling 524/525, Jatinegara, dan rapat keempat dilaksanakan tanggal 15 September 1965 dan kelima tanggal 17 September 1965 juga di rumah Kolonel A. Latif. Dalam rapat ini hadir Brigjen Supardjo. Rapat ini memutuskan merancang *Operasi Takari*, tiga komando, yaitu *Pasopati*, dengan kekuatan *Bimasakti*, dan *Gatotkaca.* Rapat keenam tanggal 19 September 1965 bertempat di rumah Sjam, Jalan Salemba Tengah, Jatibuntu, Jakarta. Rapat ketujuh tanggal 22 September 1965 juga diselenggarakan di rumah Sjam. Dalam rapat itu ditetapkan penentuan sasaran gerakan bagi tiap-tiap pasukan. Yang akan bergerak menculik atau membunuh para jenderal Angkatan Darat diberi nama pasukan *Pasopati.* Pasukan teritorial dengan tugas utama menduduki objek vital, gedung RRI, dan gedung telekomunikasi diberi nama pasukan *Bimasakti.* Pasukan yang bertugas mengoordinasikan kegiatan di Lubang Buaya diberi nama pasukan *Gatotkaca.*

---

[90] Kopkamtib, *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI)*, Jakarta, 1979, hlm. 100

Rapat kedelapan dilaksanakan tanggal 24 September 1965, rapat kesembilan tanggal 26 September 1965, dan rapat terakhir tanggal 29 September 1965, kesemuanya dilakukan di rumah Sjam.[91]

Sementara rapat-rapat Biro Khusus berlangsung, surat kabar PKI *Harian Rakjat* pada edisi 26 September 1965, dalam pojok Cabe Rawit, Wong Tjilik, menulis:

Tembak

Soal menembak Kabir, pencoleng dan koruptor besar sampai sekarang baru ancaman. Maling bisa berteriak maling, tetapi jangan diharap yang harus ditembak akan menembak.

Tulisan tersebut merupakan satu isyarat akan terjadinya suatu peristiwa, tetapi tidak pernah ditanggapi oleh masyarakat.

Setelah persiapan-persiapan terakhir menjelang kudeta dibicarakan dalam rapat-rapat rahasia oleh tokoh-tokoh pelaksana utama di bawah pimpinan Sjam, ditetapkan bahwa gerakan akan dimulai pada hari Kamis malam tanggal 30 September 1965. Sesuai dengan keputusan rapat terakhir tanggaI 29 September 1965 di rumah Sjam, gerakan itu diberi nama *Gerakan 30 September* (kemudian dikenal di masyarakat luas dengan sebutan G-30-S/PKI atau Gestapu/PKI).

Di samping mengadakan rapat-rapat rahasia dengan beberapa orang oknum ABRI yang memangku jabatan di Jakarta tersebut, Sjam selaku Kepala Biro Khusus PKI berturut-turut mengadakan pertemuan dengan kepala-Kepala Biro Khusus Daerah yang diselenggarakan di rumahnya. Di dalam rapat-rapat itu dibicarakan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh Biro Khusus Daerah dalam rangka gerakan yang akan dilancarkan. Pertemuan dengan Biro Khusus Daerah Jakarta Raya dilakukan pada tanggal 4 September 1965, dengan Biro Khusus Daerah Jawa Barat tanggal 8 September, dengan Biro Khusus Sumatra Barat tanggal 17 September, dengan Biro Khusus Daerah Jawa Tengah 15 September, dan dengan Biro Khusus Daerah Sumatra lainnya tanggal 20 September 1965.[92]

Secara fisik militer gerakan dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion I Resimen *Cakrabirawa* (Pasukan Pengawal Presiden) selaku pimpinan formal seluruh gerakan. Mereka mulai bergerak pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, didahului dengan gerakan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat. Kesemuanya dibawa ke desa Lubang Buaya. Mereka

---

[91] Komando Operasi Pemilihan Keamanan dan Ketertiban, *op. cit.*, hlm. 101–105

[92] *Ibid.*, hlm. 105–108

dianiaya dan akhirnya dibunuh oleh anggota-anggota Pemuda Rakyat, Gerwani, dan lain-lain organisasi satelit PKI. Semua jenazah dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua lalu ditimbun dengan sampah dan tanah.

Keenam perwira tinggi yang dibunuh tersebut adalah:

1) Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) Letnan Jenderal Ahmad Yani;
2) Deputi II Pangad, Mayor Jenderal R. Soeprapto;
3) Deputi III Pangad, Mayor Jenderal Harjono Mas Tirtodarmo;
4) Asisten I Pangad, Mayor Jenderal Siswondo Parman;
5) Asisten IV Pangad, Brigadier Jenderal Donald Izacus Pandjaitan;
6) Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat, Brigadier Jenderal Soetojo Siswomihardjo.

Jenderal Abdul Haris Nasution, Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Menko Hankam/Kasab) berhasil meloloskan diri dari penculikan, tetapi putrinya Ade Irma Suryani tewas akibat tembakan penculik. Ajudannya, Letnan Satu Pierre Andries Tendean menjadi sasaran penculikan karena sepintas lalu dalam kegelapan wajahnya mirip Jenderal Nasution. Turut tewas Brigadier Polisi Karel Satsuit Tubun, pengawal rumah Wakil Perdana Menteri II dr. J. Leimena yang rumahnya dekat dengan rumah Jenderal A.H. Nasution. Satsuit Tubun mengadakan perlawanan ketika akan dilucuti oleh penculik yang akan masuk ke rumah Jenderal A.H. Nasution.

Bersama dengan gerakan penculikan, pasukan G-30-S/PKI juga menguasai objek vital yaitu Studio RRI Pusat di Jalan Medan Merdeka Barat, dan gedung PN Telekomunikasi di Jalan Medan Merdeka Selatan. Melalui RRI yang telah mereka kuasai, pada pukul 07.20 dan diulang pada pukul 08.15, Letnan Kolonel Untung menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September. Antara lain diumumkan bahwa gerakan mereka ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota *Dewan Jenderal* yang akan mengadakan kudeta (perebutan kekuasaan).

Pada tanggal 1 Oktober 1965 itu ada dua surat kabar yang memuat berita G-30-S menyelamatkan Pemimpin Besar Revolusi dan memuat nama-nama anggota Dewan Revolusi, yaitu *Harian Rakjat* dan *Warta Bhakti*. Dalam kolom "Film Minggu Ini", *Harian Rakjat* memuat karikatur lakon, *the General's Fall*.

Mereka mengumumkan bahwa G-30-S dilancarkan oleh perwira-perwira yang "berpikiran maju", menentang rencana kudeta Dewan Jenderal. Pada pukul 13.00 disiarkan sebuah dekrit tentang pembentukan Dewan Revolusi, dan Kabinet Dwikora dinyatakan *demisioner*. Diumumkan

pula bahwa *Dewan Revolusi* merupakan sumber kekuasaan dalam negara Republik Indonesia.

Dengan dekrit tersebut terbukalah tabir yang menyelubungi tujuan G-30-S sebenarnya adalah kudeta, yaitu gerakan merebut kekuasaan yang didahului dengan gerakan penculikan dan pembunuhan pimpinan Angkatan Darat, karena mereka dinilai sebagai penghalang utamanya.

Gerakan pendadakan yang dilancarkan pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 oleh Komando yang menamakan diri G-30-S untuk sementara berhasil membingungkan masyarakat. Akan tetapi, pada hari itu juga Panglima Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto setelah menerima laporan mengenai terjadinya penculikan-penculikan dan pembunuhan-pembunuhan, bertindak cepat untuk menguasai keadaan. Hal itu sesuai dengan tata cara yang berlaku bahwa apabila Menteri/Panglima Angkatan Darat berhalangan, Pangkostrad yang ditunjuk dapat mewakilinya. Sambil menunggu pengaturan lebih lanjut dari Presiden/Panglima Tertinggi ABRI, untuk sementara pimpinan Angkatan Darat dipegangnya. Ia mengambil langkah-langkah mengadakan koordinasi di antara kesatuan-kesatuan ABRI, khususnya yang ada di Jakarta, melalui panglima masing-masing yang semuanya berhasil dihubungi, kecuali Menteri/Panglima Angkatan Udara yang mengeluarkan perintah harian mendukung G-30-S.[93]

Setelah menilai keadaan, dengan cepat Pangkostrad sampai kepada kesimpulan bahwa penculikan dan pembunuhan terhadap perwira tinggi Angkatan Darat adalah bagian dari usaha perebutan kekuasaan pemerintahan, bahwa pimpinan Angkatan Udara mendukung gerakan yang menamakan diri Gerakan 30 September; Batalion 454/Diponegoro dan 530/Brawijaya yang berada di sekitar Medan Merdeka disalahgunakan oleh G-30-S/PKI. Kedua batalion tersebut didatangkan ke Jakarta dalam rangka parade Hari Ulang Tahun ABRI 5 Oktober 1965.

Hubungan dengan Presiden Soekarno tidak dapat dilakukan karena tidak diketahui keberadaannya. Baru kemudian diketahui keberadaannya di Pangkalan Udara Utama (Lanuma) Halim Perdanakusuma, tetapi tidak dapat dimintai petunjuknya atau perintah-perintah untuk menghadapi keadaan. Dengan kondisi seperti itu, Pangkostrad memutuskan untuk segera melancarkan operasi menumpas G-30-S/PKI dengan keyakinan bahwa gerakan itu adalah suatu pemberontakan untuk merebut kekuasaan pemerintahan, yang tampak jelas setelah mereka mengumumkan dekrit pembentukan *Dewan Revolusi* dan pendemisioneran *Kabinet Dwikora*.

---

[93] Pusat Sejarah Staf Angkatan Bersenjata, File G-30-S/PKI, Sitrap "Gerakan di Djakarta" RPKAD, hlm. 1; Pusat Kesendjataan Kavaleri, *Penerangan Pasukan*, no. 10/PENPAS/66, hlm. 4–5

Dengan menggunakan unsur-unsur Kostrad yang sedang berada di Jakarta dalam rangka parade Hari Ulang Tahun ABRI, yakni Batalion 328 Kujang/Siliwangi, Batalion 2 Kavaleri, dan Batalion 1 Resimen Para Komando Angkatan Darat (Men Parako atau RPKAD), gerakan penumpasan kudeta pun dimulai.

2. Operasi Penumpasan G-30-S di Jakarta

Operasi penumpasan G-30-S yang dilancarkan pada tanggal 1 Oktober 1965 itu juga diusahakan sedapat mungkin tanpa bentrokan senjata. Pertama kali diusahakan menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar Jalan Medan Merdeka yang digunakan oleh pemberontak. Anggota-anggota pasukan Batalion 530/Brawijaya minus 1 kompi, berhasil diinsafkan, ditarik ke markas Kostrad di Jalan Medan Merdeka Timur, sedangkan anggota-anggota Batalion 454/Diponegoro sekitar pukul 17.00 ditarik mundur dari Jalan Medan Merdeka.

Operasi militer mulai digerakkan pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965, dan pada pukul 19.15 pasukan RPKAD sudah berhasil merebut gedung RRI Pusat dan gedung telekomunikasi serta mengamankan seluruh Jalan Medan Merdeka tanpa terjadinya bentrokan senjata. Batalion 328 Kujang/ Siliwangi menguasai Lapangan Banteng untuk pengamanan Markas Kodam V/Jaya dan sekitarnya. Demikian juga Batalion I Kavaleri berhasil mengamankan BNI Unit I Kota dan Percetakan Uang, Kebayoran. Dengan demikian, dalam waktu yang sangat singkat pada tanggal 1 Oktober itu juga, kota Jakarta sudah dapat dikuasai kembali oleh ABRI dan kekuatan gerakan pemberontakan sudah berhasil dilumpuhkan.

Untuk menenteramkan kegelisahan masyarakat dan menginsafkan pasukan-pasukan yang terlibat dalam pemberontakan, melalui RRI pada pukul 20.00, Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat, mengumumkan tentang adanya usaha perebutan kekuasaan oleh yang menamakan dirinya *Gerakan Tiga Puluh September*. Diumumkan pula tentang penculikan terhadap enam perwira tinggi Angkatan Darat. Presiden dan Menko Hankam/KASAB dalam keadaan aman dan sehat, juga dinyatakan bahwa antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepolisian telah terdapat saling pengertian untuk bekerja sama serta terdapat kebulatan tekad untuk menumpas G-30-S. Kepada rakyat dianjurkan supaya tetap tenang dan waspada.[94]

Setelah diketahui bahwa basis utama G-30-S berada di sekitar Lanuma Halim Perdanakusuma dan Presiden Soekarno sedang berada di Lanuma

[94] Komando Operasi Tertinggi, *Rangkaian Pidato dan Pernjataan-Pernjataan Resmi di Sekitar "Gerakan* 30 *September"*, 1965, No. 1

Halim, langkah berikutnya adalah membersihkan daerah sekitar Pangkalan Udara Halim. Kepada Presiden Soekarno disampaikan pesan melalui kurir khusus supaya meninggalkan Halim, untuk menjaga keselamatannya dari bahaya kemungkinan terjadinya bentrokan senjata.

Setelah Presiden Soekarno meninggalkan Halim menuju Istana Bogor, diperintahkan supaya pasukan RPKAD, Batalion 328 Kujang/Siliwangi, dan Batalion 1 Kavaleri bergerak menuju sasaran. Sementara itu, bantuan kekuatan sebanyak tiga kompi tempur Kavaleri Pengintai dari Bandung dipimpin langsung oleh Komandan Kesenjataan Kavaleri (Dansenkav) Kolonel Subiantoro telah tiba di Cijantung, dan langsung diikutsertakan dalam gerakan untuk menutup jalan simpang tiga Cililitan–Kramatjati dan simpang tiga Lanuma Halim Lubang Buaya. Tanpa menemui kesulitan, pada pukul 06.10 tanggal 2 Oktober 1965 daerah sekitar Pangkalan Udara Halim sudah dapat dikuasai. Hanya terjadi perlawanan kecil dari pasukan Batalion 454. Ketika gerakan pembersihan dilanjutkan ke kampung Lubang Buaya yang sebelumnya dijadikan tempat latihan kemiliteran Pemuda Rakyat dan Gerwani.[95]

Dalam gerakan pembersihan di kampung Lubang Buaya, atas bantuan dan petunjuk seorang anggota polisi, Ajun Brigadier Polisi (Abriptu) Sukitman yang ditawan oleh regu penculik, Brigjen D.I. Pandjaitan berhasil meloloskan diri. Pada tanggal 3 Oktober 1965 diketemukan tempat jenazah para perwira Angkatan Darat yang dikuburkan dalam sebuah lubang sumur tua. Karena hari sudah gelap dan mengalami kesulitan teknis karena lubang sumur bergaris tengah kurang dari 1 meter dan kedalaman 12 meter, usaha mengangkat para jenazah dari dalam sumur terpaksa ditunda. Keesokan harinya tanggal 4 Oktober 1965 pengangkatan berhasil diselesaikan oleh tim dari Kompi I Intai Para Amphibi (Kipam) yang dipimpin oleh Kapten Winanto dari KKO-AL (marinir) dibantu oleh anggota RPKAD. Seluruh jenazah diangkut ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (sekarang Rumah Sakit Gatot Subroto) untuk dibersihkan dan kemudian disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Visum dokter menunjukkan bahwa para perwira itu telah mengalami penganiayaan berat. Keesokan harinya bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ABRI 5 Oktober 1965, jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan kemudian dianugerahi gelar *Pahlawan Revolusi* serta diberi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara *anumerta*.

Ketika berada di Halim Perdanakusuma tanggal 1 Oktober 1965 Presiden Soekarno mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada seluruh

---

[95] Pusat Sejarah ABRI, *Dinas Dokumentasi*, File G-30-S/PKI, Sitrap"Gerakan di Djakarta", RPKAD, hlm. 1; Pusat Kesendjataan Kavaleri, *Penerangan Pasukan*, no. 10/PENPAS/66, hlm. 4–5

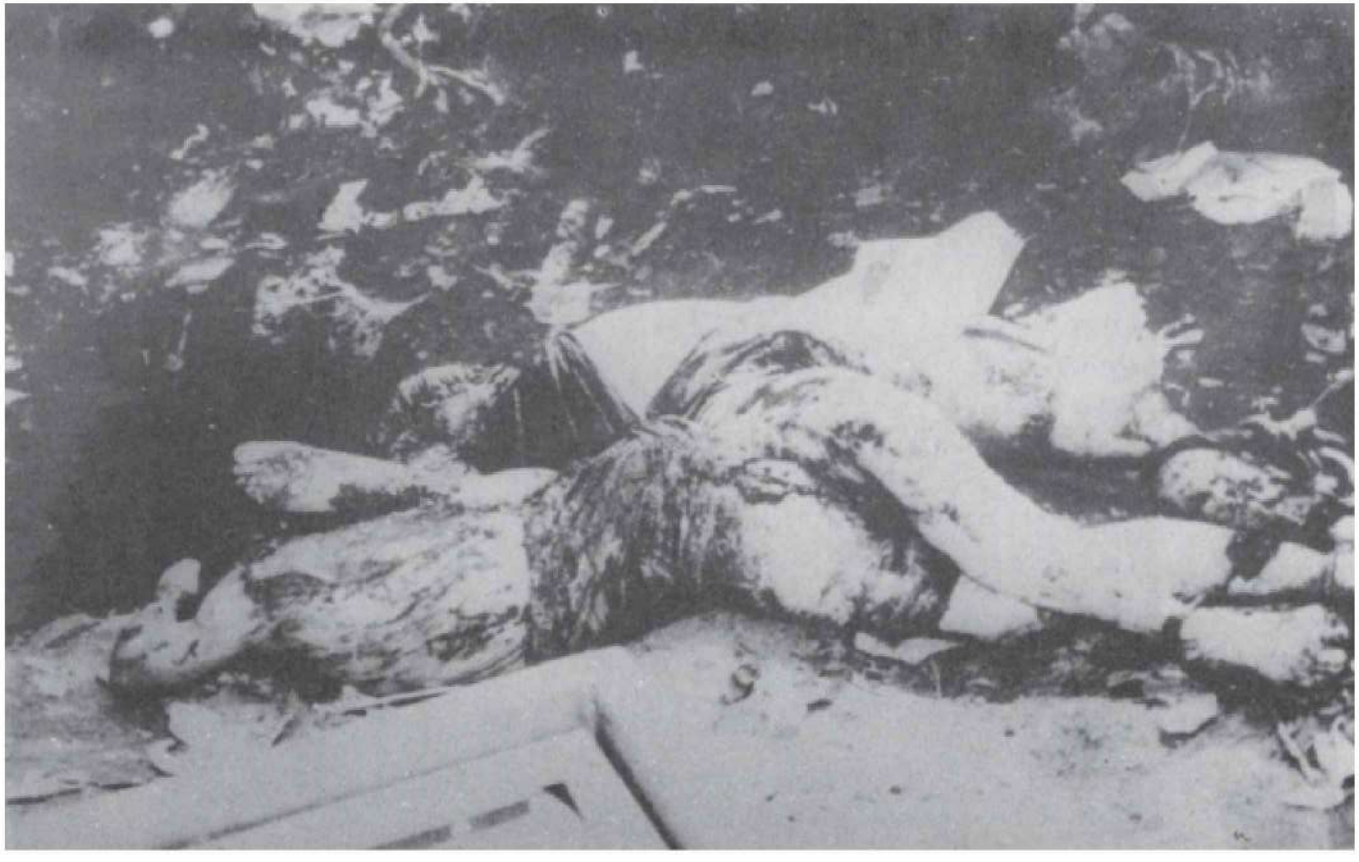

Gambar 4.7 Jenazah para Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya. Untuk kedua kalinya sejak berdirinya Republik Indonesia Kaum Komunis melakukan pengkhianatan, 1965 (Sumber: Deppen)

Angkatan Bersenjata untuk mempertinggi kesiapsiagaan dan untuk tetap di pos masing-masing dan hanya bergerak atas perintah. Seluruh rakyat supaya tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta memelihara kesatuan dan persatuan nasional. Diumumkan pula bahwa pimpinan Angkatan Darat untuk sementara waktu berada langsung dalam tangan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI, dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari ditunjuk untuk sementara Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra, Asisten III Men/Pangad.[96] Perintah itu tidak segera diketahui oleh anggota-anggota ABRI yang berada di luar daerah Halim karena pada hari yang sama, sesuai dengan tata cara yang berlaku, Mayor Jenderal Soeharto menyatakan bahwa untuk sementara ia memegang pimpinan Angkatan Darat.

Untuk menyelesaikan masalah ini, pada tanggal 2 Oktober 1965 Presiden Soekarno telah memanggil semua panglima angkatan ke Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut ia memutuskan bahwa pimpinan Angkatan Darat langsung berada dalam tangan Presiden. Untuk menyelesaikan tugas sehari-hari, dalam Angkatan Darat tetap ditunjuk Mayor Jenderal Pranoto, dan kepada Mayor Jenderal Soeharto diberi tugas untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang bersangkutan dengan peristiwa 30 September. Keputusan tersebut diumumkan melalui RRI Pusat pukul 01.30 tanggal 3 Oktober 1965.[97] Ini adalah awal eksistensi *Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban* (Kopkamtib). Berdasarkan perintah tersebut, siang harinya Mayor Jenderal Soeharto melalui RRI menyampaikan pengangkatannya selaku pelaksana pemulihan keamanan dan ketertiban yang akan dilaksanakan sebaik-baiknya.[98]

Kebijaksanaan Presiden Soekarno mengenai penyelesaian G-30-S dinyatakan dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora tanggal 6 Oktober 1965 di Istana Bogor, sebagai berikut:[99]

> "Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno menandaskan bahwa ia mengutuk pembunuhan-pembunuhan buas yang dilakukan oleh petualang-petualang kontrarevolusi dari apa yang menamakan dirinya "Gerakan 30 September". Juga Presiden tidak membenarkan pembentukan apa yang dinamakan "Dewan Revolusi". Hanya saya yang bisa mendemisioner kabinet, bukan orang lain."

---

[96] Komando Operasi Tertinggi, *Rangkaian Pidato dan Pernjataan-Pernjataan Resmi di Sekitar "Gerakan* 30 *September"*, 1965, No. 1

[97] *Ibid.*, No. 10

[98] *Ibid.*, No. 11

[99] *Ibid.*, No. 18

Dalam masalah penyelesaian G-30-S digariskan kebijakan bahwa aspek-aspek politik akan diselesaikan sendiri oleh Presiden, aspek militer-administratif diserahkan kepada Mayor Jenderal Pranoto, serta penyelesaian aspek militer teknis, masalah keamanan dan ketertiban diserahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto.

Setelah keluarnya pernyataan Presiden Soekarno yang mengutuk G-30-S dan semakin tersingkapnya fakta bahwa PKI mendalangi kudeta G-30-S, kemarahan rakyat kepada PKI semakin meningkat, yang antara lain tercetus dengan dibakarnya gedung kantor pusat PKI di Jalan Kramat Raya. Rumah-rumah tokoh PKI dan kantor-kantornya menjadi sasaran kemarahan rakyat, aksi-aksi corat-coret menuntut supaya pimpinan PKI diadili dan demonstrasi-demonstrasi menuntut pembubaran PKI dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, dan ormas-ormas yang setia kepada Pancasila. Gerakan operasi pembersihan terhadap sisa-sisa G-30-S terus ditingkatkan, antara lain yang berhasil ditangkap Kolonel A. Latief yang telah dipecat dari Brigade Infanteri I/Kodam V Jaya pada tanggal 9 Oktober 1965. Letnan Kolonel Untung tertangkap tanggal 11 Oktober 1965 di Tegal tatkala dalam perjalanan melarikan diri ke Jawa Tengah.

Sekalipun peran PKI makin terungkap sebagai dalang peristiwa G-30-S dan demonstrasi-demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin memuncak, Presiden Soekarno masih belum mengambil langkah-langkah ke arah penyelesaian politik sebagaimana dijanjikannya. Sementara itu, D.N. Aidit dalam pelariannya, pada tanggal 6 Oktober 1965 dari Blitar mengirim surat kepada Presiden, yang antara lain mengusulkan supaya melarang adanya pernyataan-pernyataan yang bersifat mengutuk G-30-S serta melarang adanya tuduh-menuduh dan salah-menyalahkan.[100] Dengan demikian, diharapkan amarah rakyat kepada PKI akan reda. Namun, aksi-aksi rakyat berjalan terus. Dalam pada itu Pepelrada-Pepelrada (Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah) yakni Komando Daerah Militer (Kodam) berturut-turut membekukan PKI dan ormas-ormasnya.

3. G-30-S/PKI di Jawa Tengah

"Setelah" bergerak di Jakarta, pihak G-30-S/PKI mulai bergerak pula di Jawa Tengah. Pada pukul 13.00 tanggal 1 Oktober 1965 melalui RRI Semarang, Asisten I Kodam VII/Diponegoro Kolonel Sahirman mengumumkan dukungannya terhadap G-30-S/PKI Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Mereka menguasai Markas Kodam VII/Diponegoro yang

[100] Pusat Sejarah ABRI, Dinas Dokumentasi, File G-30-S/PKI, "Surat D.N. Aidit kepada PJM Presiden Soekarno tanggal 6 Oktober 1965"

kemudian dijadikan pusat gerakannya, untuk meluaskannya ke seluruh Korem dan Brigade di dalam lingkungan Kodam VII/Diponegoro. Pasukan pelindung yang dipergunakannya telah didatangkan dari Solo, yakni Batalion K pimpinan Mayor Kadri, dan dua kompi Batalion D dari Salatiga pimpinan Mayor Soepardi. Pasukan-pasukan itu terutama ditempatkan di Makodam, RRI, Telekomunikasi, dan tempat-tempat lain yang strategis. Selanjutnya Kolonel Sahirman mengumumkan bahwa Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto mengambil alih pimpinan Kodam VII/Diponegoro.

Kodam VII/Diponegoro memiliki tiga brigade, yaitu Brigade 4, 5, dan 6. Sebagai hasil penggarapan Biro Khusus PKI, anggota-anggota Brigade 6 dipergunakan oleh G-30-S/PKI dan anggota-anggota Brigade 5 minimal dipengaruhi. Hanya anggota-anggota Brigade 6 yang tidak terpengaruh oleh mereka. Batalion-batalion yang aktif dipergunakan oleh G-30-S/PKI, yaitu Batalion K dan M berkedudukan di Solo, Batalion L dan C berkedudukan di Yogya, dan Batalion D berkedudukan di Salatiga. Kemudian di beberapa tempat pendukung-pendukungnya mengambil alih pimpinan setempat, yakni:

a. di Markas Komando Resort Militer (Makorem) 071/Purwokerto dipimpin oleh Kepala Staf Letnan Kolonel Soemitro;
b. di Makorem 072/Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Seksi 5 Mayor Mulyono;
c. di Makorem 073/Salatiga dipimpin oleh Kepala Staf Letnan Kolonel Idris;
d. di Markas Brigade Infanteri 6 dipimpin oleh Komandan Kompi Markas Kapten Mintarso.[101]

Pembentukan Dewan Revolusi di Yogyakarta diumumkan melalui RRI pada tanggal 1 Oktober 1965, diketuai oleh Mayor Mulyono. Dengan dukungan kekuatan Batalion L mereka mengusai Makorem 072 dan menculik Kepala Staf Korem 072 Letnan Kolonel Sugijono. Selanjutnya mereka mengeluarkan perintah kepada segenap Komando Distrik Militer (Kodim) supaya mendukung G-30-S, dan membagi-bagikan senjata kepada anggota legiun veteran setempat. Keesokan harinya pada tanggal 2 Oktober 1965 terjadi demonstrasi anggota-anggota PKI dan ormas-ormasnya di depan Makorem 072 untuk menyatakan dukungan mereka kepada G-30-S. Pada hari itu juga Komandan Korem 072 Kolonel Katamso diculik dari rumahnya dan dibawa ke kompleks Batalion L di desa Kentungan sebelah utara kota Yogyakarta. Selanjutnya bersama Letnan Kolonel Sugijono,

[101] Pusat Sejarah ABRI, Dinas Dokumentasi, File G-30-S/PKI, *Laporan Situasi Kodam VII/Diponegoro tanggal 18 Oktober 1965*, hlm. 1

Kolonel Katamso dibunuh dengan memukul kepalanya hingga pecah dengan tangkai mortir.[102]

Di kota Solo, dengan mempergunakan kekuatan Batalion M pada tanggal 1 Oktober 1965, G-30-S/PKI bergerak mengadakan penculikan terhadap Komandan Brigade 6 Kolonel Azahari, Kepala Staf Brigade 6 Letnan Kolonel Parwoto, Komandan Kodim 0735 Letnan Kolonel Ezi Soeharto, Kepala Staf Kodim 735 Mayor Soeparjan, Komandan Polisi Militer Detasemen Surakarta Kapten Prawoto, dan Komandan Batalion M Mayor Darso. Mereka menduduki gedung RRI, Telekomunikasi, Bank Negara, dan mengumumkan dukungan terhadap G-30-S. Keesokan harinya pada tanggal 2 Oktober 1965 Wali Kota Solo Oetomo Ramelan melalui RRI dengan atau nama *Front Nasional Cabang Surakarta* mengumumkan dukungannya kepada G-30-S. Daerah Surakarta diliputi suasana pemberontakan. Rakyat yang bukan anggota PKI atau organisasi satelitnya merasa ketakutan, khawatir, dan ragu-ragu. Polri belum berani bertindak kecuali hanya mengamati segala kegiatan PKI dan ormas-ormasnya karena hanya memiliki kekuatan 1 kompi Brimob dan 1 kompi perintis. Demikian juga bekas Tentara Pelajar yang tergabung dalam organisasi Gerakan Pelaksana Tjita-tjita Proklamasi (GPTP) sebanyak 50 orang, serta ormas golongan nasionalis dan agama masih bersifat pasif menghadapi kekuatan massa G-30-S yang mendapat perlindungan dari oknum-oknum Brigade 6.[103]

Sementara itu, Pangdam VII/Diponegoro Brigadier Jenderal Surjosumpeno, setelah mendengar pengumuman Letnan Kolonel Untung melalui radio, segera memanggil perwira-perwira stafnya dan *Sad Tunggal*[104] Jawa Tengah untuk mengadakan *briefing*. Diperintahkan kepada para pejabat supaya tetap tenang dan tetap di posnya masing-masing, dan berusaha untuk menenangkan rakyat karena situasi yang sebenarnya belum diketahui. Kemudian ia berangkat menuju Salatiga untuk mengadakan *briefing* yang sama dan direncanakan akan terus ke Magelang. Kepada Asisten 2 Letnan Kolonel Soeprapto diperintahkan untuk mengadakan *briefing* di Solo. Pada waktu Pangdam VII/Diponegoro tidak berada di Semarang, Kolonel Sahirman mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi dan Letnan Kolonel Usman mengambil alih pimpinan Kodam VII/ Diponegoro.

---

[102] Pusat Sejarah ABRI, Dinas Dokumentasi, File G-30-S/PKI, *Laporan Peninjauan Tentang Gestapu/Dewan Revolusi di Jawa Tengah*, 1965, hlm. 14

[103] File G-30-S, *op. cit.*, hlm. 10

[104] *Sad Tunggal* (berarti "enam menjadi satu") yaitu gabungan para pejabat paling atas tingkat daerah, terdiri atas Gubernur/Kepala Daerah, Panglima Komando Daerah Militer, Panglima Komando Daerah Kepolisian, Panglima Komando Daerah Maritim, Panglima Komando Wilayah Udara, dan Kepala Kejaksaan Tinggi

Setelah sampai di Salatiga, Brigadier Jenderal Surjosumpeno menghadapi kenyataan bahwa kota tersebut telah dikuasai oleh pemberontak dan Komandan Korem 073 ditawan oleh mereka. Segera Surjosumpeno kembali ke Semarang dan ternyata kota itu pun sudah dikuasai oleh pemberontak. Atas saran Letnan Kolonel Soeprapto yang batal berangkat ke Solo karena sudah ada informasi bahwa kota Solo dikuasai oleh pemberontak, Brigadier Jenderal Surjosumpeno berangkat menuju Magelang untuk menyusun kekuatan. Pasukan-pasukan di Garnisun Magelang tidak terpengaruh oleh G-30-S setelah Pangdam VII mengadakan *briefing* dengan komandan-komandan setempat dan memerintahkan pasukan untuk menumpas pemberontak. Pasukan-pasukan yang akan digerakkan adalah:

a. Batalion Kavaleri 2 berkedudukan di Magelang;
b. Batalion Artileri Medan 3 berkedudukan di Magelang;
c. Batalion Artileri Medan 9 berkedudukan di Magelang;
d. Batalion Zeni Tempur 4 berkedudukan di Magelang;
e. sebagian anggota Batalion 2/Para berkedudukan di Magelang;
f. Batalion F Brigade Infanteri 4 berkedudukan di Gombong;
g. sebagian anggota Batalion 3/Para berkedudukan di Semarang.[105]

Gerakan operasi penumpasan dimulai pada tanggal 2 Oktober 1965. Pasukan mulai bergerak pada pukul 05.00 untuk membebaskan kota Semarang dengan kekuatan 2 peleton (*Bronero Transportera* (BTR) = kendaraan pengangkut personel berlapis baja) Kavaleri di bawah Pimpinan Letnan Kolonel Jassin Husain dan 1 batalion Artileri Medan dengan tugas infanteri. Ternyata setelah ada siaran RRI Jakarta bahwa Jakarta telah dikuasai kembali oleh ABRI, pasukan-pasukan yang dipergunakan oleh G-30-S mulai tidak kompak sehingga kota Semarang pada pukul 10.00 telah berhasil dikuasai kembali tanpa terjadi letusan senjata. Kolonel Sahirman dan kawan-kawannya melarikan diri ke luar kota dikawal oleh 2 kompi anggota Batalion K pimpinan Mayor Kadri, sedangkan 2 kompi anggota Batalion K lainnya dan 2 kompi anggota Batalion D dapat disadarkan kembali dari keterlibatannya dalam pemberontakan G-30-S/PKI. Pukul 10.00 hari itu juga Pangdam VII melalui RRI mengumumkan bahwa Pangdam telah kembali memegang pimpinan Kodam VII/Diponegoro.

Selanjutnya berturut-turut kota demi kota yang pernah dikuasai oleh pihak G-30-S berhasil direbut kembali sehingga pada tanggal 5 Oktober 1965 garis komando Kodam VII/Diponegoro telah dipulihkan kembali. Untuk

[105] Pusat Sejarah ABRI, Dinas Dokumentasi, File G-30-S/PKI, *Laporan Situasi Kodam VII/Diponegoro tanggal 18 Oktober 1965*, hlm. 2

memantapkan konsolidasi *slagorde* Kodam VII/Diponegoro, pada tanggal 5 Oktober 1965 Pangdam VII mengadakan *briefing* secara simultan dengan komandan peleton ke atas, di Salatiga, Solo, dan Yogyakarta. Dengan demikian, secara fisik, militer pemulihan keamanan dalam jajaran Kodam VII/Diponegoro telah selesai. Akan tetapi, kemudian timbul gerakan-gerakan pengacauan, sabotase pemogokan, dan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh massa PKI terhadap golongan yang menentang G-30-S. Daerah Jawa Tengah merupakan basis PKI yang kuat, itulah antara lain mengapa ketua CC PKI D.N. Aidit memilih Jawa Tengah sebagai tempat pelariannya. Pada tanggal 1 Oktober 1965 tengah malam dengan mempergunakan pesawat terbang AURI, setelah kudeta di Jakarta gagal, Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah.

Untuk mengatasi kekacauan dan menegakkan ketertiban umum, Pangdam VII/Diponegoro mendapat bantuan pasukan RPKAD dan Kavaleri yang diberangkatkan dari Jakarta tanggal 16 Oktober dan tiba di Semarang tanggal 19 Oktober 1965. Untuk memperlancar jalannya operasi pembersihan daerah-daerah yang paling kacau terutama di Surakarta, Klaten, dan Boyolali.

Pangdam VII selaku Pepelrada Jawa Tengah menyatakan bahwa mulai tanggal 26 Oktober 1965 seluruh daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan dalam keadaan perang. Jam malam diadakan sejak pukul 17.30 hingga pukul 05.30 keesokan harinya.

Untuk mengintensifkan gerakan pembersihan terhadap sisa-sisa G-30-S/PKI, pada tanggal 1 Desember 1965 dibentuk "Komando Operasi Merapi" dipimpin langsung oleh Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo. Dalam operasi ini, antara lain ditembak mati Kolonel Sahirman, Kolonel Maryono, Letnan Kolonel Usman, Mayor Samadi, Mayor R.W. Sakirno, dan Kapten Soekarno. Dari aspek militer, dengan tertembaknya pelaku pemberontakan tersebut, kekuatan bersenjata G-30-S/PKI di daerah ini sudah berhasil dihancurkan. Oleh karena itu, pasukan RPKAD tanggal 30 Desember 1965 ditarik dari Jawa Tengah, kembali ke pangkalan. Pemulihan keamanan dan ketertiban selanjutnya dilaksanakan dalam rangka kegiatan Pepelrada, serta membersihkan orpol dan ormas pendukung G-30-S/PKI.

Sementara itu, D.N. Aidit selaku Ketua *Politbiro Central Comite PKI,* dari suatu tempat di Jawa Tengah, pada tanggal 10 November 1965 mengeluarkan "Instruksi Tetap" yang ditujukan kepada seluruh CDB PKI se-Indonesia, yang antara lain menyebutkansebagai berikut.

Jika ketua berhijrah ke tetangga, pokok pegangan adalah sebagai berikut:

a. Menjamin berlangsungnya partai.

b. Daerah-daerah basis di Jawa tetap dipertahankan.
c. Pembubaran partai dan lain-lain sebagai taktik demi terjaminnya perjuangan jangka panjang, kami anjurkan asal setelah itu dibuat CDB, CS, dan lain-lain baru.
d. Mulai sekarang hindarkan perlawanan-perlawanan frontal, kita bergerak dengan program C, sesuai dengan instruksi CC Partai 25 September.
e. Tindakan-tindakan pengamanan, teror, sabotase dijalankan secara sistematis untuk sekadar mengisi *psywar* sebagai kenyataan;
f. Usahakan agar pemerintah dan rakyat yakin bahwa partai kita masih tetap berdiri dan kuat, karena itu seksi Agitprop tiap-tiap CDB harus diperkuat dan dikerahkan.
g. Khusus di Jakarta, baik DD maupun *Sosro/Ceweng*, harus tetap dapat dirasakan bahwa kita adalah faktor bahaya besar dan tidak begitu saja dapat ditiadakan.
h. Tiap-tiap anggota partai adalah patriot, tiap-tiap anggota partai adalah informan.
i. Tiap-tiap anggota partai adalah jiwa perang, tiap-tiap anggota partai adalah penghubung.
j. Perlu dijamin, hubungan segitiga, *Sosro dan Ceweng*, yang paling aman adalah melalui perwakilan negara tetangga.[106]

Setelah Aidit mengeluarkan Instruksi Tetap tersebut, ternyata gerakan-gerakan pengacauan dan penculikan-penculikan yang dilakukan oleh golongan komunis makin melemah. D.N. Aidit sendiri tertangkap di Solo pada 22 November 1965. Setelah Aidit tertangkap, timbul pernyataan-pernyataan dari ormas-ormas PKI untuk membubarkan organisasinya di hadapan pejabat pemerintah dan rakyat setempat, diikuti dengan pembakaran bendera, papan-papan, dan lain-lain atribut PKI. Apakah tindakan-tindakannya itu berdasarkan keinsafan atau hanya sebagai taktik sesuai dengan "Instruksi Tetap" Aidit, tidak selalu jelas, tetapi setelah gerakan kudeta G-30-S/PKI mengalami kegagalan, pemimpin-pemimpin PKI yang masih belum tertangkap berusaha untuk mengadakan konsolidasi. Usaha mereka selanjutnya tercantum dalam *Tri Panji Partai* yang di antaranya menyebutkan mempersiapkan pemberontakan tani bersenjata. Secara diam-diam dan rahasia dalam perjuangan jangka panjangnya, mereka mendirikan

[106] Pusat Sejarah ABRI, Dinas Dokumentasi, File G-30-S/PKI, Central Comite Partai Komunis Indonesia, Instruksi Tetap, tanggal 10 November 1965. *Sosro* nama samaran untuk Soekarno dan *Ceweng* untuk dr. Soebandrio.

Sekolah Perlawanan Rakyat (SPR) dan *Kursus Kilat Perang Rakyat* (KKPR) serta menyusun *Kompro-Kompro (Komite Proyek)* sebagai basis menuju *comeback* PKI. Mereka merencanakan membangun kompro-kompro di seluruh daerah dengan tujuan menyusun kekuatan gerakan "desa mengepung kota".[107]

Gerakan operasi penumpasan G-30-S/PKI di daerah-daerah lain di luar Jakarta dan Jawa Tengah, dilakukan dengan operasi teritorial yang antara lain mengadakan penangkapan-penangkapan tokoh-tokoh orpol dan ormas PKI, karena di daerah-daerah tersebut pendukung G-30-S/PKI tidak sempat mengadakan gerakan perebutan kekuasaan.

G. Pendidikan, Komunikasi Massa, dan Budaya

1. Pendidikan dan Olahraga

Murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas pada tahun 1950-an jumlahnya mulai melimpah dan semuanya mengharapkan dapat menjadi mahasiswa. Mereka ini adalah produk pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Eksplosi di bidang pendidikan tinggi ini memerlukan suatu kebijakan baru untuk menampungnya, sehingga terjadilah perluasan horizontal maupun vertikal dari perguruan tinggi. Universitas baru didirikan di tiap ibu kota provinsi, sebagian karena alasan politik psikologis untuk menyalurkan kebanggaan daerah. Jumlah fakultas ditambah meskipun tenaga pengajarnya tidak ada sehingga harus dirangkap oleh pejabat-pejabat pemerintah di daerah. Perguruan-perguruan tinggi swasta juga semakin banyak, terutama setelah tahun 1960. Hal ini menandai suatu ekspansi yang sangat besar dalam pendidikan tinggi. Eksplosi pendidikan tinggi ini disebabkan oleh meluasnya aspirasi untuk menjadi mahasiswa.

Untuk menampung eksplosi murid-murid lulusan pesantren serta untuk memenuhi keinginan golongan Islam, didirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Untuk menampung keinginan Umat Kristen Protestan dan Katolik didirikan Sekolah Tinggi Theologia serta seminari-seminari. Juga didirikan perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam, Kristen dan Katolik, seperti Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta, Universitas Kristen Indonesia, serta Universitas Katholik Atmajaya.

Sistem penerimaan mahasiswa yang relatif mudah dan pembebasan uang kuliah ikut berpengaruh dan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah mahasiswa. Pertambahan jumlah mahasiswa ini membuat populasi

[107] *Pemberitaan Angkatan Bersenjata*, 30 Agustus 1968. *Central Comite* (CC) adalah pengurus tingkat pusat, sedangkan *Comite Daerah Besar* (CDB) adalah pengurus tingkat provinsi

mahasiswa melewati angka-angka seratus ribu orang dengan Jumlah perguruan tinggi 181 buah pada tahun 1961.[108] Ini berarti lebih kurang satu per seribu dari jumlah penduduk usia mahasiswa (18–24 tahun) dapat tertampung di perguruan tinggi, sedang jumlah keseluruhan penduduk usia 18–24 tahun ketika itu diperkirakan berjumlah 10.000.000 orang.[109]

Sejak tahun 1959 di bawah Menteri P dan K Prof. Dr. Prijono disusun suatu rencana pengajaran yang disebut Sapta Usaha Tama. Rencana tersebut terdiri dari 7 ketentuan. Sapta Usaha Tama itu meliputi usaha-usaha:

1. penertiban aparatur dan usaha-usaha Departemen P dan K;
2. meningkatkan seni dan olahraga;
3. mengharuskan usaha halaman;
4. mengharuskan penabungan;
5. mewajibkan usaha-usaha koperasi;
6. mengadakan kelas masyarakat;
7. membentuk regu kerja di kalangan SLTP/SLTA dan universitas.[110]

Sejak tahun 1962 sistem pendidikan untuk SMP dan SMA mengalami perubahan. Menurut rencana yang baru itu, mulai 1 Agustus 1962[111] pembagian A dan B di SMP ditiadakan. Suatu hal yang menarik dalam kurikulum SMP baru ini ialah ditambahkannya dua mata pelajaran baru, yakni mata pelajaran Ilmu Administrasi dan Kesejahteraan Keluarga.

Sistem pendidikan di SMA mendapat pula perubahan sejak tahun 1962. Dengan sistem baru ini SMA mempunyai satu jenis kelas I. Hal ini dimaksudkan agar setiap pelajar mendapat kesempatan untuk memilih minat (walaupun hanya satu tahun) jurusan-jurusan mana yang sesuai dengan bakatnya, karena mulai masuk di kelas II mereka telah dibagi-bagi sesuai dengan jurusan atau penggolongan: Budaya, Sosial, serta Ilmu Pasti dan Alam. Selain itu, kepada guru diberi tugas bimbingan bagi para pelajar di samping tugas sebagai pengajar biasa.

Jika melihat jenjang persekolahan sampai pembagian di SMA tersebut, tampak jelas bahwa mereka dipersiapkan untuk memasuki perguruan tinggi, dan bukan dipersiapkan untuk terjun dalam masyarakat setelah selesai pendidikan SMA. Hal ini pulalah yang menjadi salah satu sebab terjadinya *eksplosi* di bidang perguruan tinggi di negeri ini.

---

[108] *Perguruan Tinggi di Indonesia*, hlm. 35

[109] Widjojo Nitisastro, *Population Trends in Indonesia*, 1970, hlm. 179

[110] Instruksi Menteri P dan K, No. 1, 17-8-1959. Lihat Supardo S.H., dkk, *Civics*, 1962, hlm. 322–323

[111] Tahun ajaran ketika itu dimulai 1 Agustus setiap tahun

Tentang penyelenggaraan seni dan olahraga ditentukan, antara lain dengan kewajiban mempelajari dan menyanyikan 6 lagu nasional selain Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kegiatan olahraga ditingkatkan, sepak bola dan bola voli merupakan cabang olahraga yang dikembangkan. Untuk menumbuhkan gairah serta meningkatkan mutu, sekali-sekali diadakan pertandingan dan bagi pemenang (juara) diberi hadiah dan piala bergilir.

Bidang *usaha halaman* (UH) ialah usaha yang dapat dilakukan di halaman sekolah atau rumah, yang hasilnya dapat dibuat sebagai penambah pangan. Usaha halaman ini berlaku untuk semua tingkatan sekolah dan kejuruan atau kursus-kursus baik negeri maupun swasta. Terhadap sekolah-sekolah swasta yang tidak melakukan anjuran UH ini akan dikenakan sanksi berupa pencabutan bantuan (subsidi) pemerintah atau tidak diperkenankan mengikuti ujian-ujian negara.[112]

Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada bank tabungan pos, kantor pos, dan kantor pos pembantu. Cara menabung ini diatur oleh Departeman P dan K bersama-sama dengan direksi bank tabungan pos.[113] Usaha ini adalah mendidik anak berhemat untuk hari depan di samping pengumpulan dana dari masyarakat untuk pembangunan. Gerakan koperasi di sekolah-sekolah juga digiatkan. Murid-murid sendiri ikut secara aktif dalam penyelenggaraan koperasi di sekolahnya masing-masing. Kepala sekolah dan guru-guru bertugas sebagai pengawas dan penasihat atas koperasi sekolah yang dibentuk di sekolah tersebut.[114]

Suatu kelas masyarakat, yang waktu pendidikannya dua tahun, dibentuk untuk menampung para lulusan sekolah rakyat yang karena sesuatu hal tidak dapat meneruskan. Mereka yang dididik dalam kelas masyarakat ini untuk mendapatkan keterampilan khusus sehingga para lulusannya dapat berdiri sendiri dengan mempergunakan kecakapan dan keterampilan lainnya.

Sekitar tahun 1960-an di kalangan pendidikan telah timbul suatu masalah serius yakni usaha-usaha PKI untuk menguasai organisasi profesi guru, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Hal itu menimbulkan perpecahan di kalangan guru dan PGRI. Ketua PGRI Subiadinata menolak tegas usaha-usaha PKI untuk menguasai PGRI itu. Dengan berbagai alasan, beberapa orang anggota pengurus PGRI menolak kebijakan ketuanya. Oleh

---

[112] Instruksi Penjelenggaraan Kegiatan Seni dan Olah Raga Dilingkungan Departemen PP dan K

[113] *Ibid.*

[114] Instruksi Penjelenggaraan Kewadjiban Menabung oleh murid-murid sekolah di lingkungan P dan K

karena itu, mereka mendirikan organisasi tandingan, yang diberi nama *PGRI Non-Vaksentral* yang diketuai oleh Subandri.

Perpecahan PGRI itu bertepatan waktunya dengan dilancarkannya sistem pendidikan baru oleh Menteri PP dan K. Sistem baru itu adalah *Pancasila* dan *Pancawardhana.* Sistem Pancawardhana[115] atau lima (pokok) perkembangan, yang penjabarannya sebagai berikut:

1. perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/ internasional/keagamaan;
2. perkembangan inteligensi;
3. perkembangan nasional artistik atau rasa keharusan dan keindahan lahir batin;
4. perkembangan keprigelan (kerajinan tangan);
5. perkembangan jasmani.[116]

Di lingkungan perguruan tinggi selama periode Demokrasi Terpimpin itu diintensifkan studi terpimpin dalam rangka pelaksanaan Manipol-Usdek di perguruan tinggi, yang kemudian diikuti dengan *retooling.* Selain itu, dilakukan indoktrinasi Manipol-Usdek serta ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi kepada seluruh civitas akademika sebagai mata kuliah utama.

Negara-negara yang baru merdeka, negara berkembang pada umumnya, menghadapi kekurangan tenaga-tenaga terampil yang terdidik, sedangkan pembangunan sangat memerlukan tenaga-tenaga ahli. Karena tenaga demikian itu dididik di kampus, kerja sama antara perguruan tinggi dengan pemerintah atau swasta diadakan. Kerja sama ini biasanya dimasukkan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Pada awal Demokrasi Terpimpin, kepada perguruan tinggi diberi tugas melaksanakan *Tridharma Perguruan Tinggi,* yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.[117]

Di bidang keolahragan, terjadi perubahan menuju kemajuan. Pada tahun 1957 Inspeksi Pusat Pendidikan Djasmani (IPPD) diubah menjadi

---

[115] Masalah *Pancawardhana* ini banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat. Sementara orang beranggapan bahwa dengan sistem *Pancawardhana* ini, anak didik akan di bawa ke arah pendidikan komunisme.

[116] Supardo S.H., dkk, *op. cit.*, hlm. 481

[117] Yang dimaksud dengan studi terpimpin adalah suatu sistem pendidikan yang di dalamnya pelaksanaan tugas mahasiswa dan tugas pengajar tidak dilakukan sebebas-bebasnya.Akan tetapi, dengan bimbingan dan pimpinan dalam bentuk-bentuk yang ditujukan guna menghasilkan ahli-ahli dalam batas waktu tertentu, sesuai dengan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Lihat *Perguruan Tinggi di Indonesia, op. cit.,* hlm. 23–25

Biro Pendidikan Jasmani. Perubahan organisasi tersebut dapat disimpulkan sebagai langkah perbaikan.

Setelah *ASIAN Games III* diadakan di Tokyo pada tahun 1958, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah *ASIAN Games IV* di Jakarta. Sehubungan akan diadakan *ASIAN Games* di Jakarta, terjadi perubahan struktur organisasi Kementrian PP & K, Biro Pendidikan Jasmani ditingkatkan menjadi Jawatan Pendidikan Jasmani sejak tahun 1960.

Seiring dengan kondisi politik kenegaraan kala itu, Presiden Soekarno ingin menjadikan olahraga sebagai instrumen revolusi pembangunan yang multikompleks, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Salah satu kampanye yang menonjol adalah olahraga dijadikan *nation and character building.* Sehubungan dengan itu, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962, tentang Pembentukan Departemen Olahraga (Depora) yang bertugas mengatur, mengoordinasikan, mengawasi, membimbing, dan bila perlu menyelenggarakan kegiatan olahraga termasuk pendidikan jasmani di sekolah sampai perguruan tinggi. Menyertai dibentuknya Depora, pada tanggal 18 Desember 1963 Keppres Nomor 263 Tahun 1963i tentang "Pedoman Pelaksanaan Rencana 10 Tahun Departemen Olahraga yang berisi perintah kepada Menteri Olahraga untuk dapat melaksanakan tugas tesebut. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut dibentuk Dewan Olahraga Republik Indonesia (DORI) dengan Keppres Nomor 174/1964 tanggal 20 Juli 1964.[118] Menteri Olahraga Republik Indonesia pertama adalah R. Maladi.

Dengan adanya Depora dan didukung oleh komitmen presiden, olahraga mengalami puncaknya di *ASIAN Games IV*.

Dalam *ASIAN Games IV* Indonesia berhasil menempati ranking ke-2 di bawah Jepang. Namun, setelah Indonesia berhasil menyelenggarakan *ASIAN Games IV* suatu masalah penting yaitu *Executive Board I.O.C* di Lausanne menjatuhkan skorsing kepada Komite Olympiade Indonesia pada tahun 1963 untuk selama waktu yang tidak ditentukan karena tidak diundangnya Taiwan dan Israel pada *ASIAN Games IV*. Akhirnya, skorsing tersebut dicabut pada tahun 1963 karena Indonesia telah merencanakan akan menyelenggarakan *Ganefo* pada bulan November 1963. Ganefo I berhasil dilaksanakan pada bulan November 1963 di Jakarta dan Indonesia berhasil menempati ranking ke-3 sesudah USSR dan RRC.

---

[118] Toha Cholik Mutohir, "Penguatan Tatanan Kelembagaan Keolahragaan Nasional Masa Depan untuk Mendukung Sistem Keolahragaan Nasional" (Makalah), 2006, hlm. 23

2. Komunikasi Massa

Surat kabar dan majalah yang tidak bersedia "menari" dengan irama Demokrasi Terpimpin harus menyingkir dan tersingkir. Persyaratan untuk mendapatkan Surat Ijin Terbit dan Surat Ijin Tjetak (SIT) diperketat. Sejak 1960, semua penerbit surat kabar dan majalah diwajibkan mengajukan permohonan SIT. Pada formulir permohonan SIT itu dicantumkan 19 pasal pernyataan yang mengandung janji penanggung jawab surat kabar atau majalah tersebut. Untuk dapat diberi SIT, ia harus mendukung Manipol-Usdek.

Pedoman resmi untuk penerbitan surat kabar dan majalah di seluruh Indonesia dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1960 yang ditandatangani oleh Ir. Djuanda selaku Pejabat Presiden. Pernyataan yang berisi 19 pasal tersebut dengan mudah dipergunakan oleh penguasa untuk menindak surat kabar dan majalah yang tidak disenanginya. Akibatnya, satu demi satu penerbitan yang paling gigih menentang dominasi PKI di cabut SIT-nya, walaupun telah menandatangani pernyataan itu. Surat kabar yang dicabut SIT-nya oleh PKI, antara lain, harian *Pedoman, Nusantara, Keng Po, Pos Indonesia,* dan *Star Weekly*. Surat kabar *Abadi* memilih untuk menghentikan penerbitannya daripada menandatangani persyaratan 19 pasal itu. Makin sedikitnya pers Pancasilais yang masih hidup, menggambarkan betapa merajalelanya surat kabar PKI, seperti *Harian Rakjat, Bintang Timur,* dan *Warta Bhakti.*[119]

Melalui *Harian Rakjat,* surat kabar resminya, pimpinan PKI memimpin kampanye agitasi dan propaganda untuk menghitamkan dan bahkan menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Dengan demikian, mendekatkan dirinya kepada kedudukan hegemonistis dalam konstelasi politik Indonesia. Di samping *Harian Rakjat,* PKI menerbitkan surat kabar berkala lainnya, seperti *Bintang Muda, Mingguan Sport, Harian Rakjat Minggu, Zaman Baru,* dan surat kabar yang diselenggarakan oleh CDB. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) satu-satunya organisasi profesi wartawan yang ada dan diakui pemerintah, didominasi oleh golongan komunis dan satelit-satelitnya. Karena itulah wartawan yang berada di luar kubu komunis tidak dapat lagi bergerak karena sudah dikepung oleh orang-orang PKI. Bahkan Departemen Penerangan akhirnya dapat digiring kepada sikap mendukung garis yang diajukan PKI.

Dalam pada itu, PKI dan satelit-satelitnya sejak dahulu telah menyadari pentingnya menguasai dan mengontrol alat-alat mass media. PKI bersedia berbuat apa saja untuk mengamankan pers dan wartawan komunis.

---

[119] H. Soebagio I.N., *Sejarah Pers Indonesia,* Jakarta, 1977, hlm. 120–125

Seorang tokoh kawakan dalam dunia pergerakan pada umumnya dan dalam dunia pers pada khususnya, yakni Sajuti Melik alias Juti, bermaksud menyebarluaskan ajaran-ajaran Bung Karno yang murni (dalam arti belum dipengaruhi oleh komunisme) melalui tulisan-tulisan yang dimuat dalam surat kabar-surat kabar dengan judul tulisan "Belajar Memahami Soekarnoisme". Isi pokok tulisan Sajuti Melik itu ialah "Tidak setuju Nasakom", melainkan setuju Nasasos. Maksudnya ialah mengingatkan pelbagai pihak akan ajaran-ajaran Bung Karno yang murni. Dengan demikian, diharapkan tulisannya dapat membendung penyimpangan-penyimpangan oleh PKI terhadap ajaran-ajaran itu. Pada mulanya tulisan Juti ini dimuat dalam *Suluh Indonesia,* koran PNI, dan dari koran itu dikutip oleh harian-harian dan majalah-majalah lainnya. Akan tetapi, setelah ada protes keras dari PKI, tulisan-tulisan Juti dihentikan pemuatannya oleh *Suluh Indonesia.* Berdasarkan tulisan-tulisan Sajuti Melik ini, berdirilah *Badan Pendukung Soekarnoisme* (BPS). Pengurus BPS adalah sebagai berikut: Ketua: Adam Malik; Wakil Ketua: B.M. Diah; Ketua Harian: Sumantoro; Wakil Ketua Harian: Junus Lubis; Sekretaris Umum: Drs. Asnawi Said; Bendahara: Sunaryo Prawiradinata; Biro Dalam Negeri: Sugiarso; Biro Luar Negeri: Zain Effendi A.I., Penghubung: Adyatman.[120] BPS ini terbukti mendapat dukungan luas dalam masyarakat, meskipun di lain pihak mendapat tantangan yang hebat dari PKI dan satelit-satelitnya. Melalui surat kabar-surat kabar, rapat-rapat, dan demonstrasi, golongan komunis menfitnah dan mencaci maki BPS dengan slogan yang terkenal ketika itu, yakni *to kill Soekarno with Soekarnoism.* Tuduhan lain yang dilemparkan ke alamat BPS ialah menjadi agen-agen *Central Intelligence Agency* (CIA) Amerika Serikat atau menjadi antek-antek kaum subversif neo-kolonialis. Dapat dibayangkan jika sesuatu atau seseorang itu sampai dituduh subversif atau kolonialis yang juga disampaikan dengan anti-Manipol-Usdek, anti-Nasakom, artinya mereka sudah berada dalam keadaan bahaya.

Pemerintah Soekarno waktu itu mendapat tekanan-tekanan dari golongan komunis untuk menindak BPS. Pada akhirnya Presiden Soekarno, selaku pemutus terakhir turun tangan. Keputusan yang diambil Presiden Soekarno pada bulan Februari 1965 ialah: "... melarang semua aktivitas BPS dan mencabut izin terbit koran-koran penyokong BPS". Ini berarti, bubarlah BPS.

Akibat dilarangnya koran-koran pendukung BPS itu ialah banyak karyawan pers, yang dengan segala iktikad baik hendak menyebarkan ajaran-ajaran Bung Karno menurut tafsiran yang murni dan bukan menurut tafsiran komunis, kehilangan nafkahnya. Selain itu, Persatuan Wartawan

[120] H. Soebagio, I.N., *op. cit.,* hlm. 132

Indonesia (PWI) melakukan pemecatan secara massal terhadap anggota-anggota PWI yang menurut anggapan mereka terlibat dalam kasus BPS. Pada waktu itu pengurus PWI sudah dipengaruhi oleh golongan komunis dan golongan PNI-Ali-Surachman. Pemerintah kemudian mengadakan pengusutan terhadap gembong-gembong BPS yang pada umumnya terdiri dari wartawan-wartawan termasuk Sajuti Melik.

3. Kehidupan Budaya

Sesuai dengan semboyan PKI "politik adalah panglima", maka seluruh kehidupan masyarakat diusahakan untuk berada di bawah dominasi politiknya. Kampus diperpolitikkan: mahasiswa yang tidak mau ikut dalam rapat umumnya, apel-apel besarnya, dan demonstrasi-demonstrasi "revolusioner"-nya dimaki-maki dan dirongrong oleh unsur *Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia* (CGMI) atau satelit-satelitnya. Wartawan yang ikut BPS dimaki-maki sebagai antek Nekolim atau agen CIA. Para budayawan pada umumnya dan para seniman pada khususnya tidak luput dari raihan tangan-tangan mereka.

Sudah barang tentu *realisme sosialis* sebagai doktrin komunis di bidang seni dan sastra diusahakan untuk menjadi doktrin di Indonesia pula. Akan tetapi, pelaksanaan doktrin tersebut dilakukan secara lebih represif daripada persuasif. Yang paling mudah ditindak adalah pemusik-pemusik pop yang dilarang untuk memainkan apa yang disebut "musik ngak-ngik ngok gila-gilaan ala imperialis Amerika Serikat". Meskipun banyak juga orang yang tidak suka pada jenis musik semacam itu, bukan berarti pemusiknya harus ditangkap. Oleh karena itu, masyarakat menggeleng-gelengkan kepala ketika pemusik kelompok *Koes Bersaudara* ditahan beserta instrumen-instrumennya oleh pihak Kejaksaan, hanya karena mereka memainkan musik yang tidak disukai oleh PKI.

Peristiwa yang paling diingat oleh masyarakat pada bidang budaya adalah heboh mengenai *Manifes Kebudayaan* dan *Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia* (KKPI). Manifes Kebudayaan yang dikenal dengan singkatan peyoratif yang dilemparkan oleh PKI kepadanya, yakni "Manikebu" dikenang sampai sekarang.

Sesungguhnya isi Manifes Kebudayaan itu tidaklah baru atau luar biasa. Yang diungkapkan sesungguhnya adalah konsepsi *humanisme universal* yang timbul dalam masyarakat liberal, di Eropa Barat yang menekankan kebebasan individu untuk berkarya secara kreatif.

Memang Manifes Kebudayaan itu tidak serta-merta diserang oleh PKI dan satelit-satelitnya. Mereka baru bertindak menyerang setelah lebih empat

bulan Manifes Kebudayaan beredar. Apakah gerangan yang menyebabkan sekonyong-konyong PKI merasa perlu menyerang Manifes Kebudayaan?

Jawabnya ialah karena para sastrawan Pancasilais, baik yang mendukung Manifes Kebudayaan maupun yang tidak, menyiapkan rencana untuk menyelenggarakan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI). Suatu manifes saja tidaklah dianggap ancaman oleh PKI. Akan tetapi, suatu pengelompokan yang terorganisasi mereka nilai sebagai suatu bahaya yang harus secepatnya ditumpas sebelum berkembang menjadi besar.

Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk menyerang KKPI. Mereka beranggapan bahwa sastrawan-sastrawan yang menyiapkan KKPI bukanlah orang yang buta politik, mereka sudah melakukan pengamanan secukupnya, baik berupa konsepsi maupun berupa dukungan pejabat-pejabat dan kekuatan-kekuatan yang Pancasilais. Dengan demikian, PKI tidak menemukan "lubang" untuk menyerang KKPI terlebih setelah terbentuk Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI). Yang dapat diserang karena dapat digambarkan sebagai suatu konsepsi asing yang berasal dari Barat adalah Manifes Kebudayaan. Karena itulah PKI mengadakan kampanye untuk mengindentikkan KKPI dan PKPI dengan Manifes Kebudayaan untuk bersama-sama dihancurkan.

Serangan terhadap Manifes Kebudayaan terus dilancarkan melalui dan tulisan yang makin nyaring bunyinya dalam *Harian Rakjat, Bintang Timur,* dan *Zaman Baru.* Oleh PKI/Lekra, Manifes Kebudayaan disebut sebagai penyelewengan dari Revolusi Indonesia yang berporoskan *soko guru* tani, buruh, dan prajurit. Konsep hasrat "hati nurani manusia" bagi PKI/Lekra terlalu umum dan tidak revolusioner. PKI dan ormasnya menyokong penuh gagasan Manipol karena dalam ide-ide itu terdapat persesuaian gagasan sikap politik budaya dari perjuangan komunisme. Oleh *Bintang Timur* dilontarkan lagi tuduhan baru, Manifes Kebudayaan memisahkan politik dan kebudayaan, menjadikan Manikebu pegangan dan pedoman berarti mengesampingkan Manipol. Dan inilah tujuan konseptor Manikebu yang hakiki.[121] Sitor Situmorang, Ketua LKN, mengatakan Manifes Kebudayaan hendak memecah belah persatuan Nasakom.[122]

Tajuk rencana *Warta Bhakti* menyebut, antara lain:

> "Gagasan *Manikebu* lahir dari siasatnya orang-orang yang partainya sudah dilarang dengan mencoba berfilsafat bahwa kemanusiaan tanpa pandang bulu harus menjadi mahkota hidup kita. *Manipol* yang tidak bertoleransi terhadap

[121] *Bintang Timur,* 5 Februari 1964

[122] *Warta Bhakti,* 6 Maret 1964

kaum kontrarevolusi. *Manipol* yang tidak memberi ampun kepada imperialisme agaknya dianggap oleh manikebuis sebagai suara yang tidak berperikemanusiaan .... *Manikebuisme*, meskipun sekadar bermerek "kebudayaan", tetapi hakikatnya adalah suatu paham yang diciptakan secara masak untuk membela liberalisme ...."[123]

Propaganda PKI yang hebat itu bukan sedikit memengaruhi massa. Serangan-serangan terhadap pendukung-pendukung Manifes Kebudayaan dan KKPI tidak henti-hentinya dalam harian, pidato, tokoh-tokoh PKI/Lekra, dan juga dalam tindakan aksi politik. D.N. Aidit sebagai Wakil Ketua MPRS/ Menteri Koordinator, antara lain menyebut Manikebu yang menentang Nasakom, agar rakyat mengungkapkan kemunafikan mereka.[124] Istilah *Manikebu* bukan lagi diartikan hanya bagi penyokong dan pencetus Manifes Kebudayaan Manikebu menurut pengertian dan penggunaan PKI/Lekra termasuk penentang-penentang dari segala bidang kebudayaan, ekonomi, dan politik yang tidak sehaluan dengan cita-cita PKI. Serangan lewat mass media, aksi turun ke jalan berdemonstrasi dilakukan oleh penyokong PKI/ Lekra. Semua aksi-aksi itu memengaruhi Presiden Soekarno, sehingga pada ulang tahun Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) yang ke-3, beliau mengucapkan pidato, yang isinya antara lain sebagai berikut. "... mendesak mahasiswa-mahasiswa yang revolusioner dan militan supaya menggeser guru besar-guru besar dan sarjana-sarjana yang anti-*Manipol*".[125]

Pidato-pidato Presiden Soekarno tentang *Manipol-Usdek* diolah pimpinan PKI untuk penerapan bagi konsumsi rakyat. Dalam pidato Manipol (17 Agustus 1959), Soekarno mengecam kebudayaan Barat yang memperkenalkan tarian "*rock and roll*", "dansa *a'la cha-cha*", musik *a'la* "*ngak-ngik-ngok* gila-gilaan" yang diasosiasikan dengan cita-cita imperialisme Barat. Tidak seorang pun memungkiri bahwa kekuatan PKI setelah tahun 1963 sangat besar dan berpengaruh sekali. Oleh karena itu, tokoh-tokoh PKI dapat saja keluar masuk Istana. Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan perintah larangan terhadap *Manifes Kebudayaan* pada tanggal 8 Mei 1964, kira-kira dua bulan setelah KKPI. Pernyataan larangan itu, adalah:

"Sebab-sebab larangan itu ialah, karena Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai pancaran Pancasila telah menjadi garis besar haluan negara dan tidak mungkin didampingi dengan *Manifesto* lain, apalagi kalau *Manifesto* itu menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi dan memberi kesan berdiri di

---

[123] *Ibid.*

[124] *Bintang Timur*, 23 Maret 1964

[125] *Ibid.* (edisi Minggu), 12 April 1964

sampingnya, padahal demi suksesnya revolusi, maka segala usaha kita juga dalam lapangan kebudayaan, harus kita jalankan di atas rel revolusi menurut petunjuk-petunjuk Manipol dan bahan-bahan indoktrinasi."[126]

Pernyataan Presiden Soekarno yang menganggap pendukung Manifes Kebudayaan ragu-ragu terhadap revolusi dan menganggap Manifes Kebudayaan bertentangan dengan Manipol adalah tuduhan yang sangat berbahaya waktu itu. Majalah *Sastra* yang menjadi wadah aktivitas-aktivitas Manifes Kebudayaan, kehabisan napas. Karena larangan terhadap Manifes Kebudayaan, orang takut membeli dan membaca. Akibatnya, jadi tidak ada pasaran lagi.

Pencetus utama Manifes Kebudayaan H.B. Jassin, Wiratmo Sukito, dan Trisno Sumardjo, merasakan bahwa mereka harus membuat suatu pernyataan berkenaan dengan perintah pelarangan dari Presiden Soekarno untuk menjelaskan posisi Manifes Kebudayaan, membersihkan diri mereka dan lain-lain penyokong Manifes Kebudayaan dari aksi-aksi massa yang digerakkan oleh PKI. Oleh sebab itu, pada tanggal 11 Mei 1964, ketiga tokoh itu menanggapi larangan Presiden Soekarno dengan pernyataan:

> "... tidak ada maksud lain selain daripada membangkitkan swadaya di bidang kebudayaan.
>
> Dan berhubung sesuai dengan larangan PJM Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno, terhadap *Manifes Kebudayaan* yang tersebut demi keutuhan dan kelurusan jalannya revolusi, dan demi kesempurnaan ketahanan bangsa, maka kami, para pendukung *Manifes Kebudayaan* di Jakarta menganjurkan kepada saudara-saudara agar mematuhi/memenuhi maksud daripada larangan tersebut.
>
> Dengan demikian kita tetap setia di bawah pimpinan dan bimbingan Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno, justru untuk kepentingan nasional kita sebagai salah satu golongan yang tetap setia pada revolusi harus menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan lainnya.[127]

Pernyataan dibuat supaya jangan banyak korban jatuh akibat dukungan kepada Manifes Kebudayaan. PKI dan ormas-ormasnya belum puas dengan hanya larangan ini, sebab itu D.N. Aidit dalam menyambut HUT 44 tahun PKI menyatakan, antara lain: "... rakyat dan mahasiswa-mahasiswa yang revolusioner-progresif menghancurkan *Manikebu*, masih ada pegawai-pegawai instansi pemerintah yang melindungi Manikebu".[128]

---

[126] Pernyataan larangan Presiden dimuat dalam *Warta Bakti*, 10 Mei 1964

[127] Pernyataan ini disebarkan kepada seluruh pendukung Menteri Kebudayaan dan diberi tanggal 8 Mei 1965

[128] D.N. Aidit, "Manikebu Bertugas Lutjuti Sendjata Rakjat", *Bintang Timur*, 31 Mei 1964

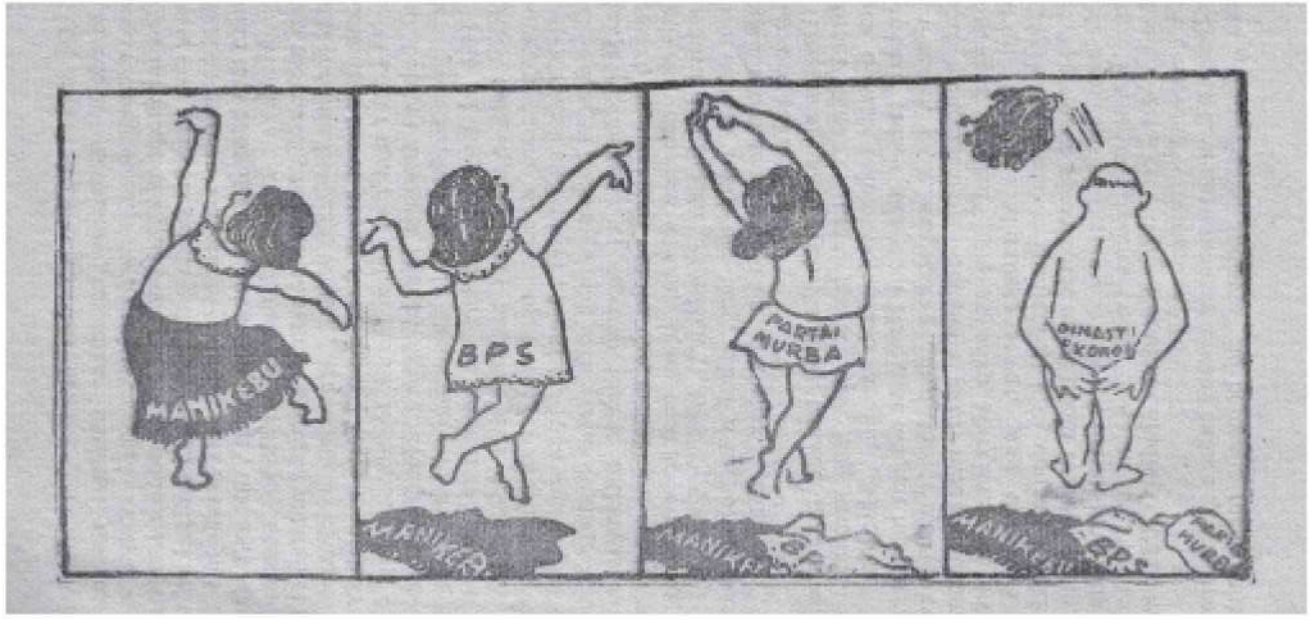

Gambar 4.8 Kartun Manikebu di sebuah media massa (Sumber: *Dokumen Istimewa*)

Karena merasa sudah cukup kuat, PKI pada tanggal 27 Agustus–2 September 1964 mengadakan Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) di Jakarta. Mungkin juga KSSR ini dimaksudkan untuk menandingi KKPI yang diadakan pada bulan Maret yang lalu. Dengan KSSR ini PKI ingin membuktikan bahwa suasana kebudayaan berada di bawah kekuasaan PKI. Kalau KKPI meminta Presiden Soekarno untuk hadir dan memberi sambutan pada pembukaan KKPI, pihak PKI bisa mendapatkan amanat dan kehadiran Presiden Soekarno pada pembukaan KSSR itu.[129] Jelas sudah, arah politik Presiden Soekarno.

Dengan demikian, PKI berhasil memukul Manifes Kebudayaan, tetapi PKPI tidak dapat mereka hancurkan. Memang PKPI mereka "kepung" dengan ketat sampai tidak dapat bergerak keluar. Akan tetapi, benteng Pancasila itu tidak dapat mereka taklukkan. Para budayawan Indonesia memperoleh pelajaran yang berharga, bahwa untuk menghadapi komunisme kecuali suatu manifes atau pernyataan prinsip, diperlukan pula senjata organisasi.

H. Seni

1. Sanggar-Sanggar Pelukis

Sekalipun kehidupan sosial dan ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda membaik, sanggar-sanggar seniman pelukis mulai terorganisasi. Wacana politik telah menjadi bagian dari kegiatan mereka. Embrio berdirinya sanggar-sanggar seniman pelukis, diawali di Jakarta dan Bandung. Ketika ibu kota Rl dipindahkan ke Yogyakarta, tahun 1946–1949, para seniman ikut hijrah pula ke Yogyakarta. Sanggar yang semula dipimpin oleh pelukis Affandi bernama "Seniman Masyarakat" di Jakarta kemudian menjadi "Seniman Indonesia Muda" disingkat SIM dipimpin oleh S. Sudjojono[130] dan bersanggar di tepi alun-alun utara Yogyakarta dengan anggota Affandi, Hendra Sudarso, Trubus, Dullah, Kartono Yudhokusumo, Basuki Resobowo, Rusli, Harjadi, Suromo, Burono, Abdul Salam, D. Joes, dan Zaini. Sanggar SIM berperan menjadi duta seniman lukis Indonesia karena sering dikunjungi oleh tamu-tamu negara atas anjuran Presiden Soekarno. Adakalanya SIM diminta membawa koleksi lukisan anggota-anggotanya ke Istana Negara untuk dipamerkan oleh Presiden kepada para tamunya.[131]

---

[129] D.N. Aidit, "Hajo bersama-sama Bung Karno kita bina kebudayaan yang berkepribadian nasional", *Zaman Baru*, Desember 1964, hlm. 1–3

[130] Kusnadi, "Periode Revolusi Fisik Kemerdekaan", dalam *Perjalanan Seni Rupa Indonesia Dari Zaman Prasejarah Hingga Masa Kini*, 1990/1991, hlm. 93

[131] Daoed Joesoef, *Bung Karno, Seni dan Saya*, dalam St. Sularto, *op. cit.*, hlm. 348

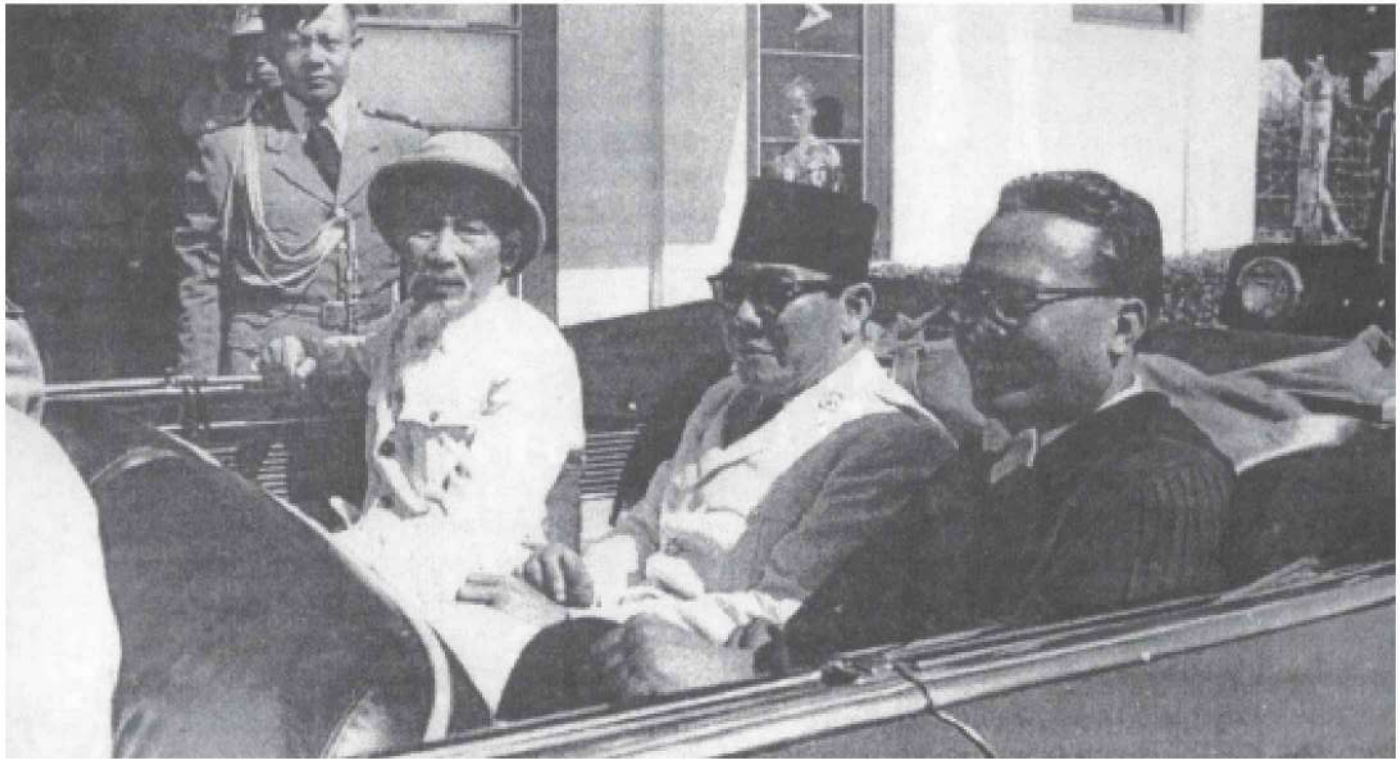

Gambar 4.9 Presiden Soekarno dan Direktur Departemen Seni Rupa ITB Pertama Sjafei Soemarojo (Sumber: *Dokumen Istimewa*)

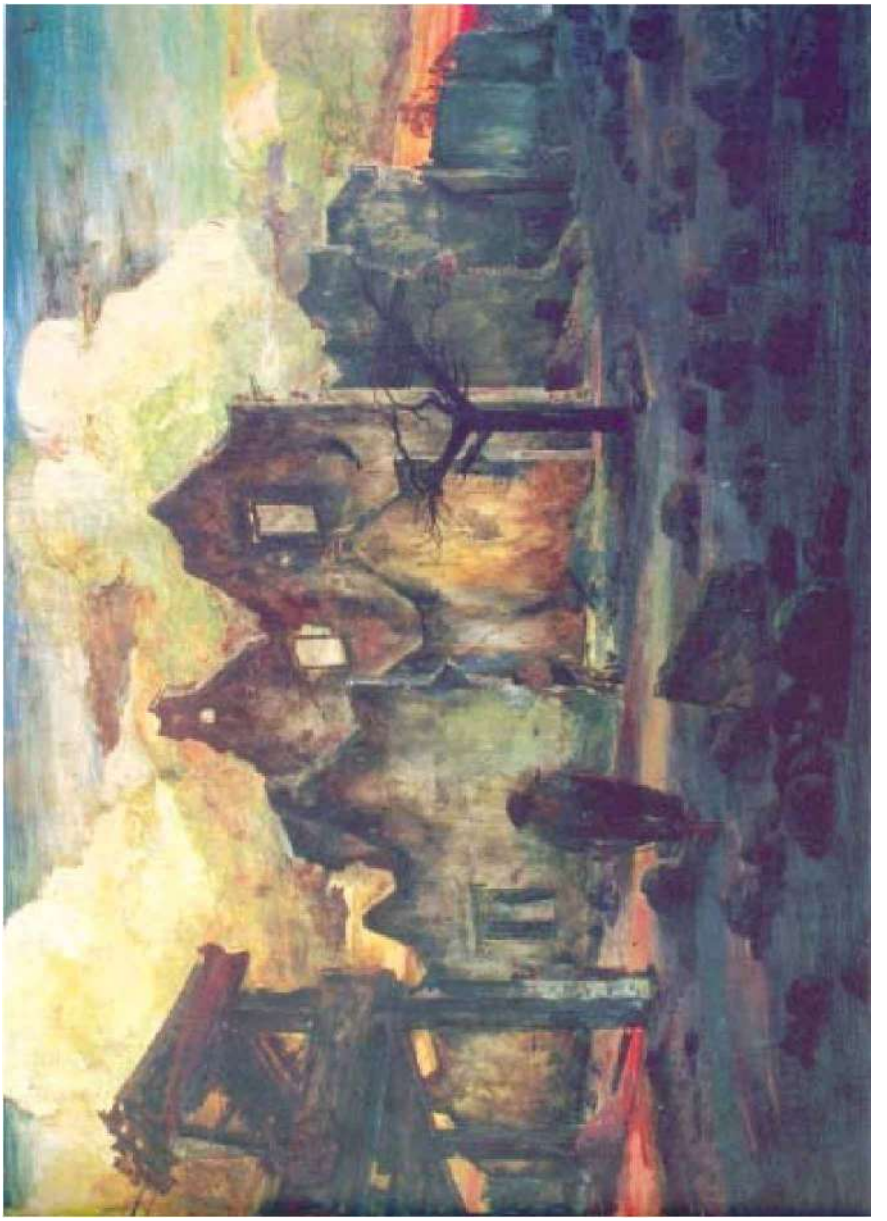

Gambar 4.10 Lukisan bertema perjuangan karya S. Sudjono (Sumber: *Dokumen Istimewa*)

Gambar 4.11 Presiden Soekarno dan Direktur ASRI Pertama R.J. Katamsi (Sumber: *Dokumen Istimewa*)

Gambar 4.12 Lukisan bertema perjuangan karya Afandi (Laskar Rakyat Mengatur Siasat)
(Sumber: *Dokumen Istimewa*)

Gambar 4.13 Poster Affandi, Boeng, Ajo Boeng
(Sumber: *Dokumen Istimewa*)

Gambar 4. 14 Lukisan bertema perjuangan (Pengantin Revolusi) karya Hendra Gunawan (Sumber: *Dokumen Istimewa*)

Gambar 4.15 Lukisan gadis bergaun merah
(Sumber: *Dokumen Istimewa*)

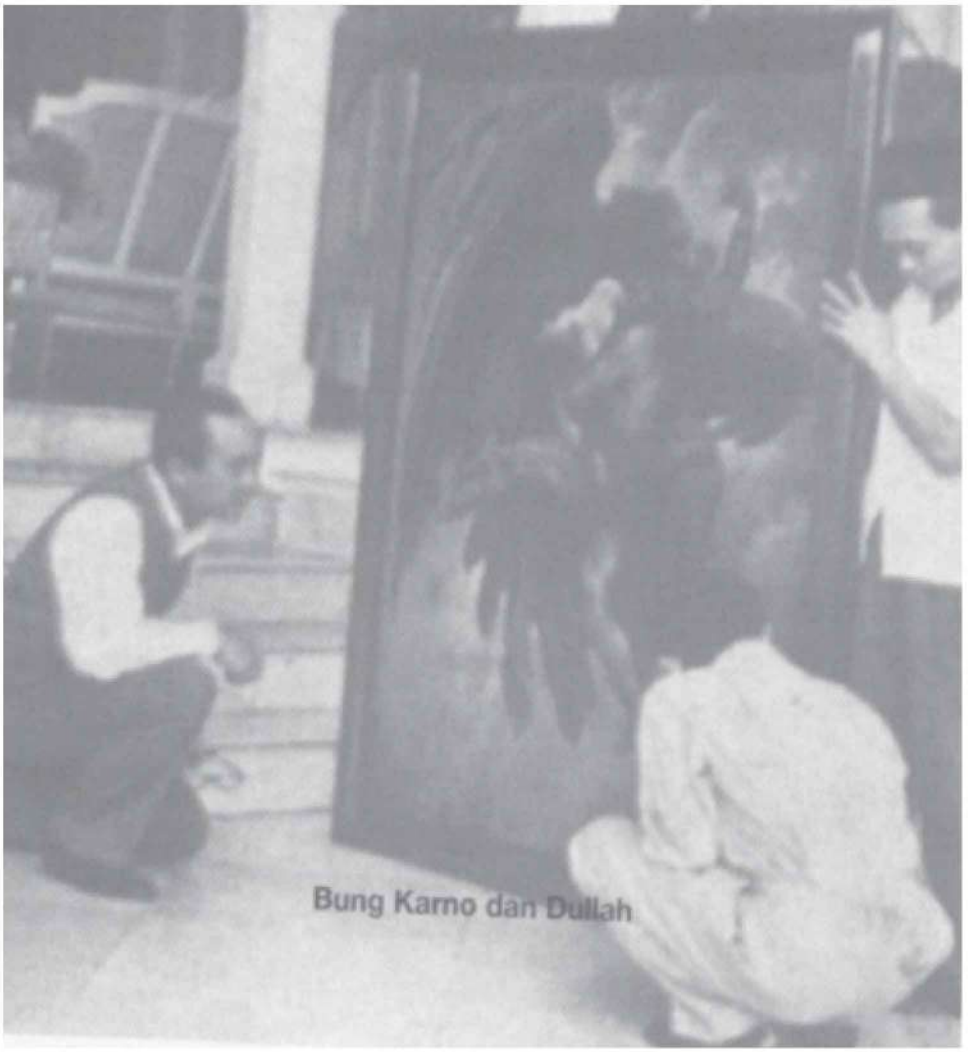

Gambar 4.16 Bung Karno dan Dullah (Sumber: *Dokumen Istimewa*)

Dasar berdirinya sanggar-sanggar seniman adalah semangat kebersamaan mendukung cita-cita kemerdekaan. Selain berfungsi sebagai wadah berkumpulnya para seniman, sanggar-sanggar juga dipakai sebagai tempat pameran pertama di Indonesia, diprakarsai oleh dua pelukis Belanda Simon dan Ries Mulder. Kemudian, atas rintisan Sjafei Sumardja, lembaga itu menjadi bagian dari Departemen Perencanaan dan Seni Rupa bersama Bagian Seni dan Arsitektur, Institut Teknologi Bandung. Setelah mengalami beberapa kali perubahan, mulai 1984 lembaga tersebut menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain. Sejak awal berdirinya, lembaga tersebut memang dirancang dengan konsep pendidikan Barat, disiapkan kurikulum dan target pencapaian kurikuler yang dirumuskan dengan jelas bahwa mahasiswa bekerja dalam suatu studio yang dibimbing ketat oleh para pengajar yang sebagian berasal dari Belanda, seperti Ries Mulder dan Simon Admiral. Secara teoritik maupun praktik, mahasiswa diajarkan ilmu pengetahuan seni rupa Barat. Di kemudian hari para mahasiwa tersebut menjadi sosok seniman, karyanya memiliki perenungan estetik yang berbeda dengan lulusan ASRI.

Karya-karya seniman banyak mempraktikkan ungkapan estetik yang dipengaruhi gerakan "formalisme', yang berkembang kuat di Amerika pada paruh pertama abad ke-20. Trisno Sumardjo menyebutnya sebagai 'oelaboratorium Barat.

2. Soekarno Patron Seni Rupa Indonesia

Perkembangan seni rupa di Indonesia, tidak terlepas dari peran Presiden Soekarno yang berjiwa seni. Atas kenyataan ini, masyarakat mengakui bahwa tidak ada presiden yang melebihi Soekarno dalam hal mencintai dan memerhatikan karya seni. Tidak hanya itu, Soekarno bahkan sering kali memanfaatkan waktu di sela-sela kunjungannya ke daerah untuk mengunjungi studio-studio seniman. Kalau sudah begitu, ia sering berlama-lama dalam pembicaraan tentang karya seni dengan seniman yang dikunjunginya.

Sebagai seorang pencinta seni dan seorang pengagum keindahan serta kreator seni, dalam diri Soekarno terdapat *sense of art* yang menonjol, selain juga seorang intelektual sejati serta pemikir yang ulung. Jiwa kesenimanannya tidak dapat terlepas dari sifat *simbolis*,[132] humanisme, intelektual, arsitek,[133] dan pejuang. Jiwa kepemimpinannya yang menonjol

---

[132] Soekarno sangat menggemari cerita wayang yang sarat dengan unsur-unsur simbolis

[133] Soekarno memang termasuk berjiwa romantis. Jiwa romantis berpengaruh kuat pada gelora emosi perjuangan dan cita-cita Soekarno. Bahkan nasionalisme Soekarno, menurut Onghokham, tidak lain sebuah romantisme.

tersebut mendorong Soekarno selalu ingin merealisasi ide-ide yang besar, megah, dan monumental. Semua itu tercermin dalam sebagian besar koleksi seni Soekarno, yang menggambarkan panorama alam Indonesia yang elok permai, kisah perjuangan yang romantis,[134] dan wanita ayu yang lembut gemulai. Cita rasa tersebut turut mengilhami Soekarno dalam pembangunan kota Jakarta sebagai ibu kota negara. Beberapa karya seni rupa berupa monumen dan patung-patung sebagai pengisi arsitektur kota, antara lain, Patung Selamat Datang, Patung Tani, Patung Dirgantara, Patung Pembebasan Irian Barat, dan Patung Kartini Berkenaan dengan gaya lukisan yang digemarinya, seleranya cenderung terhadap lukisan figur dan pemandangan gaya *Mooi Indie,* yaitu gaya lukisan *Hindia Molek,* yang menjunjung tinggi keindahan alam Indonesia.

Atas apresiasinya terhadap masyarakat seni rupa serta dorongannya kepada perkembangan seni rupa di Indonesia, Soekarno mendapatkan kedudukan istimewa di dalam masyarakat. Melalui apresiasinya, karya-karya perupa Indonesia memperoleh posisi terhormat. Stimulusnya mampu menumbuhkan seseorang menjadi peminat serius, bahkan menjadi kolektor, *connoisseur,* karena Soekarno selalu mengingatkan bahwa karya seni rupa merupakan sesuatu yang sangat berharga, *preciosa.* Dari propagandanya tersebut, masyarakat Indonesia mengangkatnya sebagai *patron seni nomor satu.*[135]

Bukti kecintaan Soekarno terhadap dunia seni rupa adalah koleksi lukisan dan patung dari Presiden Soekarno sampai saat ini di Istana Negara, Istana Merdeka, Istana Bogor, Istana Cipanas, dan Istana Tampak Siring. Menurut Guntur Siswoyo, mantan kurator Istana tahun 1974 menyatakan, koleksi Soekarno sampai saat ini ada 1.776 buah. A.R. Gapoer, kurator lukisan Istana 1950–1967, menyebut angka 3.000 buah, dan Dullah mengatakan sampai tahun 1955 koleksi dan Soekarno berjumlah lebih dari 1.000 buah. Sementara catatan Wasim, yang menjadi pelukis Istana (1961–1968) menyebut angka 1.260 buah. Jumlah koleksi Soekarno yang sebenarnya, sampai sekarang masih menjadi tanda tanya.[136] Beberapa gagasan-gagasan tentang perlunya didirikan galeri atau museum seni rupa di Jakarta pernah dilontarkan oleh Soekarno dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Semesta Berencana. Selain itu, ia juga menganjurkan sejumlah pengusaha untuk mendirikan galeri pribadi, yang bertujuan mendistribusi

---

[134] Agus Denmawan T., *Bung Karno Super Patronis,* Manuskrip tidak diterbitkan

[135] Tentang kontroversi koleksi Soekarno, lebih jauh periksa laporan investigasi *Tempo,* 4 Februari 2001, hlm. 43 – 57

[136] Dikutip dari salah satu bagian dari naskah tulisan Edhi Soenarso menjelang diterbitkan bukunya berkenaan dengan 75 tahun usia Sang Seniman Maestro ini

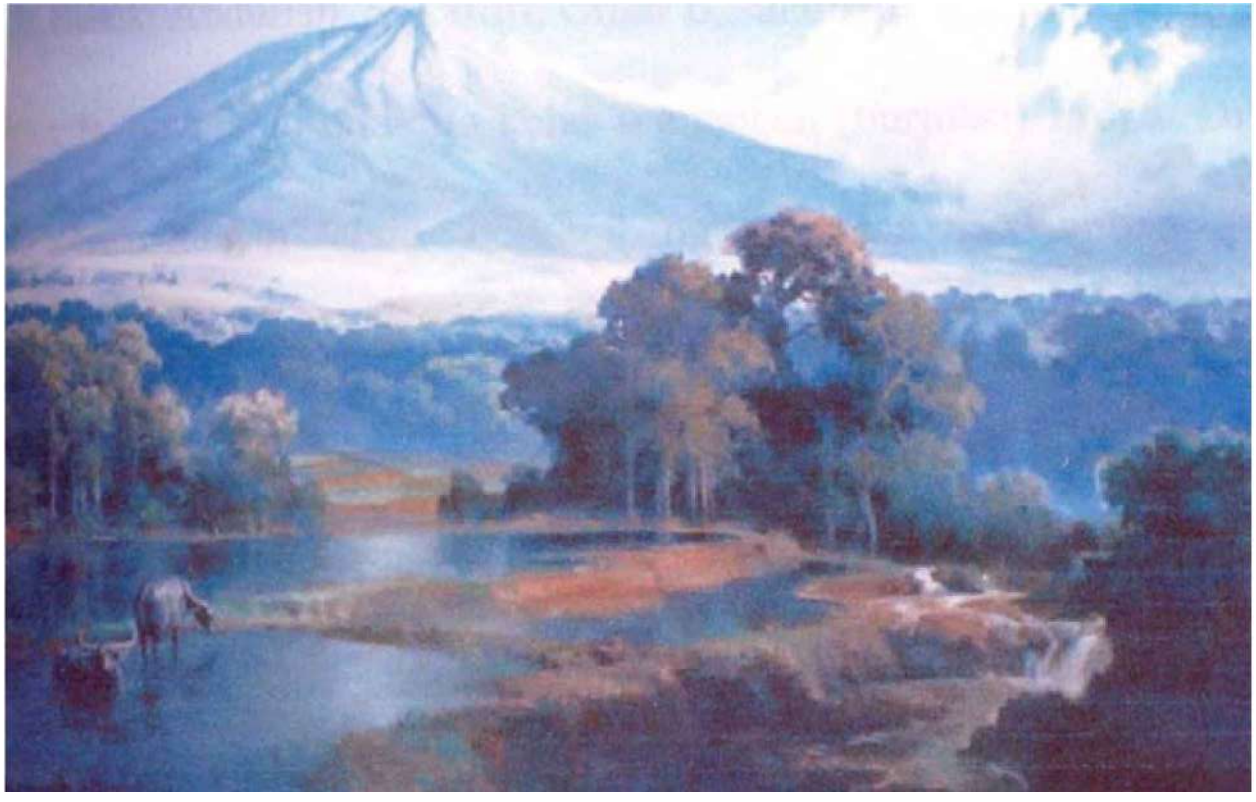

Gambar 4.17 Lukisan gaya Mooi Indi
(Sumber: *Dokumen Istimewa*)

dan mensosialisasi karya seni pada masyarakat umum. Atas anjurannya tersebut, telah didirikan *Galery Pandy* di Sanur, Bali milik James Pandy, dan kemudian disusul galeri-galeri lain serta *art shop* yang hingga kini sangat marak di berbagai kota di Indonesia. Secara ideologis, semangat sanggar digerakkan pula oleh jiwa nasionalisme yang ada pada diri seniman, yang memang turut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sanggar Seniman Masyarakat yang kemudian berubah menjadi Sanggar Indonesia Muda (SIM), diikuti oleh berdirinya sanggar-sanggar, antara lain Pelukis Rakyat (1947) dan Pelukis Indonesia Muda (1952) di Yogyakarta. Di Surakarta berdiri Himpunan Budaya Surakarta diketuai dr. Moerdowo (1945), kemudian menyusul perkumpulan Pelangi dipimpin Sularko (1947–1949). Di Medan pada tahun 1945 berdiri Angkatan Seni Rupa Indonesia. Di Jakarta, berdiri Gabungan Pelukis Indonesia (1948) diketuai oleh Affandi setelah pindah dari Yogyakarta.

Karya para seniman mayoritas bertema kerakyatan dan perjuangan, dengan gaya seni lukis populer naturalisme, ekspresionisme, dan realisme. Sanggar-sanggar yang muncul di era sebelum 1950 itu memberikan kontribusi dan inspirasi kepada seniman-seniman dan pencinta seni yang dedikatif dalam pendirian institusi formal, seperti akademi atau perguruan tinggi seni.

Di Yogyakarta pada tanggal 12 Januari 1950 berdiri Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI), dengan kekuatan tenaga pengajarnya dari kelompok seniman, seperti Hendra Gunawan Sudarso. *Trubus*, direktur pertamanya adalah R.J. Katamsi, seorang guru gambar yang paling gigih memperjuangkan berdirinya perguruan seni di Yogyakarta.[137] Konsep pendidikan di ASRI banyak mengadopsi sistem sanggar, yang memberi kebebasan pada mahasiswa untuk mencari jati dirinya melalui banyak melakukan latihan berkarya secara mandiri. Salah satu cara untuk mempertajam kemampuan teknik maupun penghayatan seni lazimnya dipergunakan sistem *nyantrik*.[138] Soekarno berharap akan lahir seniman-

---

[137] Lihat, Agus Dermawan T , "*Seni Lukis Kontemporer Indonesia 1950–1990*", dan *Perjalanan Seni Rupa Indonesia dari Zaman Prasejarah hingga Masa Kini* Jakarta: Panitia KIAS, 1990/1991, 1966 "dalam Mesiass," *Revolusi Belum Selesai, Kumpulan Pidato Presiden Soekarno, 30 September 1965–Pelengkap Nawaksara*, 2003, hlm. 400–401

[138] Wati Moerany, "Perkembangan Seni Rupa Modern di Indonesia. Kajian sejarah berdasarkan koleksi lukisan di Patung Soekarno di Istana Bogor (1945–1967)" Tesis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2003. Wawancara dengan pelukis Soedarso, 5 Mei 2003 di Sidoarjo *Nyantrik* adalah metode pendidikan atau pelatihan yang lebih menekankan pada aspek meniru atau mencontoh cara-cara melukis yang dipakai guru atau seniman senior dalam berkarya. Seni *Mood* seakan-akan tidak diberi kebebasan menemukan teknik dan gayanya sendiri.

seniman berwatak kebangsaan yang kuat, seniman yang mampu melahirkan karya seni yang dapat memunculkan jati diri bangsa Indonesia, yaitu sebagai bangsa yang besar dan bangsa yang berperadaban tinggi di antara bangsa-bangsa lain di dunia.

Di Bandung sebelumnya telah berdiri *Universitaire Leergang voor* de *Opleiding van Tekenleraren* (*Balai Pendidikan Universiter Guru Gambar*) pada tahun 1947. Sebagai pendidikan seni rupa tingkat universitas yang pertama telah didirikan *Galery Pandy* di Sanur, Bali milik James Pandy, dan kemudian disusul galeri-galeri lain serta *art shop* yang hingga kini sangat marak di berbagai kota di Indonesia.

3. Diorama, 'Seni Rupa Multidisiplin'

Salah satu karya seni warisan Demokrasi Terpimpin yang masih dapat disaksikan oleh masyarakat luas adalah diorama di Museum Sejarah Tugu Nasional di Museum Nasional Jakarta. Diorama, yang dikatakan sebagai 'seni yang mengabdi' merupakan sebuah paduan seni rupa dengan beberapa disiplin ilmu sekaligus, yaitu pelukis figuratif, pematung realis, pelukis naturalis, dan pembuat maket bangunan, yang didahului oleh penulis adegan/narasi yang melibatkan tim sejarawan sebagai aktor penentu adegan berdasar historiografi.

Pada masa pembuatan diorama di Tugu Monas, telah terjadi kolaborasi antara tim sejarawan dan seniman menjadi sebuah 'peristiwa sejarah' di bidang seni rupa. Keduanya terpanggil untuk 'bela negara mengabdi negara. Sayangnya kini tidak banyak ahli yang masih menekuni seni diorama ini, karena telah tergusur oleh maraknya seni kontemporer yang bersifat lebih instan.

Menurut Edhie Soenarso,[139] yang menjadi penanggung jawab pembuatan diorama Museum Sejarah, pada tahun 1964 seluruh diorama sudah selesai dibuat dari material plastik yang mudah pecah, yang hanya bertahan sekitar 20 tahun. Semestinya pada tahun 1984 sudah harus dilaksanakan konservasi. Untuk mengetahui secara pasti usia diorama, perlu menyimak catatan Edhi Soenarso yang mencatat selesainya pekerjaan diorama di tahun 1964 tersebut. Usia diorama yang pertama kali dibuat saat ini mencapai 47 tahun. Kenyataannya dibuat secara bertahap, dan yang termasuk yang relatif akhir yaitu diorama No. 47, yaitu diorama Surat Perintah 11 Maret 1966. Secara keseluruhan karya diorama baru dapat ditayangkan secara penuh kepada publik setelah Presiden Soeharto pada 19 Maret 1977 berkenan menyelesaikan karya bangsa ini.

---

[139] *Kompas*, "Presiden Tinjau Diorama", Djakarta, 19 Maret 1977, hlm.1

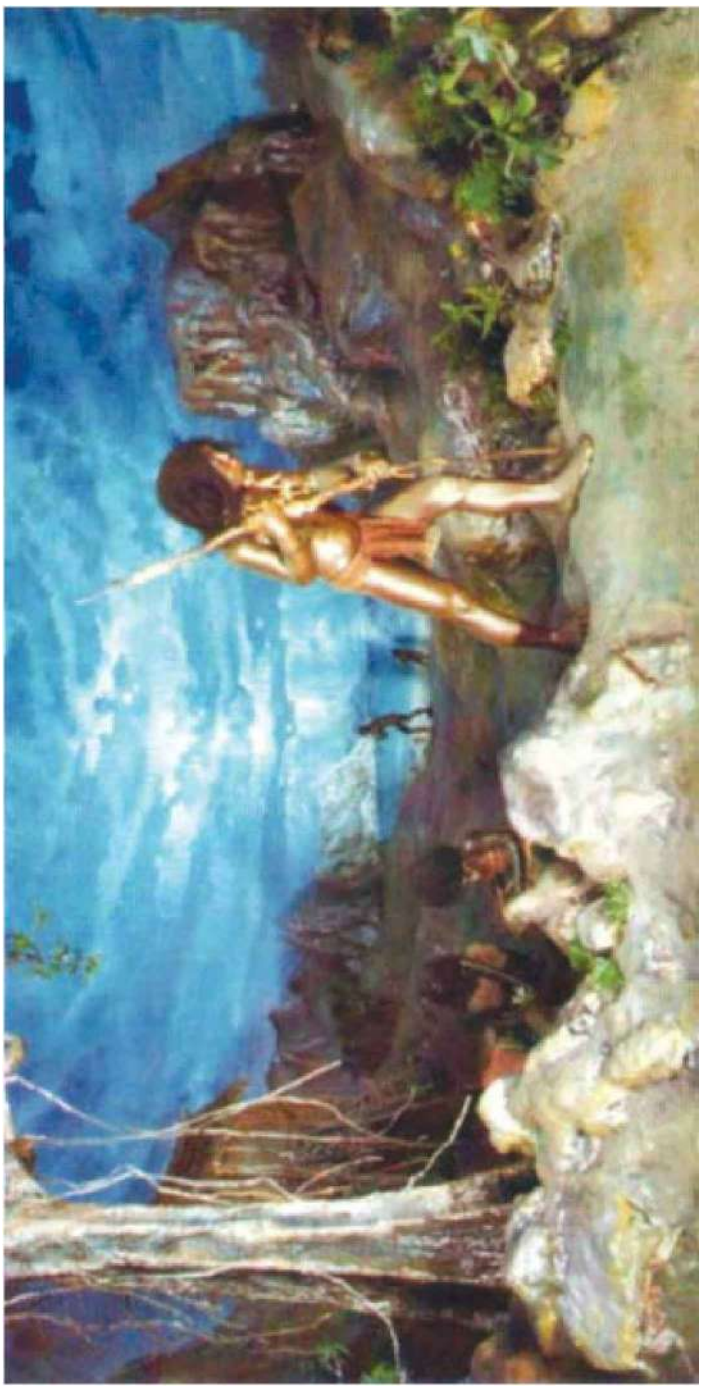

Gambar 4.18 Diorama masyarakat Indonesia purba
(Sumber: *Dokumen Istimewa*)

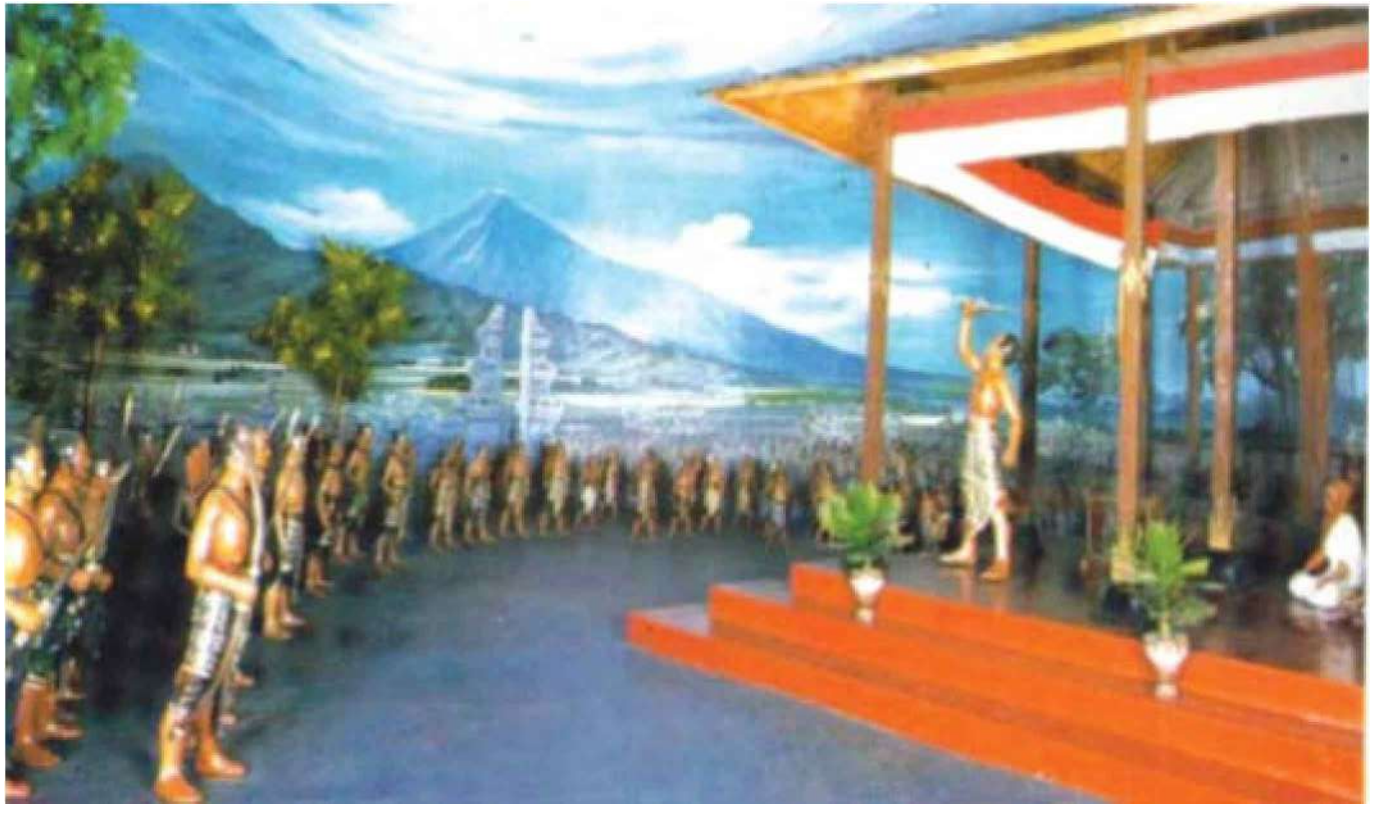

Gambar 4.19 Diorama Sumpah Palapa 1331
(Sumber: *Dokumen Istimewa*)

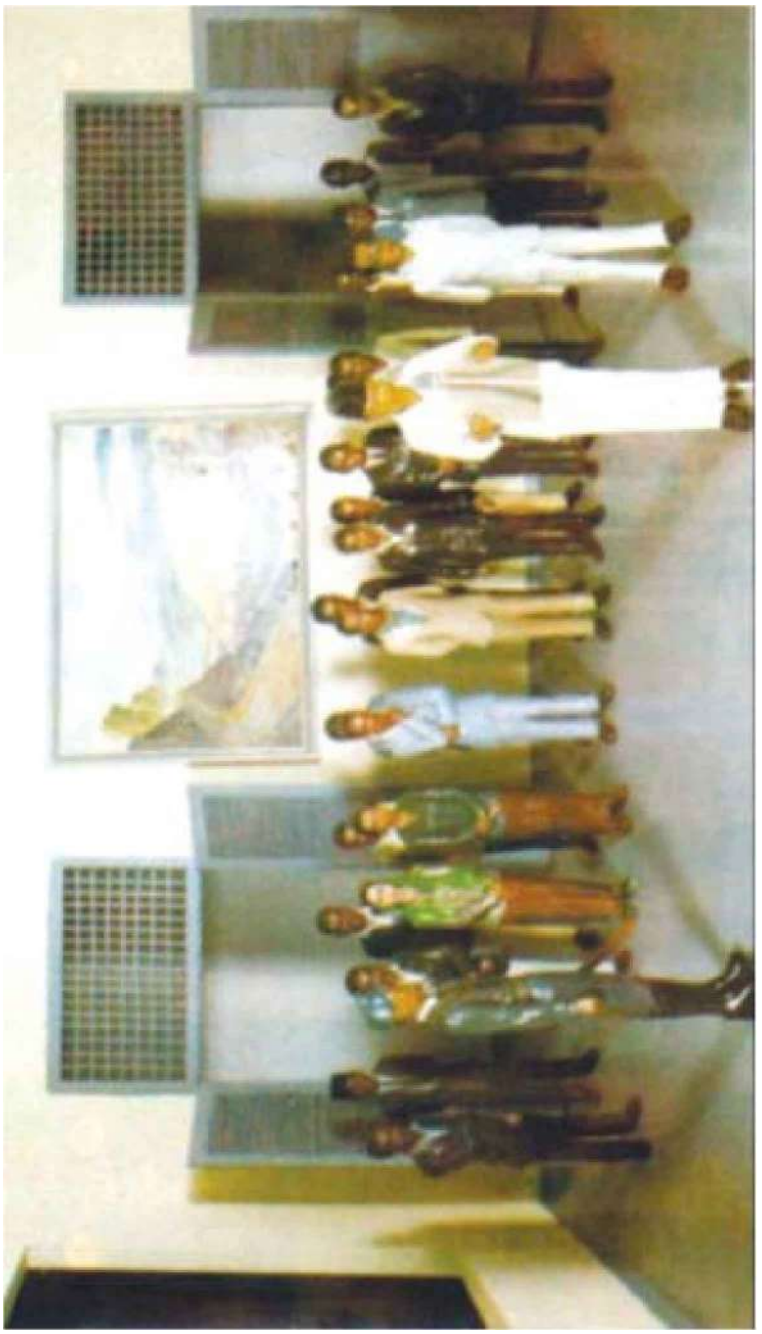

Gambar 4.20 Diorama Proklamasi 17 Agustus 1945
(Sumber: *Dokumen Istimewa*)

Sekalipun baru berusia 47 tahun, bila ditinjau berdasar keunikannya merekam peristiwa sejarah, diorama Museum Sejarah otomatis menjadi *Benda Cagar Budaya* (BCB)[140] yang termasuk Warisan Budaya *Tangible Heritage* menurut budayawan Edi Sedyawati.

I. Arsitek Era Soekarno

1. Gaya 'Padu Padan' dalam Arsitektur

Soekarno adalah peletak tonggak sejarah di bidang rancang bangun di Indonesia. Setelah menyandang gelar *Ingeniur Hogeschool* (*TH-Bandoeng*) tahun 1926 Soekarno merancang karya arsitektur sampai masa kejatuhannya sebagai presiden pada sekitar tahun 1965. Dengan demikian, selama kurun waktu 1926–1965 Soekarno telah memberikan sumbangan karya arsitektur di Indonesia. Salah satu pengakuan akademis mengenai keterlibatannya pada dunia rancang bangun di Indonesia adalah berupa anugerah gelar *Doctor Honoris Causa* dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1962.[141] Menurut promotornya Prof. Roosseno gelar tersebut dianugerahkan berdasarkan keahliannya sebagai insinyur arsitek. Arsitektur karya Presiden Soekarno yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan kekayaan intelektual Indonesia karena sebagian besar karyanya telah menjadi arsitektur *heritage*.[142]

Dunia rancang bangun atau arsitektur, tidak terlepas dari ungkapan gaya atau *style* sebagai suatu cara dalam pengungkapan sebuah peradaban. Lazimnya, gaya atau *style* ditandai oleh keindahan bentuk keseluruhan suatu bangunan atau dapat pula diwakili oleh bagian bentuk, umpamanya 'bentuk atap' bangunan. Bentuk atap bangunan merupakan sesuatu hal yang penting karena masyarakat Timur mengenal dasar filosofi perancangan

---

[140] UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Pasal 1

[141] Yuke Ardhiati, *Arsitektur, Tata Ruang Kota, Interior dan Kria, Sumbangan Soekarno di Indonesia 1926–1965, Kajian Mentalite Arsitek Seorang Negarawan*, disertasi pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2004. Lihat juga, Yuke Ardhiati, *Bung Karno Sang Arsitek, Kajian Artistik Arsitektur, Tata Ruang Kota, Interior dan Kria, Sumbangan Soekamo di Indonesia 1926–1965, Kajian Mentalite Arsitek Seorang Negarawan*, 2005

[142] *TH-Bandoeng* merupakan sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia yang semula bernama *Technische Hogeschool Bandoeng* yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1920, yang diresmikan pada tanggal 3 Juli 1920 oleh Gubernur Jenderal Belanda Jhr. M.R.J.P Graaf van Limburg Stirum, Sekolah Tinggi Teknik tersebut disebut *Nouth Universiteit van Indonesie* berada di bawah pengawasan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Pada tahun 1947, diubah rnenjadi *Universiteit van Indonesie.* Ketika Mr. Muhammad Yamin menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1958 istilah *universiteit* diganti menjadi universitas. Pada tahun 1959 sekolah tinggi teknik tersebut dijadikan institusi pendidikan yang otonom menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB).

bangunan sebagai suatu manifestasi morfologi manusia. Bangunan dianggap sebagai bagian dari alam atau kosmis. Ekspresi tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa bagian (kepala, badan, dan kaki) pada sebuah bangunan.

Atap bangunan dalam masyarakat Timur lazimnya diberi sebutan sesuai dengan bentuk yang terwujud, misalnya disebut 'atap limasan ' karena atapnya berbentuk seperti sebuah limas. Demikian pula sebutan 'atap tajuk' karena menyerupai tajuk atau mahkota yang bertumpuk-tumpuk.

Agak berbeda dengan arsitektur Barat (Eropa atau Amerika) yang lebih menekankan kepada teknologi, memandang sebuah bentuk atap hanyalah sebagai bagian dari konstruksi, sehingga lazimnya karya arsitektur diberi nama sesuai dengan arsitek perancangnya.

Gaya arsitektur Soekarno disebut 'padu padan' yang memadukan beberapa gaya sekaligus. Karyanya terbagi dalam tiga periode dengan perubahan gaya di setiap periodenya, *Periode pertama 1926–1945* disebut periode Murid Sang Profesor sebagai periode yang menggambarkan karya arsitektur Soekarno didominasi oleh pengaruh Profesor Schoemaker sebagai gurunya. Namun, gaya 'padu padan', gaya Soekarno pada periode ini sudah menggambarkan 'penolakan' terhadap gaya arsitektur bernuansa kolonial, tetapi kekurangan dari sisi materi. Soekarno jatuh bangun dalam mendirikan biro arsitek bersama Ir. Anwari teman kuliahnya. Menurut catatan resmi dari alumni *TH-Bandoeng* Soekarno Sosrodihardjo lulus dengan proyek akhir studi berupa rancangan sebuah jembatan, tetapi Soekarno lebih memiliki tertarik kepada dunia arsitektur.[143]

Meskipun tidak terlalu banyak karyanya yang sebagian besar berlokasi di Bandung, sebagai arsitek Soekarno berhasil menunjukkan gaya yang khas. Gaya atau *style* merupakan tanda keberhasilan seorang arsitek, karena telah berhasil menemukan citra dirinya melalui bentuk-bentuk khas pada karyanya. *Style* arsitektur karya Soekarno pada periode 1926–1945 mencerminkan alam pikiran Soekarno yang sarat dengan budaya multikultur yang memengaruhinya sejak masa mudanya. Ekspresi 'padu-padan' arsitektur Eropa dan ornamen organik kebudayaan *Inka-Maya* adalah ciri khasnya.

Kemampuan sebagai arsitek Soekarno secara otodidak dimulai tatkala ia bekerja magang sebagai *draftsman* di Biro Arsitek Schoemaker. Bakat arsitektural Soekarno tidak diabaikan oleh Schoemaker bersaudara. Ketika itu keduanya merupakan arsitek ternama di kota Bandung yang mengikuti aliran sekolah desain *Bauhaus* (1919–1933) yang dirintis oleh Arsitek Walter Gropius di Jerman.

---

[143] Istilah bangunan *heritage* diberikan kepada karya arsitektur yang telah berusia 50 tahun atau lebih dan dianggap sebagai Bangunan Cagar Budaya (BCB)

Beberapa situs karya arsitektur Soekarno yang ditemukan di beberapa lokasi di Bandung, pernah dipamerkan dalam Pameran Karya Arsitektur Soekarno oleh Jurusan Arsitektur ITB pada tahun 2001. Beberapa karya Soekarno yang dipamerkan tersebut antara lain, (1) Beberapa rumah di Jalan Gatot Subroto (dahulu Jalan Papandayan). Salah satunya adalah toko roti *Red Tulip* dan rumah kembar di muara Jalan Malabar dan JaIan Gatot Subroto Bandung; serta paviliun *Grand Hotel Preanger* Bandung; (2) Rumah di Jalan Kasim; (3) Rumah di Jalan Palasari; (4) Rumah di Jalan Pasir Koja; (5) Rumah di Jalan Pungkur, (6) Rumah di Jalan Dewi Sartika; (7) Rumah di Jalan Kacawetan; (8) Masjid di Jalan Suniaraja (sudah dirubuhkan); (9) Rancangan Penjara Sukamiskin, dan Gedung Himpunan di Jalan Dalem Kaum.

Karya arsitektur Soekarno,[144] periode ini, juga ditemukan di Bengkulu berupa lima rancangan yang terdiri atas (1) dua buah rumah kembar untuk seorang refendaris residen, (2) rumah seorang demang, (3) rumah untuk kantor Taman Siswa tetapi batal dibangun, (4) renovasi Masjid Jami di Bengkulu, yaitu sebuah masjid kuno yang kemudian direnovasi oleh Soekarno dan kini menjadi *landmark* kota Bengkulu.

Periode 1945–1959: gaya 'padu-padan' atap *limasan* dan ornamen *padma,* mengungkapkan pikiran artistik Soekarno, yaitu spirit nasionalisme, kegandrungan untuk mengeksplorasi keindahan budaya negeri sendiri. Pencarian bentuk-bentuk khas Indonesia diekspresikannya ke dalam karya arsitektur secara mengesankan. Periode ini menandai ditemukannya jati diri Soekarno. Ciri 'padu padan' gaya atap Eropa, seperti *hippedroof, mansard,* dan *dormer window* telah ditinggalkan Soekarno dan digantikan oleh bentuk atap *limasan* yaitu atap khas tradisional Indonesia.[145] Demikian juga 'ornamen organik' bermotif *Inka-Maya* yang dipengaruhi Arsitek Schoemaker dan Frank Lloyd Wright pada periode 1926–1945, digantikan oleh artefak *padma,* sebagai buah perenungannya yang mendalam terhadap khazanah asli Indonesia. Perhatiannya yang intensif pada kebesaran Monumen Borobudur dan Prambanan, serta arsitektur candi-candi Hindu-Buddha di Jawa, menggiring Soekarno untuk menghadirkan bentuk *padma* (bunga teratai) sebagai ciri 'padu padan' gaya Soekarno pada periode kedua, yang diterapkan sebagai desain ornamentik sampai ornamen pada kepala pilar, artefak di ornamen kolam teratai, ornamen tiang bendera, aksen

---

[144] Lambert Giebels, *Soekarno: Biografi 1901–1950, 2001,* hlm. 51

[145] Giebels, Soekarno, 2001, hlm. 184 Soekarno, "Amanat PJM Presiden Soekarno pada ramah tamah dengan Karyawan Komando Proyek Conefo di Istana Negara, Jakarta, 7 Februari 1966 " dalam Mesiass, *Revolusi Belum Selesai, Kumpulan Pidato Presiden Soekarno, 30 September 1965–Pelengkap Nawaksara,* 2003, hlm. 400–401

furnitur, lukisan, relief, sampai motif pahatan dinding. Material bangunan dipilih khas Indonesia, seperti kayu jati, rotan, dan pualam. Pada era ini seni kriya[146] mulai berkembang, mulai dari seni ukir kayu, seni kriya batik, relief batu, sampai ukiran dengan teknik cor logam serta bahan tembaga.

Karya Soekarno merupakan paduan arsitektur modern dengan kaidah arsitektur khas tradisional Indonesia terutama Jawa dan Bali, berupa atap, pilar, dan podium. Bentuk atap *limasan* mendominasi periode 1945–1959 dan memiliki kemiripan dengan atap gaya *Hipped Roof* dari Eropa, tetapi penutup atap terbuat dari kayu sirap. Bentuk unik pada 'hiasan kemuncak atap' dipilih bentuk menyerupai mahkota 'gada-gada' sebagai ciri khas karya di Bandung serta Bengkulu, digantikan dengan hiasan menyerupai 'tajuk', bentuknya meruncing ke atas menyerupai bentuk *meru* di Bali. Selain simbolis juga fungsional sebagai dudukan penangkal petir.

Jika dalam periode sebelumnya kepala pilar berornamen gaya *Inka-Maya,* pada periode ini kepala pilar dihiasi ornamen berbentuk padma.

2. Interior Furnitur Berornamen 'Padma'

Selain gaya arsitektur 'padu-padan' yang bernapaskan sintesis arsitektur modem (Barat) dan khazanah Indonesia (Timur), Soekarno juga meninggalkan seperangkat karya interior berupa furnitur/mebel yang khas furnitur. Bentuknya langsing, ergonomis, *hodyship,* dan beraksen motif padma. Sedikitnya ditemukan tujuh seri desain furnitur dengan *style* satu tema yang tersebar di Istana Jakarta, Bogor, dan Tampak Siring. Aksen *padma* ditemukan di tiap furnitur sebagai ornamen pada bagian strategis sebuah kursi ataupun meja. Karena banyaknya artefak berbentuk padma yang ditemukan pada periode 1945–1959, periode dengan *mentalite* nasionalis ini disebut sebagai periode *Sang Padma, Sang Arsitek.* Karya arsitektur dalam rumpun periode, antara lain Sang Padma, Hing Puri Bima Sakti, Bogor *Srihana-Srihani,* Bogor Wisma Yaso (sekarang menjadi Museum Satria Mandala), Jakarta, Gedung Bentot, Istana Cipanas Pesanggrahan Tenjoresmi, Pelabuhan Ratu, Istana Tampak Siring, Bali. Bangunan fasilitas umum adalah Gedung Bank Pembangunan Indonesia (sekarang Bappindo), Gedung Bank Indonesia Jakarta, Gedung Bank Negara Indonesia (BNI 46) Jakarta, Masjid Syuhada, Yogyakarta, Masjid Salman ITB Bandung, Masjid Al-Azhar Jakarta, dan Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Soekarno mengeksplorasi misteri budaya yang tidak tersentuh dari candi Hindu-Buddha, yaitu bentuk *padmasana* atau dudukan Dewa Hindu, dekorasi dinding candi, dan artefak berbentuk *padma.* Secara estetika, karya

[146] Seni kriya adalah seni kerajinan tangan

Gambar 4.21 Furnitur berornamen *Padma*, Istana Bogor (Meja makan kaki teratai)
(Sumber: *Dokumen Istimewa*)

Gambar 4.22 Meja berbentuk *Daun Padma*, Istana Jakarta (Meja tamu teratai)
(Sumber: *Dokumen Istimewa*)

Gambar 4.23 Furnitur berkaki *Padma,* Istana Jakarta (Meja konsul teratai) (Sumber: *Dokumen Istimewa*)

Soekarno pada periode ini mencitrakan 'padu padan' bentuk desain yang elegan, harmoni atau laras dengan alam Indonesia. Sekalipun struktur bangunannya sudah ditopang oleh teknologi beton.

Periode ketiga 1959–1965, periode *Sang Arsitek Maestro.* Pada saat *mentalite* artistik Soekarno mencapai puncak kematangan, yaitu setelah Pemilu I bulan September 1955, nama Indonesia dan nama Soekarno terangkat di dunia internasional. Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri, mulai dari Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman Barat, dan Swiss. Sebulan kemudian, pada bulan Agustus–September 1956, Soekarno melanjutkan perjalanannya ke Moskow. Dalam kunjungan ke Uni Soviet tersebut, Soekarno berkesempatan mengunjungi Museum Seni Lukis Tretyakovskaya, Kota Leningrad, Istana Pionir, Museum L' Hermitage, dan Stadion Raksasa Pochtakor.

Pengalaman visual-arsitektural ke beberapa negara tersebut berdampak pada cara pandangnya terhadap karya arsitektur.

Periode *Sang Arsitek Maestro* ini, negarawan besar dengan jiwa arsiteknya, berupaya mewujudkan gagasan *national pride* secara internasional. Wacana arsitektural Soekarno ternyata bersambut dengan visi MPRS. Gagasan-gagasannya dikenal dengan 'Pidato Heidelberg' yang mengimbau digalinya potensi nasional sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa, akhirnya dituangkan oleh MPRS sebagai *Blueprint* Proyek Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun Tahap I 1961–1969.[147]

Proses kreatif yang berkecamuk dalam *mentalite* Soekarno ketika itu dapat dipahami. Di satu sisi terdorong untuk menata negara secara holistik, di satu sisi yang lain, kebutuhan untuk dapat 'diperhitungkan' sebagai negara yang baru merdeka tetapi mampu tampil di dunia internasional melalui karya arsitektur merupakan sesuatu yang tidak mudah. Momentum yang memberi peluang kepada Soekarno untuk dapat merealisasi karya arsitektur yang megah dan menjadi *national pride* terjadi ketika Indonesia disetujui sebagai tuan rumah penyelenggaraan *Asian Games* IV pada tahun 1962. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus menyiapkan *sport venues* bertaraf internasional seperti yang disyaratkan oleh Komite Asian Games. Justru tantangan inilah yang sangat ditunggu oleh Soekarno, untuk dapat menata 'Wajah Muka Indonesia', dan memetaforakan kota Jakarta sebagai representasi wajah Indonesia. Pada periode 1959–1965 ini karya arsitektur,

---

[147] *Ibid.*, terdapat daftar proyek arsitektur antara lain: pembangunan empat hotel berbintang, gedung dan perkantoran dan pertokoan modern. Dalam tersebut juga diungkapkan buku proyek Tugu Monas merupakan proyek tambahan dari daftar proyek yang telah ada.

monumen, dan patung-patung skala kola banyak dibangun oleh Soekarno dan telah menjadi landmark kota metropolitan Jakarta.

Salah satu karya arsitektur *landmark* Indonesia, yaitu *mainstadium* Gelora Bung Karno sebagai *masterpiece* pada periode 1959–1965. Gagasan Soekarno[148] merancang *mainstadium* yang terindah, terbesar, dan terunik di dunia mendorong kreativitas tim arsitek dari Rusia di bawah pimpinan Soekarno menciptakan rancangan atap *temu gelang*. Gaya atap rancangan Soekarno menjadi *landmark* di kawasan Gelora Bung Karno. Ornamen khas Jawa Kuno juga ditemukan di area bangunan tersebut berupa patung Sri Rama sedang memanah. Karya arsitektur pada periode 1959–1965 di antaranya adalah, Gedung Gelora Bung Karno, Jakarta, Hotel Indonesia Jakarta, Hotel Samudra Beach, Hotel Ambarukmo, Yagyakarta, Hotel Bali Beach, Denpasar. Wisma Nusantara Jakarta, Gedung Toserba Sarinah, Jakarta, Gedung Gafiero Jakarta, Masjid Istiqlal, Gedung Graha Purna Yudha, Rumah Sakit Persahabatan di Rawamangun Jakarta, Gedung PMI Jakarta, Gedung Planetarium, dan Gedung Herbarium Bogor.

Dalam periode *Sang Arsitek Maestro* ini *mentalite* Soekarno dipenuhi oleh ide-ide internasionalis, dalam konteks sebagai bagian dari *national pride.* Periode ini memiliki *style* serta ciri khas pengaruh arsitektur *International Style,* visi arsitektur 'kota dunia' , membangun *landmark* kota berupa Patung Skala Kota gaya realis, selalu terdapat desain 'ruang film' di setiap bangunan, terdapat atap bangunan yang selalu 'unik' dengan teknologi mutakhir pada zamannya, seperti konstruksi kubah, lipat, temu gelang sebagai *point of interest* atap limasan, 'hiasan kemuncak atap' dan 'ventilasi silang' dipertahankan untuk bangunan rendah, beragam ornamen interior bernuansa Indonesia, serta penggunaan material alami yang awet 1.000 tahun, seperti beton dan marmer.

Karya tata ruang kota adalah untuk Palangkaraya berupa *rancangan skematik.* Hasil rancangan tersebut salah satunya adalah Bundaran Besar di kota Palangkaraya, sedangkan untuk kota Jakarta berupa *Masterplan Jakarta 1965–1985* yang bertumpu dari Tugu Monas dan Lingkungan Monas sebagai titik awal pengembangan kota, Tugu Nasional, dan Patung Pangeran Diponegoro.

Karya monumen dan patung skala kota pada periode ini banyak sekali dibangun. Selain untuk memperindah kota, juga dimaksudkan sebagai ekspresi peringatan kepahlawan Indonesia. Ditemukan antara lain, Patung Selamat Datang, Patung Pahlawan Diponegoro, Patung Tani, Patung Pembebasan Irian Barat, dan Patung Dirgantara. Jika diperhatikan, patung

---

[148] Julius Pour, Julius, *Dari Gelora Bung Kamo ke Gelora Bung Karno,* 19, hlm. 3

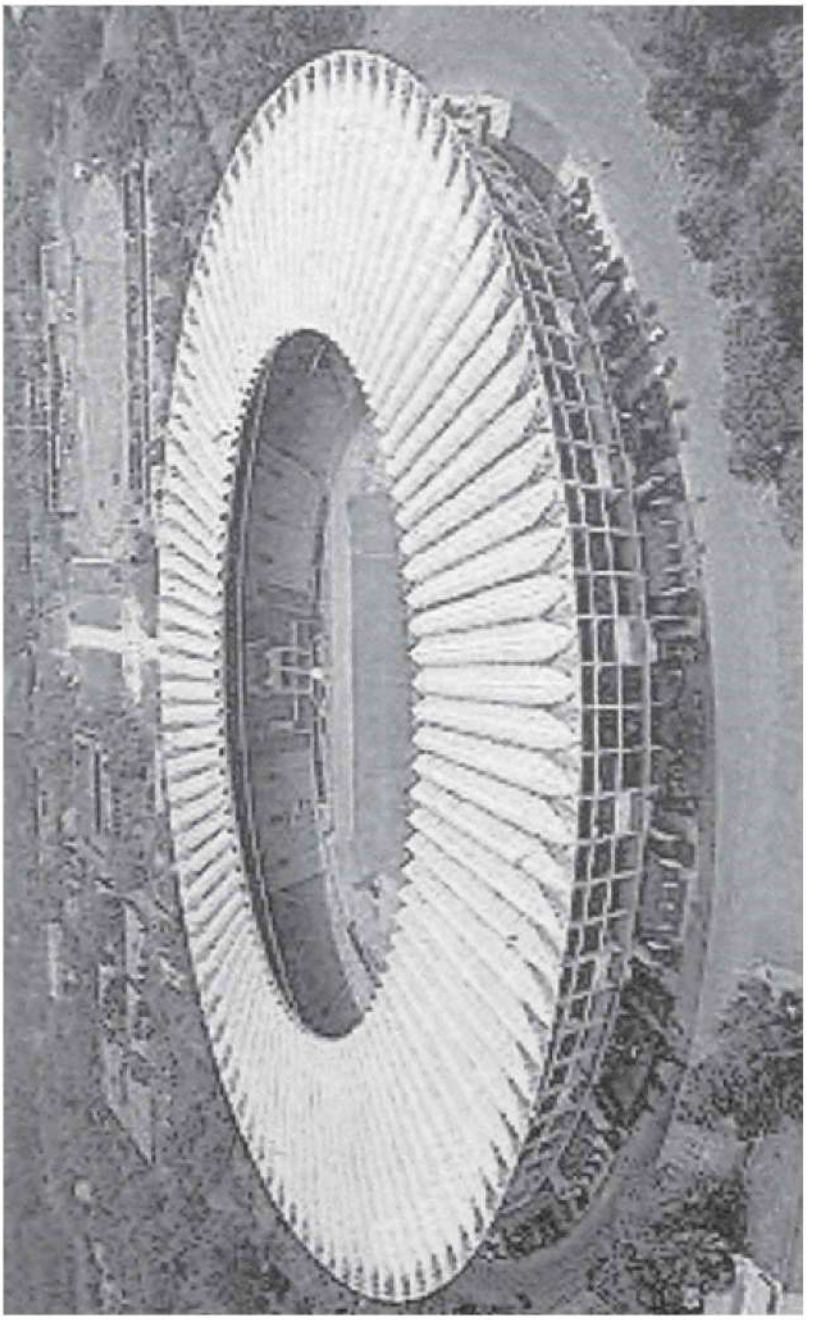

Gambar 4.24 Gelora Bung Karno (Sumber: *Dokumen Istimewa*)

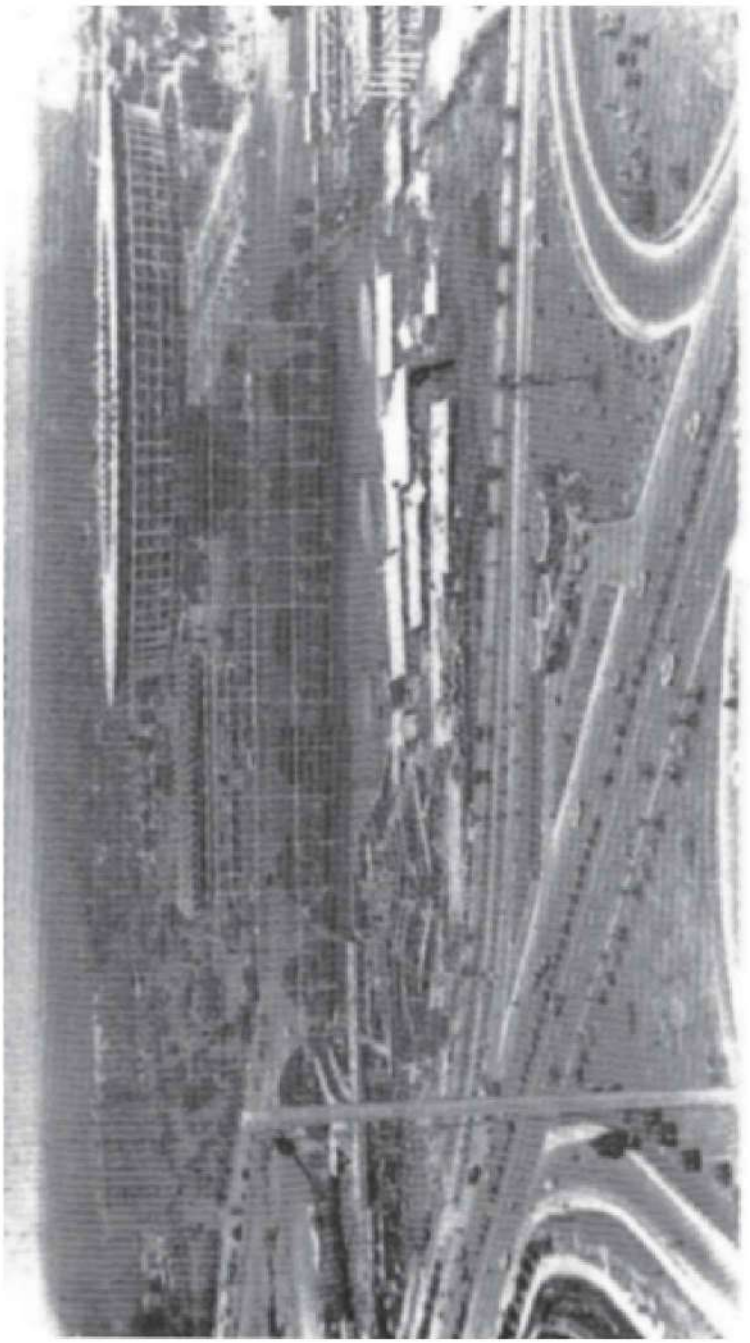

Gambar 4.25 Gelora Bung Karno dilihat dari Jembatan Semanggi
(Sumber: *Dokumen Istimewa*)

Gambar 4.26 Presiden Soekarno dan Maket Tugu Monas
(Sumber: *Dokumen Istimewa*)

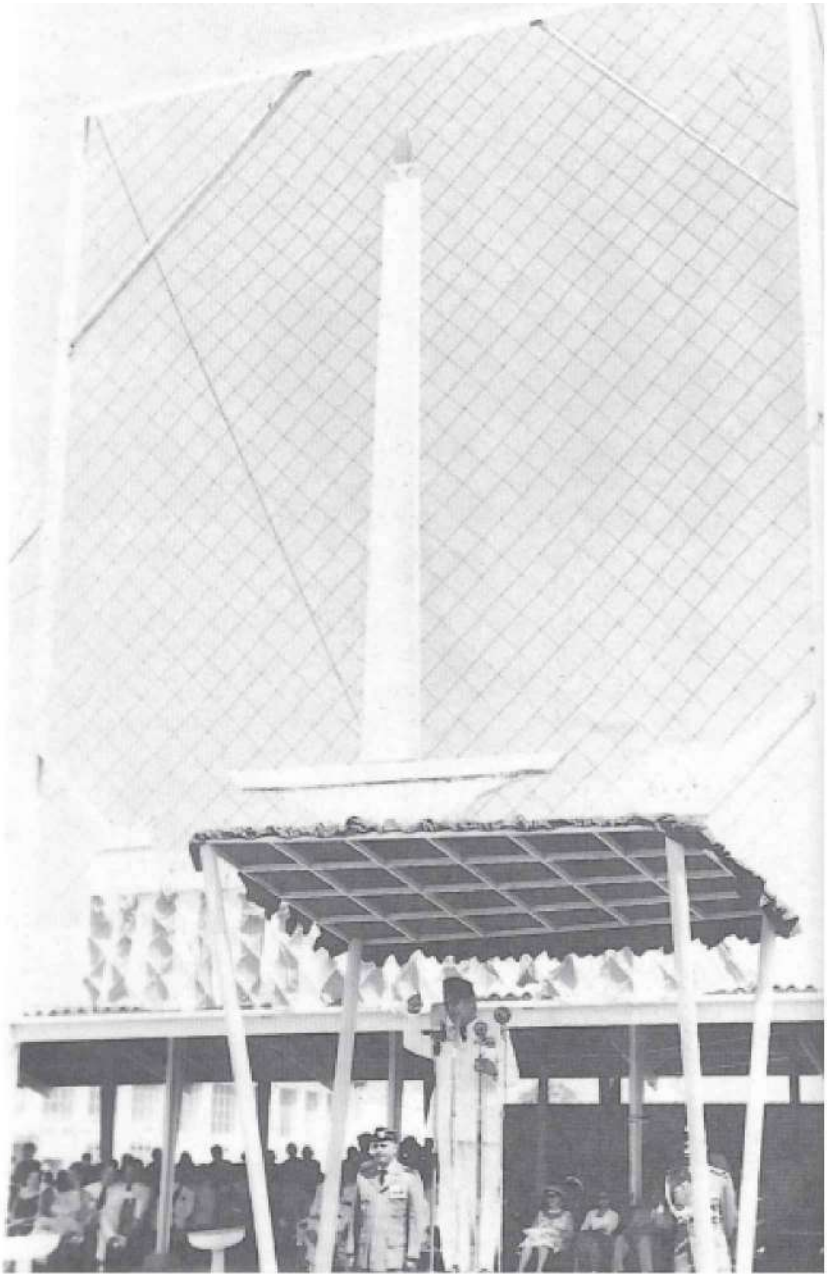

Gambar 4.27 Presiden Soekarno meresmikan Pembangunan Tugu Monas
(Sumber: *Dokumen Istimewa*)

skala kota yang dirancang pada periode 1959–1965 ini, dapat dikatakan rancang patung aliran 'realis', yaitu patung yang 'berwujud manusia' sebagai sosok tiga dimensional dengan karakter yang disesuaikan dengan misi tertentu.

Berbeda dengan 'padu padan' gaya yang 'laras dengan alam' pada periode sebelumya 1945–1965, ketika itu keindahan arsitektur berupa harmoni dengan unsur alam tercipta karena adanya ritme, pengulangan bentuk-bentuk organik berupa *padma* tertuang menjadi satu gubahan karya yang solid. Pada periode ini, sungguhpun terjadi eksplorasi besar-besaran terhadap kekayaan budaya yang ditampilkan, sulit untuk dikatakan terciptanya citra harmoni dari keberagaman artefak tersebut.

Apabila telah memasuki ranah desain, yang hakiki diciptakan adalah gubahan 'harmoni' yang diibaratkan seperti halnya menggubah sebuah puisi, kapan harus ditempatkan sebuah kata, kapan harus sebuah kalimat, dan kapan harus ada jeda, semua diberi tempat secara proporsional.

3. Konsep *Pro Bono Publico*

Jika diamati dengan saksama, karya-karya Soekarno yang ditemukan pada periode 1926–1965 didominasi oleh perancangan tipologi bangunan yang termasuk klasifikasi bangunan fasilitas umum atau *public facility*, seperti peribadatan sampai kepada fasilitas keolahragaan. Kedua tipe bangunan tersebut menekankan kreativitas perancangan yang tinggi. Ketika Soekarno memberikan pernyataan bahwa karya arsitektur yang berlokasi di Jakarta merupakan 'wajah muka Indonesia' sangatlah wajar jika Soekarno akhirnya berperan langsung dalam setiap perancangan arsitektural yang penting. Hampir semua fasilitas umum memperoleh perhatian serius dari Soekarno terutama perhatian yang cukup besar terhadap *style* arsitektur, serta *progress* pekerjaan bagi selesainya pembangunan fisik ketika itu. Seperti juga halnya perancangan *mainstadium* Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Gedung Conefo, Mesjid Istiqlal, Sarinah, serta Wisma Nusantara, semuanya tidak lepas dari pengaruh Soekarno sebagai kepala negara yang sekaligus memiliki profesi sebagai arsitek.

Dalam mempersiapkan rancangan desain arsitektural, selain mempekerjakan arsitek asing bagi beberapa proyek yang bersifat khusus, Soekarno mengajak juga arsitek lokal Indonesia untuk ikut berkarya ataupun terlibat agar tercipta iklim kondusif bagi dunia arsitektur.

Lazimnya ketika ide gagasan arsitektural telah diputuskan oleh Soekarno, desain arsitektural dibuat melalui sayembara. Suasana kompetisi antar-arsitek terjalin secara sehat ketika itu, dan berusaha menuangkan

gagasan-gagasan Soekarno melalui presentasi dan konsultasi kepada Soekarno. Suasana Istana Merdeka, ketika itu dapat diibaratkan sebagai sebuah *biro arsitek*, Soekarno sebagai arsitek penggagas, sedangkan F. Silaban dan Ir. Sudarsono sebagai *partnership.* Sementara itu, para yunior arsitek berperan memvisualisasikan keinginan Soekarno. Dalam dunia arsitektur, keberpihakan seorang arsitek kepada kepentingan masyarakat luas disebut telah bertindak secara *ethic* dan berasas pada *pro bono publico.* Karya-karya arsitektur Soekarno telah memerankan peran tersebut.

Tidak sedikit karya yang disumbangkan oleh Soekarno kepada Indonesia, mulai dari pembuatan masjid, rumah sakit, gelora, perhotelan, pertokoan, sarana pendidikan, hingga makam pahlawan. Dari aspek yang sangat detail hingga yang sangat luas, yaitu perancangan kriya dan furnitur hingga perancangan kota. Dengan kata lain, seluruh aspek kehidupan masyarakat dicakupnya. Jika ditinjau dari kajian estetis, bagaimanakah bobot karya Soekarno?

Untuk dapat memberikan penilaian terhadap bobot karya seni dapat dilakukan melalui kajian elemen formal yang mencakup satu per satu kajian pada elemen desain, atau melalui penilaian terhadap perumusan pengetahuan yang dimiliki oleh sang arsitek perancang. Bobot karya atau kualitas rancangan seorang arsitek atau desainer, ataupun desainer kriya sangat tergantung pada proses ini. Menurut perumusan dari Prof. Yusuf Affendi berupa "Rumusan Pemahaman Pengetahuan" yang sebagian, atau seluruhnya melandasi daya cipta seorang perancang arsitek desainer dapat ditelusuri kapasitas sang perancang.

Terdapat sedikitnya terdapat 13 butir pemahaman pengetahuan yang dimaksud, yaitu (1) pemahaman *genius loci* atau *spirit of place*, (2) pengetahuan keterampilan tradisional, (3) pengetahuan bahan alam lokal/ *indegenous material,* (4) pemahaman misteri budaya tak tersentuh, (5) pemahaman teknologi baru dan produk baru, (6) kemampuan manajemen/ wawasan *marketing*, (7) pengetahuan sejarah/artifaklarkeologi seni, (8) pengetahuan teropong budaya peristiwa dunia, (9) pemahaman model *as fashion trend,* (10) pengetahuan pariwisata, (11) pemahaman karakter seni lokal, (12) pengolahan bahan baru, dan (13) *design as art.* Sesuai dengan penelitian tentang *mentalite* artistik Soekarno, ditambahkan lagi unsur pengalaman pribadi, perjalanan asmara, konflik batin, religi, serta sistem kemasyarakatan sebagai bagian dari *mentalite* sang perancang. Setelah dilakukan penilaian estetis, karya Soekarno rata-rata memiliki 12 macam pengetahuan yang terkandung dalam dirinya sebagai perancang. Hanya satu point justru yang tidak dimilikinya, yaitu nomor 6 khususnya di bidang

Gambar 4.28 Ukiran kayu *coffee shop* Hotel Samudera Beach, Pelabuhan Ratu (Sumber: *Dokumen Istimewa*)

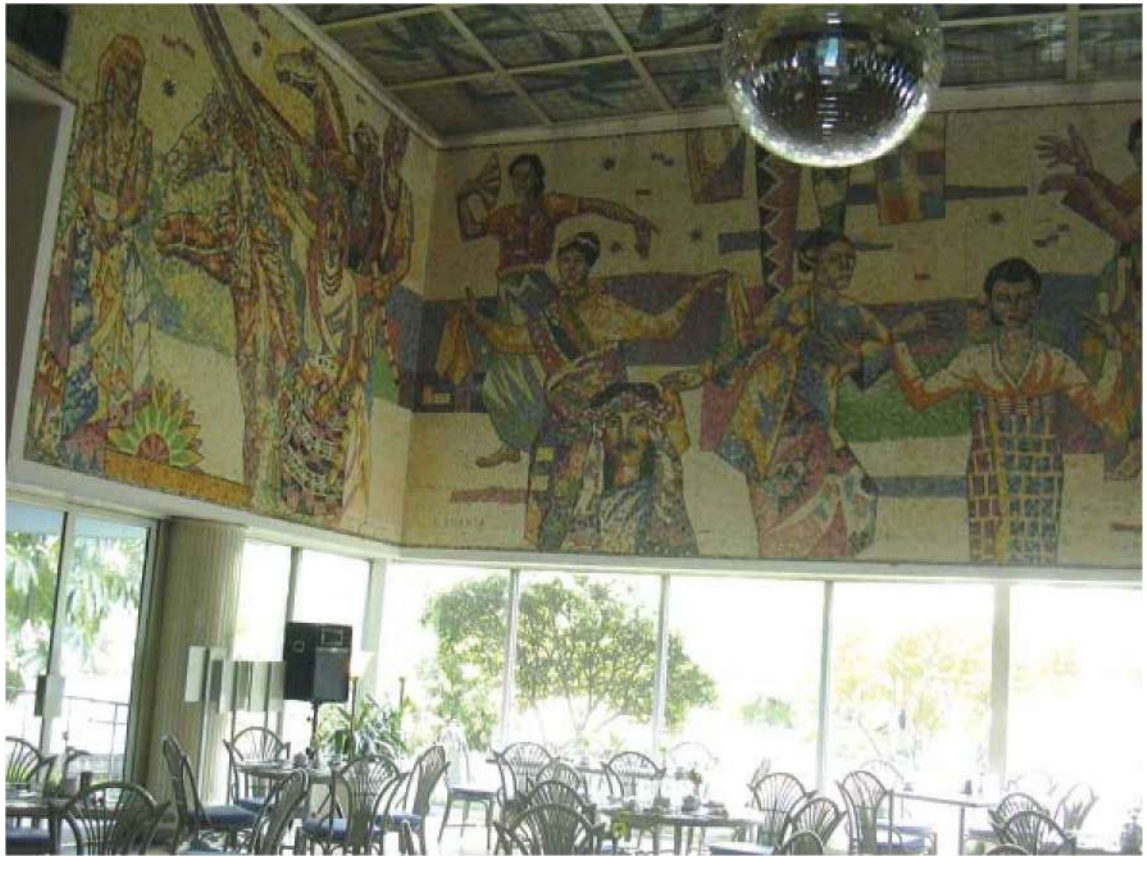

Gambar 4.29 Lukisan Mural yang pernah terpasang di Restoran Hotel Indonesia, kini bernama Hetel Indonesia Kempinski, Jakarta (Sumber: *Dokumen Istimewa*)

wawasan pasar, dalam pengertian sebagai bidang *marketing*. Soekarno tidak memerlukan hal tersebut karena seluruh karya yang dirancangnya merupakan *"perintah"*, karena peran gandanya sebagai *arsitek sekaligus kepala negara*.

Sumbangan yang diberikan oleh Soekarno melalui karya arsitektural selain menciptakan iklim kondusif berkarya bagi arsitek Indonesia, juga peran sebagai sutradara yang sangat tepat dalam menentukan *casting* seorang pemain.

Soekarno dengan visi arsitektur kotanya, sangat tepat menunjuk Ali Sadikin untuk terus menghidupkan gagasan spektakulernya tentang Jakarta, untuk visi konstruksinya yang hebat ditunjuknya Profesor Roosseno sahabatnya untuk merealisasikan bentuk-bentuk konstruksi yang rumit, dan untuk mengisi koleksi Istana Presiden dipilihnya para pelukis ulung.

Gaya arsitektur yang ditinggalkan oleh Soekarno secara kenyataan telah memberi nuansa atau warna arsitektur pada zamannya. Eksplorasi terhadap budaya misteri yang tidak tersentuh, antara lain budaya Jawa sebagai bagian dari desain arsitektural telah diawali olehnya. Hotel-hotel berbintang di Indonesia pasca-Soekarno banyak terilhami oleh tema arsitektur interior dan kriya yang tidak jauh dari suasana 'padu padan' gaya Soekarno, seperti di Hotel Indonesia Group.

Apabila dikaji secara lebih lanjut, gaya 'padu padan' Soekarno dapat diunggulkan sebagai 'pelopor sebuah gaya arsitektur yang khas', yang tidak ditemukan pada masa sebelum era Soekarno. Oleh sebab itu, 'padu padan' gaya arsitektur Soekarno tersebut perlu diwacanakan. Selain sebagai *style* yang baru pada zamannya, keberanian Soekarno dalam 'padu padan' gaya arsitekturnya telah membuka peluang bekerja dan berkarya berbagai seni di luar bidang arsitektur.

Bab V
Orde Baru

A. Surat Perintah 11 Maret 1966

1. Aksi-Aksi Tritura

Menjelang berakhirnya tahun 1965 operasi militer penumpasan terhadap pemberontakan G-30-S/PKI dapat dikatakan sudah berakhir. Akan tetapi, penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut belum terlihat adanya tanda-tanda akan dilaksanakan oleh Presiden Soekarno sesuai dengan janjinya. Dengan demikian, krisis politik semakin mendalam. Akibatnya, terjadi erosi kepercayaan rakyat kepada Presiden Soekarno. Pada tanggal 25 Oktober 1965, para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang terdiri atas HMI, PMKRI, PMII, GMNI, SEMMI, SOMAL, PELMASI, dan Mapantjas, yang disponsori oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dr. Syarif Thayeb. Federasi itu merupakan satu kesatuan aksi dengan target utama penumpasan Gerakan 30 September (PKI), yang diberi nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).[1] Pimpinan KAMI berbentuk presidium, sebagai ketua periodik terpilih Zamroni (PMII) yang didampingi tiga orang ketua, yaitu Cosmas Batubara (PMKRI), Elyas (SOMAL), dan David Napitupulu (Mapantjas), dan sebagai Sekretaris adalah Djoni Sunarya Hardja Sumantri. GMNI, organisasi mahasiswa yang berinduk kepada Partai Nasional Indonesia (PNI), menyatakan tidak masuk ke KAMI.

Dengan semakin parahnya krisis ekonomi, kesejahteraan rakyat jauh merosot, antara lain karena laju inflasi yang mencapai 650%. Dalam suasana demikian, pada tanggal 13 Desember 1965 pemerintah mengumumkan kebijakan baru di bidang ekonomi.[2] Pokok isinya adalah tentang devaluasi nilai rupiah, yaitu dari nilai Rp1.000,00 uang lama turun menjadi Rp1,00 uang baru. Keputusan pemerintah itu disusul dengan Penetapan Presiden No. 27/1965 berikut ketetapan-ketetapan tambahannya tentang kenaikan tarif dan jasa karena pengaruh devaluasi rupiah. Ketegangan mencapai puncak dengan ditetapkannya kenaikan harga minyak tanah dan bahan

---

1 Christianto Wibisono, *Aksi-aksi Tritura Kisah Sebuah Partnership*, 1970, hlm. 3

2 *Harian Angkatan Bersendjata*, 14 Desember 1965

bakar minyak pada tanggal 3 Januari 1966, yang akibatnya terasa oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menyadari betapa gawatnya keadaan ekonomi, pemerintah membentuk dua panitia *ad hoc*. Tugasnya adalah menyelidiki lebih menyeluruh pengaruh kenaikan harga dan tarif barang-barang dan jasa. Hasil penelitian panitia ini tidak begitu mempunyai arti untuk dapat dijadikan pegangan karena derasnya laju inflasi. Dalam situasi krisis itu pemerintah membentuk suatu panitia yang diberi nama *Fact Finding Commission* (KOTI), yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai pejabat pemerintah dan pemimpin partai politik yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Mayjen dr. Sumarno, Oei Tjoe Tat (Partindo), Chalid Mawardi (NU), dan Brigjen Sunarso (KOTI).

Tugas komisi ini adalah menghimpun fakta dan keterangan-keterangan serta bukti-bukti jumlah korban konflik massa akibat peristiwa G-30-S/PKI dan epilognya.[3] Anggota-anggota komisi ini dikirim ke daerah-daerah dari tanggal 27 Desember 1965 sampai dengan tanggal 6 Januari 1966. Kesimpulan yang diperoleh komisi ialah bahwa terdapat keinginan keras dari rakyat supaya Presiden/Pemimpin Besar Revolusi segera mengambil tindakan penyelesaian politik.[4] Hasil komisi disampaikan kepada Presiden Soekarno pada tanggal 10 Januari 1966. Karena Presiden Soekarno memperoleh informasi dari pihak lain, di luar *Fact Finding Commission*, ia menunda tindakan penyelesaian politik. Sementara itu, pada tanggal 31 Desember 1965 Badan Koordinasi Kesatuan Aksi dan Front Pancasila menandatangani naskah deklarasi mendukung Pancasila, yang pokok isinya adalah penggalangan persatuan antara dwitunggal yang terdiri dari rakyat dan ABRI dalam mengamalkan ideologi Pancasila secara murni, serta menolak usaha pembelaan G-30-S/PKI dalam bentuk apa pun. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari KAMI meminta agar kenaikan harga barang ditinjau kembali. Permintaan ini tidak mendapat tanggapan dari pemerintah.[5]

Kebijakan pemimpin negara dalam memecahkan berbagai kemelut di dalam negeri dipandang oleh rakyat sebagai suatu kebijakan yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Ketidakpuasan masyarakat yang menumpuk itu akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar. Dengan dipelopori KAMI dimulailah aksi-aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia dengan jaket kuningnya pada tanggal 10 Januari 1966, yang melanda hampir seluruh

---

3 *Pusat Pemberitaan Angkatan Bersendjata*, 28 Desember 1965, hlm. 1

4 Christianto Wibisono, *op. cit.*, hlm. 12

5 Laporan tentang Hasil *Fact Finding Commission* KOTI (dokumen), Pramoedya Ananta Toer, *Memoar Oei Tjoe Tat*, 1998, hlm. 200

jalan ibu kota selama lebih kurang 60 hari. Mereka menyampaikan *Tri Tuntutan Rakyat* (Tritura) kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Bubarkan PKI.
2. Retool Kabinet Dwikora.
3. Turunkan harga/perbaikan ekonomi.

Aksi demonstrasi para mahasiswa dan pelajar mendapat dukungan dari berbagai kesatuan aksi lainnya maupun dari Front Pancasila dan massa rakyat. "Jaket kuning" Universitas Indonesia menjadi lambang penegak keadilan dan kebenaran yang murni.

Menanggapi aksi-aksi mahasiswa dan pelajar di Jakarta itu, Presiden Soekarno mengundang para wakil mahasiswa untuk mengikuti sidang paripurna Kabinet Dwikora pada tanggal 15 Januari 1966 di Bogor. Dalam sidang itu Presiden menuduh aksi-aksi mahasiswa didalangi oleh Nekolim (*Neo-Kolonialisme* dan *Imperialisme*), khususnya oleh *Central Intelligence Agency* (CIA) Amerika Serikat. Akhirnya, Presiden Soekarno memberi komando kepada seluruh rakyat agar membentuk "Barisan Soekarno" untuk mempertahankan kedudukannya terhadap aksi-aksi yang dirasakan sebagai usaha mendongkelnya.

Pada tanggal 16 Januari dilancarkan kampanye bahwa "Barisan Soekarno" bertujuan mempertahankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Karena masih mengakui kepemimpinan Presiden Soekarno, rakyat Indonesia menyatakan dukungannya terhadap komando Presiden. Front Pancasila, di mana tergabung tujuh partai politik dan puluhan organisasi massa, dalam pernyataannya tanggal 17 Januari mendukung komando Presiden Soekarno untuk mempertinggi kewaspadaan terhadap Nekolim, kontrarevolusi, Gestok/PKI, kaum *vested interest*, dan kaum intrik.[6] Bahkan, Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia yang merupakan tulang punggung KAMI, juga menyatakan dukungannya.[7] Hampir semua golongan bagaikan berlomba-lomba menyatakan dukungan kepada pembentukan "Barisan Soekarno" itu.

Pada tanggal 16 Januari ABRI menanggapi isu itu dengan menyatakan bahwa ABRI tetap taat kepada Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi ABRI dan memelihara kekompakan sesama ABRI dan kekompakan antara rakyat dan ABRI. Sebelumnya pimpinan Angkatan Darat juga menyatakan bahwa seluruh rakyat adalah Barisan Soekarno, sehingga tidak perlu lagi

---

6 *Harian Angkatan Bersendjata*, 19 Januari 1966. Penggunaan istilah "Gestok" sebagai singkatan "Gerakan Satu Oktober" yang diciptakan oleh Presiden Soekarno ditafsirkan sebagai usaha untuk mendeskreditkan usaha penumpasan terhadap G-30-S/PKI yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965

7 *Harian Angkatan Bersendjata*, 18 Januari 1966

pembentukan Barisan Soekarno secara fisik. Dua hari kemudian Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (Pepelrada) Jawa Barat mengeluarkan larangan pembentukan Barisan Soekarno dalam bentuk organisasi apa pun di daerah hukum Jawa Barat. Meskipun larangan itu mendapat teguran dari Presiden, tindakan itu tetap diikuti oleh daerah-daerah lain, seperti Komando Antar Daerah (Koanda) Sumatra. KAMI pusat mengeluarkan pernyataan mendukung larangan tersebut karena pembentukan barisan itu secara fisik akan meningkatkan perpecahan di kalangah rakyat.

Tidak berhasilnya pembentukan Barisan Soekarno berarti usaha membelokkan perhatian rakyat dari penyelesaian politik terhadap pemberontakan G-30-S/PKI juga tidak berhasil. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Januari 1965 Presiden Soekarno kembali memberi komando kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menyusun barisan pembela Pemimpin Besar Revolusi. Seruan itu ternyata tidak menambah tenangnya situasi yang justru diinginkan untuk suatu *political solution.* Pihak yang tidak senang terhadap Tritura menghasut massa PNI/Front Marhaenis Ali-Surachman (PNI-Asu) untuk membalas aksi-aksi KAMI dengan perbuatan teror. Sejak itu, pertentangan antara pihak Orde Baru, yang dicerminkan oleh kesatuan-kesatuan aksi, dengan pihak pembela Soekarno, tidak hanya terbatas pada "perang mulut" (pernyataan dan penyebaran plakat-plakat) tetapi juga sudah meningkat menjadi perbenturan fisik.

Hanya dengan dukungan Front Pancasila dan ABRI perjuangan *Tritura* dapat diteruskan.[8] Front Pancasila mengeluarkan pernyataan lima pasal pada tanggal 14 Februari 1966 yang pada pokoknya mendukung tuntutan *Tritura* dan menolak segala fitnahan yang ditujukan kepada KAMI dan Front Pancasila.

Selanjutnya, Presiden melakukan *reshuffle* kabinet. Ditegaskan oleh Presiden bahwa *reshuffle* bukan karena perjuangan kesatuan-kesatuan aksi. Hasil *reshuffle* yang disebut "Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan" ternyata sangat mengecewakan harapan rakyat. Kabinet baru yang beranggota 102 menteri diumumkan pada tanggal 21 Februari 1966. Hal yang sangat mencengangkan rakyat ialah disingkirkannya tokoh-tokoh yang justru gigih menentang G-30-S/PKI, seperti Jenderal A.H. Nasution, Menteri Koordinator Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Sebaliknya, Presiden Soekarno mengangkat sejumlah orang yang diragukan iktikad baiknya, bahkan orang-orang yang diindikasikan terlibat dalam G-30-S/PKI, seperti Ir. Surachman dan Oei Tjoe Tat, S.H. Tidak mengherankan jika para mahasiswa memberi nama kabinet itu "Kabinet Gestapu" atau "Kabinet 100 Menteri", karena jumlah anggotanya seratus orang lebih.

---

[8] Christianto Wibisono, *Aksi-aksi Tritura, Kisah Sebuah Partnership,* 1970, hlm. 46

Pada tanggal 24 Februari 1966, saat pelantikan menteri kabinet baru, para demonstran melakukan aksi serentak mengempiskan ban-ban mobil di jalan-jalan raya di seluruh ibu kota sehingga lalu lintas praktis terhenti. Dalam bentrokan di depan istana, seorang demonstran yang bernama Arief Rachman Hakim, mahasiswa Universitas Indonesia, gugur terkena peluru Resimen Cakrabirawa. Insiden berdarah itu ternyata menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Sebagai akibat aksi mahasiswa itu, keesokan harinya pada tanggal 25 Februari 1966 berdasarkan keputusan Panglima Besar Komando Ganyang Malaysia (Kogam), KAMI dibubarkan.

Keputusan membubarkan KAMI dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan "Ikrar Keadilan dan Kebenaran" yang memprotes pembubaran KAMI dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Sementara itu, surat perintah penangkapan atas tokoh-tokoh KAMI mulai disebarkan. Dr. Subandrio dalam peringatan ulang tahun Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) yang merupakan ormas PNI, pada tanggal 28 Februari 1966 melakukan kontra-aksi menghasut massa Marhaenis untuk melakukan aksi teror terhadap lawan politiknya. Keadaan menjadi bertambah tidak aman. Di Jakarta jam malam diperpanjang. Universitas Indonesia ditutup sejak tanggal 3 Maret 1966, dan para mahasiswa dilarang berkumpul lebih dari lima orang.

Dengan dibubarkannya KAMI muncul Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) dan mahasiswa membentuk Resimen Arief Rachman Hakim melanjutkan aksi KAMI. Melihat gejala itu, Presiden menyatakan ketidakpuasannya akan pelaksanaan pembubaran KAMI. Dalam rapat Kogam tanggal 7 Maret 1966, Presiden memerintahkan agar Pepelrada lebih meningkatkan pelaksanaan pembubaran KAMI, tetapi tidak ditanggapi.

Sebaliknya, Front Pancasila meminta kepada pemerintah agar pembubaran KAMI ditinjau kembali. Dalam suasana demikian, gedung Departemen Luar Negeri diserbu dan diobrak-abrik oleh para pelajar dan mahasiswa, bersamaan waktunya dengan kantor berita RRC, *Hsin Hua* dibakar. Aksi demonstran tanggal 8 Maret itu betul-betul menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno.[9] Pada hari itu juga Presiden mengeluarkan Perintah Harian yang ditujukan kepada seluruh ABRI, parpol-parpol dan ormas-ormasnya, dan seluruh rakyat "yang progresif-revolusioner" supaya waspada terhadap usaha untuk "membelokkan jalannya revolusi kita ke kanan", dan supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha yang

[9] Wawancara dengan H. Marzuki Jatim, Jakarta, 8 Juni 1971; Ali Sastroamidjojo, S.H., Jakarta, 13 Agustus 1971

langsung maupun tidak langsung bertujuan merongrong terhadap kepemimpinan, kewibawaan, atau kebijakan Presiden/Mandataris MPRS/ Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi serta untuk memperhebat "pengganyangan terhadap Nekolim serta proyek *British Malaysia*".[10]

2. Surat Perintah 11 Maret 1966

Untuk mengatasi krisis politik yang makin memuncak, Presiden Soekarno memanggil Front Pancasila, ASu-PNI, dan Partindo pada pertemuan tanggal 10 Maret 1966. Sebelum pertemuan dilangsungkan, Front Pancasila sudah membulatkan tekad akan kompak menghadapi pendukung Presiden Soekarno. Akhirnya pertemuan itu dihadiri oleh wakil-wakil partai NU, PSII, IPKI, Perti, Partai Katholik, Parkindo, PNI, Partindo, dan Muhammadiyah; sedangkan Presiden didampingi oleh para Wakil Perdana Menteri (Waperdam) dr. Subandrio, Chairul Saleh, dr. J. Leimena, Menteri Dalam Negeri dr. Sumarno, Menteri Penerangan Mayjen Achmadi, dan Duta Besar RI untuk Kuba A.M. Hanafi. Presiden Soekarno dan para pembantunya serta PNI dan Partindo menekankan agar partai politik dan organisasi massa mengutuk demonstrasi Tritura sebagai aksi yang kontra-revolusi. Akan tetapi, pihak Front Pancasila tidak bersedia mengutuk demonstrasi kecuali hanya mengingatkan agar tidak ditunggangi pihak ketiga karena tuntutan pokoknya adalah PKI harus dibubarkan.[11] Hasil pertemuan tidak memuaskan kedua pihak, terutama Front Pancasila, karena permintaan pembubaran PKI tidak berhasil. Pernyataan partai politik dan ormas hasil pertemuan itu disiarkan oleh Menteri Penerangan di dalam surat-surat kabar tanggal 11 Maret 1966. Karena siaran itu dapat menimbulkan kesan yang salah, Front Pancasila mengeluarkan suatu penjelasan untuk intern partai politik dan ormas pada tanggal 11 Maret 1966. Penjelasan itu berisi bantahan siaran pemerintah yang ditandatangani oleh wakil-wakil NU, Muhammadiyah, Partai Katholik, IPKI, Perti, dan PSII kecuali oleh Parkindo.[12]

Pada tanggal 11 Maret 1966 kabinet mengadakan sidang paripurna. Sidang bertujuan mencari jalan keluar dari krisis yang memuncak. Sidang diboikot oleh para demonstran dengan melakukan pengempisan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju Istana. Belum lama Presiden berpidato,

---

[10] *Berita Yudha*, 9 Maret 1966; *Harian Angkatan Bersendjata*, 9 Maret 1966

[11] Wawancara dengan H. Marzuki Jatim, Jakarta, 7 dan 8 Juli 1971; Subchan Z.E., Jakarta, 4 Agustus 1971

[12] Wawancara dengan Subchan Z.E., *Harian Angkatan Bersendjata*, tanggal 12 Maret 1966

ia mendapat laporan dari Brigjen Sabur, Ajudan Senior dan Komandan Resimen Cakrabirawa bahwa di luar Istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal pada seragamnya berada di tengah-tengah demonstran. Presiden merasa terancam keamanan pribadinya meskipun ada jaminan dari Pangdam V/Jaya Brigadier Jenderal Amir Machmud, yang hadir waktu itu, bahwa keadaan tetap aman. Presiden Soekarno tetap merasa khawatir, dan meninggalkan sidang. Kutipan jaminan Amir Machmud adalah sebagai berikut:

> "Mir, ke mana Bapak harus jalan?"
>
> "Bapak mau ke mana? Bapak tidak usah bingung tidak usah takut, karena ada perintah tegas Pak Harto untuk menjaga keselamatan Bapak dan tidak boleh satu peluru pun mengenai Bapak. Jadi, Bapak harus tenang karena tidak terjadi apa-apa."[13]

Tindakan Presiden Soekarno meninggalkan sidang diikuti oleh Waperdam I dr. Subandrio dan Waperdam III Dr. Chairul Saleh. Presiden dikawal oleh Brigjen Sabur dengan helikopter menuju Bogor. Dengan helikopter lain Waperdam I dr. Subandrio bersama Waperdam III Chairul menyusul Presiden ke Bogor. Sidang ditutup oleh Waperdam II dr. J. Leimena, yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Kehadiran pasukan di sekitar Istana atas perintah Jenderal Soeharto tujuannya adalah untuk menangkap para menteri yang diragukan iktikad baiknya,[14] antara lain dr. Subandrio.

Pada waktu yang sama di Jakarta telah berkumpul para panglima ABRI seluruh Indonesia yang menurut rencana akan diberi *briefing* oleh Presiden pada tanggal 12 Maret 1966. Untuk menghadapi situasi selanjutnya, antara Front Pancasila dan ABRI harus tetap terjalin kerja sama. Ketua Front Pancasila mengadakan kontak dengan para panglima ABRI, untuk meminta dukungan atas tindakan yang telah dilakukan Front Pancasila.[15]

Sementara itu, tiga orang perwira tinggi TNI AD, yaitu Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Urusan Veteran), Brigjen M. Jusuf (Menteri Perindustrian), dan Brigjen Amir Machmud, yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Motivasinya adalah agar Presiden Soekarno tidak merasa terpencil dan supaya yakin bahwa ABRI, khususnya TNI AD tetap siap sedia mengatasi keadaan asal diberi kepercayaan penuh. Sebelum berangkat, ketiga perwira tinggi itu minta izin kepada atasannya, yakni Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal

---

13 Amir Machmud, *Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) Tonggak Sejarah Orde Baru*, 1985, hlm. 7

14 Saleh A. Djamhari, *Memoar Jenderal (Purn.) Soemitro*, 1999, hlm. 269–269

15 Wawancara dengan Subchan Z.E., 4 Agustus 1971

Soeharto yang juga merangkap panglima Kopkamtib. Pada waktu itu Jenderal Soeharto sedang sakit, dan beristirahat di rumah. Niat ketiga perwira itu disetujuinya.[16] Mayjen Basuki Rachmat menanyakan apakah ada pesan khusus dari Jenderal Soeharto untuk Presiden Soekarno, Jenderal Soeharto menjawab, "Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti."

Latar belakang ucapan itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965 pascapemberontakan G-30-S/PKI, antara Presiden Soekarno dengan Jenderal Soeharto terdapat perbedaan pendapat mengenai cara bertindak bagi usaha menyelesaikan krisis dan gerakan rakyat. Menurut Jenderal Soeharto, gerakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan jalan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan. Sebaliknya, Presiden Soekarno menyatakan bahwa ia tidak mungkin membubarkan PKI karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, perbedaan paham itu tetap muncul. Pada suatu ketika Jenderal Soeharto bersedia diri untuk membubarkan PKI asal mendapat kebebasan bertindak dari Presiden. Pesan Jenderal Soeharto yang disampaikan kepada ketiga orang perwira tinggi yang akan berangkat ke Bogor itu mengacu kepada kesanggupan itu.[17]

Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi itu mengadakan pembicaraan dengan Presiden. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tinggi itu bersama komandan Resimen Cakrabirawa Brigjen Sabur diperintahkan menyusun draf surat perintah kepada Jenderal Soeharto. Setelah draf tersebut dibahas bersama dengan para Waperdam dr. Subandrio, dr. Leimena, dan Dr. Chairul Saleh, draf surat perintah itu ditandatangani oleh Presiden Soekarno sehingga menjadi surat perintah resmi. Surat perintah itu kemudian terkenal dengan nama *Surat Perintah 11 Maret*, yang disingkat menjadi *SP 11 Maret* atau *Supersemar*.

Ketiga perwira tinggi menyampaikan surat perintah itu kepada Jenderal Soeharto pada malam hari itu juga, kemudian Jenderal Soeharto mengundang Front Pancasila dan memanggil para panglima daerah ke Markas Kostrad untuk membicarakan adanya surat perintah itu dan langkah yang akan diambil karena dukungan mereka sangat diperlukan.[18] Langkah

[16] M. Jusuf, Letjen TNI, "Pengalaman Saja dengan Supersemar", *Pedoman*, 17 Maret 1973

[17] Keterangan Presiden Soeharto kepada Kepala Pusat Sejarah ABRI, Brigjen Nugroho Notosusanto, Jakarta, 3 Maret 1977

[18] Wawancara dengan Jenderal Pol. Soetjipto Joedodihardjo, Jakarta, tanggal 18 Agustus 1971, I.J. Kasimo, Jakarta, 18 Agustus 1971

pertama pada tanggal 12 Maret 1966, Jenderal Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas di seluruh wilayah Indonesia. Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat, karena dengan demikian salah satu di antara Tritura telah dilaksanakan.

Kepada para mahasiswa dan pelajar, Jenderal Soeharto meminta untuk segera kembali ke bangku sekolah. Sementara itu, kepada semua partai politik dan organisasi massa diserukan untuk tidak menerima anggota bekas PKI dan ormasnya.[19] Dalam seruan yang sama para anggota partai terlarang itu harus segera melaporkan diri paling lambat akhir Maret 1966. DPR GR dalam sidang paripurnanya tanggal 16 Maret 1966 mendukung kebijakan yang diambil oleh Jenderal Soeharto.

Langkah kedua, tindakan yang diambil berdasarkan SP 11 Maret adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang dinilai terlibat di dalam pemberontakan G-30-S/PKI atau memperlihatkan iktikad tidak baik dalam rangka penyelesaian masalah itu. Para menteri yang ditahan itu adalah dr. Subandrio, dr. Chairul Saleh, Ir. Surachman, Ir. Setiadi Reksoprodjo, Oei Tjoe Tat, S.H., Jusuf Muda Dalam, Mayjen Achmadi, drs. Achadi, Sumardjo, Armunanto, Soetomo Martopradopo, Astrawinata, S.H., J. Tumakaka, Mayjen dr. Sumarno, dan Letkol Sjafei.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, Jenderal Soeharto mengangkat lima orang Menteri Koordinator (Menko) *ad interim* yang bersama-sama menjadi Presidium Kabinet. Mereka adalah Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, dr. Roeslan Abdulgani, dr. K.H. Idham Chalid, dan dr. J. Leimena. Juga beberapa orang menteri *ad interim* diangkat sampai terbentuknya kabinet baru. Mereka adalah Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dirangkap oleh Menteri Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro, S.H.; Menteri Urusan Bank Sentral oleh Menko Soemarno, S.H.; Menteri Perburuhan dirangkap oleh Menteri Perkebunan drs. Frans Seda; Menteri Pertambangan dirangkap oleh Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi Mayjen dr. Ibnu Sutowo; Menteri Listrik dan Ketenagaan dirangkap oleh Menteri Ir. Sutami; Menteri Pengairan Rakyat dan Pembangunan Masyarakat Desa dirangkap oleh Menteri Pengairan Dasar Ir. P.C. Harjosoedirdjo; Menteri Transmigrasi dan Koperasi dirangkap oleh Menteri drs. A. Sukendro; Menteri PDK dan Menteri PTIP dirangkap oleh Menteri/Wakil Ketua DPR GR Brigjen dr. Sjarif Thayeb; Menteri/Sekjen Front Nasional dirangkap oleh Menteri/Wakil Ketua DPR GR. K.H. Achmad

---

[19] *Harian Angkatan Bersendjata,* 15 Maret 1966; *Berita Yudha,* 15 Maret 1966

Sjaichu; Menteri Penerangan dirangkap oleh Menteri Domine J. Rumambi; Menteri Dalam Negeri/Gubernur KDH Khusus Ibu Kota Jakarta Raya dirangkap oleh Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi Mayjen Basuki Rachmat, dan Menteri Perhubungan Darat Letjen Hidayat merangkap sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi.[20]

B. Stabilisasi Politik

1. Masa Transisi (1966–1967)

Dalam masa 1966–1967 terjadi dualisme dalam kepemimpinan nasional. Di satu pihak Presiden Soekarno yang masih aktif, dan di pihak lain adanya tokoh Jenderal Soeharto yang memimpin pemerintahan.[21] Suasana konflik politik amat kondusif untuk terjadinya perpecahan nasional.

Pada 2 Mei 1966, Presidium KAMI Pusat menyampaikan nota politik kepada DPR GR mengenai pemerintah UUD 1945 dengan konsekuen terutama tentang pengangkatan anggota DPR/MPRS dan mengesahkan SP 11 Maret 1966 untuk mengamankan jalannya revolusi. Dengan nada yang sama dengan KAMI, 11 orang anggota Front Pancasila menandatangani pernyataan kebulatan tekad.[22] Dalam menanggapi suasana konflik itu, pimpinan ABRI pada 5 Mei 1966 mengeluarkan pernyataan yang isinya menegaskan posisi ABRI dalam suasana konflik politik itu. Dalam konsideransnya, pimpinan ABRI menyatakan:

> "Bentuklah Pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah memahami dengan saksama perkembangan keadaan yang mengejawantahkan suara hati nurani rakyat, dengan khidmat menanggapi dengan pernyataan, antara lain, sebagai berikut.
>
> 1. Angkatan Bersenjata adalah pengaman, pengawal Revolusi Indonesia dengan tiga kerangka tujuannya yang hendak dicapai berdasarkan Pancasila.
> 2. Angkatan Bersenjata adalah pengaman Pimpinan Revolusi Indonesia dan pengaman Kewibawaan Presiden Soekarno beserta ajaran-ajarannya dengan iktikad baik anak kandung revolusi, berani dan papar dalam memberikan laporan dan pertimbangan kepada Pimpinan Presiden ....
> 3. Angkatan Bersenjata ... hendak menempatkan hakikat kedudukan presiden yang sebenarnya menurut kemurnian asas dan sendi pelaksanaan dan pada UUD 1945.

---

[20] *Harian Angkatan Bersendjata*, 19 Maret 1966

[21] Departemen Penerangan RI, *Putusan-putusan Sidang Istimewa MPRS pada tahun 1967*, hlm. 3–8

[22] *Kompas*, 4 Mei 1966

Pernyataan ini ditandatangani oleh Jenderal Soeharto, Jenderal A.H. Nasution, Laksamana Muda Laut Mulyadi, Komodor Udara Rusmin Nuryadin, dan Komisaris Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo.[23]

Bersamaan dengan pernyataan pimpinan ABRI, DPR GR menyampaikan sumbangan pikiran untuk dijadikan acara pokok dalam Sidang Umum IV MPRS.

Saran-saran untuk perbaikan politik dalam negeri juga diajukan oleh Universitas Indonesia dalam kerja sama dengan KAMI dan KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) pada simposium *Kebangkitan Semangat '66 Menjelajah Tracee Baru* yang diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 9 Mei 1966. Khusus mengenai bidang politik dalam negeri dengan tema "Indonesia Negara Hukum", antara lain diingatkan bahwa pada waktu yang lampau banyak sekali terjadi penyimpangan dari asas-asas serta norma-norma yang berlaku dalam suatu negara hukum. Peraturan hukum dan pelaksanaannya tidak mencerminkan jiwa Pancasila. Dalam bidang ketatanegaraan ditunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan bahwa ada pejabat yang harus bertanggung jawab kepada pejabat yang lain, tetapi pejabat yang bersangkutan justru pengangkatannya tergantung dari pejabat yang tersebut pertama, seperti tercantum dalam Penetapan Presiden (Penpres) No. 2 Tahun 1959 tentang MPRS. Lembaga Yudikatif seperti Mahkamah Agung yang seharusnya melakukan "kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah", ketuanya diangkat sebagai Menteri Negara, yang menyebabkan pengintegrasian Mahkamah Agung dalam tubuh kabinet sebagai lembaga eksekutif.

Mengenai saran-saran yang disampaikan kepada pemerintah untuk mengembalikan kewibawaan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum diusulkan pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, penghentian penpres-penpres baru dan peninjauan kembali semua penpres yang telah dikeluarkan. Diusulkan pula agar diadakan jaminan yang cukup terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia dalam menciptakan dan menegakkan hukum.[24] Pada bulan Mei 1966, pemerintah disibukkan oleh persiapan Sidang Umum IV MPRS yang akan diselenggarakan pada bulan Juni–Juli 1966. Suasana politik semakin memanas. Para pendukung Presiden Soekarno melakukan konsolidasi yang melibatkan kesatuan-kesatuan Angkatan Bersenjata terutama di Jawa Timur. Untuk membela Bung Karno dan menentang Sidang Umum MPRS, mereka mengadakan pawai dengan

---

[23] Pusat Sejarah ABRI, *40 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia II*, 1985, hlm. 46–47; *Harian Angkatan Bersendjata*, 6 Mei 1966

[24] Simposium Kebangkitan Semangat '66, diselenggarakan dari tanggal 6 Mei s.d. 9 Mei 1966: "Kesimpulan Bidang Politik Dalam Negeri"

tema "Bung Karno Jaya" dan "Pejah Gesang nderek Bung Karno hidup-mati bersama Bung Karno".

Usaha merintis jalan menuju kepada iklim politik yang stabil berlangsung setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. MPRS bersidang dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966 menghasilkan 24 ketetapan MPRS dan satu keputusan No. 5/MPRS/1966.[25]

Menyadari fungsinya selaku lembaga yang menentukan garis besar haluan negara, MPRS pada waktu yang bersamaan mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera. Kabinet ini dibentuk untuk memenuhi dan melaksanakan Tri Tuntutan Rakyat di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang perlu *diambeg-paramaartakan.* Tugas membentuk kabinet ini diserahkan kepada Letjen Soeharto sebagai Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Tugas pokok yang dibebankan kepada kabinet ini ialah menciptakan kestabilan politik dan ekonomi dengan programnya antara lain memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, serta melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XI.[26]

Guna menunjang program kerja Kabinet Ampera, bertempat di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Bandung, mulai tanggal 25 sampai 31 Agustus 1966 diadakan Seminar Angkatan Darat II. Seminar ini bertujuan menyumbangkan pikiran kepada Kabinet Ampera dengan merumuskan konsep strategi dan operasi Kabinet Ampera. Di bidang politik dan konstitusional dirumuskan dasar-dasar Demokrasi Pancasila seperti dimaksudkan dalam UUD 1945, yang berarti menegakkan kembali asas-asas negara hukum, di mana kepastian hukum dirasakan oleh seluruh warga negara serta penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Lembaga-lembaga serta tata kerja Orde Baru dilepaskan dari ikatan-ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan. Sosialisme Indonesia dirumuskan sebagai masyarakat yang adil dan makmur, sedang mengenai jangkauan revolusi dimaksudkan untuk mendorong Indonesia ke arah kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan tuntutan-tuntutan abad ke-20.[27]

Kabinet Ampera diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966, setelah Letjen Soeharto mengadakan konsultasi dengan pimpinan MPRS dan DPR GR maupun dengan organisasi politik dan massa. Jangka waktu kerja Kabinet Ampera adalah dua tahun. Tugas pokok dan programnya yang terkenal dengan Dwi Dharma Catur Karya berorientasi kepada tugas-tugas

---

[25] Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, No. XII/MPRS/1966

[26] Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966

[27] Hasil Seminar Angkatan Darat II, "Konsep Strategi dan Operasi Kabinet Ampera", 1966, hlm. 46

penyelesaian proses revolusi. Organisasi kabinet diusahakan melaksanakan dapat menjamin kontinuitas perencanaan, administrasi, dan pembinaan personel.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, pimpinan adalah Presiden Soekarno yang memimpin kabinet. Pelaksanaan pimpinan pemerintahan sehari-hari dilakukan oleh presidium kabinet yang dipimpin oleh seorang Ketua Presidium Letjen Soeharto. Kebijakan umum pemerintah dilaksanakan oleh menteri-menteri yang berjumlah 24 orang, masing-masing memimpin sebuah departemen. Dalam melakukan *Dwi Dharma* (tugasnya) dan *Catur Karya* (programnya), Kabinet Ampera berpegangan kepada hasil-hasil Sidang Umum III MPRS tahun 1966.[28]

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur desentralisasi teritorial,[29] kepada pemerintah daerah diletakkan tanggung jawab otonomi riil yang seluas-luasnya. Kepada pemerintah daerah juga diberikan wewenang menjalankan politik *dekonsentrasi* sebagai *komplemen* yang vital. Dengan menjalankan politik demikian, diharapkan dapat mendewasakan daerah menuju swadaya dan swasembada dalam berbagai bidang. Urusan-urusan yang pada mulanya ada dalam kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi tugas dan kewenangan daerah (desentralisasi) tanpa mengurangi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat. Penyerahan tugas dan wewenang kepada daerah diimbangi dengan keuangan yang dibutuhkan.[30]

Sementara itu, masalah kepartaian, keormasan, dan berkenaan kekaryaan, MPRS menghasilkan Ketetapan MPRS No. XII Tahun 1966 yang mengatur mengenai kepartaian, keormasan, dan kekaryaan.[31] Materi yang digunakan membahas masalah ini ialah Penetapan Presiden No. 7/1959, Peraturan Presiden No. 13/1960, dan Keputusan Presiden No. 2/1959 yang ditinjau kembali. Tujuan pengaturan ketetapan ini merupakan penerapan asas demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Bidang lain yang mendapat perhatian MPRS ialah masalah pembinaan kesatuan bangsa. Melalui resolusi MPRS No. III/ Res/MPRS/1966 ditetapkan dalam pasal-pasalnya mengenai penerapan sistem pendidikan Pancasila dengan cara-cara:[32]

---

28 Pidato radio/tv, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tanggal 29 Juli 1966

29 *Desentralisasi* ialah cara pemerintahan yang lebih banyak memberi kekuasaan kepada pemerintah daerah

30 Penjelasan Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah

31 Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan

32 Resolusi MPRS No. III/Res/MPRS/1966, Bab I, Pasal I

1. mengintensifkan pendidikan agama sebagai unsur mutlak untuk *national* dan *character building* di semua sekolah dan lembaga pendidikan, dengan memberikan kesempatan yang seimbang;
2. melarang usaha penumbuhan dan pengembangan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan Pancasila, antara lain Marxisme-Leninisme (Komunisme).

Karena bahasa dianggap sebagai alat pemersatu yang ampuh, Pasal 2 dari resolusi MPRS ini menekankan kepada pemerintah agar penggunaan bahasa Indonesia ditingkatkan. Demikian pula mengenai budaya-budaya daerah pada Pasal 3 digariskan untuk menyuburkan pertumbuhannya. Usaha integrasi melalui asimilasi warga negara keturunan asing dilaksanakan dengan mengajukan larangan perangkapan kewarga-negaraan. Dalam pelaksanaannya diusahakan untuk menghapuskan segala hambatan-hambatan yang menyebabkan terjadinya hubungan tidak harmonis dengan warga negara asli. Ketentuan ini tercantum dalam Resolusi MPRS yang sama, yaitu Pasal 4. Pasal 7 resolusi ini memberikan petunjuk untuk memperkukuh kesatuan bangsa, dengan menyadarkan perlunya pencerminan sikap Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pertentangan politik di dalam negeri berangsur-angsur menjadi reda setelah Presiden Soekarno pada tanggal 22 Februari 1967 menyerahkan kekuasaan pemerintahan negara kepada Jenderal Soeharto. MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa pada 7–12 Maret 1967 dengan mengangkat Jenderal Soeharto selaku pejabat presiden. Pendekatan-pendekatan dengan organisasi politik dan organisasi massa oleh pejabat presiden tetap berlangsung guna mendapatkan masukan mengenai kehendak mereka.

Masih dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin berlakunya hukum dan demokrasi di Indonesia, beberapa produk MPRS semasa Demokrasi Terpimpin ditinjau kembali, seperti Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 yang telah menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, disesuaikan dengan tuntutan serta perkembangan politik, ekonomi, dan sosial Orde Baru. Untuk itu, berdasarkan Ketetapan MPRS No. X/ MPRS/1966 Pasal 1, MPRS berfungsi sebagai MPR yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga ini yang berwenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Setelah bermusyawarah dari tanggal 7 sampai 12 Maret 1967, dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 yang meninjau kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia yang

menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara.[33] Produk MPRS masa lalu lainnya yang ditinjau kembali ialah tentang gelar atau pengertian Pemimpin Besar Revolusi. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966, predikat Pemimpin Besar Revolusi yang diberikan kepada Dr. Ir. Soekarno tidak membawa wewenang hukum sehingga dianggap sebagai gelar biasa. Selanjutnya, berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/1967, mencabut Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966.[34] Selain gelar, karya-karya Bung Karno yang dikenal sebagai "Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi", sebagaimana yang dicantumkan oleh Ketetapan MPRS No. XVI/MPRS/1966, dinyatakan sebagai aset intelektual nasional mempunyai kedudukan yang sama dengan karya-karya pemimpin Indonesia lainnya. Ketetapan yang kemudian diambil oleh MPRS ialah mencabut Ketetapan MPRS yang mengatur tentang penelitian ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.[35]

Memasuki fase terakhir masa transisi, pemerintah menghadapi berbagai masalah nasional. Mengingat pemilihan umum sesuai dengan keputusan MPRS harus diselenggarakan dalam tahun 1968 sedang undang-undang yang mengaturnya belum ada, Pejabat Presiden di depan DPR GR-MPRS pada tanggal 29 Februari 1968 memberikan penjelasan bahwa kemanfaatan dan tujuan pemilihan umum ialah menciptakan stabilisasi politik untuk membangun wujud demokrasi yang sehat. Pemilihan umum paling cepat dapat diselenggarakan dalam jangka waktu 1 tahun sesudah di-undangkannya berbagai undang-undang yang diperlukan. Tujuan pemilihan umum adalah untuk menyegarkan DPR GR dan MPRS, mendekatkan kedudukannya kepada masyarakat yang diwakilinya. Penyegaran lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta lembaga-lembaga eksekutif lainnya merupakan kebutuhan yang mendesak agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan penyegaran lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimaksudkan agar rencana pembangunan nasional mendapat dukungan luas dari semua lapisan masyarakat.[36]

Ada tiga masalah nasional selama tahun terakhir masa transisi (yang berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 26 Maret 1968) yang diperhatikan oleh pemerintah Orde Baru, yakni:

---

[33] Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967

[34] Ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/1967

[35] Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967

[36] Penjelasan Pj. Presiden mengenai masalah nasional yang penting dan mendesak di depan DPR GR-MPRS pada tanggal 29 Februari 1968

1. memperkuat pelaksanaan sistem konstitusional, menegakkan hukum, dan menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat sebagai syarat untuk mewujudkan stabilisasi politik;
2. melaksanakan pembangunan lima tahun yang pertama sebagai usaha untuk memberi isi kepada kemerdekaan;
3. tetap waspada dan sekaligus memberantas sisa-sisa kekuatan laten PKI.

Masalah nasional lainnya yang ditanggulangi ialah peningkatan mutu pegawai serta pemberantasan korupsi. Usaha ini ditempuh dengan cara alokasi dan meningkatkan mutu mereka. Untuk itu, diselenggarakan pendidikan khusus sehingga mereka dapat meningkatkan mutu pekerjaannya. Pemerintah tidak melakukan pengurangan pegawai secara drastis karena hal ini dapat menimbulkan masalah sosial yang baru.

Selanjutnya guna menanggulangi masalah pemberantasan korupsi, pemerintah membentuk *Tim Pemberantas Korupsi* (TPK). Pada mulanya tim ini bekerja dengan pola yang sederhana, yaitu mengadakan penyelidikan terhadap para pejabat yang menurut masyarakat melakukan korupsi. Terhadap penyelewengan yang menurut hukum tidak dapat ditindak, pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan administratif.

Langkah yang sangat penting ialah mengembalikan Kepolisian Republik Indonesia pada fungsinya semula, yakni sebagai alat ketertiban masyarakat dan penegak hukum. Dengan dikembalikannya fungsi Kepolisian ini, kriminalitas berangsur-angsur berkurang.

2. Peralihan Kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Pengemban TAP IX/MPRS/1966, Jenderal Soeharto

Pada Sidang Umum MPRS tahun 1966, Presiden selaku Mandataris MPRS diminta oleh MPRS untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kebijakan yang telah dilakukan, khususnya mengenai masalah pemberontakan G-30-S/PKI. Hal yang mengecewakan MPRS adalah bahwa Presiden Soekarno dalam pidato pertanggungjawabannya terhadap MPRS cenderung memberi amanat, sebagaimana biasa ia lakukan di hadapan sidang-sidang lembaga yang berada dalam lingkungan tanggung jawabnya. Presiden menamai pidatonya itu *Nawaksara*, artinya sembilan pokok masalah. Masalah G-30-S/PKI merupakan masalah nasional yang menyangkut kebijakan Presiden tidak disinggung dalam *Nawaksara*. Pimpinan MPRS meminta kelengkapan laporan pertanggungjawabannya sebagai Mandataris MPRS agar Presiden melengkapi pertanggung-jawabannya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa G-30-S/PKI beserta

epilognya dan kemunduran ekonomi serta akhlak.[37] Pada tanggal 22 Oktober 1966 pimpinan MPRS mengirim nota kepada Presiden. Permintaan pimpinan MPRS itu dipenuhi oleh Presiden. Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden menyampaikan naskah untuk melengkapi pidato pertanggungjawabannya (*Nawaksara*); naskah itu disebut *Pelengkap Nawaksara* disingkat *Pel Nawaksara.* Isinya pada pokoknya tidak meredakan keadaan, tetapi situasi konflik semakin menajam. *Pel Nawaksara* mendapat tanggapan dari seluruh rakyat, dengan pendapat bahwa Presiden Soekarno berusaha untuk menambah gawatnya situasi politik. Dewan Pimpinan Daerah PNI Sulawesi Selatan menyatakan bahwa *Pel Nawaksara* bukan saja menambah gawatnya keadaan, bahkan cenderung mengarah kepada malapetaka nasional yang baru. PNI Sulawesi Selatan merasa kecewa terhadap *Pel Nawaksara* sebagai pertanggungjawaban Presiden/Mandataris dan tidak pula memberikan penyelesaian terhadap situasi konflik yang berlangsung.[38] Demikian juga DPRD Sulawesi Selatan menyatakan menolak *Pel Nawaksara* karena dianggap tidak memenuhi Tritura.[39] Pihak GMNI Bandung menganggap bahwa *Pel Nawaksara* tidak memenuhi kehendak yang tersirat dalam Ketetapan MPRS No. V/MPRS/1966. Koordinator Pemuda Sekretariat Bersama Golongan Karya menolak *Pel Nawaksara* dan mengusulkan agar MPRS mengadakan sidang istimewa. Para alim ulama Jawa Barat menyatakan tidak lagi mengakui Presiden Soekarno sebagai presiden karena telah melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan MPRS.[40]

Sehubungan dengan masalah *Pel Nawaksara* dan bertambah gawatnya situasi konflik, pada tanggal 9 Februari 1967 DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar MPRS mengadakan sidang istimewa. Sementara itu, usaha-usaha untuk menyelesaikan situasi konflik ini dilakukan terus, berhubung dengan banyaknya reaksi-reaksi rakyat. Pihak pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi dengan Presiden. Kehendak Pimpinan ABRI dalam penyelesaian situasi konflik itu ialah agar Presiden sebelum Sidang Umum MPRS, mengadakan penyerahan kekuasaan kepada Pengemban TAP IX/MPRS/1966, Jenderal Soeharto. Hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan rakyat dan juga untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan serta pribadi Presiden Soekarno sendiri supaya jangan sampai dibahas berpanjang-panjang.

---

37 A.H. Nasution, *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran*, I, hlm. 169

38 *Berita Yudha*, 21 Djanuari 1967

39 *Ibid.*, 21 Djanuari 1967

40 *Berita Yudha*, 28 Djanuari 1967

Pada tanggal 7 Februari 1967 Jenderal Soeharto menerima surat rahasia dari Presiden Soekarno dengan perantaraan Hardi, S.H. Surat tersebut dilampiri sebuah konsep (draf) surat penugasan mengenai pimpinan pemerintah sehari-hari kepada pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966.[41]

Pada tanggal 8 Februari 1967, oleh Jenderal Soeharto, konsep tersebut dibahas dan dibicarakan bersama keempat Panglima Angkatan Bersenjata. Jenderal Soeharto dan para panglima berkesimpulan bahwa konsep surat tersebut tidak dapat diterima karena penugasan semacam itu tidak akan membantu menyelesaikan konflik politik yang ada. Dua hari kemudian, tanggal 10 Februari 1967, Jenderal Soeharto menghadap Presiden Soekarno dan membicarakan masalah surat penugasan khusus itu, serta melaporkan pendirian Panglima Angkatan. Presiden kemudian menanyakan kemungkinan yang baik untuk menyelesaikan masalah ini.

Keesokan harinya para Panglima Angkatan menemui Presiden di Bogor. Di hadapan Presiden, Jenderal Soeharto mengajukan konsep yang mungkin digunakan untuk mempermudah penyelesaian situasi konflik. Presiden meminta waktu untuk mempelajarinya.

Konsep yang diajukan oleh Jenderal Soeharto itu berisi tentang: Pernyataan Presiden berhalangan atau Presiden menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berdasarkan Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966. Sesuai dengan janji Presiden pada tanggal 12 Februari 1967, Jenderal Soeharto beserta dengan para Panglima Angkatan mengadakan pertemuan lagi. Dalam pertemuan ini Presiden Soekarno menyatakan tidak dapat menerima konsep yang diajukan oleh Jenderal Soeharto. Presiden mengusulkan supaya diadakan perubahan bentuk, di samping itu juga tidak menyetujui pernyataan yang isinya berhalangan. Presiden mengusulkan agar esok harinya diadakan pertemuan kembali.

Pagi tanggal 13 Februari 1967, para panglima berkumpul kembali untuk membicarakan konsep yang telah disusun sebelum diajukan kepada Presiden. Pada pukul 11.00 para panglima mengutus Jenderal Panggabean dan Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo untuk menghadap Presiden. Dalam pertemuan ini tidak terdapat kesepakatan pendapat karena Presiden masih menuntut perubahan-perubahan yang tidak mungkin dapat dipenuhi.

Beberapa waktu kemudian, dengan perantaraan Mayor Jenderal Surjo Sumpeno, Ajudan Presiden, Presiden Soekarno menyatakan setuju konsep yang diajukan oleh Jenderal Soeharto, tetapi beliau meminta jaminan dari Jenderal Soeharto. Selanjutnya memerintahkan agar Jenderal Soeharto

[41] Hardi, *Api Nasionalisme*, 1985, hlm. 180–182

bersama para Panglima Angkatan berkumpul kembali pada hari Minggu tanggal 19 Februari I967 di Bogor. Selama itu, para Panglima Angkatan mengadakan serangkaian pertemuan membahas soal-soal yang akan dibicarakan dengan Presiden. Tanggal 19 Februari kembali diadakan pertemuan di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, Presiden tetap menolak untuk menandatangani konsep yang diajukan Jenderal Soeharto. Sore harinya Panglima Angkatan Laut (Pangal) Laksamana Mulyadi dipanggil oleh Presiden. Pangal Mulyadi datang menghadap dengan membawa konsep yang telah dipersiapkan. Presiden menyetujui dengan perubahan-perubahan kecil pada Pasal 3 ditambah dengan kata-kata menjaga dan menegakkan revolusi. Pada tanggal 20 Februari, Pangal Mulyadi dan Pangak Soetjipto dipanggil menghadap Presiden. Kemudian konsep itu ditandatangani pada hari itu juga. Presiden meminta agar diumumkan hari Kamis, tanggal 23 Februari, 1967.[42] Setelah diketahui tentang hari pengumuman penyerahan kekuasaan itu, pada hari Kamis sore Jenderal Soeharto memanggil semua menteri ke kantor presidium Kabinet, Merdeka Barat 15. Semua menteri tidak ada yang tahu maksud pemanggilan Jenderal Soeharto, kecuali para Panglima Angkatan. Kemudian mereka berangkat bersama-sama ke Istana, sementara Jenderal Soetjipto dan Komodor Rusmin telah mendahului datang di Istana.

Pada hari Kamis pukul 19.30, bertempat di Istana Negara, dengan disaksikan oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan resmi menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto.[43] Isi pengumuman itu adalah sebagai berikut.

Pengumuman Presiden

Kami Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan rakyat, bangsa, dan negara.

1. Kami Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pengemban Ketetapan MPRS/IX/1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada Presiden setiap waktu dirasa perlu.

---

42 Wawancara dengan Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo, Jakarta, 2 Juli 1971

43 *Berita Yudha*, 23 Februari 1967

3. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, para pemimpin masyarakat, segenap aparatur pemerintahan dan seluruh ABRI untuk terus meningkatkan persatuan dan menjaga dan menegakkan revolusi dan membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 seperti tersebut di atas.
4. Menyampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab pengumuman ini kepada rakyat dan MPRS. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Rakyat Indonesia dalam melaksanakan cita-citanya mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Jakarta, 20 Februari 1967.
Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

ttd.
SOEKARNO

3. Masa Konsolidasi Sejak Tahun 1968[44]

Memasuki tahun kedua Repelita I, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan berbagai macam undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan. Salah satu di antaranya ialah undang-undang yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah sesuai dengan ketetapan MPRS. Sementara itu, untuk melancarkan jalannya pembangunan berhasil dirintis hubungan tata kerja yang konstitusional antara lembaga-lembaga tertinggi. Dengan adanya hubungan kerja yang konstitusional ini, koordinasi berlangsung dengan baik dan lancar.

Bahan-bahan pertimbangan yang bermanfaat mengenai berbagai masalah telah diberikan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) kepada pemerintah. Sumbangan pemikiran ini telah dijadikan bahan pembanding serta koreksi-koreksi oleh pemerintah. Koreksi mengenai masalah penggunaan keuangan negara telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Bapeka). Pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap koreksi ini.

Bidang hukum sebagai jaminan objektif untuk normalisasi keadaan mendapat perhatian. Kekuasaan kehakiman serta badan-badan pengadilan mulai leluasa bergerak sebagai kekuasaan yang bebas. Masih dalam rangka usaha pemurnian dan penertiban hukum yang berlaku sesuai dengan ketetapan MPRS, telah berhasil dibentuk undang-undang yang menghapuskan semua produk Demokrasi Terpimpin yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, baik yang berbentuk penetapan presiden

[44] Pidato Presiden di depan Sidang Pleno DPR GR tanggal 16 Agustus 1969

maupun peraturan presiden. Sebagian dicabut dan sebagian lagi yang materi hukumnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 diperlukan sebagai undang-undang atau bahan guna membuat undang-undang baru atau peraturan perundang-undangan yang lain.[45]

Menghadapi pemilihan umum, persiapan-persiapan mulai dilaksanakan. Pada tanggal 23 Mei 1970, Presiden dengan Surat Keputusan No. 43 telah menetapkan organisasi-organisasi yang dapat ikut serta dalam pemilihan umum dan anggota DPR/DPRD yang diangkat. Organisasi politik yang dapat ikut dalam pemilihan umum, ialah partai politik yang pada saat pemilihan umum sudah ada dan diakui serta mempunyai wakil di DPR/DPRD. Partai-partai itu ialah: 1. *Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)*, 2. *Murba*, 3. *Nadhlatul Ulama (NU)*, 4. *Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam (PI Peril)*, 5. *Partai Katholik*, 6. *Partai Kristen Indonesia (Parkindo)*, 7. *Partai Muslimin Indonesia (Parmum)*, 8. *Partai Nasional Indonesia (PNI)*, dan 9. *Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)*.[46]

Organisasi golongan karya yang dapat ikut serta dalam pemilihan umum ialah *Sekretariat Bersama Golongan Karya* (*Sekber Golkar*).[47]

Usaha pemberantasan korupsi dilaksanakan secara menyeluruh, baik dengan langkah-langkah preventif maupun represif. Beberapa tindakan preventif yang dilakukan pemerintah antara lain mengadakan deposito berjangka dengan bunga yang realistis, melalui tabungan Asuransi Berjangka (Taska) dan Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas). Tindakan tersebut untuk menarik peredaran uang panas ke dalam bank untuk disalurkan ke kegiatan yang produktif serta memperkuat pengendalian inflasi.

Selain *Tim Pemberantasan Korupsi* (TPK) pada tahun 1968, dibentuk *Tim Penyelidikan dan Pengusutan Perkara Penyelundupan* (TP4) untuk memberantas penyelundupan. Sampai dengan akhir tahun 1969, baik TPK maupun TP4, telah berhasil mengajukan 140 perkara korupsi dan penyelundupan ke pengadilan. Usaha pemberantasan korupsi dilakukan pula dengan membentuk *Komisi Empat* yang anggotanya terdiri atas Wilopo, S.H. (Ketua), I.J. Kasimo, Prof. Ir. Johannes, dan H. Anwar Tjokroaminoto serta Mayjen Sutopo Yuwono (Sekretaris).[48] Menurut komisi ini, kemungkinan meluasnya korupsi disebabkan beberapa hal, yaitu gaji yang tidak mencukupi, penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatnya kegiatan-kegiatan ekonomi pembangunan yang membuka kemungkinan timbulnya tindak korupsi.

---

45 *Kompas*, 3 Juni 1970

46 *Kompas*, 3 Juli 1974

47 Pidato Presiden di depan Sidang Pleno DPR GR tanggal 16 Agustus 1969; *Harian Kamis*, 2 Februari 1970, hlm. 1, 11 dan *Harian Kamis*, 2 Juli 1970, hlm. 2, 3

48 Pidato Presiden di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 1970, *Kompas*, 18 Agustus 1970, hlm. 1–7

Sebagai saran kepada pemerintah, *Komisi Empat* menyarankan penyempurnaan struktur dan prosedur aparat pemerintah. Sebagian besar dari saran-saran *Komisi Empat* ini pada tahun kedua Repelita I telah dilaksanakan.[49]

Memasuki tahun 1971, suasana politik lebih banyak dicurahkan kepada kegiatan kampanye menghadapi pemilihan umum yang kedua dalam sejarah Republik Indonesia yang berarti pemilihan umum pertama pada zaman Orde Baru. Pemilihan umum kedua yang dilangsungkan pada tanggal 3 Juli 1971 menghasilkan perhitungan kursi di DPR RI dengan urutan sebagai berikut, Golkar sebagai pemenang pertama memperoleh 227 kursi, NU 58 kursi; dan PNI 20 kursi.[50]

Selain berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan aturan permainan yang telah disetujui bersama, pemerintah juga berhasil menyatubahasakan aparatur pemerintahan,[51] koordinasi antarinstansi dapat berlangsung dengan lancar.

Persoalan lain yang muncul selama fase ini adalah soal pribumi dan nonpribumi. Masalah ini sebenarnya merupakan warisan masa lampau dan pemerintah mencoba memecahkannya secara bertahap dengan menjauhkan kemungkinan timbulnya emosi dan kecenderungan rasial. Tantangan lain yang dihadapi pemerintah memasuki tahap pembangunan ini ialah masalah terbatasnya lapangan kerja. Meskipun penanaman modal asing mulai direalisasi dengan berdirinya pabrik-pabrik yang telah menyerap tenaga kerja, masalah kesempatan kerja masih merupakan masalah nasional yang dominan.[52]

Mengenai masalah kehidupan kepartaian, pada tahun 1971 pemerintah melemparkan gagasan penyederhanaan partai-partai dengan mengadakan pengelompokan partai. Pengelompokan partai ini menganut sistem dwi-partai. Partai-partai politik yang ada umumnya menyetujui pengelompokan ini, sehingga gagasan ini kemudian dilaksanakan.[53] Kelompok partai-partai politik Islam, seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti kemudian bergabung dalam kelompok Persatuan Pembangunan, sedangkan partai-partai politik: Partai Katholik, Parkindo, PNI, dan IPKI bergabung dalam kelompok Demokrasi Pembangunan. Selain kedua partai ini, terdapat pula kelompok Golongan Karya, yang semula bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar. Pengelompokan ini, secara formal dimulai dari fraksi-fraksi di

---

49 *Kompas*, 9 Agustus 1971, hlm 1, 12

50 Pidato Presiden di depan Sidang Pleno DPR GR tanggal 16 Agustus 1972

51 *Nusantara*, 8 Oktober 1971; *Merdeka*, 14 Oktober 1971

52 *Ibid.*

53 *Harian Angkatan Bersendjata*, 12 Januari 1973

lingkungan DPR dan MPR. Perombakan struktur politik ini dalam pelaksanaannya dilakukan dengan musyawarah antara pemerintah dengan partai-partai politik.[54]

Memasuki tahun 1973 usaha membina stabilisasi politik berhasil dicapai karena partai-partai politik telah mengadakan fusi.[55] Kelompok Persatuan Pembangunan sejak tanggal 5 Januari 1973 mengubah namanya menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Perubahan nama ini kemudian diikuti oleh cabang-cabang partai tersebut di daerah. Lima partai politik yang semula tergabung dalam kelompok Demokrasi Pembangunan, pada tanggal 10 Januari 1973 telah berfusi dalam satu wadah yang bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Fusi ini merupakan klimaks dari penyederhanaan yang telah dijalani oleh kedua kelompok organisasi politik ini selama tiga tahun.[56]

Organisasi masyarakat berdasarkan kekaryaan atau profesinya dikonsolidasikan dalam bentuk organisasi-organisasi gabungan, seperti: pegawai negeri (Korpri), buruh (Federasi Buruh Seluruh Indonesia), tani (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), dan pemuda (Komite Nasional Pemuda Indonesia).

C. Stabilisasi Ekonomi

1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

Pada awal Orde Baru program pemerintah (Kabinet Ampera) semata-mata diarahkan kepada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama berupa usaha memberantas inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi sekitar 650% setahun mengharuskan pemerintah memprioritaskan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.

Stabilisasi berarti pengendalian inflasi, supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat, sedangkan *rehabilitasi* meliputi rehabilitasi secara fisik prasarana, rehabilitasi ekspor, serta rehabilitasi alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Dengan melaksanakan rehabilitasi bukan berarti pemerintah membuat jalan-jalan baru, melainkan perbaikan jalan-jalan yang sudah ada dapat dan bukan pula berarti membuat pabrik baru sebelum pabrik yang ada dapat dimanfaatkan sepenuhnya.[57]

---

[54] Pidato Presiden di depan Sidang Pleno DPR pada tanggal 16 Agustus 1973

[55] *Kompas*, 12 Januari 1973, hlm. 17

[56] Pidato Presiden di depan Sidang Pleno DPR pada tanggal 16 Agustus 1973

[57] Widjojo Nitisastro, "Rencana Pembangunan Lima Tahun", *Administrasi Negara*, No. 3 Tahun X, November 1970, hlm. 4

Demikian pula rehabilitasi di bidang ekspor. Dalam tahun 1950 ekspor Indonesia di luar minyak bumi adalah sekitar 500 juta dolar sampai 1 miliar dolar. Ekspor tahun 1966 adalah kurang dari 500 juta dolar tanpa minyak bumi. Adanya kemerosotan ekspor terus-menerus memerlukan rehabilitasi mengingat bertambahnya penduduk dan kebutuhan impor.[58]

Pada waktu itu pula utang Indonesia kepada luar negeri meliputi sekitar 2,3 miliar dolar. Pemerintah wajib membayarnya kembali di dalam tahun 1967, ditambah dengan tunggakan-tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlahnya diperkirakan meliputi 500 juta dolar.[59]

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyatakan perlu diadakannya landasan-landasan baru. Berdasarkan landasan-landasan itu dapat dilakukan stabilisasi dan rehabilitasi. Ketetapan No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi strategis yang tepat untuk menanggulangi kemerosotan ekonomi yang terjadi sejak tahun 1955.[60] Ketetapan MPRS ini terdiri dari 10 bab dan 71 pasal sebagai berikut:

1. landasan dan prinsip kebijaksanaan ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
2. kebijakan ekonomi;
3. skala prioritas nasional;
4. peran pemerintah;
5. peran koperasi;
6. peran swasta nasional;
7. kebijaksanaan pembiayaan;
8. hubungan ekonomi luar negeri;
9. prasyarat;
10. penutup.

Dengan ketetapan ini MPRS menggariskan bahwa pemerintah harus mengadakan pembaruan landasan ekonomi, yaitu dari ekonomi terpimpin ke demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menurut Widjojo Nitisastro berarti produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan dan penilikan anggota masyarakat. Ekonomi disusun atas dasar kekeluargaan, tidak

---

[58] *Ibid.*, hlm. 4

[59] *Ibid.*

[60] Subroto, "Perkiraan Situasi Dewasa ini", dalam Amanat/Pidato Pra-Saran dalam Seminar AD II/1966, 1967, hlm. 99

mengenal pertentangan kelas.[61] Oleh karena itu, mempunyai konsekuensi keharusan adanya pengawasan rakyat terhadap kekayaan negara.[62] Peran pemerintah sejauh mungkin tidak menguasai segala sesuatu, tetapi memberikan pengarahan dan mendorong pembangunannya. Hal ini bukan sistem liberal, melainkan pemerintah jangan mengurus segala sesuatu dengan sistem lisensi, sistem penjatahan yang akibatnya justru penyalahgunaan dan penyelewengan. Jadi, pemerintah menggunakan apa yang disebut *indirect means* dan menjalankan *indirect control*.[63]

MPRS menyadari bahwa kemerosotan ekonomi yang berlarut-larut itu disebabkan oleh:

a. tidak adanya pengawasan yang efektif dari DPR terhadap kebijakan ekonomi;
b. kepentingan ekonomi dikalahkan oleh kepentingan politik;
c. pemikiran ekonomi yang rasional untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dikesampingkan.

Selanjutnya MPRS menggariskan tiga macam program yang harus diselesaikan oleh pemerintah secara bertahap. Program itu adalah:

a. program penyelamatan;
b. program stabilisasi dan rehabilitasi;
c. program pembangunan.

Program stabilisasi dan rehabilitasi merupakan program yang pendek dengan skala prioritasnya:

a. pengendalian inflasi;
b. pencukupan kebutuhan pangan;
c. rehabilitasi prasarana ekonomi;
d. peningkatan kegiatan ekspor;
e. pencukupan kebutuhan pangan.

Program di bidang keuangan/moneter adalah menekan inflasi dan peningkatan nilai rupiah. Di bidang produksi ditetapkan prioritas peningkatan produksi sandang pangan terutama sembilan bahan kebutuhan pokok dan produksi ekspor serta perbaikan prasarana produksi. Di bidang distribusi ditetapkan program untuk memperlancar distribusi dengan jalan

---

61 Widjojo Nitisastro, *Hakikat dan Konsekuensi Ketetapan MPRS di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, 1966, hlm. 8; Widjojo Nitisastro," Rencana Pembangunan Lima Tahun", *op. cit.*, hlm. 6

62 Widjojo Nitisastro, *Hakikat dan Konsekuensi Ketetapan MPRS di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, 1966, hlm. 2

63 Widjojo Nitisastro, "Rencana Pembangunan Lima Tahun", *op. cit.*, hlm. 6–7

menertibkan pengawasan dan penguasaan sembilan bahan kebutuhan pokok, peningkatan kemampuan angkutan darat, laut, dan udara, serta memperlancar komunikasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XIII, peran pemerintah dalam stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi lebih menekankan pengawasan arah kegiatan ekonomi dengan *debirokratisasi* dari sistem pengawasan dan *dekontrol* manajemen perusahaan-perusahaan negara. Dengan demikian, unit-unit produksi memperoleh kebebasan bekerja yang lebih besar, sedangkan pemerintah tetap memberikan bimbingan dan pengarahan kepada perkembangan ekonomi secara tidak langsung, antara lain dalam kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan impor. Dengan adanya *dekontrol* ini, campur tangan secara langsung dalam manajemen perusahaan-perusahaan dihindarkan sehingga pimpinan perusahaan dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip yang rasional.[64]

Selanjutnya, pemerintah menetapkan bahwa penentuan harga barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara diserahkan sepenuhnya pertanggungjawabannya kepada pimpinan perusahaan-perusahaan negara yang bersangkutan dengan beberapa pengecualian, di antaranya minyak bumi dan listrik. Dalam menentukan harga-harga tersebut perusahaan diwajibkan memegang teguh harga-harga tersebut dan perusahaan diwajibkan memegang teguh pedoman-pedoman yang digariskan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan di atas bertujuan untuk memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan penting. *Pertama,* adalah Peraturan 3 Oktober 1966, yang memuat pokok-pokok usaha, antara lain tentang:

1. anggaran belanja yang berimbang (*balanced budget*) untuk meniadakan salah satu sebab bagi inflasi, yaitu defisit dalam anggaran belanja;
2. pengekangan ekspansi kredit untuk usaha-usaha produktif, khususnya di bidang pangan, ekspor, prasarana, dan industri;
3. penundaan pembayaran utang-utang luar negeri (*rescheduling*) dan usaha untuk mendapatkan kredit baru;
4. penanaman modal asing guna membuka kesempatan pada luar negeri untuk turut serta membuka alam Indonesia, membuka kesempatan kerja, serta membantu usaha peningkatan pendapatan nasional.

Disusul dengan Peraturan 10 Februari 1967 yang menyangkut penyesuaian harga dan tarif. Maksudnya adalah untuk menghilangkan berbagai kepincangan dalam perbandingan harga dan memberi

---

[64] Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka,* Jakarta, 1977, hlm. 615

kemungkinan bagi perusahaan-perusahaan untuk memenuhi keperluannya dengan sumber pembiayaannya sendiri. Selain itu, dikeluarkan Peraturan 28 Juli 1967 yang memberikan perangsang kepada pengusaha-pengusaha. Dalam hal ini pemerintah menyerahkan sebagian dari penerimaan pajak ekspor, pajak penjualan. Dengan cara ini diharapkan adanya penerimaan yang lebih besar dan realistis bagi para pengusaha sehingga dapat lebih merangsang kegiatan ekonomi.

Demikian pula untuk menanggulangi kemerosotan ekonomi, pada tanggal 10 Januari 1967 pemerintah mengesahkan dan menetapkan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang menyangkut tentang Penanaman Modal Asing. Guna memberikan pelayanan di bidang ini, pada tanggal 9 Januari 1967 dibentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing, yang dipimpin oleh Ketua Presidium Kabinet Jenderal Soeharto beserta beberapa menteri sebagai anggota. Akan tetapi, badan ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1968 dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Panitia Teknis Penanaman Modal. Tugasnya adalah mengadakan penelitian dan penilaian terhadap syarat-syarat permintaan izin yang berhubungan dengan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dan memberikan pertimbangan dan saran kepada pemerintah serta melakukan langkah-langkah teknis. Modal swasta nasional diperlukan untuk membangun ekonomi sehingga pemerintah pada tanggal 13 Juli 1968 mengesahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Guna membulatkan usaha stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta mempersiapkan landasan pembangunan, pemerintah mengesahkan Rencana Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN 1968) menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 1967. Undang-Undang APBN ini disahkan sebelum tahun anggaran dimulai. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan lainnya pada tahun-tahun yang lalu digunakan sistem *deficit spending* dalam penerimaan dan pengeluaran negara, sedangkan dalam APBN 1967 digunakan prinsip anggaran berimbang atau *balanced budget.* Prinsip ini berarti bahwa besarnya belanja negara berimbang dengan besarnya pendapatan negara.

Dengan APBN tersebut pemerintah mengambil kebijakan agar hasil penerimaan pemerintah digunakan untuk belanja rutin pemerintah, sedangkan bantuan luar negeri digunakan untuk belanja pembangunan.

2. Hasil-Hasil yang Telah Dicapai Sebelum Repelita

Langkah-langkah kebijakan yang dimulai sejak bulan Oktober dan selama tahun 1967 sampai pertengahan 1968 merupakan kebijakan

stabilisasi yang bersifat operasional penyelamatan. Tujuannya adalah menertibkan keuangan negara.[65] Tindakan yang diutamakan adalah mengambil uang yang menjadi hak negara dan menertibkan prosedur keuangan. Perhatian pemerintah dipusatkan pada *deferred payment* khusus dan kredit-kredit yang sebelumnya diperoleh dari Dana Revolusi, Cadangan Nasional, Pampasan Perang Jepang, PN-PN, dan PT-PT. Hasil-hasil positif yang telah dicapai adalah:

a. berhasil dikembalikannya uang negara sebesar:
   US $9.571.586,33.-,
   Yen 145.381.442,-,
   Rp494.947.761,37,-;
b. emas seberat 1.005.403 kg;
c. perak seberat 100 kg.[66]

Tindakan lain pemerintah meliputi:

1) Mengadakan operasi pajak, terutama di kota-kota besar untuk meneliti sampai seberapa jauh perusahaan-perusahaan besar milik negara dan swasta memenuhi kewajiban membayar pajak. Telah diciptakan cara-cara baru pemungutan pajak yang terkenal dengan nama MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung Pajak Orang) untuk pajak pendapatan, perseroan, dan kekayaan. Hasilnya, pendapatan dan penerimaan negara meningkat. Penerimaan pajak secara tidak langsung meningkat dari 26% pada tahun 1967 menjadi 36% pada tahun 1968. Penerimaan pajak rutin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah uang yang masuk pada tahun 1966 sebesar Rp3.818 juta, pada tahun 1967 bertambah menjadi Rp38.880 juta dan tahun berikutnya pada tahun 1969 menjadi Rp57.410 juta.[67]
2) Penghematan di bidang pengeluaran pemerintah, khususnya pengeluaran yang konsumtif dan rutin. Subsidi untuk perusahaan-perusahaan dihapuskan.
3) Kredit bank dibatasi, kredit impor dihapuskan.Kredit ekspor diberikan apabila bank yakin akan terlaksananya ekspor. Kebijakan kredit ketat dari pemerintah ini merupakan kredit yang selektif dan terarah.

---

[65] Soemitro Djojohadikusumo, *Kebijaksanaan di Bidang Ekonomi Perdagangan*, 1972, hlm. 14–15

[66] Departemen Penerangan RI, Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Djenderal Soeharto di Depan Sidang DPR GR 16 Agustus 1968, 1968, hlm. 42

[67] Lihat selanjutnya Nugroho, *Indonesia Sekitar Tahun 2000*, 1972, hlm. 99

Serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini merupakan usaha untuk menekan inflasi dan mengurangi volume uang serta mengarahkankannya kepada bidang yang produktif.[68]

Sebagai negara yang struktur ekonominya berbasis ekonomi pertanian, hasil pertanian sangat berpengaruh atas perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam usahanya mencukupi kebutuhan pangan, pemerintah memberikan perhatian sepenuhnya kepada peningkatan produksi pangan di dalam negeri, khususnya beras. Untuk meningkatkan produksi beras diselenggarakan bimbingan massal (Bimas) dan intensifikasi massal (Inmas) yang meliputi perbaikan prasarana irigasi penggunaan bibit unggul PB-5 dan PB-8, penyediaan pupuk dan obat-obatan, serta penyuluhan penanaman padi secara teknis. Produksi padi pada tahun 1967 menunjukkan kenaikan sebesar 3% dan pada tahun 1968 naik menjadi 5%, aslinya dari 9,3 juta ton menjadi 10,16 juta ton pada tahun 1968. Produksi barang-barang lainnya yang meningkat jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1967 adalah sebagai berikut:

Jenis Barang	Tahun 1967	Tahun 1968
tekstil	225 juta meter	325 juta meter
karet	585.000 ton	593.275 ton
minyak kelapa sawit	115.031 ton	120.750 ton
biji kelapa sawit	22.225 ton	22.250 ton
minyak bumi	183.149.334 barel	202.154.300 barel
nikel	170.601.75 ton	250.026 ton[69]

Produksi sandang dalam negeri pada tahun 1968 meningkat karena adanya perubahan kebijakan dalam penggunaan bea masuk untuk berbagai macam tekstil dalam rangka memberikan proteksi produksi dalam negeri. Demikian pula karena meningkatnya impor bahan baku seperti benang tenun dan kapas menyebabkan pabrik-pabrik pemintalan dan pertenunan yang tampak masih lesu pada tahun 1967 dapat kembali menuntaskan roda produksinya pada tahun 1968.

Namun, laju inflasi yang berhasil ditekan dari 650% pada tahun 1966 menjadi 120% pada tahun 1967 masih menunjukkan angka yang tinggi dan merupakan faktor penyebab terjadinya kenaikan harga-harga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa menjelang akhir tahun 1967 terjadi gangguan terhadap stabilisasi ekonomi yang disebabkan kurang berhasilnya

---

[68] Emil Salim, *Masalah Stabilisasi Ekonomi,* Djakarta, 1971, hlm. 19–21; Soedradjat Djiwandono, *Masalah-masalah Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, 1970, hlm. 12–13

[69] Departemen Penerangan RI, "Laporan Presiden Republik Indonesia pada Akhir Tahun 1968 kepada Seluruh Rakyat Indonesia", 1968, hlm. 15

panen gadu. Sebab-sebab lainnya adalah devaluasi poundsterling pada bulan November 1966, melonjaknya harga pada hari-hari raya Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan timbulnya kegelisahan di kalangan masyarakat terhadap penurunan kembali nilai uang rupiah dengan dikeluarkannya mata uang seri Soedirman untuk menggantikan mata uang seri Soekarno.[70]

Untuk mengatasi keadaan tersebut, pemerintah menetapkan serangkaian kebijakan dan mengambil langkah-langkah pelaksanaannya. Kebijakan jangka pendek diambil untuk mengatasi masalah kekurangan beras, dengan memperbesar impor beras dan bahan-bahan pengganti beras, memperbesar suplai pasar dan memperlancar distribusi dan arus beras antardaerah. Kebijakan dan langkah-langkah jangka panjang diarahkan untuk meningkatkan produksi beras dan pengarahan impor serta perencanaan-perencanaan di bidang ekonomi dan keuangan.[71]

Karena utang-utang peninggalan masa Demokrasi Terpimpin yang berjumlah antara US $ 2,2,–2,7 miliar, *rescheduling* dilakukan oleh Kabinet Ampera dan Kabinet Pembangunan yang menggantikannya. Situasi ekonomi dan keuangan yang parah menyebabkan pemerintah berusaha meminta kepada negara-negara kreditor agar dapat menunda pembayaran kembali utang-utang itu. Pada tanggal 19–20 September 1966 diadakan perundingan di Tokyo atas prakarsa Jepang. Pada kesempatan itu pihak pemerintah Indonesia mengemukakan bahwa devisa ekspor sebagai pembayar utang tetapi perlu dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku, *spareparts*, dan sebagainya, sehingga keadaan ekonomi menjadi lebih baik. Negara-negara kreditor, seperti Jepang, Prancis, Inggris, Italia, Jerman Barat, Belanda, dan Amerika Serikat menanggapi kesulitan yang dikemukakan pemerintah Indonesia. Berdasarkan pembicaraan antara mereka sampai pada kesimpulan bahwa suatu perundingan perlu diadakan lagi. Perundingan di Tokyo kemudian dilanjutkan di Paris.[72] Dalam perundingan ini dicapai persetujuan mengenai:

a. utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar dalam tahun 1968 ditunda pembayarannya hingga tahun 1972–1978;
b. utang-utang yang seharusnya dibayar dalam tahun 1969 dan 1970 dipertimbangkan untuk juga ditunda pembayarannya dengan syarat-syarat yang sama lunaknya dengan utang-utang yang seharusnya dibayar dalam tahun 1968.[73]

---

70 Sekretariat Negara RI, *op. cit.*, hlm. 668

71 Sekretariat Negara RI, *op. cit.*, hlm. 668

72 Widjojo Nitisastro, "Rentjana Pembangunan Lima Tahun", hlm. 9

73 Sekretariat Negara RI, *op. cit.*, hlm. 613

Perundingan di kedua tempat itu hanya dihadiri oleh kelompok negara-negara Barat dan Jepang. Negara-negara kreditor dari Blok Sosialis tidak menghadiri pertemuan-pertemuan itu, meskipun diundang, sehingga tidak termasuk apa yang kemudian dikenal sebagai *Tokyo Club* atau *Paris Club.*

Perundingan di antara beberapa negara maju dilanjutkan di Amsterdam pada tanggal 23–24 Februari 1967 untuk membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri, serta kemungkinan-kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat-syarat lunak. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama dari apa yang kemudian dikenal dengan nama *Inter-Governmental Group for Indonesia* (IGGI).[74]

Melalui pertemuan-pertemuan itu pemerintah telah berhasil mengusahakan bantuan luar negeri, di samping mengadakan penangguhan dan peringanan syarat-syarat pembayaran kembali (*rescheduling*) utang-utang peninggalan Orde Lama. Bantuan kredit yang didapat adalah untuk tahun 1967 sebesar $210 juta, untuk tahun 1968 sebesar $325 juta, dan untuk tahun 1969 $500 juta. Selain itu, pemerintah juga menjadi anggota badan-badan ekonomi internasional, seperti *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) atau *World Bank, International Monetery Fund* (IMF), *International Development Agency* (IDA), dan *Asian Development Bank* (ADB). Dari lembaga-lembaga internasional ini Indonesia mendapat bantuan kredit, tenaga ahli, dan rekomendasi untuk menghadapi negara kreditor.[75]

Bantuan luar negeri hanya diterima pemerintah jika tidak mengikat dan tidak melampaui batas kemampuan untuk membayar kembali. Pemerintah mencari bantuan luar negeri dengan syarat-syarat selunak mungkin, yaitu dengan *grace period* yang panjang dan bunga yang rendah. Pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah dalam tahun 1967, 1968, dan 1969 dikenakan persyaratan yang jauh lebih ringan jika dibandingkan pinjaman-pinjaman sebelumnya. Dari Amerika Serikat pemerintah mendapat persyaratan yang lebih ringan, yaitu jangka waktu pengembaliannya 40 tahun dengan *grace period* 10 tahun dan bunga 2½%. Artinya selama 10 tahun pertama pemerintah tidak usah membayar utang dan baru pada tahun ke-11 pemerintah mulai membayarnya. Persyaratan yang didapat dari Jerman Barat meliputi jangka waktu 30 tahun, *grace period* 8 tahun, dengan bunga 2½%. Kemudian persyaratan dari badan-badan internasional seperti Bank Dunia atau IDA meliputi jangka waktu 50 tahun, *grace period* 10 tahun, dan tanpa bunga. Negara peminjam yang

---

[74] Sekretariat Negara RI, *op. cit.*, hlm. 612

[75] Soedradjat Djiwandono, *op. cit.*, 1970, hlm. 15–18

memberikan syarat agak lebih berat dari negara-negara tersebut di atas adalah Jepang, yaitu meliputi jangka waktu 20 tahun, *grace period* 7 tahun, dengan bunga 2½ – 3%. Lain halnya dengan Australia yang memberi *grant.* Sedangkan negeri Belanda memberikan 2/3 *grant* dan 1/3 pinjaman.

Pinjaman-pinjaman itu digunakan oleh pemerintah indonesia untuk tiga macam kegiatan yang dinamakan Bukti Ekspor (BE), yaitu:

a. untuk impor,
b. untuk proyek-proyek pembangunan, dan
c. untuk pangan.

BE yang digunakan untuk impor barang-barang ekonomi, seperti *spareparts,* pupuk, dan obat hama, sedangkan BE untuk impor pangan memungkinkan devisa pemerintah dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih produktif. BE yang diwujudkan dalam bentuk barang-barang konsumtif itu dijual oleh pemerintah dan hasilnya dimasukkan dalam anggaran belanja pemerintah dan kemudian dipakai untuk anggaran pembangunan. Jadi, anggaran pembangunan berupa rupiah itu asalnya dari penjualan barang-barang konsumsi. Dengan demikian, bantuan luar negeri bukan hanya untuk mengimpor barang-barang yang perlu, melainkan hasil penjualannya juga dipakai untuk pembangunan.[76]

D. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

1. Pola Dasar Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang

Pembangunan adalah proses perubahan yang terus-menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam pembangunan nasional Indonesia, tujuan yang ingin dicapai adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan *Pancasila.* Pelaksanaan pembangunan itu bertumpu kepada Trilogi Pembangunan, yaitu:

a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia, yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur, tidak mungkin diwujudkan dalam waktu

---

[76] Widjojo Nitisastro, *op. cit.,* 1970, hlm. 12

yang singkat, sebaliknya, harus dilakukan dalam jangka waktu panjang dan melalui beberapa tahapan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pola dasar dan pola umum jangka panjang sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan itu. Kedua pola itu, yakni Pola Dasar Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, yang dicantumkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya digariskan pula asas-asas pembangunan, modal dasar, dan faktor-faktor dominan yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan itu. Secara keseluruhan, pola dasar itu merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan dari masa ke masa.

Asas-asas pembangunan memberi corak dan watak kepada pembangunan yang akan dilaksanakan, yang meliputi tujuh asas, sebagai berikut.

a. *Asas manfaat,* yang berarti bahwa pembangunan yang dilakukan itu harus memberi manfaat untuk rakyat banyak.
b. *Asas usaha bersama dan kekeluargaan,* yang berarti bahwa pembangunan dilakukan secara gotong royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
c. *Asas demokrasi,* yang dimaksudkan dengan demokrasi di sini ialah Demokrasi Pancasila dan dengan demikian, jika timbul masalah-masalah nasional, jalan yang ditempuh untuk menyelesaikannya ialah musyawarah untuk mufakat.
d. *Asas adil dan merata,* yakni setiap hasil pembangunan baik material maupun spiritual harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.
e. *Asas perikehidupan dalam keseimbangan,* yang menekankan perlu adanya keseimbangan antara kepentingan rohani dan jasmani, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dan keseimbangan antara kepentingan nasional dan internasional.
f. *Asas kesadaran hukum,* yang mewajibkan setiap warga negara sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
g. *Asas kepercayaan kepada diri sendiri,* artinya pembangunan itu dilakukan berdasarkan kemampuan dan kekuatan sendiri dan bersendikan kepribadian bangsa.

Modal dasar yang disebutkan dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional adalah:

a. kemerdekaan dan kedaulatan bangsa;
b. kedudukan geografi;
c. sumber-sumber kekayaan alam;
d. jumlah penduduk;
e. modal rohaniah dan mental;
f. modal budaya;
g. potensi efektif bangsa;
h. Angkatan Bersenjata.

Dalam menggerakkan modal dasar untuk mencapai tujuan pembangunan, perlu pula diperhatikan faktor-faktor dominan sebagai berikut:

a. faktor demografi dan sosial budaya;
b. faktor geografi, hidrografi, geologi, dan topografi;
c. faktor klimatologi;
d. faktor flora dan fauna;
e. faktor kemungkinan pengembangan.

Usaha-usaha pembangunan yang meliputi banyak bidang dan dilakukan di sebuah negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa, budaya, dan agama, dengan ciri-ciri tersendiri, memerlukan suatu wawasan yang dapat mengikat dan menyatukan semua suku bangsa, budaya, dan agama dalam suatu kesatuan yang harmonis. Wawasan yang dipakai ialah Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Wawasan ini memperkuat rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam persatuan. Dalam Wawasan Nusantara terkandung pengertian bahwa kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan dalam bidang politik sosial-budaya, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan-keamanan.

Syarat lain yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan ialah adanya ketahanan nasional, yakni kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Antara ketahanan nasional dengan pembangunan nasional terdapat kaitan yang erat. Ketahanan yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional, sebaliknya pembangunan nasional yang berhasil akan semakin meningkatkan ketahanan nasional.

Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, yang merupakan arah dan strategi pembangunan jangka panjang yang meliputi waktu 25–30 tahun. Di dalam Pola Umum itu ditentukan kebijakan pembangunan dan sasaran-sasaran pembangunan yang hendak dicapai. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara bertahap dan sambung-menyambung. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Sesuai dengan jangka waktu tersebut, setiap tahap disebut *Rencana Pembangunan Lima Tahun.* Kebijakan pembangunan dalam setiap Repelita didasarkan atas Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang. Tujuan pembangunan dalam setiap Repelita adalah sama, yakni pada bidang pertanian. Upaya meningkatkan penghasilan produsen pertanian perlu dilakukan sehingga mereka akan terangsang untuk membeli barang-barang keperluan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri. Perkembangan sektor industri akan menyebabkan pula penghematan devisa di samping dapat menampung tenaga kerja yang cukup banyak.

Pembangunan sektor pertanian, pertambangan, dan industri tidak mungkin dicapai jika prasarana tidak diperbaiki. Oleh karena itu, dalam Repelita I dicantumkan pula perbaikan prasarana yang meliputi usaha-usaha rehabilitasi dan perluasan.

Pembangunan dalam Repelita I diarahkan kepada tiga bidang yang strategis, yakni pertanian, industri, dan pertambangan, serta prasarana. Pertumbuhan salah satu bidang berkaitan dan memengaruhi bidang lainnya. Dari pertumbuhan bidang-bidang tersebut muncul kebutuhan akan tenaga kerja dan tenaga ahli. Hal ini berarti terbukanya kesempatan kerja dan lapangan kerja yang cukup banyak. Adanya kesempatan kerja, lebih-lebih di daerah yang tidak padat penduduknya di luar Pulau Jawa, akan menjadi daya tarik bagi tenaga kerja baru dari Pulau Jawa yang berpenduduk padat. Dengan demikian, pelaksanaan transmigrasi akan berjalan dengan lebih lancar.[77]

Ekonomi suatu negara dapat disebut sehat jika memberikan pendapatan per kapita yang cukup bagi penduduknya. Jika penduduk terlalu banyak sedangkan sumber ekonomi kurang, akibatnya pendapatan memperlihatkan grafik yang meningkat, sedangkan sumber ekonomi terbatas. Hal itu dapat mengganggu stabilitas ekonomi yang selanjutnya dapat pula mengganggu stabilitas keamanan. Untuk mengurangi kecepatan pertambahan penduduk itu, dalam Repelita I dilaksanakan program keluarga berencana.

Masalah lain yang digarap dalam Repelita I ialah masalah pendidikan. Pada masa-masa sebelumnya, sistem dan program pendidikan tidak

---

[77] Bintoro Tjokroamidjojo, M.A., *Perencanaan Pembangunan,* hlm. 50

disesuaikan dengan rencana pembangunan sehingga timbul akibat-akibat yang negatif, misalnya:

a. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat, dan
b. meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

2. Repelita I dan Pelaksanaannya

Repelita I mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 1969 setelah berhasilnya usaha-usaha stabilisasi di bidang politik dan ekonomi yang dilancarkan sejak Oktober 1966. Tujuan Repelita I ialah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya, sedangkan sasaran yang hendak dicapai ialah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.[78] Titik berat diletakkan pada pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan mendobrak keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaruan bidang pertanian karena sebagian besar penduduk masih hidup dari hasil pertanian.

Masyarakat Indonesia sedang berada dalam masa peralihan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Masyarakat yang demikian disebut masyarakat sedang berkembang. Salah satu ciri masyarakat sedang berkembang ialah struktur ekonominya berat ke agraris. Hal itu menyebabkan terjadinya kelemahan-kelemahan konjungtural. Sumbangan sektor agraria terhadap produksi nasional lebih besar daripada sumbangan sektor-sektor industri.[79] Dalam Repelita I diusahakan untuk memperkecil perbedaan antara sumbangan sektor agraria dengan sektor industri.

Pertanian tidak hanya terbatas pada pangan, tetapi meliputi pula perkebunan. Untuk meningkatkan produksi dan mutu sektor pertanian diperlukan bahan-bahan baku yang dihasilkan oleh sektor industri. Dengan demikian, sektor industri akan turut pula berkembang. Akibat lain dari perkembangan sektor adalah terjadinya pengangguran para sarjana. Dalam Repelita I titik berat pendidikan diarahkan kepada menciptakan sebanyak mungkin tenaga kejuruan dan tenaga teknik yang dapat membantu usaha-usaha di bidang pembangunan. Dalam rangka pembinaan nilai dan martabat manusia Indonesia yang mempunyai landasan falsafah Pancasila, pembangunan bidang agama pun mendapat perhatian khusus dalam

---

[78] Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penatar Pegawai Republik Indonesia, *Himpunan Bahan Penataran*, buku III, *Garis-garis Besar Haluan Negara*, t.th, hlm. 5–19

[79] Departemen Penerangan RI, *Rencana Pembangunan Lima Tahun I 1969/1970–1973/1974*, hlm. 15

Repelita I. Pembangunan itu meliputi penyediaan buku-buku pelajaran dan kitab-kitab suci bagi tiap-tiap agama. Selain itu, diadakan pula rehabilitasi dan pembangunan tempat-tempat ibadah.

Berbagai rencana pembangunan itu dituangkan dalam proyek-proyek pembangunan. Karena kekayaan dan sumber-sumber alam terletak di daerah-daerah, proyek-proyek itu disebar di daerah-daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi ekonomi daerah yang bersangkutan. Dengan cara demikian, pembangunan dapat berlangsung dan mencakup sebagian besar daerah di Indonesia.

Untuk membiayai pembangunan digali sumber-sumber keuangan dan tabungan pemerintah, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang dari perbankan, penanaman modal, dan re-investasi oleh perusahaan swasta nasional, perusahaan asing dan perusahaan negara, serta bantuan luar negeri berupa bantuan proyek dan bantuan program.[80] Bantuan proyek selama Repelita I berjumlah Rp288,2 miliar, digunakan untuk pembangunan sektor-sektor listrik, perhubungan dan pariwisata, industri dan pertambangan, pertanian, pendidikan, dan keluarga berencana. Bantuan program adalah bantuan berupa beras, tepung terigu, gandum, dan bulgur. Bantuan tersebut telah berhasil membantu stabilisasi harga bahan pangan pokok. Selain itu, ada pula bantuan program nonpangan, seperti kapas, benang tenun, dan pupuk.

Sumber-sumber keuangan untuk membiayai investasi di dalam Repelita I diperkirakan akan berjumlah Rp1.420 miliar. Dari jumlah ini pembiayaan melalui Anggaran Pembangunan Negara adalah sebesar Rp1.059 miliar, sedangkan pembiayaan di luar anggaran tersebut berjumlah Rp361 miliar.[81]

Landasan utama yang dipakai ialah melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan sendiri yang berarti sumber-sumber keuangan dalam negeri harus dimobilisasi sebanyak mungkin, sedangkan sumber-sumber luar negeri hanya dibutuhkan untuk mengisi kekurangan yang masih diperlukan.

Repelita I berakhir tanggal 31 Maret 1974. Secara keseluruhan Repelita I itu berhasil dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai, walaupun dalam beberapa hal terdapat gangguan-gangguan. Pada akhir tahun 1972 dan awal 1973 terjadi kenaikan harga beras, sedangkan ekonomi dunia memperlihatkan pula keadaan yang tidak stabil yang disebabkan oleh keguncangan di dalam sistem pembayaran internasional, kelangkaan dalam persediaan pangan, krisis energi dan bahan baku, serta inflasi yang melanda banyak negara.

---

[80] Departemen Penerangan RI, *op. cit.*, hlm. 25

[81] Departemen Penerangan RI, *op. cit.*, hlm. 35

Di bidang pertanian terjadi peningkatan pada sebagian besar hasil pertanian. Beras mengalami kenaikan rata-rata 4% setahun. Kenaikan yang terbesar tercatat pada produksi kayu, khususnya kayu rimba, rata-rata 37,4% setahun. Hasil-hasil pertanian lainnya yang juga mengalami peningkatan ialah cengkih, kelapa sawit, gula-tebu, kedelai, karet, kacang tanah, lada, jagung, telur, ikan darat, daging, dan susu. Akan tetapi, terdapat pula perkembangan yang kurang menggembirakan di bidang produksi umbi-umbian, kelapa, kopi, teh, dan kapas.

Produksi beras naik karena adanya perluasan areal persawahan dan kenaikan hasil per hektare. Areal persawahan meningkat disebabkan oleh bertambah baiknya sarana pengairan, sedangkan kenaikan hasil per hektare disebabkan oleh terlaksananya program intensifikasi melalui bimas dan inmas, serta pemakaian bibit unggul, pupuk, dan obat pembasmi hama. Sesuai dengan perkembangan itu, sejak tahun 1970 dibentuk unit-unit desa oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk melayani petani akan kebutuhan kredit. Selain itu, dibentuk pula Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) yang semuanya bertujuan untuk melayani para petani.

Selama Repelita I telah dilakukan rehabilitasi perkebunan dan pabrik-pabrik pengolahan yang telah ada. Usaha rehabilitasi kebun-kebun untuk pembibitan dan penanaman percontohan dilakukan terhadap perkebunan rakyat. Di samping itu, dibuat pula proyek Pembangunan Perkebunan Rakyat di Sumatra Utara (untuk karet dan kelapa sawit) dan Proyek Pembangunan Teh Rakyat dan Swasta di Jawa Barat, sedangkan untuk daerah Jambi dibentuk proyek yang disebut "perkebunan inti".

Perkembangan perikanan memperlihatkan hal-hal yang menggembirakan. Ekspor ikan, terutama udang, naik rata-rata 62% per tahun. Intensifikasi pengusahaan hutan-hutan di luar Jawa telah menyebabkan naiknya volume ekspor kayu sehingga devisa yang diperoleh dari ekspor ini menduduki tempat kedua sesudah minyak.

Iklim ekonomi yang semakin membaik menjadi perangsang bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Sektor industri merupakan sektor yang paling menarik bagi penanaman modal dalam negeri disusul oleh sektor kehutanan, pariwisata, perhubungan, dan perkebunan. Sebagian besar proyek-proyek penanaman modal dalam negeri merupakan proyek-proyek yang sifatnya cepat menghasilkan dan tersebar terutama di Jawa, khususnya di Jakarta. Sektor perminyakan, pertambangan, industri, dan kehutanan merupakan sektor-sektor yang menarik bagi penanaman modal asing. Proyek-proyek ini terutama terletak di Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Irian Barat.

Peningkatan produksi industri terlihat antara lain pada pabrik pupuk Pusri di Palembang dan mulai bekerjanya Petrokimia Gresik dan pembangunan pabrik pupuk di Jatibarang, Jawa Barat. Produksi semen mengalami kenaikan sebesar 51%. Industri tekstil mengalami kemajuan pesat baik dalam produksi benang tenun maupun bahan tekstil. Benang tenun meningkat dari 177.000 bal pada awal Repelita I menjadi 316.247 bal pada akhir Repelita I, sedangkan bahan tekstil meningkat dari 449,8 juta menjadi 920 juta meter.

Di bidang perminyakan ditemukan sumber-sumber minyak baru di daratan dan di lepas pantai, antara lain di Kalimantan Timur dan di pantai utara Jawa Barat. Selama Repelita I berhasil pula dibangun pengilangan minyak di Dumai dan Sungai Pakning di Provinsi Riau, sedangkan pembangunan kilang minyak di Cilacap masih dalam taraf penyelesaian.

Dalam periode Repelita I telah selesai direhabilitasi jalan negara sepanjang 6.555 km dan jembatan sepanjang 20.331 meter, di samping peningkatan mutu jalan negara sepanjang 3.385 km dan jembatan sepanjang 15.503 meter. Selain itu, dibangun pula jalan baru sepanjang 367 km dan jembatan sebanyak 707 buah.

Dalam pembangunan pusat-pusat tenaga listrik, telah selesai dibangun antara lain Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Karangkates, Riam Kanan, dan Selorejo. Selain itu, dibangun pula Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Priok (Jakarta) dan Makassar. Untuk menyebarkan prasarana listrik telah pula dibangun pusat tenaga diesel di berbagai tempat, seperti di Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Irian Jaya (Papua), dan beberapa kota di Jawa.

Di bidang pendidikan, lebih dari 10.000 orang guru telah ditatar. Selain itu, dilakukan pula usaha untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam jumlah murid baik antara berbagai tingkatan pendidikan maupun antara berbagai jenis pendidikan. Selama Repelita I telah dibagikan lebih dari 63,5 juta buku untuk murid-murid dan guru-guru. Pada akhir tahun Repelita I berdasarkan Inpres No. 10 telah dibagikan pula 3,6 juta buku untuk kelas I sekolah dasar. Selain itu, telah dibangun pula 6.000 gedung sekolah dasar sedangkan sejumlah 57.740 orang guru telah diangkat, terutama guru sekolah dasar.

Di bidang pendidikan teknik, dibangun 5 proyek pusat latihan teknik, yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Selain itu, telah dilakukan rehabilitasi terhadap sekolah-sekolah kejuruan yang ada dan penataran terhadap tenaga-tenaga pengajar.

Pembangunan kesehatan terutama ditujukan untuk memberantas penyakit menular dan untuk meningkatkan kesehatan yang menunjang program keluarga berencana. Untuk itu, dilakukan pembangunan dan

rehabilitasi sarana kesehatan, yaitu Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan rumah sakit baik di provinsi maupun di kabupaten. Jumlah BKIA dalam tahun 1973 meningkat menjadi 6.801 buah. Jumlah puskesmas meningkat dari 1.227 buah dalam tahun 1969 menjadi 2.343 buah dalam tahun 1973.

Dalam rangka penyediaan sarana kehidupan beragama telah diselesaikan penyediaan 533.100 buah kitab suci untuk umat Islam, 55.331 buah umat Kristen/Protestan, 16.887 buah untuk umat Katolik, dan 32.812 buah untuk umat Hindu/Buddha. Selain itu, telah dibangun pula tempat-tempat peribadatan dan sekolah-sekolah agama.

3. Repelita II dan Pelaksanaannya

Repelita II dimulai pada tanggal 1 April 1974. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam Repelita I merupakan titik tolak bagi pelaksanaan Repelita II.

Berdasarkan hasil-hasil itu, sasaran-sasaran utama Repelita II adalah:

a. tersedianya pangan dan sandang yang serba cukup dengan mutu yang bertambah baik lagi pula terbeli oleh masyarakat umumnya;
b. tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan, terutama untuk kepentingan rakyat banyak;
c. keadaan prasarana yang makin meluas dan sempurna;
d. keadaan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih merata;
e. meluasnya kesempatan kerja.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, produksi sektor pertanian harus meningkat sekitar 4,6% setahun, sektor industri sekitar 13%, pertambangan 10,1%, perhubungan 10%, bangunan sekitar 9,2%, dan sektor-sektor lain sekitar 7,7%.[82] Dengan peningkatan sektor-sektor tersebut diperkirakan pendapatan nasional akan meningkat sekitar 7,5%. Dengan pertambahan penduduk sekitar 2,3% atau kenaikan sebesar 28% pada akhir Repelita II dibandingkan dengan keadaan pada akhir Repelita I.

Dengan laju pertumbuhan seperti tersebut di atas, akan tercapai permulaan perubahan struktur ekonomi Indonesia yang akan menjadi landasan yang lebih kuat bagi pelaksanaan pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya. Sumbangan sektor industri, pertambangan, dan perhubungan terhadap produksi nasional tidak akan terlalu besar bedanya dengan sumbangan sektor pertanian.

Pertumbuhan tersebut lebih jauh akan membuka lapangan kerja yang lebih luas. Perluasan lapangan kerja ini merupakan hal yang mendesak

[82] Departemen Penerangan RI, *Rencana Pembangunan Lima Tahun II 1974/1975–1978/1979*

mengingat pertambahan penduduk pada masa yang lalu dan di masa yang akan datang. Untuk itu, antara lain dibentuk proyek-proyek inpres (instruksi presiden) program transmigrasi dan program padat karya. Dalam Repelita II program transmigrasi diharapkan akan dapat memindahkan 250.000 kepala keluarga terutama dari daerah-daerah di Jawa, Bali, dan Lombok ke Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian tenggara, serta Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Program baru yang akan dijalankan dalam Repelita II ialah Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I. Melalui pembangunan tersebut disalurkan dana pembangunan bagi daerah tingkat I. Pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat hanya memberikan pengarahan secara umum.

Dalam melaksanakan Repelita II pemerintah menghadapi berbagai tantangan. Merosotnya kegiatan ekonomi di negara-negara industri menyebabkan berkurangnya ekspor berbagai hasil produksi Indonesia. Sementara itu, inflasi yang terjadi di negara-negara industri menyebabkan naiknya harga barang-barang modal yang diperlukan untuk pembangunan. Tantangan lain disebabkan oleh krisis Pertamina. Walaupun harga minyak di pasar dunia naik, hal itu tidak membawa manfaat sebagaimana diharapkan sebab terpaksa dipakai untuk menutupi utang-utang Pertamina. Musim kemarau yang panjang selama beberapa tahun dan hama wereng menyebabkan merosotnya hasil padi.

Sekalipun hambatan-hambatan seperti yang disebutkan di atas, secara keseluruhan Repelita II berhasil dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% setahun. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru (1966) laju inflasi mencapai 650%. Pada masa akhir Repelita I laju inflasi adalah 47%, sedangkan dalam tahun keempat Repelita II turun menjadi 9,5%. Pada sektor pertanian terdapat kenaikan yang mencolok, antara lain pada kelapa sawit dan teh. Langkah-langkah lain yang berhasil dilaksanakan di bidang pertanian ialah perbaikan dan penyempurnaan irigasi kira-kira 500 ribu ha, pembangunan jaringan irigasi baru lebih kurang 500 ribu ha, dan pengaturan serta pengembangan sungai dan rawa lebih kurang 600 ribu ha.

Di bidang industri terjadi kenaikan produksi kerajinan rakyat, industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Produksi tekstil meningkat dari 900 juta menjadi 1,3 miliar meter. Jika sebelum Repelita II Indonesia mengimpor pupuk urea dari luar negeri, pada akhir Repelita II keadaan itu sudah terbalik, yakni sudah dapat mengekspor di atas pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ekspor pupuk urea dilakukan terutama ke negara-negara ASEAN, seperti Filipina dan Muang Thai. Produksi semen

memperlihatkan pula kenaikan yang mencolok dari 900 ribu ton menjadi 5 juta ton. Kebutuhan semen dalam negeri hanya berjumlah 4,4 juta ton. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengekspor semen ke luar negeri, seperti Australia, beberapa negara Eropa, serta negara-negara ASEAN. Sementara itu, telah pula diselesaikan pembangunan kilang gas alam cair (LNG) di Kalimantan Timur dan Aceh serta proyek feronikel di Sulawesi Tenggara. Semua pembangunan ini dengan sendirinya meningkatkan hasil ekspor Indonesia.

Di bidang perhubungan tercatat rehabilitasi jalan sepanjang 8.000 km dan jembatan 21.000 meter. Selain itu, selesai pula dibangun jalan baru sepanjang 850 km dan jembatan baru sekitar 6.500 buah.

Pertumbuhan ekonomi yang sehat menjadi jaminan bagi usaha pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan dimaksudkan bahwa seluruh lapisan masyarakat dan terutama rakyat berpenghasilan rendah dapat menikmati hasil pembangunan secara merata. Usaha-usaha ke arah pemerataan pembangunan itu tampak dalam pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah dan pengembangan pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah yang terutama terdiri dari golongan pribumi. Langkah-langkah yang diambil antara lain bimbingan dan penyuluhan industri, serta bantuan dalam pemasaran melalui pembangunan pasar-pasar inpres (instruksi presiden). Selain itu, untuk pengusaha kecil diberikan pula kredit investasi kecil, kredit kerja permanen, dan kredit candak kulak. Pembangunan sekolah-sekolah dasar, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah ibadah merata dilakukan di seluruh tanah air sehingga asas pemerataan itu mulai tercapai. Pada tahun terakhir Repelita II pemerintah telah memberikan dana pembangunan daerah-daerah sebanyak Rp358 miliar rupiah.

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia terdapat tiga sektor yang harus dikembangkan, yakni sektor negara, sektor swasta, dan sektor koperasi. Selama Repelita II telah berhasil dibangun 70.000 rumah inti dan rumah sederhana yang dikoordinasikan oleh Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas). Selain itu, di desa-desa dilakukan pula peningkatan mutu perumahan.

Di bidang pendidikan, Repelita II berhasil melampaui target yang sudah ditentukan, baik dalam hal pembangunan gedung-gedung sekolah baru, rehabilitasi, pengangkatan guru, penyediaan buku-buku pelajaran, maupun dalam hal peningkatan mutu pendidikan.

Peningkatan di bidang komunikasi terlihat pada kemajuan-kemajuan yang dicapai pada sektor telepon. Satelit domestik Palapa telah memperlancar hubungan antara semua kota provinsi dan kota-kota penting lainnya.

Sarana komunikasi sosial pun memperlihatkan peningkatan. Siaran RRI telah mencapai seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah pemancar naik menjadi 180 buah. Hal yang serupa terjadi pada TVRI yang memperlihatkan penambahan jumlah stasiun penyiaran, stasiun pemancar, dan stasiun penyambung. Selain itu, dalam rangka komunikasi sosial ini telah dilakukan kebijakan "koran masuk desa" dan "siaran pedesaan" melalui RRI.

Pembangunan yang semakin meningkat dengan sendirinya membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang banyak. Di bidang kepegawaian, selama Repelita II telah diangkat lebih dari 433.000 pegawai negeri baru. Sebagian besar dari pegawai ini adalah guru sekolah dasar dan guru agama. Untuk memberikan penghasilan yang layak kepada para pegawai, dilakukan beberapa kali kenaikan gaji.

4. Repelita III dan Pelaksanaannya

Repelita III dimulai pada tanggal 1 April 1979 dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 1984. Seperti pada Repelita I dan Repelita II, pembangunan dalam Repelita III berlandaskan pada Trilogi Pembangunan dengan tekanan pada segi pemerataan. Asas pemerataan itu akan dituangkan dalam berbagai langkah dan kegiatan antara lain melalui 8 Jalur Pemerataan, yakni:

a. pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan;
b pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;
c. pemerataan pembagian pendapatan;
d. pemerataan kesempatan kerja;
e. pemerataan kesempatan berusaha;
f. pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan;
g. pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air;
h. pemerataan memperoleh keadilan.

Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat erat kaitannya dengan masalah produksi pangan. Produksi pangan yang terpenting, yakni beras, diperkirakan akan meningkat dari 17,5 juta ton dalam tahun 1978 menjadi 20,6 juta ton dalam tahun 1983. Untuk mencapai target tersebut, diusahakan agar persediaan dan konsumsi bahan makanan terus meningkat dan semakin beraneka ragam, yang dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan intensifikasi, penganekaragaman, dan perluasan kegiatan pertanian.

Di bidang sandang, diperkirakan pada tahun 1983/1984 produksi dan konsumsi akan mencapai masing-masing 2.500 juta meter atau 16 meter per kapita dan 2.200 juta meter atau 14 meter per kapita.

Pembangunan perumahan rakyat dan perbaikan kampung ditujukan untuk meningkatkan mutu kehidupan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Usaha pembangunan perumahan melalui Perumnas di daerah permukiman kota akan terus ditingkatkan dan diperluas ke berbagai kota. Melalui Bank Tabungan Negara, pembangunan perumahan rakyat akan membangun lebih kurang 30.000 rumah.

Di bidang pendidikan, titik berat program diletakkan pada perluasan pendidikan dasar serta peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan pada semua tingkat. Kesempatan belajar pada sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), pada tahun 1983/1984, akan terbuka untuk lebih kurang 22 juta anak pada pendidikan dasar yang berusia di bawah 7 tahun dan/ atau di atas 12 tahun. Sementara itu, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) diarahkan agar dapat menampung 85% lulusan SD, sedangkan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) menampung 90% lulusan SLTP.

Usaha perbaikan kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan pemberantasan penyakit menular, penyakit masyarakat, peningkatan gizi, peningkatan sanitasi lingkungan, perlindungan terhadap bahaya narkotika, penyediaan obat-obatan yang semakin merata dan terbeli oleh rakyat, penyediaan tenaga medis dan paramedis. Selain itu, akan ditingkatkan pula pembangunan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di kota-kota kecamatan dan puskesmas pembantu di desa-desa.

Selama Repelita III, kesempatan kerja akan diperluas antara lain melalui Proyek Padat Karya Guna Baru dengan sasaran utama memperluas kesempatan kerja produktif dalam pembangunan atau rehabilitasi sarana ekonomi. Proyek-proyek seperti ini akan dilaksanakan di kecamatan-kecamatan yang tergolong miskin, penduduk yang relatif padat, dan sering mengalami bahaya kekeringan atau banjir. Proyek ini akan meliputi sekurang-kurangnya 500 kecamatan setiap tahun. Penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja muda terdidik ke perdesaan melalui BUTSI akan tetap pula ditingkatkan. Dalam rangka BUTSI ini, dalam Repelita III akan dikerahkan 36.500 tenaga sarjana dan sarjana muda.

Salah satu usaha untuk mengatasi masalah kependudukan dan kesempatan kerja ialah meningkatkan program transmigrasi. Selama Repelita III akan ditransmigrasikan 500.000 kepala keluarga dan untuk itu akan dibangun 250 daerah permukiman.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perluasan dunia usaha swasta nasional mendapat perhatian yang sungguh-

sungguh. Perluasan itu terutama ditujukan terhadap pengusaha kecil golongan ekonomi lemah dengan cara memberi kredit yang bersyarat ringan dan bantuan keahlian. Selain itu, akan diberikan pula bantuan pemasaran, antara lain dengan jalan memberikan prioritas untuk memperoleh tempat penjualan di pasar-pasar dan pusat-pusat pertokoan.

Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air mempunyai sasaran, antara lain lebih menyerasikan pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah. Usaha itu juga ditujukan untuk lebih menyerasikan pertumbuhan antardaerah, yang akan dicapai antara lain melalui penyediaan jumlah minimum bantuan pembangunan daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Selama Repelita III diutamakan pula pembangunan daerah-daerah yang terbelakang, daerah-daerah minus, dan daerah-daerah yang padat penduduknya.

Dalam rangka menunjang pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh daerah, berbagai proyek perhubungan akan ditingkatkan baik fasilitas maupun pelayanannya. Proyek-proyek yang dimaksud antara lain adalah proyek jalan dan jembatan. Untuk itu, akan dilaksanakan Inpres Prasarana Jalan yang lebih banyak diarahkan untuk jalan-jalan kabupaten di luar Jawa. Di daerah permukiman transmigrasi akan dibangun jalan sepanjang 40.000 kilometer.

Segi lain yang juga mendapat perhatian ialah penerbangan perintis. Dari 75 lokasi bandar udara perintis pada akhir Repelita II akan ditingkatkan menjadi 104 lokasi. Jumlah pesawat ditambah dan frekuensi penerbangan ditingkatkan pula. Bidang perhubungan laut dan perhubungan darat pun mengalami peningkatan dan hubungan antara satu daerah dengan daerah lain semakin lancar, dan dengan demikian dapat dicapai pemerataan penyebaran pembangunan.

Segi lain yang juga mendapat perhatian ialah penerbangan pemerataan, tetapi hal itu tidak berarti bahwa pembangunan bidang lain diabaikan sama sekali. Di bidang ekonomi akan diusahakan pertumbuhan sebesar 6,5% setahun. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2%, pendapatan riil per kapita diharapkan naik sebesar 24% dalam waktu lima tahun. Gambaran singkat perkiraan pertumbuhan ekonomi menurut sektor adalah sebagai berikut:

a.	pertanian	: 3,5%	d.	bangunan	: 9%
b.	industri	: 11%	e.	pengangkutan	: 10%
c.	pertambangan	: 4%	f.	lain-lain	: 8%[83]

[83] Departemen Penerangan, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/1980–1983/1984*, jilid I, Jakarta, 1979, hlm. 20–50

Pada permulaan *oil boom* di akhir 1974, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dengan naiknya harga migas di pasar internasional. Situasi tersebut menyebabkan penerimaan pemerintah dan devisa melonjak sehingga negara mengalami kenaikan dana yang dapat mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Sebagai dampaknya pemerintah dapat membiayai berbagai proyek pembangunan, termasuk mengurangi kadar ketergantungan Indonesia pada berbagai jenis impor.

Peningkatan penerimaan pemerintah dan devisa menyebabkan pertumbuhan secara pesat terhadap pertambahan likuiditas perekonomian. Hal ini memengaruhi perbankan yang dapat meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat. Namun, peningkatan perolehan dana perbankan yang disalurkan bagi kredit untuk dunia usaha dapat membahayakan stabilitas moneter. Pada saat itu hal tersebut telah menunjukkan gejala-gejala kurang sehat, yaitu dengan terceminnya laju inflasi sebesar 27 persen selama tahun 1973.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan April 1974 yang mengharuskan Bank Indonesia mengikuti dan menganalisis secara terus-menerus serta mendalami berbagai variabel, seperti neraca pembayaran, dampak moneter dari APBN, serta laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi guna menentukan apakah program moneter perlu disesuaikan dalam satu tahun anggaran. Kebijakan tersebut berhasil menurunkan laju inflasi yang wajar sehingga pemerintah dapat meneruskan kegiatan pembangunan sesuai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.[84]

Rezeki minyak ini membuka peluang bagi Indonesia untuk melakukan investasi di bidang industri, pertanian, angkutan, infrastruktur, dan sebagainya. Sebagian proyek investasi itu, terutama proyek-proyek padat modal dan teknologi milik Pertamina, ditenderkan secara internasional. Pada awal 1980-an menurut Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Widjojo Nitisastro banyak perusahaan luar negeri berminat mengikuti tender proyek, apalagi waktu itu negara industri maju sedang mengalami resesi ekonomi akibat krisis minyak. Bisnis negara-negara tersebut sedang mengalami kelesuan ekonomi sehingga semua perhatian tertuju ke negara pengekspor minyak, seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan juga Indonesia yang sedang mengalami *boom*. Pada tahun 1981 Indonesia menjadi penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Negara-negara tersebut

---

[84] Arifin M. Siregar, dalam Anwar Arsjad, (ed.), *Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro*, Jakarta, 2007, hlm. 115

sedang giat melaksanakan proyek-proyek besar di sektor perminyakan dan infrastruktur ekonomi.[85]

Walaupun demikian, sektor migas tidak dapat diandalkan sebagai primadona secara terus-menerus. Penurunan harga migas dan resesi dunia mengakibatkan penurunan penerimaan pemerintah dan devisa negara dalam jumlah signifikan serta merosotnya kegiatan ekonomi di dalam negeri. Laju pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 2,3 persen pada tahun 1982. Ekspor nonmigas yang diharapkan dapat mengimbangi penurunan penerimaan devisa, ternyata kurang dapat bersaing.

Agar kegiatan pembangunan terus dapat berlangsung, pemerintah mengeluarkan Pakjun 1983 (Paket Juni). Paket ini merupakan rangkaian pertama dan langkah-langkah deregulasi di berbagai bidang, seperti keuangan dan perdagangan, yang mendapat sambutan baik di kalangan dunia usaha.

Pergerakan dana masyarakat oleh perbankan meningkat dengan pesat, demikian pula penyalurannya sebagai kredit kepada dunia usaha. Pertambahan kredit banyak digunakan untuk membiayai kegiatan ekspor nonmigas yang waktu itu mengalami hambatan-hambatan yang berkaitan dengan ekonomi biaya tinggi.

Kredit yang berkembang secara pesat adalah salah satu faktor penting dalam mendorong kegiatan dalam negeri yang tercermin pada naiknya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1982 hanya 2,3 persen menjadi rata-rata 5 persen pada tahun 1988. Hal ini berarti bahwa apabila ekspor nonmigas Indonesia pada tahun 1982 baru 20 persen dari keseluruhan ekspor, pada tahun 1988 peran ekspor nonmigas meningkat menjadi 60 persen. Selain itu, kondisi ini menunjukkan pula adanya perubahan yang menonjol dalam komposisi ekspor nonmigas, yaitu mengarah dengan cepat pada hasil perindustrian.

Suatu kondisi fenomenal waktu itu adalah walaupun kegiatan ekonomi dan ekspor berkembang dengan pesat, stabilitas moneter dapat dipertahankan. Laju inflasi yang meningkat dan mencapai 11,5 persen pada tahun 1983, justru mengalami penurunan dan hanya berada di posisi 6,5 persen pada tahun 1988. Perkembangan ini berkaitan erat dengan langkah-langkah yang diambil dalam rangka Pakjun 1983 yang bertujuan bukan hanya mendorong kegiatan ekonomi berdasarkan kemampuan rakyat, melainkan juga dimaksudkan untuk memelihara stabilitas moneter melalui kebijakan yang tidak langsung.[86]

---

[85] Suhadi Mangkusuwondo, dalam Anwar Arsjad (ed.), *ibid.*, hlm 248

[86] Arifin M. Siregar, dalam Anwar Arsjad, (ed.), *Ibid.*, hlm. 119

Selain itu, pembangunan ekonomi Indonesia yang telah sukses dalam bidang pertanian dan mulai bergeser ke bidang industri membutuhkan jumlah tenaga kerja. Munculnya pencari kerja baru merupakan tantangan pembangunan yang harus dicarikan pemecahannya. Pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung diharapkan mampu menyerap angkatan kerja baru yang terus membengkak. Hubungan antara kondisi buruh harus disinkronkan dengan kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah buruh dimasukkan dalam ruang lingkup ekonomi, keuangan, dan industri. Dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja berupaya memberi informasi kepada para Menteri Bidang Ekuin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, seperti buruh yang merupakan bagian dari pembangunan itu sendiri. Pada masa Cosmas Batubara menjabat Menteri Tenaga Kerja, ia mengeluarkan Peraturan Ketentuan Upah Minimum bagi pekerja. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-OS/Men/1989. Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa tingkat upah belum dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi pekerja dan keluarga.[87]

Dengan pembangunan nasional yang dirancang secara terpadu dan selalu dipantau perkembangan implementasinya serta memerhatikan para pesaing dari negara lain, Indonesia dituntut siap melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan ekonomi agar efisiensi ekonomi dapat ditingkatkan. Hal ini memerlukan tindakan dan langkah-langkah antisipatif berupa deregulasi dari waktu ke waktu. Berkat kebijakan Pakjun 1983 ini ekspor Indonesia bangkit kembali. Pada tahun 1986 ekspor Indonesia mencapai 14,8 miliar dolar AS, terdiri dari 8,3 miliar dolar AS (6 persen) ekspor migas, sedangkan 6,5 miliar dolar AS (44 persen) berupa hasil ekspor nonmigas. Pada tahun 1993, jumlah ekspor telah mencapai 39 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, sebesar 30 miliar dolar AS (77 persen) berupa ekspor nonmigas.

Dari perkembangan ekspor itu menunjukkan bahwa langkah-langkah deregulasi yang dilaksanakan selama itu telah berhasil memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang semula menggantungkan diri pada perkebunan, kemudian beralih ke migas dan selanjutnya ke setiap sektor yang potensi ekspornya cukup tinggi. Selain itu, terobosan-terobosan pemasaran komoditas perdagangan yang semula ke Eropa dan Amerika Serikat, selanjutnya banyak diarahkan ke kawasan Asia dan Asia Pasifik dengan jarak transportasi yang relatif lebih dekat dan dengan biaya yang lebih murah. Hal ini diharapkan agar mampu menambah daya saing di pasar internasional.[88]

---

[87] Cosmas Batubara, *Cosmas Batubara sebuah Otobiografi Politik*, 2007, hlm. 265

[88] Saleh Afif dalam Anwar Arsjad, *et al.* (ed.), *op. cit.*, 2007, hlm. 302

E. Integrasi, Dwifungsi ABRI, dan Tugas Internasional Keamanan Dalam Negeri

1. Integrasi Mental sebagai Titik Tolak

Pada bulan Juni tahun 1962, Presiden Soekarno mengintegrasikan TNI dan Polisi dalam organisasi ABRI, dengan sentralisasi komando pada Panglima Tertinggi (Pangti). Jabatan para Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian RI, diubah menjadi Panglima Angkatan (Pangad, Pangal, Pangau, dan Pangak). Usaha integrasi ABRI pada era demokrasi terpimpin ini menemui banyak hambatan.

Hambatan utama adalah munculnya *divergensi* dan *rivalitas* antar-angkatan. Masalah-masalah pembinaan teritorial, doktrin, kekaryaan, organisasi, dan intelijen merupakan sumber timbulnya divergensi dan persaingan. Pada masa awal Orde Baru, pimpinan ABRI berusaha menghilangkannya melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan pendidikan, pendekatan doktrin, dan pendekatan organisasi.[89]

Khusus pendekatan pendidikan, penekanan diletakkan pada bidang pendidikan yang terintegrasi dan gabungan secara fisik. Pendidikan yang terintegrasi dimulai pada tingkat pembentukan perwira dan diteruskan pada tingkat lanjutan perwira.

Pendidikan yang terintegrasi secara mental dan fisik pada tingkat pembentukan perwira adalah dasar untuk membentuk kader penerus ABRI. Untuk pelaksanaan itu, pada tahun 1966 dibentuk wadah pendidikan baru, yakni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri).

Pada upacara Hari Ulang Tahun ABRI 5 Oktober 19665 di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta, Presiden Soekarno menyatakan dengan resmi berdirinya Akabri dan melantik Komandan Jenderal Akabri yang pertama Laksamana Muda (L) Rachmat Sumengkar dan Wakil Komandan Jenderal Akabri Laksamana Muda (U) atau Marsekal Muda TNI Suharnoko Harbani. Presiden menganugerahkan panji-panji Akabri yang memuat semboyan *Bhinneka Eka Bhakti.* Pada tanggal 29 Januari 1967 diresmikan Akabri Bagian Umum dengan mengambil tempat di Akabri Bagian Darat, Magelang. Peresmian ini merupakan permulaan tahun akademi dan sekaligus merupakan integrasi pendidikan pembentukan perwira. Akabri sebagai lembaga pendidikan mempunyai bagian-bagiannya yakni Akabri Bagian Umum berpusat di Magelang, Akabri Bagian Darat di Magelang, Akabri Bagian Laut di Surabaya, Akabri Bagian Udara di Yogyakarta, dan Akabri Bagian Kepolisian di Sukabumi.[90]

---

89 Saleh As'ad Djamhari, *Ichtisar Sedjarah Perdjuangan ABRI,* 1971, hlm. 128–129

90 Mako Akabri, *Sedjarah Akademi Angkatan Bersendjata RI*, 1972, hlm. 302–305

Pada pendidikan lanjutan perwira, integrasi dimulai pada tanggal 28 Desember 1963 dalam taraf Afiliasi Antar-Sekolah Staf dan Komando (Sesko) yang kemudian menjadi Dewan Antar-Sesko, dan diketuai oleh Mayor Jenderal Suwarto.

Sebelum secara resmi, Sesko-sesko Angkatan/Polri diintegrasikan ke dalam wadah Sesko ABRI pada bulan Mei 1974. Pada dasarnya tiap-tiap Sesko Angkatan/Polri berdiri sendiri langsung di bawah kendali masing-masing Angkatan/Polri. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Menhankam/Pangab No. Sprin/B/92/III/1974 tanggal 28 Maret 1974 wewenang kendali operasi pendidikan sesko-sesko Angkatan/Kapolri diserahterimakan oleh para Kepala Staf Angkatan/Polri kepada Komandan Jenderal Sesko ABRI.

Nilai hakiki yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan Sesko ABRI bersumber pada sasaran pendidikan, yaitu mendidik calon pemimpin-pemimpin ABRI yang tangguh, terampil, dan memiliki sikap mental yang baik, serta dilandasi falsafah "Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan".[91]

2. Integrasi dalam Doktrin dan Organisasi

Pendekatan kedua yang ditempuh dalam mencapai integrasi ABRI ialah pendekatan doktrin, melalui penyusunan dan penyempurnaan doktrin-doktrin dasar Angkatan dan Polisi menjadi satu doktrin ABRI.

Sejak seminar pertama TNI AD yang diselenggarakan enam bulan sebelum meletusnya pemberontakan G-30-S/PKI menghasilkan doktrin "Tri Ubaya Cakti" (Tiga Tekad Sakti). Beberapa saat kemudian menyusul doktrin-doktrin dari Angkatan-angkatan dan Polri. TNI AL menyusun doktrin dengan nama "Eka Casana Jaya" (Satu Doktrin yang Menang), TNI AU dengan doktrin "Swa Bhuana Paksa" (Sayap Tanah Air), dan Polri dengan doktrin "Tata Tentrem Kerta Rahardja". Dengan doktrin-doktrin itu, TNI AD menonjolkan wawasan buana, TNI AL menitikberatkan wawasan bahari, TNI AU menekankan pada wawasan dirgantara, dan Polri pada wawasan ketenteraman masyarakat.

Doktrin yang berdiri sendiri dengan wawasan yang berbeda dan bersaing satu dengan yang lain itu, dilemparkan ke tengah-tengah masyarakat dan diindoktrinasikan kepada jajaran angkatan masing-masing. Hal ini sangat membahayakan keutuhan ABRI dan kesatuan bangsa , sebab pada hakikatnya wawasan adalah aspek dari falsafah hidup suatu angkatan

---

[91] Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, *Angkasa*, November–Desember 1978, XXVIII, hlm. 30–32

yang berisi dorongan dan rangsangan untuk mencari jalan dan cara guna mencapai tujuan hidup.[92] Oleh karena itu, setelah pemberontakan G-30-S/PKI, Pimpinan Angkatan Bersenjata menyadari masalah doktrin dan wawasan antar-Angkatan/Polri menjadi salah satu sumber persaingan diusahakan untuk mengintegrasikannya melalui seminar.

Atas prakarsa pimpinan Hankam, pada tanggal 21 September sampai 17 Oktober 1966 diadakan Pra Seminar Hankam sebagai langkah persiapan menuju ke Seminar Hankam. Seminar Hankam diselenggarakan dari tanggal 12 hingga 21 November 1966, dipimpin oleh Kepala Staf Hankam Mayor Jenderal M.M. Rachmat Kartakusuma sebagai ketua seminar dan Laksamana Muda Subijakto, Deputi Strategi Hankam, sebagai wakil ketua.

Berkat jiwa integrasi di kalangan ABRI, seminar berhasil merumuskan Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional dan Doktrin Perjuangan ABRI yang bernama *Tjatur Darma Eka Karma* serta Wawasan Nusantara Bahari. Doktrin *Tjatur Darma Eka Karma* (Tjadek) merupakan hasil penelitian dan penyempurnaan hasil diskusi pada Pra-Seminar Hankam, diskusi pada integrasi konsepsi dan doktrin dari Departemen Veteran, Lemhanas, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Dengan berhasilnya Seminar Hankam menyusun doktrin Tjadek ini, perbedaan-perbedaan yang tajam antara doktrin-doktrin Angkatan berhasil ditumpulkan, khususnya mengenai perbedaan wawasan.

Rumusan tentang wawasan hasil seminar disempurnakan dalam Rapat Kerja Hankam pada bulan November 1967. Rapat kerja menentukan bahwa kita menganut Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Dengan Wawasan Nusantara tidak ditonjolkan kepentingan salah satu matra. Satu sama lain saling berhubungan, yang satu tidak dapat dihapuskan untuk kepentingan yang lain. Yang perlu adalah penentuan prioritas, penentuan titik berat sesuai dengan situasi dan kondisi dalam suatu jangka waktu tertentu.[93]

Pendekatan ketiga ialah pendekatan organisasi. Organisasi adalah suatu alat, suatu wahana untuk melaksanakan tugas pokok yang telah ditentukan. Organisasi meliputi unsur fungsi, faktor fisik personel, dan hubungan-hubungan yang setepat-tepatnya antara ketiga unsur tersebut.

Landasan pengorganisasian dan penstrukturan Departemen Hankam pada awal Orde Baru berdasar pada surat Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967. Sejak tahun 1963 angkatan-angkatan berkembang menjadi

---

92 Departemen Pertahanan-Keamanan, *Himpunan Amanat Menhankam/Pangab dan Wapangab*, 1970, hlm. 81

93 *Ibid.*, hlm. 83

departemen-departemen dan kepala-kepala staf angkatan menjadi panglima-panglima angkatan yang kemudian menjadi menteri/panglima angkatan. Akibatnya, pembagian dan penentuan fungsi-fungsi, baik vertikal maupun horizontal menjadi rancu. Terdapat enam badan hankam yang masing-masing menjalankan fungsi serupa atau hampir serupa sehingga pikiran, tenaga, dana, dan daya yang ada dihamburkan secara percuma. Fungsi-fungsi yang serupa dilaksanakan oleh beberapa pihak menimbulkan kesimpangsiuran, kekacauan, dan kemelut yang luar biasa, sehingga semakin lama semakin banyak pimpinan nasional memutuskan kebijakan-kebijakan yang keliru. Keenam badan-badan itu adalah Komando Operasi Tertinggi (KOTI), Kompartemen Hankam, Departemen Angkatan Darat, Departemen Angkatan Laut, Departemen Angkatan Udara, dan Departemen Angkatan Kepolisian. Karena fungsi-fungsi ini dikerjakan secara melebar, tidak secara mendalam, semakin lama nilai-nilai kemiliteran, nilai-nilai keahlian, dan keterampilan kemiliteran semakin merosot. Kompensasi pengembangan kekuatan Hankam beralih menjadi kekuatan politik.[94]

Dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967 adalah untuk menertibkan pembagian fungsional angkatan. Pemegang kekuasaan tertinggi ABRI dan pucuk pimpinan Hankamnas adalah Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata. Rantai komando berjalan dari Presiden dengan melalui Menhankam/Pangab. Tiap-tiap angkatan mempunyai tugas penyelenggaraan dan pembinaan Hankamnas, menurut matranya masing-masing. Setiap angkatan adalah bagian organik dari Departemen Hankam, serta bertanggung jawab untuk memberikan bantuannya dalam penyelenggaraan dan pengamanan kebijakan dalam bidang Hankam.

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 132/1967, ABRI terdiri atas:

a. Angkatan Darat disingkat AD,
b. Angkatan Laut disingkat AL,
c. Angkatan Udara disingkat AU, dan
d. Angkatan Kepolisian disingkat AK.

Tiap-tiap angkatan dipimpin oleh Panglima Angkatan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Kecuali angkatan, Menhankam/Pangab juga membawahi komando-komando utama operasional Hankam/ABRI. Motivasi pembentukan komando utama (Kotama) ini didasarkan atas asas bahwa untuk memperoleh kekuatan Hankam/ABRI secara efektif

---

[94] Departemen Pertahanan Keamanan, *op. cit.*, 1970, hlm. 84–85

diperlukan pemikiran dan tindakan sungguh-sungguh untuk merealisasikan integrasi antar-angkatan serta integrasi ABRI dan rakyat. Fungsi komando utama operasional adalah melaksanakan operasi ofensif-strategis dan operasi defensif-strategis sebagai cara menghadapi agresi dan invasi lawan.

Di dalam struktur ini Menteri Hankam adalah seorang perwira tinggi ABRI yang karena kedudukannya merangkap sebagai Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab), dan saat itu dijabat oleh Jenderal Soeharto. Sementara itu, Panglima Angkatan Laut dijabat oleh Laksamana Laut Mulyadi, Panglima Angkatan Udara dijabat oleh Laksamana Muda Udara Rusmin Nuryadin, dan Panglima A.K. oleh Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo. Pangab adalah pembantu Presiden dalam menyelenggarakaan kekuasaan presiden mengenai pimpinan dan pembinaan tertinggi ABRI dan bidang Hankam serta menentukan kebijakan Hankam dan melakukan pengendalian atas ABRI.[95]

Keputusan Presiden No. 132/1967 ini kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 79 Tahun 1969. Tujuan penyempurnaan ini adalah agar pada akhir Repelita tahun 1973 telah didapat landasan dan pangkal tolak pembangunan suatu sistem Hankamnas yang modern, baik doktrin maupun aparaturnya.

Dengan tercapainya kemantapan integrasi antara fungsi-fungsi pertahanan keamanan, baik dalam segi organisasi maupun segi prosedur kerjanya, diadakan penyempurnaan kembali Keputusan Presiden No. 79/1969 dengan Keputusan Presiden No. 7 tahun 1974 tanggal 18 Februari 1974. Penyempurnaan dilakukan terutama pada tingkat departemental, eselon, pimpinan yang terdiri dari pimpinan dan pembantu pimpinan, serta beberapa badan pada eselon pelaksana pusat.[96]

3. Penyempurnaan Organisasi ABRI

Perencanaan Strategis Pembangunan Kekuatan ABRI (Renstra Bangkuat ABRI) tahun 1984 dimaksudkan agar ABRI terus membangun diri dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga ABRI dapat mengurus dan ikut serta dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II yang menjangkau kurun waktu tahun 2000-an, dengan reorganisasi komprehensif dan melanjutkan upaya integrasi yang telah dimulai sejak tahun 1970-an. Usaha tersebut terus dikembangkan terutama yang mencakup bidang pembinaan dan penggunaan kekuatan.

---

[95] Departemen Pertahanan-Keamanan, *Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Departemen Pertahanan Keamanan* (Keppres No. 132/1967), 1967

[96] Departemen Pertahanan-Keamanan, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974*, 1974

Pada tahun 1982 lahirlah Undang-Undang Nomor 241/1982 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara. Berdasarkan UU tersebut reorganisasi dilakukan di lingkungan organisasi Departemen Hankam dan Mabes ABRI. Kedua lembaga tersebut dipisahkan guna mendukung optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas agar dapat melaksanakan tugas pokok masing-masing secara maksimal.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 60 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi ABRI dipandang perlu untuk segera menentukan pokok-pokok organisasi dan prosedur TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri. Kebijakan pimpinan ABRI tentang perubahan organisasi di tingkat Mabes ABRI dan Departemen Hankam, ditindaklanjuti dengan penataan organisasi di tim Mabes Angkatan dan Polri serta komando-komando utama operasi. Jadwal penyusunan organisasi yang dilaksanakan oleh panitia kerja organisasi pusat sejak tanggal 26 November 1983 telah selesai ditetapkan pada akhir tahun 1985. Pelaksanaan operasionalnya dimulai pada tanggal 1 Januari 1986.[97]

Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional dan situasi globalisasi, pemerintah melakukan penyempurnaan organisasi Angkatan Bersenjata. Penyempurnaan yang mengacu pada keberhasilan reorganisasi ABRI tahun 1984 dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas secara optimal untuk mendukung keberhasilan tugas pokok tiap-tiap angkatan.

Pada tanggal 5 Oktober 1992 Mabes ABRI mengeluarkan Keputusan Pangab Nomor Kep/108/X/1992 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur TNI AD. Dalam keputusan tersebut, organisasi TNI AD disusun dalam dua tingkat, yaitu tingkat Mabesad dan tingkat Kotama TNI AD.

Selain itu, penyempurnaan organisasi TNI AL dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Pangab Nomor Kep/49/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur TNI AL. Organiasi TNI AL disusun dalam dua tingkat, yaitu Mabesal dan tingkat Kotama TNI AL.

Dalam jajaran TNI AU diadakan penyempurnaan pula sesuai Keputusan Pangab Nomor Kep/14/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur TNI AU. Organisasi TNI AU disusun dalam dua tingkat, yaitu Mabesau dan tingkat Kotama TNI AU.

---

[97] Pusat Sejarah TNI, *Sedjarah TNI*, jilid V, 2000, hlm. 6

Di Polri, penyempurnaan sesuai Keputusan Kep II/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Polri. Organisasi Polri disusun dalam dua tingkat, yaitu tingkat Mabes Polri dan tingkat kewilayahan Polri atau Polda.[98]

4. Tugas-Tugas Internasional

Perang Iran dan Irak telah menarik perhatian dunia internasional. Dewan Keamanan PBB pun turut serta berusaha mencari penyelesaian guna mencapai kesepakatan damai di antara dua negara itu. Pada tanggal 20 Juli 1987 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi Nomor 598 yang menawarkan agar Irak dan Iran melaksanakan gencatan senjata. Sebagai anggota PBB, pemerintah RI mendapat kepercayaan kembali untuk berperan serta dalam pasukan perdamaian dunia.

Dalam tugas sebagai Pasukan Pemelihara Perdamaian di wilayah Iran-Irak, Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda IX yang berlangsung sejak bulan Agustus 1988 hingga bulan November 1990. Personel yang dikirim berasal dari AD, AL, dan AU. Dalam pelaksanaan tugasnya Kontingen Garuda IX bergabung dengan anggota ITNIIMOG lainnya, yaitu Malaysia, Bangladesh, Sinegal, Zambia, Kanada, Denmark, Australia, Selandia Baru, Polandia, India, Ghana, dan Hongaria.

Kontingen Garuda X yang dikirim ke Namibia, mengemban tugas dari PPB untuk ikut serta menyelesaikan masalah kemerdekaan Namibia pada tahun 1987. Selama 8 bulan kontingen yang berangkat pada Juni 1987 berhasil menyelesaikan tugasnya dan kembali ke tanah air pada bulan Maret 1990.

Dalam rangka mengatasi gencatan senjata Irak dan Kuwait, PBB meminta kepada Indonesia untuk mengirimkan pasukan pemeliharaan perdamaian di wilayah tersebut. Pasukan perdamaian itu dikenal dengan *United Nations Irak-Kuwait Observation Mission* (UNIKOM).

Kontingen Garuda XI dikirim dalam rangka memenuhi permintaan PBB guna mewujudkan perdamaian Irak-Kuwait dan bertugas sebagai pengamat militer untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata. Pengiriman Kontingen Garuda XI hingga Kontingen Garuda XVII berlangsung dari bulan April 1991 hingga bulan Juni 2000.

Selanjutnya dalam melaksanakan operasi perdamaian PBB di Kamboja, pemerintah Indonesia mengirimkan kontingen yang disebut Kontingen Garuda XII. Kontingen yang diberangkatkan pada bulan Maret 1992 bertugas membantu PBB untuk menciptakan situasi dan kondisi perdamaian di wilayah

---

[98] *Ibid.*, hlm. 14

Kamboja. Tugas tersebut ditujukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilu guna pembentukan suatu pemerintahan yang sah. Selama pelaksanaan tugas lebih kurang dua tahun (berakhir pada Februari 1994), Kontingen Garuda XII memiliki prestasi menonjol, yaitu pembebasan terhadap enam personel UNTAC serta penyelamatan dua pengamat yang ditangkap Khmer Merah.

Penggulingan Presiden Siryad Barre dari kedudukannya sebagai kepala pemerintahan di Somalia oleh sekelompok gerilyawan yang menentang kebijakannya, mengakibatkan pertempuran demi pertempuran yang terjadi semakin meningkat pada tahun 1992. Pertempuran yang terjadi menyebabkan kelaparan dan pengungsian penduduk Somalia ke negara tetangganya, seperti Ethiopia dan Kenya. Melihat kondisi yang terjadi di Somalia tersebut, PBB memprakarsai perdamaian dan bertindak sebagai penengah dengan mengusahakan gencatan senjata. Indonesia dipilih kembali oleh PBB untuk ikut berperan aktif dalam mengatasi pertikaian di Somalia. Untuk memenuhi permintaan tersebut, pada bulan Juli 1992 pemerintah Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda XIII menuju Somalia di bawah koordinasi *United Nations Operation in Somalia* (UNOSOM). Tugas Kontingen Garuda tersebut berakhir pada tanggal 5 Februari 1995.

Selanjutnya dalam upaya membantu mengatasi konflik di Bosnia-Herzegovina dan atas permintaan PBB, pemerintah Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda XIV. Dalam tugas yang dimulai pada bulan Oktober 1993 hingga bulan Juli 1996, kontingen Garuda XIV bergabung dalam pasukan perdamaian PBB (UNPROFOR = *United Nations Protection Force*). Tugas yang diemban kontingen ini adalah sebagai pengamat militer pada *United Nations Military Observer* (UNMO) dengan menitikberatkan pada penyelidikan, laporan, pemantauan, penghubung, dan membantu tugas kemanusiaan. Dengan demikian, UNMO memiliki kebebasan bergerak dan berkomunikasi ke semua wilayah yang bertikai. Di samping itu, tugas UNMO juga sebagai pemberi data dan informasi yang digunakan pada setiap pemantauan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pimpinan PBB.

Pada bulan November 1994, pemerintah Indonesia mengirimkan tim pengamat militer yang tergabung dalam *United Nations Observer Mission in Georgia* (UNOMIG). Tim tersebut adalah Kontingen Garuda XV. Di samping sebagai pengamat militer, kontingen tersebut juga bertugas sebagai duta bangsa yaitu memberikan penjelasan tentang Indonesia dan pasukan ABRI dalam masyarakat (pembinaan teritorial) kepada anggota kontingen UNOMIG maupun masyarakat setempat. Selama dalam penugasan, kontingen yang mengakhiri misinya pada Oktober 2000 itu dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

Dalam mengatasi kekacauan politik dan militer di Mozambik, karena memburuknya hubungan negara tersebut dengan Afrika Selatan, PBB memprakarsai sebagai penengah untuk melakukan perdamaian di kawasan konflik. PBB menyerukan kepada anggota-anggotanya untuk mengirimkan kontingennya ke Mozambik. Pemerintah Indonesia mengirimkan Kontingen Garuda XVI pada Juni 1984 hingga 1994. Tugasnya adalah sebagai pemantau polisi sipil yang berada di bawah kendali pengamat PBB di Mozambik (*United Nations Observer in Mozambique* = UNOMOZ).

Dalam proses perjanjian perdamaian antara pemerintah Filipina (*Government Republic of Philipina* = GRF dengan *Moro National Liberation Front* = MNLF), pemerintah Indonesia ikut berpartisipasi dalam mengatasi konflik tersebut dengan mengirimkan Kontingen Garuda XVII. Kontingen yang berangkat pada Oktober 1994 bertugas sebagai tim pengamat gencatan senjata antara pemerintah Filipina dan MNLF. Prestasi yang dicapai oleh Kontingen Garuda yang bertugas selama di Filipina hingga tahun 2000, yaitu keberhasilannya mendekatkan hubungan antara pihak MNLF dan GRP. Usaha tersebut mendorong terciptanya proses perdamaian antara kedua belah pihak yang berkonflik. Sebagai perwujudannya, bulan Desember 1995 antara GRP dan MNLF bertemu di Jakarta. Pada bulan Agustus 1996 kedua pihak tersebut kembali melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta yang menghasilkan kesepakatan Perjanjian Perdamaian (*Final Peace Agreement*) antara Pemerintah Filipina dan MNLF.

5. ABRI Masuk Desa (AMD)

Pada rapat pimpinan ABRI tanggal 27 Maret 1980 di Pekanbaru, Presiden Soeharto mengingatkan kembali kepada pimpinan ABRI tentang perlunya peningkatan upaya mewujudkan kemanunggalan ABRI dengan rakyat. Perjuangan ABRI dibutuhkan karena rakyat menginginkan kelanjutan dan kelancaran pembangunan. Dalam hal ini tugas kekaryaan di samping di lingkungan eksekutif maupun legislatif, juga perlu dilanjutkan dengan pelaksanaan Operasi Bhakti. Tugas tersebut dikhususkan bagi daerah-daerah yang memerlukan, tanpa mengurangi kemampuan ABRI dalam membangun institusinya. Operasi Bhakti merupakan pengabdian ABRI kepada rakyat guna menangani bidang-bidang yang belum mampu dilaksanakan oleh rakyat, atau untuk membantu instansi lain yang belum mampu menanganinya.[99]

Bentuk pelestarian kemanunggalan ABRI dan rakyat dilaksanakan melalui program ABRI Masuk Desa (AMD). Program tersebut merupakan

[99] Pusat Sejarah TNI, *Sejarah TNI*, jilid IV, 2000, hlm. 193

perwujudan bakti ABRI di masa damai. Selain itu, upaya ini dimaksudkan agar ABRI dapat turut serta memajukan pembangunan seperti yang diarahkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pelaksanaan program AMD yang dicetuskan pada tahun 1980 memiliki tiga tujuan pokok, yaitu: *Pertama,* menguji sistem keamanan pertahanan rakyat semesta di lapangan. *Kedua,* membantu rakyat dalam semua aspek kehidupan. *Ketiga,* mengumpulkan permasalahan untuk dicari pemecahannya. Tujuan lainnya adalah menjajaki cara terbaik untuk melaksanakan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata).

Dalam hal ini desa dipilih oleh ABRI sebagai sasaran utama pembangunan karena desa merupakan penunjang di dalam usaha bela negara. Dari sudut pandang ekonomi, desa memiliki potensi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembangunan di perdesaan mendapatkan skala prioritas untuk segera ditangani agar kehidupan masyarakatnya dapat ditingkatkan.

Masyarakat menyambut pelaksanaan program AMD secara terbuka. Penyelenggaraan AMD merupakan suatu rangkaian program terpadu dalam usaha menjangkau kecamatan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) yang diprioritaskan dalam pembangunan perdesaan, terutama bidang kesejahteraan rakyat berupa kegiatan fisik dan nonfisik. Titik berat sasaran adalah program air bersih, listrik, penanggulangan bencana alam, dan mengatasi wabah-wabah penyakit menular. Kegiatan nonfisik berupa pemberian ceramah tentang kesadaran bernegara dan bela negara. Kegiatan-kegiatan fisik berupa pembangunan rumah sakit, pembuatan jalan-jalan, sekolah, jembatan, dan lain-lain. Kegiatan yang berhubungan dengan bidang ketertiban masyarakat (kamtibmas) ditangani oleh petugas polisi. Tugas Kamtibmas dalam kegiatan fisik meliputi penanganan kasus-kasus kriminalitas, mengeluarkan surat izin bepergian, surat kelakuan baik, pengaturan lalu lintas, dan rambu-rambu. Kegiatan nonfisiknya seperti penyuluhan dan penerapan agar masyarakat desa memahami dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan serta ketertiban di desanya masing-masing.

Realisasi kemanunggalan ABRI dan rakyat dapat mudah tercapai jika satuan-satuan ABRI mampu mengisi semua desa. Namun, sejak Repelita I jumlah desa di Indonesia selalu meningkat. Hal tersebut karena adanya desa-desa baru yang diciptakan oleh adanya program transmigrasi yang berakibat pada pemekaran desa-desa berpenduduk padat. Pada awal Repelita IV (1984–1985), jumlah desa di Indonesia mencapai 67.448 desa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dari Sabang (Pulau Weh) hingga Merauke (Papua).

6. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib)

Pada tanggal 3 Oktober 1965, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin operasi pemulihan keamanan dan ketertiban pasca kudeta G-30-S/PKI. Untuk melakukan operasi yang diperintahkan, Jenderal Soeharto Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) sebagai salah satu unsur komando pelaksana dari Komando Operasi Tertinggi (KOTI) yang langsung di bawah Panglima Tertinggi. Organisasi Kopkamtib yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan No.162/KOTI 1965, 12 November 1965. Sebagai komando pelaksana, Jenderal Soeharto pada awalnya menggunakan unsur Kostrad. Koopskamtib kerusuhan membentuk unsur pelaksananya yaitu Tim Pemeriksa Pusat dan Daerah (6 Oktober 1965) dan Oditur Pusat dan Daerah (November 1965). Pada tanggal 3 Juli 1967 Staf Koopskamtib diintegrasikan dengan Staf Umum Angkatan Darat (SUAD), dan akronimnya diganti menjadi Kopkamtib, dengan anggaran belanja tersendiri. Pada tingkat daerah dibentuk Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Daerah (Laksus Pangkopkamtibda) yang semula Pepelrada. Pada tahun 1969, organisasi Kopkamtib dipindahkan dari Staf Umum AD ke Staf Umum Hankam, tetapi secara *de facto* sebagai komando yang berdiri sendiri, yang langsung di bawah Menhankam/Pangab Jenderal M. Panggabean. Pada tahun 1973, Panglima Kopkamtib dilimpahkan kepada Wapangab, Jenderal Sumitro. Setelah peristiwa Malari pada tahun 1974, Panglima Kopkamtib diambil alih oleh Presiden Soeharto (1974–1978), dan Laksamana Sudomo diangkat sebagai Kepala Staf Kopkamtib. Tugas pokok Kopkamtib adalah, *pertama,* memulihkan keamanan dan ketertiban akibat peristiwa pemberontakan G-30-S/PKI, kegiatan-kegiatan ekstrem, dan kegiatan-kegiatan subversi lainnya. *Kedua,* mengamankan kewibawaan pemerintah beserta alat-alatnya dari pusat sampai dengan daerah dalam rangka mengamankan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kopkamtib memiliki fungsi organik, yaitu mengoordinasi operasi secara terbatas dan fungsi teknis, yaitu menyelenggarakan pengendalian operasi pemulihan keamanan dan ketertiban. Organisasi Kopkamtib terdiri atas unsur staf pelaksana dan staf umum yang terdiri atas staf-staf sosial-politik, intelijen, operasi, teritorial, serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Unsur pelaksana Kopkamtib terdiri atas Satuan Tugas (Satgas) Intelijen, Dinas Hubungan Masyarakat, Tim Pemeriksa Pusat (Teperpu), dan Tim Oditur/Jaksa Pusat (Todsapu). Para panglima daerah setingkat Komando

Wilayah Pertahanan (Kowilhan) dan panglima daerah setingkat Komando Daerah Militer, sebagai eselon pelaksana khusus (Laksus).[100]

Pangkopkamtib dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Staf Kopkamtib. Dalam surat Keputusan Presiden 1974, Menhankam/ Pangab adalah pembantu utama dan penasihat Pangkopkamtib. Dalam perkembangan selanjutnya sejak 23 Desember 1978, Presiden memutuskan Pangkopkamtib dijabat oleh Wapangab Laksamana Sudomo dan Jenderal Widjojo Soejono sebagai Kepala Staf Kopkamtib.

Pada pasca kudeta G-30-S/PKI, sejumlah orang ditahan karena diduga terlibat dalam kudeta G-30-S/PKI secara langsung atau tidak langsung. Team Screening Pusat (Teningpu), Tim Pemeriksa Pusat dan Daerah (Teperpu dan Teperda), serta Tim Oditur/Jaksa (Todsada), bertugas melakukan penindakan hukum pidana terhadap tahanan G-30-S/PKI. Dasarnya adalah Instruksi Presiden No. 09/Kogam/5/1966, tanggal 13 Mei 1966, tentang Penertiban/Pembersihan Personel Aparatur Negara. Tugas tim-tim ini (berdasarkan Instruksi Presiden No. 13/Kogam/7/1966), yaitu melakukan klasifikasi para tahanan G-30-S/PKI. Mereka diklasifikasi atas tiga golongan A, B, dan C. Golongan A adalah mereka yang nyata-nyata terlibat secara langsung, artinya ikut merencanakan membantu atau mengetahui adanya perencanaan, tetapi tidak melapor kepada yang berwajib. Jumlahnya 4.926 orang, yang terdiri dari mereka yang cukup bukti peran keterlibatannya, yang perkaranya diajukan ke pengadilan. Golongan B adalah mereka yang nyata-nyata pengkhianat dan menunjukkan sikap dalam perbuatan maupun ucapan yang bersifat gerakan tersebut, termasuk anggota pengurus, tokoh, anggota bekas partai terlarang PKI atau yang telah bersumpah terhadap PKI jumlahnya mencapai 11.611 orang. Golongan C adalah mereka yang patut diduga terlibat secara langsung atau tidak langsung dan pernah terlibat peristiwa pemberontakan Madiun 1948 dan mereka yang pernah menjadi anggota ormas PKI, terbagi atas tiga kelompok C_1, C_2, dan C_3. Golongan C_2 dan C_3 yang masih diperkenankan menjadi aparatur pemerintah dengan pengawasan, berjumlah 25.969 orang. Sampai tahun 1968, tahanan G-30-S/PKI berjumlah 63.893 orang.[101] Di samping yang telah diklasifikasi, masih ada yang belum jelas statusnya sebanyak 26.712 orang dan 47.410 orang dikenakan wajib lapor.

Dari hasil pemilahan terhadap tahanan G-30-S/PKI, khususnya golongan B untuk penempatannya, pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:

---

[100] Departemen Pertahanan Keamanan, *Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Departemen Pertahanan Keamanan* (Keppres No. 132/1967), 1967

[101] Surat Keputusan Presiden No. 9/1974, tanggal 2 Maret 1974

a. penyelesaian harus tetap berdasarkan hukum;
b. penyelesaian tidak boleh mengganggu keamanan;
c. tahanan harus diperlakukan dengan perikemanusiaan.[102]

Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden dan Surat Keputusan Pangkopkamtib No. Kep/009/Kopkam/2/1961 tanggal 26 Februari 1969 Jaksa Agung ditunjuk sebagai penyelenggara[103] dan pelaksana penempatan tahanan/ G-30-S/PKI golongan B di Pulau Buru. Jaksa Agung Soegih Arto pada 24 Juni 1971 membentuk Badan Pelaksana Rehabilitasi di Pulau Buru (Bapreru) dan Brigjen Wing Wiryawan diangkat sebagai ketua pelaksana Bapreru di Ambon. Pelaksana tingkat bawah adalah seorang komandan Tempat Pemanfaatan (Tefaat) yang membawahi 18 unit. Tugas Bapreru adalah, *pertama,* menampung, memelihara, dan memanfaatkan para tahanan G-30-S/PKI dalam rangka pemecahan masalah tahanan G-30-S/ PKI, pengasingan oknum-oknum yang dinilai paling berbahaya demi ketahanan nasional.[104] *Kedua,* melaksanakan Operasi Ksatria untuk menentukan siapa-siapa yang dalam waktu dekat dapat dikembalikan ke masyarakat. *Ketiga,* membangun desa Savana Jaya sebagai tempat tinggal tahanan sebagaimana masyarakat secara wajar dan membuka *rice-estate.* Pemerintah memilih Pulau Buru sebagai tempat untuk menampung tahanan politik golongan B, dengan pertimbangan politis. Pulau Buru letaknya jauh dari ibu kota yang sensitif politis. Luas areal yang dibangun mula-mula 100.000 ha, dan pada tahun 1974 diperluas menjadi 240.000 ha.

Pengiriman tahanan politik ke Pulau Buru dilakukan dalam beberapa tahap.Tahap pertama, mereka tiba di Pulau Buru pada tanggal 11 September 1969 sejumlah 850 orang. Selanjutnya pada tahun 1969–1970, sejumlah 2.500 orang. Masing-masing berasal dari Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tahap kedua, pada tahun 1970–1971, sejumlah 5.000 orang. Tahap berikutnya, pada tahun 1971–1972, sejumlah 2.500 orang. Dari jumlah tahanan politik tersebut, lima persennya pernah menempuh pendidikan tinggi, yang terdiri dari sastrawan, seniman, dan wartawan, antara lain Prof. D. Suprapto, S.H., Hasyim Rakhman, Karel Supit, Rivai Apin, Pramoedya Ananta Toer, dan Basuki Effendi. Pada tanggal 1 Oktober 1973, pemerintah menempuh kebijakan akan melepaskan para tahanan politik G-30-S/PKI dan mengizinkan keluarganya ikut ke Pulau Buru. Untuk meninjau persiapannya, Presiden memerintahkan Pangkopkamtib Jenderal

---

[102] Soegih Arto, *Sanul Daca,* 1989, hlm. 290

[103] *Ibid.*, 1989, hlm. 290–294

[104] Surat Keputusan Pangkopkamtib No. Kop-017/Kopkam/15/1/1969

Soemitro berangkat ke Pulau Buru. Pada tanggal 9 Oktober 1973, Pangkopkamtib bersama rombongan yang terdiri atas Staf Kopkamtib Tim Psikologi UI dipimpin oleh Prof. Dr. Fuad Hasan dan para wartawan senior (Rosihan Anwar, Muchtar Lubis, Jacob Oetama, dan Sabam Sirait). Di hadapan para tahanan politik, Sumitro menyatakan bahwa keberadaan mereka di Pulau Buru adalah konsekuensi dan risiko berpolitik. Dengan pertimbangan politik dan keamanan, rencana pembebasan para tahanan tertunda. Di samping keamanan di Ibu Kota, keamanan di Pulau Buru sendiri tidak kondusif. Ada kelompok-kelompok tahanan yang memanfaatkan Pulau Buru sebagai basis perjuangan. Ada tiga aliran di antara mereka, yaitu aliran *Tripanji*, aliran *Tripanji Baru*, dan aliran *Triwasiat*. Ketiga aliran tersebut sama-sama menekankan triwasiat, yaitu:

a. Cinta terhadap kelas buruh.
b. Meyakinkan kebaikan kolekivitisme.
c. Menanamkan keyakinan PKI akan *come back* dan dengan semboyan "Proyek Buru harus jadi basis revolusi, giat bekerja di kalangan musuh dan menimbulkan kontradiksi. Lebih baik jadi macan sehari daripada kambing seumur hidup."[105]

Oleh karena itu, pembebasan tahanan politik baru dimulai bulan Desember 1977 secara bertahap. Mereka dibebaskan tatkala Pangkopkamtib dijabat oleh Laksamana Sudomo. Sampai bulan Desember 1979, seluruh tahanan politik berjumlah 13.353 orang telah dibebaskan.[106] Dari jumlah tersebut 298 orang memilih tinggal di Pulau Buru.[107]

Pada tanggal 5 September 1988, Kopkamtib dibubarkan dengan pertimbangan terpeliharanya stabilitas nasional telah mantap. Sebagai penggantinya Presiden membentuk badan nonstruktural baru, yaitu Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas), yang bertugas dan berfungsi sebagai koordinator tugas-tugas departemen dalam rangka pemulihan dan pemantapan stabilitas nasional. Ketua Bakorstanas dijabat oleh Panglima Angkatan Bersenjata RI dan di daerah-daerah dibentuk Bakorstanas Daerah yang diketuai oleh para Panglima Daerah Militer (Pangdam).

---

[105] Soegih Arto, *Sanul Daca*, 1989, hlm. 295–298

[106] Saleh A. Djamhari, *Memoar Jenderal (Purn.) Soemitro Perjalanan Seorang Prajurit Pejuang Profesional*, 1998, hlm. 388

[107] I.G. Krisnadi, "Dampak G-30-S, Tahanan Politik Orde Baru di Pulau Buru" dalam *Sejarah*, No. 9, 2000, hlm. 47. Hasil penelitian Krisnadi jumlah tahanan yang dibebaskan 9.349 orang. Pembebasan bertahap, didasarkan Surat Keputusan Pangkopkamtib No. Skep: 025/Kopkam/XII/1977, didahului dengan sumpah setia kepada negara RI

7. Dwifungsi ABRI

Seminar Hankam yang dipimpin oleh Kepala Staf Hankam Mayor Jenderal M.M. Rachmat Kartakusuma yang berlangsung selama sembilan hari (12– 21 November 1966), menghasilkan dokumen penting, yaitu *Doktrin Pertahanan dan Keamanan Nasional* dan *Doktrin Perdjuangan ABRI Tjatur Dharma Eka Karma.* Ada tiga pokok isi doktrin ini yang meliputi landasan idiil, asas-asas, dan pedoman pelaksanaan. Dalam landasan idiil disebutkan bahwa Pancasila galian Bung Karno menjiwai revolusi Indonesia yang melahirkan kekuatan pertahanan keamanan nasional pada era revolusi yang berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat, Kepolisan Negara, dan kemudian menjadi ABRI. Oleh karena itu, ABRI sejak awalnya merupakan alat negara di bidang Hankam dan kekuatan sosial Revolusi Indonesia dengan Pancasila sebagai doktrinnya. Hakikat ABRI merupakan salah satu kekuatan sosial Revolusi Indonesia sekaligus menjadi Angkatan Bersenjata Revolusi, yang memiliki fungsi sosial yang melaksanakan tugas serta fungsi kekaryaan di bidang politik, sosial, ekonomi, ilmu, dan teknologi, serta Wawasan Nusantara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Bagian asas-asas, berisikan dua bagian utama yang menjelaskan makna Pertahanan Keamanan Nasional tugas serta fungsi ABRI dalam menghadapi hakikat ancaman, sengketa, dan strateginya.

Pada bagian kedua, dijelaskan tentang Doktrin Kekaryaan, yaitu doktrin perjuangan ABRI, sebagai golongan karya (Golkar), penegak demokrasi yang berjiwa Orde Baru yang secara konstitusional tercantum di dalam UUD 1945, dilaksanakan melalui kekaryaan yaitu semua kegiatan dilakukan di luar di bidang Hankam.[108] Pada tahun 1975, lahir Doktrin Kekaryaan, ABRI, sebagai doktrin pelaksanaan kegiatan-kegiatan kekaryaan ABRI. Dalam doktrin ini dinyatakan secara tegas istilah *dwifungsi* ABRI.[109] Sebagai kekuatan Hankam, ABRI merupakan aparatur pemerintah, dan sebagai kekuatan sosial ABRI merupakan salah satu unsur golongan karya yang ikut secara aktif dalam segala usaha dan kegiatan negara dan bangsa, ditinjau dari beberapa pendekatan (falsafah, politik, ekonomi, sejarah, dan pertahanan keamanan). Kehadiran dwifungsi ABRI di dalam sistem politik Indonesia merupakan suatu kenyataan dan kebenaran. Melalui kekaryaannya, ABRI secara aktif ikut serta dalam menentukan haluan dan politik negara. Kedua doktrin itulah yang dijadikan landasan pelaksanaan peran ABRI di bidang politik praktis, yang pelakunya disebut karyawan

---

[108] Staf Pertahanan dan Keamanan, *Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional dan Doktrin Perdjuangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Tjatur Darma Eka Karma*, 1967, hlm. 54–61

[109] Departemen Pertahanan Keamanan, *Doktrin Kekaryaan ABRI*, 1975, hlm. 3

ABRI. Sekalipun istilah dwifungsi ABRI baru dikenal pada masa Orde Baru, peran militer dalam politik telah diciptakan oleh Presiden Soekarno. Melalui Konsepsi Presiden pada Februari 1957, Angkatan Perang pada saat itu diposisikan sebagai salah satu golongan fungsional, bersama dengan golongan fungsional lainnya, bertujuan membangun kekuatan politik baru sebagai pengimbang kekuatan partai-partai politik. Sejak itu, ABRI mulai terlibat dalam aktivitas politik praktis.

Pada tahun 1966 terjadi perdebatan di DPR GR mengenai tiga Rancangan Undang-Undang (RUU tentang kepartaian, keormasan, dan kekaryaan, RUU tentang Pemilu dan RUU susunan MPR, DPR, dan DPRD), terutama yang berkaitan dengan imbangan kekuatan antara golongan politik dan golongan karya pada MPR dan jumlah anggota DPRD I dan DPRD II yang diangkat. Pada hakikatnya partai-partai politik belum rela menerima kehadiran ABRI sebagai kekuatan politik baru. Akhirnya, pada tanggal 22 November 1969 partai-partai politik menyetujui 20% anggota badan legislatif yang diangkat.[110] Persetujuan partai-partai politik ini sebagai pembuka kunci pelaksanaan fungsi kedua ABRI dalam politik praktis sebagai golongan karya pada badan legislatif. Fungsi kedua ABRI dalam badan legislatif berdasar atas konsep stabilisator dan dinamisator dalam kehidupan bangsa dan negara, yaitu memanfaatkan kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat dan memelopori modernisasi. Dalam pratiknya pelaksanaan tugas fungsi kedua (kekaryaan) ini menimbulkan berbagai ekses. Beberapa sebabnya adalah *pertama,* pejabat atau karyawan kurang memahami tugas pokoknya (*mission*). Mereka masih cenderung menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*) dalam segala bidang, *Kedua,* adanya ambisi pribadi dan kurang mampu bekerja sama dengan pihak lain. *Ketiga,* salah pilih personel, pimpinannya tidak menerapkan asas *the right man on the right place. Keempat,* jumlah karyawan ABRI yang ditempatkan di luar departemen Hankam demikian dominan sehingga lahir sindiran dan kecemburuan dari kalangan sipil sebagai usaha "penghijauan" yang menutup karier pejabat sipil.[111] Pada awal 1970 jumlah jabatan menteri/pimpinan lembaga tertinggi berjumlah 50 persen, jabatan eselon I 50 persen, jabatan gubernur 70 persen, bupati 50 persen, dan duta besar 45 persen. Pada tahun 1977, jabatan sipil yang diduduki oleh ABRI mencapai 53,5 persen.[112] Sampai tahun 1980 karyawan ABRI berjumlah

---

[110] Nugroho Notosusanto (ed.), *Pejuang dan Prajurit, dan Implementasi Dwifungsi ABRI*, 1984, hlm. 138

[111] Nugroho Notosusanto, *ibid.*, hlm. 281–285

[112] Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi*, 2002, hlm. 94

16.800 orang terdiri atas karyawan "bantuan" berjumlah 1.070 orang. Akibat ekses ini lahir sejumlah kritik baik yang disampaikan oleh para purnawirawan ABRI, para cendekiawan sipil, maupun politisi sipil. Pada rapat Pimpinan ABRI 1981, Kepala Staf Kekaryaan Letjen Charis Suhud menyatakan bahwa karyawan ABRI berjumlah 8.025 orang, dengan perincian 28 orang duta besar (dari 63 jabatan duta besar yang tersedia, 4 orang konsul jenderal (dari 10 jabatan yang tersedia), 18 orang gubernur (dari jabatan gubernur yang berjumlah 27), 130 orang bupati (dari 240 jabatan bupati), 14 orang sekretaris jenderal (dari 19 jabatan sekjen dan dirjen), 15 orang inspektur jenderal (dari 19 jabatan yang tersedia), 8 orang kepala lembaga (dari 18 jabatan yang tersedia), serta asisten menteri dan sekretaris menteri (dari 25 jabatan).[113]

Di antara para purnawirawan, sebagai pengkritik adalah Jenderal (Purn.) Soemitro. Ia mengimbau pimpinan ABRI mengenai pentingnya integrasi ABRI-rakyat. Integrasi tersebut hendaknya dikuti dengan program normalisasi dengan pengurangan secara bertahap keterlibatan ABRI dalam kehidupan politik praktis dan menegakkan disiplin politik dalam tubuh ABRI sendiri. Soemitro melihat bahwa keterlibatan ABRI di dalam politik praktis sebagai kondisi yang tidak normal (darurat) dan mengkonstatasi ABRI sebagai pemain tunggal.[114] Letnan Jenderal (Purn.) T.B. Simatupang menyoroti keterlibatan militer dalam soal-soal pemerintahan akan dapat menimbulkan tradisi kudeta silih berganti seperti di Amerika Latin. Secara tersirat Simatupang mengkritik peran ABRI yang terlalu jauh dalam rangka pembangunan nasional, akibatnya dapat terjadi tiga kemungkinan sebagaimana yang terjadi dalam sejarah militer dunia. *Pertama,* pembangunan berhasil, tetapi negara menjadi militerialistis dan fasis seperti militeristis yang terjadi di Jepang dan pada zaman pra-Perang Dunia II. *Kedua,* jika pembangunan gagal dan Angkatan Perang gagal, hasilnya adalah kekacauan dan revolusi seperti yang terjadi di Cina, pada pemerintahan Chiang Kai Shek (Koumintang) dan pada rezim Syah di Iran.[115] *Ketiga,* pembangunan berhasil dalam arti negara semakin maju dalam mencapai tujuan nasionalnya. ABRI dapat mencapai kemungkinan *ketiga,* jika ABRI menjadi faktor pendorong bukan penghambat. Simatupang juga berpendapat bahwa istilah dwifungsi juga tidak tepat untuk menyatakan peran ABRI di luar fungsinya, dan menyarankan agar secara berangsur-angsur ABRI mengurangi fungsinya sebagai stabilisator dan dinamisator sejalan dengan proses pendewasaan lembaga-lembaga politik, sosial,

---

[113] Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi*, 2002, hlm. 94–95

[114] Nugroho Notosusanto, *ibid.*, 1984, hlm. 321, Wawancara dengan Jenderal (Purn.) Soemitro, 11 September 1990

[115] Nugroho Notosusanto, *ibid.*, hlm. 323–324

ekonomi, dan kebudayaan.[116] Tidak berbeda dengan Jenderal Simatupang, Jenderal A.H. Nasution juga mengkritik penggunaan istilah dwifungsi, yang sebenarnya adalah dwi kesanggupan dan kemampuan ABRI, yang penggunaannya ditentukan oleh kebutuhan Republik dari masa ke masa[117] yang konsisten dengan konsep "jalan tengah" sebagaimana yang dikemukakannya pada tahun 1958.

Secara internal, terjadi kritik terhadap pelaksanaan dwifungsi ABRI, terutama setelah Jenderal Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden untuk periode 1978–1983. Para perwira senior Angkatan Darat memerhatikan pidato Presiden Soeharto di hadapan sidang MPR, Maret 1978, yang mereka nilai ditujukan kepada Angkatan Darat. Mereka kemudian berprakarsa untuk menyumbangkan pikiran agar dapat membantu menyukseskan tugas presiden dan mencari usaha untuk mencegah merosotnya citra TNI sehingga tetap akan menyinarkan kewibawaannya.[118]

F. Oposisi terhadap Orde Baru

Kelompok Petisi 50

Pada tanggal 9 Maret 1978, beberapa orang perwira senior Angkatan Darat menghadap KASAD Jenderal Widodo. Pada kesempatan itu Widodo melemparkan gagasan untuk membentuk lembaga studi sosial yang dapat menghasilkan konsep-konsep konstruktif tentang pelaksanaan dwifungsi ABRI. Gagasan ini langsung diterima oleh para hadirin yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan KASAD (Skep/29/V/1978) tanggal 26 Mei tentang Pembentukan Forum Studi dan Komunikasi (Fosko) Purnayuda. Beberapa orang Jenderal yang menjadi anggotanya, antara lain Letnan Jenderal G.P.H. Djatikusumo, Letnan Jenderal Soedirman, Letnan Jenderal A.J. Mokoginta, Letnan Jenderal Sukendro, Brigjen H.R. Dharsono, Mayor Jenderal Iskandar Ranuwiharjo, dan Sukanda Brata Menggala. Dari luar Angkatan Darat adalah Jenderal Hoegeng dari Polri dan Marsekal Soejitno Soekirno dari Angkatan Udara. Letjen Soegih Arto terpilih sebagai ketuanya. Fosko mengadakan rapat pertama yang dihadiri oleh 26 anggotanya, yang menghasilkan studi paper yang disampaikan melalui Kepala Staf Angkatan Darat. Namun, aktivitas Fosko dicurigai sebagai aksi menentang pemerintah dengan menyalahgunakan TNI AD. Pada tanggal 26 Mei 1979 Fosko dibubarkan. Pendapat Fosko yang utama adalah bahwa dwifungsi ABRI harus *mission oriented* bukan sekadar memberikan pekerjaan

[116] Nugroho Notosusanto (ed.), *ibid.*, hlm. 324

[117] Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi* , 2002, hlm. 89

[118] Soegih Arto, *Sanul Daca*, 1989, hlm. 320

anggota angkatan yang memerlukan. Peran ABRI dalam organisasi politik disarankan agar ABRI harus berdiri di atas segala-galanya, bukan hanya milik dari satu golongan saja, yaitu Golongan Karya.[119]

Pada waktu ada Fosko, saran dan pendapat Fosko selalu dilaporkan kepada pemerintah, melalui ketuanya Letjen Soegih Arto. Setelah Fosko dibubarkan, pada 20 Februari 1980, lahir sebuah petisi tentang pemilikan pemilihan umum, yang ditandatangani oleh sejumlah perwira senior (purnawirawan) ABRI, politisi sipil, tokoh-tokoh masyarakat, dan cendekiawan. Di antara mereka adalah A.H. Nasution, Ali Sadikin, Azis Saleh, Hoegeng, dan sebagian besar adalah tokoh-tokoh sipil, antara lain, M. Natsir, Anwar Haryono, K.H. A. Syaichu, S.K. Trimurti, Manai Sophiaan, Soebadio Sastrosatomo, Prof. Dr. Ismail Suny, K.H. M. Thahir Rahily, Ir. Slamet Bratanata, dan Drs. A.M. Fatwa yang berjumlah 25 orang, Anggota *Petisi* ini sejak Januari 1981 jumlahnya bertambah. Akhirnya, pada 5 Mei 1980, mereka menyampaikan pernyataan (petisi) yang berjudul *Pernyataan Keprihatinan,* yang ditandatangani oleh 50 tokoh. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai *Kelompok Petisi* yang melakukan oposisi terhadap pemerintah. Isi petisi ini mengkritik Presiden telah melakukan kesalahan penafsiran terhadap Pancasila, dengan berlaku seolah-olah dirinya (Soeharto) sebagai perwujudan dari Pancasila. Sasaran kritik terhadap dwifungsi ABRI bukan pada konsep dwifungsi, melainkan pelaksanaannya. Opini mereka adalah bahwa ABRI bukan lagi milik rakyat, ABRI telah berpisah dengan rakyat. Dalam perkembangannya ketidaksepahaman Presiden dengan pihak-pihak pengkritiknya menjadikan Presiden Soeharto tidak nyaman. Sementara itu, di kampus pun mulai marak dengan demonstrasi yang mengkritik tentang adanya korupsi dalam pemerintahan. Pada tahun 1979, Ketua Dewan Mahasiswa ITB Herry Achmadi di penjara selama dua tahun karena dituduh melakukan penghinaan terhadap presiden, DPR, dan MPR.[120] Pada Februari 1984 terjadi aksi *walk-out* di DPR yang dilakukan oleh unsur NU dan PPP pada saat pembahasan tentang RUU Pemilu.

Antara NU dan PPP tidak terdapat kesepakatan sehubungan dengan daftar calon anggota legislatif. Panitia pemilu menyatakan bahwa daftar calon versi NU dianggap tidak sah. Daftar yang dinyatakan terjadi karena posisi NU sebagai organisasi oposisi terhadap pemerintah.

Karena peran politiknya terhambat, antusiasme NU terhadap partai politik semakin memudar dengan cepat seiring dengan ketatnya kontrol pemerintah terhadap kelompok politik yang berseberangan.

---

[119] Soegih Arto, *ibid.*, 989

[120] M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2004,* Jakarta, 2005, hlm. 820

Presiden Soeharto menanggapi bahwa gagasan tentang oposisi yang kuat dan menetap dapat menimbulkan instabilitas yang berkelanjutan. Presiden menyatakan bahwa oposisi seperti di Barat dalam arti menentang dan berbeda tidak dikenal di negara Indonesia. Walaupun demikian, pada kenyataannya keberadaannya tidak berlangsung lama dan tidak memberikan dampak politik yang besar. Masalah yang diperdebatkan terlalu sulit dimengerti dan jauh dari kepentingan langsung sebagian besar rakyat Indonesia. Debat-debatnya pun dilakukan dalam tingkat eselon yang tinggi sehingga kecil kemungkinannya dapat memicu kemarahan dari publik.

Selanjutnya, para penanda tangan petisi itu dikenakan pembatasan-pembatasan atas kegiatan-kegiatan mereka, termasuk pemberhentian pemberian kredit, pelarangan kontak-kontak dengan pemerintah, hak bepergian keluar negeri dan pencoretan dari daftar undangan untuk hilangnya nama mereka dari daftar undangan perayaan Hari Kemerdekaan di Istana Negara. Sidang terhadap perkembangan kritik-kritik melawan demonstrasi kampus-kampus pemerintah menghapuskan dewan mahasiswa hasil pemilihan dan menggantikannya dengan badan-badan yang mewakili administrasi kampus. Cara tersebut dimaksudkan untuk menghambat aktivisme kampus.

G. Politik Luar Negeri Republik Indonesia

1. Pelaksanaan Politik Bebas dan Aktif

Dalam bidang politik luar negeri, penyelewengan terhadap politik bebas-aktif telah terjadi dengan dicetuskannya Manifesto Politik Republik Indonesia. Untuk menghindari terulangnya kembali pengalaman pahit masa lampau itu, tugas dan kewajiban politik luar negeri Orde Baru adalah mengoreksi semua penyelewengan pada masa Demokrasi Terpimpin. Berdasarkan kenyataan itu, MPRS (kemudian MPR) sebagai lembaga kenegaraan tertinggi telah menegaskan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia. Dengan demikian, setelah lahirnya Orde Baru, pemerintah (Departemen Luar Negeri) telah mempunyai pedoman yang konkret dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Landasan politik luar negeri Orde Baru adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Penegasan kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia.[121]

[121] Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966

2. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.[122]
3. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan.[123]
4. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.[124]

Menurut rumusan yang telah ditetapkan MPRS, politik luar negeri Republik Indonesia secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu dititikberatkan kepada pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, serta penegasan kebenaran dan keadilan, sebagai pencerminan dari kehendak hati nurani rakyat.

Sesuai dengan kepentingan nasional, politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif tidak dibenarkan memihak pada salah satu blok ideologi yang ada. Politik bebas dan aktif bukanlah politik yang netral, melainkan suatu politik luar negeri yang tidak mengikat diri pada salah satu blok ataupun pakta militer. Tujuannya ialah mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Dalam mempertahankan kebebasan itu, sifat aktif politik luar negeri tersebut mengharuskan Indonesia aktif berjuang membantu bangsa-bangsa terjajah untuk menghapuskan imperialisme dan kolonialisme demi tercapainya perdamaian dunia, dengan berpedoman pada semangat dan prinsip-prinsip Dasasila Bandung. Sifat politik luar negeri Indonesia adalah anti-kolonialisme dan anti-imperialisme karena kedua ideologi tersebut secara prinsipiil bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia bukanlah bersifat isolasionis di satu pihak ataupun ekspansionis di lain pihak.[125]

Sejak tahun 1967, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif telah diterapkan secara konkret dalam menanggapi masalah-masalah internasional yang timbul, seperti masalah Vietnam, Timur Tengah, dan lain-lain. Menteri Luar Negeri Adam Malik menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dituntut oleh realitas yang ada di dunia luar.[126] Sikap pemerintah Indonesia telah memperoleh pengertian positif dari dunia luar.[127] Pengertian

---

[122] Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966
[123] Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1968
[124] Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1973
[125] C.S.T. Kansil, S.H. dan Drs. Rudy T. Erwin, S.H., *Kitab Himpunan Hasil Karya MPRS*, 1970, hlm. 133
[126] Michael Leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia*, 1989, hlm. 165
[127] Departemen Penerangan, *Pidato Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna 12 Desember 1967*, hlm. 11

dan kepercayaan luar negeri terhadap kebijakan Kabinet Ampera, telah digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional, antara lain berbentuk pemberian kredit, *grant*, dan penangguhan pembayaran utang (*rescheduling*).[128] Negara-negara Blok Barat pada umumnya menyetujui penangguhan utang-utang Indonesia yang dibuat selama masa Orde Lama, bahkan bersedia memberikan bantuan baru yang diperlukan untuk membangun kembali perekonomian Indonesia. Dengan negara-negara Blok Timur hanya dapat dicapai persetujuan mengenai penangguhan utang-utang. Untuk mendapatkan kredit-kredit baru tidak mungkin (kecuali dari Yugoslavia) karena adanya pertimbangan politik sehubungan dengan penumpasan pemberontakan G-30-S/PKI.

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan bantuan keuangan dari luar negeri untuk menunjang pembiayaan pembangunannya, khususnya di bidang ekonomi. Menteri Luar Negeri Adam Malik menjelaskan bahwa untuk Repelita II di bidang luar negeri, pembangunan ekonomi Indonesia mencapai dua sasaran pokok sekaligus. *Pertama,* memaksimalkan pemanfaatan segenap fasilitas yang tersedia di luar negeri guna meningkatkan dan menyukseskan usaha pembangunan nasional, tanpa mengakibatkan ketergantungan Indonesia pada suatu pihak. *Kedua,* menciptakan suatu iklim internasional yang menguntungkan dan dapat mengamankan usaha-usaha pembangunan nasional.[129]

Untuk mencapai kedua sasaran pokok tersebut, usaha-usaha utama yang perlu dilakukan adalah memperkuat kerja sama regional, memperbesar keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara, kerja sama dengan semua negara di dunia untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional, serta kerja sama dengan negara-negara berkembang untuk memperjuangkan kepentingan bersama, terutama kepentingan ekonomi.[130] Oleh karena itu, pemerintah memulihkan kembali peran perwakilan-perwakilan RI secara wajar dalam bentuk percaturan politik internasional dan menggunakan sebaik-baiknya peluang yang ada untuk kepentingan nasional.

Sesuai dengan strategi nasional dalam subbidang luar negeri, pemerintah berusaha memperbaiki hubungan Indonesia dengan luar negeri yang terputus atau beku akibat politik konfrontasi. Selama pemerintah Demokrasi Terpimpin, kebijakan politik luar negeri lebih condong berhubungan dengan negara-negara sosialis atau negara-negara yang termasuk golongan *The New Emerging Forces* (*Nefos*). Akan tetapi, dengan

---

[128] *Ibid.*

[129] *Berita Yudha,* 14 Februari 1974

[130] Departemen Luar Negeri, *Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru*, 1977, hlm. 3

lahirnya Orde Baru (1966), kebijakan yang membatasi ruang gerak Indonesia di forum internasional itu dievaluasi, sesuai dengan tuntutan dan tujuan Undang-Undang Dasar 1945.

Karena politik konfrontasi (terhadap Malaysia, Singapura, dan Inggris) tidak sesuai dengan dasar politik bebas dan aktif, politik konfrontasi pun diakhiri, dan kemudian diganti dengan politik bertetangga dan bersahabat baik serta hidup berdampingan secara damai yang saling menguntungkan. Dalam hal ini pemerintah berpegang teguh pada ketetapan dan Nota Politik MPRS tahun 1966 dan 1968 tentang Politik Luar Negeri berdasarkan Pancasila.

Konfrontasi dengan Malaysia berakhir setelah tercapainya Persetujuan Bangkok, pada tanggal 29 Mei–1 Juni 1966 antara Wakil Perdana Menteri/ Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak dan Menteri Utama/ Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik. Pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta ditandatangani persetujuan untuk menormalisasi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Sejak 31 Agustus 1967, kedua pemerintah telah membuka hubungan diplomatik pada tingkat kedutaan besar.[131]

Selanjutnya, pada tanggal 2 Juni 1966, Republik Indonesia dengan resmi mengakui Republik Singapura.[132] Pengakuan itu selanjutnya disusul dengan pelaksanaan hubungan diplomatik yang ditandatangani pada tanggal 7 September 1967 oleh kedua Menteri Luar Negeri.[133] Sebaliknya, hubungan dengan RRC dan Kuba sebagai akibat peristiwa G-30-S/PKI masih mengalami ketegangan. Hubungan diplomatik RI-RRC kemudian pada tanggal 30 Oktober 1967 dibekukan, dan KBRI di Peking ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan.

Berakhirnya politik konfrontasi juga berarti putusnya poros Jakarta-Pnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang (Beijing). Oleh karena itu, hubungan dengan Uni Sovyet dan negara-negara sosialis lainnya diarahkan untuk mengusahakan terciptanya pengertian baik dengan negara-negara tersebut.

Mengingat kepentingan nasional makin mendesak, Indonesia merasa perlu secara aktif mengambil bagian dalam kegiatan badan-badan internasional. Panitia Musyawarah DPR GR mengadakan rapat pada tanggal 13 Juni 1966 untuk membahas resolusi anggota DPR GR Komisi C (Hankam–Luar Negeri), H. Mhd. Thoha Ma'ruf dkk. Resolusi tersebut mendesak kepada pemerintah supaya Indonesia masuk kembali menjadi

---

[131] *Pelopor Baru*, 31 Agustus 1967

[132] *Ibid.*, 6 September 1966

[133] *Ibid.*, 7 September 1967

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelum persidangan umum badan dunia itu dimulai pada tahun 1966. Sebagai dasar pertimbangan disebutkan bahwa selama menjadi anggota badan dunia itu sejak 1950–1964, Indonesia telah memperoleh banyak manfaatnya.[134] Setelah meninggalkan PBB sejak 1 Januari 1965, Indonesia kembali aktif di PBB pada tanggal 28 September 1966.[135] Tindakan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai negara, seperti Aljazair, Jepang, Filipina, Pakistan, RPA (Mesir), dan Muang Thai.

Di samping itu, Indonesia juga berusaha memulihkan kembali hubungannya dengan negara-negara lain yang karena kebijakan politik luar negeri era Demokrasi Terpimpin telah menjadi renggang. Misalnya dengan India, Filipina, Muang Thai (Thailand), Australia, dan negara-negara *non-aligned* di Asia, Afrika, dan Eropa. Dalam organisasi-organisasi internasional yang bersifat "non-governmental" khususnya dalam rangka solidaritas Asia-Afrika seperti OISRAA, AA, PWAA, Indonesia berusaha mengadakan pemurnian dalam asas-asas dan tujuan organisasi-organisasi tersebut baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.

2. Kerja Sama Regional: ASEAN

Menjelang berakhirnya konfrontasi pada tahun 1966, pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara makin merasakan perlunya membentuk suatu kerja sama regional untuk memperkuat kedudukan dan kestabilan sosial-ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, pada tanggal 5–8 Agustus 1967 di Bangkok dilangsungkan pertemuan Menteri Luar Negeri dari lima negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Muang Thai. Dalam pertemuan itu, tiap-tiap negara mengirim delegasinya. Pemimpin delegasi tiap-tiap negara itu adalah Adam Malik (Menteri Utama Urusan Politik/ Menteri Luar Negeri RI), Tun Abdul Razak (Wakil Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia), S. Rajaratman (Menteri Luar Negeri Singapura), Narciso Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina), dan Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Muang Thai). Sebagai hasil pertemuan pada tanggal 8 Agustus 1967 itu ditandatangani suatu deklarasi yang diberi nama *Bangkok Declaration,* yang merupakan persetujuan kebulatan tekad kelima negara itu untuk membentuk sebuah organisasi kerja sama regional yang disebut *Association of South East Asian Nations* (ASEAN).[136]

---

[134] *Pelopor Baru,* 14 Juni 1966

[135] H. Roeslan Abdulgani, *25 Tahun Indonesia-PBB,* 1971, hlm. 14

[136] *Berita Yudha,* 9 Agustus 1967

Bergabungnya Indonesia dengan ASEAN tidak berarti telah menyeleweng dari kebijakan politik bebas dan aktif. ASEAN bukan merupakan suatu pakta militer seperti SEATO.[137] ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, stabilitas sosial-budaya dan kesatuan regional melalui usaha dengan semangat tanggung jawab bersama dan persahabatan, yang akan menjamin bebasnya kemerdekaan negara-negara anggotanya. Pilihan kerja sama dalam bidang ekonomi disebabkan unsur persamaan yang lebih dominan dibanding unsur lain yang bersifat politik dan militer.

Dengan berdirinya ASEAN diharapkan negara-negara anggotanya dapat membentuk suatu pandangan politik yang sama atau setidak-tidaknya paralel dalam menanggapi persoalan-persoalan di dalam maupun di luar negeri, tanpa mengikatkan diri dalam suatu pakta militer. Hal ini tidak berarti kerja sama di bidang politik atau militer di antara negara anggota ASEAN tersisihkan atau tidak dianggap penting.

Meskipun ASEAN bukan blok kekuatan politik, atau suatu persekutuan militer atau pengelompokan keamanan,[138] organisasi regional itu tidak menghalangi suatu bentuk kerja sama bilateral di antara anggotanya, sekalipun dalam rangka *military cooperation*. Contohnya, Malaysia dan Muang Thai bekerja sama dalam usaha penumpasan gerombolan komunis di sepanjang perbatasan kedua negara. Begitu juga Indonesia dan Malaysia, mengadakan kerja sama militer di perbatasan Kalimantan, dan antara Indonesia dan Filipina terdapat pula suatu perjanjian "joint patrol" di laut.[139]

Deklarasi Bangkok dengan tegas menyebutkan bahwa pangkalan militer asing yang berada di negara anggota ASEAN hanya bersifat sementara dan keberadaannya atas persetujuan negara yang bersangkutan.

Sebagai organisasi regional yang baru tumbuh, ASEAN tidak luput dari berbagai cobaan berat yang berasal dari masalah intraregional, antara lain masalah Sabah antara Malaysia dan Filipina, persoalan hukuman mati dua orang anggota marinir Indonesia di Singapura, kerusuhan rasialis di Malaysia, dan masalah minoritas muslim di perbatasan Muang Thai-Malaysia. Sengketa mengenai Sabah sangat serius dan mengkhawatirkan, yang berakhir dengan putusnya hubungan diplomatik Malaysia dan Filipina. Guna tetap memelihara keutuhan ASEAN, Indonesia berusaha keras untuk menengahi sehingga masalah sengketa politik yang sensitif itu dapat diatasi.

---

[137] *Harian Angkatan Bersendjata*, 12 Agustus 1967

[138] *Berita Yudha*, 14 Agustus 1967

[139] Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, 1977, hlm. 331

Dalam perkembangannya, ASEAN banyak bergiat dalam bidang politik. Akan tetapi, yang paling menonjol adalah produk *Deklarasi Kuala Lumpur* 27 November 1971, yang berisi pernyataan kelima menteri luar negeri ASEAN mengenai Asia Tenggara sebagai *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (ZOPFAN), bebas dari segala bentuk campur tangan pihak luar. Dalam KTT ASEAN pertama di Bali pada tahun 1976, masalah Asia Tenggara sebagai daerah damai, bebas, dan netral, telah berhasil dicantumkan dalam "Deklarasi Kesepakatan ASEAN" dan diterima sebagai program kegiatan kerangka kerja sama ASEAN.[140]

Usaha memperkuat ASEAN pada mulanya berjalan lamban karena kerja sama regional itu merupakan soal yang baru. Sikap sinisme dan keraguraguan terhadap ASEAN tidak hanya dari negara-negara luar, tetapi juga dari kalangan intraregional sendiri. Sekalipun Indonesia dan Malaysia telah menunjukkan perhatian besar kepada kegiatan-kegiatan ASEAN sejak berdirinya, Muang Thai dan Filipina masih meragukan keberhasilan organisasi ini. Begitu juga Singapura, yang mula-mula memperlihatkan sikap kurang antusias terhadap ASEAN. Kiranya masih diperlukan waktu cukup lama untuk memadukan kepentingan nasional anggotanya dengan kepentingan regional keseluruhan.[141] Periode orientasi ini berlangsung dari tahun 1967 sampai 1969.

Selama periode orientasi itu negara-negara lain menyoroti secara cermat dasar, tujuan, kemampuan, dan hasil-hasil ASEAN. Negara-negara sosialis seperti RRC, menganggap ASEAN sebagai rencana "pemerintah fasis Indonesia" yang mau membentuk suatu perserikatan "Anti-Cina dan anti-komunis yang didalangi Amerika Serikat". Uni Sovyet menganjurkan untuk membentuk *Asian Collective Security System* sebagai pengganti ASEAN. Begitu juga Jepang, yang meragukan kehidupan organisasi kerja sama regional itu, dan meramalkan akan ambruk dalam waktu singkat. Akan tetapi, negara-negara Barat (khususnya Amerika Serikat) sangat menyambut baik berdirinya ASEAN.[142] Sikap sinisme dan keragu-raguan terhadap ASEAN dari kalangan intraregional kemudian lambat laun menghilang setelah melihat bukti-bukti keberhasilan ASEAN.

Dalam proses perkembangannya, tahun 1969–1974 merupakan tahap konsolidasi bagi ASEAN. Rasa solidaritas telah timbul pada setiap negara anggota, dan mulai tumbuh keyakinan bahwa tegak jatuhnya organisasi regional itu mempunyai pengaruh imbal balik atas maju mundurnya anggota di dalamnya. ASEAN telah mendapat pengakuan dari negara luar sebagai

---

[140] Sekretariat Negara, *Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, Bali 23–25 Februari 1976*, hlm. 42

[141] Departemen Luar Negeri, *Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru*, hlm. 4

[142] Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, hlm. 6

suatu kekuatan organisasi regional Asia Tenggara, yang telah tumbuh menjadi suatu kekuatan ekonomi yang mendapat tempat di wilayah Pasifik dan kelompok ekonomi lainnya di dunia, seperti Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan Jepang.

Dalam bidang sosial-budaya, ASEAN telah mencapai kemajuan yang cukup besar artinya. Melalui berbagai proyek telah diusahakan untuk memasyarakatkan ASEAN, terutama yang menyangkut kalangan remaja, seniman, dan cendekiawan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, telah dibentuk suatu Panitia Tetap Sosial-Budaya pada tahun 1972. Proses konsolidasi di bidang ekonomi sosial-budaya telah memberikan pengaruh positif terhadap timbulnya dialog dan kerja sama multilateral yang terarah di luar ASEAN.

Misalnya, dalam bidang diplomatik di PBB ketika menghadapi keanggotaan RRC pada badan dunia itu. Begitu juga kerja sama politik di antara negara ASEAN sendiri, yang telah mencapai kata sepakat, dan menghasilkan Deklarasi Kuala Lumpur 1971, untuk menjadikan wilayah Asia Tenggara suatu daerah damai, bebas, dan netral.[143] Dengan demikian, kerja sama ASEAN secara formal telah diperluas ke dalam bidang politik, di samping kerja sama ekonomi dan sosial-budaya. Pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ketujuh di Jakarta 9 Mei 1974, Presiden Soeharto menyatakan bahwa ASEAN merupakan kelompok regional murni yang tidak mengabdi kepada kepentingan kekuatan asing, juga tidak menjalankan politik memusuhi kekuatan asing. ASEAN sebuah organisasi regional asli yang mengemban kepentingan regional.[144]

Begitu juga dalam perkembangan organisasi telah mengalami kemajuan besar. Dalam KTT pertama di Bali pada bulan Februari 1976, telah berhasil direalisasi pembentukan Sekretariat Tetap ASEAN. Sekretariat ASEAN tersebut telah disepakati berkedudukan di Jakarta dan sebagai Sekretaris Jenderal pertama ditetapkan Letjen H.R. Dharsono (Sekretaris Jenderal Nasional ASEAN Indonesia). Ia resmi disahkan sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN pada sidang tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada tanggal 7 Juni 1976,[145] untuk jabatan dua tahun.[146] Akan tetapi, karena persoalan politik dalam negeri Indonesia, H.R. Dharsono ditarik kembali sebelum berakhir jabatannya. Untuk melanjutkan sisa jabatannya yang masih ada, pemerintah Indonesia kemudian menunjuk Umarjadi Njotowijono sebagai penggantinya. Sementara struktur baru belum tersusun,

---

[143] *Harian Angkatan Bersendjata,* 29 November 1971

[144] Adam Malik, *Mengabdi Republik*, jilid II, 1979, hlm. 86–87

[145] *Kompas,* 1 Juli 1976

[146] Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, 1977, hlm. 17

struktur lama masih dipakai terus. Struktur tersebut yang merupakan aparat pelaksana Deklarasi ASEAN pada pokoknya terdiri atas:

1. Sidang tahunan para menteri-menteri luar negeri (*ASEAN Ministerial Meeting*) yang diadakan di negara anggota secara bergilir;
2. *Standing Committee* diketuai oleh Menteri Luar Negeri Tuan Rumah. Tugasnya melanjutkan pekerjaan ASEAN dalam jangka waktu di antara sidang-sidang tahunan para menteri luar negeri ASEAN;
3. *Permanent Committee* dan panitia-panitia *ad-hoc*, beranggotakan para tenaga ahli serta pejabat pemerintah negara-negara anggota ASEAN;
4. Sekretariat Nasional ASEAN masing-masing negara anggota ditugasi menyelenggarakan pekerjaan ASEAN atas nama negara-negara yang bersangkutan.[147]

Untuk memberi landasan yang lebih kuat bagi terciptanya perjuangan antara anggota ASEAN dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dan regional, dirasa perlu untuk mengadakan pertemuan kepala-kepala pemerintahan negara-negara ASEAN. KTT ASEAN pertama diselenggarakan pada tanggal 23–24 Februari 1976 di Bali. KTT ASEAN pertama telah berakhir dengan sukses serta menghasilkan empat dokumen yang merupakan tonggak sejarah bagi ASEAN, yakni:

1. Deklarasi Kesepakatan ASEAN *(Declaration of Asean Concord);*[148]
2. Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*);[149]
3. Persetujuan Mengenai Pembentukan Sekretariat ASEAN (*Agreement on the Establishment of the Asean Secretariat*);[150]
4. Komunike Pers Bersama *(Joint Press Communique)*.[151]

Dengan lahirnya keempat dokumen tersebut, benar-benar tercermin keinginan negara-negara anggota ASEAN mengenai kawasan Asia Tenggara sebagai daerah damai, bebas, dan netral. Tercermin pula keinginan yang sungguh-sungguh agar negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Sovyet, RRC, dan Jepang bersedia menghormatinya.

KTT ASEAN di Bali 1977 telah memperkuat Deklarasi Kuala Lumpur 1971, dan telah pula menetapkan prinsip-prinsip program kerja dalam usaha

---

[147] Departemen Luar Negeri, *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945–1970,* hlm. 328

[148] *State Secretariat, ASEAN Summit Meeting, Bali, 23–25 February 1976,* hlm. 39

[149] *State Sccretariat, op. cit.,* hlm. 45

[150] *Ibid.,* hlm. 51

[151] *Ibid.,* hlm. 71

bersama untuk menciptakan stabilitas politik, serta mempererat kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan kata lain, KTT Bali telah menghasilkan persetujuan yang merupakan pengakuan terhadap Deklarasi Kuala Lumpur. KTT Bali telah berhasil menetapkan cara-cara yang lebih konkret dan terperinci dalam usaha-usaha kerja sama regional ASEAN.

Sebagai tindak lanjut KTT ASEAN pertama di Bali, diadakan sidang menteri-menteri ekonomi ASEAN di Kuala Lumpur pada tanggal 8–9 Maret 1976 untuk melaksanakan keputusan-keputusan KTT ASEAN di bidang kerja sama ekonomi. Dalam sidang tersebut telah disetujui asas bantu-membantu antara negara-negara anggota ASEAN dalam hal pangan dan energi, terutama dalam soal pengadaan dan produksinya. Sidang itu juga telah berhasil memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang pangan dan energi, yang bertujuan membebaskan wilayah ASEAN dalam kemungkinan timbulnya gangguan krisis pangan dan energi seperti yang pernah dialami sebelumnya.

Dalam bidang industri telah disetujui kerja sama pembangunan lima proyek bersama di negara anggota ASEAN. Proyek-proyek tersebut tidak dibangun sebagai proyek ASEAN, tetapi proyek nasional masing-masing negara anggota, dengan pengertian tetap diadakan koordinasi antara satu sama lain. Dalam bidang perdagangan telah disepakati untuk mengambil langkah-langkah bersama guna mengadakan dialog dengan negara-negara Australia, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Timur Tengah, negara-negara Eropa Timur, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan kelompok-kelompok negara lain. Di samping itu, telah disepakati pula untuk mengadakan pendekatan bersama antara negara anggota ASEAN mengenai masalah-masalah ekonomi dunia dalam badan-badan PBB, UNCTAD, Konferensi Paris, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia.

Pembentukan ASEAN pada Agustus 1967, menandakan pula bahwa pemerintah Orde Baru telah menetapkan proses rehabilitasi internasional dalam rel yang tepat.[152]

3. Memelihara Keamanan dan Stabilitas Asia Tenggara

Bersamaan dengan usaha stabilisasi di dalam negeri, pemerintah Indonesia juga berusaha mengisi politik luar negerinya. Politik bebas dan aktif telah diisi dengan politik bertetangga baik, hidup berdampingan secara damai, dan bekerja sama saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga.

---

[152] Michael Leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia*, 1989, hlm. 168–169, 186

Pembentukan kerja sama regional di Asia Tenggara (1967) merupakan suatu usaha konkret untuk menciptakan perikehidupan yang mantap dan aman dalam berbagai bidang. Akan tetapi, Indonesia menyadari kenyataan, kerja sama regional itu tidak akan berhasil meningkatkan kemakmuran nasional dan regional bangsa-bangsa di Asia Tenggara dengan sebaik-baiknya tanpa ada keamanan dan stabilisasi di kawasan tersebut. Itulah sebabnya Indonesia senantiasa berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indo-Cina. Oleh karena Indonesia berpendapat bahwa penyelesaian masalah Indo-Cina secara keseluruhan dan Vietnam khususnya sangat penting artinya dalam rangka pemeliharaan keamanan dan menciptakan stabilisasi di Asia Tenggara.

Dalam rangka usaha mencegah makin meluasnya perang Vietnam, Indonesia telah mengambil inisiatif menyelenggarakan konferensi penyelesaian pertikaian Kamboja. Konferensi itu diselenggarakan pada tanggal 15–17 Mei 1970 di Jakarta dan dihadiri oleh 11 negara, yaitu Laos, Vietnam Selatan, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Muang Thai, Malaysia, Singapura, Australia, dan Selandia Baru. Konferensi tersebut mengajukan suatu saran yang berguna bagi penyelesaian masalah Kamboja.[153] Tidak berhasilnya saran-saran itu dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa adalah di luar kemampuan Indonesia. Yang jelas Indonesia telah berusaha menyumbangkan jasa-jasa baiknya untuk mengurangi ketegangan-ketegangan dan konflik-konflik bersenjata di Asia Tenggara.

Indonesia berpendapat, negara-negara di Asia Tenggaralah yang paling berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan serta ketenteraman di wilayahnya. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di Asia Tenggara harus mencegah dan menghalau setiap campur tangan asing yang negatif dalam segala bentuk dan manifestasinya.[154] Dalam Deklarasi Kuala Lumpur tanggal 27 November 1971, kelima negara anggota ASEAN telah sepakat menyatakan Asia Tenggara sebagai daerah damai, bebas, dan netral. Bebas dari segala bentuk campur tangan pihak luar.[155]

Netralisasi Asia Tenggara yang belum tercapai disebabkan masih adanya pertentangan dan campur tangan asing terhadap masalah-masalah dalam negeri negara-negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Adam Malik pada tanggal 22 Oktober 1973 di Kuala Lumpur

---

[153] Departemen Luar Negeri, *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945–1970,* hlm. 157

[154] Departemen Penerangan, *Pidato Presiden Soeharto di Depan Foreign Correspondents Club (Perkumpulan Wartawan-wartawan Asing) di Tokyo pada 30 Maret 1968,* hlm. 13

[155] *Harian Angkatan Bersendjata,* 29 November 1971

menyatakan, negara-negara Asia Tenggara harus bertindak secara kolektif menghadapi pertarungan kepentingan yang saling berbeda dari empat negara besar Amerika Serikat, Uni Sovyet, Republik Rakyat Cina, dan Jepang yang hadir secara politik dan fisik di kawasan Asia Tenggara.[156]

Sesuai dengan sifat politik bebas dan aktif, Indonesia tidak menghendaki adanya pakta militer atau pangkalan-pangkalan militer asing di Asia Tenggara. Kehadiran pangkalan militer asing di Asia Tenggara lebih banyak menimbulkan ketegangan dan konflik-konflik bersenjata daripada membawa perdamaian, serta tidak sesuai dengan prinsip hidup berdampingan secara damai. Akan tetapi, dalam masalah ini Indonesia cukup realistis untuk menerima alasan dari negara-negara tetangganya. Pangkalan-pangkalan militer asing tersebut adalah bersifat sementara, pada suatu saat kemudian akan dihapuskan.[157] Masalah tersebut telah disepakati bersama oleh negara-negara anggota ASEAN sebagaimana yang dicantumkan dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967.

Dengan tercapainya Persetujuan Paris pada tanggal 23 Januari 1973, Republik Demokrasi Vietnam dan Amerika Serikat secara resmi telah meminta Indonesia untuk ikut serta dalam *International Commision for Control and Supervision* (ICCS), yakni suatu komisi pengawasan gencatan senjata di Vietnam Selatan. ICCS yang terdiri dari empat negara: Polandia, Hongaria, Indonesia, dan Kanada (Kanada kemudian menarik diri dan diganti oleh Iran).

Pihak yang bersengketa menganggap Indonesia sangat penting untuk diikutsertakan dalam usaha mencari penyelesaian konflik tersebut karena Indonesia adalah negara besar dan berpengaruh dalam percaturan politik di Asia Tenggara.

Untuk melaksanakan partisipasi dalam ICCS itu, Indonesia sejak Januari 1973 hingga April 1975 telah mengirimkan tiga kali misi perdamaian secara bergantian. Misi tersebut adalah kontingen Indonesia Garuda IV, V, dan VII dengan komandan pasukannya masing-masing Brigjen TNI Wijogo, Brigjen TNI Harsojo, dan Brigjen TNI Soekemi Soemantri. Sebagai ketua Delegasi/Pimpinan Misi Garuda adalah Letjen TNI H.R. Dharsono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Khmer.[158]

Dalam melaksanakan tugasnya, ICCS mengalami banyak kesulitan karena dalam persetujuan Paris mengenai perdamaian di Vietnam itu banyak terdapat pasal-pasal yang saling bertentangan. Pada tanggal 27 April

---

[156] *Antara,* 24 Oktober 1973

[157] Departemen Penerangan, *op. cit.*, 1968, hlm. 14

[158] *Suara Karya*, 29 Januari 1973

1975 pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanggil kembali pulang ke Indonesia semua anggota Kontingen Garuda VII dalam ICCS di Saigon. Kebijakan itu berdasarkan pertimbangan keamanan dan keselamatan para anggota Garuda, tetapi tidak berarti Indonesia keluar dari ICCS. Perkembangan di Vietnam memperlihatkan akhirnya golongan komunis yang memperoleh kemenangan.[159] Indonesia dan negara-negara ASEAN menyambut baik pemulihan kembali perdamaian di Indo-Cina.

Dengan pengunduran diri Amerika Serikat dari Indo-Cina setelah jatuhnya Vietnam Selatan, banyak negara yang mengkhawatirkan Uni Sovyet akan mengisi kekosongan itu. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa pembangunan kekuatan militer Uni Sovyet harus dihadapi dengan pembangunan kekuatan militer dari Amerika Serikat supaya ada perimbangan kekuatan untuk menjaga perdamaian di Asia.

Indonesia berpendapat lain, yakni bahwa kekosongan itu dapat diisi oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara sendiri. Keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara dapat dipelihara jika terdapat hubungan baik antara semua bangsa-bangsa di kawasan itu.[160] Hubungan baik itu dapat diciptakan dengan menghilangkan konflik intraregional melalui pembentukan peningkatan ketahanan nasional masing-masing negara, kerja sama dan integrasi regional di segala bidang menuju kepada pembentukan pandangan politik yang lama atau sekurang-kurangnya paralel.[161]

Untuk lebih memperluas daerah netral di Asia Tenggara, Indonesia dan India pada bulan April 1973 menyerukan dihapuskannya campur tangan negara-negara besar itu di Samudra Hindia. Hilangnya permusuhan antara negara-negara besar itu akan memberikan keamanan dan stabilisasi di kawasan Asia Tenggara.[162] Dalam rangka menyukseskan Samudra Hindia sebagai kawasan damai dan bebas nuklir, pemerintah Indonesia telah meningkatkan kegiatan diplomatiknya, terutama dengan negara-negara pantai di sekitar Samudra Hindia, seperti Republik Malagasi.[163]

Kondisi keamanan, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi menjadikan Indonesia semakin percaya diri dalam kiprahnya di dunia internasional. Di samping itu, dukungan politik luar negeri pun semakin meningkat terhadap pemerintah Indonesia. Pada awal era 1980-an keikutsertaan Indonesia dalam semua forum Dunia Ketiga membawa pengaruh terhadap posisinya yang semakin kukuh, terutama atas ASEAN.

---

[159] Berita Buana, 30 April 1975

[160] Departemen Luar Negeri, *op. cit*, 1977, hlm. 73

[161] *Antara*, 24 Oktober 1973

[162] *Ibid.*, 4 April 1973

[163] *Ibid.*, 17 Desember 1974

Dukungan Indonesia bagi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini mendatangkan rasa aman dan stabilitas bagi kawasan ini secara keseluruhan. Dalam hal ini sikap pemerintah Indonesia terhadap regionalisme adalah pencapaian stabilitas nasional di tiap-tiap negara ASEAN yang tentu saja hal tersebut akan mendukung terwujudnya stabilitas kawasan di Asia Tenggara.[164]

Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan kerja sama antara ASEAN dalam perdagangan dan investasi sebagai salah satu cara mencapai ketahanan nasional sebagai dasar kerja sama regional yang berhasil. Selanjutnya Indonesia semakin melebarkan perannya di dunia internasional. Pada tahun 1982 Presiden Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan ke Washington dan Tokyo. Sebaliknya, di Jakarta Presiden menerima kunjungan beberapa kepala negara asing, seperti Indira Gandi (India), Zia Ul-Haq (Pakistan), dan Nicolae Ceaucescu (Rumania) yang merupakan kepala negara komunis pertama yang berkunjung saat itu. Pada tahun 1983 Perdana Menteri Jepang Nakasone Yasuhiro berkunjung ke Indonesia dan berjanji akan memberikan bantuan yang lebih besar dan membeli lebih banyak minyak Indonesia.

Di samping kesuksesan menangani tantangan politik dan ekonomi, prestasi di bidang diplomasi pun menonjol. Pada pertemuan FAO PBB di Roma bulan Oktober 1985, dalam dialog "Utara-Selatan", Presiden Soeharto menjadi juru bicara pihak Selatan dan Presiden Francois Mitterand (Prancis) mewakili pihak Utara. Masalah kemiskinan dunia menjadi perhatian Indonesia dan khususnya kesenjangan Utara-Selatan yang dipandang sebagai egoisme Barat. Dalam perjalanan tersebut, Presiden Soeharto mengujungi Eropa Timur dan pada bulan Oktober itu pula Deputi PM Uni Soviet mengujungi Jakarta.

Inisiatif internasional Indonesia paling menonjol di kawasan Asia Tenggara. Saat ASEAN menghadapi masalah diplomatis regional besar pertamanya, yaitu pendudukan Vietnam atas Kamboja pada akhir 1978. Di satu pihak negara-negara ASEAN mendukung rezim 'Khmer Merah Pol Pot yang dikenal kejam. Di pihak lain Indonesia memiliki hubungan baik dengan Vietnam. Dalam hal ini Indonesia bersikap non-intervensi. Indonesia berusaha menggunakan hubungan dengan Vietnam untuk menyelesaikan kebuntuan masalah Kamboja.

Pada tahun 1988 Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menghasilkan kesepakatan masalah Kamboja.

---

[164] Dwipayana G. dan Ramadhan K.H., *Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (Autobiografi)*, Jakarta, 1989, hlm. 489

Pada bulan Juli 1988 diselenggarakan *Jakarta Informal Meeting Pertama* untuk mempertemukan antara empat faksi Kamboja yang saling bertikai, yang dihadiri oleh semua kepala pemerintahan ASEAN, Vietnam, dan Laos. Proses ini berlanjut dengan adanya konferensi internasional di Paris yang dibuka tahun 1989 dengan diketuai bersama oleh Prancis dan Indonesia (diwakili Ali Alatas). Akhirnya, kesepakatan komprehensif ditandatangani pada bulan Oktober 1991 di Paris. Pasukan Indonesia ikut berperan dalam membantu penyelenggaraan peralihan kekuasaan sementara tugas PBB di Kamboja adalah mengawasi masa transisi dari konflik aktif ke arah bentuk politik yang lebih damai. Kepemimpinan regional Indonesia terhadap penyelesaian masalah Kamboja menjadikan Indonesia mendapatkan respek internasional.[165]

Selanjutnya Indonesia mulai melakukan kampanye untuk mengetuai Gerakan Nonblok, tetapi kedudukannya dalam gerakan ini masih dianggap cacat oleh masalah Timor Timur. Pada tahun 1985 PM Australia Bob Hawke mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur dan memblokade hubungan radio luar Fretilin dengan Australia. Sebagai pengaruhnya suara anti Indonesia di PBB pun melemah setiap tahun.[166] Pada tahun tersebut Presiden Soeharto mengunjungi Uni Soviet yang saat itu menuju ambang keruntuhan. Kedudukan Presiden Soeharto sebagai salah satu tokoh dunia telah membawa kesempatan bagi Indonesia untuk terpilih sebagai ketua Gerakan Nonblok pada tahun 1991, dan tahun 1992 Jakarta menjadi tempat konfrensi. Hal ini mencerminkan posisi Indonesia semakin terakui di kancah internasional.[167]

Hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC) yang beku selama 23 tahun sejak pasca pemberontakan G-30-S/PKI dan peralihan kepemimpinan RI pada tahun 1967, pada 8 Agustus 1990, dicairkan kembali. Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri RRC Qian Qichen, menandatangani naskah pencairan hubungan yang disaksikan oleh Presiden Soeharto dan Perdana Menteri RRC Li Peng. Pencairan hubungan diplomatik ini memakan waktu yang panjang, telah dirintis sejak tahun 1973, tatkala para Menteri Luar Negeri negara ini bersama-sama menandatangani Persetujuan Paris dalam rangka mengakhiri perang Vietnam. Upaya selanjutnya melalui mediator pihak ketiga. Pada tahun 1985, di Singapura diadakan pertemuan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan *China Council for the Promotion of International Trade*

---

[165] M.C. Ricklefs, *op. cit.*, 2005, hlm. 620

[166] Retnowati Abdulgani-Knapp, *Soeharto–The Life and Legacy of Indonesia Second President*, 2007, hlm. 162

[167] *Republika*, 24 Mei 1998

(CCPIT), yang menandai hubungan dagang secara langsung. Pada bulan Februari 1989 di Tokyo Menteri Luar Negeri RRC Qian Qichen bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono. Pertemuan tersebut merupakan pembuka bagi pencairan hubungan diplomatik kedua negara.

4. Pengungsi Vietnam

Jatuhnya kota Saigon, ibu kota Vietnam Selatan, ke tangan pasukan Vietnam Utara pada 30 April 1975, mengakhiri perang saudara di negara itu. Kemudian terjadi eksodus orang-orang Vietnam Selatan ke negara-negara Asia Tenggara, Filipina, Thailand, Malaysia, Hong Kong, dan Indonesia. Dengan menggunakan kapal-kapal kecil mereka mengungsi ke negara-negara yang dianggapnya aman, karena itu mereka disebut *boat people* (manusia perahu). Manusia perahu yang pertama kali memasuki Indonesia, mendarat di Pulau Laut, Kecamatan Bunguran, kepulauan Natuna pada tanggal 25 Mei 1975 dalam keadaan yang amat mengenaskan. Mereka ditampung di balai kecamatan. Keberhasilan perahu pionir ini disusul dengan jumlah yang amat besar, melebihi jumlah penduduk setempat. Pulau Anambas yang hanya berpenghuni 3.000 orang, kedatangan manusia perahu yang berjumlah 4.000 orang. Pasar mereka kuasai, alat pembayaran yang mereka gunakan dolar Amerika. Selanjutnya, gelombang demi gelombang memasuki wilayah kepulauan Riau sehingga merepotkan pemerintah setempat. Pemerintah daerah Riau harus menyediakan makanan dan air. Mereka mendarat di pulau-pulau kecil yang jaraknya berjauhan. Panglima Kowilhan selaku Laksus Panglima Kopkamtibwil I, Letnan Jenderal Poniman, pada 28 April 1975 memerintahkan agar pengungsi Vietnam ditampung. Gubernur juga memerintahkan Bupati Riau Kepulauan untuk menampung pengungsi di Pulau Bintan. Arus pengungsi mengalir deras melalui petunjuk anjungan Conoco di perairan Natuna.

Jumlah yang terbesar diangkut oleh kapal Southen Cross, lebih kurang 1.200 orang dan mendarat di Pulau Pengibu, suatu pulau kosong yang tidak mempunyai sumber air. Berpuluh-puluh karung beras dan drum air dikerahkan dari Tanjung Pinang. Kemudian TNI AL dengan kapal LST memindahkan mereka ke Tanjung Ungat.

Kedatangan pengungsi Vietnam ini merepotkan dan menjadi problem hampir seluruh pemerintah di Asia Tenggara (Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Thailand).

Untuk mengatasi problema pengungsi ini, pada bulan Februari 1979 para Menteri Luar Negeri ASEAN, mengadakan pertemuan di Bangkok, yang menghasilkan *Bangkok Statement* 21 Februari 1979. Negara-negara ASEAN setuju bekerja sama untuk meringankan beban pengungsi dengan

menyiapkan tempat pusat *processing*, sebagai tempat transit dengan batas waktu dan jumlah tertentu sesuai dengan kemampuan negara masing-masing. UNCHR dan negara-negara maju pun diharapkan memberikan bantuan. Penanganan pengungsi dilanjutkan dengan pertemuan Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Thailand Kriangsak Chomanand, karena jumlah pengungsi telah mencapai 200.000 orang yang tersebar di negara-negara ASEAN. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Menlu RI Mochtar Kusumaatmadja pada bulan April 1979 berangkat ke Jenewa menemui Paul Harthing Commisioner UNCHR. Usul Indonesia yang menawarkan Pulau Rempang atau Galang sebagai pusat pemrosesan pengungsi[168] disetujui. UNCHR kemudian membuka kantor di Jakarta, dan menyelenggarakan pertemuan 24 negara pada tanggal 15–16 Mei 1979. Dari hasil pertemuan itu pemerintah Indonesia membentuk tim pembangunan tempat pemrosesan yang terdiri atas Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Hankam, dan Departemen Dalam Negeri.

Pada 2 Juli 1979, Menteri Hankam membentuk Tim Penanggulangan dan Pengelolaan Pengungsi Vietnam (P_3V). Mayjen Moerdani (Asintel Hankam) ditunjuk sebagai ketuanya. Pada tingkat daerah dibentuk P_3V daerah yang dipimpin oleh Laksamana Pertama Abu, Panglima Kodamar Riau. Unsur pelaksananya adalah Satuan Pengaman dan Perawatan di bawah Letnan Kolonel Polisi Drs. Koenarto. Setelah seluruh persiapan selesai, tugas tim dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden No. 38/1979/11 September 1979. Menteri Luar Negeri ditugasi untuk menyelenggarakan aksi diplomasi Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah ditugasi untuk melakukan tindakan pencegahan agar pengungsi tidak memberatkan kehidupan penduduk setempat pusat pemrosesan di Pulau Galang yang dibangun sejak 1 Juni 1979 pada bulan Agustus 1979 telah selesai. Para pengungsi dari pelbagai tempat dipindahkan ke Pulau Galang. Beberapa negara memberikan bantuan pembangunan fasilitas umum. Pendekatan diplomasi dengan pemerintah Vietnam secara aktif dilakukan oleh Duta Besar D.H. Assegaff, yang meminta pemerintah Vietnam agar mencegah eksodus warganya, atau menerima kembali warganya. Akhirnya, pemerintah Vietnam mengirimkan delegasi khusus ke Pulau Galang untuk melakukan penelitian warganya yang bakal diterima kembali di tanah airnya. Mereka yang datang pada bulan Maret 1989 dikategorikan bukan lagi pengungsi. Keengganan para pengungsi kembali ke negaranya menjadi kendala. Sering kali mereka membuat keonaran, aksi mogok makan, bahkan bunuh diri atau unjuk kekuatan sebagai protes menentang kedatangan delegasi Vietnam. Sidang *Internasional Conference*

[168] *Kompas*, 3 April 1979

on Indo-Cina Refugee VI di Jenewa memutuskan bahwa selambat-lambatnya pada tahun 1995 Pulau Galang harus dikosongkan. Namun, dalam pelaksanaannya sampai dengan tanggal 30 Juni 1996, masih terdapat 4.628 orang pengungsi yang berada di Pulau Galang. Jumlah pengungsi yang pernah ditampung di Pulau Galang 121.000 orang. Dari jumlah tersebut 83.000 orang masuk ke Indonesia melalui perairan dengan kapal-kapal dan perahu.

Untuk memroses pengungsi Vietnam yang berada di Pulau Galang, Markas Besar ABRI pada 1976 membentuk Komando Tugas (Kogas) Kemanusian Galang 96, yang dipimpin oleh Mayjen Arie J. Kumaat (Asisten Teritorial), Mayjen Djauhari Nataatmadja, dan Brigjen T. Rizal Nurdin. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kogas ini melibatkan petugas sejumlah 1.635 orang. Tugas mereka adalah melakukan *screening* dan memulangkan pengungsi kembali ke negaranya dengan kapal angkut TNI AL. Setelah bekerja sejak 2 Juli 1976, Kogas Kemanusian Galang 96 mengakhiri tugasnya, setelah tiga kapal TNI AL terakhir lego jangkar di pelabuhan Tanjung Pinang menuju Vietnam pada tanggal 8 September 1996.

5. Timor Timur Berintegrasi dengan Indonesia

Kudeta militer di Portugal pada tanggal 25 April 1974, ternyata tidak hanya membawa perubahan keadaan sosial-politik yang radikal di negara itu, tetapi juga membuka lembaran baru dalam sejarah politik di koloni-koloninya. Setelah tumbangnya Presiden Dr. Antonio de Oliveire Salazar dengan Perdana Menteri Marcel Caetano, pemerintah baru di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinola segera memenuhi janji untuk mengembalikan hak-hak sipil, termasuk hak-hak demokrasi.

Sehari setelah *Red Flower's Revolution* itu, Presiden Spinola dengan konsepnya yang berjudul *Portugal e 0 Future* (Portugal dan Masa Depannya), mengeluarkan amnesti bagi semua tahanan politik yang dipenjarakan atau melarikan diri ke luar negeri semasa pemerintahan otoriter Salazar–Caetano. Iklim dan peluang baik dimanfaatkan oleh berbagai golongan politik dan masyarakat dan tampil sebagai kekuatan sosial-politik. Antara lain tampil golongan ekstrem kiri *League for Revolutionary Unity* (*LUAR*), *Armed Revolution Action* (*ARA*), *Movement for Revolution of Party of the Proletariat* (*MRPP*), dan Partai Komunis *Partido Communista Portuguese* (*PCP*).

Di antara organisasi-organisasi itu, yang paling berpengaruh ialah MRPP dengan warna politik Maois. Anggota-anggota MRPP aktif dan sangat militan, serta rajin mencari massa dengan slogan dan aksi-aksinya. MRPP menghasut prajurit-prajurit Angkatan Bersenjata Portugal agar melakukan disersi dengan membawa senjatanya dan masuk dalam organisasi MRPP.

Ternyata tidak sedikit di antara prajurit-prajurit itu yang termakan oleh hasutan-hasutan tersebut.

Presiden Spinola yang anti-golongan ekstrem kiri mencoba mendekati pimpinan Partai Komunis PCP *Alvaro Cunhal* agar partainya dapat menghindari aksi-aksi ekstrem. Bagi PCP kesempatan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai cita-citanya sehingga dalam waktu singkat telah menjadi populer di kalangan rakyat. Bahkan telah berhasil pula menerbitkan surat kabar *Avente* serta menciptakan kader-kader yang militan dan berdisiplin. Cunhal menyadari bahwa hanya dengan perebutan kekuasaan, cita-cita PCP dapat tercapai. Akan tetapi, karena situasi dan kondisi serta lapangan belum memungkinkan, PCP harus bersikap moderat bersedia menerima kerja sama dengan berbagai golongan dan menerima koalisi serta menerima *Movimento* (kelompok perwira muda yang melakukan kudeta) dengan program-programnya.

Sementara itu, sebagaimana di koloni-koloni Portugal lainnya, rakyat di Timor Timur juga segera memanfaatkan kebebasan yang diberikan. Sesuai dengan politik dekolonisasi rezim baru Portugal, di Timor Timur muncul tiga partai politik, yaitu Partai *Uniao Democratica Timorense (UDT), Frente Revolutionaria de Timor Leste Independente (Fretilin),* dan *Associacao Populer Democratica Timorense (Apodeti).* Di samping itu, kemudian muncul dua partai kecil, yaitu Partai *Kota* dan *Trabalista* yang sehaluan dengan Partai Apodeti. Mengenai masa depan Timor Timur terdapat perbedaan pandangan yang prinsipiil di antara partai-partai politik tersebut. Partai UDT menginginkan tetap di bawah bendera Portugal sebagai negara bagian Timor Portugis (Provinsi Seberang Lautan Portugal). Fretilin memperjuangkan kemerdekaan penuh. Akan tetapi, Partai Apodeti menginginkan integrasi dengan Indonesia.[169] Sebagai persiapan integrasi, Apodeti mengusulkan bahasa Indonesia diajarkan di sekolah-sekolah di Timor Timur. Karena sasaran perjuangannya itu, Apodeti mendapat kecaman dari kedua partai lainnya dan dicap sebagai penjual bangsa.

Untuk menekan perjuangan, Apodeti, UDT, dan Fretilin kemudian berhasil membentuk suatu koalisi. Akan tetapi, dalam perkembangan partai-partai politik itu selanjutnya, Fretilin ternyata makin bergerak ke arah komunisme. Sementara itu, UDT sangat menentang komunisme yang makin jelas mewarnai Fretilin. Karena perbedaan latar belakang politik yang mendasari perjuangan mereka, koalisi tersebut tidak dapat dipertahankan. Pada tanggal 27 Mei 1975 koalisi UDT-Fretilin pecah kembali. Dalam perkembangan selanjutnya, UDT mengubah namanya menjadi *Movimento Anti-*

[169] *Antara,* 1 September 1974

Comunista (MAC). MAC bersama-sama dengan Apodeti, Kota, dan Trabalista kemudian melakukan perlawanan gabungan dalam menghadapi Fretilin.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Apodeti, Arnaldo dos Reis Araujo, pada tanggal 31 Agustus 1974 menyatakan bahwa partainya menghendaki Timor Timur bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Sebagai alasan pertimbangan tersebut, bahwa rakyat kedua wilayah itu mempunyai persamaan dan hubungan erat baik secara historis, etnik, maupun geografis.[170] Oleh karena itu, integrasi akan menjamin stabilitas di seluruh kawasan tersebut.

Indonesia sangat menyokong maksud Portugal yang merencanakan dekolonisasi jajahannya di Timor Timur. Namun, sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung, tidak menginginkan proses dan hasil dekolonisasi itu menimbulkan gangguan yang mungkin memengaruhi stabilitas Indonesia dan Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia dan Portugal menyatakan sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan dekolonisasi di Timor Timur.[171]

Pada sidang Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional tanggal 18 Oktober 1974 di Jakarta yang dihadiri oleh Menteri Seberang Lautan Portugal Dr. Antonio de Almeida Santos, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan sikap dasar pemeritah Indonesia mengenai masalah Timor Timur sebagai berikut:

a. tidak mempunyai ambisi teritorial;
b. menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri;
c. jika rakyat Timor Timur ingin bergabung dengan Indonesia, tidak mungkin bergabung sebagai negara, tetapi sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[172]

Presiden Soeharto kemudian mengirim utusan pribadinya Letjen TNI Ali Murtopo untuk menjelaskan sikap Indonesia kepada pemerintah Portugal di Lisabon. Dari pendekatan itu, Indonesia melihat tiga alternatif dalam penyelesaian masalah Timor Timur, yaitu:

a. merdeka di bawah naungan Portugal;
b. bergabung dengan Indonesia;
c. merdeka penuh.[173]

---

[170] *Ibid.*

[171] *Berita Buana*, 25 September 1974

[172] Soekanto *et al.*, *Integrasi Melawan Tekad Rakyat Timor Timur*, 1976, hlm. 125

[173] James Dunn, *East Timor*, 1983, hlm 53–54

Menurut penilaian Indonesia, merdeka penuh bagi Timor Timur tidaklah rasional, karena ada dua faktor yang tidak dapat dipenuhi. *Faktor pertama,* rakyat Timor Timur tidak cukup mempunyai tenaga terdidik untuk membentuk suatu pemerintahan yang kapabel.

Faktor kedua, negeri itu tidak mempunyai sumber-sumber nasional (*national resources*) sebagai jaminan untuk berdirinya suatu negara bebas, merdeka, dan berdaulat. Dengan demikian, jika Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh akan berakibat masuknya suatu kekuatan dari luar. Jika hal itu terjadi, di Timor Timur timbul instabilitas yang mungkin saja memengaruhi kawasan di sekitarnya. Prospek seperti itu sangat dikhawatirkan oleh Indonesia, yang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonominya.

Letak geografis Timor Timur yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia telah mendorong pemerintah Portugal untuk mengadakan pendekatan dengan Indonesia. Terutama setelah dalam proses dekolonisasi itu, lahir pula suatu kekuatan politik di kalangan rakyat Timor Timur yang mengemban aspirasi untuk berintegrasi dengan Indonesia. Hubungan diplomatik kedua negara yang terputus sejak tahun 1964, dipulihkan kembali pada bulan Mei 1975. Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama dan diputuskan kembali pada tanggal 7 Desember 1975 oleh pihak Portugal. Indonesia sangat menyesalkan keputusan Pemerintah Portugal tersebut.[174]

Sesuai dengan perkembangan politik, pada tanggal 4 November 1974 pemerintah Portugal mengadakan penggantian gubernur di Timor Timur. Penggantian gubernur dari Fernando Alves Aldeia kepada Kolonel Lemos Pires ternyata membawa perubahan situasi politik cukup besar di negeri itu. Sejak kehadiran Lemos Pires dengan stafnya, ketiga partai yang ada, yaitu UDT, Apodeti, dan Fretilin telah melakukan persaingan seru. Tindakan Pires cenderung menguntungkan Partai UDT, tetapi stafnya yang sebagian besar anggota PCP dan MRPP cenderung menguntungkan Fretilin. Mereka ingin menciptakan masa depan Timor Timur menguntungkan bagi gerakan Komunis internasional.[175] Perembesan unsur-unsur gerakan Marxis ke Timor Timur sudah dimulai sejak bulan Agustus 1974, yaitu dengan datangnya lima orang mahasiswa kader komunis dari Lisabon untuk menggarap Fretilin. Dengan demikian, Fretilin dapat menjadi organisasi dan gerakan Marxis yang lebih unggul dan lebih militan daripada partai-partai lainnya.

Atas permintaan pemerintah Lisabon, pada tanggal 9 Maret 1975 diadakan pertemuan antara delegasi pemerintah Portugal dengan Indonesia

---

[174] *Kompas,* 9 Desember 1975

[175] *Suara Karya,* 1 November 1974

di London. Dalam pertemuan itu, pemerintah Portugal masih tetap beranggapan bahwa integrasi dengan Indonesia adalah jalan yang paling rasional dalam rangka pelaksanaan dekolonisasi Timor Timur. Oleh karena itu, Portugal secara *de facto* mengakui Indonesia sebagai salah satu faktor kekuatan yang terkait di dalam proses dekolonisasi itu. Dalam perkembangannya, Indonesia selalu diperhitungkan dan diikutsertakan.

Sebagai realisasi pembicaraan di London, Indonesia mengirimkan suatu tim ke Dili untuk mengadakan konsultasi dengan pemerintah setempat dan partai-partai politik di Timor Timur. Pemerintah Portugal pada tanggal 26–28 Juni 1975 mengadakan pertemuan pula dengan partai-partai UDT, Apodeti, dan Fretilin di Macao untuk membicarakan pembentukan *Consul-tative Body*. Ternyata Fretilin melakukan pemboikotan terhadap pertemuan tersebut sehingga sifat pertemuan berubah menjadi hanya sekadar dengar pendapat mengenai masa depan Timor Timur. Pemerintah Portugal kemudian memutuskan akan menentukan sendiri jadwal dan proses dekolonisasi melalui referendum yang direncanakan pada bulan Maret 1975. Akan tetapi, karena situasi politik yang kurang menguntungkan bagi Portugal, jadwal tersebut diubah menjadi Oktober 1978.

Sementara itu, perkembangan di Timor Timur makin hangat dan tegang. Akibat teror Fretilin, pelarian dari Timor Timur ke Indonesia makin meningkat, bahkan pernah mencapai 50.000 orang. Untuk menanggulangi masalah pengungsi tersebut, pada tanggal 6 September 1975 dibentuk "Satuan tugas" yang terdiri dari unsur-unsur beberapa departemen. Hingga akhir Maret 1976, pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan biaya sebesar Rp1.769.164.000,00 di samping bantuan pangan, bahan-bahan bangunan, dan alat-alat pertanian.[176] Jelaslah bahwa perkembangan situasi politik di Timor Timur telah menunjukkan ketidakmampuan pemerintah Portugal untuk menegakkan kekuasaan dan wibawanya di negeri jajahannya itu.

Penyelesaian politik di Timor Timur tidak mungkin ditangani sendiri oleh Portugal tanpa mengikutsertakan kekuatan lain untuk membantunya. Oleh karena itu, Portugal bersedia menerima berbagai formula politik yang tidak bertentangan dengan kehendak rakyat Timor Timur dan kepentingan negara-negara di sekitarnya. Pada tanggal 5 November 1975 ditandatangani sebuah dokumen berupa *Memorandum of Understanding*, sebagai hasil pertemuan antara Indonesia dan Portugal di Roma.[177] Hasil pertemuan tersebut mengandung tiga arti penting yaitu:

---

[176] Departemen Penerangan, *Propinsi Daerah Tingkat I Timor*, hlm. 32–35

[177] *Berita Yudha*, 6 November 1975

Kesatu: pertama kalinya RI mendapat pengertian secara resmi dari pemerintah Portugal.

Kedua: Portugal mengakui semua pihak yang ada di Timor Timur.

Ketiga: akan dilanjutkan kontak-kontak tetap antara RI-Portugal.[178]

Dengan lahirnya *Memorandum of Understanding* itu, pemerintah Portugal tidak dapat mengakui klaim salah satu partai saja atas wilayah-wilayah yang dinyatakan diduduki mereka karena pemerintah Timor Timur bukan didasarkan atas kekuasaan partai. Memorandum itu merupakan pembuka jalan ke arah pelaksanaan dekolonisasi Timor Timur secara wajar, tepat, dan lancar.

Akan tetapi, Fretilin yang sudah mulai mengalami kekalahan di hampir semua sektor pertempuran mengalihkan perjuangannya dari "medan tempur" ke "medan diplomasi internasional". Pada tanggal 28 November 1975 pukul 05.55 bertempat di lapangan Dos Bona Ventura, Dili, Komite Sentral Fretilin mengumumkan secara sepihak pembentukan "Republik Demokrasi Timor Timur". Di samping itu, ditetapkan pula bendera Fretilin dan sebagai "Presiden" diangkat Xavier Do Amaral.[179]

"Proklamasi" Fretilin itu sebenarnya hanya merupakan suatu taktik untuk menutupi kekacauan dalam tubuh sendiri dan menutupi kekejaman teror yang dilakukan Fretilin terhadap rakyat Timor Timur. Namun, jelas berakibat mempersulit kedudukan perjuangan gabungan Apodeti, UDT, Kota, dan Trabalista di forum politik internasional. Oleh karena itu, untuk mengimbangi "proklamasi" Fretilin, gerakan gabungan keempat partai itu menjawab tantangan Fretilin dengan suatu proklamasi tandingan, yaitu suatu pernyataan penggabungan kepada Indonesia. Proklamasi itu diumumkan pada tanggal 29 November 1975 dan ditandatangani di Balibo pada esok harinya oleh pimpinan partai-partai Apodeti, UDT, Kota, dan Trabalista.[180]

Proklamasi di Balibo tersebut selain merupakan reaksi terhadap tindakan Fretilin, juga dapat diartikan sebagai saat timbulnya suatu lingkungan tata hukum baru di bekas jajahan Portugal itu atau dengan kata lain, proklamasi Balibo menjadi sumber dan landasan hukum baru ditegakkan oleh gerakan gabungan Apodeti, UDT, Kota, dan Trabalista.

Pemerintah Portugal menyatakan tidak dapat menyetujui pernyataan-pernyataan sikap secara sepihak oleh partai-partai. Begitu juga Australia, menyatakan tidak dapat mengakui pernyataan yang dilakukan oleh Fretilin.

---

[178] Soekanto dkk., *op. cit.*, hlm. 273–274

[179] Soekanto dkk., *op. cit.*, 1976, hlm. 280

[180] *Ibid.*, hlm. 277

Australia tetap mengakui kedaulatan Portugal di Timor Timur dan mendukung penyelesaian dekolonisasi secara damai, di mana rakyat dapat menyatakan kehendaknya.[181] Sementara itu, kedudukan rakyat Indonesia di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Timur, telah terancam dengan adanya tindakan-tindakan Fretilin yang tidak lagi mengindahkan tatakrama internasional. Fretilin sering melakukan pelanggaran wilayah dan melakukan perampokan ke wilayah Indonesia.

Pada tanggal 4 Desember 1975 pemerintah Indonesia menyambut dengan rasa haru pernyataan penggabungan Timor Timur yang dinyatakan keempat partai di Balibo.

Pernyataan Fretilin tidak membawa kemajuan seperti yang diinginkannya. Pembentukan pemerintah distrik dan wilayah-wilayah mengalami kegagalan karena tidak mendapat dukungan dari rakyat. Sejak "proklamasi" hingga jatuhnya kota Dili, tidak ada satu negara pun yang memberikan pengakuan terhadap apa yang dinamakan "Republik Demokrasi Timor Timur".

Pada tanggal 7 Desember 1975 seluruh kota Dili (ibu kota Timor Timur), telah dikuasai oleh pasukan gabungan Apodeti, UDT, Kota, dan Trabalista,[182] yang didukung sukarelawan Indonesia. Kehadiran sukarelawan Indonesia adalah atas permintaan rakyat Timor Timur dan dengan desakan rakyat Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah Indonesia sukar menahan para sukarelawan tersebut melindungi para pengungsi kembali ke kampung halaman dan membantu saudara-saudaranya membebaskan diri dari penindasan dan teror Fretilin. Sementara itu, Pimpinan Partai Apodeti Arnaldo Dos Reis Araujo yang ditahan Fretilin, berhasil dibebaskan oleh pasukan gabungan. Araujo pada kesempatan pertama esok harinya melalui radio Dili menyerukan kepada seluruh rakyat Timor Timur untuk mengibarkan bendera Merah Putih.[183]

Dengan berhasilnya pasukan gabungan Apodeti itu, timbul reaksi dari berbagai negara terhadap Indonesia. Portugal, RRC, dan Australia menuduh Indonesia melakukan invasi militer ke Timor Timur. Akan tetapi, sebaliknya Malaysia, Saudi Arabia, dan Filipina menerima baik keputusan pemerintah Indonesia yang mengizinkan sukarelawan-sukarelawannya masuk ke Timor Timur untuk membantu memulihkan tegaknya hukum dan ketertiban di wilayah tersebut. Untuk menjelaskan duduk persoalannya kepada dunia internasional, pada tanggal 10 Desember 1975 dikeluarkan keterangan

---

[181] *Berita Yudha,* 8 Desember 1975

[182] *Berita Yudha,* 12 Desember 1975

[183] *Ibid.,* 12 Desember 1975

pemerintah yang terdiri dari 10 pasal. Antara lain disebutkan bahwa kejadian-kejadian di Timor Timur adalah sebagai akibat serangkaian tindakan dan kebijakan yang bersumber pada kealpaan pemerintah Portugal dalam melaksanakan dekolonisasi di Timor Timur. Portugal telah memberikan peluang kepada Fretilin untuk menggunakan pasukan kolonial Tropas untuk menindas lawan-lawan politiknya sehingga timbul pemberontakan rakyat terhadap kekejaman Fretilin.[184] Pada tanggal 12 Desember 1975 terjadi peristiwa penting yang merupakan "miniatur" integrasi seluruh Timor Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Oekussi bekas jajahan Portugal menyatakan dirinya masuk menjadi daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus seluruh penduduknya menjadi warga negara Republik Indonesia.[185]

Beberapa hari setelah kota Dili direbut, pasukan gabungan Apodeti telah berhasil menguasai Timor Timur. Pada tanggal 17 Desember 1915 partai-partai Apodeti, UDT, Kota, dan Trabalista menyatakan berdirinya *Pemerintah Sementara Timor Timur* (PSTT) untuk menyelenggarakan tertib pemerintah, tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib keamanan. Pernyataan pembentukan Pemerintah Sementara itu ditandatangani oleh pimpinan Partai Apodeti Arnaldo Dos Reis Araujo dan pimpinan Partai UDT Francisco Xavier Lopez da Cruz dalam bahasa Portugis. Pemerintahan tersebut didirikan atas kebulatan tekad rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri sebagaimana telah diikrarkan dalam proklamasi 30 November 1975 oleh keempat partai tersebut.

Setelah terbentuknya PSTT, dibentuk pula DPR wilayah Timor Timur berdasarkan Akta No. I/AD. 1976. Kedua lembaga tertinggi eksekutif dan legislatif itu dibentuk untuk melengkapi aparat penyelenggaraan dan penyediaan wadah untuk menampung kehendak rakyat secara objektif. Dengan demikian, tuntutan Indonesia agar keinginan rakyat dilegalisasikan lebih dahulu telah dapat dipenuhi, yang sekaligus berarti dapat memenuhi tata krama internasional, yang menghendaki penentuan masa depan Timor Timur didasarkan atas kehendak rakyat di wilayah itu sendiri.

Sementara itu, Portugal mengadukan masalah Timor Timur kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan alasan apa yang dinamakan "agresi Indonesia", Portugal berhasil meminta Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat. Sejak itu sidang-sidang Komisi Dekolonisasi PBB sering membicarakan masalah Timor Timur. Akan tetapi, sidang-sidang tersebut berjalan penuh dengan perdebatan dan ketegangan karena terdapat dua kelompok pendapat yang saling bertentangan.

---

[184] Soekanto dkk., *op. cit.*, 1976, hlm. 354–356

[185] *Ibid.*, hlm. 607

Kelompok pertama yang bersikap anti-Indonesia, disponsori oleh Mozambique, Guyana, Sierra Leone, Trinidad, Tobago, dan Aljazair. Kelompok kedua disponsori oleh India, Iran, Saudi Arabia, Muang Thai, Malaysia, dan Filipina yang merupakan kelompok pro-Indonesia.

Sekretaris Jenderal PBB kemudian menunjuk Direktur Jenderal PBB di Jenewa, Victtorio Winspeare Guicciardi, sebagai utusan khusus ke Timor Timur. Hasil misi peninjauan itu dilaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 29 Februari 1976.[186]

Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timor Timur melangsungkan sidang paripurna terbuka untuk menentukan masa depan negeri itu. Sidang tersebut dihadiri oleh semua anggota DPR lengkap yang berjumlah 30 orang, dan para undangan, yaitu kepala dan wakil kepala eksekutif Pemerintah Sementara Timor Timur, perwakilan negara sahabat, serta sejumlah besar rakyat Timor Timur. Acara tunggal sidang itu adalah "Integrasi Timor Timur dengan Republik Indonesia". Keputusan sidang adalah sebagai berikut.

a. Untuk mempercepat proses integrasi Timor Timur dengan Republik Indonesia, perlu disampaikan petisi integrasi, yang kemudian disahkan oleh sidang paripurna tersebut sebagai petisi yang akan disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. Selain itu, juga perlu membentuk delegasi yang akan menghadap pemerintah Indonesia di Jakarta untuk menyampaikan petisi integrasi.
b. Usaha membuat rancangan naskah petisi integrasi, diserahkan kepada satu Komisi Khusus dengan mandat penuh dari sidang paripurna terbuka.
c. Mempercayakan kepada ketua sidang untuk menentukan calon delegasi yang akan menemui pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna menyampaikan keanggotaan Komisi Khusus.[187]

Adapun susunan Komisi Khusus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Guilherme Maria Goncalves – Ketua Sidang/Ketua Komisi
2. J. Hermenegildo da Costa – Anggota Komisi
3. Ny. Maria Acuncao Osorio Soares – Anggota Komisi
4. Luis Gonsaga Soares – Anggota Komisi
5. Joao Pedro Soares – Anggota Komisi

Dengan terbentuknya Komisi Khusus itu, berhasil pula disusun naskah petisi integrasi. Sidang paripurna menyatakan dapat menerima rancangan naskah dan kemudian ditandatangani oleh Ketua DPR Timor Timur

[186] James Dunn, *op. cit.*, 1983, hlm. 310

[187] Soekanto dkk., *op. cit.*, 1976, hlm. 607

Guilherme Maria Goncalves dan Kepala Eksekutif PSTT Arnaldo Dos Reis Araujo. Petisi integrasi tersebut ditulis dalam bahasa Portugis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.[188]

Petisi integrasi disampaikan oleh delegasi Timor Timur kepada pemerintah Republik Indonesia dan pada tanggal 7 Juni 1976 petisi diterima Presiden Soeharto di Jakarta dengan harapan agar integrasi tersebut diterima tanpa referendum. Presiden Soeharto atas nama pemerintah RI menjelaskan kepada delegasi bahwa penerimaan petisi pengintegrasian tersebut tidaklah didasarkan atas ambisi teritorial dan nafsu untuk merayah rakyat negara lain, tetapi semata-mata atas dasar rasa tanggung jawab kemanusiaan, tanggung jawab terhadap negara, tanggung jawab terhadap dasar-dasar dan cita-cita kemerdekaan, serta atas dasar rasa tanggung jawab terhadap hati nurani rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, rakyat dan bangsa Indonesia menyambut dengan hangat dan tidak akan mengecewakan hasrat dan keinginan saudara-saudara sekandungnya di Timor Timur.[189]

Pada tanggal 23 Juni 1976 Presiden Soeharto mengirimkan sebuah delegasi pemerintah Republik Indonesia ke Timor Timur. Delegasi berjumlah 36 orang ditambah 11 perwakilan asing dan 40 orang wartawan dalam dan luar negeri, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud. Menteri Dalam Negeri Amir Machmud mengemukakan bahwa delegasi yang dipimpinnya tidak bermaksud untuk meneliti dan memeriksa ataupun menguji kebenaran petisi PSTT. Delegasi bermaksud dapat menyaksikan dan merasakan sendiri dari hati ke hati secara langsung spontanitas rakyat Timor Timur yang menginginkan integrasi dengan Republik Indonesia.

Pada tanggal 29 Juli 1976, setelah mendengarkan laporan Menteri Dalam Negeri, Sidang Kabinet Paripurna menyatakan keputusan pemerintah Republik Indonesia untuk menerima keinginan rakyat Timor Timur berintegrasi dengan Republik Indonesia.

Sebagai realisasinya, pada tanggal 17 Juli 1976 ditandatangani UU No. 7 Tahun 1976 yang mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan provinsi/daerah tingkat I Timor Timur. Dengan demikian, Timor Timur secara resmi telah menjadi salah satu daerah Indonesia, yaitu menjadi provinsi daerah tingkat I yang ke-27. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 1976 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1976 untuk menetapkan pengaturan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten-kabupatennya.

---

[188] Departemen Penerangan, *Petisi Rakyat Timor Timur*, hlm. 22

[189] Departemen Penerangan, *Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur*, hlm. 14

H. Konflik, Kekerasan, dan Komisi Hak-Hak Asasi Manusia

1. Peristiwa 15 Januari 1974

Menjelang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka, pada 15 Januari 1974 di Jakarta terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang disusul dengan aksi anarki. Proyek Senen, pusat perbelanjaan yang megah, gedung Toyota Astra, sejumlah toko milik pedagang Cina di Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Glodok, Pancoran, Jalan Sudirman, dan Cempaka Putih, terbakar habis karena aksi tersebut. Geger Jakarta ini mengejutkan jajaran aparat keamanan dan pemerintah, karena itu diberi julukan *Malapetaka Lima Belas Januari* yang populer dengan *Malari.*

Peristiwa demonstrasi mahasiswa ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan mahasiswa hampir di semua kampus. Pada akhir Repelita I mahasiswa mensinyalir terjadinya penyelewengan program pembangunan nasional yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan ekonomi yang cenderung memberikan *privilige* kepada investor Jepang, dinilai merugikan rakyat. Apalagi para investor dan orang-orang Jepang yang bekerja di Indonesia berperilaku arogan. Kasus korupsi Badan Urusan Logistik (Bulog) yang melahirkan *cukongisme,* disorot secara tajam oleh mahasiswa. Rekanan pada badan ini sebagian besar adalah orang-orang keturunan Cina yang dijuluki *cukong* yang mendominasi distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat.

Di bidang politik, pemerintah tidak membuka saluran aspirasi masyarakat karena gaya kepemimpinannya yang *top down.*

Beberapa sebab keresahan mahasiswa dan masyarakat adalah, *pertama,* adanya tulisan-tulisan dalam *Harian Nusantara,* yang mengulas tentang *cukongisme,* mengulas mereka yang kaya, dan pengaruhnya terhadap kekuasaan. Koran ini kemudian dilarang terbit. *Kedua,* merembesnya ideologi *New Left* dan gerakan mahasiswa *New Left* (Kiri Baru) yang anti *establishment.* Obsesinya untuk menjamin pemimpin bersih dan berwibawa mereka ingin paling tidak 25 persen kelompok partai sebagai oposisi.[190] *Ketiga,* pada bulan September 1973, Jenderal Soemitro mencetuskan gagasan tentang *Komunikasi Dua Arah* dan *Pola Kepemimpinan Baru.* Kedua gagasan ini mendapat sambutan dari kalangan aktivitis mahasiswa dengan pemahamannya sendiri, yang kemudian meledak menjadi isu politik besar. Keprihatinan generasi muda ini melahirkan aksi kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Hampir semua kampus melakukan aksi kritik yang dikemas dalam bentuk

[190] Saleh A. Djamhari, *Memoar Jenderal TNI (Purn.) Soemitro. Perjalanan Seorang Prajurit Pejuang dan Profesional,* 1994, hlm. 394

diskusi, seminar, dan pertemuan informal di kampus, yang memuncak menjadi pernyataan sikap dalam bentuk unjuk rasa, pemasangan poster, serta penyebaran pamflet dan brosur.

Aksi-aksi mahasiswa ini dimulai sejak bulan September 1973. Pada Oktober 1973, 11 orang delegasi mahasiswa ITB mendatangi pimpinan DPR, yang diterima oleh Ketua Komisi IX, Djamal Ali. Mereka menyatakan anti Kopkamtib dan menyampaikan surat terbuka kepada wakil rakyat. Isi surat tersebut sebagai berikut:

> Kami adalah sebagian dari generasi muda masa kini, masa yang dipenuhi harapan dan kecewaan.
>
> Masa yang kami harap membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. ... negeri ini negeri yang aman. Sampai kapankah status quo setengah SOB ini terus dipertahankan?
>
> Kami tidak mau hanya dijadikan permainan politik karena kamilah pewaris negeri ini.[191]

Surat delegasi mahasiswa ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Mahasiswa ITB Muslim Tampubolon, Komarudin, Ahmad Fuad, Tahir Mujahid, dan Hindrajat. Mahasiswa UI pun ikut bergerak. Menjelang hari peringatan Sumpah Pemuda 1973, pada 24 Oktober panel diskusi yang diadakan di Gedung Balai Budaya Jakarta, yang mengeluarkan Petisi 24 Oktober 1973 yang antara lain berisi peringatan kepada pemerintah agar meninjau kembali strategi pembangunan dan menyusun strategi baru yang di dalamnya terdapat keseimbangan di bidang politik, sosial, ekonomi, serta anti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.

> Segera bebaskan rakyat dari cekaman ketidakpastian dan pemerkosaan hukum, merajalelanya korupsi dan penyelewengan kekuasaan, kenaikan harga, dan pengangguran.[192]

Dalam menanggapi aksi-aksi mahasiswa ini, yang disebut sebagai keresahan kampus, Presiden Soeharto memerintahkan Pangkopkamtib Jenderal Soemitro untuk melakukan safari ke kampus-kampus guna meredam aksi-aksi mahasiswa yang semakin meningkat dan menanggapi opini yang negatif terhadap pemerintah. Pada akhir Oktober 1973, Pangkopkamtib datang ke Jawa Timur untuk berdialog dengan mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat Jawa timur. Organisasi-organisasi mahasiswa mengeluarkan semua unek-uneknya mengenai kebijakan pemerintah. Mereka datang dari Universitas Airlangga, Universitas Merdeka, dan Universitas Djember.[193]

---

[191] *Sinar Harapan,* 11 Oktober 1973

[192] *Sinar Harapan,* 25 Oktober 1973

[193] *Berita Buana,* 28 Oktober 1973

Safari kampus Soemitro dilanjutkan ke Yogyakarta. Bertempat di kampus Universitas Gajah Mada, seperti di Jawa Timur, Soemitro melayani semua pertanyaan mahasiswa. Pertanyaan mahasiswa yang antara lain berkenaan dengan status Kopkamtib dan mahasiswa menuntut agar Kopkamtib dibubarkan. Salah seorang mahasiswa IAIN, Slamet Effendi, menanyakan dialog-dialog yang dilakukan oleh Pangkopkamtib apakah karena pemerintah takut akan terjadinya revolusi sosial seperti yang terjadi di Muang Thai?[194] Jawaban Soemitro tidak memuaskan mahasiswa yang tidak bergabung dalam dewan mahasiswa, mereka menamakan diri mahasiswa gelandangan atau mahasiswa jalanan yang ditokohi oleh Anhar Gonggong. Menurut kelompok ini dewan mahasiswa tidak dapat diharapkan mampu menyalurkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Soemitro berjanji akan berdialog secara khusus dengan kelompok ini.[195]

Pada 2 November 1973, Pangkopkamtib berdialog dengan mahasiswa se-Jawa Barat di Gedung PIAI Bandung yang dihadiri oleh mahasiswa ITB, UNPAD, IKIP, UNP, dan UNISBA. Dialog berlangsung selama enam jam. Dewan mahasiswa ITB menyampaikan memorandum yang ditandatangani oleh delapan orang pimpinan dewan.

> Sangatlah mengkhawatirkan kalau untuk hampir setiap pencetusan bentuk spontanitas kaum muda, penguasa menyediakan cap berbau vonis yang memungkinkan timbulnya berbagai bentuk frustrasi. Kami khawatir bentuk frustrasi yang disebabkan oleh hal tersebut di atas akan membekas dalam jangka waktu yang relatif lama serta merusak idealisme mereka sebagai generasi penerus.[196]

Pada pelbagai kesempatan Soemitro mencetuskan mengenai konsepsinya tentang Komunikasi Dua Arah dan Pola Kepemimpinan Baru[197] yaitu kepemimpinan yang memupuk kepemimpinan nasional secara utuh. Menginjak bulan Desember 1973, aksi-aksi mahasiswa semakin meningkat. Sasarannya antara lain Kedutaan Besar Jepang di Jalan Thamrin. Mahasiswa Fakultas Hukum UI menyerahkan memorandum yang berjudul *Mahasiswa Menuntut*. Memorandum *Mahasiswa Menggugat* juga disampaikan kepada pejabat Departemen Luar Negeri.[198]

Aksi menyerahkan memorandum kepada pejabat pemerintah menjadi model aksi di samping demonstrasi. Di tengah maraknya demonstrasi

---

[194] Saleh A. Djamhari, *op. cit.*, 1999, hlm. 394

[195] *Berita Buana*, 28 Oktober 1973

[196] *Berita Buana*, 7 November 1973

[197] *Sinar Harapan*, 15 November 1973

[198] *Berita Buana*, 1 Desember 1973

mahasiswa, Drs J.P. Pronk, Ketua IGGI, menambah panasnya situasi. Kedatangan Pronk di samping melakukan pertemuan dengan para pejabat Indonesia baik eksekutif maupun legislatif serta tokoh-tokoh masyarakat, juga meninjau desa-desa di Yogyakarta. Mahasiswa menilai sikap Pronk sangat arogan dan kolonial. Dalam pertemuannya dengan pimpinan DPR terjadi dialog yang terkesan bersikap sebagai tuan besar semakin membangkitkan kebencian mahasiswa terhadap bantuan asing.

> Pronk : Apakah penggunaan bantuan luar negeri juga dibahas di DPR? Apakah DPR selalu setuju dengan *policy* pemerintah?[199]

Karena aksi-aksi mahasiswa yang semakin meningkat, pada 1 Desember 1973, Pelaksana Khusus Panglima Kopkamtib Daerah Jakarta Raya (Laksusda Jaya) menyerukan agar mahasiswa menghentikan gerakan-gerakannya. Sejak pengumuman seruan itu mahasiswa yang melakukan aksi semakin nekad. Aksi coret-coret[200] dilakukan di pelbagai tempat di Jakarta.

Di samping aksi mahasiswa, beberapa cendekiawan antara lain Mochtar Lubis, Dorojatun Kuntjoro Jakti, Suhadi Mangkusuwondo, dan Maruli Panggabean mengadakan diskusi dengan tema "Untung Rugi Modal Asing", yang mendukung tema gerakan mahasiswa. Pada 18 Desember 1973, mahasiswa UI menggelar pernyataan *Kebulatan Tekad* untuk memperjuangkan perombakan keadaan ke arah kehidupan kenegaraan secara menyeluruh, yang ditandatangani oleh Hariman Siregar dan Judil Hery.

Hari-hari berikutnya aksi mahasiswa bertambah kompak dan solid. Pada 24 Desember 1973 lebih kurang 200 mahasiswa yang mewakili 12 *Dewan Mahasiswa,* berangkat dari kampus UI Salemba bergerak menuju Bina Graha dan Cendana dengan maksud ingin berdialog dengan Presiden Soeharto. Hanya 12 orang yang diterima petugas Bina Graha,[201] yaitu para Ketua Dewan Mahasiswa. Akhirnya Presiden Soeharto bersedia menerima delegasi mahasiswa sesudah tanggal 7 Januari 1974.[202] Sampai akhir tahun 1973, aksi-aksi mahasiswa di Bandung tidak kunjung surut. Aksi tempel plakat dilakukan di sekitar kampus UNPAD, ITB, dan beberapa tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

---

[199] *Berita Buana,* 17 November 1973

[200] *Sinar Harapan,* 10 Desember 1973

[201] Sinar Harapan, 26 Desember 1973, *Abadi,* 26 Desember 1973, mereka adalah, Hariman Siregar (UI), Sainamur Harahap (UNPAD), Masian (IPB), Haris Harahap (Jayabaya), Papaman (Trisakti), Muhammad Thamrin (IKIP Muhammadiyah), Hermansyah (UN Muhammadiyah), Policarpus Lopez (Atmajaya), John Pangemanan (STO), dan Iskandar Ali (STTN)

[202] *Abadi,* 28 Desember 1973

Sementara itu, para Ketua Dewan Mahasiswa, di Cibogo, pada 30 Desember 1973 berhasil merumuskan *Deklarasi Mahasiswa* dan memorandum yang berisi agar pemerintah melaksanakan kepemimpinan terbuka yang ditandatangani oleh 15 orang Ketua Dewan Mahasiswa dan memorandum tuntutan mahasiswa yang dirumuskan pada 10 Januari 1974. Pada 11 Januari Presiden mengadakan dialog dengan mahasiswa selama dua jam. Pada kesempatan itu para Ketua Dewan Mahasiswa menyerahkan memorandum tuntutan mahasiswa yang terdiri atas enam pokok, antara lain sebagai berikut.

1. Pola pembangunan yang berorientasi kepada keadilan sosial dan kemakmuran bagi rakyat banyak.
2. Terwujudnya iklim politik yang berasaskan demokrasi sehingga pemerintahan benar-benar milik rakyat untuk kepentingan rakyat.
3. Pembangunan hukum untuk tegaknya tertib hukum dan mekanisme peradilan yang tidak memihak di mana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.
4. Pembatasan segala bentuk kemewahan dan mencegah serta mengadakan pemberantasan korupsi.[203]

Sekalipun telah bertemu dengan Presiden, sentimen anti modal asing semakin menguat. Pada 12 Januari 1974, sejumlah mahasiswa berkumpul di kampus UKI Jalan Diponegoro melakukan apel siaga dengan membakar dua patung kertas yang diberi nama "Imperialis Ekonomi Jepang" dan "Anjing Tokyo" serta menggelar poster-poster yang bernada anti Jepang.

> Langit makin mendung, rakyat berkabung
> Minggu ini penjajah ekonomi berkunjung
> Lapor: Indonesia siap dijual.[204]

Perdana Menteri Kakuei Tanaka tiba di Jakarta pada hari Senin 14 Januari 1974, dan para mahasiswa menyambutnya dengan memblokade jalan keluar bandar udara Kemayoran. Pada keesokan harinya terjadi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran lewat Jalan Thamrin menuju arah Istana. Panglima Kopkamtib yang mendapat laporan adanya demonstrasi bergegas mencegat mereka di Bundaran Air Mancur di depan Bank Indonesia, agar tidak memasuki kawasan di sekitar Monumen Nasional yang harus steril dari gangguan keamanan dan kerusuhan. Demonstrasi mahasiswa berhasil ditahan oleh Soemitro:

---

[203] *Berita Buana*, 12 Januari 1974

[204] *Berita Buana*, 14 Januari 1974

"Saya mengerti aspirasi saudara-saudara. Saya mengerti unek-unek kalian. Percayakan soal itu kepada saya. Kalian percaya atau tidak pada saya?"

"Percaya!"[205]

Demonstran kemudian berbalik arah. Berkaitan dengan peristiwa ini beberapa orang ditahan, antara lain Hariman Siregar, Marsilam Simanjuntak, Dorojatun Kuntjoro Jakti, Fahmi Idris, Imam Waluyo, dan H.J.C. Princen.[206] Selain itu, berkaitan dengan peristiwa ini pula, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro mengundurkan diri, dan penjabat panglima Kopkamtib diambil kembali oleh Presiden Soeharto. Laksamana Soedomo yang semula menjadi Wakil Panglima ditunjuk sebagai Kepala Staf Kopkamtib.

2. Peristiwa Tanjung Priok

Pada Rabu malam pukul 23.00 tanggal 12 September 1984, di Tanjung Priok terjadi peristiwa berdarah yang menelan korban sejumlah orang meninggal dan luka-luka.[207] Dua hari sebelumnya seorang bintara pembina desa (babinsa) tanpa melepas sepatunya, masuk ke sebuah musala di Koja Selatan dengan maksud menyita sejumlah brosur yang bermuatan politik menentang pemerintah. Masyarakat yang tersinggung atas perilaku bintara tersebut marah. Sepeda motor milik bintara itu dibakar. Empat orang ditahan di markas Kodim Tanjung Priok. Pasca peristiwa tersebut beberapa orang utusan mencoba meminta pembebasan mereka yang ditahan, ditolak pihak Kodim.

Dua hari kemudian, sejumlah orang seusai menghadiri ceramah di masjid Jalan Sindang, ada orang yang memprovokasi peserta ceramah agar menyerbu markas Polres dan Kodim. Mereka berbondong-bondong bergerak ke markas Polres dan Kodim, di bawah pimpinan Amir Biki. Sepanjang perjalanannya, massa melakukan perusakan terhadap beberapa rumah, kendaraan, dan apotek.[208] Massa menuntut agar empat orang kawannya yang ditahan dibebaskan.[209] Satu regu pasukan pengamanan di markas Kodim mencoba menenangkan massa tidak berhasil bahkan massa bergerak mendekat ke arah markas. Pasukan pengamanan terancam keselamatannya karena massa membawa pelbagai macam senjata, dan melepaskan tembakan ke arah massa.

---

[205] Heru Cahyono, *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*, 1998, hlm. 222

[206] *Berita Buana*, 18 Januari 1974

[207] *Republika*, 2 Mei 2000

[208] *Merdeka*, 14 September 1984

[209] *Merdeka*, 14 September 1984

Latar belakang peristiwa ini secara kronologis diuraikan oleh pemerintah, bahwa sejak tanggal 7, 10, dan 12 September 1984, ada oknum yang dengan sengaja memasang poster yang berbau sara, menentang kebijakan pemerintah dan menolak asas tunggal Pancasila.

Peristiwa malam berdarah ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat dan media massa. Surat kabar *Sinar Harapan*[210] dalam Tajuk Rencananya yang berjudul "Menciptakan Kerangka Landasan bagi Alternatif Keempat", menyarankan agar pemerintah menciptakan kerangka landasan bagi alternatif keempat dalam mengatasi kerawanan sosial.

Kerawanan sosial adalah akar dari peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok. Ada beberapa faktor yang menjadi sebab kerawanan sosial semakin parah karena kerawanan sosial dapat melahirkan pergolakan atau revolusi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan satu alternatif pemecahan masalah baru, yaitu menjabarkan secara konseptual dan operasional GBHN 1983 bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan dwifungsi ABRI tidak akan mengarah ke militerisme, otoriterisme, dan totaliterisme.

Harian *Kompas*[211] dalam Tajuk Rencananya yang berjudul "Mengatasi Kejadian Tanjung Priok", berpendapat, "jika massa terhasut untuk melangkah ke tindak kekerasan melawan aparat keamanan, tidak terhindarkan aparat keamanan terpaksa akan menindaknya dengan kekerasan pula. Skenario itu terjadi di Tanjung Priok tanggal 12 September 1984 malam dan membawa korban tewas dan luka. Dalam kejadian itu tanggung jawab pertama terletak pada mereka yang menghasut sehingga keadaan tidak terkendali, terjadi perusakan dan korban pun jatuh.

Akar dari peristiwa tersebut adalah radikalisme. Radikalisme tidak begitu saja dapat dinetralkan oleh karena berpaham pada ideologi yang sumbernya dapat berasal dari ideologi sekuler, ideologi marxisme, dan ideologi agama. Radikalisme yang bersumber dari ideologi apa pun mudah memperoleh tanggapan jika dihadapkan dengan keadaan masyarakat yang mempunyai akumulasi banyak permasalahan atau masyarakat yang sedang mengalami perubahan dan pelbagai proses distorsi akar dan nilai. Akumulasi persoalan yang rumit dan kompleks mudah menjadi lahan subur dari radikalisme. Penegasan kemanusian dan segala aspirasinya barangkali dapat menjadi penangkal paling efektif terhadap kecenderungan-kecenderungan radikal terutama kecenderungan radikal yang berpaham sosial dan agama.[212]

---

[210] *Sinar Harapan*, 17 September 1984

[211] *Berita Buana*, 19 September 1984

[212] *Terbit*, 21 September 1984

Harian *Berita Buana,* dengan Tajuk Rencananya yang berjudul "MUI dan PPP Sesalkan Peristiwa Tanjung Priok", mengutip pernyataan Majelis Ulama Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan yang menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut, dan menyarankan agar masyarakat berpegang pada penjelasan Pangkopkamtib sebagai penanggung jawab keamanan. Harian *Terbit* mengemukakan bahwa akar permasalahan adalah adanya kesenjangan antara pemimpin dan organisasinya seperti yang terjadi pada organisasi NU dan Muhammadiyah sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 3/1971.[213]

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam pernyataan persnya, menyesalkan peristiwa demonstrasi massa Tanjung Priok yang dihadapi dengan tindak kekerasan. "Bahwa tindak kekerasan seakan-akan dipilih sebagai nilai dan kerangka acuan yang harus dioperasikan dalam memecahkan konflik berskala lokal. Tumbuhnya nilai-nilai dan norma kekerasan jelas bukan hanya memakan korban manusia, melainkan secara pasti menyisihkan nilai-nilai dasar Pancasila dan norma-norma perikemanusiaan yang adil dan beradab."[214]

Beberapa orang yang dituduh sebagai penggerak peristiwa Tanjung Priok, antara lain, A.M. Fatwa, Abdul Qodir Djailani, Prof. Oesmany al Hamidi, H. Mawardi Nur, dan Salim Qadar ditangkap. Satu tahun kemudian, dari bulan Oktober sampai Desember 1985, mereka diajukan ke sidang pengadilan dengan tuduhan melakukan tindak pidana subversif.

3. Peristiwa Talangsari Lampung

Anwar Warsidi, seorang guru mengaji yang sederhana, membangun Musala Mujahidin di dusun Cihideung, dukuh Talangsari III, desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Lampung Tengah. Setelah ia berkenalan dengan beberapa orang pendatang dari luar Cihideung, antara lain Muhammad Usman, corak pengajiannya berubah menjadi radikal. Pengajian yang diadakan bersifat politik menolak Pancasila dan mengkritik pemerintah. Dekadensi moral, maksiat, dan yang timbul karena kemiskinan adalah akibat pemerintah RI tidak berdasarkan hukum-hukum Alquran dan Hadis. Pengikutnya dibuat wajib patuh dan taat kepada pemimpinnya. Umat Islam bahkan seorang ulama pun yang tidak bergabung dalam jamaahnya tergolong kafir dan darahnya halal. Jamaahnya dilarang membayar pajak, iuran desa, dan menolak Kartu Tanda Penduduk (KTP)

---

213 *Terbit,* 19 September 1984

214 Wijiono Wasis, *Geger Talangsari Serpihan Gerakan Darul Islam,* 2001, hlm. *62*

sebagai pernyataan melawan pemerintah. Para pendatang yang disebut sebagai "muhajirin" tidak perlu mengikuti aturan administrasi yang dibuat oleh pemerintah kafir.[215] Usman kemudian melakukan hubungan dengan kelompok Negara Islam Indonesia (NII) Lampung dan kelompok yang sealiran di Jakarta yang bernama Kelompok Empat, dipimpin oleh Nurhidayat.[216] Mereka bercita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang berdasarkan Alquran dan Hadis. Kemudian Nurhidayat terpilih sebagai Amir Musafir, dan Usman terpilih sebagai Khotib (Wakil). Anwar Warsidi menyatakan jamaah Lampung siap untuk menjadi Anshar dan memperluas kompleks pesantren yang diberi nama baru Mujahidin Fisabilillah. Sejak bulan Desember 1988 banyak "muhajirin" dari Jakarta yang tiba di Cihideung, tanpa melaporkan diri ke pemerintah setempat. Karena bertambahnya jumlah orang dan tidak cukup tersedianya logistik, para "muhajirin" menjarahi kebun-kebun pertanian milik masyarakat, sehingga meresahkan masyarakat setempat.

Pada bulan Januari 1989, Nurhidayat berkunjung ke Cihideung dan ia menyarankan agar jamaah mempersiapkan diri membentuk pasukan khusus yang dipimpin oleh Riyanto dan Fadillah, dengan latihan fisik, latihan bela diri, latihan memanah, membuat anak panah beracun, dan membuat bom-bom molotov sebagai alat untuk berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran.[217] Aktivitas kelompok Warsidi ini dilaporkan oleh pemerintah setempat. Kepala Desa Rajabasa yang mendapat laporan dari masyarakat pada 12 Januari 1989 menulis surat kepada Warsidi, yang diperkuat dengan surat Camat Rajabasa, agar datang ke kantor camat. Kedua surat tersebut ditolak oleh Warsidi. Menurut Warsidi, bukan ulama yang datang ke umaro, tetapi umaro yang mendatangi ulama.[218] Aparat pemerintah setempat mengalah, dan datang ke tempat Warsidi. Dalam suasana yang kurang bersahabat, Camat mengundang Warsidi agar datang ke kantornya dan Warsidi menyanggupinya. Namun, sampai hari yang dijanjikan Warsidi tidak datang. Pada tanggal 5 Februari 1989 Dan Ramil Kapten Sutiman memerintahkan anak buahnya untuk membuktikan aktivitas anak buah Warsidi. Pada malam hari berhasil disergap lima orang remaja beserta senjatanya, Warsidi marah. Untuk membebaskan anak buahnya, Warsidi memerintahkan "pasukan khusus" di bawah pimpinan Riyanto.

---

[215] Riyanto, *Tragedi Lampung Peperangan yang Direncanakan*, 2006, hlm. 15

[216] Bambang Siswoyo, *Peristiwa Lampung*, 1989, hlm. 35

[217] Pusat Sejarah TNI, *Sejarah TNI*, V, 2000, hlm. 40; Riyanto, *op. cit.*, hlm 20–21

[218] Riyanto, *op. cit.*, 2006, hlm. 17

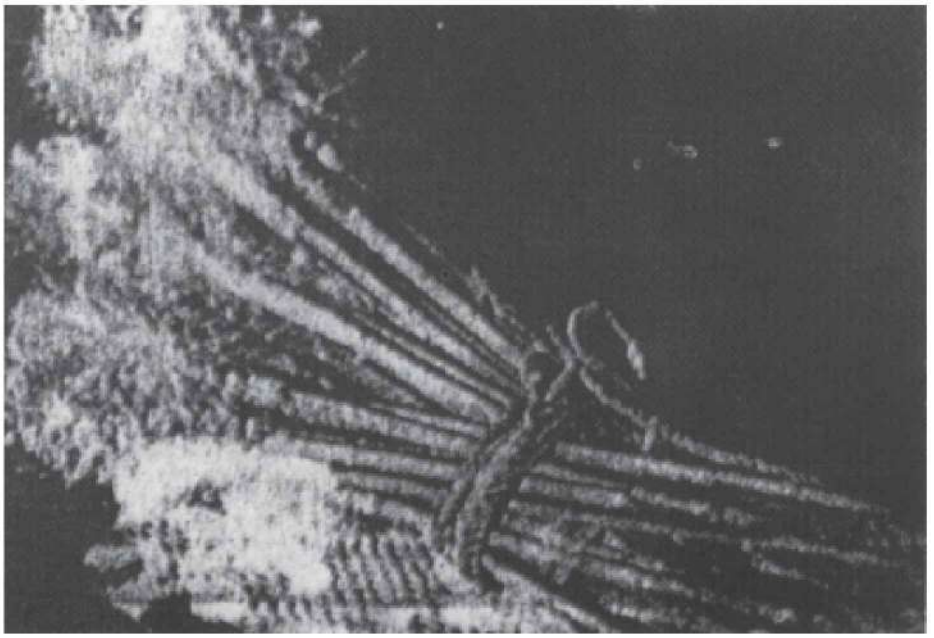

Gambar 5.1 Seonggok panah beracun ciptaan Sudarsono ini, konon salah satu lesatannya melukai Kapten Sutiman (Sumber: *Geger Talangsari, Serpihan Gerakan Darul Islam*)

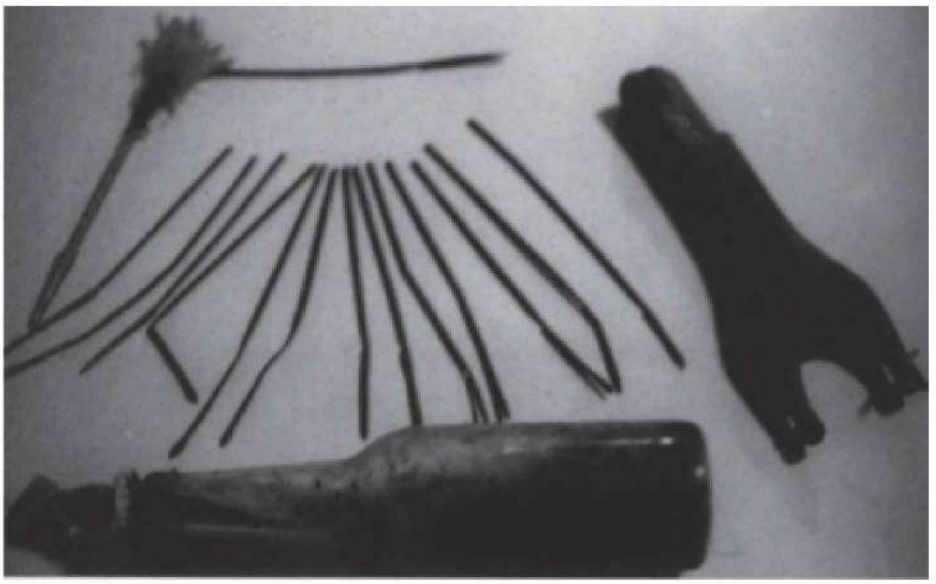

Gambar 5.2 Senjata-senjata ini adalah barang bukti berupa: panah beracun, katapel (alat pelontar), dan botol bom molotov yang berhasil disita dari tangan anak buah Warsidi (Sumber: *Geger Talangsari, Serpihan Gerakan Darul Islam*)

(a)

(b)

Gambar 5.3 **(a)** Bendorit, paduan antara bendo (arang) dan arit, berfungsi untuk memotong selembut rumput dan sekeras batang. Marsudi menggunakan senjata ini untuk membunuh Kapten Sutiman. Dari benda inilah Gegeran Talangsari meletus; **(b)** Kapten Sutiman (Sumber: *Geger Talangsari, Serpihan Gerakan Darul Islam*)

Pembangkangan Anwar Warsidi oleh pemerintah setempat dilaporkan kepada Komandan Korem (Danrem) 043/Garuda Hitam, Kolonel Hendropriyono. Danrem menginstruksikan agar dilakukan pendekatan secara persuasif terhadap Anwar Warsidi dan para jamaahnya.[219]

Pada 6 Februari 1989, sebuah rombongan yang terdiri atas Dan Ramil, Camat, Kapolsek Way Jepara, dan Kepala Desa Rajabasa lama, yang dipimpin oleh Kepala Staf Kodim Mayor Oloan Sinaga berangkat menuju kompleks jamaah Mujahidin, dipandu oleh Komandan Koramil Kapten Sutiman yang bermaksud menangkap Anwar Warsidi. Sesampainya di tempat tujuan, Kapten Sutiman berhenti di depan gardu. Dua orang penjaga gardu berteriak, "Allahuakbar!" sambil melepaskan anak panah. Sekitar 300 orang maju menyerbu rombongan. Kapten Sutiman terkena panah beracun dan gugur. Karena kekuatan tidak seimbang, Mayor Oloan Sinaga memerintahkan untuk mundur dan melapor kepada Danrem. Setelah terbunuhnya Kapten Sutiman, Warsidi panik. Ia memerintahkan pasukan khususnya untuk membuat kerusuhan di Tanjung Karang. Dalam perjalanannya, pasukan ini membunuh seorang prajurit TNI dan mencederai anggota Polri. Kolonel Hendropriyono meminta bantuan Brimob Polri serta tiga peleton Batalion Inf 143. Pasukan Kolonel Hendropriyono dapat mengepung kompleks tersebut pada pukul 04.00 tanggal 7 Februari 1989.

Pemberitahuan bahwa mereka telah terkepung dan perintah agar menyerah dilakukan melalui pengeras suara, dan disambut dengan "tembakan" anak panah dan lemparan bom molotov serta teriakan "Allahuakbar". Sebaliknya, pasukan yang mengepung juga diperintahkan meneriakkan Allahuakbar.[220] Pada pukul 12.00 aparat berhasil menguasai kompleks, tetapi telah dibumihanguskan oleh kelompok Warsidi sendiri. Pada peristiwa ini jatuh korban 27 orang meninggal termasuk Anwar Warsidi dan 159 orang ditahan. Sampai akhir Maret 1989 pihak keamanan menangkap 227 orang, 16 orang diklasifikasi A (beraliran keras), 33 orang diklasifikasi B (tokoh) diajukan ke pengadilan, serta 178 orang diklasifikasi C (ikut-ikutan) dibebaskan.[221]

4. Peristiwa Dili 12 November 1991

Pada 31 Mei 1976, DPR Timor Timur yang beranggotakan 30 orang bersidang dengan acara tunggal mengenai integrasi Timor Timur dengan Republik Indonesia, yang disusul dengan pengajuan petisi integrasi yang

---

[219] Pusat Sejarah TNI, *Ibid.*, 2000, hlm. 21–22

[220] Bambang Siswoyo, P., *op. cit.* 1989, hlm. 25; Riyanto, *op. cit.*, 2006, hlm. 24

[221] Pusat Sejarah TNI, *op. cit.*, 2000, hlm. 43

disampaikan kepada pemerintah RI pada 7 Juni 1976. Sebagai realisasi petisi tersebut, pemerintah RI mengeluarkan UU No. 7/1976 yang mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam negara Republik Indonesia tanggal 17 Juli 1976. Setelah Timor Timur menjadi provinsi negara RI, pemerintah mencurahkan perhatiannya untuk membangun provinsi ini dari pelbagai macam ketinggalan dengan provinsi lain.[222] Untuk menyukseskan pembangunan dilancarkan operasi teritorial. Hasil pembangunan di samping berdampak positif juga berdampak negatif. Urbanisasi meningkat pesat, penduduk kota Dili yang pada tahun 1976 berjumlah 25.000 orang meningkat menjadi 124.284 orang pada tahun 1991. Akibat pesatnya kemajuan pendidikan, dan kurangnya lapangan kerja, jumlah angkatan kerja yang tidak tertampung semakin meningkat setiap tahunnya.[223] Mereka menuntut pemerintah agar disediakan lapangan kerja yang memadai.

Pada 8 Oktober 1996 kelompok anti-integrasi menggunakan sekolah Eksternanto dan SMPK Santo Paulus sebagai pusat aksi-aksinya. Pada 15 Oktober 1990 terjadi insiden antara siswa sekolah tersebut dengan aparat keamanan karena aparat keamanan menurunkan spanduk yang menolak Pancasila. Aparat keamanan dipukul dan senjatanya dirampas, bendera Merah Putih yang berkibar di depan sekolah diturunkan. Pemuda pro-integrasi membalas dan terjadi perkelahian di kompleks Gereja Montea, seorang siswa meninggal dalam bentrokan ini.

Sekalipun operasi keamanan yang dilakukan oleh ABRI secara berangsur-angsur berhasil, keamanan di Timor Timur secara umum telah kondusif, masyarakat Timor Timur masih terpecah antara kelompok pro-integrasi dan kelompok anti-integrasi. Pada 28 Oktober 1991, kembali terjadi bentrokan antara dua kelompok tersebut di depan Geraja Motael. Dalam bentrokan ini jatuh korban pada kedua belah pihak. Kelompok anti-integrasi memanfaatkan peristiwa ini dengan melakukan demonstrasi anti pemerintah RI bertepatan dengan momentum kedatangan pelopor khusus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Pieter Kooijmans. Pada 12 November 1991, berlangsung upacara misa di Gereja Motael, dilanjutkan dengan acara tabur bunga bagi pemuda anti-integrasi yang tewas pada peristiwa 28 Oktober 1991. Seusai acara misa, para jemaat yang mayoritas anak muda tidak segera meninggalkan tempat, tetapi berbaris menuju ke kota sambil mengacung-acungkan tangan dengan yel "Viva Fretilin" "Viva Xanana Gusmao". Sebagian dari mereka membeberkan poster *"Check The Prison"* yang ditujukan kepada Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB yang berada di Hotel Turismo. Tiga peleton aparat keamanan memblokade jalan, tetapi massa

---

[222] Sekretariat Negara RI, 50 *Tahun Indonesia Merdeka*, 1977, hlm. 104

[223] Pusat Sejarah TNI, *Sejarah TNI*, jilid V, 2000, hlm. 69

kemudian masuk ke pusat kota dan mengamuk. Mayor Gerhan Lantara yang berusaha menenangkan massa ditusuk dengan pisau, massa panik, suasana tidak terkendali, sebagian menuju ke makam Santa Cruz. Aparat keamanan lalu bersiaga penuh di makam, dari dalam makam terdengar suara tembakan dan sebuah granat tangan dilempar ke aparat keamanan. Aparat keamanan membalas dengan melepaskan tembakan peringatan, akibatnya terjadi kepanikan luar biasa, dan ribuan orang mati terinjak-injak karena suasana kacau.[224] Tim Kooijmans menilai bahwa tindakan kekerasan di Dili harus diselesaikan di forum PBB. Untuk menyelidiki tindakan kekerasan dan jumlah korban kerusuhan Dili ini, pada 19 November 1991, pemerintah membentuk Komisi Penyelidik Nasional (KPN) yang terdiri atas Hakim Agung Djaelani, S.H. dibantu oleh Hari Soegiman (Departemen Dalam Negeri), Anton Suyata (Departemen Kehakiman), Clementio Dos Reis Amaral (Anggota DPR), Ben Mang Reng Say (Dewan Pertimbangan Agung), Hadi Wayarabi Al-Hadar (Departemen Luar Negeri), serta Laksamana Muda Sumitro (Markas Besar ABRI). Komisi yang diberi waktu selama 20 hari berhasil mewawancarai sejumlah 132 orang saksi dengan menelusuri rute perjalanan demonstrasi dari depan Gereja Motael sampai ke pemakaman Santa Cruz. Dalam penelitiannya, komisi menemukan 72 bekas tembakan pada pintu tembak, pintu makam, tiang-tiang listrik, dan pada pohon di pemakaman lain sejumlah kuburan, baru ditemukan. Dari pihak aparat keamanan jatuh korban dua orang luka-luka akibat penusukan.

Dalam laporannya kepada pemerintah, KPN menyimpulkan:

1. Peristiwa 12 November 1991 dilakukan oleh kelompok anti-integrasi/ gerakan pengacau keamanan Fretilin yang sudah direncanakan. Karena hasutan kelompok itu, massa demonstran berubah menjadi beringas, emosional, dan destruktif.
2. Akibat keberingasan massa tersebut terjadi penusukan terhadap seorang perwira ABRI, melukai seorang anggota ABRI dan membahayakan keselamatan jiwa aparat keamanan. Reaksi spontan para prajurit tanpa kendali komando melakukan pembelaan diri dan penembakan terhadap demonstran sehingga jatuh korban mati dan luka-luka.
3. Sekalipun ada pasukan yang bertugas sebagai pengendali huru-hara, kondisi saat itu tidak memungkinkan digunakannya prosedur penanganan huru-hara secara optimal.
4. Di samping pasukan pengendali huru-hara, ada kelompok pasukan dan aparat keamanan lain yang terbukti melakukan penembakan dan

[224] Pusat Sejarah TNI, *Sejarah TNI*, jilid VI, 2000, hlm. 71

penganiayaan sehingga menimbulkan banyaknya korban yang meninggal dan luka-luka.

Selanjutnya KPN menyarankan, demi tegaknya hukum semua kelompok yang terlibat dalam Peristiwa 12 November 1991 di Dili perlu diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku di negara RI.

Sementara itu, pada tanggal 30 Desember 1991 Markas Besar ABRI membentuk Dewan Kehormatan Militer (DKM), yang bertujuan untuk meneliti secara mendalam dan langkah-langkah komando dalam menangani peristiwa Dili 12 November 1991 ini.[225] Dewan Kehormatan Militer ini terdiri atas tujuh perwira tinggi yang berpangkat mayor jenderal, yaitu

1. Mayor Jenderal Feisal Tanjung, sebagai ketua;
2. Mayor Jenderal Setiana, sebagai wakil ketua;
3. Mayor Jenderal Toni Hartono, wakil ketua merangkap sekretaris;
4. Mayor Jenderal Suryadi Sudirja, anggota;
5. Mayor Jenderal Suwardi, anggota;
6. Mayor Jenderal Sutedjo, anggota;
7. Mayor Jenderal Sunardi, anggota.

Dewan Kehormatan Militer memulai tugasnya pada 2 Januari 1993 dengan melakukan rekonstruksi peristiwa dan memeriksa Panglima Komando Pelaksana Operasi (Pangkolakpos) Brigadier Jenderal Rudolf S. Warrouw. Setelah berada di Dili selama 50 hari, DKM menyimpulkan ada dua kesalahan, yaitu kesalahan komando dan kesalahan pidana. Pengendalian dan pelaksanaan di lapangan menyebabkan 50 orang meninggal dan 91 orang luka-luka. Perencanaan operasi pengendalian sebenarnya sudah baik, tetapi pengendalian dan pelaksanaan di lapangan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok anti-integrasi, merupakan suatu kegagalan dalam tugas. Dewan Kehormatan Militer merekomendasi agar dua orang pejabat yang bertanggung jawab diberikan sanksi dan pelaku tindak kekerasan diajukan ke pengadilan.

Rekomendasi DKM diterima oleh Pangab. Dua orang pejabat yakni Mayor Jenderal Sintong Pandjaitan, Panglima Kodam IX/Udayana dan Panglima Komando Pelaksana Operasi Brigjen Rudolf S. Warrouw diganti. Brigadier Jenderal Theo Syafei diangkat sebagai pengganti Brigjen Rudolf S. Warrouw dan Mayor Jenderal H.B.L. Mantiri diangkat sebagai Panglima Kodam IX/Udayana yang baru menggantikan Mayor Jenderal Sintong Pandjaitan.

---

[225] Pusat Sejarah TNI, *Sejarah TNI*, jilid IV, 2000, hlm. 72–74

5. Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia

Pada Juni 1993, pemerintah Indonesia bersama 171 negara menandatangani *Vienna Declaration and Programme Action* (Deklarasi Wina dan Program Aksi), yaitu kesepakatan tentang hak asasi manusia baik yang bersifat politik maupun ekonomi, harus diperlakukan dengan dasar level yang sama, sekalipun dalam pelaksanaannya berdasarkan kekhasan nasional, regional dan latar belakang sejarah.[226]

> "Semua orang berhak untuk menetapkan nasib sendiri. Dengan hak ini mereka bebas menetapkan status politik mereka serta dengan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka."[227]

Ada dua peristiwa yang menjadi latar belakang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu janji Presiden Soeharto dalam pidatonya pada lokakarya Regional Hak Asasi Manusia Asia-Pasifik PBB pada bulan Januari 1993 dan Deklarasi Wina 1993. Sesudah Deklarasi Wina 1993 itu, pemerintah RI mengeluarkan Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Pemerintah menunjuk Letnan Jenderal Ali Said, S.H., mantan Ketua Mahkamah Agung dan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman untuk menyusun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibantu oleh Kohar Hari Sumarno, mantan Hakim Agung, Bambang W. Suharto dari Kosgoro, dan Prof. Dr. Hamid S. Attamimi, pejabat Sekretariat Negara, sebagai panitia persiapan pembentukan komisi ini. Setelah panitia bekerja keras dengan menghadapi pelbagai tantangan dan tentangan terutama setelah terjadinya peristiwa Dili (November 1991), pada bulan Desember 1993, panitia mengajukan 25 orang calon anggota Komnas HAM kepada Presiden yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Presiden No. 455/M/1993 tentang anggota Komnas HAM.[228] Para anggota Komnas HAM dalam sidangnya yang pertama, sepakat memilih Ali Said, S.H. sebagai Ketua, Prof. Miriam Budiardjo dan Marzuki Darusman sebagai Wakil Ketua, dan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal.[229] Fungsi utama dan peran komisi ini adalah sebagai salah satu organ negara anggota PBB dalam

---

[226] Miriam Budiardjo, "Sambutan" dalam Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, 2002, hlm. V–VI

[227] Deklarasi Wina merupakan keputusan dari *World Conference on Human Rights 1993*

[228] Saafroedin Bahar, *op. cit.*, 2002, hlm. 296–298

[229] Anggota Komnas Ham, berdasarkan Keppres 456/M/1993, 3 Desember 1993, adalah: Letjen Ali Said, S.H., Prof. Dr. Miriam Budihardjo, Prof. Dr. Baharudin Lopa, S.H., Dr. Albert Hasibuan, H. Aisyah Amini, Asmara Nababan, Drs. Bambang W. Suharto, Dr. H.A.A. Baramuli, S.H., Clementino Dos Reis Amaral, Mayjen Ignatius Djoko Mulyono, H.R. Djoko Sugianto, S.H., Gani Djemat, S.H., Prof. Dr. Hamid S. Attamini, S.H., K.H. Hasan Basri,

melaksanakan tanggung jawab internasionalnya dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, dengan tiga fungsi, yaitu pengkajian instrumen hak asasi manusia, pemantauan, serta pendidikan dan penyuluhan.[230] Namun, yang lebih utama adalah misi yang diemban oleh Komnas HAM ini, yaitu perlindungan, pemajuan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan menggunakan instrumen hak asasi manusia yang telah disepakati oleh PBB dan harus independen terhadap pemerintah RI. Independen dari pemerintah (RI) merupakan ciri utama dari Komnas HAM, sekalipun para anggotanya berasal dari mantan pejabat atau pejabat pemerintah.

Pada saat mengawali tugasnya, Komnas HAM berhadapan dengan sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di pelbagai daerah. Sebab-sebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, *pertama,* adanya kecenderungan dari pihak yang berkuasa tidak lagi mampu mengekang diri. *Kedua,* kebiasaan mereka yang berkuasa menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. *Ketiga,* adanya budaya *ewuh-pakewuh* menyebabkan penegakan hukum menjadi bersifat diskriminatif.[231] Sampai pada bulan Oktober 1997, Komnas HAM menerima 7.723 pengaduan dari berbagai kasus. Kritik pedas sering kali dilontarkan kepada Komnas HAM, berasal dari instansi pemerintah sendiri, karena dianggap bertindak sebagai *superbody.* Namun, Komnas HAM secara gigih mempertahankan sikap independensinya dari pemerintah. Di samping pemerintah, beberapa tokoh masyarakat yang peduli terhadap HAM, seperti Adnan Buyung Nasution, Asmara Nababan, Todung Mulia Lubis, Abdul Hakim Garuda Nusantara, Nursyahbani Katjasungkana, Emmy Hafidz, dan Zumrotin, telah lebih dahulu melakukan kegiatan menyebarkan konsep-konsep tentang hak asasi manusia ke masyarakat.[232]

6. Peristiwa 27 Juli 1996

Konflik dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kelompok pendukung Suryadi (Ketua Umum, Kongres Medan 1996) melawan kelompok pendukung Megawati (Ketua Umum, Munas Jakarta 1993) mencapai puncaknya pada pasca Kongres IV PDI di Medan tanggal 20 Juni

---

Prof. Charles Himawan, S.H., B.N. Marbun, S.H., Marzuki Darusman, S.H., Prof. Dr. Muladi, S.H., Munawir Sjadzali, M.A., Dr. Nurcholis Madjid, Brigjen Dra. Roekmini K. Astoeti, Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Mayjen Sugiri, S.H., Prof Sutandyo Wignyosubroto, S.H., dan Prof. Dr. Soemantri Martokusumo

230 Saafroedin Bahar, *op. cit.*, 2002, hlm. XVII–XVIII

231 Komnas HAM, *Hak Asasi Manusia Membangun Jaringan Kerja Sama,* 1998, hlm. 7

232 Elsam, *Atas Nama Pembangunan Bank Dunia dan Hak Asasi Manusia*, 1995, hlm. 48

1996. Pada kongres PDI ketiga yang diselenggarakan di Pondok Gede Jakarta pada 15 April 1986 dan dibuka oleh Presiden Soeharto, tidak berhasil memilih seorang ketua umum pada sidang terakhir pada 18 April 1986. Peserta kongres menyerahkan mandat kepada pemerintah untuk menyusun DPP PDI yang baru. Pemerintah menetapkan pimpinan DPP baru periode 1986–1991 yang dipimpin oleh Suryadi (Ketua Umum) dan Nicolaus Daryanto (Sekretaris Jenderal). Sejak saat itu terjadi perpecahan dalam tubuh PDI, bahkan meluas sehingga sering kali terjadi bentrokan fisik antara pendukung kedua tokoh ini. Pelbagai saran dan anjuran baik dari pemerintah maupun dari sesepuh PNI, seperti Roeslan Abdulgani, agar PDI mengakhiri dualisme kepemimpinannya, tidak berhasil. Dari pihak pemerintah antara lain Kepala Staf Sosial Politik ABRI Syarwan Hamid juga menyarankan agar Suryadi dan Megawati melakukan musyawarah,[233] tetapi tidak berhasil.

Dari pihak Megawati, kemudian membentuk Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang dipimpin oleh Amertiwi Saleh, R.O. Tambunan, dan Abdul Hakim Garuda Nusantara, untuk menuntut pemerintah agar membatalkan Kongres PDI di Medan.[234] Kelompok ini kemudian melakukan aksi mimbar bebas di kantor DPP PDI Jalan Diponegoro 58 Jakarta yang didukung oleh kelompok Partai Rakyat Demokratik (PRD), Kelompok Enam Belas, serta tokoh Petisi 50.[235]

Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 1996 kelompok pendukung Suryadi bergerak untuk merebut gedung DPP PDI. Lima truk yang mengangkut 200 orang pendukung Suryadi yang dipimpin oleh Buttu Hutapea Sekjen PDI dengan mengenakan kaus bertuliskan "Pro Kongres" tiba di depan Kantor PDI. Pendukung Megawati bertahan di halaman kantor. Kedua belah pihak bentrok saling melempar batu sehingga kaca-kaca jendela hancur berantakan. Sementara kelompok massa yang bergerak dari arah lain membakar sebuah bus di Jalan Surabaya. Di tengah-tengah "perang batu" aparat kepolisian dengan mengendarai ambulans mengadakan negosiasi dengan pendukung Megawati yang disusul oleh Komandan Kodim 0501. Dua panser bergerak dari Jalan Surabaya menuju ke arah keributan. Menjelang pukul 09.00 massa pendukung Suryadi berhasil memasuki halaman gedung. Pendukung Megawati terdesak, aparat kepolisian bergerak memisahkan mereka dan menutup jalan antara Jalan Surabaya dan Pegangsaan. Puluhan korban berjatuhan. Pendukung Megawati yang terkonsentrasi di depan gedung bioskop Megaria, mencoba menembus barikade polisi. Massa kemudian mundur ke arah Cikini, Salemba, dan Jalan

[233] *Merdeka*, 2 Juni 1996
[234] *Merdeka*, 2 Juli 1996
[235] *Merdeka*, 31 Ju1i 1996

Proklamasi. Massa yang mundur ke arah Salemba dan Matraman merusak dan membakar Kantor Persit/Chandra Kirana, gedung Departemen Pertanian beserta mobil yang berada di dalamnya. Mereka juga merusak dan membakar gedung Darmek, Bank Kesawan, dan Bank Swarsarindo. Sebagian massa melempari kantor Polsek Matraman. Massa yang bergerak ke arah Kramat Raya membakar *show-room* Toyota Auto 2000, dan merusak gedung Bank Bumi Daya dan Bank Dagang Negara. Massa yang bergerak ke sekitar Jalan Proklamasi merusak gedung Telkom, Jalan Penataran, dan membakar 23 mobil. Dua rumah toko (ruko) di Jalan Proklamasi juga dibakar. Massa yang mundur lewat Jalan Cikini merusak gedung Bank BHS. Sementara itu, aksi pendukung Megawati masih berlanjut sampai hari Minggu tangga1 28 Juli.[236]

Melihat peristiwa kerusuhan ini pemerintah bereaksi keras, Kepala Staf Sospol ABRI Syarwan Hamid dan Dirjen Sospol Depdagri Sutoyo N.K. mengundang sejumlah organisasi massa ke Departemen Dalam Negeri. Mereka menyatakan bahwa peristiwa kerusuhan itu telah berkembang bukan lagi murni masalah intern PDI, melainkan sudah meluas dengan masuknya pelbagai kepentingan yang beraliansi dengan pimpinan PDI.

Sejumlah 240 orang ditangkap dan 120 orang dinyatakan sebagai tersangka.[237] Beberapa orang tokoh ditahan oleh Kejaksaan Agung, antara lain, Mochtar Pakpahan, pimpinan Serikat Buruh Indonesia (SBS) dan tokoh-tokoh Partai Rakyat Demokratik (PRD), tokoh Majelis Rakyat Indonesia (MARI), Ridwan Saidi, Permadi, Budiman Sujatmiko, dan Petrus Haryanto.[238]

Akibat peristiwa ini, berdasarkan penelitian Komnas HAM, 70 orang dinyatakan hilang dan 149 orang luka-luka.[239] Kerugian material meliputi 22 gedung dan 91 mobil dibakar, serta 2 sepeda motor dirusak.[240]

I. Pemilihan Umum Sampai dengan 1997

1. Landasan Pemilihan Umum pada Zaman Orde Baru

Seperti halnya setiap sistem demokrasi, sistem Demokrasi Pancasila pun memerlukan pemilihan umum sebagai salah satu sarana bagi usaha mewujudkan keinginan hidup dalam alam demokrasi.[241]

---

[236] *Merdeka*, 29 Juli 1996

[237] *Merdeka*, 31 Juli 1996

[238] *Harian Angkatan Bersenjata*, 13 Agustus 1996

[239] *Harian Angkatan Bersenjata*, 7 September 1996

[240] *Merdeka*, 29 Juli 1996

[241] Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, 1978, hlm. 71–78

Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa Indonesia berdasarkan kepada ajaran kedaulatan dengan pemerintahan yang didasarkan kepada tujuh prinsip, yaitu Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional, kekuasaan tertinggi berada di Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, pemerintah yang bertanggung jawab, pemerintahan yang berdasarkan perwakilan, pemerintah bersistem presidensial, dan adanya pengawasan badan perwakilan.[242] Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan patokan dasar bagi setiap warga negara Indonesia.

Sebenarnya landasan kekuatan sistem politik demokrasi Pancasila diletakkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu landasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan pemilihan umum adalah tentang pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat.[243] Hal ini kemudian diperjelas dengan sejumlah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1973.

Untuk menjelaskan proses dan hasil pemilihan umum 1971 dan 1977 serta gambaran menuju pemilihan umum 1982 sehingga dijelaskan tentang asas dan sistem yang dipergunakan dalam pemilihan umum. Asas pemilihan yang dipergunakan bersifat umum, langsung, bebas, dan rahasia.

Asas pemilihan bersifat *umum* berarti bahwa pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 atau telah menikah, berhak ikut memilih dalam pemilihan, jika telah berusia 21 tahun berhak dipilih. Asas pemilihan bersifat *langsung*, berarti bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. Asas pemilihan bersifat *bebas*, berarti bahwa tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun atau dengan apa pun. Asas pemilihan bersifat *rahasia*, berarti bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan, tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dengan jalan apa pun, siapa yang dipilihnya. Keterangan ini dikutip dari penjelasan atas Undang-Undang

[242] Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pantjasila*, 1968, hlm. 69–85

[243] Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 Ayat 1. Perhatikan juga ketetapan-ketetapan MPR hasil pemilihan umum 1973, demikian juga sebelumnya yang tergambarkan dari UU No. 15 dan 16 tahun 1969, dilanjutkan UU No. 4 dan 5 tahun 1979. Perumusan yang penting berkisar pada pembentukan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang terdiri dari golongan politik, Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI, untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan Golongan Politik, Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI serta Utusan Daerah untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

No. 15 tahun 1969 pada bagian tujuan pemilihan umum, dan penjelasan atas Undang-Undang No. 4 tahun 1975. Sistem pemilihan memakai sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar.

Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, dipakai sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Dengan demikian, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD sejauh mungkin berimbang dengan besarnya dukungan dalam masyarakat pemilih. Untuk mencapai tujuan ini, suatu organisasi yang nama-nama calonnya disusun dalam suatu daftar calon mendapat jumlah kursi berdasarkan suatu bilangan pembagi yaitu suatu bilangan yang diperoleh dengan membagi jumlah kursi yang tersedia. Yang dimaksudkan dengan *sistem daftar* adalah sistem pemilihan menggambarkan adanya pengakuan terhadap stelsel organisasi yang ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan. Dengan demikian, tiap-tiap daerah tingkat II mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil, yang ditetapkan berdasarkan sistem perwakilan berimbang yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Asas dan sistem yang digunakan dalam pemilihan umum 1971 dan 1977 tidak ada perbedaannya. Peserta dalam pemilihan umum 1971 berjumlah 10 organisasi yang terdiri dari 9 partai dan 1 golongan karya.[244] Perlu diketahui bahwa salah satu usaha pembangunan politik dalam masa pemerintahan Orde Baru adalah dengan jalan mengadakan penyederhanaan kepartaian, sehingga peserta dalam pemilihan umum 1977 tinggal tiga organisasi, yang terdiri dari dua golongan politik dan satu Golongan Karya. Komposisi peserta pemilu tersebut tetap hingga tahun 1997.

2. Pemilihan Umum 1971

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, peserta dalam pemilihan umum 1971 meliputi sembilan partai politik (Partai Katholik Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Nadhlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Indonesia) dan Golongan Karya. Partai-partai politik berusaha untuk memenangkan pemilihan atau bertahan dalam posisi yang ada. Sementara Golongan Karya yang didukung oleh ABRI dan segolongan cendekiawan, berusaha untuk mendapat kepercayaan bagi usaha pembangunan Indonesia seperti yang dicanangkan oleh Orde Baru pada tahun 1966. Isu kampanye sangat berpengaruh kepada kemenangan Golongan Karya karena pada saat itu masyarakat sedang dilanda kelesuan

[244] Laporan hasil pemilihan umum yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemilihan Umum 1971 dan 1977

dan ketidaksenangan dengan tingkah laku partai-partai politik di masa lalu. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bagi usaha kemenangan Golongan Karya.[245] Berkaitan dengan usaha memenangkan Golongan Karya, peran ABRI tidak dapat dikesampingkan. Pernyataan pimpinan ABRI yang tersimpul dalam rapat pimpinan sejak 1969 sedikit banyaknya menunjukkan kepada siapa ABRI mendukung.

Dalam pemilihan umum 1971, partai-partai politik mendapat 124 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, sementara Golongan Karya mendapat 261 kursi (semula 236 kursi, kemudian ditambah 25 kursi melalui hak pengangkatan yang dimiliki presiden) dan ABRI mendapat 75 kursi.[246] Untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat terlihat hasil bahwa partai-partai politik mendapat 168 kursi (setelah ditambah dari selisih hasil pemilihan sebanyak 42 kursi dan diangkat 2 kursi). Golongan Karya mendapat 340 kursi ditambah dengan yang diangkat 207 kursi (terdiri dari 155 kursi Golongan Karya ABRI dan 52 kursi Golongan Karya bukan ABRI), sehingga secara keseluruhan Golongan Karya mendapat 547 kursi. Di samping partai-partai politik dan golongan karya (ABRI dan bukan ABRI), dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat juga terdapat perwakilan Utusan Daerah.

Kebijakan mengadakan perwakilan Utusan Daerah sesuai dengan maksud yang dikandung dalam UUD 1945 Bab II Pasal 2 Ayat 1. Dengan demikian, dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat terdapat kelompok (sering disebut dengan nama: fraksi) Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya, ABRI, dan Utusan Daerah yang berjumlah 130 kursi.[247]

Dengan kemenangan yang diterima dari hasil pemilihan umum 1971, usaha pemantapan dan pembinaan Demokrasi Pancasila kini mendapat kepercayaan yang lebih tinggi di kalangan rakyat. Usaha pemerintah dalam mencapai tujuan nasional diwujudkan melalui Pembangunan Lima Tahun I (1969/1970–1973/1974), dan Pembangunan Lima Tahun II (1974/1975–1975/1979) yang semula menekankan pembangunan utama di sektor ekonomi, pertanian, dan industri penunjang pertanian; berubah dalam

---

[245] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12/1969 tentang perlu adanya monoloyalitas pegawai negeri kepada pemerintah. Kemudian dipertegas dengan kebijakan tentang pelarangan pegawai negeri ikut dalam salah satu organisasi politik tanpa seizin atasan. Untuk jelasnya lihat Masashi Nishihara, *Golkar and the Indonesian Elections of 1971*, Monograph Series, 1972, New York, hlm. 19 – 21

[246] Kebijakan mengangkat sejumlah anggota ABRI dalam badan permusyawaratan/perwakilan rakyat adalah karena ABRI menanggalkan hak pilihnya untuk menghindarkan perpecahan di dalam tubuh ABRI yang akan mengancam pula persatuan nasional.

[247] Laporan hasil pemilihan umum, *op. cit.*

Pembangunan Lima Tahun III (1979/1980–1983/1984) yang menekankan aspek kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan melalui Trilogi Pembangunan.

Perubahan strategi sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Trilogi pembangunan berarti; (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; (c) stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

3. Pemilihan Umum 1977

Pemilihan umum III diadakan pada tahun 1977. Dalam pemilihan umum ini, asas dan sistem yang dipakai masih tetap sama dengan pemilihan umum 1971. Peserta dalam pemilihan umum 1977 terdiri dari tiga kelompok. *Pertama,* Partai Persatuan Pembangunan (terdiri dari partai-partai Islam: Partai Nadhlatul Ulama, Partai Syarikat Islam, Partai Muslimin Indonesia, dan Partai Persatuan Tarbiyah Indonesia). *Kedua,* Partai Demokrasi Indonesia (terdiri dari Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik Indonesia, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan Partai Murba). *Ketiga,* Golongan Karya sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pemilihan Umum.[248] Hal ini kemudian dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.[249]

Dalam pemilihan umum 1977 terjadi perbedaan yang tajam dalam isu kampanye. Pada pemilihan umum 1971 isu berkisar pada perbedaan yang tajam antara orientasi ideologi (terutama didominasi oleh kelompok partai politik) berhadapan dengan orientasi pembangunan (terutama didominasi oleh kelompok Golongan Karya). Dalam pemilihan umum 1977, isu berkisar kepada seberapa jauh kemampuan dan keberhasilan pemerintah menjalankan pembangunan.[250] Untuk mencegah dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pihak keamanan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang sedikit banyak mengurangi ketegangan dalam masa kampanye sebelum pemilihan umum berlangsung.[251]

Hasil pemilihan umum 1977 memperlihatkan bahwa kemenangan masih tetap pada Golongan Karya. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat

---

[248] Ketetapan MPR RI Nomor VIIII/MPRI/1973 tentang Pemilihan Umum

[249] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tetang Partai Politik dan Golongan Karya

[250] R. William Liddle, "The 1977 Indonesia Elections an New Order Legitimacy" dalam Leo Suryadinata (ed.), *Southeast Asian Affairs 1978, Singapore,* 1978, hlm. 127

[251] R. William Liddle, *Ibid.,* hlm. 128

kelompok partai-partai politik mendapat 128 kursi, Golongan Karya 257 kursi (semula 232 kursi, kemudian ditambah 25 kursi sesuai dengan hak pengangkatan oleh presiden), sementara ABRI masih tetap dengan 75 kursi. Untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat terlihat bahwa kelompok partai mendapat 170 kursi, Golongan Karya mendapat 490 kursi (terdiri dari jumlah hasil tambahan pemilihan sebanyak 76 kursi, golongan karya ABRI 155, dan golongan karya bukan ABRI sebanyak 52 kursi). ABRI mendapat 75 kursi; sementara Utusan Daerah mendapat 135 kursi.[252]

4. Pemilihan Umum 1982

Pemilu ke-4 yang berlangsung pada tahun 1982 diikuti oleh tiga peserta kontestan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Dalam kampanye pemilu ini ditandai dengan kekerasan berskala besar. Surat kabar *Pelita* dan majalah *Tempo* dilarang terbit karena menurunkan laporan tentang kekerasan yang berkembang pada kerusuhan besar pada sebuah rapat umum *Golkar* di lapangan Banteng, Jakarta dengan korban 60 orang.[253]

Puncak pemilu yang berlangsung pada 4 Mei 1982 dengan kemenangan besar yang dicapai oleh Golkar sebesar 64,3 persen (perolehan suara 48.334.724 suara), PPP mendapatkan 27,78 persen (perolehan suara 20.871.880 suara), dan PDI mengumpulkan 7,88 persen (perolehan suara 5.919.702 suara). Dari hasil pemilu tersebut, di DPR, Golkar mendapat 246 kursi, PPP mendapat 94 kursi, dan PDI mendapat 24 kursi. Dalam hal ini Golkar meraih kemenangan di Jakarta, yang sebelumnya dikuasai PPP pada Pemilu 1977. Selain itu, kemenangan juga diperoleh di seluruh provinsi kecuali Aceh. Pada periode 1982–1987 terdapat 77 orang personel ABRI dalam legislatif.[254]

5. Pemilihan Umum 1987

Penyelenggaraan pemilu 1987 mencerminkan situasi tenang dan tidak membawa pertentangan oleh karena ketiga kontestan sejak tahun 1985 telah menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Meskipun perolehan suara dari hasil pemilu tahun 1982 tetap menunjukkan dominasi suara berada di pihak Golkar. Pelimpahan suara dari NU menjadi keberuntungan tersendiri bagi organisasi tersebut.

---

[252] Laporan hasil pemilihan umum, *op. cit.*

[253] R.E. Elson, *op. cit.*, 2005, hlm. 447

[254] Syamsul Ma'arif, dkk., *TNI-Polri Dalam DPR/MPR 1960*, 2004, hlm. 469

Peralihan pendukung NU dari PPP ke Golkar tampak jelas dari hasil pemilu 23 April 1987. Perolehan suara Golkar melonjak dari 64,34 persen pada tahun 1982 menjadi 72,94 persen. Hal ini disebabkan oleh penarikan diri NU dari partai politik (PPP) sejak kongresnya pada tahun 1984. Ketika itu NU berada di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid sebagai ketua dewan tanfidznya.

Sementara itu, PPP dalam perolehan suara pada hasil pemilu tersebut merosot dari 27,78 persen pada 1982 menjadi 16,04 persen pada tahun 1987. PDI mengalami peningkatan perolehan suara, yaitu dari 7,88 persen pada 1982 menjadi 11,02 persen pada tahun 1987. Jadi, 11,9 persen suara telah meninggalkan PPP dan 8,9 persen beralih ke Golkar dan sisanya ke PDI. Golkar pada pemilu ini mendapatkan kemenangan pertama dari Aceh dengan meraih 51,8 persen suara, PPP meraih 42,8 persen, dan PDI hanya 5,4 persen suara.

Berdasarkan hasil perolehan suara yang dicapai dalam pemilu ini, jumlah anggota DPR ditingkatkan, yaitu dari 460 anggota menjadi 500 anggota (100 anggota dialokasikan untuk ABRI). Dalam hal ini, Golkar yang memperoleh 62.433.161 suara pada pemilu ini, mendapat 299 kursi di DPR. PPP yang memperoleh 13.730.456 suara mendapat 61 kursi di DPR. PDI dengan perolehan 9.434.667 suara, mendapat 40 kursi di DPR.[255]

6. Pemilihan Umum 1992

Pada pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada bulan Juni 1992, pemerintah berhasil menciptakan suasana aman meskipun pihak oposisi telah memberikan warna lain dalam menyongsong pemilu tersebut. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan larangan atas pawai-pawai jalanan untuk menghindari kekerasan saat berkampanye. Kontestan pemilu tidak mengalami perubahan, yaitu PPP, Golkar, dan PDI.

Pada kampanye Pemilu 1992, PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi menyerukan supaya masa jabatan presiden dibatasi. Kampanye tersebut merupakan warna baru setelah pemerintah berhasil menyatukan para peserta kontestan dalam ikatan satu asas tunggal pada pemilu sebelumnya. Dalam kesempatan itu PDI mengajak Guruh Soekarno Putra (putra bungsu Presiden Pertama RI, Soekarno) sebagai alternatif calon presiden.[256]

Di tengah adanya oposisi yang mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sejak era 1970-an pemerintah melakukan antisipasi untuk memperkecil kerusuhan-kerusuhan di sekitar pemungutan suara yang

---

[255] William Liddle, *op. cit.*, 1978, hlm. 171

[256] M.C. Ricklefs, *op. cit.*, 2005, hlm. 638

Gambar 5.4 Presiden Soeharto sedang menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 1992 di TPS 002 Cendana tanggal 9 Juli 1992 (Sumber: *Dokumen Istimewa*)

dilakukan pada tanggal 9 Juni 1992. Pada pemilu ini Golkar tetap menduduki posisi pertama dalam mencapai kemenangan dengan meraih 66.559.331 suara (68 persen) dan memperoleh 282 kursi di DPR. PPP memperoleh 16.624.647 suara (17 persen) dengan memperoleh 62 kursi di DPR, sedangkan PDI memperoleh kenaikan suara, yaitu 14.565.556 suara (1987: 11.02 persen menjadi 14,9 persen pada 1992). Di DPR, PDI memperoleh 56 kursi. Pada periode hasil pemilu 1992 dalam fraksi ABRI terdapat 166 orang.[257]

7. Pemilihan Umum 1997

Kampanye pemilu 1997 merupakan suatu peristiwa yang mencerminkan ketidakpuasan sosial politik masyarakat. Kampanye pada pemilu ini membawa korban besar, yaitu 250 orang meninggal dalam iring-iringan pawai politik dengan menggunakan motor. Di Banjarmasin, segerombolan penjarah terperangkap di dalam pusat perbelanjaan yang terbakar. Sejumlah 130 orang meninggal dunia. Sabotase terhadap kotak-kotak pemungutan suara sering kali terjadi.

Dalam pemungutan suara yang dilakukan tanggal 29 Mei 1997, Golkar mencapai kemenangan terbesarnya, yaitu 684.187.907 suara (74,5 persen). Hasil pencapaian Golkar merupakan kejadian fenomenal di tengah masa awal runtuhnya Orde Baru. Di Madura, pendukung PPP yang tidak puas melakukan pembakaran gedung-gedung pemerintah dan kantor-kantor Golkar serta menghancurkan banyak kotak suara sehingga pemungutan suara pun harus diulang. Hasil pemungutan suara untuk PPP adalah 25.340.028 suara (22,4 persen) dan PDI mendapat 3.565.556 suara (2,6 persen).

Dari hasil perolehan suara, masing-masing kontestan mendapat jatah kursi di DPR. Golkar mendapat 325 kursi, PPP memperoleh 89 kursi, dan PDI mendapat 11 fraksi. DPR Fraksi ABRI yang dalam periode sebelumnya terdapat 100 personel jumlah kursi fraksi ABRI di DPR dikurangi menjadi 75 orang. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi peran ABRI di lembaga legislatif dengan hasil pemilu 1997.[258]

J. Perkembangan Olahraga

Kelembagaan bidang olahraga mengalami perubahan sejak lahirnya pemerintah Orde Baru yang penanganannya berada di bawah Direktorat Jenderal Olahraga (Ditjora). Namun, keberadaan lembaga ini hanya berlangsung dari tahun 1966–1969. Hal ini disebabkan adanya hambatan

[257] Syamsul Maa'rif, *op. cit.*, 2004, hlm. 473

[258] M.C. Ricklefs, *op. cit.*, 2005, hlm. 650

kewenangan, seperti pengambilan keputusan cakupan atau lingkup kerja sama, kesulitan dalam berkoordinasi, dan keterbatasan anggaran.

Dalam perkembangan selanjutnya, bidang olahraga pun mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat internasional. Saat itu bulu tangkis yang telah menjadi primadona di tengah pertumbuhan bidang olahraga lainnya mengantarkan para atlet-atletnya, seperti Ferry Soneville, Tan Joe Hok, Mulyadi, Tjun Tjun, Rudi Hartono, Liem Swie King, Verawaty Fajrin, dan Ivana Lie, menjadi juara dunia dalam pertandingan piala Thomas Cup maupun All England.

Selain itu, cabang-cabang olahraga lainnya pun mulai bermunculan, seperti taekwondo dan karate. Karate yang asalnya merupakan olahraga bela diri dari Jepang, pada tahun 1957 mengalami puncak kejayaannya sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Japan Karate Assosiation (JKA) baik di Jepang maupun di tingkat dunia. Sejak itu cabang olahraga karate yang awalnya diperkenalkan oleh Cichin Funakoshi (Bapak Karate Modern), berkembang pula di negara-negara lain, seperti Indonesia. Selain olahraga karate, yudo, dan keido juga merambah Indonesia. Cabang-cabang olahraga tersebut sebenarnya telah dikenal di Indonesia sejak Jepang menduduki negeri ini pada tahun 1942 hingga 1945. Karate ini sangat menonjol dengan adanya berbagai perguruan dengan induk berpusat di Jepang.

Sejarah perkembangan perkaratean di Indonesia mencatat bahwa para mahasiswa Indonesia yang belajar di Jepang, setelah pulang ke tanah air, mereka mengembangkan seni bela diri karate tersebut. Pada tahun 1964 muncul tokoh-tokoh karate, Baud A.D. Adikusuma, Otoman Nuh, Karyanto, dan lain-lain dan mereka mendirikan Persatuan Olahraga Karate Indonesia (PORKI). Sebelumnya, pada tahun 1960-an telah dibentuk Karate Club oleh para mahasiswa yang kembali ke Indonesia dari studinya di Jepang.

Pada tahun 1970 PORKI menjadi anggota sementara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang mewadahi semua cabang olahraga yang ada di Indonesia. Pada tahun 1971 PORKI menjadi anggota tetap KONI. Selain itu, PORKI dijadikan induk organisasi karate Indonesia dengan anggota-anggotanya berasal dari perguruan-perguruan karate lainnya.

Taekwondo merupakan olahraga bela diri sejenis karate, yang dimodernisasi, yang berasal dari Korea. Dalam perkembangannya, unsur-unsur tradisi yang ada pada taekwondo disederhanakan. Di bidang karate maupun taekwondo, atlet-atlet Indonesia telah ikut berperan serta mengharumkan nama Indonesia melalui cabang olahraga ini.

Perkembangan cabang olahraga yang semakin beragam menjadi sarana yang signifikan dalam memperkenalkan Indonesia dalam percaturan

internasional. Sejak tahun 1983 penanganan olahraga secara nasional ditangani oleh sebuah kementerian negara, yaitu Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora). Selain prestasi yang menjadi target pemerintah, juga penanganan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam usaha penyehatan masyarakat Indonesia dengan slogan yang dikenal *"mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatan olahraga"*pun dapat tercapai. Namun, masalah olahraga tidak sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi oleh masing-masing cabang olahraga, sedangkan pencapaian prestasi berada di bawah penanganan KONI Pusat. Salah satu prestasi gemilang yang pernah dicapai yaitu pada tahun 1977 dalam SEA GAMES IX Indonesia mampu membawa nama bangsanya di tingkat internasional sebagai juara umum.

K. Runtuhnya Orde Baru

1. Krisis Moneter, Awal Keterpurukan Perekonomian

Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperi Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar Rp2.500/US $ terus mengalami kemerosotan hingga 9 persen.[259] Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut menjadi perhatian khusus Presiden Soeharto. Meskipun demikian, masih menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia mampu menahan badai yang bertiup dari Thailand tersebut. Merosotnya nilai mata uang rupiah memicu keadaan panik tentang akan habisnya persediaan bahan makanan sehari-hari.[260]

Presiden Soeharto yang ketika itu berpangkat Jenderal Besar Kehormatan (berbintang lima) meminta bantuan sarana penyelamatan *International Monetary Fund* (IMF) berjumlah US $43 miliar. Perjanjian dengan IMF yang dilakukan pada bulan Oktober 1997 memaksa pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan-pembaruan kebijakan. Di antaranya, penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Namun, usaha ini tidak membawa suatu pemecahan permasalahan.

Bank Indonesia yang telah melakukan intervensi agresif di pasar guna mendongkrak nilai rupiah, mengakui bahwa lembaga tersebut tidak mampu membendung rupiah yang terus merosot. Pada bulan Oktober 1997 nilai tukar rupiah yang berada di posisi Rp4.000/US $, pada bulan Januari 1998 rupiah terus melemah hingga level sekitar Rp17.000/US $. Kondisi ini

[259] *Republika*, 24 Mei 1998

[260] Kwik Kian Gie, *Gonjang-ganjing Ekonomi Indonesia-Badai Pasti Berlalu*, 1998, hlm. 211

berdampak pada hancurnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan modern di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.[261]

Situasi yang berkembang secara cepat menyebabkan Presiden Soeharto menuruti nasihat dari Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, Kanselir Jerman Helmut Kohl, dan Perdana Menteri Jepang Hashimoto Ryutaro yang melakukan pembicaraan melalui telepon, agar menerima proposal reformasi IMF. Pada tanggal 15 Januari 1998 di kediamannya di Jalan Cendana nomor 8/10, Jakarta Pusat, Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF Michelle Camdessus menandatangani *Letter of Intent* (Nota Kesepakatan). Dalam tindak lanjutnya, Presiden melakukan revisi terhadap Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah disampaikan pada tanggal 6 Januari 1998, dan dinyatakan belum final.

Di tengah kondisi yang tidak menentu itu, Presiden Soeharto justru mengeluarkan pernyataan bahwa paket IMF yang ditandatanganinya pada tanggal 15 Januari 1998 menjurus pada ekonomi liberal. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melaksanakan perjanjian IMF yang berisi 50 butir kesepakatan tersebut. Situasi tarik-menarik antara pemerintah dan IMF itu menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia semakin memburuk. Sedangkan Thailand dan Korea Selatan yang pada awal krisis keadaannya lebih buruk daripada Indonesia, telah berkembang menuju proses pemulihan.[262]

Pada saat krisis semakin dalam, gangguan sosial pun merupakan ekses yang tidak terlepaskan. Dalam bulan-bulan pertama tahun 1998 di sejumlah kota terjadi kerusuhan-kerusuhan anti-Cina. Kelompok ini merupakan sasaran kemarahan masyarakat karena dominasi perekonomian di Indonesia berada di tangan mereka. Badai krisis ini pun semakin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi lainnya yang membawa pengaruh terhadap proses suatu perubahan selanjutnya.

2. Krisis Politik dan Surutnya Kredibilitas Pemerintah

Pemilihan umum ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997 memberikan kemenangan pada Golkar dengan perolehan suara 74,5 persen, PPP 22,4 persen, dan PDI 3 persen. Setelah pelaksanaan pemilu tersebut, perhatian politik tercurah pada Sidang Umum MPR pada bulan Maret 1998 yang bertugas memilih presiden dan wakil presiden. Dalam sidang tersebut,

---

[261] *Ibid.*

[262] James Luhulima, *Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto*, 2001, hlm. 83

[263] Kees van Dyk, *A Country in Dispair Indonesia Between 1997 and 2007*, 2001, hlm. 53

Golkar mencalonkan kembali Soeharto sebagai nominasi tunggal untuk menduduki jabatan presiden.[263]

Pada tanggal 20 Januari 1998 Presiden Soeharto secara resmi menerima pencalonannya oleh Golkar untuk jabatan kepresidenan. Dalam Sidang Umum MPR tanggal 11 Maret 1998 tersebut Soeharto terpilih secara aklamasi sebagai presiden untuk masa jabatan lima tahun yang ketujuh kalinya dan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Pada tanggal 14 Maret Presiden Soeharto membentuk kabinet barunya dengan menyertakan Siti Hardiyanti Rukmana, putrinya, sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial, dan orang dekatnya, Bob Hasan, sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian.[264]

Di samping itu, stagnasi perekonomian Indonesia, peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta menyempitnya kesempatan kerja memancing aksi keprihatinan di kalangan masyarakat. Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya Soeharto sebagai Presiden RI, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto tumbuh subur yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Gerakan mahasiswa yang mulai mengkristal di kampus-kampus, seperti ITB, UI, dan lain-lain semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto.

Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia melibatkan pula para staf akademisi maupun pimpinan universitas. Adapun garis besar tema yang dituntut mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus di berbagai kota yaitu penurunan harga sembako (sembilan bahan pokok), penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta suksesi kepemimpinan nasional.

Pada penutupan Sidang Umum MPR menjadi suatu kesempatan bagi sejumlah massa untuk melakukan demonstrasi. Pada tanggal 11 Maret 1998 ribuan orang dan bergabung pula Amien Rais serta berbagai staf akademisi dari berbagai kampus melakukan demonstrasi untuk mendukung gerakan mahasiswa. Bahkan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Gajah Mada di Yogyakarta merupakan demonstrasi terbesar yang terjadi selama beberapa dekade ini. Patung Soeharto setinggi 3 meter pun dirusak oleh massa.[265]

Aksi-aksi mahasiswa yang tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah menyebabkan para mahasiswa di berbagai kota lainnya mulai mengadakan aksi hingga ke luar kampus. Menjelang bulan April 1998, Amien Rais yang menempatkan dirinya sebagai pemimpin informal gerakan secara terbuka menyerukan dukungan rakyat bagi perjuangan mahasiswa.

---

[264] R.E. Elson, *op. cit.*, 2005, hlm. 558

[265] Kees van Dijk, *op. cit.*, 2001, hlm. 163

Selama itu pada permulaan bulan Mei 1998 sejumlah organisasi seperti LSM, dan *International Forum on Indonesian Development* (INFID), bergabung bersama staf senat dari berbagai universitas melakukan protes turun ke jalan untuk menuntut turunnya Presiden Soeharto.[266]

Maraknya aksi-aksi mahasiswa tidak jarang berlanjut menjadi bentrokan dengan para aparat keamanan. Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto mencoba meredamnya dengan menawarkan dialog kepada mahasiswa. Menurut Menhankam/Pangab, dialog sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi permasalahan bangsa yang sangat sulit. Dari dialog tersebut, ia berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terbuka kembali.[267] Sebaliknya, para mahasiswa menganggap bahwa dialog dengan pemerintah dianggap tidak efektif karena pokok tuntutan aksi-aksi mereka adalah reformasi politik dan ekonomi pengunduran diri Presiden Soeharto. Menurut mereka, mitra dialog yang paling efektif adalah lembaga kepresidenan dan MPR.[268]

Di tengah maraknya aksi-aksi protes mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, pada tanggal 4 Mei 1998 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu memutuskan kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Dalam hal ini pemerintah justru mengambil langkah yang bertentangan dengan tuntutan yang berkembang saat itu. Bahkan kenaikan harga BBM dan tarif listrik semakin memicu gerakan massa karena hal ini berdampak pada naiknya biaya angkutan dan barang kebutuhan lainnya.

Dalam kondisi krisis ekonomi, politik, dan kepercayaan pada pemerintah, pada tanggal 9 Mei 1998 Presiden Soeharto menghadiri Konferensi G-15 di Kairo. Di dalam pesawat menjelang keberangkatannya, Presiden Soeharto meminta masyarakat tenang dan memahami kenaikan harga BBM. Selain itu, ia menyerukan pula kepada lawan-lawan politiknya bahwa pasukan keamanan akan menangani dengan tegas setiap gangguan yang muncul.[269] Meskipun demikian, kerusuhan tetap tidak dapat dipadamkan dan gelombang protes dari berbagai kalangan komponen masyarakat terus mewarnai perkembangan situasi perpolitikan saat itu.

3. Berbagai Kerusuhan dan Akhir Pemerintahan Orde Baru

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 1998 direncanakan oleh gerakan mahasiswa sebagai

---

[266] R.E. Elson, *op. cit.*, 2005, hlm. 560
[267] Aidul Fitriciada Azhari, *Dari Catatan Wiranto Jenderal Purnawirawan Bersaksi di Tengah Badai*, 2006, hlm. 14
[268] James Luhulima, *op. cit.*, 2001, hlm. 85
[269] R.E. Elson, *op. cit.*, 2005, hlm. 561

momen Hari Reformasi Nasional. Namun, ledakan kerusuhan terjadi lebih awal dan di luar dugaan. Pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti yang berlokasi di daerah Grogol, Jakarta Barat terjadi peristiwa penembakan terhadap empat orang mahasiswa oleh aparat keamanan. Keempat orang mahasiswa Trisakti tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hendriawan Sie, Heri Hartanto, dan Hafidhin Royan. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti lainnya baru memasuki kampusnya setelah menggelar aksi keprihatinan.[270]

Kematian empat mahasiswa Trisakti tersebut memicu berbagai gerakan proreformasi untuk menyatukan langkah dan mendesak Presiden Soeharto mengundurkan diri. Senat mahasiswa UI menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia mulai tanggal 13 Mei 1998 mengenakan pita hitam di tangan kiri, sebagai tanda berkabung nasional serta lambang perjuangan reformasi dan suksesi kepemimpinan nasional. Seruan ini mendapat tanggapan secara luas.[271]

Pada tanggal 13 Mei 1998, setelah acara pemakaman keempat mahasiswa tersebut, ribuan mahasiswa Trisakti mengadakan aksi berkabung di kampusnya. Massa mulai membanjiri sekitar kampus Universitas Trisakti untuk bergabung dengan mahasiswa. Aparat keamanan berusaha mencegah aksi massa itu, akibatnya massa mengamuk dan mulai melakukan aksi pelemparan serta perusakan.

Keadaan yang hampir sama pun terjadi pula di Universitas Katolik Atma Jaya di Jalan Jenderal Soedirman, Jakarta, tempat para mahasiswa menggelar aksi keprihatinan dan rasa dukacita bagi mahasiswa Trisakti yang telah menjadi mortir-mortir bangsa. Warga sekitar melakukan pembakaran di kompleks pertokoan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Peristiwa itu terus berkembang dan menyebar menjadi kerusuhan rasial. Toko-toko warga Indonesia keturunan Cina menjadi sasaran penjarahan massa yang tidak dikenal. Selain itu, rumah-rumah mereka pun dirusak dan dibakar.

Massa yang semula berada di Jalan S. Parman, Jakarta Barat secara cepat bergerak ke arah Jalan Daan Mogot. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran mobil-mobil serta gedung-gedung di sepanjang jalan yang dilalui. Selain itu, terjadi pula pemerkosaan terhadap sejumlah besar perempuan-perempuan Indonesia keturunan Cina. Kerusuhan dan perusakan serupa terjadi pula di kota-kota lainnya, terutama di Solo. Suasana Jakarta pun seperti kota mati, tidak ada kendaraan yang lalu lalang.

---

[270] Soekisno Hadikoemoro, *Tragedi Trisakti 12 Mei 1998*, hlm. 101

[271] James Luhulima, *op cit.*, hlm. 101

Namun, di tempat-tempat tertentu, khususnya kawasan pertokoan, aksi-aksi penjarahan massa terus berlangsung hingga dini hari.[272]

Wakil Presiden B.J. Habibie di Istana Merdeka Selatan, atas nama Presiden Soeharto menyampaikan keprihatinan pemerintah atas musibah yang terjadi dalam unjuk rasa mahasiswa. Pemerintah menyerukan agar semua pihak menahan diri dalam memelihara ketenteraman dan stabilitas. Walaupun demikian, pada tanggal 14 Mei 1998 kerusuhan terus melanda hampir seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bantuan pasukan dari luar kota pun mulai didatangkan untuk mengamankan situasi ibu kota. Sementara itu, sejak tanggal 14 Mei 1998, ribuan etnis Cina melakukan eksodus ke luar negeri, khususnya ke Singapura, Bangkok, Hong Kong, dan Australia. Penyelamatan diri ini pun kemudian diikuti oleh warga asing lainnya, seperti staf kedutaan, pekerja asing (ekspatriat) beserta keluarga, dan pejabat-pejabat IMF yang bertugas di Indonesia. Kerusuhan di Jakarta menjadikan beberapa kedutaan besar di Jakarta mulai mengevakuasi sebagian warganya ke Singapura dan Bangkok. Kedutaan besar lainnya menyarankan agar warga negaranya meninggalkan Indonesia. Langkah tersebut juga diikuti oleh beberapa perusahaan multinasional dalam rangka menghindari kerusuhan.

Perkembangan situasi tanah air yang semakin tidak menentu menyebabkan Presiden Soeharto mempersingkat kunjungannya di Kairo, yang dijadwalkan pulang pada tanggal 16 Mei 1998, sehari sebelumnya telah tiba di tanah air. Di kediamannya di Jalan Cendana Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan para pembantu-pembantunya untuk meminta laporan kondisi terakhir di dalam negeri. Keesokan harinya pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga BBM. Selanjutnya Presiden Soeharto berjanji akan melakukan reformasi di segala bidang dan segera *mereshuffle* Kabinet Pembangunan VII yang dipimpinnya. Hal ini disampaikan oleh Soeharto ketika ia bertemu dengan para pemimpin DPR di Jalan Cendana, Jakarta Pusat.

Langkah-langkah kebijakan ini pun tidak mampu meredam situasi *chaos* saat itu yang menginginkan mundurnya Presiden Soeharto. Pertemuan selanjutnya terjadi antara Presiden Soeharto dan delegasi staf akademisi UI yang dipimpin oleh Rektor Prof. Asman Boedisantosa yang menyampaikan hasil simposium rektor seluruh Indonesia agar Presiden mundur dari jabatannya. Presiden Soeharto menjawab bahwa mundur baginya bukan masalah.[273]

---

[272] R.E. Elson, *op. cit.*, 2005, hlm. 564

[273] Kees van Dijk, *op. cit.*, 2001, hlm. 196

Pada tanggal 17 Mei 1998 gerakan mahasiswa memutuskan untuk menduduki Gedung DPR/MPR. Pada hari berikutnya para mahasiswa dari seluruh Jabotabek dan Bandung ikut bergabung di gedung tersebut. Dalam situasi ini aparat keamanan tidak menghalangi mahasiswa untuk masuk dan menduduki gedung MPR/DPR. Mereka menyerukan slogan-slogan "Reformasi atau Mati" sambil menyanyikan lagu-lagu patriotik.

Keesokan harinya, tanggal 18 Mei 1998, terjadi pertemuan antara pimpinan DPR dan sejumlah delegasi mahasiswa untuk mendiskusikan penyelenggaraan secepatnya Sidang Umum Istimewa. Selanjutnya Ketua MPR/DPR Harmoko mengumumkan keputusan secara resmi kepada publik tentang tuntutan pengunduran diri Presiden Soeharto. Pengumuman tersebut disambut gembira terutama oleh para mahasiswa yang menduduki gedung MPR/DPR.

Petang harinya, Presiden Soeharto melakukan pertemuan dengan cendekiawan Islam terkemuka Nurcholis Madjid guna membahas pendapatnya tentang langkah terbaik selanjutnya. Dalam pertemuan itu Presiden Soeharto ada petunjuk bahwa ia bersedia turun. Hari berikutnya, tanggal 19 Mei 1998, Presiden bertemu dengan sembilan orang pimpinan senior muslim dan mengumumkan rencananya untuk membentuk Komisi Pembaruan serta kabinet baru.[274]

Dalam sebuah pidato nasional, Presiden Soeharto secara resmi mengumumkan pembubaran kabinet yang baru berusia dua bulan dan membentuk kabinet baru yang dinamai Kabinet Reformasi. Komisi Pembaruan bertugas menyiapkan undang-undang baru, menyelenggarakan pemilu secepat mungkin, dan dalam hal ini Soeharto tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden untuk periode berikutnya jika MPR yang baru sudah bersidang.

Di tengah rencana-rencana Presiden itu, Amien Rais mengordinasikan protes-protes mahasiswa dan mengancam akan menghimpun satu juta demonstran di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1998 guna menyerukan pengunduran diri Presiden Soeharto. Pidato Presiden tidak memengaruhi pendirian Amien Rais dan yang lainnya karena mereka mencurigai bahwa Presiden membuat taktik baru untuk mengulur waktu saja.

Namun, rencana Amien Rais tidak jadi dilakukan karena adanya ancaman kekerasan terhadap para demonstran. Amien Rais menyampaikan pidatonya yang disiarkan oleh *RCTI* untuk membatalkan acara apel akbar di Monas yang akan dihadiri satu juta orang.

---

[274] *Adil*, 27 Mei 1998

Menjelang akhir pemerintahannya, Presiden Soeharto mulai ditinggalkan pembantu-pembantunya di kabinet. Para menterinya, yang dipimpin oleh Ginandjar Kartasasmita, mengadakan rapat dan menyusun pernyataan bahwa mereka tidak bersedia menjabat dalam kabinet baru serta mendesak Presiden untuk turun. Pernyataan tersebut disampaikan ke Cendana sekitar pukul 20.00, dan hal ini sangat mengguncang Presiden Soeharto.

Pada pertemuan di malam yang sama, Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto atas nasihat sekelompok ahli hukum konstitusi serta ahli politik menyatakan bahwa demi kepentingan bangsa, solusi terbaik adalah mengalihkan kekuasaan secara konstitusional dari Presiden kepada Wakil Presiden. Pandangan itu disampaikannya kepada Presiden pada malam itu.

Menurut Probosutedjo yang mendampingi Presiden Soeharto di saat-saat yang menentukan tersebut, Presiden menyatakan bahwa kariernya sebagai pemimpin bangsa sudah berakhir dan ia harus menyerahkan kekuasaan sesegera mungkin kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Pada saat itu pula dukungan internasional kepada Soeharto untuk bertahan juga sudah sirna. Sebelum tengah malam, Menlu Amerika Serikat Madeleine Albright menyiarkan pernyataan melalui jaringan televisi *CNN* agar Soeharto mundur demi kepentingan transisi menuju demokrasi.[275]

Pada pagi hari tanggal 19 Mei 1998 pukul 00.10, Yusril Ihza Mahendra Staf Sekretariat Negara menelepon Amien Rais yang berada di rumah. Malik Fadjar bersama Nurcholis Madjid dan kawan-kawan memberitahukan bahwa Pak Harto sudah menandatangani naskah pengunduran dirinya. Selanjutnya pada pagi hari pukul 00.20, Amien Rais dan kawan-kawan mengadakan jumpa pers di rumah Malik Fadjar di Jalan Indramayu No. 14, Jakarta Pusat. Mereka menyerukan langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah seandainya Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 sekitar pukul 09.00 WIB, Presiden membacakan pidato pengunduran dirinya sebagai Presiden RI di Istana Merdeka. Soeharto mengumumkan, sesuai Pasal 8 UUD 1945, Wapres B.J. Habibie akan melanjutkan sisa masa jabatan Presiden Mandataris MPR 1998–2003. Saat itu Habibie mengucapkan sumpah, disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Presiden RI yang baru. Selanjutnya Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto mengumumkan bahwa ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan mantan Presiden Mandataris MPR, termasuk Presiden Soeharto dan keluarganya.

---

[275] *Kompas*, 21 Mei 1998

Gambar 5.5 Pidato pengunduran diri Presiden Soeharto di Istana Merdeka tanggal 21 Mei 1998 (Sumber: Dokumen Istimewa)

Gambar 5.6 Penyerahan kekuasan dari Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie di Istana Merdeka tanggal 21 Mei 1998 (Sumber: Dokumen Istimewa)

L. Kesusastraan

1. Awal Kebangkitan Kembali

Titik balik perseteruan golongan sastrawan penanda tangan Manifes Kebudayaan dengan sastrawan Lekra berikut para pendukungnya terjadi selepas pecah kudeta Gerakan 30 September 1965 seperti antiklimaks sepak terjang PKI berikut segenap ormasnya.[276] Selang beberapa hari sesudah tragedi itu, di Taman Sunda Kelapa Jakarta diadakan rapat raksasa partai-partai agama, organisasi, dan gabungan pelajar dan mahasiswa yang menuntut agar partai dan ormas yang terlibat peristiwa G-30-S/PKI dibubarkan.

Peta politik berubah drastis. Perubahan yang begitu cepat dalam kehidupan politik itu tentu saja ikut pula memengaruhi aspek kehidupan yang lain, terutama kehidupan masyarakat dan kebudayaan dan di dalamnya, termasuk juga kesusastraan, teror, represi, dan segala bentuk tekanan yang menciptakan keresahan dan ketakutan yang terjadi sepanjang paruh pertama dasawarsa tahun 1960-an itu, seolah-olah telah memperoleh saluran pembebasan. Kepentingan ideologi dan politik yang semula didesak paksa memasuki berbagi aspek kehidupan, tiba-tiba jatuh dan berada di titik nadir.

Di bidang kesusastraan, perubahan yang begitu cepat itu juga menjadi titik balik para sastrawan Lekra, baik yang terlibat langsung maupun yang sekadar simpatisan yang pada paruh pertama tahun 1960-an itu condong memihak PKI. Mereka dihadapkan pada situasi tragis yang sangat kontras dengan apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka diburu, ditangkapi, dan dipenjarakan, sebagiannya tanpa proses pengadilan apa pun.

---

[276] Antiklimaks juga terjadi pada sejumlah media massa yang menjadi organ PKI, seperti *Kebudayaan Baru, Zaman Baru, Harian Rakjat,* dan beberapa surat kabar pro PKI, seperti *Bintang Timur, Suluh Indonesia* (Sulindo), *Warta Bhakti,* dan *Berita Minggu* yang setelah dua hari terjadinya peristiwa G-30-S/PKI tiba-tiba seperti tenggelam dan menghentikan penerbitannya. Padahal, sebelumnya, surat-surat kabar itu begitu garang menyerang para penanda tangan Manifes Kebudayaan dan gencar menyuarakan agitasi dan propaganda PKI. Menyusul setelah itu, 30 November 1965, buku-buku karya 87 sastrawan Lekra dinyatakan dilarang digunakan di sekolah-sekolah sejalan dengan instruksi Menteri P dan K. Sebaliknya, Deputi Menteri Pendidikan Dasar, Maret 1966, mengeluarkan keputusan bahwa "Karya-karya penanda tangan Manifes Kebudayaan, tidak bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, larangan terhadap karya-karya Manifes–yang bahkan pernah mengalami pembakaran–tidak berlaku lagi. Lihat Lukman Ali, "Pelarangan Karya Sastra Manifes dan Lekra", *Kompas,* 10 Oktober 1993; Periksa juga, Ajip Rosidi, "Laranglah Buku, Djangan Pengarang", *Masalah Angkatan dan Periodisasi*

Keadaannya sangat berbeda dengan para sastrawan penanda tangan Manifes Kebudayaan.[277] Mereka yang selama sekitar dua tahun terakhir sebelum G-30-S/PKI, dan terutama sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 8 Mei 1964, yang melarang Manifes Kebudayaan, terus-menerus dikejar teror dan ketakutan,[278] tiba-tiba saja seperti terbebas dari lubang gelap dan muncul dengan semangat baru. Pengalaman pahit betapa dominasi politik dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan dan sendi-sendi kebudayaan, telah menumbuhkan kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi kehidupan politik.[279]

---

[277] Manifes Kebudayaan ditandatangani oleh 20 seniman. Sesuai urutan dalam dokumen aslinya, mereka adalah: H.B. Jassin, Trisno Sumardjo, Wiratmo Sukito, Zaini, Bokor Hutasuhut, Goenawan Mohamad, A. Bastari Asnin, Bur Rasuanto, Soe Hok Djin (Arief Budiman), D.S. Moeljanto, Ras Siregar, Hartojo Andangdjaja, Sjahwil, Djufri Tanissan, Binsar Sitompul, Taufiq Ismail, Gerson Poyk, M. Saribi Afn, Poernawan Tjondronagoro, dan Boen S. Oemarjati. Meskipun naskah Manifes Kebudayaan bertarikh 17 Agustus 1963, naskah itu baru disetujui dalam pertemuan dua hari di Jalan Raden Saleh 19, pada tanggal 23–24 Agustus 1963. Lebih sebulan kemudian baru dipublikasikan dalam surat kabar *Berita Republik,* no. l, th. I, 19 Oktober 1963 dan dalam majalah *Sastra,* no. 9/10, th. III, 1963. Sejak publikasi itu, seniman dari berbagai kota di Indonesia menyatakan dukungannya yang juga dipublikasikan di berbagai media massa. Akan tetapi, dalam perkembangannya kemudian, terutama setelah muncul Dekrit Presiden 8 Mei 1964, yang melarang Manifes Kebudayaan, birokrat, seniman, dan mereka yang tidak ikut menandatangani pernyataan mendukung manifes itu, tiba-tiba seperti hilang keberaniannya. Bahkan, mereka cenderung tidak ingin terlibat sama sekali. Para penanda tangan Manifes Kebudayaan yang sejak September 1963 mengalami berbagai tekanan, fitnah, pemecatan, dan serangkaian teror, seperti berada di jurang kematian. Goenawan Mohamad, misalnya, sudah membayangkan akibat-akibat yang mungkin akan diterima para penanda tangan Manifes Kebudayaan jika pada akhirnya PKI berhasil mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Belakangan baru dipahaminya betul ketika Pol Pot dengan Khmer Merahnya melakukan pembersihan terhadap kaum cendekiawan yang dianggap kontrarevolusioner. Selengkapnya mengenai masalah ini, lihat D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail, *Prahara* .... Lihat juga catatan D.S. Moeljanto, "Lahirnja Manifes Kebudajaan", *Horison,* no. 5, th. II, Mei 1967. Bandingkan dengan tulisan Wiratmo Soekito, "Catatan Harian Seorang Manifestan", *Horison,* no. 9, th. XI, September 1931 yang mengungkapkan beberapa peristiwa di balik sikap yang melatarbelakangi dan melatardepani para pendukung dan penentang Manifes Kebudayaan. Periksa juga Wiratmo Soekito, "Catatan mengenai Manifes Kebudayaan", *Tifa Sastra,* No. 35, th. VI, 1977. Beberapa artikel lain mengenai Manifes Kebudayaan dimuat Majalah *Sastra,* no. 9/10, th. III, 1963, bersamaan dengan pemuatan teks Manifes Kebudayaan yaitu tulisan H.B. Jassin, dkk., "Pendjelasan Manifes Kebudajaan" (hlm. 28–29), dan sebuah artikel tanpa nama penulisnya, "Sedjarah Lahirnja Manifes Kebudajaan" (hlm. 30–31). Belakangan Goenawan Mohamad dalam artikelnya, "Peristiwa `Manikebu': Kesusastraan Indonesia dan Politik Tahun 1960-an" (*Kesusastraan dan Kekuasaan,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm. 11–54) mengakui bahwa artikel itu adalah tulisan Goenawan Mohamad sendiri.

[278] Sebuah catatan harian yang ditulis Arief Budiman dan A. Adjib Hamzah ("Tjatatan Harian Manikebuis", *Horison,* no. 5, th. II, Mei 1967, hlm. 153–157) mengungkapkan pengalaman pribadi karenanya berkaitan dengan keterlibatannya sebagai penanda tangan Manifes Kebudayaan. Dalam catatan harian A. Adjib Hamzah, terasa benar kegetirannya menghadapi serangkaian penghinaan dan teror. Bahkan, hampir semua temannya tiba-tiba saja bersikap begitu sinis

[279] Penyelenggaraan simposium itu dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa kebudayaan harus terbebas dari segala macam kekuasaan politik. Dominasi politik yang terlalu jauh memasuki

Sejak pembubaran PKI, gerakan pertama di bidang kebudayaan terjadi dengan diselenggarakannya "Simposium Kebangkitan Semangat '66: Mendjeladjah Tracee Baru" yang berlangsung di Universitas Indonesia, tanggal 6–9 Mei 1966. KAMI dan KASI bertindak sebagai pemrakarsa acara itu. Beberapa pemikiran penting mengenai hubungan seni, budaya, dan politik berhasil dirumuskan, sebagaimana terungkap dalam kutipan berikut.

1. Falsafah Pantjasila harus diungkapkan dalam seni budaja ....
2. Dalam membina dan memperkembangkan seni budaja nasional kita haruslah ditjegah penggunaan untuk kepentingan satu golongan.
3. Kekuatan suatu bangsa didukung oleh massa lapisan buruh pekerdja dan lapisan menengah, tapi kemadjuan suatu bangsa ditentukan oleh potensi kesadaran dan bertindak daripada lapisan universiter.
4. Angkatan 66 merindukan kemerdekaan, bukan sadja kemerdekaan politis ... akan tetapi kemerdekaan sebagai nilai jang hakiki dari manusia.
5. Angkatan 66 menolak Lekraisme dan Neo-Lekraisme di dalam kebudajaan, jaitu dominasi politik atas karja-karja seni ...[280] kesempatan berusaha menjauhinya, hanya karena ia diketahui sebagai penanda tangan Manifes Kebudayaan.
6 Sikap para seniman Indonesia untuk lebih berhati-hati terhadap kehidupan politik di tanah air dan pengaruhnya bagi perkembangan kesenian dan kebudayaan Indonesia, pada akhirnya seperti menabukan politik memasuki wilayah kebudayaan. Politik dipandang menjadi sesuatu yang cenderung negatif. Ada semacam trauma bagi seniman Indonesia dalam memandang hubungan politik dan kesenian, dan kebudayaan pada umumnya.

Istilah Angkatan 66 sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam butir kelima rumusan itu hendak menegaskan sikap yang menolak dominasi politik memasuki wilayah kesenian kebudayaan. Di bidang sastra, H.B. Jassin menyatakan sikapnya. Secara politis, Angkatan 66 terlahir dari pergolakan politik dalam masyarakat. Kelahirannya adalah suatu peristiwa politik. Akan tetapi, di samping ukuran politik, di bidang kesusastraan mempunyai ukuran

---

kehidupan seni dan budaya telah menciptakan kehancuran-kehancuran yang begitu parah atas sendi-sendi kemanusiaan. Dari simposium ini pula muncul istilah Angkatan 66. Di bidang seni dan budaya, Angkatan 66 menolak adanya campur tangan politik dan beranggapan bahwa seni budaya dan politik berada dalam dua wilayah yang berbeda. Di bidang sastra, istilah Angkatan 66 kemudian digunakan Jassin sebagai sebuah gerakan yang mencerminkan semangat perlawanan atas berbagai penyelewengan yang dilakukan pemerintah saat itu.

[280] *Simposium Kebangkitan Semangat "66: Menjeladjah Tracee Baru, 6–9 Mei 1966*, Lihat Yahaya Ismail, *Pertumbuhan ...*, hlm. 112

nilai, yaitu nilai kesusastraan. Ia antitiran, tetapi menegakkan keadilan dan kebenaran. Kesenian senantiasa antikezaliman, ingin kebajikan keadilan dan kebenaran itu dituangkan dalam hasil kesenian, hasil kesusastraan. Apabila seniman berjaya menuangkan nilai-nilai itu dalam hasil seninya, ia telah mengatasi dataran politik.[281]

Sebagai salah satu realisasi hasil perumusan simposium itu Yayasan Indonesia kemudian menerbitkan majalah bulanan *Horison* Juli 1966. Pendirinya adalah Mochtar Lubis, P.K. Oyong, Zaini, Arief Budiman, dan Taufiq Ismail. Mochtar Lubis sendiri bertindak sebagai penanggung jawab, sementara yang duduk di Dewan Redaksi, selain Mochtar Lubis, tercatat nama-nama penanda tangan Manifes Kebudayaan, yaitu H.B. Jassin, Zaini, Taufiq Ismail, Soe Hok Djin (Arief Budiman), dan D.S. Moeljanto. Dalam pernyataan sikapnya yang dimuat dalam edisi pertama majalah itu dikatakan bahwa:

> *Horison* adalah sebuah majalah bulanan sastra dalam pengertian yang seluas-luasnya. Tujuan utamanya ialah merenggang pemikiran-pemikiran dan eksperimen-eksperimen baru di bidang kesusastraan khususnya, dan kebudajaan umumnya. Itulah salah satu alasan mengapa dipilih nama Horison bagi majalah ini, karena Horison mengandung arti sesuatu yang nyata riil, tetapi tak pernah akan kita capai ujungnya."

Setelah tragedi September 1965, sejumlah surat kabar yang sebelum itu menghentikan penerbitannya, mulai terbit lagi. Surat kabar *Merdeka* dengan B.M. Diah bertindak sebagai pemimpin redaksinya, yang sejak Februari 1966 dilarang beredar, pada tanggal 2 Juni 1966, memulai kembali penerbitannya disusul kemudian beberapa surat kabar lain, seperti Harian *Kompas* dengan salah seorang pendirinya, P.K. Oyong, Harian *Kami* dengan tokoh-tokoh Nono Anwar Makarim, Taufiq Ismail, dan Arief Boediman

2. Angkatan 66 Sebuah Kontroversi

Penamaan Angkatan 66 sebagai sebuah gerakan sosial politik muncul pertama kali dalam "Simposium Kebangkitan Semangat '66: Menjelajah Tracee Baru" yang berlangsung di Universitas Indonesia, 6–9 Mei 1966. Dalam kesusastraan Indonesia, nama Angkatan 66 pertama kali diangkat oleh H.B. Jassin dalam artikelnya, "Angkatan 66: Bangkitnya Satu Generasi" yang dimuat majalah *Horison*, no. 2, th. I, Agustus 1966. Seperti juga

---

[281] H.B Jassin, *Angkatan '66 Prosa dan Puisi*, 1976, hlm. xv, cet. I, 1968. Pernyataan Jassin ini sebenarnya dimaksudkan sebagai argumen atas penamaan Angkatan 66. Belakangan, alasan itu ditentang Satyagraha Hoerip yang lebih condong menyebutnya Angkatan Manifes atau Angkatan 63. Demikian juga Rachmat Djoko Pradopo menolak gagasan Jassin itu.

penamaan Angkatan 45 yang memancing berbagai tanggapan dan kontroversi, penamaan Angkatan 66 yang ditawarkan Jassin, juga mengundang serangkaian tanggapan dan reaksi. H.B. Jassin melandasi dasar pemikirannya tentang penamaan Angkatan 66 dengan bertumpu pada peristiwa tahun 1966 ketika gelombang aksi mahasiswa dan pelajar berhasil menumbangkan rezim yang telah banyak melakukan penyelewengan. Sejak itu, slogan "Politik adalah Panglima" tidak berlaku lagi. Sastrawan tidak perlu terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatan politik. Dengan demikian, karya sastra tidak hendak dijadikan alat propaganda politik.

> "Kini, dalam tahun 1966, di Indonesia terjadi suatu peristiwa yang penting. Peristiwa yang melahirkan angkatan yang menyebut dirinya Angkatan 66. Ialah pendobrakan terhadap kebobrokan yang disebabkan oleh penyelewengan negara besar-besaran, penyelewengan yang membawa ke jurang kehancuran total .... kita pun menyaksikan satu ledakan pemberontakan dari penyair, pengarang dan cendekiawan, yang telah sekian lama dijajah jiwanya dengan slogan-slogan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa."[282]

Selanjutnya Jassin mengatakan:

> "Siapakah pengarang-pengarang yang termasuk Angkatan 66 ini? Ialah mereka yang tatkala tahun 1945 berumur kira-kira 6 tahun dan ... tahun 1966 kira-kira berumur 25 tahun. Mereka ... telah giat menulis dalam majalah sastra dan kebudayaan sekitar tahun 50-an, seperti Kisah, Siasat, Mimbar Indonesia, Budaya, Indonesia, Konfrontasi, Tjerita, Prosa, Basis ...."[283]

Dengan dasar pemikiran tersebut, H.B. Jassin memasukkan nama Motinggo Boesje, Sapardi Djoko Damono, Taufiq Ismail, Umar Kayam, Goenawan Mohamad, Arifin C. Noer, Ramadhan K.H., Bur Rasuanto, Rendra, Ajip Rosidi, Titie Said, Slamet Sukirnanto, Subagio Sastrowardojo, Satyagraha Hoerip, Nh. Dini, dan beberapa nama lain. Sebagian besar dari nama-nama itu memang terlibat aktif dalam pergolakan politik yang terjadi tahun 1960-an. Di antara mereka, terutama Taufiq Ismail, Slamet Sukirnanto, Bur Rasuanto, dan Abdul Wahid Situmeang, juga menghasilkan karya yang memperlihatkan perlawanannya atas kebrengsekan pemerintah waktu itu. Jadi, pemikiran Jassin lebih didasarkan pada usia pengarang dan kiprahnya pada pertengahan tahun 1950-an sampai tahun 1966, serta pada karya-karya yang menggambarkan perlawanan atau kritik sosial.

Pandangan H.B. Jassin tentang Angkatan 66 yang didasari pada peristiwa yang terjadi dalam perkembangan sosial-politik di tanah air, memang cukup beralasan. Akan tetapi, dengan memasukkan nama-nama

---

[282] H.B. Jassin, *Angkatan '66, ...*, hlm. 5

[283] *Ibid.*, hlm. 19

sastrawan yang sudah berkarya sejak tahun 1950-an dan rujukannya pada karya sastra yang bertema perlawanan yang ditulis Taufiq Ismail, Bur Rasuanto, Slamet Sukirnanto, Mansur Samin, dan Wahid Situmeang, dianggap tidak cukup representatif menggambarkan keseluruhannya.

Satyagraha Hoerip,[284] misalnya, keberatan atas pandangan Jassin itu. Menurutnya, sebelum tahun 1966, terutama tahun 1961 sampai 1964, perlawanan para sastrawan terhadap rezim dan para pendukung antidemokrasi, yang menjadi dasar pemikiran Jassin itu, justru sudah secara terus-menerus dilakukan. Bahkan, jika mencermati sikap dan kiprah para penanda tangan Manifes Kebudayaan yang kreatif, konsisten, dan konsekuen atas sikap berkeseniannya yang benar-benar mendukung arti perjuangan demokrasi di Indonesia, penamaan itu lebih tepat dengan Angkatan Manifes. Hal tersebut tampak pula dari bukti karya-karya mereka dalam majalah sastra dan terbitannya waktu itu. Demikian pula konsepsi keseniannya jelas, yaitu Pancasila dan antitotaliterisme, antikomunisme, dan antikekuatan-kekuatan politik/moral yang bertentangan dengan alam demokrasi. Begitulah alasan Satyagraha Hoerip menentang penamaan Angkatan 66 yang diajukan H.B. Jassin.

Penolakan terhadap penamaan Angkatan 66 juga disampaikan Rachmat Djoko Pradopo.[285] Menurutnya, penamaan angkatan haruslah dilandasi oleh faktor karya sastra itu sendiri, dan bukan dari faktor sosial-politik.

> "Kalau kita lihat secara "saksama, maka dasar-dasar H.B. Jassin untuk menggolongkan sastrawan-sastrawan dan karyanya ke dalam angkatan kesusastraan itu kurang kuat adanya. Hal itu disebabkan oleh kriteria yang berbeda-beda, yang kurang didasarkan pada kriteria sastra yang murni, yang kurang melihat pada sistem norma yang menguasai karya-karya sastra tersebut secara keseluruhan."

Alasan Jassin tentang usia para sastrawan yang dimasukkan ke dalam Angkatan 66, juga ditolak Pradopo.

> "Dasar serta alasan yang disandarkan pada usia para sastrawan serta prasangka-prasangka dan ramalan akan timbulnya suatu angkatan tiap-tiap masa tertentu itu bertentangan dengan kenyataan dan dasar-dasar kesusastraan."

Selain itu, harus juga ada pijakan kultural yang menyangkut sistem norma masyarakat, khususnya dalam diri para sastrawannya. Usulan

---

[284] Satyagraha Hoerip, "Angkatan 66 dalam Kesusastraan Kita", *Horison*, no. 6, th. I, Desember 1966, hlm. 188–189.

[285] Rachmat Djoko Pradopo, "Penggolongan Angkatan dan Angkatan 66 dalam Sastra", *Horison*, no. 6, th. 11, Juni 1967, hlm. 165–168

Angkatan 50, menurut Pradopo, sebenarnya lebih pas, mengingat sastrawan-sastrawan yang muncul dalam dasawarsa tahun 1950-an memperlihatkan sistem norma yang berbeda dengan sistem norma yang berlaku atau dianut sastrawan Angkatan 45.

Sesungguhnya cukup ramai perdebatan mengenai penamaan Angkatan 66 yang diproklamasikan H.B. Jassin ini. Sampai tahun 1977 ketika Ajip Rosidi menerbitkan sebuah buku antologi berjudul *Laut Biru Langit Biru* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1977) yang menghimpun sejumlah karya dari 62 sastrawan yang muncul dalam rentang sepuluh tahun (1966–1976), penamaan Angkatan 66 belum sepenuhnya dapat diterima.[286] Di antara sastrawan yang karyanya masuk dalam buku itu, banyak pula yang kiprahnya sudah dimulai sejak tahun 1950-an yang kemudian digolongkan Ajip Rosidi ke dalam sastrawan Angkatan Terbaru.[287]

Perdebatan konseptual yang menyangkut penamaan Angkatan 66 yang diajukan H.B. Jassin menunjukkan terjadinya dinamika yang lebih didasarkan pada substansi pemikiran daripada kepemihakan ideologi dan politik, sebagaimana yang terjadi pada pertengahan tahun 1960-an ketika sastrawan Lekra menentang pandangan humanisme universal yang kemudian berpuncak pada pelarangan Manifes Kebudayaan. Meskipun begitu, polemik yang sebenarnya dapat menumbuhkan iklim yang baik bagi perkembangan pemikiran mengenai sastra Indonesia itu, belum sepenuhnya didukung oleh masyarakat secara luas. Dalam hal ini, golongan agama masih mempunyai semacam prasangka pada para seniman. Dikatakan Ajip Rosidi,

---

[286] Ramainya perdebatan tentang Angkatan 66 ini mendorong Dewan Kesenian Jakarta menyelenggarakan Diskusi Besar tentang Angkatan 66 di Taman Ismail Marzuki, 27 Agustus 1969. Terlibat dalam diskusi itu, antara lain, H.B. Jassin, Subagio Sastrowardojo, S. Effendi, dan Ajip Rosidi. Lukman Ali bertindak sebagai moderator membuat cacatan sejumlah pendapat tentang angkatan dalam sastra Indonesia, "Ikhtisar Pendapat tentang Masalah Angkatan dalam Kesusastraan Indonesia" dimuat *Budaja Djaya*, no. 35, th. IV, 1971. Sebuah rangkuman berbagai pendapat tentang Angkatan, mulai Angkatan 45 sampai Angkatan 66. Tampak di sana bahwa proklamasi Jassin tentang Angkatan 66 memang membuka peluang terjadinya kontroversi.

[287] Penamaan Angkatan Terbaru pertama kali digunakan oleh Panitia Simposium Sastra Pekan Kesenian Mahasiswa kedua di Jakarta, 14 Agustus 1960. Jadi, mendahului penamaan Angkatan 66 yang diajukan H.B. Jassin. Penamaan Angkatan Terbaru ini diangkat Ajip Rosidi dalam makalahnya "Sumbangan Angkatan Terbaru Sastrawan Indonesia kepada Perkembangan Kesusastraan Indonesia" yang dibawakan dalam simposium itu. Menurut Ajip Rosidi, ciri-ciri Angkatan Terbaru, antara lain: (a) terikat oleh kesadaran tempat asal (daerah) dan waktu, karena ketika itu, sastra Indonesia dianggap mengalami kemunduran *(impasse)*, (b) sastrawan-sastrawan dalam Angkatan Terbaru merupakan hasil pendidikan dan penganuh sastra Indonesia sendiri, bukan sastra dan pendidikan Belanda, (c) karya-karya mereka memperlihatkan pentingnya unsur daerah sebagai sumber ilham dan kultural. Oleh karena itu, tidak lagi homogen memperlihatkan dominasi latar Minangkabau atau

"Peristiwa Langit Makin Mendung" pada tahun 1968, misalnya, merupakan suatu bukti kepada kepekaan perasaan agama umat Islam, yang tersinggung oleh kekasaran sebuah cerita pendek yang buruk."[288] Peristiwa itulah yang kemudian dikenal dengan apa yang disebut "Heboh Sastra".

3. Heboh Sastra

Terciptanya suasana yang kondusif bagi sastrawan dalam berkarya dan dalam pengembangan kebebasan berkreasi itu tidak serta-merta berbanding lurus dengan apresiasi dan tanggapan masyarakat terhadap sastra. Itulah yang kemudian terjadi pada majalah *Sastra.* Majalah yang dikelola H.B. Jassin ini, sejak awal memasuki dasawarsa 1960-an (1961–1964) pernah begitu gencar mendapat serangan sastrawan-sastrawan Lekra, dan karena alasan teknis terpaksa menghentikan penerbitannya selama lebih dari dua tahun (1965–1966). Pada November 1967 majalah ini kemudian terbit lagi (no. 1, th. IV) dengan H.B. Jassin dan D.S. Moeljanto bertindak sebagai redakturnya.

Kemunculan kembali majalah *Sastra* tentu saja mendapat sambutan yang sangat berarti dari para peminat sastra Indonesia. Bagaimanapun juga, majalah ini pernah begitu berwibawa ketika pada tahun-tahun awal penerbitannya beberapa kali memberikan hadiah dan penghargaan kepada para sastrawan yang karyanya dipandang terbaik pada masa itu. Dengan terbitnya kembali majalah *Sastra,* para sastrawan dari berbagai daerah menyambutnya dengan antusias.[289] Boleh jadi karena merasa ada ruang yang lebih bebas dalam menyalurkan kreasinya dan kepentingan politik tidak lagi memasuki wilayah sastra, maka persoalan hubungan sastra dan masyarakat, kurang begitu diperhatikan.[290]

Sumatra, sebagaimana yang terjadi dalam karya-karya sebelum merdeka. Sastrawan-sastrawan yang digolongkan ke dalam Angkatan Terbaru, antara lain, A.A. Navis, Abas Kartadinata, Ajatrohaedi, Ajip Rosidi, Dodong Djiwapradja, Kirdyo, Misbach Jusa Biran, Motinggo Boesje, Muhammad Ali, Nasjah Djamin, Nh. Dini, Nugroho Notususanto, Rendra, Sapardi Djoko Damono, S.M. Ardan, Soekanto S.A., Soebagio Sastrowardojo, Toha Mochtar, Toto Sudarto Bachtiar, Triswono, dan beberapa nama lain yang muncul pada tahun 1950-an itu. Lihat Ajip Rosidi, *Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir?* Djakarta: Gunung Agung, 1964

[288] Ajip Rosidi, "Pengantar" dalam *Laut Biru Langit Biru,* 1977, hlm. 14

[289] Sambutan Wiratmo Soekito (Harian *Kami,* 8 November 1967) dan J.S. Hadis (*Berita Yudha Minggu,* 12 November 1967) yang dimuat lagi dalam *Sastra,* no. 1, thn. VI, Januari 1968, menunjukkan tanggapan yang positif atas terbitnya kembali majalah *Sastra.* Dikatakan Wiratmo Soekito, "*... terbitnya kembali majalah Sastra ... berguna sekali dalam rangka menciptakan desentralisasi pusat-pusat kegiatan intelektual dan kultural ...* " (kutipan disesuaikan EYD).

[290] Ketegangan hubungan sastra dan masyarakat kerap terjadi mana kala sastrawan, di satu pihak, merasa mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan gagasannya, dan di lain pihak, masyarakat memakai ukuran-ukuran normatif. Karya sastra lalu diperlakukan bukan

Hal itu pula yang terjadi pada majalah *Sastra* no. 8, Agustus 1968, ketika memuat sebuah cerpen "Langit Makin Mendung" karya Kipanjikusmin.[291] Cerpen ini menceritakan kebosanan para nabi di surgaloka. Mereka kemudian mengajukan petisi agar diizinkan turun ke bumi. Salah seorang penanda tangan itu adalah Nabi Muhammad saw. Beliau lalu disuruh turun ke bumi, diantar Malaikat Jibrail. Selanjutnya diceritakan situasi kota Jakarta yang penuh hiruk-pikuk politik, kemaksiatan, hubungan dengan CIA dan RRC, konfrontasi dengan Malaysia, Waperdam (Wakil Perdana Menteri) Togog yang memanas-manasi situasi, dan usaha Paduka Yang Mulia yang coba menyatukan ideologi nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom).[292] Sebuah cerita simbolik yang sebenarnya hendak mengkritik kebrengsekan para pemimpin negara waktu itu. Kritik sosial dengan menampilkan tokoh-tokoh simbolik, barangkali tidak akan menimbulkan reaksi. Masalahnya akan lain, ketika yang ditampilkan adalah tokoh yang justru sangat dimuliakan umat Islam (Muhammad saw.). Apalagi jika penggambarannya begitu eksplisit sehingga penafsiran pembaca hanya mengacu pada satu tokoh tertentu.

Untuk memberi gambaran sedikit tentang cerpen itu dikutip beberapa bagian cerpen itu yang dianggap merupakan penghinaan terhadap umat Islam.

---

sebagai teks imajinatif, melainkan teks agama, sejarah, dan sebagainya. Maka, ketika ada karya sastra yang coba mengangkat tokoh agama tertentu atau tokoh sejarah, masyarakat lain mengaitkannya dengan agama yang dianutnya atau dengan sejarah yang diketahuinya. Sekadar contoh, publikasi *Orkes Madun* karya Arifin C. Noer yang dipentaskan Teater Ketjil, pertengahan April 1974, dianggap tidak benar karena gambar Semar dalam bentuk kaligrafi berisi ayat-ayat Alquran. Arifin C. Noer kemudian tidak melanjutkan pementasannya. Pementasan tarian *Putih-Putih* karya Farida Faisol di Teater Arena TIM pertengahan November 1976, yang menampilkan tarian dalam gerak sembahyang, juga dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam karena penggunaan mukena yang tipis, tidak menutup aurat, dan gerakannya yang erotis. Pada hari ketiga, pementasan *Putih-Putih* pun dihentikan. Dalam suratnya 22 November 1976, Majelis Ulama DKI Jakarta menyampaikan penyesalannya dan menganggap pementasan itu "sangat membahayakan".

[291] "Langit Makin Mendung" adalah cerpen kedua karya Kipanjikusmin yang dimuat majalah *Sastra.* Cerpen pertamanya, "Domba Kain" yang dimuat Majalah *Sastra.* no. 5, Mei 1968 bersamaan dengan esainya, "Siapa dan Bagaimana Pengarang Angkatan 66?". Cerpen "Domba Kain" bercerita tentang kekecewaan seorang serdadu yang merasa telah berkorban sia-sia dalam peristiwa konfrontasi dengan Malaysia. Sebuah kritik sosial ditujukan kepada para pemimpin pemerintahan waktu itu. Cerpen ini sama sekali tidak mendapat reaksi apa-apa.

[292] Selengkapnya cerpen "Langit Makin Mendung" karya Kipanjikusmin dimuat sebagai lampiran buku H.B. Jassin, *Polemik,* Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1972, hlm. 225–242. Buku ini juga memuat berbagai tulisan mengenai perdebatan cerpen "Langit Makin Mendung" ditinjau dari berbagai aspek (kebebasan imajinasi, ilmu agama, tasawuf, sastra dan masyarakat, hukum, dan politik).

—Lama-lama mereka bosan juga dengan status pensiunan-nabi di sorgaloka. Petisi dibikin, mohon (dan bukan menuntut) agar pensiunan-pensiunan diberi cuti bergilir turun ke bumi, yang konon makin ramai saja.

—Refreshing sangat perlu. Kebahagiaan berlebihan justru siksaan bagi umat manusia yang biasa berjuang. Kami bukan malaikat atau burung perkutut. Bibir-bibir kami sudah pegal-pegal kejang memuji kebesaran-Mu; beratus tahun tanpa henti.

Membaca petisi para nabi, Tuhan terpaksa menggeleng-gelengkan kepala, tak habis pikir pada ketidakpuasan di benak manusia .... Dipanggil penanda tangan pertama: Muhammad dari Madinah, Arabia. Orang bumi biasa memanggilnya Muhammad saw.

—Daulat, ya Tuhan.

—Apalagi yang kurang di sorgaku ini? Bidadari jelita berjuta, sungai susu, danau madu. Buah apel emas, pohon limau perak, kijang-kijang platina, burung-burung berbulu intan baiduri. Semua adalah milikmu bersama, sama rasa sama rata!

—Hamba ingin mengadakan riset.(Jawabnya lirih)

—Tentang apa?

—Akhir-akhir ini begitu sedikit umat hamba yang masuk sorga.

—Ah, itu kan biasa. Kebanyakan mereka dari daerah tropis kalau tak salah?

—Betul, kau memang maha tahu.

—Kemarau kelewat panjang di sana. Terik matahari terlalu lama membakar otak-otak mereka yang bodoh. (Kacamata model kuno dari emas diletakkan di atas meja dari emas pula).

—Bagaimana, ya Tuhan?

—Umatmu banyak kena tusukan sinar matahari. Sebagian besar berubah ingatan, lainnya pada mati mendadak.

—Astaga! Betapa nasib mereka kemudian?

—Yang pertama asyik membadut di rumah-rumah gila.

—Dan yang mati?

—Ada stempel kalimah Syahadat dalam paspor mereka. Terpaksa raja iblis menolak memberikan visa neraka untuk orang-orang malang itu.

—Heran, tak pernah mereka mohon suaka ke sini! (Kening sedikit mengerut).

—Tentara neraka memang telah merantai kaki-kaki mereka di batu nisan masing-masing.

—Apa dosa mereka gerangan? Betapa malang nasib umat hamba, ya Tuhan!

—Jiwa-jiwa mereka kabarnya *mambu Nasakom.* Keracunan Nasakom!

—Nasakom? Racun apa itu, ya Tuhan! Iblis laknat mana meracuni jiwa mereka. (Muhammad saw. tampak gusar sekali. Tinju mengepal). Usman, Umar dan Ali asah pedang kalian tajam-tajam

Tuhan hanya mengangguk-angguk, senyum penuh pengertian penuh kebapaan.[293]

Kisah bagian pertama dari sebuah cerita bersambung itu, ternyata mendapat reaksi sangat keras dari kalangan umat Islam. Gelombang protes mula-mula datang dari Medan. Mahasiswa-mahasiswa Islam di sana, l2 Oktober 1968, memprotes dan mendesak agar Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara di Medan melarang peredaran dan menyita majalah tersebut. Kantor majalah *Sastra* di Jakarta didemonstrasi beberapa kelompok massa Islam. Sejumlah organisasi Islam di berbagai kota menganggap bahwa cerpen itu telah menghina Tuhan dan Nabi Muhammad saw., dengan demikian melukai hati umat Islam. Mereka mendesak agar cerpen itu dicabut dari peredaran dan pengarangnya meminta maaf kepada umat Islam.

Pada tanggal 22 Oktober 1968, Kipanjikusmin secara terbuka menyatakan, mencabut cerpen "Langit Makin Mendung" dan menganggapnya tidak ada. Pernyataan itu sama sekali tidak berpengaruh. Beberapa organisasi pemuda Islam di Jakarta, 24 Oktober 1968, membuat sebuah deklarasi yang isinya mendukung gugatan umat Islam Medan bahwa cerpen itu memang menghina Islam, menghina Tuhan, dan menghina Nabi Muhammad saw. Polemik mengenai itu kemudian berkembang lebih lanjut. Persoalannya makin rumit, karena H.B. Jassin tetap merahasiakan nama, identitas, dan alamat penulisnya. Cerpen "Langit Makin Mendung" memang ditulis dengan menggunakan nama samaran Kipanjikusmin. Dalam hal ini, hanya H.B. Jassin sendiri yang tahu nama, identitas, dan alamat penulisnya. Mengingat H.B. Jassin selaku redaktur yang bertanggung jawab atas pemuatan cerpen itu, sementara Jassin tetap merahasiakan identitas Kipanjikusmin, H.B. Jassin sendiri yang harus bertanggung jawab atas persoalan itu. Jika kemudian ia berhadapan dengan pengadilan, itulah bentuk tanggung jawabnya sebagai redaktur majalah *Sastra* yang telah memuat cerpen tersebut. Itulah risiko yang harus diterima atas sikapnya tetap melindungi penulisnya. Peristiwa itulah yang menandai terjadinya apa yang disebut Heboh Sastra,[294] yaitu peristiwa gugatan kepada H.B. Jassin atas pemuatan cerpen itu sehingga ia harus mempertanggungjawabkannya

---

[293] Dikutip dengan penyesuaian ejaan dari cerpen "Langit Makin Mendung" karya Kipanjikusmin (*Sastra*, no. 8, VI, Agustus 1968), hlm. 3

[294] Selain buku *Polemik* ... H.B. Jassin juga menerbitkan buku sejenis dengan judul *Heboh Sastra: Suatu Pertanggungan Jawab*, Jakarta: Gunung Agung, 1970. Studi mengenai "Langit Makin Mendung" dilakukan Firmiani dalam skripsi sarjananya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1986). Studi yang lebih komprehensif atas cerpen "Langit Makin Mendung"

di pengadilan. Proses pengadilannya berlangsung antara tahun 1969–1970 yang mengundang perhatian banyak pihak. Dalam sejarah sastra Indonesia, bahkan dalam sejarah peradilan di Indonesia, kasus "Langit Makin Mendung" adalah kejadian pertama sebuah karya sastra yang diperkarakan di depan pengadilan. Yang juga menarik dari peristiwa itu adalah tampilnya H.B. Jassin sebagai terdakwa, sementara pengarangnya tidak diketahui keberadaannya, dan hanya H.B. Jassin yang mengetahui alamat dan identitas Kipanjikusmin. Pada tanggal 28 Oktober 1970, hakim akhirnya memvonis H.B. Jassin dengan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan selama dua tahun.[295]

4. Angkatan 70: Kembali ke Tradisi

Kasus "Heboh Sastra" yang dilatarbelakangi pemuatan cerpen "Langit Makin Mendung" karya Kipanjikusmin, boleh jadi merupakan salah satu bentuk representasi semangat kebebasan berekspresi. Terlepas dari akibat-akibat yang ditimbulkannya, semangat kebebasan berekspresi itu dimungkinkan oleh beberapa faktor berikut: (1) pudarnya pengaruh politik dalam kesenian, dan lebih khusus lagi, kesusastraan. Penolakan para seniman terhadap campur tangan politik dalam wilayah kesenian, telah menghilangkan tekanan-tekanan psikologis yang justru sangat penting bagi proses penciptaan karya seni, (2) penerbitan kembali sejumlah majalah dan surat kabar yang independen dan menyediakan rubrik sastra, memungkinkan sastrawan punya banyak pilihan untuk mengirimkan karya-karyanya ke berbagai media massa itu tanpa pretensi adanya faktor di luar sastra, (3) terbitnya majalah *Horison*, majalah *Sastra*–yang kemudian menghentikan penerbitannya akibat kasus cerpen "Langit Makin Mendung", –dan *Budaya Jaya* yang memberi tempat bagi karya-karya eksperimental, ikut menciptakan suasana bagi lahirnya karya-karya yang lebih berbobot, sekaligus memungkinkan lahirnya sastrawan-sastrawan baru, (4) berdirinya Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) yang didukung sepenuhnya oleh Pemerintah DKI Jakarta, telah ikut mendorong lahirnya semangat berkreasi dan

melalui kajian sosiologis dan teologis (Islam) dilakukan Jamal D. Rahman, "Antropomorfisme Islam dalam Sastra Indonesia: Kasus *Langit Makin Mendung*" (Tesis Magister IImu Susastra), Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2004.

[295] Laporan lengkap mengenai proses persidangan H.B. Jassin itu, lihat J.E. Siahaan, "Imadjinasi di Depan Pengadilan: Satu Rekaman Dokumentasi Dewan Kesenian Djakarta", *Horison*, Agustus–Oktober 1970. Menarik komentar Ajip Rosidi mengenai pembelaan itu. Dikatakannya, "Dalam pembelaannya Jassin mengemukakan pentingnya kebebasan mencipta dan berimajinasi dan lain-lain-pendapat yang sebenarnya cukup sungguh-sungguh, asal saja tidak dihubungkan dengan kenyataan bahwa ia membela sebuah cerita pendek yang jelek. Ajip Rosidi, *Laut Biru* ..., hlm. 14

keberanian untuk melakukan eksperimentasi, dan (5) terjadinya pergeseran orientasi sastrawan dalam memandang tradisi budaya tempatan memberi kemungkinan yang lebih *pas* bagi para sastrawan dalam melakukan eksplorasi estetiknya.

Sejak tahun 1968, dan terutama paruh pertama tahun 1970-an, bermunculanlah karya sastra yang memperlihatkan semangat kebebasan berkreasi.[296] Pada masa itu, berbagai karya eksperimental seperti memperoleh lahan yang subur dan momentum yang baik. Karya-karya eksperimental itu mencakupi semua ragam sastra (puisi, novel, cerpen, dan drama). Di antara karya-karya yang konvensional yang terbit tahun 1970-an, tidak sedikit pula yang memperlihatkan semangat kebebasan itu yang diejawantahkan dalam bentuk karya-karya eksperimental. Sementara itu, nama-nama yang oleh H.B. Jassin dimasukkan ke dalam Angkatan 66, dalam tahun 1970-an itu, justru makin memperlihatkan kematangannya. Jika disederhanakan, sastrawan tahun 1970-an, berdasarkan karya-karya yang dihasilkannya, dapat dibagi ke dalam tiga kelompok.

Pertama, mereka yang termasuk Angkatan 66 atau yang telah berkarya pada dasawarsa tahun 1960-an, bahkan sudah sejak dasawarsa tahun 1950-an, tetapi mulai makin matang pada tahun 1970-an. Jadi, kelompok ini dapat disebut sebagai sastrawan senior mengingat kiprah mereka yang memang sudah dimulai tahun-tahun sebelumnya. Yang termasuk kelompok sastrawan dari golongan ini antara lain, Gerson Poyk, Goenawan Mohamad, Hartojo Andangdjaja, Husni Djamaludin, M. Fudoli Zaini, M. Poppy Hutagalung, Mahbub Djunaidi, Mohammad Diponegoro, Nasyah Djamin, Nh. Dini, Rachmat Djoko Pradopo, Rendra, Saini K.M., Sapardi Djoko Damono, Satyagraha Hoerip, Slamet Sukirnanto, Sori Siregar, Subagio Sastrowardojo, Taufiq Ismail, Titis Basino, Umar Kayam, Wildan A. Yatim, dan Wing Kardjo.

---

[296] Contoh kasus semaraknya kebebasan berkreasi pascatragedi 1965 dapat kita lihat pada mencuatnya nama Iwan Simatupang (18 Januari 1928–4 Agustus 1970) sebagai tokoh penting dalam perkembangan sastra Indonesia zaman Orde Baru. Ia bolehlah dianggap sebagai salah seorang pemicu lahirnya karya-karya eksperimental, terutama dalam penulisan prosa dan (mungkin juga) dalam penulisan naskah drama. Karya pertamanya, drama *Bulan Bujur Sangkar* terbit tahun 1960, sebuah drama yang selesai ditulisnya tahun 1957 di Eropa, nyaris tidak mendapat tanggapan apa pun ketika itu. Setelah itu, terutama setelah kematian istrinya –Cornelia Astrid van Geem–, ia seperti tenggelam, meski sempat menikah lagi dengan Tanneke Burki, seorang balerina dari Bandung (1961) yang hanya bertahan sampai awal tahun 1964. Antara 1964–1966, Iwan sama sekali tidak mau terlibat dalam organisasi apa pun yang sedang berseteru. Pada tahun 1966, dua drama Iwan Simatupang, yaitu *RT Arol~Rdl'Nol* dan *Petang di Taman,* terbit. Kedua drama ini pun belum mendapat tanggapan yang cukup ramai. Karya Iwan Simatupang mulai mendapat tanggapan luas, bahkan

Kedua, mereka yang karya-karyanya baru muncul tahun 1970-an. Yang termasuk sastrawan golongan ini antara lain, Abrar Yusra, Arswendo Atmowiloto, Aspar Paturisi, Budiman S. Hartoyo, D. Zawawi Imron, Darmanto Jatman, Diah Hadaning, Ediruslan P.E., Amanriza, Emha Ainun Nadjib, Frans Nadjira, Hamid Jabbar, Iman Budhi Santosa, Korrie Layun Rampan, Linus Suryadi A.G. Marianne Katoppo, Putu Arya Tirtawirya, Ragil Suwarna Pragolapati, Rayani Sriwidodo, Sanento Yuliman, Seno Gumira Ajidarma, Sides Sudyarto D.S., Th. Sri Rahayu Prihatmi, Toeti Herati Noerhadi, dan Wisran Hadi.

Ketiga, mereka yang menghasilkan karya dengan kecenderungan melakukan eksperimentasi. Di antaranya, ada yang sudah berkarya sejak tahun 1960-an, ada pula yang kemunculannya pada tahun 1970-an itu. Yang termasuk ke dalam golongan ini, antara lain, Iwan Simatupang, Arifin C. Noer, Danarto, Sutardji Calzoum Bachri, Abdul Hadi W.M., Kuntowijoyo, Putu Wijaya, Ikranagara, Ibrahim Sattah, Leon Agusta, Akhudiat, Adri Darmadji Woko, Darmanto Jatman, dan Yudhistira A.N.M. Massardi.

Dilihat dari kecenderungan karya-karya mereka, ada semangat yang sama yang menjadi landasan dan wawasan estetiknya, yaitu semacam kerinduan untuk menggali nilai-nilai tradisi masa lalu budaya leluhur. Menurut Abdul Hadi W.M., corak pendekatan dan sikap terhadap tradisi itu dapat dibagi ke dalam tiga kelompok kecenderungan. Mereka mengambil unsur-unsur budaya tradisional untuk keperluan inovasi dalam pengucapan.

Kecenderungan pertama yang menyikapi tradisi dengan begitu kreatif untuk keperluan inovasi, dapat dilihat pada karya-karya Goenawan Mohamad, Sapardi Djoko Damono, Arifin C. Noer, dan Sutardji Calzoum Bachri. Dalam seni tari dan teater tampak dalam karya Sardono W. Kusumo, Arifin C. Noer, W.S. Rendra, Putu Wijaya, dan Ikranagara. Mereka tidak berpretensi kedaerahan walaupun sadar mengambil unsur tradisi daerah.

---

memunculkan polemik, justru setelah terbit novel *Merahnya Merah* (1968, selesai ditulis tahun 1961) dan terutama novel *Ziarah* (1969, novel Iwan pertama yang selesai ditulis tahun 1960, setelah kematian istrinya). Tampak di sini, tanggapan terhadap novel Iwan Simatupang begitu semarak, bersifat polemis, dan penting dalam menyemarakkan kehidupan kritik sastra. Sangat mungkin tanggapan masyarakat pembaca akan berbeda jika novel itu terbit tahun 1960-an ketika politik diusung sebagai panglima dan pengaruhnya memasuki hampir semua aspek kehidupan. Dengan demikian, terbitnya novel Iwan selepas tragedi tahun 1965, seperti memperoleh momentum yang tepat. Sejak itulah kemudian berlahiran karya-karya sejenis dari sastrawan lainnya yang memperlihatkan semangat eksperimentasi, sebagaimana yang telah dilakukan Iwan Simatupang. Betapa ramainya tanggapan pembaca terhadap karya-karya Iwan Simatupang, dapat dilihat dari semua tulisan tentang Iwan Simatupang, yang mencapai lebih dari 300-an tulisan, baik yang berupa resensi, artikel, esai, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Studi mendalam tentang Iwan Simatupang dilakukan Dami N. Toda, *Novel Baru Iwan Simatupang* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980; buku ini

Kecenderungan kedua dalam sastra dapat dilihat dalam karya-karya Nh. Dini, Umar Kayam, Ahmad Tohari,[297] Darmanto Jt., Linus Suryadi A.G., Wisran Hadi, Ibrahim Sattah, Subagio Sastrowardojo, dan lain-lain. Kebanyakan dari mereka melihat tradisi sebagai produk sejarah yang bentuk-bentuknya sukar diubah dan merupakan ciri khas budaya masyarakat tertentu yang mungkin tidak dimiliki suku bangsa lain.

Kecenderungan ketiga, yang menghubungkan diri dengan sumber-sumber agama dan bentuk-bentuk spiritualitas agama tampak dalam karya-karya Danarto, Abdul Hadi W.M., Kuntowijoyo, M. Fudoli Zaini, Taufiq Ismail, Emha Ainun Nadjib, D. Zawawi Imron, juga Sutardji Calzoum Bachri (dalam tahap akhir perkembangan kepenyairannya).[298]

Bagi Abdul Hadi W.M.,[299] munculnya "kesadaran baru" dan "wawasan estetik baru" itu menunjukkan adanya perbedaan yang tajam dengan semangat dan wawasan estetik seperti yang terdapat pada karya-karya periode sebelumnya. Kecenderungan yang lain tampak dari kesadaran sastrawan tahun 1970-an itu yang mulai menolak *realisme formal,* dan mulai *menerima improvisasi* dan *anti-rasionalisme.* Danarto, bahkan menambahkan, selain anti-intelektualisme dan anti-rasionalisme, ada kecenderungan lain yang mencolok, yaitu adanya penjelajahan terhadap mistisisme dan tasawuf. Ciri lainnya, seperti dikatakan Dami N. Toda, adalah anti-slogan. Pada karya-karya sastrawan tahun 1970-an itu, tidak ada lagi semboyan seni untuk rakyat atau seni untuk seni, tidak ada lagi slogan cinta tanah air, humanisme universal, atau pertentangan Timur-Barat. Jadi, ada kesadaran dan semangat yang sama yang tampak dari karya-karya sastrawan tahun 1970-an itu berkenaan dengan wawasan estetik, pandangan, sikap hidup

---

berasal dari skripsi penulisnya tahun 1975 di Fakultas Sastra Universitas Indonesia), Kurnia Jaya Raya, "Resepsi Novel-Novel Iwan Simatupang di Indonesia 1968–1988" (Skripsi Sarjana, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 1989), Okke K.S. Zaimar, *Menelusuri Makna Ziarah Karya Iwan Simatupang* (Jakarta: Intermasa, 1991; buku ini berasal dari disertasi penulisnya tahun 1990 di Fakultas Sastra Universitas Indonesia), Kurnia Jaya Raya, *Inspirasi? Nonsens!* (Magelang: Indonesia Tera, 1999). Lihat juga *Surat-Surat Politik Iwan Simatupang, 1964–1966* (Jakarta: LP3ES, 1986), surat-surat Iwan Simatupang yang dikumpulkan dan diberi Kata Pengantar Frans M. Parera. Pembicaraan mengenai perjalanan sastra Indonesia kontemporer, hampir tidak pernah menafikan tempat dan peran Iwan Simatupang sebagai tokoh pembaharu.

297 Ahmad Tohari baru muncul namanya dan mulai diperhitungkan keberadaannya dalam sastra Indonesia awal tahun 80-an. Tidak begitu jelas, mengapa Abdul Hadi memasukkan nama Ahmad Tohari ke dalam sastrawan Angkatan 70-an.

298 Abdul Hadi W.M., *Kembali ...,* hlm. 6–7

299 Abdul Hadi W.M., "Angkatan 70 dalam Sastra Indonesia", Makalah dibawakan dalam Diskusi Sastra di Teater Arena, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 4 September 1984, dimuat juga dalam E. Ulrich Kratz (Peny.), *Sumber Terpilih Sejarah Sastra Indonesia Abad IX*; 2000, hlm. 789–806. Penamaan Angkatan 70 sebenarnya sudah banyak dilontarkan Abdul Hadi dan

pengarang, semangat, dan orientasi kebudayaannya. Atas dasar itulah, Abdul Hadi W.M. menamakan sastrawan periode itu sebagai Angkatan 70 dalam sastra Indonesia.[300]

Alasan utama yang menjadi pemikiran Abdul Hadi untuk menyebut sastrawan periode itu sebagai Angkatan 70 didasari oleh adanya semacam gerakan sastra yang membawa ciri baru dan perbedaan yang mencolok dengan ciri gerakan sastra sebelumnya. "Jadi, pangkal tolaknya adalah karya-karya yang merintis pembaruan, yang kemudian melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru sebagai hasil proses interaksi dengan kehidupan sosial, moral, intelektual, serta spiritual lingkungan dan zamannya."

Ciri-ciri yang mencolok dari eksperimentasi yang diperlihatkan karya-karya yang muncul dasawarsa 1970-an itu, dapatlah disebutkan beberapa di antaranya. Untuk novel yang dapat diwakili oleh karya Iwan Simatupang, Putu Wijaya, Kuntowijoyo, dan Budi Darma,[301] memperlihatkan adanya

---

Dami N. Toda sejak pertengahan dasawarsa 1970-an. Dalam artikel panjang "Kepenyairan di Indonesia tahun 70-an" yang dimuat bersambung di Harian *Berita Buana* (14, 21, dan 28 Januari 1977), Abdul Hadi mengemukakan tokoh-tokoh persajakan utama 70-an seperti Sutardji Calzoum Bachri, Sapardi Djoko Damono, Goenawan Mohamad, dan Darmanto Jatman yang membawa kecenderungan baru, menggeser wawasan estetik lama dan mewarnai dunia persajakan sepanjang tahun 70-an.

[300] Penamaan Angkatan 70 dalam sastra Indonesia ini tidak hanya diperkenalkan oleh Abdul Hadi W.M., tetapi juga oleh Dami N. Toda sebagaimana diungkapkan dalarn beberapa artikelnya, "Peta Perpuisian Indonesia 1970-an dalam Sketsa", *Budaya Jaya,* no. 12, th. X, September 1977; "Tahap-Tahap Perkembangan Wawasan Estetik Perpuisian Indonesia," *Budaya Jaya,* no. 121, th. XI, Juni 1978; "Puisi Indonesia dalam Dekade Terakhir", *Horison,* no. 8, XVI, Agustus 1981. Lihat juga esai-esai Dami N. Toda dalarn bukunya, *Hamba-Hamba Kebudayaan,* Jakarta: Sinar Harapan, 1984. Sutardji Calzoum Bachri dan Danarto datam wawancaranya dengan Abdul Hadi W.M. *(Berita Buana,* 14 Februari 1978) juga mengusung nama Angkatan 70 ketika keduanya melihat adanya kecenderungan baru yang terdapat dalam karya-karya yang terbit pada periode itu. Mengenai hal ini, Boen S. Oemarjati tidak secara tegas menyebut Angkatan 70, melainkan menyebutnya sebagai "periode". Hal yang senada juga dilontarkan oleh Goenawan Mohamad yang menyebutnya sebagai "generasi sastrawan 1970-an". Sementara itu, Korrie Layun Rampan, meskipun pandangan yang mendasarinya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan Abdul Hadi dan Dami N. Toda, ia menyebut sastrawan pada periode itu sebagai "Angkatan 80". Penamaan yang dilakukan Korrie ini mungkin diilhami oleh penamaan Angkatan `80 (*De Tachtiger Beweging*) Belanda yang menyerap pengaruh romantisisme Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Korrie sendiri tidak memberi alasan, mengapa ia menyebutnya sebagai Angkatan 80, dan tidak Angkatan 70. Padahal, penyebutan Angkatan 80 yang dilontarkan Korrie dalam artikelnya "Angkatan 80 dalam Sastra Indonesia" (*Suara Karya,* 24 Agustus 1984), jelas lebih kemudian dibandingkan dengan penamaan Angkatan 70 yang diangkat Abdul Hadi, Dami N. Toda, Danarto, dan Sutardji Calzoum Bachri sejak pertengahan dasawarsa 70-an, terutama ketika Abdul Hadi mengasuh lembar kebudayaan "Dialog" di harian *Berita Buana* antara tahun 1979–1990.

[301] Beberapa novel mereka dapat disebutkan di sini, antara lain: Iwan Simatupang, *Merahnya Merah* (1968), *Ziarah* (1969), *Kering* (1972), dan *Koong* (1975); Putu Wijaya, *Bila Malam Bertambah*

kesamaan tema yang mengangkat masalah keterasingan manusia modern dan kehidupan yang absurd. Identitas tokoh menjadi tidak penting yang ditandai dengan penamaan "Tokoh Kita" (dalam novel-novel Iwan Simatupang) atau cukup disebutkan lelaki setengah baya, penjaga kuburan, buruh pabrik, wali kota, pensiunan, dan beberapa nama jabatan atau status sosial yang bisa berlaku untuk siapa saja. Latar tempat dan latar waktu juga tidak mengacu pada tempat dan waktu tertentu sehingga dapat berlaku di mana dan kapan saja. Alur yang dalam novel konvensional selalu harus didasari pada rangkaian peristiwa yang mempunyai pertalian hubungan sebab-akibat (kausalitas), dalam novel-novel tahun 1970-an itu tidak lagi berlaku. Segala peristiwa bisa tumpang tindih tidak ada hubungan sebab-akibatnya (kausalitas). Peristiwa yang dihasilkan oleh perilaku dan pikiran disajikan seketika secara serempak, seolah-olah peristiwa itu datang saling menyergap. Akibatnya, peristiwa itu seperti tidak jelas lagi *juntrungannya*. Model novel-novel yang seperti inilah yang kemudian disebut sebagai novel arus kesadaran (*stream of conciousness*), sebuah aliran dalam sastra (terutama prosa) yang menekankan cerita melalui pikiran, perasaan, dan alam bawah sadar tokoh-tokohnya.

Untuk cerpen, dapatlah kiranya diwakili oleh karya-karya Danarto, Putu Wijaya, Kuntowijoyo, Fudoli Zaini, dan Umar Kayam.[302] Lebih khusus lagi pada cerpen-cerpen Danarto, tokoh-tokoh yang muncul bisa apa saja. Air, batu, hewan, tanaman, atau benda dan binatang apa pun, bisa saja menjadi tokoh yang juga dapat berdialog dengan tokoh lain. Kumpulan cerpen Danarto, *Godlob* (1976) dan *Adam Ma'Rifat* (1982) memperlihatkan adanya penggalian mistisisme Jawa dan tasawuf, sedangkan kumpulan cerpen Kuntowijoyo dan Fudoli Zaini mengedepankan tema-tema sufistik. Yang sangat kuat mengungkapkan warna lokal budaya Jawa tampak pada cerpen-cerpen Umar Kayam, *Sri Sumarah dan Bawuk*, sementara karya-karya Putu Wijaya yang cenderung menampilkan serangkaian teror mengangkat tema-tema keterasingan manusia perkotaan. Begitulah, cerpen-cerpen Indonesia pada dasawarsa tahun 1970-an seperti sengaja melepaskan diri

---

Malam (1971), *Telegram* (1972), *Pabrik* (1976), *Stasiun* (1977), *Keok* (1978), *Lho* (1982), *Pol* (1987), dan beberapa novel lainnya yang mencapai lebih dari 10 novel; Kuntowijoyo, *Khotbah di Atas Bukit* (1976), dan Budi Darma, *Olenka* (I983).

302 Karya-karya mereka dapatlah disebutkan di sini, beberapa antaranya: Danarto, *Godlob* (1976) dan *Adam Ma'rifat* (1982); Putu Wijaya, *Bom* (1978), *Es* (1980), dan *Gres* (1982); Kuntowijoyo, *Dilarang Mencintai Bunga-Bunga* (1993), cerpen "Dilarang Mencintai Bunga-Bunga" memperoleh Hadiah Pertama Sayembara Majalah *Sastra*, 1969; Fudoli Zaini, *Lagu dari Jalanan* (1982), *Potret Manusia* (1983), *Kota Kelahiran* (1985), dan *Arafah* (1985). Fudoli dua kali mendapat hadiah dari Majalah *Horison*, yaitu untuk cerpennya "Si Kakek dan Burung Dara" (1966/1967), dan "Sisifus" (1977/1978); Umar Kayam, *Seribu Kunang-kunang di Manhattan* (1972) dan *Sri Sumarah dan Bawuk* (1975).

dari konvensi cerpen sebelumnya. Ada inovasi (pembaruan) dan pemberontakan terhadap wawasan estetik cerpen-cerpen periode sebelumnya. Itulah yang dimaksud dengan adanya kecenderungan baru, baik yang menyangkut tema cerita, tokoh yang ditampilkan, alur cerita, maupun penyajiannya. Dalam bidang puisi, terjadi juga pemberontakan terhadap konvensi yang berlaku sebelumnya. Ikatan pada bait dan larik yang dalam puisi-puisi sebelumnya terutama puisi zaman Pujangga Baru, sudah ditinggalkan Chairil Anwar, pada tahun 70-an itu tidak lagi dipersoalkan. Artinya, para penyair tidak merasa perlu memikirkan bait dan larik dalam puisinya itu. Puisi tahun 1970-an cenderung lebih mementingkan ekspresi untuk mendukung tema yang hendak disampaikan. Oleh karena itu, ada puisi naratif yang panjang menyerupai bentuk prosa,[303] ada pula yang sengaja disusun pendek-pendek. Dalam hal ini, semakin tidak jelas batas tegas antara prosa dan puisi. Penyair boleh saja menuliskan puisinya seperti sebuah cerpen, jika si penyair hendak memanfaatkan narasi bagi kepentingan puisinya. Selain itu, gencar pula kecenderungan untuk menggali akar tradisi kultural tempat penyair itu lahir dan dibesarkan. Sutardji Calzoum Bachri, Ibrahim Sattah, Abdul Hadi W.M., Adji Darmadji Woko, Linus Suryadi, Darmanto Jatman, D. Zawawi Imron, Goenawan Mohamad, Emha Ainun Nadjib, dan Hamid Jabbar, adalah beberapa nama yang menonjol mengangkat tradisi kulturalnya.

Seperti posisi Chairil Anwar bagi Angkatan 45 dalam sastra Indonesia, kedudukan Sutardji Calzoum Bachri bagi Angkatan 70 juga tidak terpisahkan. Ia menjadi ikon bagi gerakan sastra pada dekade itu. Pemberontakan yang dilakukan Sutardji Calzoum Bachri tidak hanya berhenti pada tataran bentuk yang tidak lagi mempersoalkan bait dan larik atau rima persajakan, tetapi juga makna. Abdul Hadi menyebutnya sebagai penyair *avant-garde* dengan kredo puisinya yang kontroversial dan

---

[303] *Pengakuan Pariyem* (1981) karya Linus Suryadi A.G., misalnya, merupakan contoh puisi naratif yang panjang (192 halaman). Linus Suryadi sendiri menyebutnya sebagai prosa lirik, prosa yang dibangun seperti puisi yang mengingatkan kita pada bentuk syair atau hikayat dalam sastra lama. Dalam karya ini, Linus juga begitu banyak menggunakan kosa-kata Jawa, sehingga diperlukan lampiran Daftar Kosa Kata Jawa-Indonesia setebal hampir 50 halaman (halaman 193–238). Banyak pula pembaca dan pengamat sastra Indonesia yang mempertanyakan tempat *Pengakuan Pariyem* dalam sastra Indonesia; apakah termasuk sastra Indonesia atau sastra Jawa. Penulisan puisi naratif, sebelumnya banyak dilakukan Ajip Rosidi (*Jante Arkidam*) dan Ramadhan K.H. (*Priangan si Jelita*). Belakangan, Sapardi Djoko Damono juga banyak memanfaatkan pola puisi naratif dalam hampir semua antologi puisinya, seperti dalam antologi *DukaMu Abadi* (1969), *Mata Pisau* (1974), *Akuarium* (1974), *Perahu Kertas* (1983), *Silzir Hujarr* (1984), sampai ke antologi puisinya yang belakangan seperti *Hujan Bulan Juni* (1994), *Arloji* (1999), dan *Ayat-Ayat Api* (2000) cenderung menggunakan bentuk narasi yang jernih dengan bahasa yang sederhana. Gaya seperti ini banyak memengaruhi para penyair yang kemudian.

menghebohkan.[304] Penyair kelahiran Riau ini berhasil memanfaatkan mantera dari tradisi leluhurnya (Melayu) untuk kepentingan persajakannya yang tampak liar dan memukau. Di samping itu, renungannya yang mendalam tentang maut, kefanaan manusia, pencarian, dan kerinduan pada Tuhan, memancarkan sebuah kesadaran transendental baru, yang dikatakan Abdul Hadi sebagai kesadaran sufistik.[305]

Kredo atau pernyataan sikap penyair Sutardji Calzoum Bachri, boleh dikatakan merupakan bentuk kesadaran itu dalam usahanya menawarkan pembaruan. Kredo Sutardji Calzoum Bachri yang bertarikh 30 Maret 1973 dan kemudian dimuat dalam majalah *Horison* (no. 12, th. 9, Desember 1974) merupakan wujud pernyataan sikap atas pendirian kepenyairannya.

Jika Sutardji Calzoum Bachri memanfaatkan mantra dari kultur Melayu[306] dan belakangan masuk pengaruh pemikiran tasawuf dalam karya-karyanya yang kemudian, Linus Suryadi A.G. (3 Maret 1951–30 Juli 1999) dan Darmanto Jatman menggunakan kultur Jawa sebagai unsur penting dalam mengungkapkan ekspresi puitiknya. Goenawan Mohamad lebih khusus lagi mengangkat simbol-simbol dunia pewayangan, sedangkan Sapardi Djoko Damono–terutama pada awal-awal kepenyairannya–cenderung berorientasi pada filsafat Jawa. Dari kultur lain, muncul pula Abdul Hadi W.M. dan D. Zawawi Imron (Madura), meski Abdul Hadi banyak pula menyerap pengaruh karya-karya agung para sastrawan sufi.

---

[304] Abdul Hadi W.M., "Sastra Transendental dan Kecenderungan Sufistik Kepengarangan di Indonesia," *Kembali ke Akar Kembali ke Sumber*, 1999, hlm. 36–46

[305] Istilah sastra sufi–sering juga dipakai istilah sastra sufistik yang kemudian menjadi wacana perdebatan pada dekade tahun 1970-an itu, pertama kali dilontarkan Abdul Hadi W.M. dalam serangkaian artikelnya yang dimuat di lembar "Dialog" Harian *Berita Buana.* Ia kemudian begitu gencar memperkenalkan dan menerjemahkan–khazanah sastra sufi berikut pemikiran dan estetika para penyairnya. Antologi puisi *Sastra Sufi* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985) merupakan salah satu usaha Abdul Hadi dalam mengangkat karya-karya penyair sufi, baik para penyair yang berasal dari Asia Barat maupun para penyair dari wilayah Nusantara, seperti Hamzah Fansuri, Raja Ali Haji, Bukhari Al-Jauhari, Yosodipuro I, Yosodipura II, Ronggowarsito sampai ke Amir Hamzah. Bukunya yang lain, *Tasawuf yang Tertindas: Kajian Hermeneutik terhadap Karya-Karya Hamzah Fansuri* (2001) dan *Hermeneutik, Estetika, dan Religiusitas* (2004) adalah usaha serius Abdul Hadi dalam memperkenalkan sastra sufi. Belakangan, ia juga banyak memperkenalkan (dan menerjemahkan) khazanah sastra Timur, terutama Cina, Jepang, dan India. Sementara itu, istilah sastra sufistik digunakan juga oleh Danarto, Nurcholis Madjid, Ali Audah, Fudoli Zaini, dan Sutardji Calzoum Bachri dalam kaitannya dengan pemikiran tasawuf dalam sastra. Dari sana lahir istilah-istilah sejenis, seperti sastra profetik, sastra transendental (diperkenalkan Kuntowijoyo dalam Temu Sastra 1982 di Taman Ismail Marzuki), sastra dzikir (diperkenalkan Taufiq Ismail dalam Catatan Kebudayaan, "Sastra sebagai Amal Shaleh", *Horison,* no. 6 Juni 1984), dan sastra Islam yang makna dan cakupannya lebih luas.

[306] Hal yang sama kemudian juga dilakukan Ibrahim Sattah (1943–19 Januari 1988) sebagaimana tampak dalam tiga antologi puisinya, *Dandandid* (1975), *Ibrahim* (1980), dan *Hai Ti* (1981).

Dinamika yang terjadi dalam sastra Indonesia tahun 1970-an sebenarnya jauh lebih semarak. Selain bermunculan karya-karya yang mengusung tema-tema yang berkaitan dengan tradisi budaya leluhur (Batak, Cirebon, Dayak, Jawa, Madura, Melayu, dan Minangkabau), tema-tema sufisme (tasawuf),[307] dan keterasingan manusia modern, juga muncul beberapa gerakan yang ikut menyemarakkan kehidupan kesusastraan Indonesia tahun 70-an itu. Ada tiga hal yang menandai terjadinya kesemarakan itu dan terus berlanjut pada periode berikutnya.

Pertama, terbitnya sejumlah majalah hiburan, seperti *Vista, Selecta, Varia, Aktuil, Top, Flamboyan,* dan *Violeta,* yang kemudian disusul majalah-majalah wanita-Kartini Grup, di satu sisi melahirkan penulis-penulis baru, dan terutama para penulis perempuan, dan di sisi lain, ikut menyebarkan popularitas sastra hiburan. Meskipun yang disebut terakhir sastra hiburan yang kemudian lebih sering disebut sastra populer, sudah berkembang sejak zaman sebelum Balai Pustaka,[308] kemudian semarak kembali pada dasawarsa tahun 1950-an.[309] Pada tahun 1970-an itu keberadaannya cukup banyak mengundang reaksi berbagai kalangan.[310] Beberapa novel Motinggo Boesje, Remy Sylado, menyusul Abdullah Harahap, Eddy D. Iskandar, Teguh Esha, Ashadi Siregar sampai ke novel yang ditulis para pengarang perempuan,

---

[307] Pada dekade tahun 1970-an itu dan kemudian berlanjut pada dasawarsa berikutnya, wacana tentang sastra sufi tidak hanya semarak dalam perdebatan konsep-konsep, seperti istilah sastra sufi, sastra sufistik, sastra profetik, sastra dzikir, dan sastra transendental, tetapi juga muncul dalam banyak puisi, cerpen, novel, dan drama. Para penyair yang coba mengangkat tema-tema tasawuf, dapatlah disebutkan beberapa di antaranya, Abdul Hadi W.M., Apip Mustopa, Budiman S. Hartoyo, D. Zawawi Imron, Emha Ainun Nadjib, Hamid Jabbar, Ibrahim Sattah, Ikranagara, Kuntowijoyo, Leon Agusta, Sides Sudyarto D.S., Slamet Sukirnanto, Sutardji Calzoum Bachri, dan Taufiq Ismail. Tentu saja masih banyak nama yang tercecer yang sebenarnya pernah berkiprah pada periode itu.

[308] Salah satu faktor yang mendorong didirikannya Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat (1908) justru lantaran munculnya bacaan-bacaan hiburan yang diterbitkan pihak swasta. Setelah lembaga itu berganti nama menjadi Balai Pustaka (1917), pihak pemerintah kolonial Belanda menyebut bacaan yang diterbitkan di luar Balai Pustaka (swasta) sebagai "bacaan liar". Mereka yang menerbitkan dan menjual buku-buku terbitan pihak swasta itu disebut sebagai *"saudagar kitab yang kurang suci hatinya".* Satu ungkapan yang jelas bermaksud memarginalkan karya-karya sastra terbitan pihak swasta.

[309] Pada dasawarsa 1950-an, bacaan-bacaan hiburan terutama terbitan Medan, cukup banyak diminati masyarakat luas. Kemasannya yang sederhana, bentuknya yang kecil seperti buku saku (*pocketbook*), cetakan yang agak buruk, dan kertasnya yang berkualitas rendah, menjadikan buku-buku sejenis itu dijual dengan harga murah. Karena harganya yang murah itu, ia dipersamakan dengan nilai uang terkecil, yaitu picis. Oleh karena itulah, buku-buku sejenis itu –yang umumnya mengangkat tema-tema percintaan–disebut roman picisan. Satu bentuk penghinaan terhadap buku-buku sejenis itu. Pembicaraan yang cukup luas mengenai buku-buku hiburan sejenis itu ditulis R. Roolvink, "Roman Pitjisan", *Pokok dan Tokoh,* Djakarta: Jajasan Pembangunan, 1953.

[310] Kebanyakan masyarakat memandang novel-novel sejenis itu secara apriori yang dikaitkan dengan masalah pornografi. Jika dicermati serius, novel-novel itu sesungguhnya tidak

seperti Ike Soepomo, Marga T., dan Mira W. yang terbit tahun 1970-an itu adalah contoh novel populer.[311] Dalam hal ini, seyogianya kita menempatkan posisi novel populer itu secara proporsional sebab ada novel populer yang baik, ada pula yang buruk. Beberapa karya pengarang yang disebutkan itu, boleh dikatakan termasuk kategori novel populer yang baik. Bukankah novel-novel sastra yang serius juga ada yang masuk kategori baik dan ada juga yang jelek?

Kedua, munculnya gerakan para penulis muda yang hendak memberontak pada kemapanan para penyair senior dan gugatan terhadap majalah *Horison* yang tidak dapat menampung karya-karya mereka.[312] Penganjur utama gerakan ini adalah Remy Sylado nama pena Jopie Tambayong yang kebetulan menjadi pengasuh majalah *Aktuil* (1972–1978). Dalam majalah itulah, karya-karya mereka itu dimuat dan kemudian diberi label "Puisi Mbeling". Salah satu ciri utama puisi *mbeling* adalah kuatnya semangat berkelakar, kata-kata dipermainkan begitu rupa, dan bentuk tipografi dimanfaatkan untuk mencapai efek kelakar itu. Di balik kelakar itu, ada sesuatu yang hendak ditawarkan mereka, yaitu kritik sosial dan kritik atas dominasi etnis tertentu dalam perekonomian nasional.[313]

Ketiga, jika majalah *Aktuil* dan majalah *Top* menggugat kemapanan majalah *Horison* dan para penyair senior melalui rubrik "Puisi Mbeling"

---

dapat begitu saja dimasukkan ke dalam karya pornografi. Di dalam novel-novel itu, masalah seks sekadar bumbu. Itu pun tidak digambarkan secara vulgar. Jadi, pandangan masyarakat terhadap novel populer, terutama karya-karya Motinggo Boesje yang dikaitkan dengan pornografi dan menudingkan karya-karyanya sebagai novel porno, tidaklah seluruhnya benar.

311 Motinggo Boesje pada awal kepengarangannya banyak menulis karya sastra serius (drama, novel, dan cerpen). Memasuki tahun 1990-an, ia kembali menulis karya-karya serius. Bahkan novelnya, *Sanu, Infinita Kembar* (1985) –menurut pandangan H.B. Jassin dan Abdul Hadi WM–termasuk sebagai novel sufistik. Terlepas dari persoalan populer atau tidaknya novel-novel yang ditulisnya tahun 1970-an, sejauh pengamatan, Motinggo Boesje tercatat sebagai novelis Indonesia paling produktif. Sekitar 200-an novel telah dihasilkannya. Sejauh pengamatan, belum ada sastrawan Indonesia yang menghasilkan novel sebanyak Motinggo Boesje. Sementara itu, Remy Sylado, belakangan juga menulis novel-novel serius. Bahkan salah satu novelnya, *KerudungMerah Tirmiry* (2002) terpilih sebagai pemenang Khatulistiwa Award. Eddy D. Iskandar dalam sastra Indonesia memang dikenal sebagai penulis sastra populer. Akan tetapi, dalam kesusastraan Sunda, ia termasuk sastrawan Sunda yang menghasilkan novel-novel yang bagus dalam bahasa Sunda.

312 Lihat Sapardi Djoko Damono, *Kesusastraan Indonesia Modern: Beberapa Catatan,* Jakarta: Gramedia, 1983, hlm. 89–97. Periksa juga, Soedjarwo, Th. Sri Rahayu Prihatmi, dan Yudiono K.S., *Puisi Mbeling: Kisah dan Sastra Sepintas,* Magelang: Indonesia Tera, 2001

313 Dua artikel yang dimuat *Budaya Jaya,* No. 93, IX, Februari 1976, yang ditulis H.B. Jassin, "Beberapa Penyair di Depan Forum" (hlm. 65–85) dan Saini K.M., "Penyair-Penyair Muda Jakarta" (hlm. 86–98), memberi gambaran cukup baik mengenai puisi-puisi *mbeling* atau puisi lugu yang dimuat majalah *Aktuil* dan majalah *Top*

atau "Puisi Lugu" yang isinya terkesan berkelakar, hal yang sama juga dilakukan dalam sebuah forum yang disebut "Pengadilan Puisi". Forum yang pada mulanya terkesan bermain-main itu diselenggarakan di Universitas Parahyangan, Bandung, September 1974. Bagaimana mungkin sebuah puisi diadili dengan menampilkan Sanento Yuliman sebagai Hakim Ketua, Darmanto Jatman sebagai Hakim Anggota, Slamet Sukirnanto sebagai Jaksa, Taufiq Ismail sebagai Pembela, dan sejumlah sastrawan Indonesia sebagai saksi-saksi? Saksi yang memberatkan, antara lain, Sutardji Calzoum Bachri, Sides Sudyarto, Abdul Hadi W.M., dan Pamusuk Eneste, sedangkan Saini K.M, Wing Kardjo, Adri Darmadji, dan Yudhistira A.M. bertindak sebagai saksi yang meringankan. Sesungguhnya, di balik kesan main-main itu, di dalamnya ada semangat pemberontakan terhadap perpuisian Indonesia. Ada tiga instansi yang menjadi sasaran gugatannya, yaitu (1) sistem penilaian terhadap puisi Indonesia mutakhir, (2) kritikus sastra: H.B. Jassin dan M.S. Hutagalung, (3) penyair mapan: Subagio Sastrowardojo, Rendra, dan Goenawan Mohamad, dan (4) majalah sastra: *Horison.*

Slamet Sukirnanto yang bertindak sebagai jaksa dalam pengadilan puisi tersebut mengajukan empat tuntutan.

"Pengadilan Puisi" sebagai sebuah peristiwa budaya tidaklah berpengaruh besar bagi proses penciptaan. Meskipun demikian, peristiwa itu tetap dapat dianggap penting mengingat ia mewakili semangat zamannya. Bagaimana para penyair muda masa itu merasa perlu melakukan perlawanan terhadap dominasi dan pengaruh penyair sebelumnya. Bagaimana pula mereka mengusung semangat perubahan. Dengan merujuk pada usaha pembaruan yang dilakukan Sutardji Calzoum Bachri, para penyair muda itu hendak menegaskan kembali keberadaan dan kontribusi mereka dalam perkembangan kesusastraan Indonesia.

Selang dua minggu setelah peristiwa itu, tepatnya 21 September 1974, di Jakarta diselenggarakan acara "Jawaban atas Pengadilan Puisi" dengan menampilkan para pembicara yang namanya disebut-sebut dalam Pengadilan Puisi, yaitu H.B. Jassin, M.S. Hutagalung, Goenawan Mohamad, dan Sapardi Djoko Damono. Jawaban yang lebih menyerupai semacam pembelaan ini tidak memberi pengaruh penting bagi perkembangan sastra Indonesia.

Demikianlah, kesusastraan Indonesia pada dasawarsa 1970-an itu memperlihatkan sebuah perkembangan penting. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya berbagai karya eksperimental, polemik dan perdebatan mengenai konsep-konsep kesastraan, serta derasnya semangat melakukan perubahan. Kondisi dinamis itu tentu saja berdampak positif bagi perkembangan kesusastraan Indonesia periode selanjutnya.

5. Gerakan Sastra *Horison*

Majalah *Horison* lahir sebagai salah satu realisasi hasil perumusan "Simposium Kebangkitan Semangat '66: Mendjeladjah Tracee Baru" yang berlangsung di Universitas Indonesia, 6–9 Mei 1966. Majalah sastra bulanan yang berada di bawah Yayasan Indonesia ini, terbit pertama kali Juli 1966. Pendirinya adalah Mochtar Lubis, P.K. Oyong, Zaini, Arief Budiman, dan Taufiq Ismail. Adapun yang duduk di Dewan Redaksi adalah Mochtar Lubis, H.B. Jassin, Zaini, Taufiq Ismail, Soe Hok Djin (Arief Budiman), dan D.S. Moeljanto. Itulah tokoh-tokoh perintis majalah *Horison.* Sejalan dengan perkembangan zaman, nama-nama baru pun masuk dan tercatat sebagai redaksi majalah itu. Goenawan Mohamad, Sapardi Djoko Damono, Ikranagara, Hardi, Sutardji Calzoum Bachri, Hamsad Rangkuti, Aan S. Kawisar, dan Hamid Jabbar adalah nama-nama yang pernah tercatat sebagai redaksi majalah itu. Tercatat pula nama Jakob Oetama, Ali Audah, Aristides Katoppo, Sofyan Alisjahbana, Umar Kayam,[314] Fuad Hassan, dan M.T. Zen sebagai Penyantun/Penasihat.

Sejak awal kelahirannya, *Horison* memang memokuskan diri pada sastra, sebagaimana tercantum secara eksplisit di atas nama *Horison,* tertulis "Majalah Sastra". Salah satu kontribusi majalah ini adalah lahirnya nama-nama baru yang kemudian justru menjadi sastrawan penting pada dasawarsa berikutnya. Ia tidak hanya berperan sebagai wadah lahirnya sastrawan-sastrawan Indonesia, tetapi juga berfungsi semacam laboratorium, dan bahkan diperlakukan oleh para sastrawannya sendiri–langsung atau tidak sebagai "pembaptis". Dalam hal itulah, peran yang dimainkan majalah *Horison* tidak dapat diabaikan, melalui penghargaan yang diberikan atas karya yang pernah dimuat majalah itu, tambahan lagi dengan nama-nama redakturnya yang sudah dikenal kiprahnya dalam kesusastraan Indonesia.

Majalah *Horison* menjadi begitu penting artinya bagi reputasi kesastrawanan seseorang. Berkat perannya itu pula bermunculan nama-nama, seperti Abdul Hadi W.M., Danarto, Sutardji Calzoum Bachri, M. Fudoli Zaini, Satyagraha Hoerip, Subagio Sastrowardojo, Umar Kayam, dan

---

[314] Sampai Februari 2005, susunan keredaksian *Horison* adalah: Pendiri: Mochtar Lubis (1922–2004), P.K. Ojong (1920–1980), Zaini (1924–1977), Arief Budiman, Taufiq Ismail; Pemimpin Redaksi (1966–2002): Mochtar Lubis, Sapardi Djoko Damono, Arwah Setiawan, Hamsad Rangkuti; Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan: Mochtar Lubis (1922–2004); Direktris Eksekutif: Ati Ismail; Pemimpin Redaksi: Jamal D. Rahman, Redaktur Senior: H.B. Jassin (1917–2000), Hamid Jabbar (1949–2004), Taufiq Ismail; Dewan Redaksi: Taufiq Ismail, Fadli Zon, Jamal D. Rahman, Agus R. Sarjono, Moh. Wan Anwar, Cecep Samsul Hari, Joni Ariadinata.

Wildam Yatim.[315] Mengingat begitu pentingnya peran majalah *Horison*, Subagio Sastrowardojo lalu memasukkan nama-nama Taufiq Ismail, Bur Rasuanto, Danarto, Arifin C. Noer, Iwan Simatupang, Goenawan Mohamad, Arief Budiman, Toeti Heraty Noerhadi, dan Satyagraha Hoerip sebagai **g**enerasi *Horison;* penamaan yang mengisyaratkan pentingnya peran majalah itu.[316]

Mengenai peran majalah *Horison*, Ajip Rosidi menyatakan:

> ... Lekra, dan yang dengan permainan kekuasaan politik cenderung dianggap sebagai satu-satunya aliran yang boleh dianut dalam lapangan kesenian, menjadi kehilangan pamornya. Berbagai aliran kesenian yang lain, tiba-tiba muncul (kembali) dan dalam kesusastraan terutama setelah terbitnya majalah *Horison* yang dipimpin oleh Mochtar Lubis, H.B. Jassin, Taufiq Ismail, Soe Hok Djin (Arief Budiman), dan kawan-kawannya yang menganut paham humanisme universal, berbagai bentuk eksperimentasi dalam berkarya mendapat tempat. Berbagai ragam

---

[315] Nama-nama itu tercatat pernah mendapat hadiah dari Majalah *Horison.* Cerpen "Si Kakek dan Burung Dara" karya M. Fudoli Zaini, memperoleh hadiah majalah *Horison* tahun 1966; Puisi, "Dan Kematian Makin Akrab" karya Subagio Sastrowardojo dan cerpen "Seribu Kunang-Kunang di Manhattan" karya Umar Kayam memperoleh hadiah untuk karya yang dimuat tahun 1966–1967; Puisi "Madura" karya Abdul Hadi, cerpen "Rintrik" karya Danarto dan cerpen "Sebelum yang Terakhir"– karya Satyagraha Hoerip, memperolehya tahun 1968, sedangkan Wildam Yatim memperolehnya tahun 1969. Dalam periode berikutnya, nama-nama itu kemudian menjadi sastrawan penting. Sampai tahun 2004, majalah *Horison,* hampir setiap tahun memberikan penghargaan pada karya-karya sastra terbaik yang pernah dimuat majalah itu. Pemberian penghargaan semacam ini tidak hanya memberi dorongan bagi sastrawan untuk menghasilkan karya-karya yang lebih berkualitas, tetapi juga menempatkan majalah itu mempunyai citra dan wibawa tersendiri.

[316] Ulasan serba sedikit mengenai posisi dan kontribusi majalah *Horison* bagi perkembangan sastra Indonesia, ditulis A. Teeuw, *Sastra Indonesia Modern II,* 1989, hlm. 51–52. Dalam uraiannya, A. Teeuw terkesan begitu pesimis akan keberlangsungan majalah ini. Barangkali A. Teeuw melihat bahwa dalam perjalanan sastra Indonesia, tidak ada satu pun majalah sastra (di Indonesia) yang dapat bertahan hidup lebih dari dua dasawarsa. Kajian mendalam mengenai peran majalah *Horison* dan citranya dalam pandangan sastrawan Indonesia dilakukan Kasijanto dalam disertasinya, "Perjalanan Sunyi menuju Kakilangit: Upaya *Horison* Membuka Ruang Publik (1966–2004)", Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005. Menurut Kasijanto, munculnya berbagai kritik, kecaman, atau tudingan dan tuduhan apa pun terhadap *Horison,* sesungguhnya semua itu merupakan bentuk perhatian dan apresiasi yang tinggi terhadap keberadaan dan peran *Horison* selama ini. Jadi, ada semacam paradoks –terutama pada diri mereka yang seolah-olah berseberangan jalan dengan para redaktur majalah ini–dalam memandang majalah *Horison.* Mereka mengecam, sekaligus juga sebenarnya mencintai; mereka melecehkan, tetapi sebenarnya ingin menutupi penghormatannya yang tinggi; mereka meninggalkan dan membuat majalah sendiri, sesungguhnya merupakan bentuk keinginan mereka masuk sebagai bagian dari majalah itu. "Citra sebagai majalah yang serius, berwibawa, dan penting, sudah telanjur kukuh melekat pada majalah ini. Ia telah menjadi sebuah ikon yang–sadar atau tidak–justru dimunculkan oleh para pembacanya sendiri".

eksperimen telah dilakukan orang selama sepuluh tahun itu dalam penulisan prosa dan puisi Indonesia; bahkan ada kecenderungan yang kuat: para pengarang seakan-akan dirangsang untuk selalu bereksperimen.[317]

Sejak terbit pertama kali Juli 1966 sampai tahun 1996, majalah *Horison* tetap berusaha mengembangkan misinya sebagai majalah kesusastraan dan kebudayaan dengan membuka ruang bagi lahirnya berbagai karya eksperimentasi. Sebagai majalah sastra yang sejak awal sampai tahun 1980-an berhasil membangun mitos sebagai wadah karya-karya berbobot, *Horison* kadang kala dimaknai secara berlebihan. *Horison* tidak hanya dipandang sebagai "pusat orientasi", tetapi juga sebagai "juru baptis" bagi seseorang dalam kiprah kesastrawanannya di tingkat nasional. Di antara mitos itu, *Horison* tetap tampil dengan kebersahajaannya yang dalam bahasa Mochtar Lubis, *dapat bertahan hidup, meskipun berada dalam kemiskinan.* Jadi, di satu pihak *Horison* dipandang sebagai majalah sastra berwibawa dengan pengelolaan yang semata-mata didasarkan pada idealisme, dan di pihak yang lain, kerap dihadapkan pada kesulitan keuangan akibat pengelolaan yang tidak rapi. Dalam kondisi seperti itu, sejak memasuki pertengahan tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an, kantor majalah *Horison* terpaksa juga harus sering berpindah-pindah. Tentu saja itu berakibat negatif; banyak naskah tercecer dan pembaca sulit melakukan kontak. Pemberian honor kepada penulis pun selalu di bawah standar. Segala masalah itu bermuara pada jumlah pelanggan yang terus berkurang, dan orang makin malas mengirimkan naskahnya ke *Horison.*

Bersamaan dengan itu, makin banyaknya media massa, dan terutama surat kabar yang menyediakan ruang kesusastraan, memberi alternatif lain bagi sastrawan untuk mengirimkan karyanya tidak lagi ke majalah *Horison.* Akibatnya, *Horison* makin jauh ditinggalkan pembacanya. Selain itu, *Horison* tidak lagi menjadi pusat orientasi. Posisinya yang sampai tahun 1980-an sangat diperhitungkan, sampai awal tahun 1990-an tidak lagi demikian. Lembaran-lembaran budaya yang disediakan berbagai surat kabar, telah mulai menggeser kedudukan majalah *Horison.* Sejauh pengamatan, majalah *Horison* seperti hidup terseok-seok dan selalu mengalami kesulitan keuangan dengan oplah yang tidak pernah lebih dari 4.000 eksemplar.

Pada *Horison* edisi no. 7, th. XXVII, Juli 1993, terjadi perubahan yang menyangkut logo (jenis huruf untuk nama *Horison),* susunan redaksi, dan alamat. Di atas nama *Horison* yang telah menjadi ciri khas majalah itu sejak pertama kali terbit yang biasanya tertulis *Majalah Sastra* kini berubah menjadi *Majalah Sastra dan Seni.* Jadi, *Horison* tampaknya hendak memperluas isi

[317] Ajip Rosidi, *Laut Biru Langit Biru*, 1977, hlm. 5

majalah yang meliputi juga seni. Susunan redaksinya adalah Bambang Bujono, Goenawan Mohamad (Ketua), Nirwan Dewanto, Sapardi Djoko Damono, S. Malela Mahargasarie, dan Taufik Rahzen. Pemimpin Redaksi Hamsad Rangkuti dinyatakan non-aktif, sedangkan di antara nama-nama redaksi sebelumnya, yaitu H.B. Jassin, Taufiq Ismail, Sapardi Djoko Damono, dan Sutadji Calzoum Bachri, hanya Sapardi Djoko Damono yang masih tercantum di sana. Dengan alamat PT Grafiti Pers yang sama dengan alamat majalah *Tempo*, jelas sudah bahwa majalah *Horison* terbitan edisi Juli 1993 berada di bawah manajemen majalah *Tempo*, meskipun Mochtar Lubis masih tercantum sebagai Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan.

Nirwan Dewanto yang memberi Pengantar edisi itu menyatakan, " ... bahwa setelah 27 tahun lamanya, majalah *Horison* dianggap sebagai "juru baptis" dan mitos itu telah membutakan mata terhadap kenyataan-kenyataan baru di seluruh dunia. *Horison* agaknya perlu belajar untuk melupakan mitos yang pernah disandangnya. *Horison* bukanlah pusat yang mahatahu .... Itulah sebabnya, dalam kehadirannya kali ini, *Horison* mengetengahkan sejumlah pandangan yang mengungkai gagasan-gagasan tentang seni modern." [318]

Dalam edisi berikutnya yang merupakan gabungan no. 7 dan 8, Juli–Agustus 1993, Mochtar Lubis dalam "Catatan Kebudayaan" menjelaskan duduk perkara yang melatarbelakangi terjadinya perubahan dalam edisi sebelumnya. Di awal uraiannya, ia menyatakan: "Catatan Kebudayaan dalam nomor ini berfungsi untuk mencabut Catatan Kebudayaan di Majalah *Horison* bulan Juni 1993, karena rupanya Yayasan Indonesia tidak berjodoh dengan PT Grafiti yang berminat hendak mengelola *Horison.*

Sejak akhir tahun 1994 sampai pertengahan tahun 1995, majalah *Horison* seperti mengalami masa-masa yang paling sulit yang memaksa penggabungan beberapa edisi. Pada pertengahan tahun 1995, Ati Ismail masuk dan ikut membenahi manajemen majalah ini. Namanya baru tercantum sebagai Direktris Eksekutif pada edisi bulan Mei–Juli 1996, menggantikan nama-nama yang tercantum sebagai manajer bisnis, iklan, dan sirkulasi. Dua bulan kemudian, November 1996, majalah ini membuka rubrik baru, berupa sisipan bernama *Kakilangit*, sebuah rubrik yang khusus ditujukan untuk para siswa dan guru sebagai bagian dari usaha memberi bahan pelajaran sastra di sekolah.[319] Distribusinya pun diperluas memasuki

---

[318] Nirwan Dewanto, "Setelah 27 Tahun", *Horison*, no. 7, th. XXVI, Juli 1993, hlm. 4–5

[319] Salah satu keluhan yang banyak terdengar dari para guru sastra mengenai pelajaran sastra di sekolah adalah langkanya bahan ajar. Sisipan *Kakilangit* seperti hendak menjawab keluh-kesah para guru itu, sebab di sana dimuat karya sastrawan tertentu, riwayat hidupnya, ulasan mengenai karya tersebut, dan proses kreatif sastrawan yang bersangkutan. Sampai

sekolah-sekolah. Demikian juga sumber-sumber dananya. Dengan bantuan dana dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud, kini Departemen Pendidikan Nasional), sebanyak 4.500 sekolah menengah tingkat atas dan madrasah aliyah, di berbagai kota di tanah air, menjadi pelanggan majalah ini. Secara meyakinkan oplahnya meningkat cepat. Sejak dibuka sisipan *Kakilangit*, oplah majalah ini yang semula 9.000 eksemplar, tahun 2004 telah mencapai sekitar 15.000 eksemplar dengan distribusi ke sekolah-sekolah di berbagai kota kabupaten di Indonesia. Tulisan-tulisan mengenai kebudayaan juga makin dikurangi dan lebih memokuskan pada kesusastraan. Sejak September 1999, *Horison* dalam setiap tiga bulan membuka rubrik *Mastera*, sebuah rubrik yang memuat karya para sastrawan dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Adanya rubrik ini sekaligus telah meluaskan distribusinya, yaitu memasuki negara-negara yang terhimpun dalam Mastera (Majelis Sastra Asia Tenggara).

Sebelum itu, pada tanggal 17–21 April 1999, Ati Ismail sebagai Direktris Eksekutif majalah *Horison*, membawa 30 sastrawan muda Indonesia dari Yogyakarta, Cirebon, Padang, Bandung, Lampung, Jakarta, Banten, dan Tangerang, atas tanggungan biaya majalah *Horison*, mengikuti dua forum internasional, yaitu Pertemuan Sastrawan Nusantara X dan Pertemuan Sastrawan Malaysia I di Johor Baru yang kebetulan bertepatan dengan pemberian Hadiah Mastera kepada Taufiq Ismail. Kedua forum itu tentu saja sangat penting bagi sastrawan muda Indonesia dalam rangka memperoleh pengalaman internasional.[320] Inilah kontribusi penting pertama yang dilakukan majalah *Horison* di luar masalah keredaksian.

6. *Budaja Djaja* dan Dewan Kesenian Jakarta

Majalah lain yang juga pernah punya arti penting bagi perkembangan kesusastraan Indonesia adalah *Budaja Djaja.* Majalah yang terbit pertama kali 2 Juni 1968 ini sejak mula dikelola Ajip Rosidi, Den Surianegara, dan Ramadhan K.H. Belakangan Abdul Hadi W.M. dan Harijadi S. Hartowardojo

---

Desember 2004, 95 sastrawan Indonesia telah dibicarakan dalam *Kakilangit.* Di samping itu, dimuat juga karya-karya para siswa dan pengalaman mengajar guru sastra di sekolah. Sejak November 1996, sebanyak 95 sekolah dari berbagai kota telah mengirimkan karya-karya siswanya. Jadi, Sisipan *Kakilangit* sesungguhnya merupakan bahan ajar yang lengkap bagi guru, sekaligus wadah bagi siswa untuk menyalurkan karya-karyanya.

320 Rombongan *Horison* yang sebagian besar sastrawan muda yang dibawa ke Johor Baru itu, antara lain, A. Syubanuddin Alwy, Abdul Rozak Zaidan (Pusat Bahasa), Aef Sanusi, Agus Noor, Cecep Samsul Hari, Evawani Chairil Anwar (putri Chairil Anwar), Hamid Jabbar, Helvy Tiana Rosa, Hudan Hidayat, Husnul Khuluqi, Ike Soepomo, Isbedy Stiawan Z.S., Iyut Fitra, Jamal D. Rahnian, Joni Ariadinata, Kenedi Nurhan (*Kompas*), Maman S. Mahayana, Sutan Iwan Soekri Munaf, Taufiq Ismail, Toto St. Radik, Viddy A.D. Wowok Hesti Prabowo.

tercatat pula sebagai redaksinya. Sesungguhnya, majalah yang kemudian diterbitkan atas nama Dewan Kesenian Jakarta ini[321] tidak terlepas dari campur tangan Gubernur Jakarta Ali Sadikin.[322] Dalam sambutannya, Ali Sadikin menyatakan pentingnya kebebasan disalurkan secara kreatif. "Dan wadah yang ideal untuk itu adalah majalah. Majalah kebudayaan yang khusus, yang memberi keluasan kepada para budayawan untuk berbudaya." Di bagian lain, dinyatakan pula: "... saya berusaha supaya pemerintah DKI Jaya dapat memberikan bantuan finansial secukupnya untuk menyelenggarakan paling tidak sebuah majalah kebudayaan. Bantuan itu hendaknya terbatas pada soal-soal material saja, sedangkan mengenai redaksi dan penyelenggaraan isinya, sepenuhnya bebas .... Redaksi mempunyai kebebasan yang mutlak dalam hal itu ...."[323]

Perlu dicatat, bahwa ketika *Budaya Djaja* terbit, pemerintah Orde Baru sedang gencar membersihkan semua yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Militer menjadi satu-satunya alat negara yang sangat menentukan. Dalam kondisi itu, slogan "persatuan dan kesatuan" seolah-olah menjadi obat mujarab untuk menghindari konflik. Akan tetapi, apa yang ditulis Nono Anwar Makarim dalam artikelnya "Belenggu Sikap Mental" yang dimuat *Budaja Djaja*, edisi pertama, Juni 1968? Perhatikan penggalan artikelnya yang dikutip berikut ini.

> Di kalangan Orde Baru hanya ada persatuan dan kesatuan, kita semua kompak menghadapi lawan. Kalau terjadi perpecahan, kalau terjadi konflik, maka itu adalah kerja PKI. Kita tidak boleh berkonflik, sebab itu memberi peluang pada gerpol (gerilya politik). Yang mengatakan bahwa di antara kita ada konflik, dia adalah penghasut, pemfitnah, dia kena infiltrasi mental PKI. Celakalah ia yang terkena cap tuduhan "pemecah belah Orde Baru".

---

[321] *Budaja Djaja* memang diterbitkan Dewan Kesenian Jakarta, tetapi penerbitannya pertama kali, 2 Juni 1968, justru mendahului pembentukan Dewan Kesenian Jakarta yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta, 7 Juni 1968.

[322] Selain mendorong penerbitan majalah *Budaja Djaja*, Gubernur DKI Ali Sadikin juga membantu berdirinya penerbit Pustaka Jaya, 17 Agustus 1972–belakangan namanya menjadi Dunia Pustaka Jaya–dengan memberi bantuan modal awal sebanyak Rp20 juta. Pusat perhatian kegiatan penerbit ini adalah menerbitkan dan menyebarluaskan buku-buku sastra ke sekolah-sekolah di wilayah Jakarta. "Sampai awal tahun 1980-an, penerbit ini menjadi salah satu penerbit buku-buku sastra yang terkemuka. A. Teeuw *(Sastra Indonesia Modern II*, hlm. 58) mengatakan: "*... sumbangan Pustaka Jaya terhadap perkembangan sastra Indonesia modern bagaimanapun sangat penting, tidak terkecuali juga karya-karya yang paling modern. Malahan bisa dikatakan, tanpa berlebihan, bahwa justru pertama-tama dan terutama berkat Pustaka Jaya, maka sastra Indonesia modern tampil kembali di tengah masyarakat Indonesia dan telah memperoleh wajahnya yang baru pula.*"

[323] *Budaja Djaja*, no. 1, th. I, Djuni 1968. Teks kutipan disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan.

Kalau berani ia kontan dicap subversi. Setidak-tidaknya bila analisis konflik yang diberikannya itu bersifat serius dan mencoba mencari jalan keluar, setidak-tidaknya ia akan dipanggil oleh penguasa untuk diberi "nasihat", ABRI kompak!

Siapa berbicara tentang konflik Pusat-Daerah, tentang konflik Jawa dan luar Jawa, siapa yang tidak takut dituduh separatis, federalis, ingkar pada negara kesatuan? Untuk setiap pembicaraan konflik telah disediakan ancaman. Untuk bicara tentang konflik antara elite dan kelas menengah kita yang berkembang dengan pesat sekali, telah disediakan tuduhan "penganut teori perjuangan kelas, Marxist". Bicara tentang konflik ABRI-sipil dituduh ABRI *phobie*, sebab ABRI tidak konflik dengan sipil, sebab ada suatu *partnership* antara ABRI dan sipil. Melancarkan kritik terhadap partai politik berarti anti-demokrasi.

Di Indonesia tidak ada konflik sosial, di Indonesia yang ada hanya persatuan dan kesatuan .... Di Indonesia hitam adalah putih .... Dan lahirlah suatu bahasa tersendiri, suatu bahasa yang bersifat apologetis secara menggelikan, suatu bahasa yang terdiri dari rangkaian slogan-slogan edisi baru. Bahasa yang hipokretis akan menghasilkan generasi hipokrit.[324]

Artikel Nono Anwar Makarim yang bertarikh Mei 1968 itu, tampaknya sengaja hendak mengingatkan pemerintah Orde Baru untuk tidak memanipulasi slogan "persatuan dan kesatuan". Boleh jadi, ia ketika itu sudah menangkap adanya bahaya penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, tindakan pemerintah dalam melakukan pembersihan terhadap lawan-lawan politiknya selalu dengan dalih demi "ketenangan dan ketertiban," "stabilitas politik dan ekonomi" atau "konsensus nasional". Di bagian akhir artikel itu, ditegaskan lagi:

Kita hidup di bawah suatu diktator yang tidak fisik. Sikap mental kita terbelenggu oleh suatu interpretasi kaku terhadap istilah-istilah "gotong royong", "musyawarah mencapai mufakat". Kita telah mematikan, mencekik "Bhineka", dan mendewakan "Tunggal Ika". Dalam kehidupan ekspresi intelektual kita terdapat terlalu banyak tabu, terlalu banyak "pantang", terlalu banyak "momok". Indonesia telah dibesarkan melalui konflik-konflik sosial. Marilah kita memberanikan bahwa konflik sosial telah merupakan kultur politik Indonesia. Mengapa dimatikan konflik-konflik itu, mengapa kita berpura-pura seakan-akan tidak ada konflik? Mengapa kita *"government oriented"* dan tidak *"progress-oriented"* ... marilah kita terlebih dahulu mulai dengan membicarakan, memperbincangkan rentetan konflik ini secara terbuka, secara sungguh-sungguh, secara ilmiah. Mampukah forum penerbitan ini menjawab tantangan belenggu sikap mental?

---

[324] Nono Anwar Makarim, "Belenggu Sikap Mental", *Budaja Djaja*, no. 1, th. I, Juni 1968. Teks disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan.

Di belakang kritik yang dilontarkan Nono Anwar Makarim, tersimpan harapan bahwa *Budaja Djaja* sebagai media kebudayaan, dapat memulai mengangkat wacana keberagaman (bhineka), dan tidak melulu keseragaman (*tunggal ika*). Edisi *Budaja Djaja* berikutnya tidak lagi memuat tulisan sejenis itu, dan lebih memokuskan pada tulisan yang membicarakan masalah kebudayaan dan kesusastraan. Ternyata, pemikiran ini baru semarak dan menjadi wacana publik, justru setelah pemerintah Orde Baru tumbang oleh gerakan reformasi, Mei 1997. Jadi, di awal pemerintahan Orde Baru, Nono Anwar Makarim melalui *Budaja Djaja* telah mengingatkan bangsa ini akan bahaya memanipulasi "Tunggal Ika" dan demi "persatuan dan "kesatuan" semata-mata untuk tujuan politik pemerintah yang berkuasa.

Dilihat dari usaha pengembangan pemikiran kebudayaan dan kesusastraan, Redaktur *Budaja Djaja* Hen Surianegara, Ajip Rosidi, dan Ramadhan K.H. dengan pengalaman dan kesungguhannya, berhasil membawa *Budaja Djaja* sebagai salah satu majalah kebudayaan yang penting. Banyak nama dengan sejumlah karya berbobot dimuat dalam majalah ini. Kembali, keberadaan sebuah media yang membuka ruang bagi berbagai kebebasan berekspresi dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan kesenian dan kebudayaan umumnya. Sampai penerbitannya yang terakhir tahun 1979, *Budaya Djaya* masih menempatkan perannya sebagai salah satu majalah kebudayaan yang berpengaruh besar bagi perkembangan kesenian dan kebudayaan, dan secara khusus kesusastraan Indonesia.

Tidak lama setelah penerbitan *Budaja Djaja,* 2 Juni 1968, terbentuk Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), 7 Juni 1968, yang juga tidak terlepas dari sokongan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, yang kemudian melantik secara resmi 19 Juni 1968. Proses pembentukan DKJ diawali dari pertemuan seniman dan budayawan ibu kota dengan Gubernur Ali Sadikin, 9 Mei 1968.[325] Dalam pertemuan itu, disepakati pembentukan formatur[326] untuk menyusun formasi Badan Pembina Kebudayaan. Pada tanggal 24 Mei 1968,

---

[325] Latar belakang dan proses pembentukan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) diungkapkan Ajip Rosidi dalam makalahnya "Ali Sadikin dan Kesenian". Disampaikan pada acara penyerahan Anugerah Cipta Utama 2002 kepada H. Ali Sadikin oleh Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki, 24 Agustus 2002. Sebuah informasi penting tentang proses dan latar belakang berdirinya DKJ. Dalam tulisan Abrar Yusra, "Berdirinya Taman Ismail Marzuki dan Dewan Kesenian Jakarta" (25 *Tahun Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki,* Jakarta: Yayasan Kesenian Jakarta, 1994, hlm. 24–27), nama-nama Hen Surianegara, Ajip Rosidi, dan Ramadhan K.H., sama sekali tidak disinggung sebagai bagian dari proses pembentukan DKJ. Lihat juga Ali Sadikin, "TIM: Pengukuhan Pemerintah dan Kebebasan Seniman", *Horison,* no. 11, th. XXVIII, November 1993.

[326] Formatur itu terdiri dari Brigjen Rudy Pirngadi, Djaja Kusuma, Zulharman Said, Mochtar Lubis, Asrul Sani, H. Usmar Ismail, dan Gajus Siagian.

formatur tersebut melaporkan hasil pekerjaannya dan mengusulkan 19 orang calon anggota Badan Pembina Kebudayaan.[327] Dalam rapat pertama di gedung Balai Budaya, 27 Mei 1968, diusulkan adanya penambahan enam nama lagi, yaitu Oesman Effendi, D. Djajakusuma, Asrul Sani, Moh. Amir Sutaarga, Sjuman Djaja, dan D.A. Peransi. Selain itu, disepakati pula agar nama Badan Pembina Kebudayaan diganti menjadi Dewan Kesenian Djaya. Setelah ada perubahan ejaan bahasa Indonesia, 17 Agustus 1972, nama Dewan Kesenian Djaya juga disesuaikan dengan ejaan yang berlaku, yaitu Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

Pengurus Dewan Kesenian Jakarta yang dilantik itu adalah: Trisno Sumardjo, anggota Arief Budiman, Sardono W. Kusumo, Zaini, Binsar Sitompul, Teguh Karya, Goenawan Mohamad, Taufiq Ismail, Pramana Padmadarmaya, Ajip Rosidi, Darsyaf Rachman, Misbach Jusa Biran, Wahyu Sihombing, S. Brata, Rudy Laban, Ny. Irawati Sudyarso, Adidharmo, Satyawati Sulaeman, Oesman Effendi, D. Djajakusumah, Asrul Sani, Gajus Siagian, Sjuman Djaja, dan D.A. Peransi. Sebagai Pengurus Harian ditetapkan: Trisno Sumardjo (Ketua), Arief Budiman (Ketua I), D. Djajakusumah (Ketua II), Pramana Padmodarmaya (Sekretaris I), D.A. Peransi (Sekretaris II), Oesman Effendi, dan S. Brata (Anggota). DKJ kemudian menunjuk dan menetapkan dr. Soeparman sebagai General Manager.[328]

Dalam surat sebaran Dewan Kesenian Jakarta 66 dinyatakan bahwa ke-25 anggota Dewan Kesenian Jakarta akan bertindak sebagai pengurus kompleks bangunan pusat kesenian yang sedang dibangun di Jalan Cikini Raya No. 73.[329] Selain itu, Dewan Kesenian Jakarta ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta sebagai satu-satunya badan tertinggi tingkat daerah di bidang kesenian/kebudayaan dengan status otonom di wilayahnya itu. "... inilah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia merdeka bahwa sesuatu pihak penguasa bertindak demikian tegas dan murah hati mengenai

---

[327] Ke-19 nama yang diusulkan menjadi calon anggota Badan Pembina Kebudayaan itu adalah: Trisno Sumardjo, Arief Budiman, Sardono W. Kusumo, Zaini, Binsar Sitompul, Teguh Karya, Goenawan Mohamad, Taufiq Ismail, Pramana Padmodarmaya, Ajip Rosidi, Darsjaf Rahman, Misbach Jusa Biran, Wahyu Sihombing, H.B. Jassin, S. Brata, Rudy Laban, Ny. Irawati Sudyarso, Adhidarmo, dan Satyawati Sulaeman. Dalam rapat 24 Mei 1968, H.B. Jassin tidak hadir dan mengirimkan pernyataan tidak menerima pengangkatan tersebut. Lihat, "Dewan Kesenian Djakarta Terbentuk", *Budaja Djaja,* no. 1, th. I, Juni 1968, hlm. 62.

[328] *Budaja Djaja,* no. 2, th. I, Juli 1968, hlm. 123. Selengkapnya mengenai susunan dan anggota-anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Akademi Jakarta (AJ) dan Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) antara tahun 1968–1996; lihat Lampiran *25 Tahun Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki*, 1994, hlm. 244–257.

[329] *Budaja Djaja,* no. 5, th. I, Oktober 1968, hlm. 316–317

lapangan kebudayaan serta membuka usaha kultural yang besar, dengan menaruh kepercayaan besar pula kepada pihak seniman."

Kompleks Pusat Kesenian yang kemudian bernama Taman Ismail Marzuki (TIM) ini, diresmikan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, 10 November 1968. Dengan otonomi yang diberikan Pemerintah DKI Jakarta, TIM benar-benar tampil sebagai pusat kesenian penting, baik kesenian tradisional maupun kontemporer, yang dampak positifnya tidak hanya bagi sastrawan di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Dalam 10 tahun sejak berdirinya TIM, berbagai cabang kesenian seperti mendapatkan tempat yang tepat untuk mengembangkan dirinya. Para seniman menikmati masa kejayaan dan kebebasannya di kompleks kesenian itu. Khusus di bidang sastra, berbagai drama eksperimental dipentaskan di sana. Berbagai diskusi, seminar, simposium, ceramah, pentas sastra, dan pertemuan-pertemuan antarsastrawan, terus berlangsung secara teratur yang memungkinkan kesusastraan Indonesia berkembang sangat semarak. Selain itu, dibukanya lomba penulisan novel, drama, puisi, esai, dan pemberian penghargaan bagi karya-karya sastra yang bermutu, telah menempatkan TIM dengan DKJ-nya menjadi pemicu lahirnya sastrawan-sastrawan baru dengan berbagai karyanya yang berhasil memperkaya khazanah kesusastraan Indonesia modern. Selama 10 tahun masa Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI Jakarta, TIM berada pada masa keemasannya.[330]

Memasuki tahun 1980-an, otonomi TIM seperti mulai menghadapi kendala. Dikatakan oleh Pramana Padmodarmaya, "Pada awalnya, PKJ-TIM tumbuh dengan semacam debirokratisasi, namun pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1980-an, PKJ-TIM mengalami semacam rebirokratisasi yang ditandai dengan masuknya PKJ-TIM ke dalam birokrasi pemerintah daerah. Hal ini merupakan refleksi dari semakin kuatnya kekuasaan negara birokrasi sebagai akibat kewaspadaan negara serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kesenian. Keadaan ini juga membatasi kebebasan kreativitas seniman yang kontraknya sewaktu-waktu dapat diputuskan sepihak tanpa adanya hukum yang melindunginya.[331]

---

[330] Pusat kesenian itulah yang kemudian menjadi cikal bakal kompleks Taman Ismail Marzuki (TIM)

[331] Menurut catatan Pramana Padmodarmaya ("25 Tahun Pasang Surut Pusat Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki", dalam *25 Tahun Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki*, 1994, hlm. 34), puncak kegiatan TIM baik secara kuantitas maupun kualitas, terjadi pada lima tahun kedua TIM, yaitu antara tahun 1974–1978. Pada periode itu, di TIM tampil 1573 kegiatan, dan 122 di antaranya adalah khusus kegiatan sastra. Lima tahun berikutnya (1979–1983), setelah Ali Sadikin tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pengaruhnya masih terus bergema, sehingga kegiatan sastra mencapai 127 kegiatan. Lihat juga Slamet Sukirnanto, "25 Tahun kegiatan Sastra", dalam *25 Tahun Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki*, 1994, hlm. 144–158.

Terjadinya beberapa pelarangan pertunjukan,[332] memperlihatkan mulai kuatnya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan TIM. Sejak itu, lambat laun, TIM yang semula sebagai pusat kesenian, tempat "pembaptis" reputasi para seniman, dan sebagai tempat berkembang biaknya kreasi-kreasi inovatif dan berbobot, mulai kehilangan pamornya.

[332] Pelarangan terhadap Rendra yang hendak membacakan puisi-puisinya, F. Rahardi yang hendak membacakan kumpulan sajaknya, "Sumpah WTS", dan Nano Riantiarno yang akan mementaskan drama yang berjudul "Suksesi" tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk hilangnya otonomi TIM.

Daftar Istilah Asing

ad interim sementara
arbitrase perwasitan
balanced budget anggaran belanja yang berimbang
Batavia Tokubetsu Syico Wali Kota Istimewa Batavia
Beikoku Srimeigyo Kumiai *kumiai* penggilingan padi
Bolai Engokai tata usaha pembantu prajurit Peta dan *Heihō*
bue semacam departemen
Bukanfu kantor penghubung
bundanco komandan regu
bunken subkabupaten, *onderafdeeling*
bunsy¤ subkeresidenan
busyidō ksatria
cōkan kanbo, majelis permusyawaratan
C¤dan kompi pada tentara Peta
ChūōSangi In Badan Pertimbangan Pusat
CūōSeinenKurensyō lembaga pusat latihan pemuda
daidan batalion
daidancō komandan batalion
de facto rill, nyata
de jure secara hukum
Dōkuritsu Jumbi Cōsakai Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Dōkuritsu Jumbi Iinkai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Dōkuritsu Jumbi Cōsakai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Domei kantor berita pemerintah Jepang
fuku wakil
fuku kaicō wakil ketua
fukusyūcōkan wakil gubernur/residen
fujinkai, organisasi perempuan
Futabashi lokasi pelacuran di dekat Ambarawa, Jawa Tengah
Gakutotai Korps Pelajar

Gendarmerie pasukan gabungan

giyuhei prajurit sukarela

good neighbour policy politik bertetangga baik

gun kawedanan

gunchō wedana

gunseibu pemerintah militer

gunsei pemerintah militer

gunseikan kepala pemerintah

Gunseireikan panglima tentara

Hakkō Iciu Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya

heihō pembantu prajurit

hōkōkai kumpulan kebaktian

hosokyoku Jawatan Radio

hoko sheisin semangat kebaktian

iin anggota

Ika Daigaku Perguruan Tinggi Kedokteran

Izi Hōkōkai wadah kebaktian untuk para dokter

Jawa Bōei Giyugun Kanbu Renseitai Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa

Jawa Hōkōkai Himpunan Kebaktian Jawa

Jawa Sentotai Benteng Persatuan Jawa

Jawa Shinbunkai Gabungan Persurat kabaran Jawa

jibakutai barisan berani mati

Joint Statement pernyataan bersama

Jōshi Seinendan Seinendan Putri

Jōshi Suisintai Barisan Pelopor Wanita

Jugun Ianfu perempuan penghibur (budak seks)

Kaichō ketua

KanPō berita pemerintah

kakyō sōkai perhimpunan bangsa Cina

keibodan barisan bantu polisi

Keimin Bunka Shidōshō Pusat Kebudayaan

keimubu Departemen Kepolisian

kempetai polisi militer

ken kabupaten

Keisatsubu bagian kepolisian

Keizaibu bagian ekonomi

keizaibucō kepala urusan ekonomi daerah keresidenan

kencō bupati

Khōiku Hōkōkai Kebaktian Para Pendidik

Kigyo Saibien Badan Pengusaha Perkebunan

Kinrohoshi kerja bakti

kleutterbedrijven perusahaan kecil

koci daerah istimewa

Kogyo Daigaku Perguruan Tinggi Teknik

kokumin gakkō sekolah dai

Kotsubu Departemen Lalu Lintas

ku kelurahan

kucō kepala desa

kumiai koperasi pengumpulan padi

minseibu pemerintahan Angkatan Laut

Minseifu pemerintah Angkatan Laut

Naiseibu bagian pemerintahan umum

Naimubu Departemen Urusan Dalam Negeri

Naimubu Bungkyōku Departemen Dalam Negeri bagian Pengajaran, Olahraga dan Pemuda

Nanpo Keihatsu Kenso perbendaharaan untuk kemajuan daerah selatan

national resources sumber nasional

nogyo kumiai koperasi pertanian

Non-Aligned Non-Blok, tidak memihak

Osamu nama kode bagi Tentara Ke-16

Osamu Seirei Undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16

Osamu Kanrei Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kepala pemerintahan militer (gunseikan)

peaceful coexistency berdampingan secara damai

Portuguese e 0 Future Portugal dan masa depannya

rescheduling penangguhan pembayaran utang

rijkseenheids gedachte gagasan kesatuan kerajaan Belanda

rōmusha pekerja

Saikō Syikikan panglima tertinggi

San A Seinen Kunrensho latihan pemuda yang dilakukan oleh Gerakan Tiga A
Sangjobu Departemen Ekonomi

Sanyo Kaigi Dewan Penasihat Militer

School type macam sekolah

seikeirei penghormatan secara Jepang dengan membungkukkan kepala dan badan
Seimeigyo Kumiai Koperasi Penggilingan Padi

Seinendan organisasi pemuda

Seinen Dojo tempat latihan pemuda (di Tangerang)

Seinen Kunrensho Pusat Latihan Pemuda

Seishin semangat

Sendenbu Departemen Propaganda

Shidobunco penasihat

Shidoin orang yang dilatih

Shidokan pelatih

Shodan peleton

Shodanco komandan peleton

Shucokan gubernur

Somubu Departemen Urusan Umum

Son kecamatan

Sonco camat

Staatsnoodrecht hukum keadaan bahaya bagi negara

Sy¤ wilayah keresidenan

taikoku gikai parlemen kerajaan

taiso berolahraga

takutai perhimpunan olahraga

Tencosetsu Hari Lahir Kaisar Hirohito

the individual power of the reason kekuatan penalaran individual

The New Emerging Forces Kelompok Negara-negara anti-Kolonialisme

The Old Established Forces Negara-negara Kolonial

tokubutsu syi kota istimewa

tokubetsu syico wali kota istimewa

tonarigumi rukun tetangga

total people's defenc Pertahanan Rakyat Semesta

Zaimubu Departemen Keuangan

zaken kabinet kabinet yang berdasarkan keahlian

Daftar Pustaka

I. Buku-Buku

A. Surodjo, Benedicta, JMV. Soeparno. 2001. *Tuhan Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku, Pledoi Omar Dani.* Jakarta: PT Media Lintas Inti Nusantara.

Abdulgani, Roeslan. 1971. *25 Tahun Indonesia–PBB.* Djakarta: Gunung Agung.

————. 1956. *Mendajung dalam Taufan.* Djakarta.

————. 1957. *Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia.* Djakarta.

————. 1961. *Sosialisme Indonesia.* Djakarta: Prapantja.

Abdul Latief, Kolonel. 1999. *Pledoi Kol. A. Latief : Soeharto terlibat G-30-S.* Jakarta: Studi Arus Informasi.

Abdul Latief. tth. *Soeharto terlibat G-30-S, Pleidoi Kolonel A Latief.* Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, Et.

Abdul Rohim Ghazali, (ed). 1998. *Kapan Badai Akan Berlalu.* Bandung: Mizan.

Abdul Syukur. 1989. *Gerakan Usrah di Indonesia. Peristiwa Lampung.* Jogjakarta: Penerbit Ombak.

Adam Malik. 1976. *Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru.* Jakarta: Yayasan Idayu.

————. 1966. *Politik dan Ekonomi.* Djakarta: Departemen Penerangan.

————. 1975. *Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.* Jakarta: Penerbit Wijaya.

Adams, Cindy. 1965. *Sukarno: An Autobiography. As Told To Cindy Adams.* Indiana polis-Kansas City-New York: Bobbs-Meril Coy Inc.

————. 1966. *Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat* (terdjemahan). Djakarta: Gunung Agung.

Aidit, D.N. 1964. *Kibarkan Tinggi Pandji Revolusi.* Djakarta: Jajasan Pembaruan.

————. 1964. *Marxisme dan Pembinaan Nasion Indonesia* (Ceramah Menko/ Wakil Ketua MPRS/Ketua CC PKI di hadapan para Kader Tingkat Atas Akademi Angkatan Laut di Surabaja pada tanggal 21 April 1964). Djakarta: Jajasan Pembaruan.

————. 1965. *PKI dan Angkatan Darat.* Djakarta: Jajasan Pembaruan.

————. 1964. *Angkatan Bersenjata dan Penjesuaian Kekuatan Negara dengan Tugas-tugas Revolusi* (Ceramah Menko/Wakil Ketua MPRS/Ketua CC PKI di Seskoad, Bandung, pada tanggal 1 Juli 1964). Djakarta: Jajasan Pembaruan.

————. 1963. *Dekon Dalam Udjian.* Djakarta: Jajasan Pembaruan.

————. 1963. *PKI dan ALRI* (Ceramah Menteri/Wakil Ketua MPRS/Ketua CC PKI di Seskoal Djakarta). Djakarta: Jajasan Pembaruan.

————. *Kobarkan Semangat Onderhandekngan Maju Terus Pantang Mundur.* 1963. Laporan politik kepada Sidang Pleno ke-II. CC PKI diperlukan dengan Komisi Verifikasi dan Komisi Kontrol Central, di Djakarta tanggal 23–26 Djanuari 1963. Djakarta. Jajasan Pembaruan.

————. 1964. *Kobarkan Semangat Banteng.* Djakarta: Jajasan Pembaruan.

————. 1964. *Membela Pantjasila.* Djakarta: Jajasan Pembaruan.

————. 1964. *Revolusi, Angkatan Bersendjata dan Partai Komunis* (Ceramah Menko/Wakil Ketua MPRS/Ketua CC PKI di hadapan para Perwira AURI di Seskau, Djakarta, pada tanggal 17 Maret 1964). Djakarta: Jajasan Pembaruan.

————. 1965. *Kaum Tani Mengganjang Setan-setan Desa.* Djakarta: Jajasan Pembaruan.

————. 1965. *Pilihan Tulisan I, II, dan III.* Djakarta: Jajasan Pembaruan.

Azhari, Aidul Fitriciada. 2004. *Wiranto Bersaksi di Tengah Badai.* Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia.

Ajip Rosidi. 1969. *Ikhtisar Sedjarah Indonesia.* Bandung: Binatjipta.

Alfian. 1978. *Beberapa Masalah Pembaruan Politik di Indonesia.* Jakarta: PSPI.

————. 1971. *Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakjat.* Djakarta: Leknas.

————————. 1978. *Pemikian dan Perubahan Politik Indonesia.* Jakarta: PT Gramedia.

Amar, Djen. 1963. *Bandung Lautan Api.* Bandung: Dhiwantara.

Amas Permulter. 2004. *The Military and Polities ini Modern Times*. On Professional, Pretorian and Revolusinary Soldiero New Haven and London, Yale University Pres.

Amier, Andi Baso, 1957. *Gema Revolusi.* Makassar: Anna Gratika.

Amin, Mr. S.M., 1967. *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin.* Djakarta: Tintamas.

Amiruddin Kasdi. 2001. *Kaum Merah Menyerah Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960–1965.* Yogyakarta: Penerbit Jendela.

Amrin Imran Cs. 1971. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Darat.* Jakarta: Pusat Sedjarah ABRI.

--------. *et al.* 2005. *PDRI dalam Perang Kemerdekaan.* Jakarta: Citra Pendidikan.

Anak Agung Gde Agung, Ida, 1973. *Twenty Years Indonesian Foreign Policy, 1945–1965.* The Hague, Paris: Mouton.

Anak Agung Gde Agung, Ida. 1983. *Renville*, Terjemahan Hanny Rungkat dan Ny M. Th Sejabat Rungkat, Renville ols Keerpunt in de Nederlands. Indonesisihe ... AW. Stijthof Stijthoff Alphen aan den Rijn. Jakarta: Sinar Harapan.

Anderson, Benedict R.O.G. 1972. *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistence 1944–1946.* Ithaca and London: Cornell University Press.

--------. 1961. *Some Aspects of Indonesian Politics under the Japanese Occupation, 1944–1945.* Ithaca, New York: Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program, Dept. of Far Eastern Studies, Cornell University.

Anwar, Rosihan. 1981. *Sebelum Prahara, Pergolakan Politik Indonesia 1961–1965.* Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Gonggong, Anhar. 1992. *Abdul Gahlan Mudzakkar dan Patriot hingga Pemberontak.* Jakarta: Grasindo.

--------. 2005. *et al.* (ed.) *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi.* Jakarta: Departemen Kominfo.

Anne Marie, The. 1965. *Darah Tersimbah di Djawa Barat: Gerakan Operasi Militer V.* Djakarta: Pusat Angkatan Bersendjata.

Arief Iskandar. 1971. *Sedjarah Perkembangan Perang Dari Zaman Klasik-Modern.* Djakarta: Pusat Sedjarah ABRI, Departemen Pertahanan-Keamanan.

Ariwiadi. 1965. *Penjelesaian Peristiwa Atjeh: Gerakan Operasi Militer VII.* Djakarta: Pusat Angkatan Bersenjata.

Aroean, Dj.L., 1963. *Deklarasi Ekonomi dengan Peraturan-peraturan Pelaksanaan dan Peraturan-peraturan Ekonomi Irian Barat.* Djakarta: Upaja.

Arsip Nasional Republik Indonesia. 1988. *Di Bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya.* Jakarta: Arsip Nasional RI.

Aryani, Faiz Manshur, Mathori A. E$Iwa (Editor). 2003. *Aidit: Abang Sahabat dan Guru di Masa Pergolakan.* Bandung: Nuansa Cendekia.

As'ad Djamhari, Saleh. 1979. *Ikhtisar Sedjarah Perjuangan ABRI (1945–Sekarang).* Cetakan ke-2. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.

Asmara Hadi. 1961. *Sembilan Tesis Marhaenisme dan Pendjelasan Singkatnja.* Djakarta: Pengurus Besar Partindo.

Aspan, M.A. 1961. *Sosial Stratification and Social Mobility in Indonesia.* Djakarta: Gunung Agung.

Atoeran-atoeran Tentang Seinendan. Djakarta: Kantor Pengadjaran, Naimubu, Gunseikanbu. Kantor Pengajaran Naimubu, Gunseikanbu. 2605 (1945).

Azis, M.A. 1955. *Japan's Colonialism and Indonesia.* The Hague: Martinus Nijhof.

Bachsan, Oemar. 1955.*Tjatatan Ringkas Tentang PETA (Pembela Tanah Air) dan Peristiwa Rengasdengklok.* Bandung: N.V. Melati.

Bahar, Soafroeddin, *et al.* 1992. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945–19 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.

Bambang Siswoyo, P. 1989. *Peristiwa Lampung dan Gerakan Sempalan Islam.* Jakarta: UD Mayasari.

Bardosono, Major. 1950. *Peristiwa Sulawesi Selatan.* Djakarta.

Batubara, Cosmas, 1986. *Sejarah Lahirnya Orde Baru Hasil dan Tantangannya.* Jakarta. Yayasan Prahita.

Benda, Harry J., James K. Irikura, Koichi Kishi. 1965. *Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Documents.* Southeast Asian Studies, Yale University, New Haven, Connecticut: Yale University Press.

Benda, Harry J., 1958. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesia Islam Japanesia Occupation*

Bijkerk. 1988. *Selamat Berpisah Sampai Berjumpa di Saat yang Lebih Baik (Dokumenter Runtuhnya Hindia Belanda).* Jakarta: Penerbit Djambatan.

Tjokroamidjojo, Bintoro. *Perencanaan Pembangunan.* Jakarta: Gunung Agung.

Biro Perantjang Nasional. 1971. *Laporan Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun 1956–1960.* Djakarta: Biro Perantjang Nasional.

Boland, J. 1975. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia.* The Hague: Martinus Nijhoff.

Bondan, Mohammad. 1971. *Genderang Proklamasi di Luar Negeri.* Djakarta: Kawal.

Brackman, Arnold C. 1963. *Indonesian Communism, a History.* New York: Frederick A. Praeger.

Bruce Glassburner (Editor). 1971. *The Economy of Indonesia.* Ithaca & London: Cornell University Press.

Bruce Grant. 1966. *Indonesia.* Victoria: Melbourne University Press.

Brugmans, *et al.*, 1960. *Nederlandsh Indie Onder Japanse Bezetting: Gegevens en Documenten over de jaren 1942–1945.* Franeker: T. Wever.

Budi Hartono. A, 1997. Dadang Juliantoro, *Derita Paksa Perempuan, Kisah Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang 1942–1945.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Budiardjo, Miriam S. 1955. *Evolution to wards Parliamentary Government in Indonesia: Parties and Parliament.* Georgetown.

Budley L. William; Mochtar Lubis. 1991. *Dokumen-dokumen Pilihan tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Asia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Butow, Robert, J.C. 1954. *Japan's Decision to Surrender.* Stanford, California: Stanford University Press.

Care Hun. 1975. *Sebuah Petundjuk Guna Memahami Istilah-istilah Komunis* (terjemahan Savitri). Djakarta: Badan Penerbit Masa.

Castles (Editor). 1970. *Indonesia Political Thinking, 1945–1965.* Ithaca & London: Cornell University Press.

Catatan Kronologis di Sekitar Peristiwa G-30-S/PKI. 1965. Djakarta: Koti.

Conboy, Ken, 2004. Intel: *Inside Indonesia's Intellgence* Service. Jakarta: Equinox Publishing (Asia) PTE. LTD.

Kahin, George Mc. T. 1969. *Nationalism and Revolution in Indonesia.* Ithaca & New York: Cornell University Press.

Cribb, Robert (Editor), Erika S. Alkhattab dan Narulita Rusli (Penerjemah). 2003. *The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965–1966* (terjemahan: The Indonesian Killings of 1965–1966: Studies from Java and Bali). Yogyakarta: Mata Bangsa.

Cribb, Robert Bridson. 1990. *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945–1949.* Jakarta: Grafik.

Dahm, Bernard. 1959. *Sukarno and the Struggle of Indonesia Independence.* Ithaca & London: Cornell University Press.

Dake, Antonie, C.A. 2006. *Sukarno File.* Jakarta: Aksara Karunia.

Dake, C.A., 1971. *History of Indonesia the Twentieth Century.* London and New York, Washington: Praeger Publishers.

Daksa Prijadi. 1973. *In the Spirit of the Red Banteng: Indonesia Communist Between Moscow and Peking,* 1959–1965. The Hague: Mouton.

Danoemihardja, Sjarief Hidaja. tth. *Riwajat Perdjuangan Kiai Hadji Zainal Mustafa: Pemimpin dan Penggerak Pemberontakan Singaparna 25 September.*

Daoed Joesoef. 1944, 1973. *Pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional.* Jakarta: Yayasan Proklamasi; CSIS.

Deplu RI. 1959. *Amanat dan Pendjelasan Presiden RI tentang Tindakan-tindakan Pemerintah di Bidang Keuangan dan Ekonomi.* Djakarta: Deplu RI.

————. 1959. *Buku Ringkasan Pembangunan Semesta.* Djakarta: Deplu RI.

————. 1965. *20 Tahun Indonesia Merdeka.* Djakarta: Deplu RI.

————. 1966. *Keterangan Pemerintah tentang Kebidjaksanaan Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi.* Djakarta: Deplu RI.

————. 1966. *Pidato-pidato Sambutan Berkenaan Dengan Berachirnja Sidang Umum ke-IV Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.* Djakarta: Deplu RI.

————. 1968. *Pendjelasan pada Presiden mengenai masalah nasional yang penting dan mendesak di depan DPR-MPRS pada tanggal 29 Februari 1968.* Djakarta: Deplu RI.

————. 1968. *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Djenderal Soeharto di Depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1968.* Djakarta: Deplu RI.

————. 1968. *Pidato Presiden Soeharto di Depan Foreign Correspondents Club (Perkumpulan Wartawan-wartawan Asing) di Tokyo, 30 Maret 1968.* Djakarta: Deplu RI.

————. 1969. *Pidato Presiden di Depan Sidang Pleno DPRGR tanggal 16 Agustus 1969.* Djakarta: Deplu RI.

————. 1971. *Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri.* Djakarta: Deplu.

————. 1976. *ASEAN dan Perkembangannya.* Jakarta: Deplu RI.

————. 1976. *Sepuluh Tahun Politik Luar Negeri Orde Baru.* Jakarta: Deplu RI.

————. 1966. *Pidato Presiden Sukarno di Depan Sidang Kabinet Dwikora tanggal 15 Djanuari.* Djakarta: Deplu RI.

————. 1967. *Putusan-putusan Sidang Istimewa MPRS pada tahun 1967.* Djakarta: Deplu RI.

Departemen Penerangan RI. 1994. *Gelora Konfrontasi Mengganjang "Malaysia".* Jakarta: Departemen Penerangan.

--------. 1956. *Risalah Perundingan Tahun 1956.* Djilid I. Djakarta: Departemen Penerangan.

--------. 1970. *Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat.* Djakarta: Departemen Penerangan.

--------. 1970. *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia selama 25 tahun: 1945–1970.* Djakarta: Pradnja Pramita.

--------. 1972. *Pidato Presiden di depan Sidang Pleno DPRGR tanggal 16 Agustus 1972.* Djakarta.

--------. 1973. *Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 12 Maret 1973.* Jakarta.

--------. 1974. *Rencana Pembangunan Lima Tahun II, 1974/1975–1978/1979.* Jakarta.

--------. 1975. *Masalah Pendidikan/Kebudayaan dan Agama: Jawaban/ Penjelasan Pemerintah di Depan Sidang Komisi IV DPR-RI.* Jakarta.

--------. 1975. *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1975.* Jakarta.

--------. 1975. *Ringkasan Repelita II 1974/1975–1978/1979.* Jakarta.

--------. 1976. *Petisi Rakyat Timor Timur.* Jakarta.

--------. 1976. *Provinsi Daerah Tingkat 1 Timor Timur.* Jakarta.

--------. 1977. *Almanak Pers 1977.* Jakarta.

--------. 1977. *Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang DPR-RI, 16 Agustus 1977.* Jakarta.

--------. 1978. *Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Depan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia tanggal 11 Maret 1978.* Jakarta.

--------. *Surat Kabar Indonesia pada tiga zaman.* 1978. Jakarta: Departemen Penerangan RI.

Departemen Perguruan Tinggi Dan Ilmu Pengetahuan. 1963. *Perguruan Tinggi di Indonesia.* Djakarta.

Departemen Pertahanan Keamanan Doktrin. 1975. *Kekayaan ABRI.* Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan.

Departemen Pertahanan-Keamanan. 1967. *Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Departemen Pertahanan Keamanan (Kepres No. 132/1967).* Djakarta.

--------. 1967. *Tjatur Darma Eka Karma. Doktrin Perdjuangan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.* Djakarta.

--------. 1972. *Darma Pusaka '45.* Djakarta.

———. 1974. Keputusan Presiden RI Nomor 7 tahun 1974. Jakarta.

———. 1980. *Kebijaksanaan Dasar Menhankam/Pangab pada Rapim ABRI tahun 1980 di Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 1980.* Pekanbaru.

————. 1972. *Himpunan Amanat Menhankam/Pangab dan Wapangab.* Jakarta.

Department of Foreign Affairs, of Republic Indonesia. *Indonesia.* Djakarta.

Dharsono, H.R. tth. *Menuntut Janji Orde Baru, Saripati pleidooi terdakwa H.R. Dharsono, Letjen TNI (Pur),* Et.

Ditjen RTF. 1977. *Radio Televisi Film 1977.* Jakarta: Ditjen R.T.F.

Dinas Sejarah Kodam VIII/Brawijaya. 1982. *Pemberontakan PKI Dan Bahaya Latent Komunis.*

Dinuth, Alex (Penyunting). 1993. *Dokumen Terpilih Sekitar Pemberontakan G-30S-PKI.* Jakarta: Lembaga Pertahanan Nasional.

Djajusman. 1978. *Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda (KNIL).* Bandung: Penerbit Angkasa.

Djalinus, Yusril, (koordinator), Stanley Adi Prasetyo dan Tariw Hadad (Editor). 2002. *Jenderal tanpa Pasukan Politisi tanpa partai: Perjalanan Hidup A.N. Nasution.* Jakarta: PT Grafitipers.

Djamhari, Saleh, A. *et al. Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966,.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1986.

Djawa Goenseikanbu Somoeboe. 29 April 1945. *Azas-azas Pembentoekan Badan Oentoek Penjelidikan Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan.* Djakarta.

Djawa Shinbunkai. Sjowa 2605 (1945). *Kewadjiban Pemoeda.* Djakarta.

Djiwandono, Soedradjat, J. 1970. *Masalah-masalah Ekonomi-Keuangan dan Pembangunan.* Djakarta: Leknas.

Djojohadikoesoemo, Soemitro. 1953. *Persoalan Ekonomi di Indonesia.* Djakarta: Pembangunan.

Djojoprajitno, Sudiono. 1962. *PKI-SIBAR Contra Tan Malaka.* Djakarta: Jajasan Massa.

Dn R. Soeharto. 1984. *Saksi Sejarah mengikuti Pergelangan Dwitunggal.* Jakarta: Gunung Agung.

Dunn, James. 2003. *East Timor Double Bay.* ABC Books

Dwipayana, G, Nazaruddin Sjamsudin (eds). 1991. *Jejak Langkah Pak Harto.* Jakarta: PT Citra Lamtoro Gunung Persada.

Elies, W.H.J. 1947. *Indie Onder Japanschen* Hiel.'s, Gravenhage: W. van Hoeve.

Elsbree, Willard. 1953. *Japan's Role in Southeast Asian Nationalist Movements, 1940 to 1945.* Cambridge, Massachuset: Harvard UniversityPress.

Elson, Robert Edward. 2005. *Suharto Sebuah Biografi Politik.* Jakarta: Pustaka Utama.

Endang Saifuddin Anshari, MA, H. 1983. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* Jakarta: CV Rajawali.

Engelan, O.E. *et al.* 1997. *Lahirnya Satu Bangsa dan Negara.* Jakarta: Penerbit UI Press.

Feis, Herbert, 1950. *The Road to Pearl Harbor: The Coming of the War between the United States and Japan.* Princeton, New York: Princeton University Press.

————. 1957. *The Indonesian Elections of 1955.* Ithaca: Cornell University Press.

————. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia.* Ithaca: Cornell University Press. Feith, Herbert dan Lance.

Franklin B. Weinstein. *Indonesia Foreign Policy and the Dilemma of Dependence, from Sukarno to Suharto.* Ithaca & London: Cornell University Press.

Ganda Soebrata, S.M. 1953. *An Account of the Japanese Occupation of Banjumas Residency, Java, March 1942 to August 1945.* Ithaca, New York: Cornell University Press.

Ganis Harsono. 1977. *Recollections of Indonesia Diplomat in the Sukarno Era.* University of Queensland Press.

————. 1985. *Cakrawala Politik Era Sukarno.* Jakarta, Inti I Dayu Press.

Garis-garis Besar Tentang Pergerakan Romoesha. Disoesoen oleh Naimoeboe Romoekjokoe, Showa 19.

Geertz, Clifford. 1964. *The religion of Java.* London: The Free Press of Glencoe.

Goenseikanboe. 1945. *Notulen Stenografis Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Pada Tanggal 18 Boelan 8 Tahoen 1945.* Djakarta.

————. 1962. *Boekoe Pengoemoeman Oendang-oendang disoesoen dengan peroebahan dan tambahan sampai penghabisan tahun Syoowa 19 (2604).* Djakarta.

————. 2604 (1962). *Orang Indonesia jang Terkemoeka di Djawa.* Djakarta.

Gondokusumo, Djody dan Amelz. 1951. *Parlemen Indonesia.* Djakarta: Bulan Bintang.

Goudoever, W.A. van, 1946. *Malino Maakt Historie.* Batavia.

Goudoever. 1947. *Denpasar Bouwt een Huis.* Batavia.

Gray, Marie. 2001. *Tamu: A New Zealand Family, in Java.* Bandung: PT Remaja "I" Rosdakarya.

Hadiwardojo, Soekandar. tth. *Jogja Berdjuang Semasa Agresi Belanda ke-2.* Jogjakarta: Quick.

Hanifah, Aboe, 1946. *Kira Berdjoeang, Goebahan Koeltoer Politik.* Djakarta: Merdeka.

Harahap, Parada. 1951. *Saat Bersedjarah.* Djakarta: Gapura.

Harahap, Zainabun. 1965. *Operasi-operasi Militer Menumpas Kahar Muzakar.* Djakarta: Pusat Angkatan Bersenjata.

Hatta, Mohammad. 1952. *Verspreide Geschriften.* Djakarta, Amsterdam & Surabaja: G.P.J. van der Peet, Penerbit dan Balai Buku Indonesia.

————. 1953. *Dasar-dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia.* Djakarta: Tintamas.

————. 1967. *Ekonomi Terpimpin.* Djakarta: Djambatan.

————. 1967. *Teori Politik Ekonomi dan Orde Ekonomi.* Djakarta: Tintamas.

————. 1970. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus* 1945. Djakarta: Tintamas.

————. 1979. *Ekonomi Terpimpin.* Jakarta: Mutiara.

————. 1979. *Memoir.* Jakarta: Tintamas.

Herkusumo, Arniati Prasedyawati. 1984. *Chuo Sangi In, Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang.* Jakarta: PT Rosada Jayaputra.

Higgins, Benjamin. 1968. *Indonesia's Economy Stabilization and Development.* New York: W.W. Norton.

Hindra, Eka dan Koichi Kimura. 2007. *Momoye, Mereka Memanggilku.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Hindley, Donald. 1966. *The Communist Party of Indonesia, 1951–1963.* Berkeley & Los Angeles: University of California Press.

Hughes, John. 2002. *The End of Sukarno A Coup That Misfired.* London, Augus dan Robetson.

Ikatan Keluarga Pahlawan Revolusi. 2002. *Kunang-Kunang Kebenaran, Di Langit Malam, Tuntutan Anak-Anak Pahlawan Revolusi; Keluarga Korban, dan Saksi Pada peristiwa Dini Hari 9 Oktober 1965.* Jakarta: PT Enka Parahiyangan.

Indonesia Islam Under the Japanese *Occupation, 1945–1945.* The Hague and Bandung: W. van Hoeve.

Insider. 1950. *Atjeh Sepintas Lalu.* Djakarta: Archapada.

Integrasi: Kebulatan Tekad Rakyat Timor Timur. Jakarta: Yayasan Parikesit, 1976.

Isak, Joesoef, ed. (Kata Pengantar). 2002. *Dokumen CIA Melacak Penggulingan dan Konspirasi G-30-S-1965.* Jakarta: Hasta Mitra, Agustus.

Ismail Suny. 1968. *Mekanisme Demokrasi Pantjasila.* Djakarta: CV Taruna Djaja.

Japan's Longest Day. The Pacific War Research Society, Tokyo & Palo Alton: Kodansha International Ltd., 1968.

Jassin, H.B. 1955. *Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Seni.* Djakarta: Gunung Agung.

————. 1969. *Kesusastraan Indonesia di Masa Djepang.* Djakarta: Gunung Agung.

John Coast. 1952. *Recruit to Revolution: Adventure and Politics In Indonesia.* Melbourne, Sydney, Welington, Cape Town, Toronto: London Christopher's.

Jones, F.C., *Japan's New Order in East Asia: The Rise and Fall, 1937–1945.* London-New York, Toronto: Oxford University Press.

Jones, Howard P. 1971. *Indonesia: The Possible Dream.* New York: Harcourt Broce Java-novich Ind.

Kahin, George McTurnan (Editor), *Governments and Politics of Southeast Asia.* Ithaca & London:

Kalimantan Memperdjoeangkan Kemerdekaan. Yogyakarta, 1945.

Kansil, C.S.T.; Rudi T. Erwin. 1970. *Kitab Himpunan Hasil Kerja MPRS.* Djakarta: Erlangga.

Kartadjoemena, H.S. 1977. *The Politics of External Economic Relations: Indonesia's Options in the Post Detente Era.* Singapore: Institute of Southeast Asia Studies.

Katoppo, Aristides (koordinator). 2000. Puranama Kusumaningrat, JMV. Soeparno, MM, Drs. Moh. Cholil (anggota). *Menyingkap Kabut Halim 1965.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Keamanan dan Ketertiban. 1978. *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G.30.S/PKI).* Jakarta.

Kebijakan Agung. 1967. *Proses Peradilan Jusuf Muda Dalam.* Djakarta: Kedjaksaan Agung.

Kedutaan Besar Belanda. 1997. *Aspek-Aspek Internasional Perjuangan Kemerdekaan Indonesia 1945–1945,* Terj. Ny/Tn Slamet. Jakarta: Kedutaan Besar Belanda.

Kementerian Penerangan Djawatan Radio RI. 1955. *Sedjarah Radio di Indonesia.* Djakarta: Pertjetakan Seno N.V.

Kementerian Penerangan. 1945. *Kepartaian dan Parlementaria di Indonesia.* Djakarta.

————. 1951. *Kepartaian di Indonesia.* Djakarta.

————. 1952. *Kenangan 7 Tahun Revolusi Indonesia.* Djakarta.

————. 1952. *Keterangan dan Djawaban Pemerintah atas Program Kabinet Wilopo.* Djakarta.

————. 1953. *Provinsi-provinsi* (Seri Provinsi). Djakarta.

————. 1953. *Subversive Activities in Indonesia, The Jungschlager and Schmidt Affairs.* Djakarta.

————. *Keterangan tentang Peristiwa Pengeluaran Schmidt.* Djakarta.

————. 1954. *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta.* Djakarta.

————. 1956. *Keterangan dan Djawaban Pemerintah tentang Program Kabinet Ali Sastroamidjojo II.* Djakarta.

————. *Kabinet-kabinet Republik Indonesia.* 1957. Djakarta.

————. 1950. *Undang-Undang Dasar dan Maklumat Politik RI.* Djakarta.

Keterangan bekas MENKO/HANKAM berhubung dengan Pelaksanaan Nawaksara. Djakarta. 1966.

Keyfitz, Dr. Nathan, Widjojo Nitisastro. 1955. *Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia.* Djakarta: Pembangunan.

Kingsbury, Damien. 2002. *The Polities of Indonesia, Melbourne.* Oxford University Press.

Kishi Koichi, Nishijima Shigetada, *et al.* 1963. *Indonesia Ni Okeru Nippon Gunsei No Kenkyu (Study of the Japanese Military Administration in Indonesia),* trans. Joint Publication Research Service.

Kleden, Ignas. "Berpikir Strategis tentang Kebudayaan." *Prisma,* No. 3 Maret 1987.

Komando Operasi Tertinggi. 1965. *Rangkaian Pidato dan Pernjataan-pernjataan Resmi Di sekitar "Gerakan 30 September,* Djakarta.

Konstitusi (AD–ART) Partai Komunis Indonesia. 1961. Djakarta: CC PKI.

Kopkamtib. 1978. *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.* Jakarta.

Legge, Jhon. 1985. *Sukarno: Sebuah Biografi Politik.* Sinar Harapan. Jakarta.

Krijgsgechiedenis Afdeling, Hoofdkwartier van de Chef van de Generale Staf, *Nederlands Indie contra Japan,* III & VII. 1954. 's Gravenhage: Staatsdruk-kerij en Uitgeveri.

Kroef, Justus M. van der. 1971. *Indonesia Since Sukarno.* Singapore: Asia Pasific Press.

Lebra, Joyce C., 1977. *Japanese Trained Armies In Southeast Asia: Independence and Volunteer Forces in World War II.* Hongkong, Singapore & Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd.

Legge, J.D. 1964. *Indonesia.* New Jersey.

————. 1972. *Sukarno: A Political Biography.* London.

Leimena, J., 1949. *Perselisihan Indonesia–Belanda.* Djakarta: Grafica.

Leirissa, R.Z., 1965. *Bukan Disiplin Kadaver Melainkan Disiplin Berdjiwa: Gerakan Operasi Militer Terhadap Permesta,* Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata.

————. 1975. *Maluku Dalam Perdjuangan Nasional Indonesia.* Jakarta: Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

————. 2006. *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia.* Jakarta: Pustaka Sejarah.

Lembaga Bahasa Nasional. 1972. *Bahasa dan Kesusastraan* (seri chusus No. 9/1972). Djakarta.

Lev, Daniel. 1966. *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957–1959.* Ithaca, New York: Cornell Univesity Press.

Liddle, E. William, *Cultural and Class Politics in New Order Indonesia.* Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, Research Notes & Discussions Series No. 2, March 1977.

Long, Gavin, 1963. *The Final Campaign.* Canberra: The Australian War Memorial.

Maartowidjojo, H. Mangil. 1999. *Kesaksian tentang Bung Karno* 1945–1967. Jakarta: Grasindo.

Machmud, H. Amin. 1985. *Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar Tonggak Sejarah Perjuangan Orde Baru.* Jakarta: Penerbit.

Mackie, J.A.C. 1974. *Konfrontasi, The Indonesia–Malaysia Dispute 1963–1966.* London: Oxford University Press.

Mac Vey, Ruth T. 1965. *The Rise of Indonesian Communism.* Ithaca, New York: Cornell University Press.

————. 1976. *Problem of the Indonesian Inflation.* New York.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara RI. 1966. *Hasil-hasil Sidang Umum ke-IV tahun 1966,* Djakarta.

————. 1968. *Hasil-hasil Sidang Umum ke-V tahun 1968.* Djakarta.

Makmun Salim. 1971. *Ichtisar Sedjarah Perang Dunia II.* Djakarta: Pusat Sedjarah ABRI, Departemen Pertahanan-Keamanan.

Manaii Sophiaan. 1994. *Kehormatan Bagi yang Berhak Bung Karno tidak terlibat G-30-S/PKI.* Jakarta: Yayasan Mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Mangkunsarkoro, S. 1952. *Pendidikan Nasional.* Jogjakarta: Pelopor.

Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusat Sejarah ABRI, 1988. *Hari-hari Menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.* Jakarta.

Markas Komando Akademi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia. 1972. *Sedjarah Akademi Angkatan Bersendjata RI.* Djakarta.

Marshal, Green. 1985. *Dari Sukarno ke Soeharto: G-30-S-PKI dari Kacamata Seorang Duta Besar* (terjemahan: Indonesia: *Crisis and Transformation 1965–1968.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Martosewojo, Soejono, *et al.* 1984. *Mahasiswa '45 Prapatan 10 Pengabdiannya I.* Bandung: Patma.

Mattalioe, Bahar. 1965. *Kahar Muzakar dengan petualangannja.* Djakarta: Delegasi.

Maulwi Saelan. 2001. *Dari Revolusi '45 sampai Kudeta '66: Kesaksian Wakil Komandan. Tjakrabirawa.* Jakarta: Yayasan Hak Bangsa.

————. 2001. *Dari Revousi '45 Sampai Kudeta '66.* Jakarta: Yayasan Hak Bangsa.

Maxwell, John; Tri Wibowo Budi Santoso (Penerjemah). 2000. *Soe Hok-Gie. Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani* (terjemahan: *Soe Hok-Gie : A Biography of A Young Indonesian Intellectual).* Jakarta: Grafiti.

May, Brian. 1978. *The Indonesian Tragedis,* Singapore: Graham Brash (PTE) LTD.

————. 1978. *The Indonesian Tragedy, London.* Routledgee Kegon Paul Ltd.

Mendjeladjah Tracee baru: Kebangkitan Semangat '66. Djakarta: Universitas Indonesia. 1966.

Meyer, D.H. 1946. *Japan Wint Den Oorlog: Documenten over Java.* Maastricht: N.V. Leiter-Nijpels

Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1950 *Indonesie in de Veiligheidsraad van den Verenigde Naties (Februari–Desember 1949,* 's. Gravenhage Staatsdrukkerij en Vitgever bedrijf.

Moeljanto, D.S., Taufiq Ismail. 1995. *Prahara Budaya.* Bandung: Penerbit Mizan.

Mokoginta, Maj. Djen.A.J.(Ed). 1964. *Sedjarah Singkat Perdjuangan Bersendjata Bangsa Indonesia.* Djakarta: Staf Angkatan Bersendjata.

Mook, H.J. 1944. *The Netherlands Indies and Japan.* London: Allen & Unwin.

————. 1949. *Indonesie, Nederland en de Wereld.*Bandung: Vorking.

MPRS. 1969. *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPRS disertai UUD 1945.* Djakarta: C.V. Pantjuran Tudjuh.

————. *Himpunan Pidato Ketua MPRS RI.* 1971. Djakarta: MPRS.

Mortimer, Rex. 1974. *Indonesian Co titntunisnt Under Sukarno, Ideology & Politics, 1959–1961.* Kuala Lumpur, Singapore & Jakarta: Oxford University Press.

Nagasumi, Akira (Penyunting). 1988. *Pemberontakan Indonesia di Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nasroen, M. 1951. *Masalah Sekitar Otonomi.* Djakarta: Wolters.

————. 1954. *Soal Pembentukan Daerah Otonom dan Tingkat Daerah Otonom.* Djakarta: Endang.

Nasution, A.H. 1964. *Sedjarah Perdjuangan Nasional Di bidang Bersendjata.* Djakarta: Mega Bookstore.

————. 1966. *ABRI Penegak Demokrasi UUD 1945.* Jakarta: Seruling Masa.

————. 1975. *1 Oktober 1965 Kebaktian 1966: Koreksi/Pembaharuan/ Pembangunan.* Jakarta.

————. (1985). *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid* V dan VI, Jakarta: Gunung Agung, MCMLXXXV.

————. 1988. *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 7. Masa Konsolidasi Orde Baru*: Jakarta: CV Haji Masagung.

————. 1955. *Pokok-pokok Gerilja.* Djakarta: Pembimbing.

————. 1955. *Tjatatan Sekitar Politik Militer Indonesia.* Djakarta: Pembimbing.

————. 1962. *Tentara Nasional Indonesia.* Bandung & Djakarta: Ganaco N.V.

————. 1964. *Mengamankan Pandji-pandji Revolusi.* Djakarta: Delegasi.

————. 1966. *ABRI Penegak Demokrasi UUD* 1945. Djakarta: Seruling Masa.

————. 1966. *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran, I dan* II. Djakarta: Seruling Masa.

————. 1967. *Menegakkan Keadilan dan Kebenaran II.* Jakarta: Seruling Masa, PT.

————. 1968. *Tentara Nasional II.* Djakarta: Seruling Masa.

————. 1969. *Tentara Nasional III.* Djakarta: Seruling Masa.

———. 1976. *Memperingati 10 Tahun Gugurnya Pahlawan Ampera.* Jakarta.

———. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan,* Jilid IV dan V. Bandung: Angkasa.

———. 1979. *Kekarjaan ABRI.* Djakarta: Seruling Masa.

Nieuwenhuyze, C.A.O. van. 1947. *What the Japanese did to Islam in Java.* Batavia.

Nio Joe Lan. 1946. *Dalam Tawanan Djepang.* Djakarta: Lotus Co.

Nishihara, Masashi. 1976. *The Japanese and Sukarno's Indonesia: Tokyo–Jakarta Relations, 1951–1956.* Honolulu: The University Press of Hawaii.

Nitisasastro, Widjojo. 1970. *Population Trends in Indonesia.* Ithaca: Cornell University Press.

———. 1966. *Hakekat dan konsekwensi Ketetapan MPRS dibidang ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.* Djakarta: Leknas.

Notosusanto, Nugroho dan Ismail Saleh. 1989. *Tragedi Nasional Percobaan KUP G 30 S/PKI.* Jakarta : PT Pembimbing Masa.

———. 1985. *Tercapainya Konsensus Nasional* 1966–1969. Jakarta: PN Balai Pustaka.

———. 1985. *Tercapainya Konsensus Nasional, 1966-1969.* Jakarta: *PN.* Balai Pustaka.

Notosutardjo, H.A. 1956. *Dokumen-dokumen Konperensi Medja Bundar,* Djakarta.

Nugroho Notosusanto & Ismail Saleh. 1968. *The Coupattempt of the September 30 Movement in Indonesia.* Djakarta: Pembimbing.

1968. *Bidang Sosial Budaja dalam Rangka Ketahanan Nasional.* Djakarta: Lembaga Sedjarah Hankam.

———. 1968. *Pemberontakan Tentara PETA* Blitar Melawan Djepang: 14 Februari 1944. Djakarta: Lembaga Sedjarah Hankam.

———. 1968. *Sedjarah dan Hankam.* Djakarta: Lembaga Sedjarah Hankam.

———. 1970. *The Battle of Surabaja.* Djakarta: Department of Defence & Security, Centre for Armed Forces Histroy.

———. 1970. *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces Especially Since 1966.* Djakarta: Department of Defence and Security, Centre for Armed Forces History.

———. 1971. *The PETA Army in Indonesia 1943–1945.* Djakarta: Department of Defence & Security, Centre for Armed Forces History.

————. 1974. *Generations in Indonesia.* Jakarta: Department of Defence & Security, Centre for Armed Forces History.

————. 1974. *Some Effects of the Guerilla on Armed Forces and Society in Indonesia.* Jakarta: Department of Defence & Security, Centre for Armed Forces History.

————. 1974. *The Revolt Against The Japanese of a PETA–Battalion in Blitar (Februari 14, 1945). Jakarta: Department of Defence & Security,* Centre for Armed Forces History.

————. 1974. *The Transfers of Values in The Indonesian Armed Forces.* Jakarta: Department of Defence & Security, Centre for Armed Forces History.

————. 1975. *The Japanese and Indonesian Independence.* Jakarta: Department of Defence & Security, Centre for Armed Forces History.

————. 1975. *The National Struggle and The Armed Forces in Indonesia.* Jakarta: Department of Defence & Security, Centre for Armed Forces History.

————. 1976. *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik.* Cetakan II. Jakarta: Pusat Sedjarah ABRI.

————. 1979. *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia.* - Jakarta: PT Gramedia.

————. 1979. *The Peta Army During The Japanese Occupation of Indonesia.* Tokyo: Waseda University Press.

————. 1972. *Indonesia Sekitar Tahun 2000.* Bogor: Archipel.

Oei Tjoe Tat. 1995. *Pramudya Ananta Toer dan Stanley Adi Prasetyo (Penyunting), Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden.* Jakarta: Hasta Mitra.

Oetmans, Willem. 2001. *Di Balik Keterlibatan CIA: Bung Karno Dikhianati,* Jakarta: Aksara Karunia.

Oetojo Oesman. *et al.* 1992. *Pancasila sebagai ideology,* Jakarta, BP-7 Pusat.

Ong Hok Ham. 1965. *Sapta Marga Berkumandang Di Sumatra: Operasi Menumpas Pemberontakan "PRRI".* Djakarta: Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata.

————. 1987. *Runtuhnya Hindia Belanda.* Jakarta: Penerbit PT Gramedia.

Osman Raliby. 1952. *Sedjarah Hari Pahlawan.* Djakarta: Tintamas.

Oudang, M. 1952. *Perkembangan Kepolisian di Indonesia.* Djakarta: Penerbit Mahabrata.

Overdijkink. 1940. *G. Het Indonesisch Probleem.* Den Haag.

Pakpahan, G. ttt. dan tth. *1261 Hari di bawah sinar "Matahari Terbit", 6 Maret 2602017 Agustus 2605.*

Palmier, Leslie. 1960. *Social Status and Power in Java.* London School of Economics Monographs of Social Anthropolgy, 20. London: Athlone Press.

Panggabean, M. 1993. *Berjuang dan Mengabdi.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70. 1972. *Bung Hatta mengabdi Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa.* Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70.

Pantjawarsa Manipol. 1964. Djakarta: Panitia Pembina Djiwa Revolusi.

Panitia Lima. 1977. *Uraian Pancasila,* Jakarta.

Parera, Frans M. (penyunting). 1986. *Surat-Surat Politik Iwan Simatupang 1964–1966.* Jakarta: LP3ES.

Pauw, Douglas S. 1959. *Financing Economic Development: The Indonesian Case.* Glencoe: The Free Press.

Pawiloy, Sarita. 1987. *Sejarah Perjuangan Angkatan 45 di Sulawesi Selatan.* Makassar: Dewan Harian Daerah Angkatan 45.

Pembinaan Bahasa Indonesia. Medan: Kongres Bahasa Indonesia. 1959.

Penders, C.L.M. 1975. *The Life and Times of Sukarno.*

Peratoeran-peratoeran Himpoenan Kebaktian Rakjat. 1944. Djakarta.

Perguruan Tinggi di Indonesia. 1965. Djakarta: Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Persadja. 1955. *Proses Peristiwa Sultan Hamid II.* Djakarta.

Peter Dale Scott. 2000. *Amerika Serikat Dan Penggulingan Sukarno 1965–1967.* Alih Bahasa: Waluyo Soebagyo Kartanegara. Jakarta: Cipta Lestari.

Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang DPR RI, 16 Agustus 1971. 1971. Djakarta.

Pidato Presiden di depan Sidang Pleno DPRGR tanggal 16 Agustus 1970. 1970. Djakarta.

Piekaar, A.J. 1949. *Atjeh en de Oorlog met Japan.* The Hague/Bandung: W. van Hoeve.

Pledoi Sudisman: Kritik Oto Kritik Seorang Politbiro CC PKI. 2001. Jakarta: Teplok Press.

Portrait of A Patriot Selected Writings of Mohammad Hatta. 1972. The Hague, Paris: Mouton.

Pour, Julius, (editor). 1999. H. Mangil Martowidjojo: *Kesaksian Tentang Bung Karno 1945–1967.* Jakarta: Grasindo.

Pramoedya Ananta Toer, *et al.* 1998. *Memoar Oei Tjoetat Pembantu Presiden Soekarno.* Jakarta: Harta Mitra.

Pringgodigdo, Prof. Mr.A.G. 1952. *Tatanegara di Djawa pada waktu pendudukan Djepang: Dari Bulan Maret sampai Bulan Desember 1942.* Berita Ilmu Pengetahuan Populer, No. 1, 1952. Jogjakarta: Jajasan Fonds Universiteit Negeri Gadjah Mada.

————. 1978. *Sekitar Pancasila.* Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.

Priyo Budi Santoso. 1995. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pusat Penerapan Angkatan Darat. *Fakta-fakta Persoalan Sekitar Gerakan 30 September.* 1965. Djakarta: Pusat Penerangan Angkatan Darat.

Pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan Darat. *G-30-S Di hadapan Mahmilub 1: Perkara Njono.* 1966. Djakarta: Pusat Pendidikan Kehakiman AD.

————. *G-30-S Di hadapan Mahmilub 2: Perkara Untung.* 1966. Djakarta: Pusat Pendidikan Kehakiman AD.

————. *G-30-S Di hadapan Mahmilub 3: Perkara Dr. Subandrio.* Jilid I, II. 1966. Djakarta: Pusat Pendidikan Kehakiman AD.

————. *G-30-S Di hadapan Mahmilub di Djakarta: Perkara Untung.* 1966. Djakarta: Pusat Pendidikan Kehakiman AD.

Pusat sedjarah Angkatan Bersendjata. 1965. *40 Hari Kegagalan "G-30-S".* Djakarta: Staf Angkatan Bersendjata, Pusat Sedjarah.

————. 1965. *40 Hari Kegagalan G.30.S.* Djakarta.

————. 1965. *40 Hari Kegagalan G-30-S: 1 Oktober–10 November 1965.* Jakarta.

————. 1995. *Gerakan Operasi Militer II, Operasi Penumpasan APRA/ Westerling, Bandung.* 1965. Djakarta: Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata.

Prawiro, Radius. 1998. *Indonesia's Stuggle for Economic Development.* Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Prawiroatmodjo, Soehoed. 1953. *Perlawanan Bersendjata Terhadap Fasisme Djepang.* Djakarta: Merdeka Press.

Purbakawatja, Sugarda. 1965. *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka.* Djakarta: Prapantja.

Pusat Sejarah ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia*, 5 jilid, Jakarta, Pusat Sejarah ABRI.

Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. 1994. *Bahaya Laten Komunisme Di Indonesia Pembentukan G-30-S/PK/Dan Penumpasannya,* Jilid IVA. Jakarta.

Quispel, H.N. 1945. *Nederlandsch Indie en den Tweeden Wereld Oorlog.* London: The Netherland Publishing Company Limited.

Redmana, Hans R. 1970. *Beberapa Persoalan Penduduk di Indonesia.* Djakarta: LIPI.

Regeerings Voorlichting Dienst. 1946. *Indonesia's Toekomst.* Batavia.

Reid, Anthony. J.S., 1996. *Revolusi Nasional Indonesia.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Rentjana Pembangunan Lima Tahun I, 1969/1970–1973/1974. Djakarta. 1969.

R.G. Djopari. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Riyanto. 2006. *Tragedi Lampung Peperangan yang Direncanakan.* Jakarta: Penerbit PT Toko Gunung Agung Tbk.

Robins, Richard. 1990. *Power Economy in Suharto's Indonesia.* Manil. the Journal of Contemporary Asia Publishers.

Roem, Mohammad. 1970. *Pentjulikan, Proklamasi dan Penilaian Sedjarah.* Djakarta & Semarang: Hudaja dan Ramadhan.

Said, Tribuana dan D.S. Moeljanto. 1983. *Perlawanan Pers Indonesia BPS Terhadap, Gerakan PKI.* Jakarta: Sinar Harapan.

Said, Salim. 1993. *Genezis of Power, Jenderal Soedirman and the Indonesian Military ini Polities 1945–1949.* Singapore, Institute of S.E. Studies. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan Indonesia.

Salim, Emil. 1976. *Masalah Pembangunan Ekonomi Indonesia.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

————. 1976. *Perencanaan Pembangunan dan Perataan Pendapatan.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Samawi. 1970. *25 Tahun Merdeka.* Jogjakarta: Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat.

Samsudin. Mayjen (Purn), 2004. *Mengapa G-30-S/PKI Gagal.* Jakarta: Yayasan Obor.

Santoso, Rochmani. 1965. *Bom Waktu Kolonialis Belanda Meledak di Makassar.* Djakarta: Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata.

Santoso, Rokhamani, *et al*. 1988. *Hari-Hari Menjelang Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.

Sastroamidjojo, Ali. 1974. *Tonggak-tonggak di Perjalananku.* Jakarta: PT Kinta.

Sastrodihardjo, Soedjito. 1968. *Perubahan Struktur Masjarakat di Djawa: Suatu Analisa.* Jogjakarta: Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada.

Schwarz, Adam. 1994. *A Nation in Waiting.* Sidney: Allen and Unwin.

Sekretariat Negara RI. 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan PKI.* Jakarta.

————. 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia.* Jakarta: Sekretariat Negara.

————. 1977 dan 1978. *30 Tahun Indonesia Merdeka.* Jakarta: Sekneg RI.

————. 1995. *50 Tahun Indonesia Merdeka.* Jakarta: Sekretariat Negara RI.

————. 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan PKI Tahun 1965.* Jakarta: Sekretariat Negara RI.

————. 1976. *Konperensi Tingkat ASEAN, Bali 23–25 Februari 1976.* Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Seksi Penerangan KOTI. November 1965. *Rangkaian dan Pernyataan-Pernyataan Resmi Di Sekitar Peristiwa Gerakan 30* September. Jakarta: Seksi Penerangan KOTI (Komando Operasi Tertinggi) Jakarta.

————. 1969. *Rangkaian Pidato dan Pernjataan Resmi Di sekitar Peristiwa G-30-S.* 1965. Djakarta: Koti.

Seldom W. Simon, *The Broken Tiangle: Peking, Djakarta and the PKI.* Baltimore: The Johns Hopkins Press.

Setjen MPR RI. 1978. *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1978.* Jakarta: Setjen MPR-RI.

Sewaka. *Tjorat-Tjaret dari djaman kedjaman.*

Sidik Kertapati. 1964. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945.* Djakarta: Jajasan Pembaruan.

Sihombing, O.D.P. 1962. *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Djepang.* Djakarta: Sinar Djaja.

Simatupang, T.B. 1960. *Laporan dari Banaran: Kisah Pengalaman Seorang Pradjurit Selama Perang Kemerdekaan.* Djakarta: Pembangunan.

Simorangkir, J.C.T., dkk. 1975. *Tentang dan sekitar UUD 1945.* Cet. ke-8. Jakarta: Jembatan.

Sjamsuddin, Nazaruddin (ed.) 1988. *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktik.* Jakarta: Rajawali Pers.

Sjahrir, Soetan. 1949. *Out of Exile* (terjemahan Charles Wolf Jr.). New York: The John Day Coy.

Soe Hok Gie. 1965. *Kisah Penumpasan RMS: Gerakan Operasi Militer IV.* Djakarta: Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata.

Soebadio Sastrosatomo. 1998. *Politik Doso Muko Rezim Orde Baru.* Jakarta: Dokumenter Politik Guntur 49.

Soebardjo, Ahmad. 1977. *Lahirnya Republik Indonesia.* Jakarta: PT Kinta.

Soediro. 1972. *Pengalaman Saja Sekitar 17 Agustus 1945.* Djakarta: Idayu.

Soegih Arto. 1989. *Sanul Daca.* Jakarta: PT Merdeka Sarana Usaha.

Soekarno, Presiden. 1957. *Menjelamatkan Indonesia.* Djakarta: Kementerian Penerangan.

Soeripto Putra Djaja. 1958. *Kegagalan Pemberontakan Husein Cs.* Surabaja.

Soetanto, Himawan. 1986. *Madiun dari Republik ke Republik.* Jakarta: Penerbit Kota Hasta Pusaka.

————. 2006. *Yogyakarta 19 Desember 1948, Jenderal Spoor versus Jenderal Soedirman.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Solichin Salam. 1970. *Sedjarah Partai Muslim Indonesia.* Jakarta: Lembaga Pendidikan Islam

————————. 1991. *Tahun Bung Karno dalam Kenangan.* Jakarta: Yayasan Pendidikan Soekarno.

Staf Umum I Komando Tentara dan Territorium I Bukit Barisan 1956. *Memorandum tentang Peristiwa Pemberontakan DI-TII di Atjeh.* Medan: Komando Tentara dan Territorium I Bukit Barisan.

State Secretariat. 1976. *ASEAN Summit Meeting Bali,* 23–25 Februrari 1976. Jakarta.

Subagio, I.N. 1970. *Sejarah Pers Indonesia 1945–1970.* Djakarta: Pradnja Paramita.

Subekti. 1966. *Hari-hari Terakhir Aidit.* Jogjakarta: BP Kedaulatan Rakjat.

Sudono Jusuf. 1971. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut.* Djakarta: Pusat Sedjarah ABRI.

Sumantri, Iwa Kusuma. tth. *Sedjarah Revolusi Indonesia,* Djilid I dan II. Djakarta: Grafica.

James, David H. 1952. *The Rise and Fall of the Japanese Empire.* London: George Allen and Unwin Ltd.

————. *Sedjarah Revolusi Indonesia Jilid I, II, III,* 1963, 1969. Djakarta.

Supardo, dkk. 1963. *Civics.* Djakarta: PN Balai Pustaka.

Suparno, Irdjen, Pol. 1971. *Sedjarah Perkembangan Kepolisian Dari Zaman Klassik-Modern.* Djakarta: Pusat Sedjarah ABRI.

Suripto Putra Djaja. 1962. *Dokumen-dokumen Irian Barat.* Surabaja: GRIP.

Susunan Kabinet Republik Indonesia 1945–1950. 1970. Djakarta: Pradnja Paramita.

Sutter, John O. 1962. *Indonesianisasi.* Ithaca: Cornell University Press.

Suwarno, P.J. 1999. *Romusa Daerah Istimewa Yogyakarta.* Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma.

Takdir Alisjahbana, Sutan. 1957. *Dari Perdjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia.* Djakarta: Pustaka Rakyat.

Taktik-taktik Front Persatuan Komunis dialam Demokrasi Terpimpin. Djakarta: KKK, 1967.

Tan Din Eng. 1975. *A Portrait of Malaysia and Singapore.* Singapore-Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Tan Goan Po. 1955. *Faktor-faktor strategis dalam kebijaksanaan ekonomi ditindjau dari sudut pembangunan.* Djakarta: Pembangunan.

Tan Malaka. 1948. *Dari Pendjara ke Pendjara, III.* Djakarta: Pustaka Murba.

Taufik, I. 1977. *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia.* Jakarta: PT Triyinto

Taylor, Alastair, M. 1960. *Indonesia Independence and the United Nations.* London: Stevens & Sons.

Team Redaksi Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 1967. *Sedjarah Singkat Universitas Indonesia.*

Teeuw, A. 1958. *Pokok dan Tokoh.* Djakarta: Pembangunan.

The Liang Gie. 1966. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia.* Djakarta: Gunung Agung.

Tianlean, Bakri, A.G. 2001. *Kansistensi TNI dalam Pasang Surut Republik.* Jakarta: Komite Penegak Keadilan.

Tien Jaar Japansch Gewroet in "Nederlandsch-Indie". 1942. Publicatie van de Regeering van Nederlansch Indie. Batavia: Bandadrukkerij.

Tim Institut Studi Arus Informasi. 1995. *Bayang-Bayang PKI.* Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

Tjondronegoro, Sudjarwo. 1967. *Rendez-Vous dengan Revolusi di Irian Barat.* Djakarta: Gunung Agung.

Trihadi. 1971. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Udara.* Djakarta: Pusat Sedjarah ABRI.

Umar, Junus. 1969. *Sedjarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia.* Djakarta: Bhratara.

UNHCR. 1990. *The Indo Chinese Exodus and the CPA* (Special Report) Geneva: UNHCR

Urusan Pendidikan SMP. Djawatan Pendidikan Umum Dep. P.D. dan K. 1964. *Rentjana Peladjaran dan Pendidikan SMP Gaja Baru.* Djakarta: Balai Pustaka.

van Kam, Ben. 1977. *Ambon Door de Euwen.*

Wasis, Widjiono. 2003. *Kesaksian Peristiwa Tanjung Priok.* Jakarta. Balai Pustaka.

Weerd, K.A. de. 1946. *The Japanese Occupation of the Netherlands Indies.* Tokyo: International Prosecution Section, Netherlands Divison.

Wehl, David. 1948. *The Birth of Indonesia.* London: George Allen & Unwin Ltd.

Wertheim, W.F. 1959. *Indonesian Society in Transition.* 's. Gravenhage: W. van Hoeve.

Wibisono, Christianto. 1970. *Aksi-2 Tritura: Kisah Sebuah Partnership 10 Djanuari–11 Maret 1966.* Djakarta: Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata.

Wilopo. 1978. *Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahannya.* Jakarta.

Wowor, B. 1979. *Sulawesi Utara Bergolak.* Jakarta.

Yamin, Muh. 1953. *Sapta Dharma,* Medan, Yamin, Muhammad, 1950. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia.* Djakarta: Djambatan.

————. 1955. *Pembentukan dan Pembubaran Uni.* Djakarta.

————. 1960. *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.* Djakarta: Djambatan.

————. 1959 dan 1971. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, I,* Djakarta: Jajasan Prapantja.

Yuke Ardhiati. 2005. *Bung Karno Sang Arsitek.* Depok: Komunitas Bambu.

Zon, Fadli. 2004. *Politik Hura Hara Mei 1998.* Jakarta: Institute for Policy Studies.

Zorab, A.A. 1954. *De Japanese Bezetting van Indonesia en haar Volkenrechtelijke Zijde.* Leiden: Universitarie Press.

II. Dokumen

Ali Wardhana, Monetary Problems of an Underdeveloped Economy, with special Reference to Indonesia, Ann Arbor, 1962 (disertasi).

Anspach, Ralp, The Problem of a Plural Economy and its effects on Indonesia's Economy, Ann Arbor, 1963 (disertasi).

Pusat Sejarah ABRI, Dinas Dokumentasi, Surat D.N. Aidit kepada PJM Presiden Sukarno, tanggal 6 Oktober 1965.

Pusat Sejarah ABRI, Dinas Dokumentasi, Laporan Situasi Kodam VII/ Diponegoro tanggal 18 Oktober 1965.

Pusat Sejarah ABRI, Dinas Dokumentasi,Central Comite Partai Komunis Indonesia, Instruksi Tetap tanggal 10 November 1965.

Pusat Sejarah ABRI, Dinas Dokumentasi, Laporan Penindjauan Tentang Gestapu/Dewan Revolusi di Djawa Tengah, 1965.

Berita Acara Persidangan Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa), Perkara: Untung Bin Sjamsuri, Pimpinan G-30-S, Dalam Peristiwa G-30-S, Jakarta, 1966.

Berita Acara Persidangan Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa), Perkara: Njono bin Sastroredjo alias Tugimin alias Rukma, anggota Dewan harian Polit Biro CC-PKI, Dalam Peristiwa G-30-S, Jakarta, 1966.

Berita Acara Persidangan Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa), Perkara: Kamarusaman bin Ahmad Mubaidah (dengan nama samaran Sjam, Djirnin, *Ali Sastra, Sjamsudin, Kasman*), Kepala Biro Chusus Central PKI, Dalam Peristiwa G-30-S, Jakarta, tahun 1967.

Berita Acara Persidangan Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa), Perkara: Sudisman, Anggota Dewan Harlan Polit Biro CC-PKI, Dalam Peristiwa G-30-S, Jakarta. tahun 1967.

Kanahele, George S., The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence. A thesis presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University for the Degree of Doctor of Philosophy, 1967 (disertasi).

Dinas Sejarah TNI-AD, Komunisme dan Kegiatannya di Indonesia, 1972 (stensil).

Dr. Moh. Hatta, Rasionalisasi TNI dalam tahun 1948. Ceramah pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 22 Maret 1972 (stensil).

Keterangan Presiden Tentang Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Kepala Pusat Sejarah ABRI Brigjen Nugroho Notosusanto pada tanggal 3 Maret 1976, Jakarta (trankripsi wawancara).

Dinas Sejarah TNI-AD, Pemberontakan G-30-S/PKI dan Penumpasannya, Bandung, 1978 (stensil).

Pusat Sejarah ABRI, Dinas Dokumentasi, Sitrap "Gerakan di Jakarta", RPKAD.

Sumardi, M., Lecture on the September 30 Movement, The Indonesian Communist Party and Elimination of the Communist in Indonesia. Jakarta: Deppen RI (stensil).

III. Artikel-Artikel

Abu Hanifah, "Pembangunan Negara dan Pendidikan Bangsa", *Kompas,* 21 November 1972.

Aidit, D.N."Manikebu bertugas lucuti sendjata rakjat", *Bintang Timur,* 31 Mei 1964.

————. "Hajo bersama-sama Bung Karno kita bawa kebudajaan jang berkepribadian Nasional, "*Zaman Baru,* Desember 1964.

Ajip Rosidi, "Sumbangan Angkatan Terbaru Satrawan Indonesia kepada perkembangan Kesusastraan Indonesia", dalam kumpulan tulisan Ajip Rosidi, *Kapankah Kesusastraan Indonesia Lahir?* Djakarta: Bratara, 1964.

Alisjahbana, T. "Sedjarah Bahasa Nasional", *Pembinaan Bahasa Indonesia,* No. 6, Thn. III, 1955.

Ali Wardhana, "The Indonesian Banking Systemc, *The Economy of Indonesia Selected Readings* (Ed. by Bruce Glass-burner), Hong Kong, 1971.

Alwi Dahlan, "Komunikasi Mass-media dan Dunia Ilmu", *Sinar Harapan, 5* Djanuari 1971.

"Anak-anak harus diperkenalkan dengan jenis dan lingkungan kerja", Bulletin Departemen Pendidikan & Kebudajaan, No. 107, Thn. III, Januari 1973.

Anderson, Ben, The problem of rise", *Indonesia II,* October, 1966.

Andjar Asmara, "Sandiwara dimasa datang", *Mimbar Indonesia,* No. 2, 23 November 1947.

Assegaff, D.H., "10 tahun TVRI", *Indonesia Raya,* 28 September 1972.

————. "Mass-media dan perkembangan bahasa, *Indonesia Raya,* Desember 1972.

Benda, Harry, J., "The Beginnings of the Japanese Occupation of Java", *Journal of Asian Studies, V,* Vol. 15. No. 4. (Augustus–1956).

Bruce Glassburner, Ed., "Economic Policy Making", *The Economy* of Indonesia, Selected *Readings,* Hong Kong, 1971.

"Dasar Pokok Rantjangan Ekonomi Indonesia", Mimbar Indonesia, No. 2, Thn. I, 22 November 1947.

David Jenkins, "The Four Phases of Inflation", *Far Eastern Economic Review,* Vol. 102, No. 48, December 1, 1978.

Davis, Ir. F.J.H., "Beknopt overzicht van de Hudigen toestand der suiker industrie in Nederlands Indie, *Economische Weekblad,* No. 1., Th. XII, 11 Februari 1946.

"Djatoehnja Soebang: Tentara Belanda menjerang doea kali tapi tak berhasil", *Asia Raja,* 28 Mei 1942.

Djoko Kentjono, "Penjempurnaan Edjaan Bahasa Indonesia", *Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia sebagai tjermin manusia Indonesia baru,* Djakarta, 1967.

Dungga, J.A., "Studie pendahuluan dan perkembangan musik Indonesia", *Almanak Seni 1957.*

Effendi, O. "Seni bangunan di Indonesia", *Gema Suasana,* No. 2, Februari 1948.

Gatot Mangkupradja, "The Peta and My Relations with the Japanese: A Correction of Sukarno's Autobiography", *Indonesia,* No. 5, April 1968.

"Gema Suara", *Kebudajaan Indonesia,* 6 Djuni 1950.

Graaf, H.J. de, "The Indonesian Declaration of Independence", *Bijdragen tot de Taal, Land en Volkenkunde van Nederlandsh Indie,* deel 113, 1959.

Gunawan Mohammad, "Kesenian dan Lingkungan", *Sinar Harapan,* 6 Nopember 1971.

Harahap, Frans, "In memorium Cornell Simandjuntak", *Sinar Harapan,* 13 September 1971.

Harimurti Kridaleksana, "Pembentukan Istilah llmiah dalam bahasa Indonesia", *Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia sebagai tjermin manusia Indonesia baru,* Djakarta, 1967.

Hasil Seminar Angkatan Darat Ke-II "Konsep Strategi dan Operasi Kabinet Ampera".

Herbert Feith, President Sukarno, the Army, and the Communist: The Triangle Changes Shape", *Asian Survey,* Vol. IV, No. 8, Agust 1964.

Hindley, Donald, "Foreign Aid to Indonesia and Its Political Implications", *Pacific Affairs,* Vol. XXXVI, No. 2, Summer 1963.

Hoed, B.H. "Pembakuan bahasa Indonesia", *Kompas,* 29 Juni 1972.

Hoesin Joesoef, "Detik Proklamasi di Atjeh", *Modal Revolusi '45,* No. 3, Kutaradja, 1960.

Ir. Djuanda, "Ekonomi Nasional", *Mimbar Indonesia,* No. 32, Thn. IV, 12 Agustus 1950.

Isa Anshary, Moll, Transmigrasi dan Pemanfaatan Natural dan Human Resources", *Arti dan Peranan Transmigrasi di Indonesia dalam Pembangunan dan Hankamnas,* Hasil Seminar Transmigrasi 1970, Djakarta, 1971.

Jusuf, Letjen TNI. M."Pengalaman saya dengan Supersemar, *Pedoman,* 17 Maret 1973.

"Kegiatan Cinematografi di Indonesia", *Gema Pemuda al Irsjad,* No. 6, Thn. III, September 1956.

"Kesimpulan Bidang Politik Dalam Negeri, Simposium Kebangkitan Semangat '66, yang diselenggarakan pada tanggal 6 Mei s/d 9 Mei 1966.

Koentjaraningrat, R.M., "The Javanese of South Central Java", dalam C.P. Murdock (Ed), *Social Structure of Southeast Asia,* Chicago, 1960.

"Konperensi Perguruan Tinggi", *Pembangunan,* No. 1, Tahun II, 1 April 1947.

Kroef, Justus van der, "Indonesian Communism and the Changing Balance of Power", *Pacific Affairs, Vol. XXXVII,* No. 4, Winter, 1964–1965.

Lebra, Joyce, "The Significanse of the Japanese Military Model for Southeast Asia", *Pacific Affairs,* Vol. 28, No. 1, Summer 1975.

Leirissa, R.Z., "Pemberontakan RMS", *Prisma,* No. 7, Tahun VII, Agustus 1978.

Loekman Hakim, Mr., "Keadaan Keuangan pada waktu sekarang dan djalan keluar untuk mengatasinya", *Menudju Ekonomi Marhaenis,* Jogjakarta.

"Masalah Modernisasi Senitari di Indonesia", *Berita Judha,* 3 Djuli 1972.

"Menjongsong seperempat abad bagian Senirupa ITB", *Sinar Harapan,* 19 Djuni 1972.

Muqri Sukotjo, "Laporan lengkap hasil seminar kesenian di Surakarta", *Abadi,* 16 Nopember 1972.

Nakamura, Mitsuo, "General Imamura and the Early Period of Japanese Occupation", *Indonesia,* No. 10, October 1970.

Nasution, A.H.,"Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952", *Sinar Harapan,* 9 November 1972.

Nasution, Abdul Haris, "Peristiwa 17 Oktober 1952", *Purnawirawan,* No. 12, Djanuari 1975.

Natsir, Moh. "Revolusi Indonesia", *Capita Selecta,* II.

Nugroho Notosusanto, "Instansi jang membentuk Tentara PETA", *Madjalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia,* II/2, 1964.

Nugroho Notosusanto, "Hari-hari Sesudah Proklamasi", *Intisari,* No. 13, Thn. II, Agustus 1964.

Nugroho Notosusanto, "Lahirnja UUD *'45, Intisari,* No. 37, Thn. III, Agustus 1966.

Nugroho Notosusanto, "Gagalnja G -30-*S*", *Intisari,* No. 39, Thn. IV, Oktober 1966.

Nugroho Notosusanto, "1 Oktober 1965", *Intisari,* No. 63, Thn. IV, Oktober 1968.

Nugroho Notosusanto, "The Revolt of PETA Battalion in Blitar", *Asian Studies,* VII, No. 1, April 1969.

Nugroho Notosusanto, Pasukan-pasukan Belanda dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, 1945–1949", *Intisari,* No. 65, Thn. VI, Juli 1969.

Nugroho Notosusanto, "Djepang Kontra Belanda di Djawa Barat dalam Perang Dunia II", *Intisari,* No. 78, Thn. VII, Djanuari 1970.

Nugroho Notosusanto, "Versi Djepang mengenai Pendudukan Djepang di Indonesia dan Perumusan Proklamasi", *Intisari,* No. 81, Thn. VII, April 1970.

Nugroho Notosusanto, "Naskah Proklamasi jang Otentik dan Rumusan Pantjasila jang Otentik", *Kompas,* 3-8-1970.

Nugroho Notosusanto, "The Dual Function of the Indone-sian Armed Forces", dalam Bernhard Grossmann (Ed), *Southeast*

Nugroho Notosusanto, *Asia in the Modern World,* 1972. "Indonesia: Armed Forces and Society into the 1980's" dalam Catherine M. Kelleher (Ed), *Political* Military Systems: comparative Perspective, 1974.

Nugroho Notosusanto, "The Historiography of the Indonesian Armed Forces: Its First Development", dalam International Commission for Military History, *Acta,* No. *2, 1975.*

Nugroho Notosusanto, "Mengamankan Pancasila Dasar Negara", *Persepsi,* No. 1, tahun I. 1979.

"Oeraian tentang kelas masjarakat", *Pewarta,* No. 1, Thn. I, 15 Djuni 1946.

Padmonagoro, Dr. R.M.T., "Seni Suara Indonesia dalam Revolusi", *Siaran dan Masjarakat Indonesia,* 1953.

"Perkembangan Senilukis di Indonesia", *Madjalah Kebudajaan Indonesia,* Thn. I, 1949.

"Pidato Sambutan Sekretaris Djenderal Kementerian Penerangan Harjoto Joedoatmodjo pada pembukaan seminar Pers di Tugu, Bogor, tanggal 24 Djuli 1955", *Warta dan Masa,* No. 1 s/d 6, 1955–1956.

Pranata SSP.,"Perang Kemerdekaan di Tegal", *Berita Buana,* 29 Desember 1976 s/d 21 Januari 1977.

Palmier, L.H."Aspects of Indonesia's Social Structure", *Pacific Affairs,* No. 28, 1955.

Prillwitz, Ir. "De onderneming-landbouw tijden de Japanse bezetting", *Economisch Weekblad,* No. 1., Thn. XII, Maret 1946.

Reid, Anthony, "The Japanese Occupation and Rival Indonesian Elites", *Journal*

of Asia Studies, XXXV, No. 1., November 1975.

"Rentjana Produksi Tiga Tahun (Plan Kasimo)", *Buku Menjongsong Konferensi Ekonomi antar Indonesia di Jogjakarta, 2–8* Desember *1949,* Semarang, 1949.

Rodenburgh, Mr. G. "De Suiker Industrie op Java Tijden de Japanse bezetting", *Econo-misch Weekblad,* No. 5, Thn. XII, 13 April 1946.

Rosady, M.,"Riwajat Pemberontakan PETA Blitar", *Madjalah Sedjarah Militer Angkatan Darat, SA* 14, *1964.*

Rosihan Anwar, "Apakah persaingan antara pers ibu kota dan pers daerah?", *Warta dan Masa,* No. 1–6, 1955–1956.

Sadono Dibjowirjo, "Tentara Pembela Tanah Air", *Almanak Asia Raja, 2604 (1944).*

Said Reksohadiprodjo, Moh., "Bagaimanakah melaksanakan P-4 secara tepatguna", *Gema Angkatan* '45, No. 32, 1978.

Simatupang, T.B., "Duapuluh Tahun Setelah Peristiwa 17 Oktober 1952", *Sinar Harapan, 16–21 Oktober 1972.*

Sjamaun Gaharu,"*Perebutan kekuasaan dari tangan Djepang", Modal Revolusi '45,* Kutaradja, 1966.

Soebagio Reksosoedarmo S.H.,"Perundang-undangan transmigrasi", *Arti dan Peranan Transmigrasi di Indonesia dalam Pembangunan dan Hankamnas.* Hasil seminar transmigrasi 1970, Djakarta 1971.

Soedarsono, Dr. "Pengiriman beras ke India", *Siasat,* No. 16, Thn. I, 9 April 1946.

Soedarsono, R.P.,"Revolusi Djogja dan sekitarnya", *Penelitian Sedjarah,* No. 3, Thn. I.

Soejono Rahardjo, "Kisah Singkat pemberontakan Peta Blitar", *Madjalah PHB,* Thn. V., No. 2/3, Februari–Maret 1959.

Soepardi, Musen, "Dibawah Penindasan Djepang: Perlawanan Kita dipelbagai Lapangan", *Merdeka,* Nomor Peringatan, Djakarta, 17 Agustus 1946.

Soewarno, "Persatuan Tenaga Ekonomi", Buku *Penjongsong Konferensi Ekonomi antar Indonesia di Jogjakarta, 2–8 Desember 1949,* Semarang,

1949.

"Sluimers, L., Nieuwe Orde op Java", *Bijdragen tot Tall. Land-en Volkenkunde van Nederlandsch Indie,* No. 124, 1968.

Sosrohadikoesoemo, Ir., "Kedoedoekan goela di Djawa", *Berita Perekonomian,* No. 1, Thn. I, 15 Mei 1946.

Sri Edi Swasono, Dr.,"Transmigrasi dalam perspektif pembangunan", *Arti dan Peranan Transmigrasi dalam Pembangunan dan Hankamnas.* Hasil Seminar Transmigrasi 1970, Djakarta, 1971.

Sri Edi Swasono, "Proteksi atau penyuluhan untuk pengusaha pribumi", *Indonesia Raya,* 28–29 Mei 1973.

Subangun, Emmanuel, "Rapat Seniman-seniman Sastra se Indonesia di TIM", *Kompas,* 9 Desember 1973.

Subroto, Prof. Dr., "Perkiraan Situasi Ekonomi' Dewasa ini", *Amanat/Pidato Pra-Saran Dalam Seminar AD ke-11/1966,* Cet. I, Djakarta, 1967.

Suharso, "Urbanisasi di Indonesia, salah satu sebuah analisa kejadian", *Prisma,* No. 7, Desember 1972.

Sullivan John H., "The press and politics in Indonesia", *Journalism Quaterly,* No. 44, 1967.

Sumarmadi, "Menindjau tjorak Siaran Radio", Radio dan Masjarakat Indonesia,1952.

Sumitro Djojohadikusumo, "Beberapa Pemikiran mengenai Kebijaksanaan di bidang Perdagangan", *Prisma,* No. 6, Oktober 1972.

Tahir, Brigjen. Achmad, "Soal Mandala dan Irian Barat", Karya Wira Djati, No. 9, 1963.

Tan Goan Tiong, Drs., "Beberapa akibat inflasi di Indonesia", *Mendjeladjah Tracee Baru.* Djakarta, 1966.

Thayeb, Mr. Moh. "Blokade Ekonomi", *Mimbar Indonesia,* No. 1., Thn. II, 3 Djanuari 1947.

"The resignation of Natsir Cabinet", *Indonesia Affairs,* Vol. I., No. 3, March 1951.

Trisno Soemardjo, "Kedudukan Senirupa kita", *Almanak Seni 1957,* Djakarta, 1958.

Usmar Ismail, "Sandiwara dan Masjarakat", *Indonesia,* Thn. X, 1949.

Widjojo Nitisastro, "Rentjana Pembangunan Lima Tahun", *Administrasi Negara,* No. 3, Thn. X, Nopember 1970.

IV. Majalah-Majalah

Almanak Pers Indonesia, Djakarta, 1954 s.d. 1956 dan 1958.
Almanak Seni, Djakarta, 1957.
Bahtera, Bandjarmasin, 1947.
Berita Perekonomian, Djakarta, 1945–1946.
Berita Repoeblik Indonesia, Djakarta, 1945–1946.
Bintang Timur, Djakarta, 1964.
Bulletin Departemen P dan K, Djakarta, 1973.
Djawa Baroe, Jawa Shinbunkai, Djakarta, 1943–1945.
Gema Pemuda Al Irsjad, Djakarta, 1950.
Gema Angkatan '45, Jakarta, 1978.
Indonesia, Madjalah Kebudajaan, Djakarta, 1949.
Indonesia Merdeka, Djakarta, 1945.
Indonesian Affairs, Djakarta, 1947–1950.
Indonesia Raja, Djakarta, 1959.
Kan Pō (Berita Pemerintah), Djakarta, 1942–1945.
Makmoer, Madjalah Ekonomi, Djakarta, 1945–1946.
Mimbar Indonesia, Djakarta, 1949–1950.
Pandji Poestaka, Djakarta, 1942–1945.
Pemberitaan Angkatan Bersendjata, Djakarta, 1966.
Persepsi, Jakarta, 1979.
Pradjoerit, Djakarta, 1944–1945.
Prisma, Jakarta, 1972–1973.
Resimen Tentara Perdjuangan, Garut, 1947.
Siasat, Warta Sepekan, Djakarta, 1947–1950.
Siaran dan Masjarakat Indonesia, Jogjakarta, 1950.
Soeara MIAI, Djakarta, 1942–1943.
Tempo, Jakarta, 1975.
Tentara Keamanan Rakjat, Jogjakarta, 1946–1947.
Voice of Free Indonesia, HIPI, Djakarta, 1945–1946.
Warta dan Masa, Djakarta, 1955–1956.
World Communication, Djakarta, 1951.

V. Surat Kabar

Abadi, Djakarta, 1960 dan 1972.

Adil, 27 Mei 1998

Angkatan Bersendjata, 1960 dan 1972.

Angkatan Bersenjata, 24 Mei 1998

Angkatan Bersenjata, 25 Mei 1996

Angkatan Bersenjata, 30 Juli 1996

Antara, Djakarta, Jogjakarta, 1946–1950; 1953–1957; 1973 dan 1979. *Asia Raja,* Djakarta, 1942–1945.

Berita Buana, Jakarta, 1974–1975.

Berita Yudha, Djakarta, 1964–1966; 1972–1975.

Evening News, Djakarta, 1945.

Harian Rakjat, Djakarta, 1959.

Independent, Djakarta, 1945.

Indonesia Raja, Djakarta, 1959.

Kedaulatan Rakjat, Jogjakarta, 1945–1948.

Keng Po, Djakarta, 1953.

Kompas, Jakarta, 1973–1975 dan 1980.

Kompas, 21 Mei 1998

Kompas, 22 Juni 1996

Kompas, 26 Juni 1996

Kompas, 28 Juni 1996

Kompas, 3 Juli 1996

Lasjkar, Surakarta, 1945–1946.

Merdeka, Djakarta, 1948–1949; 1962–1965; 1971–1972.

Min Pao, Jogjakarta, 1946–1947.

Nasional, Jojgakarta, 1945–1948.

Nusantara, Djakarta, 1945–1948.

Pedoman, Djakarta, 1957.

Pelita Rakjat, Soerabaja, 1948.

Pemandangan, Djakarta, 1942.

Pembangoen, Djakarta, 1942.

Pewarta, Djakarta, 1946.

Pikiran Rakyat, 22 Mei 1998
Republika, 24 Mei 1998
Semangat Merdeka, Djakarta, 1946.
Soeara Merdeka, Kutaradja (Banda Aceh), 1945.
Soeloeh Merdeka, Medan, 1946–1948.
Suara Karya, Jakarta, 1973–1974.
Suluh Indonesia, Djakarta, 1959. *Tjahaja,* Bandung, 1945.
Warta Bhakti, Djakarta, 1964.

VI. Wawancara

Adam Malik, Menteri Luar Negeri, Jakarta
Ahmad Soebardjo, Mr. bekas Menteri, Jakarta
Arifin Abdurrachman, Prof. Dr, Guru Besar, Jakarta
Didi Kartasasmita, Mayor Jenderal (Pur), Jakarta
Djamat Ali, Wartawan, Jakarta
Djohar Noer, Swasta, Jakarta
Kasimo, I.J. Ketua Partai, Jakarta
Latief Hendraningrat, Brig. Jend. (Pur), Jakarta
Mahmud, Pengusaha, Jakarta, Marzuki Yatim, bekas Menteri, Jakarta
Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden, Jakarta
Samidjo Mangoenwirono, Kolonel (Pur), Jakarta
Singgih, Drs., Swasta, Jakarta
Soeharto, Jenderal, Presiden RI, Jakarta
Soengkono, Mayor Jenderal (Pur), Jakarta
Soetjipto Joedodihardjo, Jenderal (Pur), Jakarta
Soewardi, M.R.A, pensiunan pegawai negeri, Jakarta Subchan Zaini Erfan, mantan Wakil Ketua MPRS, Jakarta
Sudiro, Pensiunan Gubernur, Jakarta
Suhud, S, Swasta, Jakarta

Indeks

A

A.A. Navis 399, 400, 401

Abrar Yusra 687

ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) 477, 478, 480, 544, 547, 552, 591, 592, 594, 595, 596, 599, 600, 605, 606, 609, 649, 650, 658, 660, 661, 672, 700

ABRI Masuk Desa (AMD) 599, 600

A. Hakim 313

A. Halim, K.H. 42

A. Latif 482, 490

A. Malik 305

A. Syaicu, K.H. 609

Abas, Kyai 119

ABDACOM (*American British Dutch Australian Command*) 4

Abdoellah, Basuki 106

Abdoerachman, R.A., Ny. 89

Abdul Abbas, Mr. 26, 27

Abdulgani, Roeslan 132, 189, 193, 551, 654

Abdul Hadi W.M. 687, 688, 689, 692, 696, 700

Abdul Halim, dr. 307

Abdul Hamid Ono, H. 110

Abdullah Arung Ponceng, Andi 120

Abdul Djalil, Teungku 111, 112

Abdul Madjid, Mr. 221, 242

Abdul Muthalib Moro 317

Abdul Rahman, Teungku 460, 461, 463

Abdul Rasyid, Dr. 22

Abdul Salam 508

Abe, Kapten 175

Abu Hanifah 385

academic achievement 96

Aceh Simbun 67

Achdiat Karta Mihardja 399, 402

Achmadi, Herry 609

Achmad Sjaichu, K.H. 551, 552

Achmad Tahir 197, 443

Achmad Husein 360, 369, 370, 374, 375

Achmadi, Mayjen 548

Acoma (Angkatan Comunis Muda) 212

ACW (*Artillerie Constructie Winkel*) 174

Adams, Cindy 28

Adam Malik 551, 611, 613, 620

ADB (*Asian Development Bank*) 573

Adenauer, Kanselir 452

Adikusuma, Baud A.D. 664

Adinegoro 26

aede memoire 244, 245, 246

Affandi 508

AFNEI (*Allied Forces Netherlands East Indie*) 185, 192, 274

Agresi Militer I 220, 254, 255, 289

Agresi Militer II 242, 257, 258, 261, 282, 299, 408

Agus Salim, H. 104, 128, 129, 259
Ahmad, Thaharudin 277
Ahmad Tohari 688
Ahmad Yani 488
Ahmad Fuad 638
Aidit, D.N. 49, 381, 425, 426, 477, 478, 479, 481, 490, 494, 495, 506
Ajip Rosidi 697, 700
Akabri (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) 591
Akigama 34
A.K. Gani, dr. 59, 165, 178, 211, 276, 279, 280, 281
Aksam, Haji 119
Alatas, Ali 623, 624
Al Hamidi, Oesmany 644
Albright, Madeleine 672
Alimin 240
Ali Murtopo 629
Ali Sadikin 609, 701, 704, 705
Ali Said, S.H. 652
Ali Sastroamidjojo 314, 321, 324, 329, 343, 369, 372, 378, 380
All England 664
Allingham, Miss 199
Almaida Santos, Antonio de 629
Amertiwi Saleh 654
Amien Rais 667, 672
Amir Biki 642
Amir Fatah 362
Amir Hamzah 396
Amir Machmud 636
Amir Musafir 645
Amrullah, Abdul Karim 110
Anak Agung Gde Agung 301
Anderson, Mayor 199
Andi Azis 304, 306, 349, 352
Angkatan '45 393, 394, 405, 678, 680, 691
Angkatan 66 676, 677, 679, 686
Angkatan 70 689
AMI (Angkatan Moeda Indonesia) 133, 177
Angkatan Muda 132
Angkatan Pelukis Muda 294
Angkatan Perang Federal 244
Angkatan Perang Jepang 121
Angkatan Perang RIS 268
Angkatan Perang Sekutu 121
antifasisme 33
Anwar Makarim, Nono 677, 701, 703
Anwar, Rosihan 62
APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 569, 588
API (Angkatan Pemuda Indonesia) 178, 180
Apodeti (*Associacao Populer Democratica Timorense*) 628, 629, 632, 633, 634
APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) 303, 304, 306, 345, 346, 347, 348, 349
APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) 269, 302, 306, 346, 349, 352, 354, 356, 357, 358
ARA (*Armed Revolution Action*) 627
Archibald Clark Kerr, Sir 203, 205
Arief Rachman Hakim 547
Arief Budiman 677, 696
Arifin, B. 108
Arifin C. Noer 678, 687, 697
Arifin, Zainul 40

Ario Suriadi, Pangeran 17
Armada Selatan Kedua 14
Armansjah 138
Arswendo Atmowiloto 687
A.S. Bey 409
ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) 583, 584, 614–626
ASIAN Games I 390
ASIAN Games III 504
ASIAN Games IV 504, 532
ASRI (Angkatan Seni Rupa Indonesia) 295, 520
Asia Raja 62, 99, 100, 101
Asia Raya 64
Asia Timur Raya 134
Asmara Hadi 49, 133, 134
Asrul Sani 704
Assaat, Mr. 164, 308, 322
Assegaff, D.H. 626
Ateng, dr. 262
Attamini, Hamid S. 652
Aulia, dr. 104
Ayatrohedi 401
Azahari, Kolonel 492
Azis Saleh, dr. 374, 609

B

Badan Penyelidik 122, 123, 124, 129
BAF (Bagian Film Indonesia) 108
Bajak (Barisan Anti-Jawa Komunis) 367
Bakaruddin, Sidi 369, 371
Balai Pustaka 291, 397, 399, 400, 401
Bambang Supeno 339
Bambang Utojo 343
Bank Internatio 192
Bank Negara Indonesia 275
BBI (Barisan Buruh Indonesia) 180
BE (Bukti Ekspor) 574
BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*) 262, 263, 267, 269
BPRI (Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia) 180
Badan Pekerja KNIP 163, 164, 213, 230, 234, 274, 283
baitul mal 38, 40
Bakorstanas (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional) 604
Bandaharo, H.R. 395
Banzai 125
Bara (Barisan Rakyat Indonesia) 180
Barisan Merah 198
Basino, Titis 686
Basuki Rachmat 549, 550, 552
Basuki Resobowo 508
Batavia 8, 20, 21
Batavia Bank 79
Baperi (Badan Pertahanan Negeri) 58
Baperpi (Badan Perantaraan Pelajar-Pelajar Indonesia) 34
Barisan Pelopor 48, 49, 150
Barisan Pelopor Istimewa 131
Barisan Soekarno 545
Basrul Jamal 44
Baso Ahmad, Andi 120
Batubara, Cosmas 543, 590
Beikoku Seimegyo Kumiai 82
Ben Bella, Presiden 458
Bendera Pustaka 154

Berita Gunseikanbu 102
Bintang Surabaja 108
Biro Khusus PKI 477, 478, 482, 483
Biro Perjuangan 228, 229, 232
B.J. Habibie 670, 672
BKF (*Bandoengsche Kinine Fabriek*) 77
BKR 165, 174, 178, 180
Blom, N.S. 264
boat people (manusia perahu) 625
Bob Hawke 624
Boeai Engokai 36
Boedisantosa, Asman 670
Bogodan 40
BOMPA (Badan Oentoek Membantu Pertahanan Asia) 58
Borneo Konan Hōkōkudan 48
Bosch, Defensielijn van den 149
BPAR (Badan Pemuda Asia Raya) 43, 44
BPPI (Balai Penerangan Pemuda Indonesia) 199
BPPGN (Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara) 279
BPS (Badan Pendukung Soekarno) 428, 502, 503
BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 27, 159, 161, 162
Bratanata, Slamet 609
BRI (Bank Rakyat Indonesia) 580
Brigade Sakaguchi 7
Brigadi U 201
BTC (*Banking and Trading Corporation*) 276, 282
BTI (Barisan Tani Indonesia) 232, 429, 473, 476
bu 22
budan 114
budanchō 52, 53, 115
Budaja Djaya 700, 703
Budiardjo, Miriam 652
Budi Darma 689
Buitenzorg (Bogor) 8
Bukanfu 22
Bung Tomo 194
bunkakai 23
bunken 21
Bunker, Ellsworth 439
Buntaran Martoatmodjo, dr. 23, 30, 48, 82, 138, 162
bushido 43
Burono 508
Bur Rasuanto 678, 679, 697
Buruh Marhaen 476
Bustomi, Letnan Kolonel 221
BUUD (Badan Usaha Unit Desa) 580

C

Camdessus, Michelle 666
Cateano, Marcel 627
CCPIT (*China Council for the Promotion of International Trade*) 624, 625
CC-PKI (Central Comite Partai Komunis Indonesia) 381
CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) 503
Chairil Anwar 293, 392, 691
Chairul Saleh 130, 134, 138, 158, 181, 207, 548, 549, 551
Chiang Kai Shek 607
CIA (Central Intelligency Agency) 502, 545

Cikada 71, 72, 73, 74
chūdan 113, 114
chūdanchō 52, 113
Chūō Sangi In 23, 24, 25, 26, 27, 37, 40, 48, 61, 65, 80, 82, 122, 125, 134
Christison, Sir Philips 185, 192
Clinton, Bill 666
Chūō Seinen Kunrensyo 46
cocor bebek 72
Cochran, Merle 245, 247, 248, 263, 264, 265, 310
Conefo (*Conference of the New Emerging Forces*) 432, 459, 472
Consentrasi Mahasiswa Yogya (CMY) 476
Critchley, Thomas 244, 267
CTN (Corps Tjadangan Nasional) 302
cuto shihan gakko 92

D

da Costa, J. Hermenegildo 635
da Cruz, Xavier Lopez 634
Daan Mogot 51, 55, 175
Daan Jahja, Letnan Kolonel 257
Dahlan Abdullah, H. 17, 20
Dahlan, Letnan Kolonel 241
Dahlan Djambek, Kolonel 200, 369, 370, 375
daidan 54, 55, 59, 113, 114, 115
daidanchō 53, 55, 114
Daidanchō Daidan 131
Dai Nippon 38
Dai Nippon Seito Kaisha 78
Dami N. Toda 688
Danarto 687, 688, 697
Dana Revolusi 436
Danuatmodjo, Winarno 371
Dardanella 109
Darmanto Jt. 688
Daroesman, Sorjono 277
Darso 492
Darusman, Marzuki 652
Darwis, Satibi 55
Daryanto, Nicolaus 654
Dato Abdul Razak bin Dato Husein 391
Datuk Rangkayo Basa, Kaharudin 379
Daud Beureueh 314, 363, 364, 365
Daja Oepaja 99
defensif 44
De Javasche Bank 79, 272, 274, 333, 335
Dekrit Presiden 316, 419, 446
De Locomotief 99
Demokrasi Terpimpin 419, 433, 434, 572, 612
Demokrasi Pembangunan 564
De Ruyter 5
Dewan Banteng 368, 369, 370, 371, 372
Dewan Gajah 369, 370, 372
Dewan Garuda 370, 371
Dewan Jenderal 482, 484
Dewan Keamanan PBB 597, 634
Dewantara, Ki Hadjar 24, 31, 32, 34, 136, 283, 289
Dewan Mahasiswa 640, 641
Dewan Revolusi 484, 485, 492
Dewanto 446
Dharsono, H.R. 608, 617, 621
DI (Darul Islam) 360, 361, 362, 367
DI/TII 303, 314, 360, 361

Diah, B.M. 101, 133, 134, 144, 149, 343, 677
Diapari, P.D., Ir. 304
Divide et impera 268
Divisi ke-2 7
Divisi ke-38 7
Divisi ke-48 7
Djailani, Abdul Qodir 644
Djaja Baroe 101
Djajadiningrat, Hoesein Dr. 104, 129
Djajasoeminta, Agus 106
Djamal Ali 133, 638
Djamaludin, Husni 686
Djamaluddin Malik 298
Djamil Djambek, Syekh 59
Djatikusumo, G.P.H. 608
Djiwa Mukti 294
Djojohadikusumo, Margono 275
Djojohadikusumo, Sumitro 269, 275, 276, 282, 308, 332
Djojopratedjo 477
Djojopuspito, Suwarsih 401
Djojosukarto, Sidik 311
Djohan Syahruzah 132
Djohar Nur 49, 138
Djokosujono 230
Djuanda, Ir. 221, 263, 269, 301, 308, 335, 337, 372, 374, 380, 391, 419, 423
Djunaidi, Mahbud 401
Djumhana, Mr. 262
DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) 685, 700, 704
DKM (Dewan Kehormatan Militer) 651
Do Amaral, Xavier 632
Dodong Djiwapradja 401
Dōkuritsu Junbi Cōsakai 121, 124, 127, 128, 136, 160
Dōkuritsu Junbi Inkai 135
Doko, Sutan 92
Domei 157
Doorman, Karel 5, 6
Dorojatun Kuntjono Jakti 640, 642
Dos Reis Araujo, Arnaldo 629, 634, 636
DPA (Dewan Pertimbangan Agung) 420, 562, 633
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 567, 606, 661
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) 606
DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) 421, 422, 423, 554, 557, 559, 606
DPV (*Deli Planters Vereeniging*) 313
Drost, Kolonel 221
Drees, Willem Dr. 261, 269
Du Bois 244, 245
Dulles, Djon Foster 325
Dwifungsi ABRI 591, 605, 608, 609
Dwikora (Dwi Komondo Rakyat) 464, 480, 545
Dwitunggal 373
D. Zawawi Imron 687, 688, 691, 692

E

E.C. Mansergh, Mayor Jenderal 186, 192, 193
Edhie Soenarso 521
Eddy D. Iskandar 693
Edi Sedyawati 525
Efendi 55

Ejaan Melindo 391, 392
Electra 5
Ejaan Republik, Ejaan Suwandi 292
Ejaan van Ophuyzen 274
El Hakim (Abu Hanifah, Dr.) 108, 109
Elyas 543
Emha Ainun Nadjib 688, 691
Emiria Soenassa, Ny. 106
Emmy Hafidz 653
Empat Serangkai 31, 32, 34, 35, 44
Engels, Mayor Jenderal 346
Eny Karim 371
EYD (ejaan yang disempurnakan) 293
Exeter 5

F

Fahmi Idris 642
Fajrin, Verawati 664
Fatchurrachman, K.H. 42
Fatmawati Soekarno, Ny. 151, 152, 154
Fatwa, A.M. 644
Farid Ma'ruf, K.H. 40
Fashinori Shoji, Kolonel 7, 8, 9
FAO 623
FD (Fraksi Demokrat) 311
FDR (Front Demokrasi Rakyat) 232, 233, 234
Fernando Alves Aldeia 630
Ferry Soneville 664
Field Security Section 188
Fosko (Forum Studi dan Komunikasi) Purnayuda 608, 609
Fraksi ABRI 663
Frans Seda 551
Fretilin (*Frente Revolutionaria de Timor Leste Independente*) 628-634
Front Pancasila 545, 547, 548, 549, 550, 552
Fuad Hasan 604, 696
Fujinkai 36, 48, 68, 89
Futabashi 74
Fuku Kaicō 121
Funakoshi, Chicin 664

G

G-30-S/PKI 54, 57, 434, 481, 484, 485, 492-496, 543, 544, 546, 558, 593, 601, 603, 612, 613, 624, 674, 675
Garuda Nusantara, Abdul Hakim 653, 654
Gapi (Gabungan Politik Indonesia) 29
Gakutotai 50
Gamal Abdel Nasser 457
Ganefo (*Games of the New Emerging Forces*) 432
Gapoer, A.R. 518
Gatot Subroto, Kolonel 228, 239, 251, 321, 366
Gatot Mangkupraja 28,52
GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) 575
GBN (Gerakan Banteng Negara) 362, 363
Gelora Bung Karno 533, 534, 535, 538
Generasi Gelanggang 405
Gerakan Angkatan Baroe Indonesia 133
Gerakan Benteng 332
Gerakan Nonblok 450
Gerakan Rakjat Baroe 134
Gerakan Tiga A 31, 42, 44
Gerindo 59
Gerson Poyk 401, 686

Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) 474, 481
Gintings, Djamin 370
Giyogon 162
Giyūgun 26, 55, 58, 59, 60
Giyūgun Konsetbu Honbu 58
GLORA (Gerakan Latihan Olahraga Organisasi Rakyat) 44
GMNI 54
Goenawan Mohamad 686, 691, 692, 696, 697
Golkar (Golangan Karya) 564, 605, 657, 658, 559, 660, 661, 663, 666
Gondokusumo, Djody 317
Goncalves, Guilherme Maria 635, 636
Gonggong, Anhar 639
GPI (Gabungan Pelukis Indonesia) 294
Graham, Frank B. Dr. 216, 220
GRF (*Government Republic of Philipina*) 599
Groom, Wing Commander 189
grontol 112
GRR (Gerakan Rakyat Revolusioner) 237, 239
GSNI (Gerakan Siswa Nasional Indonesia) 547
G to G (*Government to Government*) 434
Gultom, P. 133
gun 19, 21, 34, 45
gunchō 19, 22
gunsei 21, 30, 31
gunseibu 15
Gunseikan 15, 20, 23, 35, 38, 40, 45, 52, 76, 77, 78, 81, 100
Gunseikanbu 15, 21, 134
Gunshireikan 15

H

H. Shaw 189
Hadikosoemo, A.A. Maramis 124
Hadinoto, Sujono 267, 269, 310
Hadisubeno 476
Hakko Ichui 91, 135
Hamengku Buwono IX, Sri Sultan 165, 268, 270, 272, 301, 308, 339, 349, 374, 375, 551
Hamid Jabbar 696
Hamid, T.A. 60
Hamidhan, A.A. 160
Hanafi, A.M. 548
Harada, Kumakichi 52
Harahap, Parada 19, 129
Harahap, Abdullah 693
Harahap, Burhanuddin 316, 317, 321, 324, 346
Harbani, Suharnako 591
Hardjadi 508
Hardjosoediro, P.C. 551
Hardjowardojo, Soehardjo 257
Harmoko 671
Harsojo, Brigjen TNI 621
Hart, Laksamana Thomas C. 4
Hartawardojo, Harijadi S. 401
Hartojo Andangdjaja 401, 686
Hartoyo, S. Budiman 687
Harun, Ny. 89
Haruye 71
Haryono, Anwar 609
Hassan, T.M. 158, 260, 343
Hasymi 180

Hatta, Mohammad, Drs. 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 82, 86, 124, 136, 137, 138, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 164, 189, 240, 246, 262, 265, 268, 269, 281, 301, 373, 374, 379
Hasjim Asj'ari, K.H. 40, 41, 187
Hawthorn, D.C. 186, 187, 188, 189
rōmusha 26, 36, 50, 51, 67, 80, 162, 178
Hendradiningrat, Latief 150
Hendropriyono 648
Henk Ngantung 408
Herling Laoh, Ir. 301
Herremans 223
Hidayat 552
Hilman Djajaningrat, R. Adipati Aria 17
Hindrajat 638
Hinomaru 18
Hirōshima 137
Hirohito, Kaisar 18
HIS Baloeweg 95
HIS Gastenweg 95
HIS Djagamonjet 95
Hizbullah 49, 180, 198, 200, 360, 362
H.M. Chambers, Mayor Jenderal 186
HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia)
HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia) 54, 543
Hoegeng, Jenderal 608, 609
Hoerip, Satyagraha 678, 679, 686, 696
Hoesein Djajadiningrat, Prof. Dr. 22
Hōkōkai 26, 36, 49
hōkō seishin 35
Holand Iskandar, Kolonel 195
Horie, Kolonel 38, 39, 110
Horison 677, 685, 692, 696, 697, 698, 699, 700
Hoso Kankikyoku 102, 110
Hōsōkyōku 132, 300
Houari Boumedienne, Kolonel 458
Houston 5, 8, 694
Hotel Yamato 172, 173
Hubertus Suyono 343
Huiyer, Kolonel 188
Hutagalung, M. Poppy 401, 686
Hutchinson, Brigadier 199
Hutapea, Butu 654

I

Ian-jo 69, 71, 72, 74
Ibnu Sutowo 551
Ibrahim Adji 257
Ibrahim Sattah 688
IBRD (*International Bank for Reconstruction an Development*) 573
Iciki 104
ICCS (*International Commision for Control and Supervision*) 621, 622
IDA (*International Development Agency*) 573
Idham Chalid, K.H. 551
Idrus 394
IGGI (*Inter-Governmental Group for Indonesia*) 573, 640
Ika Daigaku 133
Ike Soepomo 694
Ikeda, Perdana Menteri 464
Ikranagara 687, 696
Ikrar Lamteh 365

Imam Waluyo 642
Imamura, Letnan Jenderal Hitoshi 8, 9, 11, 14, 15, 38
IMF (*International Monetery Fund*) 573, 665, 666
Imron Rosyadi 422
Inada, Abdul Miniam 40
Indoff (*Indonesia Office*) 276, 277
Inoe Perbatasari 108
INS Kayutanam 26
INFID (*International Forum on Indonesian Development*) 668
IPKI 379, 422, 548, 564
IPPI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) 76, 563
Isa, dr. 305
ISI (Ikatan Sport Indonesia) 34
Iskaq Tjokroadisuryo, Mr. 422
Ismail, Taufiq 401, 677, 678, 679, 686, 688, 696, 697, 700
Ismail Suny, Prof. Dr. 609
Ismail, Usmar 108
Istitut Cinedrama 297
Itakagi, Jenderal 122
ITB (Institut Teknologi Bandung) 517, 525, 527
Izi Hōkōkai 36

J

Jacob, A. 264
Jacob Oetama 604, 696
Jakarta Shūcōkai 89
Jakarta Sy¤ 88
Jakarta Syuco 108
Jakarta Tōkubetsu Syi 87, 88, 89
Jakarta Tōkubetsu Syi Funjinkai 89
Jakarta Tōkubetsu Syi Insyōkuten Kumiai 87
Jakarta Tōkubetsu Syi Suisan Kumiai 88
Jalan Baru Muso 239, 240
Jaling 119
James Pandi 520
Jassin, H.B. 392, 394, 506, 676, 678, 680, 681, 684, 685, 686
Java Bode 101
Jawa Boei Giy¤g¤n Kanbu Kyokutai 53
Jawa Boei Giy¤g¤n Kanbu Renseitai 53
Jawa Eiga Haikusha 108
Jawa Eiga Kasha 108
Jawa Hanbai Rengo Kumiai 78
Jawa Hōkōkai 35, 36, 37, 49, 50, 62, 80, 84, 89, 95, 134, 165
Jawa Shinbun 99, 100
Jawa Shinbunkai 99, 100, 101, 102
Jayengprawiro, Ali 277
Jibakutai 49
JKA (*Japan Karate Assosiation*) 664
J. Kumaat, Arie 627
Joes, D. 508
Johannes, Prof. Ir. 563
Johnson 463
Josyi Seinendan 45
Joyoboyo 27, 53
Judil Hery 640
Judodihardjo, Sutjipto 346
Jugun Ianfu 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75
Juliana, Ratu 269
Jupiter 5
Jusuf Wibisono 310, 335
Jusuf Muda Dalam 435, 551

J. Rumambi, Domine 552
Jusupadi Danudiningrat, Ny. 34

K

Kabinet Alisastroamidjojo I 307, 317, 324, 327, 328, 336, 342
Kabinet Alisastroamidjojo II 316, 322, 328, 372, 380
Kabinet Ampera 565, 572, 612
Kabinet Burhanuddin Harahap 316, 317, 321
Kabinet Djuanda 316, 373
Kabinet Dwikora 484
Kabinet Gotong Royong 426
Kabinet Hatta II 363
Kabinet Karya 373, 419
Kabinet Kerja 419
Kabinet Nasakom 421
Kabinet Natsir 307, 323, 338
Kabinet Pembangunan 572
Kabinet Reformasi 671
Kabinet RIS 323
Kabinet 100 Menteri (Kabinet Gestapu) 546
Kabinet Sukiman 307, 310, 323, 326
Kabinet Tojo 121
Kabinet Wilopo 307, 312, 323
Kadin (Kamar Dagang Industri) 624
Kadir, Abdul 162
Kahar Muzakar 314, 365, 366, 367
Kaichō 121
Kaigun 37, 158
Kaikayō Seinen Taishintai 49
Kakyō Sokai 89
Kamaruzzaman, Sjam 482
KGSS (Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan) 365, 366
Khmer Merah Pol Pot 623
Komisi Istilah 292
Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia 292
KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) 54, 543, 546, 547, 552, 676
KAPPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia) 547
Kamikaze 49
Kana Ginko 79
Kana Jawa Shinbun 103
Kanachele, George 28
Kan Pō 15
Kartadiredja (Patih Jatinegara) 92
Kartakusuma 401
Kartasasmita, Didi 179, 202, 221
Kartawiguna, Pandu 134
Kartohadikoesoemo, Mas Soetardjo 22, 124
Kartosudarno 40
Kartosuwiryo, Sekarmadji Maridjan 314, 360, 363, 367
Karyanto 664
Katakana 103
Katamso, Kolonel 491, 492
Kaseger, J. 177
Katjasungkana, Nursyahbani 653
Karel Satsuit Tubun 484
KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) 553, 676
Kasimo, I.J. 256, 280, 563
Kasman, Mr. 159, 160

Katamsi, R.J. 520
Katoppo, E. 390
Kawilarang, A.E. 257, 3350, 351, 352, 353, 359, 366
Kayo Keibotai 46
Kedaulatan Rakjat 101
Keibodan 45, 46, 48, 67, 89
Keisatsubu 20
Keizaibu 20
Kemal Idris, A. 51, 55
ken 19, 34, 119
kenchō 19, 40
kendo 44
Keimin Bunka Shidosho 36, 106, 107, 108, 109
Kennedy, Presiden 452
Kennedy, Agung Robert 463
Kesaibu 21
Keisatsubu 20, 21
Keizaibuchō 80
Kenkoku Gakuin 96
Kenpetai 107, 108,111, 112
Kertapati, Sidik 49
Kertapati, Inu 49
Khmer Merah 598
Kido Butai 174
Kido, Mayor 174
Kie Yoek Moi 89
Kigyo Saibaien 77
Kimigayo 18, 92, 133
Kimmel, Laksamana, H.E. 1
Kirdjomuljo 396, 401
kinrohosyi 92
KKPI (Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia) 503, 504, 505, 508
KKSR (Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner) 508
KMB (Konferensi Meja Bundar) 164, 262, 264, 269, 301, 302, 304, 334, 373, 436, 437
KNI (Komite Nasional Indonesia) 164, 165, 166
KNI Daerah 164, 174
KNIL (Tentara Hindia Belanda) 3, 8, 9, 179, 187, 245, 246, 268, 303, 354, 357, 358
KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) 163, 164, 203, 206, 212, 230, 269, 301
kōchi 23, 64, 61, 62
Kodamar Riau 626
Koenarto 626
Koes Bersaudara 503
Koets, Dr. 262
Kogam (Komando Ganyang Malaysia) 547
KOI (Komite Olympiade Internasional (COI=*International Olympic Commitee*) 389
Kohl, Helmut 666
Kolone Sakaguchi 7
Komisi Empat 563, 564
Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) 652, 653, 655
KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) 664, 665
Konstituante 317, 321
KPN (Komisi Penyelidik Nasional) 650, 651
K. Pamuntjak, Sutan 31
Koga (Komando Siaga) 466

Kogyo Daigaku 96
Koiso, Perdana Menteri 25, 27, 120, 125
kokumin gakkō 92
Komarudin 638
Komisi Bahasa Indonesia 105
Komisi Penyelidik Keadaan (*Fatt-Finding Commission*) 370
Komisi Teknis 221
Komite Peinsyafan Pemuda 43
Komite van Aksi 166, 180
Komunike Bersama 463
Konan Hōkōkudan 48
Kortenaer 5, 6
Konferensi Asia Afrika 314, 315, 323, 328, 350, 458
Konferensi G-15 668
Konferensi Malino 208
Konservatori Karawitan 407, 408
Kontact Bureau (Kontak Biro) 188, 189, 192
Kontingen Garuda 597, 598, 599, 621
Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) 601
Korie Layun Rampan 687
Kosasih, R.A. 51, 342
Kolot Sukardi 408
KORI (Komite Olimpiade Indonesia = *Commissie voor de Volkslectuur*) 291
Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) 565
Kota 629, 632, 633, 634
KOTI (*Fact Finding Commision*) 54, 543, 594, 601
kōtō shihan gakkō 92
Kotsubu 15, 23
Kretarto, Letnan Kolonel 344
Kriangsak Chomanand 626
KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) 180
Kruschev, Perdana Menteri 452
KTN (Komisi Tiga Negara) 216, 219, 220, 221, 223, 224, 243, 246, 247, 248, 258
ku 19, 46
kucō 19
KUD (Koperasi Unit Desa) 580
Kumakichi Harada, Letnan Jenderal 35
kumiai 54, 85, 86, 87, 88
kumiai-kumiai 113
Kundan, T.D. 189
Kung Cang Tang 389
Kung Yung Pao 100
Kuntowijoyo 687, 688, 689, 690
Kuo Ming Tan 389
Kurasawa, Aiko 60
Kusnandar 138
Kusno Wibowo 55
Kusumaatmadja, Mochtar 626
Kusumasumantri, Iwa 131, 136, 138, 159, 343
Kusumo Utojo, R.M.A.A. 23
Kyoiku Hōkōkai 36

L

L. Adam, Dr. 17
Lapangan Ikada 126, 150, 166, 167, 178
Lapangan Monas 150
Laskar Pesindo 237
Latuhairary, Mr. 129, 155
LBH (Lembaga Bantuan Hukum) 644

Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) 396, 403, 404, 405, 408, 409, 474, 504, 674, 680
Leimena, J., dr. 221, 263, 269, 301, 358, 374, 419, 484, 548, 549, 551
Lemos Pires 630
Letter of Intent (Nota Kesepakatan) 666
Leon Agusta 687
Lie Ivana 664
Liem Soei Liong 44
Liem Swie King 664
Liga Demokrasi 422, 423, 424
Liga Muslimin 422
Li Peng 624
Lincoln Fifth Regiment 199
Linus Suryadi A.G. 687, 688
Lopa, Baharuddin 652
Lord Killearn 208
LUAR (*League for Revolutionary Unity*) 627
Lubang Buaya 487, 488
Lubis, M.H.
Lubis, Mochtar 402, 604, 640, 677, 696
Lubis, Todung Mulia 653
Lubis, Zulkifli 55, 321, 343, 375
L.H.O. Pugh, Kolonel 189
Lovink, A.H.J. 270, 272

M

MAC (*Movimento Anti-Comunista*) 629
MacArthur, Jenderal 185
Madrais, Haji 119
MacDonald 201
Mahbud Djunaidi 686
Mahkamah Militer Jepang 115, 117
Maida, Laksamana 140
Makoginta, A.J., Letnan Kolonel 349, 352, 374, 608
Maladi, R. 504
Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) 637
Malik, Adam 130, 134, 180
Malik Fadjar 672
Mallaby, A.W.S. 187–189, 191, 192
Manai Sophiaan 609
Mangkudidjaja, Halim 116
Mangkudidjaja, Hilman 92
Mangkusuwondo, Suhadi 640
Mangunsarkoro, Sarmidi 104, 313
Mangunkusumo, Darmawan 278
Manifes Kebudayaan (Manikebu) 503, 504, 505, 506, 679, 680
Manifesto Politik 447, 448, 505
Mantiri, H.B.L. 651
Manuhutu 358
Manusama, Ir. 357, 358
Mansur, K.H. Mas 24, 31, 32, 34, 37, 38, 40
Mansur Samin 401, 679
Mao Tse Tung 406
Mapantjas 54, 543
Maphilindo 462, 464
Maramis, A.A., Mr. 128, 164, 258
Marga T. 694
Margono 138
Maria Amin 109
Masjkur, K.H. 256
Masjoemi (Majelis Sjoero Moeslimin Indonesia), Masyumi 40, 134, 198, 225, 232, 266, 301, 360, 378, 379, 380, 422

Masako 71
Massardi, Yudhistira A.N.M. 687
Masuda, Toyohito 122
Matahari 99
Mataram 99
Matsui, Kolonel 17
Mawardi, Chalid 544
M. Balfas 398
Mbah Diro 144
McMillan, Harold 460
Megawati 653, 654
Meiji Seito Kaisha 78
Melik, Sajuti 136, 147, 159
M. Fudoli Zaini 686, 688
M. Hubson, Mayor 189
M. Thahir Rahily, K.H. 609
MARI (Majelis Rakyat Indonesia) 655
MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) 37, 38
Mira W. 694
missie 95
Minseifu 21, 55, 80
Miss Tjitjih 108
Mitsui Kabushiki Kaisha 78, 84
Mitsui Ginko 79
Miyoshi 140, 141, 144
Mh. Rustandi 401, 402
MNLF (*Moro National Liberation Front*) 599
Moeljanto, D.S. 677, 681
Moerdani 626
Moerdowo, dr. 520
Moh. Roem 211, 242, 244, 263, 265, 269, 303, 313
Mohammad Amir, dr. 27
Mohammad Diponegoro 686
Mohammad Hasan, Teuku, Mr. 27, 158
Moh. Natsir 310, 378
Mohammad Saleh 31
Motinggo Boesje 678
M. Taslim Ali 402
Mokoginta, A.T. 466
Momoc (*Moment Mobiele Comando*) 367
Momoye 69
Mononutu, Arnord 301
Montolalu, G.K. 372
Mooi Indie (Hindia Molek) 518, 519
Mook, H.J. van, Dr. 203, 204, 205, 211, 243
Mori 104
Motinggo Busye 401, 693
Motik, B.R. 282
MPO (Menghitung Pajak Orang) 570
MPPR (Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi) 423, 606
MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) 421, 423, 435, 552–562, 566, 567, 610
MPS (Menghitung Pajak Sendiri) 570
MRPP (*Movement for Revolution of Party of the Proletariat*) 627, 630
MSA (*Mutual Security Act*) 310, 323
M. Jusuf 549
M. Natsir 609
Muchtar, K.H. 30, 40
Muchtar, Sabirin 55, 466
Mufracni Mukmin 131
Muh. Yamin 429
Muhammad Ali 401
Muhammad Chalil, Rd. 17
M. Insja 365

Muhammad Sjafei 283
Muhammad Usman 644, 645
Muhammadiyah 40, 548
Mukti, K.H. 40
Mulia, T.S.G., Dr. 30, 283
Mulyadi 553, 561
Muljadi 466
Muljohardjo, Ruslan 369
Muradi 54
Murba 563
Murdjani 306
Musso 239, 242
Muwardi, dr. 150, 157, 164, 239

N

Nababan, Asmara 653
Nachrowi, K.H. 40
Nagasaki 137
Nagono 122
Nagumo, Laksamana Noichi 1
Nahdlatul Ulama (NU) 40, 314, 317, 334, 378, 379, 421, 422, 544, 548, 563, 564, 609, 610, 611, 660, 661,
Naimubu-bunkyōku 22,45
Nainggolan, Boyke 376
Naiseibu 20, 21
Nanpo Keihatsu Kenso 79
Namura, Kapten 175
Napindo (Nasional Pelopor Indonesia 198
Napitupulu, David 543
Napsirin 44
Nasakom 425, 426, 428, 502, 504
Nasasos 502
Nasjah Djamin 401, 402, 686
Nasrun, Mr. 221
Nasution, Adnan Buyung 653
Nasution, A.H. 179, 202, 250, 261, 267, 321, 338, 340, 345, 355, 374, 375, 439, 443, 444, 480, 484, 546, 553, 608, 609
Nataatmadja, Djauhari 627
Nawaksara 58, 59, 558
Nazi 165
Nederlandshe Handels Maatshappij 7
Nederlands-Indische Escompto Bank 79
Nefos (*New Emerging Forces*) 454, 456, 460, 472, 612
Negara Pasundan 304
Neher, L. 246
Nehru, PM 452
Nekolim (Neo-Kolonialialisme Emperialisme) 427, 450, 545
Nemoto, Letnan 116
New Left (Kiri Baru) 637
Nh. Dini 401, 678, 686, 688
NICA *(Netherlands Indies Civil Administration)* 176, 177, 186, 187, 194, 197, 274
Nicole Ceaucescu 623
Nicork Express 99
NII (Negara Islam Indonesia) 360, 361, 645
Nippon 95
Nippon Seisin 59, 60, 92, 107, 111, 129
NIROM (*Nederands-Indische Radio Omroep Maatschappij) 101*
NIS (Negara Indonesia Serikat) 212, 244, 245, 247
Nishijima, Shigitada 140
Nishimura, Mayor Jenderal 140

NIT (Negara Indonesia Timur) 302, 304, 305, 307. 349, 355, 357
Nitimihardjo, Maruto 180
Njono 477
N.K., Sutoyo 655
Nkrumah, Presiden 452
Noburu 71
Nogyo Kumiai 80
non-alignment 450, 451
non-aligned 451, 452, 456, 458
Nonblok 453
Nonkooperasi 28, 29
Notowidagdo, Mukarto 314
Nugroho Notosusanto 28, 394, 398, 401
Nurcholis Madjid 671
Nur, Mawardi 644
Nurhidayat 645
Nursyamsu 109
Nyak Arif, Teuku 26
Nyonoprawoto 150
Nyoto 395
NST (Negara Sumatara Timur) 306, 307

O

Oding Suhendar 375
O. Effendi 294, 295, 407
Oei Hok Tjoan 44
Oei Tiang Tjoei 89
Oei Tjoe Tat 544, 546, 551
ofensif 44, 50
Ofensif PKI 473
Okasaki, Seizaburo 16
Okinawa Seito Kaisha 84
Oldefos (*Old Estabilished Forces*) 450, 456, 459
Olimpiade XV 390
Oliveire Salazar, Antonio de 627
Omar Dhani 466, 480
Ong Eng Die, Dr. 276
Ono, Abdulhamid 53
Operasi Banten Ketaton 444
Operasi Garuda Putih 444
Operasi Jatayu 444
Operasi Jaya Wijaya 444, 445
Operasi Naga 444
Operasi Wisnu Murti 444
Ophuyzen, A.H. 223, 293
ORI (*Oeang Repoeblik Indonesia*) 274, 275
OSD (Orkes Studio Djakarta) 296
Osaka Reina Kabushiki Kaisha 84
Osamu Kanrei 15, 23
Osamu Seirei 14, 23, 52, 77, 78, 79, 95
Oto Iskandar Dinata 30, 31, 44, 48, 62, 82, 99, 128, 159, 160
Otoman Nuh 664
Otto Djaja Soetara 106
Otsuka Bukai 174
Oyong, P.K. 677, 696

P

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) 457, 463, 468, 470, 471, 472, 597, 614, 634,652
PCP (*Partido Communista Portuguese*) 627, 628
P. Sengodjo 401
Pahlawan Revolusi 487, 488
Pakpahan, Mochtar 655
Palar, L.N. 258
Pane, Armijn 104

Pane, Sanusi 104, 131
Soetojo Siswomihardjo, Brigadier Jenderal 484
Pandjaitan, Donald Izacus 484, 487
Pandji Poestaka 101
Panelewen, Waidan B. 157
Panggabean, Maruli 601, 640
Panglima Tentara Ke-16 141
Panglima Tentara Ke-25 20, 27
Panitia Angket 237
Panitia Kecil 124, 128, 160
Panitia Sembilan 160
Pardede, Peris 477
Parindra (Partai Indonesia Raya) 31, 311, 343
Partai Islam Persatuan Tarbiyah Indonesia) 657
Parkindo (Partai Kristen Indonesia) 198, 212, 301, 311, 379, 422, 548, 563, 564, 657
Parmum (Partai Muslimin Indonesia) 563, 657, 659
Parmusi 564
Partai Katholik 212, 422, 548, 563, 564
Partai Katholik Indonesia 657
Partai Murba 311, 428, 657
Partai Nadhlatul Ulama 657, 659
Partai Rakyat Jelata 212
Partai Syarikat Islam 659
Partindo 476, 544, 548
Parwoto, Letnan Kolonel 492
Pasaribu, Amir 296
Pasukan Bebas 349
Patterson, W.R. 186
Paturisi, Aspar 687
PB Pomer 86
PBR (Pemimpin Besar Revolusi) 423
PDI (Partai Demokrasi Indonesia) 565, 653, 654, 659, 660, 663, 666
PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) 260, 261, 363
Pearl Harbor 1, 2
PI Peril (Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam) 563
P.J. Koets, Dr. 223
pejabatan 33, 34
PELMASI 543
Pel Nawaksara (Pelengkap Nawaksara) 559
Pelukis Rakyat 520
Pemandangan 99
Pemberontakan Peta 43
Pemerintah Kemaharajaan Jepang 120
Pemerintah Militer Jepang 15, 21, 29, 38, 61, 68, 85, 86, 92, 96, 99, 103, 109, 110
Pemerintah Pendudukan Jepang 17, 19, 23, 27, 31, 37, 42, 76, 78, 96, 100, 109
Pemerintah Pendudukan Militer Jepang 25
Pemerintah Sementara 14, 19
Pemerintah Tentara Ke-25 64
pemilu (pemilihan umum) 655–663
Pemuda Marhaen 476
Pemuda Rakyat 480, 481
Pendudukan Militer Jepang 14
Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 441
Peperda (Penguasa Perang Daerah) 426
Peperti (Penguasa Perang Tertinggi) 426
Pepolit (Pendidikan Politik Tentara) 228

Perang Asia Timur Raya (Perang Pasifik) 23, 25, 65, 91, 92, 104, 109, 110, 135
Perang Dingin 325, 326, 351
Perang Dunia II 165, 328, 334, 472
Perang Korea 335
Perang Kemerdekaan 43
Perang Pasifik 92, 108
Pergerakan Nasional Indonesia 29, 33
Peristiwa Talangsari 644
Peristiwa Tanjung Priok 642
Perjanjian New York 441
Perkindo (Perkemahan Kepanduan Indonesia) 44
PERMASI 54
Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) 367, 368, 372, 375, 377
PFN (Persatuan Fim Negara) 408
Perfini (Perusahaan Film Nasional) 297
Persafi (Persatuan Aktris Film Indonesia) 108, 109
Persari (Persatuan Artis Republik Indonesia) 298
Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) 282
Persemakmuran 206
Persetujuan Linggajati 164, 213, 214, 217, 266
Persetujuan *Renville* 217, 218, 223, 224, 232, 242, 247, 248, 254, 261, 265, 280, 360
Perth 5, 8
Pertempuran Medan Area 197
Persatuan Pembangunan 564
Perti 380, 548, 564
Pesindo 197, 212, 239
Petojo ku 89
Pertahanan Rakyat Semesta 254
Perwabi (Perserikatan Warung Bangsa Indonesia) 85, 86
Pesman, J.J. 9
Peta 36, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 67, 80, 113, 114, 116, 181
Petisi Soetardjo 29
Piagam Yogyakarta 344
Pierre Andries Tendean 484
Pituhena, Ir. 304
PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) 476, 477, 498
PI (Pelukis Indonesia) 294
PIM (Pelukis Indonesia Muda) 294, 407
PIM (Pemuda Indonesia Maluku) 180
PIR (Partai Indonesia Raya) 311, 314
PKI (Partai Komunis Indonesia) 54, 198, 212, 239, 241, 242, 254, 282, 317, 379, 403, 408, 421, 425, 426, 473, 474, 476–479, 481, 490, 498, 501, 543, 602, 674, 676, 701
PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia) 311
Plan Kasimo 280
Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 279, 280
PMII 54, 543
PMKRI 54, 543
PNI (Partai Nasional Indonesia) 54, 212, 224, 230, 232, 267, 301, 308, 309, 310, 317, 378, 379, 380, 421, 422, 473, 476, 543, 548, 563, 564, 565
Poerwardarminta, W.J.S. 92
Poetra (Poesat Tenaga Rakjat) 32, 33, 34, 35, 37, 44
Polri 597
Poniman, Letnan Jenderal 625

PON II 390
PORI (Persatuan Olahraga Republik Indonesia) 290
PORKI (Persatuan Olahraga Karate Indonesia) 664
PPBM (Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan) 278
PPFI (Persatuan Produsen Film Indonesia) 408, 409
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 27, 135, 136, 137, 138, 141, 149, 150, 151, 158, 159, 160, 178
PPN (Perusahaan Perkebunan Negara) 279
POK (Penampung Operasi Keuangan) 430
PPP (Partai Persatuan Pembangunan) 565, 609, 659, 660, 661, 663, 666
PPRK (Persiapan-Perserikatan Radio Ketimuran) 101
Prabu Mangkunegoro, Mochtar bin 23
Prajurit Pekerja 61
Pramoedya Ananta Toer 394, 395, 396, 402, 406, 408
Pranoto, Mayor Jenderal 490
Prawiradinata, R.P. 104
Prawiradiredja, Akil 257
Prawiranegara, Sjafruddin 202, 268, 375
Prawirodihardjo, Sarwono, Prof. Dr. 286
Prawoto Mangkusasmito 422
Prawoto Sumadilogo 23
PRD (Partai Rakyat Demokratik) 655
PRI (Pemuda Republik Indonesia) 177
Prijono, Prof. Dr.104, 388, 390, 497
Princen, H.J.C. 642
Pringgodigdo, A.G., Mr. 122
Pringgodigdo, Abdul Karim 269
Pro Bono Publico 538
Pronk, J.P. 640
PRN 379
PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) 375, 376, 377
PSI 379
PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) 343, 360, 379, 422, 548, 563, 564, 657
PSTT (Pemerintah Sementara Timor Timur) 634
Pubaja 92
PTPI (Pusat Tenaga Pelukis Indonesia) 407
Pudya, Ketut 160
Pujangga Baru 10, 293, 392, 691
Puperti (Pusat Perusahaan Tembakau Indonesia) 283
Purbatjaraka, R. Ng., Dr. 104
PUSA (Pusat Ulama Seluruh Aceh) 363
Putu Wijaya 687, 689, 690
PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) 501, 503

Q

Qian Qichen 624, 625
Qadar, Salim 644

R

R. Soeprapto 484
Rachman, Hasyim 603
Raco (*Rapat Collegiaal*) 344
Rachmat Djoko Pradopo 679, 680, 686
RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan Negara) 666
RAPWI 197

Radjiman Wediodiningrat, K.R.T., Ir. 122, 130, 136, 137, 166
Ranuwiharjo, Iskandar 608
Ramadhan K.H. 396, 399, 400, 402, 678, 700
Ramelan Oetojo, Mr. 277
Ratulangie, G.S.S.J., Dr. 160, 176
Reksosamodro, Pranoto
Remy Sylado 693, 694
Rendra, W.S. 398, 402, 678, 686
Rengasdengklok 139, 141, 142
Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) 574, 577
Repelita I 578, 579, 581, 582, 600, 637
Repelita II 582, 583, 584, 585, 612
Repelita III 585, 586, 587
Repelita IV 600
Rera 250, 251
resident 19
residentie 19, 20
Richard C. Kirby 216, 220
Ries Mulder 517
Rijono Praktikno 399
RIS (Republik Indonesia Serikat) 164, 268, 269, 272, 301, 302, 303, 306, 310, 349, 358
Rivai Apin 395, 603
Rizal Nurdin, T. 627
RMS (Republik Maluku Selatan) 303, 350, 355, 356, 358
Roijen, J.H. van, Dr. 264, 265
Ro'is Aam 421
rōmusha 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 83, 113, 114
Rōmukyōku 64
Roseno, Prof. 525
Rosidi, Ajip 394, 395, 400, 402, 678, 680
Rosihan Anwar 604
RRI (Radio Republik Indonesia) 300, 585
R. Sartono, Mr. 82
Rusman Sutiasumarga 396
Rusmin Nuryadin 553
Ryutaro, Hashimoto 666

S

Sabur, Brigjen 550
S. Rukiah 398, 401
Sahirman 490, 491, 492, 493, 494
Said, Mohamad 131
Said, Titi 678
Saikō shikikan 15, 22, 23, 48, 82, 134
Saini K.M. 686
Sajuti Melik (Juti) 502
Sakirman, Ir. 230, 242
Sakti (Sarekat Tani Indonesia) 313
Sakura 71
Salamun 17
Saleh, Chairul 133
Saleh, Harsono 133
Saleh, S.A. 43
Salim, H.A. 221, 222
Samadikoen 305
Samsi, Dr. 155
Samsudin, Mr. 25, 30, 31, 42
Samsuri 391, 392
San A Seinen Kunrenshō 44
Santoso, Maria Ulfah, Mr.
Santoso, Surio, Letnan Kolonel 221
Sanusi, dr. 138

Sanyō 22
Sanyo Kaigi 82
Sapardi Djoko Damomo 678, 686, 692
Sapii, M. 89
Sarbini, M. 195, 362
Sarwo Edhie Wibowo 494
Sastroamidjojo, Ali, Mr. 263, 269
Sastroatmoatmodjo, Onie 195
Sastrosatomo, Soebadio 609
Sastrowardoyo, Soebagio 398
Sartono, Mr. 30, 309, 422
Sassen, AM.J.A. 269, 246
Sayido Wakar, Moh. 40
SBS (Serikat Buruh Indonesia) 655
Schoemaker, Prof. 526
SEAC (*South West Pasific Command*) 185
SEATO 615
Sedyo Tomo 99
Seikerei 53, 92, 110, 111
Seimaigyo Kumiai 86
seishin 43
Seinen 46
Seinendan 45, 47, 48, 52, 67, 89
Seinen Dojo 50, 51, 55
Sekber Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya) 563
SEMMI 54, 543
Seniman Masyarakat 508
Sendenbu 23, 31, 130
Setiadjit 221, 230
Shaw, Kapten 188
Shidoin 81
Shidokan 81
Shihōbu 15, 23
shidōbucō 101
Shimizu, Hitoshi 44, 130
shōdan 113, 114
Shōdanchō 52, 54, 113
Shodonso 102
Shokuryo Kanri Limusyo 118
Shomin Ginko 275
Shūmubucō 25, 111, 134
Shoto shinan gakko 92
Shumubu 110
Siagian, Bachtiar 395
Sidang Istimewa ke-85 120
Sidang Umum MPR 666, 667
SIM (Sanggar Indonesia Muda) 520
Simanjuntak, Cornel 107, 296
Simanjuntak, Marsilam 642
Simatupang, Iwan 401, 687, 689, 697
Simatupang, T.B. 261, 269, 340, 349, 607
Simbolon, Kolonel 221, 369, 370, 375
Simon Admiral 517
Sinar Matahari 99, 100, 101
Sinar Baroe 100
Singodimedjo, Kasman, Mr. 136, 158, 179
Sipatahunan 99
Sirait, Sabam 604
Siregar, Ashadi 693
Siregar, Bakri 395
Siregar, Hariman 640, 642
Siregar, Sori 686
Sir Montagu Stopford, Letnan Jenderal 274
Siswondo Sitompul, Hotman 60
Siswoyo, Guntur 518
Sutardji Calzoum Bachri 687
Situmeang, Abdul Wahid 678, 679

Situmorang, Sitor 393, 401, 402, 504
Sjafei, Letkol 551
Sjafei, Moh. 26, 37
Sjafei Sumardja 517
Sjamaun Gaharu, Letnan Kolonel 365
SKI (Sarekat Kerakyatan Indonesia) 311
S.K. Trimurti, Ny. 155
SKK (Saibai Kigyo Kanrikodan) 76, 77
Slamet Effendi 639
Slametmuljana, Prof. Dr. 391
Slamet Riyadi 359
Slamet Sudibyo, dr. 43
Soares, Joao Pedro 635
Soares, Luis Gonsaga 635
Soares, Maria Acuncao Osorio, Ny. 635
Soeara Asia 99, 100, 101
Soeara Kita 101
Soeara Merdeka 101
SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) 232, 473
Soeara Rakjat 101
Soebardjo, Ahmad 131, 136, 141, 144, 145, 146, 323
Soetjipto Joedodihardjo 553, 560
Soedarpo 131
Soedirman, Jenderal , 209, 183, 184, 225, 249, 255, 267
Soedirman, Kolonel 176, 225, 374
Soedirman, Letnan Jenderal 608
Soediro 150
Soedjatmiko 131
Soegih Arto 603, 608, 609
Soegiri, Dr. 191
Soeharto 259, 260, 353, 354, 442, 443, 444, 486, 521, 549, 550, 551, 552, 558–561, 599, 601, 609, 610, 623, 624, 626, 629, 636, 638, 640, 642, 652, 665–672
Soekarno, Ir. (Bung Karno) 22–25, 27–33, 48, 54, 62, 63, 64, 82, 104, 123–127, 129, 136, 141, 142, 144, 147–156, 160, 164, 184, 188, 230, 242, 261, 262, 269, 301, 311, 322, 369, 370, 372–375, 378-380, 389, 408, 419–423, 425, 426, 429, 435, 436, 440, 443, 444, 450, 461, 464, 468, 470, 472, 480, 486, 487, 489, 502, 505, 508, 517, 518, 525–532, 538, 539, 542, 543, 545, 548, 549, 552, 556, 558, 560, 562, 591, 605, 606, 661
Soekarno Putra, Guruh 661
Soekirno, Soejitno 608
Soemarno 551
Soemitro 604, 607, 638, 639, 641, 642
Soemohardjo, Oerip 179, 181, 221, 225
Soumokoil, Christian Robert Steven, Dr. 355, 357
Soenario 130
Soengkono 189, 193
Soeprapto 492
Soeroso, Dr. 277
Soeroto Koento 131
Soeryo, Gubernur 192, 193
Soesanti, Nn. 89
Soetardjo, R.A. 89
Soewarni Pringgodigdo, Ny. 89
Soewarno, Ir. 389
Sokowati, S. 354
SOMAL 54, 543
Somubu 15, 22
son 19, 21
sonc$\bar{o}$ 19

Soumokil, Ch. R. 223
Spinola, Antonio de 627, 628
Sri, Nn. 89
St. Pamuntjak, Abas 104
Stadsgemeente 19
Stikker, D.U. 245, 246
Subagio Sastrowardajo 398, 401, 678, 686, 688, 696, 697
Subandrio 419, 438, 449, 458, 548, 549, 551
Subandrio, Surjo 359
Subianto 138
Subijakto, Kolonel 256
Subono, Kolonel Laut 443
Sudarmo 116
Sudarso, Hendra 508
Sudarsono, dr. 258
Sudiro 49, 62, 134
Sudirman 44
Sudisman 477
Sudjasmin, R.A.J. 296
Sudjiman Martadiredja Gandasubrata 17
Sudomo 602, 604
Sugijono, Letnan Kolonel 491
Suhud, Charis 607
Suhud, S. 150, 157
Sudjojono, S. 508
Sukanda Brata Menggala 608
Sukendro, Letnan Jenderal 608
Sukirnanto, Slamet 678, 679, 686, 695
Sultan Hamid II 269, 349
Sumardi, Mr. 269
Sunario 437
Sunchichiro, Miyoshi 65
Supit, Karel 603
Surjadjanegara, R.A.A. 17
Surjo, R.A.A. 17
Subadio 138
Suishintai 48
Sukardjo Wirjopranoto 30, 31
Sukarni 130, 133, 134, 144, 146, 149, 158, 180, 207
Sukendro, A. 551
Sukiman, dr. 38, 256, 266, 310
Sulaiman, Chatib 37
Sularko 520
Sultan Hamid II 301
Sumarang, R.M., Mr. 104
Sumarman, S.H. 371
Sumarno, dr. 54, 548, 551
Sumarno, Kohar Hari 652
Sumatra Hōkōkai 26
Sumengkar, Rachmat 591
Sumera 18
Sumo 44, 94
Sumodilogo, Prawoto 82
Sumpah Pemuda 104
Sumual, Ventje 372
Sunanto 116
Sunario 108, 310
Sunarjo Mangunpuspito, Ny. 36
Sunarso 544
Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) 543, 548, 550, 560
Supeno 34, 49, 133, 134
Supomo, Prof. Dr. Mr. 23, 123, 160, 261, 263, 269, 301, 307
Supono (Pono) 477, 482
Suprapto, Prof. Dr. 603

Suprijadi 54, 113, 225
Surachman, Ir. 476, 546, 551
Surianegara, Den 700
Surjadarma 249, 344
Surjodikusumo, Roosseno 334
Surjo, R.M.T.A. 22, 187
Surjosumpeno, Brigadier Jenderal 492, 493
Surio Suroso, R.P.
Suripno 243
Suromo 508
Suryadi 653, 654
Sutami, Ir. 551
Sutandoko, Mas 17
Sutardji Calzoum Bachri 687, 688, 692
Sutardjo Kartohadikusumo 30
Sutarto, Kolonel 237
Sutiman, Kapten 645, 647, 648
Sutomo 134, 422
Suyono 482
Suwandi, Mr. 22, 283, 284
Suwondo, Letnan Kolonel 342
Suwirjo 150, 155, 157, 381
Suwondo 131
Sjaiful Bahri 296
Syarif Thayeb 133, 543, 551
Sjahril, Sutan 29, 30, 33, 187, 203, 204, 205, 210, 214, 215, 221, 222, 229
Syarifuddin, Amir 104, 164, 179, 187, 189, 211, 214, 221, 224, 225, 229, 230, 232, 242, 249
Syarwan Hamid 654, 655
Syafruddin Prawiranegara 375
Syeh Nasir bin Ismail 391
syi 19
Syico 19, 25, 35
Syiku-Syiku 89
syu 19, 20, 21, 23, 26, 34, 45, 48, 50, 64, 79
Syudjito, R. 99
Syū Sangikai 26, 40
Syūcōkan 19, 20, 22, 35, 36, 45, 86, 87

T

Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional) 563
Tadjudin Noor 30
Taga, Letnan Kolonel 17
Tagaki, Laksamana 5
Taher, Ahmad 180
Tai Iku Kai 44
taiso 44, 92
Taiwan Ginko 79
Taiwan Seito Kaisha 78
Takaco 77
Takdir Alisjabana, St. 292
Takito 71
Tambayong, Jopie 694
Tambunan, R.O. 654
Tampubolon, Muslim 638
Taniguci 34
Tanaka, Kakuei 641
Tan Joe Hok 664
Tan Ling Djie 242
Tan Malaka 205
Tamtomo 277
Taska (Tabungan Berjangka) 563
Tarunamihardja, Gatot, Mr. 164
Taufiqurrahman, K.H. 38
Taulu, Ch. 177

Teguh Esha 693
Teguh Karya 704
Temmale, Haji 120
T.E.D. Kelly, Brigadir Jenderal 197, 198
Tencosetsu 18
Teikoku Ginkai 120
Tenno Heika (Sri Baginda) 18
Tentara Ke-16 7, 8, 14, 29, 35, 51, 55, 136
Tentara Ke-25 14, 31, 55
Tentara Peta 52, 53
Terauchi, Jenderal Besar 135, 136
Ter Poorten, Letnan Jenderal 9, 10, 11, 14
TGP (Tentara Genie Pelajar) 180, 252
Thanat Khoman 464
The Tiger of Kuranji (Harimau Kuranji) 200
Theo Syafei 651
Thomas Cup 664
Tjun Tjun 664
TII (Tentara Islam Indonesia) 360
TIM (Taman Ismail Marzuki) 705, 706
TKR (Tentara Keamanan Rakyat) 189, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 225, 227
TNI (Tentara Nasional Indonesia) 182, 215, 223, 226, 227, 229, 231, 244, 246, 253, 257, 258, 268, 302, 303, 591, 592, 596, 608
The Cartered Bank of India 79
The Djingseng 89
The Hong Kong Shanghai Corporation Ltd. 79
Theodore Friend 67
Timor Timur 627–635, 649
Tino Sidin 295
Tirtoprodjo, Susanto, Mr. 129
Tjipto Mangunkusumo, dr. 30
Tjahaya 99, 100
Tjahaya Timoer 99, 108
Tjoa Siek Ien 221
Tjokroadisurjo, Iskaq 313, 333
Tjokrosujoso, Abikusno 207
Tjokroaminoto, Anwar 130, 346, 563
Tjokroaminoto, Harsono 130, 133, 134
Toindo Nippo 34
Togyo Rengokai 78
Tojo, Perdana Menteri 22, 120
Toha Moctar 398, 401, 402
Tokubetsu Han, Beppan 51, 52, 53
tōkubetsu hōkōkai 36
Tōkubetsu syi sangikai 23
tonarigumi 67, 68
Toto Sudarto Bachtiar 401, 402
TPK (Tim Pemberantas Korupsi) 58, 63, 558, 563
TP4 (Tim Penyelidikan dan Pengusutan Perkara Penyelundupan) 63, 563
Trabalista 629, 632, 633, 634
Trikora (Tri Komando Rakyat) 440, 442, 443, 446, 480
Trilogi Pembangunan 574
Trimuti, S.K. 134, 609
Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) 57, 543, 544, 551
TRI (Tentara Republik Indonesia) 200, 208, 225, 226, 228, 229
Tripanji 604
Tripanji Baru 604
Triwasiat 604
TRIP (Tentara Republik Indonesi Pelajar) 180, 252
Trisnojuwono 398, 402

Trisno Sumardjo 398, 401, 506, 517
Trubus 508
Ttjarda van Starkerborgh 2, 4, 9,10, 29, 30
Tugu Monas 536, 537
Tukul Sorahadinoto, R. 99
Tumakaka, J. 551
Tun Abdul Razak 613
Tunas Muda 294, 407
TVRI (Televisi Republik Indonesia) 585

U

UDT (*Uniao Democratica Timorense*) 628, 630, 632, 633, 634
UGM (Universitas Gajah Mada) 667
Umar Kayam 678, 686, 688, 690, 696
UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*) 219
UNESCO 299
UNIKOM (*United Nations Irak-Kuwait Observation Mission*) 597
UNHCR 626
Universitas Gajah Mada 289
Universitas Katolik Atmajaya 669
Universitas Trisakti 669
UNMO (*United Nations Military Observer*) 598
UNOMIG (*United Nations Observer Mission in Georgia*) 598
UNOSOM (*United Nations Operation in Somalia*) 598
UNPROFOR (*United Nations Protection Force*) 598
UNTAC 598
UNTEA (*United Nations Temporary Authority*) 441
Untung, Letnan Kolonel 482, 492
Usman, Letnan Kolonel 492
U Than 439, 468, 470
Utusan Daerah 658
Utuy Tatang Sontani 402

V

Velde, J.J. van der 264
Viaduct 193, 201
Volksraad 25, 30
Vredenburgh, Buurman van, Mayor Jenderal 221, 223

W

Wahab Chasbullah, K.H. 421
Wahid, Abdulrrahman 661
Wahid Hasjim, K.H. 40, 41, 124, 128, 158
Wahyudi, Kapten 482
WAKABA, Sekolah Kepandaian Poeteri 98
Wakabayashi 44
Walter Foote, Dr. 220
Walter Gropius 526
Wanita Marhaen 476
Warnasari 108
Warrouw, Rudolf S. 252, 651
Warsidi, Anwar 645, 648
Warta Indonesia 101
Warta Sy¤ 101
Warrouw , J.F. 344
Wattimena, Leo 443
Wattimena, L.W.J. 466
Wawasan Nusantara 576, 593
Wavell, Marsekal Sir Archibald 4
Westerling, Raymond 345, 346, 347, 349, 357

Widjojoatmodjo, R. Abdul Kadir 221, 243
Widjojo Nitisastro 588
Widodo, Jenderal 608
Wikana 133, 134, 138, 158
Wilayah Selatan 75
Wildan A. Yatim 686, 697
Wilopo, Mr. 150, 301, 311, 321, 563
Wiluyo Puspoyudo, kolonel 421
Winarno 31
Wing Kardjo 686
Wirahadikusuma, Umar 51
Wiranatakusumah, Achmad 446, 466
Wiranatakusumah, R.A.A. 17, 159, 160, 304
Wiranto, Jenderal 672
Wiratmo Sukiti 506
Wirjono Prodjodikoro 551
Wirjopranoto, Sukardjo 82, 100
Wiryomartono 477
Wisran Hadi 687, 688
Witte de With 5
Wongsonegoro, Mr. 129, 174
Worang, H.V. 349
Wright, Mr. 209
W.R. Patterson, Laksamana Muda 186
W. Suharto, Bambang 652
Wuz, F. 157

Y

Y. Nagano, Letnan Jenderal 134
Yakohama, Bank 34
Yamasaki, Ichiro 34
Yamin, Muh, Mr. 23, 30, 123, 124, 160, 207, 309
Yanagawa, Letnan 51
Yokohama Ginko 79
Yoshizumi, Tomegoro 140
Yasuhiro, Nakasone 623
Yos Sudarso, Komodor 443
Yudhokusumo, Kartono 508
Yuwono, Sutopo 563
Yusril Ihza Mahendra 672

Z

Zachman, Nizam 446
Zaimubu 15
Zainal Abidin Ahmad 371
Zainal Arifin 50
Zainal Mustafa, K.H. 112, 113
Zaini 295, 508, 677, 696
Zairin Zain, Mr. 277
Zakariah 295
zaken kabinet 301, 308, 310, 311, 372
Zaman Pendudukan Jepang 91
Zamroni 543
Zeke 3
Zeeland, Paul van 216, 220
zending 95
Zetka 295
Zia Ul-Haq 623
ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*) 616
Zou Enlai 480
Zulkarnaen, Teungku 221, 223

Lampiran

Lampiran 1

Maklumat Wakil Presiden No. X

KOMITE NASIONAL PUSAT
Pemberian kekuasaan legislatief
kepada Komite Nasional Pusat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SESUDAH MENDENGAR pembitjaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaja sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat dibentuk kekuasaannja jang hingga sekarang didjalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut Pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar, hendaknja dikerdjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaja pekerdjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinja berhubung dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan bernama Dewan Pekerdja jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat;

MENIMBANG bahwa didalam keadaan jang genting ini perlu ada Badan jang ikut bertanggung djawab tentang nasib bangsa Indonesia, di sebelah Pemerintah;

MENIMBANG selandjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakjat;

Memutuskan:

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara, serta menjetudjui bahwa pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat.

Djakarta, 16 Oktober 1945.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD HATTA.

Lampiran 2

Maklumat Pemerintah*

PARTIJ POLITIK. Andjuran Pemerintah
tentang pembentukan
partij-partij politik.

Berhubung dengan usul Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat kepada Pemerintah, supaja diberikan kesempatan kepada Rakjat seluas-luasnja untuk mendirikan partij-partij politik, dengan restriksi, bahwa partij-partij itu hendaknja memperkuat perdjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannja jang telah diambil beberapa waktu jang lalu bahwa:

1. Pemerintah menjukai timbulnja partij-partij politik, karena dengan adanja partij-partij itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat.
2. Pemerintah berharap supaja partij-partij itu telah tersusun, sebelumnja dilangsungkan pemilihan anggauta Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada bulan Djanuari 1946.

Djakarta, 3 Nopember 1945

WAKIL PRESIDEN
MOHAMMAD HATTA.

Lampiran 3

PERSETUDJUAN LINGGAJATI

Delegasi-2 Belanda dan Indonesia dalam rapat pada hari ini telah mendapat kata sepakat tentang persetudjuan dibawah ini, hal mana terbukti dari pemarapan naskah jang tersebut dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia masing2 berlipat tiga.
Pemerintah Belanda
dalam hal ini berwakilkan Komisi-Djenderal,

dan

Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini berwakilkan Delegasi Indonesia oleh karena mengandung keinginan jang ichlas hendak menetapkan perhubungan jang baik antara kedua bangsa Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan tjara dan bentuk dengan suka-rela jang merupakan djaminan sebaik-baiknja bagi kemadjuan jang bagus serta dengan masa datang, dan jang membukakan djalan kepada kedua bangsa itu untuk mendasarkan perhubungan antara kedua belah pihak atas dasar-dasar jang baru menetapkan mupakat seperti berikut dengan ketentuan akan mengandjurkan persetudjuan ini selekas-lekasnja untuk memperoleh kebenaran daripada madjelis perwakilan rakjatnja masing-masing.

Patsal 1

Pemerintah Belanda mengakui kenjataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Djawa, Madura dan Sumatera.

Adapun daerah-daerah jang diduduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerdja-bersama antara kedua belah pihak akan dimasukkan pula di dalam atau ke dalam Daerah Republik. Untuk menjelenggarakan jang demikian itu, dengan segera akan dimulai melakukan tindakan jang perlu-perlu, supaja selambatnja pada waktu jang disebutkan dalam Patsal 12, termasuknja daerah-daerah jang tersebut itu telah selesai.

Patsal 2

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama menjelenggarakan segera berdirinja sebuah negara berdaulat dan berdemokrasi, jang berdasarkan perserikatan, dan dinamai Negara Indonesia Serikat.

Patsal 3

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnja dengan ketentuan, bahwa, djika kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, setelah dimusjawaratkan dengan lain-lain bagian daerah pun djuga, menjatakan

menurut aturan demokratis, tidak atau masih belum suka masuk kedalam perikatan Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu bolehlah diwudjudkan sematjam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat itu dan terhadap Keradjaan Belanda.

Patsal 4

(1) Adapun negara-negara jang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu, ialah Republik Indonesia, Borneo dan Timur-Besar, jaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah untuk menjatakan kehendaknja, menurut aturan demokratis, supaja kedudukannja dalam Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan tjara lain.

(2) Dengan tidak menjalahi ketentuan didalam pasal tadi dan didalam ajat ke (1) pasal ini, Negara Indonesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu-negerinja.

Patsal 5

(1) Undang-undang Dasar daripada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentuk negara, jang akan didirikan daripada wakil-wakil Republik Indonesia dan wakil-wakil sekutu lain-lain jang akan termasuk kelak dalam negara Indonesia Serikat itu, jang wakil-wakil itu ditudjukan dengan djalan demokratis, serta dengan mengingat ketentuan ajat jang berikut dalam pasal ini.

(2) Kedua belah pihak akan bermusjawarat tentang tjara turut-tjampurnja dalam persidangan pembentuk negara itu oleh Republik Indonesia oleh daerah-daerah jang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleh golongan-golongan penduduk jang tidak ada atau tidak tjukup perwakilannja segala itu dengan mengingat tanggung-djawab dari para Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing.

Patsal 6

(1) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membela-peliharaan kepentingan-kepentingan bersama daripada Negeri Belanda dan Indonesia akan bekerdja bersama untuk membentuk Persekutuan Belanda-Indonesia, jang dengan terbentuknja itu Keradjaan Belanda jang meliputi Negara Belanda, Hindia-Belanda, Suriname dan Curracao ditukar sifatnja menjadi persetudjuan itu, jang terdiri pada satu pihak daripada Keradjaan Belanda, jang meliputi Negeri Belanda Suriname dan Curracao dan pada pihak lainnja daripada Negara Indonesia Serikat.

(2) Jang tersebut diatas ini tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian berkenaan kedudukan antara Negeri Belanda dengan Suriname dan Curracao satu dengan lainnja.

Patsal 7

(1) Untuk membela-pemeliharaan kepentingan-kepentingan jang tersebut didalam pasal diatas ini, Persekutuan Belanda-Indonesia itu akan mempunjai alat-alat kelengkapan sendiri.

(2) Alat-alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah Negara Indonesia Serikat: mungkin djuga oleh madjelis-madjelis perwakilan rakjat negara-negara itu.

(3) Adapun jang akan dianggap kepentingan-kepentingan bersama itu ialah kerdja-bersama dalam hal perhubungan luar negeri, pertahanan dan, seberapa perlu keuangan, serta djuga hal-hal ekonomi kebudajaan.

Patsal 8

Diputjuk Perserikatan Belanda Indonesia itu duduk Radja Belanda.

Keputusan-keputusan bagi mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan Persekutuan itu atas nama Baginda Radja.

Patsal 9

Untuk membela peliharaan kepentingan-kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negeri Belanda dan kepentingan-kepentingan Keradjaan Belanda di Indonesia maka pemerintah masing-masingnja kelak mengangkat Komisaris Luhur.

Patsal 10

Anggar-anggar Persekutuan Belanda-Indonesia itu antara lain-lain akan mengandung djuga ketentuan-ketentuan tentang:

a) pertanggungan hak-hak kedua belah pihak jang satu terhadap jang lain dan djaminan-djaminan kepastian kedua belah pihak penetapi kewadjiban2 jang satu kepada jang lain;

b) hal kewarga-negaraan untuk warga-negara Belanda dan warga-negara Indonesia masing-masing didaerah lainnja.

c) aturan tjara bagaimana menjelesaikannja apabila dalam alat-alat kelengkapan Persekutuan itu tidak dapat ditjapai mupakat;

d) aturan tjara bagaimana dan dengan sjarat-sjarat apa alat-alat kelengkapan Keradjaan Belanda memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat, untuk selama masa Negara Indonesia Serikat itu tidak atau kurang tjukup mempunjai alat-alat kelengkapan sendiri;

e) pertanggungan dalam kedua bagian Persekutuan itu, akan ketentuan hak-hak dasar kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan, jang dimaksudkan djuga oleh piagam Persekutuan Bangsa-Bangsa.

Patsal 11

(1) Anggar-anggar itu akan direntjanakan kelak oleh suatu permusjawaratan antara wakil-wakil Keradjaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat jang hendak dibentuk itu.

(2) Anggar-anggar ini terus berlaku, setelah dibenarkan oleh madjelis-madjelis perwakilan rakjat kedua belah pihak masing-masingnja.

Patsal 12

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan, supaja berwudjudnja Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu telah selesai, sebelum tanggal 1 Djanuari 1949.

Patsal 13

Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan-tindakan, agar supaja setelah terbentuknja Persekutuan Belanda-Indonesia itu, dapatlah mendjadi Negara Indonesia Serikat diterima mendjadi anggota didalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Patsal 14

Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak orang-orang bukan bangsa Indonesia akan menuntut dipulihkan hak-hak mereka jang dilakukan dan dikembalikan barang-barang milik mereka, jang lagi berada didalam daerah kekuasaannja de facto. Sebuah Panitya bersama akan dibentuk untuk menjelenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

Patsal 15

Untuk mengubah sifat Pemerintah Hindia sehingga susunannja dan tjara bekerdjanja seboleh-bolehnja sesuai dengan pengakuan Republik Indonesia dan dengan bentuk-susunan menurut hukum negara, jang ditekankan itu maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan supaja dengan segera dilakukan aturan-aturan undang-undang akan supaja, sementara menantikan berwudjudnja Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu, kedudukan Keradjaan Belanda dalam hukum negara dan hukum bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Patsal 16

Dengan segera setelah persetudjuan ini mendjadi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan kekuatan angkatan bala-tentaranja masing-masing.

Kedua belah pihak akan bermusjawarat tentang sampai seberapa dan lambat-tjepatnja melakukan pengurangan itu; demikian djuga tentang kerdja-bersama dalam hal keterangan.

Patsal 17

(1) Untuk kerdja bersama jang dimaksudkan dalam persetudjuan ini antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia hendak diwudjudkan sebuah badan jang terdiri daripada delegasi-delegasi jang ditudjukan oleh tiap-tiap pemerintah itu masing2nja dengan sebuah sekretariat bersama.

(2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bilamana ada tumbuh perselisihan berhubung dengan persetudjuan ini, jang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi jang tersebut itu, maka menjerahkan keputusan kepada arbitrage. Dalam hal itu persidangan delegasi-delegasi itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan suara memutuskan, jang diangkat dengan semupakat antara dua pihak delegasi itu, djika tidak berhasil semupakat itu, diangkat oleh ketua Dewan Pengadilan International.

Patsal penutup

Persetujuan ini dikarangkan dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia.

Kedua-duanja naskah itu sama kekuatannja.

Djakarta, 15 November 1946

Lampiran 4

PERSETUJUAN RENVILLE

Dewan Keamanan
Komisi Tiga Negara dalam peristiwa Indonesia
Perundingan dengan Delegasi Pemerintah Belanda dan
Pemerintah Republik Indonesia
Persetujuan gentjatan-sendjata antara Pemerintah
Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia
Ditandatangani pada pertemuan yang ke-empat
pada tanggal 17 Djanuari 1948

Pemerintah Keradjaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia jang dalam persetudjuan ini disebut para pihak, bersama ini menjetudjui seperti berikut:

1. Bahwa suatu perintah tinggal tetap (stand fast) dan menghentikan tembak-menembak (cease-fire) akan dikeluarkan oleh kedua pihak masing-masing serta serentak dengan segera sesudah ditandatangani persetudjuan ini dan akan berlaku sepenuhnja didalam empatpuluh delapan djam. Perintah itu berlaku untuk pasukan-pasukan kedua pihak disepandjang garis daerah-daerah seperti dimaksud dalam proklamasi Pemerintah Hindia-Belanda pada 29 Agustus 1947, jang akan dinamakan garis status quo, dan didaerah-daerah seperti jang dimaksud dalam ajat jang berikut.
2. Bahwa terlebih dahulu dan buat sementara waktu akan dibentuk daerah-daerah jang akan dikosongkan oleh tentara (demilitarized-zones), pada umumnja sesuai dengan garis status quo tersebut diatas; daerah-daerah itu pada pokoknja mengenai daerah-daerah diantara garis status quo, dan disatu pihak garis kedudukan Belanda jang terkemuka dan, dilain pihak garis kedudukan Republik jang terkemuka lebarnja rata-rata daerah-daerah itu kira-kira bersamaan.
3. Bahwa dalam mengadakan daerah-daerah jang dikosongkan tentara itu sekali-kali tidak mengurangi hak-hak tuntutan-tuntutan atau kedudukan para pihak menurut resolusi-resolusi Dewan Keamanan pada tanggal 1, 25 dan 26 Agustus serta 1 November 1947.
4. Bahwa setelah diterima apa jang tersebut diatas oleh kedua pihak, Komisi Tiga Negara bersedia untuk memperbantukan kepada kedua pihak pembantu-pembantu militernja jang akan dipertanggung-djawabkan, terlebih dahulu, untuk menetapkan apakah salah satu peristiwa memerlukan penjelidikan dari pembesar-pembesar jang lebih tinggi dari satu atau kedua pihak.

5. Bahwa, sebelum ada penjelesaian politik, tanggungdjawab atas pemeliharaan hukum serta ketertiban dan keamanan djiwa dan harus benda didalam daerah-daerah jang akan dikosongkan oleh tentara itu tinggal tetap ditangan pasukan-pasukan polisi sipil dari masing-masing pihak. (Perkataan polisi sipil berarti pula pemakaian buat sementara orang-orang militer sebagai polisi sipil, tetapi pasukan-pasukan polisi itu adalah dibawah perintah sipil). Pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara akan bersedia untuk memberi nasehat kepada pembesar-pembesar jang bersangkutan dari kedua pihak dan untuk membantu dalam pekerdjaan-pekerdjaan lain jang dianggap perlu, kalau diminta. Antara lain, mereka harus:
   a) mengumpulkan pembesar-pembesar polisi jang disediakan oleh tiap-tiap pihak dalam daerahnja jang dikosongkan oleh tentara itu untuk mengikuti pembantu-pembantu militer dalam pekerdjaannja dan perondaannja didalam daerah jang dikosongkan oleh tentara. Pembesar-pembesar polisi dari satu pihak tidak boleh meronda didalam atau melalui daerah jang dikosongkan oleh tentara lain pihak kalau tidak disertai oleh seorang pembantu militer Komisi Tiga Negara dan seorang pembesar polisi dari lain pihak.
   b) memperbaiki perhubungan kerdja-sama antara pasukan-pasukan polisi kedua pihak.
6. Bahwa perdagangan dan perhubungan antara semua daerah diperbolehkan sedapat mungkin; larangan-larangan jang dianggap perlu akan disetudjui oleh kedua pihak dengan bantuan Komisi Tiga Negara dan wakil-wakilnja kalau perlu.
7. Bahwa persetudjuan ini mengandung pula pokok-pokok jang berikut jang pada azasnja telah disetudjui oleh kedua pihak.
   a) Melarang sabotage, intimidasi, dan balas-dendam serta perbuatan-perbuatan yang bersifat sedemikian pula terhadap orang-orang, golongan-golongan dan harta-benda, termasuk djuga pengrusak harta-benda apapun djuga dan jang dimiliki siapapun djuga, serta menggunakan segala tenaga jang ada padanja untuk mentjapai maksud itu.
   b) Mentjegah pidato-pidato radio atau propaganda apapun djuga jang bermaksud menghasut atau menjesatkan pikiran tentara dan penduduk.
   c) Mengadakan pidato-pidato radio serta mengambil lain-lain tindakan untuk memberi penerangan kepada semua tentara dan penduduk tentang keadaan jang genting dan tentang perlunja untuk tunduk kepada apa jang dimaksud dalam sub a) dan b).
   d) Kesempatan sepenuhnja untuk menjelidiki harus diberikan kepada pembantu-pembantu militer atau sipil jang diperbantukan kepada Komisi Tiga Negara.

e) Menghentikan dengan segera penerbitan komunike gerakan harian atau lain-lain keterangan tentang tindakan-tindakan militer, ketjuali kalau sebelumnja ada persetudjuan jang tertulis dari kedua pihak, selain dari pada pengumuman mingguan daftar orang-orang (mentjatat nama-nama, nomor dan alamat) jang telah terbunuh atau tewas dari luka-luka jang diderita dalam pertempuran.

f) Menerima azas untuk melepaskan tawanan-tawanan dari masing-masing pihak dan memulai perundingan-perundingan dengan maksud untuk melaksanakannja setjara tepat dan tjepat, pada azasnja penglepasan ini tidak memandang djumlahnja tawanan-tawanan jang dipegang oleh salah satu pihak.

8. Bahwa pada penerimaan jang tertulis diatas pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara akan segera mengadakan penjelidikan untuk menentukan apakah dan dimana teristimewa di Djawa-Barat, pasukan-pasukan tentara Republik masih melandjutkan perlawanan dibelakang kedudukan-kedudukan garis terkemuka dari pasukan-pasukan Belanda. Kalau penjelidikan membenarkan adanja pasukan-pasukan sedemikian, maka pasukan-pasukan itu harus diundurkan selekas mungkin dan sebaik-baiknja didalam 21 hari, sebagai tertjantum dalam pasal jang berikut.

9. Semua pasukan-pasukan dari masing-masing pihak didaerah manapun djuga jang telah disetudjui untuk dikosongkan oleh tentara atau didaerah mana pun disebelah daerah pihak lain jang dikosongkan oleh tentara, akan pindah dengan aman ke daerahnja sendiri jang dikosongkan oleh tentara dengan membawa semua sendjata dan perlengkapan militer dibawah pengawasan pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara. Kedua belah pihak berusaha memudahkan pemindahan setjara tjepat dan damai dari pasukan-pasukan jang bersangkutan.

10. Persetujuan ini dianggap berlaku, ketjuali djika salah satu pihak memberitahukan kepada Komisi Tiga Negara dan kepada pihak lain, bahwa dia berpendapat gentjatan perang ini tidak ditaati oleh lain pihak, dan oleh karenanja persetudjuan ini harus dibatalkan.

Atas nama Pemerintah Kerajaan Belanda	Atas nama Pemerintah Republik Indonesia
Raden Abdoelkadir Widjojoatmodjo	*Mr. Amir Sjarifuddin,*
(Ketua Delegasi)	(Ketua Delegasi).

Tanda-tanda-tangan jang diatas dibubuhkan pada tanggal 17 Djanuari 1948, diatas kapal U.S.S. *Renville*, dan disaksikan oleh wakil-wakil Komisi Tiga Negara Dewan Keamanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam soal Indonesia dan sekretaris Komisi Tiga Negara, jang tanda-tangannja dibubuhkan disini sebagai saksi-saksi.

Ketua	:	Mr. Justice Richard Kirby (Australia)
Wakil-wakil	:	Mr. Paul van Zeeland (Belgia).
		Dr. Frank Graham (Amerika Serikat).
Sekretaris	:	Mr. T.G. Narayanan.

Lampiran I

Pendjelasan tentang Persetudjuan

1. Mengenai ajat 1 dari persetudjuan tadi, berarti bahwa kedua pihak harus berusaha dengan segera dan dengan semua alat jang ada padanja untuk melaksanakan semua pokok-pokok persetudjuan gentjatan sendjata; berarti pula bahwa, djika salah satu pihak menemui kesulitan-kesulitan istimewa, dalam melaksanakan sepenuh-penuhnja kewadjiban jang diberikan kepadanja oleh persetudjuan gentjatan sendjata dalam beberapa hari jang ditetapkan, sesudah diberitahukan kepada lain pihak, pembatasan waktu empatpuluh delapan (48) djam jang ditetapkan dalam pasal pertama dari usul-usul akan diperpandjang sampai paling lama duabelas (12) hari.
2. Mengenai ajat 2 dari persetudjuan tadi, berarti bahwa djika sebagai diharapkan, persetudjuan gentjatan sendjata lambat laun dilaksanakan dan keadaan umum terus menerus mendjadi baik, daerah-daerah jang dikosongkan oleh tentara akan diperbesar lagi. Soal memperbesarkan daerah-daerah jang dikosongkan oleh tentara, atas permintaan salah satu pihak, akan dipertimbangkan segera oleh pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara, jang bertindak sesuai dengan maksud ajat 5, akan memberi nasehat kepada pembesar-pembesar jang bersangkutan.
3. Mengenai ajat 4 dari persetudjuan tadi, berarti bahwa pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara, dalam mendjalankan ajat 4 dari persetudjuan gentjatan sendjata akan mendapat segala kesempatan untuk menetapkan apakah sesuatu peristiwa memerlukan pemeriksaan oleh pembesar-pembesar jang lebih tinggi dari salah satu pihak atau kedua pihak, dalam hal mana mereka pada waktu itu djuga dengan sendirinja akan menjampaikan soal itu kepada penjuruhnja, jaitu Komisi Tiga Negara, jang bersedia untuk membantu dalam menjelesaikan perbedaan-perbedaan faham antara kedua pihak, jang mengenai gentjatan perang.

Dewan Keamanan
Komisi Tiga Negara dalam peristiwa Indonesia
Perundingan dengan Delegasi Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia
Prinsip-prinsip jang merupakan dasar jang telah disetudjui untuk melakukan perundingan politik disetudjui dalam pertemuan ke-empat tanggal 17 Djanuari 1948

Komisi Tiga Negara telah mendapat keterangan dari delegasi Keradjaan Belanda dan dari delegasi Republik Indonesia, bahwa, karena persetudjuan gentjatan-sendjata telah ditandatangani, Pemerintah mereka menerima prinsip dibawah ini atas dasar mana perundingan-perundingan politik akan dilakukan:

1. Bahwa bantuan Komisi Tiga Negara supaja dilandjutkan dalam pelaksanaan dan penanda-tanganan suatu persetudjuan untuk penjelesaian perselisihan politik dipulau Djawa, Sumatra dan Madura, berdasarkan prinsip-prinsip didalam Persetudjuan Linggadjati.
2. Diinsjafi, bahwa masing-masing pihak tidak berhak menghalang-halangi kemerdekaan pernjataan gerakan-gerakan rakjat kearah organisasi politik jang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Persetudjuan-Linggadjati. Diinsjafi djuga, bahwa masing-masing pihak akan mendjamin kemerdekaan berkumpul, berbitjara dan mengeluarkan pengumuman setiap waktu, asal sadja dalam djaminan ini terkandung arti membenarkan berlakunja kekerasan dan perbuatan pembalasan.
3. Diinsjafi, bahwa putusan-putusan mengenai perubahan dalam pemerintahan daerah hanja dapat didjalankan dengan persetudjuan penuh dan merdeka dari penduduk daerah-daerah tersebut dan apabila keamanan dan kebebasan daripada-paksaan bagi penduduk sudah terdjamin.
4. Bahwa sesudah penanda-tanganan persetudjuan politik supaja dibuat aturan-aturan untuk berangsur-angsur mengurangi pasukan-pasukan bersendjata dari kedua pihak.
5. Bahwa sesudah penanda-tanganan persetudjuan gentjatan-sendjata setjepat mungkin aktiviteit ekonomi, perdagangan, pengangkutan dan perhubungan dihidupkan kembali dengan kerdja-sama antara kedua pihak; dalam pada itu diingat djuga kepentingan bagian-bagian lainnja jang merupakan Indonesia.
6. Bahwa aturan-aturan diadakan agar terdapat waktu jang lajak, jaitu tidak kurang dari enam bulan atau tidak lebih dari satu tahun setelah penanda-tanganan persetudjuan; dalam waktu itu akan berlaku perundingan serta pertimbangan-pertimbangan jang bebas dari paksaan dan merdeka mengenai soal-soal jang penting. Pada achir waktu itu akan dilakukan pemilihan-merdeka supaja rakjat menentukan sendiri tentang perhubungan-politiknja dengan Negara Indonesia-Serikat.
7. Bahwa suatu badan pembuat undang-undang dasar akan dipilih selaras dengan djalan jang demokratis guna merentjanakan suatu undang-undang dasar bagi Negara Indonesia Serikat.
8. Diinsjafi, bahwa djika sesudah penanda-tanganan persetudjuan sebagai tersebut dalam pasal 1, salah satu pihak minta kepada Serikat Bangsa-Bangsa untuk mengadakan suatu badan guna menindjau keadaan sewaktu-waktu hingga kedaulatan dipindahkan dari pemerintah Nederland kepada pemerintah Negara Indonesia Serikat, maka pihak jang lain akan mempertimbangkan permintaan itu dengan saksama.
9. Kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Indonesia.
10. Kerdja-sama antara bangsa-bangsa Nederland dan Indonesia.

11. Suatu negara berdaulat atas dasar federal dengan suatu undang-undang dasar jang akan tertjapai dengan djalan demokratis.
12. Suatu uni antara Negara Indonesia Serikat dan lain-lain bahagian Keradjaan Nederland dibawah radja Nederland.

Disetudjui untuk pemerintah	Disetujui untuk pemerintah
Kerajaan Nederland	Republik Indonesia
(tt) *Raden Abdoelkadir Widjojoatmodjo*	(tt) *Mr. Amir Sjarifuddin*
(Ketua Delegasi)	(Ketua Delegasi)

Wakil-wakil Komisi Tiga Negara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam soal Indonesia, dan sekretaris Komisi, jang tanda-tangannja dibubuhkan disini pada tangga 17 Djanuari 1948 di kapal U.S.S. Renville menjadi saksi bahwa prinsip-prinsip tersebut di atas, disetudjui sebagai dasar untuk perundingan-perundingan politik jang akan dilakukan.

Ketua	:	(tt) Mr. Justice Richard C. Kirby (Australia).
Wakil-wakil	:	(tt) Mr. Paul van Zeeland (Belgia).
	:	(tt) Mr. T.G. Narayanan.

Dewan Keamanan
Komisi Tiga Negara dalam peristiwa Indonesia
Perundingan dengan Delegasi Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia
Enam prinsip tambahan untuk
Perundingan guna mentjapai penjelesaian politik Dikemukakan oleh
Komisi Tiga Negara dalam pertemuan keempat pada
tanggal 17 Djanuari 1948

Komisi Tiga Negara berpendapat, bahwa diantara lain-lain prinsip jang berikut ini merupakan dasar perundingan-perundingan untuk mentjapai penjelesaian politik.

1. Kedaulatan diseluruh Hindia Belanda ada dan tetap ada pada keradjaan Nederland sampai, setelah suatu masa perantaraan jang ditentukan, keradjaan Nederland memindahkan kedaulatannja kepada Negara Indonesia Serikat.

   Sebelum berachir masa perantaraan tersebut, Keradjaan Nederland dapat memindahkan hak-hak, kewadjiban-kewadjiban dan pertanggungan djawab jang

lajak kepada suatu pemerintah federal sementara dari daerah-daerah Negara Indonesia Serikat jang akan dibentuk itu. Negara Indonesia Serikat, apabila ini sudah dibentuk, akan merupakan suatu negara jang berdaulat dan merdeka sebagai partner jang sedjadjar dengan keradjaan Nederland, dalam Uni Nederland-Indonesia dengan radja Nederland sebagai kepala. Status Republik Indonesia adalah status suatu negara didalam Negara Indonesia Serikat.

2. Dalam pemerintah federal sementara, jang diadakan sebelum pengesahan undang-undang-dasar Negara Indonesia Serikat jang akan dibentuk itu, semua negara akan diberi perwakilan jang lajak.
3. Sebelum pembubaran Komisi Tiga Negara, salah satu pihak dapat minta supaja bantuan Komisi itu diteruskan guna menolong dalam penjelesaian perselisihan antara kedua pihak jang berhubungan dengan persetudjuan politik dan jang mungkin timbul selama masa perantaraan itu. Pihak jang lain tidak akan memadjukan keberatan terhadap permintaan itu; permintaan tersebut akan dikemukakan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa supaja mendapat perhatian Dewan itu, oleh pemerintah Nederland.
4. Dalam waktu tidak kurang enam bulan atau tidak lebih dari satu tahun sesudah penanda-tanganan persetudjuan ini akan dilakukan suatu pemungutan suara rakjat untuk menentukan apakah penduduk-penduduk dari berbagai daerah di Djawa, Sumatra dan Madura menghendaki supaja daerahnja merupakan bahagian Republik Indonesia atau bahagian negara lain dalam Negara Indonesia Serikat; pemungutan suara rakjat itu akan dilakukan dengan peninjauan Komisi Tiga Negara, jaitu kalau satu pihak, selaras dengan procedure jang tertera dalam pasal 3 diatas, minta djasa Komisi dalam kedudukannja sebagai *Committee of Good Offices*. Kedua pihak dapat djuga bersetudju mengambil djalan jang lain daripada pemungutan suara guna mendapat kepastian tentang kehendak penduduk-penduduk.
5. Sesudah terdapat gambaran (susunan) negara-negara itu dengan djalan selaras dengan procedure sebagai termaktub pada pasal 4 diatas, suatu badan pembuat undang-undang-dasar akan dibentuk dengan djalan demokratis guna merantjang suatu undang-undang-dasar bagi Negara Indonesia Serikat. Perwakilan berbagai negara dalam badan tersebut akan seimbang dengan besarnja djumlah penduduk.
6. Djika sesuatu negara memutuskan tidak akan mengesahkan undang-undang dasar itu dan berkehendak, selaras dengan prinsip pasal-pasal 3 dan 4 Persetudjuan Linggadjati, untuk merundingkan perhubungan istimewa dengan Negara Indonesia Serikat dan dengan keradjaan Nederland, maka kedua pihak masing-masing tidak akan mengemukakan keberatannja. *Keterangan Red.:* 6 Prinsip Politik K.T.N. ini ditandatangani pada tanggal 19-1-1948.

"Usul Natal" Komisi Tiga Negara

Dalam pidatonja sesudah penanda-tanganan persetudjuan gentjatan-senjata dan prinsip-prinsip politik pada tanggal 17 Djanuari 1948, Ketua Delegasi Republik Indonesia Mr. Amir Sjarrifuddin-menjatakan keketjewaannja, bahwa "Usul-usul mengenai gentjatan-senjata jang dikemukakan oleh Komisi pada waktu-waktu jang lalu, jang telah diterima oleh Republik, dianggap tidak dapat diterima oleh pihak Belanda".

Meskipun tidak dikatakannja, bolehlah dianggap, bahwa keketjewaan Mr. Amir terutama didasarkan pada tidak diterimanja "Usul Natal" Komisi Tiga Negara.

Apa isi usul ini sebenarnja tak pernah diumumkan dengan resmi, tetapi telah botjor pula kepada pers, terutama disiarkan oleh "United Press" dan kantor-kantor berita asing serta "Antara".

"Usul Natal" Komisi Tiga Negara, sebagai jang tersiar disana-sini dalam pers, dapat kita simpulkan dalam beberapa pokok jang terpenting: mengenai gentjatan-sendjata: disitu disebut-sebut pula "garis demarkasi tanggal 29 Agustus", tetapi tidak dinamakannja "garis status quo", artinja hanja disebutnja berkenaan dengan keadaan sekarang dan untuk sementara diperlukannja sebagian besar mendjalankan gentjatan-sendjata; demiliterisasi harus dilakukan didaerah sebelah-menjebelah garis tersebut, dan disebut-sebut pula bahwa pasukan-pasukan Belanda harus mundur sampai kedudukan tanggal 20 Djuli, jaitu kedudukan sehari sebelum perang kolonial dimulai; djumlah tentara harus lambat laun dikurangi, pengosongan "pockets" tidak disebut mengenai politik: dasar-dasar Linggadjati dikemukakan, didalamnja termasuk pula pembentukan Negara Indonesia Serikat; pemerintahan sipil harus segera dikembalikan pada kedudukan dan keadaannja sebelum perang kolonial.

Beberapa tjatatan

Berkenaan dengan penolakan "Usul-Natal" Komisi Tiga Negara oleh pihak Belanda tersebut, perlu ditjatat, bahwa kewadjiban pertanggungan djawab dan kemungkinan-kemungkinan bagi Komisi tersebut adalah terbatas pada "good-offices" sadja, karena tidak mempunjai kekuasaan sebagai arbiter. Kewadjibannja hanja terbatas pada menerima usul-usul dari kedua pihak, menjampaikan usul pihak jang satu kepada pihak lainnja djika dipandang perlu, mengemukakan sugesti-sugesti sendiri, menghubungkan kedua pihak dan memberi laporan-laporan, diantaranja pembantu-pembantu militer, jang bisa melakukan penindjauan dan membantu kedua pihak dalam usaha mentjapai penjelesaian.

Kronologi kejadian selama Aksi Militer I Belanda.

20 Djuli 1974 djam 24.00 malam permulaan perang-kolonial. Achir Djuli soal Indonesia dibawa ke Dewan Keamanan oleh Australia dan India.

1 Agustus dalam sidang ke-173 Dewan Keamanan diputuskan; "... minta kepada kedua belah pihak supaja dengan segera menghentikan permusuhan dengan djalan arbitrage atau dengan djalan damai lainnja".

4 Agustus pihak Republik baru menerima putusan tersebut, (via Belanda) dan perintah penghentian tembak-menembak diutjapkan.

7 Agustus usul arbitrage Pilipina ditolak. Djuga usul arbitrage Australia dan Polandia jang diutjapkan kemudian tidak diterima. Rusia dan Polandia atjap kali mengusulkan penarikan tentara Belanda, tetapi ditolak.

25 Agustus usul arbitrage Pilipina ditolak. Djuga usul arbitrage Australia dan Polandia jang diutjapkan kemudian tidak diterima. Rusia dan Polandia atjap kali mengusulkan penarikan tentara Belanda, tetapi ditolak.

25 Agustus resolusi (usul Rusia) membentuk komisi 11 negara jang diterima dengan 7 suara pro, 2 suara kontra dan 2 blanko,

diveto oleh Perantjis. Usul Amerika untuk membentuk komisi "good-offices" diterima dengah 8 suara pro, 3 blanko.

8 Oktober Komisi Tiga Negara untuk pertama kalinja bersidang di New York.

27 Oktober Komisi Tiga Negara tiba di Indonesia.

Lampiran 5

STATEMENT ROEM–ROYEN

I. STATEMENT DELEGASI REPUBLIK INDONESIA

(Diutjapkan oleh Mr. Moh. Roem)

Sebagai Ketua Delegasi Republik saja diberi kuasa oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk menjatakan kesanggupan mereka sendiri (*persoonlijk*), sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan tertanggal 28 Djanuari 1949 dan petundjuk-petundjuknja tertanggal 23 Maret 1949 untuk memudahkan tertjapainja:

1. pengeluaran perintah kepada pengikut-pengikut Republik jang bersenjata untuk menghentikan perang gerilja;
2. kerdja-sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan mendjaga ketertiban dan keamanan, dan
3. turut serta pada Konperensi Medja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penjerahan kedaulatan jang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Sarekat, dengan tidak bersjarat.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta akan berusaha mendesak supaja politik demikian diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia selekas-lekasnja setelah dipulihkan di Jogjakarta.

II. STATEMENT DELEGASI BELANDA

(Diutjapkan oleh Dr. van Royen)

1. Delegasi Belanda diberi kuasa menjatakan bahwa, berhubung dengan kesanggupan jang baru sadja diutjapkan oleh Mr. Roem, ia menjetujui kembalinja Pemerintah Republik Indonesia di Jogjakarta. Delegasi Belanda selandjutnja menjetujui pembentukan satu panitya-bersama atau lebih di bawah auspices UNCI dengan maksud:
   a. mengadakan penjelidikan dan persiapan jang perlu sebelum kembalinja Pemerintah Republik Indonesia ke Jogjakarta.
   b. mempelajari dan memberi nasehat tentang tindakan tindakan jang akan diambil untuk melaksanakan penghentian perang gerilja dan kerdja-sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan mendjaga ketertiban dan keamanan.
2. Pemerintah Belanda setudju bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan djabatannja jang sepatutnja dalam satu daerah jang meliputi Karesidenan Jogjakarta dan bahwa ini adalah satu langkah jang dilakukan sesuai dengan maksud petundjuk-petundjuk Dewan Keamanan tanggal 23 Maret 1949.

Lampiran 6

KOMUNIKE BERSAMA
KONPERENSI ASIA–AFRIKA
JANG TELAH DIADAKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 18 S/D 24 APRIL 1955.

Konperensi negara2 Asia-Afrika telah berkumpul atas undangan para perdana menteri Burma, Sailan, India, Indonesia dan Pakistan di Bandung dari tanggal 18 hingga 24 April dan dikundjungi, ketjuali oleh kelima negara penjelenggara ini, djuga oleh negara-negara:

1. Afghanistan
2. Kambodja
3. Rep. Rakjat Tiongkok
4. Mesir
5. Ethiopia
6. Pantai Emas
7. Iran
8. Irak
9. Djepang
10. Jordania
11. Laos
12. Lebanon
13. Liberia
14. Libia
15. Nepal
16. Pilipina
17. Saudi Arabia
18. Sudan
19. Suriah
20. Muang Thai
21. Turki
22. Republik Demokrasi Vietnam (Utara)
23. Negara Vietnam (Sel.)
24. Yaman

Konperensi Asia-Afrika telah meninjau soal2 jang mengenai kepentingan bersama negara2 Asia dan Afrika dan telah merundingkan tjara2 bagaimana rakjat negara2 ini dapat bekerdja sama dengan lebih erat dilapangan ekonomi, kebudajaan dan politik.

A. KERDJA-SAMA EKONOMI.

1. Konperensi Asia-Afrika mengakui mendesaknja keperluan untuk memadjukan perkembangan ekonomi didaerah Asia dan Afrika. Diantara negara2 peserta terdapat keinginan umum untuk bekerdja-sama dalam lapangan ekonomi atas dasar saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan nasional masing2.

Usul2 mengenai kerdja-sama dalam lapangan ekonomi diantara negara2 peserta sendiri tidaklah menutup keinginan atau kebutuhan akan kerdja-sama dengan negara2 jang terletak diluar daerah ini, termasuk penanaman modal asing.

Selanjutnja diakui, bahwa bantuan jang diterima oleh beberapa negara peserta konperensi jang tertentu dari luar daerah ini, melalui peraturan2 internasional telah memberi sumbangan jang besar bagi pelaksanaan rentjana pembangunan mereka.

2. Negara2 peserta konperensi menjetudjui untuk saling memberikan bantuan teknik, sebanjak mungkin jang dapat dilaksanakan dalam bentuk tenaga2 ahli, pelatih2, usaha2 perintis dan perlengkapan2 bagi keperluan demonstrasi; untuk saling tukar-menukar pengetahuan dan pengalaman, pendirian lembaga2 nasional dan, bila mungkin, lembaga2 regional untuk latihan dan penjelidikan bagi penjebaran pengetahuan dan ketjakapan teknik, dengan bekerdja-sama dengan badan2 internasional jang ada.
3. Konperensi Asia-Afrika mengandjurkan, dibentuknja dengan segera suatu Dana Istimewa PBB untuk Perkembangan Ekonomi; supaja Bank Internasional untuk Pembangunan dan Kemadjuan (*International Bank for Reconstruction and Development*) menjediakan alokasi dari sebagian terbesar dari kekajaannja untuk negara2 Asia adan Afrika; dibentuknja dengan segera suatu Kerdja sama Keuangan Internasional jang usaha2nja hendaknja meliputi tertjapainja penanaman modal dengan tjara jang adil; dan dorongan bagi diperluasnja usaha-usaha bersama diantara negara-negara Asia-Afrika jang dapat membawa keuntungan bagi kepentingan mereka bersama.
4. Konperensi Asia-Afrika mengakui perlunja diadakan usaha2 untuk menstabilisasikan perdagangan barang2 didaerahnja. Prinsip untuk memperluas lingkungan perdagangan dan perdagangan multilateral telah diterima oleh konperensi. Tetapi diakui pula, bahwa beberapa negara akan terpaksa menjalankan perdagangan bilateral berhubung dengan keadaan ekonominja.
5. Konperensi Asia-Afrika mengandjurkan diambilnja tindakan kolektif dan negara2 peserta untuk mentjapai stabilitasi harga2 internasional dan permintaan barang2 keperluan pertama dengan djalan perdjandjian2 bilateral dan multilateral, dan agar selama dapat didjalankan serta memang diinginkan hendaknja mereka mengambil sikap jang lama mengenai soal2 ini dalam Panitia Penasihat Tetap P.B.B. untuk Perdagangan Barang2 Internasional (*United Nations Permanent Advisory Commission and International Commodity Trade*) dan lain2 forum internasional.
6. Konperensi Asia-Afrika selandjutnja mengandjurkan supaja: negara2 Asia-Afrika merubah perdagangan ekspornja dengan mengolah bahan2 mentahnja sendiri - selama ekonomis dapat dipertanggung djawabkan sebelum mengekspornja;

perdagangan intra-regional hendaknja diadjukan dan pertukaran delegasi2 dagang dan rombongan2 kaum pengusaha diberi dorongan; pertukaran keterangan2 dan tjontoh2 hendaknja diandjur2kan dengan maksud, supaja perdagangan intra-regional dapat diperluas; fasilitet2 jang biasa bagi perdagangan transito hendaknja diberikan kepada negara2 jang letaknja dilingkungi oleh negara2 lain.

7. Konperensi Asia-Afrika menganggap soal2 perkapalan penting sekali dan menjatakan penjesalannja, bahwa maskapai2 pelajaran sewaktu2 merubah tarif pengangkutannja jang menjatakan kerap kali merugikan negara2 peserta. Konperensi mengandjurkan, supaja soal ini dipeladjari dan sesudah ini supaja diadakan tindakan bersama untuk memaksa maskapai2 perkapalan jang bersangkutan mengambil sikap jang lebih pantas. Telah disarankan, supaja dipelajari pengangkutan dengan kereta api bagi perdagangan transito.
8. Konperensi Asia-Afrika menjetujui untuk memberikan dorongan bagi pembentukan bank2 dan perseroan2 pertanggungan (*insurance companies*) nasional dan regional.
9. Konperensi Asia-Afrika berpendapat, bahwa pertukaran keterangan2 mengenai hal2 jang berhubungan dengan semuanja itu, seperti misalnja jang mengenai transfer keuntungan padjak, mungkin akan dapat membawa kepada suatu perumusan politik bersama.
10. Konperensi Asia-Afrika menegaskan pentingnja arti perkembangan penggunaan tenaga nuclear untuk keperluan2 damai bagi negara2 Asia-Afrika. Konperensi menjambut dengan gembira inisiatif negara2 jang terutama bersangkutan untuk menjediakan keterangan2 mengenai penggunaan tenaga atom bagi tudjuan2 damai; mendesak segera dibentuknja suatu Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency*) dimana negara2 Asia harus mempunyai wakil2 jang tjukup, terutama dalam kekuasaan eksekutip dari pada badan ini, dan mengandjurkan kepada pemerintah negara2 Asia dan Afrika untuk mempergunakan sebaik2-nja kesempatan untuk mendapat latihan dan fasilitet2 lainnja mengenai penggunaan tenaga atom bagi tudjuan2 damai jang ditawarkan oleh negara2 jang menjokong rentjana sematjam ini.
11. Konperensi Asia-Afrika menjetujui ditundjuknja penjabat2 penghubung di negara2 peserta oleh masing2 pemerintah negara ini untuk pertukaran keterangan2 dan pendapat2 mengenai hal jang dapat memberi keuntungan bersama. Konperensi menganjurkan, supaja negara2 peserta mempergunakan sebaik2nja kesempatan jang diberikan oleh organisasi2 internasional jang telah ada dan mengandjurkan kepada negara2 jang belum mendjadi anggota organisasi2 sematjam ini, tetapi berhak untuk diterima sebagai anggota, supaja berusaha mendapatkan keanggotaannja.
12. Konperensi Asia-Afrika mengandjurkan diadakannja perundingan2 pendahuluan antara negara2 peserta dalam forum2 internasional dengan maksud sebanjak mungkin

menarik keuntungan bagi kepentingan ekonomi bersama mereka. Tetapi ini bukannja dimaksudkan untuk membentuk suatu blok regional.

B. KERDJA-SAMA KEBUDAJAAN.

1. Konperensi Asia-Afrika jakin, bahwa diantara usaha2 jang terpenting untuk memadjukan saling mengerti diantara bangsa2, jalan usaha memadjukan kerdjasama kebudajaan Asia dan Afrika adalah tempat lahirnja agama2 dan kebudajaan2 jang besar jang telah memperkaja kebudajaan2 dan peradaban2 lain dan dalam process itu telah mendjadi makin kaja pula. Dengan begitu maka kebudajaan2 Asia dan Afrika mempunjai dasar rochani jang universil. Tetapi negara2 Asia dan Afrika telah berputus selama abad jang lalu.

   Bangsa2 Asia dan Afrika sekarang berkehendak dengan sungguh2 untuk membaharui hubungan2 kebudajaan mereka jang lama dan memperkembangkan hubungan2 baru dalam hubungan dunia modern sekarang ini. Semua negara peserta konperensi menjatakan kehendak mereka untuk bekerdja jang lebih erat dalam lapangan kebudajaan.

2. Konperensi Asia-Afrika memperhatikan kenjataan, bahwa adanja kolonialisme dibanjak bagian dari pada Asia dan Afrika, dalam bentuk apapun djuga, tidak hanja menghalang-halangi kerdjasama kebudajaan, tetapi djuga menindas kebudajaan nasional dari rakjat. Beberapa negara2 djadjahannja hak2 dasar mereka dalam lapangan pendidikan dan kebudajaan, jang menghalang2i perkembangan kepribadian mereka dan djuga mentjegah adanja hubungan kebudajaan dengan bangsa2 Asia dan Afrika lainnja. Hal ini terutama njata dalam hal Tunisia, Aldjazair, dan Marokko, dimana hak dasar rakjatnja untuk mempelajari bahasa dan kebudajaan mereka sendiri telah ditindas. Diskriminasi sematjam ini telah didjalankan pula terhadap bangsa2 Afrika dan bangsa2 kulit berwarna dibeberapa bagian benua Afrika. Konperensi merasa, bahwa tindakan2 ini merupakan pelanggaran hak2 dasar manusia, menghalang2i berkembangnja kebudajaan didaerah ini dan pula menghalang2i kerdjasama kebudajaan dalam lapangan internasional jang lebih luas. Konperensi dengan ini mengutuk pelanggaran hak2 dasar manusia dalam lapangan pendidikan dan kebudajaan dibeberapa daerah di Asia dan Afrika dan bentuk2 lain dari penindasan kebudajaan. Konperensi terutama mengutuk racialisme sebagai alat untuk melakukan penindasan dalam lapangan kebudajaan.

3. Dalam pandangannja mengenai pengembangan kerdjasama kebudajaan diantara negara2 Asia dan Afrika sama sekali bukanlah maksud konperensi untuk mengetjualikan atau menjaingi golongan bangsa2 dan peradaban serta kebudajaan lain. Sesuai dengan tradisi toleransi dan universalitet negara2 Asia dan Afrika, konperensi berpendapat, bahwa kerdjasama kebudajaan antara mereka haruslah diperkembangkan dalam hubungan kerdjasama sedunia jang lebih luas.

Berdampingan dengan pengembangan kerdjasama kebudajaan antara bangsa2 Asia dan Afrika negara2 Asia-Afrika berkehendak pula mengembangkan hubungan kebudajaan mereka dengan negara2 lain. Hal ini mereka anggap akan dapat memperkaja kebudajaan mereka sendiri dan memberikan sumbangan bagi tertjapainja perdamaian dunia dan saling pengertian.

4. Masih banyak negara2 di Asia dan Afrika jang belum dapat memperkembangkan dirinja dalam lapangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan tehnik. Konperensi mengandjurkan, supaja negara2 di Asia dan Afrika jang dalam hal ini telah lebih beruntung, memberikan fasilitet2 bagi masuknja mahasiswa2 dan orang2 jang hendak mengikuti latihan dari negara2 tersebut diatas tadi kedalam badan2 pendidikan mereka. Fasilitet2 sematjam itu hendaknja diberikan pula kepada penduduk bangsa Asia dan Afrika jang pada dewasa ini dilanggar haknja untuk mendapatkan kesempatan menerima pendidikannja jang lebih tinggi.

5. Konperensi Asia-Afrika berpendapat, bahwa usaha2 memadjukan kerdjasama kebudajaan antara negara2 Asia dan Afrika hendaknja ditudjukan kepada:

   1. mendapat pengetahuan tentang negara2 satu sama lain

   2. pertukaran kebudajaan dan

   3. pertukaran keterangan2.

6. Konperensi Asia-Afrika berpendapat, bahwa dalam tingkatan sekarang ini hasil2 terbaik dalam kerdjasama kebudajaan akan dapat diperoleh dengan mengadakan perdjandjian2 bilateral untuk memenuhi andjuran2 konperensi, dan dengan tindakan masing2 negara sendiri dimana mungkin dan dapat.

C. HAK2 MANUSIA DAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI.

1. Konperensi Asia-Afrika menjatakan sokongannja jang sepenuhnja kepada prinsip2 dasar Hak2 Manusia seperti jang tertjantum dalam piagam P.B.B. dan memperhatikan Pernjataan tentang Hak2 Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) sebagai dasar umum bagi seluruh rakjat. Konperensi menjatakan sokongan sepenuhnja kepada prinsip untuk menentukan nasib sendiri, seperti termuat dalam piagam P.B.B. dan memperhatikan resolusi P.B.B. mengenai hak2 rakjat dan bangsa2 untuk menentukan nasib sendiri, jang merupakan sjarat pertama untuk dapat menikmati hak2 dasar manusia seluruhnja.

2. Konperensi Asia-Afrika menjesalkan politik dan tindakan membeda2kan dan diskriminasi jang merupakan dasar pemerintahan dan hubungan2 diantara manusia2 didaerah2 luas di Afrika dan lain2 bagian dunia. Tindakan sematjam itu tidak hanja suatu pelanggaran besar terhadap hak2 manusia, tetapi djuga terhadap nilai2 dasar peradaban dan martabat manusia.

Konperensi menjatakan simpatinja jang besar dan sokongan kepada sikap gagah berani dari para korban2 diskriminasi bangsa2, terutama kepada sikap penduduk bangsa Afrika. India dan Pakistan di Afrika Selatan; Konperensi menghargai mereka semua jang menjokong soal mereka itu; menguatkan kebulatan tekad bangsa2 Asia dan Afrika untuk menghapuskan setiap bekas rasialisme jang mungkin masih ada dalam negerinja, dan berdjandji mempergunakan seluruh pengaruh moralnja untuk mendjaga djangan sampai djatuh korban2 kedjahatan jang sama jang hendak mereka hapuskan dalam perdjoangan mereka.

D. MASALAH BANGSA2 JANG BELUM MERDEKA.

1. Konperensi Asia-Afrika telah membitjarakan masalah bangsa2 jang belum merdeka, kolonialisme dan keburukan2 jang timbul dari pendjadjahan serta pemerasan bangsa2 oleh kekuasaan asing.

   Konperensi menjetujui untuk:

   a. menjatakan, bahwa kolonialisme dalam bentuknja jang bagaimanapun djuga adalah suatu kedjahatan jang harus segera diachiri;

   b. menegaskan, bahwa didjadjahnja serta diperasnja bangsa2 oleh kekuasaan asing merupakan pelanggaran hak2 dasar manusia, bertentangan dengan piagam P.B.B. dan merupakan penghalang bagi tertjapainja perdamaian dan kerdjasama sedunia;

   c. menjatakan bantuannja kepada perdjoangan untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan bagi semua bangsa2 tersebut dan,

   d. menjerukan kepada negara2 jang bersangkutan, supaja memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada bangsa2 tadi.

2. Mengingat belum tertjapainja penjelesaian keadaan di Afrika Utara dan masih tetap belum diberikannja hak menentukan nasib sendiri kepada bangsa2 di Afrika Utara, konperensi Asia-Afrika menjatakan bantuannja kepada hak rakjat Aldjazair, Marokko dan Tunisia untuk menentukan sendiri dan mendesak kepada Pemerintah Perantjis untuk menjelesaikan soal ini setjepat2nja dengan tidak ditunda2 lagi.

E. SOAL2 LAIN.

1. Mengingat adanja ketegangan di Timur Tengah jang disebabkan karena keadaan di Palestina dan adanja bahaja bagi perdamaian dunia jang dirupakan oleh ketegangan ini, konperensi Asia-Afrika menjatakan sokongannja kepada hak bangsa2 Arab atas Palestina dan menjerukan dilaksanakannja resolusi PBB

mengenai Palestina dan ditjapainja suatu penjelesaian dengan djalan damai dari pada masalah Palestina.

2. Dalam hubungan sikap jang telah dinjatakannja mengenai penghapusan kolonialisme, konperensi Asia-Afrika menjokong kedudukan Indonesia dalam persoalan Irian Barat jang didasarkan pada persetudjuan jang telah ditjapai antara Indonesia dan Belanda mengenai soal ini.

   Konperensi Asia-Afrika mendesak pemerintah Belanda untuk setjepat mungkin memulai lagi perundingan2, untuk menepati kewajiban2 mereka seperti jang ditentukan dalam persetudjuan tersebut diatas tadi dan menjatakan harapannja, supaja P.B.B. mau membantu pihak2 jang bersangkutan untuk mentjapai penjelesaian perselisihan ini dengan djalan damai.

3. Konperensi Asia-Afrika menjokong kedudukan Yaman dalam persoalan Aden dan bagian2 Selatan dari pada Yaman jang dikenal sebagai daerah2 protektorat, serta mendesak pihak2 jang bersangkutan untuk mentjapai penjelesaian masalah ini dengan djalan damai.

F. MEMADJUKAN PERDAMAIAN DAN KERDJASAMA DI DUNIA.

1. Memperhatikan kenjataan, bahwa masih ada beberapa negara jang belum diterima mendjadi anggota P.B.B., Konperensi Asia-Afrika jang beranggapan, bahwa untuk kerdjasama jang efektif dalam usaha mentjapai perdamaian dunia keanggotaan dari P.B.B. haruslah bersifat universil menjerukan kepada Dewan Keamanan untuk menjokong diterimanja semua negara2 itu jang, menurut sjarat2 jang ditentukan dalam piagam P.B.B., berhak untuk diterima sebagai anggota. Menurut pendapat konperensi Asia-Afrika, negara2 berikut ini diantara negara2 peserta konperensi, jaitu: Kambodja, Sailan, Djepang, Jordania, Laos, Libia, Nepal, Vietnam jang Bersatu, (United Vietnam) berhak pula untuk diterima mendjadi anggota.

   Konperensi mempertimbangkan, bahwa perwakilan dari pada negara2 jang terletak dalam daerah Asia-Afrika dalam Dewan Keamanan, berdasarkan perwakilan menurut pembagian jang sesuai dengan letak geografis daerah2, adalah tidak tjukup. Konperensi menjatakan pendapatnja, bahwa mengenai keanggotaan jang tidak tetap dari Dewan Keamanan, negara2 Asia-Afrika, jang menurut persetudjuan jang ditjapai di London dalam 1946 tidak mendapat hak untuk dipilih, hendaknja diberi kesempatan untuk memberikan djasa2nja dalam Dewan Keamanan, supaja mereka dapat memberikan sumbangan jang efektif bagi usaha mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia.

2. Konperensi Asia-Afrika, setelah mempelajari keadaan jang berbahaja berhubung dengan adanja ketegangan internasional dan bahaja dunia, dimana kekuatan penghantjur dari segala matjam sendjata, termasuk sendjata2 nuclear dan thermo-

nuclear, tentunja akan dipergunakan, meminta perhatian dari seluruh bangsa2 bagi akibat2 jang dahsjat jang akan terdjadi apabila peperangan sematjam itu petjah.

Konperensi beranggapan, bahwa perlutjutan sendjata dan pelarangan produksi, pertjobaan dan penggunaan sendjata2 nuclear dan thermo-nuclear adalah suatu keharusan untuk menjelamatkan manusia dan peradaban dari ketakutan dan kemungkinan akan kehantjuran seluruhnja. Konperensi merasa, bahwa bangsa2 Asia dan Afrika jang berkumpul dalam konperensi ini berkewadjiban terhadap kemanusiaan dan peradaban untuk menjatakan sokongan mereka bagi perlutjutan sendjata dan pelarangan negara2 jang terutama bersangkutan serta kepada pendapat umum didunia untuk diadakannja perlutjutan sendjata dan pelarangan sematjam itu.

Konperensi berpendapat, bahwa pengawasan internasional yang efektif haruslah diadakan dan dipertahankan untuk mendjamin ditepatinja perlutjutan sendjata dan pelarangan tadi dan bahwa untuk keperluan ini haruslah diambil tindakan2 jang segera dan tegas.

Dengan tudjuan untuk mentjapai dilarangnja sama sekali pembuatan sendjata-sendjata nuclear dan thermo-nuclear, konperensi menjerukan kepada semua negara-negara jang bersangkutan, untuk menghentikan pertjobaan-pertjobaan dengan sendjata-sendjata sematjam itu.

G. PERNJATAAN MENGENAI USAHA MEMADJUKAN PERDAMAIAN DAN KERDJASAMA DI DUNIA.

Konperensi Asia-Afrika memikirkan dengan rasa chawatir soal perdamaian dan kerdjasama sedunia. Konperensi melihat dengan rasa chawatir adanja ketegangan2 internasional dewasa ini dengan antjaman bahaja petjahnja perang dunia dimana dipergunakan sendjata2 atom. Masalah perdamaian mempunjai sangkut-paut jang rapat dengan masalah keamanan internasional.

Dalam hubungan ini semua negara2 didunia hendaknja bekerdja-sama, terutama melalui P.B.B., dalam usaha mentjapai pengurangan persendjataan dan penghapusan sendjata2 nuclear di bawah pengawasan internasional. Dengan djalan ini perdamaian dunia akan dapat ditjapai dan tenaga nuclear akan dapat dipergunakan semata2 untuk keperluan damai.

Ini akan dapat memenuhi kebutuhan2 terutama dari Asia dan Afrika, sebab kebutuhan mereka jang mendesak jalan kemadjuan sosial dan tingkat hidup jang lebih baik dalam kemerdekaan jang lebih luas.

Kemerdekaan dan perdamaian saling bergantungan. Hak untuk menentukan nasib sendiri harus dapat diketjap oleh semua bangsa2 dan kebebasan serta kemerdekaan haruslah diberikan dengan setjepat mungkin, kepada mereka jang belum merdeka. Sesungguhnja, semua bangsa2 haruslah mendapat haknja untuk memilih sendiri dengan bebas sistim politik, ekonomi atau tjara hidup jang mana jang akan dianutnja, jang, sesuai dengan tudjuan2 dan prinsip2 jang termuat dalam piagam P.B.B.

Dengan bebas dari perasaan tjuriga dan takut, dan dengan saling mempertjajai dan menunjukkan *goodwill*, semua bangsa didunia hendaknja mendjalankan toleransi dan hidup bersama dalam perdamaian sebagai tetangga jang baik, dan, mendjalankan kerdjasama dalam suasana persahabatan atas dasar prinsip2 berikut ini:

1) Menghormati hak2 dasar manusia dan tudjuan serta azas2 jang termuat dalam piagam P.B.B.
2) Menghormati kedaulatan dan integritet teritorial semua bangsa2.
3) Mengakui persamaan semua suku2 bangsa dan persamaan semua bangsa2 besar maupun ketjil.
4) Tidak melakukan intervensi atau tjampur tangan dalam soal2 dalam negeri negara lain.
5) Menghormati hak tiap2 bangsa untuk mempertahankan diri sendiri setjara sendirian atau setjara kolektif, jang sesuai dengan piagam P.B.B.
6) (a) Tidak mempergunakan peraturan2 dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan chusus dari salah satu dari negara2 besar.
   (b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
7) Tidak melakukan tindakan2 atau antjaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap intergritet territorial atau kemerdekaan politik sesuatu negara.
8) Menjelesaikan segala perselisihan2 internasional dengan djalan damai, seperti perundingan, persetudjuan, arbitrase atau penjelesaian hakim, atau pun lain2 tjara damai lagi menurut pilihan pihak2 jang bersangkutan, jang sesuai dengan piagam P.B.B.
9) Memadjukan kepentingan bersama dan kerdja-sama.
10) Menghormati hukum dan kewadjiban2 internasional.

Konperensi Asia-Afrika menjatakan kejakinannja, bahwa kerdja-sama setjara persahabatan jang sesuai dengan prinsip2 ini, akan dapat memberikan sumbangan jang efektif kepada usaha mempertahankan dan memadjukan perdamaian dan keamanan internasional, sedangkan kerdja-sama dalam lapangan ekonomi, sosial dan kebudajaan akan dapat memberikan sumbangan bagi tertjapainja kemakmuran bersama.

H. PENUTUP

Konperensi Asia-Afrika mengandjurkan supaja kelima negara penjelenggara mempertimbangkan diadakannja pertemuan berikutnja dari pada konperensi ini, dengan meminta pendapat negara2 peserta lainnja.

Bandung, 24 April 1955.

Lampiran 7

DEKRIT KEMBALI KEPADA UUD 1945

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA /
PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG

Dengan ini menjatakan dengan chidmat:

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara.

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipercajakan oleh Rakjat kepadanja.

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa, menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan, bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG.

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah, dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 5 Djuli 1959.
Atas nama Rakjat Indonesia,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

SOEKARNO

Lampiran 8

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH

I. Mengingat

1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional maupun Internasional

1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966

II. Menimbang

2.1. Perlu adanja ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi

2.2. Perlu adanja djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja

III. Memutuskan/Memerintahkan

Kepada : LETNAN DJENDRAL SOEHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan2 lain dengan sebaik-baiknja.
3. Supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung-djawab seperti tersebut diatas:

IV. Selesai

Djakarta, 11 Maret 1966
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR
REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.

SOEKARNO

Lampiran 9

STRUKTUR PERTAHANAN–KEAMANAN NASIONAL (HANKAMNAS)

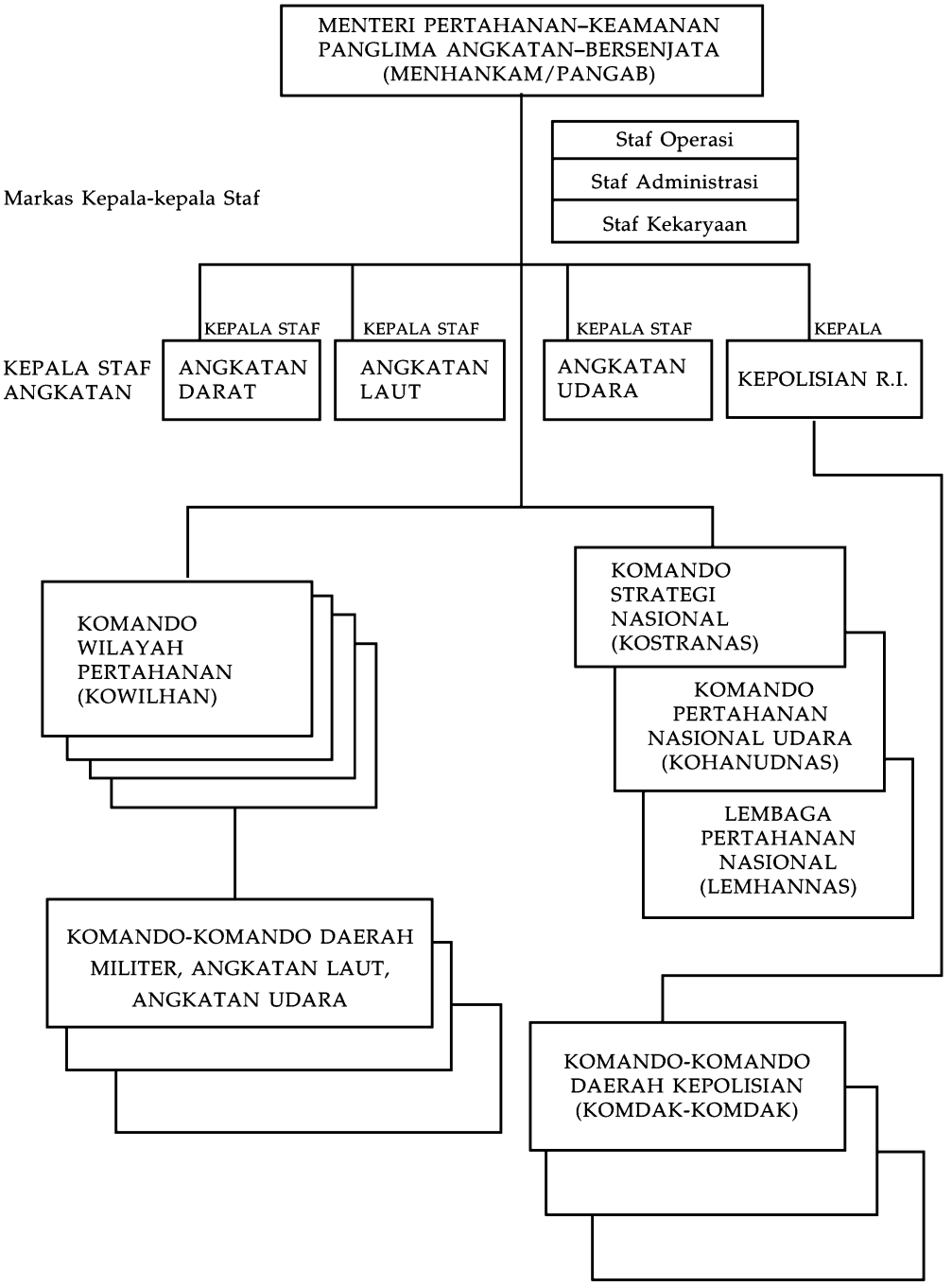

Lampiran 10

KABINET-KABINET REPUBLIK INDONESIA
(1945–1983)

I. Masa Perang Kemerdekaan.

1.	Kabinet Presidentil	:	2 September 1945–14 Nopember 1945.
2.	Kabinet Sjahrir I	:	14 Nopember 1945–12 Maret 1946.
3.	Kabinet Sjahrir II	:	12 Maret 1946–2 Oktober 1946.
4.	Kabinet Sjahrir III	:	2 Oktober 1946 –3 Juli 1947.
5.	Kabinet Amir Sjarifuddin I	:	3 Juli 1947–11 November 1947.
6.	Kabinet Amir Sjarifuddin II	:	11 Nopember 1947– 29 Januari 1948.
7.	Kabinet Hatta I	:	29 Januari 1948–4 Agustus 1949.
7.	Kabinet Darurat (Sjatruddin)	:	19 Desember 1948–13 Juli 1949.
8.	Kabinet Hatta II	:	4 Agustus 1949–20 Desember 1949.

II. Masa Demokrasi Liberal.

9.	Kabinet Hatta	:	20 Desember 1949–6 September 1950.
10a.	Kabinet Peralihan (Susanto)	:	20 Desember 1949–21 Januari 1950.
10b.	Kabinet Halim (RI Jogjakarta	:	21 Januari 1950–6 September 1950.
11.	Kabinet Natsir	:	6 September 1950–27 April 1951.
12.	Kabinet Sukiman	:	27 April 1951–3 April 1952.
13.	Kabinet Wilopo	:	3 April 1952–1 Agustus 1953.
14.	Kabinet Ali Sastroamidjojo	:	1 Agustus 1953–12 Agustus1955.
15.	Kabinet Burhanuddin Harahap	:	12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956.
16.	Kabinet Ali Sastroamidjojo II	:	24 Maret 1956–9 April 1957.
17.	Kabinet Djuanda (Kabinet Karya)	:	9 April 1957–10 Juli 1959.

III. Masa Demokrasi Terpimpin.

18.	Kabinet Kerja I	:	10 Juli 1959–18 Februari 1960.
19.	Kabinet Kerja II	:	18 Februari 1960–6 Maret 1962.
20.	Kabinet Kerja III	:	6 Maret 1962–13 Nopember 1963.
21.	Kabinet Kerja IV	:	13 Nopember 1963–27 Agustus 1964.

22. Kabinet Dwikora : 27 Agustus 1964–20 Februari 1966.
23. Kabinet Dwikora yang disempurnakan : 21 Februari 1966–11 Maret 1966.
24. Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi : 27 Maret 1966–24 Juli 1966.

IV. Masa Orde Baru.

25. Kabinet Ampera : 25 Juli 1966–10 Oktober 1967.
26. Kabinet Ampera yang disempurnakan : 11 Oktober 1967–6 Juni 1968.
27. Kabinet Pembangunan I : 6 Juni 1968–23 Maret 1973.
28. Kabinet Pembangunan II : 27 Maret 1973– 28 Maret 1978.
29. Kabinet Pembangunan III : 29 Maret 1978–15 Maret 1983.
30. Kabinet Pembangunan IV : 16 Maret 1983–

Pahlawan Nasional Indonesia

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) Edisi Pemutakhiran ini terbit dalam cetakan ketujuh. Sejak awal penerbitan SNI pada tahun 1975, buku SNI ini belum pernah dimutakhirkan sesuai dengan temuan-temuan baru dan perkembangan teori sejarah yang baru. Sudah hampir tiga puluh tiga tahun, banyak naskah perbaikan masih tersimpan di laci para penulis sejarah Indonesia. Keunikan dari SNI adalah bahwa buku merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri, ilmuwan/wati Indonesia yang sebagian besar masih hidup.

Keunikan kedua dari buku SNI ini adalah dia ditulis dengan latar belakang Indonesia atau bersifat Indonesia sentris. Untuk mengetahui latar belakang penulisan buku SNI sebanyak enam jilid ini perlu membaca Prakata Editor Umum pada edisi pertama yang ditulis oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo.

Buku SNI telah mendapat julukan dari masyarakat Indonesia sebagai "buku standar" sejarah Indonesia. Oleh karena itu, isi buku SNI sering dipakai sebagai sumber rujukan penulisan dan pembicaraan tentang sejarah Indonesia, baik secara langsung dikatakan maupun secara tersirat.

Balai Pustaka sebagai pemegang hak penerbitan buku SNI telah berusaha keras untuk menghidupkan kembali semangat nasional para pencetus dan penulis awal buku SNI. Dengan menghimpun semua mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penulisan buku SNI, Balai Pustaka berhasil memutakhirkan isi buku SNI. Kepada para penulis buku SNI, baik yang masih hidup dan terus terlibat dalam pemutakhiran buku SNI ini dan kepada yang telah meninggal, Balai Pustaka mengucapkan terima kasih dan penghormatan besar atas karya dan jasa mereka.

Dengan ini, SNI Edisi Pemutakhiran ini hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga SNI Edisi Pemutakhiran ini menyadarkan bangsa Indonesia akan sejarah bangsanya dan buku ini berguna bagi bangsa Indonesia.

Buku ini telah dinilai oleh Panitia Penialaian Buku Nonteks Pelajaran (PPBNP) dan dinyatakan layak sebagai buku nonteks pelajaran (buku pengayaan, buku referensi, dan/atau buku panduan pendidik) berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Depdiknas Nomor: 3610/A8/LL/2009, Tahun 2009, Tanggal 21 Desember, dengan kategori*

Penerbitan dan Percetakan
PT Balai Pustaka
Jalan Bunga No. 8 – 8A Matraman
Jakarta 13140
Telepon : (+6221) 8583369
Faks : (+6221) 29622129
Http : //www.balaipustaka.co.id

ISBN: 979-407-412-8
EAN 13 : 978-979-407-412-1